J TRUST BANK
Jトラスト銀行

PT BANK J TRUST INDONESIA Tbk.

JUMP TOGETHER!

2019

Laporan Tahunan
Annual Report

JUMP
TOGETHER!

“Jump Together!” adalah *tagline* resmi dari J Trust Group. Digunakan sebagai tema dari Laporan Tahunan 2019 J Trust Bank, *tagline* tersebut menggarisbawahi posisi penting Bank dalam keseluruhan strategi pertumbuhan J Trust Group ke depan. Bagi kami di J Trust Bank, “Jump Together!” juga mewakili keinginan kami untuk tumbuh besar bersama, dengan setiap individu dalam organisasi bergerak selaras untuk kemajuan Bank, didukung kerja sama erat dengan jaringan perusahaan J Trust Group lainnya di Indonesia. Dengan demikian, J Trust Bank akan tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

“Jump Together!” is the current official tagline of J Trust Group. As the theme for J Trust Bank’s 2019 Annual Report, it serves to underline the Bank’s important position within the overall growth strategies of J Trust Group into the future. For the Bank, “Jump Together!” also signifies our intention of growing together, with every individuals in the Bank moving in unison to develop the Bank, in close collaboration with the other entities of J Trust Group network in Indonesia. In this way, J Trust Bank can expand in a sustainable and healthy manner.

9
TENTANG LAPORAN TAHUNAN TERINTEGRASI
About This Integrated Annual Report

17
IKHTISAR UTAMA
Main Highlights

41
LAPORAN MANAJEMEN
Management Report

63
PROFIL PERUSAHAAN
Corporate Profile

109
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Management Discussion and Analysis

241
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

475
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN
Integrated and Sustainable Corporate Social Responsibility

DAFTAR ISI

Contents

RINGKASAN KINERJA 2019 4
Performance Highlights 2019

FOKUS & STRATEGI 2019 7
2019 Focus & Strategy

TENTANG LAPORAN TAHUNAN TERINTEGRASI
About This Integrated Annual Report

Pedoman Pelaporan 10
Reporting Guidelines
Konten, Periode dan Ruang Lingkup 12
Content, Period, and Scope
Materialitas dan Batasan 12
Materiality & Limitations
Perioritas Topik dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan 13
Priorities of Topics and Involvement of Stakeholders
Memastikan Kredibilitas Data & Informasi 14
Ensuring Data & Information Credibility
Umpan Balik 15
Feedback

IKHTISAR UTAMA
Main Highlights

Ikhtisar Keuangan 18
Financial Highlights
Ikhtisar Saham 20
Stock Highlights
Ikhtisar Data Keberlanjutan 22
Sustainability Highlights
Data Terkait Lainnya 26
Other Related Data
Inisiatif Keuangan dan Strategi Pencapaian Target Penerapan Berkelanjutan 27
Financial Initiatives And Sustainable Application Target Achievements
Kinerja Ekonomi dan Inklusi Keuangan 28
Report of the Board of Commissioners
Peristiwa Penting 2019 36
2019 Event Highlights

LAPORAN MANAJEMEN
Management Report

Laporan Dewan Komisaris 43
Report of the Board of Commissioners
Laporan Direksi 51
Ensuring Data & Information Credibility
Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan 60
Responsibility for Annual Reporting

PROFIL PERUSAHAAN
Corporate Profile

Informasi Perusahaan 64
Corporate Information

Sekilas J Trust Bank 66
J Trust Bank at a Glance

Jejak Langkah 68
Milestones

Visi & Misi 70
Vision & Mission

Filosofi Logo J Trust Bank 72
J Trust Bank Logo Philosophy

Bidang Usaha 73
Business Segment

Produk dan Layanan 74
Products and Services

Struktur Organisasi 76
Organizational Structure

Struktur Grup 78
Group Structure

Informasi Pemegang Saham 79
Shareholders Information

Statistik Profil dan Komposisi Karyawan 82
Statistics of Employee Profile and Composition

Jaringan Kantor 84
Offices Network

SItus Web Perusahaan 85
Corporate Website

Pejabat Eksekutif 86
Executive Officers

Profil Dewan Komisaris 87
Board of Commissioners' Profile

Profil Direksi 91
Board of Directors' Profiles

Profil Executive Vice President 96
Executive Vice President's Profiles

Profil Anggota Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris 101
Member of Committees under the Board of Commissioners Profile

Profil Sekretaris Perusahaan 104
Corporate Secretary Profile

Profil Kepala Audit Internal 105
Profile of internal Audit chairman

Peta Area Operasional 106
Operational Area Map

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Management Discussion and Analysis

Tinjauan Ekonomi 110
Economic Review

Tinjauan Industri Perbankan 112
Banking Industry Review

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha 114
Operational Review by Business Segment

Tinjauan Kinerja Keuangan 126
Financial Performance Review

Aspek Pemasaran 155
Marketing Aspect

Manajemen Risiko 160
Risk Management

Teknologi Informasi 220
Information Technology

Sumber Daya Manusia 224
Human Resources

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

Pendahuluan 243
Foreword

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Direksi 256
General Meeting of Shareholders (GMS), Implementation of Board Of Commissioners and Board of Directors Tasks

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank Jtrust Indonesia Tbk. 334
Completion and Implementation of Duties of Committees of PT Bank Jtrust Indonesia Tbk.

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, Audit Intern dan Audit Ekstern 393
Implementation of The Bank's Compliance Function, Internal Audit, and External Audit

Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern 422
Risk Management and Internal Control System Implementation

Penyediaan Dana, Rencana Strategis Bank, Transparansi dan Pengungkapan Aspek Lainnya 444
Provisions of Funds, Strategic Plan of The Bank, Transparency, and The Disclosure of Other Aspects

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik 464
Donation For Social and Political Activities

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka 465
Implementation of Public Company Governance Guideline

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN
Integrated and Sustainable Corporate Social Responsibility

LAPORAN KEUANGAN
Financial Statements

RINGKASAN

KINERJA 2019

Performance Highlights 2019

Pada tahun 2019, Bank terus memperkuat kualitas pinjaman untuk membangun bisnis yang akan berlangsung dalam jangka panjang. Kinerja debitur terus dipantau, dan Bank mempertahankan hanya debitur-debitur yang dinilai berkualitas dan mampu memenuhi kewajibannya. Hal ini menyebabkan jumlah pinjaman menurun, namun disertai dengan jauh membaiknya kualitas kredit.

Di sisi lain, kondisi perekonomian dan perbankan dalam negeri yang masih berada dalam tekanan mengakibatkan likuiditas tetap ketat. Dana pihak ketiga (DPK) Bank juga turut mengalami penurunan, di tengah upaya Bank meningkatkan rasio CASA.

Dalam hal permodalan, Bank berhasil terus memperkuat rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum di tingkat yang sehat pada 14,53%.

In 2019, the Bank continued strengthening lending quality to build a sustainable business in the long term. The Bank continued monitoring debtors performance, and only maintained quality debtors who have been assessed as able to pay back their obligations. This caused lending to decline, but on the other hand lending quality much improved.

Meanwhile, domestic economic and banking conditions remained under pressure which caused liquidity to stay tight. The Bank's third party funds also decline amid the Bank's efforts to increase CASA ratio.

In capital, the Bank managed to strengthen the Capital Adequacy Ratio at a healthy level of 14.53%.

Pinjaman yang Diberikan
Loans

2019	2018	2017
6.133	10.129	11.282

Dalam Miliar Rupiah | In Billion Rupiah

Simpanan Nasabah
Deposits from Customers

2019	2018	2017
12.806	13.249	12.905

Dalam Miliar Rupiah | In Billion Rupiah

Jumlah Aset
Total Assets

2019	2018	2017
17.312	17.824	17.171

Dalam Miliar Rupiah | In Billion Rupiah

Laba Bersih
Net Profit

2019	2018	2017
49.495	(401.101)	121.534

Dalam Miliar Rupiah | In Billion Rupiah

14,53%

Rasio KPMM

CAR Ratio

48,77%

Rasio Kredit yang Diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (LFR)

Loan to Funding Ratio (LFR)

1,49%

Rasio Pinjaman yang Diberikan Bermasalah (NPL) Bruto

Non-Performing Loans (NPL) Gross Ratio

0,39%

Margin Bunga Bersih (NIM)

Net Interest Margin (NIM)

RINGKASAN

KINERJA 2019

Performance Highlights 2019

Pembayaran kepada Penyandang Dana
(bunga pinjaman dan dividen)
(Rp Juta)

Payment to Funder
(interest on loans and dividends)
(IDR million)

2019	2018	2017
79.299	53.540	27.437

Total Dana Investasi + Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Total Corporate Social Responsibility Investment Fund

2019	2018	2017
Rp217.265.320	Rp152.222.300	Rp121.962.925

Jumlah Karyawan
[102-8]

Jumlah Karyawan [102-8]

2019	2018	2017
800	971	974

Rasio Pinjaman yang Diberikan Bermasalah (NPL) Bruto

Non Performing Loan (NPL) Gross Ratio

2019	2018	2017
1,49%	4,29%	2,94%

2019

FOKUS & STRATEGI

2019 Focus & Strategy

1

Memperkuat perolehan laba secara berkesinambungan

Strengthening sustainability of profit

2

Ekspansi penyaluran kredit dan investasi *corporate bond*.

Lending and corporate bond expansion.

3

Peningkatan jaringan dan pendapatan berbasis biaya, serta digitalisasi perbankan

Network, digitalization, and fee based income

4

Peningkatan CASA

Funding

TENTANG LAPORAN TAHUNAN TERINTEGRASI

About This Integrated Annual Report

Bank terus berupaya untuk mengintegrasikan penerapan keuangan berkelanjutan dengan strategi usaha Bank. Melalui inisiatif ini, diharapkan dapat memanfaatkan peluang dan prospek usaha yang ada.

The Bank continues to integrate sustainable financial application with the Bank's business strategy. Through this initiative, it is expected to take advantage of existing business opportunities and prospect.

PEDOMAN PELAPORAN

Reporting Guidelines

Informasi yang disampaikan dalam laporan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi pemangku kepentingan.

Information conveyed in this report is expected to meet the information needs of stakeholders.

Laporan Tahunan Terintegrasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut 'J Trust Bank'/'Bank') tahun 2019 merupakan laporan pertama Bank yang disusun terintegrasi meliputi Laporan Tahunan dengan Laporan Berkelanjutan 2019 J Trust Bank. Melalui laporan ini, J Trust Bank menyampaikan informasi kinerja Bank serta terkait dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional Bank pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. [102-50][102-51][102-52]

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Selain itu, laporan ini juga disusun menggunakan acuan Standar *Global Reporting Initiative* (GRI): Opsi "Core". [102-54]

Dalam laporan ini, tidak terdapat pernyataan kembali (*restatement*) atas data signifikan yang telah disampaikan dalam laporan sebelumnya, yakni Laporan Tahunan Bank. Laporan ini juga belum dilakukan verifikasi oleh pihak independen melalui proses *assurance*. Meski demikian, dalam meningkatkan kredibilitas dan reliabilitas laporan, J Trust Bank melakukan proses verifikasi sendiri yang dilakukan oleh unit kerja terkait. Setelah proses verifikasi, maka laporan disesuaikan dan diperbaiki sejalan dengan hasil temuan. Dengan demikian, semua informasi dalam laporan ini dapat terpercaya keandalannya. [102-48] [102-56]

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut atau memberikan saran dan masukan yang dibutukan atas Laporan ini, mohon menghubungi: [102-53]

Kantor Pusat PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Sahid Sudirman Center 33rd Floor.
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Indonesia
Telp. : (62-21) 2926 1111 (*Hunting*)
E-mail : christiati.sianipar@jtrustbank.co.id
Website : www.jtrustbank.co.id

he Annual Integrated Report of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (hereinafter referred to as 'J Trust Bank' / 'Bank') in 2019 is the Bank's first report prepared integrated the 2019 J Trust Bank Annual and Sustainability Report. Through this report, J Trust Bank conveys information Bank's performance and related to the impacts caused by the Bank's operational activities on environmental, social and economic aspects. [102-50] [102-51][102-52]

This Report was prepared based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies and POJK No.51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies. In addition, this report is prepared using the Global Reporting Initiative (GRI) Standard: "Core" Option as a reference. [102-54]

This report contains no restatement of significant data that were submitted in the previous one; in this case the Bank's 2018 Annual Report. This report has not been verified by an independent party through an assurance process. However, to increase the credibility and reliability of the report, J Trust Bank did its own verification process with the help of relevant work units. After the verification process, the report was adjusted and corrected in line with all findings. Thus, we believe that the reliability of all the information in this report is credible. [102-48] [102-56]

For further information or to provide suggestions and input that you think are needed for this Report, please contact: [102-53]

Head Office PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Sahid Sudirman Center 33rd Floor.
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Indonesia
Telp. : (62-21) 2926 1111 (Hunting)
E-mail : christiati.sianipar@jtrustbank.co.id
Website : www.jtrustbank.co.id

KONTEN, PERIODE DAN RUANG LINGKUP

Content, Period, and Scope

Laporan mencakup periode waktu 1 Januari hingga 31 Desember 2019 dengan cakupan informasi dan data yang berasal dari Kantor Pusat J Trust Bank dan kegiatan operasional di Indonesia. Terkait dengan data keberlanjutan, seperti mengenai data karyawan dan penggunaan listrik disampaikan dengan mencakup unit kerja dan kantor cabang di Indonesia. [102-45]

The report covers the period January 1 to December 31, 2019 period with the scope of information and data extracted from J Trust Bank Headquarter and operational activities in Indonesia. Related to sustainability data, such as employee data and electricity consumption is conveyed covering work units and branch offices in Indonesia. [102-45]

MATERIALITAS DAN BATASAN [102-46]

Materiality & Limitations [102-46]

Khusus berkaitan dengan data keberlanjutan, penetapannya mengacu pada prinsip keterlibatan pemangku kepentingan, konteks keberlanjutan, materialitas, dan kelengkapan. Di samping itu, kualitas pelaporan juga memerhatikan prinsip keseimbangan, komparabilitas, akurasi, ketepatan waktu, kejelasan, dan keandalan.

Penetapan isi laporan dilakukan melalui empat tahap meliputi identifikasi, prioritas topik, validasi, dan umpan balik.

1. Indentifikasi
   Karakteristik industri perbankan, konsep keuangan berkelanjutan, serta pengaruhnya terhadap pemangku kepentingan merupakan dasar yang digunakan untuk mengidentifikasi topik keberlanjutan (*sustainability context*) yang relevan untuk disampaikan dalam laporan ini.
2. Prioritasi topik
   Untuk menentukan topik material dan batasannya dilakukan dengan cara melakukan analisis materialitas. Analisis materialitas merupakan proses untuk menentukan topik material yang relevan dengan kegiatan bisnis Bank serta berpengaruh dan berdampak secara signifikan bagi para pemangku kepentingan. Bank telah memetakan topik-topik material tersebut dalam tabel dan grafik materialitas sebagai berikut.

Specifically with regard to sustainability data, the determination referring to the principle of stakeholder involvement, the context of sustainability, materiality and adequacy. In addition, the quality of reporting also takes into account the principles of balance, comparability, accuracy, timeliness, clarity, and reliability.

The report contents were elected through four phases i.e. identification, priority topics, validation, and feedback.

1. Identification
   The characteristics of the banking industry, the concept of sustainable finance, and its impacts on stakeholders are the basis used to identify sustainability context that are relevant to this report.

2. Prioritizing the Topic
   The topic of material and its limitations were determined by analyzing materiality. Materiality analysis is a process to determine material topics that are relevant to the Bank's business activities and have significant influence and impact on its stakeholders. The Bank maps the material topics in the materiality chart and graph presented below.

3. Validasi
   Seluruh topik material yang telah diperoleh melalui input dari pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal divalidasi dan disetujui oleh Direksi untuk menjadi prioritas informasi yang disampaikan dalam laporan ini.
4. Umpan Balik
   Tahap terakhir dalam penentuan isi laporan adalah memerhatikan dan menerima saran, serta masukan dari pemangku kepentingan, baik melalui lembar umpan balik maupun surel. Saran ini akan menjadi masukan bagi pembuatan laporan tahun selanjutnya. Dengan demikian, informasi yang disampaikan dalam laporan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi pemangku kepentingan. Proses penentuan isi laporan dalam empat tahap di atas menjadi siklus pelaporan yang dilakukan oleh J Trust Bank untuk memastikan pelibatan pemangku kepentingan.

3. Validation
   All material topics that were collected through input from stakeholders, both internal and externals, have been validated and approved by the Board of Directors to set priority of the information presented in this report.
4. Feedback
   The final stage of determining the contents of the report is to take into account and accept feedbacks and input from stakeholders, both through the feedback sheet and e-mail. The feedback will be used as inputs for the preparation of the next year's sustainability report. Thus, the information presented in this report is expected to meet the need for information of the stakeholders. The above process of 4-stages determination of this report is the reporting cycle carried out by J Trust Bank to ensure stakeholder involvement.

PRIORITAS TOPIK DAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN
[102-40] [102-42] [102-43] [102-47]

Priorities of Topics And Involvement Of Stakeholders
[102-40] [102-42] [102-43] [102-47]

Pada laporan yang berkaitan dengan data keberlanjutan, J Trust Bank melakukan evaluasi dan melakukan penyesuaian yang dibutukan untuk topik material. Penyesuaian ini dilakukan sejalan dengan adanya pemahaman atas konsep keuangan berkelanjutan yang perlu disampaikan dalam laporan. Dengan adanya penyesuaian ini, maka Bank berharap isi laporan dengan prioritas topik materialnya akan lebih relevan dan berguna bagi pemangku kepentingan.

In the reports relating to sustainability data, J Trust Bank evaluates and makes adjustments needed for material topics. This adjustment was made on the basis that the concept of sustainable finance needs to be disclosed in the report. With this adjustment, the Bank hopes that the contents of this report with priority material topics will be more relevant and useful for the stakeholders.

Topik material dapat kami sampaikan sebagai berikut: [102-44]

1. Kinerja Ekonomi
2. Portofolio Produk dan Kualitas Pinjaman
3. Perlindungan Informasi Nasabah
4. Pengembangan Teknologi

We can inform now that the material topic are follows: [102-44]

1. Economic Performance
2. Product Portfolio and Loan Quality
3. Protection of Customer Information
4. Technology Development

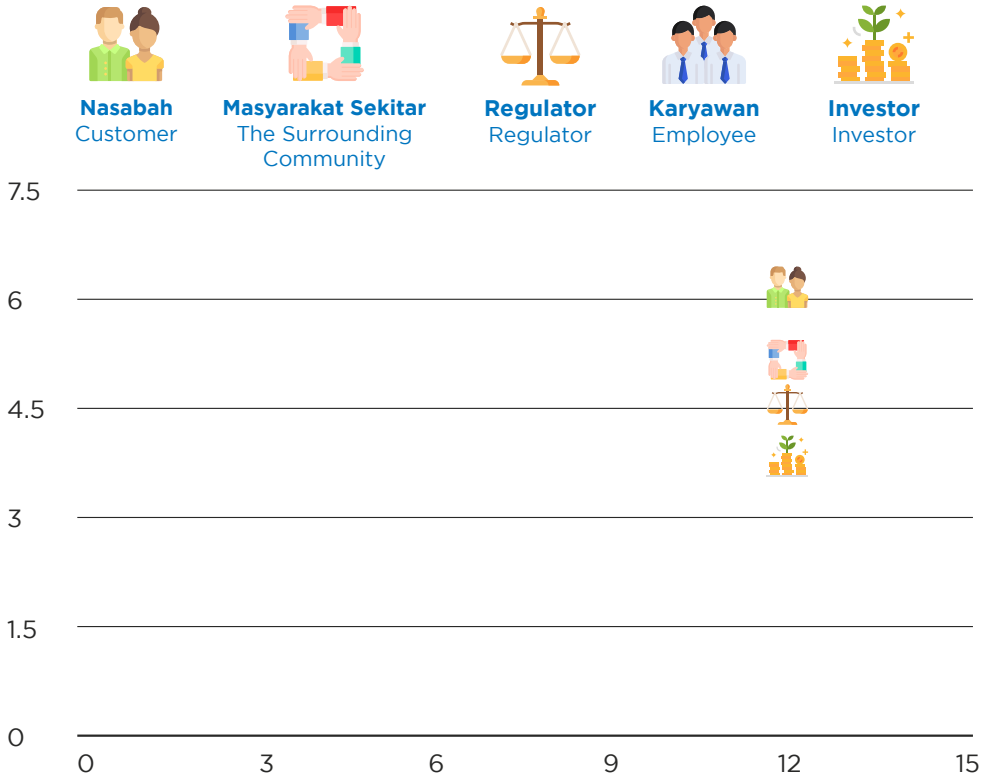

MEMASTIKAN KREDIBILITAS DATA & INFORMASI

Ensuring Data & Information Credibility

Bank memastikan bahwa seluruh topik material yang telah diperoleh dan disusun telah dilakukan input dari pemangku kepentingan, divalidasi dan disetujui oleh Direksi untuk menjadi prioritas informasi yang disampaikan dalam laporan ini. Bank telah melakukan evaluasi atas konten Laporan ini serta menyatakan bahwa laporan telah mencakup seluruh topik yang material bagi Bank dan Pemangku Kepentingan lainnya.

The Bank ensures that all material topics that were collected and compiled related to sustainability data have taken stakeholders input into consideration, validated and approved by the Board of Directors as priority information to be presented in this report. The Bank has evaluated the contents of this Report and stated that the report covers all topics that are material to the Bank and its stakeholders.

UMPAN BALIK

Feedback

Bank mengundang seluruh pemangku kepentingan dan para pembaca untuk memberikan masukan, arahan, kritik, dan saran terkait bagaimana Bank dapat meningkatkan kualitas laporan di masa yang akan datang. Silakan menyampaikan tanggapan terkait isi laporan ini ke: [102-53]

Kantor Pusat PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Sahid Sudirman Center Lantai 33
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Indonesia
Telp. : (62-21) 2926 1111 (Hunting)
E-mail : christiati.sianipar@jtrustbank.co.id
Website : www.jtrustbank.co.id

Bank invites all stakeholders and readers to give their feedback, directions, criticism, and suggestions on how the Bank can improve the quality of future reports. For any comments or response regarding the content of this report, please contact: [102-53]

Head Office PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Sahid Sudirman Center 33rd Floor.
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Indonesia
Telp. : (62-21) 2926 1111 (Hunting)
E-mail : christiati.sianipar@jtrustbank.co.id
Website : www.jtrustbank.co.id

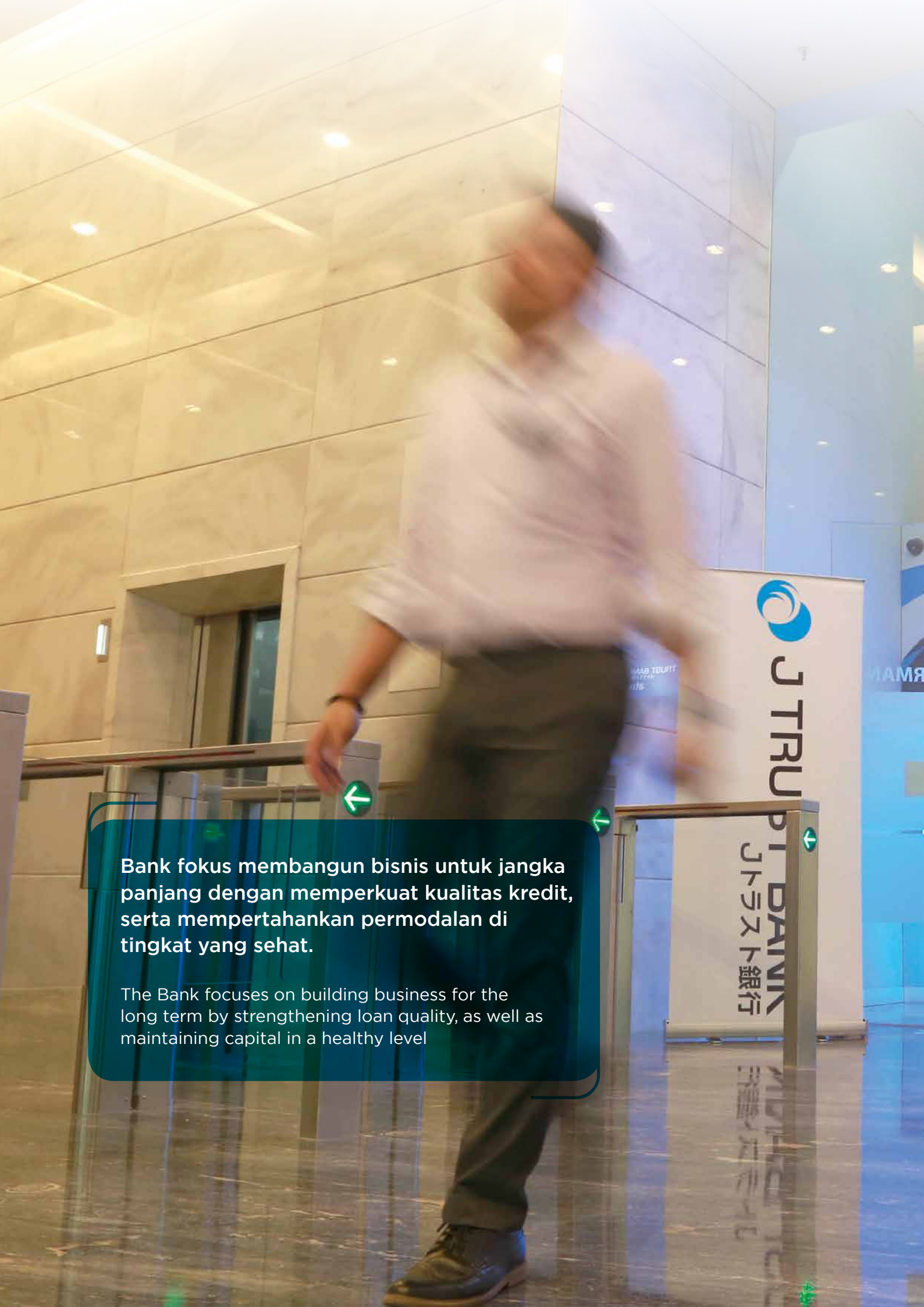

Bank fokus membangun bisnis untuk jangka panjang dengan memperkuat kualitas kredit, serta mempertahankan permodalan di tingkat yang sehat.

The Bank focuses on building business for the long term by strengthening loan quality, as well as maintaining capital in a healthy level

IKHTISAR UTAMA

Main Highlights

IKHTISAR KEUANGAN [102-7]

Financial Highlights [102-7]

Angka-angka pada seluruh tabel dan grafik dalam laporan tahunan ini menggunakan notasi bahasa Indonesia

Numerical notations in all tables and graphs in this annual report are in Indonesian

(Dalam jutaan Rupiah) kecuali disebutkan lain

(In million Rupiah) unless stated otherwise

Keterangan	2019	2018	2017	Description
ASET				ASSETS
Kas	110.308	110.105	181.457	Cash
Pinjaman yang diberikan	6.245.991	10.259.055	11.468.893	Loan
Penempatan pada bank lain	586.310	250.330	264.914	Placements with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia	896.710	1.453.029	1.400.774	Current accounts with Bank Indonesia
Surat berharga	4.219.862	3.562.738	2.938.516	Marketable securities
Tagihan derivatif	2.645	11.324	810	Derivative receivables
Tagihan akseptasi	23.518	649.131	616.941	Acceptance receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-				Allowance for impairment losses of financial assets -/-
a. Kredit	(113.108)	(129.938)	(187.032)	a. Loan
b. Lainnya	(743)	(547.727)	(516.814)	b. Others
Aset tidak berwujud	214.847	195.001	127.661	Intangible assets
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(125.988)	(112.322)	(100.461)	Accumulated amortization of intangible assets
Aset tetap	236.363	222.144	244.138	Fixed assets
Akumulasi penyusutan aset tetap -/-	(37.198)	(28.065)	(20.654)	Accumulated depreciation of tangible assets
Agunan yang diambil alih	131.230	237.653	231.367	Foreclosed assets
Aset pajak tangguhan	74.209	125.323	72.945	Deferred tax assets
Aset lainnya	4.846.641	1.565.888	447.726	Other assets
TOTAL ASET	**17.311.597**	**17.823.669**	**17.171.181**	**TOTAL ASSETS**
LIABILITAS				LIABILITIES
Giro	652.867	786.173	873.058	Demand deposits
Tabungan	1.166.534	790.545	828.521	Savings deposits
Simpanan berjangka	10.986.831	11.671.887	11.203.041	Time deposits
Liabilitas akseptasi	2.101	16.546	5.608	Acceptance payables
Liabilitas dari bank lain	1.845.988	1.911.604	1.485.561	Liabilities with other banks
Liabilitas spot dan derivatif	-	640	411	Spot and derivative payables
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	88.001	532.005	264.040	Securities sold under repurchase agreement
Pinjaman yang diterima	400.000	143.800	339.188	Loan received
Setoran jaminan	2.827	943	860	Security deposits
Liabilitas lainnya	492.622	654.623	658.569	Other liabilities
TOTAL LIABILITAS	**15.637.771**	**16.508.766**	**15.658.857**	**TOTAL LIABILITIES**
EKUITAS				EQUITY
Modal ditempatkan dan disetor penuh	12.223.149	12.223.149	12.223.155	Issued and fully paid capital
Tambahan modal disetor	178.765	178.765	178.759	Additional paid-in capital
Komponen ekuitas lain	495.500	353.375	-	Other components of equity
Kerugian aktuarial	(11.096)	(34.602)	(24.339)	Actuarial loss
Surplus revaluasi aset tetap - neto	138.336	124.962	143.097	Revaluation surplus of fixed assets - net
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual	8.391	(122.032)	17.400	Unrealized gain (losses) on changes in fair value of available-for-sale securities
Saldo rugi	(11.359.219)	(11.408.714)	(11.025.748)	Deficit
Total Ekuitas	**1.673.826**	**1.314.903**	**1.512.324**	**Total Equity**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**17.311.597**	**17.823.669**	**17.171.181**	**TOTAL LIABILITIES AND EQUITY**

(Dalam jutaan Rupiah) kecuali disebutkan lain

(In million Rupiah) unless stated otherwise

Keterangan	2019	2018	2017	Description
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
LAPORAN LABA RUGI				STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
Pendapatan Bunga Bersih	50.256	391.541	483.601	Net Interest Income
Beban Operasional Lainnya	(38.698)	(696.716)	(370.616)	Other Operating Expenses
Laba (Rugi) Operasional	11.558	(305.175)	112.985	Operating Profit (Loss)
Laba (Rugi) Non Operasional	37.741	(98.406)	5.414	Non-Operating Income (Expenses)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	49.299	(403.581)	118.399	Profit (Loss) Before Income Tax
Manfaat Pajak Tangguhan - Neto	196	2.480	3.135	Income Tax Benefit - Net
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	49.495	(401.101)	121.534	Net Profit (Loss) for Current Year
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Net Profit (Loss) Attributable to:
Pemilik	49.495	(401.101)	121.534	Shareholders
Kepentingan Non Pengendali	-	-	-	Non-Controlling Shareholders
Laba (Rugi) Komprehensif	216.798	(550.796)	159.061	Other Comprehensive Income (Loss)
Laba (Rugi) Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				Other Comprehensive Income (Loss) Attributable to:
Pemilik	216.798	(550.796)	159.061	Shareholders
Kepentingan Non Pengendali	-	-	-	Non-Controlling Shareholders
Laba (Rugi) Per Saham (Nilai Penuh)	4,94357	(40,06203)	12,13883	Basic Earnings (Loss) per Share (Full Amount)
RASIO KEUANGAN				FINANCIAL RATIOS
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)				Capital Adequacy Ratio (CAR)
- KPMM yang tersedia untuk risiko kredit dan risiko operasional	14,59%	14,10%	14,35%	CAR with credit and operational risk -
- Rasio KPMM yang tersedia setelah memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	14,53%	14,03%	14,15%	CAR with credit, market and operational risk -
ASET PRODUKTIF				EARNING ASSETS
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif	0,84%	7,13 %	5,98%	Non-Performing Earning Assets to Total Productive Assets
Pinjaman yang Diberikan Bermasalah (Bruto)	1,49%	4,26%	2,94%	Non-Performing Loans (Gross)
Pinjaman yang Diberikan Bermasalah (Neto)	0,80%	3,12%	1,53%	Non-Performing Loans (Net)
Pembentukan Penyisihan Aset Produktif (PPAP) terhadap Aset Produktif	1,02%	4,59%	4,32%	Allowance for Possible Losses on earning assets
Pemenuhan PPAP	70,19%	82,49%	100,79%	Allowance for possible losses compliance
RENTABILITAS				RENTABILITY
Return on Asset (ROA)	0,29%	(2,25%)	0,73%	Return on Assets (ROA)
Return on Equity (ROE)	4,24%	(29,13%)	8,09%	Return on Equity (ROE)
Margin Bunga Bersih (NIM)	0,39%	2,28%	2,41 %	Net Interest Margin (NIM)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	99,92%	116,32%	93,87%	Operating Expense to Operating Income (BOPO)
LIKUIDITAS				LIQUIDITY
Rasio Kredit yang Diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (LFR)	48,77%	77,43%	88,87%	Loan to Funding Ratio (LFR)
KEPATUHAN				COMPLIANCE
Persentase Pelanggaran BMPK	-	-	-	Percentage of LLL Violations
Persentase Pelampauan BMPK	-	0,61 %	0,47%	Percentage of LLL Excess
GWM Rupiah	11,14%	14,66%	9,93%	Primary Reserve in Rupiah
GWM Valuta Asing	33,45%	10,34%	9,63%	Reserve in Foreign Currencies
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	12,87%	20,35%	-	Macroprudential Liquidity Buffer (PLM)
GWM Sekunder Rupiah	-	-	13,85%	Secondary reserve in Rupiah
Posisi Devisa Neto (PDN)	0,74%	1,82 %	3,58 %	Net Open Position

Rasio Pinjaman yang Diberikan Bermasalah (Kotor) (%)
Non Performing Loan (NPL) (Gross)

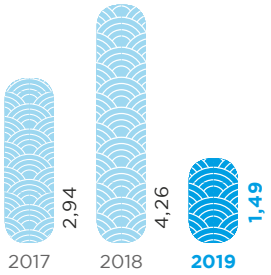

Marjin Bunga Bersih (%)
Net Interest Margin

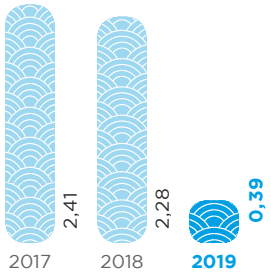

Rasio Kredit yang Diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (%)
Loan to Funding Ratio (LFR)

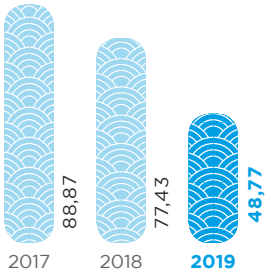

IKHTISAR SAHAM

Stock Highlights

Saham J Trust Bank tercatat dengan kode BCIC di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 25 Juni 1997. Perdagangan saham Bank masih dalam masa suspensi sejak 2008 sampai tahun 2019, karena itu sepanjang tahun 2019 harga saham Bank tidak mengalami pergerakan sehingga tidak terjadi perubahan harga tertinggi, terendah, dan penutupan saham Bank pada Bursa Efek Indonesia.

Namun demikian, mengacu kepada pengumuman No. Peng-UPT-00001/BEI.PP3/01-2020, Bursa Efek Indonesia telah memutuskan untuk mencabut penghentian sementara perdagangan efek PT Bank JTrust Indonesia Tbk. di seluruh pasar mulai dari sesi *pre-opening* tanggal 8 Januari 2020.

J Trust Bank shares have been registered under the code of BCIC on the Indonesia Stock Exchange since June 25, 1997. The Bank's stock trading is still in suspension since 2008 to 2019, therefore during 2019 there was no movement of the Bank's share price, resulting in no change in the highest, lowest, and closing prices of the Bank shares in the Indonesia Stock Exchange.

However, referring to the announcement No. Peng-UPT-00001/BEI.PP3/01-2020, the Indonesia Stock Exchange decided to revoke the temporary suspension of PT Bank JTrust Indonesia Tbk stocks in all markets starting from the pre-opening session on 8 January 2020.

Informasi Jumlah Saham yang Beredar per 31 Desember 2019

Total Outstanding Shares as of December 31, 2019

Uraian	Jumlah Saham Number of Shares	Jumlah Nilai Nominal Total (Rp)	Persentase Percentage (%)	Description
Saham Seri A (Rp 1.000,- per saham)				Series A Shares (IDR 1,000,- per share)
J Trust Co., Ltd.	8.679.019.445	8.679.019.445.000	86,685	J Trust Co., Ltd.
PT JTrust Investments Indonesia	100.121.245	100.121.245.000	1,000	PT JTrust Investments Indonesia
J Trust Asia Pte. Ltd.	467.700.928	467.700.928.000	4,671	J Trust Asia Pte. Ltd.
Publik	764.999.382	764.999.382.000	7,641	Public
Saham Seri B (Rp 7.800.000,- per saham)				Series B Shares (IDR 7,800,000,- per share)
J Trust Co., Ltd.	26.038	203.096.400.000	0,000	J Trust Co., Ltd., Japan
Publik	257.463	2.008.211.400.000	0,003	Public
Subtotal	**283.501**	**2.211.307.800.000**	**0,003**	**Subtotal**
Total Modal disetor	**10.012.124.501**	**12.223.148.800.000**	**100,000**	**Paid-In Capital**

Informasi Harga Saham Tahun 2019

Stock Price Information in 2019

Uraian	Pembukaan Opening (Rp)	Terendah Lowest (Rp)	Tertinggi Highest (Rp)	Penutupan Closing (Rp)	Volume Perdagangan Transaction Volume	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization	Description
Triwulan I	450	450	450	450	0	NaN	1st Quarter
Triwulan II	450	450	450	450	0	NaN	2nd Quarter
Triwulan III	450	450	450	450	0	NaN	3rd Quarter
Triwulan IV	450	450	450	450	0	NaN	4th Quarter

Ikhtisar Lainnya

Bank tidak melakukan pencatatan atas efek lain selain saham.

Aksi Korporasi

Pada tahun 2019, Bank tidak melakukan aksi korporasi seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus maupun perubahan nilai nominal saham.

Informasi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*)

Berdasarkan Surat No. Peng-23/BEI.PSJ/SPT/11-2008 tanggal 21 November 2008, PT Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek Bank (dahulu PT Bank Century Tbk) di seluruh pasar mulai sesi pertama perdagangan efek pada tanggal 21 November 2008 hingga pengumuman lebih lanjut untuk mencegah terjadinya perdagangan efek Bank yang tidak wajar.

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Oktober 2019, Bank telah menginformasikan mengenai pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama adalah sebesar 7,6433%.

Sehubungan dengan Surat Bursa Efek Indonesia No. S-07875/BEI.PP3/12-2019 tanggal 5 Desember 2019 perihal Status Suspensi Saham Perseroan dalam hal ini Bank, Bank telah memenuhi ketentuan V.1 dan ketentuan V.2 Peraturan Bursa No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Sebagai tindak lanjut atas penghentian sementara perdagangan efek Bank (suspensi) di seluruh pasar, Bursa Efek Indonesia meminta Bank menyampaikan dokumen hasil penilaian harga wajar saham oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang terdaftar pada OJK sebagai referensi harga saham saat dilakukan pembukaan suspensi.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan terhadap 100% saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk., nilai pasar wajar perseroan adalah sebesar Rp4,51 triliun. Dengan demikian, harga saham wajar perseroan pasca *open suspend* adalah sebesar Rp450 per saham.

Mengacu kepada Pengumuman Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (BCIC) Tercatat di Papan: Pengembangan No. Peng-UPT-00001/BEI.PP3/01-2020, Bursa Efek Indonesia telah memutuskan untuk mencabut penghentian sementara perdagangan efek PT Bank JTrust Indonesia Tbk. di seluruh pasar mulai dari sesi *pre-opening* pada 8 Januari 2020.

Other Highlights

The Bank did not record other securities with the exception of stocks.

Corporate Actions

In 2019, the Bank did not commit any corporate actions such as stock split, reverse stock, share dividend, bonus share or changes in the share nominal.

Information on Temporary Suspension of Stock Trading

Based on the letter No. Peng-23/BEI.PSJ/SPT/11-2008 dated November 21, 2008, PT Bursa Efek Indonesia decided to suspend the stock trading of the Bank (formerly PT Bank Century Tbk) in all market starting from the first session of stock trading on November 21, 2008, until further notice in order to prevent any unusual trading of Bank shares.

Based on the Monthly Report of Shareholders Register per October 31, 2019, the Bank has informed about non-controlling shareholders and non-main shareholders of 7.6433%.

In accordance with the Indonesia Stock Exchange Letter No. S-07875/BEI.PP3/12-2019 on December 5, 2019, on the Company's Share Suspension Status in this case the Bank, the Bank has met provisions V.1 and V.2 of Exchange Regulation No. I-A on the Recording of Shares and Non-Share Equity Securities issued by Listed Companies.

As a follow-up to the temporary trading suspension of Bank shares in all market, the Indonesia Stock Exchange requested the Bank to submit document on fair share price appraisal by Public Appraisal Office registered in OJK as a reference for share price during the opening of suspension.

Based on the appraisal from Public Appraisal Office Kusnanto & Rekan to 100% shares of Bank JTrust Indonesia Tbk., the company's fair share price was IDR4.51 trillion. Therefore, the fair share price of the company on open suspend is IDR450 per share.

Referring to the Announcement on Temporary Trading Suspension Revocation of Efek PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) Listed on Board: Development No. Peng-UPT-00001/BEI.PP3/01-2020, the Indonesia Stock Exchange decided to revoke the temporary trading suspension of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. in all market starting from pre-opening session on January 8, 2020.

IKHTISAR DATA KEBERLANJUTAN

Sustainability Highlights

Kinerja Ekonomi

Economic Performance

Distribusi Manfaat pada Ekonomi Indonesia (Rp Juta)

Distribution of Benefits to the Indonesian Economy (IDR Million)

Pembayaran kepada Penyandang Dana (bunga pinjaman dan dividen)
Payment to Funders (interest on loans and dividends)

2019 : 79.299
2018 : 53.540
2017 : 27.437

Keberadaan Bank

The Bank Presence

Jumlah Jaringan Kantor
Number of Office Networks

2019 : 45
2018 : 47
2017 : 45

Jumlah Jaringan Kantor Cabang Pembantu
Total Supporting Office Network

2019 : 14
2018 : 23
2017 : 20

Jumlah Jaringan Kantor Cabang
Total Branch Office Network

2019 : 22
2018 : 22
2017 : 22

Jumlah Kantor Kas
Total Cash Office

2019 : 9
2018 : 2
2017 : 3

Kinerja Finansial (Rp Juta)

Financial Performance (IDR Million)

Kredit yang Diberikan
Credit Distributed

2019 : 6.132.883
2018 : 10.129.117
2017 : 546.054

Pendapatan Bunga Kredit berdasarkan Segmen (Rp Juta)
Interest Income of Loan Distribution based on Segment (IDR Million)

Kredit Modal Kerja
Working Capital Loan

2019 : 352.391
2018 : 537.177
2017 : 546.054

Kredit Investasi
Investment Loan

2019 : 87.291
2018 : 193.889
2017 : 165.788

Kredit Konsumsi
Consumer Loan

2019 : 234.572
2018 : 198.526
2017 : 432.709

Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Rp Juta)
Loan Distribution to Small Medium Enterprises (IDR Million)

2019 : 2.018.136
2018 : 859.573
2017 : 847.674

Tabungan (Rp Juta)
Saving (IDR Million)

2019 : 1.166.533
2018 : 790.545
2017 : 828.521

Giro (Rp Juta)
Current Account (IDR Million)

2019 : 652.867
2018 : 786.173
2017 : 873.058

Deposito Berjangka (Rp Juta)
Time Deposit (IDR Million)

2019 : 10.986.831
2018 : 11.671.887
2017 : 11.203.041

Pendapatan Bunga (Rp Juta)
Interest Income (IDR Million)

2019 : 50.256
2018 : 391.541
2017 : 483.601

Laba (Rugi) Operasional (Rp Juta)
Income (Loss) from Operations (IDR Million)

2019 : 11.558
2018 : (305.175)
2017 : 112.985

Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan (Rp Juta)
Income (Loss) for the Current Year (IDR Million)

2019 : 49.495
2018 : (401.101)
2017 : 121.534

Laba (Rugi) per Saham Dasar
Income (Loss) per Share

2019 : 4,94
2018 : (40,06)
2017 : 12,14

Teknologi Informasi
Information Technology

Jumlah Volume Transaksi Internet Banking (Rp Juta)
Total transaction volume through Internet Banking (IDR Million)

2019 : Rp6.194.504
2018 : Rp4.820.566

Jumlah Pengguna Internet Banking
Total Internet Banking Users

2019 : 4.779
2018 : 1.009

Kerja Sama
Partnership

Jumlah *Supplier* Lokal
Total Local Suppliers

2019 : 50
2018 : 50
2017 : 50

Kinerja Sosial
Social Performance

Total Dana Investasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Rp Juta)
Total Corporate Social Responsibility Investment Fund (IDR Million)

2019 : Rp217.265.320
2018 : Rp152.222.300
2017 : Rp121.962.925

Total Remunerasi, Tunjangan, dan Bonus untuk Karyawan (Rp Juta)
Total Employee Remuneration, Allowances and Bonuses (IDR Million)

2019 : (260.154)
2018 : (289.492)
2017 : (248.521)

Keberagaman Karyawan [102-8]
Employee Diversity [102-8]

Jumlah Karyawan
Total Employee

2019 : 800
2018 : 971
2017 : 974

Hasil *Employee Engagement Survey* (EES)
Results of Employee Engagement Surveys

2019 : Baik
2018 : N/A
2017 : N/A

Kebersamaan dengan Nasabah
Time spent with Customers

Jumlah Nasabah
Total Customers

2019	: 40.143
2018	: 34.079
2017	: 44.902

Tingkat Penyelesaian Keluhan Nasabah
Level of Settlement in Customer Complaints

2019	: 100%
2018	: 99,83%
2017	: 100%

Persentase Pengaduan (*whistleblowing*) yang Telah Selesai Diinvestigasi dari Total Pengaduan Diterima
Percentage of Investigated Complaints (whistleblowing) of Total Complaints Received

2019	: 100%
2018	: Hasil tidak diungkapkan Undisclosed
2017	: Tidak ada laporan | NA

Kinerja Lingkungan
Environment Performance

Air [303-1]
Water [303-1]

J Trust Bank menggunakan sumber air untuk kegiatan operasional yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Selama tahun 2019 dan 2018 penggunaan air untuk kebutuhan operasional Bank belum dapat dihitung. Di kantor pusat, biaya air dibayarkan dalam bentuk biaya pemeliharaan gedung sehingga tidak dapat terdeteksi jumlah air yang dipakai. [303-2]

J Trust Bank sources water for operational activities from Regional Water Supply Company (PDAM). For 2019 and 2018 the water consumption for the Bank's operational needs could not be calculated. At the head office, water bill was paid as part of building maintenance costs so the amount of water used could not be detected. [303-2]

Energi [302-1]
Energy [302-1]

Konsumsi Energi (KWh)
Konsumsi Energi (KWh)

2019	: Rp5.077.809.461
2018	: Rp5.968.482.402
2017	: Rp5.748.024.735

DATA TERKAIT LAINNYA

Other Related Data

Skala Perusahaan [102-7]

Scale of Business [102-7]

Total Kapitalisasi

Total Capitalization

Utang (Rp Juta)
Liabilities (IDR Million)

2019	: 15.637.771
2018	: 16.508.766
2017	: 15.658.857

Ekuitas (Rp Juta)
Equity (IDR Million)

2019	: 1.673.826
2018	: 1.314.903
2017	: 1.512.324

Total Aset
Total Assets

2019	: 17.311.597
2018	: 17.823.669
2017	: 17.171.181

Jumlah Produk dan Layanan
Total Products and Services

2019	: 34
2018	: 32
2017	: 26

Sektor dan Jenis Pasar Terlayani [102-6]

Sector and Types of Served Markets [102-6]

J Trust Bank menawarkan kepada nasabahnya layanan perbankan yang dapat mendukung kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan jasa keuangan sehari-hari dan sebagai sarana pengembangan bisnis. J Trust Bank menyediakan beragam bentuk produk/jasa keuangan dengan berfokus melalui bidang *Commercial Banking, Small Medium Enterprise & Consumer, Retail Funding, Treasury & Instititutional Funding*, dan *Consumer*.

Sepanjang tahun 2019, terdapat perubahan pada jumlah cabang, kantor cabang pembantu dan unit kerja yang beroperasi, namun perubahan ini tidak signifikan pengaruhnya terhadap kegiatan operasional Bank. Di sisi lain, tidak ada perubahan signifikan pada struktur kepemilikan Bank. [102-10]

J Trust Bank offers its customers banking services that can make it more convenient for the public to access its financial services and as a means to expand the business. J Trust Bank offers various forms of financial products/services by focusing on the fields of Commercial Banking, Small Medium Enterprise & Consumer, Retail Funding, Treasury & Institutional Funding, and Consumer.

During 2019, there were changes in the number of branches, sub-branch offices and operating work units, but this change did not give significant impacts to the Bank's operational activities. On the other hand, there was no significant change in the ownership structure of the Bank. [102-10]

INISIATIF KEUANGAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN TARGET PENERAPAN BERKELANJUTAN [FS-1]

Financial Initiatives And Sustainable Application Target Achievements [FS-1]

J Trust Bank menjalankan kegiatan usaha perbankan yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan yang tertuang dalam kebijakan internalnya. Hingga akhir 2019, kebijakan tersebut masih dalam tahap penyusunan. Komitmen J Trust Bank dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) disampaikan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).

J Trust Bank menyusun RAKB yang berisi rencana kegiatan dalam jangka pendek dan panjang dalam menerapkan Keuangan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (LST), serta penerapan prinsip kehati-hatian perbankan, sistem pengendalian internal, serta manajemen risiko.

Pelaksanaan keuangan berkelanjutan J Trust Bank dalam tahun pertama, yaitu di tahun 2019 dimulai dari pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pelatihan, serta penyesuaian internal yang dibutuhkan dalam mendukung penerapan keuangan berkelanjutan seperti pembentukan organisasi, penyesuaian kebijakan dan lain-lain.

J Trust Bank carries out sustainable banking business activities by applying sustainable finance principles as stated in its internal policies. Until the end of 2019, the policy was still in the preparation stage. J Trust Bank's commitment to support the realization of the Sustainable Development Goals (SDGs) is disclosed in the Sustainable Finance Action Plan (SFAP).

J Trust Bank prepares RAKB which contains planned activities in the short and long term for the implementation of sustainable finance, with due consideration to compliance with environmental, social and governance (ESG) aspects, and the application of banking precautionary principles, internal control systems, and risk management.

The implementation of sustainable finance J Trust Bank in the first year, namely in 2019 began with developing sustainable finance products and/or services, developing employee competencies through training and education, and internal adjustments that became necessary to support sustainable finance implementation such as organizational formation, policy adjustments, etc.

KINERJA EKONOMI DAN INKLUSI KEUANGAN [103-1, 103-2, 103-3]

Economic Performance and Financial Inclusions [103-1, 103-2, 103-3]

Pendekatan Manajemen [103-1, 103-2, 103-3]

Management Approaches [103-1, 103-2, 103-3]

J Trust Bank turut berperan serta dalam sektor perbankan nasional dan memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan sistem perekonomian masyarakat. Pencapaian kinerja ekonomi Bank menjadi salah satu tolok ukur kepercayaan serta menjadi dasar bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil keputusan investasinya.

Bank telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Dalam RAKB tersebut, Bank berupaya untuk menyelaraskan tiga aspek keberlanjutan yang umumnya disebut dengan *triple bottom line*, yang terdiri dari *profit* (ekonomi), *people* (sosial), dan *planet* (lingkungan) sebagai landasan komitmen berkelanjutan yang akan diterapkan Bank JTrust Indonesia dalam memberikan kontribusi nyata bagi kelestarian lingkungan hidup dan peningkatan aspek sosial ekonomi masyarakat, melalui peningkatan taraf hidup seluruh karyawan Bank beserta keluarga pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya yang sejalan dengan program pembangunan pemerintah Indonesia.

Berlandaskan *triple bottom line* tersebut J Trust Bank merumuskan tujuan sebagai berikut :
"Menjadi 10 Bank teratas di Indonesia dengan rasio keuntungan tertinggi terhadap aset dan berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dalam 5 tahun mendatang, yang dilaksanakan melalui strategi utama yaitu: restrukturisasi organisasi berbasis kinerja serta penyesuaian sumber daya manusia dengan kebutuhan strategis, integrasi aspek sosial dan lingkungan hidup ke dalam pengelolaan risiko serta peningkatan pertumbuhan portofolio pembiayaan pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan."

J Trust Bank participates in the national banking sector and has an influence on the sustainability of the economic system of the community. The achievement of the Bank's economic performance is one of the benchmarks of trust and used by investors and other stakeholders to make investment decisions.

The Bank has prepared a Sustainable Finance Action Plan (SFAP). In the SFAP, the Bank works to harmonize the three aspects of sustainability commonly referred to as the triple bottom line, profit (economy), people (social), and planet (environment) as the basis for sustainable commitment to be applied by the Bank in making tangible contribution to environmental sustainability and improvements in the socio-economic aspects of the community, by improving the living standards of all Bank employees and their families in particular and the wider community in general in line with the Indonesian government's development program.

Based on the triple bottom line, J Trust Bank formulated the objectives as follows:
"To be the top 10 banks in Indonesia with the highest return on asset ratio and a commitment to preserve the environment and social life of the Indonesian people in the next 5 years, to be realized through the main strategies: performance-based organizational restructuring and HR adjustment to strategic needs, integration of social and environmental aspects into risk management and increasing the growth of financing portfolios in ecofriendly business activities. "

Pada tahun 2019, J Trust Bank membukukan pertumbuhan kredit sebesar Rp6.132.883 juta, turun 39,45% dibandingkan Rp10.129.117 juta di tahun 2018. Di sisi lain, total aset Bank pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp17.311.597 juta. Dalam hal Dana Pihak Ketiga (DPK), Bank mampu menghimpun dana nasabah mencapai Rp12.806.232 juta di tahun 2019, sedikit turun 3,34% dibandingkan DPK tahun 2018 sebesar Rp13.248.605 juta.

Meski demikian, J Trust Bank mampu mencatatkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp49.495 juta di tahun 2019 atau naik sebesar 112,34% dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencatatkan rugi sebesar Rp401.101 juta. Pertumbuhan laba bersih setelah pajak tersebut terutama didukung oleh pedapatan operasional lainnya. Rasio Kecukupan Modal (CAR) Bank mengalami perbaikan setiap tahunnya dan mencapai 14,53% di tahun 2019, sedangkan rasio *Net Interest Margin* (NIM) terjadi di 0,39% pada akhir tahun 2019.

In 2019, J Trust Bank posted a credit growth of IDR6,132,883 million, down 39.45% compared to IDR10,129,117 million in 2018. On the other hand, the Bank's total assets in 2019 were recorded at IDR17,311,597 million. In Third Party Funds (DPK), the Bank was able to collect customer funds that reached IDR12,806,232 million in 2019, a slight decrease of 3.34% compared to IDR13,248,605 million in 2018.

However, J Trust Bank was able to earn IDR49,495 million in net profit after tax in 2019 or an increase of 112.34% compared to a loss of IDR401,101 million in 2018. The growth in net profit after tax was mainly supported by other operating income. The Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) has been improving year on year and reached 14.53% in 2019, while Net Interest Margin (NIM) ratio was a high 0.39% at the end of 2019.

Nilai Ekonomi yang Diterima dan Didistribusikan [201-1]

Economic Value Received and Distributed [201-1]

Produk dan jasa keuangan Bank terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan industri perbankan, dan ditawarkan dengan tujuan, antara lain, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas keuangannya, serta mendorong terciptanya dampak positif bagi para pemangku kepentingan.

The Bank will continue to develop its financial products and services in line with the development of the banking industry, and will offer them to i.e. improve the quality of life of the community and give more convenience for the public to do financial activities, while encouraging the creation of positive impacts for the stakeholders.

Distribusi Nilai Ekonomi (Rp Juta) [201-1]

The Distribution of Economic Value (IDR Million) [201-1]

Uraian	Periode Pelaporan Reporting Period			Description
	2019	2018	2017	
I. Nilai Ekonomi Langsung yang Diterima **Received Direct Economic Value**				
Pendapatan Bunga	1.132.243	1.426.813	1.500.646	Interest Income
Pendapatan Operasional Lainnya	526.546	(78.786)	137.319	Other Operating Income
Jumlah Nilai Ekonomi yang Diterima	1.658.789	1.348.027	1.637.965	Total Direct Economic Value Received
II. Nilai Ekonomi yang Didistribusikan **Distributed Economic Value**				
Beban Bunga	(1.081.987)	(1.035.272)	(1.017.045)	Interest Expense
Beban Operasional Lainnya	(565.244)	(617.930)	(507.935)	Other Operating Income
Pembayaran kepada penyandang dana (pembayaran dividen)	-	-	-	Payment to the funder (dividend payment)
Pembayaran kepada Pemerintah (pajak, retribusi dan lain- lain)	196	2.480	3.135	Payment to the Government (Tax, Retribution, etc.)
Jumlah Nilai Ekonomi yang Didistribusikan	1.647.035	1.650.722	(1.521.845)	Total Economic Value Distributed
III. Nilai Ekonomi yang Ditahan **Retained Economic Value**				
Nilai Ekonomi yang Ditahan	11.754	(302.695)	3.159.810	Total Economic Value Retained

Portofolio Kredit dan Kualitas Pinjaman

Credit Portfolio and Loan Quality

Pendekatan Manajemen [103-1][103-2][103-3]

Management Approach [103-1][103-2][103-3]

Portofolio usaha Bank meliputi kegiatan pinjaman dan simpanan. J Trust Bank terus meningkatkan pertumbuhan portofolio dan menjaga kualitas pinjaman menjadi dasar yang penting bagi perkembangan usaha Bank. Bank juga telah menerapkan strategi dan kebijakan dalam menghadapi tantangan industri perbankan, serta memberikan pelayanan yang terbaik. Evaluasi kinerja perkreditan dan kualitas aktiva menjadi tanggung jawab unit-unit kerja terkait seperti unit bisnis, unit kredit dan unit manajemen risiko. Masing-masing unit kerja bertanggung jawab kepada Direksi.

The Bank's business portfolio comprises lending and savings activities. J Trust Bank continuously grow portfolio and maintain loan quality as an important basis for further expansion. The Bank has also implemented strategies and policies to face the challenges in the banking industry while providing the best services. The evaluation of credit performance and asset quality is the responsibility of related work units i.e. business units, credit units and risk management units. Each work unit reports to the Board of Directors.

Pemberian Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi (Rp Juta) [103-1][103-2][103-3]

Provision of Credit by Economic Sector (IDR Million) [103-1][103-2][103-3]

Portofolio Kredit berdasarkan Sektor dan Kategori [FS6]

Credit Portfolios by Sector and Category [FS6]

J Trust Bank turut mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional antara lain melalui penyaluran kredit produktif bagi debitur-debitur di berbagai segmen usaha dan sektor ekonomi. Penyaluran kredit untuk debitur non-individual dimulai dari segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga korporasi yang merupakan salah satu fokus layanan Bank. Nilai jangka panjang dari kegiatan penyaluran kredit tersebut adalah pertumbuhan kredit yang berkesinambungan pada segmen-segmen utama Bank.

J Trust Bank also supports the achievement of national development goals i.e. through productive lending to debtors in various business segments and economic sectors. Lending for non-individual debtors starts from the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) segment to the corporation, which is one of the focus of the Bank's services. The long-term value of the credit distribution activity is sustainable credit growth in the Bank's core segments.

Pemberian Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi (Rp juta)
Provision of Credit by Economic Sector (IDR million)

Uraian	2019	2018	2017	Pertumbuhan (%) Growth		Description
				2019-2018	2018-2017	
Rumah tangga	1.906.189	1.519.528	1.562.264	25,44%	(2,73%)	Household
Industri pengolahan	905.197	2.644.452	2.939.004	(65,77%)	(10,02%)	Processing Industry
Perdagangan besar dan eceran	1.130.698	2.292.760	2.727.395	(50,68%)	(15,94%)	Wholesaling and Retailing
Perantara keuangan	1.123.000	1.246.475	1.432.156	(9,91%)	(12,97%)	Financial Mediation
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	126.190	533.739	777.344	(76,36%)	(31,34%)	Transportation, warehousing, and communication

Pemberian Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi (Rp juta)
Provision of Credit by Economic Sector (IDR million)

Uraian	2019	2018	2017	Pertumbuhan (%) Growth		Description
				2019-2018	2018-2017	
Konstruksi	336.279	496.438	385.002	(32,26%)	28,94%	Construction
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	10.993	41.790	61.127	(73,69%)	(31,63%)	Community services, social culture, entertainment and other personal services
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	348	9.779	35.497	(96,44%)	(72,45%)	Healthcare and social activities
Penyediaan akomodasi, makanan dan minuman	155.735	611.968	979.115	(74,55%)	(37,50%)	Hospitality, food and beverage
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	403.672	545.537	480.014	(26,00%)	13,65%	Real estate, corporate rent, and services
Pertambangan	11.387	115.491	65.368	(90,14%)	76,68%	Mining
Perikanan	14.999	14.956	14.887	0,29%	0,46%	Fishery
Pertanian, perburuan dan kehutanan	49.821	71.837	9.071	(30,65%)	691,94%	Agriculture, hunting, and forestry
Jasa pendidikan	-	510	607	(100,00%)	(15,98%)	Educational services
Listrik, gas dan air	-	22.367	-	(100,00%)	100,00%	Electricity, gas, and water
Lain-lain	71.483	91.428	-	(21,81%)	100,00%	Other sectors

Pendapatan Bunga Kredit Berdasarkan Segmen (Rp juta)
Interest Income of Loan Distribution based on Segment (IDR million)

Pemberian Kredit	2019	2018	2017	Pertumbuhan (%) Growth		Loans
				2019-2018	2018-2017	
Kredit modal kerja	352.391	537.177	546.054	(34,40%)	(1,63%)	Capital Loan
Kredit konsumer	234.572	198.526	432.709	18,16%	(54,12%)	Consumer Loan
Kredit investasi	87.291	193.889	165.788	(54,98%)	16,95%	Investment Loan

***Non Performing Loan* (NPL)**

Pada periode 31 Desember 2019, rasio pinjaman bermasalah (*Non-Performing Loans* (NPL) mengalami perbaikan dan tercatat sebesar 1,49% (*gross*) dan 0,80% (*net*) sedangkan pada periode 31 Desember 2018 adalah sebesar 4,26% (*gross*) dan 3,12% (*net*).

Non-Performing Loans (NPL)

For the period ended December 31, 2019 period, the ratio of non-performing loans (NPL) improved and was recorded at 1.49% (gross) and 0.80% (net) for the figures in the corresponding period in 2018 were respectively 4.26% (gross) and 3.12% (net).

Dampak Nilai Ekonomi Tidak Langsung
Indirect Economic Value Impact

Pendekatan Manajemen [103-1][103-2][103-3]
Management Approach [103-1][103-2][103-3]

J Trust Bank senantiasa memberikan perhatian terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktukan melalui aktivitas tanggung jawab sosial di bidang inklusi dan literasi keuangan. Hal ini juga sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan pada Bank dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

J Trust Bank always attends closely to the sustainability and welfare of the community. This is shown in the social responsibility activities in financial inclusion and literacy. This is also in line with the implementation of sustainable finance at the Bank with the aim of promoting inclusive and sustainable economic growth.

Program inklusi dan literasi keuangan unggulan yang diluncurkan oleh J Trust Bank seperti:
"Edukasi Produk Perbankan" yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2019, bertempat di SMP Islam Tugasku, Jl. Pulo Mas Jaya No. 2, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Kegiatan ini bertujuan sebagai edukasi pengenalan mengenai pengenalan produk, layanan, dan transaksi perbankan.

The Leading financial inclusion and literacy programs launched by J Trust Bank, such as:
"Banking Product Education" held on October 29, 2019, which took place at the Islamic Middle School of Duty, Jl. Pulo Mas Jaya No. 2, Kayu Putih, Pulo Gadung, East Jakarta. This event was intended as an introductory education on banking products, services, and transactions.

Produk/Program Inklusi dan Literasi Keuangan [203-1][FS14][FS16]
Financial Inclusion and Programs/Products Literacy [203-1][FS14][FS16]

Program inklusi keuangan merupakan salah satu kebijakan yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang ditujukan kepada masyarakat di lapisan bawah (*the bottom of the pyramid*) untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal, seperti sarana menyimpan uang yang aman, pengiriman uang (*transfer*), menabung maupun pinjaman dan asuransi.

The financial inclusion program is one of the policies implemented by the Financial Services Authority (OJK) as a form of financial service deepening that is directed at the bottom of the pyramid so they will use formal financial products and services i.e. to save money safely, transfer money, save or borrow money and insurance.

Bank secara konsisten menjalankan produk/program inklusi dan literasi keuangan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program inklusi dan literasi keuangan yang dicanangkan oleh Pemerintah.

The Bank consistently runs financial inclusion and literacy products/programs as a form of commitment to supporting financial inclusion and literacy programs launched by the Government.

Portofolio Kredit Berwawasan Lingkungan dan Sosial

Environmental and Social Credit Portfolio

J Trust Bank telah menetapkan sektor pembiayaan prioritas berwawasan sosial dan lingkungan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. Melalui Divisi Bisnis (*Lending*), Bank berupaya menyalurkan dana dalam bentuk kredit sesuai target yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke sektor ekonomi yang sejalan dengan prinsip Keuangan Berkelanjutan dengan memperhitungkan aspek sosial dan lingkungan hidup.

J Trust Bank has set a priority financing sector with a social and environmental perspective as outlined in its Sustainable Finance Action Plan. Through the Business Division (Lending), the Bank works to channel funds in the form of loan based on its five-year targets to the economic sector consistent with the principles of Sustainable Finance, with due consideration on social and environmental aspects.

Kelemahan yang mendasar dari rencana penyaluran kredit Keuangan Berkelanjutan adalah masih terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam melakukan analisa perkreditan dengan memperhitungkan aspek sosial dan lingkungan hidup. Namun demikian, kelemahan ini akan segera ditutup dengan penyelenggaraan pelatihan/*workshop* untuk meningkatkan kompetensi terkait Keuangan Berkelanjutan.

A fundamental weakness of sustainable finance credit distribution plan is the still lacking competent human resources who can make credit analysis without neglecting the social and environmental aspects. However, a series of trainings/workshops to improve sustainable finance-related competencies will cover this weakness in the near future.

J Trust Bank berupaya mewujudkan program *green banking* sebagai bentuk nyata penerapan green economy dalam dunia perbankan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Salah satu penerapan intinya yaitu melalui penyaluran pembiayaan ramah lingkungan dan kegiatan operasional ramah lingkungan (*green campaign*).

J Trust Bank is working to realize green banking program as a tangible form of green economy implementation in banking to comply with the regulations of the Financial Services Authority, and those of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). One of the core applications is through ecofriendly financing distribution and operations (green campaign).

Di samping itu, J Trust Bank juga akan mulai mengidentifikasi dan membuka peluang bagi pendanaan hijau (*green estate/project*) kepada debitur yang telah memiliki hasil kajian lingkungan. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk mencegah atau meminimalisi dampak perubahan iklim, maka peluang pembiayaan proyek-proyek *clean energy* dan/atau *renewable energy* maupun green estate/project juga akan semakin tumbuh. [FS8]

Bank mensyaratkan dokumen yang terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan informasi terkini mengenai Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), khususnya bagi debitur berskala besar dengan bidang usaha tertentu. Dengan kepatuhan pada peraturan lingkungan, maka calon debitur memastikan bahwa mereka juga telah mengelola limbahnya dengan baik. [FS1][FS2] [FS3]

Hingga akhir tahun 2019, J Trust Bank sedang dalam tahap penyusunan kebijakan keberlanjutan yang merupakan langkah awal untuk melaksanakan keuangan berkelanjutan secara lebih mendalam, terutama untuk pendanaan hijau. [FS12]

In addition, J Trust Bank will also begin to identify and offer opportunities for green finance (green estate/projects) to debtors who already have environmental assessment results. As public awareness of the importance of environmental preservation to prevent or minimize the impact of climate change increases, the opportunity for financing clean energy projects and/or renewable energy and green estate/projects will also grow. [FS8]

The Bank requires documents related to the Environmental Impact Assessment (AMDAL) and the latest information on Rating Performance Environmental Management (PROPER) from rating agencies, especially for large-scale debtors engaged in more specific business sectors. By complying with environmental regulations, each prospective debtor ensures that they also manage their waste properly. [FS1][FS2] [FS3]

Until the end of 2019, J Trust Bank was still in the process of formulating a sustainability policy as the first step to implement sustainable finance in more depth, especially for green funding. [FS12]

PERISTIWA PENTING 2019

2019 Event Highlights

Januari January 11

J Trust Bank Peduli Korban Tsunami Selat Sunda
J Trust Bank melalui Corporate Secretary Division bekerja sama dengan Serikat Pekerja J Trust Bank, Koperasi J Trust Bank Terpercaya, Keluarga Muslim J Trust Bank, dan Persekutuan Doa Kasih J Trust Bank menyelenggarakan aksi sosial peduli korban tsunami Selat Sunda di Desa Sukarame, Jl Raya Carita KM 10, Pandeglang, Banten.

J Trust Bank Care for Sunda Strait Tsunami Victims
J Trust Bank through the Corporate Secretary Division cooperated with J Trust Bank Labor Union, J Trust Bank Terpercaya Cooperatives, J Trust Bank Muslim Family, and Persekutuan Doa Kasih J Trust Bank held social act to care for Sunda Strait tsunami victims in Sukarame Village, Jl Raya Carita KM 10, Pandeglang, Banten.

Perayaan Natal J Trust Bank & JTO Finance
J Trust Bank dan PT JTrust Olympindo Multi Finance (JTO Finance) menggelar kegiatan Perayaan Natal bersama para karyawan di Sakura Function Room, Sahid Sudirman Center.

J Trust Bank & JTO Finance Christmas Celebration
J Trust Bank and PT JTrust Olympindo Multi Finance (JTO Finance) held Christmas Celebration with employees in Sakura Function Room, Sahid Sudirman Center.

Februari February 11

RUPS Luar Biasa J Trust Bank
J Trust Bank menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Sakura Function Hall, Sahid Sudirman Center, Jakarta Pusat pada Senin, 11 Februari 2019.

J Trust Bank Extraordinary AGMS
J Trust Bank held the Extraordinary Annual General Meeting of Shareholders at Sakura Function Hall, Sahid Sudirman Center, Central Jakarta on Monday, 11 February 2019.

Maret March 6

Kerja Sama J Trust Bank dengan Asuransi Simas Jiwa
J Trust Bank menjalin kerja sama dengan PT Asuransi Simas Jiwa dalam meluncurkan produk asuransi unitlink Simas Investa Optima dan Simas Investa Optima Dollar di Sakura Function Room, Sahid Sudirman Center, Jakarta.

Cooperation between J Trust Bank and Asuransi Simas Jiwa
J Trust Bank cooperated with PT Asuransi Simas Jiwa to launch unitlink insurance products Simas Investa Optima and Simas Investa Optima Dollar at Sakura Function Room, Sahid Sudirman Center, Jakarta.

Mei May 24

J Trust Bank Berbuka Puasa Bersama Anak Yatim
J Trust Bank menyelenggarakan acara buka puasa bersama 50 anak yatim Yayasan Al-Fajr Panti Yatim Indonesia di Sakura Function Room, Sahid Sudirman Center, Jakarta Pusat.

J Trust Bank Fast Breaking with Orphans
J Trust Bank held fast breaking event with 50 orphans of Yayasan Al-Fajr Panti Yatim Indonesia at Sakura Function Room, Sahid Sudirman Center, Central Jakarta.

Juni June 17

Donor Darah J Trust Bank Juni 2019
J Trust Bank menyelenggarakan kegiatan donor darah pertama pada 2019, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang. Kegiatan donor darah rutin ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan J Trust Bank kepada masyarakat.

J Trust Bank Blood Donor June 2019
J Trust Bank held its first blood donor activity in 2019, in cooperation with the Indonesian Red Cross (PMI) of Tangerang City. The routine blood donor event was part of J Trust Bank's corporate social responsibility to the public.

Juni June 22-23

J Trust Group Dukung Ennichisai 2019
J Trust Bank kembali mendukung perhelatan Ennichisai 2019 untuk keempat kalinya, bersama dengan sesama entitas bisnis J Trust Group di Indonesia, PT JTrust Olympindo Multi Finance (JTO Finance).

J Trust Group Supports Ennichisai 2019
J Trust Bank supported Ennichisai 2019 for the fourth time, together with J Trust Group's business entity in Indonesia, PT JTrust Olympindo Multi Finance (JTO Finance).

RUPS Tahunan J Trust Bank
J Trust Bank menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Sakura Function Room, Sahid Sudirman Center, Jakarta. RUPS Tahunan dihadiri oleh jajaran Direksi dan Dewan Komisaris, beserta pemegang saham J Trust Bank.

J Trust Bank Annual GMS
J Trust Bank held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) at Sakura Function Room, Sahid Sudirman Center, Jakarta. The Annual GMS was attended by the Board of Directors and Commissioners, and J Trust Bank shareholders.

Agustus August 3-4

J Trust Bank Dukung Jicomfest 2019
J Trust Bank mendukung penyelenggaraan Jakarta International Comedy Festival (Jicomfest) 2019 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Jicomfest merupakan festival komedi pertama dan terbesar di Indonesia.

J Trust Bank Holds Jicomfest 2019
J Trust Bank supports the Jakarta International Comedy Festival (Jicomfest) 2019 held in JIExpo Kemayoran, Central Jakarta. Jicomfest was the first and biggest comedy festival in Indonesia.

J Trust Bank Berkurban 2019
Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1440 H, J Trust Bank menyerahkan satu ekor sapi sebagai hewan kurban kepada pengurus Masjid Mathla'ul Anwar yang berlokasi di Jalan Karet Pasar Baru Barat IV, Karet Tengsin, Jakarta Pusat.

J Trust Bank Qurbani 2019
To celebrate the Idul Fitri 1440 H, J Trust Bank gave one cow as qurbani (sacrifice) to the administrator of Mathla'ul Anwar Mosque located in Jalan Karet Pasar Baru Barat IV, Karet Tengsin, Central Jakarta.

Peringatan HUT Ke-74 RI di J Trust Bank
Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia, J Trust Bank kembali menyelenggarakan acara tahunan Lomba 17-an di Sakura Meeting Hall, Sahid Sudirman Center, Jakarta.

The 74th Independence Day of Indonesia in J Trust Bank
In commemorating the 74th independence day of Indonesia, J Trust Bank held the annual Race event at Sakura Meeting Hall, Sahid Sudirman Center, Jakarta.

Peluncuran J Trust Net Individual dan J Trust Mobile
J Trust Bank meluncurkan fitur *internet banking* J Trust Net Individual dan *mobile version* J Trust Mobile di kantor pusat J Trust Bank, Jakarta.

Launching of J Trust Net Individual and J Trust Mobile
J Trust Bank launched the internet banking J Trust Net Individual and mobile version J Trust Mobile features in J Trust Bank headquarters, Jakarta.

PERISTIWA PENTING 2019
2019 Event Highlights

Agustus August 24

J Trust Group Gelar CSR di Cipanas, Cianjur
Entitas bisnis J Trust Co., Ltd. di Indonesia yang terdiri dari J Trust Bank, PT JTrust Investment Indonesia (JTII), dan PT JTrust Olympindo Multi Finance (JTO Finance) menyelenggarakan kegiatan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) bersama anak yatim dengan tema "Sharing Happiness" di Cipanas, Cianjur.

J Trust Group Holds CSR in Cipanas, Cianjur
J Trust Co., Ltd. business entities in Indonesia - J Trust Bank, PT JTrust Investment Indonesia (JTII), and PT JTrust Olympindo Multi Finance (JTO Finance) – held a Corporate Social Responsibility (CSR) event with orphans with the theme "Sharing Happiness" in Cipanas, Cianjur.

September September 10

Donasi J Trust Bank untuk Pembangunan Veneer House di Palu
J Trust Bank memberikan donasi senilai 5.000 dolar AS kepada Kobayashi Laboratory untuk membangun Community Center tahan gempa dan tsunami dengan metode Veneer House di Balaroa, Kecamatan Ulujadi, Palu, Sulawesi Tengah.

J Trust Bank Donation for Veneer House Development in Palu
J Trust Bank gave donation of USD5,000 to Kobayashi Laboratory to build an earthquake and tsunami proof Community Center with the Veneer House method in Balaroa, Kecamatan Ulujadi, Palu, Central Sulawesi.

J Trust Bank Dukung Jakarta Kizuna Ekiden 2019
J Trust Bank mendukung pergelaran tahunan lari estafet Jakarta Kizuna Ekiden di Gelora Bung Karno, Jakarta.

J Trust Bank Supports Jakarta Kizuna Ekiden 2019
J Trust Bank supported the annual relay race event Jakarta Kizuna Ekiden in Gelora Bung Karno, Jakarta.

Oktober October 15-16

J Trust Bank Partisipasi pada Indonesia Career Expo
J Trust Bank berpartisipasi pada acara bursa kerja "Indonesia Career Expo" yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta.

J Trust Bank Participates in Indonesia Career Expo
J Trust Bank participated in job fair "Indonesia Career Expo" at Balai Kartini, Jakarta.

Seremoni Pembukaan J Trust Bank Kantor Cabang Bandung-Juanda
J Trust Bank menyelenggarakan seremoni *Grand Opening* kantor cabang Bandung-Juanda, Jl. Ir. H. Djuanda No. 36 yang terintegrasi dengan kantor cabang PT JTrust Olympindo Multi Finance (JTO Finance).

Opening Ceremony of J Trust Bank Bandung-Juanda Branch
J Trust Bank held Grand Opening ceremony of Bandung-Juanda branch in Jl. Ir. H. Djuanda No. 36, integrated with the branch of PT JTrust Olympindo Multi Finance (JTO Finance).

J Trust Bank Peringati Bulan Inklusi Keuangan
Dalam rangka memperingati Bulan Inklusi Keuangan selama Oktober 2019, J Trust Bank menyelenggarakan kegiatan "Edukasi Produk Perbankan" di SMP Islam Tugasku, Jakarta Timur.

J Trust Bank Celebrates Financial Inclusion Month
In celebration of the Financial Inclusion Month in October 2019, J Trust Bank held "Banking Products Education" activity in SMP Islam Tugasku, East Jakarta.

November November 20

J Trust Bank Dukung Singaperbangsa Charity Golf Tournament 2019
J Trust Bank mendukung pergelaran Singaperbangsa Charity Golf Tournament 2019 yang berlangsung di Palm Springs Golf Karawang yang juga bertujuan menggalang donasi untuk kemanusiaan, baik yatim piatu maupun korban bencana alam.

J Trust Bank Supports Singaperbangsa Charity Golf Tournament 2019
J Trust Bank supported the Singaperbangsa Charity Golf Tournament 2019 in Palm Springs Golf Karawang aimed at raising donation for humanity, both orphans or disaster victims.

Penarikan Undian Tabungan Berhadiah J Trust Bank Tahap I
J Trust Bank menyelenggarakan Penarikan Undian Tabungan Berhadiah J Trust Bank Tahap I di kantor pusat J Trust Bank, Jakarta, yang dihadiri oleh jajaran Direksi, Komisaris, dan EVP J Trust Bank.

Lottery Withdrawal of J Trust Bank Savings with Prizes Phase 1
J Trust Bank held Lottery Withdrawal of J Trust Bank Savings with Prizes Phase 1 in J Trust Bank headquarters, Jakarta, attended by Directors, Commissioners, and EVP of J Trust Bank.

Paparan Publik J Trust Bank 2019
J Trust Bank menyelenggarakan paparan publik kinerja keuangan triwulan III/2019 di kantor pusat J Trust Bank, Jakarta dan dihadiri oleh jajaran manajemen, investor, dan masyarakat.

J Trust Bank 2019 Public Expose
J Trust Bank held public expose for Q3/2019 financial performance in J Trust Bank headquarters, Jakarta, attended by the management, investors, and public.

Desember December 3

Kerja Sama J Trust Bank dengan Akseleran
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (J Trust Bank) menjalin kerja sama dengan PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) berupa penyaluran pinjaman dengan skema *channeling*.

Cooperation of J Trust Bank with Akseleran
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (J Trust Bank) held cooperation with PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) in form of loan disbursement with channeling scheme.

Donor Darah J Trust Bank Desember 2019
J Trust Bank menyelenggarakan kegiatan donor darah yang kedua kali pada tahun ini, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang.

J Trust Bank Blood Donor December 2019
J Trust Bank held its second blood donor event in 2019, in cooperation with the Indonesian Red Cross (PMI) of Tangerang City.

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

Di 2019, Bank berfokus untuk bersikap selektif dalam memberikan kredit, demi memiliki aset berkualitas, dan meningkatkan manajemen risiko. Bank berhasil mengurangi tingkat kredit bermasalah ke level yang sangat sehat di bawah 2%.

In 2019, the Bank focused on selective lending, owning high-quality assets, and strengthening the risk management. The Bank was successful in reducing the rate of non-performing loans to a very healthy level of below 2%.

Nobiru Adachi
Komisaris Utama
President Commissioner

LAPORAN DEWAN KOMISARIS [102-14]

Report of the Board of Commissioners [102-14]

Tahun 2019 adalah sebuah periode konsolidasi untuk J Trust Bank. Namun berkat kerjas keras manajemen, fondasi Bank sekarang ini adalah yang terkuat sepanjang sejarah Bank.

Year 2019 was a period of consolidation for J Trust Bank. However with the hard work of management, the Bank's foundations are the strongest in the history of the Bank.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Tahun 2019 adalah tahun yang penuh tantangan bagi J Trust Bank. Dewan Komisaris melihat bahwa manajemen telah berupaya untuk menjalankan bisnis sesuai dengan rencana, namun berbagai kondisi yang terjadi di tengah perekonomian global dan domestik yang penuh ketidakpastian membuat kami harus meninjau ulang beberapa rencana.

Walaupun demikian, secara keseluruhan kami meyakini bahwa J Trust Bank tetap berada di langkah yang tepat. Kami terus memperkuat fundamental Bank dan merancang strategi jangka menengah-panjang demi pertumbuhan yang baik ke depannya. Hal-hal tersebut akan kami jelaskan di dalam Laporan Tahunan ini.

Kondisi Ekonomi Global dan Domestik

Di tahun 2019, kita menyaksikan pertumbuhan ekonomi global mencapai titik terendah sejak krisis satu dekade lalu. Masih berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok menyebabkan arus perdagangan dan investasi terhambat, baik di negara

Respected Shareholders and Stakeholders,

Year 2019 was a challenging one for J Trust Bank. The Board of Commissioners saw the management had aimed to do business as planned, however the conditions in uncertain global and domestic economies caused us to review several plans.

Nevertheless, overall we think that J Trust Bank is moving in the right direction. We continue strengthening the Bank's fundamentals and designing medium-long term strategy for a better growth in the future. We will explain these matters in the Annual Report.

Global and Domestic Economic Conditions

In 2019 we saw the global economic growth reached the lowest point since the crisis a decade ago. Continued trade wars between the US and China disrupted the flow of trade and investment, both in developed and emerging countries. The economies of US, China, and

maju dan negara berkembang. Perekonomian AS, Tiongkok, Eropa semuanya mengalami perlambatan. Hal ini juga terasa di Asia Tenggara.

Perekonomian Indonesia pun terkena dampak dari menurunnya arus perdagangan dan investasi. Ekspor mengalami kontraksi karena menurunnya harga-harga komoditas dunia, sedangkan investasi juga menurun yang terlihat dari lesunya pergerakan saham. Konsumsi rumah tangga, yang merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, relatif stagnan yang ditandai dengan angka inflasi yang turun ke titik terendah sejak krisis 1999.

Kegaduhan yang timbul dari Pemilihan Umum dan Presiden 2019 juga menambah unsur ketidakpastian di perekonomian dalam negeri. Hampir sepanjang tahun hal ini menjadi tema utama di kehidupan masyarakat Indonesia. Baru sesudah pengumuman kabinet di akhir Oktober 2019 bisnis bisa kembali berjalan seperti biasa.

Kondisi Industri Perbankan Nasional

Berbagai kondisi makroekonomi dan politik juga turut berpengaruh ke industri perbankan. Keputusan dari pebisnis untuk menahan ekspansi mengakibatkan pertumbuhan kredit turun signifikan ke 6,08% dibandingkan 11,75% di tahun 2018. Selain itu, korporasi juga memiliki alternatif pendanaan lain dari pasar obligasi dan teknologi finansial (*fintech*) yang bisa menawarkan suku bunga lebih kompetitif.

Upaya Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan sebanyak 100 bps sampai di titik 5% per akhir 2019 belum berdampak pada kenaikan kredit, karena bank perlu waktu untuk menyesuaikan tingkat suku bunganya. Selain itu, bank perlu juga mempertimbangkan potensi adanya kredit bermasalah. Untuk tahun 2019, perbankan sudah berjaga-jaga terhadap kemungkinan naiknya rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loans*/NPL) sehingga bisa ditahan di angka 2,5%, sedikit naik dari 2,4% di tahun 2018.

Di sisi permodalan, sektor perbankan juga tetap terjaga, yang tercermin dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) sebesar 23,3%, sedikit meningkat dari 23,0% di tahun 2018. Profitabilitas juga masih tergolong baik mengingat besarnya tantangan yang dihadapi di tahun 2019. Laba bersih mencapai Rp156,49 triliun, naik 4,3% dari tahun sebelumnya.

Penilaian atas Kinerja Direksi 2019

Tahun 2019 adalah sebuah periode konsolidasi untuk J Trust Bank di mana Bank bersikap selektif dalam menyalurkan dana dan mengurangi eksposur pada

Europe suffered a slowdown. The impact was also felt in Southeast Asia.

The Indonesian economy was also impacted by the decline in trade and investment. Exports contracted due to lower global commodity prices, while investment declined as reflected in the sluggish share price movement. Household consumption, the main source of Indonesian economic growth, was relatively stagnant as seen in the inflation rate which hit the lowest point since the 1999 crisis.

The noise arising from the General and Presidential Elections in 2019 also added uncertainty to the domestic economy. Almost throughout the year these became the main theme of Indonesian people's lives. Only after the cabinet announcement in end October 2019, business resumed as usual.

Domestic Banking Industry Condition

Macroeconomic and political conditions also affected the banking industry. The decision by businesses to halt expansion caused loan growth to drop significantly to 6.08% from 11.75% in 2018. Moreover, corporations also had alternative financing from the bond market and financial technology (fintech) which offered more competitive interest rates.

Bank Indonesia's move to cut the benchmark policy rate by 100 bps to 5% by the end of 2019 had yet to translate to rising loans, as banks required time to adjust interest rates. Furthermore, banks needed to consider the potential of bad loans. For 2019, the banking sector had mitigated the possibility of rising non-performing loans (NPL) that gross NPL could be kept at 2.5%, slighty up from 2.4% in 2018.

On capital, the banking sector remained resilient, as reflected in the capital adequacy ratio (CAR) of 23.3%, slightly increasing from 23% in 2018. Profitability also remained good considering the challenges faced in 2019. Net profit reached IDR156.49 trillion, up 4.3% from the previous year.

Assessment on the Performance of Board of Directors in 2019

Year 2019 was a period of consolidation for J Trust Bank where the Bank was being selective in channeling loans and reducing exposures to high-risk

Sutirta Budiman
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Nobiru Adachi
Presiden Komisaris
President Commissioner

Nobuiku Chiba
Komisaris
Commissioner

Mahdi Mahmudy
Komisaris Independen
Independent Commissioner

sektor-sektor dan debitur-debitur yang berisiko tinggi. Kami juga berfokus untuk meningkatkan manajemen risiko untuk mendukung pertumbuhan ke depannya.

Menghadapi tantangan-tantangan eksternal tersebut, selain tantangan yang dihadapi oleh internal Bank, Dewan Komisaris menilai Direksi telah bekerja keras untuk mencapai berbagai target yang ditetapkan sebelumnya. Kami pikir secara fundamental, fondasi Bank sekarang ini adalah yang terkuat sepanjang sejarah J Trust Bank.

Upaya manajemen dapat dilihat dari perbaikan rasio NPL bruto menjadi 1,49% dari 4,26% di tahun 2018, serta kenaikan *Return on Assets* dan *Return on Equity* menjadi 0,29% dan 4,24%, dari minus 2,25% dan minus 29,13% sebelumnya. Bank juga berhasil meningkatkan komposisi dana murah (CASA) sebesar 15,4% menjadi Rp1,82 triliun.

Perubahan komposisi Direksi yang dilakukan di pertengahan tahun 2019 juga dimaksudkan untuk memperkuat Bank dalam mengeksekusi sasaran jangka menengah-panjang yang sudah dicanangkan. Kami yakin di bawah kepemimpinan Direktur Utama Ritsuo Fukadai, Bank dapat melakukan penetrasi lebih di pasar Indonesia sesuai dengan filosofi dari J Trust Group.

sectors and debtors. We also focused on improving risk management to support future growth.

Considering the external challenges, as well as internal issues, the Board of Commissioners think the Board of Directors has worked hard to achieve the targets. Fundamentally, we think the Bank's foundations are the strongest in the history of J Trust Bank.

The management's effort can be seen from the improvement of gross NPL to 1.49%, from 4.26% in 2018, as well as better Return on Assets and Return of Equity to 0.29% and 4.24%, from minus 2.25% and minus 29.13% previously. The Bank also managed to improve low-cost funds (CASA) by 15.4% to IDR1.82 trillion.

The change in Board of Directors composition made in mid-2019 was also meant to strengthen the Bank in executing the planned medium-long term target. We believe that under the leadership of President Director Ritsuo Fukadai, the Bank can penetrate further into the Indonesian market according to the philosophy of J Trust Group.

Pengawasan atas Implementasi Strategi Bank

Dewan Komisaris selalu memantau kinerja Direksi, terutama yang berkaitan dengan hal-hal strategis. Kami ingin melakukan bisnis di Indonesia dalam jangka panjang, karena itu Dewan Komisaris memberikan nasihat dan rekomendasi untuk melakukan segala sesuatunya dengan prinsip kehati-hatian dan keberlangsungan.

Dewan Komisaris secara aktif berkomunikasi dengan Direksi dan jajaran Bank. Tidak hanya melalui rapat rutin dengan Direksi, kami juga terus berkomunikasi dengan berbagai jajaran Bank untuk memahami cara kerja Bank dan menilai apakah strategi yang dijalankan tepat dan telah diimplementasikan dengan baik .

Kami juga meminta manajemen untuk memperbaiki manajemen risiko dan memprioritaskan kehati-hatian dalam penyaluran kredit, serta meningkatkan rasio dana murah. Selain itu, kami meminta manajemen untuk melakukan disiplin biaya di berbagai sektor dan memperlakukan konsumen dengan layanan terbaik.

Penguatan manajemen risiko dan *credit review* merupakan sebuah hal yang fundamental yang dilakukan, dan akan berdampak besar pada kinerja Bank ke depannya. Tata Kelola Perusahaan (GCG) juga terus menerus diperbaiki sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam negeri dan standar praktik terbaik di dunia.

Frekuensi dan Cara Pemberian Saran Kepada Direksi

Pada tahun 2019, Dewan Komisaris mengadakan Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris sebanyak 5 kali untuk meninjau implementasi strategi Bank yang dirancang oleh Direksi. Dewan Komisaris juga melakukan pemberian saran dengan cara lain, yang tidak harus dalam bentuk rapat formal, untuk mengingatkan Direksi agar menjalankan bisnis sesuai rencana. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris juga selalu bekerja sama dengan Direksi untuk memantau kinerja Bank.

Pandangan atas Prospek Usaha

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan turun di bawah 2,3% di 2020 karena dampak dari pandemi Covid-19. Perekonomian membukukan pertumbuhan 2,97% di kuartal satu, jauh di bawah 4,97% yang dibukukan di kuartal empat 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan telah menghitung kemungkinan adanya penurunan pertumbuhan sampai 0,6% akibat virus ini.

Otoritas Jasa Keuangan kini memprediksi pertumbuhan kredit antara 1% sampai 2% di 2020, jauh di bawah estimasi awal antara 10% sampai 12%. Perbankan

Supervision on the Bank's Strategy Implementation

The Board of Commissioners always monitor the performance of Board of Directors, especially related to strategic issues. We want to do business in Indonesia in long term, therefore the Board of Commissioners gives advice and recommendation to do business in prudential and sustainable manner.

The Board of Commissioners actively communicates with the Board of Directors and Bank's ranks. Not only through regular meetings with the Board of Directors, we continue communicating with the Bank's ranks to understand the way of work and to assess if the strategy is accurate and well-implemented.

We also have requested the management to improve risk management and prioritize prudence in lending, while increasing the ratio of low-cost funds. Furthermore, we asked the management to do cost discipline in all sectors and to prioritize customer first.

Risk management improvement and credit review are fundamentals, and will create big impact to the Bank's performance in the future. Good Corporate Governance is continuously enhanced according to existing regulations locally and best practices globally.

Frequency and Method of Recommendation to the Board of Directors

In 2019, the Board of Commissioners held Joint Meeting between the Board of Directors and Commissioners 5 times to assess the implementation of Bank's strategy as designed by the Board of Directors. The Board of Commissioners also gave advice in other means, excluding formal meetings, to remind the Board of Directors to run business as planned. Committees under the Board of Commissioners also continued cooperating with the Board of Directors to monitor the Bank's performance.

View on Business Prospects

Indonesia's economic growth is expected to fall below 2.3% in 2020 due to the impact of Covid-19 pandemic. The economy booked a 2.97% growth in the first quarter, far below the 4.97% growth in the last quarter of 2019. Finance Minister Sri Mulyani even calculated the possibility of a growth contraction up to 0.6% due to the pandemic.

The Financial Services Authority now forecast loan growth at around 1% to 2% in 2020, far below initial estimates to 10% to 12%. Banks are becoming very

bersikap sangat selektif dalam menyalurkan kredit karena lingkungan bisnis yang begitu menantang.

J Trust Bank dalam kurun waktu tiga tahun ke depan tetap akan berfokus mengembangkan bisnis ritel, konsumen, UKM, dan kredit sindikasi untuk pemerintah atau perusahaan Jepang dan Korea. Kami berharap strategi ini dapat meningkatkan jumlah kredit namun dengan tingkat risiko yang rendah.

J Trust Bank ingin menjadi sebuah bank yang bisa memberikan kepuasan pada nasabahnya, sekaligus berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Untuk ini, kami akan terus menerus menantang diri sendiri agar bisa melakukan yang terbaik.

Inisiatif Keuangan Berkelanjutan

Dalam melakukan usahanya, Bank selalu berfokus pada jangka panjang. Kami berada di Indonesia untuk melakukan bisnis dengan baik dan secara berkelanjutan. Filosofi inilah yang menurut kami merupakan unsur dasar dari sebuah bisnis untuk dapat menjalankan usaha dengan kaidah-kaidah yang baik, sesuai dengan aspek ekonomi, sosial, bahkan lingkungan hidup.

Dalam hal pemberian kredit, misalnya. Kami melihat profil risiko dari calon nasabah, apakah yang mereka lakukan itu memiliki sifat berkelanjutan. Hal ini membantu kami baik dari sisi penerapan keuangan berkelanjutan, serta menjaga kualitas kredit Bank. Kami juga selalu mempertimbangkan dampak secara ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam melakukan strategi bisnis.

Sumber Daya Manusia

Dewan Komisaris mendukung penuh upaya yang dilakukan Direksi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Bank menerapkan apa yang dinamakan *Performance Driven Organization*, di mana semua jajaran diharapkan untuk bergerak selaras sebagai tim untuk sama-sama membangun Bank, sesuai dengan falsafah gotong royong yang dikenal di Indonesia.

Pada tahun 2019, Direksi terus melakukan upaya efisiensi SDM, baik dari pemutusan hubungan kerja serta melalui rotasi dan mutasi untuk mencari posisi terbaik bagi karyawan. Bank juga mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas karyawan dan memberikan apresiasi sebagai penghargaan kepada karyawan yang sudah memberikan kontribusi.

Teknologi Informasi

Bank terus berupaya meningkatkan dukungan teknologi informasi pada proses bisnis. Aplikasi *mobile banking* yang efektif berjalan di tahun

selective in channeling loans due to difficult business environment.

J Trust Bank has planned in the next three years to remain focus on developing retail, consumer, SME, and syndicated loans for the government or Japan and Korean companies. We expect the strategy can increase the number of loans but with low risk.

J Trust Bank aims to become a bank which can give customer satisfaction, while contributing to the Indonesian economy. Therefore, we continuously challenge ourselves to do the best.

Sustainable Finance Initiatives

In doing business, the Bank continues focusing on the long term. We are present in Indonesia to do business in a good and sustainable manner. We consider this philosophy as the basic element for a business to perform with good principles, in line with economic, social, and environment aspects.

In terms of loans, for example. We see the risk profile of potential debtors, whether their businesses have sustainable elements. This will help us in implementing sustainable finance, while protecting the Bank's loan quality. We always consider the economic, social, and environment impact in making business strategy.

Human Resources

The Board of Commissioners fully supports the Board of Directors's move to improve human resources. The Bank implements what is called Performance Driven Organization, where all ranks are expected to move in unison as a team to develop the Bank, in accordance with the mutual cooperation (gotong royong) principle known in Indonesia.

In 2019, the Board of Directors performed HR efficiency, through work termination as well as rotation and mutation to find the best position for employees. The Bank also held trainings to increase employees capability and gave appreciation as rewards to employees that have made contribution.

Information Technology

The Bank continues increasing information technology support in business process. Mobile banking application which was effective in 2019 is a way to

2019 merupakan sebuah cara untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah untuk dapat melakukan transaksi dari genggaman. Selain itu, proses persetujuan kredit yang dilakukan secara digital juga meningkatkan transparansi serta kepastian bagi calon nasabah.

provide simplicity and convenience for customers to make transactions from their hands. Moreover, digital loan approval process also increased transparency and certainty for potential customers.

Dewan Komisaris melihat upaya-upaya ini positif dan akan meningkatkan nilai tambah Bank di mata nasabah dan calon nasabah. Perbaikan di teknologi informasi juga diharapkan akan dapat menambah nilai kompetitif Bank di tengah derasnya persaingan yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan *fintech*.

The Board of Commissioners sees these efforts are positive and will increase the Bank's added value in the eyes of customers and potential customers. Improvement in information technology is expected to add the Bank's competitive value amid strong competition against fintech companies.

Pandangan atas Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan pengawasan terhadap implementasi Tata Kelola Perusahaan (GCG) di Bank. Di tahun 2019, kami melihat bahwa Direksi telah menerapkan GCG dengan baik, dan temuan-temuan yang ada berhasil diselesaikan atau sedang dalam proses untuk diselesaikan. Komunikasi antara Direksi dan Dewan Komisaris pun berjalan dengan sangat lancar dan transparan.

View on Corporate Governance

The Board of Commissioners through the Audit Committee supervised the implementation of Bank's Good Corporate Governance (GCG). In 2019, we see that the Board of Directors implemented GCG well, and the findings were resolved or on the process to be resolved. Communications between the Board of Directors and Commissioners also went smooth and transparent.

Dalam hal manajemen risiko, kami memperkuat sisi ini dengan merekrut seseorang yang berpengalaman di otoritas jasa keuangan Jepang. Dengan keahlian beliau, kami berharap tata kelola Bank akan makin kuat. Bank juga terus menanamkan nilai-nilai budaya perusahaan yang kami pikir akan berdampak positif pada penguatan tata kelola dari segi para individu di dalam Bank.

In risk management, we strengthened the sector by recruiting an experienced figure in Japan's financial services authority. With his expertise, we expect the Bank's governance to be stronger. The Bank also continues instilling corporate culture values which we think will have positive impact to governance strengthening on individuals inside the Bank.

Penerapan *Whistleblowing System*

Sistem pelaporan pelanggaran (atau *Whistleblowing System*) Bank memberikan kesempatan setara kepada setiap karyawan untuk dapat melaporkan dugaan adanya *fraud* atau konflik kepentingan tanpa perlu merasa khawatir. Pada tahun 2019, Bank menambah jumlah *person in charge* agar dapat lebih tanggap melihat laporan yang masuk. Laporan pun dapat dilakukan melalui aplikasi internal sehingga lebih mudah dan transparan.

Whistleblowing System Implementation

The Bank's whistleblowing system gives equal chance to all employees to report potential fraud or conflict of interest without worry. In 2019, the Bank added the number of person in charge to be more responsive in checking the number of incoming reports. Reports can be made using internal application to be more simple and transparent.

Dewan Komisaris melihat sistem pelaporan pelanggaran ini sudah berjalan dengan baik, namun kami tetap akan melakukan pemantauan untuk melihat apabila diperlukan adanya perbaikan.

The Board of Commissioners sees the whistleblowing system has performed well, but we will still hold monitoring to check if necessary improvements are required.

Penilaian atas Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melihat tiga komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Assessment on the Performance of Committees under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners views the three committees under it, Audit Committee, Risk Oversight Committee, and Remuneration and Nomination Committee have performed their duties well according to their authority and responsibility.

Sepanjang tahun 2019, Komite Audit mengadakan 9 pertemuan sepanjang tahun untuk melihat kinerja Bank dan menelaah laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya. Komite Pemantau Risiko mengadakan 7 pertemuan untuk memantau risiko-risiko yang dihadapi Bank. Komite Remunerasi dan Nominasi bertemu 6 kali untuk membahas hal-hal terkait kebijakan remunerasi dan nominasi.

In 2019, the Audit Committee held 9 meetings to check the Bank's performance and review financial statements and other financial information. The Risk Oversight Committee held 7 meetings to monitor the risks faced by the Bank. The Remuneration and Nomination Committee met 6 times to discuss issues related to remuneration and nomination policies.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Pada Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2019 di tanggal 27 Juni, Bank mengukuhkan pemberhentian Bapak Kwik Ing Hie dari posisinya sebagai komisaris independen seiring dengan berakhirnya masa jabatan beliau. Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk dukungan beliau selama ini. Posisi beliau digantikan oleh Bapak Sutirta Budiman.

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris J Trust Bank per Laporan Tahunan 2019 ini adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Nobiru Adachi
Komisaris : Nobuiku Chiba
Komisaris Independen : Mahdi Mahmudy
Komisaris Independen : Sutirta Budiman

Changes in the Composition of Board of Commissioners

In the Annual General Meetings of Shareholders 2019 on June 27, the Bank approved the resignation of Kwik Ing Hie as independent commissioner as his term ended. The Board of Commissioners expressed gratitude for his support. He was replaced by Sutirta Budiman.

Therefore, the composition of J Trust Bank's Board of Commissioners per 2019 Annual Report was as follows:

President Commissioner : Nobiru Adachi
Commissioner : Nobuiku Chiba
Independent Commissioner : Mahdi Mahmudy
Independent Commissioner : Sutirta Budiman

Apresiasi

Mengakhiri sambutan ini, izinkan saya mewakili Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk. untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para pemegang saham, pemangku kepentingan, manajemen, karyawan, mitra kerja, dan nasabah atas dukungannya di tahun 2019.

Kami menyadari bahwa kinerja Bank mungkin masih tertahan dengan berbagai tantangan yang ada, namun kami yakin bahwa fondasi yang telah ditanamkan akan mampu membawa Bank membukukan kinerja yang lebih baik ke depannya. Kami berharap J Trust Bank dapat terus tumbuh dan memberikan nilai bagi kalian semua.

Appreciation

Ending this remark, allow me to represent the Board of Commissioners of PT Bank J Trust Indonesia Tbk. in saying gratitude and appreciation to shareholders, stakeholders, management, employees, business partners, and customers for their support in 2019.

We realize that the Bank's performance might be halted with the arising challenges, but we are certain that the foundations built can bring the Bank to book a better performance in the future. We expect J Trust Bank can continue growing and give added value to all of you.

Jakarta, Juni | June 2020

Nobiru Adachi
Komisaris Utama
President Commissioner

Ritsuo Fukadai
Direktur Utama
President Director

LAPORAN DIREKSI [102-14]

Report of the Board of Directors [102-14]

Kinerja J Trust Bank di 2019 merefleksikan ekspektasi kami. Bank bersikap selektif dalam memberikan kredit demi memiliki aset berkualitas, serta meningkatkan manajemen risiko untuk berkembang secara berkelanjutan dan sehat.

The performance of J Trust Bank in 2019 reflected our expectation. The Bank was selective in lending to own high-quality assets, while strengthening risk management to expand in a sustainable and healthy manner.

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Kita menghadapi tahun yang penuh tantangan di 2019, baik secara global maupun dalam negeri. Ketidakstabilan kondisi perekonomian dan politik di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, memiliki dampak yang tidak bersahabat pada lingkungan usaha. Akibatnya banyak perusahaan yang menunda pengeluarannya, yang mana berdampak pada industri perbankan.

Namun demikian, J Trust Bank masih membukukan kinerja sesuai ekspektasi dan memperkuat fondasi untuk pertumbuhan ke depannya. Upaya dari manajemen untuk memperbaiki Bank dapat dilihat pada angka-angka penting yang disampaikan di dalam laporan tahunan ini.

Respected shareholders and stakeholders,

We have experienced a year full of uncertainties in 2019, both globally and domestically. Unstable economic and political conditions in many parts of the world, including Indonesia, were not friendly for the business environment. Many companies chose to delay spending in this situation, which affected the banking industry.

Nevertheless, J Trust Bank still managed to perform in line with expectation as we have enhanced the foundations for future growth. The management's efforts to improve the Bank are reflected in the key figures which are disclosed in this annual report.

KONDISI MAKROEKONOMI DAN PERBANKAN 2019

Pertumbuhan ekonomi global di 2019 mencapai titik terendah di satu dekade terakhir, terutama diakibatkan berlanjutnya perang dagang antara AS dan Tiongkok. Pemakzulan Presiden AS Donald Trump, persoalan Brexit, dan keresahan sosial di berbagai negara berkembang juga berkontribusi pada ketidakpastian perekonomian tahun kemarin. Dana Moneter Internasional mengatakan pertumbuhan global mencapai 3% di 2019, turun dari 3,6% di 2018.

Kondisi perekonomian yang tidak baik menyebabkan bisnis untuk berhati-hati dan menahan investasi, yang turut mengakibatkan turunnya pertumbuhan. Permintaan rumah tangga juga melemah meskipun para bank sentral telah memotong suku bunga untuk mendorong belanja. Ada kekhawatiran bahwa pertumbuhan yang lebih lambat akan menjadi sesuatu yang normal di dekade ini, termasuk di Tiongkok, ekonomi terbesar kedua dunia.

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi turun ke 5,02% di 2019, di bawah target 5,3% dan pertumbuhan 2018 sebesar 5,2%. Lemahnya permintaan global mengakibatkan ekspor Indonesia menurun, sementara volatilitas perekonomian global dan ketegangan akibat pemilihan umum dalam negeri membuat bisnis menahan investasi. Permintaan dalam negeri, yang merupakan sumber utama perekonomian Indonesia, juga terbilang lemah sepanjang tahun. Hal ini tercermin dari laju inflasi 2019 di angka 2,72%, terendah sejak 1999.

Bank Indonesia mencoba memberikan stimulus ekonomi dengan memangkas suku bunga kebijakan sebanyak 100 basis poin di 2019, namun dampaknya belum terlihat langsung. Pada akhir 2019, suku bunga *7-Day Reverse Repo Rate* mencapai 5%, dibandingkan 6% di akhir 2018. Perlambatan perekonomian berdampak pada industri perbankan seperti terlihat dari pertumbuhan kredit 2019 pada 6,08%, turun dari angka dua digit yang dibukukan di dua tahun sebelumnya.

Ketidakpastian perekonomian dan ketegangan geopolitik berpengaruh pada bisnis dan para debitur mulai memiliki kesulitan untuk membayar utangnya. Di 2019, tingkat kredit bermasalah di industri perbankan meningkat ke 2,5%, dari 2,4% di 2018 walaupun bank

MACROECONOMIC AND BANKING CONDITIONS IN 2019

Global economic growth in 2019 was the lowest in a decade, mainly due to the ongoing trade tensions between the US and China. The impeachment of US President Donald Trump, the Brexit, and social unrests in some emerging markets also contributed to economic uncertainties last year. The International Monetary Fund said global growth was at 3% in 2019, down from 3.6% in 2018.

Unfavorable economic conditions caused businesses to be cautious and hold investment, further dragging down growth. Household demand was also weak despite moves by central banks to cut rates to stimulate spending. There are concerns that slower growth may become the new norm going into this decade, including for China, the world's second largest economy.

In Indonesia, economic growth slowed to 5.02% in 2019, lower than the target of 5.3% and the 2018 growth of 5.2%. Weak global demand caused Indonesian exports to decline, while global economic volatilities and heated domestic elections resulted in businesses halting investments. Domestic demand, which is the main driver of Indonesia's economy, was also weak almost throughout the year. It was reflected in the 2019 inflation rate of 2.72%, the lowest since 1999.

Bank Indonesia tried to stimulate the economy by slashing its policy rate by a total of 100 basis points in 2019, but the impact was not directly translated. By the end of 2019, the 7-Day Reverse Repo Rate stood at 5%, as compared to 6% in December 2018. A slowing economy affected the banking industry as seen from the 2019 loan growth at 6.08%, down from the small double digits booked in the previous couple years.

The economic uncertainties and geopolitical tension affected the businesses and borrowers began having problems to repay their debts. In 2019 the rate of non-performing loans in the banking industry rose to 2.5%, from 2.4% in 2018 despite banks already being

Felix I. Hartadi Tiono
Direktur
Director

Helmi A. Hidayat
Direktur
Director

Ritsuo Fukadai
Direktur Utama
President Director

Cho Won June
Direktur
Director

Bijono Waliman
Direktur
Director

sudah bersikap selektif dalam mengucurkan kredit ke sektor-sektor pilihan atau debitur berkualitas. Namun, tingkat kecukupan modal tetap kuat di 23,3%, dibandingkan 23,0% di 2018, yang menandakan sektor perbankan masih tetap kokoh.

Perbankan juga menghadapi tantangan lain di 2019, seperti volatilitas nilai tukar Rupiah dan likuiditas ketat. Dana pihak ketiga di industri perbankan tumbuh 6,54%, sedikit lebih tinggi dari 6,4% yang dibukukan di 2018 namun masih di bawah estimasi 8% sampai 10%. Rupiah menguat 4% ke level Rp13.901 per dolar AS pada 31 Desember 2019, sesudah mengalami volatilitas.

Menjelang akhir tahun, ada tanda-tanda perbaikan seiring dengan pola musiman di mana belanja meningkat di kuartal terakhir. Kenaikan ekspor dan investasi, serta ekspansi fiskal pemerintah, mendorong keyakinan konsumen. Kami berharap pemerintah bisa memberikan stimulus untuk menopang perekonomian yang terkena dampak besar dari Covid-19 di 2020.

selective in channeling loans to preferred sectors or quality borrowers. However, capital adequacy ratio remained strong at 23.3%, compared to 23.0% in 2018, indicating the banking sector was still sturdy.

Banks also faced other challenges in 2019, such as the volatility in Rupiah exchange rate and tight liquidity. Third party funds in the banking industry grew 6.54%, slightly higher than 6.4% posted in 2018 but below an estimate of 8% to 10%. The Rupiah strengthened 4% to IDR13,901 per US dollar as of Dec. 31, 2019, after experiencing some volatility.

There were encouraging signs at the year-end, in line with the cyclical pattern where spending rose in the last quarter. Increasing exports and investment, as well as government's fiscal expansion, boosted consumer confidence. We expect the government can provide stimulus to support the economy which is highly impacted by the Covid-19 in 2020.

ANALISIS ATAS KINERJA PERUSAHAAN 2019

Kebijakan Strategis

J Trust Bank berupaya tumbuh bersama-sama, dari hulu ke hilir. Kami ingin agar setiap individu di Bank, dari *frontline* sampai tim di *back end*, untuk bergerak seirama dalam mengembangkan Bank. Dengan cara ini, J Trust Bank dapat berkembang secara berkelanjutan dan sehat.

Di 2019, Bank berfokus untuk bersikap selektif dalam memberikan kredit, demi memiliki aset berkualitas, dan meningkatkan manajemen risiko. Bank berhasil mengurangi tingkat kredit bermasalah ke level yang sangat sehat di bawah 2%, walaupun total kredit menurun signifikan, yang membuat jumlah kredit menjadi lebih kecil namun lebih berkualitas.

Bank juga berfokus pada perbaikan biaya dana dengan mengurangi jumlah deposit berjangka secara bertahap, terutama yang memiliki suku bunga tinggi dan meningkatkan Giro dan Tabungan (CASA). Bank berkolaborasi dengan PT JTrust Olympindo Multi Finance, salah satu usaha di jaringan J Trust Group, untuk meningkatkan dana murah dan memperluas basis konsumen.

Bank juga melakukan efisiensi biaya di semua lapisan organisasi untuk memastikan efisiensi operasional secara optimal. Struktur organisasi juga ditinjau dan disesuaikan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi organisasi, dan produktivitas optimal. Sebagai *Equal Opportunity Employer*, posisi strategis kunci di Bank diambil dari eksternal dan internal. Di *back end*, Bank bersikap lebih selektif dalam berinvestasi di teknologi informasi dan berfokus pada proyek-proyek yang bisa mendorong pertumbuhan bisnis.

Kinerja Bank 2019

Kinerja J Trust Bank di 2019 merefleksikan ekspektasi kami, seperti terlihat dari rasio keuangan penting. Manajemen Bank berhasil mengurangi NPL bruto ke 1,49% dan NPL neto ke 0,80%, sedangkan NPL bruto di 2018 mencapai 4,26%. Tingkat kecukupan modal tetap di angka yang sehat di angka 14,53%, dibandingkan 14,03% di 2018.

ANALYSIS ON COMPANY'S PERFORMANCE IN 2019

Strategic Policies

J Trust Bank aims to grow together, from end to end. We want every individuals in the Bank, from the frontline to back end, to move in unison to develop the Bank. This way, J Trust Bank can expand in a sustainable and healthy manner.

In 2019, the Bank focused on selective lending, owning high-quality assets, and strengthening the risk management. The Bank was successful in reducing the rate of non-performing loans to a very healthy level of below 2% although outstanding loans dropped significantly, resulting in a smaller amount of loans outstanding with better quality.

The Bank also focused on improving the cost of funds by gradually reducing the amount of time deposits, particularly those with high interest rates and growing the Current Accounts and Savings Account (CASA). The Bank collaborated with PT JTrust Olympindo Multi Finance, one of the businesses in J Trust Group network, to improve low-cost funds and broaden customer base.

The Bank also undertook cost efficiency in every layer of the organization to ensure optimal operational efficiency. The organizational structure was also reviewed and adjusted to ensure organizational effectiveness, efficiency and optimal productivity. As an Equal Opportunity Employer, key strategic positions within the Bank are sourced both externally and internally. At the back end, the Bank was more selective in investing in information technology and focused only on projects that can propel business growth.

Bank Performance in 2019

The performance of J Trust Bank in 2019 reflected our expectation, as seen from the key financial ratios. The Bank's management was able to reduce gross NPL to 1.49% and net NPL 0.80% whereas gross NPL in 2018 was recorded at 4.26%. Capital adequacy ratio last year remained at a healthy level of 14.53%, as compared to 14.03% in 2018.

Total kredit turun 39,4% ke Rp6,13 triliun per Desember 2019, dari Rp10,3 triliun di tahun sebelumnya, dikarenakan Bank bersikap selektif dalam penyaluran kredit. Total simpanan menurun sedikit ke Rp12,81 triliun, dari Rp13,25 triliun di 2018, namun dana murah (CASA) naik 15,4% ke Rp1,82 triliun.

Pada tahun 2019, Bank membukukan laba bersih sebesar Rp49,5 triliun per Desember 2019, setelah mengalami kerugian sebesar Rp401,1 miliar di tahun sebelumnya.

PROSPEK USAHA 2020

Perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal terakhir 2019 diharapkan dapat memberikan katalis untuk pertumbuhan tahun 2020 sebelum pandemi menerpa. Pertumbuhan ekonomi Indonesia jatuh ke 2,97% di kuartal pertama 2020, dari 4,97% di kuartal empat 2019, karena pandemi menahan pergerakan barang dan jasa. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan 2020 bisa turun di bawah 2,3%, jauh dari perkiraan awal di antara 5,1% sampai 5,5%.

Pandemi ini juga memukul sektor perbankan. Pertumbuhan kredit diperkirakan akan mencapai 1% atau 2%, jauh di bawah perkiraan awal antara 10% sampai 20%, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank akan menjadi lebih selektif dalam menyalurkan kredit karena dunia usaha menghadapi masa-masa sulit di tengah pandemi. Bank Indonesia mengatakan akan menjalankan kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk memitigasi risiko di sektor keuangan.

Secara global, perekonomian diperkirakan akan mengalami kontraksi 3% di 2020, jauh lebih buruk dari krisis keuangan 2008-09, menurut Dana Moneter Internasional. Pembuat kebijakan perlu meluncurkan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat untuk menahan dampak Covid-19 ke dunia usaha dan rumah tangga.

J Trust Bank akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan dampak pandemi ini seminimal mungkin pada kinerja Bank.

Outstanding loans dropped 39.4% to IDR6.13 trillion in December 2019, from IDR10.13 trillion a year before, as the Bank was selective in channeling loans. Total deposits slightly declined to IDR12.81 trillion, from IDR13.25 trillion in 2018, but low-cost funds (CASA) improved 15.4% to IDR1.82 trillion.

For the year of 2019, the Bank booked a net profit of IDR49.5 billion per December 2019, after suffering losses of IDR401.1 billion in the previous year.

BUSINESS PROSPECTS IN 2020

The improvement in Indonesian economic growth in the last quarter of 2019 was expected to pave ways for a better growth in 2020 before the Covid-19 pandemic. Indonesia 's economic growth dropped to 2.97% in the first quarter of 2020, from 4.97% in the fourth quarter of 2019, as the pandemic hampered movement of goods and services. Bank Indonesia forecast the 2020 growth could fall below 2.3%, far from earlier estimates of between 5.1% and 5.5%.

The pandemic also hit the banking sector, with loan growth expected to grow around 1% or 2%, far below initial forecast of between 10% and 12%, according to the Financial Services Authority (OJK). Banks are being more selective in channeling loans as all businesses face difficult times due to the pandemic. Bank Indonesia said it will continue implementing accomodative macroprudential policies to mitigate risks in the financial sector.

Globally, the economy is estimated to contract 3% in 2020, much worse than the 2008-09 financial crisis, according to the International Monetary Fund. Policymakers need to implement accurate fiscal and monetary policies to cushion the Covid-19 impact to businesses and households.

J Trust Bank will take necessary measures to ensure the pandemic will have as little impact as possible to the Bank's performance.

Keuangan Berkelanjutan

Bank akan terus menjalankan usahanya secara berkelanjutan, dengan menjaga risiko kredit sekaligus memastikan kinerja bisnis tetap baik di tengah pandemi Covid-19. Kami akan menjalankan kegiatan operasional perbankan sesuai ketentuan dan kebijakan yang berlaku, serta mempertimbangkan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial akibat kegiatan-kegiatan bisnis Bank.

Sebagai komitmen atas keuangan berkelanjutan, Bank telah melaksanakan 5 pilar kegiatan pada komunitas dan lingkungan secara berkelanjutan, meliputi Pendidikan, Kesehatan dan Kemanusiaan, Sosial dan Keagamaan. Dengan diperkenalkannya pilar-pilar keberlanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan, kami kini melangkah ke arah implementasi program-program tanggung jawab yang lebih kuat.

Kinerja Berkelanjutan

Dalam mencapai penerapan keuangan berkelanjutan, kami telah merealisasikan berbagai kegiatan program inklusi dan literasi keuangan sebagai bentuk kontribusi sosial kami yang berkelanjutan. Pencapaian kinerja sosial lainnya antara lain terlihat pada pelaksanaan program "J Trust Peduli" yang fokus dalam membantu masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, lingkungan hidup, dan tanggap darurat terhadap setiap bencana alam.

Dalam hal kinerja lingkungan hidup, kami turut berkontribusi pada perubahan iklim dengan melakukan penghematan energi dan penggunaan kertas dalam operasional Bank.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

J Trust Bank melanjutkan strategi peta jalan sumber daya manusia melalui program pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas karyawan. Kami ingin memiliki karyawan dengan rasa kepemilikan di Bank sehingga bisa bertumbuh dan mengembangkan Bank bersama-sama.

Di 2019, Bank mengurangi sekitar 6% biaya personil dengan memangkas jumlah karyawan menjadi 800 dari 971. Pemotongan biaya ini merupakan bagian dari efisiensi di seluruh organisasi. Bank tidak merekrut pegawai baru, namun mempromosikan karyawan yang

Sustainable Finance

The Bank will continue to do business in a sustainable manner, by managing credit risk while ensuring acceptable performance amid the Covid-19 pandemic. We will implement banking operations in compliance with relevant rules and regulations, while considering economic, environment and social impact due to the Bank's business activities.

In our commitment to sustainable financing, the Bank has implemented 5 activity pillars related to communities and environment on a sustainable basis, in Education, Healthcare and Humanitarian, Social and Religion. With the introduction of these sustainability pillars to our stakeholders, we are now in position to implement more robust social responsibility programs.

Sustainable Performance

In achieving sustainable finance implementation, we have realized a number of financial inclusion and literacy programs as our sustainable social contribution. Other social achievements include the implementation of programs "J Trust Peduli" that focuses on helping the community in the fields of education, health, social, religious, environmental, and emergency response to any natural disaster.

In environmental performance, we also contribute to mitigating climate change by reducing the amount of energy and paper used in the Bank's operations.

Human Resources Development

J Trust Bank continued the human resources roadmap strategy by holding development and training programs to improve the capability of employees. We want to have employees who have a sense of ownership in the Bank so that we can grow and develop the Bank together.

In 2019, the Bank cut roughly 6% of personnel cost by reducing the number of employees to 800 from 971. The cost cutting was part of efficiency moves taken in the whole organization. The Bank did not recruit new people, but instead promoting existing employees to

ada untuk mengisi posisi lowong, sebagai pernyataan bahwa sumber daya manusia berkualitas bisa memiliki jenjang karir di Bank.

Pengembangan Teknologi Informasi

Strategi dan pengembangan teknologi informasi di 2019 merupakan kelanjutan dari proyek-proyek 2018 dan implementasi proyek-proyek baru. Beberapa hal yang dilakukan Bank dalam hal TI mencakup penambahan fitur *internet* dan *mobile banking*, penambahan cek saldo melalui *chatbot*, implementasi sistem *help desk* untuk meningkatkan layanan permintaan dan keluhan pelanggan, pembaharuan *server* yang sudah lama, dan peningkatan keamanan.

Kami memperhitungkan budget untuk TI sesuai keperluan dan hanya berinvestasi pada sistem dan alat yang mendukung pertumbuhan usaha. Kami juga melihat peluang-peluang di keuangan digital yang bertumbuh pesat di Indonesia dengan menyediakan kenyamanan lebih untuk konsumen. Kami juga berencana mengeluarkan produk uang elektronik di 2020.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

J Trust Bank terus meningkatkan kepatuhan dalam hal Tata Kelola Perusahaan yang Baik karena kami percaya bahwa keberlangsungan sebuah bank banyak bergantung pada implementasi tata kelola di mata publik. Saat ini, peringkat GCG Bank dinilai baik dan kami berupaya untuk memperbaiki ini ke depannya dengan menempatkan orang-orang terbaik di Dewan Komisaris dan Direksi.

Bank juga memprioritaskan tata kelola perusahaan dalam menjalankan usaha. Kami juga berusaha berkembang dengan cara yang selektif dan hati-hari untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, serta mematuhi regulasi yang ada. Kami memiliki satuan tugas yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan implementasi kebijakan dan *standard operating procedure* Bank, sesuai dengan regulasi terkini dan praktik-praktik terbaik.

fill vacant posts, as a statement that quality human resources can have a career path in the Bank.

Information Technology Development

Information technology strategy and development in 2019 was a continuity from the ongoing projects in 2018 and an implementation of several new projects. Some of the things the Bank performed in the IT front included adding features for internet and mobile banking, providing balance checking by chatbot, implementing help desk system to increase services for customer requests and complaints, updating outdated servers, and improving security.

We managed the budget for IT accordingly and only invested in system and tools that would support business growth. We are also looking at opportunities in digital finance which is rapidly growing in Indonesia by first introducing our chatbot which provides more convenience for customers. We are also planning to issue an electronic money product in 2020.

Good Corporate Governance Implementation

J Trust Bank continues to improve compliance in regard to Good Corporate Governance because we believe that a bank's sustainability much depends on its governance implementation in the public eye. Currently, the Bank's GCG rating is evaluated as good and we aim to improve this going forward by having excellent people in the Board of Commissioners and Board of Directors.

The Bank also puts corporate governance as priority in doing business. We are trying to expand in a selective and prudent manner to ensure that growth will be sustainable, while complying with regulations. We have a task force which is responsible for coordinating the implementation of Bank's policy and standard operating procedures, in line with latest regulations and best practices.

Sebagai dasar dalam penerapan keuangan berkelanjutan, kami juga menyadari bahwa implementasi prinsip Tata Kelola Berkelanjutan dapat mengantisipasi berbagai tantangan. Kami akan terus berupaya meningkatkan penerapan tata kelola di Bank dengan tujuan mencapai daya saing tinggi, dan memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga meraih reputasi dan kepercayaan masyarakat. Kami yakin penerapan Tata Kelola Berkelanjutan akan berpengaruh pada pemanfaatan peluang dan prospek usaha Bank di masa mendatang.

In the implementation of sustainable finance, we realize that the implementation of Sustainable Governance principles can anticipate challenges. We will continue to improve governance practices in the Bank in order to improve competitiveness and provide optimal value for all stakeholders, thereby earning good reputation and public trust. We believe the implementation of Sustainable Governance will have a positive impact on the Bank's prospects and future opportunities.

Penilaian terhadap Kinerja Komite-Komite di bawah Direksi

Direksi menilai ketujuh komite di bawah Direksi telah memenuhi tugasnya sebagaimana diharapkan di 2019. Tujuh komite tersebut adalah Komite Manajemen Risiko, Komite Aset & Liabilitas, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Sumber Daya Manusia, Komite Produk & Aktivitas Baru, Komite Kontrol Internal, dan Komite Kredit.

Assessment on the Performance of Committees under BOD

The Board of Directors considered all seven committees under the BOD had fulfilled their duties as expected in 2019. The seven committees were the Risk Management Committee, the Asset & Liability Committee (ALCO), the Information Technology Steering Committee, the Human Capital Committee, the New Activity & Product Committee, the Internal Control Committee, and the Credit Committee.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Di Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Juni 2019, Bank mengangkat empat anggota Direksi, tiga di antaranya telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Ritsuo Fukadai menggantikan Shigeyoshi Asano sebagai presiden direktur, sementara Cho Won June, Bijono Waliman, dan Rayendra Prasetya diangkat sebagai direktur. Rio Lanasier mengundurkan diri dari posisinya sebagai direktur.

Komposisi anggota Direksi per Maret 2020 adalah sebagai berikut:

CHANGES IN THE BOD COMPOSITION

In the Annual General Meeting of Shareholders in June 2019, the Bank appointed four members of the BOD, three of which have been approved by the Financial Services Authority. Ritsuo Fukadai replaced Shigeyoshi Asano as president director, while Cho Won June, Bijono Waliman, and Rayendra Prasetya were appointed as directors. Rio Lanasier resigned from his position as director.

The composition of members of BOD per March 2020 is as follows:

Jabatan	Nama | Name	Position
Direktur Utama	Ritsuo Fukadai	President Director
Direktur	Felix I. Hartadi Tiono	Director
Direktur	Helmi A. Hidayat	Director
Direktur	Cho Won June	Director
Direktur	Bijono Waliman	Director

APRESIASI

Kami ingin mengucapkan terima kasih pada para pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaannya sehingga kami dapat bertumbuh secara berkesinambungan. Kami juga mengapresiasi upaya semua individu di J Trust bank untuk berjalan searah. Kami berharap dengan kinerja ini kami telah menempatkan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ke depannya.

Kami juga memberikan terima kasih pada konsumen setia yang terus bersama kami pada berbagai kesempatan dan konsumen baru yang mempercayai kami. Kami berharap dapat terus berbuat yang terbaik untuk melayani Anda.

APPRECIATION

We would like to thank all shareholders and stakeholders for their confidence in us which allowed us to grow in a sustainable manner. We also appreciated the efforts by all individuals in J Trust Bank to move in the same direction. We expect that with this work we have laid strong foundations for future growth.

We also give our gratitude to loyal customers who have stayed with us through all moments and new customers who entrust us. We hope that we can do our best to serve you.

Jakarta, Juni | June 2020

Ritsuo Fukadai
Direktur Utama
President Director

Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan

RESPONSIBILITY FOR ANNUAL REPORTING

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.

Statement from the Board of Commissioners Regarding Responsibility for Integrated Annual Reporting 2019 PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Terintegrasi PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk. tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Terintegrasi Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juni 2020

We the undersigned hereby declare that all information in the 2019 Integrated Annual Report of PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk. has been fully completed and we are fully responsible for the validity of the Company's Integrated Annual Report contents.

This statement letter is made and signed in good faith.

Jakarta, June 2020

Nobiru Adachi
Komisaris Utama
President Commissioner

Nobuiku Chiba
Komisaris
Commissioner

Mahdi Mahmudy
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Sutirta Budiman
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Surat Pernyataan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.

Statement from the Board of Directors Regarding Responsibility for Integrated Annual Reporting 2019 PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Terintegrasi PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk. tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Terintegrasi Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juni 2020

We the undersigned hereby declare that all information in the 2019 Integrated Annual Report of PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk. has been fully completed and we are fully responsible for the validity of the Company's Integrated Annual Report contents.

This statement letter is made and signed in good faith.

Jakarta, June 2020

Ritsuo Fukadai
Direktur Utama
President Director

Felix I. Hartadi Tiono
Direktur
Director

Helmi A. Hidayat
Direktur
Director

Cho Won June
Direktur
Director

Bijono Waliman
Direktur
Director

J TRUST BANK
BANKING YOU
J TRUST BANK
atm
ATM Bersama
PRIMA
GPN
UnionPay
JCB
1500 615
www.jtrustbank.co.id
SETOR TARIK
J TRUST BANK
Rp 50.000,-

PROFIL PERUSAHAAN

Corporate Profile

J Trust Bank melihat potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia, dengan populasi terbesar keempat di dunia dan jumlah masyarakat dengan pendapatan menengah yang terus meningkat.

J Trust Bank sees high economic growth potential in Indonesia, with the fourth largest population in the world and the increasing number of middle income people.

INFORMASI PERUSAHAAN

Corporate Information

Nama Perusahaan Company Name [102-1]
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Tanggal Pendirian Date of Establishment
29 Mei 2015 | May 29, 2015
(PT Bank JTrust Indonesia Tbk.)

Kegiatan Usaha Type of Business
Jasa Perbankan
Banking Services

Alamat Address [102-3]
Sahid Sudirman Center 33rd Floor.
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Indonesia
Tel. : (62-21) 2926 1111 (*Hunting*)
Fax. : (62-21) 522 4670
E-mail : customercare@jtrustbank.co.id
Website : www.jtrustbank.co.id

Modal Dasar Authorized Capital
12.000.387.615
Lembar Saham/Shares

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully Paid Capital
10.012.124.501
Lembar Saham/Shares

Jumlah Karyawan 2019
Number of employee 2019
800

Total Aset 2019
Total Assets 2019
Rp17,31 triliun | trillion

Entitas Anak dan Entitas Asosiasi
Subsidiaries and Associate Entity
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. tidak memiliki anak perusahaan, dan merupakan bagian dari kelompok usaha J Trust Group
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has no subsidiary and is part of J Trust Group.

Lembaga Profesi dan Penunjang Pasar Modal
Stock Exchange Supporting Profession and Entity

Kantor Akuntan Publik
Public Accountant Firm
Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan – Crowe Indonesia
Cyber 2 Tower Lantai 20
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950
Tel. : (62-21) 2553 9292
Fax. : (62-21) 2553 9289

Notaris
Notary
Jose Dima Satria
Jl. Taman Gandaria No. 11A
Jakarta 12420
Tel. (62-21) 291 25500

Biro Administrasi Efek
Share Registrar
PT Sharestar Indonesia
Citra Graha Building Lantai 7
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36,
Jakarta 12950
Tel. : (62-21) 527 7966
Fax. : (62-21) 527 7967

Informasi pada *Website* Perusahaan
Information on Corporate Website

Bank memiliki situs *website* yakni https://www.jtrustbank.co.id/ yang dapat diakses secara *real time* oleh publik. Informasi pada *website* tersebut meliputi antara lain:
- Informasi produk dan layanan perbankan;
- Penerapan *good corporate governance*
- Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu;
- Struktur grup perusahaan;
- Analisis kinerja keuangan;
- Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir); dan
- Profil Dewan Komisaris dan Direksi.

The Bank has a website namely https://www.jtrustbank.co.id/ that can be accessed in real time by general public. The information on the website includes:
- Information on banking products and services;
- Implementation of good corporate governance
- Information on shareholders until individual owners;
- The Company's Group Structure;
- Analysis on financial performance;
- The annual financial statements (in the last 5 years); and
- Board of Commissioners and Board of Directors profiles.

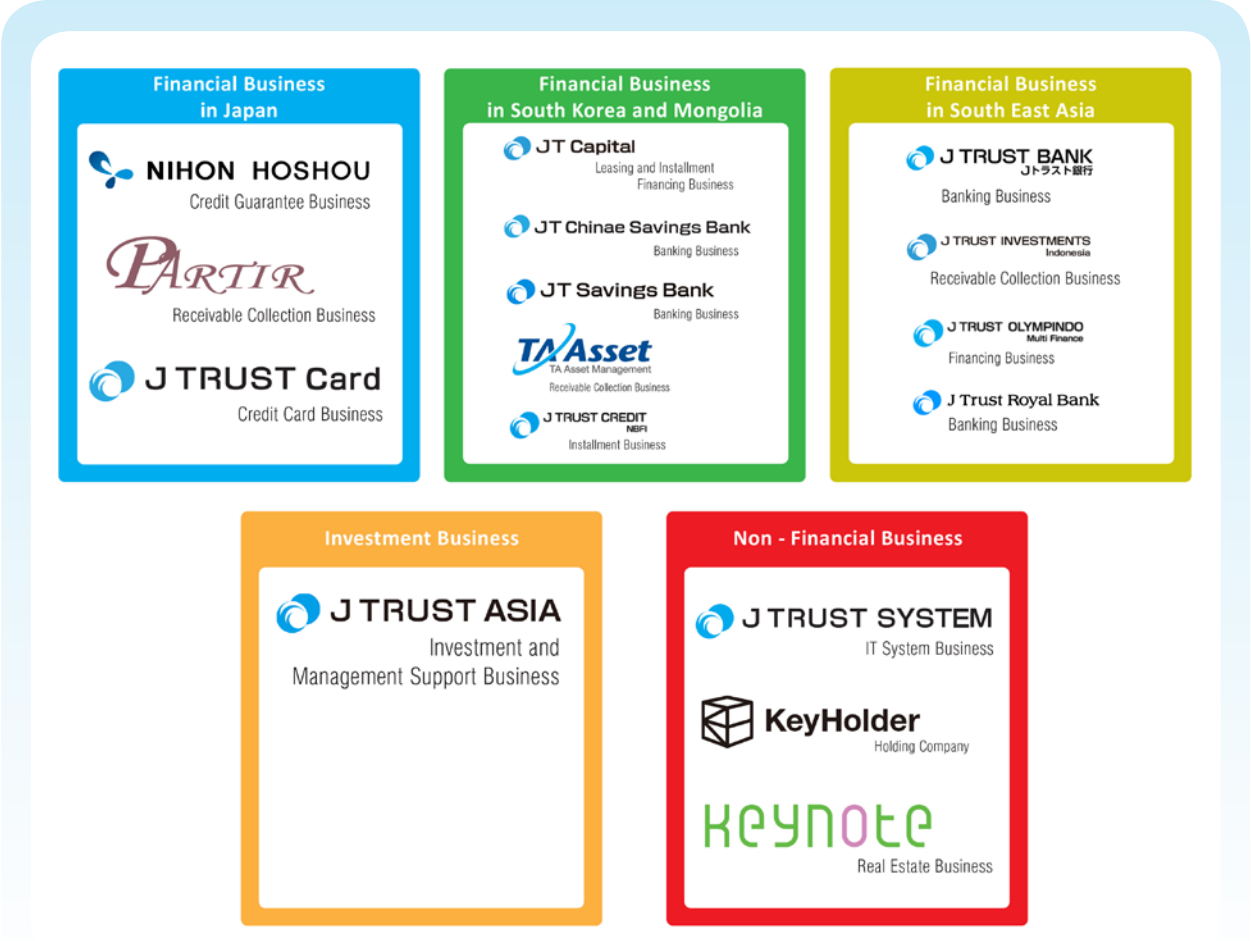
Financial Business in Japan
NIHON HOSHOU
Credit Guarantee Business
PARTIR
Receivable Collection Business
J TRUST Card
Credit Card Business
Financial Business in South Korea and Mongolia
JT Capital
Leasing and Installment Financing Business
JT Chinae Savings Bank
Banking Business
JT Savings Bank
Banking Business
TA Asset
TA Asset Management
Receivable Collection Business
J TRUST CREDIT
NBFI
Installment Business
Financial Business in South East Asia
J TRUST BANK
Banking Business
J TRUST INVESTMENTS
Indonesia
Receivable Collection Business
J TRUST OLYMPINDO
Multi Finance
Financing Business
J Trust Royal Bank
Banking Business
Investment Business
J TRUST ASIA
Investment and Management Support Business
Non - Financial Business
J TRUST SYSTEM
IT System Business
KeyHolder
Holding Company
keynote
Real Estate Business

SEKILAS J TRUST BANK

J Trust Bank at a Glance

Latar Belakang

J Trust Co., Ltd. (J Trust), merupakan perusahaan *holding* Jepang dengan lingkup operasi global. J Trust mengambil alih 99% saham Perseroan dari tangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui perjanjian jual beli kondisional antara LPS dan J Trust pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 20 November 2014.

J Trust Co., Ltd. dikecualikan dari regulasi pembatasan kepemilikan saham asing pada bank umum komersial di Indonesia, sesuai dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada LPS pada 10 November 2014.

Background

J Trust Co., Ltd. (J Trust), is a Japanese holding company with global operations. J Trust took over 99% shares of the Company from the Deposit Insurance Corporation (LPS) through the conditional sales agreement between LPS and J Trust in the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on November 20, 2014.

J Trust Co., Ltd. was excluded from the restriction of foreign shareholding in commercial banks in Indonesia, according to the letter of Financial Services Authority (OJK) to LPS on November 10, 2014.

J Trust Bank melihat potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia, dengan populasi terbesar keempat di dunia dan jumlah masyarakat dengan pendapatan menengah yang terus meningkat.

J Trust Bank sees high economic growth potential in Indonesia, with the fourth largest population in the world and the increasing number of middle income people.

Perubahan Nama

Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk. melalui RUPSLB tanggal 30 Maret 2015, setelah berbagai pembenahan internal dan konsolidasi dengan berbagai perusahaan di bawah naungan J Trust Co., Ltd. [102-1]

Perubahan nama ini resmi diumumkan ke publik pada 29 Mei 2015 setelah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 7 April 2015, dan persetujuan OJK tanggal 21 Mei 2015.

Tentang J Trust Bank

J Trust Bank hadir untuk memberikan pelayanan perbankan terbaik dan berkualitas dengan standar Jepang kepada masyarakat di Indonesia dan Asia Tenggara. [102-6]

J Trust Bank melihat potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia, dengan populasi terbesar keempat di dunia dan jumlah masyarakat dengan pendapatan menengah yang terus meningkat. Dengan integrasi keahlian perbankan yang didukung wawasan keuangan ritel Jepang, J Trust Bank yakin dapat yang menargetkan kalangan pendapatan menengah tersebut dalam meraih berbagai peluang bisnis di Indonesia dan Asia Tenggara. [102-6]

Change of Name

The Company changed its name to PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk. through EGMS on March 30, 2015, after several internal revamp and consolidation with many companies under J Trust Co., Ltd., [102-1]

The change of name was officially announced to the public on May 29, 2015, after acquiring approval from the Ministry of Law and Human Rights on April 7, 2015, and OJK's approval on May 21, 2015.

About J Trust Bank

J Trust Bank is present to provide the best and quality banking services in Japanese standard for customers in Indonesia and Southeast Asia. [102-6]

J Trust Bank sees high economic growth potential in Indonesia, with the fourth largest population in the world and the increasing number of middle income people. By integrating banking experience with the insight of Japanese retail finance, J Trust Bank is confident in targeting the middle income consumers in achieving various business opportunities in Indonesia and Southeast Asia. [102-6]

JEJAK LANGKAH

Milestones

20 Nov '14

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) secara resmi menyerahkan Perseroan ke J Trust Co., Ltd. melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

The Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) officially handed over the Company to J Trust Co., Ltd. through the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

30 Mar '15

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyetujui penambahan modal dan perubahan nama menjadi J Trust Bank.

Additional paid in capital and rebranding to J Trust Bank approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

29 Mei '15

Perubahan nama Perseroan menjadi PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.

Change of Company's name to PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.

23 Jun '15

Perkenalan logo baru J Trust Bank dan awal restrukturisasi organisasi dan manajemen.

Introduction of new J Trust Bank logo and beginning of management and organization restructuring.

29 Sep '15

Peningkatan modal dasar menjadi Rp15 triliun dan penambahan modal.

Increase of Authorized Capital to be IDR15 trillion and additional Paid in Capital.

1 Okt '15

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. secara resmi mengawali langkah di Indonesia melalui *Grand Launching* J Trust Bank.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. officially started in Indonesia through the Grand Launching event of J Trust Bank.

10 Des '15

J Trust Bank menjadi Bank dengan status pengawasan normal dari OJK.

The Indonesian Financial Services Authority (OJK) stated that J Trust Bank had become Bank under normal supervision.

28 Des '15

Restrukturisasi manajemen lebih lanjut dan perpindahan alamat dan lokasi kantor pusat.

Further management restructuring and changes of headquarters address and location.

30 Jun '16

Restrukturisasi manajemen dan organisasi lebih lanjut.

Further restructuring of management and organization.

23 Des '16

Restrukturisasi manajemen lebih lanjut dan pengalihan saham seri A.

Further management restructuring and transfer of series A shares.

30 Mar '17

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebesar Rp1 triliun.

The Company's Annual General Meeting of Shareholders approved Private Placement of IDR1 trillion.

22 Des '17

Manajemen J Trust Bank menyelenggarakan paparan publik kinerja keuangan Triwulan III/2017.

J Trust Bank's Management organized a public expose to inform the Company's financial performance for Q3/2017.

28 Jun '18

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan menyetujui untuk melakukan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) Perseroan untuk Saham Seri A maupun Saham Seri B dengan rasio setiap 100.000 (seratus ribu) Saham lama menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal baru. Dalam Rapat tersebut Manajemen menyelenggarakan paparan publik kinerja keuangan selama tahun 2017. *Reverse Stock* tersebut terealisasikan terhitung tanggal 5 Oktober 2018.

The Company's Annual General Meeting of Shareholders approved a reverse stock action for Series A and Series B Shares with the ratio of 100,000 (one hundred thousand) old shares into 1 (one) share with a new nominal value. In the AGM, the Management held a public expose for 2017 financial performance. The Reverse Stock was realized on October 5, 2018.

22 Sep '18

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dan organisasi lebih lanjut.

The Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders approved the Changes in the Management of the Company and the organization.

21 Agt '19

J Trust Bank meluncurkan fitur *internet banking* J Trust Net Individual dan *mobile version* J Trust Mobile.

J Trust Bank launched the feature of internet banking J Trust Net Individual and mobile version J Trust Mobile.

22 Sep '19

Pemegang saham utama melakukan penyuntikan modal senilai total Rp15 triliun.

Main shareholders injected capital of IDR15 trillion in total.

VISI & MISI

Vision & Mission

VISI

Vision

"Menjadi bank yang membahagiakan masyarakat Indonesia dengan memberikan pelayanan yang menyenangkan melalui ide-ide baru dan produk-produk keuangan yang inovatif."

"To be a bank with pleasant service that makes Indonesian people happy by delivering new ideas and innovative financial products."

MISI

Mission

- **Memberikan nilai yang terbaik kepada *Stakeholders*.**
- **Memiliki semangat untuk mengutamakan pelayanan kepada nasabah.**
- **Mengembangkan karyawan agar memiliki integritas yang tinggi.**
- **Memberikan pelayanan yang tercepat agar dapat memenuhi kepuasan nasabah.**
- **Melanjutkan semangat "KAIZEN" kepada nasabah.**

- To provide maximum value to our Stakeholders.
- To have a customer-first spirit.
- To develop employees with super integrity.
- To provide the fastest services in meeting customer satisfaction.
- To continue "Kaizen" spirit for customers.

NILAI-NILAI PERUSAHAAN [102-16]

Corporate Value [102-16]

4 VALUES

Super Integrity

Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan berkarakter kuat.

Integrity is a concept related with consistency in actions, values, methods, measurements, principles, expectations, and outputs. People with integrity mean they have honest personality and strong character.

Customer First

Setiap pikiran, kata, dan perbuatan yang akan dilakukan untuk menjangkau lebih banyak nasabah dan selalu menyenangkan nasabah sebagai pelanggan setia.

Every thought, word, and action made to reach out to more customers and to always satisfy loyal customers.

Be Discipline & Responsible

Kesediaan seseorang yang timbul dengan kesadaran sendiri untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di dalam organisasi dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan, tanpa paksaan dari luar.

The readiness of someone that comes from self-awareness, to comply with the applicable rules in the organization and the behavior that reflects responsibilities.

Learning & Trying More

Belajar berarti mengadopsi suatu kebiasaan, menciptakan ide yang bernilai, menghasilkan nilai-nilai, dan mengisi kembali.

Learning means to adopt habits, create value ideas, produce/deliver the values, and recharge.

FILOSOFI LOGO J TRUST BANK

J Trust Bank Logo Philosophy

J TRUST BANK
Jトラスト銀行

Brand logo J Trust Bank adalah turunan dari logo korporat J Trust, perusahaan induk kami di Jepang. Logo tersebut merepresentasikan keyakinan bahwa kredibilitas dan reliabilitas sangat diperlukan untuk mendapatkan dukungan dari nasabah dan para pemangku kepentingan.

Logo ini merepresentasikan J Trust yang lahir di tengah-tengah masa pergolakan, tetapi tetap memiliki kekuatan untuk melangkah ke depan. Ombak hebat yang tetap bertahan di tengah putaran arus, dan kekuatan untuk selamat dari masa-masa sulit tergambar pada bentuk lingkaran. Lingkaran adalah garis berputar tanpa akhir, menggambarkan keadilan, kenyamanan, dan fleksibilitas. Oleh sebab itu, inovasi dan kebebasan juga direpresentasikan pada logo ini.

The brand logo of J Trust Bank is derived from the corporate logo of J Trust, our parent company in Japan. The logo represents confidence that credibility and reliability are much needed to get support from customers and stakeholders.

The logo represents J Trust which was born during upheaval, but still has the strengths to move forward. Great waves which survive amidst the tides, and the strengths to survive from difficult moments are illustrated in form of the circle. Circle is an endless line, illustrating justice, comfort, and flexibility. Therefore, innovation and freedom are also represented in this logo.

BIDANG USAHA [102-2]

Business Segment [102-2]

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Terakhir

Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir, Bank menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa perbankan.

Maksud dan tujuan Perseroan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Tanda Daftar Perusahaan adalah berusaha di bidang bank umum swasta nasional devisa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Bank melaksanakan kegiatan usaha-usaha pokok, yaitu sebagai berikut:

a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b. Memberikan kredit/pinjaman, baik jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek, dan pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
d. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
e. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Business Activities Based on the Latest Articles of Association

Based on the latest Articles of Association, the Bank runs business activities in the banking services.

The Company's aim and objective according to the Articles of Association and the Company Register List is to do business as private national foreign exchange commercial bank. To achieve its aim and objective, the Bank undertakes core business activities as follows:

a. To collect public funds in form of demand deposits, time deposits, certificate of deposits, savings, and/or other forms which are equivalent to them;
b. To provide credit/loans, either for long term, medium term, or short term, as well as other form of loans as usually provided in the banking sector, with due consideration of prevailing laws and regulations;
c. To engage in fund transfer, either for own use or on behalf of customers;
d. To engage in fund placement in, fund borrowing from, or fund lending to other banks, either using letters, telecommunication infrastructure, or money order, cheque, or other means;
e. To engage in foreign exchange activities in accordance with regulations from Bank Indonesia.

PRODUK DAN LAYANAN [102-2]

Products and Services [102-2]

J Trust Bank menyediakan produk/jasa keuangan sebagai berikut:

Commercial Banking, Small Medium Enterprise & Consumer Loan

- Menjadi bank pilihan dalam layanan pembiayaan segmen konsumtif dengan penawaran produk yang menarik dan kompetitif.
- Sebagai mitra utama pilihan pembiayaan kredit oleh perusahaan keuangan di Indonesia.
- Produk dan jasa yang ditawarkan, adalah:
  - Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
  - Kredit Tanpa Agunan (KTA)
  - Kredit Modal Kerja
  - Kredit Angsuran Berjangka
  - *Trade Finance*

Retail Funding

- Menjadi bank pilihan dalam memenuhi layanan kebutuhan transaksi untuk "*mass affluent*".
- Menjadi bank penyedia jasa layanan prima, khususnya kepada kelompok nasabah utama Bank.
- Mengoptimalkan jaringan kantor dan ATM untuk lebih mendekatkan diri dengan segmen retail.
- Melakukan publikasi produk, layanan dan korporasi melalui promosi dan iklan untuk meningkatkan *awareness* J Trust Bank di masyarakat yang pada akhirnya akan memperluas segmen nasabah.
- Produk dan jasa yang ditawarkan, adalah:
  - Tabungan
    - Tabungan MOE
    - Tabungan Bisnis
    - Tabungan JTrust
    - Tabunganku
    - Tabungan Rencana

J Trust Bank provides financial products/services as follows:

Commercial Banking, Small Medium Enterprise & Consumer Loan

- To be the bank of choice in consumer segment financing by providing attractive and competitive products.
- To be the prime partner in consumer finance of financial institutions in Indonesia.
- Products and services provided are as follows:
  - Mortgage Loan (KPR)
  - Unsecured Loan (KTA)
  - Working Capital Loan
  - Term Installment Loan
  - Trade Finance

Retail Funding

- To be the bank of choice in fulfilling transaction needs for "mass affluent".
- To be the Bank of prime service provider, particularly for the Bank's priority customers.
- To optimize office and ATM networks to be closer to retail segment.
- To publish products, services, and corporations via promotion and advertisement to increase awareness of J Trust Bank in the public which eventually will expand customer segment.
- Products and services provided are as follows:
  - Saving
    - MOE Saving
    - Business Saving
    - JTrust Saving
    - Tabunganku
    - Plan Saving

- Giro Rupiah dan Valuta Asing (USD, SGD, EUR, JPY, AUD)
- Deposito Berjangka Rupiah dan Valuta Asing (USD, SGD, EUR, JPY, AUD)
- Produk *bancassurance* dari 2 penyedia asuransi
  - o Premi Tunggal
  - o Premi Reguler
  - o Asuransi Umum dan Asuransi Kredit

Treasury & Institutional Funding

- Menjadi bank penyedia kebutuhan produk treasury utama dan lengkap yang mendukung pengembangan bisnis nasabah utama Bank.
- Menjadi salah satu bank penyedia layanan transaksi bagi institusi pemerintah dan korporasi.
- Produk dan jasa yang dihasilkan, adalah:
  - Transaksi *Banknotes*
  - Transaksi Devisa Umum
  - Surat Berharga atau *Fixed Income Securities* (SB/FIS)

Layanan Lain

- Bank Garansi
  - o *Tender Bond*
  - o *Advance Payment Bond*
  - o *Performance Bond*
  - o *Maintenance Bond*
  - o *Shipping Guarantee*
- Referensi Bank
- *Letter of Credit*
- Jual Beli Mata Uang Asing
- Kliring
- Kiriman Uang Dalam dan Luar Negeri
- Inkaso Dalam dan Luar Negeri
- *Safe Deposit Box*
- *Bancassurance*
- *Payment & Billing*
- Kartu ATM dan Debit
- *Internet Banking*

- Demand Deposit in Rupiah and Forex (USD, SGD, EUR, JPY, AUD)
- Term Deposit in Rupiah and Forex (USD, SGD, EUR, JPY, AUD)
- Bancassurance products from 2 insurance providers
  - o Single Premium
  - o Regular Premium
  - o General Insurance and Credit Insurance

Treasury & Institutional Funding

- To be the provider bank of main and complete treasury products which support business development of the Bank's prime customers.
- To be one of the banks that provide transaction services for government institutions and corporations.
- Products and services provided are as follows:
  - Banknotes transaction
  - General Foreign Exchange Transaction
  - Securities or Fixed Income Securities (SB/FIS)

Other Services

- Bank Guarantee
  - o Tender Bond
  - o Advance Payment Bond
  - o Performance Bond
  - o Maintenance Bond
  - o Shipping Guarantee
- Bank Reference
- Letter of Credit
- Buy and Sell of Foreign Exchange
- Clearing
- Domestic and Overseas Money Transfer
- Domestic and Overseas Money Collection
- Safe Deposit Box
- Bancassurance
- Payment & Billing
- ATM and Debit Cards
- Internet Banking

STRUKTUR ORGANISASI

Organizational Structure

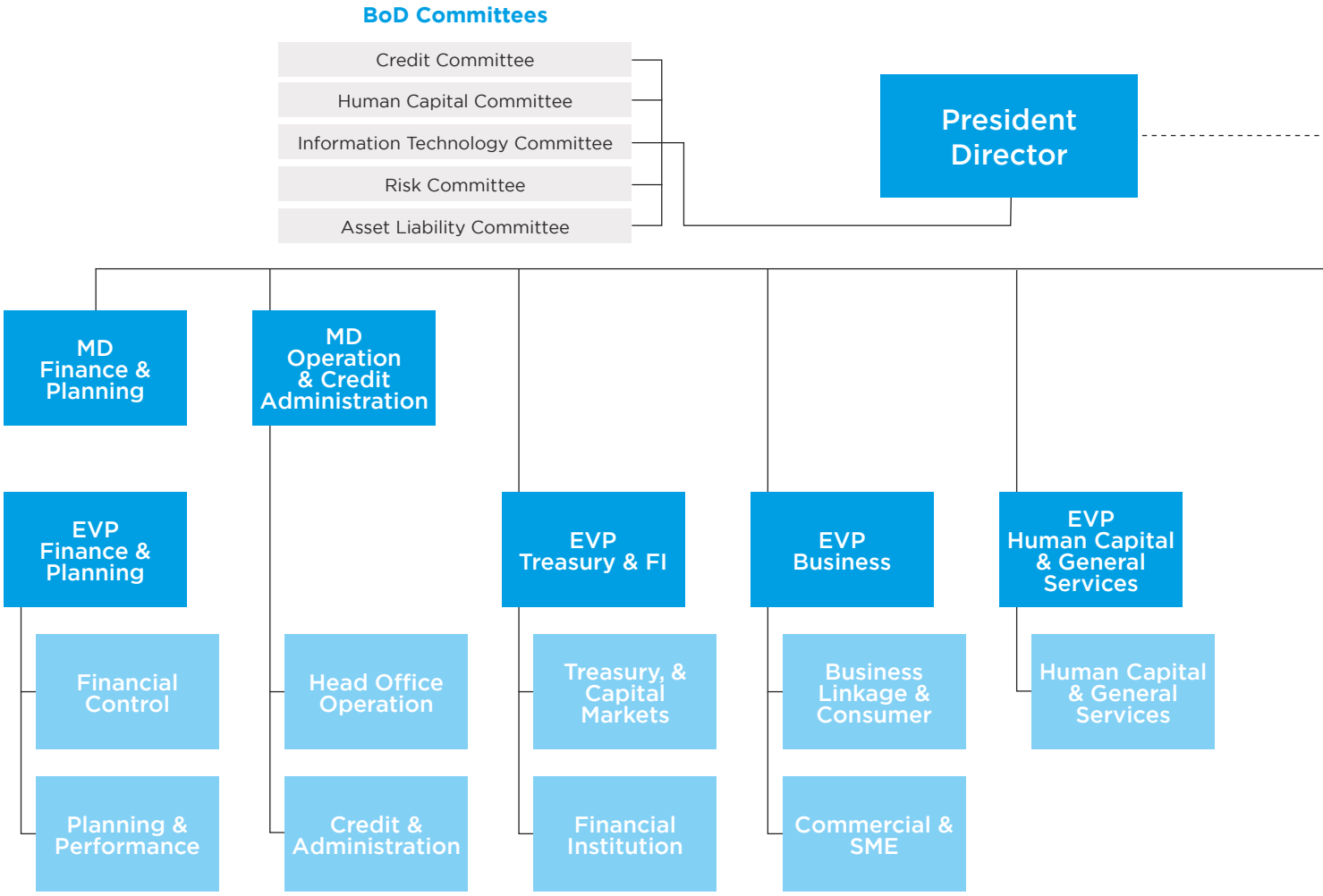

J TRUST BANK
Jトラスト銀行

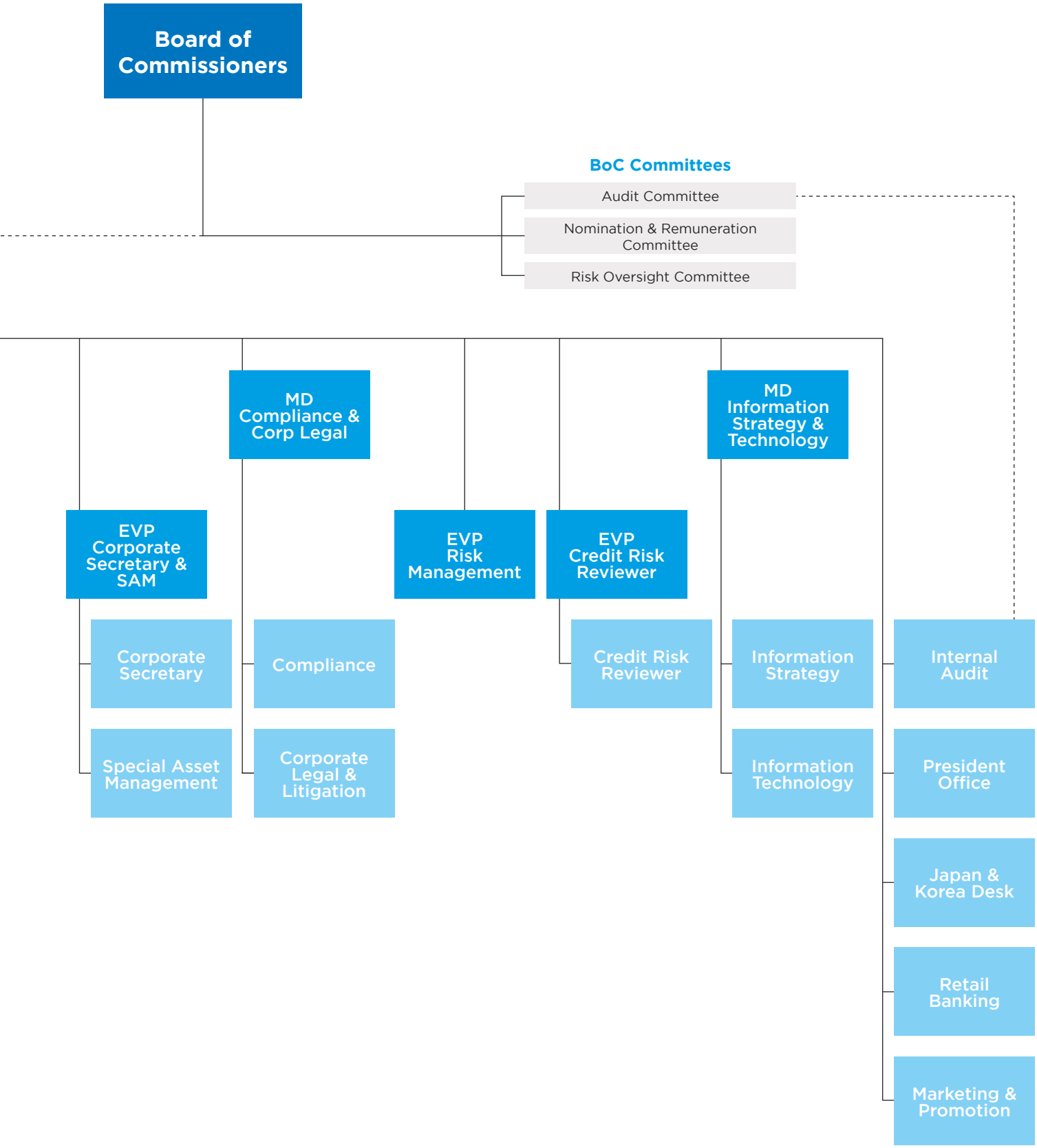

STRUKTUR GRUP

Group Structure

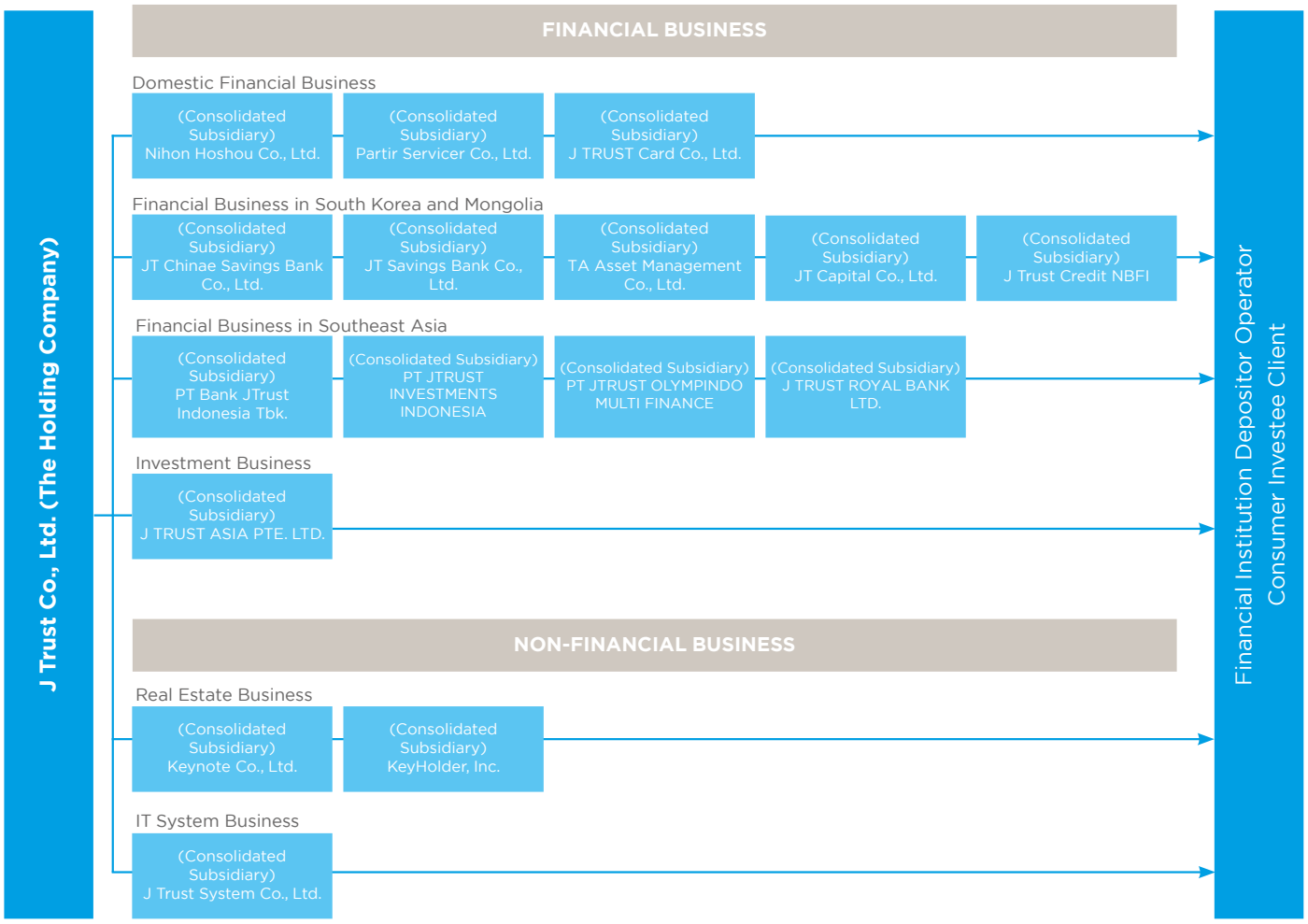

INFORMASI PEMEGANG SAHAM [102-5]

Shareholders Information [102-5]

Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Controlling and Ultimate Shareholders

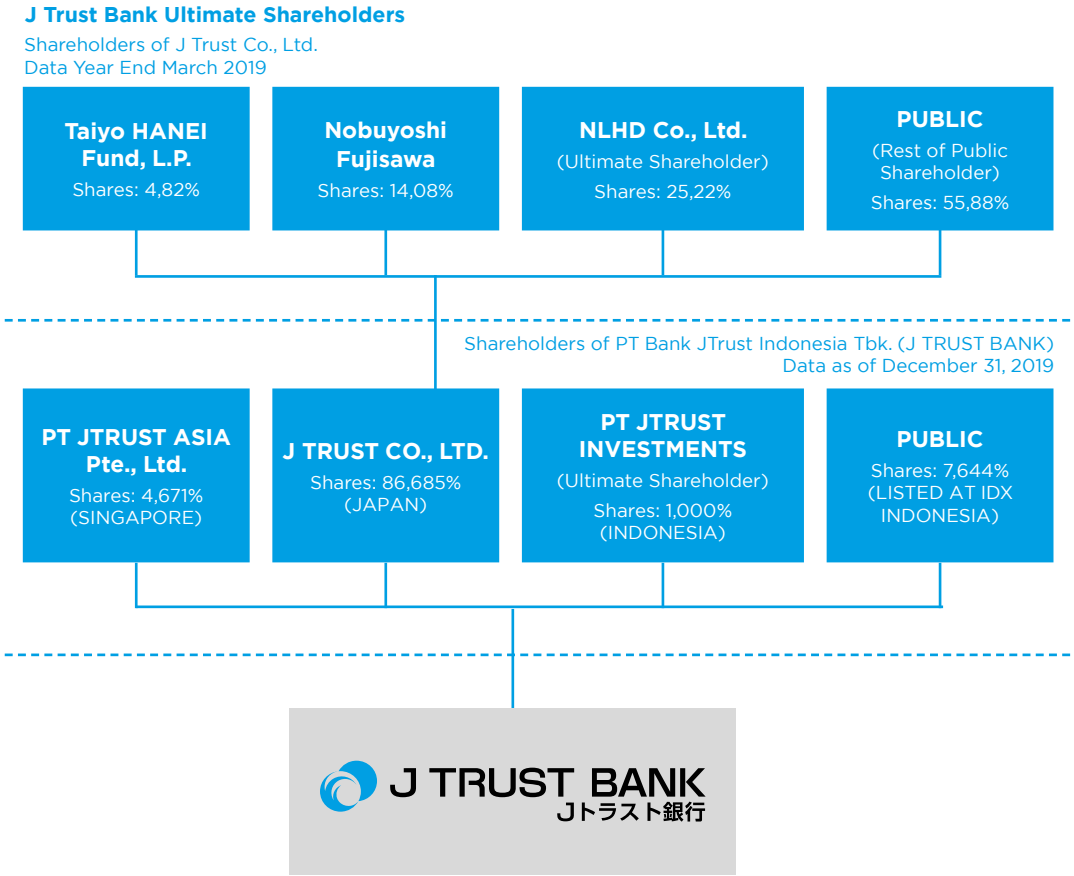

Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Tidak ada kepemilikan saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Share Ownership of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners

There is no share ownership by the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan Berdasarkan Klasifikasi Per 31 Desember 2019

Total Shareholders and Percentage of Ownership as of December 31, 2019

Klasifikasi	Nominal (lembar saham) Nominal (per share)	Persentase Percentage (%)	Classification
Kepemilikan Institusi Lokal	100.208.515	1,0008	Ownership of Local Institutions
Kepemilikan Institusi Asing	9.911.871.791,00	98,9986	Ownership of Foreign Institutions
Kepemilikan Individu Lokal	31.587	0,0004	Ownership of Local Individuals
Kepemilikan Individu Asing	1.773	0,0002	Ownership of Foreign Individuals

Struktur Modal per 31 Desember 2019

Capital Structure as of December 31, 2019

Keterangan	Nominal Saham Nominal Value of Share (Rp)	Jumlah Saham Number of Shares	Jumlah Total (Rp)	Persentase Percentage (%)	Description
Modal Dasar:					**Authorized Capital:**
- Seri A	1.000.-	12.000.003.000	**12.000.003.000.000**	-	- Series A
- Seri B	7.800.000.-	384.615	**2.999.997.000.000**	-	- Series B
Total Modal Dasar		**12.000.387.615**	**15.000.000.000.000**		**Total Authorized Capital**
Modal Disetor					**Issued and Fully Paid Capital**
Saham Seri A:					**Series A Shares:**
J Trust Co., Ltd.	1.000.-	8.679.019.445	**8.679.019.445.000**	86.685	J Trust Co., Ltd.
J Trust Investments Indonesia	1.000.-	100.121.245	**100.121.245.000**	1.000	J Trust Investments Indonesia
J Trust Asia Pte. Ltd.	1.000.-	467.700.928	**467.700.928.000**	4.671	J Trust Asia Pte. Ltd.
Publik	1.000.-	764.999.382	**764.999.382.000**	7.641	Public
Saham Seri B:					**Series B Shares**
J Trust Co., Ltd.	7.800.000,-	26.038	**203.096.400.000**	0.000	J Trust Co., Ltd.
Publik	7.800.000.-	257.463	**2.008.211.400.000**	0.003	Public
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		**10.012.124.501**	**12.223.148.800.000**	**100.000**	**Total Issued and Fully Paid Capital**
Modal dalam Portepel:					**Treasury Stock:**
- Seri A	1.000.-	1.988.162.000	**1.988.162.000.000**		- Series A
- Seri B	7.800.000.-	101.114	**788.689.200.000**		- Series B

Saham Seri A adalah saham baru yang diterbitkan atas Penyertaan Modal Sementara (PMS) yang dilakukan oleh LPS dalam rangka pengambilalihan Bank oleh LPS pada November 2008. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang LPS, maka LPS telah melakukan program divestasi atas mayoritas saham milik LPS pada Bank kepada JTrust Co., Ltd., Jepang, melalui perjanjian penjualan dan pembelian saham bersyarat tanggal 12 September 2014.

Series A shares are new shares issued under the framework of Temporary Equity Participation by LPS as part of the Bank's acquisition by LPS in November 2008. In order to comply with the provisions of Article 42 of Law No. 24/2004 as amended by Law No. 7/2009 on LPS, LPS subsequently undertook a divestment program of LPS majority shares in the Bank to J Trust Co., Ltd., Japan, through the conditional sale and purchase agreement of shares dated September 12, 2014.

Seluruh Saham Seri A belum dicatatkan di Bursa. Sedangkan saham Seri B merupakan saham yang dimiliki oleh pemegang saham pendiri terdahulu dan saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang membeli saham Bank melalui IPO.

All Series A shares have not been listed in the Stock Exchange. Meanwhile, Series B shares represent the shares held by the previous founders as well as shares owned by shareholders who bought the Bank's shares through IPO.

Kronologi Pencatatan Saham

Chronology of Share Listing

Kronologi pencatatan saham Seri B sebagai berikut:

The chronology of Series B shares listing as follow:

Tanggal Pencatatan	Aksi Korporasi Corporate Action	Jumlah Penambahan/ Pengurangan Saham Number of Additions/ Reduction of Shares	Jumlah Saham Tercatat Total Shares Listed	Date of Listing
25 Juni 1997	IPO	230.000.000	230.000.000	June 25, 1997
31 Agustus 1998	Saham Bonus	55.200.000	285.200.000	August 31, 1998
1 April 1999	*Stock Split*	1.140.800.000	1.426.000.000	April 1, 1999
20 April 1999	HMETD	570.400.000	1.996.400.000	April 20, 1999
11 Juni 1999	*Partial Delisting*	19.964.000	1.976.436.000	June 11, 1999
17 Juli 2000	Waran	7.692.500	1.984.128.500	July 17, 2000
30 Agustus 2000	HMETD	401.773.500	2.385.902.000	August 30, 2000
31 Agustus 2000	*Partial Delisting*	4.142.410	2.381.759.590	August 31, 2000
24 Maret 2003	Waran	109.975.338	2.491.734.928	March 24, 2003
26 Maret 2003	HMETD	5.738.909.508	8.230.644.436	March 26, 2003
22 Juli 2003	HMETD	2.469.205.464	10.699.849.900	July 22, 2003
2 Agustus 2004	Waran	433.300	10.700.283.200	August 2, 2004
15 Desember 2004	*Partial Relisting*	6.701.953.175	17.402.236.375	December 15, 2004
5 Januari 2005	*Partial Relisting*	2.357.723.076	19.759.959.451	January 5, 2005
6 Januari 2006	Waran	2.720.564.816	22.480.524.267	January 6, 2006
29 Mei 2007	*Partial Delisting*	27.205.648	22.453.318.619	May 29, 2007
11 Juli 2001	HMETD	5.613.329.655	28.066.648.274	July 11, 2001

Keterangan:
1. Pada bulan Juni 1997, Bank (dahulu PT Bank CIC International Tbk) melakukan IPO dengan menjual 70.000.000 sahamnya yang bernilai Rp500 per saham dengan harga penawaran Rp900 per saham. Kemudian Bank melakukan pencatatan sejumlah 230.000.000 saham di Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari 160.000.000 saham pendiri dan 70.000.000 saham hasil IPO.
2. Total seluruh saham seri B berjumlah 28.350.177.035 saham:
   a. Sejumlah 28.066.648.274 saham (99%) tercatat di Bursa Efek Indonesia.
   b. Sejumlah 283.501.499 saham (1%) tidak tercatat.

Note:
1. In June 1997, the Bank (formerly PT Bank CIC International Tbk) conducted an IPO by selling 70,000,000 shares worth IDR500 per share with an offering price of IDR900 per share. The Bank subsequently listed 230,000,000 shares at the Indonesia Stock Exchange consisting of 160,000,000 founders' shares and 70,000,000 shares of IPO proceeds.
2. The total of B series shares amounted to 28,350,177,035 shares:
   a. All 28,066,648,274 shares (99%) are listed on the Indonesia Stock Exchange.
   b. The 283,501,499 shares (1%) are not listed.

Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya

Pada tahun 2019, Bank tidak melakukan pencatatan atas efek lain selain saham. Bank juga tidak melakukan aksi korporasi seperti pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, maupun perubahan nilai nominal saham.

Chronology of Other Securities Listing or Recording

In 2019, the Bank did not record other securities besides shares. The Bank also did not di any corporate actions such as stock split, reverse stock, share dividend, bonus share, or change in nominal share value.

Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama

Bank tidak memiliki entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama.

Subsidiaries, Associates and Joint Venture Company

The Bank has no subsidiary, associates, and joint venture company.

STATISTIK PROFIL DAN KOMPOSISI KARYAWAN [102-7][102-8]

Statistics of Employee Profile and Composition [102-7][102-8]

Statistik profil dan komposisi karyawan yang menginformasikan perbandingan komparatif 2 tahun terakhir beserta data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi tercantum pada pembahasan Sumber Daya Manusia.

The statistics of employee profile and composition that present comparisons of the last 2 years along with employee competency development data that reflects the opportunities for each level of organization are presented in the discussion on Human Resources.

Komposisi Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan
Employee Composition Based on Education Level

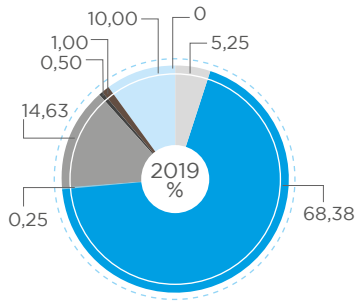

S3 | Doctorate	○
S2 | Post Graduate	●
S1 | Bachelor Degree	●
D4 | Diploma 4	●
D3 | Diploma 3	●
D2 | Diploma 2	●
D1 | Diploma 1	●
Lainnya | Others	●

Komposisi Karyawan berdasarkan Status
Employee Composition based on Status

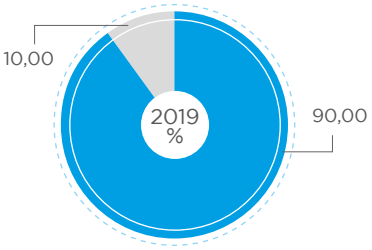

Tetap | Permanent Employee	●
Kontrak | Non Permanent Employee	●

Komposisi Karyawan berdasarkan Level Jabatan
Employee Composition based on Position

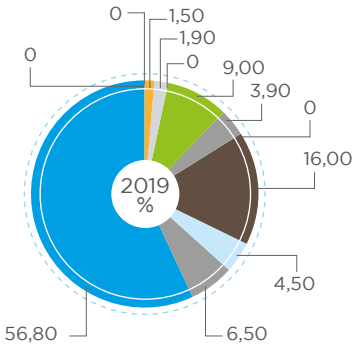

Kepala Divisi | Division Head	●
Wakil Kepala Divisi | Vice of Division Head	●
Kepala Regional | Regional Head	○
Kepala Bagian | Unit Head	●
Pimpinan Cabang | Branch Manager	●
Wakil Pimpinan Cabang | Vice of Branch Manager	○
Kepala Seksi | Section Head	●
Kepala Bagian Operasional | Operations Head	●
Operasional Officer | Operations Officer	●
Officer/Staff | Officer/Staff	●
Clerk/Karyawan Dasar | Clerk/Basic Employee	○
Non Clerk | Non Clerk	○

Komposisi Karyawan berdasarkan Jenis Kelamin
Employee Composition based on Gender

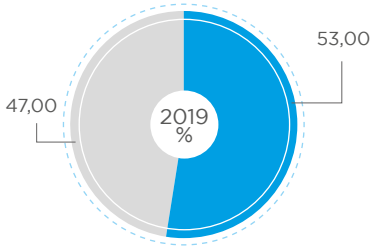

Pria | Male	●
Wanita | Female	●

Komposisi Karyawan berdasarkan Usia (tahun)
Employee Composition based on Age (years)

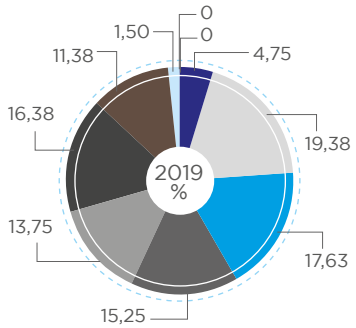

15-19 tahun | years	○	40-44 tahun | years	●
20-24 tahun | years	●	45-49 tahun | years	●
25-29 tahun | years	●	50-54 tahun | years	●
30-34 tahun | years	●	55-59 tahun | years	●
35-39 tahun | years	●	>60 tahun | years	○

Komposisi Karyawan berdasarkan Masa Kerja (tahun)
Employee Composition based on Working Period (years)

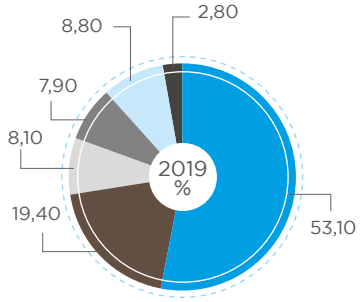

0-5 tahun | years	●
6-10 tahun | years	●
11-15 tahun | years	●
16-20 tahun | years	●
21-25 tahun | years	●
>25 tahun | years	●

Alokasi Dana Pengembangan SDM 2019

Selama tahun 2019, Perusahaan mengalokasikan dana sebesar Rp1,95 miliar untuk biaya pengembangan SDM dengan rincian sebagai berikut:

Budget Allocation for HC Development in 2019

Throughout 2019, the Company allocated IDR1.95 billion for HC development with details as follows:

No	Biaya Pengembangan	Nominal Value Rp	Development Expenses
1	Program/Kegiatan	830.583.276	Program/Activities
2	Sertifikasi	571.954.970	Certification
3	Konsumsi	12.429.650	Foods
4	Pendukung /Perlengkapan Pelatihan	24.514.000	Training Support/Equipment
5	Perjalanan Dinas	209.389.678	Business Trips
6	Module Development	87.178.619	Module Development
7	ODP	209.355.186	ODP
	Total	**1.945.405.379**	**Total**

Kategori Kegiatan 2019

Category of Activities in 2019

No	Kategori Category	Posisi Jabatan Level Position								Grand Total
		Manajemen Management	Clerk	Kepala Departemen Dept. Head	Wakil Kepala Divisi Deputy Division Head	Direktur Director	Kepala Divisi Division Head	Officer	Kepala Seksi Section Head	
1	Certification	16	2	78	12	33	16	32	19	208
2	External Training	-	44	8	-	-	1	20	14	87
3	e-Learning Training	10	1.706	440	46	4	46	1.383	628	4.263
4	Inhouse Training	4	12	25	15	9	25	39	16	145
5	Internal Training	13	1731	199	31	2	53	690	382	3101
6	Socialization	1	102	101	19	4	25	215	139	606
	Grand Total	**44**	**3.597**	**851**	**123**	**52**	**166**	**2.379**	**1.198**	**8.410**

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif [404-2]

Manajemen J Trust Bank berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Informasi mengenai pelatihan dan pengembangan Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dimuat dalam pembahasan Sumber Daya Manusia di halaman 236.

Training and Competence Development of the Board of Commissioners, Directors, Executive Officers [404-2]

J Trust Bank's management is committed to increasing competence in supporting the implementation of task and responsibility on a daily basis. Information on training and development of the Board of Commissioners, Directors, Executive Officers is in the chapter of Human Resources on page 236.

JARINGAN KANTOR [102-3] [102-4]

Offices Network [102-3] [102-4]

No.	Kantor Pusat/Cabang Office/Branch		Alamat Address	Provinsi Province
	Nama Kantor Office Name	Tipe Kantor Office Type		
Kantor Pusat		**Jakarta**	**Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Gd. Sahid Sudirman Center Lt. 33**	**DKI Jakarta**
1	Kantor Cabang	Medan - Putri Hijau	Jl. Putri Hijau No. 4 BC	Sumatera Utara
2	Kantor Cabang	Batam - Costa Rica	Komp. Pertokoan Costa Rica Niaga Blok B1 No. 3 - 3A	Kepulauan Riau
3	Kantor Cabang	Pekanbaru - Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman No. 150 A - B	Riau
4	Kantor Cabang	Jambi - Gatot Subroto	Jl. Gatot Suboto No. 75	Jambi
5	Kantor Cabang	Pangkal Pinang - Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman No. 30 - 32	Bangka Belitung
6	Kantor Cabang	Palembang - Kebumen	Jl. Kebumen Darat No. 834	Sumatera Selatan
7	Kantor Cabang	Jakarta - Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Gd. Sahid Sudirman Center Lt. GF	DKI Jakarta
8	Kantor Cabang	Bogor - Suryakencana	Jl. Suryakencana No. 294 - 296	Jawa Barat
9	Kantor Cabang	Bandung - Juanda	Jl. Ir. H. Juanda No. 36	Jawa Barat
10	Kantor Cabang	Karawang - KIIC	Jl. Permata Raya Lot CA1, Sentra KIIC Lt. 1 No. 1	Jawa Barat
11	Kantor Cabang	Semarang - Pemuda	Jl. Pemuda No. 150, Komp. Ruko Pemuda Mas Blok A4, Sekayu	Jawa Tengah
12	Kantor Cabang	Solo - Slamet Riyadi	Jl. Slamet Riyadi No. 295	Jawa Tengah
13	Kantor Cabang	Yogyakarta - Diponegoro	Jl. Pangeran Diponegoro No. 9	DI Yogyakarta
14	Kantor Cabang	Surabaya - Darmo	Jl. Raya Darmo No. 105 - 107	Jawa Timur
15	Kantor Cabang	Denpasar - Teuku Umar	Jl. Teuku Umar No. 121 Blok D1 - D2, Komp. Teuku Umar Investama	Bali
16	Kantor Cabang	Balikpapan - Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman No. 11	Kalimantan Timur
17	Kantor Cabang	Samarinda - Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman No. 4C	Kalimantan Timur
18	Kantor Cabang	Pontianak - Juanda	Jl. Ir. H. Juanda No. 55-56	Kalimantan Barat
19	Kantor Cabang	Makassar - Botolempangan	Jl. Botolempangan No. 18	Sulawesi Selatan
20	Kantor Cabang	Bandar Lampung - Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman No. 23 E - F	Lampung
21	Kantor Cabang	Malang - Sutoyo	Jl. Letjen. Sutoyo No. 124	Jawa Timur
22	Kantor Cabang	Cirebon - Yos Sudarso	Jl. Yos Sudarso No. 15 D - F	Jawa Barat
23	Kantor Kas	Sungai Liat - Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman, Sungai Liat, Komp. Ruko Permata Indah Blok A No. 1 A -B	Bangka Belitung
24	Kantor Cabang Pembantu	Palembang - Rajawali	Jl. Rajawali No. 1087 - 1088	Sumatera Selatan
25	Kantor Kas	Medan - Asia	Jl. Asia No. 172 C	Sumatera Utara
26	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta - Tanah Abang	Komp. Pertokoan Tanah Abang, Bukit Blok F No. 16 - 17	DKI Jakarta
27	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta - Gajah Mada	Jl. Gajah Mada No. 11 A - B	DKI Jakarta
28	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta - Mangga Dua	Jl. Mangga Dua Raya, Komp. Mangga Dua Plaza Blok H. No.1 - 3	DKI Jakarta
29	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta - Tomang	Jl. Tomang Raya Terusan Kav.71-72, Gd. Graha Sukandamulia Lt. 1	DKI Jakarta

No.	Kantor Pusat/Cabang Office/Branch		Alamat Address	Provinsi Province
	Nama Kantor Office Name	Tipe Kantor Office Type		
30	Kantor Kas	Jakarta - Puri Indah	Jl. Puri Indah Raya, Pasar Puri Indah Blok I No. 37	DKI Jakarta
31	Kantor Kas	Jakarta - Pintu Kecil	Jl. Pasar Pagi No. 101 A (D/H No. 99)	DKI Jakarta
32	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta - Kelapa Gading Boulevard	JL.Raya Boulevard Barat Blok LC 6 Kav. No. 55	DKI Jakarta
33	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta - Muara Karang	Jl. Muara Karang Raya Blok A 8 Utara No. 21	DKI Jakarta
34	Kantor Kas	Jakarta - Sunter	Jl. Danau Sunter Blok G-7C No. 5, Sunter Agung	DKI Jakarta
35	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta - Fatmawati	Jl. R.S. Fatmawati 22 B - D	DKI Jakarta
36	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta - Pondok Indah	Jl. Metro Pondok Indah Blok UA No. 71	DKI Jakarta
37	Kantor Kas	Jakarta - Tebet	Jl. Tebet Raya No. 26D, Tebet Barat	DKI Jakarta
38	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta - Kemang	Jl. Kemang Selatan Raya No. 111 H	DKI Jakarta
39	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta - Klender	Buaran Plaza Lt. Dasar No. 8-10, Jl. Radin Inten No. 1, Buaran, Klender	DKI Jakarta
40	Kantor Cabang Pembantu	Tangerang Selatan - Serpong	Perumahan Alam Sutera, Jalur Sutera 29D No. 39	Banten
41	Kantor Cabang Pembantu	Bekasi - Grand Mall	Jl. Jenderal Sudirman, Grand Mall Bekasi Blok B No. 8	Jawa Barat
42	Kantor Kas	Karanganyar - Palur	Jl. Raya Palur KM 0,5 RT 05 RW 02	Jawa Tengah
43	Kantor Cabang Pembantu	Depok - Margonda	Jl. Margonda Raya No. 252 D	Jawa Barat
44	Kantor Kas	Jakarta - AEON Mall Cakung	AEON Mall Jakarta Garden City Lt. GF Unit G-68, Jl. Boulevard Garden City, Cakung	DKI Jakarta
45	Kantor Kas	Cikarang - Jababeka	Hotel Holiday Inn Cikarang Jababeka Lt. 1, Jl. Jababeka Raya Kav. A-2 Jababeka 1, Cikarang	Jawa Barat

SITUS *WEB* PERUSAHAAN

Corporate Website

Situs *web* Perusahaan, https://www.jtrustbank.co.id/, mengandung berbagai informasi untuk nasabah, serta pemegang saham dan pemangku kepentingan, yang bisa diakses secara mudah dan cepat.

Situs *web* J Trust Bank memiliki 6 navigasi utama, yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- **Personal**
  Berisikan berbagai informasi mengenai personal banking untuk nasabah individu dan pelaku usaha mikro.
- **Business**
  Berisikan informasi mengenai layanan perbankan untuk bisnis kecil dan menengah, serta korporasi.
- **About J Trust Bank**
  Berisikan berbagai informasi penting tentang Bank untuk pemegang saham serta pemangku kepentingan.

Corporate website, https://www.jtrustbank.co.id/, contains information for customers, as well as shareholders and stakeholders, which is easily and quickly accessible.

J Trust Bank website has 6 main navigations, which can be described as follows:

- **Personal**
  Containing information on personal banking for individual customers or micro businesses.
- **Business**
  Containing information on banking services for small and medium businesses, as well as corporates.
- **About J Trust Bank**
  Containing important information on the Bank for shareholders as well as stakeholders.

Sub *Good Corporate Governance* mencakup tata kelola, Kode Etik, Piagam Unit Audit Internal dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris, serta pedoman tata tertib Dewan Komisaris dan Direksi.

Sub *Corporate Information* mencakup visi dan misi, serta nilai-nilai Bank. Sub ini juga menampilkan profil Dewan Komisaris dan Direksi.

Sub *Investor Support* berisikan Laporan Tahunan selama lebih dari satu dekade, informasi Rapat Umum Pemegang Saham secara detail yang meliputi risalah sampai tanggal pemanggilan RUPS, informasi kepemilikan saham terkini.

- **News**
  Berisikan berita-berita terkini terkait aktivitas Bank.
- **Tabungan Moe**
  Berisikan informasi mengenai Tabungan Moe, sebuah jenis tabungan baru yang merupakan bagian dari J Trust Komunitas dengan fitur anime Jepang.
- **J Trust Net**
  Berisikan login *internet banking* untuk nasabah Bank.

Sub Good Corporate Governance contains governance, Code of Conduct, Internal Unit Audit Charter and committees under the Board of Commissioners, as well as Code of Conduct for the Board of Commissioners and Directors

Sub Corporate Information contains vision and mission, as well as values of the Bank. The Sub also presents the profile of Board of Commissioners and Directors.

Sub Investor Support contains Annual Report of more than one decade, information on General Meetings of Shareholders in details which covers minutes to dates of GMS, information on latest share ownership.

- **News**
  Contains latest news on the Bank's activities.
- **Tabungan Moe**
  Contains information on Tabungan Moe, a new form of savings part of J Trust Communities with Japanese animated feature.
- **J Trust Net**
  Contains internet banking login for the Bank's customers.

PEJABAT EKSEKUTIF

Executive Officers

Jabatan	**Nama** | Name	Position
Kepala Divisi Corporate Secretary	Christiati E. Sianipar	Corporate Secretary Division Head
Kepala Divisi Audit Internal	Ari Prihadi Atmosoekarto	Internal Audit Division Head
Kepala Divisi Corporate Legal & Litigation	Adi Yulistanto	Corporate Legal & Litigation Division Head
Kepala Divisi Human Capital & General Services	Agung Cahyanto	Human Capital & General Services Division Head
Kepala Divisi Financial Control	Eko Bramantyo	Financial Control Division Head
Kepala Divisi Treasury & Capital Market	Ignatius Edwin Sulistio	Treasury & Capital Market Division Head
Kepala Divisi Retail Banking	Tekun Halim	Retail Banking Division Head
Kepala Divisi Information Strategy	Tatta Ambarala	Information Strategy Division Head
Kepala Divisi Head Office Operation	Irene Ina Munir	Head Office Operation Division Head
Kepala Divisi Credit Risk Reviewer	Daniel Budianto Saragih	Credit Risk Reviewer Division Head
Kepala Divisi Credit Administration	Fong Kuan Liung	Credit Administration Division Head
Kepala Divisi Commercial & SME	Sintawati Luswanto	Commercial & SME Division Head

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Profile

Nobiru Adachi
Komisaris Utama
President Commissioner

Warga Negara Jepang, 61 tahun. Diangkat sebagai Komisaris Utama di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. pada 30 Desember 2014 setelah Bank diakuisisi oleh J Trust Co., Ltd.

Saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur JTRUST ASIA PTE. LTD. sejak Maret 2018. Beliau memiliki pengalaman di Kementerian Keuangan Jepang selama 26 tahun.

Beliau bergabung dengan Kementerian Keuangan pada April 1980 dan menjabat berbagai posisi strategis, yaitu Kepala Staf pada Wakil Menteri Keuangan untuk Urusan Internasional pada 1997, dan menjabat sebagai Penasihat Hukum Biro Anggaran pada 1999, serta bekerja sebagai Kepala Divisi Riset Departemen Internasional pada 2002. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Lembaga Penelitian Kebijakan Kementerian Keuangan Jepang pada 2004 dan Direktur Jenderal Bea Cukai Hakodate pada 2005. Beliau diangkat sebagai Pejabat Eksekutif Bursa Efek Jasdaq pada April 2006 dan dipromosikan menjadi Direktur pada Juni 2006. Beliau menjabat sebagai Japan Country Head di ETF Securities Co., Ltd. pada 2008. Pada 2010, beliau bertugas sebagai Chairman Japan MA Solutions Co., Ltd.

Beliau menerima gelar LLB dari University of Tokyo dan MA in Economics dari Case Western University pada 1983. Beliau juga menuntut ilmu di Kennedy School of Government of Harvard University pada 1984.

Japanese Citizen. 61 years old. Appointed as President Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. on December 30, 2014, upon the Bank's acquisition by J Trust Co., Ltd.

Currently, he has served as Director of JTRUST ASIA PTE. LTD. since March 2018. He has 26 years of experience in the Ministry of Finance of Japan.

He joined the Ministry of Finance in April 1980 and served various strategic positions, namely the Chief of Staff to the Vice Minister of Finance for International Affairs in 1997, and as the Legal Counselor of the Budget Bureau in 1999, and as the Head of Research Division of the International Department in 2002. He became the Director-General of the Policy Research Institute of the Japan's Ministry of Finance in 2004 and the Director-General of Customs in Hakodate in 2005. He was appointed as Executive Officer of Jasdaq Stock Exchange in April 2006 and was promoted as Director in June 2006. He became the Japan Country Head of ETF Securities Co., Ltd. in 2008. In 2010, he served as the Chairman of Japan MA Solutions Co., Ltd.

He received LLB from the University of Tokyo and MA in Economics from Case Western University in 1983. He also studied in the Kennedy School of Government of Harvard University in 1984.

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE

Nobuiku Chiba

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Jepang, 46 tahun, berdomisili di Jepang. Diangkat sebagai Komisaris J Trust Bank berdasarkan RUPSLB pada 20 September 2018.

Beliau menjabat sebagai Representative Senior Managing Director, Executive Officer J Trust Co., Ltd yang bertanggung jawab pada bisnis keuangan di Asia Tenggara sejak Juni 2019. Selain itu, beliau juga menjadi Komisaris Utama PT JTrust Olympindo Multi Finance sejak Oktober 2018.

Beliau memiliki pengalaman selama 27 tahun di industri keuangan di Jepang dan Korea Selatan, antara lain perbankan, perusahaan keuangan, kartu kredit.

Japanese Citizen, 46 years old, residing in Japan. Appointed as Commissioner of J Trust Bank based on EGMS on September 20, 2018.

He has served as Representative Senior Managing Director, Executive Officer J Trust Co., Ltd. in charge of financial business in Southeast Asia since June 2019. Moreover, he has become the President Commissioner of PT JTrust Olympindo Multi Finance since October 2018.

He has 27 years of experience in the financial industry in Japan and South Korea, including banking, financial institutions and credit cards.

Mahdi Mahmudy

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, 62 tahun, berdomisili di Jakarta. Diangkat melalui RUPST pada 30 Juni 2016. Beliau memiliki pengalaman di industri perbankan selama 30 tahun.

Beliau memulai karier di Bank Indonesia pada tahun 1986. Pengalaman kerja terakhir sebagai Direktur Eksekutif Departemen Regional Bank Indonesia, Regional Kalimantan, pada tahun 2015; Jabatan sebelumnya Direktur Eksekutif Bank Indonesia Regional VIII tahun 2013 dan Direktur Bank Indonesia Yogyakarta tahun 2012; Direktur Departemen Kredit, BPR, dan UMKM tahun 2010. Pada tahun 2007 beliau Direktur Bidang Moneter – Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Beliau menjabat Wakil Kepala Bank Indonesia Singapura pada tahun 2001; Sebelumnya sebagai Peneliti Ekonomi pada Departemen Kebijakan Ekonomi Makro pada tahun 1996.

Beliau juga berpengalaman sebagai dosen di program pasca sarjana antara lain di Universitas Trisakti pada tahun 2015-2018, di BINUS University tahun 2015, serta Perbanas Institute tahun 2015 sampai sekarang.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 1984. Kemudian, beliau meraih gelar Magister di bidang Kebijakan Moneter dari University of Illinois, Amerika Serikat pada tahun 1992, serta gelar Doktor di bidang Manajemen Stratejik dari Universitas Indonesia pada tahun 2011.

Indonesian Citizen, 62 years old, residing in Jakarta. Appointed as Independent Commissioner by AGMS on June 30, 2016. He has 30 years of experience in the banking industry.

He started his career in 1986 at Bank Indonesia with last position as the Executive Director of Bank Indonesia's Regional Department for Kalimantan Area in 2015. He was appointed as the Executive Director of Regional Department VIII in 2013 and served as Director of Bank Indonesia – Yogyakarta Province in 2012. Previous roles held include Director of Department of Credit, Rural Bank, and Small Medium Enterprises in 2010, Director of Bank Indonesia-Central Java Province in 2007, and Deputy of Chief of Bank Indonesia Singapore in 2001. He was an Economist in the Department of Macro Economic Policy in 1996.

He is a lecturer on postgraduate program at some universities, namely Trisakti University in 2015-2018, Binus University in 2015, and Perbanas Institute from 2015 until now.

He obtained Bachelor of Arts degree in Financial Management from the University of Indonesia in 1984. He received master's degree in Monetary Policy from the Illinois University at Urbana-Champaign in 1992, and Doctorate degree in Strategic Management from the University of Indonesia in 2011.

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE

Sutirta Budiman, CFA
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, 61 tahun, berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Komisaris Independen J Trust Bank melalui RUPST pada tanggal 27 Juni 2019.

Beliau berpengalaman lebih dari 35 tahun di industri keuangan dan sektor riil. Memulai karirnya pada tahun 1982 di Citibank NA sebagai Vice President/Senior Risk Manager, dilanjutkan di PT Bank Sampoerna International sebagai Direktur Manajemen Risiko pada tahun 1989. Pada tahun 1993 bergabung dengan PT AKR Corporindo Tbk. sebagai Direktur Keuangan Grup dan sebagai Presiden Direktur di PT Asiana Multikreasi Tbk. pada tahun 1997. Bergabung dengan PT. BNI Sekuritas sebagai Komisaris dan pada tahun 2008 dan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Chief Business Risk Officer pada tahun 2010. Pernah juga menjabat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit di PT Antam Tbk. (2004 - 2008), anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2005 - 2007), Co-Regional Director PRMIA - Indonesian Chapter (2010 - 2014) dan anggota Komite Manajemen Risiko di Lembaga Penjamin Simpanan (2015 - 2019).

Meraih gelar BSc. (Hon) di bidang Teknik Listrik dari Imperial College London pada tahun 1981. Mendapatkan hak menggunakan sebutan Chartered Financial Analyst sejak tahun 2006.

Indonesian Citizen, 61 years old, residing in Jakarta. Appointed as Independent Commissioner in the AGMS on June 27, 2019.

He has over 35 years of experience in the financial industry and real sector. In 1982, he began his career with Citibank NA as Vice President/ Senior Risk Manager, and then with PT Bank Sampoerna International as Risk Management Director in 1989. In 1993, he joined PT AKR Corporindo Tbk as Group Finance Director and as President Director in PT Asiana Multikreasi Tbk in 1997. He joined PT. BNI Sekuritas as Commissioner in 2008 and PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. as Chief Business Risk Officer in 2010. Other previously held positions are as member of Risk Management Committee and Audit Committee at PT Antam Tbk. (2004 - 2008), as member of Risk Monitoring Committee at PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2005 - 2007), as Co-Regional Director PRMIA - Indonesian Chapter (2010 - 2014) and as member of Risk Management Committee at Indonesia Deposit Insurance Corporation (2015 - 2019).

Obtained BSc. (Hon) degree in Electrical Engineering from Imperial College London in 1981. He is a holder of the right to use the Chartered Financial Analyst designation since 2006.

PROFIL DIREKSI

Board of Directors' Profiles

Ritsuo Fukadai
Direktur Utama
President Director

Warga Negara Jepang, 57 tahun, berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Direktur Utama J Trust Bank berdasarkan RUPST pada 27 Juni 2019.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Nihon Hoshou Co., Ltd. Jepang sejak 2018. Memiliki pengalaman 32 tahun di industri perbankan, beliau mengawali karier sebagai officer di Money Desk Division Bank of Tokyo Mitsubishi pada 1987 hingga diangkat sebagai General Manager di Yangon, Myanmar, pada 2012-2015 setelah ditugaskan ke berbagai negara, seperti Malaysia dan Amerika Serikat. Beliau melanjutkan karier sebagai Chief Financial Officer di Super Seven Stars Motors Co.,Ltd. Yangon, Myanmar. Selanjutnya, beliau bergabung dengan J Trust Group melalui JT Chinae Savings Bank sebagai General Manager pada 2016-2018.

Beliau menyelesaikan pendidikan Bachelor of Economics di University of Hitotsubashi jurusan Ekonomi pada 1987.

Japanese Citizen, 57 years old, residing in Jakarta. Appointed as President Director of J Trust Bank based on EGMS on June 27, 2019.

Previously, he served as Director of Nihon Hoshou Co., Ltd. Japan since 2018. He has 32 years of experience in the banking industry, starting his career as officer in the Money Desk Division at Bank of Tokyo Mitsubushi In 1987 and was appointed as General Manager in Yangon, Myanmar, in 2012-2015 after being assigned to many countries such as Malaysia and US. He continued his career as Chief Financial Officer in Super Seven Stars Motors Co.,Ltd. Yangon, Myanmar. Then, he joined J Trust Group through JT Chinae Savings Bank as General Manager in 2016-2018.

He finished his Bachelor of Economics in the University of Hitotsubashi in Economics in 1987.

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' PROFILES

Felix Istyono Hartadi Tiono

Direktur Kepatuhan
Compliance Director

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan J Trust Bank berdasarkan RUPSLB pada 26 Februari 2014, yang saat itu dikenal sebagai Bank Mutiara.

Beliau memiliki pengalaman di bidang legal–kepatuhan dan industri perbankan selama 32 tahun. Memulai karier sebagai Legal Officer PT Wellwood Sejahtera Ekapratama pada 1986. Beliau melanjutkan kariernya di Rabobank sejak 1990 dengan jabatan terakhir Direktur Kepatuhan, sebelum bergabung dengan Bank DBS Indonesia pada 2006 sebagai Direktur Kepatuhan, dan terakhir sebagai Direktur Kepatuhan Bank HSBC Indonesia sejak 2009 sebelum bergabung dengan J Trust Bank.

Beliau meraih gelar Sarjana Hukum Perdata di Universitas Katholik Parahyangan Bandung pada 1986 dan gelar S2 di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, Jakarta, pada 2006.

Indonesian Citizen, 60 years old, residing in Jakarta. Appointed as Compliance Director of J Trust Bank based on EGMS on February 26, 2014, at that time was known as Bank Mutiara.

He has more than 32 years of working experience in legal-compliance and banking industry. He started his career as Legal Officer in PT Wellwood Sejahtera Ekapratama in 1986. He continued his career with Rabobank since 1990 with last position as Compliance Director prior to joining with DBS Indonesia in 2006 as Compliance Director, then he joined Bank HSBC Indonesia since 2009 as Compliance Director, before joining J Trust Bank.

He graduated from the Faculty of Law in Civil Affairs in Parahyangan Catholic University, Bandung, in 1986, and obtained his Master's degree from Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, Jakarta, in 2006.

Helmi Arief Hidayat

Direktur
Director

Warga Negara Indonesia, 61 tahun, berdomisili di Jakarta. Diangkat menjadi Direktur J Trust Bank melalui RUPSLB pada Juni 2016.

Pengalaman bekerja terakhir sebagai Executive Vice President J Trust Bank sejak 2012 yang saat itu dikenal sebagai Bank Mutiara. Memiliki pengalaman 32 tahun di industri perbankan. Beliau memulai karir perbankan di Bank Umum Nasional pada tahun 1987. Beliau pernah bekerja di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan beberapa bank seperti Bank Dana Asia, Bank Akita, Barclays Bank Indonesia, dan Nobu Bank.

Beliau meraih gelar sarjana jurusan Elektro dari UDS 45 pada tahun 1987, kemudian menyelesaikan program pasca sarjana dari Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) tahun 1993.

Indonesian Citizen, 61 years old, residing in Jakarta. Appointed as J Trust Bank Director by EGMS in June 2016.

Previously, he was Executive Vice President of J Trust Bank since 2012, at that time was known as Bank Mutiara. He has 32 years of experience in the banking industry. He started his banking career in 1987 with Bank Umum Nasional. He has worked in the Indonesia Bank Restructuring Agency and several banks such as Bank Dana Asia, Bank Akita, Barclays Bank Indonesia, and Nobu Bank.

He obtained his bachelor degree in Electrical Engineering from UDS 45 in 1987 and Master's degree from Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) in 1993.

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' PROFILES

Cho Won June

Direktur
Director

Warga Negara Korea Selatan, 49 tahun, berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Direktur J Trust Bank berdasarkan RUPST pada 27 Juni 2019.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Managing Director Information Strategy Group di JT Chinae Savings Bank, Korea Selatan, sejak 2014. Memiliki pengalaman 24 tahun di industri teknologi informasi. Beliau mengawali karier sebagai Research Scientist di R&D Center Doosan Group pada 1995 sampai 2000 kemudian berlabuh ke LG Group sebagai Manager of New Business TFT selama 2001 sampai 2005. Selanjutnya, beliau melanjutkan karier di sektor keuangan sebagai Senior Project Manager, IT Department, Solomon Financial Group pada periode 2005-2012 dan Department Head, Information Strategy Department, Gongpyung Saving Bank pada periode 2012-2013. Beliau bergabung dengan J Trust Group melalui JT Chinae Savings Bank sebagai Information Strategy Group Director pada tahun 2013-2014.

Beliau menyelesaikan pendidikan Bachelor of Science di University of Myonggi jurusan Material Science & Engineering pada 1995 dan Master of Science di Korea Advanced Institute of Science and Technology jurusan Management Information Systems pada 2002.

South Korean Citizen, 49 years old, residing in Jakarta. Appointed as Director of J Trust Bank based on AGMS on June 27, 2019.

Previously he worked as Managing Director of Information Strategy Group in JT Chinae Savings Bank, South Korea, since 2014. He has 24 years of experience in the information technology industry. He started his career as Research Scientist in R&D Center Doosan Group from 1995 to 2000, then moved to LG Group as Manager of New Business TFT between 2001 and 2005. Then, he continued his career in the financial sector as Senior Project Manager, IT Department, Solomon Financial Group in the 2005-2012 period and Department Head, Information Strategy Department, Gongpyung Saving Bank in the 2012-2013 period. He joined J Trust Group through JT Chinae Savings Bank as Information Strategy Group Director in 2013-2014.

He finished Bachelor of Science in University of Myonggi in Material Science & Engineering in 1995 and Master of Science in Korea Advanced Institute of Science and Technology in Management Information Systems in 2002.

Bijono Waliman

Direktur
Director

Warga Negara Indonesia, 69 tahun, berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Direktur J Trust Bank berdasarkan RUPST pada 27 Juni 2019.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Business Partner Jimmy Budhi & Rekan sejak 2018. Memiliki pengalaman 33 tahun di industri perbankan. Beliau berkarier di Citibank NA Jakarta sebagai Vice President, Financial Controller & Country Operation Head for Investment Banking pada periode 1982-1990. Kemudian melanjutkan karier di PT Bank Subentra sebagai Direktur pada tahun 1993-1997. Beliau bergabung dengan PT Aneka Kimia Raya Tbk sebagai Group Executive Director, Chief Financial Officer, pada tahun 1997-1998 sebelum berlabuh kembali ke Citibank NA Jakarta sebagai Vice President selama periode 1998-2004. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Executive Vice President, Operation Control Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk sejak tahun 2004 hingga 2013, dan terakhir sebagai Direktur Keuangan di PT AKR Corporindo Tbk pada tahun 2013-2015.

Beliau menyelesaikan pendidikan Electrical Engineering, Diplom-Ingenieur Ruehr di University of Bochum, West Germany, pada 1976 dan Master of Business Administration, Doktorandus di Delf University, Belanda, pada 1981.

Indonesian Citizen, 69 years old, residing in Jakarta. Appointed as Director of J Trust Bank based on AGMS on June 27, 2019.

Previously, he was Business Partner of Jimmy Budhi & Rekan since 2018. He has 33 years of experience in the banking industry. He worked in Citibank NA Jakarta as Vice President, Financial Controller & Country Operation Head for Investment Banking in the 1982-1990 period. He then continued his career in PT Bank Subentra as Director in 1993-1997. He joined PT Aneka Kimia Raya Tbk as Group Executive Director, Chief Financial Officer, in 1997-1998 before returning to Citibank NA Jakarta as Vice President in the 1998-2004 period. Then, he became Executive Vice President, Operation Control Head of PT Bank Danamon Indonesia Tbk from 2004 to 2013, and finally Finance Director of PT AKR Corporindo Tbk in 2013-2015.

He finished education in Electrical Engineering, Diplom-Ingenieur Ruehr in the University of Bochum, West Germany, in 1976 and Master of Business Administration, Doktorandus in Delf University, Netherlands, in 1981.

PROFIL EXECUTIVE VICE PRESIDENT

Executive Vice President's Profiles

Pey Fang Ong
Executive Vice President

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Executive Vice President J Trust Bank sejak 2019.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Compliance Head (Executive Vice President) PT Commonwealth Bank Indonesia pada tahun 2017-2018 dan Compliance Head (EVP) PT Danamon Indonesia Tbk pada 2009-2017. Beliau sempat meniti karier sebagai Business Support Head (Vice President) ABN Amro NV Indonesia selama periode 2006-2009 dan di Citibank di berbagai posisi dengan jabatan terakhir sebagai Business Coordinator periode 2003-2006.

Beliau meraih gelar Bachelor of Business in Accountancy (*with distinction*) dari Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australia, pada 1988.

Indonesian Citizen, 55 years old, residing in Jakarta. Appointed as Executive Vice President of J Trust Bank since 2019.

She previously worked as Compliance Head (Executive Vice President) of PT Commonwealth Bank Indonesia in 2017-2018 and Compliance Head (EVP) of PT Danamon Indonesia Tbk in 2009-2017. She had a career as Business Support Head (Vice President) of ABN Amro NV Indonesia in the 2006-2009 period and Citibank in a variety of positions with the latest being a Business Coordinator from 2003-2006.

She has a Bachelor of Business in Accountancy (with distinction) from the Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australia, in 1988.

Masayoshi Kobayashi
Executive Vice President

Warga Negara Jepang, 50 tahun, berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Executive Vice President J Trust Bank sejak 2019.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Wakil Direktur, Kantor Monitoring Bank-bank Besar, Pengembangan Strategi & Biro Manajemen Strategi di Financial Services Agency of Japan pada periode 2016-2018. Beliau berkarier sejak tahun 2009 hingga 2018 di Financial Services Agency of Japan dengan berbagai posisi penempatan.

Beliau mengawali karier sebagai Assistant Trader of Fixed Income Products Fuji Bank Limited, Tokyo, pada tahun 1995-1997. Selanjutnya, beliau ditugaskan ke Fuji Bank Limited, New York, sebagai Treasurer/ Assistant Investment Officer pada 1999-2001. Beliau melanjutkan kariernya sebagai Equity Analyst di Deutsche Securities Inc., Tokyo, hingga 2007. Kemudian bekerja sebagai Investment Analyst di ABN Amro Asset Management Ltd., Tokyo, pada tahun 2007 sebelum pindah ke Advisor Oasis Limited cabang Tokyo sebagai Investment Advisor pada tahun 2008.

Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Keio University, Tokyo, Jepang pada 1993. Kemudian meraih gelar Master of Science dalam Industrial Administration dengan Konsentrasi Keuangan dari Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat, pada 1999.

Japanese Citizen, 50 years old, residing in Jakarta. Appointed as Executive Vice President of J Trust Bank since 2019.

Previously, he served as Deputy Director, Large Banks Monitoring Office, Strategic Development & Strategic Management Bureau in the Financial Services Agency of Japan in the 2016-2018 period. He had a career from 2009 to 2018 in the Financial Services Agency of Japan with various placements.

He started his career as Assistant Trader of Fixed Income Products in Fuji Bank Limited, Tokyo, in 1995-1997. He then was transferred to Fuji Bank Limited, New York, as Treasurer/Assistant Investment Officer in 1999-2001. He continued his career as Equity Analyst in Deutsche Securities Inc., Tokyo, until 2007, then worked as Investment Analyst in ABN Amro Asset Management Ltd., Tokyo, in 2007 before moving to Oasis Advisor Limited of Tokyo branch as Investment Advisor in 2008.

He received Bachelor of Laws from Keio University, Tokyo, Japan in 1993, and Master of Science in Industrial Administration with Finance Concentration from Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, US, in 1999.

PROFIL EXECUTIVE VICE PRESIDENT
EXECUTIVE VICE PRESIDENT'S PROFILES

Novy Angela Andow
Executive Vice President

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Executive Vice President J Trust Bank sejak 2019.

Sebelumnya, beliau berkarier di PT Bank QNB Indonesia sebagai Treasury Sales Head pada tahun 2014-2015 dengan jabatan terakhir sebagai Head of Treasury PT Bank QNB Indonesia pada 2015-2018. Beliau pernah berkarier di Royal Bank of Scotland sebagai Director Corporate Risk Solution selama periode 2009-2013.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen Unika Atmajaya pada 1994.

Indonesian Citizen, 52 years old, residing in Jakarta. Appointed as Executive Vice President of J Trust Bank since 2019.

Previously, she worked in PT Bank QNB Indonesia as Treasury Sales Head in 2014-2015 with latest position as Head of Treasury of PT Bank QNB Indonesia in 2015-2018. She once worked in the Royal Bank of Scotland as Corporate Risk Solution Director in the 2009-2013 period.

She received Bachelor of Economics degree in Management from Atmajaya University in 1994.

Agung Subagiyo
Executive Vice President

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Executive Vice President J Trust Bank sejak 2019.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Special Asset Management Division Head dan Corporate Secretary Division Head PT Bank JTrust Indonesia Tbk. sejak 2018. Beliau pernah berkarier di PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk sejak 1999 hingga 2017, dengan jabatan terakhir sebagai Deputy Director.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi STIE Indonesia Membangun pada 2007 dan Sarjana Hukum STIH Dharma Andigha Bogor pada 2018. Kemudian, beliau meraih gelar Master of Human Resources Management Universitas Bina Sarana Informasi, Bandung, pada 2011.

Indonesian Citizen, 47 years old, residing in Jakarta. Appointed as Executive Vice President of J Trust Bank since 2019.

Previously, he was the Special Asset Management Division Head and Corporate Secretary Division Head of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. since 2018. He had a career in PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk from 1999 to 2017, with last position as Deputy Director.

He obtained Bachelor of Economics from STIE Indonesia Membangun in 2007 and Bachelor of Laws from STIH Dharma Andigha Bogor in 2018. Then, he received Master of Human Resources Management from Bina Sarana Informasi University, Bandung, in 2011.

Kazuo Shibuya
Executive Vice President

Warga Negara Jepang, 51 tahun.
Diangkat sebagai Executive Vice President J Trust Bank sejak 2019.

Sebelumnya, beliau berkarier di Rakuten Securities, Inc dengan posisi terakhir sebagai Group Manager of Finance & Accounting, Tokyo Office. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang Financial Accounting dan Managerial Accounting (USGAAP, IFRS, dan JGAAP) pada lembaga keuangan. Beliau pernah berkarier di beberapa lembaga keuangan ternama, seperti BNP Paribas Bank, Mizuho Securities, Barclays Bank, dan ABN Amro Securities.

Beliau meraih gelar Bachelor of Arts jurusan International Relations-East Asia, University of Southern California, Amerika Serikat pada 1993 dan Master of Economics-Taxation, Rikkyo University Graduate School, Jepang pada 2005. Beliau memiliki kualifikasi profesional US CPA (Anggota Japan USCPA).

Japanese Citizen, 51 years old.
Appointed as Executive Vice President of J Trust Bank since 2019.

Previously, he worked at Rakuten Securities, Inc with his last position as Group Manager of Finance & Accounting, Tokyo Office. He has more than 20 years of experience in Financial Accounting and Managerial Accounting (USGAAP, IFRS, and JGAAP) mainly in the field of financial institutions. He has worked in a number of well-known financial institutions, such as BNP Paribas Bank, Mizuho Securities, Barclays Bank and ABN Amro Securities.

He obtained Bachelor of Arts degree majoring in International Relations-East Asia, University of Southern California, United States in 1993 and a Master of Economics-Taxation, Rikkyo University Graduate School, Japan in 2005. He has professional qualification US CPA (Member of Japan USCPA).

PROFIL EXECUTIVE VICE PRESIDENT
EXECUTIVE VICE PRESIDENT'S PROFILES

Rayendra Prasetya
Executive Vice President

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Executive Vice President pada 2019.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Chief Management Officer Indosurya Group dan Chief Management Officer di Tzu Chi Foundation pada 2018 hingga awal 2019. Memiliki pengalaman di bidang human capital development selama 35 tahun.

Beliau mengawali karier sebagai Corporate Personnel and Legal Affairs Manager PT Sac Nusantara pada tahun 1983-1990, Manufacturing Personnel Manager PT Gunung Sewu Pratama (1990-1991), Division Personnel Manager - Packaging PT Indofood Sukses Makmur Tbk (1991–1994), Head of Corporate Human Resources Development PT Aneka Kimia Raya Tbk (1994–2000), sebelum bergabung dengan PT Securicor Indonesia sebagai GM Human Resources (2000-2001). Kemudian, beliau menjabat sebagai Direktur Human Resources di sejumlah perusahaan, seperti PT Heinz ABC Indonesia (2001-2007), PT Karya Megah Adijaya (2007-2010), Kanzen Group (2007-2010), dan Agung Sedayu Group (2010-2016). Selanjutnya, beliau berkarier di PT Suryamas Dutamakmur Tbk sebagai Chief Management Officer pada tahun 2016-2017.

Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Parahyangan pada 1993, Magister Manajemen - Human Resources Management STIE Jakarta pada 1997, Magister Hukum di Universitas Padjadjaran jurusan Magister Hukum pada 2003, dan Doktor di Universitas Padjadjaran jurusan Hukum Bisnis pada 2019.

Indonesian Citizen, 60 years old, residing in Jakarta. Appointed as Executive Vice President since 2019.

Previously he worked as Chief Management Officer in Indosurya Group and Chief Management Officer in Tzu Chi Foundation from 2018 to early 2019. He has 35 years of experience in human capital development.

He started his career as Corporate Personnel and Legal Affairs Manager of PT Sac Nusantara in 1983-1990, Manufacturing Personnel Manager of PT Gunung Sewu Pratama (1990-1991), Division Personnel Manager - Packaging of PT Indofood Sukses Makmur Tbk (1991–1994), Head of Corporate Human Resources Development of PT Aneka Kimia Raya Tbk (1994–2000), before joining PT Securicor Indonesia as GM Human Resources (2000-2001). Then, he became Human Resources Director in several companies, including PT Heinz ABC Indonesia (2001-2007), PT Karya Megah Adijaya (2007-2010), Kanzen Group (2007-2010), and Agung Sedayu Group (2010-2016). He then served as Chief Management Officer in PT Suryamas Dutamakmur Tbk in 2016-2017.

He completed Bachelor of Laws from the Parahyangan University in 1993, Master's in Management - Human Resources Management from STIE Jakarta in 1997, Master's of Laws from the Padjadjaran University in 2003, and Doctorate in Business Laws from the Padjadjaran University in 2019.

PROFIL ANGGOTA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Member of Committees under the Board of Commissioners Profile

Komite Audit | Audit Committee

Mahdi Mahmudy
Ketua Komite Audit (menjabat sejak 23 Desember 2019)
Chairman of the Audit Committee (appointed since 23 December 2019)

Lihat Profil Dewan Komisaris
See Profile of the Board of Commissioners

Bambang Setyoko
Sekretaris merangkap Anggota Komite Audit |
(Secretary and Member of Audit Committee)

Sutirta Budiman
Anggota Komite Audit | Member of the Audit Committee

Lihat Profil Dewan Komisaris
See Profile of the Board of Commissioners

Amalia Setyanti Lestari
Anggota Komite Audit | Member of the Audit Committee

Bambang Setyoko
Anggota
Member

Warga Negara Indonesia, 62 tahun.

Berlatar belakang pendidikan Akademi Uang & Bank Yogyakarta (1975-1978) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK Jakarta jurusan Ekonomi Manajemen. Beliau memiliki pengalaman bekerja di Bank Indonesia sejak 1979 dengan berbagai posisi dan penempatan, seperti Makassar, Bandar Lampung dan New York. Posisi terakhir sebagai Assistant of Director Foreign Debt Settlement Division Bank Indonesia pada 2013.

Beliau sempat berkarier sebagai Head of GE & HRD Division PT Fakar Mekar Indah (2013-2014) dan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Resona Perdania (2014-2018). Beliau memiliki sertifikasi Manajemen Risiko (level 1-4) dan Perbankan Syariah.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. No. 23.13/S. Kep-Dir-HCGD/JTRUST/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019, beliau diangkat sebagai Sekretaris merangkap Anggota Komite Audit dari Pihak Independen dan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen.

Indonesia Citizen, 62 years old.

With educations in Yogyakarta Bank & Finance Academy (1975-1978) and IBEK Economics Academy Jakarta in Management. He had worked in Bank Indonesia since 1979 with various placements and positions, including in Makassar, Bandar Lampung, and New York. His last position was as the Assistant of Director Foreign Debt Settlement Division Bank Indonesia in 2013.

He also worked as Head of GE & HRD Division in PT Fakar Mekar Indah (2013-2014) and Member of Audit Committee and Risk Oversight Committee in PT Bank Resona Perdania (2014-2018). He has Risk Management certificate (level 1-4) and Sharia Banking certificate.

According to PT Bank JTrust Indonesia Tbk. No. 23.13/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/XII/2019 Board of Directors Letter dated 23 December 2019, he was appointed as Secretary and Member of Audit Committee from Independent Party and as Member of Risk Oversight Committee from Independent Party.

PROFIL ANGGOTA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
MEMBER OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

Amalia Setyanti Lestari
Anggota
Member

Warga Negara Indonesia, 57 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi, jurusan akuntansi, dari Universitas Indonesia pada 1988. Memiliki 12 tahun pengalaman kerja di dunia konsultasi dan 18 tahun di dunia perbankan. Sebagai Head of Internal Audit dan Audit Manager for Corporate Banking & Head Office Function (2007-2009), sebagai Head of Compliance pada PT Bank Rabobank International Indonesia (2010-2013) dan sebagai TS Compliance dan Money Laundering Reporting Officer pada JP Morgan Chase Bank & Co (2013-2015). Beliau pernah menjabat sebagai anggota independen Komite Audit dan anggota independen Komite Pemantau Risiko & Compliance pada PT Bank Rabobank International Indonesia periode 2016-2018.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. No. 23.13/S. Kep-Dir-HCGD/JTRUST/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019, beliau diangkat sebagai Anggota Komite Audit dari Pihak Independen dan sebagai Sekretaris merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen.

Indonesian Citizen, 57 years old.

Graduated as Bachelor of Economics in accounting from the University of Indonesia in 1988. Having 12 years of experience in consulting and 18 years of experience in banking. She has worked as Head of Internal Audit and Audit Manager for Corporate Banking & Head Office Function (2007-2009), Head of Compliance in PT Bank Rabobank International Indonesia (2010-2013), and TS Compliance and Money Laundering Reporting Officer in JP Morgan Chase Bank & Co (2013-2015). She previously held position as independent member of Audit Committee and independent member of Compliance & Risk Oversight Committee in PT Bank Rabobank International Indonesia for the 2016-2018 period.

According to the PT Bank JTrust Indonesia Tbk. No. 23.13/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/XII/2019 Board of Directors Letetr dated 23 December 2019, he was appointed as Member of Audit Committee from Independent Party and as Secretary and Member of Risk Oversight Committee from Independent Party.

Komite Pemantau Risiko | Risk Oversight Committee

Sutirta Budiman
Ketua merangkap Anggota
Chairman and Member
Lihat Profil Dewan Komisaris
See Profile of the Board of Commissioners

Mahdi Mahmudy
Anggota
Member
Lihat Profil Dewan Komisaris
See Profile of the Board of Commissioners

Nobiru Adachi
Anggota
Member
Lihat Profil Dewan Komisaris
See Profile of the Board of Commissioners

Nobuiku Chiba
Anggota
Member
Lihat Profil Dewan Komisaris
See Profile of the Board of Commissioners

Amalia Setyanti Lestari
Sekretaris dan Anggota
Secretary and Member
Lihat Profil Komite Audit
See Profile of the Audit Committee

Bambang Setyoko
Anggota
Member
Lihat Profil Komite Audit
See Profile of the Audit Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi | Nomination and Remuneration Committee

Mahdi Mahmudy
Ketua
Chairman
Lihat Profil Dewan Komisaris
See Profile of the Board of Commissioners

Nobuiku Chiba
Anggota
Member
Lihat Profil Dewan Komisaris
See Profile of the Board of Commissioners

Pey Fang Ong
Sekretaris merangkap Anggota
Secretary and Member
Lihat Profil Executive Vice President
See Profile of the Executive Vice President

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary Profile

Christiati Elmi Sianipar
Kepala Divisi
Corporate Secretary
Head of Corporate Secretary Division

Warga Negara Indonesia, 51 tahun.

Ditunjuk sebagai Kepala Divisi Corporate Secretary J Trust Bank sejak Agustus 2019. Memiliki pengalaman di industri perbankan selama 26 tahun. Mengawali karier sebagai Section Head of Management Services and Systems PT Asuransi Royal Indrapura sebelum menjajaki dunia perbankan di PT IBJ Indonesia Bank dengan posisi terakhir sebagai Senior Officer Internal Audit Department.

Kemudian, beliau melanjutkan karier di PT Bank Rabobank International Indonesia pada 1997-2006 dengan posisi terakhir sebagai Head of Treasury Operations Corporate Loans and Treasury Department. Beliau bergabung dengan PT DBS Indonesia Bank pada 2006-2009 dan 2010-2018 dengan posisi terakhir Head of Liabilities and Wealth Operations (Vice President). Beliau sempat bekerja sebagai Head of Commercial Loan Operations and Cash Management Operations (Vice President) di PT Bank Barclays Indonesia (2009-2010).

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi pada 1991.

Indonesian Citizen, 51 years old.

Appointed as the Head of Corporate Secretary Division of J Trust Bank since August 2019. Experienced in the banking industry for 26 years. Started her career as Section Head of Management Services and Systems in PT Asuransi Royal Indrapura before moving to banking with PT IBJ Indonesia Bank with her latest position as Senior Officer Internal Audit Department

Then, she pursued her career in PT Bank Rabobank International Indonesia in 1997-2006 with her last position as Head of Treasury Operations Corporate Loans and Treasury Department. She joined PT DBS Indonesia Bank in 2006-2009 and 2010-2018 with her last position as Head of Liabilities and Wealth Operations (Vice President). She worked as Head of Commercial Loan Operations and Cash Management Operations (Vice President) in PT Bank Barclays Indonesia (2009-2010).

She holds a Bachelor of Economics degree from the University of North Sumatra, in accounting, in 1991.

PROFIL KEPALA AUDIT INTERNAL

Profile of internal Audit chairman

Ari Prihadi Atmosoekarto

Kepala Satuan Kerja Audit Internal
Chairman of Internal Audit Unit

Warga Negara Indonesia, berusia 58 tahun.

Menjabat sebagai Kepala SKAI sejak 2019. Memiliki pengalaman di dunia perbankan lebih dari 30 tahun. Selain memiliki latar belakang pendidikan Bachelor Degree in Building Construction & Diploma in Industrial Studies (N.I. - UK), beliau juga memegang sertifikasi profesi internasional CBA, CIA, dan CISA, serta sertifikasi nasional (Manajemen Risiko level 1-4).

Sebelum bergabung dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk., beliau pernah berkarier sebagai Head of Internal Audit Department Sumitomo Mitsui Banking Corporation (2015-2017), Bank BRI Agroniaga (2008-2013) dengan posisi terakhir sebagai Compliance Risk Management & Legal Divisions Head, dan Bank Niaga (1986-2006) dengan jabatan terakhir System & IT Audit Division Head.

Indonesian Citizen, 58 years old.

Holds position as SKAI Chairman since 2019.
Have more than 30 years of experience in banking. He has a Bachelor Degree in Building Construction & Diploma in Industrial Studies (N.I. - UK), as well as holding international profession certificates CBA, CIA, and CISA, and national certificate (Risk Management level 1-4).

Before joining PT Bank JTrust Indonesia Tbk., he had worked as Head of Internal Audit Department in Sumitomo Mitsui Banking Corporation (2015-2017), Bank BRI Agroniaga (2008-2013) with last position as Compliance Risk Management & Legal Divisions Head, and Bank Niaga (1986-2006) with last position as System & IT Audit Division Head.

PETA AREA OPERASIONAL

Operational Area Map

2	**Sumatera Utara** Medan	1	**Jambi** Jambi	1	Depok
2	**Sumatera Selatan** Palembang	1	**Lampung** Bandar Lampung	1	Karawang
1	**Kepulauan Riau** Batam	1	**Banten** Tangerang Selatan	1	Cirebon
1	**Riau** Pekanbaru	16	**DKI Jakarta** Jakarta	1	Bogor
1	**Kepulauan Bangka Belitung** Pangkal Pinang	1	**Jawa Barat** Bandung	1	Cikarang
1	Sungai Liat	1	Bekasi	1	**Jawa Tengah** Semarang

1	Solo
1	Karang Anyar
1	**DI Yogyakarta** Yogyakarta
1	**Jawa Timur** Surabaya
1	Malang
1	**Bali** Denpasar
1	**Kalimantan Timur** Balikpapan
1	Samarinda
1	**Kalimantan Barat** Pontianak
1	**Sulawesi Selatan** Makassar

45

Jaringan Kantor

Office Network

Bank memfokuskan pada revitalisasi neraca keuangan dan penguatan profitabilitas di tengah kondisi bisnis yang menantang, sejalan dengan ekspansi bisnis yang selektif dan perbaikian proses bisnis.

The Bank focuses on revitalizing balance sheet and strengthening probability amid challenging business condition in line with selective business expansion and business process improvement.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

TINJAUAN EKONOMI

Economic Review

Tinjauan Makroekonomi Global dan Nasional

Perekonomian global di tahun 2019 mencapai titik terendah sejak krisis satu dekade lalu akibat dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Laju ekonomi AS dan Tiongkok sama-sama melambat. Selain menurunnya volume perdagangan dunia, kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu berpengaruh terhadap psikologi pelaku pasar, yang cenderung berhati-hati untuk melakukan investasi. Pelemahan ini coba direspons oleh bank sentral dunia dengan memberikan stimulus.

Menurut Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi dunia di 2019 mencapai 2,4%, lebih rendah dari pertumbuhan 3% di 2018 dan merupakan yang terendah sejak krisis 2009. Tidak hanya di negara-negara maju, efek perang dagang juga merambat ke negara-negara berkembang, termasuk di Asia Tenggara. Negara-negara berkembang merasakan pelemahan kinerja investasi dan perdagangan, serta fluktuasi pada nilai tukar mata uang.

Indonesia pun turut merasakan dampak dari volatilitas di perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 tercatat hanya mencapai 5,02%, meleset dari target awal 5,3% dan lebih rendah dari pertumbuhan 5,2% pada tahun 2018. Konsumsi swasta masih menjadi kontributor ekonomi terbesar meski cenderung stagnan, dengan hanya tumbuh 5,04% di tahun 2019. Lemahnya permintaan domestik juga tercermin dari inflasi tahunan 2,72%, yang merupakan level terendah sejak tahun 1999.

Kinerja ekspor terus dibayangi oleh penurunan permintaan dan harga-harga komoditas di pasar internasional. Pada tahun 2019, ekspor Indonesia mengalami kontraksi 0,87% setelah pada tahun sebelumnya tumbuh 6,55%. Impor juga turun, pada tingkat 7,69% dibandingkan pertumbuhan 11,88% di tahun 2018. Selain itu, para pelaku pasar tampaknya memilih berhati-hati mengingat meningkatnya suhu politik nasional menjelang dan pasca pemilihan presiden dan DPR. Investasi hanya mampu tumbuh 4,45% pada tahun 2019, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya 6,64%.

Global and National Macroeconomic Review

The global economy in 2019 dropped to the lowest level since the financial crisis a decade ago due to the impact of trade tensions between the US and China. Economic growth in the US and China both slowed. Declining volume of global trade, as well as uncertain geopolitical conditions impacted the psychology of market players, who became cautious in making investment. Central banks worldwide tried to respond this weaknesses through stimulus.

According to the World Bank, global economic growth in 2019 reached 2.4%, lower than 3% booked in 2018 and the lowest since the 2009 crisis. The trade wars impacted developed economies as well as developing countries, including Southeast Asia. Developing countries suffered weaknesses in trade and investment, as well as currency fluctuations.

Indonesia also suffered the impact of global economic volatility. Indonesia's economic growth in 2019 only reached 5.02%, missing the initial target of 5.3% and lower than 5.2% booked in 2018. Private consumption remained the largest economic contributor despite being relatively stagnant, only growing 5.04% in 2019. The Weak domestic demand was reflected in annual inflation rate of 2.72%, the lowest level since 1999.

Export performance was overshadowed by the decline in demand and price of commodities in the international market. In 2019, Indonesian exports contracted by 0.87%, after growing 6.55% in the previous year. Imports also dropped to 7.69% from 11.88% growth in 2018. Moreover, market players seemed to be cautious considering the rising tensions of domestic politics in the general and presidential elections. Investment only grew 4.45% in 2019, lower than the growth of 6.64% in the previous year.

Untuk mendorong perekonomian, Bank Indonesia berupaya melonggarkan kebijakan moneter dengan empat kali memangkas suku bunga acuan BI-7 *Day Reverse Repo Rate* atau sebanyak total 100 basis poin menjadi 5% per Desember 2019. Untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memitigasi risiko global, Bank Indonesia juga menerapkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Efektivitas bauran kebijakan Bank Indonesia mulai terasa di kuartal terakhir 2019, terutama terhadap kinerja ekspor dan investasi yang mulai berbalik positif.

Volume perdagangan yang menurun membuat defisit transaksi berjalan turun menjadi 2,72% dari PDB, dibandingkan 2,94% pada tahun 2018. Neraca Pembayaran Indonesia juga membaik, mencapai US$4,7 miliar dari defisit 2,94% di tahun sebelumnya. Nilai tukar rupiah menguat 3,58% sepanjang 2019 menjadi Rp13.901 per dolar AS per 31 Desember.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di level 6.229,5 pada penutupan perdagangan 2019, tumbuh 1,7% dibandingkan dengan posisi 6.194,5 pada penutupan perdagangan tahun sebelumnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana untuk menumbuhkan pasar modal dengan mendorong diversifikasi instrumen investasi serta memperkuat tata kelola.

Para pelaku usaha berharap tahun 2020 akan membaik dengan adanya relaksasi aturan perpajakan dan investasi yang akan diatur dalam satu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus (*Omnibus Law*). Dalam APBN 2020, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3%.

Encouraging the economy, Bank Indonesia tried to loosen monetary policy by cutting the BI-7 Day Reverse Repo Rate four times or a total of 100 basis points to 5% per December 2019. To maintain economic stability while mitigating global risks, Bank Indonesia also implemented accommodative macroprudential policies. The effectiveness of Bank Indonesia's policy mix was began to translate in the last quarter of 2019, especially with the positive turnaround in export and investment performance.

Declining trade volume caused current account deficit to decline to 2.72% of GDP, compared to 2.94% in 2018. Indonesia's Balance of Payments also improved, reaching USD4.7 billion from a deficit of 2.94% in the previous year. The rupiah exchange rate rose 3.58% in 2019 to IDR13,901 per US dollar per 31 December.

The Jakarta Composite Index (JCI) was closed at 6,229.5 in the market closing in 2019, growing 1.7% compared to 6,194.5 at the market closing in 2018. The Financial Services Authority (OJK) planned to develop the capital market by boosting investment instrument diversification and strengthening governance.

Market players expected the year 2020 to see improvement with the relaxation of taxation and investment rules merged in an Omnibus Law. In the 2020 State Budget, the government aims for a 5.3% economic growth.

TINJAUAN INDUSTRI PERBANKAN

Banking Industry Review

Tahun 2019 merupakan periode yang menantang bagi industri perbankan nasional. Perlambatan ekonomi dan ketidakpastian yang tinggi berpengaruh signifikan terhadap fungsi intermediasi perbankan, seperti tercermin dari penyaluran kredit yang hanya tumbuh 6,08%, dibandingkan 11,75% pada 2018. Perlambatan kredit terutama dipengaruhi oleh terbatasnya permintaan kredit sejalan dengan kepercayaan pelaku usaha yang belum kuat. Kendati demikian, kualitas penyaluran kredit relatif terjaga, dengan rasio kredit bermasalah bruto (*Non Performing Loan*/NPL) sebesar 2,5%, atau sedikit lebih tinggi dari 2,4% pada 2018.

Year 2019 was a challenging period for the domestic banking industry. Economic slowdown and high uncertainty significantly affected bank intermediation, as reflected in the growth of loan disbursement of 6.08%, compared to 11.75% in 2019. Slow lending was mainly affected by limited loan demand in line with low confidence of business players. Nevertheless, the quality of loans remained under control, with the Non-Performing Loan (NPL) ratio at 2.5%, or slightly higher than 2.4% in 2018.

Meskipun tekanan pasar menguat dan membuat likuiditas mengetat, industri perbankan masih terkendali karena didukung oleh permodalan yang cukup kuat. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) pada 2019 tercatat sebesar 23,4%, sedikit meningkat dari 23% pada 2018. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan tumbuh 6,54%, di atas 6.45% yang dibukukan di tahun 2018. Ini menyebabkan rasio kredit terhadap simpanan (*Loan to Deposit Ratio*/LDR) mencapai 94.43% atau di atas batas atas yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) 92%.

Selaras dengan kinerja kredit, profitabilitas sedikit mengalami penurunan, seperti terlihat dari *Return on Assets* (ROA) bank umum yang turun menjadi 2,47% dari 2,55% pada 2018. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) bank juga mengalami kenaikan, dari 77,86% pada 2018 menjadi 79,39%. Di sisi lain, keuntungan bunga bersih (NIM) mengalami penurunan menjadi 4,91% dari 5,14% pada 2018.

Secara umum, perbankan Indonesia membukukan laba sebesar Rp156,49 triliun di 2019, tumbuh 4,32% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, total aset perbankan bertumbuh 8,21% menjadi Rp8.562,97 triliun dibandingkan dengan total aset pada 2018 yang mencapai Rp7.913,49 triliun.

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh sektor perbankan adalah perkembangan teknologi digital yang menghadirkan alternatif layanan keuangan (*financial technology*/fintech), yang menawarkan layanan pembayaran maupun pendanaan atau *peer-to-peer* (P2P) *lending*. Selain itu, pasar obligasi juga memberikan opsi pendanaan lain bagi korporasi. Pada tahun 2019, penerbitan obligasi oleh korporasi bertumbuh 7,6%, sedangkan jumlah pendanaan oleh fintech meningkat 141,5%.

Prospek ekonomi yang membaik pada kuartal terakhir 2019 membawa harapan positif bagi industri perbankan. Bank Indonesia juga telah melonggarkan kebijakan moneter dengan memangkas suku bunga acuan sebesar 100 bps yang mulai diikuti dengan penurunan suku bunga kredit. Hal ini diharapkan dapat mendukung kinerja bank menjadi lebih baik pada tahun 2020. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis intermediasi perbankan akan tumbuh antara 10-12% pada 2020 dengan tingkat risiko tetap terjaga rendah. Mengacu pada Rencana Bisnis Bank tahun 2020, perbankan nasional menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 10%. Namun hal ini semua belum memperhitungkan dampak dari pandemi COVID-19 yang melemahkan kinerja berbagai bisnis di dunia.

Despite increasing market pressure and tight liquidity, the banking industry was still sturdy with support from strong capital. The Capital Adequacy Ratio (CAR) in 2019 reached 23.4%, slightly higher than 23% in 2018. Meanwhile, Third Party Funds collected by banks grew 6.54%, above 6.45% booked in 2018. This caused the Loan to Deposit Ratio (LDR) to reach 94.43% or above the ceiling stipulated by Bank Indonesia at 92%.

In line with loan performance, profitability slightly dropped, as seen from the Return on Assets (ROA) of commercial banks which declined to 2.47% from 2.55% in 2018. The Cost Efficiency ratio (BOPO) of banks increased, from 77.86% in 2018 to 79.39%. On the other hand, Net Interest Margin (NIM) declined to 4.91% from 5.14% in 2018.

In general, Indonesia's banking sector booked profits of IDR156.49 trillion in 2019, growing 4.32% compared to the same period in 2018. Meanwhile, total banking assets rose 8,21% to IDR8,562.97 trillion compared to total assets in 2018 which reached IDR7,913.49 trillion.

Another challenge faced by the banking sector was the growth in digital technology which created financial services alternative (financial technology/fintech), which offers payment or financing services or peer-to-peer (P2P) lending. Moreover, the bond market also gave another funding option for corporates. In 2019, corporate bond issues grew 7.6%, while total financing by fintech rose 141.5%.

Improving economic prospects in the last quarter of 2019 brought positive hopes to the banking industry. Bank Indonesia has also loosened monetary policy by slashing key policy rates by 100 bps, which have been followed by lower lending rates. This is expected to improve banking performance in 2020. The Financial Services Authority (OJK) was confident that bank intermediation to grow between 10% and 12% in 2020 with low risk levels. Referring to Banks Business Plan for 2020, the domestic banking sector targeted loan growth of 10%. However, all of these have not taken into factor the impact of COVID-19 pandemic which has weakened the performance of many businesses worldwide.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Operational Review by Business Segment

J Trust Bank di tahun 2019 berfokus pada revitalisasi neraca keuangan dan penguatan profitabilitas di tengah kondisi bisnis yang menantang. Ketatnya likuiditas menyebabkan Bank harus bersaing dengan bank-bank yang lebih besar dalam menarik dana pihak ketiga. Di sisi kredit, Bank terus berupaya memperbaiki kualitas kredit dengan meninjau ulang debitur-debitur yang ada, dan bahkan melakukan *exit policy* untuk debitur yang dinilai tidak berkualitas. Hal ini sejalan dengan komitmen Bank untuk mendukung ekspansi bisnis yang selektif dan perbaikan proses bisnis.

Secara keseluruhan, strategi Bank pada tahun 2019 difokuskan pada tiga langkah ini:

a. Ekspansi (*Expand*)
1. Memperbaiki proses, prosedur, dan kebijakan kredit sebagai dasar untuk ekspansi kredit.
2. Bersikap sangat selektif dalam melakukan ekspansi, yang diprioritaskan untuk pembiayaan JTrust Olympindo melalui *joint financing* dan *chanelling*, sehingga dapat tumbuh bersama-sama.
3. Merencanakan pertumbuhan CASA melalui pengembangan produk baru berbasis teknologi, seperti *mobile banking*, *internet banking*, *virtual account, digital banking*.

b. Peningkatan Kualitas Neraca (*Improving Quality of Balance Sheet*)
1. Melakukan revaluasi aset.
2. Mengupayakan penjualan agunan yang diambil alih (AYDA).
3. Menurunkan rasio kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan (*NPL).

c. Penguatan Profit (*Strengthening Profit*)
1. Meningkatkan *fee-based income* melalui pembelian obligasi dengan *rating* A- dan telah membukukan lama selama minimal 3 tahun.
2. Melakukan efisiensi biaya, terutama dengan memaksimalkan tenaga kerja yang ada untuk mencapai kapasitas optimal.

The focus of J Trust Bank in 2019 was to revitalize financial balance sheet and strengthen profitability in the midst of challenging business condition. Tight liquidity prompted Bank to compete with bigger lenders in attracting third-party funds. Bank is also continuously improving its loan quality by reviewing existing debtors, and even carrying out exit policy for debtors who were considered not qualified. These efforts were in line with the Bank's commitment to support selective business expansion and business process improvement.

Overall, the Bank's strategies in 2019 focused on these three parts:

a. Expanding
1. Improving credit process, procedures, and policies as the basis for credit expansion.
2. Being selective in credit expansion, which was prioritized for JTrust Olympindo financing through joint financing and channeling, so both can grow together.
3. Setting up plan to boost CASA growth through development of new technology-based products, such as mobile banking, internet banking, virtual account, and digital banking.

b. Improving Quality of Balance Sheet
1. Conducting asset revaluation.
2. Promoting sales of foreclosed collateral.
3. Lowering Non-Performing Loan (NPL) ratio.

c. Strengthening Profit
1. Increasing fee-based income through purchase of debt papers with 'A-'rating and has period record of at least three years.
2. Conducting cost efficiency, particularly by maximizing existing workforce to reach optimal capacity.

3. Memperkuat *tier 1 dan tier 2 capital* dengan mengoptimalkan pinjaman subordinasi pada *tier 2* dialihkan ke *tier 1 capital*, dan mengupayakan tambahan modal melalui pinjaman subordinasi lain dari investor baru.
4. Perbaikan kinerja keuangan untuk memperoleh *rating* sehingga dapat mengundang investor baru terkait *tier 2 capital.*
5. Membuka suspensi terhadap saham bank, dan memenuhi peraturan *free float* sebesar 7,5%.

J Trust Bank mendefinisikan segmen usahanya menjadi 6 bagian, yaitu:
1. Pendanaan
2. Perbankan Komersil
3. *Small Medium Enterprise*
4. Perbankan Konsumer & *Linkage Business*
5. *Japan & Korean Linkage*
6. Perbankan Korporasi
7. *Treasury* dan Pasar Modal
8. Masing-masing segmen tersebut akan kami jelaskan secara detail di halaman berikut.

PENDANAAN

Pendanaan merupakan upaya Bank balam menyediakan layanan dan solusi keuangan yang komprehensif bagi nasabah, yang mencakup giro, tabungan, deposito, dan lainnya. Berbagai produk perbankan tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik nasabah, serta memperhatikan tingkat risiko dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Inisiatif dan Kinerja 2019

Pada tahun 2019, Bank memperkuat strategi pendanaan dana pihak ketiga melalui peningkatan komposisi dana murah guna menekan *Cost of Fund* (CoF). Salah satunya dengan melakukan penurunan saldo jumbo deposit secara bertahap dengan bunga yang lebih kecil, meningkatkan produk giro dan tabungan berbasis IT seperti layanan *e-channel* yang akan terdiri dari: *internet banking*, *mobile banking*, *virtual account*, *debit online & QR payment*, *JTrust Alert System (e-Notification)*, *Cash Recycle Machine* (CRM), dan lain lain. Fitur tersebut dapat memberikan kemudahan bagi nasabah untuk dapat mengakses rekening mereka, serta memberikan Bank nilai kompetitif dalam bersaing dengan bank-bank lain dalam memanfaatkan teknologi digital untuk bisnisnya.

Bank juga telah Melakukan kerja sama internal antar Divisi terkait untuk tujuan *cross selling,* menjalin kerja sama dengan perusahaan jepang dan asuransi melalui Penguatan *fee-based income* dengan memanfaatkan produk-produk non konvensional seperti ORI, Sukuk Ritel dan *Bancassurance* yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah nasabah dan rasio CASA,

3. Strengthening tier 1 and tier 2 capital by optimizing subordinated debt on tier 2 and shifted them to tier 1, as well as seeking additional capital through other subordinated debt from new investors.
4. Improving financial performance to obtain rating and attract new investors for tier 2 capital.
5. Opening suspension on the Bank's shares and meet free float regulation of 7.5%.

J Trust Bank defines its business segments into six parts:
1. Funding
2. Commercial Banking
3. Small and Medium Enterprises
4. Consumer Banking and Business Linkage
5. Japan & Korean Linkage
6. Corporate Banking
7. Treasury and Capital Markets
8. We will explain about details of each business segments in the following pages.

FUNDING

Funding is the Bank's effort to provide a comprehensive financial service and solutions for customers, which includes demand deposits, savings, deposits, and others. There various banking products are in line with customers' needs and characteristics, as well as pay attention to risk levels and prioritize prudence principles.

Initiatives and Performance in 2019

In 2019, the Bank strengthened third-party funding strategies by increasing the composition of low-cost funds to reduce Cost of Fund (CoF). One of them is by gradually reducing jumbo deposit balances with lower interest rates, increasing information technology-based demand deposits and savings products, such as e-channel services, which consist of: internet banking, mobile banking, virtual account, online debit & QR payment, J Trust Alert System (e-Notification), Cash Recycle Machine (CRM), and others. These features will make it easier for customers to access their accounts, as well as giving the Bank a competitive value in competing against other banks in utilizing digital technology for business.

The Bank also created internal cooperation between related division for cross selling, establishing cooperation with Japanese companies and insurance through strengthening fee-based income by utilizing non-conventional products such as Indonesian Retail Bonds (ORI), retail sukuk, and bancassurance, which are expected to increase the number of customers and

sehingga dapat menurunkan *cost of fund* dan pada akhirnya memperbaiki rasio *Net Interest Margin* (NIM).

Dengan berbagai inisiatif tersebut, pada akhir 2019 Bank mencatat jumlah rekening nasabah mencapai 54.019 rekening, naik dari 47.925 rekening pada tahun 2018. Jumlah dana pihak ketiga yang terhimpun sepanjang tahun 2019 mencapai sebesar Rp12,81 triliun, turun sebesar 3,32% dari perolehan Rp13,25 triliun pada tahun 2018. Penurunan dana tersebut terjadi sebagai bentuk penyesuaian RIM bank terhadap ekspansi kredit yang terbatas sepanjang tahun 2019 dimana bank masih berfokus pada ekspansi bisnis yang cukup selektif dan prudent.

Deposito masih mendominasi sumbangan terhadap dana pihak ketiga, yakni sebesar 85,8% dari total simpanan. Namun, jumlah ini menurun 5,87% menjadi Rp10,98 triliun dari Rp11,67 triliun pada tahun sebelumnya. Kontributor dana pihak ketiga terbesar kedua adalah tabungan, dengan kontribusi sebesar 9,1%. Tabungan mencatatkan pertumbuhan signifikan pada tahun 2019, yakni sebesar 47,56% menjadi Rp 1,16 triliun dari perolehan Rp790,55 miliar pada tahun 2018. Sementara giro membukukan nilai Rp652,86 miliar atau turun 16,9% dari realisasi Rp786,17 miliar pada tahun sebelumnya.

Upaya Bank untuk meningkatkan CASA mulai tampak, seperti tercermin dari pencapaian CASA sebesar 14,2%, dibandingkan 11,9% di tahun 2018. Hal ini dapat tercapai karena penurunan jumlah deposito, dan peningkatan jumlah tabungan yang naik signifikan di tahun 2019.

Rencana, Fokus, dan Strategi 2020

Bank telah mencanangkan strategi jangka menengah untuk memastikan bisnis akan berjalan sesuai ekspektasi dari Grup. Untuk tahun 2020, Bank akan berfokus untuk mendorong penguatan permodalan dan pendanaan pada dana murah dengan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Bekerja sama dengan cabang dalam menyelenggarakan aktivitas promosi dengan target kepada sekolah-sekolah, komunitas, sehingga mendapatkan nasabah baru, menambah jumlah rekening dan meningkatkan volume CASA.
2. Meningkatkan *marketing awareness* agar produk bank lebih dikenal di masyarakat dan pada akhirnya membuka rekening di bank dengan menyelenggarakan *event* seperti konser musik, *fun run* dan lain-lain.
3. Melakukan *cross selling* dalam menawarkan produk yang lain pada nasabah yang telah ada terutama deposan, sehingga nasabah akan berinvestasi pada bank melalui bermacam-macam produk.

CASA ratio, thus reducing cost of funds and improve Net Interest Margin (NIM) ratio.

With these initiatives, the Bank's customer accounts reached 54,019 in 2019, up from 47,925 accounts in 2018. Total amount of third-party funds collected during 2019 was IDR12.81 trillion, down 3.32% from IDR13.25 trillion rupiah recorded in 2018. The fall in the amount of funds occurred as a result of adjustment in Intermediary Macroprudential Ration (RIM) towards limited credit expansion throughout 2019, as banks still focused on selective and prudent business expansion.

Deposits still dominated the amount of third-party funds, contributing around 85.8% of the total. However, the amount was 5.7% lower at IDR10.98 trillion rupiah, compared with IDR11.67 trillion rupiah in 2018. Savings accounted for around 9.1% of total third-party funds. It recorded a significant growth in 2019, rising 47.56% to IDR1.16 trillion from IDR790.55 billion in 2018. Meanwhile, the amount of demand deposits was IDR652,86 billion, down 16.9% from IDR786.17 billion in 2018.

The Bank's efforts to improve CASA started to show some results, as reflected by CASA realization of 14.2% in 2019, compared with 11.9% a year earlier. This can be achieved due to a decrease in the amount of deposits and a significant increase in the amount of savings in 2019.

Plan, Focus, and Strategy in 2020

The Bank has set up medium-term strategies to make sure that business will run according to the Group's expectations. For 2020, the Bank will focus on strengthening capital and financing on low-cost funds with the following strategies:

1. Cooperate with branches in promoting activities targeting schools and communities in order to obtain new customers, add the number of accounts, and increase CASA volume.
2. Increase marketing awareness to make the society more familiar with the Bank's products and lead them to open bank accounts. This can be done by holding events, such as music concert, fun running, etc.
3. Conduct cross selling in offering other products to existing customers, particularly depositors, so they will invest in banks through various products.

4. Melanjutkan *bundling* program, dengan menawarkan kepada deposan produk dana murah namun dengan suku bunga yang masih menarik sehingga diharapkan akan menurunkan suku bunga tertimbang,
5. Memaksimalkan produk *Bancassurance* yakni Simas Investa Optima dengan produk tabungan
6. Berkolaborasi dengan PT JTrust Olympindo Multi Finance (JTO) untuk memasarkan produk bank kepada nasabahnya baik nasabah baru maupun nasabah yang telah ada.
7. Program *Employee Get Customers* yakni karyawan membantu bank untuk mereferensikan calon nasabah dengan mengenalkan produk-produk pendanaan bank.
8. Bekerja sama dengan divisi *loan business* seperti *business linkage*, *commercial*, *Japan linkage* maupun SME dengan memasarkan program EBP (*employee benefit program*) kepada perusahaan debitur.

Selain itu, melihat meningkatknya kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan digital, Bank juga mendorong pengembangan inovasi perbankan digital yang memungkinkan nasabah memperoleh informasi, komunikasi, registrasi pembukaan rekening, transaksi perbankan, penutupan rekening, sampai dengan *financial advisory* meliputi *startup* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowd funding*), remittance, riset keuangan.

Bank juga akan melanjutkan perbaikan CASA melalui penerapan produk baru berbasis teknologi, seperti *mobile banking*, *virtual account*, dan *financial inclusion*, serta berkolaborasi dengan JTO untuk pembukaan rekening dengan *dealer* dan konsumen JTO.

PERBANKAN KOMERSIAL

Perbankan Komersial di Bank memberikan pembiayaan yang bersifat komersial, yang menyasar pasar segmen korporasi.

Inisiatif dan Kinerja 2019

Bank berupaya untuk memiliki sebuah fondasi yang kuat untuk bisnis ke depannya. Karena itu pada tahun 2019 Bank melakukan *exit policy* pada debitur-debitur yang dinilai kurang berkualitas dan berada pada kategori *"watchlist"*. Beberapa strategi yang dilakukan bank selama tahun 2019 di antaranya adalah:

- Memberikan pembiayaan selektif kepada *startup fintech company* dengan jaminan *fixed asset*.

4. Continue bundling program by offering low-cost fund products to depositors , but with attractive interest rates, which is expected to lower weighted interest rates.
5. Maximize Bancassurance product Simas Investa Optima with savings products.
6. Collaborate with JTrust Olympindo (JTO) to market banking products to new and existing customers.
7. Implement a program called Employee get customer where employees help Bank referring potential customers by introducing the Bank's funding products.
8. Collaborate with business loan division, such as business linkage, commercial, Japan linkage, or small and medium enterprises (SMEs) by marketing employee benefit program (EBP) to debtor companies.

In addition, seeing increasing public needs for digital banking services, the Bank also encourage development of digital banking innovations that enable customers to obtain information, communication, account opening registration, banking transactions, account closures, and financial advisory including payment start-up, lending, personal finance, retail investment, crowd funding, remittance, and financial research.

The Bank will also continue CASA improvement through new technology-based products, such as mobile banking, virtual account, and financial inclusion, as well as collaborate with JTrust Olympindo (JTO) to open accounts with JTO dealers and consumers.

COMMERCIAL BANKING

Commercial Banking at the Bank provides commercial financing, targeting the corporate segment market.

Initiative and Performance in 2019

The Bank strived to have a strong foundation for business going forward. Therefore, in 2019, the Bank implemented an exit policy on debtors who were less qualified and under the "watchlist". Several strategies undertaken by the Banks in 2019 were:

- Providing selective financing to startup fintech companies with fixed assets as collateral.

- Meningkatkan *fee based income* dari klien yang mempunyai pertumbuhan usaha yang baik untuk aktif menggunakan layanan Bank sebagai salah satu pilihannya, baik dalam transaksi valas, transaksi perbankan, dan lainnya.
- Mengembangkan *value chain* bagi *existing clients* guna memudahkan dalam mengembangkan portofolio dan berbasis pada industri/usaha yang baik bagi Bank.
- Melakukan pemantauan secara dini terhadap kewajiban debitur dan melakukan kunjungan rutin terhadap aktivitas usaha debitur sehingga dapat diketahui perkembangan usaha yang ada.

Hingga akhir 2019, proporsi pinjaman komersial mencapai sebesar Rp2,61 triliun atau 41,8% dari pinjaman secara keseluruhan. Porsinya jauh berkurang dari realisasi pinjaman komersial tahun 2018 yang mencapai Rp5,75 triliun atau 56,0% dari total pinjaman namun dengan kualitas kredit yang lebih baik.

Rencana, Fokus, dan Strategi 2020

Pengembangan bisnis pemberian fasilitas kredit di segmen komersial akan dilakukan dengan peningkatan pelaksanaan prinsip kehati-hatian melalui strategi sebagai berikut di bawah ini.

- Pembiayaan diutamakan kepada Grup Usaha Besar dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki reputasi baik dalam kelompok industrinya
- Pembiayaan selektif kepada *startup fintech company* dengan jaminan *fixed asset*.
- Meningkatkan *fee based income* dari klien yang mempunyai pertumbuhan usaha yang baik untuk aktif menggunakan layanan Bank sebagai salah satu bank pilihannya, baik dalam transaksi valas, *transaction banking* dan lainnya.
- Mengembangkan *value chain* bagi *existing clients* yang memudahkan dalam mengembangkan portofolio dan berbasis pada industri/usaha yang baik bagi Bank.
- Melakukan pemantauan secara dini terhadap kewajiban debitur dan melakukan kunjungan rutin terhadap aktivitas usaha debitur sehingga dapat diketahui perkembangan usaha yang ada.

SMALL MEDIUM ENTERPRISE

Small Medium Enterprise (SME) atau UKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang mengalami pertumbuhan semakin pesat di era digital. Sektor usaha—yang relatif tahan terhadap guncangan ekonomi dan memiliki tingkat risiko kredit yang lebih kecil—masih tetap dipertahankan dalam ekspansi kredit bank walaupun dalam porsi terbatas.

- Increasing fee-based income from clients who have good business growth to actively use the Bank's services as one of their choices in foreign exchange transactions, banking transactions, and others.
- Developing value chains for existing clients to make it easier to develop portfolios that based on industries / businesses that are good for the Bank.
- Conduct early monitoring of the debtor's obligations and conduct regular visits to the debtor's business activities to get a glimpse of the debtor's business development.

At the end of 2019, the proportion of commercial loans reached IDR2.61 trillion or around 41.8% of the total loans. The portion is far less than the realization of commercial loans in 2018, which reached IDR5.75 trillion or 56.0% of total loans, but with better credit quality.

Plan, Focus and Strategy in 2020

Business development in providing loan facilities for commercial segment will be carried out by implementing prudent principles through the following strategies:

- Financing is prioritized for Large Business Groups and State-Owned Enterprises (SOEs) that have a good reputation in their respective industries.
- Selective financing for startup fintech companies with fixed assets as collateral.
- Increase fee-based income from clients who have good business growth to actively use the Bank's services as one of the banks of choice, both in foreign exchange transactions, banking transactions and others.
- Develop a value chain for existing clients that makes it easy to develop portfolios that based on industry / business that is good for the Bank.
- Conduct early monitoring of the debtor's obligations and conduct regular visits to the debtor's business activities so that it can know the development of existing businesses.

SMALL MEDIUM ENTERPRISE

Small Medium Enterprise (SME) is the core of national economy, which is growing rapidly in the digital era. The business sector that is relatively resilient against economic shock still becomes a priority of the Bank's productive loan targets because it has lower level of credit risk it is still maintained in bank credit expansion even in a limited portion.

Inisiatif dan Kinerja 2019

Penyaluran kredit produktif kepada UKM skala bisnis ritel dilaksanakan terbatas dengan harapan agar kredit semakin bertumbuh dan berkualitas. Dalam rangka meningkatkan kinerja SME di tahun 2019, Bank melakukan berbagai inisiatif sebagai berikut:

- Pengembangan program bisnis mikro SME, *trade finance*, dan *treasury*.
- Mengembangkan produk program *consumer banking*.
- Optimalisasi infrastruktur.
- Merekrut tenaga pemasaran (*sales force*) untuk menunjang bisnis ritel.
- Fokus pada pertumbuhan dan ekspansi SME dan *retail banking*.
- Terus menjaga pertumbuhan dan kualitas bisnis yang lebih *prudent*.
- Implementasi aktivitas investigasi lapangan untuk segmen yang dikategorikan berisiko tinggi.
- Kebijakan deviasi *leverage* dan *override monitoring*.
- Ekspansi SME *Loan* termasuk rencana kerja sama dengan Bank Daerah di Jepang yang memfasilitasi perusahaan Jepang skala SME yang akan berinvestasi di Indonesia.

Sepanjang tahun 2019, Bank menyalurkan kredit SME sebesar Rp302,4 miliar, turun dari Rp935,13 miliar di tahun 2018. Hal ini disebabkan karena bank lebih selektif dalam memberikan penyaluran kredit SME dengan mempertimbangkan prospek debitur yang memiliki kinerja keuangan yang baik dengan penjualan atau pendapatan yang stabil, serta mempunyai prospek usaha yang baik dan memiliki nilai jaminan yang memadai.

Rencana, Fokus, dan Strategi 2020

Bank masih melanjutkan ekspansi terbatas pada sektor UKM untuk mendorong kredit SME dengan fokus pada para pengusaha di segmen usaha kecil dan menengah yang berlokasi di area perkotaan besar, seperti: Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, Batam, Makassar serta kota–kota lain dimana jaringan kantor Bank berada. Berikut ini beberapa strategi yang akan dilakukan di tahun 2020 untuk kredit SME:

1. Program "Back to J Trust Bank" dimana dalam program ini pihak Bank mentargetkan para debitur yang pernah menjadi nasabah J Trust Bank, untuk dapat kembali menjadi debitur J Trust Bank.
2. Memanfaatkan jaringan kantor cabang Bank yang ada namun tidak memiliki Team Marketing Lending, untuk mendapatkan prospek calon debitur.
3. Memaksimalkan penggunaan plafon fasilitas kredit yang tidak terpakai dari para debitur eksisting.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Team Credit Review untuk mempercepat proses kredit.

Initiatives and Performance 2019

The distribution of productive loans to SMEs in retail business scale is limited on hope that loans will keep growing and becoming more qualified. In order to improve the performance of SMEs in 2019, the Bank undertook various initiatives as follows:

- Developing SME micro business programs, trade finance, and treasury.
- Developing consumer banking program products.
- Optimizing infrastructure.
- Recruiting sales force to support the retail business.
- Focusing on growth and expansion of SMEs and retail banking.
- Maintaining more prudent business growth and quality.
- Implementing field investigation activities for segments categorized as high risk.
- Implementing leverage deviation policy and override monitoring.
- Expanding SME Loan expansion, including plan to cooperate a Regional Bank in Japan to facilitate SME-scale Japanese companies that will invest in Indonesia.

Throughout 2019, the Bank extended SME loans amounting to IDR302.4 billion, falling from IDR935.13 billion in 2018. This happened as the Bank was more selective in providing loan to SMEs by considering the prospect of debtors who have good financial performance with sales or income stable, and has a good business prospect and has an adequate guarantee value.

Plan, Focus and Strategy 2020

The Bank continues its limited credit expansion in SME industry in order to disburse loans that focus on entrepreneurs in small and medium business segment located in big cities, such as: Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, Batam, Makassar and other cities where the Bank's office network is located. Following are some of the strategies that will be carried out in 2020 for SME credit:

1. Launching "Back to JTrust Bank" program, where the Bank targets debtors who used to be customers of Bank J Trust, to become debtors of Bank J Trust again.
2. Utilizing the Bank's existing branch network that does not have Marketing Lending Team, to get prospective debtors.
3. Maximizing the use of unused credit facility ceilings from existing debtors.
4. Improving coordination with the Credit Review Team to speed up credit process.

5. Pembuatan *Risk Acceptance Criteria* yang mudah dimengerti sehingga dapat menjadi panduan bagi Team Bisnis.
6. Mendorong nasabah untuk secara aktif menggunakan rekening J Trust Bank mereka untuk transaksi keuangan mereka dengan cara lebih aktif memberikan penjelasan kelebihan *mobile* dan *internet banking*.
7. Untuk meningkatkan profitabilitas melalui peningkatan pendapatan *fee base*, pihak bisnis akan secara lebih aktif menawarkan produk simpanan dan produk non pinjaman/jasa perbankan lainnya seperti transaksi *forex*, *Trade Finance*, *payroll*, *employee benefit program*, produk *funding* dan juga *bancassurance.*
8. Melakukan pembiayaan pada BPR yang akan membiayai UKM-UKM lokal di daerahnya.

PERBANKAN KONSUMER & *LINKAGE BUSINESS*

Perbankan Konsumer & *Linkage Business* mencakup pemberian kredit untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi kepada nasabah melalui pembiayaan rumah, kendaraan, dan lain lain.

Inisiatif dan Kinerja 2019

Dalam rangka meningkatkan kinerja perbankan konsumer & *Linkage Business*, Bank di tahun 2019 melakukan berbagai inisiatif strategis sebagai berikut:

PERBANKAN KONSUMER

- Kerja sama dengan koperasi/perusahaan untuk kesejahteraan karyawan melalui program EBP dengan penambahan 30 rekan baru di akhir Desember 2019.
- Memaksimalkan pemasaran produk kepemilikan rumah pertama kepada nasabah baru.
- Melakukan program *Take Over* atas fasilitas KPR dari Bank lain.
- Melakukan penambahan sekitar 10 *account officer* yang akan ditempatkan di beberapa cabang seperti Jabodetabek, Surabaya, Solo dan Semarang.
- Mengembangkan kerja sama dengan *FinTech company* (*chanelling program*) untuk penyaluran kredit konsumer dan multiguna sehingga memperluas penetrasi pasar baru di segmen pembiayaan konsumer.
- Pengembangan infrastruktur IT yaitu percepatan implementasi LOS (*Loan Originated System*) untuk penyederhanaan dan mempercepat proses dan pencairan kredit.
- Menambah kemitraaan pengembang sebanyak 4 kemitraan baru dengan pengembang terkemuka dan memiliki *track record* yang bagus di sektor perumahan untuk tahun 2019.

5. Making Risk Acceptance Criteria that are easy to understand so it could become guidance for the Business Team.
6. Encouraging customers to actively use their PT Bank JTrust account for financial transactions by explaining the advantages of mobile and internet banking.
7. Increasing profitability through higher fee-based income, in which businesses division will be more active in offering savings and non-loan products/ other banking services such as forex transactions, Trade Finance, payroll, employee benefit programs, product funding and bancassurance.
8. Providing financing for rural banks(BPR) that will finance local SMEs in the area.

CONSUMER BANKING & BUSINESS LINKAGE

Consumer Banking & Business Linkage include lending to meet consumption needs through loans for housing, vehicles, and others.

Initiative and Performance in 2019

In order to improve the performance of consumer banking & Linkage Business, the Bank in 2019 undertook various strategic initiatives as follows:

CONSUMER

- Developing cooperation with cooperatives/ companies for employees' welfare through the EBP program with the addition of 30 new partners at the end of December 2019.
- Maximizing the marketing of first home ownership products to new customers.
- Conducting Take Over program for housing loan facilities from other banks.
- Adding about 10 account officers who will be placed in several branches such as Greater Jakarta, Surabaya, Solo and Semarang.
- Developing cooperation with FinTech company (channeling program) for consumer and multipurpose lending to expand new market penetration in the consumer financing segment.
- Developing IT infrastructure by implementing LOS (Loan Originated System) to simplify and accelerate the process and disbursement of credit.
- Adding partnetships with 4 leading real estate developers that have good track record in the housing sector for 2019.

- Meningkatkan kompetensi dan *skill* SDM kredit dengan mengikutsertakan dalam *training* yang berkelanjutan.

Melalui berbagai inisiatif dan strategis tersebut, perbankan konsumer belum berhasil meningkatkan saldo pinjaman konsumer sehingga turun 13,6% menjadi Rp506,96 miliar ditahun 2019, dari Rp586,81 miliar di tahun 2018.

LINKAGE BUSINESS

Bank akan menyalurkan kredit kepada debitur multifinance dan BPR secara selektif yakni dengan kriteria sebagai berikut:

Segmen *Multifinance*:

- Perusahaan *multifinance* yang dimiliki oleh bank sehingga pendanaan perusahaan lebih kuat dan didukung oleh bank tersebut sehingga relatif aman.
- Perusahaan *multifinance* yang dimiliki oleh grup besar yang relatif lebih aman karena kelangsungan usaha akan didukung oleh grup.
- Perusahaan *multifinance* yang dimiliki oleh Jepang atau Korea, karena kepemilikan asing akan didukung oleh pemegang saham atau *owner* yang memiliki komitmen tinggi dalam kelangsungan usaha perusahaan

Segmen BPR:

- Penyaluran kredit kepada BPR akan diprioritaskan kepada BPR yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Pemda) karena relatif didukung oleh pemodal yang kuat.
- BPR yang melakukan kredit melalui model gramin, sehingga BPR tersebut lebih aman, mengingat kepastian pembayaran dari debiturnya relatif lebih tinggi
- Diprioritaskan kepada BPR yang memiliki aset besar yakni memiliki aset lebih besar dari Rp300 miliar sehingga diversifikasi pendanaan akan lebih baik yakni dari banyak bank sebagai alternatif pembiayaan.

Melalui berbagai inisiatif dan strategis tersebut, perbankan *Linkage Business* berhasil meningkatkan saldo pinjamannya menjadi Rp2,4 triliun ditahun 2019, meningkat 73,2% dari Rp1,39 triliun di tahun 2018.

Rencana, Fokus, dan Strategi 2020

Bank akan terus meningkatkan kinerja perbankan konsumer dan *Linkage Business* pada tahun 2020 dengan melanjutkan sejumlah rencana, fokus, dan strategi yang masih sesuai dengan strategi tahun lalu sebagai berikut:

- Improving the competence and skills of human resources in credit division by taking then it participate in a training.

Through these various initiatives and strategies, consumer banking has not succeeded in increasing the balance of consumer loans, which fell by 13.6% to IDR506.96 billion in 2019 from IDR586.81 billion in 2018.

BUSINESS LINKAGE

The bank will selectively extend credit to multifinance and rural banks, with the following criteria:

Multifinance Segment:

- Multi-finance companies owned by banks as they have stronger funding and were supported by banks so it is relatively safe.
- Multi-finance companies owned by large groups as they were relatively safer because business continuity will be supported by groups.
- Multi-finance companies owned by Japan or Korea, because foreign ownership will be supported by shareholders or owners who have high commitment in the company's business continuity

Rural Banks Segment:

- Lending to rural banks will be prioritized to the banks owned by local governments (Pemda) because they are relatively supported by strong investors.
- Rural banks that disbursed loan through gramin model to make them safer as payment certainty from its debtors was relatively higher.
- Rural banks that have large assets, which is greater than IDR300 billion, so that funding diversification will be better, namely from many banks as an alternative financing.

Through various initiatives and strategies, Business Linkage was succeeded in increasing its loan balance to IDR2.4 trillion in 2019, an increase of 73.2% from IDR1.39 trillion in 2018.

Plan, Focus and Strategy 2020

The Bank will continue to improve the performance of consumer banking and Linkage Business in 2020 by continuing with a number of plans, focus, and strategies that are still in line with last year's strategy as follows:

- Kerja sama dengan koperasi/perusahaan untuk kesejahteraan karyawan melalui program EBP.
- Memaksimalkan pemasaran produk kepemilikan rumah pertama kepada nasabah baru.
- Melakukan program *Take Over* atas fasilitas KPR dari Bank lain.
- Mengembangkan kerja sama dengan *FinTech company* (*chanelling program*) untuk penyaluran kredit *consumer* dan multiguna sehingga memperluas penetrasi pasar baru di segmen pembiayaan *consumer*.
- Melakukan pembiayaan terhadap Perusahaan *multifinance* yang dimiliki oleh bank sehingga pendanaan perusahaan lebih kuat dan didukung oleh bank tersebut sehingga relatif aman.
- Melakukan pembiayaan terhadap Perusahaan *multifinance* yang dimiliki oleh grup besar yang relatif lebih aman karena kelangsungan usaha akan didukung oleh grup
- Melakukan pembiayaan terhadap Perusahaan *multifinance* yang dimiliki oleh Jepang atau Korea, karena kepemilikan asing akan didukung oleh pemegang saham atau *owner* yang memiliki komitmen tinggi dalam kelangsungan usaha perusahaan.

PERBANKAN KORPORASI

Bank melakukan ekspansi kredit terbatas pada segmen perbankan korporasi dan hanya menjaga hubungan baik dengan mitra-mitra strategis, sambil terus memperbaiki kualitas kredit dari debitur-debitur eksisting melalui strategi inti:

Bertumbuh
Mendukung debitur-debitur eksisting yang dapat dikembangkan usahanya dengan bantuan pembiayaan usaha dari Bank. Selain itu, Bank juga dapat memperoleh *referral* dari pemasok maupun pembeli produk debitur. Hal ini dilakukan tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemeliharaan
Memelihara *outstanding* debitur agar dapat selalu memenuhi kewajibannya dan menjaga agar usaha debitur dapat berjalan dengan baik sampai melunasi seluruh kewajiban.

Keluar
Debitur yang memiliki risiko tinggi (*Character, Capacity, Capital, Condition,* dan *Collateral*) serta berpotensi merugikan Bank diharapkan dapat segera melunasi seluruh kewajibannya.

- Developing cooperation with cooperatives / companies for employee welfare through the EBP program.
- Maximizing the marketing of first home ownership products to new customers.
- Continuing Take Over program for housing loan facilities from other banks.
- Developing cooperation with FinTech company (channeling program) for consumer and multipurpose credit distribution to expand new market penetration in the consumer financing segment.
- Providing financing for multifinance companies owned by banks to create stronger corporate funding as it will be supported by banks, which will make it relatively safe.
- Providing financing for multifinance companies owned by large groups, which will be relatively safer because business continuity will be supported by groups
- Providing financing for multifinance companies owned by Japan or Korea, because foreign ownership will be supported by shareholders or owners who have a high commitment to the company's business continuity.

CORPORATE BANKING

The Bank expanded limited credit to corporate banking segment and only maintained good relations with strategic partners, while continuing to improve the credit quality of existing debtors through the core strategy:

Growth
Support existing debtors whose business can be developed with the help of business financing from the Bank. In addition, the Bank can also get referrals from suppliers and buyers of debtor products. This is done without reducing the prudent principles as stated in regulations.

Maintain
Maintaining of outstanding debtors in order to fulfill their obligations and keep the debtor's business running well until paying off all obligations.

Exit
Debtors who have high risk (Character, Capacity, Capital, Condition, and Collateral) and are potentially detrimental to the Bank are expected to immediately pay off all their obligations.

Inisiatif dan Kinerja 2019

Selain dari strategi tersebut, Bank juga melanjutkan beberapa inisiatif sebagai berikut:

- Pengembangan bisnis segmen ini, termasuk tahap pendekatan, diperkuat dengan melibatkan unit *risk* (*four-eyes principle*) untuk mengawal kualitas kredit.
- Memperkuat transaksi perbankan dan menggali potensi bisnis peminjam yang sudah ada dalam rangka meningkatkan *fee based income* dan mengembangkan rantai nilai bisnis (*value chain*) dengan unit bisnis lain.
- Memaksimalkan pengelolaan debitur-debitur yang masuk dalam kategori *watchlist* (debitur kol 2B & 2C), baik yang masih bisa dipertahankan atau yang harus dialihkan.
- Menata organisasi dengan perkembangan bisnis, perbaikan proses, peningkatan sistem dan monitoring serta *quality assurance*. Hal ini akan sangat berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Hingga akhir 2019, pinjaman korporasi turun menjadi Rp157,8 miliar, dengan proporsi pinjaman korporasi menjadi 2,5% dari pinjaman secara keseluruhan. Dibandingkan dengan Rp1,028 triliun di tahun 2018, dengan proporsi 10,03%.

Fasilitas Kredit Korporasi

Bank menyediakan fasilitas kredit yang serupa dengan tahun sebelumnya bagi para pelaku usaha. Adapun fasilitas kredit yang ditawarkan sepanjang tahun 2019 meliputi:

- Fasilitas Modal Kerja, berupa kredit jangka pendek yang diberikan dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
- Fasilitas Investasi, berupa kredit jangka menengah dan jangka panjang yang diberikan dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing untuk pembiayaan pengadaan barang-barang modal untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru maupun *refinancing*, yang pelunasannya bersumber dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai.
- Fasilitas *Non Cash Loan* dari J Trust Bank, berupa fasilitas *Export and Import Advisory*, Produk Ekspor, Produk Impor dan *Trust Receipt, Open Account Financing*, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Bank Garansi dan *Standby LC*. Pemberian kredit kepada perbankan korporasi dan komersial dilakukan secara sangat selektif dan berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

Initiative and Performance in 2019

Aside from this strategy, the Bank also continued the following initiatives:

- Developing the business segment, including the initial stage, is strengthened by involving the unit risk (four-eyes principle) to monitor credit quality.
- Strengthening banking transactions and exploring business potential of existing borrowers in order to increase fee-based income and develop business value chains with other business units.
- Maximizing the management of debtors included in the watchlist category (debtors 2B & 2C), whether it can still be maintained or must be transferred to other parties.
- Managing organizations with business development, process improvement, system improvement and monitoring and quality assurance. This will be closely related to the development of Human Resources.

Until the end of 2019, corporate loans fell to IDR157.8 billion, with the proportion accounted for 2.5% of total loans. This was lower compared to IDR1.028 trillion in 2018, with a proportion of 10.03%.

Corporate Credit Facility

The bank provides credit facilities similar to the previous year for business owners.. The credit facilities offered throughout 2019 include:

- Working Capital Loan facility, in the form of short-term loans provided in Rupiah and foreign currencies to finance working capital. The loan was usually for one business cycle with a maximum term of 1 (one) year.
- Investment Loan facility, which is medium- and long-term loans provided in Rupiah and foreign currencies to finance the procurement of capital goods for rehabilitation, modernization, expansion or establishment of new projects and refinancing, the repayment of which is sourced from the results of operations with financed capital goods .
- Non Cash Loan facilities from J Trust Bank, in the form of Export and Import Advisory facilities, Export Products, Imported Products and Trust Receipts, Open Account Financing, Domestic Documented Credit Letters (SKBDN), Bank Guarantees and LC Standby. Lending to corporate and commercial banks is done very selectively and is guided by the precautionary principle.

Rencana, Fokus, dan Strategi 2020

Untuk tahun 2020, Bank merencanakan untuk tidak meningkatkan kredit korporasi dan hanya menjaga hubungan baik dengan mitra-mitra strategis, sambil terus memperbaiki kualitas kredit dari debitur-debitur eksisting.

TREASURY DAN PASAR MODAL

Perkembangan pasar modal dan pasar obligasi di Indonesia semakin strategis, karenanya Bank berkomitmen untuk menjadi penyedia kebutuhan produk *treasury* utama dan lengkap bagi para nasabah, baik institusi pemerintah dan korporasi ataupun nasabah ritel. Produk dan jasa yang dihasilkan meliputi transaksi *Banknotes*, transaksi Devisa Umum, dan Surat Berharga atau *Fixed Income Securities* (SB/FIS).

Pengembangan segmen usaha *Treasury* dan *Capital Markets* tetap difokuskan pada bisnis ritel, bisnis *linkage*, dan korporasi. Semua ini dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, terutama di tengah kondisi pasar yang bergejolak. Kontribusi yang signifikan untuk segmen ini berasal dari *fee-based income*.

Inisiatif dan Kinerja 2019

Untuk mengembangkan segmen *Treasury* dan *Capital Markets*, pada tahun 2019 Bank melakukan berbagai inisiatif seperti:

- Pemberian fasilitas *Treasury Line* seperti *tom, spot, forward*, dan *swap* untuk nasabah korporasi agar bisa menghasilkan laba bagi Bank serta meningkatkan volume.
- Melakukan kerja sama dengan Divisi Kredit untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah ekspor dan impor yang memiliki fasilitas kredit dari J Trust Bank.
- Melakukan *cross border transaction* seperti *borrowing (collateralized loan*, dan lain-lain) atau penerbitan surat berharga guna menurunkan *cost of fund* dan tidak mengandalkan pendanaan dari deposan tertentu atau individu saja.
- Penerbitan *Promissory Notes* untuk *cross border transaction* untuk memitigasi risiko likuiditas dengan masih tingginya dominasi deposan besar/jumbo. Bank merencanakan untuk melakukan *cross border transaction borrowing* melalui penerbitan surat berharga *Promissory Notes* dengan menarik investasi dana melalui pemegang saham secara bertahap.

Plan, Focus and Strategy 2020

For 2020, the Bank does not have plans to increase corporate credit and will only maintain good relations with strategic partners, while continuing to improve the credit quality of existing debtors.

TREASURY AND CAPITAL MARKETS

The development of the capital market and bond market in Indonesia is becoming more strategic, so the Bank is committed to being a provider of primary and complete treasury products for customers, whether it is the government and corporate institutions or retail customers. Products and services include Banknotes transactions, General Foreign Exchange transactions, and Securities or Fixed Income Securities (SB / FIS).

The development of the Treasury and Capital Markets business segment focused on the retail business, linkage business, and corporation. All of this is done by continuing to prioritize the prudent principle, especially in the midst of turbulent market conditions. Significant contributions to this segment came from fee-based income.

Initiative and Performance 2019

To develop the Treasury and Capital Markets segment in 2019, the Bank carried out various initiatives such as:

- Providing Treasury Line facilities such as toms, spots, forwards, and swaps for corporate customers in order to generate profits for the Bank and increase volume.
- Cooperating with the Credit Division to improve services for export and import customers who have credit facilities from J Trust Bank.
- Conducting cross border transactions such as borrowing (collateralized loans, etc.) or the issuance of securities to reduce the cost of funds and not rely on funding from certain depositors or individuals.
- Issuing Promissory Notes for cross border transactions to mitigate liquidity risk due to high domination of large/jumbo depositors. The bank plans to conduct cross border transaction borrowing through the issuance of promissory notes by gradually attracting investment funds through shareholders.

- Menerbitkan *Promissory Notes* (PN) dan *Medium Term Notes (MTN)*, melakukan *Repo* atau *Reverse Repo* untuk atau dari Sekuritas, mendapatkan dan/atau menyediakan *Banker Acceptance* sebagai sumber pendanaan yang dapat dipergunakan sebagai alternatif sumber pendanaan di luar Dana Pihak Ketiga.
- Pembelian reksadana terproteksi (portofolio tersedia untuk dijual/*available-for-sale*/AFS).

Berbagai inisiatif dan strategi yang dilakukan sepanjang tahun 2019 telah berhasil meningkatkan pendapatan *fee-based income* segmen ini, yang tercatat sebesar Rp96,43 miliar, naik 116,84% dibandingkan dengan perolehan tahun 2018 sebesar Rp44,47 miliar. Hal ini disebabkan kondisi pasar obligasi yang kondusif pada tahun 2019 sehingga meningkatkan pendapatan pada transaksi perdagangan surat berharga.

Rencana, Fokus, dan Strategi 2020

Rencana, fokus, dan strategi Bank pada tahun 2020 dalam mengembangkan segmen usaha *Treasury* dan *Capital Markets* adalah sebagai berikut:

- Menerbitkan *subordinated loan/debt* dalam rangka memperkuat permodalan Bank dan nilai rasio CAR.
- Pembelian reksadana terproteksi (portofolio tersedia untuk dijual/*available-for-sale*/AFS).
- Meningkatkan transaksi obligasi ritel (ORI, obligasi korporasi dan SUKRI) dan menjadi sub agen penjual Surat Berharga Negara Ritel: SUKRI dan ORI.
- Pembelian Reksa Dana Pasar Uang dan NCD untuk melakukan *yield enhancement* untuk dana *idle*.
- Transaksi Domestik NDF dengan Nasabah, meningkatkan profit dan *image* Bank melalui peningkatan volume transaksi valas (DU).

- Issuing Promissory Notes (PN) and Medium Term Notes (MTN), conducting Repo or Reverse Repo for or from Securities, obtain and/or provide Banker Acceptance as an alternative source of funding outside of Third Party Funds.
- Purchasing protected mutual funds (available-for-sale / AFS portfolio).

Various initiatives and strategies carried out during 2019 have succeeded in increasing fee-based income from this segment, which was recorded at IDR96.43 billion, increase by 116.84% compared with the acquisition in 2018 of IDR44.47 billion. This was due to conducive bond market conditions in 2019, which increased income in securities trading transactions.

Plan, Focus and Strategy 2020

The Bank's plans, focus and strategy for 2020 in developing the Treasury and Capital Markets business segments are as follows:

- Issue subordinated loans/debt in order to strengthen the Bank's capital and CAR value ratio.
- Purchase protected mutual funds (available-for-sale/AFS portfolio).
- Increase retail bond transactions (ORI, corporate bonds, and SUKRI) and become sub-agents for selling Retail Government Securities: SUKRI and ORI.
- Purchase Money Market Mutual Funds and NCDs to enhance yields for idle funds.
- Conduct Domestic NDF Transactions with Customers, as well as increase the Bank's profit and image through increasing volume of foreign exchange transactions (DU).

Pendapatan dan Profitabilitas per Segmen Operasi

Income and Profitability by Operating Segment

Keterangan (dalam jutaan Rupiah)	**Retail**	**Kredit Ekspor Impor** **Export Import Loan**	**Treasury**	**Total**	**Description** (in million Rupiah)
2019					
Pendapatan	478.145	857.574	323.070	**1.658.789**	Income
Beban	1.427.332	33.323	186.576	**1.647.231**	Expenses
Laba/Rugi Tahun Berjalan				**11.558**	Profit/Loss for the year
2018					
Pendapatan	(144.683)	1.215.273	277.437	**1.348.027**	Income
Beban	1.440.796	37.954	174.452	**1.653.202**	Expenses
Laba/Rugi Tahun Berjalan				**(305.175)**	Profit/Loss for the year

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Review

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan berikut berpedoman pada Laporan Keuangan Audit untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*An Independent Member Firm of* Crowe) dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam segala hal yang material. Laporan keuangan tersebut disajikan bersama-sama dengan Laporan Tahunan ini.

PEMBAHASAN UTAMA

Keputusan Bank untuk melakukan peninjauan ulang terhadap pinjaman yang telah diberikan dan mengedepankan kehati-hatian dalam menyalurkan kredit baru berimplikasi terhadap penurunan kredit. Secara umum, bank mencatatkan penurunan kredit sebesar 39,4% dari Rp10.129,12 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp6.132,88 miliar. Kendati demikian, Bank mampu menekan jumlah pinjaman bermasalah secara signifikan. Tingkat rasio pinjaman bermasalah (NPL) neto turun menjadi 0,80% dari 3,12% pada tahun 2018. NPL bruto juga berhasil turun drastis, dari 4,26% pada tahun 2018 menjadi 1,49%.

Penurunan juga terjadi pada simpanan nasabah sebesar 3,34% menjadi Rp12.806,23 miliar dari Rp13.248,60 miliar pada tahun 2018. Sejalan dengan itu, *Loan to Funding Ratio* (LFR) turun dari 77,43% pada tahun 2018 menjadi 48,77% pada tahun 2019.

Total aset Bank pada tahun 2019 sedikit berkurang sebesar 3,80% menjadi Rp17.311,59 miliar dari sebelumnya Rp17.823,67 miliar pada tahun 2018. Sejalan dengan penurunan kredit, penghasilan bunga bersih bank juga mengalami penurunan 87,17%, dari Rp391,54 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp50,25 miliar pada tahun 2019.

Penurunan itu diikuti dengan margin bunga bersih (NIM) yang juga turun menjadi 0,39% dari 2,28% pada periode sebelumnya. Walaupun demikian, Bank mampu meningkatkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) menjadi 14,53% dari 14,03% di tahun 2018.

The analysis and discussion of the following financial performance is based on the Audited Financial Statements for the years ended December 31, 2019 and December 31, 2018 audited by the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Associates (an Independent Member Firm of Crowe) with unqualified opinion in all material respects. The financial statements are also presented together with this Annual Report.

MAJOR ANALYSIS

The Bank's decision to review existing disbursed loan and prioritize caution in channelling new loans has resulted in lower loan disbursement. In general, the Bank recorded a decrease in credit by 39.4% from IDR10,129.12 billion in 2018 to IDR6,132.88 billion. However, the Bank was able to reduce its non-performing loans significantly. The net non-performing loan (NPL) ratio decrease to 0.80% from 3.12% in 2018. The gross NPL ratio also decrease from 4.26% in 2018 to 1.49%.

The Company also recorded a 3.34% decreasing of customer deposits to IDR12,806.23 billion from IDR13,248.60 billion in 2018. Therefore, Loan to Funding Ratio (LFR) dropped from 77.43% in 2018 to 48.77% in 2019.

Total Bank assets in 2019 was slightly decrease by 3.80% at IDR17,311.59 billion from IDR17,823.67 billion in 2018. As lending dropped, net interest income decreased by 87.17% from IDR391.54 billion in 2018 to IDR50.25 billion in 2019.

The decrease in net interest income resulted in a decline in Net Interest Margin (NIM) to 0.39% from 2.28% in 2018. Nevertheless, the Bank managed to maintain the Capital Adequacy Ratio (CAR) at 14.53% from 14.03% in 2018.

POSISI KEUANGAN

Aset

Pada tahun 2019, Bank mencatatkan total aset sebesar Rp17.311,60 miliar atau turun 2,87% dari Rp17.823,67 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan kualitas kredit membuat Bank harus melakukan peninjauan ulang terhadap pinjaman yang telah diberikan, dan menahan pemberian kredit baru. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah pinjaman pada tahun 2019 sebesar 39,45% menjadi Rp6.132,88 miliar dari Rp10.129,12 miliar pada tahun 2018.

FINANCIAL POSITION

Assets

In 2019, the Bank managed to record total assets amounting to IDR17,311.60 billion or decrease 2.87% from IDR17,823.67 billion in 2018. The decline in credit quality caused the Bank to review existing loans, and hold new loan disbursements. This affected to the decline in loan amount in 2019 by 39.45% to IDR6,132.88 billion from IDR10,129.12 billion in 2018.

Keterangan dalam Jutaan Rupiah	2019	2018	Description in Million Rupiah
Pinjaman yang Diberikan	6.132.883	10.129.117	Loans
Giro pada Bank Indonesia	496.757	803.124	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	522.802	249.546	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	462.718	649.905	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-Surat Berharga	4.219.862	3.562.738	Marketable securities
Tagihan Akseptasi	23.518	102.188	Acceptances receivables
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	(404.171)	(894.494)	Allowance for Impairment Losses Assets
Aset lainnya	5.857.228	3.221.545	Other Assets
Total Aset	**17.311.597**	**17.823.669**	**Total Assets**

A. Kredit Berdasarkan Segmen Bisnis

Pinjaman yang diberikan merupakan alokasi penempatan dana dalam bentuk fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan sejumlah imbalan dalam bentuk pendapatan bunga dan/atau bagi hasil.

a. Kredit *Consumer Business*

Consumer Business merupakan perantara keuangan untuk pengadaan kebutuhan konsumsi nasabah, seperti fasilitas kepemilikan rumah dan mobil. Secara rinci, saldo portofolio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) selama tahun 2019 dan 2018 sebagai berikut:

A. Credit by Business Segment

Loans which are provided are allocated fund placements in the form of financing facilities to customers with a certain amount of interest in the form of interest income and/or profit sharing.

a. Consumer Business Credit

Consumer Business is a financial intermediary for the procurement of consumer needs, such as home and car ownership facilities. In details, the balance of the Housing Loan (KPR) and Vehicle Loan (KKB) portfolio during 2019 and 2018 is as follows:

Keterangan dalam Jutaan Rupiah	2019	2018	Description in Million Rupiah
Kredit Kendaraan Bermotor	1.342.910	802.131	Vehicle Loans
Kredit Pemilikan Rumah	151.796	268.504	Housing Loans
Total	**1.494.706**	**1.070.635**	**Total**

Portofolio KKB mengalami kenaikan sebesar 67,42%, dari Rp802,13 miliar menjadi Rp1.342,91 miliar. Sedangkan portofolio KPR mengalami penurunan sebesar 43,47% menjadi Rp151,8 miliar dari Rp268,5 miliar di 2018. Produk Consumer Business berkontribusi terhadap pertumbuhan pinjaman Bank pada tahun 2019 sekitar 24%, naik dari 9,48% pada tahun 2018.

The portfolio of working capital loans is the only one increased in the SME and Corporate portfolio segment, with an increase of 67.42% to IDR1,342.91 billion from IDR802.13 billion in 2018. Meanwhile, mortgage portfolio dropped by 43.47% to IDR151.8 billion in 2019 from IDR268.5 billion in 2018. SME and Corporate products contributed 24% to credit growth in 2019, slightly increase from 9.48% in 2018.

b. Kredit *SME* dan *Corporate*
Kredit *SME* dan *Corporate* sebagai penyokong dan perantara keuangan untuk pengadaan kebutuhan modal kerja dan usaha bagi masyarakat industri. Produk kredit tersebut seperti kredit modal kerja, kredit investasi, fasilitas rekening koran, dan lain sebagainya.

b. SME and Corporate Credits
SME and Corporate Credit serve as financial support and intermediaries for the procurement of working capital and business needs for the industrial community. Credit products include working capital loans, investment loans, bank account facilities, and so forth.

Keterangan dalam Jutaan Rupiah	2019	2018	Description in Million Rupiah
Kredit modal kerja	1.503.125	3.018.635	Working capital loans
Kredit investasi	545.316	1.499.699	Investment loans
Pinjaman rekening koran	794.645	1.811.923	Current account loans
Kredit ekspor impor	1.352.981	1.566.546	Export import loans
Lain-Lain	555.218	2.362.252	Others
Total	**4.751.285**	**10.259.055**	**Total**

Portofolio pinjaman modal kerja mengalami penurunan 50,21% di portofolio *SME* dan *Corporate* menjadi Rp1.503,13 miliar dari Rp3.018,64 miliar di tahun 2018. Produk SME dan Corporate memberikan kontribusi bagi pertumbuhan kredit sebesar 24% pada tahun 2019, menurun dari 88,27% pada tahun 2018.

The portfolio of working capital loans decreased 50.21% in the SME and Corporate portfolio segment to IDR1,503.13 billion compared with IDR3,018.64 billion in 2018. SME and Corporate products contributed 24% to credit growth in 2019, slightly down from 88.27% in 2018.

c. Kredit berdasarkan Jenis Mata Uang
Kontribusi kredit dalam mata uang Rupiah menurun 35,97% menjadi Rp5.772,20 miliar dari Rp9.015,24 miliar pada tahun 2018. Penurunan juga terjadi pada kredit dalam bentuk valas sebesar menurun 61,91%, dari Rp1.243,81 miliar menjadi Rp473,79 miliar.

c. Credit by Currency
Rupiah-denominated loans fell 35.97% to IDR5,277.20 billion, compared with IDR9,015.24 billion in 2018. Foreign currency-denominated loans also decreased by 61.91% to IDR473.79 billion from IDR1,243.81 billion in 2018.

Keterangan dalam Jutaan Rupiah	2019	2018	Description in Million Rupiah
Rupiah	5.772.195	9.015.242	Rupiah
Valas	473.796	1.243.813	Foreign Exchange
Total	**6.245.991**	**10.259.055**	**Total**

d. Kredit Menurut Sektor Ekonomi

Kredit berdasarkan sektor ekonomi mengalami penurunan sebesar 39% di tahun 2019, terutama disebabkan oleh penurunan di hampir seluruh sektor industri. Dari empat besar sektor ekonomi yang diberikan kredit, hanya sektor rumah tangga yang mengalami peningkatan 25% menjadi Rp1.900,02 miliar dari Rp1.519,53 miliar di tahun 2018. Sedangkan industri industri pengolahan turun 75% menjadi Rp662,4 miliar dari Rp2.644,45 miliar, perdagangan besar dan eceran turun 54,8% menjadi Rp1.036,45 miliar dari Rp2.292,76 miliar, dan perantara keuangan turun 12,9% menjadi Rp1.086,34 miliar dari Rp1.246,48 miliar.

d. Credit by Economic Sector

Lending based on the economic sector dropped 39% in 2019, mainly due to decline in almost all industrial sectors. All of the top four sectors, only household recorded a 25% increase in lending to IDR1,900.02 billion from IDR1,519.53 billion in 2018. Loan disbursement to the manufacturing sector plunged 75% to IDR662.4 billion from IDR2,644.45 billion. Lending for wholesale and retail trade fell 54.8% to IDR1,036.45 billion from IDR2,292.76 billion, and financial intermediaries dropped 12,9% to IDR1,086.34 billion from IDR1,246.48 billion.

Keterangan dalam Jutaan Rupiah	2019	2018	Description in Million Rupiah
Rumah Tangga	1.906.189	1.519.528	Household
Industri Pengolahan	905.197	2.644.452	Processing Industry
Perdagangan Besar dan Eceran	1.130.698	2.292.760	Wholesaler and Retailer
Perantara Keuangan	1.123.000	1.246.475	Financial Agent
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	126.190	533.739	Transportation, Warehousing and Communications
Konstruksi	336.279	496.438	Construction
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	10.993	41.790	Lifestyle, Social Cultural, Entertainment and Other Individuals
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	348	9.779	Other Individuals
Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman	155.735	611.968	Healthcare Services and Social Activities
Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	403.672	545.537	Real Estate, Rental and Services
Pertambangan	11.387	115.491	Mining
Perikanan	14.999	14.956	Fishery
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	49.821	71.837	Agribusiness, Hunting and Forestry
Jasa Pendidikan	-	510	Education Services
Listrik, Gas dan Air, dan lain-lain	71.483	113.795	Electricity, Gas and Water
Total	**6.245.991**	**10.259.055**	**Total**

B. Kualitas Kredit/NPL

Pada tahun 2019, rasio NPL bruto tercatat sebesar 1,49%, turun signifikan dari 4,26% di tahun 2018. Sementara NPL neto tercatat sebesar 0,80%, yang juga turun drastis dari 3,12% pada tahun 2018. Penurunan NPL sejalan dengan upaya Bank memperbaiki kualitas kredit dan kesehatan neraca keuangan.

Bank telah melakukan peninjauan ulang dari kredit yang ada dan akan terus mengelola secara ketat eksposur debitur korporasi tertentu yang berpotensi menaikkan tingkat NPL.

C. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Bank menggunakan teknik perhitungan dalam Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) nilai aset keuangan secara individual dan kolektif, yaitu sebagai berikut:

- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Individual. Bank melakukan evaluasi kerugian penurunan nilai dan perhitungan pembentukan CKPN aset keuangan kredit secara individual menggunakan teknik *discounted cash flow* (nilai kini estimasi arus kas masa datang) dan *fair value of collateral* (nilai kini dari nilai wajar agunan). Estimasi arus kas masa datang (*discounted cash flow*) bersumber dari ekspektasi penerimaan pokok, bunga dan atau denda, dapat juga bersumber dari penerimaan realisasi hasil klaim jaminan pihak ketiga dan/atau pembayaran ganti rugi dari perusahaan asuransi. Adapun, estimasi arus kas masa datang yang berasal dari ekspektasi penerimaan realisasi agunan (*fair value of collateral*) bersumber dari realisasi penjualan agunan. Aset keuangan kredit yang telah dievaluasi secara individual namun tidak terdapat bukti objektif kerugian penurunan nilai sehingga evaluasi kerugian penurunan nilai dan CKPN dilakukan secara kolektif.
- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kolektif. Perhitungan CKPN kolektif menggunakan metode *roll rates* atau *migration analysis* dengan parameter *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD) berdasarkan data historis bank. Aset keuangan yang telah dievaluasi secara kolektif namun ditemukan dan atau terdapat bukti objektif terjadi kerugian penurunan nilai maka CKPN dinilai secara individual.

B. Credit Quality/NPL

In 2019, gross NPL ratio was recorded decreasing to 1.49% in compared to 4.26% in 2018. Meanwhile, net NPL was also recorded at 0.80%, significantly decrease from 3.12% in 2018. The decline in NPL was in line with the Bank's efforts to improve credit quality and the health of the balance sheet.

The Bank has reviewed existing loans and will continue to manage strictly the exposure of certain debtors who potentially could increase the NPL level.

C. Provision for Impairment Losses (CKPN)

The Bank adopts the techniques of calculating Provision for Impairment Losses (CKPN) of financial assets individually and collectively, as follows:

- Individual Impairment Losses. The Bank evaluates impairment losses and calculates the formation of Provision for Impairment Losses of individual financial credit assets using discounted cash flow techniques and fair value of collateral. Discounted cash flow estimations are derived from the projected income from principal amount, interest and/or fines, which may also be derived from the proceeds of a thirdparty guarantee claim and/or compensation payment from the insurer. While the estimated future cash flows are derived from the projected income of the fair value of collateral from the realization of collateral sales. For financial assets of credit that have been evaluated individually but there is no objective evidence of impairment loss, the evaluation of Provision for Impairment Losses shall be collective.
- Collective Impairment Loss is calculated by using the method of roll rates or migration analysis with Probability of Default (PD) and Loss Given Default (LGD) parameters based on bank historical data. As for financial assets that have been collectively evaluated without objective evidence of impairment loss, the evaluation of impairment losses and CKPN is assessed individually.

Keterangan dalam Jutaan Rupiah	2019 Individual	2019 Kolektif Collective	2018 Individual	2018 Kolektif Collective	Description in Million Rupiah
Rupiah					**Rupiah**
Saldo awal tahun	61.947	66.529	81.429	103.224	Balance at beginning of the year
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan	4.786	(32.338)	105.397	(36.695)	Provision (reversal) during the year
Penghapusbukuan pinjaman	(20.558)	-	(6.805)	-	Written-off loans
Pelunasan dari Klaim Asuransi	-	-	(100.436)	-	Paid Off from Insurance Claim
Pemulihan yang timbul dari *unwinding interest*	7.140	-	(17.638)	-	Reversal arising from unwinding interest
Saldo akhir tahun	53.315	34.191	61.947	66.529	Balance at end of year
Mata uang asing					**Foreign currency**
Saldo awal tahun	1.173	289	2.007	372	Balance at beginning of the year
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan	(11.813)	25.313	5.881	(83)	Provision (reversal) during the year
Selisih perbedaan kurs	10.640	-	(6.715)	-	Exchange rate differences
Saldo akhir tahun	-	25.602	1.173	289	Balance at end of year
Total	**53.315**	**59.793**	**63.120**	**66.818**	**Total**

Meski demikian, Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang dibentuk pada tahun 2019 masih dapat menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pinjaman.

However, Management believes that the provision for impairment losses formed in 2019 still covers the losses that may arise from uncollectible loans.

D. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan alokasi penempatan dana sementara untuk mengoptimalkan kelebihan dana pihak ketiga dan memitigasi risiko likuiditas Bank. Fluktuasi saldo penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain tergantung dari siklus perputaran likuiditas dana dari pihak ketiga. Pada tahun 2019, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain tercatat mengalami penurunan 28,80% menjadi Rp462,72 miliar dari Rp649,91 miliar di tahun 2018.

D. Placement with Bank Indonesia and Other Banks

Placements with Bank Indonesia and other banks represent temporary fund allocation to optimize the excess of third party fund and mitigate the Bank's liquidity risk. Volatility in the balances of placement with Bank Indonesia and other banks depend on the cycle of liquidity of funds from third parties. In 2019, placements with Bank Indonesia and other banks decreased by 28.80% to IDR462.72 billion compared to IDR649.91 billion in 2018.

E. Surat Berharga

Surat berharga merupakan alokasi penempatan dana sementara dalam bentuk surat-surat berharga untuk mengoptimalkan kelebihan dana pihak ketiga dan memitigasi risiko likuiditas Bank. Seperti halnya penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, fluktuasi saldo surat berharga tergantung dari siklus perputaran likuiditas dana dari pihak ketiga. Pada tahun 2019, saldo aset surat berharga naik 18,44% menjadi Rp4.219,86 miliar dari Rp3.562,74 miliar di tahun 2018.

E. Marketable Securities

Marketable Securities represent the allocations of temporary fund placements in the form of securities to optimize the excess of third-party funds and mitigate the Bank's liquidity risk. As with placements with Bank Indonesia and other banks, fluctuations in securities balances depend on the cycle of liquidity of funds from third parties. In 2019, the balance of securities assets increased by 18.44% to IDR4,219.86 billion compared to IDR3,562.74 billion in 2018.

Keterangan dalam Jutaan Rupiah	2019	2018	Perubahan (%) Change (%)	Description in Million Rupiah
Pinjaman yang diberikan	6.245.991	10.259.055	-39,1	Loans
Giro pada Bank Indonesia	496.757	803.124	-38,1	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	522.802	249.546	109,5	Current account with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	462.718	649.905	-28,8	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-Surat Berharga	4.219.862	3.562.738	18,4	Marketable securities
Tagihan Akseptasi	23.518	649.131	-96,4	Acceptances receivables
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	(404.171)	(894.494)	-45,2	Allowance for impairment losses assets
Aset Lainnya	5.856.845	3.323.073	56.7	Other Assets
Total Aset	**17.311.597**	**17.823.669**	**-2,87**	**Total Assets**

Liabilitas

A. Simpanan Nasabah

Simpanan nasabah merupakan dana yang dihimpun dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Pada tahun 2019, Bank membukukan simpanan nasabah sebesar Rp12.806,23 miliar atau menurun 3,34% dari Rp13.248,60 miliar di tahun 2018. Komposisi dana giro turun 17% menjadi Rp652,87 miliar dari Rp786 miliar di tahun 2018, sedangkan tabungan meningkat 47,6% menjadi Rp1.166,53 miliar dari Rp790,54 miliar di tahun 2018. Deposito juga turun 5,87% menjadi Rp10.986,83 miliar menjadi Rp11.671,89 miliar.

Porsi terbesar dari simpanan nasabah adalah deposito yang tercatat sebesar 85,8% dari total simpanan nasabah. Bank berupaya mempertahankan outstanding bersamaan dengan memperbaiki CASA melalui cara menambah nasabah retail yang tentunya dengan tingkat bunga yang lebih rendah sehingga dapat memperbaiki biaya dana secara keseluruhan.

B. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain merupakan penempatan dana oleh bank lain untuk suatu jangka waktu tertentu. Simpanan dari bank lain pada tahun 2019 menurun 3,4% menjadi Rp1.845,99 miliar dari Rp1.911,60 miliar di tahun 2018.

C. Total Liabilitas

Pada tahun 2019, total liabilitas Bank menurun 5,3% menjadi Rp15.637,77 miliar dari Rp16.506,77 miliar di tahun 2018.

Liabilities

A. Deposits from Customers

Deposits from customers represent the fund gathered from customers in the form of demand deposits, savings, and time deposits. In 2019, the Bank managed to maintain total deposits of IDR12,806.23 billion or decrease 3.34% compared to IDR13,248.60 billion in 2018. The composition of demand deposits decreased by 17% to IDR652.87 billion compared to IDR786 billion in 2018, while savings increased 47.6% to IDR1,166.53 billion from IDR790.54 billion. Deposits dropped 5.87% to IDR10,986.83 billion from IDR11.671,89 billion.

The largest portion of customer savings is time deposits amounted for 85.8% of total customer deposits. The Bank tried to maintain outstanding amount along with improving CASA by increasing the number of retail customers with lower interest rates to improve overall cost of fund.

B. Deposits from Other Banks

Deposits from Other Banks represent placements of funds by other banks for a certain period of time. Deposits from other banks in 2019 decreased by 3.4% to IDR1,845.99 billion compared to IDR1,911.60 billion in 2018.

C. Total Liabilities

In 2019, the Bank's total liabilities decreased by 5.3% to IDR15,637.77 billion compared to IDR16,506.77 billion in 2018.

Keterangan dalam Jutaan Rupiah	2019	2018	Perubahan (%) Change (%)	Description in Million Rupiah
Simpanan nasabah	12.806.232	13.248.605	-3,3	Deposits from customers
Giro	652.867	786.173	-17,0	Demand deposits
Tabungan	1.166.534	790.545	47,6	Savings deposits
Deposito	10.986.831	11.671.887	-5,9	Time deposits
Simpanan dari Bank Lain	1.845.988	1.911.604	-3,4	Deposits from other banks
Liabilitas Lainnya	985.551	1.348.557	-26,9	Other Liabilities
Total Liabilitas	**15.637.771**	**16.508.766**	**-5,3**	**Total Liabilities**

Ekuitas

Pada tahun 2019, total ekuitas Bank meningkat 27,3% atau sebesar Rp358,93 miliar menjadi Rp1.673,83 miliar dari Rp1.314,90 miliar pada 2018. Pertumbuhan tersebut antara lain berkat peningkatan komponen ekuitas lain sebesar Rp142,13 miliar dan Surplus Revaluasi Aset Tetap-Neto yang meningkat Rp13,37 miliar.

Equity

In 2019, the Bank's total equity increased by 27.3% or IDR358.93 billion to IDR1,673.83 billion compared to IDR1,314.90 trillion in 2018. The increase in equity was mainly due to an increase in other equity components by IDR142.13 billion and Net Surplus from Revaluation of Fixed Asset, which increased by IDR13.37 billion.

Keterangan dalam Jutaan Rupiah	2019	2018	Perubahan (%) Change (%)	Description in Million Rupiah
Modal ditempatkan dan disetor penuh	12.223.149	12.223.149	-	Issued and fully paid capital
Tambahan Modal Disetor	178.765	178.765	-	Additional paid-in capital
Komponen Ekuitas Lain	495.500	353.375	40,2	Other Components of Equity
Kerugian Aktuarial	(11.096)	(34.602)	(67,9)	Actuarial Loss
Uang Muka Setoran Modal	-	-	-	Advances in Paid-Up Capital
Surplus Revaluasi Aset Tetap - Neto	138.336	124.962	10,7	Revaluation surplus of fixed assets - net
Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual	8.391	(122.032)	(106,9)	Unrealized losses on changes in fair value of available-for-sale securities
Saldo Rugi telah ditentukan penggunaannya	1.002	1.002	-	Deficit Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	(11.360.221)	(11.409.716)	0,4	Deficit Unappropriated
Total Ekuitas	**1.673.826**	**1.314.903**	**27,3**	**Total Equity**

Laba Rugi

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga berasal dari imbal jasa atas kredit yang diberikan, surat-surat berharga, serta penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain. Pada tahun 2019, pendapatan bunga bank turun 20,65% atau sebesar Rp294,57 miliar menjadi Rp1.132,24 miliar dari Rp1.426,81 miliar. Penurunan pendapatan bunga terutama karena berkurangnya pendapatan bunga yang berasal dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp346,36 miliar atau minus 28,67% menjadi Rp861,85 miliar, serta penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang turun 63,53% atau minus Rp4,69 miliar menjadi Rp2,69 miliar.

Profit and Loss

Interest Income

Interest income is derived from fees from loans, marketable securities, and placements with Bank Indonesia and other banks. In 2019, the Bank's interest income decreased by 20.65% or IDR294,57 billion to IDR1,132.24 billion compared to IDR1,426.81 billion. The decrease in interest income was mainly driven by the decrease in interest income from loans by minus 28.67% or IDR346.36 billion to IDR861.85 billion, and Placement with Bank Indonesia and other banks dropped 63.53% or minus IDR4.69 billion to IDR2.69 billion.

Keterangan dalam Jutaan Rupiah	2019	2018	Perubahan (%) Change (%)	Description in Million Rupiah
Pinjaman yang diberikan	861.850	1.208.214	-28,67	Loans
Surat-Surat Berharga	267.701	211.217	26,74	Marketable securities
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	2.692	7.382	-63,53	Placements with Bank Indonesia (BI) and other banks
Jumlah Pendapatan Bunga	**1.132.243**	**1.426.813**	**-20,65**	**Total Interest Income**

a. Pendapatan Bunga Kredit
Pada tahun 2019, pendapatan bunga kredit turun 28,6% atau sebesar Rp346,36 miliar menjadi Rp 861,85 miliar dari Rp1.208,21 miliar. Hal ini disebabkan jumlah pinjaman yang diberikan menurun sebesar 39,1%.

b. Pendapatan Bunga Surat Berharga
Pendapatan bunga surat berharga di tahun 2019 naik 26,74% atau sebesar Rp56,48 miliar menjadi Rp267,7 miliar dari Rp211,22 miliar. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan bunga dari obligasi pemerintah.

c. Pendapatan Bunga Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain
Pendapatan bunga penempatan pada BI dan bank lain di tahun 2018 turun 63,53% atau sebesar Rp4,69 miliar menjadi Rp2,69 miliar dari Rp7,38 miliar.

a. Loan Interest Income
In 2019, loan interest income decreased by 28.6% or IDR346.36 billion to IDR861.85 billion from IDR1,208.21 billion. This was due to the decrease in loans by 39.1%.

b. Marketable Securities Interest Income
Marketable Securities Interest Income in 2019 increased by 26.74% or IDR56.48 billion to IDR267.7 billion compared to IDR211.22 billion. This is due to the increase in interest income from government bonds.

c. Interest Income on Placements with Bank Indonesia and Other Banks
Income from placement with BI and other banks in 2019 was decreased by 63.53% or IDR4.69 billion to IDR2.69 billion from IDR7.38 billion.

Beban Bunga

Beban bunga berasal dari imbal jasa atas simpanan nasabah, fasilitas pinjaman dan surat-surat berharga yang diterbitkan. Pada tahun 2019, beban bunga bank naik sebesar Rp46,7 miliar atau 4,5% menjadi Rp1.081,99 miliar dari Rp1.035,27 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya jumlah deposito, simpanan dari bank lain, tabungan dan surat berharga. Beban bunga untuk giro mengalami penurunan 47,96%, serta provisi dan komisi turun 89,47%.

Interest Expense

Interest expense is derived from fees on customer deposits, loan facilities and marketable securities issued. In 2019, the bank's interest expense increased IDR46.7 billion or 4.5% to 1,081.99 billion compared to IDR1,035.27 billion. The increase was mainly due to the rising amount of time deposits, deposits from other banks, savings, and securities. Interest expense for demand deposits decreased by 47.96% and Provision and commission dropped 89.47%.

Keterangan dalam Jutaan Rupiah	2019	2018	Perubahan (%) Change (%)	Description in Million Rupiah
Deposito Berjangka	851.460	839.129	1,47	Time deposits
Giro	11.513	22.125	-47,96	Demand deposits
Simpanan dari Bank lain	96.104	83.051	15,72	Deposits from other banks
Tabungan	43.334	37.389	15,90	Savings deposits
Provisi dan Komisi	4	38	-89,47	Provision and commission
Surat Berharga	78.858	53.058	48,63	Marketable Securities
Lain-lain	714	482	48,13	Others
Jumlah Beban Bunga	**1.081.987**	**1.035.272**	**4,51**	**Total Interest Expense**

Pendapatan Bunga Bersih

Pendapatan bunga bersih bank di tahun 2019 turun 87% atau sebesar Rp341,29 miliar menjadi Rp50,25 miliar dari Rp391,54 miliar di tahun 2018. Hal ini terkait erat dengan penurunan jumlah kredit *outstanding* di tahun 2019.

Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan non-bunga yang terutama diperoleh dari pendapatan hapus buku. Pada tahun 2019, Bank mencatat pendapatan operasional lainnya meningkat 768% atau sebesar Rp605,33 miliar dari sebelumnya minus Rp78,79 miliar di tahun 2018 menjadi Rp526,55 miliar. Hal ini disebabkan oleh pemulihan dari kredit yang telah dihapus buku dan pendapatan *treasury* dari transaksi devisa umum dan banknotes, serta penjualan agunan.

Beban operasional lainnya merupakan beban selain bunga yang diperoleh dari kegiatan operasional bank mencakup beban gaji dan tunjangan, penyisihan kerugian penurunan nilai, beban umum dan administrasi serta beban lain-lain. Pada tahun 2019, beban operasional lainnya berkurang sebesar 8,5% atau sebesar Rp52,69 miliar menjadi Rp565,24 miliar dari Rp617,93 miliar di tahun 2018. Hal ini terutama disebabkan kenaikan signifikan pemulihan kerugian penurunan nilai, dari minus Rp154,51 miliar menjadi surplus Rp449,05 miliar.

Laba (Rugi) Operasional

Bank berhasil membukukan laba sebesar Rp11,56 miliar pada tahun 2019 setelah sebelumnya merugi Rp305,18 miliar di tahun 2018. Kinerja positif tersebut berkat pendapatan operasional yang meningkat dari hasil pemulihan kerugian penurunan nilai dan keuntungan atas penjualan surat-surat berharga.

Pendapatan dan Beban Non Operasional

Pendapatan dan beban non operasional bank merupakan penerimaan dan pengeluaran bank yang berasal dari kegiatan non operasional bank. Pada tahun 2019, pendapatan non operasional Bank meningkat signifikan sebesar Rp197,95 miliar (1,088%) menjadi Rp216,14 miliar dari Rp18,19 miliar di tahun sebelumnya.

Adapun beban non operasional Bank pada tahun 2018 naik 53% atau sebesar Rp61,58 miliar menjadi Rp178,4 miliar dari Rp116,60 miliar. Kenaikan beban non operasional antara lain disebabkan oleh rugi penjualan agunan yang diambil alih dan lain-lain.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Pada tahun 2019, Bank berhasil membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp49,50 miliar dari sebelumnya merugi Rp401,10 miliar di tahun 2018. Surplus tersebut

Net Interest Income

Net interest income of banks in 2019 dropped by 87% or IDR341.29 billion to IDR50.25 billion compared to IDR391.54 billion in 2018. This is closely related with the declining amount of outstanding loans in 2019.

Other Income and Operating Expense

Other operating income represents the non-interest income which is primarily derived from income from write-offs. In 2019, the Bank recorded a 768% jump in other operating income, or an increase by IDR605.33 billion to IDR526.55 billion compared to a loss of IDR78.79 billion in 2018. This is due to the recovered loans already written off and treasury revenues from general foreign exchange transactions and banknotes, as well as the sales of collateral.

Other operating expenses represent expenses other than interests from bank operations including salaries and allowances, provision for impairment losses, general and administrative expenses and other expenses. In 2019, other operating expenses decreased by 8.5% or IDR52.69 billion to IDR565.24 billion compared to IDR617.93 billion in 2018. This is primarily due to significant increase in provision for impairment losses to from deficit IDR154.51 billion to surplus IDR449.05 billion.

Operating Income (Loss)

Operating Income in 2019 was IDR11.56 billion versus operating loss of IDR305.18 billion in 2018. This was primarily due to higher operating income from the recovery of impairment loss and gains on the sale of securities.

Non-operating Income and Expenses

Non-operating income and expenses represent bank receipts and expenditures derived from Bank's non-operational activities. In 2019, the Bank's non-operating income skyrocketed by IDR197.95 billion (or 1.088%) to IDR216.14 billion compared to IDR18,19 billion in previous year.

Non-operating expenses of the Bank increased by 53% or IDR61.58 billion to IDR178.4 billion in 2019 compared to IDR116.60 billion a year earlier. The increase in non-operating expenses was due to the loss of sale of foreclosed collateral and others.

Net Profit (Loss) for the Year

In 2019, the Bank managed to record net profit of IDR49.50 billion, compared to loss IDR401.10 billion in 2018. The swing to net profit was due to increased

berkat pendapatan operasional yang meningkat dari hasil pemulihan kerugian penurunan nilai dan keuntungan atas penjualan surat-surat berharga.

operating income from the recovery of impairment losses and gains from the sale of securities.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI 2019

COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION 2019

Permodalan

Pada tahun 2019, Rasio Kecukupan Modal (CAR) (KPMM) tercatat sebesar 14,53% dan telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 13,67%.

Capital

In 2019, Capital Adequacy Ratio (CAR) stood at 14.53% and exceeds target which was set at 13.67%.

Keterangan	Target 2019	Realisasi Desember 2019 (Audited) Realization on December 2019	Description
KPMM	13,67%	14,53%	CAR

Kualitas Aset

Non-Performing Loan

Pada tahun 2019 rasio NPL neto tercatat sebesar 0,80% dan NPL bruto sebesar 1,49%, sedangkan target yang ditetapkan untuk NPL neto sebesar 2,64% dan NPL bruto sebesar 4,53%. Bank akan terus berupaya agar NPL berada pada batas yang ditentukan regulator.

Asset Quality

Non Performing Loan

In 2019, the net NPL ratio was recorded at 0.80% and gross NPL of 1.49%, while the target set for net NPL was 2.64% and gross NPL of 4.53%. The Bank will continue to make sure that the NPL is within the limits set by the regulator

Keterangan	Target 2019	Realisasi Desember 2019 (Audited) Realization on December 2019	Description
NPL Bruto	4,53%	1,49%	NPL Gross
NPL Neto	2,64%	0,80%	NPL Net

Kredit yang Diberikan

Realisasi kredit yang diberikan tahun 2019 sebesar Rp6.245,99 miliar, atau 82,7% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank sebesar Rp7.554,78 miliar. Penurunan portfolio kredit di tahun 2019 sejalan dengan upaya konsolidasi yang dilakukan oleh bank guna memelihara kegiatan bisnis kredit yang *prudent*, yang berfokus pada kegiatan pengawasan dan penanganan kredit bermasalah, seperti penagihan, restrukturisasi, dan ekspansi kredit baru.

Loan Disbursement

Loan disbursement in 2019 amounted to IDR6,245.99 billion, or 82.7% of full-year the target set in the Bank's Business Plan at IDR7,554.78 billion. Lower loan portfolios in 2019 was in line with the Bank's consolidation efforts in order to maintain prudent credit business activities, which focus on monitoring and handling non-performing loans, such as collection, restructuring, and expansion of new loans.

Dana Pihak Ketiga

Bank pada tahun 2019 berhasil menghimpun Dana Pihak ketiga sebesar Rp12.806,23 miliar atau mencapai 98,70% dari yang ditargetkan bank Rp12.975 miliar. Hal ini sejalan dengan upaya Manajemen untuk optimalisasi dana pihak ketiga serta terus berupaya menata komposisi dana ke arah yang lebih murah, dan berupaya melepaskan keterikatan pada deposan besar.

Third Party Funds

The Bank was succeeded in collecting third party funds amounted to IDR12,806.23 billion in 2019, or 98.70% of its full-year target of IDR12,975 billion. This was in line with the Management's efforts to optimize third party funds organize the composition to low-cost funds, and to no longer be dependent on large depositors.

Keterangan	Target 2019 (Rp miliar / billion)	Realisasi Desember 2019 (Audited) Realization on December 2019 (Audited)	Pencapaian Achievement (%)	Description
Dana Pihak Ketiga	12.975.000	12.806.232	98,7%	Third Party Fund
- Giro	997.227	652.867	65,47%	- Demand Deposits
- Tabungan	1.002.773	1.166.534	116,33%	- Saving Deposits
- Deposito	10.975.000	10.986.831	100,11%	- Time Deposits

Laba Rugi

Pencapaian target laba setelah pajak sebesar Rp49,50 miliar atau mencapai 760,7% dari target yang ditetapkan minus Rp376,469 miliar.

Profit and Loss

The profit after tax of IDR49.50 billion was 760.7% of the target set at negative IDR376.469 billion.

Keterangan	Target 2019 (Rp miliar / billion)	Realisasi Desember 2019 (Audited) Realization on December 2019 (Audited)	Pencapaian Achievement (%)	Description
Laba (Rugi) Setelah Pajak	(376,469)	49,495	760,7%	Profit (Loss) After Tax

Fee Based Income

Fee Based Income dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, antara lain surat berharga dan transaksi valas. Pada tahun 2019, Bank mencatat perolehan *fee based income* dari transaksi surat berharga dan transaksi valas sebesar Rp52,74 miliar dan mencapai 58,7% dari target yang ditetapkan sebesar Rp89,85 miliar.

Fee Based Income

Fee based income is influenced by macroeconomic condition such as, securities and forex transactions. In 2019, the Bank recorded fee-based income from securities and forex transactions amounting to IDR52.74 billion and reached 58.7% of the target at IDR89.85 billion.

Biaya *Overhead*

Pada tahun 2019, Bank mencatatkan biaya umum administrasi sebesar Rp299,57 miliar, atau 135% di atas target yang ditetapkan sebesar Rp222,30 miliar. Hal ini dikarenakan adanya biaya-biaya yang terkait dengan aksi korporasi.

Bank telah melakukan efisiensi biaya tenaga kerja dan terealisasi sebesar Rp 260,15 miliar atau sebesar 90,6% dari target yang diberikan sebesar Rp287,22 miliar. Rekrutmen yang selektif dengan prioritas kepada bisnis Bank serta optimalisasi jam kerja adalah salah satu keberhasilan efisiensi dalan penurunan biaya tenaga kerja. Sedangkan, realisasi BOPO pada tahun 2019 sebesar 99,92% dari target yang ditetapkan 133,34%.

Secara keseluruhan, Bank akan berusaha menekan beban biaya *overhead* agar dapat dihemat secara maksimal di bawah target yang ditetapkan.

Overhead Cost

In 2019, the Bank recorded general administrative fees of IDR299.57 billion, or 135% above the target established at IDR222.30 billion. This is due to the costs of corporate action.

The Bank has implemented labour cost efficiency which was realized at IDR260.15 billion or below the target of 90.6% from the target given at IDR287.22 billion. Selective recruitment with priorities on the Bank's business as well as office hour optimization were among the success in efficiency of labor cost decrease. Meanwhile, the realization of BOPO in 2019 99.92% below the target established at 133.34%.

Overall, the Bank will try to reduce overhead cost in order to save at the maximum below the specified target in the future.

Keterangan	Target 2019 (Rp miliar / billion)	Realisasi Desember 2019 (Audited) Realization on December 2019 (Audited)	Pencapaian Achievement (%)	Description
BUA	222,30	299,569	135%	BUA
Personel	287,22	260,154	90,6%	Personnel

Pencapaian Target dan Realisasi Lainnya

Target Achievement and Other Realization

Keterangan	Target 2019 (Rp miliar / billion)	Realisasi 2019 Realization 2019	Status	Description
Rasio Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga	73,43%	48,77%	Tidak Tercapai Not Achieved	Loan to Funding Ratio
Komposisi CASA terhadap Total Dana Pihak Ketiga	15,41%	14.21%	Tidak Tercapai Not Achieved	CASA to Total Customer Deposits
Margin Bunga Bersih	0.72%	0,39%	Tidak Tercapai Not Achieved	Net Interest Margin

PROYEKSI 2020

Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) 2020 untuk mencapai pertumbuhan bisnis dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi makro dan asumsi-asumsi keuangan internal lainnya, meliputi proyeksi makroekonomi dan kebijakan moneter Bank Indonesia. Proyeksi keuangan pada pada tahun 2020 dalam Laporan Tahunan ini merupakan "pernyataan harapan untuk masa depan" mengenai kehendak, harapan, ataupun proyeksi masa depan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ataupun manajemen Bank pada saat Laporan Tahunan ini diterbitkan. Pernyataan yang tertulis dalam proyeksi ini bukan merupakan jaminan kinerja masa depan karena hasil sebenarnya di masa depan dapat berbeda dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kendali manajemen.

PROJECTION 2020

The Bank has developed Bank's Business Plan 2020 to achieve business growth by taking considering macro assumptions and other internal financial assumptions, including macroeconomic projections and Bank Indonesia's monetary policy. The financial projection in 2020 in this Annual Report is a "statement of hope for the future" concerning the plan, hope, or future projection of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. or management of the Bank upon the publication of this Annual Report. The statements written in this projection do not serve as a guarantee of future performance, as actual results in the future may differ, and may be influenced by factors beyond the control of management.

Indikator	Proyeksi 2020 Projection 2020	Indicator
Pertumbuhan Ekonomi	5,3%	Economic Growth
Inflasi	3,1%	Inflation
SPN 3 Bulan	5,4%	3 Month SPN
Nilai Tukar Rupiah	Rp14.400/US$	Rupiah Trade Value
BI 7-day RR *Rate*	5%	BI 7-day RR Rate
Suku Bunga *Deposit Facility*	4,25%	Deposit Interest Rate
Lending Facility	5,75%	Lending Interest Rate

Total Aset

Bank memproyeksikan total aset pada tahun 2020 sebesar Rp21.939,71 miliar. Perolehan tersebut tumbuh 26,73% atau Rp4.628,11 miliar dibandingkan dengan

Total Assets

The bank projected total assets in 2020 amounting to IDR21.939.71 billion. The revenue grew by 26.73% or IDR4,628.11 billion compared to 2019. Such growth

tahun 2019. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh pertumbuhan dana pihak ketiga yang meningkat pada sisi liabilitas, yang digunakan untuk peningkatan transaksi surat berharga dan ekspansi kredit pada sisi aktiva.

was mainly driven by the increase in third party fund on liabilities, which was utilized to increase Securities transactions and credit expansion on the assets.

Indikator dalam Juta Rupiah	**Proyeksi 2020** Projection 2020	**Indicator** in Million Rupiah
Total Aset	21.939.713	Total Asset
Ekuitas	3.040.568	Equity
Total Modal	3.604.603	Total Capital
Tier 1	2.509.952	Tier 1
Tier 2	1.094.651	Tier 2

Laba Rugi

Pada tahun 2020, Bank memproyeksikan dapat membukukan *Net Interest Income* sebesar Rp288,39 miliar, dan laba bersih sebesar minus Rp207,46 miliar, seiring dengan implementasi kebijakan dan strategi Bank, agar dapat memperoleh kinerja yang terus bertumbuh.

Adapun strategi-strategi tersebut sebagai berikut:

- Memperkuat permodalan untuk mendukung ekspansi bisnis yang selektif dan perbaikan bisnis proses.
- Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan Kredit dan menjaga kualitas Kredit yang telah diberikan
- Meningkatkan dana murah (CASA) berbasis teknologi
- Meningkatkan *fee-based income*
- Melakukan efisiensi biaya operasional (*overhead)*

Profit and Loss

In 2020, the Bank projected to record Net Interest Income of IDR288.39 billion and net profit of minus IDR207.46 billion, in line with the Bank's policy and strategy implementation, in order to achieve a steady growth performance.

The strategies are as follows:

- Strengthening capital to support selective business expansion and business process improvement.
- Implementing prudent principles in channelling loans and maintaining the quality of disbursed loans.
- Increase technology-based low-cost funds (CASA)
- Increase fee-based income
- Perform operational cost efficiency (overhead)

Rasio Keuangan

Financial Ratios

Indikator	**Proyeksi 2020** Projection 2020	**Indicator**
CAR	25,20%	CAR
NPL - Gross	1,23%	NPL - Gross
NPL - Net	0,71%	NPL - Net
ROA	(1,09%)	ROA
ROE	(9,73%)	ROE
NIM	2,07%	NIM
CASA	20,12%	CASA
Operating Expense/Operating Income	108,05%	Operating Expense/Operating Income
COF	6,44%	COF
LFR	65,39%	LFR

Permodalan

Pada tahun 2020, Bank tetap berupaya menjaga Rasio Kecukupan Modal agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan senantiasa tetap dapat memenuhi ketentuan yang berlaku terutama PBI No. 15/12/PBI/2013 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. Bank juga melanjutkan pembentukan *Capital Conservation Buffer* yang secara bertahap telah dimulai dengan tambahan 0,625% pada tahun 2016; 1,25% pada tahun 2017; 1,875% pada tahun 2018; 2,5% pada tahun 2019.

Rentabilitas

Sejalan dengan pertumbuhan bisnis, Bank memproyeksikan NIM terus membaik menjadi 2,07% di tahun 2020 dan 3,18% di tahun 2021. Bank tetap mengusahakan perbaikan beberapa faktor yang menghambat NIM. Beberapa upaya untuk meningkatkan NIM adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan penghimpunan dana murah melalui penerapan produk baru berbasis teknologi.
- Memperkuat permodalan untuk mendukung ekspansi bisnis yang selektif dan perbaikan bisnis proses.
- Meningkatkan aktivitas *funding* dan *fee-based income.*
- Melakukan efisiensi biaya *overhead*.
- Pengembangan Japan *linkage* yang akan diperluas menjadi Korean *linkage*.
- Penguatan pada permodalan pada Buku 2.
- Mencari investor baru untuk berinvestasi pada pinjaman subordinasi.
- Memaksimalkan pendapatan bunga dari kelebihan dana, dengan mengoptimalkan transaksi penempatan pada bank lain dan melakukan investasi obligasi korporasi yang selektif.

Selain mengurangi biaya dana, peningkatan NIM juga dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan bunga kredit dengan strategi-strategi, antara lain sebagai berikut:

- Melanjutkan layanan kartu prioritas untuk nasabah prioritas.
- Melanjutkan program promosi untuk meningkatkan dana murah, antara lain melalui Tabungan JTrust berhadiah, Tabungan Rencana, dan Giro.
- Meningkatkan kerja sama dengan PMA, PMDN, BUMN dan sektor riil lainnya dalam pemberian Kredit Serba Guna (KSG), KKS-STA, KKS-KPR, KKS-KKB untuk pegawai dan pensiunan, dalam kaitannya dengan fasilitas *Employee Benefit Program* (EBP).
- Melakukan pengembangan atas produk-produk fasilitas pinjaman yang telah ada.

Capital

In 2020, the Bank will continue to maintain CAR in accordance with Bank Indonesia regulation and at all times be able to comply with the prevailing regulations, specifically PBI No. 15/12/PBI/2013 concerning the minimum capital requirement for commercial banks. The Bank has also gradually begun the gradual establishment of Capital Conservation Buffer starting with an additional 0.625% by 2016, 1.25% by 2017, 1.875% by 2018, and 2.5% by 2019.

Rentability

In line with business growth, the Bank projected that NIM will continue to improve to 2.07% in 2020 and 3.18% in 2021. The Bank continues to work on the improvement of several factors that hinder NIM. Several attempts to improve NIMs are as follows:

- Increase low-cost funds through the adoption of new technology-based products.
- Strengthen capital to support selective business expansion and business process improvement.
- Increase funding and fee-based income activities.
- Perform overhead efficiency.
- Develop Japan linkage and then expand to Korean linkage.
- Strengthen capital in Book 2.
- Seek new investors to invest in subordinated debts.
- Maximize interest income from excess funds, by optimizing placement transactions with other banks and making selective corporate bond investments.

In addition to reducing the cost of funds, NIM can also be higher by increasing interest income on loans with the following strategies:

- Continue priority card services for priority customers.
- Continue the promotion program to increase low-cost funds, including through JTrust Savings with prizes, Savings Plans, and demand deposits.
- Increase cooperation with PMA, PMDN, BUMN and other real sectors in the provision of Multi-purpose Loans (KSG), KKS-STA, KKS-KPR, KKS-KKB for employees and retirees, in relation to the Employee Benefit Program (EBP) facilities.
- Develop existing loan facility products.

Adapun, untuk ROA dan ROE pada tahun 2020, Bank memproyeksikan akan membaik sejalan dengan laba usaha yang telah dihasilkan sebesar -1,09% dan -9,73%, serta akan terus membaik pada tahun-tahun selanjutnya sejalan dengan peningkatan laba usaha yang didapat sebagai hasil usaha operasional dan berkesinambungan.

As for ROA and ROE in 2020, the Bank projected they will improve in line with the operating income to become -1.09% and -9.73%, and they will continue to improve in subsequent years in line with the increase in operating income as a result of operational and sustainable business.

Likuiditas

Terkait dengan likuiditas, Bank senantiasa akan memenuhi ketentuan yang berlaku untuk pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah – primer sebesar 6,5% dan sekunder sebesar 4%, termasuk pemenuhan GWM valas 8% sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank memproyeksikan likuiditas untuk operasional sehari-hari akan tetap terjaga dengan baik, di mana penempatan pada SUN dan SBI akan meningkat sejalan dengan penambahan modal bank di tahun 2020.

Rasio LFR tahun 2019 tercatat sebesar 48,77% dan diperkirakan mencapai 65,39% pada tahun 2020. Bank akan tetap berusaha menjaga LFR pada yang kisaran sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

Liquidity

In relation to liquidity, the Bank will at all times comply with the requirements of Primary Minimum Reserve (GWM) of Rupiah - primary at 6.5% and secondary at 4%, including the fulfillment of Foreign Exchange Minimum Reserve Requirement at 8% in accordance to applied regulations.

The Bank projected liquidity for daily operations to remain well maintained whereby placement in government securities and SBIs will increase in line with the addition of bank capital in 2020.

LFR ratio in 2019 was at 48.77% and projected at 65.39% in 2020. The bank will continue to remain within the range in accordance with the specified LFR regulations.

Kualitas Aset

a. Rasio *Non-Performing Loan* masih terjaga di bawah 5% pada tahun 2019, yakni sebesar 1,49% dan diharapkan akan lebih rendah dari proyeksi 1,23% di akhir tahun 2020 sebagai dampak dari ekspansi kredit yang *prudent*.
b. Rasio kredit bermasalah diproyeksikan akan terus membaik dan senantiasa diupayakan berada di bawah batas maksimal ketentuan Bank Indonesia. Hal ini dilakukan melalui upaya pengawasan dan penanganan kredit bermasalah, seperti penagihan, restrukturisasi, dan ekspansi kredit baru yang diproyeksikan lancar.

   Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki kualitas aset produktif dan non produktif adalah sebagai berikut:
   - Melakukan restrukturisasi kredit atas debitur bermasalah yang kooperatif dan prospektif.
   - Memaksimalkan penagihan dengan menggunakan jasa pihak ketiga.
   - Stratafikasi debitur yang bisa dilakukan PKPU (Peninjauan Kembali Penyelesaian Utang) dan yang bisa dipailitkan.
   - Melakukan penilaian ulang terhadap seluruh AYDA dan agunan debitur hapus buku.
   - Optimalisasi Balai Lelang dan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik).
   - Memonitor proses perkara L/C bermasalah.

Asset Quality

a. Non-Performing Loan ratio remained below 5% in 2019 at 1.49% and is expected to decline to 1.23% in 2020 as a result of prudent credit expansion.
b. Non-performing loan ratio is projected to continue to improve and remain below the maximum limit of Bank Indonesia regulation. This is conducted through the monitoring and handling of non-performing loans such as billing, restructuring and expansion of new loans which is projected to perform seamlessly.

   The efforts to improve the quality of productive and non-productive assets are as follows:
   - Restructuring troubled debtors who are cooperative and prospective.
   - Maximizing billing with third party services.
   - Performing categorization of debtors that can be categorized in (Debt Settlement Review) and that can be declared bankrupt.
   - Conducting a reassessment of all foreclosed asset and written off the debtor's.
   - Optimizing the Auction Hall and KJPP (Public Appraiser).
   - Monitoring the cases of L/C issues.

- Melakukan litigasi ataupun gugatan hukum kepada debitur yang tidak kooperatif
- Melakukan reorganisasi yang mengarah kepada penajaman unit kerja

c. Bank senantiasa berupaya membentuk PPA sesuai peraturan Bank Indonesia, sehingga pemenuhannya selalu diproyeksikan sekurang-kurangnya sebesar 100%.

d. Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif
Komposisi penyaluran kredit terhadap total aktiva produktif diproyeksikan untuk tahun 2020 menjadi 55%.
Bank dalam melakukan ekspansi kredit lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent lending*) guna mempertahankan kualitas portofolio kredit.

e. Rasio UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menegah) Terhadap Total Kredit
Bank menargetkan penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meningkat setiap tahun. Rasio kredit UMKM terhadap total kredit di akhir tahun 2019 sebesar 8,09% serta diproyeksikan tumbuh menjadi 6,81% pada tahun 2020, sejalan dengan pertumbuhan kredit yang diproyeksi sebesar 13%.

INFORMASI MATERIAL LAINNYA

Kemampuan Membayar Utang

Rasio Kecukupan Modal

KPMM (risiko kredit & risiko operasional) pada tahun 2019 meningkat menjadi 14,59% dari 14,10% di tahun 2018. Begitu juga dengan KPMM (risiko kredit, pasar & risiko operasional) tercatat sebesar 14,53%, meningkat dibandingkan dengan posisi tahun 2018 yang sebesar 14,03%.

Rasio Likuiditas, Loan to Funding Ratio (LFR)

Per 16 Juli 2018, berdasarkan PBI No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 istilah GWM LFR berubah menjadi RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial). GWM LFR dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, jika LFR dan RIM Bank di bawah minimum LFR dan RIM target Bank Indonesia (80%) atau jika di atas maksimum LFR dan RIM target BI (92%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif BI sebesar 14%. Pada tanggal 31 Desember 2019, GWM LFR (RIM) Bank adalah sebesar 48,77% dan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 77,43%.

- Conducting litigation or legal action against uncooperative debtors.
- Conducting a reorganization that leads to the sharpening of the business unit.

c. The Bank at all times strives to establish the PPA in accordance with Bank Indonesia regulations, so that the compliance is continuously projected at least by 100%.

d. Asset Productivity Ratio
For 2020, the composition of loan to total productive assets is projected to be 55%.
In extending loans, the Bank prioritized prudent principles (prudent lending) in order to maintain the quality of the loan portfolio.

e. Ratio of Micro, Small, and Medium Businesses (MSME) to Total Credit
The Bank targets micro, small and medium enterprise (MSME) loan portfolio for the next period to continue to increase every year. The ratio of MSME loans to total credit at the end of 2019 was 8.09% and is projected in 2020 to grow to 6.81% in line with projected credit growth 13%.

OTHER MATERIAL INFORMATION

Debt Service

Capital Adequacy Ratio

CAR (credit risk & operational risk) in 2019 amounted to 14.59%, increasing compared to 14.10% in 2018. CAR (credit risk, market & operational risk) in 2019 was 14.53%, increasing compared to 14.03% in 2018.

Liquidity Ratio, Loan to Funding Ratio (LFR)

As of July 16, 2018, based on PBI No. 20/4/PBI/2018 dated March 29, 2018, GWM LFR changes to RIM (Macroprudential Intermediation Ratio). GWM LFR and Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) are additional minimum deposits that must be maintained by the Bank in the form of Demand Deposits balance with Bank Indonesia and if the Bank's LFR and RIM are below the minimum LFR and RIM targets of Bank Indonesia (80%) or if above the maximum LFR and RIM targets of BI (92%) and the Minimum Capital Requirement (KPMM) of the Bank are smaller than the BI KPMM Incentives of 14%. As of December 31, 2019, the Bank's GWM LFR (RIM) was 48.77% and as of December 31, 2018 was 77.43%.

Rasio Profitabilitas

- *Net Interest Margin* (NIM)
  Level margin pendapatan bunga bersih pada tahun 2019 tercatat sebesar 0,39%, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 2,28%. Bank akan meningkatkan NIM melalui pengembangan infrastruktur ke arah bisnis retail melalui kredit mikro, kecil dan menengah dan pinjaman nasabah bersamaan dengan peningkatan CASA dan perbaikan biaya dana.

Profitability Ratio

- Net Interest Margin (NIM)
  Net interest margin in 2019 was recorded at 0.39%, a decrease compared to 2018 at 2.28%. J Trust Bank will increase NIM through the development of infrastructure towards the retail business through micro, small and medium loans and consumer loans along with CASA enhancements and funding cost improvements.

Rasio Rentabilitas

- *Return on Assets* (ROA)
  Pada tahun 2019, Bank mencatatkan tingkat ROA sebesar 0,29% atau meningkat dibandingkan posisi tahun 2018 yang tercatat minus 2,25%. Ini sejalan dengan perbaikan kinerja Bank dalam memperbaiki kualitas kredit di tahun 2019.
- *Return on Equity* (ROE)
  Rasio imbal hasil terhadap ekuitas Return on Equity (ROE) Bank merupakan cerminan imbal hasil kepada pemegang saham di tahun 2019 tercatat sebesar 4,24%, meningkat dibandingkan dengan ROE tahun 2018 yang minus 29,13%.
- Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
  Rasio BOPO di tahun 2019 sebesar 99,92% atau mengalami penurunan dari 116,32% pada tahun 2018. Hal ini sejalan dengan pemulihan kerugian penurunan nilai dan keuntungan atas penjualan surat-surat berharga.

Rentability Ratio

- Return on Assets (ROA)
  In 2019s, the Bank recorded ROA of 0,29%, increased from 2018 at minus 2,25%. This is in line with the Bank's performance in improving loan quality in 2019.
- Return on Equity (ROE)
  Return on equity ratio (ROE) of the Bank reflects returns to shareholders which in 2019 was at 4.24%, increased from 2018 at minus 29.13%.
- Cost to Income Ratio (BOPO Ratio)

Cost to Income ratio in 2019 reached 99.92%, lower than 116.32% in 2018. This is in line with the recovery of impairment losses and gains on the sale of securities.

Rasio Keuangan Lainnya

- Giro Wajib Minimum (GWM)
  Bank selalu memenuhi GWM sesuai ketentuan yang berlaku dengan rincian sesuai tabel di bawah ini.

Other Financial Ratios

- Statutory Reserves (GWM)
  The Bank consistently meets the Statutory Reserves in accordance with the applicable provisions with details as per the table below.

Rasio Keuangan	2019	2018	Financial Ratios
GWM Primer Rupiah	11,14%	14,66%	Primary Reserve in Rupiah
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Rupiah	12,87%	20,35%	PLM in Rupiah
GWM Mata Uang Asing	33,45%	10,34%	Reserve in Foreign Currencies
PDN	0,74%	1,82%	Net Open Position

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG/ KREDIT

Bank mengklasifikasikan tingkat kolektibilitas kredit yang diberikan kepada nasabah berdasarkan jumlah hari tunggakan. Analisa umur kredit yang diberikan – kotor dalam dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:

COLLECTABILITY OF RECEIVABLES/ CREDITS

The bank classifies the credit collectability level assigned to its customers based on the days of maturity. The credit maturity analysis - gross in the last two years is as follows:

Keterangan dalam Jutaan Rupiah				**Description** in Million Rupiah
	Target 2019	**Realisasi Desember 2019 (Audited)** Realization on December 2019 (Audited)	**Pencapaian** Achievement (%)	
Belum jatuh tempo	6.912.395	5.928.886	85,77%	Not yet due
Tunggakan 1-90 hari	404.644	224.306	55,43%	Overdue 1-90 days
Tunggakan > 90 hari	237.741	92.799	39,03%	Overdue > 90 days
Jumlah kredit yang menunggak	642.385	317.105	49,36%	Total loan overdue
Jumlah pinjaman yang diberikan – kotor	7.554.780	6.245.991	82,7%	Total loan disbursed – gross

Pada tahun 2019, jumlah tunggakan pada kredit (*gross*) yang diberikan oleh Perusahaan sebesar Rp317,1 miliar dengan persentase terhadap total kredit sebesar 5,08%. Jumlah tersebut mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 15,27%. Bank terus melakukan upaya dalam hal pengendalian risiko kredit sehingga tingkat kolektibilitas kredit yang diberikan tetap terjaga.

In 2019, the amount of gross loans given by the Company was IDR317.1 billion with a percentage to total loans of 5.08%. It has improved compared to the previous year at 15.27%. The Bank continues to make efforts in terms of credit risk control so as to maintain the level of credit collectability.

Sementara itu, rasio NPL *gross* pada tahun 2019 tercatat 1,49%, menurun dibandingkan dengan 4,26% pada tahun 2018. Sedangkan rasio NPL net tercatat sebesar 0,80% atau turun dari 3,12% di tahun sebelumnya. Bank berupaya melakukan mitigasi terhadap risiko kredit dengan mempersiapkan provisi yang memadai, serta strategi lainnya dalam memitigasi potensi kerugian kredit bermasalah.

Meanwhile, the gross NPL ratio in 2019 was 1.49%, decreased from 2018 at 4.26%. Meanwhile, net NPL ratio was 0.80%, dropped from previous year at 3.12%. The Bank seeks to mitigate credit risk by preparing adequate provisions and other strategies to mitigate potential non-performing loans.

STRUKTUR MODAL

Posisi permodalan Bank meningkat 2,63% menjadi Rp1.833,34 miliar dari Rp1.786,38 miliar pada tahun 2018, selaras dengan peningkatan modal inti sebesar 23,1% menjadi Rp1.428,75 miliar, sedangkan modal pelengkap turun sebesar 35,6% menjadi Rp404,58 miliar, terutama berasal dari pinjaman subordinasi sebesar Rp400 miliar dari J Trust Co., Ltd. Tujuan permodalan meningkat yaitu untuk ekspansi aktivitas bisnis dan operasional agar mendapatkan tingkat pendapatan yang optimal dengan rasio KPMM yang terjaga pada level yang telah ditentukan oleh Manajemen dan sesuai ketentuan regulasi perbankan.

CAPITAL STRUCTURE

The Bank's capital position in 2019 increased by 2.63% to IDR1,833.34 billion compared to IDR1,786.38 billion in 2018, in which core capital increased 23.1% to IDR1,428.75 billion, while capital reserves decreased 35.6% to IDR404.58 billion, mainly derived from subordinated loans of IDR400 billion from J Trust Co., Ltd. The aim of capital increase is to expand business and operational activities in order to obtain an optimal level of income while maintaining Capital Adequacy Ratio at the level determined by the Management and in accordance with banking regulations.

Keterangan dalam Jutaan Rupiah	2019	2018	Description in Million Rupiah
Modal Inti	1.428.754	1.159.716	Core Capital
Modal Disetor	12.223.149	12.223.149	Paid-in Capital
Cadangan tambahan modal	(11.289.895)	(11.416.808)	Reserve for Additional Capital
Modal Pelengkap	404.581	626.668	Supplementary Capital
Jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap	**1.833.335**	**1.786.384**	**Total Core Capital and Supplementary Capital**
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit	11.500.543	11.746.022	Risk Weighted Assets (RWA) for credit risk
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko pasar	53.607	58.852	Risk Weighted Assets (RWA) for market risk
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko operasional	1.063.517	926.700	Risk Weighted Assets (RWA) for operational risk
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk risiko kredit dan operasional	14,59%	14,10%	CAR for calculation of credit risk & operation risk
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk risiko kredit, pasar dan operasional	14,53%	14,03%	CAR for credit, market & operational risk
Rasio Kewajiban penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	11,00%	11,00%	Minimum CAR requirement

Kecukupan Permodalan

J Trust Bank memastikan telah memiliki kecukupan modal untuk menutup risiko dalam setiap kegiatan usaha dan operasionalnya. Kerangka kerja untuk pengelolaan modal Bank mengacu pada Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (KPMM) dan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) atau KPMM Sesuai Profil Risiko.

KPMM bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal atas risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional dan dihitung sesuai metode standar regulator, sedangkan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) merupakan proses penilaian kecukupan modal yang disesuaikan dengan profil risiko J Trust Bank serta penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan guna menutup risiko, aktivitas usaha, dan operasional Bank sesuai pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.

Pendekatan yang digunakan dalam menghitung ICAAP yaitu metode standar Basel II *Standardised Approach* (regulator) untuk menutup risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional (Pilar I), serta metode *add on capital* sesuai peringkat Profil Risiko Bank (Pilar II) untuk mengantisipasi risiko konsentrasi kredit, IRRBB, likuiditas, stratejik, reputasi, hukum dan kepatuhan serta memperhitungkan kebutuhan modal lainnya antara lain rencana ekspansi kredit, rencana belanja modal (*capital expenditure*), dan kebutuhan modal lainnya.

Capital Sufficiency

J Trust Bank has ensured having sufficient capital to cover risks in business and operational activities. The framework for Bank's capital management refers to the Capital Adequacy Ratio (CAR) of Commercial Banks and Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

CAR is aimed to cover capital needs for credit risk, market risk, and operational risk and is calculated based on standard regulatory method, while Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) is the process of capital sufficiency assessment adjusted with the risk profile of J Trust Bank and strategy setting to maintain capital level to cover risks, business activities, and Bank operations in accordance with Bank's Business Plan.

The approach used to calculate ICAAP is the standard Basel II method, Standardised Approach (regulator), to cover credit risk, market risk, and operational risk (Pillar I), as well as add on capital method in accordance with the Bank's Risk Profile rank (Pillar II) to anticipate risks on credit concentration, IRRBB, liquidity, strategic, reputation, legal and compliance as well as to calculate other capital needs such as credit expansion plan, capital expenditure plan, and other capital needs.

Dalam memperhitungkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Pilar 1 untuk Risiko Kredit menggunakan metode Standar sesuai dengan SEOJK No.42/SEOJK.03/2016 serta SEOJK No. 38/SEOJK.03/2016 untuk memperhitungkan Risiko Pasar dan dalam memperhitungkan Risiko Operasional berpedoman pada SEOJK No.24/SEOJK.03/2016.

In calculating Risk Weighted Assets based on Pillar I Risks for Credit Risk using Standard method in line with SEOJK No.42/SEOJK.03/2016 and SEOJK No. 38/SEOJK.03/2016 to calculate Market Risk and in calculating Operational Risk based on SEOJK No.24/SEOJK.03/2016.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Pada tanggal 11 Januari 2019, Bank menandatangani perjanjian pinjaman subordinasi dengan J Trust Co.,Ltd., Jepang. Dalam perjanjian tersebut, J Trust Co., Ltd., Jepang menyetujui untuk memberikan pinjaman subordinasi sebesar Rp400 miliar, dengan tenor 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Surat OJK No. S-13/PB.31/2019 tanggal 31 Januari 2019, OJK menyetujui untuk memperhitungkan pinjaman subordinasi ini sebagai komponen modal pelengkap (Tier 2) Bank dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Sesuai surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tanggal 24 Januari 2020, Bank telah merubah pencatatan pinjaman subordinasi antara Bank dengan J Trust Co., Ltd dari komponen Modal Pelengkap (Tier-2) menjadi komponen Modal Inti (Tier-1) sebesar Rp400 miliar dan untuk meningkatkan Modal Inti, JTrust Bank berencana untuk mengubah pencatatan pinjaman subordinasi antara Bank dengan J Trust Co., Ltd dari komponen Modal Pelengkap (Tier-2) menjadi komponen Modal Inti (Tier-1) sebesar Rp400 miliar pada awal 2020.

Pada bulan Oktober 2015, J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura sebagai perusahaan yang dimiliki oleh J Trust Co. Ltd., sebesar 98,997% telah memberikan Pinjaman Subordinasi kepada Bank sebesar Rp342 miliar (USD25 juta) yang sudah mendapat persetujuan dari otoritas terkait untuk dapat diakui sebagai komponan modal. Pada bulan Oktober 2015 terdapat penjualan kredit kepada PT J Trust Investment Indonesia sebesar Rp490,84 miliar. Pada Juli 2018, Bank menandatanganani kerja sama Pinjaman Subordinasi dengan J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura ("JTA") sebesar USD10 juta. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman subordinasi adalah sebesar USD10 juta (ekuivalen Rp143,8 miliar).

Bank memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga modal sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis, mengantisipasi peluang bisnis, dan melindungi Bank dari kemungkinan risiko bisnis.

Management Policy of Capital Structure

On 11 January 2019, the Bank signed a subordinated loan agreement with J Trust Co.,Ltd., Japan. In the agreement, , J Trust Co., Ltd., Japan agreed to give subordinated loan of IDR400 billion, with 5 (five) year maturity.

Based on OJK Letter No. S-13/PB.31/2019 on 31 January 2019, OJK approved to calculated the subordinated loan as a supplementary capital (Tier 2) component of the Bank in the calculation of Capital Adequacy Ratio (CAR).

According to the approval letter from the Financial Services Authority (OJK) per 24 January 2020, the Bank has changed the recording of subordinated loan between the Bank and J Trust Co., Ltd from the Supplementary Capital (Tier-2) component into Core Capital (Tier-1) component of IDR400 billion and to increase Core Capital, JTrust Bank plans to change the recording of subordinated loan between the Bank and J Trust Co., Ltd from Supplementary Capital (Tier-2) component into Core Capital (Tier-1) component of IDR400 billion in early 2020.

In October 2015, J Trust Asia Pte. Ltd., Singapore, as a company owned by J Trust Co. Ltd., of 98.997% provided Subordinated Loan to the Bank of IDR342 billion (USD25 million) which received approval from related authorities to be acknowledged as capital component. In October 2015 there were credit sales to PT J Trust Investment Indonesia of IDR490.84 billion. In July 2018, the Bank signed Subordinated Loan agreement with J Trust Asia Pte., Ltd., Singapore ("JTA") of USD10 million. On 31 December 2018 the balance of subordinated loans was USD10 million (equivalent to IDR143.8 billion).

The Bank has strong commitment to maintain the capital according to existing OJK regulations. This is made to support business growth, anticipate business opportunities, and protect the Bank from potential business risks.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Pada tahun 2019, Bank tidak memiliki ikatan material terkait investasi barang. Seluruh kegiatan investasi barang modal dalam bentuk penambahan tanah, gedung kantor, kendaraan bermotor, mesin dan peralatan, perlengkapan dan perabotan kantor, serta aset pra-operasional dibiayai oleh Bank dalam mata uang Rupiah.

Investasi Barang Modal yang Direalisasikan pada Tahun Buku Terakhir

Pada tahun 2019, pengeluaran Bank untuk investasi barang modal adalah sebesar Rp236,36 miliar, sedangkan pada tahun sebelumnya mencapai Rp222,1 miliar. Jenis investasi barang modal tersebut terdiri dari tanah, bangunan, investaris kantor, dan kendaraan. Tujuan investasi ini adalah untuk meningkatkan layanan operasional bisnis dan memberikan yang terbaik bagi seluruh nasabah. Investasi barang modal seluruhnya menggunakan sumber pendanaan Rupiah yang tidak perlu dilakukan transaksi lindung nilai. Pembelian barang modal yang dilakukan dalam batas yang sesuai dengan kemampuan dan arus kas Bank sehingga tidak mengganggu kinerja keuangan Bank.

Material Commitments for Capital Expenditure

In 2019, the Bank has no material commitments related to capital expenditure. All capital expenditure activities in the form of additional land, office buildings, motor vehicles, machinery and equipment, office equipment and furniture, and pre-operational assets are financed by the Bank in Rupiah.

Capital Expenditure Realized in Current Year

In 2019, the Bank's capital expenditures amounted to IDR236.36 billion, while in the previous year it reached IDR222.1 billion. Investment in capital goods include land, building, office inventories, and vehicles. The objective of this investment is to improve business operational services and provide the best for all customers. Capital expenditure is entirely using Rupiah financing sources which requires no hedging. Capital expenditure is made within limits in accordance with the capabilities and cash flows of the Bank so that will not interfere with the Bank's financial performance.

Keterangan dalam Jutaan Rupiah						**Description** in Million Rupiah
	Saldo awal Beginning balance	**Penambahan** Additions	**Pengurangan** Deductions	**Penerapan metode revaluasi** Application of the revaluation method	**Saldo akhir** Ending balance	
Nilai Revaluasi						**Revaluation Value**
Hak atas Tanah	135.148	-	-	11.325	146.473	Land Rights
Bangunan	27.260	-	-	(5.116)	22.144	Buildings
Inventaris Kantor	59.475	7.686	615	-	66.546	Office Equipments
Kendaraan	261	939	-	-	1.200	Vehicles
Total Nilai Revaluasi	**222.144**	**8.625**	**615**	**6.209**	**236.363**	**Total Revaluation Value**
Akumulasi Penyusutan						**Accumulated Depreciation**
Bangunan	3.521	1.299	-	(4.543)	277	Buildings
Inventaris Kantor	24.370	12.697	403	-	36.664	Office Equipments
Kendaraan	174	83	-	-	257	Vehicles
Total Akumulasi Penyusutan	**28.065**	**14.079**	**403**	**(4.543)**	**37.198**	**Total Accumulated Depreciation**
Nilai Buku Neto	**194.079**				**199.165**	**Net Book Value**

Anggaran Belanja Modal 2019

Pada tahun 2019, Bank telah menganggarkan belanja modal sistem IT dengan rincian sebagai berikut:

Capital Expenditure Budget 2019

In 2019, the Bank has a capital expenditure budget for IT systems with the following details:

Project Incorporated in Business Plan 2019	Jumlah Amount Rp
Core Banking	
Loan Origination System	2.000.000.000
e-Banking	
Chat Boot	600.000.000
pull SMS Service	210.000.000
Internet Chatting	600.000.000
E-Money	1.500.000.000
Customer On Boarding	6.500.000.000
QR Payment	1.200.000.000
Debit Online	1.200.000.000
Digital Branch	2.400.000.000
MIS & Reporting	
Digital Branch	1.800.000.000
Risk Management Tool's	
Operational Risk System (LED, RCSA, KRI)	630.000.000
Process Automation	
Business Process Management	4.500.000.000
e-Channel Reconciliation Application	600.000.000
Swift GPI (Global Payment Tracking Innovation)	369.600.000
Infrastructure	
New Server for S1 Payment ATM Switching	1.412.400.000
Network Access Control	1.050.000.000
End Point Security (Anti Virus)	900.000.000
Firewall for VPN Gateway (DC & DRC)	264.000.000
Server & Network Monitoring	300.000.000
Email Encryption	1.200.000.000
MDM (Mobile Device Management)	900.000.000
Additional Microsoft & IBM License	1.500.000.000
Help Desk Application	420.000.000

Pengadaan barang *capex* menjadi *opex*, antara lain pengadaan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat/komputer/mesin hitung uang/mesin *photocopy/hardware* IT dilakukan melalui mekanisme sewa dalam rangka program efisiensi Bank.

The procurement of capital expenditures as operating expenditures, among others for the procurement of two-wheeled and four-wheeled vehicles/cash register/fotocopy machine/IT hardware, is undertaken through a leasing mechanism as part of the Bank's efficiency program.

Suku Bunga Dasar Kredit

Informasi mengenai Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang diberikan Bank pada tahun 2019 sebagai berikut:

Prime Lending Rate

Information on the Prime Lending Rate (SBDK) made by Bank in 2019 is as follows:

Periode	Suku Bunga Dasar Kredit Prime Lending Rate				
	Berdasarkan Segmen Kredit Based on Loan Segment				
	Kredit Korporasi *) Corporate Loan	Kredit Ritel Retail Loan	Kredit Mikro Micro Loan	Kredit Konsumsi Consumption Loan KPR	Kredit Konsumsi Consumption Loan Non KPR
Desember 2019	11,5%	11,65%	22%	13.5%	13%

*) Kredit Korporasi adalah kredit untuk tujuan produktif dengan plafond di atas Rp5 miliar
Corporate Loan is defined as loans for productive usage in amounts above IDR5 billion

SBDK digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SDBK. Dalam Kredit Konsumsi non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui Kartu Kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA). Informasi SDBK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau website Bank.

SBDK is used as the basis for determining the credit interest rate that will be applied by the Bank to its customers. SBDK does not take into account the component of risk premium estimates, whose amount depends on the Bank's assessment of the risk of each debtor or group of debtors. Thus the rate of the interest charged to the debtor is not necessarily similar to SDBK. Consumer Loan Non-Mortgage does not include fund disbursement through Credit Card and Unsecured Loan (KTA). The applicable SDBK information can be found in the published information available at each Bank office and/or Bank website.

Informasi dan Fakta material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Bank sedang menghadapi kasus-kasus hukum. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, beberapa pihak telah mengajukan tuntutan hukum kepada Bank di pengadilan di dalam maupun di luar negeri.

Pada tanggal 14 Januari 2020, Bank telah mendapat surat pemberitahuan pelaksanaan lelang eksekusi No. 19/2019Del Jo. No. 31/Eks/2016/PN.Sby Jo. No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby yang intinya telah memberitahukan kepada Bank selaku Termohon Eksekusi, bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III akan melaksanakan eksekusi lelang (penjualan di muka umum) (tidak terjadi lelang eksekusi).

Berdasarkan hal tersebut di atas, pelaksanaan lelang yang sebagaimana telah terjadwal tidak terlaksana dikarenakan ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020, Bank telah mendapat surat pemberitahuan pelaksaan lelang eksekusi No. 18/2018.Del.PN.Jkt.Pst Jo. No. 31/Eks/2016/PN.Sby Jo. No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby yang intinya telah memberitahukan kepada Bank selaku Termohon Eksekusi, bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

Subsequent Events

The Bank is facing litigation cases. As of December 31, 2019, several parties have submitted lawsuits against the Bank in domestic or overseas courts.

On January 14, 2020, the Bank has received a notification letter on the execution of the auction No. 19/2019 Del Jo. No. 31/Eks/2016/PN.Sby Jo. No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby which in essence has informed the Bank as the Respondent Execution, that the Chairperson of the West Jakarta District Court, through the intermediaries of the Office of State Assets and Jakarta Auction III, will carry out auction execution (public sales) (not occurring execution auction).

Based on the above, the scheduled auction has not been carried out because there was one condition that has not been met which is the Land Registration Certificate (SKPT).

Whereas on January 21, 2020, the Bank received a notice of the implementation of the auction execution No. 18/2018.Del.PN.Jkt.Pst Jo. No. 31/Eks/2016/PN.Sby Jo. No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby which in essence has informed the Bank as the Respondent, that the Chairperson of the Central Jakarta District Court, through the intermediaries of the Jakarta

dan Lelang Jakarta akan melaksanakan eksekusi lelang (penjualan di muka umum) (tidak terjadi lelang eksekusi).

Berdasarkan hal tersebut di atas, pelaksanaan lelang yang sebagaimana telah terjadwal tidak terlaksana dikarenakan didalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terdapat sita pidana yang diajukan oleh bank.

Pinjaman Subordinasi III

Berdasarkan Surat OJK No. S-8/PB.31/2020 tanggal 24 Januari 2020, OJK menyetujui untuk pelaksanaan konversi pinjaman subordinasi dari sebelumnya bersifat non perpetual menjadi perpetual sehingga pencatatannya dapat direklasifikasi dari komponen Modal Pelengkap menjadi komponen Modal Inti Tambahan.

Pernyataan Keputusan Rapat

Pada tanggal 17 Januari 2020 telah diadakan Rapat yang membahas tentang perubahan susunan pengurus perseroan dan telah dinyatakan dalam Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 61 pada tanggal 17 Januari 2020 yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0056880 tanggal 31 Januari 2020.

Penawaran Umum Saham Bank

Mengacu kepada Pengumuman Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (BCIC) Tercatat di Papan: Pengembangan No. Peng-UPT-00001/BEI.PP3/01-2020, Bursa Efek Indonesia telah memutuskan untuk mencabut penghentian sementara perdagangan efek PT Bank JTrust Indonesia Tbk. di seluruh Pasar mulai dari sesi *pre-opening* pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan kewajaran proses pembentukan harga, maka pelaksanaan perdagangan saham Bank di Pasar Reguler pada tanggal 8 Januari 2020 dilaksanakan melalui sesi *pre-opening* dengan mengacu pada Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Khusus.

Surat Ketetapan Pajak Tahun 2015

Pada tanggal 16 Januari 2020, Bank telah membayar sebagian dari SKPKB dan STP yang diterima untuk tahun pajak 2015 sebesar Rp 4.980 dan menyampaikan surat keberatan sebesar Rp22.881 pada tanggal 20 Februari 2020.

Office of State Assets and Auction Services, will carry out auction execution (public sales) (not auction execution).

Based on the above, the scheduled auction has not been carried out because there was a criminal confiscation filed by the bank in the Land Registration Certificate (SKPT) component of the Bank's Supplementary Capital to Additional Core.

Subordinated Loan III

Based on OJK's Letter No. S-8/PB.31/2020 dated January 24, 2020, OJK agreed on the implementation of the conversion of subordinated loans from formerly non-perpetual to perpetual so that its record may be reclassified from component of the Bank's Supplementary Capital to Additional Core Capital.

Statement of Meeting Decision

On meeting held on January 17, 2020, there was discussion on changes in the management composition of the Bank and as covered by Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 61 dated January 17, 2020 which was accepted and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Letter No. AHU-AH.01.03- 0056880 dated January 31, 2020.

Public Offering of the Bank's Shares

Referring to the Announcement of the Temporary Revocation of the Securities Trading of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (BCIC), listed on the Board: Development No. Peng-UPT-00001/BEI.PP3/01-2020, the Indonesia Stock Exchange has decided to lift the temporary suspension of PT Bank JTrust Indonesia Tbk's securities trading in all markets starting from the pre-opening session on Wednesday, January 8, 2020.

Furthermore, in order to realize the fairness of the process of price formation, the implementation of stock exchange trade in the Regular Market on January 8, 2020 was carried out through a pre-opening session with reference to Rule Number II-A concerning Special Securities Trading.

Tax Assessment Letter Year 2015

On January 16, 2020, the Bank had partially paid the SKPKB and STP for fiscal year 2015 amounting to IDR 4,980 an and filed an objection letter for IDR 22,881 on February 20, 2020.

Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal

Hingga akhir tahun 2019, Bank tidak melakukan transaksi material terkait investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, dan restrukturisasi utang/modal.

Investment, Expansion, Divestment, Merger/Liquidation, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring

As of the end of 2019, the Bank made no material transactions related to investment, expansion, divestment, merger/liquidation, acquisition, and debt/capital restructuring.

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Transaksi Afiliasi

Pada tahun 2019, Bank tidak memiliki transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi yang mempunyai hubungan istimewa. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), di mana pemberian dan pencairan kredit senantiasa memperhitungkan permodalan bank.

Material Transactions with Conflicting Interests and Affiliated Transactions

In 2019, the Bank made no material transactions that contain conflict of interest and/or related transactions. The provision of funds to related parties and the provision of large funds has been made in accordance with the provisions of the Legal Lending Limit (LLL), whereby the grant and disbursement of credit at all times take into account the capital of the bank.

Informasi Keuangan yang Telah Dilaporkan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Sepanjang tahun 2019, Bank tidak mencatatkan informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian luar biasa dan jarang terjadi.

Financial Information under Extraordinary and Rare Events

In 2019, the Bank did not record any financial information containing extraordinary and rare events.

Transaksi-transaksi Penting Lainnya dalam Jumlah yang Signifikan

Sepanjang tahun 2019, Bank tidak mencatatkan transaksi-transaksi penting lainnya dalam jumlah signifikan.

Other Significant Transactions

In 2019, the Bank did not record other significant transactions in significant amounts.

Kebijakan Dividen

Bank memiliki kebijakan untuk membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam tiga tahun terakhir (2017, 2018 dan 2019) tidak terdapat transaksi pembagian dividen dikarenakan Bank masih membukukan kerugian.

Dividend Policy

The Bank has a policy to distribute dividends to all shareholders based on the resolution of the General Meeting of Shareholders. In the last three years (2017, 2018 and 2019) there were no dividend payouts since the Bank still suffered from losses.

Keterangan dalam Jutaan Rupiah			Description in Million Rupiah
	2019	2018	
Total Dividen yang Dibagikan	-	-	Total Shared Dividends
Jumlah Dividen Kas per Saham	-	-	Dividends Per Shares
Payout Ratio	-	-	Payout Ratio
Tanggal Pengumuman	-	-	Announcement Date
Tanggal Pembayaran	-	-	Payout Date

Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2015 sebagaimana tertuang dalam akta notaris Jose Dima Satria, SH., M.KN.No. 59 tanggal 24 Juni 2015, pemegang saham memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan

Employee and Management Stock Option Program

Based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated June 23, 2015 as set forth in the notarial deed of Jose Dima Satria, SH., M.KN. No. 59 dated June 24, 2015, the shareholders granted authorities to the Board of Commissioners of the Bank

terkait pelaksanaan kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris (*Management Stock Option Program*/ MSOP).

Namun, dikarenakan saham SERI B dari perseroan masih dalam masa suspensi sejak pengambilalihan Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan, maka pelaksanaan kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris sebagaimana diputuskan dalam program *Management Stock Option* tersebut belum dapat dilaksanakan.

Sementara itu, Bank tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan (*Employee Stock Option Program*/ESOP).

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

J Trust Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri perbankan yang sahamnya tercatat di bursa efek. Pada tahun 2019, Bank tidak melakukan penawaran umum sehingga bank tidak berkewajiban untuk membuat laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum kepada otoritas terkait serta kepada seluruh pemegang saham.

Per tanggal 8 Januari 2020, Bank mulai memperdagangkan sahamnya kembali di Bursa Efek Indonesia, sesuai pengumuman No. Peng-UPT-00001/ BEI.PP3/01-2020. Pengumuman ini mencabut suspensi saham Bank sejak 2008 sampai 2019 , yang dimulai sebelum kepemilikan Bank diambil alih oleh J Trust Co., Ltd.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan pada Tahun Buku Terakhir

Perubahan Peraturan Perundang-undangan pada Tahun Buku Terakhir Sepanjang tahun 2019, Bank tidak memiliki informasi perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja Bank.

Standar Akuntansi Baru

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan periode berjalan diungkapkan di bawah ini:

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2020:
- PSAK 71 - "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72 - "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73 - "Sewa"
- Amandemen PSAK 15 - "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"

related to the share ownership by the Directors and Commissioners (Management Stock Option Program/ MSOP).

However, since B series shares of the Bank are still suspended since the takeover of the Bank by the Deposit Insurance Corporation, the conduct of share ownership by the Board of Directors and Commissioners as set forth in the Management Stock Option program cannot be implemented yet.

Meanwhile, the Bank has no Employee Stock Option (ESOP) program.

Realization of Utilization of Proceeds from Public Offering

J Trust Bank is a company operating in the banking industry which shares are listed in the stock exchange. In 2019, the Bank did not hold public offering therefore the Bank was not required to make report on realization of utilization of proceeds from public offering to relevant authorities and all shareholders.

In 8 January 2020, the Bank began trading its shares in the Indonesia Stock Exchange, according to announcement No. Peng-UPT-00001/BEI.PP3/01-2020. The announcement revoked the Bank's share suspension from 2008 to 2019, which began before the Bank was taken over by J Trust Co., Ltd.

Changes in Regulations in Current Year

In 2019, the Bank has no information on changes in regulations that significantly affect the Bank's performance.

New Prospective Accounting Standards

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current period financial statements are disclosed below:

Effective on or after January 1, 2020:
- PSAK 71 - "Financial Instruments"
- PSAK 72 - "Revenue from Contracts with Customers"
- PSAK 73 - "Leases"
- Amendments to PSAK 15 - "Investments in Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures"

- Amandemen PSAK 62 - "Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK 1 - "Penyajian Laporan Keuangan: Definisi Material" dan Amandemen PSAK 25 - "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Material"

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2021:
- Amandemen PSAK 22 - "Definisi Bisnis"

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2020:
- PSAK 74 - "Kontrak Asuransi"

Bank sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan.

Informasi Kelangsungan Usaha

Data Bank Indonesia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 melambat seiring dengan melemahnya kinerja investasi dan perdagangan. Ekspor masih tertahan karena imbas perang dagang antara AS dan Tiongkok yang masih berlanjut.

Ketidakpastian dan perlambatan ekonomi nasional dan global berdampak pula terhadap kinerja industri perbankan, yang tercermin dari penyaluran kredit yang hanya tumbuh 6,8% pada 2019 atau jauh di bawah target Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 12% maupun realisasi pertumbuhan kredit 11,7% pada 2018.

Meskipun tekanan pasar menguat dan membuat likuiditas mengetat, namun stabilitas keuangan perbankan masih terkendali dengan baik karena didukung oleh permodalan yang cukup kuat. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) pada 2019 tercatat sebesar 23,3%, sedikit meningkat dari 23% pada 2018. Sementara itu, rasio kredit terhadap simpanan (*Loan to Deposit Ratio*/LDR) mencapai 93,6% atau di atas batas aman yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) 92%.

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Bank

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap tumbuh di kisaran 5,3%, didukung dengan angka inflasi yang cukup rendah. Manajemen memastikan tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Bank pada masa mendatang.

- Amendments to PSAK 62 - "Insurance Contracts Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts"
- Amendments to PSAK 1 - "Presentation of Financial Statements: Definition of Material" and Amendments to PSAK 25 - "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Material"

Effective beginning on or after January 1, 2021:
- Amendment PSAK 22 - "Definition of Business"

Effective beginning on or after January 1, 2020:
- PSAK 74 - "Insurance Contracts"

The Bank is still assessing the impact of these accounting standards and interpretations on the financial statements.

Going Concerns

Data from Bank Indonesia showed economic growth decelerated in 2019, in line with weak investment and trade. Exports were halted as an impact of continued US-China trade war.

Uncertainty and slowdown in national and global economy also affected banking industry, which can be seen from an only 6.8% rise in lending in 2019, much lower than the target set by the Financial Services Authority OJK at 12% and loan growth of 11.7% in 2018.

As strong market pressures led to tight liquidity, the financial system stability was remained under control, supported by strong capital. The Capital Adequacy Ratio stood at 23.3% in 2019, slightly increase from 23% a year earlier. Meanwhile, Loan to Deposit Ratio (LDR) was at 93.6%, or above the safe limit set by Bank Indonesia (BI) at 92%.

Potentially Significant Matters on the Bank's Going Concerns

In 2020, economic growth is expected to continue growing at 5.3%, supported by low inflation. The Management ensures that there are no potential matters significantly affecting the Bank's business sustainability in the future.

Asesmen Manajemen atas Hal-Hal yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Bank

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya yang memadai untuk terus melanjutkan kegiatan bisnis. Selain itu, laporan keuangan konsolidasian juga telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Asesmen

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan manajemen dalam melakukan asesmen terhadap kelangsungan usaha, antara lain kinerja keuangan, struktur modal, solvabilitas, masalah internal, dan perkara hukum. Pada tahun 2019, Bank melanjutkan melakukan penataan secara berkesinambungan dan optimalisasi jaringan kantor serta jaringan ATM untuk mendukung kelangsungan usaha. Jika terdapat kekurangan infrastruktur pendukung lainnya, Bank akan memenuhi kekurangan tersebut tanpa mengganggu kondisi keuangan yang dimiliki. Dari sisi pasar, seiring perkembangan ekonomi baik global maupun nasional, Manajemen meyakini mampu menghadapi berbagai tantangan dan meraih peluang yang ada. Sumber daya manusia yang berkompeten, infrastruktur bisnis yang memadai, serta jaringan bisnis internasional yang dimiliki menjadi dasar keyakinan Manajemen akan pertumbuhan bisnis Bank di masa-masa yang akan datang.

Management Assessment of the Bank's Going Concerns

The Bank's management has assessed its ability to continue its business and believes that the Bank has adequate resources to continue its business activities. In addition, the consolidated financial statements have also been prepared on the basis of sustainable business.

Management Assumptions in Assessment

Several factors that management considers in conducting assessment on business continuity include the financial performance, capital structure, solvency, internal problem, and lawsuit. In 2019, the Bank has also undertaken continuous arrangement and optimization of office network and ATM network to support business continuity. Should there be a deficiency in other supporting infrastructure, the Bank will meet such needs without disrupting its financial condition. Meanwhile, in terms of market, along with the economic development both at global and national level, Management believes that the Bank would be able to face various challenges and to seize the opportunities that exist. Competent Human Resources, adequate business infrastructure, and internationally owned business network serve as the basis for Management's belief in the Bank's future business growth.

ASPEK PEMASARAN

Marketing Aspect

Posisi Bank di Industri Perbankan

Pada tahun 2019 Bank telah berhasil mengumpulkan dana pihak ketiga mencapai Rp12.806 miliar yang terdiri dari CASA (*current account – savings account*) sebesar Rp1.819 milliar dan deposito Rp10.987 milliar. Total dana pihak ketiga turun sebesar Rp442 milliar dibanding dengan pencapaian tahun 2018. Penurunan terjadi pada produk deposito sebesar Rp685 milliar, namun di lain sisi CASA meningkat sebesar Rp243 miliar.

Bank secara bertahap berusaha menurunkan dana-dana mahal pada produk deposito dan menggantinya dengan dana murah untuk menurunkan biaya dana (*Cost of Fund*), agar pendapatan Bank dapat meningkat. Upaya penurunan *Cost of Fund* juga dilakukan melalui peningkatan pemasaran produk CASA, yang naik sebesar 18% dari tahun sebelumnya.

Dalam mencapai kinerja tersebut, Bank terus mengembangkan jaringan baik melalui kantor cabang maupun penawaran jasa atau produk baru untuk menjangkau lebih banyak nasabah. Jumlah kantor cabang sampai dengan Desember 2019 terdiri dari 45 kantor dengan rincian 22 Kantor Cabang, 14 Kantor Cabang Pembantu, dan 9 Kantor Kas. Kantor tersebut tersebar di pulau Jawa, Sumatera, Pangkal Pinang, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali.

Untuk mengoptimalkan kinerja kantor cabang, pada tahun 2019 Bank menata ulang kantor-kantor cabang yang ada melalui perubahan status, penutupan, dan relokasi. Sebanyak 7 Kantor Cabang Pembantu diturunkan statusnya menjadi kantor kas, 2 Kantor Cabang Pembantu ditutup dan 2 kantor cabang direlokasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja cabang.

Bank juga mengurangi layanan ATM yang berada di lokasi publik, dengan penutupan 9 unit di lokasi publik dan relokasi 2 unit ATM mengikuti relokasi kantor. Pengurangan ini dikompensasi melalui fasilitas yang diberikan Bank di mana nasabah yang menggunakan kartu ATM JTrust Bank tidak dikenakan biaya penarikan di ATM yang berlogo ATM Bersama dan Prima.

Bank's Position in the Banking Industry

In 2019 the Bank managed to collect third party funds of IDR12,806 billion comprising CASA (current account – savings account) of IDR1,819 billion and deposits of IDR10,987 billion. Total third party funds decreased IDR442 billion compared to 2018. The decrease was due to a decline in deposits of IDR685 billion, but on the other hand CASA increased IDR243 billion.

The Bank in stages managed to reduce costly funds in deposit products and replace them with low-cost funds in order to reduce Cost of Fund, to ensure the Bank's revenue increase. In reducing Cost of Fund, the marketing of CASA products was increased, resulting in a 18% growth from the previous year.

In achieving that performance, the Bank expanded network through branches or offering of new services or products to reach more customers. Total branches until December 2019 were 45 offices, comprising 22 Branches, 14 Sub-Branch Offices, and 9 Cash Offices. The offices were spread in Java, Sumatra, Pangkal Pinang, Sulawesi, Kalimantan, and Bali.

To optimize the performance of branches, in 2019 the Bank reorganized existing branch offices by changing the status, closing, and relocating of branches. Seven Sub-Branch Offices were downgraded to cash offices, 2 Sub-Branch Offices were closed and 2 branches were relocated to improve and increase the performance of branches.

The Bank also reduced ATM services in public areas, by closing 9 units in public locations and relocating 2 units following branch relocations. This reduction was compensated with facilities provided by the Bank to allow customers using JTrust Bank ATM cards to be exempted from withdrawal fees in ATMS with ATM Bersama and Prima logos.

Sementara itu, Bank juga memperkaya produk dan jasa yang dimiliki. Dengan memperkaya produk dan jasa yang ditawarkan, Bank ingin menjadi bank pilihan dalam memenuhi layanan kebutuhan transaksi untuk seluruh masyarakat dan menjadi bank penyedia jasa layanan prima, khususnya kepada kelompok nasabah utama Bank. Untuk itu, Bank mengoptimalkan jaringan kantor dan ATM untuk lebih mendekatkan diri dengan segmen ritel dan melakukan publikasi produk, layanan, dan korporasi melalui promosi dan iklan untuk meningkatkan *awareness* J Trust Bank di masyarakat yang pada akhirnya akan memperluas segmen nasabah.

Hingga Desember 2019, produk dan jasa yang ditawarkan oleh Bank antara lain adalah:

- Tabungan JTrust
- Tabungan MOE
- Tabungan JTrust Bisnis
- Tabungan Rencana JTrust
- TabunganKu
- Giro JTrust (IDR)
- Valas JTrust (USD, SGD, EUR, JPY, AUD)
- Deposito Rupiah JTrust
- Deposito Valas JTrust (USD, SGD, EUR, JPY, AUD)

Sementara itu, layanan lainnya yang ditawarkan kepada nasabah adalah:

- Referensi Bank
- Kliring
- Kiriman Uang Dalam dan Luar Negeri
- *Safe Deposit Box*
- *Lounge Facility*
- *Bancassurance*
- *Payment* dan *Billing*
- *Payroll Service*
- Kartu ATM dan Debit
- *Internet Banking/Mobile Banking*

Pangsa Pasar

Pasar likuiditas di tahun 2019 masih menunjukkan tingkat persaingan yang ketat, yang terlihat dengan kompetisi suku bunga yang tinggi di antara bank-bank nasional. Ketatnya likuiditas secara langsung akan meningkatkan *Cost of Fund* dalam mendapatkan dana nasabah. Kondisi ini menjadi tantangan sendiri bagi Bank karena selain menjaga likuiditas dan pertumbuhan yang telah ditargetkan, Bank juga harus mampu menciptakan loyalitas nasabah untuk mempertahankan dananya di Bank. Untuk membangun loyalitas nasabah, Bank akan tetap menjaga hubungan yang baik, layanan yang optimal, serta transparansi informasi terhadap produk dan layanan kepada nasabah, sehingga nasabah mengerti kewajiban dan manfaat produk yang dipilih.

Meanwhile, the Bank also enriched its products and services. By enriching the products and services, the Bank wants to be the bank of choice in fulfilling transactions need of the people and the bank which provides prime services, especially to the Bank's main customers category. Therefore, the Bank optimized branch and ATM network to be closer to retail segment and performed product, service, and corporation publications through promotions and advertisements to increase the awareness of JTrust Bank in the public in order to expand customer segment.

Until December 2019, products and services offered by the Bank included:

- JTrust Savings
- MOE Savings
- JTrust Bisnis Savings
- JTrust Planned Savings
- TabunganKu
- JTrust Current Account (IDR)
- JTrust Forex (USD, SGD, EUR, JPY, AUD)
- JTrust Rupiah Deposit
- JTrust Forex Deposit (USD, SGD, EUR, JPY, AUD)

Meanwhile, other services offered to customers included:

- Bank Reference
- Clearing
- Overseas and Domestic Money Transfer
- Safe Deposit Box
- Lounge Facility
- Bancassurance
- Payment and Billing
- Payroll Service
- ATM and Debit Cards
- Internet Banking/Mobile Banking

Market Share

Liquidity market in 2019 still showed a tight competition, as reflected in high rates competition between national banks. Tight liquidity would directly increase Cost of Fund in attracting customer funds. Such condition posed challenge to the Bank because apart from maintaining liquidity and growth that had been targeted, the Bank should manage customers loyalty to maintain their funds in the Bank. To build customer loyalty, the Bank managed good relationships, optimal services, and information transparency to products and services to customers, making customers understand about the obligations and benefits of selected products.

Penetrasi Pasar

Strategi penetrasi pasar dilakukan dengan cara memperluas segmen pasar Bank untuk mendapatkan nasabah-nasabah baru. Upaya penetrasi dilakukan dengan mengoptimalkan pemasaran produk melalui melalui *event-event* yang diikuti oleh J Trust Bank. Bank berpartisipasi dalam beberapa acara besar seperti Ennichisai, Jicomfest, dan Ekiden 2019 untuk penetrasi pasar. Kegiatan yang sama juga dilakukan oleh cabang-cabang dengan bentuk dan acara sesuai dengan daerahnya masing-masing.

Penetrasi pasar juga dilakukan secara parsial dengan mengenalkan produk Bank dengan cara *joint visit* bersama kepada nasabah dari J Trust Group dan nasabah JTrust Olympindo. Selain itu, Bank juga menawarkan fasilitas *payroll* kepada perusahaan-perusahaan untuk fasilitas pembayaran gaji karyawan melalui Bank. Melalui fasilitas ini Bank dapat menjaring nasabah dalam jumlah yang besar melalui suatu proses yang lebih cepat.

Market Penetration

Market penetration strategy was implemented by expanding the Bank's market segment to attract new customers. Penetration was made by optimizing product marketing through events participated by J Trust Bank. The Bank participated in big events such as Ennichisai, Jicomfest, and Ekiden 2019 for market penetration. Similar activities were performed by branches with forms and events suitable with their respective areas.

Market penetration was also performed partially by introducing the Bank's products through joint visit to customers of J Trust Group and JTrust Olympindo. Moreover, the Bank also offered payroll facility to companies for payments of employee salaries through the Bank. This facility allows the Bank to attract customers in large numbers through a quicker process.

Strategi Pemasaran Bank 2019

Dalam menjangkau lebih banyak nasabah dan menjaga loyalitas nasabah yang telah ada, selama tahun 2019 Bank telah melakukan beberapa inisiatif berupa peluncuran *internet* dan *mobile banking* serta menambah layanan yang dapat diakses melalui aplikasi *online* tersebut.

Berdasarkan Surat OJK No S-45/PB.311/2019 tanggal 29 Mei 2019 serta Surat BI No 21/226/DKSP/Srt/B, *internet banking* dan *mobile banking* J Trust Bank dengan nama J Trust Net dan J Trust Mobile telah resmi diluncurkan kepada nasabah melalui *soft launching* pada 21 Agustus 2019. Peluncuran tersebut dilakukan serentak kepada seluruh nasabah JTrust Bank, karyawan dan staf J Trust Bank, anak perusahaan PT J Trust Olympindo Multi Finance dan PT J Trust Investments Indonesia.

Sampai dengan Desember 2019, nasabah pengguna JTrust Net & JTrust Mobile mencapai lebih dari 4.000 nasabah atau 12% dari total nasabah retail J Trust Bank. Beberapa layanan atau fitur yang diberikan lewat J Trust Net dan J Trust Mobile adalah:

- Informasi Rekening: Giro, Tabungan, dan Deposito
- Cek saldo
- Transfer
- Bayar Tagihan
- Isi Pulsa
- Top Up OVO, Gopay
- Modul Penerimaan Negara/Pajak
- Pembayaran & Pembelian: TV/Internet, PDAM, Asuransi, HP, Tiket Pesawat dan Kereta Api
- BPJS
- dll

The Bank's Marketing Strategy in 2019

In attracting more customers and maintaining the loyalty of existing customers, in 2019 the Bank launched some initiatives such as internet and mobile banking while adding the number of services that can be accessed through the online applications.

Based on OJK Letter No S-45/PB.311/2019 dated 29 May 2019 and BI Letter No 21/226/DKSP/Srt/B, internet banking and mobile banking of J Trust Bank under the name of J Trust Net and J Trust Mobile were officially launched through soft launching on 21 August 2019. The launching was done simultaneously to all customers of J Trust Bank, employees and staff of JTrust Bank, subsidiaries PT J Trust Olympindo Multi Finance and PT J Trust Investments Indonesia.

Until December 2019, users of JTrust Net and JTrust Mobile reached more than 4,000 customers or 12% of total retail customers of J Trust Bank. Several services or features provided by J Trust Net and J Trust Mobile are:

- Account Information: Current Account, Savings, and Deposits
- Balance checking
- Transfer
- Bill Payments
- Mobile Balance Top-Up
- Top Up OVO, Gopay
- Tax/State Revenue Module
- Payment & Purchase: TV/Internet, PDAM, Insurance, Phone, Airflight and Train Ticket
- BPJS
- etc

Pendaftaran layanan J Trust Net dan J Trust Mobile bisa dilakukan secara mudah dan sederhana melalui aplikasi secara *online*, ataupun melalui jaringan kantor cabang J Trust Bank. Sistem keamanan sangat terjamin dengan metode *One Time Password* (OTP), dan interkoneksi *Password* dan *user ID* dalam J Trust Mobile (Aplikasi) dengan J Trust Net (Web). Selain itu, nasabah juga diberi kemudahan untuk notifikasi transaksi melalui layanan J Trust Alert System melalui SMS (pesan singkat).

Strategi Pemasaran 2020

Untuk tahun 2020, dalam perencanaan pengembangan jaringan, Bank akan menitikberatkan pada penambahan kantor kas untuk menunjang pelayanan kantor cabang, yaitu berbentuk layanan kas. Jumlah kantor kas yang akan ditambah adalah 1 (satu) kantor. Penambahan kantor kas dilakukan secara selektif dengan memilih lokasi yang memang memerlukan kantor kas untuk menunjang layanan kantor cabang, khususnya untuk wilayah cabang yang berlokasi di pusat keramaian. Kebijakan ini dilaksanakan untuk memaksimalkan pelayanan kepada nasabah dan diharapkan akan menambah jumlah transaksi nasabah yang sudah ada dan dapat menambah nasabah baru.

Pengembangan Produk

Sinergi dan aliansi dilakukan dengan bermitra dengan beberapa perusahaan asuransi untuk mendukung peningkatan *fee based income*. Bank bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk menjual produk *bancassurance* di mana Bank berindak sebagai agen dan juga untuk memenuhi *cover* asuransi kredit para debitur. Melalui kerja sama ini akan terbentuk sinergi saling bermanfaat antara Bank dan perusahaan asuransi. Sedangkan manfaat bagi debitur adalah debitur akan lebih mudah memilih perusahaan asuransi untuk melindungi aset/agunan dalam proses kredit kepada Bank.

Bank bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi yang dapat dipilih oleh debitur sesuai dengan kebutuhannya. Beberapa kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan produk melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi adalah:

1. Kerja sama Bancassurance dengan PT Asuransi Multi Artha Guna pada 21 Januari 2019 untuk produk-produk:
   a. Asuransi Magna Mobil
   b. Asuransi Magna Property
   c. Asuransi Gempa Bumi
   d. Asuransi Heavy Equipment
   e. Asuransi Contractor All Risk
   f. Asuransi Marine Hull
   g. Asuransi Marine Cargo

Registration of J Trust Net and J Trust Mobile services can be done in easy and simple manner through online applications, or branch network of J Trust Bank. Security system is highly secure using One Time Password (OTP) method, and interconnected Password and user ID in J Trust Mobile (Application) with J Trust Net (Web). Furthermore, customers are given simplicity for transaction notification through J Trust Alert System via SMS (short message).

Marketing Strategy 2020

For 2020, in the network development planning, the Bank will emphasize on the addition of cash offices to support the service of branches, through cash services. The number of cash offices will be added by 1 (one) office. The addition of cash office will be done selectively by choosing a location which needs cash office to support the service of branch office, especially for branch located in public place. This policy is aimed at maximizing service to customers and is expected to add the number of transactions from existing customers and to add new customers.

Product Development

Synergy and alliance are performed in partnership with several insurance firms to help increase fee based income. The Bank cooperates with several insurance firms to sell bancassurance products in which the Bank acts as an agent and also fulfills insurance covers of debtors' loans. This synergy will create mutual synergy between the Bank and insurance firms. Meanwhile, the benefit for debtors is debtors will have simplicity to choose insurance firms to protect their assets/collaterals in the credit process to the Bank.

The Bank cooperated with several insurance firms that debtors could select based on their needs. Several activities related to product development through cooperation with insurance firms are:

1. Cooperation on Bancassurance with PT Asuransi Multi Artha Guna on 21 January 2019 for products:
   a. Magna Mobil Insurance
   b. Magna Property Insurance
   c. Earthquake Insurance
   d. Heavy Equipment Insurance
   e. All Risk Contractor Insurance
   f. Marine Hull Insurance
   g. Marine Cargo Insurance

2. Pemasaran Produk *Bancassurance* Simas Investa Optima dan Simas Investa Optima Dollar bekerja sama dengan PT Asuransi Simas Jiwa pada tanggal 7 Februari 2019.
3. Kerja sama Bancassurance Asuransi Jiwa Kredit dengan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses tanggal 27 Mei 2019.

Service Excellence

Untuk melakukan pemenuhan kebutuhan nasabah dan peningkatan layanan yang berkualitas, JTrust Bank berupaya meningkatkan *customer engagement* melalui Kantor Cabang, *Frontliner*, *Customer Care,* dan JTrust Call yang merupakan *Customer Touch Point* bagi nasabah, antara lain dengan:

1. Standardisasi Kelengkapan Kantor Cabang
2. Penilaian Cabang terhadap *Service Quality Index*
3. Perubahan *Call Center* menjadi *Contact Center*
4. *Ticketing Online System* (Penanganan Sistem Keluhan Nasabah secara *online*)

Langkah-langkah tersebut diambil sebagai langkah dan tanggung jawab Bank untuk memberikan layanan yang baik ke nasabah. Salah satu *Service Value* Bank adalah *Ultimate Customer First* di mana Bank mengimplementasikan layanan ke nasabah sesuai *Service Value*. Salah satu *Core Value* Bank yaitu *Customer First* di mana Nasabah adalah prioritas utama bagi perusahaan dan *stakeholder*. Memenuhi kebutuhan nasabah sehingga dapat melampaui kepuasan nasabah merupakan hal yang penting bagi Bank dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis Bank di era digitalisasi perbankan.

Hal ini menunjukkan J Trust Bank sangat menghargai dan melayani nasabah secara optimal dan berkesinambungan sesuai dengan *Service Value* J Trust Bank.

Sebagai komitmen Bank untuk nasabah, Bank menyiapkan langkah perubahan dan perbaikan yang akan dijalankan di tahun 2020, yaitu:

1. Penempatan Mesin Antrean/*Queuing Machine*
2. Kompetisi *Best Frontliner Award*
3. Perubahan Desain Baru untuk Seragam Frontliner
4. Peningkatan *Soft Skills Frontliner* dan Karyawan Kantor Cabang
5. Penambahan *Staff/Call Center Agent* berbahasa Jepang

Bank berharap perubahan yang dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi digitalisasi perbankan, dan akan membuat nasabah lebih nyaman bertransaksi di J Trust Bank, sehingga tercipta *Customer Experience* di mana nasabah dan Bank akan tumbuh dan berkembang bersama.

2. Marketing of Bancassurance Products Simas Investa Optima and Simas Investa Optima Dollar in cooperation with PT Asuransi Simas Jiwa on 7 February 2019.
3. Cooperation on Bancassurance Asuransi Jiwa Kredit with PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses on 27 May 2019.

Service Excellence

To fulfill customer needs and increase quality services, JTrust Bank aims to increase customer engagement through Branch Office, Frontliner, Customer Care, and JTrust Call which are the Customer Touch Point for customers, including by:

1. Standardization of Branch Office Completeness
2. Branch Evaluation to Service Quality Index
3. Changes of Call Center into Contact Center
4. Ticketing Online System (Online System Handling of Customer Complaints)

The steps are taken as the Bank's move and responsibility to provide quality service to customers. One of the Bank's Service Value is Ultimate Customer First in which the Bank implements services to customers according to Service Value. One of the Bank's Core Value is Customer First in which Customers are the main priority for company and stakeholders. It is important for the Bank to fulfill customer needs to exceed customer satisfaction in increasing the Bank's business growth in the banking digitalization era.

This shows that J Trust Bank really appreciates and serves customers in an optimal and sustainable manner in line with Service Value of J Trust Bank.

As the Bank's commitment for customers, the Bank prepares steps for changes and improvements that will be implemented in 2020, such as:

1. Placement of Queueing Machine
2. Competition of Best Frontliner Award
3. Change of New Design for Frontline Uniform
4. Improvement of Soft Skills of Frontline and Employees in Branch Offices
5. Addition of Japanese-speaking Staff/Call Center Agent

The Bank expects the changes are in line with the development of banking digitalization technology, and will make customers to be more comfortable in making transactions in J Trust Bank, creating Customer Experience in which customers and the Bank will grow and develop together.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

Penerapan manajemen risiko dan tata kelola Bank yang tepat dan sehat meningkatkan nilai tambah dan memberi gambaran risiko yang komprehensif.

Accurate and healthy implementations of risk management and governance by the Bank will increase added value and provide comprehensive risk description.

TATA KELOLA EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

1. SISTEM MANAJEMEN RISIKO

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut Bank) telah menerapkan manajemen risiko berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/ 016 tanggal 18 Maret 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Sejalan dengan ketentuan OJK tersebut, penerapan manajemen risiko dan tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) yang tepat dan sehat akan memiliki peran dalam meningkatkan nilai tambah dan memberi gambaran yang komprehensif tentang potensi risiko dan kerugian bank di masa mendatang yang disesuaikan dengan kompleksitas dan kondisi internal Bank.

1.1. Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Dalam kerangka penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang efektif, Bank telah menentukan struktur manajemen risiko disertai dengan tugas dan tanggung jawab pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

Dalam rangka pengawasan dan pengelolaan risiko Bank serta pelaksanaan *Good Corporate Governance,* Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko di tingkat Komisaris dan di tingkat Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko (KMR).

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun dan menyesuaikan kebijakan strategi dan pedoman penerapan

GOVERNANCE EMITEN OR PUBLICK COMPANY

1. RISK MANAGEMENT SYSTEM

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (referred as to Bank) has implemented risk management based on the provisions of the Regulation of Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 dated March 18, 2016, concerning Implementation of Risk Management for Banks, and has also been implemented in accordance with Circular Letter of Otoritas Jasa Keuangan Number 34 /SEOJK.03/2016dated September 1, 2016 concerning Implementation of Risk Management for Banks.

In line with OJK regulation, with appropriate and healthy application of risk management and the Bank's governance (GCG) will have a role in increasing the added value and provide a comprehensive picture of the potential risk and loss, including mitigation of future risks that are tailored to the complexity as well as the internal condition of the Bank

1.1 Risk Management Structure Organizations

In the application of risk management and effective governance, the Bank has set an organizational structure along with the duties and responsibilities to all units are adapted to the purpose and business policy, size and complexity of the Bank's business activities.

In the framework of supervision and risk management of the Bank and the implementation of Good Corporate Governance, the Board is assisted by the Risk Monitoring Committee at the Commissioner level and at the level of the Board of Directors is assisted by the Risk Management Committee.

Risk Management Committee has the duty and responsibility of formulating and adjusting policy strategies and guidelines

manajemen risiko dan untuk itu dijamin pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko berjalan efektif. Mengevaluasi perkembangan dan kondisi Profil Risiko, serta memberikan saran-saran dan langkah-langkah perbaikan untuk membahas masalah yang spesifik pada jenis risiko tertentu dan membutuhkan putusan segera dengan dilakukan rapat KMR.

Divisi Manajemen Risiko (RMD)

RMD di bawah EVP Risk adalah unit kerja yang independen terhadap unit usaha/ operasional unit kerja. RMD memiliki fungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dan meminimalkan potensi dampak dari berbagai jenis risiko.

Struktur organisasi RMD membawahi 5 bidang yaitu (1) Risiko Kredit (2) Risiko Pasar & Likuiditas (3) Risiko Operasional dan (4) Quality Assurance Branch serta (5) Quality Assurance Head Office.

Tugas dan tanggung jawab RMD meliputi:

a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan, kebijakan, strategi dan kerangka kerja manajemen risiko,
b. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko,
c. Pemantauan terhadap strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi,
d. Memantau posisi/risiko eksposur secara keseluruhan dan jenis risiko,
e. Penerapan *stress testing* untuk mengetahui dampak penerapan kebijakan dan strategi pengelolaan risiko,
f. Melakukan penilaian risiko terhadap produk dan/atau aktivitas baru yang diusulkan,
g. Melakukan review dan rekomendasi batas risiko dari unit bisnis dan operasi yang diusulkan,
h. Menyiapkan dan menyampaikan laporan profil risiko ke Komite Manajemen Risiko secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
i. Menyusun laporan KPMM sesuai Profil Risiko Bank (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*/ICAAP) secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan OJK.

for risk management and to ensure that the implementation process and risk management system to be effective. Evaluate the development and the condition of the risk profile, as well as provide advice and remedial measures to address problems specific to certain types of risk and requires immediate decision to do Risk Management Committee meeting.

Risk Management Division (RMD)

RMD under EVP Risk is a working unit which is independent of the work unit business/ operational. RMD has the function to identify, measure, monitor and control risks and to minimize the potential impact of various types of risk.

The RMD organizational structure is in charge of 5 departement, namely (1) Credit Risk (2) Market & Liquidity Risk (3) Operational Risk, (4) Quality Assurance Branch and (5) Quality Assurance Head Office.

RMD tasks and responsibilities include:

a. Provide input to the Board of Directors in the preparation, policy, strategy and risk management framework,
b. Develop procedures and tools for the identification, measurement, monitoring and risk control,
c. Monitoring of the risk management strategy that has been approved by the Board of Directors,
d. Monitoring the position / exposure risk overall and the types of risks,
e. Application of stress testing to determine the impact of the implementation of risk management policies and strategies,
f. Conducting risk assessment on the proposed products and / or new activity,
g. Undertaking a review and recommendation of risk limits of the proposed business units and operations,
h. Prepare and submit reports to the risk profile of the Risk Management Committee on a regular basis to be submitted to the Board of Directors and the Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
i. Prepare reports the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) on a regular basis to be submitted to the Board of Directors and OJK.

1.2 Struktur Organisasi Manajemen Risiko Bank

Struktur Organisasi Manajemen Risiko Bank adalah sebagai berikut:

1.2 Risk Management Organization Structure

The Bank's Risk Management organization structure is:

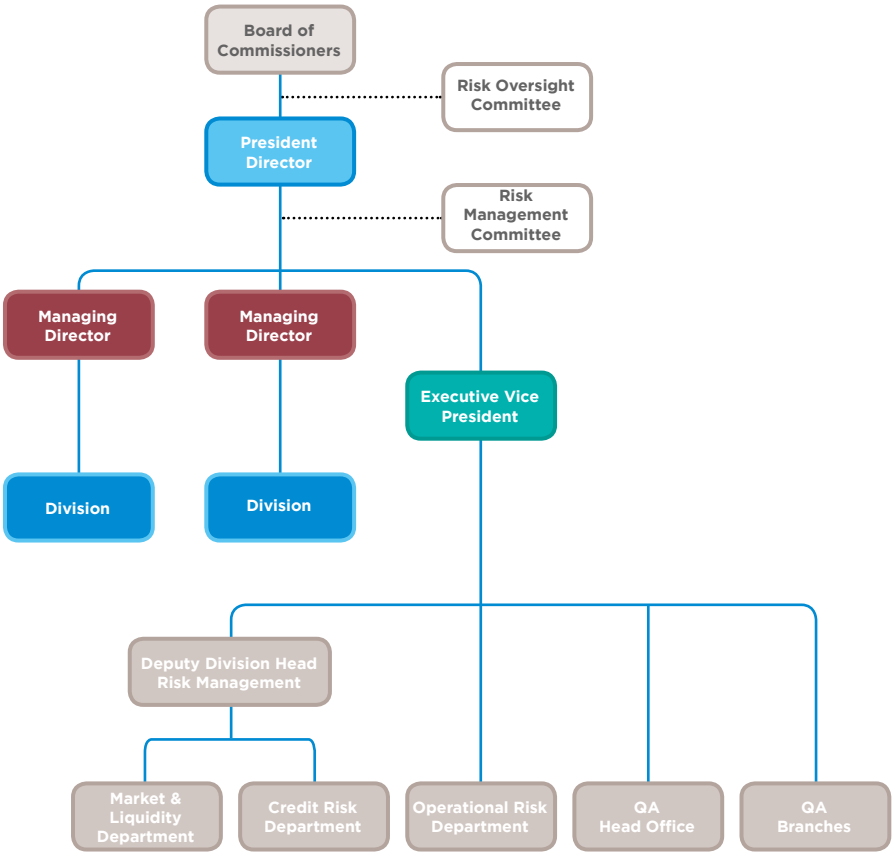

2. JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA [102-15]

Pengelolaan pada 8 (delapan) risiko Bank adalah sebagai berikut:

2.1. Risiko Kredit

Pengelolaan risiko kredit dengan menerapkan organisasi manajemen risiko kredit yaitu *four eyes principles* dalam proses pemberian & persetujuan kredit pada rapat Komite Kredit, penetapan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), dan lebih dirinci dijelaskan pada Pengungkapan Kualitatif Manajemen Risiko Kredit yang tertuang pada Laporan Tahunan ini.

2.2. Risiko Pasar

Pengelolaan risiko pasar yang disebabkan karena risiko suku bunga dan risiko nilai tukar dilakukan dengan pengelolaan portofolio aset dan liabilities yang disesuaikan jangka waktu dan suku bunga (*fixed/floating*).

2. TYPE OF RISK AND RISK MITIGATION [102-15]

Management at 8 (eight) risks of Bank are as follows:

2.1. Credit Risk

Credit risk management by applying a credit risk management organization that is four eyes principles in credit approval and approval process at Credit Committee meetings, determination of credit disbursement limits (BWMK), and more details are described in the Credit Risk Management Qualitative Disclosures contained in this Annual Report.

2.2. Market Risk

Market risk management due to interest rate risk and exchange rate risk is performed through the management of asset and liability portfolios that are adjusted for time period and fixed rate (fixed/floating).

Sebagai Bank devisa, tentunya terdapat risiko fluktuasi nilai tukar (*Foreign* Risiko) sehingga pengelolaan aset dan pasiva valasnya dalam posisi sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, untuk menghindari potensi kerugian jika terjadi fluktuasi nilai tukar. Penjelasan lebih rinci pada Pengungkapan Kualitatif Manajemen Risiko Pasar yang tertuang pada Laporan Tahunan ini

As a foreign exchange bank is of course a risk of exchange rate fluctuation so that its asset and liabilities management are in a position in accordance with Bank Indonesia provisions, to avoid potential losses in case of exchange rate fluctuations. A more detailed explanation of the Qualitative Disclosure of Market Risk Management as stated in this Annual Report

2.3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul karena bank tidak mampu memenuhi kewajban untuk nasabah atau pihak lawan yang telah jatuh waktu. Efektivitas pengelolaan *gap* likuiditas (*maturity gap* dan proyeksi arus kas) untuk batas risiko likuiditas sedini mungkin, dan juga kontrol risiko likuiditas khususnya pada saat kondisi stres. JTrust Bank juga telah memiliki & menerapkan Standar Prosedur Operasi *Liquidity Contigency Plan* (LCP) atau Rencana Pendanaan Kontinjensi, selain itu senantiasa melakukan akses ke pasar uang dengan terus membina hubungan dengan Bank koresponden.

2.3. Liquidity Risk

Liquidity risk arises because the bank is unable to fulfill the obligation for the customer or the opponent who has fallen time. Effectiveness of managing liquidity gaps (maturity gaps and cash flow projections) for liquidity risk limits as early as possible, as well as control of liquidity risk especially in times of stress. JTrust Bank also has owned & implemented Standard Operating Procedures for LCP (Liquidity Contigency Plan) Contingent Funding Plan, besides always making access to money market by continuing to build relationship with correspondent Bank.

2.4. Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional juga menjadi perhatian Bank yang disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan faktor manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal.

2.4. Operational Risk

Operational risk management is also a concern of the Bank due to inadequate and/or inadequate internal processes, human factor errors, system failures, or external problems.

2.5. Risiko Hukum

Bank telah melakukan pengelolaan risiko hukum antara lain:

- peninjauan kembali (*review*) atas dokumen hukum, perjanjian atau kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.
- Inventarisasi atas kasus-kasus hukum yang terjadi termasuk di dalamnya perkembangan dari setiap kasus hukum. Penanganan kasus hukum disusun berdasarkan skala prioritas dan seluruh perkembangannya terpantau dengan baik, untuk ditindaklanjuti melalui penyelesaian yang mengandung potensi risiko hukum paling sedikit.

2.5 Legal Risk

The Bank has conducted legal risk management, among others:

- review of legal documents, agreements or contracts with third parties.
- Inventory of legal cases that occur including the development of each legal case. The handling of legal cases is based on a priority scale and all of its developments are well monitored, to be followed through with a solution containing the least potential legal risk.

2.6. Faktor Reputasi

Pengelolaan risiko oleh Bank dilakukan dengan cara pemantauan terhadap media publikasi dengan bekerja sama dengan jasa pihak ketiga, melakukan pemantauan terhadap keluhan nasabah guna menangani keluhan dengan segera dengan optimalisasi

2.6. Reputation Factor

Risk management by the Bank is done by monitoring the publication media by working with third party services, monitoring the Customer Complaint to handle the Complaint immediately with the optimization of Call Center function. In addition, the Bank also

fungsi *Call Center*. Selain itu, Bank ikut ambil bagian dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya bersama dengan nasabah, termasuk di dalamnya sebagai sponsor dalam berbagai kegiatan masyarakat. Meningkatkan pelaksanaan Transparansi Informasi Keuangan kepada pemangku kepentingan seperti penyajian informasi keuangan, penyempurnaan *website* Bank, serta melaksanakan *press release* dengan media.

2.7. Risiko Strategi

Pengelolaan risiko ini dengan cara melakukan pengawasan atas kinerja keuangan dengan membandingkan antara target yang ingin dicapai oleh Bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.

2.8. Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan dengan melakukan pemantauan dan reminder ke unit kerja terkait kewajiban pelaporan ke regulator dengan didukung sistem *Compliance Report Monitoring* (CRM), pemantauan terhadap Kebijakan Kepatuhan dan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, pemantauan terhadap pengkinian data nasabah dan penerapan *single CIF* dan rekening pasif/dorman, Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris sesuai dengan ketentuan Regulator.

3. TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Tinjauan atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko pada keempat pilar sistem manajemen risiko telah dilakukan secara memadai yang meliputi:

a. Perumusan Tingkat Risiko
Perumusan *risk appetite* dan *risk tolerance* sudah memadai dan selaras dengan tujuan strategis dan bisnis bank yang ditetapkan dalam RBB. Parameter *risk tolerance* secara *bank wide* didokumentasikan dalam ketentuan internal di *Risk Appetite Statement & Risk Tolerance*.

b. Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi
Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan

takes part in the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) program, as well as following other social activities with customers, including as a sponsor in various community activities. Improve the implementation of Financial Information Transparency to stakeholders such as presentation of financial information, improving the Bank's website, and implementing press releases with the media.

2.7. Strategy Risk

This risk management by overseeing the financial performance by comparing the target targets to be achieved by the Bank in accordance with the Bank's Business Plan.

2.8. Compliance Risk

Compliance risk management by monitoring and reminders to work units related to reporting obligations to regulators supported by Compliance Report Monitoring (CRM) system, monitoring of Compliance Policy and Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing Policy, monitoring of updating of customer data and application of single CIF and passive/ dormant accounts, Implementation of Anti Money Laundering and Terrorist Financing Programs in accordance with the provisions of the Regulator.

3. REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

A review of the effectiveness of Risk Management implementation on the four pillars of the risk management system has been adequately conducted which includes:

a. Formulation of Risk Level
The formulation of risk appetite and risk tolerance is adequate and in line with the strategic and business objectives of the bank set out in RBB. The bank wide risk tolerance parameters are documented in the internal provisions in Risk Appetite Statement & Risk Tolerance.

b. Adequacy of active supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors
The adequacy of active supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors, including the exercise of the

Komisaris dan Direksi dinilai memadai. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Risiko, antara lain:

1. Mengevaluasi dan menganalisis kecukupan kebijakan manajemen risiko secara berkala.
2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko secara triwulanan dan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran.
3. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko.

c. Alat Organisasi Manajemen Risiko

Alat organisasi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif dinilai memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam setiap kegiatan usaha, antara lain:

1. Dalam mengelola risiko kredit menerapkan *four eyes principles* yaitu Unit Bisnis dan Unit Credit Risk Review. Delegasi wewenang diatur dalam ketentuan internal tentang Komite Kredit (KK) dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) dan dievaluasi secara rutin oleh pejabat yang berwenang.
2. Dalam pengelolaan risiko pasar dan likuiditas, fungsi manajemen risiko terdiri dari Divisi Treasury & Capital Market, Divisi Head Operation, Divisi Credit Administration dan Divisi Manajemen Risiko.
3. Dalam pengelolaan risiko operasional terdapat pemisahan tugas dan wewenang pembuat, pemeriksa, penandatangan (segregasi tugas dan *dual control*) terhadap pelaksanaan semua kegiatan operasional di unit kerja.
4. Untuk mengembangkan kompetensi dalam Manajemen Risiko, adalah wajib bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan juga pejabat sampai empat tingkat di bawah Direksi untuk mengikuti pelatihan sertifikasi Manajemen Risiko. Selain itu, *refreshment* kepada Sumber Daya Manusia juga dilakukan secara rutin.

d. Sistem Informasi

Dukungan sistem informasi untuk penerapan manajemen risiko dinilai cukup memadai, antara lain persetujuan transaksi dan delegasi wewenang di sistem informasi Core Banking, pelaksanaan *Risk Control Self Assessment (RCSA)* dalam pengukuran risiko operasional,

authority and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors is considered adequate. The Board of Commissioners has established Risk Monitoring Committee, among others:

1. Evaluate and analyze the adequacy of risk management policies on a regular basis.
2. Evaluate and analyze quarterly risk profile reports and Bank Half Rate on a semi-annual basis.
3. Supervise and evaluate the performance of the Risk Management Committee and Risk Management Working Unit.

c. Risk Management Organization Tool

Organizational tools that support the implementation of Risk Management are effectively assessed with clear authority and responsibility in every business activity, including:

1. In managing credit risk there is separation of loan officer, between Business Unit and Credit Risk Review Unit. Delegation of authority is governed in the internal provisions of the Credit Committee (KK) and the Limit of Authority to Declare Credit (BWMK) and regularly evaluated by authorized officials.
2. In the management of market risk and liquidity, the risk management function consists of the Treasury & Capital Market Division, Head Operations Division, Credit Administration Dvision and Risk Management Division.
3. In operational risk management there is a separation of duties and authority of maker, checker, signer (task segregation and dual control) on the implementation of all operational activities in the work unit.
4. To develop competence in Risk Management, it is mandatory for the Board of Commissioners, Board of Directors, as well as officials up to four levels under the Board of Directors to attend Risk Management certification training. In addition, refreshment to Human Resources is also done routinely.

d. Information Systems

Information system support for risk management implementation is considered sufficient, including transaction approval and delegation of authority in Core Banking information system, Risk Control Self Assessment (RCSA) implementation in

sistem *Compliance Report Monitoring* (CRM) sebagai *reminder* ke unit kerja pelapor mengenai kewajiban penyampaian Laporan kepada Regulator.

1. PENGUNGKAPAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

I. EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Perkembangan ekonomi dunia di tahun 2019 dirasa sulit secara tidak langsung mempengaruhi bisnis perbankan nasional, penerapan manajemen risiko dan tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) yang tepat dan sehat akan sangat memiliki peran dalam meningkatkan nilai tambah dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi risiko dan kerugian Bank di masa mendatang yang disesuaikan dengan kompleksitas serta kondisi internal bank.

Bank telah menerapkan manajemen risiko berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dan peraturan pelaksanaannya.

Untuk mencapai tujuan di atas, maka diperlukan adanya budaya risiko (*risk awareness)* dan kemampuan teknis yang memadai dari pada seluruh unit kerja di Bank, di mana hal ini menjadi tanggung jawab dan melibatkan seluruh unit kerja di Bank.

Efektivitas penerapan tata kelola dan kerangka kerja manajemen risiko oleh Bank meliputi 4 (empat) pilar yaitu:

a. **Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari pengawasan Manajemen,**
   Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Pengawasan Dewan Komisaris meliputi antara lain:
   (1) Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko *(risk tolerance*) Bank;

operational risk measurement, Compliance Report Monitoring (CRM) system as reminder to reporting unit regarding the obligation to submit the Report to the Regulator.

1. PENGUNGKAPAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

I. IMPLEMENTATION OF EXPOSURE RISKS AND RISK MANAGEMENT

Economic development and business for the year 2019 which is considered quite difficult indirectly affect the business of national banking, risk management and Good Corporate Governance (GCG) is appropriate and healthy would have a role in increasing the added value and provides a comprehensive overview of the potential and the risk of future losses in the Bank that are tailored to the complexity and the internal condition of the bank.

JTrust Bank Indonesia has implemented risk management based on the provisions of Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18 / POJK.03 / 2016 dated March 22, 2016 on the Application of Risk Management for Commercial Bank, and its implementing regulations.

To achieve the above objectives, it is necessary to culture of risk (risk awareness) and the necessary technical competence of the entire unit in JTrust Bank Indonesia, where it is the responsibility and involves all work units in JTrust Bank Indonesia.

The effectiveness of the implementation of governance and risk management framework by Bank Indonesia JTrust includes four (4) pillars, namely:

a. **Active supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors as part of management supervision,**
   Board of Commissioners and Board of Directors is responsible for the effectiveness of risk management at the Bank and ensure the application of adequate risk management in accordance with the characteristics, complexity and risk profile of the Bank. Supervision of the Board of Commissioners include, among others:
   (1) To approve the risk management policy, including strategies and risk management framework established in accordance with the level of risk taken (risk appetite) and risk tolerance (risk tolerance) Bank;

(2) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
(3) Menyelenggarakan Rapat Berkala dengan Direksi untuk mengevaluasi pencapaian tindak lanjut setiap rencana kerja (*action plan*);
(4) Memastikan rekomendasi setiap Laporan Hasil Audit (LHA) Divisi Internal Audit dan Ekternal telah ditindaklanjuti.

Dalam rangka pengawasan dan pengelolaan risiko Bank serta pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*) di tingkat Komisaris.

Sedangkan Direksi bertugas menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif, termasuk implementasinya, serta memastikan bahwa seluruh risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti. Direksi juga bertanggungjawab untuk menumbuhkembangkan budaya dan kesadaran akan risiko di seluruh jajaran unit kerja. Pengawasan aktif Direksi, di antaranya meliputi:
(1) Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;
(2) Memantau, mengevaluasi, dan memastikan Rencana Bisnis Bank, strategi dan *action plan* telah dilakukan sesuai rencana melalui rapat/pertemuan berkala;
(3) Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Kebijakan dan Prosedur telah dipahami dan dilaksanakan;
(4) Memastikan dan melaksanakan langkah perbaikan atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah dilaksanakan dengan efektif; dan
(5) Mengembangkan budaya manajemen risiko dan meningkatkan kesadaran riisko pada seluruh jenjang organisasi.

b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko,
Penerapan manajemen risiko di Bank telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai ketentuan tertinggi dalam memberikan arahan

(2) To evaluate the policies and the implementation of risk management performed by the Board of Directors.
(3) Holding Regular Meeting of the Board of Directors to evaluate the achievement of the follow-up of each work plan (action plan);
(4) Ensure that any recommendations the Audit Report (LHA) Unit Internal and External Audit have been followed up.

In the framework of supervision and risk management of the Bank and the implementation of Good Corporate Governance, the Board is assisted by the Risk Oversight Committee (Risk Monitoring Committee) at the level of Commissioner.

While the Board of Directors in charge of determining the direction of policies and comprehensive risk management strategy, including implementation, and to ensure that all material risks and impacts have been followed up. Directors are also responsible for fostering culture and risk awareness throughout the ranks of the working unit. Active supervision of the Board of Directors, among others include:
1) Develop policies, strategies, and risk management framework by taking into account the level of risk taking (risk appetite) and risk tolerance (risk tolerance) Bank;
2) Monitor, evaluate and ensure the Bank's business plan, strategy and action plan has been carried out as planned through a conference / meeting periodically;
3) Ensure Standard Operating Procedures (SOP), Policies and Procedures have been understood and implemented;
4) Ensure and implement corrective measures or recommendations of the Internal Audit Unit and External had been implemented effectively; and
5) Develop a risk management culture and raise awareness riisko at all levels of the organization.

b. The adequacy of policies, procedures, and limit as a guideline in the implementation of Risk Management,
Application of risk management in JTrust Bank Indonesia has poured in some policies and procedures, among others, the Risk Management General Policy (KUMR). KUMR as the highest provisions in providing policy

kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko dalam rangka mengamankan Bank atas risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnisnya. Penetapan limit dikelola dalam kegiatan usaha dan produk dan telah disesuaikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan limit tersebut ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko

Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan dan pengendalian terhadap kedelapan risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko stratejik, risiko hukum, dan risiko reputasi.

1) Identifikasi
   Identifikasi risiko dilakukan mencakup seluruh aktivitas bisnis dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko beserta dampaknya.
2) Pengukuran
   Pengukuran risiko dimaksudkan agar Bank mampu menghitung eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usaha, dan diperkirakan dampak terhadap permodalan.
   Salah satu pengukuran risiko tercermin dalam Laporan Profil Risiko triwulanan dan Laporan *Risk Control Self Assessment*/ RCSA.
3) Pemantauan
   Pemantauan risiko dilakukan antara lain dengan cara mengevaluasi limit transaksi *treasury* serta efektivitas proses manajemen risiko.
4) Pengendalian
   Pengendalian risiko antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat moderate to high dan high.

d. Sistem pengendalian internal yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank.

Pengendalian internal telah dilakukan oleh Divisi Internal Audit untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko. Selain itu adanya pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional (*risk taking unit*) dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (*risk management unit*).

direction risk management and control in order to secure the JTrust Bank Indonesia on the risks faced in its business activities. Limits are managed in business activities and products and has adjusted the level of risk to be taken (risk appetite) and the limits are reviewed periodically to adjust to changing conditions.

c. The adequacy of the process of identification, measurement, monitoring, and controlling risks, as well as risk management information system

The process of risk management includes the identification, measurement, monitoring, management and control of the eighth risks such as credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, strategic risk, legal risk, and reputation risk.

1) Identification
   Risk identification is done covers all business activities in order to analyze the source and possible risks and their impact.
2) Measurement
   Measurement of risk is so that the Bank is able to calculate the risk exposure inherent in business activities, and the estimated impact on capital.
   One measurement of risk is reflected in the quarterly Risk Profile Report and Reports Risk Control Self Assessment / RCSA,
3) Monitoring
   Risk monitoring conducted among others by evaluating the limit of treasury transactions and the effectiveness of the risk management process.
4) Control
   Risk control among others, by providing follow-up risks are moderate to high and high.

d. Effective internal control system in the implementation of the Bank's operations.

Internal control has been carried out by the Internal Audit Unit to assess the implementation of the risk management processes and systems in functional activities which have a risk exposure. Besides the clear separation of functions between operational units (risk-taking units) with units that carry out the functions of risk management (risk management unit).

II. EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BANK SECARA KHUSUS

1. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Termasuk dalam Risiko Kredit yaitu Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (Risiko Konsentrasi Kredit), Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*), dan Risiko Kredit akibat *country risk.*

Penerapan manajemen risiko kredit yang telah dilakukan meliputi:

a. Organisasi manajemen risiko kredit

Dalam organisasi manajemen risiko kredit, Bank telah menerapkan *Four Eyes Principle* merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan kredit dengan melibatkan unit Bisnis dan unit Credit Risk Review yang saling independen satu sama lain dengan pemisahan wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- Divisi Bisnis adalah unit bisnis yang melaksanakan usulan/aktivitas pemberian kredit atau penyediaan dana dan penanganan debitur kualitas kredit 2A agar tidak berpotensi menjadi NPL.
- Divisi *Credit Risk Reviewer* adalah unit yang melakukan *review* Nota Analisa Kredit dan membuat Nota Analisa Risiko & Rekomendasi serta dilengkapi kewenangan dalam batas limit tertentu untuk menyetujui atau menolak proposal yang diusulkan oleh Divisi Bisnis;
- Divisi Corporate Legal & Litigation, Divisi Compliance sebagai *Non Voting Member* dalam pemberian opini kepatuhan dan legal dalam mekanisme proses kredit.
- Divisi Head Operation, Divisi Credit Administration serta Divisi *Financial Control* sebagai *Non Voting Member* (add hoc) apabila diperlukan opini operasional dan restrukturisasi kredit.
- *Special Assets Management (SAM)* berfungsi melakukan penanganan debitur kualitas kredit 2B, 2C, 3, 4, 5 (*Non Performing Loan/NPL*), kredit restrukturisasi dan penyelesaian aset bermasalah.

II. RISK EXPOSURE AND RISK MANAGEMENT BANK IN PARTICULAR

1. Credit Risk

Credit risk is the risk of loss due to the failure of other parties to fulfill their obligations include in Credit Risk namely Credit Risk due to the failure of debtors , credit risk due to concentration of provision of funds (Risk Concentrations of credit) , Credit Risk due to the failure of the counterparty (counterparty credit risk) , credit risk due to the failure of settlement (settlement risk) and credit risk due to country risk .

The application of credit risk management that have been made include:

a. Credit risk management organization

In the organization of credit risk management, the Bank has implemented the Four Eye Principle is the main principle underlying the credit decision-making by involving the business units and units of Commercial Credit Risk mutually independent of each other with a separation of authority and responsibility, as follows:

- Business Division is a business unit to implement the proposal / activity of credit or provision of funds and function handling the credit quality borrowers 2A so as not to potentially become Non Performing Loan (NPL);
- Credit Risk Reviewer Division is a unit which reviews the Memorandum of Credit Analysis and make risk analysis recommendation then fitted authority within a certain limit to approve or reject the proposals suggested by Business Division;
- Corporate Legal & Litigation Division, Compliance Division as a Non-Voting Member in giving opinions compliance, legal, mechanisms of the credit processing.
- Head Operation Division, Credit Administration Division and Financial & Control Division as a Non-Voting Member (add hoc) in giving opinions operational and restructuring loan.
- Special Assets Management (SAM) function handling the credit quality borrowers 2B,2C 3,4,5 (Non Performing / NPL), restructurisasi loan and the settlement of troubled assets.

- Divisi Risk Management (RMD) berfungsi sebagai unit independen yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kredit dengan berpegang pada *prudential banking*.
- Komite Kredit merupakan mekanisme proses persetujuan kredit sesuai dengan Batas dan Wewenang Memutus Kredit yang telah ditetapkan oleh Direksi.

b. Strategi manajemen risiko kredit untuk aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan

Strategi manajemen risiko kredit berpedoman pada ketentuan bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Rencana Bisnis Bank dan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan kondisi pasar dan kondisi ekonomi.

c. Kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit

Pengelolaan risiko konsentrasi kredit antara lain:

- Melakukan penyusunan Portofolio Kredit per Sektor Industri yang digunakan sebagai limit penyaluran kredit pada sektor-sektor ekonomi tertentu sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.
- Penetapan *inhouse limit* dalam penyediaan dana kepada pihak terkait, debitur grup dan individu (BMPK) dengan tidak mengabaikan ketentuan regulator.

d. Mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko kredit

- Melakukan *review* dan menyempurnakan Kebijakan Perkreditan Bank dan Pedoman Pelaksanaan Kredit secara berkala, dan terus melengkapi serta menyempurnakan ketentuan internal bidang perkreditan secara berkesinambungan agar selaras dengan kondisi terkini sesuai dinamika organisasi, rencana bisnis bank, *best practice* industri perbankan, dan ketentuan regulator.
- Melakukan penetapan *limit*/Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) yang di-*review* secara berkala dan melakukan penyempurnaan terhadap proses kredit sehingga

- Risk Management Unit (RMD) functions as an independent unit to identify, measure, control, monitor credit risk by adhering to prudential banking.
- Credit Committee is a mechanism in accordance with the loan approval process and Powers Terminate Credit Limit set by the Board of Directors.

b. Credit risk management strategies for activities that have a significant credit risk exposure

Credit risk management strategy guided by the provisions of Indonesian banks / Financial Services Authority, the Bank Business Plan and the precautionary principle and also pay attention to market conditions and economic conditions

c. Concentration of credit risk management policy

Concentration of credit risk management, among others:

- Perform the preparation of Portofolio Loans by Sector Industry used to as a limit lending to certain economic sectors in accordance with the Bank's Business Plan.
- Determination inhouse limit in the provision of related parties, groups, individuals (LLL) without limiting the regulatory provisions.

d. Measurement and control of credit risk

- Reviewing and refining JTrust Bank Indonesia Credit Policy and Implementation Guidelines Credit regular basis, and continue to complement and refine the internal regulation field of credit as a credit risk control. on an ongoing basis to keep pace with the latest conditions appropriate organizational dynamics, business plan of the bank, the banking industry best practices, and regulatory provisions.
- Doing limits / limit Terminate Credit Authority (BWMK) which are reviewed at regular intervals and make improvements to the loan process so that the credit decision-

proses pengambilan keputusan kredit berjalan lebih cepat namun tetap berpedoman terhadap azas *prudential banking.*

- Pengukuran risiko kredit melalui kualitas analisis kredit.
- Melakukan penyempurnaan pedoman monitoring kredit melalui: Penerapan Analisa 3 Pilar & *Early Warning Monitoring.*
- Melakukan pemantauan Kredit Kualitas Rendah (KKR) melalui Rapat KKR dengan me-*review debitur watch list* membuat Action Plan Report terkait Pemantauan, Pengawasan & Tindak Lanjut.
- Melakukan pengendalian kredit melalui proses *account strategy* dan manajemen kredit bermasalah.
- *Risk awareness* dari Dewan Komisaris dan Direksi atas strategi bisnis perkreditan, *enforcement* pelaksanaan budaya risiko dan internalisasi budaya risiko kredit ke seluruh jenjang organisasi.

e. Definisi tagihan yang telah jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai/*impairment*

(a) Tagihan yang telah jatuh tempo adalah tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga;

(b) Tagihan yang mengalami penurunan nilai adalah suatu kondisi ditemukannya bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setellah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas asset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi dengan andal.

making process run faster but still refer to the principles of prudential banking.

- Measurement of credit risk through credit analysis quality.
- Improving credit monitoring guidelines, among others Pillar 3 Implementation & Early Warning Monitoring.
- Monitoring Low Quality Credit (KKR) through KKR Meetings by reviewing the watch list debtors to make an Action Plan Report related to Monitoring, Monitoring & Follow Up.
- Perform credit control through the process of account strategy and management of problem loans.
- Risk awareness of the Board of Commissioners and Board of Directors on lending business strategy , enforcement execution risk culture and internalization of credit risk culture to all levels of the organization .

e. Definition of bills due and bills impaired / impairment

(a) Claims which have expired are bills that are overdue for more than 90 (ninety) days either for payment of principal and / or interest payments;

(b) Claims impaired is a condition of the discovery of objective evidence of an adverse event as a result of one or more adverse events as a result of one or more events that occurred Set up the initial recognition of the loan, and that loss event has an impact on the estimated on future cash flows on the financial asset or group of financial assets that can be estimated reliably.

f. Penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) individual dan kolektif, serta metode statistik yang digunakan dalam perhitungan CKPN.

Bank menggunakan teknik perhitungan dalam cadangan kerugian penurunan (CKPN) nilai aset keuangan secara individual dan kolektif, adalah sebagai berikut:

(a) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Individual

Bank melakukan evaluasi kerugian penurunan nilai dan perhitungan pembentukan CKPN aset keuangan kredit secara individual menggunakan teknik *discounted cash flow* (nilai kini estimasi arus kas masa datang) dan *fair value of collateral* (nilai kini dari nilai wajar agunan). Estimasi arus kas masa datang (*discounted cash flow*) bersumber dari ekspektasi penerimaan pokok, bunga dan atau denda, dapat juga bersumber dari penerimaan realisasi hasil klaim jaminan pihak ketiga dan atau pembayaran ganti rugi dari perusahaan asuransi. Sedangkan estimasi arus kas masa datang yang berasal dari ekspektasi penerimaan realisasi agunan (*fair value of collateral*) bersumber dari realisasi penjualan agunan. Aset keuangan kredit yang telah dievaluasi secara individual namun tidak terdapat bukti obyektif kerugian penurunan nilai, maka evaluasi kerugian penurunan nilai dan CKPN dilakukan secara kolektif.

(b) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kolektif

Perhitungan CKPN kolektif menggunakan *metode roll rates* atau *migration analysis* dengan parameter *probability of default* (PD) dan *loss given default* (LGD) berdasarkan data historis bank. Aset keuangan yang telah dievaluasi secara kolektif namun ditemukan dan atau terdapat bukti objektif terjadi kerugian penurunan nilai maka evaluasi kerugian penurunan nilai dan CKPN dinilai secara individual.

f. An explanation of the approach used for the formation of Allowance for Impairment Losses (CKPN) individually and collectively, as well as the statistical methods used in the calculation of CKPN.

Banks use calculation techniques in the allowance for impairment losses (CKPN) value of financial assets individually and collectively, are as follows:

(a) Allowance for Impairment Losses Individual

The Bank evaluates impairment losses and calculation of the formation of financial assets CKPN sevara individual credit using discounted cash flow techniques (present value of estimated future cash flows) and the fair value of collateral (the present value of the fair value of the collateral). Estimates of future cash flows (discounted cash flow) sourced from the expectations of receipt of principal, interest or penalties, can also be sourced from the receipt of the realization of the results of third-party warranty claims or compensation from the insurance company. While the estimated future cash flows derived from the realization of the expected receipt of collateral (fair value of collateral) comes from sales of collateral. Financial assets loans evaluated on an individual basis but there is no objective evidence of impairment losses, the evaluation of impairment losses and CKPN done collectively.

(b) Allowance for Impairment Losses Collective

CKPN collective calculation using the roll rates or migration analysis with parameters probability of default (PD) and loss given default (LGD) based on historical data bank. Financial assets that are collectively evaluated but found or there is objective evidence of impairment losses, the evaluation of impairment losses and CKPN assessed individually.

Tabel 1.1. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah – Bank secara individual Audited
Table 1.1. Disclosure of Net Receivables by Area – Bank, individually Audited

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019 | December 31, 2019				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah | Net Receivable Based on Region				
		Wilayah 1 Area 1	Wilayah 2 Area 2	Wilayah 3 Area 3	Wilayah 4 Area 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	3.051.411	-	3.051.411
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	1.025.569	-	1.025.569
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	6.990	-	893.064	14.832	914.886
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	130.256	128.694	1.675.690	112.237	2.046.877
9	Tagihan Kepada Korporasi	486.957	347.904	3.057.569	646.983	4.539.412
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	111	80.113	655	80.880
11	Aset Lainnya			5.204.390		5.204.390
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-
	Total	**624.203**	**476.709**	**14.987.806**	**774.706**	**16.863.425**

Tabel 1.2. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak – Bank secara individual Audited
Table 1.2. Disclosure of Net Receivables by Remaining Contract Period – Bank, individually Audited

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019 | December 31, 2019					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak | Net Receivables by Contractual Maturity					
		≤ 1 tahun ≤ 1 year	> 1 thn s.d. 3 thn > 1 year s.d. 3 year	> 3 thn s.d. 5 thn > 3 year s.d. 5 year	> 5 thn > 5 year	Non Kontraktual Non Contractual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2.554.654	-	-	-	496.757	3.051.411
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	95.867	253.710	675.991		1.025.569
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan Kepada Bank	276.970	30.456	85.244	-	522.216	914.886
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-		-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-		-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-		-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	128.482	402.797	1.180.485	335.113		2.046.877
9	Tagihan Kepada Korporasi	1.768.329	1.315.580	499.460	956.043		4.539.412
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	10.885	22.816	46.468	711		80.880
11	Aset Lainnya	-				5.204.390	5.204.390
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-		-
	Total	**4.739.320**	**1.867.516**	**2.065.368**	**1.967.858**	**6.223.364**	**16.863.425**

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

31 Desember 2018 | December 31, 2018					
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah | Net Receivable Based on Region					Portfolio Category
Wilayah 1 Area 1	Wilayah 2 Area 2	Wilayah 3 Area 3	Wilayah 4 Area 4	Total	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
-	-	4.109.954	-	4.109.954	Claims on Government/Sovereign
-	-	244.373	-	244.373	Claims on Public Sector Entities
-	-	-	-	-	Claims on Multilateral Development Banks and International Entities
-	6.990	472.847	97.857	577.694	Claims on Banks
-	-	-	-	-	Claims Secured by Residential Property
-	-	-	118.171	118.171	Claims Secured by Commercial Real Estate
-	-	-	-	-	Claims on Pension Loans
-	234.102	101.375	1.933.244	2.268.721	Claims on Micro, Small, and Retail Portfolio
-	631.102	947.607	5.892.486	7.471.195	Claims on Corporates
-	32.162	78.529	330.393	441.084	Claims on Past Due Exposures
		1.984.463		1.984.463	Other Assets
-	-	-	-	-	Sharia Exposures (if any)
-	**904.356**	**7.939.147**	**8.372.152**	**17.215.655**	**Total**

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

31 Desember 2018 | December 31, 2018						
Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak | Net Receivables by Contractual Maturity						Portfolio Category
≤ 1 tahun ≤ 1 year	> 1 thn s.d. 3 thn > 1 year s.d. 3 year	> 3 thn s.d. 5 thn > 3 year s.d. 5 year	> 5 thn > 5 year	Non Kontraktual Non Contractual	Total	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
3.350.684	-	-	-	759.270	4.109.954	Claims on Government/Sovereign
-	36.308	29.952	178.113		244.373	Claims on Public Sector Entities
-	-	-	-		-	Claims on Multilateral Development Banks and International Entities
223.717	6.990	98.021	-	248.967	577.694	Claims on Banks
-	-	-	-		-	Claims Secured by Residential Property
-	-	-	118.171		118.171	Claims Secured by Commercial Real Estate
-	-	-	-		-	Claims on Pension Loans
416.564	598.038	669.403	584.717		2.268.721	Claims on Micro, Small, and Retail Portfolio
2.946.642	1.968.723	893.253	1.662.576		7.471.195	Claims on Corporates
112.556	64.366	61.895	202.267		441.084	Claims on Past Due Exposures
-				1.984.463	1.984.463	Other Assets
-	-	-	-		-	Sharia Exposures (if any)
7.050.163	**2.674.424**	**1.752.525**	**2.745.843**	**2.992.700**	**17.215.655**	**Total**

Tabel 1.3. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sektor Ekonomi – Bank secara individual Audited
Table 1.3. Disclosure of Net Receivables by Economic Sector – Bank, individually Audited

No.	Sektor Ekonomi Economic Sector	Tagihan Kepada Pemerintah Claims on Government/ Sovereign	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Claims on Public Sector Entities	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Entities	Tagihan Kepada Bank Claims on Banks	Kredit Beragun Rumah Tinggal Claims Secured by Residential Property
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	31 Desember 2019 | December 31, 2019					
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan Agricultures, hunting and forestry	-	-	-	-	-
2	Perikanan | Fisheries	-	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian Mining and Quarrying	-	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan | Manufacturing	-	-	-	-	-
5	Listrik, Gas, dan Air Electricity, Gas and Water	-	-	-	-	-
6	Konstruksi | Construction	-	-	-	-	-
7	Perdagangan besar dan Eceran Wholesale and Retail Trading	-	-	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Provision of accommodation and food supply drinking	-	-	-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi Transportation, warehousing and communications	-	-	-	-	-
10	Perantara keuangan Financial Intermediary	-	1.025.569	-	95.700	-
11	Real Estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan Real estate, Rental Business, and services company	-	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan Government Administration	-	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan | Education services	-	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Health and social services	-	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya Community, Sociocultural, Entertainment and Other Individual Services	-	-	-	-	-
16	Jasa Perorangan yang melayani Rumah Tangga Individual services which serve households	-	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya Extra agency international agency and other international	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya Business Activities which are not clearly defined	-	-	-	-	-
19	Bukan lapangan usaha Credit Recipients Non Industrial Origin	-	-	-	-	-
20	Lainnya | Others	3.051.411	-	-	819.186	-
	Total	**3.051.411**	**1.025.569**	**-**	**914.886**	**-**

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

Kredit Beragun Properti Komersial Claims Secured by Commercial Real Estate	Kredit Pegawai atau Pensiunan Claims on Pension Loans	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Claims on Micro, Small, and Retail Portfolio	Tagihan Kepada Korporasi Claims on Corporates	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claims on Past Due Exposures	Aset Lainnya Other Assets	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) Sharia Exposures (if any)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	-	49.821	-	-	-
-	-	14.999	-	-	-	-
-	-	8.423	2.964	-	-	-
-	-	35.524	844.208	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	28.482	305.830	1.968	-	-
-	-	191.509	913.696	13.375	-	-
-	-	2.600	139.912	-	-	-
-	-	1.059	125.132	-	-	-
-	-	6.335	1.021.202	-	-	-
-	-	38.366	365.306	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	348	-	-	-	-
-	-	10.915	25	55	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	71.482	-	-	-
-	-	1.680.440	3.963	65.482	-	-
-	-	27.877	695.872	-	5.204.390	-
-	**-**	**2.046.877**	**4.539.412**	**80.880**	**5.204.390**	**-**

Tabel 1.3. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sektor Ekonomi – Bank secara individual Audited
Table 1.3. Disclosure of Net Receivables by Economic Sector – Bank, individually Audited

No.	Sektor Ekonomi Economic Sector	Tagihan Kepada Pemerintah Claims on Government/ Sovereign	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Claims on Public Sector Entities	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Entities	Tagihan Kepada Bank Claims on Banks	Kredit Beragun Rumah Tinggal Claims Secured by Residential Property
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	31 Desember 2018 | December 31, 2018					
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan Agricultures, hunting and forestry	-	-	-	-	-
2	Perikanan | Fisheries	-	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian Mining and Quarrying	-	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan | Manufacturing	-	-	-	-	-
5	Listrik, Gas, dan Air Electricity, Gas and Water	-	-	-	-	-
6	Konstruksi | Construction	-	-	-	-	-
7	Perdagangan besar dan Eceran Wholesale and Retail Trading	-	-	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Provision of accommodation and food supply drinking	-	-	-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi Transportation, warehousing and communications	-	-	-	-	-
10	Perantara keuangan Financial Intermediary	-	244.373	-	105.011	-
11	Real Estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan Real estate, Rental Business, and services company	-	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan Government Administration	-	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan | Education services	-	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Health and social services	-	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya Community, Sociocultural, Entertainment and Other Individual Services	-	-	-	-	-
16	Jasa Perorangan yang melayani Rumah Tangga Individual services which serve households	-	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya Extra agency international agency and other international	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya Business Activities which are not clearly defined	-	-	-	-	-
19	Bukan lapangan usaha Credit Recipients Non Industrial Origin	-	-	-	-	-
20	Lainnya | Others	4.109.954	-	-	472.683	-
	Total	**4.109.954**	**244.373**	**-**	**577.694**	**-**

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

Kredit Beragun Properti Komersial Claims Secured by Commercial Real Estate	Kredit Pegawai atau Pensiunan Claims on Pension Loans	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Claims on Micro, Small, and Retail Portfolio	Tagihan Kepada Korporasi Claims on Corporates	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claims on Past Due Exposures	Aset Lainnya Other Assets	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) Sharia Exposures (if any)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	9.620	62.217	-	-	-
-	-	14.956	-	-	-	-
-	-	9.835	105.656	-	-	-
-	-	247.319	2.371.480	14.314	-	-
-	-	-	22.367	-	-	-
-	-	92.918	388.897	9.936	-	-
-	-	547.488	1.635.352	99.099	-	-
117.947	-	22.252	360.771	102.147	-	-
-	-	2.980	496.569	16.187	-	-
-	-	7.350	1.134.277	-	-	-
-	-	133.396	387.057	21.494	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	510	-	-	-
-	-	510	9.269	-	-	-
-	-	18.196	22.573	934	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	91.430	-	-	-
-	-	1.145.220	1.773	111.543	-	-
224	-	16.683	380.996	65.429	1.984.463	-
118.171	**-**	**2.268.723**	**7.471.194**	**441.083**	**1.984.463**	**-**

Tabel 1.4. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah – Bank secara individual Audited
Table 1.4. Disclosure of Receivables and Allowances by Area – Bank, individually Audited

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2019 | December 31, 2019				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah | Net Receivable Based on Region				
		Wilayah 1 Area 1	Wilayah 2 Area 2	Wilayah 3 Area 3	Wilayah 4 Area 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan | Receivables	624.203	476.709	14.987.806	774.706	16.863.425
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (*Impaired*) Impaired Receivables					-
	a. Belum jatuh tempo Non Past Due	16.374	3.210	184.006	63.078	266.668
	b. Telah jatuh tempo Past Due	10.474	-	39.963	-	50.437
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual Allowance for Impairment Losses - Individual	-	-	25.248	25.465	50.713
4	Cadangan Kerugian Penurunan nilai (CKPN) - Kolektif Allowance for Impairment Losses - Collective	467	196	60.962	770	62.395
5	Tagihan yang dihapus buku Claims written off	-	-	104.693	-	104.693

Tabel 1.4. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah – Bank secara individual Audited
Table 1.4. Disclosure of Receivables and Allowances by Area – Bank, individually Audited

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2018 | December 31, 2018				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah | Net Receivable Based on Region				
		Wilayah 1 Area 1	Wilayah 2 Area 2	Wilayah 3 Area 3	Wilayah 4 Area 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan | Receivables	-	904.356	7.939.147	8.372.152	17.215.655
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (*Impaired*) Impaired Receivables					-
	a. Belum jatuh tempo Non Past Due	-	55.785	33.066	1.200.714	1.289.566
	b. Telah jatuh tempo Past Due	-	80.667	17.509	178.993	277.170
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual Allowance for Impairment Losses - Individual	-	10.086	5.515	47.519	63.120
4	Cadangan kerugian penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif Allowance for Impairment Losses - Collective	-	4.756	4.170	57.892	66.818
5	Tagihan yang dihapus buku Claims written off	-	-	121.297	-	121.297

Tabel 1.5. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi – Bank secara individual Audited
Table 1.5. Disclosure of Receivables and Allowances by Economic Sector – Bank, individually Audited

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi Economic Sector	Tagihan | Receivable	Tagihan yang mengalami penurunan nilai | Impaired Receivables		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual | Allowance for Impairment Losses - Individual	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif | Allowance for Impairment Losses - Collective	Tagihan yang dihapus buku | Claims Written off
			Belum jatuh tempo Non Past Due	Telah jatuh tempo Past Due			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	31 Desember 2019 | December 31, 2019						
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan | Agricultures, hunting and forestry	49.821	-	-	-	15	-
2	Perikanan | Fisheries	14.999	-	-	-	5	-
3	Pertambangan dan Penggalian | Mining and Quarrying	11.387	-	-	-	3	-
4	Industri Pengolahan | Manufacturing	879.732	25.465	-	25.465	264	-
5	Listrik, Gas, dan Air | Electricity, Gas and Water	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi | Construction	336.280	1.585	1.968	-	609	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran | Wholesale and retail trading	1.118.579	89.884	35.167	11.918	29.179	104.693
8	Penyediaan Akomodasi dan penyediaan makan minum | Provision of accomodation and food supply drinking	142.511	-	-	13.224	15	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi | Transportation, warehousing and communications	126.190	-	-	-	39	-
10	Perantara keuangan | Financial Intermediary	2.148.805	8.994	-	-	435	-
11	Real Estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan | Real estate, Rental Business, and services company	403.673	435	-	-	128	-
12	Administrasi Pemerintahan Government administration	-	-	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan | Education services	-	-	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Health and social services	348	-	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya | Community, Sociocultural, Entertainment and Other Individual Services	10.995	410	-	-	21	-
16	Jasa Perorangan yang melayani Rumah Tangga | Individual services which serve households	-	-	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya | Extra agency international agency and other international	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya Business Activities | which are not clearly defined	71.482	-	-	-	22	-
19	Bukan lapangan usaha | Credit Recipients Non Industrial Origin	1.749.885	139.896	13.302	106	31.661	-
20	Lainnya | Others	9.798.737	-	-	-	-	-
	Total	**16.863.424**	**266.669**	**50.437**	**50.713**	**62.396**	**104.693**

Tabel 1.5. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi – Bank secara individual Audited
Table 1.5. Disclosure of Receivables and Allowances by Economic Sector – Bank, individually Audited

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi Economic Sector	Tagihan | Receivable	Tagihan yang mengalami penurunan nilai | Impaired Receivables		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual | Allowance for Impairment Losses - Individual	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif | Allowance for Impairment Losses - Collective	Tagihan yang dihapus buku | Claims Written off
			Belum jatuh tempo Non Past Due	Telah jatuh tempo Past Due			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	31 Desember 2018 | December 31, 2018						
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan | Agricultures, hunting and forestry	71.837	8.213	1.407	-	133	-
2	Perikanan | Fisheries	14.956	-	-	-	5	-
3	Pertambangan dan Penggalian | Mining and Quarrying	115.491	-	-	-	38	-
4	Industri Pengolahan | Manufacturing	2.633.113	387.955	64.830	11.340	1.422	-
5	Listrik, Gas, dan Air | Electricity, Gas and Water	22.367	-	-	-	7	-
6	Konstruksi | Construction	491.751	73.418	8.333	4.686	922	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran | Wholesale and retail trading	2.281.939	292.491	103.627	10.555	13.989	104.693
8	Penyediaan Akomodasi dan penyediaan makan minum | Provision of accomodation and food supply drinking	603.117	317.049	-	8.850	2.479	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi | Transportation, warehousing and communications	515.735	1.613	34.190	18.003	1.069	-
10	Perantara keuangan | Financial Intermediary	1.491.011	8.811	5.914	-	579	-
11	Real Estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan | Real estate, Rental Business, and services company	541.947	54.533	25.533	3.590	405	-
12	Administrasi Pemerintahan Government administration	-	-	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan | Education services	510	510	-	-	6	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Health and social services	9.779	-	-	-	3	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya | Community, Sociocultural, Entertainment and Other Individual Services	41.703	6.644	58	-	426	-
16	Jasa Perorangan yang melayani Rumah Tangga | Individual services which serve households	-	-	-	-	-	16.604
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya | Extra agency international agency and other international	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya Business Activities | which are not clearly defined	91.430	-	-	-	30	-
19	Bukan lapangan usaha | Credit Recipients Non Industrial Origin	1.258.536	138.329	33.278	6.095	45.304	-
20	Lainnya | Others	7.030.433	-	-	-	-	-
	Total	**17.215.655**	**1.289.566**	**277.170**	**63.119**	**66.816**	**121.297**

Tabel 1.6. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai – Bank secara individual Audited
Table 1.6. Disclosure of Changes in Allowances for Imparment Losses – Bank, individually Audited

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

No.	Keterangan Description	31 Desember 2019 December 31, 2019		31 Desember 2018 December 31, 2018	
		CKPN Individual Allowance for Impairment Losses - Individual	CKPN Kolektif Allowance for Impairment Losses - Collective	CKPN Individual Allowance for Impairment Losses - Individual	CKPN Kolektif Allowance for Impairment Losses - Collective
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Saldo Awal CKPN | Beginning Balance - Allowance for Impairment Losses	126.240	133.636	207.193	136.636
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net) | Additional/ reversal allowance for impairment losses during the year (Net)	(24.813)	(8.847)	(80.953)	(3.000)
	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan | Additional allowance for impairment losses during the year	50.713	62.395	63.120	66.818
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan | Reversal allowance for impairment losses during the year	75.526	71.241	144.073	69.818
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan | Allowance for impairment losses used for write off receivables during the year	-	-	-	-
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan | Other additional (reversal) of allowance during the year	-	-	-	-
	Saldo Akhir CKPN | Ending Balance - Allowance for Impairment Losses	**101.427**	**124.789**	**126.240**	**133.636**

g. Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Pelaporan Pendekatan Standar oleh Bank saat ini tidak menggunakan peringkat eksternal terhadap kategori portfolio, posisi eksposur risiko kredit Bank berdasarkan peringkat seperti terlihat pada tabel berikut:

g. Credit Risk Standard Approach

The standard approach to reporting by the Bank does not currently use external ratings for the category of portfolio, credit risk exposure position of the Bank based on ratings as shown in the following table:

Tabel 2.1. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan kategori Portofolio dan Skala Peringkat – Bank secara individual Audited

Table 2.1. Disclosure of Net Receivables by Portfolio Category and Ranking – Bank, individually Audited

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Lembaga Pemeringkat Rating Agencies	Peringkat Jangka Panjang Long-Term Rating				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT. Fitch Rating	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT. ICRA Indonesia	(idr)AAA	(idr)AA+ s.d (idr)AA-	(idr)A+ s.d (idr)A-	(idr)BBB+ s.d (idr)BBB-	(idr)BB+ s.d (idr)BB-
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah Claims on Government/Sovereign		3.051.411	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Claims on Public Sector Entities		330.724	-	694.845	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Entities		-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank | Claims on Banks		261.384	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal Claims Secured by Residential Property		-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial Secured by Commercial Real Estate		-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan Claims on Pension Loans		-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Claims on Micro, Small, and Retail Portfolio		-	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi Claims on Corporates		453.362	-	169.462	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claims on Past Due Exposures		-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya | Other Assets		-	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | Sharia Exposures (if Any)		-	-	-	-	-
	Total		**4.096.881**	**-**	**864.307**	**-**	**-**

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

31 Desember 2019 | December 31, 2019							
Tagihan Bersih | Net Receivables							
			Peringkat Jangka Pendek Short-Term Rating				
B+ s.d B-	Kurang dari Less than B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari Less than A-3	Tanpa Peringkat Unrated	Total
B+ s.d B-	Kurang dari Less than B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari Less than F3		
B1 s.d B3	Kurang dari Less than B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari Less than P-3		
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari Less than B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari Less than F3(idn)		
(idr)B+ s.d (idr)B-	Kurang dari Less than (idr)B-	(idr)A1+ s.d (idr)A1	(idr)A2+ s.d (idr)A2	(idr)A3+ s.d (idr)A3	Kurang dari Less than (idr)A3		
id B+ s.d id B-	Kurang dari Less than id B-	idA1	idA2	idA3 s.d A4	Kurang dari Less than idA4		
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	-	-	-	-	-	-	3.051.411
-	-	-	-	-	-	-	1.025.569
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	653.502	914.886
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2.046.877	2.046.877
-	-	-	-	-	-	3.916.589	4.539.413
-	-	-	-	-	-	80.880	80.880
-	-	-	-	-	-	5.204.390	5.204.390
-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.902.238**	**16.863.426**

Tabel 2.1. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan kategori Portofolio dan Skala Peringkat – Bank secara individual Audited

Table 2.1. Disclosure of Net Receivables by Portfolio Category and Ranking – Bank, individually Audited

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Lembaga Pemeringkat Rating Agencies	Peringkat Jangka Panjang Long-Term Rating				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT. Fitch Rating	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT. ICRA Indonesia	(idr)AAA	(idr)AA+ s.d (idr)AA-	(idr)A+ s.d (idr)A-	(idr)BBB+ s.d (idr)BBB-	(idr)BB+ s.d (idr)BB-
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah Claims on Government/Sovereign		4.109.954	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Claims on Public Sector Entities		101.362	-	143.010	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Entities		-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank | Claims on Banks		223.137	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal Claims Secured by Residential Property		-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial Secured by Commercial Real Estate		-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan Claims on Pension Loans		-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Claims on Micro, Small, and Retail Portfolio		-	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi Claims on Corporates		180.597	-	37.311	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claims on Past Due Exposures		-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya | Other Assets		-	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | Sharia Exposures (if Any)		-	-	-	-	-
	Total		**4.615.051**	**-**	**180.321**	**-**	**-**

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

31 Desember 2018 | December 31, 2018							
Tagihan Bersih | Net Receivables							
			Peringkat Jangka Pendek Short-Term Rating				
B+ s.d B-	Kurang dari Less than B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari Less than A-3	Tanpa Peringkat Unrated	Total
B+ s.d B-	Kurang dari Less than B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari Less than F3		
B1 s.d B3	Kurang dari Less than B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari Less than P-3		
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari Less than B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari Less than F3(idn)		
(idr)B+ s.d (idr)B-	Kurang dari Less than (idr)B-	(idr)A1+ s.d (idr)A1	(idr)A2+ s.d (idr)A2	(idr)A3+ s.d (idr)A3	Kurang dari Less than (idr)A3		
id B+ s.d id B-	Kurang dari Less than id B-	idA1	idA2	idA3 s.d A4	Kurang dari Less than idA4		
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	-	-	-	-	-	-	4.109.954
-	-	-	-	-	-	-	244.373
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	354.557	577.694
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	118.171	118.171
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2.268.721	2.268.721
-	-	-	-	-	-	7.253.287	7.471.194
-	-	-	-	-	-	441.084	441.084
-	-	-	-	-	-	1.984.463	1.984.463
-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.420.283**	**17.215.655**

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

Bank memiliki eksposur derivatif yang tidak terlalu signifikan, dengan porsi terbesar adalah pada transaksi *fx swap* dengan Bank lain, sedangkan eksposur derivatif suku bunga berasal dari transaksi *interest rate swap*. Posisi transaksi *reverse repo* adalah dengan bank lain dan korporasi Bank Indonesia, sedangkan transaksi repo adalah dengan bank lain dengan *Underlying* Obligasi Pemerintah maupun SBI.

Berdasarkan pelaporan Pendekatan Standar, eskposur Bank di transaksi derivatif, *repo* dan *reverse repo* adalah sebagai berikut:

a. Transaksi Derivatif *Over The Counter*

Disclosure of Counterparty Credit Risk

The Bank has derivative exposures in amounts that are not significant, the largest portion being the swap forex transactions with other banks, and interest rate derivative exposure from swap interest rate transactions. Reverse repo transactions are conducted with other banks and with corporate Bank Indonesia, while repo transactions are transactions with other banks with Government Bonds and SBI as underlying securities.

Based on reporting with Standardized Approach, the Bank's exposures in derivative, repo and reverse repo transactions are as follow:

a. Over the Counter Derivative Transactions

Tabel 2.2. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)
Tabel 2.2. Disclosure of Counterparty Credit Risk

a. **Transaksi Derivatif *Over The Counter Audited* - Bank secara Individu**
Over the Counter Derivative Transactions Audited - Bank, individually

No.	Variabel yang Mendasari	31 Desember 2019 | December 31, 2019							
		Notional Amount			Tagihan Derivatif Derivative Claims	Kewajiban Derivatif Derivative Liabilities	Tagihan Bersih sebelum MRK Net Claim Before CRM	MRK CRM	Tagihan Bersih setelah MRK Net Claim after CRM
		≤ 1 tahun ≤ 1 year	> 1 tahun s.d. 5 tahun > 1 year s.d. 5 year	> 5 tahun > 5 year					
BANK SECARA INDIVIDUAL BANK INDIVIDUALLY									
1	Suku Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Nilai Tukar	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

31 Desember 2018 | December 31, 2018								
Notional Amount			Tagihan Derivatif Derivative Claims	Kewajiban Derivatif Derivative Liabilities	Tagihan Bersih sebelum MRK Net Claim Before CRM	MRK CRM	Tagihan Bersih setelah MRK Net Claim after CRM	Underlying Variables
≤ 1 tahun ≤ 1 year	> 1 tahun s.d. 5 tahun > 1 year s.d. 5 year	> 5 tahun > 5 year						
-	-	-	-	-	-	-	-	Interest Rate
2.407.857	-	-	11.324	640	11.324	8	11.438	Exchange Rate
-	-	-	-	-	-	-	-	Others
2.407.857	**-**	**-**	**11.324**	**640**	**11.324**	**8**	**11.438**	**Total**

b. Transaksi Repo

b. Repo Transactions

b. Transaksi Repo - Bank secara Individual Audited
Repo Transactions - Bank, individually Audited

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019 | December 31, 2019			
		Nilai Wajar SSB Repo Fair Value of SSB Repo	Kewajiban Repo Repo Liabilities	Tagihan Bersih Net Claim	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**

c. Transaksi Reverse Repo

c. Reverse Repo Transactions

c. Transaksi Revers Repo - Bank secara Individual Audited
Reverse Repo Transactions - Bank, Individually

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019 | December 31, 2019			
		Nilai Wajar SSB Repo Fair Value of SSB Repo	Kewajiban Repo Repo Liabilities	Tagihan Bersih Net Claim	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

31 Desember 2019 | December 31, 2019				Portfolio Category
Nilai Wajar SSB Repo Fair Value of SSB Repo	Kewajiban Repo Repo Liabilities	Tagihan Bersih Net Claim	ATMR RWA	
(3)	(4)	(5)	(6)	
-	-	-	-	Claims on Government/Sovereign
-	-	-	-	Claims on Public Sector Entities
-	-	-	-	Claims on Multilateral Development Banks and International Entities
-	-	-	-	Claims on Banks
-	-	-	-	Claims on Micro, Small, and Retail Portfolio
-	-	-	-	Claims on Corporates
-	-	-	-	Sharia Exposures (if any)
-	**-**	**-**	**-**	**Total**

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

31 Desember 2019 | December 31, 2019				Portfolio Category
Nilai Wajar SSB Repo Fair Value of SSB Repo	Kewajiban Repo Repo Liabilities	Tagihan Bersih Net Claim	ATMR RWA	
(3)	(4)	(5)	(6)	
-	-	-	-	Claims on Government/Sovereign
-	-	-	-	Claims on Public Sector Entities
-	-	-	-	Claims on Multilateral Development Banks and International Entities
-	-	-	-	Claims on Banks
-	-	-	-	Claims on Micro, Small, and Retail Portfolio
-	-	-	-	Claims on Corporates
-	-	-	-	Sharia Exposures (if any)
-	**-**	**-**	**-**	**Total**

h. Mitigasi Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar

Bank menggunakan berbagai teknik mitigasi risiko kredit, antara lain melalui agunan. Berdasarkan pelaporan Pendekatan Standar, eksposur Bank dan mitigasi risiko kredit yang digunakan dengan agunan sebagai *secondary way out* dalam hal debitur tidak mampu mengembalikan kewajibannya, adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan, prosedur dan proses untuk menilai dan mengelola agunan. Kebijakan, prosedur dan proses untuk menilai dan mengelola agunan Bank sesuai dengan ketentuan/Peraturan Bank Indonesia yang berlaku dan telah dituangkan kedalam kebijakan dan prosedur penilaian (*appraisal*) internal Bank.

2. Pihak pihak utama pemberi jaminan/ garansi dan kelayakan kredit (*credit worthiness*) dari pihak-pihak tersebut.
   Kelayakan kredit (*credit worthiness*) adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Fokus utama analisis kredit terletak pada risiko, bukan profitabilitas. Analisis kredit berfokus pada sisi buruk risiko, bukan sisi baik potensi. Hal ini meliputi analisis likuiditas maupun solvabilitas. Alat analisis kredit dan kriterianya untuk penilaian beragam ketentuan (tangggal jatuh tempo), jenis, dan tujuan kontrak utangnya.

3. Informasi tingkat konsentrasi yang ditimbulkan dari penggunaan teknik mitigasi risiko kredit.

h. Credit Risk Mitigation using Standard Approach

The Bank uses various credit risk mitigation techniques, such as through collateral. Standards based reporting approach, Bank exposure and credit risk mitigation used by the collateral as a secondary way out in the event that the debtor is unable to restore its obligations, is as follows:

1. Policies, procedures and proce-sses to assess and manage the collateral. Policies, procedures and processes to assess and manage the collateral the Bank in accordance with the provisions/Bank Indonesia Regulation and have poured into the policies and procedures for appraisal (appraisal) internal Bank.

2. The main party providers guarantee/ warranty and creditworthiness (credit worthiness) of the parties.
   Creditworthiness (credit worthiness) is ability the company to meet its credit obligations. The main focus lies on the analysis of credit risk, not profitability. Credit analysis focuses on the downside risk, not the potential good side. This includes analysis of liquidity and solvency. Credit analysis tools and criteria for the assessment of a variety of conditions (tangggal maturity), the type and purpose of the contract debts.

3. Information arising from the concentration levels of the use of credit risk mitigation techniques.

Pengungkapan konsentrasi berdasarkan penggunaan teknik mitigasi risiko kredit adalah Bank memiliki konsentrasi pada tagihan korporasi. Bank melakukan pengelolaan risiko konsentrasi kredit dengan menentukan limit untuk sektor industri untuk mengoptimalkan alokasi modal Bank pada suatu tingkat risiko/ *risk appetite* dan *risk tolerance* yang bisa diterima.

Dengan melaksanakan manajemen risiko kredit yang baik dapat menghasilkan pengelolaan kredit secara sehat dan *prudent*, sehingga dapat memberikan dampak yang baik dan membawa arah positif bagi Bank untuk menjadikan integritas dan independensi dalam proses penilaian risiko kredit dimaksud.

Disclosure of concentrations based on the use of risk mitigation techniques are lredit Bank has a concentration in corporate bill. The Bank manages credit risk by determining the concentration limit for the industry sector to optimize the allocation of bank capital at a level of risk/risk appetite and risk tolerance is acceptable.

By implementing a good credit risk management can result in a healthy credit management and prudent, so as to provide a good impact and bring a positive direction for the Bank to make the integrity and independence in the process of credit risk assessment in question

Tabel 3.1. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Bobot Risiko Setelah memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit – Bank secara Individual Audited

Table 3.1. Disclosure Net Receivables based on Risk Weighting, taking into account the Credit Risk Mitigation Impact – Bank, individually Audited

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	0%	20%	35%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	**Eksposur Neraca | Balance Sheet Exposures**			
1	Tagihan Kepada Pemerintah | Claims on Government/Sovereign	3.051.411	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik | Claims on Public Sector Entities	-	330.724	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Entities	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank | Claims on Banks	-	799.186	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal | Claims Secured by Residential Property	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial | Claims Secured by Commercial Real Estate	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan | Claims on Pension Loans	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Claims on Micro, Small, and Retail Portfolio	2.065	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi | Claims on Corporates	92.483	453.362	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo | Claims on Past Due Exposures	-	-	-
11	Aset Lainnya | Other Assets	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | Sharia Exposures (if any)	-	-	-
	Total Eksposur Neraca | Total Balance Sheet Exposures	**3.145.9589**	**1.583.272**	**-**
B	**Ekposur Kewajiban/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif Commitment and Contigencies Liabilities Exposures on Administrative Account**			
1	Tagihan Kepada Pemerintah | Claims on Government/Sovereign	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik | Claims on Public Sector Entities	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Entities	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank | Claims on Banks	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal | Claims Secured by Residential Property	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial | Claims Secured by Commercial Real Estate	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan | Claims on Pension Loans	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Claims on Micro, Small, and Retail Portfolio	14.722	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi | Claims on Corporates	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo | Claims on Past Due Exposures	-	-	-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | Sharia Exposures (if any)	-	-	-
	Total Eksposur TRA | Total Off Balance Sheet Exposures	**14.722**	**-**	**-**
C	**Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan | Counterparty Credit Risk**			
1	Tagihan Kepada Pemerintah | Claims on Government/Sovereign	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik | Claims on Public Sector Entities	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Entities	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank | Claims on Banks	-	2.671	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Claims on Micro, Small, and Retail Portfolio	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi | Claims on Corporates	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | Sharia Exposures (if any)	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk | Total Exposures - Counterparty Credit Risk	**-**	**2.671**	**-**

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

31 Desember 2019 | December 31, 2019								
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivable After Credit Risk Mitigation							ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge
40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya Others		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	694.845	-	-	-	-	413.567	33.085
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	107.210	-	-	-	-	213.442	17.075
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.044.812	-	-	-	1.533.609	122.689
-	-	169.462	-	3.824.106	-	-	3.999.509	319.961
-	-	-	-	3.462	77.418		119.588	9.567
-	-	-	-	-	-	5.159.696	5.159.696	412.776
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**971.517**	**2.044.812**	**3.827.568**	**77.418**	**5.159.696**	**11.439.411**	**915.153**
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	14.571	-	-	-	10.928	874
-	-	-	-	49.667	-	-	49.667	3.973
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**14.571**	**49.667**	**-**	**-**	**60.595**	**4.847**
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	534	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**534**	**43**

Tabel 3.1. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit – Bank secara Individual Audited

Table 3.1. Disclosure Net Receivables based on Risk Weighting, taking into account the Credit Risk Mitigation Impact – Bank, individually Audited

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	0%	20%	35%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	**Eksposur Neraca | Balance Sheet Exposures**			
1	Tagihan Kepada Pemerintah | Claims on Government/Sovereign	4.109.954	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik | Claims on Public Sector Entities	-	101.362	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Entities	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank | Claims on Banks	-	472.683	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal | Claims Secured by Residential Property	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial | Claims Secured by Commercial Real Estate	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan | Claims on Pension Loans	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Claims on Micro, Small, and Retail Portfolio	9.918	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi | Claims on Corporates	234.579	180.597	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo | Claims on Past Due Exposures	65.429	-	-
11	Aset Lainnya | Other Assets	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | Sharia Exposures (if any)	-	-	-
	Total Eksposur Neraca | Total Balance Sheet Exposures	**4.419.880**	**754.642**	**-**
B	**Ekposur Kewajiban/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif Commitment and Contigencies Liabilities Exposures on Administrative Account**			
1	Tagihan Kepada Pemerintah | Claims on Government/Sovereign	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik | Claims on Public Sector Entities	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Entities	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank | Claims on Banks	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal | Claims Secured by Residential Property	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial | Claims Secured by Commercial Real Estate	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan | Claims on Pension Loans	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Claims on Micro, Small, and Retail Portfolio	70.539	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi | Claims on Corporates	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo | Claims on Past Due Exposures	-	-	-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | Sharia Exposures (if any)	-	-	-
	Total Eksposur TRA | Total Off Balance Sheet Exposures	**70.539**	**-**	**-**
C	**Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan | Counterparty Credit Risk**			
1	Tagihan Kepada Pemerintah | Claims on Government/Sovereign	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik | Claims on Public Sector Entities	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Entities	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank | Claims on Banks	-	11.439	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Claims on Micro, Small, and Retail Portfolio	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi | Claims on Corporates	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | Sharia Exposures (if any)	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk | Total Exposures - Counterparty Credit Risk	**-**	**11.439**	**-**

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

31 Desember 2018 | December 31, 2018								
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivable After Credit Risk Mitigation							ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge
40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya Others		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	143.010	-	-	-	-	91.778	7.342
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	98.021	-	-	-	-	143.547	11.484
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	118.171	-	-	118.171	9.454
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.258.804	-	-	-	1.694.103	135.528
-	-	37.311	-	7.018.708	-	-	7.073.482	565.879
-	-	-	-	55.463	320.192		535.751	42.860
-	-	-	-	-	-	1.993.185	1.993.185	159.455
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**278.342**	**2.258.804**	**7.192.341**	**320.192**	**1.993.185**	**11.650.017**	**932.002**
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	70.729	-	-	-	53.046	4.244
-	-	-	-	40.670	-	-	40.670	3.254
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**70.729**	**40.670**	**-**	**-**	**93.716**	**7.498**
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2.288	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.288**	**183**

Tabel 3.2. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual Audited
Table 3.2. Disclosure of Net Receivables and Credit Risk Mitigation Technique – Bank, Individually Audited

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2019 | December 31, 2019			
		Tagihan Bersih Net Receivable	Bagian Yang Dijamin dengan Portion Secured By		
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Credit Insurance
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	**Eksposur Neraca | Balance Sheet Exposures**				
1	Tagihan Kepada Pemerintah | Claims on Government/Sovereign	3.051.411	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik | Claims on Public Sector Entities	1.025.569	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Entities	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank | Claims on Banks	914.886	8.490	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal | Claims Secured by Residential Property	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial | Claims Secured by Commercial Real Estate	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan | Claims on Pension Loans	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Claims on Micro, Small, and Retail Portfolio	2.046.877	2.065	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi | Claims on Corporates	4.539.412	92.483	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo | Claims on Past Due Exposures	80.880	-	-	-
11	Aset Lainnya | Other Assets	5.204.390	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | Sharia Exposures (if any)	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca | Total Balance Sheet Exposures	**16.863.425**	**103.038**	**-**	**-**
B	**Ekposur Rekening Administratif | Exposures on Administrative**				
1	Tagihan Kepada Pemerintah | Claims on Government/Sovereign	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik | Claims on Public Sector Entities	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Entities	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank | Claims on Banks	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal | Claims Secured by Residential Property	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial | Claims Secured by Commercial Real Estate	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan | Claims on Pension Loans	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Claims on Micro, Small, and Retail Portfolio	29.293	14.722	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi | Claims on Corporates	139.028	89.361	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo | Claims on Past Due Exposures	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | Sharia Exposures (if any)	-	-	-	-
	Total Eksposur Rekening Administratif Total Off Balance Sheet Exposures	**168.321**	**104.083**	**-**	**-**
C	**Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan | Counterparty Credit Risk**				
1	Tagihan Kepada Pemerintah | Claims on Government/Sovereign	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik | Claims on Public Sector Entities	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Entities	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank | Claims on Banks	2.645	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Claims on Micro, Small, and Retail Portfolio	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi | Claims on Corporates	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | Sharia Exposures (if any)	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit risk Total Exposures - Counterparty Credit Risk	**2.645**	**-**	**-**	**-**
	Total (A+B+C)	**17.034.391**	**207.121**	**-**	**-**

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

31 Desember 2018 | December 31, 2018							
			Bagian Yang Dijamin dengan Portion Secured By				
Lainnya Others	Bagian Yang Tidak Dijamin Unsecured Portion	Tagihan Bersih Net Receivable	Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Credit Insurance	Lainnya Others	Bagian Yang Tidak Dijamin Unsecured Portion
(7)	(8)=(3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]
3.051.411	-	4.109.954	-	-	-	4.109.954	-
-	244.373	244.373	-	-	-	-	244.373
-	-	-	-	-	-	-	-
-	570.704	577.694	6.990	-	-	-	570.704
-	-	-	-	-	-	-	-
-	118.171	118.171	-	-	-	-	118.171
-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.258.803	2.268.721	9.918	-	-	-	2.258.804
-	7.236.616	7.471.195	234.579	-	-	-	7.236.616
-	375.655	441.084	65.429	-	-	-	375.655
-	1.984.463	1.984.463	-	-	-	-	1.984.463
-	-	-	-	-	-	-	-
3.051.411	**12.788.785**	**17.215.655**	**316.916**	**-**	**-**	**4.109.954**	**12.788.785**
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	141.268	141.268	-	-	-	-	141.268
-	40.670	96.963	56.293	-	-	-	40.670
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	**181.938**	**238.231**	**56.293**	**-**	**-**	**-**	**181.938**
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	11.325	11.325	-	-	-	-	11.325
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	**11.325**	**11.325**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.325**
3.051.411	**12.982.048**	**17.465.211**	**373.209**	**-**	**-**	**4.109.954**	**12.982.048**

i. **Pengungkapan Sekuritisasi Aset**
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, Bank tidak mempunyai eksposur pada pengungkapan terkait.

j. **Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan Standar**
Kebijakan untuk perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dilakukan dengan *Standard Approach* yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia/OJK.

i. **Disclosure of Asset Securitization**
As of December 31, 2019 and December 31, 2018, the Bank has no exposure to the related disclosures.

j. **Calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk**
Policy for calculation of risk-weighted assets for credit risk is performed with the Standard Approach that refers to the regulatory provision.

Tabel 4.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca Audited
Table 4.1. Disclosure of Exposure of Assets in the Balance Sheet Audited

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2019 December 31, 2019			31 Desember 2018 December 31, 2018		
		Tagihan Bersih Net Receivable	ATMR Sebelum MRK RWA Before Credit Risk Mitigation	ATMR Setelah MRK RWA After Credit Risk Mitigation	Tagihan Bersih Net Receivable	ATMR Sebelum MRK RWA Before Credit Risk Mitigation	ATMR Setelah MRK RWA After Credit Risk Mitigation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah Claims on Government/Sovereign	3.051.411	-	-	4.109.954	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claims on Public Sector Entities	1.025.569	413.567	413.567	244.373	91.778	91.778
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Entities	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Claims on Banks	914.886	217.687	213.442	577.694	147.042	143.547
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal Claims Secured by Residential Property	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial Claims Secured by Commercial Real Estate	-	-	-	118.171	118.171	118.171
7	Kredit Pegawai/Pensiunan Claims on Pension Loans	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Claims on Micro, Small, and Retail Portfolio	2.046.877	1.535.158	1.533.609	2.268.721	1.701.541	1.694.103
9	Tagihan Kepada Korporasi Claims on Corporates	4.539.412	4.091.992	3.999.509	7.471.195	7.308.062	7.073.482
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claims on Past Due Exposures	80.880	119.588	119.588	441.084	633.895	535.751
11	Aset Lainnya | Other Assets	5.204.390	-	5.159.696	1.984.463	-	1.993.185
	Total	**16.863.425**	**6.377.992**	**11.439.411**	**17.215.655**	**10.000.489**	**11.650.017**

Tabel 4.2. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administrasi Audited

Table 4.2. Disclosure of Exposure to Commitment Contingencies Liabilities in Administrative Account Transactions Audited

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2018 December 31, 2018			31 Desember 2018 December 31, 2018		
		Tagihan Bersih Net Receivable	ATMR Sebelum MRK RWA Before Credit Risk Mitigation	ATMR Setelah MRK RWA After Credit Risk Mitigation	Tagihan Bersih Net Receivable	ATMR Sebelum MRK RWA Before Credit Risk Mitigation	ATMR Setelah MRK RWA After Credit Risk Mitigation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah Claims on Government/Sovereign	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Claims on Public Sector Entities	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Entities	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank Claims on Banks	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal Claims Secured by Residential Property	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial Claims Secured by Commercial Real Estate	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan Claims on Pension Loans	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Claims on Micro, Small, and Retail Portfolio	29.293	21.970	10.928	141.268	105.951	53.046
9	Tagihan Kepada Korporasi Claims on Corporates	139.028	139.028	49.667	96.963	96.963	40.670
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claims on Past Due Exposures	-	-	-	-	-	-
	Total	**168.321**	**160.998**	**60.595**	**238.231**	**202.914**	**93.716**

Tabel. 4.3. Pengungkapan Eksposure yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) Audited

Table 4.3. Disclosure of Exposure due to the Counterparty Credit Risk Audited

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2019 December 31, 2019			31 Desember 2018 December 31, 2018		
		Tagihan Bersih Net Receivable	ATMR Sebelum MRK RWA Before Credit Risk Mitigation	ATMR Setelah MRK RWA After Credit Risk Mitigation	Tagihan Bersih Net Receivable	ATMR Sebelum MRK RWA Before Credit Risk Mitigation	ATMR Setelah MRK RWA After Credit Risk Mitigation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah Claims on Government/Sovereign	-	-	-	294.885	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claims on Public Sector Entities	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Entities	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Claims on Banks	2.645	529	534	11.325	2.265	2.288
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Claims on Micro, Small, and Retail Portfolio	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi Claims on Corporates	-	-	-	-	-	-
	Total	**2.645**	**529**	**534**	**360.210**	**2.265**	**2.288**

Tabel 4.4. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit

Table 4.4. Disclosure of Total Credit Risk Measurement

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

	31 Desember 2019 December 31, 2019	31 Desember 2018 December 31, 2018
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT | RISK WEIGHTED ASSETS CREDIT RISK	**11.500.543**	**11.746.022**
FAKTOR PENGURANG MODAL | TOTAL CAPITAL DEDUCTION FACTOR	**-**	**-**

2. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko yang timbul akibat pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Bank baik transaksi tunai maupun transaksi derivatif, yang dapat merugikan Bank. Yang termasuk dalam variabel pasar adalah suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga komoditas termasuk turunan dari variable-variabel tersebut.

a. Organisasi manajemen risiko pasar dilakukan oleh Divisi *Treasury & Capital Market* dan Divisi Operasi sebagai *first line of defence*, RMD sebagai *second line of defence* dan Divisi Audit Internal sebagai *third line of defence*.

2. Market Risk

Market Risk is arising from market variables movement on Bank's portfolio, both cash and derivative transactions, which can adversely affect the Bank. Market variables comprise of interest rates, exchange rates, stock prices, and commodity prices, including the derivatives from the aforementioned variables.

a. Market risk management organization is conducted by the Treasury & Capital Market Division and the Operations Division as the first line of defense, RMD as the second line of defense and the Internal Audit Division as the third line of defenses.

b. Perhitungan Risiko Suku Bunga dengan metode standar dilakukan terhadap posisi semua instrumen keuangan yang tergolong dalam *Trading Book* yang terkena Risiko Suku Bunga dan Perhitungan risiko nilai tukar mata uang asing dengan metode standar dilakukan pada posisi devisa yang terkena Risiko Mata Uang Asing.

c. Faktor risiko yang dipertimbangkan dalam risiko suku bunga dan nilai tukar dalam metode standar adalah:
   - Risiko Spesifik dari sekuritas atau keuangan instrumen, terlepas dari posisi panjang atau pendek
   - Risiko General Market keseluruhan portofolio, di mana posisi *long* atau posisi *short* dari sekuritas atau instrumen yang berbeda dapat saling mengimbangi.
   - Perhitungan Risiko nilai tukar dan suku bunga dilakukan untuk *banking book* dan *trading book* dalam mata uang asing.

d. Lingkup portofolio yang dihitung dalam *Capital Adequacy Ratio* (CAR), antara lain:
   - Posisi diadakan untuk dijual kembali dalam jangka pendek.
   - Posisi yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dari pergerakan harga aktual dan/atau potensial.
   - Instrumen derivatif yang terkait dengan sekuritas atau tingkat suku bunga, seperti *Bond Forward*, Opsi Obligasi, *Swap* Suku Bunga, *Swap* Mata Uang Asing.
   - Semua efek hutang dengan tingkat bunga tetap atau mengambang.
   - Posisi devisa dalam *trading book* dan *banking book* yang terkena risiko valuta asing.

e. *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB)
   Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* merupakan Risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan pendapatan Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.

   Sesuai SEOJK nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang "Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan

b. Interest Rate Risk Calculation by standard method is applied to the position of all financial instruments classified as Trading Books subject to Interest Rate Risk, and Foreign currency exposure risk calculation by standard method is applied to foreign currency position exposed to Foreign Currency Risk.

c. The risk factors considered in interest rate and exchange rate risk in standard methods are:
   - Specific Risk from securities or financial instruments, regardless of long or short positions,
   - General Market Overall risk of the portfolio, in which long positions or short positions of different securities or instruments can co-exist.
   - Calculation of exchange rate risk and interest rate is conducted for banking book and trading book in foreign currency.

d. The portfolio scope calculated in the Capital Adequacy Ratio (CAR), among others :
   - Positions are held for resale in the short term.
   - Position held for short-term gain from actual price movements and / or potential price movements.
   - Derivative instruments related to securities or interest rates, such as Bond Forward, Bond Option, Interest Rate Swap, Swap Foreign Currency.
   - All debt securities with fixed or floating interest rates.
   - Foreign exchange position in trading book and banking book exposed to foreign exchange risk

e. Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)
   Interest Rate Risk in the Banking Book is a risk due to movement interest rates in the market that are opposite to the Banking Book position, which has the potential to have an impact on capital and income of the Bank, both now and in the future.

   In accordance with SEOJK number 12 / SEOJK.03 / 2018 concerning "Application of Risk Management and Risk

Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (*Interest Rate Risk in The Banking Book*) bagi Bank Umum", Bank menggunakan 2 (dua) metode dalam melakukan pengukuran Risiko IRRBB sebagai berikut:

a. Pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*), yang selanjutnya disingkat EVE, adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank; dan
b. Pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih, yang selanjutnya disingkat NII, adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan Bank.

f. Langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko pasar yang dilakukan Bank adalah:
1) Bank mengoptimisasi struktur aset dan kewajibannya untuk meminimalisir risiko dan memaksimalkan keuntungan.
2) Meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan jangka waktu panjang.
3) Memonitor perkembangan harga pasar sekaligus memperkokoh kebijakan *pricing* aktiva maupun pasiva melalui forum rapat *Assets Liability Committee* (ALCO) dengan membahas beberapa perhitungan strategis seperti *cost of fund, base lending rate* dan perhitungan lainnya. Dengan demikian, setiap permasalahan yang terjadi di dalam Bank khususnya yang berkaitan dengan risiko suku bunga dapat diantisipasi sedini mungkin.
4) Melakukan monitoring atas risk limits dan aktivitas dari Divisi *Treasury & Capital Market* secara harian dan melaporkannya kepada Direksi.
5) Senantiasa melakukan *monitoring* pergerakan harga dari portofolio investasi Bank, sehingga dapat segera diambil tindakan sedini mungkin jika terjadi indikasi merugikan.

Measurement Approaches Standards for Interest Rate Risk in the Banking Book (Interest Rate Risk in the Banking Book) for Commercial Banks ", Banks use 2 (two) methods in measuring IRRBB Risk as follows:

a. Measurement based on changes in the economic value of equity (economic value of equity), hereinafter abbreviated as EVE, is a method that measures the impact of changes in interest rates on the economic value of the Bank's equity; and
b. Measurement based on changes in net interest income, hereinafter referred to as NII, is a method that measures the impact of changes in interest rates on bank income.

f. Some anticipation / risk mitigation strategies from the Bank are as follows:
1) The bank optimizes its Asset and Liability structure to curtail the risk and maximize the profit.
2) Increase the long term Third Party Fund (TPF).
3) Monitor the market price development while strengthen the pricing policy of asset and liability through the Asset Liability Committee (ALCO) meeting to discuss some strategic calculations such as the cost of fund, the base lending rate and other calculations. Thus, any problems that occur in the Bank, especially with regard to interest rate risk can be promptly anticipated.
4) Monitoring on risk limits and Treasury and Institutional Banking Division activities on daily basis which subsequently reported to the Board of Directors.
5) Continually monitoring the price movements of the Bank's portfolio, so as to immediately act as early as possible should there be any adverse indication.

6) Mengelola dan melakukan mitigasi risiko konsentrasi dengan membuat aturan yang jelas mengenai batas transaksi mulai dari batas pemutus, batas limit antarbank, *limit dealer*, batas per sektor ekonomi, geografi dan lain-lain.
7) Melakukan analisis yang mendalam (*rating, maturity, issuer, underlying transaction, dan lain-lain*) sebelum melakukan investasi.

6) Managing and mitigating concentration risk by imposing robust directive on the transaction including boundary limit, interbank limit, dealer limit, limit by economic sector, geography and others.
7) Conducting in-depth analysis (rating, maturity, issuer, underlying transaction, etc) prior to investing.

Tabel 5.1. Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar *Audited*
Table 5.1. Market Risk using the Standardized Method Audited

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2019 | December 31, 2019				Risk Type
		Bank		Konsolidasi | Consolidated		
		Beban Modal Capital Charge	ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge	ATMR RWA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Risiko Suku Bunga					Interest Rate Risk
	a. Risiko Spesifik	-	-			a. Specific Risk
	b. Risiko Umum	3.178	39.730			b. General Risk
2	Risiko Nilai Tukar	1.110	13.876			Foreign Exchange Risk
3	Risiko Ekuitas *)	-	-			Equity Risk *)
4	Risiko Komoditas *)	-	-			Commodity Risk *)
5	Risiko Option	-	-			Option Risk
	Total	**4.288**	**53.606**	**-**	**-**	**Total**

*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud
*) For banks with subsidiaries having an exposure to such risk

Tabel 5.1. Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar *Audited*
Table 5.1. Market Risk using the Standardized Method Audited

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2018 | December 31, 2018				Risk Type
		Bank		Konsolidasi | Consolidated		
		Beban Modal Capital Charge	ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge	ATMR RWA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Risiko Suku Bunga					Interest Rate Risk
	a. Risiko Spesifik	-	-			a. Specific Risk
	b. Risiko Umum	-	-			b. General Risk
2	Risiko Nilai Tukar	4.708	58.852			Foreign Exchange Risk
3	Risiko Ekuitas *)	-	-			Equity Risk *)
4	Risiko Komoditas *)	-	-			Commodity Risk *)
5	Risiko Option	-	-			Option Risk
	Total	**4.708**	**58.852**	**-**	**-**	**Total**

*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud
*) For banks with subsidiaries having an exposure to such risk

Tabel 5.2. Pengungkapan Eksposure Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB).
Table 5.2. Disclosure of Eksposure Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Berdasarkan hasil simulasi sensitivity analysis per akhir tahun 2019, dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas dan pendapatan bunga bersih sebagai berikut:

Based on the results of a sensitivity analysis simulation at the end of 2019, the impact of changes in interest rates on the economic value of equity and net interest income is as follows:

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

	△EVE		△NII		
Periode	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**Periode**
Parallel up	(658.436)	n.a	(403.440)	n.a	Parallel up
Parallel down	812.698	n.a	(403.440)	n.a	Parallel down
Steepener	(172.322)	n.a			Steepener
Flattener	24.672	n.a			Flattener
Short rate up	309.413	n.a			Short rate up
Short rate down	(288,615)	n.a			Short rate down
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	658.436	n.a	403,440	n.a	Negative Maximum Value (absolute)
Modal Tier 1 (untuk △EVE) atau Projected Income (untuk △NII)	1.417.112	n.a	577,563	n.a	Tier 1 Capital (for △EVE) or Projected Income (for △NII)
Nilai Maskimum dibagi Modal Tier 1 (untuk △EVE) atau Projected Income (untuk △NII)	46,46%	n.a	69,85%	n.a	Maximum Value divided by Tier 1 Capital (for △EVE) or Projected Income (for △NII)

Analisis Kualitatif IRRBB IRRBB Qualitative Analysis	
1. Penjelasan mengenai bagaimana Bank mendefinisikan IRRBB untuk pengukuran dan pengendalian risiko	1. Explanation on how the Bank defines IRRBB for risk management and measurement
Risiko suku bunga dalam *Banking Book* atau *Interest Rate Risk in The Banking Book*, yang selanjutnya disingkat IRRBB, merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (*earnings*) Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.	Risk on interest rate in the Banking Book, which hereafter abbreviate as IRRBB, is a risk caused by the movement of market interest rate that contradict with the Banking Book position, which potentially impacts to capital and earnings of the Bank, both for current or future situation.
Bank melakukan pengukuran IRRBB menggunakan dua metode yakni pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*) atau disingkat △EVE dan pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*) atau disingkat △NII. Simulasi △EVE dan △NII dilakukan sesuai skenario kenaikan dan penurunan suku bunga (rate shock) dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018. Bank melakukan pengendalian serta mitigasi risiko suku bunga melalui strategi rekomposisi aset dan *liabilities* atau strategi *hedging*.	The Bank carries out IRRBB measurement using two methods: measurement based on economic value of equity or △EVE and measurement based on net interest invome or △NII. Simulation of △EVE and △NII is carried out according to the scenario of rate shock stipulated on SE OJK No. 12/SEOJK.03/2018 dated 21 August 2018. The Bank carries out interest rate risk control and mitigation through asset recompotition strategy and liabilities or hedging strategy.
2. Penjelasan mengenai strategi manajemen dan mitigasi IRRBB	2. Explanation on IRRBB mitigation and management strategy
Bank menetapkan strategi pengendalian IRRBB yang sejalan dengan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang disetujui oleh Direksi.	The Bank determines IRRBB control strategy in line with the Bank's overall business strategy by considering risk appetite and risk tolerance agreed by the Board of Directors.
Sementara itu, strategi mitigasi IRRBB terhadap perubahan nilai ekonomis dari modal (△EVE) ditetapkan tergantung dari posisi duration (rata-rata *repricing maturity*) dari aset dan kewajiban. Per 31 Desember 2019, △EVE Bank Jtrust Indonesia sebesar 46,46% masih jauh di bawah *limit* regulator yakni 15%.	Meanwhile, IRRBB mitigation strategy toward economic value of equity (△EVE) is determined by considering duration position (average of repricing maturity) from assets and obligation. As of 31 December 2019, Bank JTrust Indonesia's △EVE was 46.46%, far below regulator's limit of 15%.

3. Periodisasi perhitungan IRRBB bank, dan penjelasan mengenai tindakan spesifik yang digunakan bank untuk mengukur sensitivitas terhadap IRRBB.	3. Calculation period of the Bank's IRRBB, and explanation on specific actions used by the Bank to measure sensitivity to IRRBB
Untuk memastikan IRRBB termonitor dengan baik, Bank melakukan perhitungan IRRBB untuk setiap posisi akhir bulan laporan dan melakukan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengukuran sensitivitas terhadap IRRBB dilakukan sesuai ketentuan dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018, antara lain sebagai berikut:	To ensure IRRBB is monitored in a good manner, the Bank calculates IRRBB every end of the report month and carries out a report according to prevailing provisions. Sensitivity measurement on IRRBB is conducted according to the provision stipulated on SE OJK No. 12/SEOJK.03/2018 dated 21 August 2018, among others as follow:
1. Perhitungan IRRBB memperhitungkan keseluruhan posisi *Banking Book* dengan mengeluarkan ekuitas dan dikelompokkan berdasarkan posisi mata uang yang material bagi Bank	1. IRRBB calculation considers the overall the Banking Book's position by extracting equity and grouped based on the currencies that are important to the Bank.
2. Perhitungan △EVE tidak memperhitungkan keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas.	2. The calculation of △EVE is not accounting the existence of commercial margin in cash flow and discounted cash flow.
4. Penjelasan mengenai skenario *shock* suku bunga dan skenario stres yang digunakan bank untuk mengestimasi perubahan *economic value* dan *earnings*. Berdasarkan ketentuan regulator, untuk △EVE, Bank menerapkan skenario: • *Shock* suku bunga yang paralel ke atas (parallel shock up) • *Shock* suku bunga yang paralel ke bawah (*parallel shock down*) • *Shock* suku bunga yang melandai (*steepener shock*) • *Shock* suku buga yang mendatar (*flattener shock*) • *Shock* suku bunga jangka pendek yang meningkat (*short rates shock ip*) • *Shock* suku bunga jangka pendek yang menurun (*short rates shock down*) Untuk △NII : • *Shock* suku bunga yang parallel ke atas (*parallel shock up*) • *Shock* suku bunga yang parallel ke bawah (*parallel shock down*)	4. Explanation on interest rate shock scenario and stress scenario used by the Bank to estimate changes of economic value and earnings According to the regulation, for △EVE, the Bank implements these scenarios: • Parallel shock up interest rate • Parallel shock down interest rate • Steepener shock interest rate • Flattener shock interest rate • Short rates shock up interest rate • Short rates shock down interest rate For △NII: • Parallel shock up interest rate • Parallel shock down interest rate
5. Asumsi permodelan yang berdampak signifikan dalam perhitungan Dalam perhitungan IRRBB, Bank menggunakan asumsi permodelan dengan pendekatan standar maupun acuan yang ditetapkan oleh regulator.	5. Modeling assumption with significant impact in calculation In calculating IRRBB, the Bank uses an assumption model with standard approach or a benchmark determined by the regulator.
6. Penjelasan komprehensif mengenai asumsi utama pemodelan dan parametrik yang digunakan dalam menghitung △EVE dan △NII. Asumsi yang digunakan oleh Bank dalam menghitung IRRBB merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in the Banking Book*) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas.	6. Comprehensive explanation on main assumptions of modeling and parametric used in calculating △EVE and △NII. Assumption used by the Bank in calculating IRRBB is referring to the Financial Service Authority Regulation that regulates the Implementation of Risk Management and Risk Measurement with Standard Approach for Interest Risk in the Banking Book and Financial Service Authority Regulation that regulates the obligation of fulfillment on liquidity adequacy ratio.
Analisis Kuantitatif Quantitative Analysis	
1. Rata-rata *repricing maturity* yang ditetapkan untuk NMD	1. Average repricing maturity set for NMD
Dalam menetapkan repricing maturity untuk NMD, bank melakukan pendekatan konservatif dengan memperhitungkan NMD kedalam penyesuaian suku bunga (*repricing maturity*) *overnight*.	In determining repricing maturity for NMD, the Bank carries out conservative approach by considering NMD in overnight repricing maturity.
2. Repricing maturity terpanjang yang diterapkan untuk NMD	2. Longest repricing maturity implemented for NMD
Bank melakukan pendekatan konservatif dengan memperhitungkan NMD kedalam penyesuaian suku bunga (*repricing maturity*) overnight.	The Bank carries out conservative approach by considering NMD in overnight repricing maturity.

3. Risiko Likuiditas

Dalam pengelolaan risiko likuiditas yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah atau *counter-party* yang telah jatuh waktu.

a. Organisasi manajemen risiko likuiditas dilakukan oleh *Divisi Treasury & Capital* Market dan Divisi Head Operasi sebagai *first line of defence*, RMD sebagai *second line of defence* dan Divisi Audit Internal sebagai *third line of defence*.

b. Mekanisme pengukuran, *stress testing*, teknik mitigasi risiko likuiditas termasuk indikator peringatan dini dan rencana pendanaan darurat.
Bank berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan *gap* likuiditas (*maturity gap* dan proyeksi arus kas) untuk mengantisipasi risiko likuiditas sedini mungkin, dan juga mengendalikan risiko likuiditas khususnya pada saat kondisi stres. Bank juga telah menyusun *Contingency Funding Plan*, selain juga senantiasa memelihara kemampuannya dalam melakukan akses ke pasar uang dengan terus membina hubungan dengan bank koresponden. Untuk mendeteksi risiko likuiditas, Bank telah mempunyai *Standard Operation Procedure* LCP (*Liquidity Contigency Plan*) dan melakukan pemantauan likuiditas secara harian untuk dilaporkan kepada Direksi.

c. Beberapa strategi (pendanaan) yang dilakukan Bank untuk mengantisipasi hal tersebut adalah:
   1) Melakukan portofolio investasi ke arah investasi yang lebih likuid.
   2) Menurunkan konsentrasi deposan inti dan mengganti dengan dana retail sehingga menjadi lebih *sustainable* (berkesinambungan)
   3) Mendorong bertumbuhnya jumlah investasi dana-dana murah atau nasabah kategori *low cost fund.*
   4) Meningkatkan efektivitas pengelolaan gap likuiditas (*maturity gap, proyeksi cash flow*) untuk mengantisipasi risiko likuiditas sedini mungkin.
   5) Meningkatkan kerja sama dengan Bank Lain agar dapat memanfaatkan fasilitas *Call Money* maupun Repo Surat Berharga intern bank.

3. Liquidity Risk

In managing liquidity risk, among others, due to the Bank is unable to meet obligations to customers or counter-party that has matured. Some of the strategies taken by the Bank to anticipate things are:

a. The liquidity risk management organization is conducted by the Treasury & Capital Market Division and the Head Operations Division as the first line of defense, RMD as the second line of defense and the Internal Audit Division as the third line of defenses.

b. Measurement mechanisms, stress testing, liquidity risk mitigation techniques include early warning indicators and emergency funding plans.
Bank seeks to improve the effectiveness of managing the liquidity gap (maturity gap and cash flow projections) to anticipate liquidity risk as early as possible, as well as to control liquidity risks particularly during stressful conditions. Bank has also set up a Contingency Funding Plan, as well as maintaining its ability to access money market by continuing to establish relationships with correspondent banks. To detect liquidity risk, Bank already has a Standard Operating Procedure LCP (Liquidity Contigency Plan) and performs daily liquidity monitoring to report to the Board of Directors.

c. Some of the Bank's (funding) strategies to anticipate this are:
   1) Conducting investment portfolio toward more liquid investments.
   2) Lowering the concentration of core depositors and replace with retail funds to be more sustainable (sustainable).
   3) Encouraging the growth of the number of investment funds are low or customer category of low cost funds.
   4) Improving the effectiveness of the management of liquidity gap (maturity gap, projected cash flow) in anticipation of liquidity risk as early as possible.
   5) Increase cooperation with other banks in order to avail the facility of Call Money and Securities Repo internal bank.

d. *Liquidity Coverage Ratio* (LCR)

Bank juga telah mengadopsi perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) berdasarkan kerangka kerja BASEL III. LCR tersebut merupakan rasio aset likuid berkualitas tinggi terhadap potensi arus kas keluar. LCR yang diperhitungkan ini juga mengukur kemampuan Bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas apabila terjadi arus keluar yang cukup besar atau pada saat kondisi stres. Pada kondisi stres, diharapkan aset-aset likuid berkualitas tinggi yang dimiliki oleh Bank seperti Surat Berharga Pemerintah atau Bank Indonesia dapat dijual dengan harga yang sesuai untuk memenuhi likuiditas apabila terjadi arus kas keluar yang besar.

Liquidity Coverage Ratio (LCR) bulan Desember 2019 untuk Bank adalah sebesar 145,79% atau berada di atas ketentuan minimum Rasio LCR sebesar 100% yang ditetapkan oleh Regulator. Hal ini menunjukkan bahwa Bank dapat mengelola likuditas dengan baik.

d. Liquidity Coverage Ratio (LCR)

The Bank has also adopted a Liquidity Coverage Ratio (LCR) calculation based on the BASEL III framework. The LCR represents a high quality liquid asset ratio against the potential for cash outflows. This calculated LCR also measures the Bank's ability to meet liquidity requirements in the event of a substantial outflow or under stressful conditions. Under stress conditions, it is expected that high quality liquid assets held by Banks such as Government Securities or Bank Indonesia can be sold at appropriate prices to meet liquidity in the event of substantial cash outflows.

The December 2019 Liquidity Coverage Ratio (LCR) for Jtrust Bank Indonesia is 145.79% or above the minimum LCR Ratio of 100% set by the Regulator. This shows that Bank can manage liquidity well.

Tabel 6.1. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual Audited

Table 6.1. Maturity Profile in Rupiah – Bank, individually Audited

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No.	Pos - pos Account	Saldo Balance	31 Desember 2019 | December 31, 2019				
			Jatuh Tempo | Maturity				
			≤ 1 bulan month	> 1 – 3 bulan month	> 3 – 6 bulan month	> 6 –12 bulan month	> 12 bulan month
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	**NERACA | BALANCE SHEET**						
A	**Aset | Assets**						
1	Kas | Cash	87.493	87.493	-	-	-	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia Placement with Bank Indonesia	798.070	798.070	-	-	-	-
3	Penempatan pada bank lain Placement with other banks	62.924	42.924	-	-	20.000	-
4	Surat Berharga **) Marketable securities	4.074.146	139.410	197.103	56.318	291.510	3.389.805
5	Kredit Yang Diberikan | Loans	5.772.196	361.975	448.747	719.884	904.233	3.337.358
6	Tagihan lainnya Other receivable	-	-	-	-	-	-
7	Lain-lain | Others	4.841.718	4.841.718	-	-	-	-
	Total Aset | Total Assets	**15.636.547**	**6.271.590**	**645.850**	**776.202**	**1.215.743**	**6.727.163**
B	**Kewajiban | Liabilities**						
1	Dana Pihak Ketiga Deposits from customer	11.846.662	8.324.970	2.707.595	334.782	450.935	28.380
2	Kewajiban kepada Bank Indonesia Liabilities with Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3	Kewajiban kepada bank lain Liabilities with other banks	1.256.430	1.092.372	145.000	9.433	9.625	-
4	Surat Berharga yang Diterbitkan Securities issued	667.154	667.154	-	-	-	-
5	Pinjaman yang Diterima Borrowings	-	-	-	-	-	-
6	Kewajiban lainnya Other liabilities	-	-	-	-	-	-
7	Lain-lain | Others	268.680	268.680	-	-	-	-
	Total Kewajiban | Total Liabilities	**14.038.926**	**10.353.176**	**2.852.595**	**344.215**	**460.560**	**28.380**
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca On Balance Sheet Asset and Liabilities Differences	**1.597.621**	**(4.081.586)**	**(2.206.745)**	**431.987**	**755.183**	**6.698.783**
II	**REKENING ADMINISTRATIF | OFF BALANCE SHEET**						
A	Tagihan rekening Administratif | Off Balance Sheet Receivables						
1	Komitmen | Commitment	-	-	-	-	-	-
2	Kontinjensi | Contingency ******)	-	-	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif Total Administrative Account Receivable	-	-	-	-	-	-
B	Kewajiban Rekening Administratif | Off Balance Sheet Liabilities						
1	Komitmen | Commitment	-	-	-	-	-	-
2	Kontinjensi | Contingency ******)	128.676	70.917	27.418	12.439	1.704	16.199
	Total Kewajiban Rekening Administratif Total Off Balance Sheet Liabilities	**128.676**	**70.917**	**27.418**	**12.439**	**1.704**	**16.199**
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif Off Balance Sheet Assets and Liabilities Differences	**(128.676)**	**(70.917)**	**(27.418)**	**(12.439)**	**(1.704)**	**(16.199)**
	Selisih | Differences ((IA - IB) + (IIA - IIB))	**1.468.945**	**(4.152.503)**	**(2.234.163)**	**419.548**	**753.479**	**6.682.584**
	Selisih Kumulatif | Cumulative Differences		**(4.152.504)**	**(1.918.341)**	**(2.337.890)**	**(3.091.368)**	**(9.773.952)**

Tabel 6.1. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual Audited
Table 6.1. Maturity Profile in Rupiah – Bank, individually Audited

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No.	Pos - pos Account	Saldo Balance	31 Desember 2018 | December 31, 2018				
			Jatuh Tempo | Maturity				
			≤ 1 bulan month	> 1 – 3 bulan month	> 3 – 6 bulan month	> 6 –12 bulan month	> 12 bulan month
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	**NERACA | BALANCE SHEET**						
A	**Aset | Assets**						
1	Kas | Cash	91.750	91.750	-	-	-	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia Placement with Bank Indonesia	1.343.664	1.343.664	-	-	-	-
3	Penempatan pada bank lain Placement with other banks	43.250	43.250	-	-	-	-
4	Surat Berharga ** Marketable securities	2.815.299	486.987	-	97.748	292.886	1.937.678
5	Kredit Yang Diberikan | Loans	9.015.242	2.927.373	1.034.465	763.516	264.226	4.025.663
6	Tagihan lainnya Other receivable	16.546	4.222	12.324	-	-	-
7	Lain-lain | Others	1.514.258	1.514.258	-	-	-	-
	Total Aset | Total Assets	**14.840.009**	**6.411.504**	**1.046.789**	**861.264**	**557.113**	**5.963.341**
B	**Kewajiban | Liabilities**						
1	Dana Pihak Ketiga Deposits from customer	12.261.027	8.572.864	2.742.500	417.461	512.719	15.483
2	Kewajiban kepada Bank Indonesia Liabilities with Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3	Kewajiban kepada bank lain Liabilities with other banks	1.460.583	1.250.595	193.940	4.423	11.625	-
4	Surat Berharga yang Diterbitkan Securities issued	664.814	664.814	-	-	-	-
5	Pinjaman yang Diterima Borrowings	-	-	-	-	-	-
6	Kewajiban lainnya Other liabilities	16.546	4.222	12.324	-	-	-
7	Lain-lain | Others	212.631	212.631	-	-	-	-
	Total Kewajiban | Total Liabilities	**14.615.601**	**10.705.127**	**2.948.765**	**421.883**	**524.344**	**15.483**
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca On Balance Sheet Asset and Liabilities Differences	**224.408**	**(4.293.623)**	**(1.901.976)**	**439.380**	**32.769**	**5.947.858**
II	**REKENING ADMINISTRATIF | OFF BALANCE SHEET**						
A	Tagihan rekening Administratif | Off Balance Sheet Receivables						
1	Komitmen | Commitment	-	-	-	-	-	-
2	Kontinjensi | Contingency *****)	31.590	31.590	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif Total Administrative Account Receivable	31.590	31.590	-	-	-	-
B	Kewajiban Rekening Administratif | Off Balance Sheet Liabilities						
1	Komitmen | Commitment	3.743	687	3.056	-	-	-
2	Kontinjensi | Contingency ******)	216.665	93.313	39.372	11.519	29.263	43.199
	Total Kewajiban Rekening Administratif Total Off Balance Sheet Liabilities	**220.408**	**93.999**	**42.428**	**11.519**	**29.263**	**43.199**
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif Off Balance Sheet Assets and Liabilities Differences	**(188.818)**	**(62.409)**	**(42.428)**	**(11.519)**	**(29.263)**	**(43.199)**
	Selisih | Differences ((IA - IB) + (IIA - IIB))	**35.590**	**(4.356.032)**	**(1.944.403)**	**427.861**	**3.506**	**5.904.659**
	Selisih Kumulatif | Cumulative Differences		**(4.356.032)**	**(2.411.629)**	**(2.839.490)**	**(2.842.996)**	**(8.747.655)**

Tabel 6.2. Pengungkapan Profil Maturitas Valuta Asing – Bank secara Individual Audited
Table 6.2. Disclosure of Maturity Profile in Foreign Exchange – Bank, individually Audited

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No.	Pos - pos Account	Saldo Balance	31 Desember 2019 | December 31, 2019 Jatuh Tempo | Maturity				
			≤ 1 bulan month	> 1 – 3 bulan month	> 3 – 6 bulan month	> 6 –12 bulan month	> 12 bulan month
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	**NERACA | BALANCE SHEET**						
	A Aset | Assets						
	1 Kas | Cash	22.815	22.815	-	-	-	-
	2 Penempatan pada Bank Indonesia Placement with Bank Indonesia	98.640	98.640	-	-	-	-
	3 Penempatan pada bank lain Placement with other banks	522.643	522.643	-	-	-	-
	4 Surat Berharga ** Marketable securities	145.715	-	-	-	-	145.715
	5 Kredit yang Diberikan | Loans	473.795	18.068	140.805	33.434	164.193	117.295
	6 Tagihan lainnya Other receivable	23.518	4.761	8.630	10.127	-	-
	7 Lain-lain | Others	4.923	4.923	-	-	-	-
	Total Aset | Total Assets	**1.292.049**	**671.850**	**149.435**	**43.561**	**164.193**	**263.010**
	B Kewajiban | Liabilities						
	1 Dana Pihak Ketiga Deposits from customer	959.569	796.341	116.820	46.392	16	-
	2 Kewajiban kepada Bank Indonesia Liabilities with Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
	3 Kewajiban kepada bank lain Liabilities with other banks	139.558	139.558	-	-	-	-
	4 Surat Berharga yang Diterbitkan Securities issued	-	-	-	-	-	-
	5 Pinjaman yang Diterima Borrowings	-	-	-	-	-	-
	6 Kewajiban lainnya Other liabilities	2.101	-	-	2.101	-	-
	7 Lain-lain | Others	6.789	6.789	-	-	-	-
	Total Kewajiban | Total Liabilities	**1.108.017**	**942.688**	**116.820**	**48.493**	**16**	**-**
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca On Balance Sheet Asset and Liabilities Differences	**184.032**	**(270.838)**	**32.615**	**(4.932)**	**164.177**	**263.010**
II	**REKENING ADMINISTRATIF | OFF BALANCE SHEET**						
	A Tagihan rekening Administratif | Off Balance Sheet Receivables						
	1 Komitmen | Commitment	-	-	-	-	-	-
	2 Kontinjensi | Contingency *****)	-	-	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif Total Administrative Account Receivable	-	-	-	-	-	-
	B Kewajiban Rekening Administratif | Off Balance Sheet Liabilities						
	1 Komitmen | Commitment	10.727	2.636	6.941	1.151	-	-
	2 Kontinjensi | Contingency ******)	203.675	92.615	-	-	55.530	55.530
	Total Kewajiban Rekening Administratif Total Off Balance Sheet Liabilities	**214.402**	**95.251**	**6.941**	**1.151**	**55.530**	**55.530**
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif Off Balance Sheet Assets and Liabilities Differences	**(214.402)**	**(95.251)**	**(6.941)**	**(1.151)**	**(55.530)**	**(55.530)**
	Selisih | Differences ((IA - IB) + (IIA - IIB))	**(30.370)**	**(366.089)**	**25.674**	**(6.081)**	**108.647**	**207.480**
	Selisih Kumulatif | Cumulative Differences		**(366.089)**	**(391.764)**	**(385.682)**	**(494.329)**	**(701.809)**

Tabel 6.2. Pengungkapan Profil Maturitas Valuta Asing – Bank secara Individual Audited
Table 6.2. Disclosure of Maturity Profile in Foreign Exchange – Bank, individually Audited

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No.	Pos - pos Account	Saldo Balance	31 Desember 2018 | December 31, 2018 Jatuh Tempo | Maturity ≤ 1 bulan month	> 1 – 3 bulan month	> 3 – 6 bulan month	> 6 –12 bulan month	> 12 bulan month
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	**NERACA | BALANCE SHEET**						
	A Aset | Assets						
	1 Kas | Cash	18.355	18.355	-	-	-	-
	2 Penempatan pada Bank Indonesia Placement with Bank Indonesia	109.365	109.365	-	-	-	-
	3 Penempatan pada bank lain Placement with other banks	206.295	206.295	-	-	-	-
	4 Surat Berharga ** Marketable securities	747.439	-	-	-	-	747.439
	5 Kredit yang Diberikan | Loans	1.243.813	375.084	44.373	47.958	111.336	665.062
	6 Tagihan lainnya Other receivable	632.586	621.960	10.625	-	-	-
	7 Lain-lain | Others	51.628	51.628	-	-	-	-
	Total Aset | Total Assets	**3.009.481**	**1.382.688**	**54.998**	**47.958**	**111.336**	**1.412.501**
	B Kewajiban | Liabilities						
	1 Dana Pihak Ketiga Deposits from customer	987.578	572.820	267.966	23.360	123.432	-
	2 Kewajiban kepada Bank Indonesia Liabilities with Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
	3 Kewajiban kepada bank lain Liabilities with other banks	1.021	1.021	-	-	-	-
	4 Surat Berharga yang Diterbitkan Securities issued	215.700	215.700	-	-	-	-
	5 Pinjaman yang Diterima Borrowings	-	-	-	-	-	-
	6 Kewajiban lainnya Other liabilities	-	-	-	-	-	-
	7 Lain-lain | Others	12.366	12.366	-	-	-	-
	Total Kewajiban | Total Liabilities	**1.216.665**	**801.907**	**267.966**	**23.360**	**123.432**	**-**
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca On Balance Sheet Asset and Liabilities Differences	**1.792.816**	**580.780**	**(212.967)**	**24.598**	**(12.097)**	**1.412.501**
II	**REKENING ADMINISTRATIF | OFF BALANCE SHEET**						
	A Tagihan rekening Administratif | Off Balance Sheet Receivables						
	1 Komitmen | Commitment	-	-	-	-	-	-
	2 Kontinjensi | Contingency *****)	-	-	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif Total Administrative Account Receivable	-	-	-	-	-	-
	B Kewajiban Rekening Administratif | Off Balance Sheet Liabilities						
	1 Komitmen | Commitment	2.413	2.413	-	-	-	-
	2 Kontinjensi | Contingency *****)	257.335	22.004	2.810	62.868	169.653	-
	Total Kewajiban Rekening Administratif Total Off Balance Sheet Liabilities	**259.748**	**24.417**	**2.810**	**62.868**	**169.653**	**-**
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif Off Balance Sheet Assets and Liabilities Differences	**(259.748)**	**(24.417)**	**(2.810)**	**(62.868)**	**(169.653)**	**-**
	Selisih | Differences ((IA - IB) + (IIA - IIB))	**1.533.068**	**556.363**	**(215.777)**	**(38.270)**	**(181.750)**	**1.412.501**
	Selisih Kumulatif | Cumulative Differences		**556.363**	**772.141**	**810.410**	**992.160**	**(420.341)**

Tabel. 6.3. Pengungkapan Nilai *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) Audited
Table 6.3. Disclosure of Liquidity Coverage Ratio (LCR) Audited

(dalam % | in %)

	NILAI LCR (%) LCR SCORE (%)			
	Q1 - 2019	Q2 - 2019	Q3 - 2019	Q4 - 2019
Bank Secara Individu Bank Only	166,50%	139,56%	149,86%	138,43%
Bank Secara Konsolidasi Bank Consolidated	Lap. Publikasi Juni 2019 Publication Report June 2019			

4. Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional juga menjadi perhatian Bank, di mana risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan faktor manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

a. Organisasi manajemen risiko operasional dilakukan oleh seluruh Unit Kerja (baik di kantor cabang dan kantor pusat) sebagai *first line of defence*, dan RMD sebagai *second line of defence*, serta dan Divisi Intenal Audit sebagai *third line of defence*.

b. Beberapa langkah yang dilakukan Bank dalam mengidentifikasi, mengukur dan memitigasi risiko operasional adalah sebagai berikut:

1) Bank telah membentuk *Quality Assurance* (QA) yang terbagi menjadi 2 departemen yaitu QA Cabang dan QA Kantor Pusar di bawah RMD sebagai *second line of defence*. Fungsi dari QAS adalah memastikan bahwa unit kerja di cabang telah melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku, serta melakukan *review* & menyempurnakan ketentuan internal.

2) Untuk melakukan identifikasi kejadian risiko yang terjadi di Cabang serta memiliki dampak kerugian, maka pemantauan dilakukan menggunakan *Irregulatory Risk Report*.

3) Melakukan pencatatan atas data kerugian yaitu *Loss Event Database* (LED) di mana data tersebut digunakan sebagai salah satu parameter dalam pengukuran Profil Risiko Operasional.

4. Operational Risk

Operational risk management is also a concern for the Bank, which operational risk is the risk that is partly due to insufficient or failed internal processes, human factors, system failure, or external problems affecting the operations of the Bank.

a. The operational risk management organization is carried out by all working units (both at the branch office and head office) as the first line of defense, and RMD as the second line of defense, and the Intenal Audit Division as the third line of defenses.

b. Several steps taken by the Bank in identifying, measuring and mitigating operational risks are as follows:

1) Banks have established Quality Assurance (QA) defided by two departement as QA Branches and QA Head Office that under RMD as the second line of defenses. The function of QAS is to ensure that the branch's work units have performed operational transactions in accordance with applicable internal regulations, as well as reviewing and improving internal regulations.

2) To identify the risk occurrence occurring in the Branch as well as to have a loss impact, the monitoring shall be conducted using the Irregulatory Risk Report.

3) Recording of data loss is Loss Event Database (LED) where the data is used as one of the parameters in the measurement of Operational Risk Profile.

4) Bank telah menerapkan *Risk & Control Self Assessment* (RCSA) yang merupakan metodologi untuk identifikasi sumber-sumber risiko, yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko, memantau tren tingkat risiko, serta mengendalikan dan mitigasi risiko. Pelaksanaan Identifikasi melalui RCSA diterapkan pada seluruh unit kerja.
5) Melakukan peninjauan ulang dan penyempurnaan atas *Standard Operation Procedure* masing-masing unit kerja secara berkala.
6) Melakukan Penetapan batas kewenangan dalam melakukan transaksi operasional
7) Setiap adanya produk ataupun aktivitas baru Bank selalu dilakukan kajian risiko sesuai dengan ketentuan dari regulator.
8) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan frekuensi pelatihan internal maupun eksternal di bidang perkreditan, pemasaran produk dan motivasi kerja.
9) Pengelolaan risiko operasional juga dilakukan dengan memperkuat keamanan dan kehandalan teknologi informasi, sehingga kegagalan sistem maupun *human error* dapat ditekan.
10) Melakukan peningkatan pada *IT Security System* untuk seluruh sistem yang ada pada Bank.
11) Memastikan ketersediaan *Disaster Recovery Plan* (DRP) yang diuji secara berkala sebagai antisipasi jika terjadi gangguan IT.
12) Meningkatkan fungsi pengawasan internal melalui Satuan Kerja Audit Internal. Selain itu membentuk *Anti Fraud Department* dalam Satuan Kerja Audit Internal sebagai upaya memperkuat sistem pengendalian Intern.
13) Bank telah memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) dimaksudkan untuk minimalisasi risiko, menangani dampak dari gangguan/ bencana, serta percepatan proses pemulihannya agar kegiatan operasional dan pelayanan kepada nasabah tetap dapat berjalan dengan baik.

4) The Bank has implemented Risk & Control Self Assessment (RCSA) which is a methodology for identification of risk sources, used to measure high risk, monitor risk level trends, and control and mitigate risk. Implementation of Identification through RCSA is applied to all work units.
5) Perform regular review and improvement of the Standard Operation Procedure of each work unit.
6) Determining the limits of authority in conducting operational transactions
7) Any existence of new products or activities of the Bank is always conducted risk assessment in accordance with the provisions of the regulator.
8) Increasing the quality of human resources by increasing the frequency of internal and external training in the field of credit, product marketing and work motivation.
9) Operational risk management is also done by strengthening the security and reliability of information technology, so that system failure and human error can be suppressed.
10) Make improvements to the IT Security System for all existing systems in Bank.
11) Ensure availability of Disaster Recovery Plan (DRP) that is tested periodically in anticipation in case of IT interruption.
12) Improve internal control function through Internal Audit Work Unit. In addition, to form the Anti Fraud Department in the Internal Audit Working Unit as an effort to strengthen the internal control system.
13) Bank has a Bussiness Continuity Plan (BCP) intended to minimize risks, deal with the impact of disruption / disaster, and accelerate the recovery process so that operational activities and services to customers can still run well.

***Business Countinuity Plan* (BCP)**

Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian finansial maupun non finansial yang diakibatkan faktor eksternal seperti bencana alam, kebakaran, kerusuhan, yang berdampak pada kemampuan teknologi Bank dan kegiatan operasional bisnis Bank terutama pelayanan kepada nasabah, Bank telah menerapkan Kebijakan maupun Standard Operational Procedure *Bussiness Continuity Plan* (BCP).

Tim Organisasi BCP yang dibentuk Bank memiliki tugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan BCP dalam penanganan aktivitas bisnis dalam keadaan darurat (*disaster*) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Bank. Bank telah melakukan penyempurnaan BCP dengan Review *Business Impact Analysis* (BIA) sesuai dengan *business process*, dan telah melakukan sosialisasi dan simulasi pelaksanaan BCP sesuai dengan skenario, selanjutnya melakukan *Review* Kebijakan dan SOP, *Review* Prosedur Alternatif (*Contingency Plan*), dan melakukan Uji Coba BCP di Kantor Cabang tertentu dengan simulasi bencana kebakaran dengan mengaktifkan lokasi alternatif dekat dengan Kantor Cabang.

Business Countinuity Plan (BCP)

In order to minimize the potential loss of financial and non financial result of external factors such as natural disasters, fires, riots, which have an impact on the ability of technology Bank and the operational activities of the Bank's business is mainly services to customers, the Bank has implemented policies and Standard Operating Procedure Bussiness Continuity Plan (BCP).

The organization team formed BCP Bank has the task of coordinating the implementation of the BCP in the handling of business activity in an emergency (disaster) in accordance with the needs and conditions of the Bank. Bank has made improvements BCP to Review Business Impact Analysis (BIA) in accordance with the business process, and has conducted socialization and a simulation execution of BCP according with scenario, then do a Review of Policy and SOP, Review Procedures Alternatives (Contingency Plan), and conduct Testing Branch BCP in particular with the fire disaster simulation by activating an alternate location close to the Branch Office.

Tabel. 7.1. Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank Secara Individual - Audited
Table 7.1. Disclosure of Operational Risk – Bank, Individually - Audited

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No.	Pendekatan Yang Digunakan Indicator Approach	31 Desember 2019 December 31, 2019			31 Desember 2018 December 31, 2018		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) Average Gross Income in the past 3 years	Beban Modal Capital Charge	ATMR RWA	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) Average Gross Income in the past 3 years	Beban Modal Capital Charge	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)
1	Pendekatan Indikator Dasar Basic Indicator Approach	443.868	66.553	831.911	567.209	85.081	1.063.517
	Total						

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum suatu risiko yang disebabkan karena adanya kelemahan aspek yuridis/hukum atau karena tidak terdokumentasikannya transaksi tersebut dengan baik. Risiko ini tidak terbatas pada risiko yang timbul dari kemungkinan kontrak/perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan, tuntutan hukum/ gugatan pihak ketiga, ketidaksesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kelemahan perikatan, pengikatan jaminan yang tidak sempurna,

5. Legal Risk

Legal risk is a risk that due to the weakness of the juridical aspects / terdokumentasikannya law or because no such transactions properly. This risk is not limited to risks arising from the possibility of a contract / agreement that can not be implemented, litigation / claim a third-party, non-compliance with regulations and legislation in force, the weakness of the engagement, the binding guarantees are not perfect, the inability of the implementation of court decisions, decisions a court may interfere

ketidaksanggupan penerapan putusan pengadilan, keputusan pengadilan yang dapat mengganggu atau mempengaruhi operasi atau kondisi Bank.

Pengelolaan Risiko Hukum dilakukan antara lain:

a. Melakukan peninjauan kembali (*review*) atas dokumen hukum, perjanjian maupun kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.
b. Inventarisasi atas kasus-kasus hukum yang terjadi termasuk di dalamnya memantau perkembangan dari setiap kasus hukum yang ada. Penanganan kasus hukum disusun berdasarkan skala prioritas dan seluruh perkembangannya terpantau dengan baik dan selalu dilaporkan kepada Manajemen untuk ditindaklanjuti melalui penyelesaian yang mengandung potensi risiko hukum paling sedikit.
c. Fungsi *Corporate, Legal & Litigation Division* yang memiliki peranan penting dalam memberikan analisis/review dari sudut pandang legal terkait dengan produk atau aktivitas baru Bank, memberikan masukan dari sisi hukum akibat adanya perubahan regulasi, melakukan *review* atas perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Bank dengan pihak ketiga, selain itu juga menangani permasalahan hukum yang terkait dengan litigasi.

6. Risiko Stratejik

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko ini dilakukan dengan cara:

a. Penyusunan Rencana Bisnis Bank untuk periode tahun 2020-2022 yang digunakan sebagai pedoman oleh Manajemen dan karyawan.
b. Melakukan pemantauan atas kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi dengan sasaran/*target* yang ingin dicapai oleh Bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank tersebut.
c. Fungsi dari *Planning Performance Division* yang secara rutin melakukan pemantauan berkala (performance review) atas pencapaian kinerja dari tiap divisi/kantor wilayah/cabang/capem dan Bank secara keseluruhan.

with or affect the operation or condition of the Bank.

Legal Risk Management carried out among others:

a. Re-evaluate (review) on legal documents, agreements or contracts with third parties.
b. Inventory of legal cases that occurred includes monitoring the development of any case law exists. Handling of the legal case is based on priorities and the entire development is well monitored and regularly reported to the Management to be followed up through the completion of which contains at least the potential legal risks.
c. Functions Corporate, Legal & Litigation Division, which has an important role in providing analysis / review from the standpoint of legal associated with new product or activity Bank, provide input on the side of the law as a result of regulatory changes, to review the agreements made between the Bank and third parties, while also addressing legal issues related to litigation.

6. Strategic Risk

Some steps were taken to anticipate the risk of this is done by:

a. Preparation of Business Plan for the period 2020-2022 were used as guidance by management and employees.
b. The monitoring of financial performance by comparing the realization of the objectives / targets to be achieved by the Bank in accordance with the Bank's Business Plan.
c. Function of Performance Planning Division, which routinely conducts regular monitoring (performance review) upon achievement of the performance of each division / regional office / branch / Sub Branch and the Bank as a whole.

d. Merevisi pengkinian atas strategi yang ingin dicapai sesuai dengan perkembangan kondisi internal maupun eksternal, sehingga akan menjadi realistis dengan pencapaian sasaran Bank.

7. Risiko Kepatuhan

Organisasi manajemen risiko kepatuhan dilakukan seluruh unit kerja *sebagai first line of defense*, Divisi *Compliance* sebagai *second line of defence* dan Divisi Internal Audit sebagai *third line of defence*.

Pengelolaan risiko kepatuhan yang dilakukan oleh Bank adalah:

a. Menyempurnakan dan monitoring Kebijakan Kepatuhan dan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
b. Pemantauan terhadap pengkinian data nasabah dan penerapan *single CIF* serta penanganan rekening pasif/*dormant*.
c. Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris sesuai dengan amanat dalam Peraturan Bank Indonesia, di mana Bank secara rutin melakukan sosialisasi kepada unit-unit terkait melalui Divisi *Compliance*.
d. Penyusunan Laporan Kepatuhan kepada pihak Internal maupun Eksternal.
e. Peningkatan fungsi *Compliance* oleh Divisi *Compliance* dengan memastikan kepatuhan ketentuan internal sesuai/memenuhi dari regulasi, melalui *gapping analysis* dan mendiskusikan hasil *gap analysis* kepada unit kerja serta dilakukan penyempurnaan/perbaikan dari ketentuan internal tersebut.
f. Fungsi kepatuhan ini didukung oleh sistem *Compliance Report Monitoring* (CRM) sebagai reminder unit kerja atas kewajiban menyampaian laporan rutin kepada regulator.

d. Revise update on the strategy to be achieved in accordance with the development of internal and external conditions, so it would be realistic to the achievement of the objectives of the Bank.

7. Compliance Risk

The compliance risk management organization is conducted throughout the work unit as the first line of defense, the Compliance Division as the second line of defense and the Internal Audit Division as the third line of defenses.

Compliance risk management conducted by the Bank are:

a. Improve and monitoring and Policy Compliance Policy Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism.
b. Monitoring of customer data updating and implementation of CIF singles as well as the handling of the passive account / dormant.
c. Implementation of the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism in accordance with the mandate in the Regulation of Bank Indonesia, where Bank Indonesia routinely JTrust outreach to relevant units via the Compliance Division.
d. Adherence to the preparation of the Report of the Internal and External.
e. Enhanced Compliance function by Compliance Division by ensuring compliance with internal regulations in accordance with / regulating from regulation, through gapping analysis and discussing gap analysis result to work unit as well as improving / repairing from internal provision.
f. This compliance function is supported by the Compliance Report Monitoring (CRM) system as a work unit reminder of the obligation to deliver routine reports to regulators.

8. Risiko Reputasi

Pengelolaan risiko reputasi oleh Bank dilakukan dengan cara:

a. Pemantauan terhadap publikasi media, yang bekerja sama dengan jasa pihak ketiga oleh *Corporate Secretary,* dan
b. Melakukan pemantauan terhadap keluhan nasabah melalui *Retail Banking Division* guna menangani keluhan dengan segera, serta melakukan optimalisasi fungsi *Call Center* dalam penanganan keluhan nasabah.
c. Bank juga ikut ambil bagian dalam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility,* serta ikut melaksanakan aktivitas-aktivitas sosial lainnya bersama dengan nasabah, termasuk di dalamnya sebagai sponsor dalam berbagai kegiatan masyarakat.
d. Meningkatkan *new corporate image* J Trust Bank melalui penyempurnaan *website* Bank dan melaksanakan *press release* dengan media.

Bank menyakini bahwa setiap aspek efektivitas pelaksanaan manajemen Perseroan yang baik (termasuk manajemen risiko dan sistem pengendalian internal) dalam kaitannya dengan GCG akan memperbaiki reputasi.

8. Reputation Risk

Reputation risk management by the Bank is done by:

a. Monitoring of media publications, which works closely with third-party services by the Corporate Secretary, and
b. Monitoring of customer complaints via Retail Banking Division to handle complaints promptly, as well as to optimize the function of Call Center in the handling of customer complaints.
c. The Bank also took part in implementing Corporate Social Responsibility program, as well as participate in implementing other social activities together with customers, including as a sponsor in various community activities.
d. Increase the Bank's new corporate image, by improving the website J Trust Bank and carry out a press release to the media.

The Bank believes that every aspect of the effectiveness of the implementation of the Company's good management (including risk management and internal control systems) in relation to corporate governance would improve the reputation.

Profil Risiko

Penilaian Profil Risiko sesuai dengan POJK No. 4/POJK.3/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, penilaian dilakukan terhadap risiko yang melekat (*inherent risk*) dan kualitas penerapan manajemen risiko melalui proses *self assessment* pada seluruh aktivitas bisnis bank yang mencakup 8 (delapan) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko stratejik, risiko hukum, dan risiko reputasi.

Risk Profile

Risk Profile Assessment in accordance with POJK No. 4/POJK.3/2016 dated January 27, 2016 on the Assessment of Commercial Banks and its implementing regulations, the assessment of inherent risks (inherent risk) and the quality of risk management through a process of self-assessment in all business activities of banks that includes 8 (eight) risks such as credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, strategic risk, legal risk, and reputation risk.

TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology

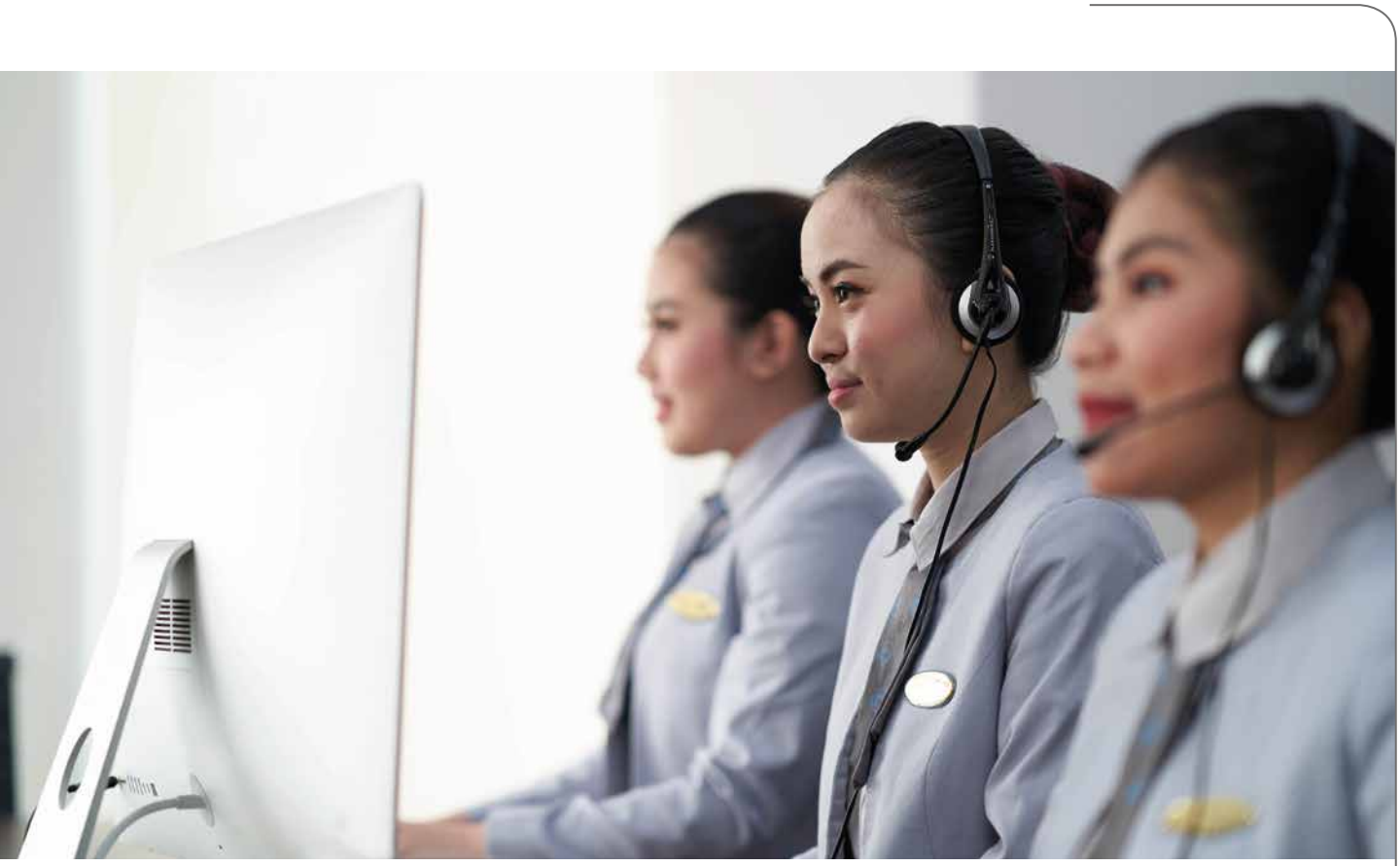

Bank melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan teknologi informasi, di internal dan untuk konsumen.

The Bank implements several strategies to increase the quality and security of information technology, both for internal and consumers.

Selama tahun 2019, Divisi Teknologi Informasi (TI) Bank telah memenuhi target yang ditetapkan untuk rencana bisnis. Beberapa pencapaian yang berarti di tahun 2019 antara lain: *Network Redesign* yang dijalankan pada semester pertama; penerapan aplikasi integrasi pelaporan BI; pengembangan aplikasi *Anti Money Laundering*; dan pembuatan *Internet Banking* dan *Mobile Banking*.

Proyek Strategis

Selama tahun 2019, Bank melakukan beberapa strategi berikut untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan bidang Teknologi Informasi, antara lain:

1. *Network Redesign*.
   Bank fokus untuk perbaikan infrastruktur jaringan, peningkatan keamanan, dan penataan ulang *topology* jaringan pada Data Center (*production environment*). Kegiatan ini dikerjakan selama semester pertama 2019.
2. Aplikasi *Anti Money Laundering*.
   Pengembangan aplikasi *Anti Money Laundering* dengan penambahan fungsi *bulk upload* yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, serta terkoneksi dengan Dukcapil dan Finacle CBS. Diharapkan ke depannya untuk proses KYC, *screening* nasabah baru, dan pengisian data awal nasabah dapat dilakukan dalam aplikasi *Anti Money Laundering* sebelum pembuatan CIF pada aplikasi *Core Banking System* (CBS). Proses *Risk Profiling* diharapkan dapat berjalan *real time* setelah CIF terbentuk pada CBS. Sistem ini diharapkan dapat digunakan di Semester I pada tahun 2020.
3. Aplikasi Pelaporan Antasena.
   TI Bank mengembangkan aplikasi terintegrasi Antasena untuk mengikuti instruksi Bank Indonesia (BI) di mana pelaporan kepada BI yang ada saat ini (LBU, LHBU, LKPBU dan LBBU) diintegrasikan sesuai dengan konsep pelaporan baru BI serta harus mengikuti target dan *timeline* BI. J Trust Bank secara tepat waktu dapat mengikuti Industrial Test yang diadakan pada 13-15 November 2019 dan mulai melakukan pelaporan harian pada 31 Desember 2019 sampai saat ini.

Throughout 2019, the Bank's Information Technology (IT) Division completed the targets determined for business plan. Several prominent achievement in 2019 are: Network Redesign that was carried out in the first semester; implementation of integrated BI reporting application; development of Anti Money Laundering application; and developed Internet Banking and Mobile Banking.

Strategic Projects

Throughout 2019, the Bank carried out these strategies to improve the quality and resilience of Information Technology, including:

1. Network Redesign
   The Bank focuses to improve network infrastructure, increase security, and rearrange network topology in Data Center (production environment). These activities were carried out during the first semester 2019.
2. Anti-Money Laundering Application
   The development of Anti-Money Laundering application by adding bulk upload function which can increase operational efficiency, as well as connected with Civil Registry Service and Finacle CBS. In the future, the Bank hopes the process of KYC, new customer screening, and customer's initial data filling can be done in the Anti-Money Laundering application before making CIF in Core Banking System (CBS) application. After CIF is formed on CBS, the Risk Profiling Process is expected to be carried out in real time. This system is expected to be utilized in the first semester of 2020.
3. Antasena Reporting Application
   The Bank's IT developed Antasena integrated application to follow Bank Indonesia's (BI) instruction where the existing reporting processes (LBU, LHBU, LKPBU, and LBBU) are integrated in line with the latest BI's reporting concept as well as achieving target and timeline from BI. J Trust Bank in timely manner is able to follow the Industrial Test held on 13-15 November 2019 and started to carry out daily report on 31 December 2019 until today.

4. Peluncuran layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking* Ritel. Kedua layanan tersebut sudah beroperasi dengan mendapatkan persetujuan dari OJK dan dapat digunakan oleh nasabah individu per Oktober 2019.
5. Pengkinian dokumentasi Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur TI, yang telah mengikuti Peraturan OJK dan disesuaikan dengan regulasi dan kebijakan J Trust Bank secara *bankwide*.
6. Peningkatan SWIFT dari versi 7.2.50 menjadi 7.3.50 merupakan kewajiban dari SWIFT Alliance International untuk meningkatkan layanan perbankan bagi nasabah, karena jasa dukungan layanan SWIFT 7.2.50 akan berakhir pada 18 November 2019.

Dalam pelaksanaan strategi tahun 2019, TI Bank mengalami beberapa tantangan, termasuk adanya perbedaan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan satu dengan yang lainnya, kurangnya keterampilan SDM sehingga masih bergantung pada vendor, perbaikan infrastruktur, dan belum adanya standardisasi dan pemenuhan SOP serta kebijakan yang berlaku.

Untuk itu, di tahun 2019 Bank melakukan kegiatan peningkatan kemampuan SDM divisi TI dengan mengadakan pelatihan dan berbagi ilmu bagi karyawan. Untuk meningkatkan kemampuannya, beberapa karyawan divisi TI mengikuti pelatihan atau seminar yang diadakan oleh J Trust Bank Indonesia atau perusahaan teknologi lain. Pada Agustus 2019, Bank mengadakan pelatihan Finacle CBS Technical untuk anggota Divisi TI yang dilakukan oleh Infosys sebagai *vendor* Finacle, serta berbagi ilmu antar karyawan Divisi TI sesuai dengan keahlian bidang kerja.

Selama tahun 2019, Bank telah mengalokasikan anggaran investasi sebesar Rp76,85 miliar, yang terdiri dari total belanja modal Rp37,93 miliar dan belanja operasional Rp38,93 miliar.

Tata Kelola TI

Tata kelola pelaksanaan operasional TI dijalankan mengikuti pedoman Kebijakan dan SOP Teknologi Informasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Pada tahun 2019, Tata Kelola TI telah melakukan pembaharuan SOP dan Kebijakan berdasarkan peraturan OJK dan *actual condition of* Teknologi Informasi pada J Trust Bank.

4. Launching of Internet Banking and Mobile Banking for Retail. Both services are in operations after obtaining approval from OJK and can be used by individual customers as of October 2019.
5. Updating IT Policies and Standard Operating Procedures, which are already in in line with OJK Regulations and adjusted with J Trust Bank's regulations and policies bankwide.
6. Improvement of SWIFT from 7.2.50 version to 7.3.50 was an obligation from SWIFT Alliance International to improve banking services to customers as SWIFT 7.2.50 service support would expire on 18 November 2019.

In carrying out the 2019 strategies, the Bank's IT faced several challenges, including knowledge gap between employees, lack of human resources which led to high dependency to vendors, infrastructure improvement, and lack of standard and fulfillment toward SOP and prevailing policies.

Therefore, in 2019, the Bank carried out capacity building activities for human resource of IT Division by conduct training and knowledge sharing for employees. For increasing their capabilities, several ITD members participated on trainings or seminars conducted by J Trust Bank Indonesia or other technology companies. In August 2019, the Bank conducted Finacle CBS Technical training for IT Division members trained by Infosys as Finacle vendor, and also sharing knowledge between IT Division members based on their own respective work expertise.

In 2019, the Bank allocated an investment budget of IDR76.85 billion, that consisted of capital spending of IDR37.93 billion and operational expenses of IDR38.93 billion.

IT Governance

The implementation of IT operational governance is carried out following the guideline of Policy and SOP of Information Technology of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. In 2019, IT governance has updated the SOP and Policy based on OJK regulation and J Trust Bank Information Technology actual condition.

Strategi TI 2020

Melanjutkan strategi tahun 2019 dalam pengembangan aplikasi untuk meningkatkan efisiensi kinerja Bank dan mempermudah transaksi nasabah, Divisi TI Bank akan melakukan strategi-strategi berikut di tahun 2020:

1. Implementasi Aplikasi LOS (*Loan Originating System*)
2. Implementasi Sistem Aplikasi *Moby Teller*
3. Implementasi Aplikasi *Web E-Branch*
4. Implementasi Sistem Aplikasi *Supply Chain*
5. Implementasi Aplikasi Sistem dan Produk *Virtual Account Bank* J Trust Bank
6. Implementasi Aplikasi Sistem dan Produk *e-Money* J Trust Bank "JT Pay"

IT Strategies 2020

Continuing the strategy in 2019 in developing application to increase the Bank's performance efficiency and ease customer transactions, the Bank's IT Division will carry out these following strategies in 2020:

1. Application LOS (Loan Originating System) Implementation
2. Application System Moby Teller Implementation
3. Web Application E-Branch Implementation
4. Application System Supply Chain Implementation
5. Application System and Product Virtual Account Bank JTrust Indonesia Implementation
6. Application System and Product e-Money J Trust Bank "JT Pay"

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

Melalui penyempurnaan sumber daya manusia, Bank menciptakan organisasi yang menunjang budaya berkinerja tinggi dan menjadikannya budaya perusahaan.

By improving human capital, the Bank creates an organization that supports high performance culture and makes it a corporate culture.

Sumber Daya Manusia (Human Capital/HC) berperan sangat penting dalam merealisasikan visi dan misi Perusahaan. Dalam menata SDM, Bank menerapkan efisiensi untuk menciptakan sebuah organisasi yang ramping, namun dengan kinerja maksimal dari setiap karyawan. Inovasi dalam program pelatihan dan pengembangan SDM terus dilakukan agar karyawan selalu *update* dengan perkembangan teknologi di era digital ini.

Selama tahun 2019, Bank menerapkan program yang sudah tertera dalam peta jalan (*roadmap*) 2014-2019. Pada tahun 2019, fokus sudah mencapai Tahap 3 yaitu *Recognition & Establishment* yang lebih berfokus pada pengembangan budaya berdasarkan kinerja yang bermuara pada pengenalan dan pengembangan bisnis.

Di tahun 2019, Bank menghadapi tantangan untuk menarik talenta yang kompeten bersaing dengan perusahaan rintisan (*start-up*). Untuk menembus akses *millenial* yang saat ini menguasai pasar tenaga kerja, Bank melakukan publikasi lowongan melalui daring seperti JobStreet dan LinkedIn; perekrutan di universitas, dan *job expo*. Bank juga mengubah kebijakan berpakaian di kantor dari pakaian kerja resmi menjadi *smart casual.*

Roadmap dan Fokus Utama Pengelolaan SDM 2019

Roadmap penyempurnaan SDM J Trust Bank dilakukan dalam tiga tahapan dari tahun 2014 hingga 2019, seperti terlihat pada gambar di bawah.

Human Capital (HC) plays an important role in realizing the vision and mission of the Company. In managing HC, the Bank implements efficiency to create a lean organization, but with maximum performance from each employee. Innovation in HC training and development program is continuously performed to make employees update with evolving digital technology.

In 2019, the Bank implemented programs stipulated in the 2014-2019 roadmap. In 2019, the focus was on Stage 3, Recognition & Establishment, that focuses on culture development based on performance centered on business introduction and development.

In 2019, the Bank was facing challenges to attract competent talents to compete with start-ups. To penetrate the labor market dominated by millennials, the Bank published job vacancies through online platform like JobStreet and LinkedIn; recruitment in universities, and job expos. The Bank also changed clothing policy in its offices from office attire to smart casual.

Roadmap and Main Focus of HC Management in 2019

Roadmap for HC improvement in J Trust Bank is carried out in three stages from 2014 to 2019, as described in this following picture.

Review, revise and implement excellent HC practices and approaches focusing in SME

Effective monitoring on performance management leading to rewards and appreciation

Performance base culture which result to business recognition and establishment

Tahap pertama, *Redefinition & Consolidation*, merupakan tahap awal yang dilalui Bank untuk melakukan konsolidasi organisasi dengan meletakkan dasar-dasar praktik *Human Resources Management* sesuai dengan praktik pengeloaan SDM yang profesional. Istilah *Human Capital* dikenalkan pada tahapan ini yang menekankan bahwa Sumber Daya Manusia adalah aset paling berharga di organisasi dan merupakan *enabler* untuk mencapai tujuan bisnis.

Pada tahap kedua, *Highly Performance & Achievement*, Bank mulai memperkenalkan fungsi *Human Capital* sebagai *Strategic Business Partner* untuk mendorong tercapainya kinerja dan pencapaian tinggi di Perusahaan. Tahun 2016 adalah masa transisi di mana Perusahaan fokus membenahi kualitas sekaligus sistem manajemen Sumber Daya Manusia.

Di tahap ketiga, *Recognition & Establishment*, sistem penyempurnaan SDM memasuki tahap internalisasi budaya kinerja (*Performance-Based Culture*). Di periode 2018-2019, Bank menciptakan organisasi yang menunjang budaya berkinerja tinggi dan menjadikannya budaya perusahaan. Karyawan diharapkan menjadi *brand ambassador* Perusahaan yang membawa nama baik J Trust Bank di industri perbankan.

Untuk menjaga kesinambungan program, Bank telah menyusun rencana kerja sampai 2020 yang masih berkaitan dengan tahap *Redefinition & Consolidation*. Program-program tersebut mencakup:

a. *Review* dan perbaikan struktur organisasi, *job description*, *Key Performance Indicator* (KPI).
b. *Review* dan perbaikan prosedur rekrutmen sesuai dengan kebutuhan fokus bisnis.
c. Implementasi *Talent Management* yang terpadu, mencakup pencarian, penetapan, dan pengembangan talenta Perusahaan.
d. Inisiatif untuk menjadikan HC sebagai *Strategic Business Partner* sehingga dapat memenuhi fungsi yang lebih strategis, yaitu:
   i. *Planning*: Penyusunan strategi dan pengembangan organisasi, serta tinjauan mengenai pengelolaan SDM.

The first stage, Redefinition & Consolidation, is an early stage experienced by the Bank to make organizational consolidation by setting the basic practice of Human Resources Management based on professional HC management practices. The term Human Capital was introduced in this stage, emphasizing that Human Resources are the most valuable asset in the organization as well as enabler to achieve business objective.

On the second stage, Highly Performance & Achievement, the Bank started to introduce the function of Human Capital as Strategic Business Partner in accomplishing high performance and achievement in the Company. Year 2016 was a transition period where the Company focuses on improving the quality and management system of Human Capital.

On the third stage, Recognition & Establishment, HC improvement system entered the Performance-Based Culture internalization stage. In the 2018-2019 period, the Bank created an organization that supports high performance culture and makes it a corporate culture. Employees are expected to become the Company's brand ambassador who carry the good brand of J Trust Bank in the banking industry.

To maintain program's continuity, the Bank formulated a working plan until 2020 that is related to the Redefinition & Consolidation stage. These programs are including:

a. Reviewing and improving organizational structure, job description, Key Performance Indicator (KPI).
b. Reviewing and improving recruitment procedures based on the demand of business focus.
c. Implementing integrated Talent Management, including exploration, determination, and development of the Company's talent.
d. Initiative to create HC as Strategic Business Partner in fulfilling more strategic functions:
   i. Planning: Strategy formulation and organizational development, as well as review on HC management.

ii. *Acquiring*: Penerapan strategi rekrutmen dan penempatan SDM.
iii. *Developing*: Penerapan strategi kompetensi dan manajemen kinerja yang bermuara pada *learning and development* melalui pelatihan dan pengembangan karir.
iv. *Maintaining*: Penerapan strategi *Compensation & Benefit*, hubungan industrial, sehingga mampu memunculkan suasana bekerja yang memotivasi, dengan memberikan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga.
v. *Retaining*: Integrasi antara penghematan *budget* dan penggunaan *budget* untuk mempertahankan SDM yang berkualitas.

e. Implementasi *Project* HRIS khususnya yang terkait dengan *Operation, Strategic* dan *Development*, dengan mekanisme:
   i. Sistem yang terintegrasi antar unit di Human Capital dari proses *Budget, Compensation, Recruitment, Payroll, Training, Performance, Talent* dan *Career Development*.
   ii. Proses transaksi HC yang bisa dilakukan secara *online*, baik dari sisi pengajuan, *approval*, dan verifikasi, maupun proses *reminder* dan notifikasi melalui email atau SMS.
   iii. *Reporting online* khususnya yang terkait dengan demografi karyawan yang bisa diakses oleh jajaran *Top Management*.
f. Peningkatan peran *Compensation & Benefit* dengan beberapa hal strategis, yaitu:
   i. Bank pada 2017 mengikuti *salary survey* berdasarkan data *salary market* dengan skala gaji baru.
   ii. *Update* skala gaji karyawan secara berkala berdasarkan *salary market* pada *peer bank*.
   iii. Program insentif berlandaskan kinerja.
g. Program sertifikasi eksternal dan internal (*product, process, knowledge*, kepatuhan, operasional, manajemen risiko) dalam rangka meningkatkan *business performance*, baik untuk *business unit* maupun *supporting unit*.
h. Peningkatan *service quality awereness*, baik kepada *frontliners* juga seluruh karyawan melalui *campaign service standard* dan *service quality*.
i. Revitalisasi Program *Corporate Culture Engagement*.

Realisasi Program Pengembangan SDM 2019

Di tahun 2019, SDM memiliki target untuk menjadikan karyawan baik secara langsung dan tidak langsung menjadi *Ambassador* yang menerapkan *core value* Perusahaan untuk membawa nama baik PT Bank JTrust Indonesia Tbk. di industri perbankan.

ii. Acquiring: Implementation of recruitment strategy and HC placement.
iii. Developing: Implementation of competency strategy and performance management centered on learning and development through training and career development.
iv. Maintaining: Implementation of Compensation & Benefit strategy, industrial relation, to create a motivating work environment by providing work and life balance.
v. Retaining: Integration between budget saving and budget expenses to maintain quality HC.

e. Implementation of HRIS Project particularly related to Operation, Strategic, and Development with these mechanisms:
   i. Integrated system between units in Human Capital from Budget, Compensation, Recruitment, Payroll, Training, Performance, Talent and Career Development.
   ii. HC transaction process that can be done online, either from proposal, approval, and verification, as well as reminder process and notification through e-mail and SMS.
   iii. Online reporting particularly related to employee demography that is accessible by Top Management.
f. Increasing the role of Compensation & Benefit through these strategic activities:
   i. The Bank in 2017 followed salary survey based on salary market with new compensation scale.
   ii. Updating employee compensation scale regularly based on salary market on peer banks.
   iii. Incentive program based on performance.
g. External and internal certification program (product, process, knowledge, compliance, operational, and risk management) in improving business performance, both for business unit and supporting unit.
h. Improving service quality awareness, both to frontliners and all employees through campaign service standard and service quality.
i. Revitalizing Corporate Culture Engagement Program.

Realization of HC Development Program in 2019

In 2019, HC has a target to make employees, both directly and indirectly, as Ambassador who implement the Company's core values to maintain PT Bank JTrust Indonesia Tbk. reputation in the banking industry.

Dalam menjalankan target SDM tersebut, Bank telah menerapkan prinsip SDM, yaitu:

1. Integritas dan kepercayaan adalah nilai utama terpenting yang dijunjung tinggi.
2. Pemenuhan karyawan berkualitas dalam mendukung *performance* bisnis melalui proses rekrutmen yang lebih berkualitas dan *individual development plan*.
3. Memberikan *reward* dengan adil secara internal, serta kompetitif dan menarik secara eksternal, dengan berbasis pada kinerja individu dan organisasi.
4. Membangun kompetensi *digital banking* dengan mengadakan pelatihan, seminar, serta mempersiapkan tim yang akan menjalankan *project* khusus dalam rangka mempersiapkan program terkait *financial technology*.
5. Membangun iklim kerja yang positif untuk mendukung kinerja dan pencapaian.
6. Pemanfaatan sumber daya yang optimal untuk pengembangan karyawan.

Dalam memenuhi target tersebut, kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah dilakukan di tahun 2019 adalah:

1. Memenuhi posisi kosong dengan karyawan berkompeten.
2. Memberikan jenjang karir kepada karyawan.
3. Melakukan rotasi dan mutasi untuk mendukung kemajuan bisnis dan pengembangan karyawan.
4. Memberikan pelatihan yang sesuai dengan jabatan dan pengembangan karyawan, serta mengadakan *sharing session* maupun sosialisasi mengenai produk, peraturan, legal, dan lainnya.
5. Memberikan apresiasi sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan yang telah berkontribusi bagi kemajuan Perusahaan.
6. Menjembatani komunikasi yang efektif antara manajemen dengan karyawan (misalnya melalui program 3 M, *dinner* dengan manajemen, kunjungan ke cabang-cabang).

Realisasi program pengembangan yang dilakukan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel ini:

In implementing the HC target, the Bank has applied HC principles, including:

1. Integrity and trust are the most important values that should be respected.
2. Recruitment of qualified employees in supporting business performance through a more robust recruitment process and individual development plan.
3. Giving reward in fairness internally, as well as in competitive manner and attractive externally, based on individual and organizational performance.
4. Establishing digital banking competence by conducting trainings, seminars, as well as preparing teams who will carry out special project in preparing programs related to financial technology.
5. Establishing positive working environment to support performance and achievement.
6. Leveraging optimal resources for employee development.

In achieving those targets, the Human Capital (HC) Development activities carried out in 2019 were:

1. Filling empty positions with competence employees.
2. Providing career path to the employees.
3. Conducting rotation and mutation to support business progress and employee development.
4. Providing trainings according to employee position and development, as well as conducting sharing session and introduction on products, regulations, legal, etc.
5. Providing appreciation as a reward to employees for their contribution to the Company's development.
6. Bridging effective communications between management and employees (e.g. through 3M program, dinner with management, visits to office branches).

Realization of development programs conducted in 2019 can be seen on this table:

UIC	Rencana Plan	Target Deliverables	Waktu Timeline
HC Business Partner	1. Memenuhi target rekrutmen sesuai dengan rencana pemenuhan *Man Power Planning* yang sudah disetujui perusahaan dengan mengedepankan tingkat efisiensi seoptimal mungkin. Meeting the recruitment target in line with approved Man Power Planning by prioritizing efficiency level optimally.	Pemenuhan target rekrutmen sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama seluruh segmen bisnis. Meeting the recruitment target according to schedule that has been approved by all business segments.	Jan-Des 2019 Jan-Dec 2019
	2. Memonitor dengan baik kualitas rekrutmen sesuai dengan standar kompetensi yang telah dibangun. Monitoring the quality of recruitment according to established competence standard.	Penggunaan Standar Kompetensi. Utilization of Competence Standard.	Jan-Des 2019 Jan-Dec 2019
HC Center of Expertise	1. Membangun dan menyempurnakan *Organization Structure Bankwide* dan seluruh bisnis serta unit kerja lainnya. Establishing and improving Organization Structure Bankwide and all business as well as other working units.	Melakukan *review* atas *organization structure* secara *bankwide*. Bersama dengan pimpinan unit kerja melakukan *review* atas organisasi di bawah supervisinya. Reviewing organization structure bankwide. Together with working unit leaders reviewing the organizations under supervision.	Jan-Des 2019 Jan-Dec 2019
	2. - Penyempurnaan *Job Description*. Improving Job Description. - Menyempurnakan *Job Grading* sesuai dengan *Organization Structure* yang telah disetujui. Improving Job Grading based on approved Organization Structure.	- Menyelesaikan seluruh *Job Description* dan mendistribusikan manual ke setiap unit kerja. Completing entire Job Description and distributing the manuals to each working unit. - Me-*review job grading* yang telah ada. Reviewing existing job grading.	Jan-Des 2019 Jan-Dec 2019
	3. Membuat KPI berbasis *Performance.* Developing KPI based on Performance.	Memonitor target KPI 2019 serta implementasinya. Monitoring 2019 KPI targets as well as the implementation.	Jan-Des 2019 Jan-Dec 2019
	4. Membangun model *Talent Management*. Developing Talent Management model.	Implementasi dari model *Talent Management* dan penyusunan SOP. Implementation of Talent Management model and SOP formulation.	Jan-Des 2019 Jan-Dec 2019

UIC	Rencana Plan	Target Deliverables	Waktu Timeline
HC Learning & Service Quality	1. Mengembangkan *training* program berbasis kebutuhan Perusahaan. Developing training program based on company needs.	Menyelenggarakan pelatihan berbasis kebutuhan Perusahaan. Conducting training based on company needs.	Jan-Des 2019 Jan-Dec 2019
	2. Pengembangan modul. Modul development.	Melakukan pengembangan modul pelatihan berkualitas yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank J Trust dan dapat diakses oleh seluruh karyawan. Developing quality training module according to the demand of Bank J Trust and is accessible by all employees.	Jan-Des 2019 Jan-Dec 2019
	3. *Corporate Culture Engagement.*	Membuat dan melaksanakan *corporate culture campaign* program yang ditargetkan akan membentuk kepribadian positif dan integritas yang tinggi dari seluruh karyawan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Formulating and implementing corporate culture campaign program that will shape positive personality and high integrity from all employees of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	Jan-Des 2019 Jan-Dec 2019
	4. *Credit Culture Enhancement.*	Membuat *Credit Culture Concept* & mensosialisasikannya ke seluruh *Team Business Credit* & *Credit Support* (termasuk disiplin proses). Formulating Credit Culture Concept & promoting it to all Business Credit & Credit Support Teams (including process discipline).	Jan-Des 2019 Jan-Dec 2019
	5. *Credit Team assessment & training.*	Mengidentifikasi kompetensi tim kredit setiap tahun serta melakukan pelatihan atas pemenuhan celah kompetensi mereka. Identifying the competence of credit team annually as well as conducting trainings to fill their competency gap.	Nov-Des 2019 Nov-Dec 2019

UIC	Rencana Plan	Target Deliverables	Waktu Timeline
HC Government & Industrial Relation	1. *Collecting Labor Agreement* (PKB).	Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi PKB. Promoting and implementing PKB.	Maret 2019 March 2019
	2. *Review Project Policy* dan Biaya Dinas HC dan membuat laporan secara tertulis serta presentasinya. Reviewing Project Policy and HC Business Trip Expenses and making written reports as well as presentation slides.	Hasil *review policy* & laporan serta materi presentasinya. Result of policy review and report as well as presentation slides.	Bulanan di tahun 2019 Monthly in 2019
	3. Melakukan sosialisasi HC ke cabang seluruh Indonesia. Conducting socialization of HC to all branches across Indonesia.	Selain memastikan kualitas pelaksanaan prosedur HC di Kantor Pusat, juga perlu memastikan pelaksanaan prosedur HC di cabang-cabang. Other than ensuring the quality of implementation of HC procedures in Headquarters, the implementation of HC procedures in branches should also be ensured.	Jan–Des 2019 Jan-Dec 2019
HC Government, Industrial Relations and Employee Services	1. Asuransi purna jabatan karyawan dan asuransi kesehatan. Post-position insurance and health insurance for employee.	Implementasi program asuransi purna jabatan karyawan dan asuransi kesehatan. Implementation of post-position insurance and health insurance for employee.	Des 2019 Dec 2019
	2. Remunerasi berdasarkan *organization performance based.* Remuneration based on organization performance based.	Besarnya remunerasi dinilai berdasarkan pencapaian target dan kinerja yang dinilai dalam KPI Individu. The amount of remuneration assessed is based on target achievement and performance evaluated in individual KPI.	Jan–Des 2019 Jan-Dec 2019
	3. *Salary Structure* 2019.	*Salary Structure* berdasarkan *internal equity*, *external equity* dan kemampuan perusahaan. Salary Structure is based on internal equity, external equity, and company's performance.	Jan-Des 2019 Jan-Dec 2019
	4. HC *Budgeting* 2019.	Tersedianya HC *Budgeting* 2019. Availability of HC Budgeting 2019.	Jan–Feb 2019
	5. Program Apresiasi/*Rewards* karyawan Reward program for employee	Skema Apresiasi/*Rewards* berdasarkan *review* manajemen Rewards scheme based on management' review.	Agt–Sep 2019 Aug–Sep 2019
	6. Implementasi HRIS. HRIS implementation.	• Implementasi ESS (*operation* & *strategic*) • Mengatur data karyawan • Mengatur layanan diri (*dashboard*) • ESS implementation (operation & strategic) • Manage employee database Manage self-service (dashboard)	Jan–Jun 2019

Komposisi Karyawan 2019 [102-7][102-8]

Bank ingin memiliki SDM yang berkualitas dan memiliki kesamaan visi dan misi untuk menjalankan Perusahaan. Pada tahun 2019, Bank mencoba untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas, serta melakukan promosi dan mutasi untuk menggantikan posisi karyawan yang keluar. Bank senantiasa menjaga komposisi karyawan berimbang dengan mempertimbangkan kesetaraan dan kesempatan kerja. Hingga 31 Desember 2019, Perusahaan mempunyai karyawan sejumlah 800, turun dibandingkan tahun 2018 yaitu 947 karyawan.

Jumlah karyawan perempuan dibandingkan dengan laki-laki menurun 13% di tahun 2019, dibandingkan tahun 2018. Perusahaan juga memberikan kesempatan kerja bagi disabilitas.

Employee Composition in 2019 [102-7][102-8]

The Bank wants to have quality HC with similar vision and mission to operate the Company. In 2019, the Bank strived to maintain quality employees, as well as carrying out promotion and mutation to replace outgoing employees. The Bank continuously maintain a balanced employee composition by considering job equality and opportunity. As of 31 December 2019, the Company employed 800 people, decreased from 2018 of 947 employee.

The number of female employees compare to male decreased by 13% in 2019, compared to 2018. The Company also provide job opportunity for people with disability.

Komposisi Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan
Employee Composition based on Education Level

Pendidikan	2019	2018	Education
S3	-	-	Doctorate
S2	42	53	Post Graduate
S1	547	646	Bachelor Degree
D4	2	-	Diploma 4
D3	117	140	Diploma 3
D2	4	4	Diploma 2
D1	8	8	Diploma 1
Lainnya	80	96	Others
Total	**800**	**947**	**Total**

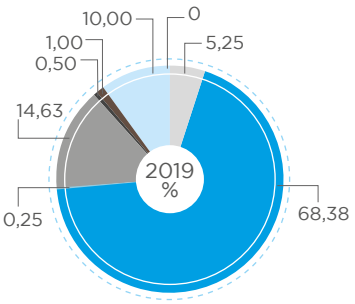

Komposisi Karyawan berdasarkan Usia
Employee Composition based on Age

Usia (tahun)	2019	2018	Age (years old)
15-19	-	-	15-19
20-24	38	68	20-24
25-29	155	188	25-29
30-34	141	185	30-34
35-39	122	160	35-39
40-44	110	123	40-44
45-49	131	130	45-49
50-54	91	87	50-54
55-59	12	6	55-59
>60	-	-	>60
Total	**800**	**947**	**Total**

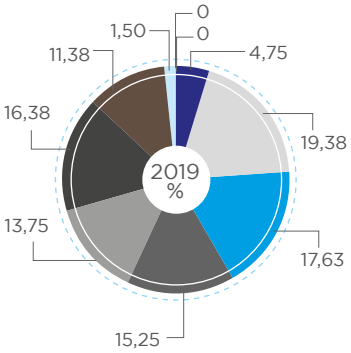

Komposisi Karyawan berdasarkan Level Jabatan
Employee Composition based on Position

Level	2019	2018	Level
Kepala Divisi	12	20	Division Head
Wakil Kepala Divisi	15	10	Vice of Division Head
Kepala Regional	-	-	Regional Head
Kepala Bagian	72	88	Unit Head
Pimpinan Cabang	31	43	Branch Manager
Wakil Pimpinan Cabang	-	-	Vice of Branch Manager
Kepala Seksi	128	151	Section Head
Kepala Bagian Operasional	36	45	Operations Head
Operasional Officer	52	73	Operations Officer
Officer/Staff	454	517	Officer/Staff
Clerk/Karyawan Dasar	-	-	Clerk/Basic Employee
Non Clerk	-	-	Non Clerk
Total	**800**	**947**	**Total**

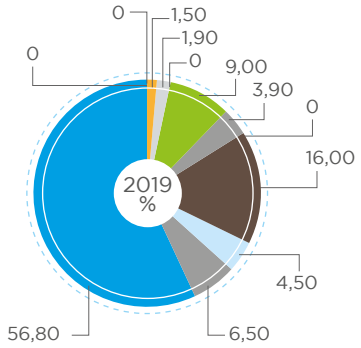

Komposisi Karyawan berdasarkan Jenis Kelamin
Employee Composition based on Gender

Jenis Kelamin	2019	2018	Gender
Pria	422	519	Male
Wanita	378	428	Female
Total	**800**	**947**	**Total**

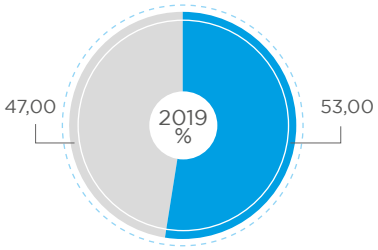

Komposisi Karyawan berdasarkan Status
Employee Composition based on Status

Status Karyawan	2019	2018	Employee Status
Tetap	722	834	Permanent Employee
Kontrak	78	113	Non Permanent
Total	**800**	**947**	**Total**

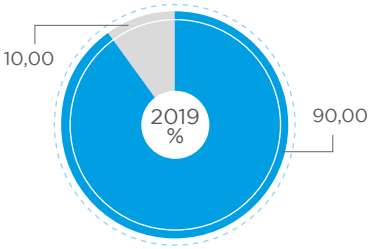

Komposisi Karyawan berdasarkan Masa Kerja
Employee Composition based on Working Period

Masa Kerja (tahun)	2019	2018	Time of Service (years)
0-5	425	584	0-5
6-10	155	144	6-10
11-15	65	75	11-15
16-20	63	60	16-20
21-25	70	67	21-25
>25	22	17	>25
Total	**800**	**947**	**Total**

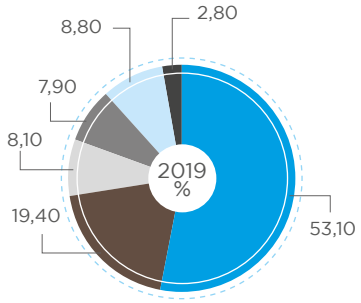

Pengembangan Sumber Daya Manusia [404-2]

Pelatihan Karyawan

Pelatihan karyawan dilakukan melalui program eksternal dan internal. Pada tahun 2019, 857 karyawan mengikuti pelatihan dengan rata-rata jumlah pelatihan 21 jam per karyawan. Program-program pelatihan yang diberikan termasuk:

Human Capital Development [404-2]

Employee Training

Employment training is conducted through external and internal programs. In 2019, 857 employees participated on trainings with the average hour of trainings of 21 hours per employee. Training programs provided included:

Kategori Kegiatan 2019

Category of Activities in 2019

No	Kategori Category	Posisi Jabatan Level Position								Grand Total
		Manajemen Management	Clerk	Kepala Departemen Dept. Head	Wakil Kepala Divisi Deputy Division Head	Direktur Director	Kepala Divisi Division Head	Officer	Kepala Seksi Section Head	
1	*Certification*	16	2	78	12	33	16	32	19	208
2	*External Training*	-	44	8	-	-	1	20	14	87
3	*e-Learning Training*	10	1.706	440	46	4	46	1.383	628	4.263
4	*Inhouse Training*	4	12	25	15	9	25	39	16	145
5	*Internal Training*	13	1731	199	31	2	53	690	382	3101
6	*Socialization*	1	102	101	19	4	25	215	139	606
	Grand Total	**44**	**3.597**	**851**	**123**	**52**	**166**	**2.379**	**1.198**	**8.410**

Rekapitulasi Pengurus dan Pejabat Pemenuhan Kewajiban Sertifikasi September 2019

Summary of Management and Executives in Fulfilling Compulsory Certification as of September 2019

Rekapitulasi Pengurus dan Pejabat Pemenuhan Kewajiban Sertifikasi
Summary of Management and Executives in Fulfilling Compulsory Certification

Rekapitulasi Pengurus & Pejabat Pemenuhan Kewajiban Sertifikasi September 2019
Summary of Management and Executives in Fulfilling Compulsory Certification as of September 2019

No	Layer	Level Wajib Diikuti Level Compulsory to Participate	Sertifikasi Level Level of Certification														
			Sesuai Ketentuan Under Provision					Telah Dilaksanakan Conducted					Belum Dilaksanakan Have Not Conducted				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Komisaris Utama | President Commissioner	2 (Kom)		2					2					0			
2	Komisaris | Commissioner	1 (Kom)	2					2					0				
3	Direksi | Board of Directors	5					6					6					0
4	EVP	4				6					5					1	
5	Div. Head/ Regional	3/4	5	0	7	9	0	4	0	5	2	0	1	0	2	7	0
6	Dept. Head/ Pimcab	2/3	0	14	22	0	0	0	13	2	0	0	0	1	20	0	0
7	Sect. Head/Pincapem/K BO/ OO	1	59	0	0	0	0	46	0	0	0		13				
			Basic		Intermediate	Advance		Basic		Intermediate	Advance		Basic		Intermediate	Advance	
8	Officer Audit/Legal/ Compliance		21		5	1		14		1	0		7		4	1	
			Basic		Intermediate	Advance		Basic		Intermediate	Advance		Basic		Intermediate	Advance	
9	Treasury		10		2	2		10		2	2		0		0	0	
10	AAJI		137					114					23				

Pengembangan Karir

Bank ingin menjadi sebuah institusi yang menyediakan jenjang karir yang jelas bagi karyawannya. Di tahun 2019, Bank melakukan strategi untuk tidak menggantikan personil yang keluar dengan rekrutmen eksternal, namun memberikan kesempatan pada karyawan internal melalui promosi dan mutasi. Hal ini diharapkan dapat memicu karyawan untuk berbuat maksimal bagi Perusahaan, sekaligus bagian dari efisiensi sumber daya yang ada.

Selama tahun 2019, sebagai penghargaan terhadap karyawan berprestasi, Bank memberikan penghargaan berupa: MVP *of the Month* dan BJI *Winner*. Penghargaan Most Valuable Person (MVP) adalah program yang diadakan oleh J Trust Bank untuk meningkatkan motivasi karyawan dengan memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah berkontribusi dalam pengembangan perusahaan dan menjadi panutan/contoh bagi karyawan lain.

Hal ini untuk memberikan apresiasi kepada karyawan J Trust Bank yang telah memberikan kontribusi terbaik dalam mengembangkan perusahaan, seperti memberikan hasil kerja yang sangat baik, dan menjadi teladan/contoh yang sangat baik bagi rekan-rekan rekan, baik di Kantor Pusat dan di Kantor Cabang.

Bank telah memberikan penghargaan MPV *of the Month* kepada satu karyawan di bulan Agustus dan 16 karyawan untuk BJI *Winner*. Pemenangnya adalah sebagai berikut:

Career Development

The Bank envisions to become an institution that provides clear career development for its employees. In 2019, the Bank conducted a strategy not to replace outgoing personnel with external recruitment, but giving the opportunity to internal employees through promotion and mutation. This is expected to motivate employee to contribute optimally to the Company, and it is also part of the efficiency of existing resources.

In 2019, as an award for performing employees, the Bank provided some awards such as MVP of the Month and BJI Winner. Most Valuable Person (MVP) award is a program held by J Trust Bank to improve employee motivation by rewarding the employees who contributed to the company's development and became an example for other employees.

This is to appreciate J Trust Bank employees who have given their best contribution in developing the company, such as providing an excellent performance, and becoming a good example for their peers, both in Headquarters and in Branches.

The Bank awarded MVP of the Month to one employee in August and 16 employees for BJI Winner. The winners are as follows:

Periode Period	Jumlah Kandidat Total Candidate	Jenis Penghargaan Award Type	Nama Name
Agustus August	30	MVP OF THE MONTH	Astrid Yolanda Napitupulu
		BJI WINNER	Nyoman Sukreni
			Bagas Kurniawan
			Fanny Fauziyyah N.A
September	17	MVP OF THE MONTH	N/A
		BJI WINNER	Radinal HeksaSimatupang
			Wirastari Budiman
			Tiara Sandy
Oktober October	23	MVP OF THE MONTH	N/A
		BJI WINNER	Lita Anastasia Sitorus
			Dhini Wulandari
			Sri Wahyuni
November	16	MVP OF THE MONTH	N/A
		BJI WINNER	Muhammad Lutfi
			Iin Verawati
			Eka Nur Hidayah
Desember December	13	MVP OF THE MONTH	N/A
		BJI WINNER	Rizal
			Avila rizki
			Aditya Nugroho

Kesetaraan dan Kesempatan Kerja

Perusahaan menerapkan kebijakan rekrutmen dan pengembangan karir yang berlandaskan prinsip keadilan dan keterbukaan untuk keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Prinsip tersebut diterjemahkan dalam keadilan seleksi penerimaan karyawan, promosi karyawan, serta penghargaan lain kepada karyawan.

Setiap karyawan J Trust Bank memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam program pendidikan dan pelatihan yang telah direncanakan Bank sesuai dengan sistem penilaian yang ditentukan. Bank juga membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kemampuan yang mereka miliki untuk pengembangan karir mereka, dengan memegang azas keadilan.

Job Equality and Opportunity

The Company implements recruitment policy and career development based on fairness and transparency for sustaining the company in the long term. The principles are translated in fairness in employee recruitment selection, promotion, as well as other rewards.

Every J Trust Bank employee has the same right and obligation on education and training programs planned by the Bank based on the determined assessment system. The Bank also opens the opportunity for every employee to improve their skills to their career development, with fairness principle.

Alokasi Dana Pengembangan SDM 2019

Selama tahun 2019, Perusahaan mengalokasikan dana sebesar Rp1,95 miliar untuk biaya pengembangan SDM dengan rincian sebagai berikut:

Budget Allocation for HC Development in 2019

Throughout 2019, the Company allocated IDR1.95 billion for HC development with details as follows:

No	Biaya Pengembangan	Nominal Vakue Rp	Development Expenses
1	Program/Kegiatan	830.583.276	Program/Activities
2	Sertifikasi	571.954.970	Certification
3	Konsumsi	12.429.650	Foods
4	Pendukung /Perlengkapan Pelatihan	24.514.000	Training Support/Equipment
5	Perjalanan Dinas	209.389.678	Business Trips
6	Module Development	87.178.619	Module Development
7	ODP	209.355.186	ODP
	Total	**1.945.405.379**	**Total**

Kebijakan Remunerasi 2019

Pada tahun 2019, Bank telah melakukan *review* dan penyesuaian terhadap Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan kondisi Perusahaan, sebagai berikut:

1. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi antara lain meliputi:
   a) Remunerasi dalam bentuk non-natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, seperti tunjangan (*benefit*), kompensasi berakhirnya kontrak kerja/putusan RUPS.
   b) Fasilitas lain dalam bentuk natura/non-natura, yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, transportasi, asuransi kesehatan, dan fasilitas lainnya yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki dan *benefit* lainnya yang pernah diatur oleh Perusahaan.
2. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi dimaksud, meliputi:
   a) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan RUPS Bank.

Remuneration Policy 2019

In 2019, the Bank performed a review and adjustment on the Remuneration Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors based on the Company's condition as follows:

1. Package/remuneration policy and other facilities for the Board of Commissioners and the Board of Directors include:
   a) Remuneration in form of non-natura, including salary and other benefits, compensations on contract expiry /GMS decision.
   b) Other facilities in natura/non-natura: other benefits, transportation, health insurance, and other facilities that can be owned or cannot be owned and other benefits regulated by the Company.
2. Package/remuneration policy disclosure, including:
   a) Package/remuneration policy and other facilities for the Board of Commissioners and Directors as determined by the Bank's GMS.

b) Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, minimal mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DireksI, dan jumlah seluruh paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain dimaksud.

b) Type of remuneration and other facilities for all members of the Board of Commissioners and Directors, at least including the number of members of the Board of Commissioners, member of Directors, and number of all package/remuneration policy and other mentioned facilities.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Dalam memberikan kompensasi kepada karyawannya, Perusahaan berpegang pada prinsip gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan/pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji di bawah ini adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai per bulan. Pegawai adalah pegawai tetap PT Bank JTrust Indonesia Tbk. dari tingkat pelaksana hingga Kepala Divisi.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2018 dan per Oktober 2019 dalam skala perbandingan:

Highest and Lowest Salary Ratio

In providing compensation to its employees, the Company upholds the principle that salary is the employee's rights and stated in a form of money as a compensation from the company/employer to employees as determined and paid according to a work contract, agreement, or regulations, including benefits for the employees and their family for the work and/or services provided.

Salaries compared in the following ratio are compensation accepted by members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees per month. Employee is permanent employee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk from officers to Division Heads.

Below is the highest and lowest salary ratio in 2018 and as of October 2019 in comparison scale:

Rasio Gaji	Rasio/Ratio		Salary Ratio
	2019	2018	
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1:25,4	1:25	Highest and lowest salary ratio of employees
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1:1,9	1:2,3	Highest and lowest salary ratio of the Board of Directors
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1:1,4	1:1	Highest and lowest salary ratio of the Board of Commissioners
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1:1,96	1:2,5	Ratio of the highest salary of the Board of Directors and employee

Pengembangan Budaya Perusahaan pada Karyawan

J Trust Bank memiliki nilai-nilai *Corporate Culture* sebagai berikut:

1. *Super Integrity*
2. *Customer First*
3. *Discipline and Responsible*
4. *Learning and Trying More*

Nilai-nilai tersebut harus diterapkan oleh semua karyawan dan manajemen dalam kinerja sehari-hari, terutama terkait dengan *service excellence* kepada nasabah. Dengan ini, Bank dapat mengembangkan bisnisnya lebih baik lagi.

Corporate Culture Development to Employees

JTrust Bank has Corporate Culture values as follows:

1. Super Integrity
2. Customer First
3. Discipline and Responsible
4. Learning and Trying More

These values should be implemented by all employees and management in their daily activities, particularly related to service excellence to customers. Therefore, the Bank can develop its business in a better way.

Hubungan Industrial dan Antar Karyawan

Dalam rangka menjalin Hubungan Industrial yang harmonis yang menunjang kelancaran bisnis dan mendukung pemenuhan hak dan kewajiban karyawan, Bank dan Karyawan beserta Serikat Pekerja berkomitmen untuk meningkatkan keberhasilan perusahaan dengan bersama-sama berusaha menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan dan mesosialisasikan kebijakan, peraturan perusahaan dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Menjalankan *reward* dan tindakan disiplin bagi seluruh karyawan terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan yang berlaku, sehingga mendorong produktivitas/kinerja sesuai harapan sebagaimana mestinya.

Industrial Relations and Employee Relations

In establishing a harmonious Industrial Relation to smooth business and fulfill the rights and obligation of employees, the Bank and Employees as well as Labor Union are committed to improving the company's success by jointly implementing determined provisions and socializing policies, company regulations and provisions approved in Joint Working Contract; carrying out reward and enforcement measures to all employees toward compliance on prevailing provisions, hence improving productivity/performance according to expectation.

Rencana Kerja SDM 2020 [102-41]

Program kerja Perusahaan yang telah diturunkan dan dituangkan dalam Rencana Kerja HC adalah:

1. Pemenuhan SDM yang kompeten;
2. Program *training* yang berkelanjutan;
3. Jenjang karir yang menarik;
4. Skema insentif;
5. Budaya perusahaan yang kuat;
6. Menyusun perusahaan yang kuat;
7. Menyusun *individual goal setting*; dan
8. *Review* dan perbaikan struktur organisasi yang dapat mengakomodasi dinamika bisnis yang cepat dan efisien.

HC Working Plan 2020 [102-41]

The Company's working plan as generated and stipulated on the HC Working Plan is:

1. Competent HC recruitment;
2. Sustainable training program;
3. Attractive career path;
4. Incentive scheme;
5. Strong company culture;
6. Building strong company;
7. Formulating individual goal setting; and
8. Reviewing and improving organizational structure that can accommodate fast and efficient business dynamics.

UIC		Rencana Plan	Target Deliverables	Waktu Timeline
HC BP & Talent Acquisition	1	Memenuhi target rekrutmen sesuai dengan rencana pemenuhan *Man Power Planning* yang sudah disetujui perusahaan dengan mengedepankan tingkat efisiensi seoptimal mungkin. Fulfilling recruitment target in line with Man Power Planning approved by the company by prioritizing efficiency optimally.	Pemenuhan target rekrutmen sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama seluruh segmen bisnis. Fulfilling recruitment target according to the approved timeline by all business segments.	Jan-Des 2020 Jan-Dec 2020
	2	Memonitor dengan baik kualitas rekrutmen sesuai dengan SOP rekrutmen Bank. Carefully monitoring recruitment quality in line with the Bank's recruitment SOP.	Menjalankan SOP rekrutmen dengan baik. Carrying out recruitment SOP in a good manner.	Jan-Des 2020 Jan-Dec 2020
HC OD & Performance Management	1	Membangun dan menyempurnakan *Organization Structure Bankwide* dan seluruh bisnis serta unit kerja lainnya. Establishing and improving Organization Structure Bankwide and all business as well as other work units.	Melakukan *review* atas *organization structure* secara *bankwide*. Bersama dengan pimpinan unit kerja melakukan *review* atas organisasi di bawah supervisinya. Conducting review on organization structure bank-wide. Together with working unit leaders conducting review on organization under their supervisions.	Jan-Des 2020 Jan-Dec 2020
	2	• Penyempurnaan *Job Description*. • Menyempurnakan *Job Grading* sesuai *Organization Structure* yang telah disetujui. • Improving Job Description. • Improve Job Grading according to approved Organization Structure.	• Menyelesaikan seluruh *Job Description* dan mendistribusikan manual ke setiap unit kerja. • Me-*review job grading* yang telah ada. • Completing entire Job Description and distributing the manuals to each working unit. • Reviewing existing job grading.	Jan-Des 2020 Jan-Dec 2020
	3	Memperbaiki implementasi KPI. Improving KPI implementation	Memonitor target KPI 2020 serta implementasinya. Monitoring target of KPI 2020 as well as its implementation.	Jan-Des 2020 Jan-Dec 2020
	4	Membangun model *Talent Management*. Establishing Talent Management model.	Implementasi dari model *Talent Management*. Implementation of Talent Management model.	Jan-Des 2020 Jan-Dec 2020

UIC		Rencana Plan	Target Deliverables	Waktu Timeline
HC-Government & Industrial Relation	1	Menjaga Hubungan Industrial yang baik dan kondusif. Maintaining a good and conducive Industrial Relation.	Komunikasi dengan baik secara periodik dan menjalankan PKB dengan baik. Conducting good communication periodically and carrying out PKB in a good manner.	Des 2020 Dec 2020
	2	Meningkatkan budaya disiplin dan iklim bekerja yang baik. Improving discipline culture and a good working climate.	Menjalankan dan menegakkan *Reward & Discipline* secara baik dan konsisten. Carrying out and enforcing Reward and Discipline properly and consistently.	Des 2020 Dec 2020
HC Comben & Executive Services	1	Remunerasi berdasarkan organization *performance based*. Remuneration based on performance-based organization.	Besarnya remunerasi dinilai berdasarkan pencapaian target dan kinerja yang dinilai dalam KPI Individu. The amount of remuneration is determined based on target achievement and performance measured by individual KPI.	Jan-Des 2020 Jan-Dec 2020
	2	*Salary Structure* 2020.	*Salary Structure* berdasarkan *internal equity*, *external equity*, dan kemampuan perusahaan. Salary Structure based on internal equity, external equity, and the company's performance.	Jan-Des 2019 Jan-Dec 2019
	3	*HC Budgeting* 2020.	Tersedianya HC *Budgeting* 2020. Availability of HC Budgeting 2020.	Jan – Feb 2020
	4	Program Apresiasi/*Rewards* karyawan 2020. Reward program for employee in 2020.	Skema Apresiasi/Rewards berdasarkan review manajemen Rewards scheme based on management' review.	Jan–Des 2020 Jan-Dec 2020

Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing 2020

Bank memanfaatkan TKA untuk bidang dan keahlian tertentu, dengan kemampuan, pengalaman dan terbukti secara profesional di bidangnya masing-masing, antara lain di bidang IT, Credit Risk Reviewer, Finance & Planning, Business dan President Office yang kami percaya akan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan strategi J Trust Bank dan sesuai dengan kondisi perbankan dan regulasi di Indonesia

Untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan TKA, maka bank mewajibkan masing-masing TKA untuk memiliki rencana kerja, target kerja dan *timeline* pencapaian kerja yang terukur. Bank berkomitmen untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target TKA tersebut.

Adapun manfaat yang diperoleh Bank dalam pemanfaatan TKA adalah: (1) Bank memperoleh hasil kinerja dari setiap TKA yang telah ditargetkan sesuai dengan rencana kerja masing-masing TKA sesuai bidang masing-masing, dan (2) Bank dapat meningkatkan keahlian dari tenaga kerja lokal/pendamping melalui program alih pengetahuan dari TKA kepada tenaga kerja lokal/pendamping.

Di samping itu, penggunaan tenaga kerja asing di J Trust Bank dimaksudkan dalam rangka menanamkan nilai-nilai J Trust Group ke Bank. Bila nilai-nilai ini dirasakan sudah tertanam, maka pada masa yang akan datang tenaga kerja lokal/pendamping dapat menjadi penerus dari TKA tersebut.

Foreign Workers Utilization Plan in 2020

The Bank hires foreign workers for particular sector and expertise, with skills and experience, and proven professionally in their area of expertise, among others in IT, Credit Risk Reviewer, Finance & Planning, Business and President Office who we believe will be implemented properly according to J Trust Bank strategy and in line with banking conditions and regulations in Indonesia.

To improve the effectiveness of foreign workers utilization, the Bank requires each foreign worker to have working plan, working target, and measured timeline for their performance. The Bank is committed to monitoring and evaluating periodically the achievement of foreign workers' targets.

Benefits obtained by the Bank in utilizing foreign workers are: (1) the Bank obtains performance result from each foreign worker as targeted in line with each foreign workers' work plan in their respective area; and (2) the Bank is able to improve skills of local workers/partners through knowledge sharing program from foreign workers to local workers/partners

In addition, the utilization of foreign workers in JTrust Bank aims to penetrate values of J Trust Group to the Bank. After the values are institutionalized, in the future the local workers/partners can be their successors.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Bank senantiasa menjalankan tata kelola perusahaan secara konsisten dan berkelanjutan dengan dukungan komitmen yang kuat dari organ perusahaan dan jajaran di bawahnya.

The Bank continuously implements good corporate governance in a consistent and sustainable manner supported by strong commitment of the corporate organs and all ranks.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Tata kelola Bank diarahkan dan dikendalikan untuk meningkatkan kinerja bisnis secara akuntabel dan mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tidak mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya.

The Bank's governance is directed and controlled to improve the accountability of business performance and to create values for shareholders in a sustainable manner, taking into account the interests of other stakeholders.

BAB I
PENDAHULUAN

CHAPTER I
FOREWORD

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. meyakini bahwa pencapaian kinerja yang baik dapat terus dipertahankan secara *sustainable* dalam jangka panjang dan berbagai prospek bisnis akan diraih, jika Bank dapat melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten.

Karena itu, bagi PT Bank JTrust Indonesia Tbk., penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya menjadi suatu keharusan, tetapi merupakan pedoman utama dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan manfaat dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan serta menjaga keberlangsungan usaha.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. senantiasa mengembangkan GCG yang selaras dengan ketentuan regulator dan/atau juga *best practices* secara berkesinambungan untuk memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada para pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, GCG juga mendorong PT Bank JTrust Indonesia Tbk. untuk menciptakan nilai bagi Bank (*shareholder value*) secara maksimal.

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh unit kerja PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berkomitmen untuk mengimplementasikan secara menyeluruh penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, optimalisasi kinerja, dan peningkatan akuntabilitas. Lebih lanjut, komitmen atas penerapan GCG juga bertujuan untuk melindungi pemangku kepentingan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

The Commitment in Implementing Good Corporate Governance

PT Bank JTrust Indonesia. Tbk. believes that good performance achievement can be maintained sustainably in the long term and various business prospect can be achieved, should the Bank implement Good Corporate Governance principles consistently.

Therefore, for PT Bank JTrust Indonesia Tbk., the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is not only an obligation, but also becomes a main guideline in doing business to maximize the benefit and added value for the stakeholders as well as maintaining business continuity.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. continuously develops GCG in line with provisions from the regulators and/or best practices continuously to provide ample protection and fair treatment to the shareholders as well as other stakeholders. Moreover, GCG also drives PT Bank JTrust Indonesia Tbk. to create value for the Bank (shareholder value) optimally.

The Board of Commissioners and Directors and all working units of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. are committed to implementing GCG principles thoroughly. These principles become a reference for responsible decision making, avoiding conflict of interest, optimizing performance, and improving accountability. Moreover, the commitment on GCG implementation also aimd to protect the stakeholders as well as improving compliance on prevailing regulations.

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, dan untuk menciptakan nilai tambah dan menjaga tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. secara konsisten dan berkelanjutan mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Dasar penerapan Tata Kelola Perusahaan mengacu kepada 4 pilar/aspek Tata Kelola, yaitu *governance commitment*, *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* yang merupakan perwujudan tanggung jawab PT Bank JTrust Indonesia Tbk. kepada pihak-pihak yang berkepentingan yakni nasabah, karyawan, pemangku kepentingan lainnya serta masyarakat.

Selain itu, penerapan GCG di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. juga merujuk pada beberapa ketentuan yang berlaku, antara lain meliputi:

1. Undang-undang Republik Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal, Perbankan dan Perseroan Terbatas;
2. Berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), khususnya mengenai Penerapan dan Pedoman Tata Kelola, Laporan Tahunan, dan lain-lain;
3. Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
4. Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SOP) Tata Kelola Yang Baik (GCG) Bank;
5. Kebijakan-kebijakan lain terkait tata kelola seperti Kode Etik & Perilaku Kepegawaian yang dimuat dalam Buku Etika Korporasi, Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam), Kebijakan *Whistleblowing*, maupun berbagai kebijakan operasional lainnya. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan pondasi sekaligus menunjukkan komitmen PT Bank JTrust Indonesia Tbk. dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola secara berkelanjutan.

Empat Pilar Tata Kelola

Governance Commitment

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. menjalankan *governance commitment* yang diwujudkan dengan komitmen Dewan Komisaris, Direksi, beserta seluruh unit kerja Bank untuk menerapkan dan menegakkan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Governance Structure

Governance structure memiliki keterkaitan dengan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang memadai agar proses penerapan prinsip GCG menghasilkan pencapaian yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). PT Bank JTrust Indonesia Tbk. memiliki struktur Tata Kelola yang terdiri dari organ utama, organ pendukung, dan infrastruktur GCG.

In achieving its Vision, Mission, and to create added value and maintain trust level of the stakeholders, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. consistently and sustainably implements Good Corporate Governance principles. The basis of the implementation of Good Corporate Governance is based on four pillars/aspects of Governance: governance commitment, governance structure, governance process, and governance outcome that are part of the embodiment of PT Bank JTrust Indoneisa Tbk responsibility to stakeholders including: customers, employees, and other stakeholders as well as societies.

Other than that, the implementation of GCG in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. also refers to several prevailing provisions, including:

1. Indonesian Laws, particularly on Stock Market, Banking, and Limited Company;
2. Various Regulations of Financial Services Authority (POJK), particularly on the Implementation and Guideline of Governance, Annual Report, and others;
3. The Company's Articles of Association and the Resolutions of General Meeting of Shareholders (GMS);
4. Policies and Standard Operating Procedures (SOP) of Good Corporate Governance (GCG) of the Bank:
5. Other policies related to governance such as Code of Ethics & Code of Conduct as stipulated in the Corporate Ethics Book, Working Guideline and Code of Conduct (Charter), Whistleblowing Policy, as well as other operational policies. These policies are the foundation and depiction of commitment of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. in implementing sustainable governance principles.

Four Pillars of Governance

Governance Commitment

PT Bank Jtrust Indonesia Tbk. carries out governance commitment that is realized by the commitment of the Board of Commissioners, Directors, as well as all working units of the Bank to implement and enforce Governance of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Governance Structure

Governance structure is related with adequate structure and infrastructure of Governance so that the implementation process of GCG principles results in the achievement in accordance with the expectation of stakeholders. PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has Governance structure that includes main organ, supporting organ, and GCG infrastructure.

Organ utama meliputi Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Sedangkan organ pendukung terdiri dari Komite-Komite Tingkat Dewan Komisaris, Komite-Komite Tingkat Direksi, Sekretaris Perusahaan, Unit Bisnis/Unit Kerja, serta Unit Independen.

Adapun yang termasuk infrastruktur GCG Antara lain Peraturan Perusahaan, Kode Etik & Perilaku Kepegawaian, Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola.

Governance Process

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. senantiasa memastikan *governance process* dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis guna menghasilkan *outcome* yang memenuhi prinsip Tata Kelola.

Governance process di lingkungan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

Governance Outcome

Komitmen menyeluruh atas penerapan Tata Kelola dari *governance structure* dan *governance process* yang cukup efektif sehingga memberikan pengaruh positif terhadap penciptaan nilai (*value creation)* dan keberlangsungan bisnis Bank (*sustainability*) dalam jangka panjang yang sejalan dengan harapan para pemangku kepentingan.

Keberlangsungan usaha Bank yang didukung dengan kepercayaan para pemangku kepentingan, akan senantiasa meningkatkan kontribusi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. bagi seluruh masyarakat dan lingkungan. Karena itu, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berkomitmen untuk senantiasa menerapkan tata kelola sebagai pedoman utama dalam menjalankan bisnis, serta untuk mempertahankan eksistensi Bank dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha dalam industri perbankan. PT Bank JTrust Indonesia Tbk. juga akan senantiasa menerapkan seluruh prinsip tata kelola yang dikenal dengan istilah "TARIF" yaitu: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), serta Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness).*

Penerapan Prinsip Tata Kelola

1. **Keterbukaan/Transparansi (*Transparency)***
   Memiliki unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat

The main organ includes General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and Directors. While supporting organ consists of Committees in the Board of Commissioners, Committees in the Board of Directors, Corporate Secretary, Business Unit/Working Unit, as well as Independent Unit.

Aspects included in yje infrastructure of GCG are among others the Company's Regulation, Code of Ethics and Code of Conduct, Policies and Governance Procedures.

Governance Process

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. continues to ensure governance process is carried out through a structured and systematic procedures and mechanism to produce outcome that meets Governance principles.

Governance process in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. environment is supported by an adequate structure and infrastructure of Governance to produce outcome that is in line with stakeholders' expectation.

Governance Outcome

The wholistic commitment in applying Governance from an effective governance structure and governance process will give positive impact in value creation and business sustainability of the Bank in a long term in line with the expectation of the stakeholders.

The Bank's business sustainability supported by the trust of the stakeholders will continuously increase the contribution of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. for all societies and environment. Therefore, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is committed to continuously implementing governance as the main guideline in doing business, as well as to maintain the Bank's existence in facing business challenge and competition in the banking industry. . also will continuously implement all governance principles known as "TARIF": Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness.

Implementation of Governance Principles

1. **Transparency**
   To have information disclosure and provision punctually, adequately, clear, accurately, and comparable as well as accessible by shareholders

diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dimana informasi harus disampaikan tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Informasi tersebut juga harus mudah diakses *stakeholders* sesuai dengan haknya.

2. **Akuntabilitas *(Accountability)***
Memiliki unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Untuk memastikan akuntabilitas, maka fungsi, tugas, dan wewenang berbagai fungsi di dalam organisasi, serta pertanggungjawabannya telah diatur dengan jelas sesuai dengan Pedoman Tata Kerja masing-masing fungsi sehingga kinerja semua bagian organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara sehat/ transparan dan terukur, serta memastikan ada tidaknya *check and balance* dalam pengelolaan Bank. Selain itu Bank juga harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten sesuai dengan nilai perusahaaan (*corporate values*), sasaran usaha, dan strategi Bank, serta memiliki *reward and punishment system*.

3. **Pertanggungjawaban *(Responsibility)***
Memiliki unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank serta bertanggung jawab. Dalam hal ini Bank harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Prinsip tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Bank juga harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).

4. **Independensi *(Independency)***
Memiliki unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Dalam hal ini pengelolaan Bank dilakukan secara profesional tanpa pengaruh/ tekanan dari pihak manapun. Selain itu, Bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelola Bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).

and stakeholders. Transparency in delivering material and relevant information, as well as transparency in carrying out decision making process where information has to be delivered punctually, adequately, clear, and accurately, and comparable. This information also has to be accessible by stakeholders according to their rights.

2. **Accountability**
To have a clarity on function in an organization and how to be accountable. To ensure the accountability, hence function, duties, and authorities of various function in an organization, as well as the accountability has been regulated clearly according to Work Procedure Guideline in each function hence the performance in entire organization can be accountable healthily/ transparently and measurable, as well as ensuring the existence of check and balance in the Bank's management. Other than that, the Bank must also have performance measurement from entire lines based on the agreed measurement consistently according to corporate values, business target, and the Bank's strategies, as well as having reward and punishment system.

3. **Responsibility**
To have compliance on regulations and laws as well as internal provision of the Bank and accountable. In this case, the Bank should hold on the principle of prudential banking practices. This principle is carried out in line with the prevailing provisions and regulations to maintain business' sustainability. The Bank also shall be able to act as a good corporate citizen.

4. **Independency**
To have independency from the domination of other parties and objective in carrying out its duties and obligations. In this case, the Bank's management is carried out professionally without influence/pressure from any parties. Other than that, the Bank shall be able to avoid unfair domination by the stakeholders. The Bank's management shall not the affected by one-side interest and shall avoid conflict of interest in any form.

5. **Kewajaran dan Kesetaraan *(Fairness)***
   Memiliki unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*), serta memberikan kesempatan kepada *stakeholders untuk* memberikan masukan bagi kepentingan Bank, serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Tujuan/Manfaat Akhir Penerapan Tata Kelola Bank

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk. yang konsisten melalui 4 (empat) pilar sebagaimana yang telah disebutkan merupakan persyaratan utama yang bertujuan/bermanfaat baik secara langsung maupun dalam jangka panjang untuk:

- Melindungi dan memperhatikan kepentingan semua pihak/pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta melindungi Bank dari intervensi politik dan tuntutan hukum.
- Meningkatkan kesungguhan manajemen/ perilaku kerja dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank sehingga menciptakan landasan bagi Bank guna bertumbuh dan berkembang untuk jangka panjang.
- Memperbaiki dan meningkatkan citra Bank dalam meningkatkan daya saing/kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada pemangku kepentingan.
- Menarik minat, meningkatkan kepercayaan investor maupun mitra usaha lainnya.
- Memaksimalkan nilai tambah bagi *shareholder* (*maximizing shareholder values*) atau memenuhi kepentingan *shareholders* atas peningkatan *shareholder values* Bank (nilai saham dan dividen).

Implementasi Aspek dan Prinsip Tata Kelola

Dalam menerapkan GCG, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berpedoman pada standar implementasi GCG yang berlaku dan/atau juga *best practices*. Hal ini agar PT Bank JTrust Indonesia Tbk. mampu untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas implementasi GCG-nya secara konsisten.

Standar implementasi GCG yang diterapkan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk. mengacu pada POJK No.55/ POJK.03/2016 dan SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta pada POJK No.4/POJK.03/2016 dan SE OJK No.14/ SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu:

5. **Fairness**
   To have fairness and equal opportunity according to its proportion. The Bank shall consider the interest of entire stakeholders according to the value of equal treatment, as well as providing opportunities to the stakeholders to provide feedbacks for the Bank's interest, as well as owning access to information according to transparency principle.

Objectives/Benefits of Implementing Good Corporate Governance

The implementation of Good Corporate Governance in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. consistently through 4 (four) pillars as mentioned is the key requirement that aims/benefits directly and in long term to:

- Protect and take care of the interests of all stakeholders and keep the Bank away from political intervention and lawsuit.
- Improve the seriousness of the Bank's management in applying the basic principles of good corporate governance and prudence in the Bank's management hence creating the basis for the Bank to grow and expand in the long-term.
- Improve and increase the Bank's image in enhancing the Bank's competitiveness/ performance, efficiency and service to stakeholders.
- Create interest, trust from investors and other business partners.
- Maximize shareholder values or meet the interests of shareholders on increasing shareholder values (share value and dividends) of the Bank.

Implementation of Governance Aspects and Principles

In implementing GCG, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. refers to prevailing implementation standards of GCG and/or best practices. It is meant for PT Bank JTrust Indonesia Tbk. to be able to continuously improve and increase the quality of its GCG implementation consistently.

The standard implementation of GCG implemented by PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is according to POJK No. 55/POJK.03/2016 and SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, as well as on POJK No.4/POJK.03/2016 and SE OJK No.14/SEOJK.03/2017 on the Assessment of Healthiness Level of Commercial Bank that covers 11 (eleven) factors as follows:

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
3. Penanganan benturan kepentingan;
4. Penerapan fungsi Kepatuhan;
5. Penerapan fungsi Audit Intern;
6. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
7. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
8. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party)* dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan, laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank

Implementation of Board of Commissioners Duties and Responsibilities

1. Implementation of Board of Commissioners' Duties and Responsibilities;
2. Implementation of Board of Directors' Duties and Responsibilities;
3. Completeness and Implementation of Committee's Duties;
4. Resolution of conflict of interests;
5. Implementation of compliance function;
6. Implementation of Internal Audit;
7. Implementation of External Audit;
8. Implementation of Risk Management including Internal Control System;
9. Fund provision to related parties and provision of large exposures;
10. Transparency of the Company's financial and non-financial conditions, Bank's GCG implementation report and internal reporting; and
11. The Bank's strategic plan.

Selain itu, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. juga menggunakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan sebagaimana tertuang dalam SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang meliputi:

Other than that, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. also utilizes Corporate Governance Guidelines as stipulated in SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 on Guidelines on Governance of Public Company, that includes:

Aspek 1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham, yang meliputi prinsip-prinsip:

a. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
b. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor

Aspek 2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris, yang meliputi prinsip-prinsip:

a. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris
b. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aspek 3. Fungsi dan Peran Direksi, yang meliputi prinsip-prinsip:

a. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi
b. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas danTanggung Jawab Direksi

Aspek 4. Partisipasi Pemangku Kepentingan, yang meliputi prinsip:
Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan

Aspect 1. Public Company Relations with Shareholders in Ensuring the Rights of Shareholders, that include the principles of:

a. Improving the Value of Organizing General Meeting of Shareholders.
b. Improving the Quality of Public Company Communications with the Shareholders or Investors.

Aspect 2. Function and Role of the Board of Commissioners that include these principles:

a. Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners.
b. Improving the Quality of Task and Responsibility Implementation of the Board of Commissioners.

Aspect 3. Function and Role of the Board of Directors, that include these principles:

a. Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors.
b. Improving the Quality of Task and Responsibility Implementation of the Board of Directors.

Aspect 4. Participation of Stakeholders, that includes this principle:
Improving Corporate Governance Aspect through Participation of Stakeholders

Aspek 5. Keterbukaan Informasi, yang meliputi prinsip: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

Fokus Pencapaian Penerapan Tata Kelola Bank di Tahun 2019

Di tahun 2019 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah menerapkan dan mengevaluasi proses implementasi Tata Kelola Bank yang baik (GCG), antara lain:

a. Menumbuhkan komitmen Manajemen dalam penerapan Tata Kelola secara menyeluruh pada setiap lini organisasi.
b. Terhadap *Governance Structure,* dengan membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG, antara lain melengkapi dan menyempurnakan Kebijakan dan SOP, merekrut Komisaris Independen dan Pihak Independen yang berpengalaman dan profesional untuk melengkapi komposisi Dewan Komisaris dan keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris, reorganisasi berkesinambungan dalam upaya meningkatkan daya saing dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dan *governance process*.
c. Terhadap *Governance Process*, dengan memantau penerapan Tata Kelola dan senantiasa berupaya menyempurnakan *monitoring* Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
d. Bank secara berkala/semesteran menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank berikut lampiran kertas kerjanya dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Tingkat Risiko (*Risk Based Bank Rating*) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
e. Bank secara berkala/tahunan menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank sebagai salah satu bagian dari materi untuk penyusunan Laporan Tahunan (*Annual Report*) serta juga dilaporkan terpisah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank termasuk dipublikasikan dalam situs *web* Bank sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan yang berlaku.

Struktur Tata Kelola Perusahaan [102-18]

Mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, struktur tata kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk. disusun dengan tujuan untuk menetapkan kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme dan alur pelaksanaan pengambilan keputusan, serta pelaporan dalam organ-organ yang ada di dalam Bank.

Aspect 5. Information Transparency, that includes this principle:

Focus on the Achievement of the Bank's Implementation on Governance in 2019

In 2019, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has implemented and evaluated the implementation process of the Bank's GCG, as follows:

a. Fostering the commitment of Management in the implementation of Governance thoroughly in every organization line.
b. On Governance Structure, by establishing and refining GCG infrastructure, among others completing and refining the Policy and SOP, recruiting experienced and professional Independent Commissioner and Independent Party to complement the composition of the Board of Commissioners and the membership of the Committee under the Board of Commissioners, reorganizing sustainably in improving competitiveness by upholding the prudential principle, and governance process.
c. On Governance Process, by monitoring the implementation of Governance and continuously striving to improve Compliance and Risk Management Monitoring by the Board of Directors and Commissioners.
d. The Bank periodically/every semester formulates and delivers the Self-Assessment Report on the Implementation of the Bank's Governance as well as its attachment in formulating and delivering the Soundness Level Report of the Risk Based Bank Rating to the Financial Services Authority (OJK).
e. The Bank periodically/annually formulates and delivers the Bank's Governance Implementation Report as one of the part for Annual Report formulation as well as separately delivering to the Financial Services Authority and the Bank's Shareholders including being published in the Bank's website according to the prevailing provisions on report delivery.

Company Governance Structure [102-18]

Referring on the prevailing regulations, PT Bank JTrust Indonesia Tbk.'s governance structure is formulated with an objective to determine the clarity in the distribution of duties and responsibility, mechanism and the flow in decision making process, as well as reporting in the existing organs in the Bank.

Berikut struktur tata kelola perusahaan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.:

Below is the corporate governance structure in PT Bank JTrust Indonesia Tbk.:

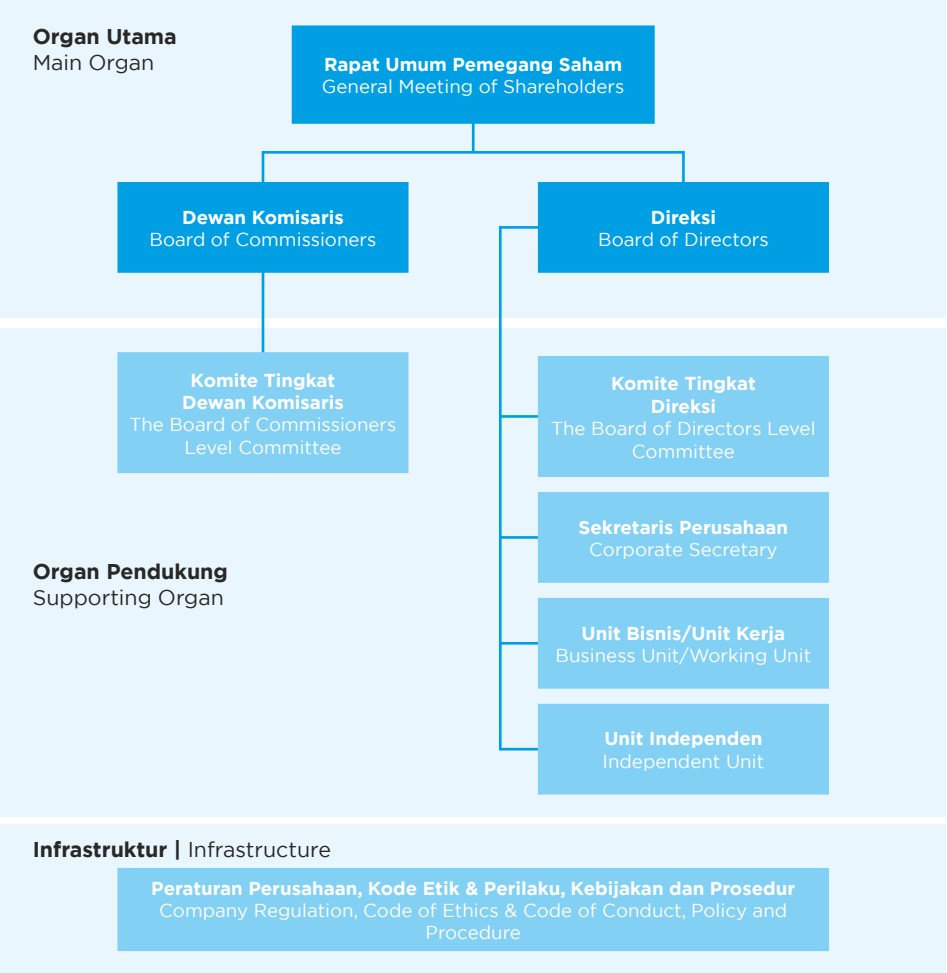

Pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan sehingga prinsip-prinsip tata kelola perusahaan telah menjadi acuan dalam kegiatan usaha di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Penerapan tata kelola perusahaan terwujud dari interaksi seluruh organ Bank, di mana dalam struktur tata kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk. organ utama terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi, dengan kedudukan tertinggi adalah RUPS. Untuk memaksimalkan fungsi organ utama dalam struktur tata kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk., maka dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaaan, Komite di tingkat Direksi dan Internal Audit.

The implementation of corporate governance is carried out systematically and sustainably that corporate governance principles become a reference for business activities in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. The implementation of corporate governance is realized from the interaction of entire organs of the Bank, where in the governance structure of PT Bank JTrust Indonesia Tbk., the main organ consists of GMS, the Board of Commissioners and Directors, with the highest level in the GMS. To maximize the function of main organ in governance structure of PT Bank JTrust Indonesia Tbk., in the implementation it will be assisted by supporting organ that consists of of a Committee in the Board of Commissioners, Corporate Secretary, a Committee in the Board of Directors and Internal Audit.

Komite di tingkat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris. Berikut Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris (*BOC Committees*) PT Bank JTrust Indonesia Tbk.:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Direksi bersama jajaran manajemen bank bertugas untuk mengelola, mengendalikan, serta bertanggung jawab atas implementasi tata kelola di PT Bank JTrust Indonesia Tbk., dibantu oleh Sekretaris Perusahaaan, Komite di tingkat Direksi dan Internal Audit. Berikut komite di tingkat Direksi (*BOD Committees*) yang terdiri dari:

a. Komite Manajemen Risiko
b. *Asset & Liability Committee* (ALCO)
c. Komite Teknologi Informasi
d. Komite Kredit
e. Komite Produk & Aktivitas Baru (PAB)
f. Komite *Reward & Punishment*

Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank

Prosedur dan Kriteria Penilaian

- Penerapan Tata Kelola membutuhkan penilaian untuk melihat sejauh mana perkembangan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang telah dilaksanakan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Penilaian tersebut juga bermanfaat untuk melihat sejauh mana kualitas penerapan tata kelola secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis.
- PT Bank JTrust Indonesia Tbk. secara rutin/berkala telah melaksanakan Penilaian Sendiri (*self assessment)* atas Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, serta Kewajaran dan Kesetaraan) sesuai POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SEOJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Penilaian GCG juga ditujukan untuk menghasilkan Peringkat Tata Kelola yang menjadi faktor dalam menentukan Tingkat Kesehatan Bank sesuai POJK No.4/POJK.03/2016. Penilaian ini dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek dalam sistem Tata Kelola, yaitu struktur, proses dan hasil Tata Kelola terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola.

The committee at the Board of Commissioners is formed to assist and improve the monitoring function carried out by the Board of Commissioners. Below are Committees under the Board of Commissioners (BOC Committees) of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.:

1. Audit Committee
2. Risk Monitoring Committee
3. Nomination & Remuneration Committee

The Board of Directors together with the management team of the Bank are obliged to manage, control, as well as be responsible on the implementation of governance in PT Bank JTrust Indonesia Tbk., assisted by Corporate Secretary, Committees at the Board of Directors level, and Internal Audit. Below are committees under the Board of Directors (BOD Committees):

a. Risk Management Committee
b. Asset & Liability Committee (ALCO)
c. Information Technology Committee
d. Credit Committee
e. Product & New Activities Committee (PAB)
f. Reward and Punishment Committee

Self-Assessment Report on the Implementation of the Bank's Governance

Procedure and Assesment Criteria

- Implementation of Governance requires an assessment to see how far the development of governance principles implemented by PT Bank JTrust Indonesia Tbk. This assessment is also useful to observe how far the quality of sustainable governance implementation in business process.
- PT Bank JTrust Indonesia Tbk. periodically has implemented self-assessment on the implementation of Governance principles (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, as well as Fairness and Equality) according to POJK No.55/POJK.03/2016 and SEOJK No.13/POJK.03/2017 on the Implementation of Governance for Commercial Banks. The GCG assessment also aims to produce Governance Ranking that becomes a factor to determine the Bank's Soundness Level according to POJK No.4/POJK.03/2016. This assessment is made to 3 (three) aspects in Governance system: structure, process, and result of Governance on 11 (eleven) Assessment Factors on Governance Implementation.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian sendiri atas implementasi Tata Kelola Bank melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen, Pejabat Eksekutif dan unit-unit independen di Bank untuk menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas sistem Tata Kelola dan kualitas hasil Tata Kelola Bank.

Parties Conducting Assessment

Self-assessment on the implementation of the Bank's Governance involves the Board of Commissioners, Directors, Independent Parties, Executive Officers, and independent units at the Bank to produce a comprehensive and structured assessment on the effectiveness of Governance system and the Bank's Governance quality.

Hasil dan Peringkat Penilaian

- Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori peringkat yaitu Peringkat 1 (Sangat Baik), Peringkat 2 (Baik), Peringkat ke-3 (Cukup Baik), Peringkat ke-4 (Kurang Baik), dan Peringkat ke-5 (Tidak Baik). Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan penerapan tata kelola yang lebih baik.
- Hasil dan Peringkat Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk. pada Tahun 2019 adalah:

Assessment Result and Ranking

- Self-Assessment report on the Implementation of the Bank's Governance is grouped in 5 (five) ranking categories: Rank 1 (Very Good), Rank 2 (Good), Rank 3 (Good Enough), Rank 4 (Fair), Rank 5 (Poor). The sequence shows that the smallest value reflecting better governance implementation.
- Self-Assessment Result and Ranking on the Implementation of Governance on PT Bank JTrust Indonesia Tbk. in 2019 are:

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Semester I/Posisi Juni 2019
Self Assessment Result on the Implementation of Governance for 1st Semester/As of June 2019

	Peringkat | Rank	**Definisi Peringkat** | Ranking Definition
Individual	3	**Cukup Baik (Good Enough)**

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Semester II/Posisi Desember 2019
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Semester II/Posisi Desember 2019

	Peringkat | Peringkat	**Definisi Peringkat** | Definisi Peringkat
Individual	3	**Cukup Baik (Good Enough)**

Hasil penilaian sendiri (*Self-Assessment*) Peringkat Faktor Tata Kelola oleh Bank untuk Semester II/Posisi Desember 2019 dan untuk Semester I/Posisi Juni 2019 adalah Peringkat 3 (Cukup Baik) yang telah sesuai dengan hasil penilaian OJK atas Peringkat Komposit (*rating*) Tingkat Kesehatan Bank.

Self Assessment result on Governance Factor Ranking by the Bank for the second Semester/As of December 2019 and for first Semester/As of June 2019 is Rank 3 (Good Enough) and in line with the assessment by OJK on the Composite Ranking (Rating) on the Bank's Soundness Level.

Struktur Tata Kelola Keuangan Berkelanjutan [102-18]

Penerapan Tata Kelola PT Bank J Trust Indonesia Tbk. (J Trust Bank) senantiasa dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan didukung komitmen yang kuat dari organ Tata Kelola dan jajaran di bawahnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ utama tertinggi dalam struktur tata kelola, kemudian terdapat Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, didukung pula oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite-Komite Tingkat Dewan Komisaris, komite-komite Tingkat Direksi, Sekretaris Perusahaan, Audit Intern, Unit Bisnis/Unit Kerja, serta Audit Eksternal.

Dalam struktur tata kelola, Bank telah menetapkan unit kerja Corporate Secretary Division sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Selain itu, dalam menjalankan struktur tata kelola, Bank juga memiliki pedoman tata kerja Dewan Komisaris dan tata kerja Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya, termasuk pemenuhan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi. Tidak hanya itu, Bank juga melakukan penguatan *Risk Management*, *Compliance* dan *Internal Control* serta penyempurnaan struktur organisasi untuk menjamin terlaksana *check and balance*.

Informasi secara lengkap mengenai tugas, tanggung jawab dan kewenangan struktur Tata Kelola, yang meliputi RUPS, Direksi maupun Dewan Komisaris, disampaikan pada pembahasan selanjutnya dari bab Tata Kelola Perusahaan ini yang disusun secara terintegrasi dan saling melengkapi dalam Laporan ini.

Sustainable Finance Management Structure [102-18]

The Corporate Governance of PT Bank J Trust Indonesia Tbk. (J Trust Bank) is implemented consistently and sustainably, backed by commitment from Governance elements and the lower ranks. General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest element in the governance structure, completed by a Board of Commissioners and a Board of Directors. Further, the structure is also backed by supporting elements i.e. the BoC and BoD committees, a Corporate Secretary, an Internal Audit, Business/Work Units, and External Audits.

In the governance structure, the Bank has set a Corporate Secretary Division as the responsibility bearer of Sustainable Finance Action Plan (RAKB) program. In addition, in running the structure, the Bank has charters for both its Boards of Commissioners and Directors to help the two boards discharge their roles and duties, including meeting the required sizes of the two boards, and that of the committees under the two boards. Further, the Bank also strengthens Risk Management, Compliance and Internal Control while improving the organizational structure to ensure checks and balances are carried out.

More detailed descriptions about the duties, responsibilities and authorities of elements of governance structure, which includes GMS, the Board of Directors and the Board of Commissioners, are presented in the later discussion of this GCG chapter which is compiled in an integrated and complementary manner in this Report.

Rantai Pemasok dan Praktik Pengadaan [102-9]

Rantai Pemasok

Bank memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Bank. Bank melibatkan perusahaan-perusahaan lokal dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan operasional Bank. Keterlibatan ini menjadi salah satu bentuk manfaat ekonomi yang dilakukan Bank secara tidak langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Kebijakan Bank dalam pengadaan barang dan jasa berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan pengadaan barang dan jasa dikelola dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan, serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pengadaan barang dan jasa pada Bank dilakukan melalui metode penawaran yang kompetitif atau *tender* dengan mencermati aspek-aspek, antara

Supply Chains And Procurement Practices [102-9]

Supplier Chain

The Bank has a policy related to goods and services procedure. The Bank engages local companies in the procurement of goods and services to support the Bank's operational activities. This involvement is one form of indirect economic benefits that the Bank is sharing with surrounding community.

The Bank's policy in the procurement of goods and services offers a guideline for ensuring the procurement of goods and services is well managed, accountable, and implemented with due regard to the principles of good corporate governance. Procurement of goods and services at the Bank is carried out through competitive bidding or tender methods by examining all aspects, including the

lain adanya prinsip keterbukaan dan menghindari *conflict of interest*, mempraktikkan standar etika tertinggi, fokus pada tujuan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan Bank dengan biaya dan mutu yang optimal.

Fungsi yang bertanggung jawab terhadap pengadaan barang dan jasa yaitu Human Capital & General Services. Proses pengadaan juga melibatkan unit-unit lain pada Bank termasuk Legal, Finance, Internal Audit, dan Operational Risk Management. Koordinasi antar unit terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa dibutuhkan dalam rangka memastikan proses tata kelola berjalan dengan standar terbaik.

Jumlah Rekanan [102-9]

Hingga akhir 2019, jumlah rekanan Bank mencapai 50 rekanan yang menjadi bagian dari rantai pemasok di Bank. Rekanan tersebut meliputi, antara lain, jasa *cleaning service*, jasa transportasi, jasa *event*, jasa renovasi dan konstruksi, jasa pengiriman dokumen, dan lain-lain.

Tantangan yang Dihadapi, Perkembangan, dan Pengaruh terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Tantangan yang dihadapi Bank dalam penerapan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan, di antaranya:

1. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi SDM mengenai implementasi Keuangan Berkelanjutan.
2. Meningkatkan pemahaman debitur mengenai kegiatan usaha yang mendukung tujuan SDGs.
3. Tantangan yang dimiliki oleh beberapa debitur untuk menerapkan kebijakan Pemerintah, antara lain kondisi ekonomi, kapasitas, atau kendala teknis lainnya.
4. Terdapat kebijakan Pemerintah yang belum bersifat wajib sehingga tingkat pemenuhan/kepatuhan debitur masih lemah.
5. Perubahan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator dan/atau Pemerintah.

Keanggotaan Pada Asosiasi [102-13]

Hingga akhir tahun 2019, Bank telah mengikuti perkembangan dunia perbankan terkini dan turut memberikan kontribusi pengetahuan dan pengalaman kepada organisasi/asosiasi. Keanggotaan J Trust Bank pada organisasi/asosiasi mempunyai arti strategis. J Trust Bank tidak memberikan kontribusi secara finansial di luar iuran keanggotaaan rutin, termasuk tidak berkontribusi pada politik maupun politisi. Beberapa keanggotaan Bank pada organisasi/asosiasi sebagai berikut:

principle of transparency, avoiding conflict of interest, practicing the highest ethical standards, focusing on the goal of obtaining quality goods or services needed by the Bank at optimum cost.

The function that is in charge for the procurement of goods and services is Human Capital & General Services. The procurement process also involves other units at the Bank including Legal, Finance, Internal Audit, and Operational Risk Management. Coordination between related units in the process of procurement of goods and services is needed to ensure that the governance process runs with the best standards.

Number of Partners [102-9]

By the end of 2019, the Bank had a total of 50 partners who were part of its supplier chain. The partners include companies that provide, among other, cleaning services, transportation services, event services, renovation and construction services, document delivery services, and other services.

Challenges Faced, Development, and Effect on Sustainable Finance Applications

Challenges faced by the Bank in applying the principles of Sustainable Finance, include:

1. How to enhance the comprehension of HR of the implementation of Sustainable Finance.
2. How to enhance the comprehension of debtor of the Banks's business activities that support the SDGs objectives.
3. Challenges faced by some debtors to implement Government policies, including economic conditions, capacity or other technical constraints.
4. There are Government policies that have not been made mandatory, so the level of debtor fulfillment /compliance is still low.
5. Changes in regulations enacted by Regulators and/or the Government.

Membership In Association [102-13]

Until the end of 2019, the Bank had followed the latest developments in the banking world and has contributed knowledge and experience to organizations/associations. J Trust Bank membership in any organization/association has a strategic meaning. J Trust Bank does not contribute financially outside of routine membership fees, including not contributing to politics or politicians. Some of the Bank's membership in the organization/association are as follows:

Nama Organisasi Name of Organization	Tujuan Purpose	Frekuensi Frequency
Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	Program pendidikan komprehensif kepada sekretaris perusahaan untuk mendukung upaya pengembangan tata kelola perusahaan yang baik, melalui pengembangan pengetahuan dan keterampilan, pertukaran informasi dan forum komunikasi antara Sekretaris Perusahaan di Indonesia, regulator dan pemangku kepentingan lainnya Comprehensive education program for Corporate Secretary to support efforts to develop good corporate governance, through the development of knowledge and skills, information exchange and communication forums between Corporate Secretary in Indonesia, regulators and other stakeholders	Anggota Member
Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) Association of National Banks (Perbanas)	1. Untuk menyalurkan aspirasi Perbankan kepada Pemerintah, DPR dan regulator industri perbankan (OJK dan BI) 2. Wadah untuk ikut menumbuh kembangkan serta menyehatkan sektor perbankan nasional melalui pemikiran aktif dan positif 3. Mengembangkan kerja sama antar anggota yang saling menguntungkan demi terciptanya suatu organisasi perbankan yang profesional. 1. To provide forum for banking aspirations to the Government, Parliament and banking industry regulators (OJK and BI) 2. As a forum to participate in developing and healthy the national banking sector through active and positive thinking 3. To develop cooperation between members that is mutually beneficial for the creation of a professional banking organization.	Anggota Member
Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Indonesian Public Listed Companies Association (AEI)	Berpartisipasi mempercepat pertumbuhan pasar modal dalam mengembangkan modal Indonesia. Participate in accelerating capital market growth in developing Indonesian capital.	Anggota Member

Praktik Prinsip Kehati-Hatian

J Trust Bank selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian menjadikan Bank senantiasa mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku di perbankan, termasuk dalam menerapkan keuangan berkelanjutan. [102-11]

Pengungkapan informasi tentang inisiatif eksternal dan sertifikasi yang dimiliki J Trust Bank hingga akhir tahun 2019, disampaikan dalam Laporan Terintegrasi ini. [102-12]

Prudent Principles Practices

J Trust Bank always prioritizes the principle of prudence in running the business operations, both in fund raising and distribution from and to the public. Therefore, the principle of prudence allows the Bank to always complies with the provisions and legal norms that apply in banking, including in applying sustainable finance. [102-11]

Disclosure of information about external initiatives and certifications earned by J Trust Bank until the end of 2019, is presented in this Integrated Report. [102-12]

BAB II
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS), PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

CHAPTER II
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS), IMPLEMENTATION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS TASKS

2.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan hirarki/organ tertinggi dalam struktur tata kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk. yang memiliki fungsi sebagai wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan. RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS adalah forum bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada kepentingan Bank, serta dilakukan secara wajar dan transparan, serta melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Bank secara keseluruhan.

RUPS wajib diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terdiri dari:

1. RUPS Tahunan (RUPST)
   Wajib diselenggarakan 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
2. RUPS Lainnya/RUPS Luar Biasa (RUPSLB)
   Dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perusahaan.

Dasar Hukum/Mekanisme Penyelenggaraan RUPS

Dasar Hukum/Mekanisme Bank menyelenggarakan RUPS mengacu pada:

1. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.
3. Anggaran Dasar Bank

Hak, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Hak yang dimiliki oleh pemegang saham antara lain :

2.1. General Meeting of Shareholders (GMS)

General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest hierarchy/organ in the governance structure of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. which functions as a place for shareholders to make decisions. The GMS has the authorities not granted to the Board of Directors and Board of Commissioners subject to limitations stipulated under the Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and/or the Articles of Association.

The GMS is a forum for shareholders to make decisions based on the Bank's interests, in a fair and transparent manner, and to monitor the Bank's overall performance.

The GMS shall be held in accordance with the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations consisting of:

1. Annual GMS (AGMS)
   Must be held 1 (once) within 6 (six) months after the end of the book year.
2. Other GMS/Extraordinary GMS (EGMS)
   Can be held at any time if deemed necessary for the benefit of the company.

Legal Basis/Mechanism for GMS

Legal Basis/Mechanism for the Bank to hold GMS refers to:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 on Limited Liability Companies.
2. POJK No. 32/POJK.04/2014 on 8 December 2014 on the Planning and Holding of GMS of Limited Liability Companies as amended with POJK No. 10/POJK.04/2017 on 14 March 2017.
3. Bank's Articles of Association

Rights, Authorities, and Responsibility of Shareholders

The rights owned by shareholders include:

- Pemegang Saham memiliki hak atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.
- Dalam RUPS, pemegang saham berhak menghadiri, mengemukakan pendapat dan mengeluarkan hak suara dalam proses pengambilan keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan dengan mata acara Rapat.
- Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Wewenang yang dimiliki oleh pemegang saham antara lain:

- Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi berkaitan dengan Laporan Tahunan Perseroan atau menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*voliedig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya masing-masing.
- Mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi, misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, dan likuidasi Perseroan.
- Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain serta *tantiem* Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Menyetujui usulan alokasi penggunaan laba Bank termasuk pembagian dividen.
- Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP), Akuntan Publik yang terdaftar di Indonesia serta yang terafiliasi dengan salah satu dari KAP Internasional dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan menetapkan jumlah honorariumnya.

- Shareholders have the rights to their shares so that the rights of shareholders are protected and can be implemented in accordance with the laws and regulations and the Bank's Articles of Association.
- In GMS, shareholders have the rights to attend, voice opinion and issue voting rights in the decision making process and receive information related to the Meeting agenda.
- In the GMS forum, shareholders are entitled to obtain information related to the Company from the Board of Directors and/or Board of Commissioners, as long as they are related to the agenda and are not contrary to the interests of the Company.
- GMS on other agendas is not entitled to take any decisions, unless all shareholders are present and/or represented in the GMS and approve the addition of meeting agendas. The decision on the added agenda of the meeting shall be unanimously approved.

Authority owned by shareholders include:

- Evaluating the performance of the Board of Commissioners and Director based on the Company's Annual Report or approve Annual Report including Financial Statements and Supervisory Task Report by the Company's Board of Commissioners and give voliedig acquit et decharge to members of the Board of Directors and Commissioners of the Company on the management and supervision action staken.
- Making decisions related to organizational structure, such as the change of Articles of Association, merger, takeover, spin off, liquidation of the Company.
- Appointing and dismissing members of the Board of Commissioners and Directors of the Company.
- Setting salary or honorarium and other benefits and tantiem of the Board of Directors and Commissioners of the Company.
- Approving the allocation proposal of the Bank's profit use including dividend sharing.
- Giving power and authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accounting Office (KAP), Public Accountant registered in Indonesia and affiliated with one of International KAP and is listed on the Financial Services Authority (OJK) to audit the Company's Financial Statements and set the amount of honorarium.

Selain itu, pemegang saham juga memiliki tanggung jawab antara lain:

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:
   a. Menaruh perhatian kepada kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau diminta oleh otoritas terkait, maka nama-nama pemegang saham pengendali sampai pemilik individu (*ultimate shareholders*) wajib diungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya (*ultimate shareholders*) atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
2. Pemegang saham pengendali yang memiliki saham pada beberapa Perusahaan Terbuka, perlu adanya transparansi dalam hal akuntabilitas dan hubungan antar Perusahaan Terbuka.
3. Penggunaan hak dengan baik dari pemegang saham minoritas sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang saham harus dapat:
   a. Melakukan pemisahan antara kepemilikan harta Perusahaan Terbuka dengan kepemilikan harta pribadi.
   b. Melakukan pemisahan fungsi sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi apabila pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.

Penyelenggaraan RUPS Selama Tahun 2019

Selama tahun 2019, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS yaitu :

a. 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 11 Februari 2019
b. 1 (satu) kali RUPS Tahunan (RUPST) pada tanggal 27 Juni 2019

(1) RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

Pada tanggal 11 Februari 2019 telah diadakan RUPSLB, dengan tahapan/jadwal pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan, pelaksanaan dan penyampaian hasil RUPSLB sebagai berikut:

Moreover, shareholders must have responsibility including:

1. Controlling shareholders should be able to:
   a. Attending to the interests of minority shareholders and other stakeholders, in accordance with applicable laws and regulations.
   b. In the event of any alleged violation of laws and regulations or as requested by the relevant authorities, the names of the controlling shareholders up to the ultimate shareholders shall be disclosed to law enforcement agencies, concerning the ultimate shareholders, or in case requested by the relevant authorities.
2. Controlling shareholders, who own shares in several Public Companies, shall be transparent in terms of accountability and relationships among the said Public Companies.
3. Proper use of the rights of minority shareholders is conducted in accordance with the Company's Articles of Association and the laws and regulations.
4. Shareholders should be able to:
   a. Separate the ownership of assets of public Company with ownership of his/ her personal assets.
   b. Separate functions as shareholders and as members of the Board of Commissioners or Board of Directors, if the said shareholders serve as member on one of the two organs.

General Meeting of Shareholders in 2019

In 2019, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. held 2 (two) GMS:

a. 1 (one) Extraordinary GMS (EGMS) on 11 February 2019
b. 1 (one) Annual GMS (AGMS) on 27 June 2019

(1) Extraordinary GMS (EGMS)

On 11 February 2019 the EGMS was held, with stages/ schedules of notification, announcement, summon, execution and submission of EGMS resolutions as follows:

Keterangan Description	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provision
Pemberitahuan RUPSLB kepada Regulator Notification of EGMS to Regulator	Tanggal 27 Desember 2018 Bank menyampaikan surat Pemberitahuan rencana RUPSLB ke OJK. On December 27, 2018 the Bank submitted Notification on EGMS plan to OJK.	Pemberitahuan mengenai tanggal pelaksanaan dan mata acara RUPS yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik. Notification of the date and agenda of GMS in clear and detailed manner is submitted at the latest 5 (five) working days before the GMS announcement date to the public.
Pengumuman RUPSLB Announcement of EGMS	Tanggal 5 Januari 2019 diumumkan melalui iklan di harian ekonomi *Neraca*, situs web Bursa Efek Indonesia (melalui *e-Reporting*) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id On January 5, 2019 was announced through advertisement in Neraca economics daily, Indonesia Stock Exchange website (via e-Reporting) and Bank website www.jtrustbank.co.id	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs Bursa Efek dan situs resmi Bank paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPS. Bukti Iklan Pengumuman disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan. Submitted minimum through 1 (one) Indonesian-language national newspaper, Stock Exchange website and Bank official website at the latest 14 (fourteen) working days before the summon of GMS. Proof of Advertisement of Announcement is submitted to OJK at the latest 2 (two) working days after the GMS announcement and submitted to IDX on the same day as the date of advertisement.
Pemanggilan beserta penjelasan mata acara RUPSLB Summon and explanations of EGMS agenda	Tanggal 20 Januari 2019 diumumkan melalui iklan di harian ekonomi *Neraca*, situs web Bursa Efek Indonesia (melalui *e-Reporting*) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id On January 20, 2019 was submitted through the Neraca economics daily, Indonesia Stock Exchange website (via e-Reporting) and Bank website www.jtrustbank.co.id	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia, situs resmi Bank paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS. Bukti iklan panggilan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panggilan RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan. Submitted minimum through 1 (one) Indonesian-language national newspaper, Stock Exchange website and Bank official website at the latest 21 (twenty one) working days before the summon of GMS. Proof of advertisement of summon is submitted to OJK at the latest 2 (two) working days after the GMS Summon and submitted to IDX on the same day as the date of advertisement.
Penyelenggaraan RUPSLB Implementation of EGMS	Tanggal 11 Februari 2019 RUPSLB dilaksanakan pada pkl. 10.00 WIB – selesai, bertempat di Sakura Function Hall – PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220. On February 11, 2019 EGMS was held on 10:00 – finish, in Sakura Function Hall – PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Gedung Sahid Sudirman Center, 35th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220.	
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPSLB Ringkasan Risalah (Hasil) RUPSLB Summary of Minutes (Result) of EGMS Publikasi di Surat Kabar Publication in Newspaper	Tanggal 13 Februari 2019 Diumumkan melalui iklan di harian ekonomi *Neraca* On February 13, 2019 was announced through advertisement in Neraca economics daily	Pengumuman ringkasan risalah RUPS diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. Announcement of summary of minutes of GMS is announced at the latest 2 (two) working days after the GMS was held.

Keterangan Description	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provision
Laporan ke Regulator dan penyampaian bukti iklan Ringkasan Risalah RUPSLB Report to Regulators and submission of proof of advertisement of EGMS Minutes of Meeting	Tanggal 13 Februari 2019 Diumumkan melalui situs web OJK dan BEI (melalui *e-Reporting*) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id On February 13, 2019 was announced through the OJK web and IDX (through e-Reporting) and Bank website www.jtrustbank.co.id	Laporan hasil RUPS disampaikan kepada OJK dan BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Penyelenggaraan RUPS dilengkapi dengan resume keputusan RUPS yang dikeluarkan oleh Notaris. Bukti publikasi Ringkasan Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan. Report of GMS result is submitted to OJK and IDX at the latest 2 (two) working days after the RUPS Implementation and completed with resume of GMS decisions as issued by Notary. Proof of publication of GMS Summary of Minutes is submitted to OJK at the latest 2 (two) working days after the announcement of GMS summary of minutes and submitted to IDX at the same day with the date of advertisement.
Risalah RUPSLB Minutes of EGMS	Akta Risalah RUPSLB disampaikan ke OJK tanggal 8 Maret 2019. Act of EGMS Minutes is submitted to OJK on March 8, 2019.	Akta Risalah RUPS disampaikan ke OJK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. Act of GMS Minutes is submitted to OJK at the latest 14 (fourteen) working days after the RUPS was held.

Seluruh hasil RUPSLB dan jalannya rapat tercantum dalam akta Berita Acara RUPSLB tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris telah tersedia dan dapat diakses pada situs *web* PT Bank JTrust Indonesia Tbk. *via* www.jtrustbank.co.id.

RUPSLB Tahun 2019 memiliki agenda dengan hasil Keputusan yang direalisasikan sebagai berikut:

All resolutions of the EGMS and the proceedings of the meeting listed in the Minutes of EGMS dated 11 February 2019 made by Notary are available and accessible on the website of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. via www.jtrustbank.co.id.

The EGMS of 2019 has several agendas with the following Resolutions that have been realized:

Agenda Agenda	Hasil Keputusan RUPSLB EGMS Resolutions	Realisasi Keputusan RUPSLB Realisation of EGMS Resolutions
Agenda Pertama: Perubahan susunan pengurus Perseroan. **First Agenda:** Changes of the Company's management structure.	1. Menyetujui untuk menguatkan pemberhentian sementara Tuan RITSUO ANDO dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, yang telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2019, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 21 Desember 2018 (selanjutnya disebut "Keputusan Dewan Komisaris"). 2. Menyetujui untuk menguatkan pemberhentian sementara Tuan HARYANTO BUDI PURNOMO dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, yang telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2019, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Komisaris. 3. Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut: **DEWAN KOMISARIS:** Komisaris Utama : Tuan Nobiru Adachi Komisaris : Tuan Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Tuan Mahdi Mahmudy Komisaris Independen : Tuan Kwik Ing Hie **DIREKSI:** Direktur Utama : Tuan Shigeyoshi Asano Direktur : Tuan Felix Istyono Hartadi Tiono Direktur : Tuan Helmi Arief Hidayat Direktur : Tuan Rio Lanasier Dengan ketentuan pengangkatan Tuan Shigeyoshi Asano sebagai Direktur Utama Perseroan dan Tuan Nobuiku Chiba sebagai Komisaris Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memenuhi peraturan per-undang-undangan yang berlaku. 4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan seluruh instansi yang terkait. 5. Menerima laporan Direksi Perseroan dengan baik mengenai komposisi Pemegang Saham dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan dalam akta Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan seluruh instansi yang terkait.	Hasil keputusan ini telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Nomor 12 tanggal 5 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan No. AHU-AH.01.03-0254185 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. The resolution has been stated in the Deed of Declaration of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. No 12 on March 5, 2019 as made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta No. AHU-AH.01.03-0254185 from the Law and Human Rights Ministry of the Republic of Indonesia.

Agenda Agenda	Hasil Keputusan RUPSLB EGMS Resolutions	Realisasi Keputusan RUPSLB Realisation of EGMS Resolutions
	1. Agreed to strengthen the temporary dismissal of RITSUO ANDO as the Company's Director, effective from January 1, 2019, as referred in the Circular of Board of Commissioners as Substitute of Meeting of the Company's Board of Commissioners on December 21, 2018 (further stated as "Board of Commissioners' Decision"). 2. Agreed to strengthen the temporary dismissal of HARYANTO BUDI PURNOMO as the Company's Director, effective from January 1, 2019, as referred in the Board of Commissioners' Decision. 3. Therefore, the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company since the closing of the Meeting is as follows: BOARD OF COMMISSIONERS: President Commissioner : Nobiru Adachi Commissioner : Nobuiku Chiba Independent Commissioner : Mahdi Mahmudy Independent Commissioner : Kwik Ing Hie BOARD OF DIRECTORS: President Director : Shigeyoshi Asano Director : Felix Istyono Hartadi Tiono Director : Helmi Arief Hidayat Director : Rio Lanasier With stipulations the appointment of Shigeyoshi Asano as the Company's President Director and Nobuiku Chiba as the Company's Commissioner has been effective since passing the fit and proper test by the Financial Services Authority (OJK) and complying with existing regulations. 4. Gave power and authority to the Company's Board of Directors to state the changes in Company's management in a separate Notarial deed and submit the Company's data changes to the Law and Human Rights Ministry of the Republic of Indonesia and all relevant institutions. 5. Accepted report from the Company's Board of Directors on the composition of Shareholders to state in a Notarial deed and gave power to the Board of Directors to submit the Company's data changes to the Law and Human Rights Ministry of the Republic of Indonesia and all relevant institutions.	

Perhitungan Suara Voting Calculation		
Setuju Agree	**Tidak Setuju** Disagree	**Tidak Memberikan Suara** Abstain
10.011.867.697 saham atau 99,9974% 10,011,867,697 shares or 99.9974%	0 saham atau 0% 0 shares or 0%	0 saham atau 0% 0 shares or 0%

(2) RUPS Tahunan (RUPST)

Pada tanggal 27 Juni 2019 telah diadakan RUPST, dengan jadwal pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan, pelaksanaan dan penyampaian hasil RUPST sebagai berikut:

(2) Annual GMS (AGMS)

The AGMS was held on June 27, 2019, with the notification, announcement, summon, execution and submission of AGMS Resolutions as follows:

Keterangan Description	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provision
Pemberitahuan RUPST kepada Regulator Notification of AGMS to Regulator	Tanggal 7 Mei 2019 Bank menyampaikan surat Pemberitahuan rencana RUPST ke OJK. On May 7, 2019 the Bank submitted Notification on AGMS plan to OJK.	Pemberitahuan mengenai tanggal pelaksanaan dan mata acara RUPS yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik. Notification of the date and agenda of GMS in clear and detailed manner is submitted at the latest 5 (five) working days before the GMS announcement date to the public.
Pengumuman RUPST Announcement of AGMS	Tanggal 14 Mei 2019 diumumkan melalui iklan di harian *Media Indonesia*, situs web Bursa Efek Indonesia (melalui *e-Reporting*) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id On May 14, 2019 was announced through advertisement in *Media Indonesia* daily, Indonesia Stock Exchange website (via e-Reporting) and Bank website www.jtrustbank.co.id	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs Bursa Efek dan situs resmi Bank paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPS. Bukti Iklan Pengumuman disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan. Submitted minimum through 1 (one) Indonesian-language national newspaper, Stock Exchange website and Bank official website at the latest 14 (fourteen) working days before the summon of GMS. Proof of Advertisement of Announcement is submitted to OJK at the latest 2 (two) working days after the GMS announcement and submitted to IDX on the same day as the date of advertisement.
Pemanggilan beserta penjelasan mata acara RUPST Summon and explanations of AGMS agenda	Tanggal 29 Mei 2019 diumumkan melalui iklan di harian *Media Indonesia*, situs web Bursa Efek Indonesia (melalui *e-Reporting*) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id On May 29, 2019 was announced through advertisement in Media Indonesia daily, Indonesia Stock Exchange website (via e-Reporting) and Bank website www.jtrustbank.co.id	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia, situs resmi Bank paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelengga-raan RUPS. Bukti iklan panggilan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panggilan RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan. Submitted minimum through 1 (one) Indonesian-language national newspaper, Stock Exchange website and Bank official website at the latest 21 (twenty one) working days before the summon of GMS. Proof of advertisement of summon is submitted to OJK at the latest 2 (two) working days after the GMS Summon and submitted to IDX on the same day as the date of advertisement.
Penyelenggaraan RUPST Implementation of AGMS	Tanggal 27 Juni 2019 RUPST dilaksanakan pada pkl. 14.00 WIB – selesai, bertempat di Sakura Function Hall – PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220. On June 27, 2019 AGMS was held on 14:00 – finish, in Sakura Function Hall – PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Gedung Sahid Sudirman Center, 35th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220.	
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST Publikasi di Surat Kabar Summary of Minutes (Result) of AGMS Publication in Newspaper	Tanggal 1 Juli 2019 Diumumkan melalui iklan di harian *Media Indonesia* On July 1, 2019 was announced through advertisement in Media Indonesia daily	Pengumuman ringkasan risalah RUPS diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. Announcement of summary of minutes of GMS is announced at the latest 2 (two) working days after the GMS was held.

Keterangan Description	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provision
Laporan ke Regulator dan penyampaian bukti iklan Ringkasan Risalah RUPST Report to Regulators and submission of proof of advertisement of AGMS Minutes of Meeting	Tanggal 1 Juli 2019 Diumumkan melalui situs web OJK dan BEI (melalui *e-Reporting*) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id On July 1, 2019 was announced through the OJK web and IDX (through e-Reporting) and Bank website www.jtrustbank.co.id	Laporan hasil RUPS disampaikan kepada OJK dan BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Penyelenggaraan RUPS dilengkapi dengan resume keputusan RUPS yang dikeluarkan oleh Notaris. Bukti publikasi Ring-kasan Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan. Report of GMS result is submitted to OJK and IDX at the latest 2 (two) working days after the RUPS Implementation and completed with resume of GMS decisions as issued by Notary. Proof of publication of GMS Summary of Minutes is submitted to OJK at the latest 2 (two) working days after the announcement of GMS summary of minutes and submitted to IDX at the same day with the date of advertisement.
Risalah RUPST Minutes of AGMS	Akta Risalah RUPST disampaikan ke OJK tanggal 25 Juli 2019. Act of AGMS Minutes is submitted to OJK on July 25, 2019.	Akta Risalah RUPS disampaikan ke OJK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. Act of GMS Minutes is submitted to OJK at the latest 14 (fourteen) working days after the GMS was held.

Seluruh hasil RUPST dan jalannya rapat tercantum dalam akta Berita Acara RUPST tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris telah tersedia dan dapat diakses pada situs web PT Bank JTrust Indonesia Tbk. *via* www.jtrustbank.co.id.

All resolutions of the AGMS and the proceedings of the meeting listed in the Minutes of the AGMS dated June 27, 2019 made by Notary are available and accessible on the website of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. via www.jtrustbank.co.id.

RUPST tahun 2019 memiliki beberapa agenda dengan hasil Keputusan yang direalisasikan sebagai berikut:

The AGMS of 2019 has several agendas with the following Resolutions that have been realized:

Agenda Agenda	Hasil Keputusan RUPST AGMS Resolutions	Realisasi Keputusan RUPST Realization of AGMS Resolutions
Agenda Pertama: Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 **First Agenda:** Approval of the Annual Report of the Company in Fiscal Year 2018 including the Report of Board of Commissioners' Supervisory Task Implementation in Fiscal Year 2018 and Validation of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2018	Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kosasih Nurdiyaman Mulyadi Tjahjo & Rekan (a member of Crowe) dengan opini Audit Tanpa Modifikasi (dahulu "Wajar Tanpa Pengecualian") sebagaimana dinyatakan dalam laporannya ter-tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas). To approve and accept the Company's Annual Report for Fiscal Year 2018 (two thousand and eighteen), including the report of the Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners, and to ratify the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2018 (two thousand and eighteen) audited by Public Accountant Firm ("KAP") Kosasih Nurdiyaman Mulyadi Tjahjo & Partner (a member of Crowe) with Unmodified Opinion (previously "Unqualified Opinion") as stated in its report of 27 (twenty seven) March 2019 (two thousand nineteen).	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Maret 2019 dan 30 April 2019 The Company's Financial Statements and Annual Report for fiscal year 2018 have been submitted to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange on March 29, 2019 and April 30, 2019

Perhitungan Suara Voting Calculation		
Setuju Agree	**Tidak Setuju** Disagree	**Tidak Memberikan Suara** Abstain
9.730.318.564 saham atau 97,18% 9,730,318,564 shares or 97.18%	281.549.137 saham atau 2,82% 281,549,137 shares or 2.82%	0 saham atau 0% 0 shares or 0%

Agenda Agenda	Hasil Keputusan RUPST AGMS Resolutions	Realisasi Keputusan RUPST Realization of AGMS Resolutions
Agenda Kedua: Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2019 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris. **Second Agenda:** Determining salary/honorarium including facilities and allowances for Fiscal Year 2019 for members of the Board of Directors and Commissioners.	Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris, tantiem serta penetapan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Approving authorization to the Company's Board of Commissioners to set the salary for Directors, honorarium of Commissioners, tantiem and other benefits for members of Board of Directors and Commissioners of the Company for Fiscal Year 2019 (two thousand nineteen) based on the recommendation of Remuneration and Nomination Committee.	Berdasarkan hasil keputusan RUPS yang memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris, dan tantiem serta penetapan benefit lainnya untuk Tahun Buku 2019. Pada tanggal 20 Maret 2017 telah ditetapkan Kebijakan Kompensasi dan Fasilitas Komisaris, Direksi dan EVP (Executive Vice President) yang dituju-kan kepada Direktur Utama untuk ditindak-lanjuti pelaksanaannya. Based on GMS decision which gives authority to the Company's Board of Commissioners through the recommendation of Remuneration and Nomination Committee to set the salary of Directors, honorarium of Commissioners, and tantiem and other allowances for Fiscal Year 2019. On March 20, 2017 the Compensation Policy and Facility for Commissioners, Directors, and EVP (Executive Vice President) was set and designated to the President Director to follow up on the implementation.

Perhitungan Suara Voting Calculation		
Setuju Agree	**Tidak Setuju** Disagree	**Tidak Memberikan Suara** Abstain
9.730.318.564 saham atau 97,18% 9,730,318,564 shares or 97.18%	281.549.137 saham atau 2,82% 281,549,137 shares or 2.82%	0 saham atau 0% 0 share or 0%

Agenda Agenda	Hasil Keputusan RUPST AGMS Resolutions	Realisasi Keputusan RUPST Realization of AGMS Resolutions
Agenda Ketiga: Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019. **Third Agenda:** Approval of the appointment of Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2019.	1) Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk dan di-tetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesai-kan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). 2) Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP/ KAP pengganti beserta honorarium dan persyaratan lainnya. 1) Approving delegating the authority to the Board of Commissioners to determine the Firm that will audit the financial statements of the Company for the financial year ended on 31 (thirty one) December 2019 (two thousand nineteen) based on recommendation from the Audit Committee and determine the replacement of the KAP in case of the designated KAP, for any reason failed to complete the audit of the Company's financial statements for 2019 (two thousand nineteen). 2) Approving to give power and authority to the Board of Commissioners to appoint KAP/ replacement KAP as well as the honorarium and other requirements.	Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.10.01/S-KOM/ JTRUST/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Komite Audit menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nudiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Horwath International) untuk me-lakukan audit atas Laporan Keuangan Perse-roan per 31 Desember 2019. Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No.10.01/S-KOM/JTRUST/X/2019 dated 10 October 2019, the Board of Commissioners, with recommendations from the Audit Committee, reappointed Public Accounting Firm Kosasih, Nudiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Associates (member of Crowe Horwath International) to audit the Company's Financial Statements per December 31, 2019.

Perhitungan Suara Voting Calculation		
Setuju Agree	**Tidak Setuju** Disagree	**Tidak Memberikan Suara** Abstain
9.730.318.564 saham atau 97,18% 9,730,318,564 shares or 97.18%	281.549.137 saham atau 2,82% 281,549,137 shares or 2.82%	0 saham atau 0% 0 shares or 0%

Agenda Agenda	**Hasil Keputusan RUPST** AGMS Resolutions	**Realisasi Keputusan RUPST** Realization of AGMS Resolutions
Agenda Keempat: Perubahan susunan pengurus Perseroan.	1) Menerima pengunduran diri dan mengukuhkan pemberhentian Tuan Rio Lanasier sebagai Direktur Perseroan efektif sejak tanggal 26 (dua puluh enam) April 2019 (dua ribu sembilan belas), dengan ini diberikan ucapan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan. 2) Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Tuan Mahdi Mahmudy selaku Komisaris Independen dan Tuan Helmi A. Hidayat selaku Direktur Perse-roan dengan ini menyetujui pengangkatan kembali Tuan Mahdi Mahmudy selaku Komisaris Independen dan Tuan Helmi A. Hidayat selaku Direktur Perse-roan efektif sejak ditutupnya Rapat. 3) Mengukuhkan pemberhentian Tuan Kwik Ing Hie sebagai Komisaris Independen dengan berakhirnya masa jabatan bersamaan dengan ditutupnya Rapat ini, dengan ini diberikan ucapan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan. 4) Menyetujui pengalihan tugas Tuan Shigeyoshi Asano yang semula menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan menjadi Wakil Direktur Utama efektif sejak ditutupnya Rapat dan mengubah masa jabatannya dari semula sampai dengan di-tutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menjadi sampai dengan ditutup-nya RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) terhitung sejak di-tutupnya Rapat. 5) Menyetujui untuk mengubah masa jabatan Tuan Nobuiku Chiba selaku Komisaris dari semula sampai dengan ditutup-nya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK menjadi sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) sejak ditutupnya Rapat. 6) Menyetujui pengangkatan nama-nama tersebut di bawah ini: a. Tuan Sutirta Budiman sebagai Komisaris Independen Perseroan. b. Tuan Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan. c. Tuan Cho Won June sebagai Direktur Perseroan. d. Tuan Bijono Waliman sebagai Direktur Perseroan. e. Tuan Rayendra Prasetya sebagai Direktur Perseroan. Efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7) Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris Per-seroan dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama : Nobiru Adachi Komisaris : Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Mahdi Mahmudy Komisaris Independen : Sutirta Budiman	Perubahan susunan Pengurus Perseroan telah disahkan dalam Akta No. 160 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Agenda Agenda	Hasil Keputusan RUPST AGMS Resolutions	Realisasi Keputusan RUPST Realization of AGMS Resolutions
	DIREKSI: Direktur Utama : Ritsuo Fukadai Wakil Direktur Utama : Shigeyoshi Asano Direktur : Felix Istyono Hartadi Tiono Direktur : Helmi A. Hidayat Direktur : Cho Won June Direktur : Bijono Waliman Direktur : Rayendra Prasetya Dengan ketentuan pengangkatan Tuan Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan, Tuan Cho Won June, Tuan Bijono Waliman dan Tuan Rayendra Prasetya masing-masing sebagai Direktur Perseroan dan Tuan Sutirta Budiman sebagai Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepa-tutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Per-seroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyam-paikan pemberitahuan peru-bahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.	
Fourth Agenda: Changes of the Company's management.	1) Accepting the resignation and confirming the dismissal of Rio Lanasier as the Company's Director effective per 26 (twenty six) April 2019 (two thousand nineteen), with appreciation for his contribution while serving the Company. 2) With the ending of Mahmi Madhmudy's term as Independent Commissioner and Helmi A. Hidayat as Director the Company approved the reappointment of Mahdi Mahmudy as Independent Commissioner and Helmi A. Hidayat as Director effective since the Meeting ended. 3) Confirming the dismissal of Kwik Ing Hie as Independent Commissioner as his term ended at the closing of the Meeting, with appreciation for his contribution while serving the Company. 4) Approving the shift of task of Shigeyoshi Asano as the President Director of the Company to Vice President Director effective from the closing of the Meeting and changing his term from initially until the closing of 3rd (third) Annual GMS since passed the fit and proper test by the Financial Services Authority ("OJK") to the closing of 1st (first) Annual GMS since the closing of the Meeting. 5) Approving to change the term of Nobuiku Chiba as Commissioner from initially until the closing of 3rd (third) Annual GMS since passed the fit and proper test by the Financial Services Authority ("OJK") to the closing of 1st (first) Annual GMS since the closing of the Meeting. 6) Approving the appointment of the names below: a. Sutirta Budiman as Independent Commissioner of the Company. b. Ritsuo Fukadai as President Director of the Company. c. Cho Won June as Director of the Company. d. Bijono Waliman as as Director of the Company. e. Rayendra Prasetya as Director of the Company. Effective since passing the fit and proper test by OJK and complying with existing regulations.	Changes in the composition of the Company's Management boards have been ratified in Deed Number 160 dated June 27, 2019, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

Agenda Agenda	Hasil Keputusan RUPST AGMS Resolutions	Realisasi Keputusan RUPST Realization of AGMS Resolutions
Fourth Agenda: Changes of the Company's management. (continued)	7) Therefore, the composition of Board of Commissioners and Directors after the closing of the Meeting:: BOARD OF COMMISSIONERS : President Commissioner : Nobiru Adachi Commissioner : Nobuiku Chiba Independent Commissioner : Mahdi Mahmudy Independent Commissioner : Sutirta Budiman BOARD OF DIRECTORS: President Director : Ritsuo Fukadai Vice President Director: Shigeyoshi Asano Director : Felix Istyono Hartadi Tiono Director : Helmi A. Hidayat Director : Cho Won June Director : Bijono Waliman Director : Rayendra Prasetya With the appointment of Ritsuo Fukadai as President Director of the Company, Cho Won June, Bijono Waliman and Rayendra Prasetya respectively as Director and Sutirta Budiman as Independent Commissioner of the Company effective since passing the fit and proper test by OJK and complying with existing regulations. 8) Giving power and authority to the Company's Board of Directors with substitute rights to state changes of the Company's Management in a separate Notarial Deed and submit changes of the Company's data to the Law and Human Rights Ministry of the Republic of Indonesia.	

Perhitungan Suara Voting Calculation		
Setuju Agree	**Tidak Setuju** Disagree	**Tidak Memberikan Suara** Abstain
9.730.318.564 saham atau 97,18% 9,730,318,564 shares or 97.18%	281.549.137 saham atau 2,82% 281,549,137 shares or 2.82%	0 saham atau 0% 0 share or 0%

Agenda Agenda	Hasil Keputusan RUPST AGMS Resolutions	Realisasi Keputusan RUPST Realization of AGMS Resolutions
Agenda Kelima: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	1. Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai jangka waktu masa jabatan anggota Direksi sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut: 11.4 Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangku-tan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah disahkan dalam Akta No. 161 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Agenda Agenda	**Hasil Keputusan RUPST** AGMS Resolutions	**Realisasi Keputusan RUPST** Realization of AGMS Resolutions
Agenda Kelima: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. (lanjutan)	2. Menyetujui perubahan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai jangka waktu masa jabatan anggota Dewan Komisaris sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut: 14.4 Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu sampai dengan di-tutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengang-katan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersang-kutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat 11 huruf c dan menghapus ketentuan Pasal 12 ayat 11 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Pasal 12 ayat 11 anggaran dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut: 12.11. a Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama (jika diangkat) berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan c. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama (jika diangkat) tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. 4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa pengecualian untuk pelaksanaan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut di atas dalam Akta Notaris tersendiri dan mengurus sampai dengan diperolehnya persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah disahkan dalam Akta No. 161 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Fifth Agenda: Changes of the Company's Articles of Association.	1. Approving the change of Article 11 clause 4 of the Company's Articles of Association on the term period of Directors to read as follows: 11.4 The term period of a Director is for the period until the closing of 1st (first) Annual General Meeting of Shareholders after the appointment of respective Director, without reducing the rights of General Meeting of Shareholders to dismiss the Director anytime before the term ends, by naming the reasons, after the respective Director is given the opportunity to attend General Meeting of Shareholders to defend themselves in the General Meeting of Shareholders.	Changes of the Company's Articles of Association have been ratified in the Deed No. 161 of June 27, 2019 made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

Agenda Agenda	Hasil Keputusan RUPST AGMS Resolutions	Realisasi Keputusan RUPST Realization of AGMS Resolutions
Fifth Agenda: Changes of the Company's Articles of Association. (continued)	2. Approving the change of Article 14 clause 4 of the Company's Articles of Association on the term period of Commissioners to read as follows: 14.4 The term period of a Commissioner is for the period until the closing of 1st (first) Annual General Meeting of Shareholders after the appointment of respective Commissioner, without reducing the rights of General Meeting of Shareholders to dismiss the Commissioner anytime before the term ends, by naming the reasons after the respective Commissioner is given the opportunity to defend themselves in the General Meeting of Shareholders. The dismissal is then effective since the closing of General Meeting of Shareholders which decides on the dismissal, unless on other dates as determined by the General Meeting of Shareholders. 3. Approving the change of Article 12 clause 11 letter c and eliminating provision of Article 12 clause 11 letter d of the Company's Articles of Association, that Article 12 clause 11 of the Company's articles of association read as follows: 12.11. a President Director has the right and authority to act for and of the Board of Directors and represent the Company b. If the President Director is not present or unable to attend due to any reason, which does not need to be approved by third parties, then the Vice President Director (if appointed) has the right and authority to act for and of the Board of Directors and represent the Company c. If the President Director and Vice President Director (if appointed) are not present or unable to attend due to any reason, which does not need to be approved by third parties, then 2 (two) other Directors have the right and authority to act for and of the Board of Directors and represent the Company. 4. Giving the power and authority to the Company's Board of Directors with substitution rights to do all necessary actions without exception for the changes in the Company's articles of association in a separate Notarial Deed and manage until receiving approval and/or submission of changes of articles of association from the Law and Human Rights Minister of the Republic of Indonesia according to existing regulations.	

Perhitungan Suara Voting Calculation		
Setuju Agree	**Tidak Setuju** Disagree	**Tidak Memberikan Suara** Abstain
9.730.318.564 saham atau 97,18% 9,730,318,564 shares of 97.18%	281.549.137 saham atau 2,82% 281,549,137 shares or 2.82%	0 saham atau 0% 0 share or 0%

Informasi tentang keputusan RUPS dalam 1 (satu) tahun selama tahun 2019 meliputi:

a. **Keputusan RUPS yang direalisasikan**
   1. **RUPS Tahunan (RUPST)**
      - Seluruh hasil keputusan dalam RUPS Tahunan pada tanggal 27 Juni 2019 umumnya sudah terealisasi.
   2. **RUPS Luar Biasa (RUPSLB)**
      - Seluruh hasil keputusan dalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 11 Februari 2019 umumnya sudah terealisasi.

b. **Keputusan RUPS yang belum/tidak terealisasi**
   1. **RUPS Tahunan (RUPST)**
      - Selama tahun 2019 seluruh keputusan RUPS telah terealisasi dan tidak ada keputusan yang belum/tidak terealisasi.
   2. **RUPS Luar Biasa (RUPSLB)**
      - Selama tahun 2019 tidak ada keputusan yang belum/tidak terealisasi.

Information on GMS resolutions in 1 (one) year during 2019 includes:

a. **GMS resolutions that are realized**
   1. **Annual GMS (AGMS)**
      - All resolutions in the Annual GMS on June 27, 2019 generally have been realized.
   2. **Extraordinary GMS (EGMS)**
      - All resolutions in the Extraordinary GMS on February 11, 2019 generally have been realized.

b. **GMS resolutions that are realized/not realized**
   1. **Annual GMS (AGMS)**
      - In 2019 all GMS resolutions have been realized. There were no unrealized resolutions.
   2. **Extraordinary GMS (EGMS)**
      - In 2019 there were no resolutions that have not been realized.

Informasi tentang keputusan RUPS dalam 1 (satu) tahun selama tahun 2018 meliputi:

a. **Keputusan RUPS yang direalisasikan**
   1. **RUPS Tahunan (RUPST)**
      - Seluruh hasil keputusan dalam RUPS Tahunan pada tanggal 28 Juni 2018 umumnya sudah terealisasi.
   2. **RUPS Luar Biasa (RUPSLB)**
      - Seluruh hasil keputusan dalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 20 September 2018 umumnya sudah terealisasi.

b. **Keputusan RUPS yang belum/tidak terealisasi**
   1. **RUPS Tahunan (RUPST)**
      - Selama tahun 2018 tidak ada keputusan yang belum/tidak terealisasi.
   2. **RUPS Luar Biasa (RUPSLB)**
      - Selama tahun 2018 tidak ada keputusan yang belum/tidak terealisasi.

Information on GMS resolution in 1 (one) year during 2018 includes:

a. **GMS Resolutions that are realized**
   1. **Annual GMS (AGMS)**
      - All resolutions in the Annual GMS on June 28, 2018 generally have been realized.
   2. **Extraordinary GMS (EGMS)**
      - All resolutions in the Extraordinary GMS on September 20, 2018 generally have been realized.

b. **GMS resolutions that have not been realized**
   1. **Annual GMS (AGMS)**
      - In 2018, there were no resolutions that have not been realized.
   2. **Extraordinary GMS (EGMS)**
      - In 2018, there were no resolutions that have not been realized.

2.2. Kepemilikan Saham

Pada tanggal 31 Desember 2019 susunan pemegang saham dan kepemilikan saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek, PT Sharestar Indonesia menjadi sebagai berikut:

2.2 Share Ownership

On December 31, 2019 the composition of shareholders and share ownership of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. based on report of the Stock Administration Bureau, PT Sharestar Indonesia was as follows:

Uraian	Jumlah Saham Number of Shares	Jumlah Nilai Nominal Total (Rp)	Persentase Percentage (%)	Description
Saham Seri A (Rp 1.000,- per saham)				Series A Shares (Rp 1,000,- per share)
J Trust Co., Ltd.	8.679.019.445	8.679.019.445.000	86,685	J Trust Co., Ltd.
PT JTrust Investments Indonesia	100.121.245	100.121.245.000	1,000	PT JTrust Investments Indonesia

Uraian	Jumlah Saham Number of Shares	Jumlah Nilai Nominal Total (Rp)	Persentase Percentage (%)	Description
J Trust Asia Pte. Ltd.	467.700.928	467.700.928.000	4,671	J Trust Asia Pte. Ltd.
Publik	764.999.382	764.999.382.000	7,641	Public
Saham Seri B (Rp 7.800.000,- per saham)				Series B Shares (Rp 7,800,000,- per share)
J Trust Co., Ltd.	26.038	203.096.400.000	0,000	J Trust Co., Ltd., Japan
Publik	257.463	2.008.211.400.000	0,003	Public
Subtotal	**283.501**	**2.211.307.800.000**	**0,003**	**Subtotal**
Total Modal disetor	**10.012.124.501**	**12.223.148.800.000**	**100,000**	**Paid-In Capital**

2.3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk. memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan sesuai dengan Anggaran Dasar serta memastikan Bank menjalankan usahanya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan dan memberikan saran terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta fungsi lain yang ditetapkan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris juga memastikan bahwa Bank melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) di setiap jenjang organisasi. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

Dasar Hukum Pengangkatan

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk. mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan.
2. Anggaran Dasar Bank.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Edaran OJK terkait penerapan Tata Kelola Perusahaan, Peraturan Bank Indonesia (BI) dan Surat Edaran BI tentang Bank Umum.

(1) Pengangkatan dan Masa Jabatan

1) Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi serta telah disetujui oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sejalan dengan kriteria utama dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2.3 Board of Commissioners

The Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.'s has roles and duties to perform supervision in accordance with the Articles of Association while ensuring the Bank runs business in line with its objectives. The Board of Commissioners is required to implement supervision and give recommendation related to the implementation of task and responsibility by the Board of Directors and other functions specified in the Articles of Association as well as existing regulations. The Board of Commissioners also ensures the Bank implements Good Corporate Governance (GCG) principles in all levels of organization. In fulfilling its task and responsibility, the Board of Commissioners must act independently.

Legal Basis for Appointment

Legal basis which becomes the reference for setup and appointment of the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. refers to several regulations:

1. Laws of the Republic of Indonesia on Limited Liabilities and Banking.
2. Bank's Articles of Association
3. Regulation of the Financial Services Authority (OJK), Circular of OJK on Corporate Governance implementation, Bank Indonesia Regulation (PBI), and BI Circular on Commercial Banks.

(1) Appointment and Term of Office

1) Any proposal for the appointment and/or replacement of members of the Board of Commissioners has taken into consideration the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee and must be approved by the shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS) in line with the main criteria by considering the integrity, competence, professionalism and adequate financial reputation in accordance with the requirements of the Fit and Proper Test that have been stipulated by the Financial Services Authority (OJK).

2) Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar adalah efektif sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS Tahunan dan berakhir pada saat RUPS Tahunan ke-1 (pertama) setelah tanggal pengangkatan tersebut.
3) Anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS.
4) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
   a. Periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank;
   b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
   d. Meninggal dunia;
   e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
   f. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
   g. Terlibat kejahatan keuangan.

(2) Kriteria Dewan Komisaris

Kriteria dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris antara lain adalah:

1) Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Memenuhi persyaratan dimaksud dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
   a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
   b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
   c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
      a) Tidak pernah dinyatakan pailit.
      b) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
      c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

2) The term of office for member of the Board of Commissioners according to the Articles of Association shall be effective from the date specified in the Annual GMS and ending at the 1st (first) Annual GMS after the date of the appointment.
3) Member of the Board of Commissioners whose term of office has expired may be reappointed by the GMS.
4) Term of office of member of the Board of Commissioners can end if:
   a. The term of office period ends according to the Bank's Articles of Association;
   b. Resigning according to existing provisions;
   c. No longer meeting legal and regulatory requirements;
   d. Passed away
   e. Dismissed based on GMS resolution
   f. Stated bankrupt or put under the ability based on a court decision;
   g. Involved in financial crimes.

(2) Criteria of the Board of Commissioners

Criteria for the appointment of members of the Board of Commissioners are as follows:

1) Indonesian Citizen and/or Foreign Nationals who meet requirements as stated in existing regulations.
2) Meeting the requirements referred to in POJK No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, namely:
   a. Having good moral and integrity.
   b. Proficient in performing legal actions.
   c. Within 5 (five) years before appointment and during the term of office:
      a) Never been declared bankrupt.
      b) Never become member of the Board of Directors and/or of the Board of Commissioners who is found guilty of causing a company to be declared bankrupt.
      c) Never been punished for committing criminal offense that is detrimental to state finances and/or relating to the financial sector; and

d) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
   (a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
   (b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
   (c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.

3) Memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi yang dimaksud dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

Persyaratan Integritas meliputi:
a. Cakap melakukan perbuatan hukum.
b. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

d) Never been a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners who, during their term of office:
   (a) Did not hold an annual GMS;
   (b) Their accountability as member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners was not accepted by the GMS or did not provide accountability as a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to the GMS; and
   (c) Once caused a company which obtained license, approval or registration from the Financial Services Authority to fail to comply with the obligation to submit annual reports and/ or financial statements to the Financial Services Authority.

d. Having a commitment to comply with laws and regulations.
e. Having knowledge and/or expertise in the field required by the company.

3) Meeting the requirements of integrity, financial reputation and competence as referred to in POJK No. 27/POJK.03/2016 dated July 22, 2016 regarding the Assessment of Ability and Payables of Major Financial Service Institutions, and SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 dated September 13, 2016 on Capacity and Compliance Assessment for candidate of Controlling Shareholders, Member of Board of Directors, and Member of Board of Commissioners of the Bank.

Integrity requirements include:
a. Proficient in conducting legal action.
b. Having good character and morals, at least indicated by attitudes in compliance with applicable provisions, including never being convicted of a criminal offense within the last 20 (twenty) years before being nominated.

c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.
d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan
e. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
a. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
b. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Persyaratan kompetensi paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Bank. Untuk kandidat Komisaris yang merupakan Warga Negara Asing, memiliki pengetahuan tentang ekonomi, budaya dan bahasa Indonesia.

(3) Kriteria Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah sesuai dengan definisi POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 21, sebagai berikut:
a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya.
b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank.
d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

c. Having a commitment to comply with laws and regulations and support OJK policy.
d. Committed to the development of a sound Bank; and
e. Not included as a party prohibited to become a Principal Party.

Financial reputation requirements include:
a. Does not have non-performing credit and/or financing; and
b. Has never been declared bankrupt and/or has never been a shareholder, Insurance Company Controller who is not a shareholder, member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt within the last 5 (five) years before being nominated.

Competence requirements at least include knowledge and/or experience that support the Bank's management. Candidates of Commissioners who are Foreign Nationals should have knowledge on Indonesian economy, culture, and language.

(3) Criteria of Independent Commissioners

Criteria for Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is in accordance with the definition stipulated in POJK No. 55/ POJK.03/2016 on the Governance Implementation for Commercial Banks and POJK No. 33/ POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies Article 21, as follows:
a. Not a person who is employed or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Bank's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner in the following period.
b. Has no shares either directly or indirectly at the Bank.
c. Has no affiliation with the Bank, member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, or the Principal Shareholder of the Bank.
d. Has no direct or indirect business relationship related to the Bank's business activities.

Pernyataan tentang Independensi Komisaris Independen

Statement on Independency of Independent Commissioner

Aspek Independensi Aspect of Independency	Mahdi Mahmudy	Sutirta Budiman
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk. pada periode berikutnya. Not a person who is employed or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. within the last 6 (six) months, except for re-appointment as Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. in the following period.	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Has no shares, directly or indirectly, at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk., anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Not affiliated with PT Bank JTrust Indonesia Tbk., member of the Board of Commissioners, Board of Directors or major shareholder of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Has no direct or indirect business relationship relating to the activities of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	√	√

Sebagai bagian dalam melakukan proses uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), anggota Komisaris Independen telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi serta telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

As a part of the Fit and Proper Test process at the Financial Services Authority (OJK), member of Independent Commissioners has prepared and signed a Statement of Independency for submission to the Financial Services Authority (OJK).

(4) Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 27 Juni 2019, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah sesuai kriteria POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu:

- Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) orang, termasuk 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Komisaris Utama sedangkan anggota Direksi sebanyak 5 (lima) orang per 31 Desember 2019 sehingga telah memenuhi komposisi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan dan berdomisili di Indonesia sebanyak 2 (dua) orang, serta 2 (dua) orang berkewarganegaraan Jepang dimana 1 (satu) orang berdomisili di Indonesia.

(4) Total and Composition of the Board of Commissioners

Based on the resolutions of Annual GMS on 27 June 2019, total and composition of the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. according to the criteria of POJK No. 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning Governance Implementation for Commercial Banks:

- Total members of the Board of Commissioners is 4 (four) persons, including 2 (two) Independent Commissioners, 1 (one) Commissioner, and 1 (one) President Commissioner while members of the Board of Directors were 5 (five) persons per 31 December 2019 which have met the composition in line with existing regulations.
- Members of the Board of Commissioners with Indonesian citizenship and domiciled in Indonesia are 2 (two) persons, and 2 (two) Japanese citizens in which 1 (one) person is domiciled in Indonesia.

- Jumlah Komisaris Independen 2 (dua) dari 4 (empat) orang atau sebanyak 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bank telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK.
- Seluruh anggota Komisaris Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

* The number of Independent Commissioners is 2 (two) out of 4 (four) persons or 50% of the total members of the Board of Commissioners.

- Replacement and/or appointment of members of the Bank's Board of Commissioners has heeded recommendation from the Nomination and Remuneration Committee and received approval from the GMS and OJK.
- All members of the Board of Commissioners do not have family relations to the second degree with other members of the Board of Commissioners and/or Directors or Controlling Shareholders.
- All members of the Board of Commissioners have passed the Fit and Proper test from the Financial Services Authority (OJK).

Jumlah dan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah:

The number and composition of the Board of Commissioners are as follow:

No	Nama Name	Jabatan Position	Warganegara/ Domisili Citizenship/ Domicile	Tanggal Pengangkatan & Persetujuan Date of Appointment & Approval		Tanggal Pengangkatan Kembali Date of Reappointment RUPS | GMS
				RUPS | GMS	BI/OJK | BI/FSA	RUPS | GMS
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	Jepang/Jepang Japanese/Japan	- RUPSLB tgl. 20 November 2014 - RUPSLB tgl. 30 Desember 2014 - EGMS on November 20, 2014 - EGMS on December 30. 2014	14 April 2015 April 14, 2015	RUPS Tahunan tgl. 30 Maret 2017 Annual GMS on March 30, 2017
2.	Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	Jepang/Indonesia Japanese/ Indonesia	- RUPSLB tgl. 20 September 2018 - EGMS on September 20, 2018	12 Maret 2019 March 12, 2019	RUPS Tahunan tgl. 27 Juni 2019 Annual GMS on June 27, 2019
3.	Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia	- RUPS Tahunan tgl. 30 Juni 2016 - AGMS on June 30, 2016	28 September 2016 September 28, 2016	RUPS Tahunan tgl. 27 Juni 2019 Annual GMS on June 27, 2019
4.	Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia	- RUPS Tahunan tgl. 27 Juni 2019 - AGMS on June 27, 2019	16 Desember 2019 Desember 16, 2019	-

Profil anggota Dewan Komisaris

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Profile of members of the Board of Commissioners

Complete profile is in the Profile of Board of Commissioners/Directors/Executive Officers

(5) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertindak dan bertanggung jawab secara kolegial, dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai bidangnya masing-masing. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

(5) Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners acts and is responsible collegially, supported by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Renumeration Committee according to their respective duties. The Board of Commissioners perform their duties and responsibilities as follows:

1. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian dan independen.
3. Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi paling kurang melalui:
   a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
   b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Bank;
   c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
   d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
   e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
   f. Rencana strategis Bank;
   g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank;
   h. Menyetujui dan mengkaji secara berkala visi, misi dan nilai-nilai utama Bank.
4. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut serta memberikan nasihat kepada Direksi.
5. Dalam melakukan pengawasan dimaksud pada angka (3 dan 4) di atas, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank sesuai regulasi.
6. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, paling kurang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat.
7. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar (AD) berlaku pula baginya.

1. Each member of the Board of Commissioners cannot act solely, but must based on the decision by the Board of Commissioners.
2. The Board of Commissioners implements its duties and responsibilities with good intention, full responsibility, prudence and independence.
3. The Board of Commissioners shall ensure the implementation of Good Corporate Governance in each business activity of the Bank at all levels of the organization at the very least through:
   a. Implementation of task and responsibility of the Board of Commissioners and Directors;
   b. Completeness and task implementation of committees and work units which perform the Bank's internal control function;
   c. Implementation of compliance function, internal auditor, and external auditor;
   d. Implementation of risk management, including internal control system;
   e. Fund provisions to related parties and large fund provisions;
   f. The Bank's strategic planning;
   g. Transparency of financial and non-financial conditions of the Bank;
   h. Approving and reviewing regularly the vision, mission and values of the Bank.
4. The Board of Commissioners is tasked to supervise the performance of management, implementation of management in general and be responsible of the supervision, as well as advising the Board of Directors.
5. In conducting supervision as stated in the point (3 and 4) above, the Board of Commissioners direct, monitor, and evaluate the Bank's strategic policy implementation according to regulations.
6. The Board of Commissioners has guidelines and code of conduct which bind all members of the Board of Commissioners, at the very least stating the arrangement of work ethics, working hours and meetings.
7. In a case of only one member of the Board of Commissioners present as the others are absent, all tasks and authorities given to the President Commissioner or other Commissioners in the Articles of Association apply to the person.

8. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
   a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
   b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
9. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dimaksud pada angka (8), merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
10. Dewan Komisaris menyetujui dan melakukan pengawasan atas penerapan Strategi, Rencana Bisnis dan beberapa Kebijakan Bank sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain penetapan serta penerapan strategi Anti *Fraud,* prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), *Whistleblowing,* Tata Kelola Terintegrasi, Transaksi Afiliasi (*Related Party Transaction*), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan strategi Bank lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, melakukan pengawasan terhadap pemilihan dan penilaian calon anggota Direksi maupun Dewan Komisaris tanpa melakukan intervensi.
12. Menetapkan sistim Remunerasi dan Evaluasi Kinerja Direksi dan Komisaris.
13. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
14. Dewan Komisaris memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
   a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
   b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

8. The Board of Commissioners is not allowed to be involved in the decision-making of bank operations, except for:
   a. Provision of funds to related parties as stipulated in the provisions of the Financial Services Authority on Legal Lending Limit for Commercial Banks; and
   b. Other matters specified in the Articles of Association of the Bank or the prevailing regulations.
9. Decision-making by the Board of Commissioners as mentioned in point (8) is part of the supervisory task of Board of Commissioners which does not negate the responsibility of the Board of Directors on the implementation of the Bank's management.
10. The Board of Commissioners approves and performs supervision on the implementation of Strategy, Business Plan and several Bank Policies according to existing regulations, such as the setting and implementation of Anti Fraud Strategy, Anti-Money Laundering and Terrorism Funding Prevention procedure, Whistleblowing, Integrated Governance, Related Party Transaction, Legal Lending Limit (LLL), and other Bank strategies according to existing provisions.
11. Through the Nomination and Remuneration Committee performs supervision on the selection and assessment of candidates for the Board of Directors or Commissioners without intervening.
12. Setting system for Remuneration and Performance Evaluation of the Board of Directors and Commissioners.
13. The Board of Commissioners shall ensure that the Board of Directors has followed up all audit findings and recommendations from the internal audit unit of the Bank, external auditors, monitoring reports from the Financial Services Authority (OJK) and/or other authorities' supervisory result.
14. The Board of Commissioners shall inform the Financial Services Authority (OJK) no later than 7 (seven) working days as of the discovery of:
   a. Infringement of finance and banking regulations; and
   b. Circumstances or prediction of circumstances that may jeopardize the Bank's going concern.

15. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk paling kurang:
    a. Komite Audit;
    b. Komite Pemantau Risiko;
    c. Komite Nominasi dan Remunerasi.

16. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Komite yang telah dibentuk dalam menjalankan tugasnya secara efektif, dan melakukan evaluasi dan/atau penilaian terhadap kinerja komite dimaksud sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
17. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan dengan:
    a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun.
    b. Memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

18. Berdasarkan angka (17) tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama.
19. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank dengan:
    a. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk Strategi dan Kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank.
    b. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
20. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
21. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank dimaksud pada angka (20) apabila dapat membuktikan bahwa:

15. In order to support the effectiveness of the execution of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners must establish at least:
    a. Audit Committee;
    b. Risk Monitoring Committee;
    c. Nomination and Remuneration Committee.
16. The Board of Commissioners performs supervision to the established Committees to perform their duties effectively, and makes evaluation and assessment of the performance of the committees at least at every end of financial year.

17. The Board of Commissioners performs active supervision to Compliance Function by:
    a. Evaluating the implementation of Bank's Compliance Function at least 2 (twice) a year.
    b. Providing advice in increasing the quality of Bank's Compliance Function implementation.
18. Based on point (17), the Board of Commissioners submits advice in increasing the quality of Compliance Function to the President Director.

19. The Board of Commissioners is responsible for ensuring the implementation of Risk Management in line with the characteristic, complexity, and risk profile of the Bank by:
    a. Approving Risk Management policy including Risk Management Framework and Strategy set in accordance with the risk appetite and risk tolerance of the Bank.
    b. Evaluating Risk Management policy and Risk Management Strategy at least once a year or in a more often frequency in case of changes in factors that affect the Bank's business activities significantly.

20. Every member of the Board of Commissioners is jointly responsible for the Bank's losses caused by mistake or negligence of members of the Board of Commissioners in implementing duties.
21. Members of the Board of Commissioners cannot be accountable for the Bank's losses as stated in point (20) if they can prove that:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank;
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

22. Seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris wajib memimpin RUPS.
23. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh Direktur Utama.

(6) Piagam Dewan Komisaris (*BOC Charter*)

Piagam Dewan Komisaris (*BOC Charter*) dituangkan dalam bentuk "Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank J Trust Indonesia Tbk." yang telah disetujui oleh Direksi pada tanggal 12 Desember 2018. Selanjutnya Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris tersebut di atas, akan ditinjau secara berkala apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

(7) Rangkap Jabatan

Sesuai ketentuan dalam POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan/perusahaan keuangan baik Bank maupun bukan Bank, juga pada > 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, kecuali:

a) Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, atau
b) Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

a. The losses are not due to their mistake or negligence;
b. Have supervised with good deed, full responsibility, and prudence for the interest and in accordance with the objective of the Bank;
c. Do not have conflict of interest directly or indirectly on the management's actions which cause losses;
d. Have took actions to prevent the losses or continued losses.

22. A member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners must chair the GMS.
23. If all members of the Board of Commissioners are not present or fail to present due to any reasons which do not need to be proven to third parties, then the GMS will be chaired by President Director.

(6) Charter of the Board of Commissioners (BOC Charter)

Charter of the Board of Commissioners is stipulated in the "Guidelines for Code of Conduct of the Board of Commissioners of PT Bank J Trust Indonesia Tbk." approved by the Board of Directors on December 12, 2018. Further, the Guidelines for Code of Conduct of the Board of Commissioners will be reviewed periodically where deemed necessary by observing the applicable laws and regulations.

(7) Concurrent Position

In accordance with POJK on the Governance Implementation for Commercial Banks, Members of the Board of Commissioners are prohibited from assuming concurrent positions as members of the Board of Directors, Board of Commissioners or Executive Officers of financial institutions/financial companies, whether Bank or non-Bank, and on > 1 (one) non-financial institutions or non-financial companies, located at home or overseas, except:

a) To concurrently serve as a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners or Executive Officers at 1 (one) non-financial institution/company, or
b) To concurrently serve as a member of Board of Directors, Board of Commissioners or Executive Officers performing supervisory functions on 1 (one) non-Bank subsidiary which is controlled by the Bank.

c) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari Pemegang Saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank, dan/atau
d) Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi/lembaga nirlaba.

c) Non-Independent Commissioner performing functional duties of the Bank's Shareholders which has a legal entity in the Bank's business group, and/or
d) Member of the Board of Commissioners holding position at non-profit organizations/ institutions.

Pada periode tahun 2019, rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

In 2019, the dual position of the Board of Commissioners is as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Jabatan Lain Other Position
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	Representative Director and Senior Managing Director in charge of Corporate Management Dept. of J Trust Co., Ltd. Representative Director and Senior Managing Director in charge of Corporate Management Dept. of J Trust Co., Ltd.
2.	Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	• Representative Director (incumbent) JTrust Co.,Ltd. • President Commisioner (incumbent) PT JTrust Investment Indonesia. • President Commisioner (incumbent) PT JTrust Olympindo Multi Finance (JTrust Olympindo Finance). • Representative Director (incumbent) JTrust Co.,Ltd. • President Commisioner (incumbent) PT JTrust Investment Indonesia. • President Commisioner (incumbent) PT JTrust Olympindo Multi Finance (JTrust Olympindo Finance).
3.	Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak ada None
4.	Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak ada None

Rangkap jabatan oleh anggota Dewan Komisaris J Trust Bank telah sesuai dengan ketentuan POJK dimaksud, yaitu anggota Komisaris Non Independen melakukan rangkap jabatan untuk menjalankan tugas fungsional dari Pemegang Saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank.

Dual positions by members of the Board of Commissioners of J Trust Bank are in line with the POJK regulations: members of Non-Independent Commissioners hold dual positions to implement functional task from the Bank Shareholders in form of legal institutions in the Bank's business group.

(8) Hubungan Afiliasi

Anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait beberapa hal sebagai berikut:

- Anggota Dewan Komisaris memiliki saham yang mencapai ≥5% (lima persen) dari modal disetor pada Bank yang bersangkutan, Bank Lain, Lembaga keuangan bukan Bank, dan perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.

(8) Affiliation

Members of the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. have issued and signed a statement letter related to the following matters:

- Members of the Board of Commissioners have shares that reached ≥5% (five percent) of the paid up capital of the respective Bank, other banks, non-bank financial institutions, and other firms both in domestic and overseas.

Transparansi Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Transparency of Share Ownership of Members of the Board of Commissioners Achieving 5% or More of Paid-in Capital

No	Nama Name	J Trust Bank	Bank Lain Other Bank	Lembaga Keuangan Bukan Bank Non Bank Financial Institution	Perusahaan Lain Other Company	%
1.	Nobiru Adachi	-	-	-	-	-
2.	Nobuiku Chiba	-	-	-	-	-
3.	Mahdi Mahmudy	-	-	-	-	-
4.	Sutirta Budiman	-	-	-	-	-

- Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

- Financial Relationships and Family Relationships of Members of the Board of Commissioners with Other Members of Boards of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholder of the Bank

Transparansi Hubungan Keuangan

Financial Relation Transparency

No	Nama Name	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
1.	Nobiru Adachi		√		√	√	
2.	Nobuiku Chiba		√		√	√	
3.	Mahdi Mahmudy		√		√		√
4.	Sutirta Budiman		√		√		√

Transparansi Hubungan Keluarga

Family Relationship Transparency

No	Nama Name	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
1.	Nobiru Adachi		√		√		√
2.	Nobuiku Chiba		√		√		√
3.	Mahdi Mahmudy		√		√		√
4.	Sutirta Budiman		√		√		√

(9) Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

1) Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
3. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal

(9) Policy and Implementation of the Board of Commissioners Meeting

1) Board of Commissioners' Meeting Policy

1. The Board of Commissioners shall hold a meeting of the Board of Commissioners at least once in 2 (two) months and joint meetings with the Board of Directors at least once in 4 (four) months.
2. The Board of Commissioners shall schedule meetings for the following year before the end of the fiscal year.
3. At the scheduled meeting, the materials for the meeting shall be submitted to the participants no later than 5 (five) days prior to the meeting. In the event that the meeting

yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

4. Dewan Komisaris wajib menghadiri setidaknya 2 (dua) kali rapat, baik secara fisik atau melalui *video conference*.
5. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan/atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi keputusan musyawarah untuk mufakat.
6. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat/notulen, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir, disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pencantuman *dissenting opinions* (apabila ada).

2) Selama tahun 2019 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

a. **Rapat Bersama anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi** sebanyak 5 (lima) kali, dan Rapat antara anggota Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) kali yang dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK. Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Dewan Komisaris pada tahun 2019 berdasarkan 'periode menjabat' adalah:

is held out of the schedule, then the meeting materials shall be submitted to the participants at least before the meeting is held.

4. The Board of Commissioners shall attend at least 2 (two) meetings, either physically or through video conference.
5. The decision making of the Board of Commissioners' meeting shall be made based on deliberation for consensus, and/or trough voting in the event that no decision based on deliberation for consensus had been reached.
6. The results of the Board of Commissioners' meetings shall be set forth in minutes of meetings, signed by members of the Board of Commissioners attending the meeting, distributed to all members of the Board of Commissioners and properly documented, including inclusion of dissenting opinions (if any).

2) In 2019, the Board of Commissioners has held meetings as follows:

a. **Joint Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors** for 5 (five) times, and Meeting of the Board of Commissioners for 8 (eight) times, which attended by all members of the Board of Commissioners who have passed the Fit and Proper Test by OJK. The frequency of attendance and level of attendance of members of the Board of Commissioners in 2019 based on the 'term of office' are as follows:

Nama Name	**Periode Menjabat (Sejak Lulus F & P)** Term of Office (Since Passing F & P)	**Frekuensi Kehadiran** Frequency of Attendance	**Tingkat Kehadiran** Level of Attendance
Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom) Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors			
Nobiru Adachi (Komisaris Utama) | (President Commissioner)	01 Januari s/d 31 Desember 2019 January 01 to December 31, 2019	2/5	40%
Nobuiku Chiba (Komisaris) [1] | (Commissioner)	12 Maret s/d 31 Desember 2019 March 12 to December 31, 2019	5/5	100%
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) | (Independent Commissioner)	01 Januari s/d 31 Desember 2019 January 01 to December 31, 2019	4/5	80%
Kwik Ing Hie (Komisaris Independen) [2] | (Independent Commissioner)	01 Januari s/d 27 Juni 2019 January 01 to June 27, 2019	3/3	100%
Sutirta Budiman (Komisaris Independen) [3] (Independent Commissioner)	16 Desember s/d 31 Desember 2019 December 16 to December 31, 2019	-	0%

Nama Name	Periode Menjabat (Sejak Lulus F & P) Term of Office (Since Passing F & P)	Frekuensi Kehadiran Frequency of Attendance	Tingkat Kehadiran Level of Attendance
Rapat Antara Anggota Dewan Komisaris **Meeting of the Board of Commissioners**			
Nobiru Adachi (Komisaris Utama) | (President Commissioner)	01 Januari s/d 31 Desember 2019 January 01 to December 31, 2019	3/8	38%
Nobuiku Chiba (Komisaris) [1] | (Commissioner)	12 Maret s/d 31 Desember 2019 March 12 to December 31, 2019	8/8	100%
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) | Independent Commissioner)	01 Januari s/d 31 Desember 2019 January 01 to December 31, 2019	7/8	88%
Kwik Ing Hie (Komisaris Independen) [2] | (Independent Commissioner)	01 Januari s/d 27 Juni 2019 January 01 to June 27, 2019	3/3	100%
Sutirta Budiman (Komisaris Independen) [3] | (Independent Commissioner)	16 Desember s/d 31 Desember 2019 December 16 to December 31, 2019	-	0%

[1] Ditunjuk sebagai Komisaris berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 20 September 2018, dan efektif tanggal 12 Maret 2019 sebagai Komisaris sejak lulus *fit and proper test* oleh OJK
[2] Berakhirnya masa jabatan berdasarkan hasil keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2019
[3] Ditunjuk sebagai Komisaris Independen berdasarkan hasil keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2019, dan efektif tanggal 16 Desember 2019 sebagai Komisaris Independen sejak lulus *fit and proper test* oleh OJK

[1] Appointed as Commissioner based on EGMS resolutions on September 20, 2018, and effective on March 12, 2019 as Commissioner since passing the fit and proper test by OJK
[2] End of term of office based on AGMS resolutions on June 27, 2019
[3] Appointed as Independent Commissioner based on AGMS resolutions on June 27, 2019, and effective on December 16, 2019 as Independent Commissioner since passing the fit and proper test by OJK

Tabel kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah :

The table of meeting attendance of each member of the Board of Commissioners is as follow:

Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom)

Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors

Nama Komisaris Name of Commissioner	1 Tgl | Date 2/4/19	2 Tgl | Date 30/4/19	3 Tgl | Date 20/6/19	4 Tgl | Date 26/9/19	5 Tgl | Date 14/11/19	∑ Jumlah Kehadiran Total Attendance
Nobiru Adachi	√	√	X	X	X	2
Nobuiku Chiba	√	√	√	√	√	5
Mahdi Mahmudy	√	√	X	√	√	4
Kwik Ing Hie	√	√	√			3
Sutirta Budiman				-	-	-

Rapat Antara Anggota Dewan Komisaris

Meeting of the Board of Commissioners

Nama Komisaris Commissioners Name	1 Tgl | Date 2/4/19	2 Tgl | Date 30/4/19	3 Tgl | Date 20/6/19	4 Tgl | Date 6/8/19	5 Tgl | Date 4/9/19	6 Tgl | Date 26/9/19	7 Tgl | Date 14/11/19	8 Tgl | Date 5/12/19	∑ Jumlah Kehadiran Attendance
Nobiru Adachi	√	√	X	√	X	X	X	X	3
Nobuiku Chiba	√	√	√	√	√	√	√	√	8
Mahdi Mahmudy	√	√	X	√	√	√	√	√	7
Kwik Ing Hie	√	√	√						3
Sutirta Budiman				-	-	-	-	-	-

Keterangan | Note:
√ : Hadir | Present
X : Absen | Absent
- : Belum efektif | Not Effective

b. Agenda Rapat

b. Meeting Agenda

Tanggal Rapat Date of Meeting	Jenis Rapat Type of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda
2 April 2019 April 2, 2019	Radirkom Joint Meeting of BOC and BOD	- Kinerja keuangan Bank per 28 Februari 2019; dan prognosa per 31 Maret 2019 - NPL Bank di tahun 2019; serta inisiatif lainnya di tahun 2019 - Bank's financial performance per February 28, 2019; and prognosis per March 31, 2019 - Bank NPL in 2019; and other initiatives in 2019

Tanggal Rapat Date of Meeting	Jenis Rapat Type of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	- Menyambut Nobuiku Chiba sebagai Komisaris dan anggota baru Dewan Komisaris - Penunjukan anggota-anggota Komite di bawah Dewan Komisaris - Welcoming Nobuiku Chiba as Commissioner and new members of the Board of Commissioners - Appointing members of Committees under the Board of Commissioners
30 April 2019 April 30, 2019	Radirkom Joint Meeting of BOC and BOD	- Kinerja keuangan Bank per 31 Maret 2019; termasuk Laporan Publikasi per 31 Maret 2019 - Prognosa per April 2019 - NPL - Struktur Organisasi - Bank's financial performance per 31 March 2019; including Publication Report per March 31, 2019 - Prognosis per April 2019 - NPL - Organizational Structure
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	- Pergantian Kepala SKAI - Surat dari HBP - *Update* dari Pertemuan dengan OJK di minggu ini - Change of Internal Audit Unit Head - Letter from HBP - Update from Meeting with OJK this week
20 Juni 2019 June 20, 2019	Radirkom Joint Meeting of BOC and BOD	- Revisi RBB 2019 Revision of 2019 RBB
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	- Surat dari HBP - Temuan SKAI - Letter from HBP - Internal Audit Unit findings
6 Agustus 2019 August 6, 2019	Dewan Komisaris Board of Commissioners	- Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris terkait hasil *special audit* SKAI Report of the Audit Committee to the Board of Commissioners related to special audit result from the Internal Audit UnitI
4 September 2019 September 4, 2019	Dewan Komisaris Board of Commissioners	- Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris terkait hasil *special audit* SKAI - Forum Konsultasi Kredit dengan Dewan Komisaris - Report of the Audit Committee to the Board of Commissioners related to special audit result from the Internal Audit Unit - Credit Consultation Forum with the Board of Commissioners
26 September 2019 September 26, 2019	Radirkom Joint Meeting of BOC and BOD	- Kinerja keuangan Bank per 31 Agustus 2019; dan prognosa per September 2019 - Hasil prudential *meeting* dengan OJK terkait Tingkat Kesehatan Bank dan Revisi RBB 2019 - Bank's financial performance per 31 August 2019; and prognosis per September 2019 - Prudential meeting result with OJK related to the Bank's Health Level and Revision of 2019 RBB
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	- *Update* dari Komite Audit - *Update* dari Komite Pemantau Risiko - *Update* dari Komite Remunerasi dan Nominasi - Update from the Audit Committee - Update from the Risk Monitoring Committee - Update from the Remuneration and Nomination Committee
14 November 2019 November 14, 2019	Radirkom Joint Meeting of BOC and BOD	- RBB 2020-2025 RBB 2020-2025
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	- Hasil pembahasan tentang RBB 2020-2025 di Radirkom - *Update* dari Komite Audit - *Update* dari Komite Pemantau Risiko - Discussion result on RBB 2020-2025 in the Joint Meeting of BOC and BOD - Update from the Audit Committee - Update from the Risk Monitoring Committee
5 Desember 2019 Desember 5, 2019	Dewan Komisaris Board of Commissioners	- Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris Members of Committees under the Board of Commissioners

(10) Penilaian (*Assessment*) Kinerja Dewan Komisaris

- **Pihak yang melakukan penilaian**
  PT Bank JTrust Indonesia Tbk. melaksanakan proses evaluasi kinerja Dewan Komisaris untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

- **Prosedur pelaksanaan penilaian Kinerja**
  Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self-assessment* penerapan tata kelola Bank dimana Dewan Komisaris mengisi Kertas Kerja *Self-Assessment* untuk faktor penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang disampaikan Bank kepada OJK dengan menyampaikan Laporan hasil *self-assessment* penerapan tata kelola Bank sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

- **Kriteria yang digunakan**
  Kriteria/Indikator yang digunakan mencakup 3 (tiga) aspek *Governance*:

  a. Penilaian *Governance Structure*
     Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

  b. Penilaian *Governance Process*
     Menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

  c. Penilaian *Governance Outcome*
     Menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

(10) Assessment on the Performance of the Board of Commissioners

- **The party conducting the assessment**
  PT Bank JTrust Indonesia Tbk conducts an evaluation on the performance of the Board of Commissioners in order to assess the effectiveness of the implementation of duties of the Board of Commissioners.

- **Performance appraisal procedures**
  The evaluation on the performance of the Board of Commissioners is conducted through self-assessment on the implementation of the Bank's governance whereby the Board of Commissioners shall fill out the Self -Assessment Working Paper for factors of assessment on the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners to be submitted by the Bank to OJK, by submitting the self -assessment Report on the implementation of the Bank's governance as stipulated in the Circular Letter of the Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

- **Criteria**
  The criteria/indicator used for the assessment include 3 (three) aspects of Governance:

  a. Governance Structure Assessment
     Assessing the adequacy of the Bank's governance structure and infrastructure so that the process of applying Good Governance principles results in an outcome that is consistent with the expectations of the Bank's Stakeholders.

  b. Governance Process Assessment
     Assessing the effectiveness of the process in applying Governance principles supported by the adequacy of Bank Governance structure and infrastructure so as to produce an outcome that is in line with the expectations of the Bank's Stakeholders.

  c. Governance Outcome Assessment
     Assessing the quality of the outcome that meets the expectations of the Bank's Stakeholders as the result of the process in applying Good Governance principles supported by the adequacy of the Bank's structure and infrastructure.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan pada saat pertanggungjawaban laporan tahunan Bank dalam RUPS Tahunan kepada pemegang saham (*shareholder*) mayoritas, yaitu J Trust Co., Ltd., dimana RUPS Tahunan di tahun 2020 ini akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku 2019 berakhir. Sebagai gambaran untuk pelaksanaan RUPS pertanggungjawaban laporan tahun buku 2018 termasuk laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan merupakan laporan tahunan perusahaan tahun buku 2018 yang menerangkan tentang keadaan jalannya perusahaan dan hasil yang telah dicapai selama tahun 2018. Selanjutnya menyatakan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*vollediq acquit et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018.

The assessment on the performance of the Board of Commissioners is also conducted during the accountability of the Bank's annual report in the Annual GMS to the majority shareholders, namely J Trust Co., Ltd., whereby the AGMS in 2020 will be held within no later than 6 (six) months after the end of fiscal year 2019. As an illustration for the implementation of the GMS for the accountability of the 2018 fiscal year report, including the Supervisory report of the Board of Commissioners is the annual report of the company for the fiscal year 2018 explaining the state of the company and the results achieved during 2018. Furthermore, declared and granted full vollediq acquit et decharge to the members of the Board of Commissioners for the supervisory actions they have exercised during the fiscal year 2018.

(11) Program Pelatihan Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkewajiban untuk mengikuti program uji kompetensi/sertifikasi sesuai ketentuan dari regulator yaitu Sertifikasi Manajemen Risiko dan *Refreshmen*t. Hal ini selaras dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau *Refreshment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2019 anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain:

(11) Training Program for Members of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners must follow the certification/competence test in accordance with regulatory provisions: Risk Management Certification and Refreshment. This is in line with Bank Indonesia Regulation No 11/19/PBI/2009 on 4 June 2009 and the change in Bank Indonesia Regulation No 12/7/PBI/2010 on 19 April 2010 on Risk Management Certification for the Management and Officers of Commercial Banks. All members of the Board of Commissioners have Risk Management Certification and/or Refreshment according to existing regulations.

To hold training programs and improve the competence of all members of the Board of Commissioners in support of the implementation of duties and responsibilities, in 2019 members of the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. attended various training programs, workshops, conferences, seminars, among others:

Nama Name	Periode Menjabat (Sejak Lulus F & P) Term of Office (Since Passing F & P)	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar Training, Workshop, Conference, Seminar	Penyelenggara Organizer	Tempat & Waktu Time & Location
Nobiru Adachi (Komisaris Utama) | President Commissioner)	01 Januari s/d 31 Desember 2019 January 01 to December 31, 2019	Integrating Future Risk Into Credit Risk Management (Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Komisaris) Integrating Future Risk Into Credit Risk Management (Maintenance of Risk Management Certification Level 1 Commissioner)	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	30 April 2019 April 30, 2019 Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
Nobuiku Chiba (Komisaris) | Commissioner)	12 Maret s/d 31 Desember 2019 March 12 to December 31, 2019	-	-	-
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) Independent Commissioner)	01 Januari s/d 31 Desember 2019 January 01 to December 31, 2019	-	-	-
Sutirta Budiman (Komisaris Independen) Independent Commissioner)	16 Desember s/d 31 Desember 2019 December 16 to December 31, 2019	Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Komisaris Training of Risk Management Certification Level 1 Commissioner	Lentera Mulia Persada	12 Juli 2019 July 12, 2019 Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
		Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Komisaris Risk Management Certification Level 1 Commissioner	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	13 Juli 2019 July 13, 2019 Menara IBI, Jakarta Selatan
		Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Komisaris Training of Risk Management Certification Level 2 Commissioner	Lentera Mulia Persada	25 Juli 2019 July 25, 2019 Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
		Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Komisaris Risk Management Certification Level 2 Commissioner	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	27 Juli 2019 July 27, 2019 Menara IBI, Jakarta Selatan

(12) Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berperan aktif dalam melakukan fungsi pengawasan, memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada Rapat Dewan Komisaris dan Direksi maupun pembahasan dalam Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas dan fungsi oleh Dewan Komisaris. Adapun topik-topik pembahasan pada Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang menjadi pengawasan dan rekomendasi Dewan Komisaris selama tahun 2019 antara lain:

a. Memberikan evaluasi dan masukan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2020-2025
b. Memberikan evaluasi dan masukan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2019-2024 beserta revisinya dan realisasi RBB per triwulan.

(12) Supervision and Recommendation from the Board of Commissioners

The Board of Commissioners plays active role in supervision, by providing inputs and recommendations through discussions at Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the discussion in the Committees under the Board of Commissioners, which support in facilitating duties and functions of the Board of Commissioners. The topics of discussion at the Board of Commissioners and Board of Directors Meetings and recommendations of the Board of Commissioners in 2019 included:

a. Giving evaluation and input on the Bank Business Plan (RBB) 2020-2025
b. Giving evaluation and input on the Bank Business Plan (RBB) 2019-2024 along with its revision and realization of RBB on quarterly basis.

c. Memberikan evaluasi dan masukan atas kinerja keuangan Bank serta pencapaiannya jika dibandingkan target dan upaya Bank dalam menanggapi deviasi yang ada.
d. Memberikan evaluasi dan masukan atas Tingkat Kesehatan Bank serta upaya Bank untuk menyempurnakan peringkat yang ada.
e. Memberikan evaluasi dan masukan atas tanggapan serta komitmen Bank kepada regulator terkait dengan surat-surat pembinaan maupun terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan tahunan regulator atas Bank.
f. Memberikan masukan kepada Direksi tentang NPL sepanjang tahun 2019.
g. Memberikan evaluasi dan masukan atas hasil pertemuan berkala Bank dengan regulator (OJK).

(13) Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Bagi Dewan Komisaris

RUPS menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi (honorarium, *tantiem* serta penetapan fasilitas/*benefit*/tunjangan lainnya) bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

- Tahap 1
  Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan mengusulkan rekomendasi remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.
- Tahap 2
  Dewan Komisaris mengkaji usulan Komite Remunerasi dan Nominasi serta mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Tahap 3
  RUPS yang bertindak mewakili pemegang saham mayoritas menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

c. Giving evaluation and input on the Bank's financial performance and achievement compared to the target and the Bank's effort in responding to deviations.
d. Giving evaluation and input on the Bank's Soundness and its efforts to improve existing ratings.
e. Giving evaluation and input on the response and commitment of the Bank to the regulator regarding the development letters or related to the follow-up of the results from the regulator's annual audit of the Bank.
f. Giving input to the Board of Directors regarding NPL in 2019.
g. Giving evaluation and input on the regular meeting of the Bank with regulator (OJK).

(13) Remuneration Policy and Facilities for the Board of Commissioners

The GMS approved to grant the authority to the Board of Commissioners to determine the amount of Remuneration (honorarium, tantiem and establishment of facilities/benefits/other benefits) for the members of the Company's Board of Commissioners based on the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.

Procedure for the Determination of the Remuneration of the Board of Commissioners

- Stage 1
  The Remuneration and Nomination Committee prepares and recommends the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Board of Commissioners.
- Stage 2
  The Board of Commissioners reviews the proposals submitted by the Remuneration and Nomination Committee and proposes to the GMS to determine the remuneration of BOC based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
- Stage 3
  The GMS acts on behalf of the majority shareholders in approving the authority to Company's BOC to determine the amount of Remuneration for the members of BOC based on the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris

Structure of Remuneration and Facilities for BOC

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Ketentuan Terms
1	Honorarium/Gaji | Honorarium/Salary	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP Per policies of compensation, benefit & facilities of BOC, BOD & EVP
2	Tunjangan Rutin | Routine Allowance	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP Per policies of compensation, benefit & facilities of BOC, BOD & EVP

Besarnya Remunerasi Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris

Rincian pemberian remunerasi Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu:

The Amount of Remuneration of Each Member of the Board of Commissioners

Details of remuneration of the Board of Commissioners as of December 31, 2019 are as follows:

Nama Name	Honararium Honararium	Tunjangan Rutin *) Routine Allowance	Tantiem	Santunan Benefits	Jumlah Remunerasi Per Orang Per Tahun Total Remuneration person/year	
					> Rp.2 miliar > IDR2 billion	≤ Rp.2 miliar ≤ IDR2 billion
Nobiru Adachi	-	-	-	-	-	-
Nobuiku Chiba			-	-	-	
Mahdi Mahmudy			-	-	-	
Sutirta Budiman			-	-	-	
Total (dalam jutaan Rp.) (in million IDR)	Rp.2.279	Rp.1.143	Rp.-	Rp.-	-	-

*) Tunjangan Rutin meliputi: Tunjangan BBM & Supir, Tunjangan Handphone, Tunjangan Hari Raya (THR), Tunjangan Cuti, Tunjangan Pajak PPh 21
Routine Allowance covers: Fuel Support & Drivers, Mobile Benefits, Holiday Allowances (THR), Leave Allowances, Income Tax Benefit)

2.4. Direksi

Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. memiliki tanggung jawab penuh secara kolegial terhadap kegiatan operasional, pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Bank yang menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis dan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank (*prudential banking principle*) untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan usaha, mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, baik yang diterbitkan oleh Regulator perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan/atau otoritas berwenang lainnya. Direksi mempertanggungjawabkan tindakan mereka dalam memimpin Bank kepada pemegang Saham di dalam RUPS. Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Bank yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Board of Directors

The Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has a full responsibility collegially for the Bank's operational activities, business development and risk management in a professional manner by upholding prudential banking principles which uphold professional attitude, objective, strategic thinking and prudential banking principle in order to enhance added value to stakeholders and ensure business going concern, representing the Bank inside and outside of the court of justice, in accordance with the provisions of the Articles of Association in accordance to the Articles of Association and always guided by the prevailing laws and regulations issued by banking regulators such as the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, the Indonesia Stock Exchange (IDX), the Deposit Insurance Corporation (LPS) and/or other authorities. The Board of Directors is accountable of their actions in leading the Bank to Shareholders in the GMS. Shareholders/Capital Owners are not permitted to interfere with the operations of the Bank which is the responsibility of the Board of Directors in accordance with the Bank's Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

Dalam menjalankan kegiatan usaha Bank, Direksi dapat menggunakan jasa penasehat profesional dan atau membentuk komite-komite sesuai dengan prosedur yang digunakan.

Dasar Hukum Pengangkatan

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan.
2. Anggaran Dasar Bank.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Edaran OJK terkait penerapan Tata Kelola Perusahaan, Peraturan Bank Indonesia (BI) dan Surat Edaran BI tentang Bank Umum.

(1) Pengangkatan dan Masa Jabatan

1) Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi serta telah disetujui oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sejalan dengan kriteria utama yang mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2) Masa jabatan seorang anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar adalah efektif sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS Tahunan dan berakhir pada saat RUPS Tahunan ke-1 (pertama) setelah tanggal pengangkatan tersebut.
3) Anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS.
4) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
   a. Periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank;
   b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
   d. Meninggal dunia;
   e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

In conducting the Bank's business activities, the Board of Directors may use independent professional advisory services and/or establish committees in accordance with the procedures used.

Legal Basis for Appointment

Legal basis which becomes reference of the setup and appointment of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. refers to several regulations, such as:

1. Law of the Republic of Indonesia on Limited Liabilities and Banking.
2. The Bank's Articles of Association.
3. Regulations of Financial Services Authority (OJK), OJK Circulars related to the implementation of Corporate Governance, Bank Indonesia (BI) Regulations and BI Circulars on Commercial Banks.

(1) Appointment and Term of Office

1) Any proposal for appointment and/or replacement of members of the Board of Directors should take into consideration the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee and must be approved by the shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS) in line with the main criteria such as integrity, competence, professionalism and financial reputation in accordance with the requirements of the Fit and Proper Test as decided by the Financial Services Authority (OJK).
2) The term of office of a member of the Board of Directors in accordance with the Articles of Association is effective from the date specified in the Annual GMS and ends at the 1st (first) Annual GMS after the date of the appointment.
3) Member of the Board of Directors whose term of office has expired may be reappointed by the GMS.
4) Term of office of a member of the Board of Directors ends if:
   a. The term of office ends according to the Bank's Articles of Association;
   b. Resigning based on existing regulations;
   c. No longer fulfilling regulatory requirements;
   d. Deceased;
   e. Dismissed based on GMS resolutions.

(2) Kriteria Direksi

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi antara lain adalah:

1. Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kandidat Direktur Kepatuhan dan Direktur Sumber Daya Manusia harus merupakan Warga Negara Indonesia. Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia.
2. Berdomisili di Indonesia.
3. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan (antara lain namun tidak terbatas pada bidang perkreditan, pendanaan, treasuri, manajemen risiko, keuangan, dan lain-lain) sebagai Pejabat Eksekutif.
4. Memenuhi persyaratan dimaksud dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
   a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
   b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
   c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
      a) Tidak pernah dinyatakan pailit.
      b) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
      c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
      d) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
         (a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
         (b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

(2) Criteria of the Board of Directors

Criteria for the selection of members of the Board of Directors are:

1. Indonesian Citizen and/or Foreign Nationals who meet requirements as per existing regulations. Candidate of Compliance Director and Human Resources Directors must be Indonesian Citizen. Majority of members of the Board of Directors must have Indonesian citizenship.
2. Domiciled in Indonesia.
3. Majority of members of the Board of Directors must have at least 5 (five) years experience in banking operations (including but not limited to credit, funding, treasury, risk management, finance, and others) as Executive Officers.
4. Meeting the requirements referred to in POJK No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, namely:
   a. Have good moral and integrity.
   b. Proficient in performing legal actions.
   c. Within 5 (five) years prior to the appointment and during the term of office:
      a) Never been declared bankrupt.
      b) Never become a member of the Board of Directors and/ or a member of the Board of Commissioners who is found guilty of causing a company to be declared bankrupt.
      c). Never been punished for committing a criminal offense that is detrimental to state finances and/or relating to the financial sector; and
      d) Never been a member of the Board of Directors and/ or members of the Board of Commissioners who, during their term of office:
         (a) Did not hold an annual GMS;
         (b) Their accountability as a member of the Board of Directors and/ or a member of the Board of Commissioners once was not accepted by the GMS or once was unaccountable as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS; and

(c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.

5. Memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi yang dimaksud dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

Persyaratan Integritas meliputi:

a. Cakap melakukan perbuatan hukum.

b. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.

d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan

e. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

Persyaratan reputasi keuangan meliputi:

a. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan

b. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan

(c) Once caused a company obtaining license, approval or registration from the Financial Services Authority to fail to comply with the obligation to submit annual reports and/or financial statements to the Financial Services Authority.

d. Have a commitment to comply with laws and regulations.

e. Possessing knowledge and/or expertise in the field required by the Company.

5. Meeting the requirements of integrity, financial reputation and competence referred to in POJK No. 27/POJK.03/2016 dated July 22, 2016 on the Assessment of Ability and Fit for Main Parties of Financial Services Institutions, and SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 dated September 13, 2016 on Capacity and Compliance Assessment for Potential Controlling Shareholder, Candidate Member of Board of Directors, and Candidate Member of Board of Commissioners of the Bank.

Integrity Requirements include:

a. Proficient in performing legal actions.

b. Having good character and morals, at least indicated by complying applicable provisions, including never being convicted for making criminal offense within the last 20 (twenty) years prior to being nominated.

c. Having commitment to comply with laws and regulations and support OJK policy.

d. Committed to the development of a sound Bank; and

e. Not included as a party that is prohibited to become a Principal Party.

Financial reputation requirements include:

a. Does not have non-performing credit and/or financing; and

b. Never been declared bankrupt and/or never become a shareholder or Controller of Insurance Company who is not a shareholder, member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared

suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Persyaratan kompetensi paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Bank.

(3) Status Independensi Direksi

a. Seluruh anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. tidak saling memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak tidak independen.
b. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.
c. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

(4) Jumlah dan Komposisi Direksi

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 27 Juni 2019, jumlah dan komposisi Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah sesuai kriteria POJK Nomor 55/POJK.03/ 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu:

√ Jumlah anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang yaitu sebanyak 5 (lima) orang per 31 Desember 2019, termasuk 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, dan 3 (tiga) orang Direktur.
√ Mayoritas anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia, yaitu 3 (tiga) dari 5 (lima) orang anggota Direksi.
√ Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, dengan telah dibuktikan bagi anggota Direksi yang berkewarganegaraan asing telah memiliki KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) & IMTA (izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) dari lembaga terkait.
√ Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi Bank telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK.

bankrupt within the last 5 (five) years before being nominated.

Competence requirements at least include knowledge and/or experience that support the management of the Bank.

(3) Independency of the Board of Directors

a. All members of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. do not have financial, management, share ownership and/or family relationship up to the second degree with other members of the Board of Directors and/or with members of the Board of Commissioners and/ or Controlling Shareholders of the Bank that may affect their ability to act not independently.
b. Members of the Board of Directors, either individually or collectively, do not own shares exceeding 25% (twenty-five percent) of paid up capital in other companies.
c) Members of the Board of Directors do not grant the general authority to any other party resulting in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.

(4) Total and Composition of the Board of Directors

Referring to the Annual GMS resolutions on June 27, 2019, total and composition of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is in line with the criteria of POJK No. 55/ POJK.03/2016 dated 7 December 2016 on the Governance Implementation for Commercial Banks:

√ Members of the Board of Directors are more than 3 (three) persons, of 5 (five) persons per 31 December 2019, including 1 (one) President Director, 1 (one) Compliance Director, and 3 (three) Directors.
√ Majority of members of the Board of Directors are Indonesian Citizens: 3 (three) out of 5 (five) members of the Board of Directors.
√ All members of the Board of Directors are domiciled in Indonesia, as proven by foreign national members of the Board of Directors with KITAS (Limited Stay Permit Card) & IMTA (Permit to Hire Foreign Workers) from related institutions.
√ Replacement and/or appointment of members of the Board of Directors of the Bank have taken recommendation from the Nomination and Remuneration Committee and received approval from GMS and OJK.

√ Seluruh anggota Direksi Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali.

√ Seluruh anggota Direksi Bank telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

√ All members of the Board of Directors of the Bank do not have family relationship up to the second degree with other members of the Board of Directors and/or with members of the Board of Commissioners and/ or Controlling Shareholders.

√ All members of the Board of Directors of the Bank have passed the Fit and Proper Test from the Financial Services Authority (OJK).

Jumlah dan susunan anggota Direksi tersebut adalah:

The number and composition of the members of the Board of Directors are as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Warganegara/ Domisili Citizenship/ Domicile	Tanggal Pengangkatan & Persetujuan Date of Appointment & Approval		Tanggal Pengangkatan Kembali Reappointment
				RUPS | GMS	BI/OJK | BI/FSA	RUPS | GMS
1.	Ritsuo Fukadai	Direktur Utama President Director	Jepang/Indonesia Japan/Indonesia	RUPST tgl. 27 Juni 2019 GMS on June 27, 2019	07 November 2019 November 07, 2019	-
2.	Shigeyoshi Asano*)	Komisaris Direktur Utama Wakil Direktur Utama Commissioner President Director Vice President Director	Jepang/Indonesia Japan/Indonesia	- RUPST tgl. 30 Juni 2016 - RUPST tgl. 20 September 2018 - RUPST tgl. 27 Juni 2019 - GMS on June 30, 2016 - AGMS on September 20, 2018 - AGMS on June 27, 2019	27 Oktober 2016 21 Februari 2019 October 27, 2016 February 21, 2019	- - -
3.	Felix Istyono Hartadi Tiono	Direktur Director	Indonesia	RUPSLB LPS tgl. 26 Februari 2014 EGMS LPS on February 26, 2014	22 April 2014 April 22, 2014	RUPST tgl. 30 Maret 2017 AGMS on March 30, 2017
4.	Helmi Arief Hidayat	Direktur Director	Indonesia	RUPST tgl. 30 Juni 2016 AGMS on June 30, 2016	5 September 2016 September 5, 2016	RUPST tgl. 27 Juni 2019 AGMS on June 27, 2019
5	Cho Won June	Direktur Director	Korea/Indonesia	RUPST tgl. 27Juni 2019 AGMS on June 27, 2019	7 November 2019 November 7, 2019	-
6.	Bijono Waliman	Direktur Director	Indonesia	RUPST tgl. 27Juni 2019 AGMS on June 27, 2019	7 November 2019 November 7, 2019	-
7.	Rayendra Prasetya **)	Direktur Director	Indonesia	RUPST tgl. 27 Juni 2019 AGMS on June 27, 2019	-	-

*) Tanggal 12 November 2019 mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Direktur Utama.
**) Tanggal 28 November 2019 mengajukan surat pengunduran diri dalam proses Fit & Proper Test di OJK dan proses pengangkatan sebagai anggota Direksi Perseroan.

*) On November 12, 2019 submitted resignation as Vice President Director.
**) On November 28, 2019 submitted resignation in a Fit & Proper Test in OJK and appointment process as members of the Company's Board of Directors.

Profil anggota Direksi

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Profile of members of the Board of Directors

Complete profile is stated in the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

(5) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pada periode per 31 Desember 2019 jumlah anggota Direksi terdiri dari 5 (lima) orang yang di antara salah satunya sebagai Direktur Utama dan 1 (satu) orang sebagai Direktur Kepatuhan, yang secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada Bank sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
2. Direksi memiliki itikad baik dan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Direksi telah menjalankan prinsip-prinsip/asas Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
4. Direksi telah menindaklanjuti semua temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip/asas Tata Kelola yang baik, Direksi telah membentuk komite dibawahnya seperti ALCO, Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Produk & Aktivitas Baru, dan Komite *Reward & Punishment*;
6. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan;
7. Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai tentang kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
8. Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, pemegang saham dan pihak regulator;
9. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, paling kurang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat;
10. Direksi telah menyusun rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi (*corporate plan*) dan rencana bisnis (*business plan*). Penyampaian rencana korporasi dan penyusunan/penyampaian rencana bisnis berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

(5) Duties and Responsibilities of the Board of Directors

As of December 31, 2019, members of the Board of Directors consisted of 5 (five) persons, including President Director and 1 (one) person as Compliance Director, jointly carrying out the duties and responsibilities as follows:

1. The Board of Directors is fully responsible in performing their duties for the interest of the Company in achieving its objectives and goals;
2. The Board of Directors shall have good faith and act in accordance with their authority and responsibility in performing their duties as stipulated in the Company's Articles of Association in accordance with the prevailing laws and regulations;
3. The Board of Directors has implemented the principles of Good Governance in every Bank's business activities at all levels of the organization;
4. The Board of Directors has followed up all audit findings and recommendations from the Internal Audit Unit (SKAI), external auditors, the results of supervision by the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and/or other authorities;
5. In order to implement the principles of Good Governance, the Board of Directors has established committees, such as ALCO, Risk Management Committee, Credit Committee, Information Technology Steering Committee, New Product & Activity Committee, and Reward & Punishment Committee;
6. The Board of Directors is responsible for its duties to shareholders through the Annual GMS;
7. The Board of Directors has disclosed the Bank's strategic employment policies to the employees;
8. The Board of Directors provides accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners, shareholders and regulators;
9. The Board of Directors has binding guidelines and work rules for each member of the Board of Directors, at least stipulating the work ethics, working time and meeting arrangements;
10. The Board of Directors has formulated a strategic plan in the form of corporate plan and business plan. Submission of corporate plan and the preparation/submission of business plan refers to the provisions of the Financial Services Authority (FSA);

11. Direksi menyelenggarakan RUPS berdasarkan permintaan pemegang saham yang mempunyai hak suara yang sah;
12. Direksi membuat dan memelihara daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus yang berisi Daftar Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Direksi dan Komisaris termasuk keluarga mereka dalam Bank dan di perusahaan lain (bila ada);
13. Menetapkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Budaya Kerja Bank;
14. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan serta rencana lain yang berhubungan dengan usaha Bank. Rencana tersebut disampaikan kepada Komisaris dan Pemegang Saham untuk disahkan dalam RUPS dan dikomunikasikan kepada segenap pegawai Bank.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya (sesuai *job description* pada Struktur Organisasi Bank), sebagai berikut:

1) Ritsuo Fukadai - Direktur Utama (*President Director*)

1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS Perseroan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mensupervisi Direktorat-Direktorat dan Divisi-Divisi di bawah supervisi langsung President Director sesuai bidangnya masing-masing dalam mencapai tujuan Perseroan, termasuk memastikan dilaksanakannya rencana strategis (Rencana Bisnis Bank) dan pencapaian target kinerjanya, pelaksanaan kepatuhan pada regulasi, peraturan perundangan-undangan, dan ketentuan internal Perseroan.
3. Mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan di seluruh bidang untuk mencapai tujuan dan kelangsungan usaha Perseroan.
4. Mengembangkan dan memperkuat *image* Perseroan dan membangun *relationship* dengan bank-bank koresponden, lembaga keuangan,

11. The Board of Directors holds the GMS upon request by shareholders with valid voting rights;
12. The Board of Directors creates and maintains a list of Shareholders and a Special Register containing the Share Ownership List owned by the Board of Directors and Commissioners including their families within the Bank and in other companies (if any);
13. Setting Vision, Mission, and Values of Work Culture of the Bank;
14. Making work plan and annual budget and other plans related to the Bank's business. The plans are submitted to the Commissioners and Shareholders to be ratified in the GMS and communicated to all Bank employees.

Scope of Work and Responsibility of Each Director

Each member of the Board of Directors implements their duty according to their respective task and responsibility (according to job description in the Bank's Organizational Structure), as follows:

1) Ritsuo Fukadai - President Director

1. To lead and coordinate the implementation of the Company's management as stipulated in the Articles of Association and GMS resolutions of the Company based on applicable regulations.
2. To lead, coordinate, direct and supervise the Directorates and Divisions in their respective fields under direct supervision from the President Director in order to achieve the Company's objectives, including ensuring the implementation of strategic plan (the Bank's Business Plan) and the achievement of its performance targets, compliance to rules, regulations, and internal regulations of the Company.
3. Directing change processes deemed necessary across the field to achieve the objectives and business going concern of the Company.
4. To develop and strengthen the image of the Company and build relationship with correspondent banks, financial institutions, clients, business

nasabah, institusi-institusi bisnis, otoritas keuangan, dan seluruh *stakeholder* Perseroan.

5. Mengambil tindakan untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dan untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, untuk mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
6. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Direktur-Direktur Bidang (Direktorat-Direktorat) dalam mengarahkan dan membina jaringan distribusi (*Branch*) dalam pencapaian target kinerja Perseroan.
7. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi Perseroan yang memadai di seluruh bidang kerja sesuai dengan tujuan Perseroan, dan memastikan tercapainya aliansi lintas bidang Direktorat dan pemanfaatan seluruh sumber daya Perseroan.
8. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja pada bidang langsung di bawah President Director (*EVP Treasury & Financial Institution, EVP Business, EVP Human Capital & General Services, EVP Risk Management, EVP Credit Risk Reviewer & Special Asset Management, Internal Audit Division, President Office Division, Japan & Korea Desk Division, Retail Banking Division, Marketing & Promotion Division*).
9. Melaksanakan supervisi dan koordinasi Direktorat-Direktorat dalam menerapkan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai (*performance management system* dan *value based management*) yang efektif.
10. Memimpin dan mengarahkan Direktorat-Direktorat dalam kebijakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM).

institutions, financial authorities and all stakeholders of the Company.

5. To take action for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company, and for certain acts of its own responsibility, to appoint one or more as representative or proxy, by granting them power for certain acts as governed by the power of attorney.
6. To lead and coordinate the implementation of the activities of the Field Directors (Directorates) in directing and fostering the distribution network (Branch) in achieving the Company's performance targets.
7. To ensure the development and implementation of an adequate Company's strategy in all areas of work in accordance with the objectives of the Company, and to ensure the achievement of cross-sectoral alliances of Directorate and utilization of all Company's resources.
8. To lead, direct the preparation and supervise the implementation of work plans in sectors directly under the President Director (EVP Treasury & Financial Institution, EVP Business, EVP Human Capital & General Services, EVP Risk Management, EVP Credit Risk Reviewer & Special Asset Management, Internal Audit Division, President Office Division, Japan & Korea Desk Division, Retail Banking Division, Marketing & Promotion Division).
9. To supervise and coordinate the Directorates in implementing the development of the Company's resources and to ensure the implementation of competence-based employee development, effective performance management system and value based management.
10. To lead and direct the Directorates regarding the development policy for Human Resources.

11. Memimpin pengembangan inisiatif baru untuk produk-produk dan jasa perbankan yang belum ada di bank baik di bidang *lending, funding* maupun *transactional based business* (*Cards, Fee Based Income*), sesuai dengan tujuan Perseroan dalam rangka mencapai tujuan pemenuhan bisnis seperti yang digariskan di Rencana Bisnis Bank.
12. Sebagai Ketua BCC (*Business Command Center*)
    a. Menetapkan Bank dalam kondisi krisis likuiditas dan mengaktifkan fungsi BCC serta menyusun strategi penanganan yang segera, sistimatis, pragmatis dan terintegrasi.
    b. Memutuskan strategi penang-gulangan kesulitan atau krisis likuiditas, antara lain menetapkan metode, jumlah dan *pricing* atas pendanaan yang diperlukan, serta hal-hal terkait lainnya.
    c. Memastikan kemungkinan bantuan yang dapat diperoleh dari Bank Indonesia.
    d. Menugaskan Direktur dan atau Kepala divisi tertentu untuk menjalankan tugas sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kondisi krisis atau kesulitan likuiditas.
    e. Menetapkan Bank telah kembali berada dalam kondisi normal, dan team BCC.

2) Felix Istyono Hartadi Tiono - Direktur *Compliance & Corporate Legal*

1. Kebijakan dan Strategi
    a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi yang memadai dalam bidang *Compliance & Corporate Legal* sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
    b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Compliance & Corporate Legal* sesuai dengan rencana dan tujuan Perseroan.

11. To lead new initiatives development for banking products and services that do not exist in the Bank in lending, funding, or transactional based business (Cards, Fee Based Income), according to the Company's objective in fulfilling business as outlined in the Bank's Business Plan.
12. As Head of BCC (Business Command Center)
    a. Determining the Bank in a liquidity crisis and activating the function of BCC and developing an immediate, systematic, pragmatic and integrated management strategy.
    b. Deciding the strategy to overcome the adversity or liquidity crisis, among others by determining the method, amount and pricing of the required funding, as well as other related matters.
    c. Ensuring any possible assistance that can be obtained from Bank Indonesia.
    d. Assigning the Director and/or the Head of a particular division to perform the duties as an effort to prevent and overcome crisis conditions or liquidity diffculties.
    e. Determining that the Bank has returned to normal condition, and BCC team.

2) Felix Istyono Hartadi Tiono - Compliance & Corporate Legal Director

1. Policy and Strategy
    a. Ensuring the development and implementation of appropriate strategies in Risk, Legal, & Compliance in accordance with the objectives of the Company and utilizing all of the Company's resources.
    b. To lead and direct the preparation and implementation of policies in all areas under the Directorate of Compliance & Corporate Legal in accordance with the Company's plans and objectives.

c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat *Compliance & Corporate Legal* dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Utama dan Direktorat-Direktorat bisnis, dengan menjaga tandar kepatuhan, *good corporate governance*, meminimalkan risiko-risiko terkait hukum, kebijakan risiko operasional dan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan produktif.

d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Compliance & Corporate Legal*, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai (*performance management system* dan *value based management*) yang efektif.

2. Kegiatan Operasional

a. Memimpin, mengarahkan, dan melaksanakan koordinasi serta supervisi penerapan kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan kegiatan bidang *Compliance & Corporate Legal* untuk mendukung Direktorat-Direktorat bisnis menghasilkan *benefit* bagi Perseroan, dan memastikan Perseroan tetap menjaga kepatuhan dan memenuhi seluruh peraturan, regulasi, dan undang-undang yang berlaku, kedudukan hukum yang kuat, dan penyediaan sumber daya manusia yang memadai serta pelaksanaan kebijakan risiko.

b. Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan seluruh kegiatan bidang *Compliance & Corporate Legal* mengimplementasikan dan memenuhi kaidah-kaidah,

c. To lead, direct the preparation and supervision of the implementation of the work plan of the Compliance & Corporate Legal Directorate and all sectors under it to support the implementation of the functions, duties and responsibilities of the President Director and the Business Directorates, by maintaining compliance standards, good corporate governance, minimizing legal risks, operational risk policies and the availability of competent and productive human resources.

d. Carrying out the development of the Company's resources in all work units under the Compliance & Corporate Legal Directorate, and ensuring the implementation of competence-based employee development, effective performance management system and value based management.

2. Operational Activities

a. To lead, direct, coordinate and supervise the implementation of policies and strategies related to the activities of Compliance & Corporate Legal to support the business Directorates to generate benefits for the Company, and to ensure the Company maintaining compliance and meeting all applicable rules, regulations, and laws, strong legal standing, and the provision of adequate human resources and the implementation of risk policies.

b. To lead and direct necessary change processes, and to ensure that all Compliance & Corporate Legal activities implement and comply with the latest principles, regulations, laws and best practice standards, including

regulasi, peraturan perundang-undangan, dan standar *best practice* terkini, termasuk ketentuan internal Perseroan.

c. Memimpin dan mengarahkan pengembangan dan penerapan kebijakan sistem perekrutan, penempatan, rotasi dan pengembangan pegawai.

d. Memastikan ketersediaan manajemen *human capital* yang memadai (antara lain standar jabatan, kalibrasi *job grading*, sistem remunerasi dan kompensasi) dan menerapkan standar *best practice* yang sesuai dengan kondisi Perseroan.

3. Sumber Daya Manusia
Memimpin, mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bawah koordinasi dan supervisi Direktorat *Compliance & Corporate Legal*.

3) Bijono Waliman - Direktur Operasi & Administrasi Kredit (*Operation & Credit Administration Director*)

1. Kebijakan dan Strategi
   a. Memimpin, mengarahkan dan melaksanakan supervisi pelaksanaan rencana kerja dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat Operation & Credit Administration.
   b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat operation & credit administration dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai, yang efektif dan efisien.

the internal requirements of the Company.

c. To lead and direct the development and implementation of policies for recruitment, placement, rotation and employee development systems.

d. Ensuring the availability of adequate human capital management (including standard position, job grading calibration, remuneration system and compensation) and applying best practice standards in accordance with the conditions of the Company.

3. Human Resources
To lead, coordinate and direct the policies and development of Human Resources under the coordination and supervision of the Directorate of Compliance & Corporate Legal.

3) Bijono Waliman - Operation & Credit Administration Director

1. Policy and Strategy
   a. To lead, direct and supervise the implementation of the work plan and shared targets related to other Directorates for the interests and objectives of the Company in utilizing the competence of the Operation & Credit Administration Directorate's resources.
   b. Carrying out the development of the Company's resources in all work units under the Operation & Credit Administration Directorate and ensuring the implementation of effective and efficient competence-based human resources development, performance management system, and value based management.

2. Kegiatan Operasional
   a. Memimpin, melaksanakan koordinasi dan supervisi penerapan kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan kegiatan operasional Direktorat *Operation & Credit Administration* dan bidang-bidang di bawahnya.
   b. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab seluruh bidang di bawah Direktorat dalam mendukung fungsi, tugas, tanggung jawab Direktur *Operation & Credit Administration*, dan memastikan Perseroan mencapai standar *best practices* layanan yang berkualitas.
   c. Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan seluruh kegiatan operasional bidang di bawah Direktorat *Operation & Credit Administration* mengimplementasikan seluruh rencana strategis yang ditetapkan secara tepat guna dan tepat sasaran.
   d. Melaksanakan supervisi dan memastikan seluruh unit di bawah Direktorat *Operation & Credit Administration* mematuhi ketentuan regulasi, kebijakan dan ketentuan internal Perseroan.
   e. Memimpin, mengarahkan dan melaksanakan pengelolaan hubungan nasabah khususnya di *Business Development* yang terkait dengan cakupan tugas dan tanggung jawab Direktorat *Operation & Credit Administration* dan unit kerja di bawahnya.
   f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama, Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketentuan internal, regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Operational Activities
   a. To lead, coordinate and supervise the implementation of policies and strategies related to the operational activities of the Directorate of Operation & Credit Administration and the areas under it.
   b. To lead, direct and coordinate the implementation of the functions, duties and responsibilities of all fields under the Directorate in supporting the functions, duties, responsibilities of the Operation & Credit Administration Director, and to ensure the Company achieve best practices standards quality.
   c. To lead and direct the necessary change processes, and to ensure that all operational activities of the field under the Directorate of Operation & Credit Administration implement all strategic plans appropriately and right on target.
   d. To carry out supervision and ensure all units under the Operation & Credit Administration Directorate comply with the Company's regulatory requirements, internal policies and regulations.
   e. To lead, direct and execute customer relationship management especially in Business Development related to the scope of duties and responsibilities of the Operation & Credit Administration Directorate and its subordinate work units.
   f. To carry out other duties granted by the President Director, the Board of Commissioners and the Shareholders of the Company, as long as they are not contradictory to the Articles of Association, internal regulations, regulations and prevailing laws and regulations.

3. Sumber Daya Manusia
   Memimpin, mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bawah koordinasi dan supervisi Direktorat *Operation & Credit Administration.*

4) Helmi Arief Hidayat - Direktur *Finance & Planning*

1. Kebijakan dan Strategi *Finance & Planning*
   a. Memimpin, mengarahkan, dan melaksanakan koordinasi serta supervisi penerapan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan *Finance & Planning* untuk mendukung Direktorat-Direktorat bisnis menghasilkan *benefit* bagi Perseroan melalui perencanaan, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan dan sistem operasional yang memadai.
   b. Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan kegiatan bidang di bawah Direktorat *Finance & Planning* mengimplementasikan standar *best practice* terkini sesuai dengan kemampuan maksimum sumber daya Perseroan.
   c. Melaksanakan supervisi dan memastikan seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Finance & Planning* mematuhi ketentuan regulasi, kebijakan dan ketentuan internal Perseroan.
   d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama dan Pemegang Saham Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketentuan internal, regulasi dan undang-undang yang berlaku.
2. Sumber Daya Manusia
   Memimpin, mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bawah koordinasi dan supervisi Direktorat *Finance & Planning*.

3. Human Resources Leading, coordinating and directing human resource policies and development under the coordination and supervision of the Directorate of Operation & Credit Administration.

4) Helmi Arief Hidayat - Finance & Planning Director

1. Finance & Planning Policy and Strategy
   a. To lead, direct, and implement coordination and supervision of the policy implementation relating to Finance & Planning activities to support business Directorates generating benefits for the Company through adequate planning, performance management system, financial control and operational system.
   b. To lead and direct the necessary change processes, as well as ensuring that field activities under the Directorate of Finance & Planning implement the latest best practice standards in line with the maximum capability of the Company's resources.
   c. To carry out supervision and ensure all work units under the Directorate of Finance & Planning comply with the regulations, policies and internal regulations of the Company.
   d. To carry out other tasks given by the President Director and Shareholders of the Company, as long as they do not conflict with the Articles of Association, internal regulations, applicable laws and regulations.
2. Human Resources
   Leading, coordinating and directing human resource policies and development under the coordination and supervision of the Directorate of Finance & Planning.

5) Cho Won June - Direktur *Information Strategy & Technology*

1. Kebijakan dan Strategi
   a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi pemanfaatan *Information Strategy & Technology* yang memadai sesuai dengan tujuan dan memanfaatkannya dalam operasional Perseroan.
   b. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Information Strategy & Technology* sesuai dengan rencana dan tujuan Perseroan.
   c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja *Information Strategy & Technology* dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Utama dan Direktorat-Direktorat bisnis.
   d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Information Strategy & Technology*, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai (*performance management system* dan *value based management*) yang efektif.
2. Sumber Daya Manusia
   Memimpin, mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bawah koordinasi dan supervisi Direktorat *Information Strategy & Technology.*

(6) Piagam Direksi (*BOD Charter*)

Piagam Direksi (*BOD Charter*) dituangkan dalam bentuk "Pedoman Tata Tertib Direksi PT Bank J Trust Indonesia Tbk." yang telah disetujui oleh Direksi pada tanggal 12 Desember 2018. Selanjutnya Pedoman Tata Tertib Direksi tersebut di atas, akan ditinjau secara berkala apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

5) Cho Won June - Information Strategy & Technology Director

1. Policy and Strategy
   a. To ensure the development and implementation of adequate Information Strategy & Technology utilization in line with the objective and to use them in the Company's operations.
   b. To lead and direct the formulation and implementation of policy in all fields under the Information Strategy & Technology Directorate in line with the Company's plan and objective.
   c. To lead, direct formulation and hold supervision of the implementation of Information Strategy & Technology working plan and all sectors under it in supporting the implementation of functions, duties, and responsibility of President Director and business Directorates.
   d. To implement development of the Company's resources in all work units under the Information Strategy & Technology Directorate, and to ensure the implementation of competence-based employee development, effective performance management system and value based management.
2. Human Resources
   Leading, coordinating and directing human resource policies and development under the coordination and supervision of the Directorate of Information Strategy & Technology.

(6) Charter of the Board of Directors (BOD Charter)

The Board of Directors Charter (BOD Charter) is set forth in the form of "PT Bank J Trust Indonesia Tbk. Board of Directors Codes of Conduct" which has been approved by the Board of Directors on December 12, 2018. Furthermore "the Board of Directors' Rules of Conduct above, will be reviewed periodically if deemed necessary by observing the prevailing laws and regulations.

(7) Rangkap Jabatan

Sesuai ketentuan dalam POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain, kecuali Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

Pada periode tahun 2019 seluruh anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan pemegang saham pengendali, bank lain, perusahaan dan/atau lembaga lain. Selain itu anggota Direksi tidak ada yang menjadi anggota Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris.

(7) Concurrent Position

According to the provision in POJK on the Governance Implementation for Commercial Banks, members of BOD are prohibited from serving concurrently as members of the BOD, or BOC, or Executive Officers at Banks, companies and/or other institutions, except as member of BOD responsible for supervising the Bank's participation in a subsidiary company, performing functional duties as member of BOC of a non-Bank subsidiary controlled by the Bank, so long as it does not result in neglecting of the implementation of duties and responsibilities as a member of BOD of the Bank.

In 2019, none of members of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. held concurrent positions as members of BOC, BOD or Executive Officers in controlling shareholder companies, other banks, companies and/or other institutions. In addition, none of BOD members served as member of the Committees under BOC.

(8) Hubungan Afiliasi

Anggota Direksi telah membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait hal-hal meliputi:

- Kepemilikan saham anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.
- Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai ≥5% (lima persen) dari modal disetor, baik pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk. maupun pada Bank dan Perusahaan Lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

(8) Affiliation

Members of the Board of Directors have made and signed a statement letter relating to the matters mentioned below:

- Members of the Board of Directors, either individually or jointly, do not own shares exceeding 25% (twenty-five percent) of paid up capital in other companies.
- Members of the Board of Directors who hold shares of ≥5% (five percent) of paid up capital, either on PT Bank JTrust Indonesia Tbk. or at Banks and Other Companies, in and outside the country.

Transparansi Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai ≥5% dari Modal Disetor

Transparency of Directors Share Ownership up to ≥5% of Paid-in Capital

No	Nama Name	J Trust Bank	Bank Lain Other Bank	Lembaga Keuangan Bukan Bank Non Bank Financial Institution	Perusahaan Lain Other Company	%
1.	Ritsuo Fukadai	-	-	-	-	-
2.	Shigeyoshi Asano *)	-	-	-	-	-
3.	Felix Istyono Hartadi Tiono	-	-	-	-	-
4.	Helmi Arief Hidayat	-	-	-	-	-
5.	Cho Won June	-	-	-	-	-
6.	Bijono Waliman	-	-	-	-	-

*) Tanggal 12 November 2019 mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Direktur Utama.
12 November 12, 2019 submitted resignation as Vice President Director.

- Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

- Financial and Family Relationships of Members of the Board of Directors with other Members of Board of Directors, Members of the Board of Commissioners and/or Controlling Shareholders of the Bank.

- Transparansi Hubungan Keuangan

- Transparency of Financial Relationship

No	Nama Name	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
1.	Ritsuo Fukadai		√		√		√
2.	Shigeyoshi Asano *)		√		√		√
3.	Felix Istyono Hartadi Tiono		√		√		√
4.	Helmi Arief Hidayat		√		√		√
5.	Cho Won June		√		√		√
6.	Bijono Waliman		√		√		√

*) Tanggal 12 November 2019 mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Direktur Utama.
On November 12, 2019 submitted resignation letter as Vice President Director.

- Transparansi Hubungan Keluarga

- Transparency of Family Relationship

No	Nama Name	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
1.	Ritsuo Fukadai		√		√		√
2.	Shigeyoshi Asano *)		√		√		√
3.	Felix Istyono Hartadi Tiono		√		√		√
4.	Helmi Arief Hidayat		√		√		√
5.	Cho Won June		√		√		√
6.	Bijono Waliman		√		√		√

*) Tanggal 12 November 2019 mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Direktur Utama.
12 November 12, 2019 submitted resignation letter as Vice President Director.

(9) Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Direksi

1) Kebijakan Rapat Direksi
   a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi atas pemintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
   b. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama, dan apabila Direktur Utama berhalangan dilakukan oleh Direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama.

(9) Policies and Implementation of the Board of Directors Meeting

1) Board of Directors' Meeting Policy
   a. Meetings of the Board of Directors may be held at any time whenever deemed necessary upon request of the President Director or by one or more members of the Board of Directors on the written request of one or more members of the Board of Commissioners or shareholders holding at least 1/10 (one tenth) part of the total number of shares with valid voting rights.
   b. The summon of the Board of Directors' Meeting shall be conducted by the President Director, and in the absence of the President Director, by the Board of Directors appointed by the President Director.

c. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan sarana media komunikasi internal Bank yang berlaku, sekurangnya 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan.

d. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan rapat bersama Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

e. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

f. Rapat dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir, Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Direksi lainnya yang dipilih dari anggota Direksi yang hadir.

g. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.

h. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan/ atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi keputusan musyawarah untuk mufakat.

i. Semua keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan Panduan Pelaksanaan Tugas Direksi dan Komisaris yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

j. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat/notulen, ditanda-tangani oleh anggota Direksi yang hadir, disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pencantuman *dissenting opinions* (apabila ada).

c. The summon of the Meeting of the Board of Directors shall be submitted directly to each member of the Board of Directors with valid Bank's internal communication media, at least 5 (five) days before the Meeting is held.

d. The Board of Directors shall hold Board of Directors meeting at least once every 1 (one) month and meeting with the Board of Commissioners at least once in 4 (four) months. The meeting must put the agenda, date, time and place of the Meeting.

e. Meetings of the Board of Directors should be held in the domicile of the Company or the principal business activities of the Company. If all members of the Board of Directors are present and/or represented, summon is not required and the Board of Directors' Meeting may be held elsewhere and shall have the right to make informed and binding decisions.

f. The Meeting shall be chaired by the President Director, and in the event the President Director is unavailable or absent, then the Meeting of the Board of Directors shall be chaired by one of the other Directors elected by the members of the Board of Directors present.

g. Every strategic policy and decision must be decided through the Board of Directors meeting.

h. Decision-making of the Board of Directors meeting has been conducted based on deliberations for consensus, and/ or majority vote in the event that no consensus decision was made.

i. All decisions of the Board of Directors are taken in accordance with the Bank's Articles of Association and the Implementation Guidelines of the Board of Directors and Commissioners which are binding and are the responsibility of all members of the Board of Directors.

j. The results of the Board of Directors' meeting shall be set forth in minutes of meeting, signed by members of the Board of Directors attending the meeting, submitted to all members of the Board of Directors and properly documented, including inclusion of dissenting opinions (if any).

2) Selama tahun 2019 telah diselenggarakan 12 (dua belas) kali rapat yang dilaksanakan oleh anggota Direksi, baik rapat Direksi maupun rapat Direksi dengan Kepala Divisi, dan unit kerja lainnya, dalam membahas segenap persoalan dan/atau strategi pengelolaan Perseroan.

a. Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Direksi pada tahun 2019 berdasarkan 'periode menjabat' adalah sebagai berikut:

2) In 2019, 12 (twelve) meetings were held by the Board of Directors, both Board of Directors meetings and Board of Directors meetings with Division Heads and other work units, discussing all issues and/or management strategies of the Company.

a. The frequency of attendance and level of attendance of members of the Board of Directors meeting in 2019 based on 'term of office' is as follows:

No	Nama Direksi Name of Directors	Periode Menjabat (Sejak Lulus F & P) Terms of Office (After Passing F&P Test)	Frekuensi Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance
1.	Shigeyoshi Asano (Wakil Direktur Utama)[1)] Vice President Director	1 Januari s/d 27 Juni 2019 (Direktur Utama) 27 Juni s/d 11 November 2019 (Wakil Direktur Utama) January 1 to June 27, 2019 (President Director) June 27 to November 11, 2019 (Vice President Director)	10/10	100 %
2.	Ritsuo Fukadai (Direktur Utama)[2)] President Director	7 November 2019 s/d 31 Desember 2019 (Direktur Utama) November 7, 2019 to December 31, 2019 (President Director)	2/2	100 %
3.	Felix Istyono Hartadi Tiono (Direktur) | (Director)	1 Januari s/d 31 Desember 2019 January 1 to December 31, 2019	12/12	100 %
4.	Helmi Arief Hidayat (Direktur) | (Director)	1 Januari s/d 31 Desember 2019 January 1 to December 31, 2019	12/12	100 %
5.	Rio Lanasier (Direktur)[3)] (Director)	1 Januari 2019 s/d 26 April 2019 January 1, 2019 to April 26, 2019	3/3	100 %
6.	Cho Won June (Direktur) | (Director)	7 November 2019 s/d 31 Desember 2019 November 7, 2019 to December 31, 2019	1/2	50 %
7.	Bijono Waliman (Direktur) | (Director)	07 November 2019 s/d 31 Desember 2019 November 7, 2019 to December 31, 2019	1/2	50 %

[1)] Pengalihan tugas dari Direktur Utama menjadi Wakil Direktur Utama berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 27 Juni 2019, dan pada tanggal 12 November 2019 mengundurkan diri.
[2)] Diangkat menjadi Direktur Utama pada RUPS Tahunan tanggal 27 Juni 2019.
[3)] Mengundurkan diri efektif tanggal 26 April 2019.
[1)] Change of duty from President Director to Vice President Director based on Annual GMS decision on June 27, 2019, and on November 12, 2019 resigned.
[2)] Appointed as President Director in Annual GMS on June 27, 2019.
[3)] Resigned effective on April 26, 2019.

Tabel kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Direksi adalah:

The table of meeting attendance of each member of the Board of Directors is as follow:

Nama Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tgl 28/1/19	Tgl 25/2/19	Tgl 25/3/19	Tgl 29/4/19	Tgl 27/5/19	Tgl 24/6/19	Tgl 29/7/19	Tgl 26/8/19	Tgl 30/9/19	Tgl 28/10/19	Tgl 27/11/19	Tgl 30/12/19
Shigeyoshi Asano	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Ritsuo Fukadai							-	-	-	-	√	√
Felix Istyono Hartadi Tiono	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Helmi Arief Hidayat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Nama Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tgl 28/1/19	Tgl 25/2/19	Tgl 25/3/19	Tgl 29/4/19	Tgl 27/5/19	Tgl 24/6/19	Tgl 29/7/19	Tgl 26/8/19	Tgl 30/9/19	Tgl 28/10/19	Tgl 27/11/19	Tgl 30/12/19
Rio Lanasier	√	√	√									
Cho Won June							-	-	-	--	√	X
Bijono Waliman							-	-	-	-	√	X

Keterangan | Note:
√ : Hadir | Present
X : Absen | Absent
- : Belum efektif | Not effective in position

b. Agenda Rapat Direksi Tahun 2019

b. Agenda of the Meeting of BOD

No	Tanggal Date	Peserta Rapat Type of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	
1	28 Januari 2019 January 28, 2019	1. Shigeyoshi Asano 2. Felix Istyono Hartadi Tiono 3. Helmi Arief Hidayat 4. Rio Lanasier	• *Update* ALCO • *Risk Management* • Temuan Audit • *Information Strategy & Technology* • *Human Capital* • *Product & Activity*	• Update ALCO • Risk Management • Audit Finding • Information Strategy & Technology • Human Capital • Product & Activity
2	25 Februari 2019 February 25, 2019	1. Shigeyoshi Asano 2. Felix Istyono Hartadi Tiono 3. Helmi Arief Hidayat 4. Rio Lanasier	• *Update* ALCO • *Risk Management* • Temuan Audit • *Information Strategy & Technology* • *Human Capital* • *Product & Activity*	• Update ALCO • Risk Management • Audit Finding • Informatio n Strategy & Technology • Human Capital • Product & Activity
3	25 Maret 2019 March 25, 2019	1. Shigeyoshi Asano 2. Felix Istyono Hartadi Tiono 3. Helmi Arief Hidayat 4. Rio Lanasier	• *Update* ALCO • *Risk Management* • Temuan Audit • *Information Strategy & Technology* • *Human Capital* • *Product & Activity*	• Update ALCO • Risk Management • Audit Finding • Information Strategy & Technology • Human Capital • Product & Activity
4	29 April 2019 April 29, 2019	1. Shigeyoshi Asano 2. Felix Istyono Hartadi Tiono 3. Helmi Arief Hidayat	• *Update* ALCO • *Risk Management* • Temuan Audit • *Information Strategy & Technology* • *Human Capital* • *Product & Activity*	• Update ALCO • Risk Management • Audit Finding • Information Strategy & Technology • Human Capital • Product & Activity
5	27 Mei 2019 May 27, 2019	1. Shigeyoshi Asano 2. Felix Istyono Hartadi Tiono 3. Helmi Arief Hidayat	• *Update* ALCO • *Risk Management* • Temuan Audit • *Information Strategy & Technology* • *Human Capital* • *Product & Activity*	• Update ALCO • Risk Management • Audit Finding • Information Strategy & Technology • Human Capital • Product & Activity
6	24 Juni 2019 June 24, 2019	1. Shigeyoshi Asano 2. Felix Istyono Hartadi Tiono 3. Helmi Arief Hidayat	• *Update* ALCO • *Risk Management* • Temuan Audit • *Information Strategy & Technology* • *Human Capital* • *Product & Activity*	• Update ALCO • Risk Management • Audit Finding • Information Strategy & Technology • Human Capital • Product & Activity
7	29 Juli 2019 July 29, 2019	1. Shigeyoshi Asano 2. Felix Istyono Hartadi Tiono 3. Helmi Arief Hidayat	• *Organization Structure* • *Other Updates*	• Organization Structure • Other Updates
8	26 Agustus 2019 August 26, 2019	1. Shigeyoshi Asano 2. Felix Istyono Hartadi Tiono 3. Helmi Arief Hidayat	• *Free float update* • *Weekly Sharing Meeting* (WSM) • *Improvement Sudirman Branch* • *Credit Policy* • *Tax Consultant Assignment for Tax Audit 2015* • *KRW Bank Account Walking Client (Treasury)*	• Free float update • Weekly Sharing Meeting (WSM) • Improvement Sudirman Branch • Credit Policy • Tax Consultant Assignment for Tax Audit 2015 • KRW Bank Account Walking Client (Treasury)

No	Tanggal Date	Peserta Rapat Type of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	
9	30 September 2019 September 30, 2019	1. Shigeyoshi Asano 2. Felix Istyono Hartadi Tiono 3. Helmi Arief Hidayat	• *Account Opening for Japanese non resident* • *Lending & potential share investor* • *Foreign exchange transaction by WIC* • *Retail Bond online system integration* • *Bank Guarantee Issuance.*	• Account Opening for Japanese non resident • Lending & potential share investor • Foreign exchange transaction by WIC • Retail Bond online system integration • Bank Guarantee Issuance.
10	28 Oktober 2019 October 28, 2019	1. Shigeyoshi Asano 2. Felix Istyono Hartadi Tiono 3. Helmi Arief Hidayat	• *Risk Management Update* • *Financial update and prognosis* • *Compliance update* • *New BJI Vision Mision* • *Data Maintenance* • *Engagement Letter with Potential Finance Advisor* • *New BJI Uniform for frontliner*	• Risk Management Update • Financial update and prognosis • Compliance update • New BJI Vision Mision • Data Maintenance • Engagement Letter with Potential Finance Advisor • New BJI Uniform for frontliner
11	27 November 2019 November 27, 2019	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix Istyono Hartadi Tiono 3. Helmi Arief Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman	• *BJI 4 Core Value.* • *SO Bankwide.* • *BJI Business Plan.*	• BJI 4 Core Value. • SO Bankwide. • BJI Business Plan.
12	30 Desember 2019 Desember 30, 2019	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix Istyono Hartadi Tiono 3. Helmi Arief Hidayat	• *To update BOD & EVP on the end of year 2019 prognosis.*	• To update BOD & EVP on the end of year 2019 prognosis.

(10) Penilaian (*Assessment*) Kinerja Direksi

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. melaksanakan proses evaluasi kinerja Direksi terkait rencana dan strategi Bank yang telah ditentukan sebelumnya. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Penilaian Kinerja Direksi dengan *Self -Assessment*
   - Penilaian individual untuk tiap anggota Direksi akan dilakukan oleh Direktur Utama.
   - Penilaian kelompok dan kinerja Direktur Utama akan dilakukan oleh RUPS.
   - Hasil-hasil dari penilaian kinerja akan diberikan pada RUPS untuk ditelaah dan dipertimbangkan.
     a. Pihak yang melakukan penilaian
        Penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris dan kemudian disetujui oleh pemegang saham (*shareholder*).
     b. Prosedur pelaksanaan penilaian Kinerja
        - Tahap 1
          Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan melalui RUPS
        - Tahap 2
          Menyusun *Draft Key Performance Indicator* (KPI)

(10) Assessment on the Performance of the Board of Directors

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. conducts evaluation on the performance of the Board of Directors regarding the Bank's predetermined plans and strategies. The assessment is conducted in the following manner:

1) Performance Appraisal of BOD using Self-Assessment
   - Individual ratings for each member of the Board of Directors shall be conducted by the President Director.
   - The group's assessment and performance of the President Director will be conducted by the GMS.
   - The results of the performance appraisal will be submitted to the GMS for review and consideration.
     a. The party conducting the assessment
        Assessment on the performance of the Board of Directors is conducted by the Board of Commissioners and subsequently approved by the shareholders.
     b. Performance appraisal procedures
        - Stage 1
          Corporate Budget Work Plan (RKAP) which has been ratified by the GMS
        - Stage 2 Drafting the Key Performance Indicator (KPI)

- Tahap 3
  KPI di-*review* oleh Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi
- Tahap 4
  Draft KPI diusulkan kepada Pemegang Saham Mayoritas (J Trust Co., Ltd.)
- Tahap 5
  Pembahasan KPI antara Tim Teknis PT Bank JTrust Indonesia Tbk. dan Tim Teknis Pemegang Saham
- Tahap 6
  Penandatanganan bersama KPI antara PT Bank JTrust Indonesia Tbk. dengan Pemegang Saham

c. Kriteria yang digunakan

- Proses penyusunan *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. menerapkan metode *Management By Objective* (MBO).
- Dengan menerapkan metode MBO ini yang diukur bukan hanya target keuangan tetapi juga proses. PT Bank JTrust Indonesia Tbk. meyakini bahwa dengan metode MBO ini dapat memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi serta dapat mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis.
- Setelah KPI secara *bankwide*/direktorat ditandatangani, setiap bulannya PT Bank JTrust Indonesia Tbk. selalu memonitor pencapaian kinerja terhadap target sesuai KPI.
- Setiap akhir tahun buku KPI tersebut akan dievaluasi oleh Pemegang Saham untuk mengukur kinerja Direksi. Adapun tahapan dalam mengevaluasi nilai KPI pada akhir tahun adalah sebagai berikut:

- Stage 3 KPI is reviewed by the Board of Commissioners and the Nomination and Remuneration Committee
- Stage 4 The draft of KPI is proposed to Majority Shareholders (J Trust Co., Ltd.)
- Stage 5
  KPI discussion by the Technical Team of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. and Technical Team of Shareholders
- Stage 6
  Joint signing of KPI by PT Bank JTrust Indonesia Tbk. together with Shareholders

c. Criteria

- The process of drafting the Key Performance Indicator (KPI) of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is based on the Management by Objective (MBO) method.
- By applying the MBO method, the financial targets and also processes are measured. PT Bank JTrust Indonesia Tbk. believes that the MBO method can clarify and translate the vision and strategy and can communicate and link strategic objectives and measures.
- After KPI bankwide/per directorate is signed, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. monthly always monitors the achievement of the target performance according to KPI.
- At the end of each fiscal year, the KPI will be evaluated by the Shareholders to measure the performance of the BOD. The stages in evaluating the value of KPI at the end of the year are as follows:

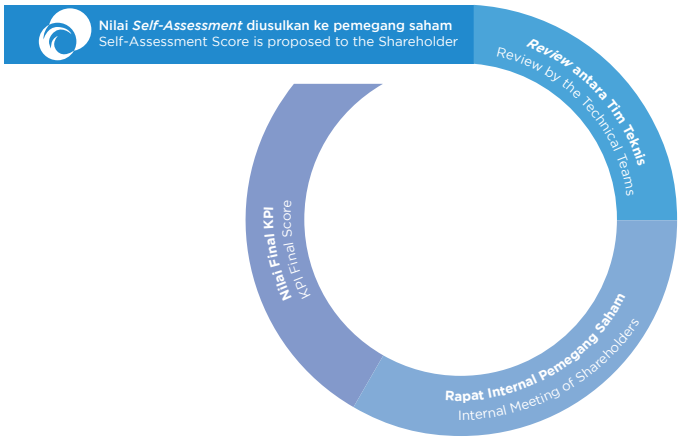

2) Penilaian Melalui *Self-Assessment* Penerapan Tata Kelola Bank

Penilaian kinerja Direksi dilakukan juga melalui *self assessment* penerapan tata kelola Bank dimana Direksi melalui *Corporate Secretary Division* mengisi Kertas Kerja *Self-Assessment* untuk faktor penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta Bank menyampaikan laporan hasil *self-assessment* penerapan tata kelola Bank kepada OJK sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria/Indikator yang digunakan mencakup 3 (tiga) aspek *Governance*:

1. Penilaian *Governance Structure*
   Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

2. Penilaian *Governance Process*
   Menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

2) Evaluation Through Self-Assessment on the Bank's Governance Implementation

Assessment of BOD performance is also conducted through self assessment on the Bank's governance implementation where BOD through Corporate Secretary Division fills the Self-Assessment Working Paper to assess the performance of the duties and responsibilities of BOD and the Bank submits the self-assessment report on the implementation of the Bank's governance to OJK as stipulated in the Circular Letter of Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 on the Governance Implementation for Commercial Banks.

Criteria/Indicator used include 3 (three) aspects of Governance:

1. Governance Structure Assessment
   Assessing the adequacy of Bank's governance structure and infrastructure so that the process of applying the Good Governance principles results in an outcome that is in line with the expectations of the Bank's Stakeholders.
2. Governance Process Assessment
   Assessing the effectiveness of the process of applying the GCG principles supported by the adequacy of Bank Governance structure and infrastructure so as to produce an outcome that is in line with the expectations of the Bank's Stakeholders.

3. Penilaian *Governance Outcome*
Menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

3) Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan pada saat pertanggungjawaban laporan tahunan Bank dalam RUPS Tahunan, dimana RUPS Tahunan di tahun 2020 ini akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku 2019 berakhir. Sebagai gambaran untuk pelaksanaan RUPS pertanggung-jawaban laporan tahun buku 2018 pada tanggal 27Juni 2019 merupakan laporan tahunan perusahaan tahun buku 2018 yang menerangkan tentang keadaan jalannya perusahaan dan hasil yang telah dicapai selama tahun 2018. Selanjutnya menyatakan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*vollediq acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi atas tindakan kepengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018.

(11) Program Pelatihan Anggota Direksi

Direksi berkewajiban untuk mengikuti program uji kompetensi/sertifikasi sesuai ketentuan dari regulator yaitu Sertifikasi Manajemen Risiko dan *Refreshmen*t. Hal ini selaras dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Seluruh anggota Direksi telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau *Refreshment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi seluruh anggota Direksi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2019 anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain:

3. Governance Outcome Assessment
Assessing the quality of outcomes that meet the expectations of the Bank's Stakeholders as a result of the process of applying the Good Governance principles supported by the adequacy of Bank Governance structure and infrastructure.

3) The performance evaluation of the Board of Directors is also made at the time of accountability of the Bank's annual report in the Annual GMS, where the Annual GMS in 2020 will be held within 6 (six) months after the end of fiscal year 2019. As an illustration for the implementation of the GMS for the 2018 fiscal year report on 27 June 2019 was the Company's annual report of for the fiscal year 2018 explaining the state of the Company's progress and the results achieved in 2018. Subsequently granting full acquittal and release (vollediq acquit et decharge) to all members of the Board of Directors for the management actions undertaken in the fiscal year 2018.

(11) Training Program for Members of the Board of Directors

The Board of Directors must follow certification/competence test programs according to regulatory requirements: Risk Management Certification and Refreshment. This is in line with the change of Bank Indonesia Regulation No. 11/19/PBI/2009 dated June 4, 2009 and the amendment in Bank Indonesia Regulation No. 12/7/PBI/2010 dated April 19, 2010 on Risk Management Certification for Management and Officers of Commercial Banks. All members of the Board of Directors have owned Risk Management Certification and/or Refreshment according to existing provisions.

To implement competence increase and training program for all members of the Board of Directors in supporting the duties and responsibilities, in 2019 members of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. have attended various training programs, workshops, conferences, seminars, among others:

Nama Name	**Periode Menjabat (Sejak Lulus F & P)** Serving Period (After Passing the F & P)	**Jenis Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar** Training, Workshop, Conference, Seminar	**Penyelenggara** Organizer	**Waktu & Lokasi** Time & Venue
Shigeyoshi Asano	- 01 Januari s/d 27 Juni 2019 (Direktur Utama) - 27 Juni s/d 11 November 2019 (Wakil Direktur Utama) - January 1 to June 27, 2019 (President Director) - June 27 to November 11, 2019 (Vice President Director)	-	-	-
Ritsuo Fukadai	7 November s/d 31 Desember 2019 November 7 to December 31, 2019	Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 Risk Management Certification Training Level 5	Lentera Mulia Persada	2 Mei 2019 May 2, 2019
		Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 Risk Management Certification Level 5	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	4 Mei 2019 May 4, 2019 Menara IBI, Jakarta Selatan
Felix Istyono Hartadi Tiono	1 Januari s/d 31 Desember 2019 January 1 to December 31, 2019	Integrating Future Risk Into Credit Risk Management (Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5) Integrating Future Risk Into Credit Risk Management (Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5)	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	30 April 2019 Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
		Workshop Sertifikasi Kepatuhan & AML Level 3 (Eksekutif) Compliance & AML Certification Workshop Level 3 (Executive)	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	3 Oktober – 4 Oktober 2019 Oktober 3 – Oktober 4, 2019 Financial Club, Graha CIMB Niaga, Jakarta
Helmi Arief Hidayat	1 Januari s/d 31 Desember 2019 January 1 to December 31, 2019	Integrating Future Risk Into Credit Risk Management (Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5) Integrating Future Risk Into Credit Risk Management (Risk Management Certification Maintenance Level 5)	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	30 April 2019 April 30, 2019 Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
Rio Lanasier	1 Januari s/d 26 April 2019 January 1 to April 26, 2019	-	-	-
Cho Won June	7 November s/d 31 Desember 2019 November 7 to December 31, 2019	Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 Risk Management Certification Training Level 5	Lentera Mulia Persada	2 Mei 2019 May 2, 2019 Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
		Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 Risk Management Certification Level 5	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	4 Mei 2019 May 4, 2019 Menara IBI, Jakarta Selatan
Bijono Waliman	07 November s/d 31 Desember 2019 November 7 to December 31, 2019	Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 Risk Management Certification Training Level 5	Lentera Mulia Persada	23 Mei 2019 May 23, 2019 Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
		Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 Risk Management Certification Level 5	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	25 Mei 2019 May 25, 2019 Menara IBI, Jakarta Selatan

(12) Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas bagi Direksi

RUPS menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi (gaji, tantiem serta penetapan fasilitas/benefit/tunjangan lainnya) bagi anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

- Tahap 1
  Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan mengusulkan rekomendasi remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.
- Tahap 2
  Dewan Komisaris mengkaji usulan Komite Remunerasi dan Nominasi serta mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan remunerasi Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Tahap 3
  RUPS yang bertindak mewakili pemegang saham mayoritas menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

(12) Remuneration Policy and Facilities for Board of Directors

The GMS approved to grant power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of Remuneration (salary, tantiem and establishment of facilities/ benefits/ other allowances) for the members of the Board of Directors of the Company based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

Procedure for BOD Remuneration Determination

- Stage 1
  The Remuneration and Nomination Committee prepares and recommends the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Board of Commissioners.
- Stage 2
  The Board of Commissioners reviews the proposals of the Remuneration and Nomination Committee and proposes to the GMS to determine the remuneration of the Board of Directors based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
- Stage 3
  The GMS acting on behalf of the majority shareholders approved to grant power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of Remuneration for members of the Board of Directors based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

Struktur Remunerasi dan Fasilitas Bagi Direksi

Remuneration Structure and Facilities for BOD

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Ketentuan Terms
1	Gaji | Salary	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP According to the compensation, benefit & facility policy of BOC, BOD & EVP
2	Tunjangan rutin | Routine allowance	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP According to the compensation, benefit & facility policy of BOC, BOD & EVP

Besarnya Remunerasi Masing-Masing Anggota Direksi

Rincian pemberian remunerasi Direksi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu:

The Amount of Remuneration of Each Member of the Board of Directors

Details of remuneration for BOD as of December 31, 2019 are as follows:

Nama Name	Gaji Salary	Tunjangan Rutin *) Routine Allowance	Tantiem	Santunan Benefits	Jumlah Remunerasi Per Orang Per Tahun Total Remuneration Per Person per Year	
					> Rp2 miliar > IDR2 billion	≤ Rp2 miliar ≤ IDR2 billion
Ritsuo Fukadai			-	-	-	
Felix Istyono Hartadi Tiono			-	-		
Helmi Arief Hidayat			-	-		-
Bijono Waliman			-	-	-	
Cho Won June			-	-	-	
Total (dalam jutaan Rp.) (in million IDR)	Rp5.305	Rp3.191	-	-	-	-

*) Tunjangan Rutin meliputi: Fasilitas Kendaraan, Tunjangan BBM & Supir, Tunjangan Handphone, Tunjangan Hari Raya (THR), Tunjangan Cuti, Tunjangan Pajak PPh 21
Routine Allowance covers: Vehicle Facility, Fuel & Driver Allowance, Mobile Allowance, Holiday Allowance, Leave Allowance, Income Tax Allowance

2.5. Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta telah diakomodir dalam Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan/pemahaman industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu, serta pengalaman yang dibutuhkan.

Kebijakan keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Bank untuk terus bertumbuh dan berkembang.

Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris, terdiri dari:

1. **Keahlian/Pengalaman**, memiliki paling kurang:
   a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/keuangan, dan/atau
   b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan, dan
   c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.

2.5 Diversity Policy of the Composition of Board of Commissioners and Directors

The diverse composition of Board of Commissioners and Directors is stated in the Attachment of Financial Services Authority Circular No. 32/SEOJK.04/2015 on November 17, 2015 on the Governance Guidelines of Public Companies, and accommodated in the Code of Conduct Guidelines for the Board of Commissioners and Directors of the Bank. The appointment of Board of Commissioners and Directors is made by considering the diversity, expertise, knowledge/understanding of the banking industry, integrity, and dedication of all individuals, and experience needed.

An accurate and proper diversity policy of the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Bank in line with the Bank's needs will support the effectiveness of task implementation of Board of Commissioners and Directors while supporting the achievement of Bank's vision and mission to continue growing and developing.

Diverse Composition of Members of the Board of Commissioners

The diversity factor of composition of members of the Board of Commissioners consists of:

1. **Expertise/Experience**, at least of:
   a. 1 (one) member with expertise/work experience in economics/business/finance, and/or
   b. 1 (one) member with expertise/work experience in banking industry, and
   c. 1 (one) member with expertise/work experience in risk management.

2. **Kewarganegaraan**
   Anggota Dewan Komisaris memiliki perimbangan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia masing-masing 50 % (lima puluh persen).
3. **Jenis Kelamin**
   Mempertimbangkan keragaman jenis kelamin dari anggota Dewan Komisaris.
4. **Usia**
   Anggota Dewan Komisaris memiliki keragaman jenjang usia.
5. **Independensi**
   a. Minimum 50 % (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
   b. Masa jabatan seorang Komisaris Independen maksimum 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku.

2. **Nationality**
   Members of the Board of Commissioners have balance of Foreign Nationals and Indonesian Citizens by 50% (fifty percent) each.
3. **Gender**
   Considering diversity of gender of members of the Board of Commissioners.
4. **Age**
   Members of the Board of Commissioners have diverse age levels.
5. **Independence**
   a. Minimum 50% (fifty percent) of members of the Board of Commissioners are Independent Commissioner.
   b. Term of office of an Independent Commissioner is maximum 3 (three) years, and can be reappointed in consideration of existing regulations.

Aspek Keberagaman Anggota Dewan Komisaris
Diversity Aspect of Members of the Board of Commissioners

Kewarganegaraan Nationality	Terdiri dari : 1. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia. 2. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Jepang.	Consisting of: 1. 2 (two) members of the Board of Commissioners of Indonesian citizens. 2. 2 (two) members of the Board of Commissioners of Japanese nationals.
Pengalaman Kerja Work Experience	Pengalaman Kerja yang beragam, antara lain : Departemen Keuangan Jepang, Kantor Pelayanan Pajak, Penasehat Hukum, Riset Biro Internasional, Riset Kebijakan Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Bea Cukai, Securities Exchange, Multi Finance, Investments, industri investasi dan bisnis, Bank Indonesia, industri keuangan dan konsultasi.	Diverse Work Experience, including: Japan's Finance Ministry, Tax Service Office, Legal Counsel, International Bureau Research, Policy Research of Finance Ministry, Customs and Excise Directorate General, Securities Exchange, Multi Finance, Investments, business and investment industry, Bank Indonesia, consultation and finance industry.
Independensi Independence	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank. Terdapat 2 (dua) Komisaris Independen.	All members of the Board of Commissioners do not have affiliated relations with members of the Board of Commissioners, Directors, Controlling and Main Shareholders of the Bank. There are 2 (two) Independent Commissioners.
Usia Age	Keberagaman usia anggota Dewan Komisaris pada rentang usia yang sangat produktif dan matang (mature), yaitu 46 tahun – 62 tahun.	Age diversity of members of the Board of Commissioners in a productive and mature age range, between 46 years and 62 years.

Keberagaman Komposisi Anggota Direksi
Faktor keberagaman komposisi anggota Direksi, terdiri dari:

1. **Keahlian/Pengalaman**, memiliki paling kurang:
   a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan atau keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis,
   b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko,
   c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang keuangan/akunting.

Diverse Composition of Members of the Board of Directors
The diversity factor of composition of members of the Board of Directors consists of:

1. **Expertise/Experience**, at least of:
   a. 1 (one) member with expertise/work experience in economics/business/finance, and/or
   b. 1 (one) member with expertise/work experience in risk management.
   c. 1 (one) member with expertise/work experience in finance/accounting.

2. **Kewarganegaraan**
   Mayoritas (lebih dari 50 % (lima puluh persen)) anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
3. **Jenis Kelamin**
   Mempertimbangkan keragaman jenis kelamin dari anggota Direksi.
4. **Usia**
   Anggota Direksi memiliki keragaman jenjang usia.
5. **Independensi**
   a. Presiden Direktur merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank.
   b. Memiliki dan/atau menunjuk 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan.

2. **Nationality**
   Majority (more than 50% (fifty percent)) of members of the Board of Directors are Indonesian Citizens.
3. **Gender**
   Considering diversity of gender of members of the Board of Directors.
4. **Age**
   Members of the Board of Directors have diverse age levels.
5. **Independence**
   a. President Director is an independent party of the Bank's controlling shareholders.
   b. Having and/or appointing 1 (one) Compliance Director.

Aspek Keberagaman Anggota Direksi
Diversity Aspect of Members of the Board of Directors

Kewarganegaraan Nationality	Terdiri dari : 1. 3 (tiga) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia. 2. 1 (satu) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Jepang. 3. 1 (satu) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Korea.	Consisting of: 1. 3 (three) members of of the Board of Directors of Indonesian citizens. 2. 1 (one) member of of the Board of Directors of Japan national. 3. 1 (one) member of of the Board of Directors of Korean national.
Pendidikan Education	Jenjang pendidikan anggota Direksi meliputi tingkat Sarjana dan Paska Sarjana dengan berbagai bidang pendidikan seperti ekonomi, manajemen, hukum, *electrical engineering*, *science*.	Education level of members of the Board of Directors covers Bachelor and Postgraduate degrees with various educational fields such as economics, management, law, electrical engineering, science.
Pengalaman Kerja Work Experience	Pengalaman Kerja yang beragam, antara lain : Perbankan, *Business advisor*, *export/import*, *money desk*, *foreign*, investasi, farmasi, kepatuhan.	Diverse Work Experience, including: Banking, Business advisor, export/import, money desk, foreign, investment, pharmacy, compliance.
Independensi Independence	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank.	All members of the Board of Directors do not have affiliated relations with members of the Board of Directors, Commissioners, Controlling and Main Shareholders of the Bank.
Usia Age	Keberagaman usia anggota Direksi pada rentang usia yang sangat produktif dan matang (*mature*), yaitu 49 tahun – 71 tahun.	Age diversity of members of the Board of Directors in a productive and mature age range, between 49 years and 71 years.

Pencapaian Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi
Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank saat ini cukup memenuhi aspek keberagaman tersebut di atas.

Achievement of Diversity Policy of the Composition of Board of Commissioners and Directors
The composition of members of Board of Commissioners and Directors of the Bank currently has fulfilled the aforementioned diversity aspect.

2.6. Informasi mengenai Kebijakan Remunerasi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, maka Bank wajib mengungkapkan informasi mengenai kebijakan remunerasi dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, sebagai berikut:

2.6 Information on the Remuneration Policy

Based on the Financial Services Authority Regulation No. 45/POJK.03/2015 dated December 28, 2015 and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 40/SEOJK.03/2016 dated September 26, 2016 on the Governance Implementation in Remuneration for Commercial Banks, the Bank shall disclose information regarding remuneration policy in the Governance Implementation Report, as follows:

A. Proses penyusunan kebijakan remunerasi, meliputi:

1.1. Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Remunerasi:

a. Dalam rangka mendukung pencapaian visi Bank dan upaya meningkatkan *competitive advantages* yang mampu menarik talenta terbaik di pasar dan juga menjaga nilai tambah pada setiap fungsi Utama.

b. Menjaga semangat kerja di organisasi dengan menciptakan praktik kesetaraan yang adil secara internal dan kompetitif dengan harga pasar serta memberlakukan kesamaan penerapan sistem kompensasi dan remunerasi di perusahaan.

2.1. Pelaksanaan kaji ulang atas Kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya:

a. Bank telah melakukan penyesuaian gaji sesuai ketentuan perusahaan.

b. Upaya kajian remunerasi dari tahun sebelumnya berdasarkan struktur skala gaji berdasarkan *market* pada industri yang sama.

3.1. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya:

Remunerasi bagi pegawai ditentukan oleh manajemen adalah termasuk pegawai yang berada di unit kontrol serta tidak mendapat pengaruh, tekanan dari pihak manapun. Pihak Human Capital akan memastikan mekanisme penetapan remunerasi tersebut sesuai dengan ketentuan dan sejalan dengan prinsip-prinsip kepatuhan.

B. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri.

Perusahaan telah memiliki cakupan kebijakan remunerasi dan implementasinya yang berdasarkan wilayah (Regional) dengan melihat aspek demografi dan daya beli masyarakat, sedangkan per unit bisnis dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri belum ada.

A. The process of preparing the remuneration policy, including:

1.1. Background and Objective of Remuneration Policy:

a. In order to support the achievement of the Bank's vision and effort to increase the competitive advantages necessary to attract the best talent in the market and create added value on of the main functions.

b. Maintaining the work spirit in the organization by creating fair equality practices internally and competitive with market prices, as well as imposing similarities on the application of compensation and remuneration system in the Company.

2.1 Implementation of review of the Remuneration Policy in the previous year, and improvements:

a. The Bank has adjusted salary based on corporate provisions.

b. Efforts to review remuneration from the previous year based on the structure of the salary scale on the market in the same industry.

3.1 Mechanism to ensure that the Remuneration for Employees in the control unit is independent from the work unit it supervises:

Remuneration for employees is determined by the management including employees in the control unit and does not receive influence, pressure from any parties. Human Capital will ensure the mechanism of remuneration determination is in line with the provision and prudential principles.

B. Scope of Remuneration policy and its implementation by business unit, by region, and in the subsidiaries or branches located overseas.

The Company already has coverage of remuneration policy and its implementation per region by considering the demographic factor and purchasing power. Meanwhile, per business unit and subsidiary companies or branches located overseas are not available yet.

C. Remunerasi dikaitkan dengan risiko, meliputi:

a. Jenis risiko Utama (*key risk*) yang digunakan dalam menerapkan remunerasi, meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko hukum.

Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi:

- Bank komitmen terhadap pemberian upah tidak kurang dari atau sama dengan upah minimum provinsi.
  Hal ini diterapkan untuk karyawan internal Bank maupun karyawan alih daya.
- Bank patuh terhadap peraturan pemerintah dalam pemberian remunerasi yaitu keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan BPJS Pensiun.

Risiko Kredit:

- Bank memberikan keringanan subsidi didalam pemberian fasilitas kredit karyawan.
- Bank memberikan retensi, menerapkan asas kehati-hatian dengan melakukan penilaian agunan serta keaslian surat-surat jaminan.

Risiko Operasional:

- Bank telah memiliki SOP operasional terkait pembayaran remunerasi karyawan.
- Bank patuh terhadap ketentuan regulator dalam pelaporan yang terkait dalam hal kepegawaian/ kekaryawanan. Contoh: tepat waktu dalam pelaporan pejabat eksekutif, pelaporan *training* dan lainnya.

Risiko Pasar:

- Bank telah turut serta didalam *salary survey* dalam pemberian remunerasi karyawan melalui lembaga independen.

b. Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur.
Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, dengan berdasarkan kepada risiko dalam kegiatan usaha Bank.

C. Remuneration linked to risks, include:

a. Key risk types that are used in applying the remuneration including credit risk, market risk, operational risk, compliance risk, reputation risk, and legal risk.

Legal Risk, Compliance Risk, Reputation Risk:

- The Bank's commitment towards remuneration not lower or the same as the provincial minimum wage.
  It is applied to internal employees of the Bank as well as outsourced employees.
- The Bank adheres to government regulations in giving remuneration, namely the participation of BPJS Employment, BPJS Health and BPJS Retirement.

Credit Risk:

- The Bank provides subsidies relief in credit facility for employees.
- The Bank provides retention, applying the principle of prudence with the assessment of collateral and guarantees the authenticity of the letters.

Operational Risk:

- The Bank has operational SOPs related to the payment of remuneration to employees.
- The Bank adheres to regulatory provisions in reporting related to employment. Example: timely manner in reporting executive officers, trainings and so on.

Market Risk:

- The Bank has participated in the salary survey in the remuneration of employees through an independent agency.

b. Criteria to determine key risks, including the qualitative risks.
Criteria for determining type of key risks, based on the Bank's business risks.

c. Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang bersifat Variabel, termasuk yang Remunerasi yang bersifat Tetap jika ada.
Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang bersifat Variabel, bagi karyawan tersebut termasuk kategori *Material Risk Takers* akan diberikan Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan untuk menjaga permasalahan-permasalahan yang muncul di kemudian hari.

d. Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan penentuan jenis risiko utama tahun lalu beserta alasannya jika ada, termasuk perubahan kriteria.
Bank tidak menentukan perubahan jenis risiko utama untuk tahun 2019.

D. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi, meliputi:
a. Tinjauan kebijakan Remunerasi terkait dengan penilaian kinerja yaitu Bank telah mengatur didalam kebijakan remunerasi berdasarkan penilaian kinerja karyawan (*employee appraisal*), hasil kinerja diukur berdasarkan pencapaian target. Tahun 2019 Bank menjalankan pemberian kenaikan gaji berdasarkan *performance level*.

b. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja, dan kinerja individu.
Bank telah memiliki metode dalam mengaitkan remunerasi dengan berdasarkan kinerja yaitu dengan menggunakan metode *Management By Objective (MBO).*

c. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Remunerasi serta besarnya penyesuaian Remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.

c. The impact of determining key risks on the Variable Remuneration, including Fixed Remuneration, if any. The impact of determining key risks on the Variable Remuneration, employees
who are in the category of Material Risk Takers will be given deferred Variable Remuneration in the anticipation of future problems.

d. The change in the determination of key risks compared to that of the prior year, with the reasons if any, including the change of criteria.
The Bank did not change the determination of key risks in 2019.

D. Measurement of performance linked to Remuneration, including:
a. Remuneration policy review related to the assessment of performance where the Bank has set up remuneration policy based on employee appraisal, performance results are measured based on the achievement of targets. In 2019, the Bank conducted salary increases based on performance level.

b. Methods in linking individual Remuneration to the Bank's performance, work unit performance, and individual performance. The Bank has a method of linking remuneration with performance-based, by using the Management By Objective (MBO) method.

c. A description of the method used by the Bank to state that the agreed performance is not achieved so that adjustment of Remuneration is required and the amount of Remuneration adjustment in the event that the condition occurs.

Bank akan melakukan monitoring atas *performance* individu. Jika *performance* karyawan tidak tercapai sesuai yang ditetapkan, maka akan mempengaruhi kenaikan gaji, bonus atau variabel tertentu yang ditetapkan oleh Bank.

E. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko, meliputi:

a. Kebijakan mengenai Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarannya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut.

Bank menetapkan besarnya remunerasi yang bersifat variabel terhadap jangka waktu penangguhan pembayaran remunerasi bersifat variabel untuk ditangguhkan antara 70%-30% (70% dibayarkan terlebih dahulu dan sisanya 30% ditangguhkan pembayaran selama 3 tahun, masing-masing *prorate* 10%) kepada pihak *material risk taker* berdasarkan jangka waktu risiko (*time horizon of risk*), yaitu:

1. Tahun I sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total remunerasi yang bersifat variabel.
2. Tahun II sebesar 10% (sepuluh persen) dari total remunerasi yang bersifat variabel.
3. Tahun III sebesar 10% (sepuluh persen) dari total remunerasi yang bersifat variabel.

Pelaksanaan pemberian remunerasi bersifat variabel di J Trust Bank sampai saat ini belum ada dikarenakan kondisi kinerja perusahaan.

b. Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (*Malus*), atau ditarik kembali dalam hal sudah dibayarkan (*clawback).*

Bank mengatur terhadap kriteria aturan *malus* dan *clawback*, yaitu:

1. Penurunan kinerja yang secara drastis dari tahun sebelumnya yang tercermin di dalam *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi.

   Yang dimaksud "kinerja" adalah kinerja keuangan, kinerja bank, dan kinerja individu.

The Bank will do monitoring on individual performance. If employee performance is below the set target, it will affect salary increase, certain bonus or variable set by the Bank.

E. Remuneration Adjustment is associated with Performance and Risk, including:

a. Deferred Variable Remuneration Policy, the amount, and criteria for determining the amount.

The Bank determines the amount of variable remuneration to the period of suspension of the variable remuneration payment to be deferred between 70% -30% (70% payable in advance and the remaining 30% deferred payment for 3 years, each prorate 10%) to material risk taker based on the time horizon of risk, namely:

1. Year I amounting to 10% (ten percent) of total remuneration of a variable nature.
2. Year II of 10% (ten percent) of total variable remuneration.
3. Year III of 10% (ten percent) of total variable remuneration. Implementation of variable remuneration in J Trust Bank until now is unavailable due to the condition of Company's performance.

b. The Bank's policy on Deferred Variable Remuneration (Malus), or withdrawn in the event that it has been paid (clawback).

The Bank has set the malus and clawback rule criteria, namely:

1. Drastic decline in performance from the previous year which is reflected in the Key Performance Indicator (KPI) of the Board of Directors.

   By "performance" means the financial performance, bank performance, and individual performance.

2. Peningkatan *Non Performing Loan* (NPL) yang cukup tinggi sehingga mengganggu kinerja keuangan Bank.
3. Terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh pihak *material risk taker* yang mengakibatkan kerugian Bank.
   Yang dimaksud "*material risk taker*" adalah Direksi dan/atau Pegawai lainnya yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank.

F. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko sebagaimana butir f.1) juga meliputi:
   a. Kebijakan pembayaran (*vesting*) atas penangguhan yang dilakukan antara lain jangka waktu pembayaran.
      Kondisi saat ini Bank belum mengatur secara rinci Kebijakan pembayaran atas penangguhan yang dilakukan berdasarkan jangka waktu.
   b. Pengungkapan faktor yang menentukan perbedaan Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan di antara Pegawai atau kelompok Pegawai, jika ada.
      Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan diperuntukkan bagi karyawan yang termasuk dalam kategori *Material Risk Takers* akan dituangkan dalam pedoman.

G. Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, dalam hal Bank menggunakan jasa konsultan ekstern.
   Perusahaan untuk saat ini tidak menggunakan jasa konsultan terkait dengan kebijakan remunerasi.

H. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

2. High increase in Non-Performing Loans (NPLs) which disrupts the financial performance of the Bank.
3. The occurrence of fraud conducted by material risk takers that results in losses of the Bank.
   By "material risk takers" means the Board of Directors and/or other Personnel whose tasks and responsibilities are making decisions that have significant impact on the Bank's risk profile.

F. Remuneration adjustment is related to Performance and Risk as per item f.1) including:
   a. The vesting policy of the suspension, among other things, is the term of payment.
      The current condition of the Bank has not set in detail the policy for suspension payment made based on a period of time.
   b. Disclosure of factors that determines the differences of Deferred Variable Remuneration among Employees or group of Employees, if any.
      Deferred Variable Remuneration is intended for employees who fall into the category of Material Risk Takers to be set forth in the guidelines.

G. Name of external consultants and consulting assignments related to Remuneration policy, in the event the Bank uses external consulting services. Currently, the Company does not use consultant services regarding the remuneration policy.

H. Remuneration package and facilities received by the Board of Directors and Board of Commissioners including remuneration structure and details of the nominal amount, as shown in the table below:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Tahun 2018 Type of Remuneration and Facilities in 2018	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun *) Amount received in 1 (One) Year *)			
	Dewan Komisaris | BOC		Direksi | BOD	
	Orang Person	Rupiah	Orang Person	Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, *tantiem*, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Remuneration (salary, bonus, routine allowance, tantiem, and other non-natura facilities)	4 **)	5.623.497.300	7	18.634.402.806
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki (purna jabatan) b. Tidak dapat dimiliki (asuransi D & O, Kendaraan) Other facilities in the form of benefits in kind (housing, transportation, health insurance etc) that: a. Can be owned (after retirement) b. Can not be owned (D&O insurance, Vehicle)	4 **)	768.000.000	6 ***)	1.687.857.600
Total	**4**	**6.391.497.300**	**6**	**20.322.260.406**

Keterangan:
*) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak
**) Komisaris tahun 2018 terdiri dari 5 orang (penerima honor 4 orang)
***) Penerima fasilitas purna jabatan Direksi 6 orang
Note:
*) Remuneration received includes tax
**) Commissioners in 2018 consisted of 5 persons (4 persons received honorarium)
***) Beneficiary of BOD post service facility: 6 persons

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Tahun 2019 Type of Remuneration and Facilities in 2019	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun *) Amount received in 1 (One) Year *)			
	Dewan Komisaris | BOC		Direksi | BOD	
	Orang Person	Rupiah	Orang Person	Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, *tantiem*, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Remuneration (salary, bonus, routine allowance, tantiem, and other non-natura facilities)	4 **)	2.585.131.303	5	6.321.948.187
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki (purna jabatan) b. Tidak dapat dimiliki Other Facilities in the form of benefits in kind (housing, transportation, health insurance etc) that: a. Can be owned (after retirement) b. Can not be owned (D&O insurance, Vehicle)	3 ***)	181.800.000	5 ***)	199.300.914
Total	**4**	**2.766.931.303**	**5**	**6.521.249.101**

Keterangan:
*) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak
**) Komisaris tahun 2019 terdiri dari 4 orang (penerima honor 3 orang)
***) Penerima fasilitas purna jabatan Direksi dan Dewan Komisaris 8 orang
Note:
*) Remuneration received includes tax
**) Commissioners in 2019 consisted of 4 persons (3 persons received honorarium)
***) Beneficiary of BOD and BOC post service facility: 8 persons)

I. Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

I. Remuneration Package grouped in levels of income received by the Board of Directors and the Board of Commissioners in 1 (one) year, as shown in the table below:

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *) Total Remuneration per Person per Year *)	Jumlah Komisaris Number of Commissioners		Jumlah Direksi Number of Directors	
	2018	2019	2018	2019
Di atas Rp2 miliar | Above IDR2 billion	-	-	5	2
Di atas Rp1 miliar s.d. IDR2 miliar | Above IDR1 billion to IDR2 billion	4	3	-	3
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar | Above IDR500 million to IDR1 billion	-	-	-	-
Rp.500 juta ke bawah | Up to IDR500 million	-	-	-	-

Keterangan:
*) yang diterima secara tunai
*) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak
Note:
*) received in cash
*) Remuneration received includes tax

J. Remunerasi yang bersifat variabel, meliputi:
a. Bentuk Remunerasi yang bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut.
Bentuk Remunerasi yang bersifat Variabel ditetapkan dalam bentuk Bonus dengan pertimbangan bahwa bonus diberikan berdasarkan hasil kinerja Bank dimana setiap tahun akan berbeda pencapaiannya.
b. Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor-faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.

Dalam pemberian bonus berdasarkan penilaian prestasi kerja, pencapaian tingkat keuntungan usaha perusahaan dan juga memperhatikan kondisi finansial perusahaan.

J. Variable Remuneration includes:
a. Form of Variable Remuneration and the reason for choosing it.
The form of Variable remuneration is set in bonus in consideration that bonus is given based on the performance of the Bank, and each year will have different achievements.

b. Explanation in the case of differences in the provision of Variable Remuneration among Board of Directors, Board of Commissioners and/or Employees, including the explanation of the factors that determine the differences and the underlying considerations.

Bonus given is based on the work performance appraisal, achievement of corporate business profit and also corporate financial conditions.

K. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

K. The number of Directors, Commissioners, and Employees who received variable remuneration for 1 (one) year and the total nominal as shown in the table below:

Remunerasi yang Bersifat Variabel Variable Remuneration	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun | Amount Received in 1 (one) Year					
	Direksi Board of Directors		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Pegawai Employee	
	Orang Person	Juta Rp IDR million	Orang Person	Juta Rp IDR million	Orang Person	Juta Rp IDR million
Bonus / Saham Bonus/Share	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

L. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT)
Bank menetapkan Dewan Komisaris, Direksi, dan EVP sebagai jabatan yang digolongkan ke dalam MRT.

L. Position and the number of parties that become Material Risk Takers (MRT)
The Bank sets the Board of Commissioners, the Board of Directors, and EVP as positions considered in the category of MRT.

M. *Shares option* yang dimiliki Direksi, Dewan komisaris, dan Pejabat Eksekutif
Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank, dan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Selama tahun 2019 tidak ada *shares option* dimaksud sebagaimana tabel berikut :

M. Shares option for the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Executive Officers
Shares option is an option to purchase shares by members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or Executive Officers and is executed through stock offering or stock option as compensation to members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Executive Officers of the Banks, and is decided in the General Meeting of Shareholders and/or the Articles of Association of the Bank.

In 2019 there was no shares options as stated in the following table:

Keterangan /Nama Note/name		**Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)** Total Number of shares owned (Shares)	**Jumlah Opsi** Number of Option		**Harga Opsi** Option Pricing **(Rp)**	**Jangka Waktu** Period
			Yang diberikan (lembar saham) Provided (Shares)	**yang telah dieksekusi (lembar saham)** Executed (Shares)		
Komisaris Commissioner	(nama)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Direksi Board of Directors	(nama)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pejabat Eksekutif Executive Officers	(total)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total		**Nihil**	**Nihil**	**Nihil**	**Nihil**	**Nihil**

N. Rasio gaji tertinggi dan terendah
Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan/pemberi Kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah Rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2018 dan 2019, dalam skala perbandingan:

N. The ratio of highest and lowest salaries
Salary is the right of employees accepted and expressed in terms of money as a reward from the company/employer to employees, which is determined and paid according to labor agreement, contracts, or prevailing regulation for such profession and/or the services rendered.

Below is the ratio of the highest and lowest salaries in 2018 and 2019, in the scale of comparison:

Rasio | Ratio	**Skala Perbandingan** Comparative Scale	
	2018	**2019**
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah The ratio of highest and lowest employee salaries	1 : 25	1 : 35
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah The ratio of highest and lowest Director salaries	1 : 2,3	1 : 2,2
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah The ratio of highest and lowest Commissioner salaries	1 : 1	1 : 1,4
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi The ratio of highest salaries of Director and Employee	1 : 2,5	1 : 2,1

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji tersebut adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap PT Bank JTrust Indonesia Tbk. dari tingkat pelaksana sampai Kepala Divisi.

The comparable salary in the salary ratio is the remuneration received by members of the Board of Commissioners, Board of Directors and employees per month. Employee means permanent employee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. from executive level to the Head of Division.

O. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja

Kondisi saat ini Bank belum memberikan remunerasi yang bersifat Variabel, sehingga belum ada pegawai yang menerima remunerasi yang dijaminkan tanpa syarat akan diberikan oleh Bank.

O. Number of recipients and the total amount of variable remuneration that are guaranteed unconditionally will be provided by the Bank to candidates of the Board of Directors, candidates of the Board of Commissioners, and/or prospective employee for their first 1 (one) year of work Under current condition, the Bank is not able to provide variable remuneration, thus there are no employees receiving remuneration pledged unconditionally by the Bank.

P. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Selama tahun 2019 jumlah Karyawan yang menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pemberhentian karena Karyawan pensiun normal dan atas permintaan Karyawan sendiri mengundurkan diri, dengan nominal pesangon yang dibayarkan adalah sebagai berikut:

P. Number of Employees affected by layoffs and the total amount of severance paid as in the table below:

In 2019 the number of employees receiving Layoffs (PHK) or dismissal because the employees had normal retirement and due to the employees' request to resign, with the nominal severance paid as follows:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (Satu) Tahun 2019 Amount of severance paid to an individual in a year 2019	**Jumlah Pegawai** Total Employees
Di atas Rp1 miliar | Above IDR1 billion	0
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar | Above IDR500 million to IDR1 billion	1
Rp500 juta ke bawah | Up to IDR500 million	97

Q. Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.

Q. The total amount of suspended variable remuneration consisting of cash and/or shares or share-based instrument issued by the Bank.

Bank belum memberikan kompensasi dalam bentuk tersebut di atas.

The Bank has not provided compensation in the form mentioned above.

R. Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun
Bank tidak memberikan kompensasi dalam bentuk tersebut di atas.

R. The total amount of suspended variable remuneration paid out in 1 (one) year.
The Bank has not provided compensation in the form mentioned above.

S. Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun, meliputi:

S. Details of the amount of Remuneration given in 1 (one) year, including:

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap *) | Fixed Remuneration *)		
1. Tunai | Cash	Rp25.349.368.165,-	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank | Shares based instrument or shares published by Bank	N/A	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel *) | Variable Remuneration *)	**Tidak Ditangguhkan** Non Deferred	**Ditangguhkan** Deferred
1. Tunai | Cash	N/A	N/A
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank Shares based instrument or shares published by Bank	N/A	N/A

Keterangan | Note:
*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah (sudah termasuk pajak) | Only for MRT and disclosed in million Rupiah

T. Informasi kuantitatif
a. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
b. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
c. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

T. Quantitative information
a. Total remaining of deferred Remuneration exposed by both implicit or explicit adjustments.
b. Total deductions on the Remuneration caused by explicit adjustments during the reporting period.
c. Total deductions on the Remuneration due to implicit adjustment during the reporting period.

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *) Variabel Remuneration *)	**Sisa yang Masih Ditangguhkan** The Deferred Remaining	**Total Pengurangan Selama Periode Laporan** Total Reduction During the Reporting Period		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) Due to Explicit Adjustment (A)	**Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)** Due to Implicit Adjustment (B)	**Total (A)+(B)**
a. Tunai (dalam juta rupiah) Cash (in million Rupiah)	N/A	N/A		N/A
b. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut) Shares/share-based instruments issued by the Bank (in number of shares and nominal million Rupiah which is a conversion of such shares)	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan | Note:
*) Hanya untuk MRT | Only for MRT

2.7. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transaksi yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara Bank dengan pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak lain yang terkait dengan Bank, maka bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan/keputusan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari untuk melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja, serta menjaga kepentingan publik, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. senantiasa menjunjung tinggi integritas pribadi dan profesionalisme yang luhur, yang dituangkan dalam bentuk buku Pedoman Etika Korporasi perusahaan dan Pernyataan Fakta Integritas sebagai standar etika dan perilaku yang wajib dijadikan pedoman oleh seluruh anggota Bank (Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Tetap/Kontrak).

Buku Pedoman Etika Korporasi perusahaan dan Pernyataan Fakta Integritas telah mengatur hal-hal yang harus dihindari untuk mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas dengan para nasabah, rekanan atau antara sesama anggota Bank, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Selama tahun 2019 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana tabel berikut:

2.7 Transactions Involving Conflict of Interest

Transactions that caused conflicts of interest between the Bank and the owners, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Executive Officers, and/or other parties related to the Bank, then the members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Executive Officers are prohibited from taking actions/decisions that may inflict damage to the Bank or reduce profit of the Bank.

In carrying out the day-to-day duties and responsibilities in doing business relationship with customers, partners and their co-workers, as well as safeguarding public interests, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. always strives to uphold personal integrity and excellent professionalism, which is manifested in a Corporate Ethics Guidelines of the company and Integrity Pact Statement as the ethical and behavioral standards which must be applied as guidelines by all members of the Bank (the Board of Commissioners, Board of Directors and Permanent/Contract Employees).

Corporate Ethics Guidelines and Integrity Pact Statement govern matters which should be avoided to prevent potential conflicts of interest in every activity with customers, partners or among members of the Bank, including in decision-making.

During 2019 there were no transactions which contained conflict of interest, as per the table below:

No.	**Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan** Name and Position of Parties with Conflict of Interest	**Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan** Name and Position of Policymaker	**Jenis Transaksi** Type of Transactions	**Nilai Transaksi** (jutaan Rupiah) **Total Transactions** (million Rupiah)	**Keterangan** *) Description *)
1	Tidak ada | None	Tidak ada | None	Tidak ada | None	Tidak ada | None	Tidak ada | None

Keterangan | Notes:
*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku
Against existing systems and procedures

2.8. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang mencapai ≥5% (lima persen) dari modal disetor,

yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank tersebut, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.

2.8 Share ownership of members of the Board of Commissioners and Board of Directors which reached ≥5% (five percent) of the paid-up capital,

which includes the type and number of shares in the Bank, other banks, Non-Bank Financial Institutions, and other companies, which domiciled locally or abroad.

Selama tahun 2019 kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang mencapai ≥5% (lima persen) dari modal disetor telah diungkapkan dalam hubungan afiliasi.

In 2019, share ownership by members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors which reached more than 5% (five percent) of the paid-up capital has been disclosed in affiliation.

2.9. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi

Selama tahun 2019 tidak ada hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank sebagaimana telah diungkapkan dalam hubungan afiliasi.

2.9 Financial and Family Relations of members of the Board of Commissioners and Board of Directors

During 2019 there was no financial and family relations of members of the Board of Commissioners and Board of Directors with another members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders of the Bank as disclosed in affiliation.

2.10. Pembelian Kembali *(Buyback)* Saham dan/atau Obligasi Bank

Pembelian kembali *(Buyback)* saham atau obligasi Bank adalah upaya mengurangi jumlah saham/obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut dengan tata cara pembayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan mencakup:

a. Kebijakan dalam melakukan pembelian kembali *(Buyback)* saham/obligasi Bank.
b. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali.
c. Harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi.
d. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.

Selama tahun 2019 tidak ada pembelian kembali *(Buyback)* saham atau obligasi Bank yang terjadi di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2.10 Buyback of the Bank's Shares and/or Bonds

Share buyback or bond buyback is the effort to reduce the number of shares or bonds issued by the Bank by repurchasing said shares or bonds, which payment mechanism is carried out subject to the prevailing laws.

The disclosure includes:

a. The shares and/or bonds buyback policy;
b. The number of repurchased shares and/or bonds;
c. The price of shares and/or bonds buyback;
d. The increase of profit per share and/or bond.

In 2019 there were no shares and/or bonds buyback in PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2.11. Informasi tentang Kode Etik Emiten/Perusahaan Publik [102-16]

a) Pokok-pokok kode etik
   a. Dasar hukum Etika Korporasi berpedoman pada ketentuan dalam Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
   b. Etika Korporasi ini digunakan sebagai acuan bagi Anggota Bank dalam menjalankan dan membina hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan dan rekan sekerja sehingga tercipta Anggota Bank yang memiliki integritas, loyalitas dan berdedikasi tinggi.

2.11 Information on the Issuers Code of Ethics [102-16]

a) Principles of the code of ethics
   a. The legal basis of Corporate Ethics is based on the provisions of the Articles of Association of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
   b. The Corporate Ethics is used as a reference for the Members of the Bank in conducting and fostering business relationships with customers, partners and co-workers in order to create Bank Members with integrity, loyalty and high dedication.

c. Etika Korporasi memungkinkan Anggota Bank untuk secara cepat mengetahui adanya penyimpangan dalam menjalankan usaha sehingga menjaga anggota Bank dari melakukan hubungan bisnis yang kurang baik. Meskipun demikian tidak bertujuan untuk mencampuri kehidupan pribadi dari Anggota Bank.

b) Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya
Dilakukan sosialisasi buku Etika Korporasi bagi seluruh karyawan terutama Anggota Bank pada saat bergabung di PT Bank JTrust Indonesia Tbk., dimana seluruh karyawan memahami informasi dan konsekuensinya.

c) Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten
Pernyataan dilakukan dengan mengisi *annual disclosure* 1 (satu) tahun sekali. Anggota Bank harus memahami dan mengetahui bahwa seluruh informasi yang berhubungan dengan Bank dan nasabah bersifat rahasia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang kerahasiaan Bank dan peraturan lainnya dan Anggota Bank wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

2.12. Informasi tentang Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) atau Nilai-Nilai Perusahaan (*Core Values*) [102-16]

Corporate Culture adalah Budaya Perusahaan yang memiliki peran sangat besar dalam menciptakan kelancaran operasional dan produktivitas perusahaan. Dengan budaya perusahaan yang jelas dan terarah, perusahaan mampu menggerakan roda bisnis menuju ke arah yang jelas dengan tuntunan, panduan atau cara untuk mencapainya.

J Trust Bank *Core Values* sebagai perwujudan dari:

SUPER INTEGRITY
Setiap karyawan berubah dari karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki integritas super.

CUSTOMER FIRST
Bertindak dengan pemikiran *Customer First* (menjadikan nasabah sebagai prioritas utama).

c. Corporate Ethics allows Members of the Bank to promptly identify irregularities in the operations so it can keep the members of the Bank away from conducting unhealthy business practices. Nevertheless, it is not intended to interfere in the private lives of the Members of the Bank.

b) The form of code of conduct socialization and enforcement effort
Socialization of Corporate Ethics book is conducted to all employees, especially Members of the Bank at the time of joining PT Bank JTrust Indonesia Tbk, in which all employees understand the information and its consequences.

c) A statement that the code of ethics is applicable to members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Issuer
The statement is conducted by filling out annual disclosure 1 (once) a year. Members of the Bank must understand and acknowledge that all information relating to the Bank and customers is confidential as stated in Bank Secrecy Act and other regulations and Members of the Bank shall maintain the confidentiality of such information.

2.12 Information on Corporate Culture or Core Values [102-16]

Corporate Culture is a culture of the Company that has a significant role in creating smooth operations and productivity. With a clear and focused corporate culture, the Company is able to run business towards a clear direction with the guidance, strategies or method to achieve it.

J Trust Bank Core Values is an embodiment of:

SUPER INTEGRITY
Every employee can change from regular employee to super integrity employee.

CUSTOMER FIRST
Acting with the thought of Customer First (making customers as the main priority).

DISCIPLINE AND RESPONSIBLE
Selalu menerapkan budaya disiplin dan bertanggung jawab.

LEARNING AND TRYING MORE
Selalu belajar dan terus mencoba hal baru.

2.13 Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten/Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun 2019

Pemantauan dilakukan terhadap sanksi administratif yang dikenakan oleh otoritas. Secara umum pelanggaran yang terjadi diakibatkan oleh faktor *human error* antara lain keterlambatan pelaporan pada LBU, LBBU, LKPBU, NSFR, dan Laporan Keuangan per 30 Juni 2019 serta kesalahan pelaporan pada LBU. Dalam rangka memitigasi agar sanksi tersebut tidak terjadi lagi, maka dilakukan langkah-langkah perbaikan seperti pemantauan dan peningkatan ketelitian serta pemahaman dari unit terkait terhadap berbagai aspek pelaporan-pelaporan tersebut.

2.14 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen yang Dilaksanakan Emiten/Perusahaan Publik (jika ada), antara lain:

a. Jumlah saham dan/atau Opsi
b. Jangka waktu pelaksanaan
c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, dan
d. Harga pelaksanaan

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. belum ada program kepemilikan saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen di tahun 2019.

DISCIPLINE AND RESPONSIBLE
Always implementing discipline and responsible culture.

LEARNING AND TRYING MORE
Always learning and trying new things.

2.13 Information on administrative sanctions imposed on Issuers/Public Companies, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by the Capital Market authorities and other authorities in 2019

Monitoring is conducted against administrative sanctions imposed by the authority. In general, the violations that occur are due to human errors, such as delay in reporting in LBU, LBBU, LKPBU, NSFR, and Financial Statements per 30 June 2019 as well as reporting mistake in LBU. In order to mitigate such sanctions from reoccurring, improvement measures such as monitoring and improvement of accuracy and understanding from the related units are made against various aspects of such reporting.

2.14 Management/Employee Stock Ownership Program conducted by Issuer/Public Company (if any), among others:

a. Number of shares and/or Options
b. Window Exercise
c. Eligible employee and/or management requirements, and
d. Exercise price

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. had no management/employee stock ownership program in 2019.

BAB III
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.

CHAPTER III
COMPLETION AND IMPLEMENTATION OF DUTIES OF COMMITTEES OF PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah membentuk Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang terdiri dari:

- Komite Audit (*Audit Committee*)
- Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)
- Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee*)

Pengangkatan anggota Komite tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau bentuk hubungan lain dengan Bank yang bisa mempengaruhi independensinya.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite-komite di bawah Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk. mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja/Piagam Komite (*Committee Charter*) yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan *best practices* yang diperbaharui secara berkala.

3.1. Komite Audit (*Audit Committee*)

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab pengawasan secara efektif dan independen di bidang pelaksanaan dan pelaporan pencatatan keuangan, kecukupan pengelolaan risiko, pengendalian internal secara efektif dan independen, dan efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, serta melakukan pengawasan pada kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Committees Under BOC

In order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has established Committees under the Board of Commissioners as required in the provisions on the Implementation of Governance for Commercial Banks which consist of:

- Audit Committee
- Risk Monitoring Committee
- Nomination and Remuneration Committee

The appointment of the members of the Committee is made by the Board of Directors based on the Board of Commissioners' Decision with the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee. Committees under the Board of Commissioners are chaired by Independent Commissioners who have no financial, management, share ownership and/or family relationships with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or other controlling shareholders or other forms of relationship with the Bank that may impair their independence.

The conduct of duties and responsibilities of committees under the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. refers to the Charter of Committees (Committee Charter) prepared under the prevailing regulations in Indonesia, specifically Financial Services Authority Regulation on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, and best practices that are regularly updated.

3.1. Audit Committee

The Audit Committee is a committee established to support the Board of Commissioners in order to support the effectiveness of the performance of its duties and supervisory functions on matters relating to the financial statements, adequacy of risk management, independent and effective internal control, audit effectiveness of internal and external audit functions, and compliance with prevailing regulations.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

a. Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*)

Komite Audit memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, komposisi dan struktur organisasi serta persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja serta waktu kerja, pelaksanaan rapat dan pelaporan, penanganan pengaduan/pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan, masa tugas dan honorarium. Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) ini dikaji dan diperbarui secara berkala oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Audit dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku.

b. Struktur dan Keanggotaaan Komite Audit

- Keanggotaan Komite Audit paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki

Legal Basis

The establishment of Audit Committee is based on the regulations as follows:

1. Regulation of the Financial Services Authority No. 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 on the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee.
2. Regulation of the Financial Services Authority No. 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
3. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
4. Regulation of the Financial Services Authority No. 13/POJK.03/2017 dated March 27, 2017 on the Utilization of Public Accountant Services and Public Accountant Firm in Financial Services Activities.
5. Regulation of the Financial Services Authority No.1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 on the Implementation of Internal Audit Function on Commercial Banks.

a. Audit Committee Charter

The Audit Committee maintains an Audit Committee Charter which regulates matters relating to the performance of duties and responsibilities and authority, composition and organizational structure and requirements of membership, procedures and working procedures as well as working hours, conduct of meetings and reporting, complaint handling/reporting regarding alleged violations related to financial reporting, term of office and fees. The Audit Committee Charter will be reviewed periodically or if it is deemed necessary to review and evaluate its adequacy by the Board of Commissioners in order that the function of the Audit Committee can be performed at an optimal level in accordance with prevailing laws and regulations.

b. Structure and Membership of Audit Committee

- Membership of the Audit Committee shall consist of at least 1 (one) Independent Commissioner who is also a Chairman, 1 (one) Independent Party with expertise

keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

- Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota komite audit paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite audit.

- Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.
- Mantan anggota Direksi Bank, mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Pihak Independen tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif yang bertugas hanya melakukan fungsi pengawasan paling singkat 6 (enam) bulan.
- Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, mampu berkomunikasi, akhlak, dan moral yang baik. Bank harus meneliti kebenaran seluruh dokumen/data pendukung pemenuhan persyaratan Pihak Independen, antara lain surat pernyataan pribadi mengenai integritas Pihak Independen.
- Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

in finance or accounting, and 1 (one) Independent Party having expertise in the field of law or banking.

- Independent Commissioners and Independent Parties who are members of the audit committee shall be at least 51% (fifty one percent) of the total members of the audit committee.
- Members of the Board of Directors are prohibited from becoming members of the Audit Committee.
- A former member of the Board of Directors of the Bank, former Executive Officer of the Bank or a party with a relationship with the Bank that may affect the ability to act independently, may not serve as an Independent Party in the Bank, before a cooling off period of 6 (six) months. The cooling off period to become an Independent Party shall not apply to former members of the Board of Directors of the Bank or former Executive Officer in charge of performing only a supervisory function for at least 6 (six) months.

- Audit Committee members must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with their field of work, ability to communicate, good morale. The Bank shall examine the accuracy of all documents/data supporting the fulfillment of the requirements of the Independent Party, including a personal statement concerning the integrity of the Independent Party.
- It is compulsory to understand the financial statements, company business especially related to the services or business activities of the Issuer or Public Company, audit process, risk management, and capital market laws and regulations as well as other related legislation.

- It is compulsory to comply with the Code of Conduct of the Audit Committee stipulated by the Issuer or Public Company.
- Members are willing to improve competence continuously through education and training.

- Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lain pada Bank yang sama.
- Rangkap jabatan Pihak Independen sebagai Pihak Independen anggota komite lain pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain sepanjang memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan, memenuhi kriteria independensi, mampu menjaga rahasia Bank, memperhatikan kode etik yang berlaku, dan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Anggota Komite Audit diangkat berdasarkan Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi melalui notulen rapat tanggal 20 Desember 2019 yang disetujui dengan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 20 Desember 2019. Selanjutnya anggota Komite Audit diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.23.13/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/XII/2019 tertanggal 23 Desember 2019.

Struktur dan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

1. Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) : Ketua/Anggota
2. Sutirta Budiman (Komisaris Independen) : Anggota
3. Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen) : Anggota
4. Bambang Setyoko (Pihak Independen) : Sekretaris/Anggota

Sebagaimana dinyatakan di atas, per 31 Desember 2019 Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

a. 2 (dua) orang Komisaris Independen (termasuk 1 orang sebagai ketua)
b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan
c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum bisnis dan perbankan

- The Chairman of the Committee may only concurrently serve as Chairman of the Committee at a maximum of another 1 (one) of committee of the same Bank.
- Multiple positions of Independent Party as Independent Party members of other committees of the same Bank, other Banks and/or other companies as long as they meet all required competencies, shall meet the criteria of independence, shall be able to keep the Bank's confidentiality, shall observe the applicable code of ethics, and shall not neglect the conduct of duties and responsibilities.

Member of the Audit Committee is appointed based on the Recommendation from Nomination and Remuneration Committee through minutes of meeting dated December 20, 2019 approved by the Circular Decision of the Board of Commissioners dated 20 December 2019. Furthermore, member of the Audit Committee is appointed based on the Decision Letter of the Board of Directors No.23.13/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/XII/2019 dated December 23, 2019.

The structure and membership of Audit Committee is as follows:

1. Mahdi Mahmudy (Independent Commissioner): Member/Chairman
2. Sutirta Budiman (Independent Commissioner): Member
3. Amalia Setyanti Lestari (Independent Party): Member
4. Bambang Setyoko (Independent Party): Secretary/Member

As stated above, as of December 31, 2019, the Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner with members consisting of:

a. 2 (two) Independent Commissioners (including 1 person as chairman)
b. 1 (one) Independent Party who is expert in accounting and finance
c. 1 (one) Independent Party who is expert in business and banking law

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Audit telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Sepanjang tahun 2019, jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit berjumlah lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Audit.

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Audit

Masa tugas/jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Masa tugas/jabatan anggota Komite Audit Per 31 Desember 2019 yaitu:

Each Commissioner who becomes Chairman and member of the Audit Committee has effectively passed the feasibility and proper test by OJK. The appointment of the names of the Chairman and members of the Audit Committee as mentioned above meets the criteria set out in the OJK Rules.

Throughout 2019, the number of Independent Commissioners and Independent Members who are members of the Audit Committee amount to more than 51% (fifty one percent) of the total members of the Audit Committee.

Term of Office of Audit Committee Members

The term of office of the members of the Audit Committee shall not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be reelected for only one (1) subsequent period.

Term of office of Audit Committee members as of December 31, 2019 is as follows:

No	Nama Name	Posisi di Komite Position in Committee	Masa Tugas/Jabatan Term of Office	
			Tanggal efektif Effective Date	Akhir Masa Tugas/ Jabatan End of Term of Office
1.	Mahdi Mahmudy Komisaris Independen | Independent Commissioner	Ketua/Anggota Chairman/Member	27 Juni 2019 June 27, 2019	30 Juni 2020 June 30, 2020
2.	Sutirta Budiman Komisaris Independen | Independent Commissioner	Anggota | Member	16 Desember 2019 December 16, 2019	30 Juni 2020 June 30, 2020
3.	Amalia Setyanti Lestari Pihak Independen | Independent Party	Anggota | Member	11 Januari 2019 January 11, 2019	8 Januari 2020 January 8, 2020
4.	Bambang Setyoko Pihak Independen | Independent Party	Sekretaris/Anggota Secretary/Member	19 Juli 2019 July 19, 2019	3 Juli 2020 July 3, 2020

c. Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Audit

Kualifikasi dan Profil anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

- **Mahdi Mahmudy,** Anggota/Ketua Komite Audit (menjabat sebagai anggota sejak 21 November 2016 dan menjabat sebagai Ketua sejak 29 Juni 2018)
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

c. Qualification and Profile of Audit Committee Members

Qualification and Profile of Audit Committee Members are as follows:

- **Mahdi Mahmudy**, Member/Chairman of Audit Committee (has become a member since November 21. 2016 and become a Chairman since June 29, 2018).
  The complete profile is described in the Profile of Board of Commissioners/ Directors/Executive Officers.

- **Sutirta Budiman,** Anggota Komite Audit (sejak 23 Desember 2019)
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Amalia Setyanti Lestari,** Anggota Komite Audit
  Sesuai Surat Dewan Komisaris No.11.01/S-KOM/JTRUST/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 dan Surat Keputusan Direksi No.11.09/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016, serta perubahan terakhir sesuai Surat Dewan Komisaris No.29.01/M.KOM/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 dan Surat Keputusan Direksi No.29.31/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 menduduki posisi sebagai anggota independen Komite Audit dan merangkap sebagai anggota independen dan sekretaris Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Bambang Setyoko,** Anggota merangkap Sekretaris Komite Audit
  Sesuai Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 18 Juli 2019 yang disetujui dengan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 18 Juli 2019, dan Surat Keputusan Direksi No.19.05/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VII/2019 tertanggal 19 Juli 2019 menduduki posisi sebagai anggota independen dan Sekretaris Komite Audit dan merangkap sebagai anggota independen Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Sutirta Budiman**, Audit Committee Member (since December 23, 2019).
  The complete profile is described in the Profile of Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

- **Amalia Setyanti Lestari**, Audit Committee Member
  According to the Board of Commissioners Letter No.11.01/S-KOM/JTRUST/I/2016 dated January 11, 2016 and Decision Letter of the Board of Directors No.11.09/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/I/2016 dated January 11, 2016 as well as the latest amendment according to Letter of the Board of Commissioners No.29.01/M.KOM/VI/2018 dated June 29, 2018 and Decision Letter of the Board of Directors No.29.31/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/VI/2018 dated June 29, 2018 is appointed as independent member of Audit Committee as well as independent member and secretary of Risk Monitoring Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

  The complete profile is described in the Profile of Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

- **Bambang Setyoko**, Member and Secretary of Audit Committee
  According to the Recommendation of Nomination and Remuneration Committee dated July 18, 2019 approved by Circular Decision of the Board of Commissioners dated July 18, 2019, and Decision Letter of the Board of Directors No.19.05/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VII/2019 dated July 19, 2019, is appointed as independent member and Secretary of Audit Committee and also an independent member of Risk Monitoring Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

  The complete profile is described in the Profile of Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

d. Independensi Anggota Komite Audit

Selama tahun 2019, seluruh anggota independen pada Komite Audit telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

1) Seluruh anggota independen pada Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
2) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada J Trust Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir.
3) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan J Trust Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
4) Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada J Trust Bank.
5) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan J Trust Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama J Trust Bank.
6) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha J Trust Bank.

e. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan mendukung tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

d. Independence of Audit Committee Members

During 2019, all independent members of the Audit Committee have met the following independence requirements:

1) All independent members of the Audit Committee have no financial relationship, management relationship, share ownership, and/ or family relationships with members of the BoC, BoD and/or Controlling Shareholders or any relationship with the Bank, which may affect the ability to act independently
2) They are not insiders in a Public Accounting Firm, Law Firm, Public Appraisal Office or any other party providing insurance, non-life insurance services, assessment services and/ or other consulting services to J Trust Bank in the last 6 (six) months.
3) They are not working or having the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of J Trust Bank in the last 6 (six) months, except Independent Commissioners.
4) They do not own shares directly or indirectly in J Trust Bank.
5) They have no affiliated relationship with JTrust Bank, Board of Commissioners, Board of Directors or Major Shareholder of J Trust Bank.
6) They have no direct or indirect business relationship relating to the business activities of J Trust Bank.

e. Roles and Responsibilities of Audit Committee

The Audit Committee is responsible for providing independent professional opinion to the Board of Commissioners on reports or issues submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, assisting the Board of Commissioners for its oversight responsibilities, including identifying matters requiring the attention of the Board of Commissioners, and supporting the duties or other tasks related to the duties of the Board of Commissioners, among others:

1) Membuat rincian kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
2) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/ atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan.
3) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
4) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan.
5) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk laporan berkala setiap tahun paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
6) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk laporan berkala setiap tahun paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
7) Memastikan bahwa semua risiko dan kontrol diperhatikan dalam laporan Audit Internal dan Auditor Eksternal, sehingga manajemen senantiasa menjalankan praktik perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
8) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
9) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
10) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.

1) Prepare details of annual activities approved by the Board of Commissioners.
2) Review the financial information that will be issued by the Company to the public and/ or the authority such as financial reports, projections and other reports related to the Company's financial information.
3) Review the compliance with laws and regulations relating to the activities of the Company.
4) Render an independent opinion in the event of differences of opinion between management and Accountant for services provided.
5) Provide recommendation on the appointment of Public Accountant Office to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders and submit to the Financial Services Authority (OJK) in the form of periodic report every 10 (ten) business days after the appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
6) Evaluate the conduct of audit services for annual financial information by Public Accountant and/or Public Accounting Firm and submit to the Financial Services Authority (OJK) in the form of periodic report every year no later than 6 (six) months after the end of the financial year.
7) Ensure that all risks and controls are addressed in the Internal Audit and External
Auditor reports, so that management continues to practice sound banking practices in accordance with prudential principles.
8) Review the conduct of audits by internal auditors and oversee the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of internal auditors.
9) Review complaints relating to the Company's accounting and reporting process.
10) Review and advise the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interest of the Company.

11) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

f. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

1) Setiap rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen Bank.
2) Rapat Komite Audit selalu dihadiri oleh lebih dari 51% dari jumlah anggota Komite Audit yang anggotanya terdiri dari Komisaris Independen serta pihak independen.
3) Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak mencapai musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite yang hadir dalam rapat.
4) Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
5) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
6) Sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah menyelenggarakan 9 kali rapat dengan melibatkan Satuan Kerja Audit Interen, unit kerja lainnya (jika dipandang perlu), seperti: unit Anti Fraud, dan pihak auditor eksternal (KAP) serta auditor independen (KPMG Consulting) terkait dengan audit kinerja SKAI selama 3 tahun sekali.

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat setiap anggota Komite Audit sebagai berikut:

11) Maintain the confidentiality of documents, data and company information.

f. Policy and Conduct of Audit Committee Meeting

1) Each Audit Committee Meeting is led by Audit Committee Chairman who also serves as the Independent Commissioner of the Bank.
2) Audit Committee Meetings are always attended by more than 51% of Audit Committee members whose members consist of Commissioners and Independent Commissioners and independent parties.
3) Decisions of the Committee Meetings shall be based on deliberations to reach consensus. If it does not reach a consensus, then the decision shall be made by vote based on the voting agreed by 2/3 (two thirds) of the Committee members present at the meeting.
4) The results of Audit Committee meetings shall be set forth in minutes of meetings and properly documented.
5) The dissenting opinions that occur in Committee meetings shall be clearly stated in the minutes of the meeting and the reasons for such dissent.
6) Throughout 2019, the Audit Committee held 9 meetings involving the Internal Audit Working Unit, other work units (if deemed necessary), such as the Anti Fraud Unit, and the external auditor (KAP) as well as independent auditor (KPMG Consulting) related to SKAI performance audit for once in every 3 years.

Frequency of meeting attendance of each Committee Audit member:

Nama Name	Periode Jabatan Term of Office	Jumlah Rapat Komite Audit Number of the Audit Committee Meetings	Frekuensi Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen, Ketua) Independent Commissioner, Chairman	1 Januari s/d 31 Desember 2019 January 1 until December 31, 2019	9	9	100%
Kwik Ing Hie (Komisaris Independen, Anggota) [1] (Independent Commissioner, Member) [1]	1 Januari s/d 27Juni 2019 January 1 until June 27, 2019	3	3	100%
Sutirta Budiman (Komisaris Independen, Anggota) [2] (Independent Commissioner, Member) [2]	16 Desember s/d 31 Desember 2019 December 16 until December 31, 2019	-	-	0%
Martinus Rosadi Nugroho (Pihak Independen, Anggota/ Sekretaris) [3] (Independent Party, Member/ Secretary) [3]	1 Januari s/d 1 Juli 2019 January 1 until July 1, 2019	3	3	100%
Bambang Setyoko (Pihak Independen, Anggota/ Sekretaris) [4] (Independent Party, Member/ Secretary) [4]	19 Juli 2019 s/d. 31 Desember 2019 July 19, 2019 until December 31, 2019	6	6	100%
Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen, Anggota) (Independent Party, Member)	1 Januari s/d 31 Desember 2019 January 1 until December 31, 2019	9	9	100%

[1] Berakhirnya masa jabatan berdasarkan hasil keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2019
[2] Ditunjuk sebagai Komisaris Independen berdasarkan hasil keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2019, dan efektif tanggal 16 Desember 2019 sebagai Komisaris Independens ejak lulus fit and proper test oleh OJK
[3] Mengundurkan diri efektif sejak tanggal 2 Juli 2019
[4] Diangkat menjabat sebagai anggota Pihak Independen efektif sejak tanggal 19 Juli 2019

[1] The end of a position is according to AGMS decision dated June 27, 2019
[2] Appointed as Independent Commissioner based on the decision of AGMS dated June 27, 2019 and effective per December 16, 2019 as Independent Commissioner since passing the fit and proper test by OJK
[3] Resigned effective since July 2, 2019
[4] Inaugurated as the member of Independent Party effective as of July 19, 2019.

g. Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Komite Audit

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komite Audit, selama tahun 2019 anggota Pihak Independen Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain :

g. Education and/or Training of Audit Committee Members

To support the execution of duties and responsibilities of Audit Committee members, during 2019 members of the Audit Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. have attended various education/training programs, workshops, conferences, seminars, among others:

No.	Nama Name	Periode Menjabat Terms of Position	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar Trainings, Workshop, Conference, Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Place and Time
1	Amalia Setyanti Lestari	01 Januari s/d 31 Desember 2019 January 1 until December 31, 2019	• Workshop Certification in Audit Committee Practices (CACP) batch XI	Ikatan Komite Audit Indonesia	29 Maret 2019 Jakarta March 29, 2019
			• Panel Diskusi "Menyongsong Penerapan Standar Auditing (SA) 701 – Komunikasi Key Audit Matters" Panel discussion on "Facing the Implementation of Auditing Standard (SA) 701 – Communication Key Audit Matters"	Ikatan Komite Audit Indonesia	28 Agustus 2019 Jakarta August 28, 2019
			• Seminar Indonesia Banking Expo 2019 "Consolidate to elevate"	Perbanas dan Mc Kinsey & Co.	6 November 2019 November 6, 2019 Jakarta
			• Board Governance Forum 2019	KPMG	11 November 2019 November 11, 2019 Jakarta

No.	Nama Name	Periode Menjabat Terms of Position	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar Trainings, Workshop, Conference, Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Place and Time
2	Bambang Setyoko	19 Juli s/d 31 Desember 2019 July 19 until December 31, 2019	• Seminar Indonesia Banking Expo 2019 "Consolidate to elevate"	Perbanas dan Mc Kinsey & Co.	6 November 2019 November 6, 2019 Jakarta

h. Program Kerja dan Realisasi Komite Audit

Program kerja Komite Audit sepanjang tahun 2019 sebagai berikut:

1. Memantau pencapaian rencana kerja SKAI sepanjang tahun 2019;
2. Memantau tindak lanjut manajemen atas temuan audit (internal dan eksternal) yang bersifat signifikan terhadap penerapan *internal control system*.
3. Memantau penyusunan laporan keuangan Bank sesuai dengan standar yang berlaku dan memberikan tanggapan yang dipandang perlu.
4. Memberikan evaluasi atas penggunaan jasa kantor akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan Bank.
5. Memberikan rekomendasi penunjukkan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Bank.
6. Memberikan rekomendasi penunjukan Kepala Satuan Kerja Audit Intern oleh Direktur Utama.
7. Melakukan revisi atas Piagam Komite Audit.
8. Ikut berpartisipasi dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi dan memberikan masukan yang dipandang perlu.

h. Work Program and Realization of Audit Committee

Audit Committee work program throughout 2019 is as follows:

1. Monitor the achievement of the SKAI work plan in 2019;
2. Monitor management follow-up on audit findings (internal and external) that are significant to the implementation of internal control system.
3. Monitor the preparation of the Bank's financial statements in accordance with applicable standards and provide the necessary responses.
4. Provide evaluation on the commission for public accounting services conducting audit on the Bank's financial report.
5. Provide recommendations on the appointment of a public accounting firm that will audit the Bank's financial statements.
6. Provide recommendation on the appointment of the Head of Internal Audit Working Unit by the President Director.
7. Conduct revision on the Audit Committee Chapter.
8. Participate in the Board of Commissioners and Directors' coordination meetings and provide the necessary inputs.

Realisasi Program Kerja Komite Audit sepanjang tahun 2019 sebagai berikut:

Realization of Audit Committee Work Program in 2019 is as follows:

No.	Realisasi Program Kerja Work Program Realization	
1	Mengadakan rapat dan diskusi dengan SKAI untuk memonitor progres kerja SKAI serta pencapaiannya; memonitor tindak lanjut atas hasil audit dan mendiskusikan hasil temuan yang signifikan	Conduct meetings and discussion with SKAI to monitor SKAI's working progress as well as achievement; monitor the follow up on audit result and discuss significant findings.
2	Memonitor dan berdiskusi dengan SKAI dan unit-unit terkait tentang pinjaman-pinjaman yang berpotensi menjadi NPL	Monitor and discuss with SKAI and related units on loans that has high NPL potential
3	Melakukan *review* atas Rencana Kerja Tahunan SKAI untuk tahun 2019	Review on SKAI's working plan for 2019
4	Memonitor progress dari pelaksanaan audit KAP atas laporan keuangan Bank untuk tahun buku 2018	Monitor the progress for KAP audit on the Bank's financial report for 2019 financial year

No.	Realisasi Program Kerja Work Program Realization	
5	Memonitor progres tindak lanjut penyelesaian temuan audit KAP tahun 2018	Monitor progress of the completion of KAP audit findings for 2018
6	Berdiskusi dengan SKAI membahas progress audit OJK serta temuan audit yang signifikan	Discuss with SKAI on OJK audit progress as well as the significant findings
7	Memonitor progres penyelesaian tindak lanjut manajemen atas temuan OJK	Monitor the progress for management's solution follow up on OJK's findings
8	Mengadakan rapat dengan auditor independen (KPMG Consulting) terkait dengan audit kinerja SKAI selama 3 tahun sekali	Hold meeting with independent auditor (KPMG Consulting) related to the SKAI performance audit once in every three years
9	Memonitor temuan audit dan penyelesaian audit terkait dengan kinerja SKAI selama 3 tahun sekali	Monitor audit findings and completion of audit related to SKAI performance once every three years
10	Ikut berpartisipasi dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi	Participate on coordination meeting of the board of Commissioners and Directors
11	Memberikan rekomendasi pemilihan/mempertahankan dan memberhentikan auditor eksternal/KAP kepada Dewan Komisaris	Recommend the selection/sustain and dismiss external auditor/KAP to the Board of Commissioners
12	Memberikan rekomendasi atas penunjukan Kepala Satuan Kerja Audit Intern oleh Direktur Utama	Give recommendation on the appointment of the Head of Internal Audit Working Unit by the President Director
13	Memberikan evaluasi terhadap kinerja kantor akuntan publik yang ditunjuk untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank tahun 2018	Provide evaluation on appointed public accounting office's performance to conduct audit on the Bank's financial report for 2018
14	Melakukan evaluasi atas kinerja SKAI selama 6 bulan dan memastikan SKAI bekerja secara independent	Conduct evaluation on SKAI performance within 6 months and ensure SKAI is working independently
15	Menyusun rencana kerja (Work Plan) Komite Audit tahun 2020	Formulate work plan for Audit Committee for 2020

i. Evaluasi Komite Audit

Secara berkala (semesteran) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan cakupan pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan proses pengendalian intern, efektivitas pemeriksaan audit eksternal dan melakukan pengawasan pada kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan proses pengendalian intern yang efektif dan independen oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana audit yang disusun pada awal tahun. Seluruh rencana audit tahun 2019 telah dapat direalisasikan sepenuhnya oleh SKAI dengan dukungan sumber daya yang cukup memadai, kegiatan audit dilaksanakan berdasarkan pedoman program audit yang jelas sehingga pelaksanaan audit dapat dilakukan dengan lancar, serta laporan hasil audit dilengkapi dengan rekomendasi perbaikan yang cukup baik untuk mencegah terulangnya temuan audit yang sama di masa yang datang.

i. Audit Committee Evaluation

The Audit Committee regularly (every semester) performs evaluation to the effectiveness and scope of internal audit implementation in assessing the adequacy of internal control process, effectiveness of external audit and supervising bank compliance to existing laws and regulations.

Internal audit implementation in assessing the adequacy of effective and independent internal control process by the Internal Audit Unit (SKAI) went according to the audit plan designed at the beginning of the year. All audit plans in 2019 were fully realized by SKAI with support from adequate resources, audit activities were held based on clear audit program guidelines to ensure smooth audit implementations, and audit reports were completed with sufficient improvement recommendations to prevent a repeat of audit findings in the future.

Audit eksternal dalam melakukan penilaian terhadap kewajaran penyusunan laporan keuangan historis tahun 2019 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (KNMTR) yang merupakan anggota dari *Crowe Global* yang berpusat di Amerika Serikat telah berjalan dengan baik sesuai dengan surat perjanjian (*engagement letter*) tanggal 22 Oktober 2019 dengan opini audit tanpa modifikasi. Evaluasi pelaksanaan audit eksternal didasarkan pada kesesuaian terhadap standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan.

External audit to evaluate the fairness of historical financial statements in 2019 performed by Public Accountant Office (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (KNMTR) which is member of Crowe Global headquartered in the US went accordingly according to the engagement letter on 22 October 2019 with unmodified opinion. The evaluation of external audit implementation was based on the appropriate existing audit standards, adequate field work time, review of services scope provided and adequate quotation test and improvement recommendations submitted.

Kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan dengan baik dengan tidak ditemukan pelanggaran ketentuan seperti antara lain dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), laporan Posisi Devisa Netto (PDN) dan penyampaian laporan keuangan publikasi *audited*.

The Bank's compliance to existing laws and regulations went accordingly with no violations such as in the report of Legal Lending Limit (LLL), report of Net Open Position (NOP) and submission of audited publish financial statements.

3.2. Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)

Komite Pemantau Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dengan melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan manajemen risiko oleh Bank yang antara lain mencakup me-*review* kesesuaiannya dengan regulasi yang ada, mengevaluasi konsistensi pelaksanaan kebijakan tersebut, dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko ("KMR") dan Satuan Kerja Manajemen Risiko ("SKMR") guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

3.2. Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee is a committee established to assist the Board of Commissioners to fulfill its duties and responsibilities by evaluating the implementation of the Bank's risk management policy which includes reviewing compliance with existing regulations, evaluating the consistency of the implementation of the policy, and monitoring and evaluating the implementation of the Risk Management Committee ("KMR") and the Risk Management Business Unit ("SKMR") to provide recommendations to the Board of Commissioners.

Legal Basis

The establishment of the Risk Monitoring Committee refers to the following Regulations:

1. Regulation of the Financial Services Authority No. 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
2. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

a. Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee Charter*)

Komite Pemantau Risiko memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Pemantau Risiko (Risk *Oversight Committee Charter*) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, komposisi dan struktur organisasi serta persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja serta waktu kerja, pelaksanaan rapat dan pelaporan, masa tugas dan honorarium. Piagam Komite Pemantau RIsiko (*Risk Monitoring Committee Charter*) ini dikaji dan diperbarui secara berkala oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Pemantau Risiko dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku.

b. Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat berdasarkan Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi melalui notulen rapat tanggal 20 Desember 2019 yang disetujui dengan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 20 Desember 2019. Selanjutnya anggota Komite Pemantau Risiko diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.23.13/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/XII/2019 tertanggal 23 Desember 2019.

Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

1. Sutirta Budiman (Komisaris Independen) : Ketua/Anggota
2. Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen) : Sekretaris/Anggota
3. Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) : Anggota
4. Nobiru Adachi (Komisaris Utama) : Anggota
5. Nobuiku Chiba (Komisaris) : Anggota
6. Bambang Setyoko (Pihak Independen) : Anggota

Sebagaimana dinyatakan di atas, per 31 Desember 2019 Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

a. Risk Monitoring Committee Charter

The Risk Monitoring Committee maintains a Risk Monitoring Committee Charter which regulates matters related to the performance of duties and responsibilities and authority, composition and organizational structure as well as membership requirements, methods and work procedures as well as working hours, conduct of meetings and reporting, duty and honorarium. The Risk Monitoring Committee Charter will be reviewed periodically or if it is deemed necessary to review and evaluate its adequacy by the Board of Commissioners in order that the Risk Monitoring Committee function can be performed at an optimal level in accordance with prevailing laws and regulations.

b. Structure and Membership of Risk Monitoring Committee

The member of Risk Monitoring Committee is appointed based on recommendation from Nomination and Remuneration Committee through minutes of meeting dated December 20, 2019 approved by Circular Decision of the Board of Commissioners dated December 20, 2019. Furthermore, the member of Risk Monitoring Committee is appointed based on the Decision Letter of the Board of Directors No.23.13/S. Kep-Dir-HCGD/JTRUST/XII/2019 dated December 23, 2019.

Structure and membership of Risk Monitoring Committee are as follow:

1. Sutirta Budiman (Independent Commissioner): Chairman/Member
2. Amalia Setyanti Lestari (Independent Party): Secretary/Member
3. Mahdi Mahmudy (Independent Commissioner): Member
4. Nobiru Adachi (Head Commissioner): Member
5. Nobuiku Chiba (Commissioner): Member
6. Bambang Setyoko (Independent Party): Member

As stated above, as of December 31, 2019, the Risk Monitoring Committee is chaired by an Independent Commissioner with members consisting of:

a. 1 (satu) orang Komisaris Utama
b. 1 (satu) orang Komisaris
c. 2 (dua) orang Komisaris Independen (termasuk 1 orang sebagai ketua)
d. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan
e. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum bisnis dan perbankan

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Sepanjang tahun 2019, jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko berjumlah lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Pemantau Risiko.

a. 1 (one) President Commissioner
b. 1 (one) Commissioners
c. 2 (two) Independent Commissioners (including 1 person as chairman)
d. 1 (one) Independent Party who is expert in accounting and finance
e. 1 (one) Independent Party who is expert in business and banking law.

Each Commissioner who becomes the Chairman and a member of the Risk Monitoring Committee has effectively passed the feasibility and proper test by OJK. The appointment of the names of the Chairman and members of the Risk Monitoring Committee as mentioned above meets the criteria set out in the OJK Rules.

Throughout 2019, the number of Independent Commissioners and Independent Members who are members of the Risk Monitoring Committee is totalling more than 51% (fifty one percent) of the total members of the Risk Monitoring Committee.

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa tugas/jabatan anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Masa tugas/jabatan anggota Komite Pemantau Risiko Per 31 Desember 2019 yaitu:

Term of Office of Members of Risk Monitoring Committee

Term of office of members of Risk Monitoring Committee shall be no longer than the term of office of Board of Commissioners as set forth in Articles of Association and may be re-appointed only for the next 1 (one) period.

The term of office of Risk Monitoring Committee members as of December 31, 2019 is as follows:

No	Nama Name	Posisi di Komite Position in the Committee	Masa Tugas/Jabatan Terms of Duty/Position	
			Tanggal efektif Effective Date	Akhir Masa Tugas/ Jabatan End of Term of Duty/ Position
1	Sutirta Budiman (Komisaris Independen) [1)] (Independent Commissioner)	Ketua Chairman	16 Desember 2019 December 16, 2019	30 Juni 2020 June 30, 2020
2	Nobiru Adachi (Komisaris Utama) | (President Commissioner)	Anggota Member	26 Mei 2015 May 26, 2015	30 Juni 2020 June 30, 2020
3	Nobuiku Chiba (Komisaris) [2)] (Commissioner)	Anggota Member	12 Maret 2019 March 12, 2019	30 Juni 2020 June 30, 2020
4	Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Anggota Member	27 Juni 2019 June 27, 2019	30 Juni 2020 June 30, 2020
5	Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen) | (Independent Party)	Sekretaris/Anggota Secretary/Member	11 Januari 2019 January 11, 2019	8 Januari 2020 January 8, 2020

No	Nama Name	Posisi di Komite Position in the Committee	Masa Tugas/Jabatan Terms of Duty/Position	
			Tanggal efektif Effective Date	Akhir Masa Tugas/ Jabatan End of Term of Duty/ Position
6	Bambang Setyoko (Pihak Independen) [3] (Independent Party)	Anggota Member	19 Juli 2019 June 19, 2019	3 Juli 2020 July 3, 2020

[1] Ditunjuk sebagai Komisaris Independen berdasarkan hasil keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2019, dan efektif tanggal 16 Desember 2019 sebagai Komisaris Independen sejak lulus *fit and proper test* oleh OJK
[2] Ditunjuk sebagai Komisaris berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 20 September 2019 dan efektif sejak tanggal 12 Maret 2019 sebagai Komisaris sejak lulus *fit and proper test* oleh OJK
[3] Diangkat sebagai anggota Pihak Independen efektif sejak tanggal 19 Juli 2019

[1] Appointed as Independent Commissioner based on the decision of AGMS dated June 27, 2019, and effective as of December 16, 2019 as Independent Commissioner since passing fit and proper test by OJK
[2] Appointed as Commissioner based on the decision of EGMS dated September 20, 2019 and effective since March 12, 2019 as Commissioner since passing fit and proper test by OJK
[3] Appointed as the member of independent Party effective since July 19, 2019

c. Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Kualifikasi dan Profil anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- **Sutirta Budiman,** Ketua/Anggota Komite Pemantau Risiko (menjabat sebagai Ketua sejak tanggal 23 Desember 2019)
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Nobiru Adachi,** Anggota Komite Pemantau Risiko
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Nobuiku Chiba**, Anggota Komite Pemantau Risiko
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Mahdi Mahmudy,** Anggota Komite Pemantau Risiko (menjabat sebagai Ketua sejak tanggal 21 November 2016 hingga 29 Juni 2018, dan menjadi anggota sejak 21 November 2016 hingga sekarang)
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

c. Qualification and Profile of the Risk Monitoring Committee Members

Qualification and Profile of the Risk Monitoring Committee Members are as follow:

- **Sutirta Budiman**, Chairman/Member of Risk Monitoring Committee (served as the Chairman since December 23, 2019)
  The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioner/ Directors/Executive Officers.

- **Nobiru Adachi**, Member of Risk Monitoring Committee.
  The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

- **Nobuiku Chiba**, Member of Risk Monitoring Committee
  The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

- **Mahdi Mahmudy**, Member of Risk Monitoring Committee (served as the Chairman since November 21, 2016 until June 29, 2018, and served as the member since November 21, 2016 until now).
  The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

- **Amalia Setyanti Lestari,** Anggota merangkap Sekretaris Komite Pemantau Risiko
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Bambang Setyoko,** Anggota Komite Pemantau Risiko
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

d. Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2019, seluruh anggota independen pada Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

1) Seluruh anggota independen pada Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
2) Bukan merupakan mantan anggota Direksi atau pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
3) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan J Trust Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama J Trust Bank.
4) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha J Trust Bank.

e. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris,

- **Amalia Setyanti Lestari**, Member and Secretary of Risk Monitoring Committee.
  The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

- **Bambang Setyoko**, Member of Risk Monitoring Committee
  The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

d. Independence of Members of Risk Monitoring Committee

During 2019, all independent members of the Risk Monitoring Committee have fulfilled the following independence requirements:

1) All independent members of the Risk Monitoring Committee shall have no financial, management, share ownership and/or family relationships with members of the BoC, BoD and/or Controlling Shareholders or any relationship with the Bank, which may affect the ability to act independently.
2) Not former members of the Board of Directors or parties that have relationship with the bank which may affect the ability of the party to act independently.
3) They have no affiliated relationship with J Trust Bank, Board of Commissioners, Board of Directors or Major Shareholder of J Trust Bank.
4) Has no direct or indirect business relationship relating to the business activities of J Trust Bank.

e. Roles and Responsibilities of Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee has the duty to provide independent professional opinion to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, assisting the Board of Commissioners for its oversight responsibilities, including identifying issues requiring the attention of the Board of Commissioners, and

dan mendukung tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang diajukan oleh Direksi untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
3) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
4) Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan bank.
5) Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi atas informasi dan/atau peristiwa-peristiwa yang diidentifikasi berpotensi atau mengandung risiko-risiko.
6) Melakukan penelaahan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam menyelenggarakan pengelolaan risiko.
7) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
8) Memastikan perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan prosedur dan praktik manajemen risiko pada semua tingkatan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pengendalian risiko yang sehat.

f. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko

1) Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko yang merupakan Komisaris Independen Bank atau oleh anggota Komisaris Independen lainnya yang ditunjuk untuk memimpin rapat saat terjadinya kekosongan pada posisi Ketua Komite Pemantau Risiko.

supporting other tasks related to the duties of the Board of Commissioners, among others:

1) Evaluate the risk management policy proposed by the Board of Directors to obtain approval from the Board of Commissioners.
2) Monitor and evaluate the conformity between risk management policy and the implementation of the policy.
3) Monitor and evaluate the execution of the duties of the Risk Management Committee and Risk Management Work Unit to provide recommendations to the Board of Commissioners.
4) Review the Bank's compliance with laws and regulations in risk management and other legislation relating to bank activities.
5) Provide input and recommendation to the Board of Commissioners to advise the Board of Directors on information and/or events identified as potentially or risk-bearing.
6) Conduct review and research deemed necessary for the implementation of the functions of the Board of Directors in organizing risk management.
7) Evaluate and decide on the proposal from the Board of Directors relating to transactions that require the approval of the Board of Commissioners.
8) Ensure continuous improvements of risk management policies and implementation of risk management procedures and practices at all levels to ensure healthy risk management and control.

f. Policy and Conduct of Risk Monitoring Committee

1) Every meeting of the Risk Monitoring Committee is chaired by the Chairman of the Risk Monitoring Committee who is an Independent Commissioner of the Bank or by other Independent Commissioners appointed to lead the meeting when the position of Chairman of Risk Monitoring Committee is absent.

2) Rapat Komite Pemantau Risiko selalu dihadiri oleh lebih dari 51% dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko yang anggotanya terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen serta pihak independen.

3) Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak mencapai musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite yang hadir dalam rapat.

4) Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

5) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

6) Sepanjang tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 7 kali rapat dengan melibatkan Satuan Kerja Manajemen Risiko, juga unit kerja lainnya yang terkait (jika dipandang perlu), seperti Kepatuhan, dan lain-lain.

2) Risk Monitoring Committee Meetings are always attended by more than 51% of the Risk Monitoring Committee members whose members consist of Commissioners and Independent Commissioners and independent parties.

3) Decisions of the Committee Meetings shall be based on deliberations to reach consensus. If it does not reach a consensus, then the decision shall be made by voting agreed by 2/3 (two thirds) of the Committee members present at the meeting.

4) The results of the Risk Monitoring Committee meetings shall be set forth in minutes of meetings and properly documented.

5) The dissenting opinions that occur in Committee meetings shall be clearly stated in the minutes of the meeting and the reasons for such dissent.

6) Throughout 2018, the Risk Monitoring Committee has conducted 6 meetings involving Risk Management Work Unit, as well as other related work units (if deemed necessary), such as Compliance, and others.

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat setiap anggota Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

Frequency of attendance of each member of the Risk Monitoring Committee as follows:

Nama Name	**Periode Jabatan** Terms of Position	**Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko** Number of Risk Monitoring Committee Meetings	**Frekuensi Kehadiran** Total Attendance	**Tingkat Kehadiran** Attendance
Kwik Ing Hie (Komisaris Independen, Ketua) [1] (Independent Commissiner, Chairman) [1]	1 Januari s/d 27 Juni 2019 January 1 until June 27, 2019	4	4	100%
Sutirta Budiman (Komisaris Independen, Ketua) [2] (Independent Commissioner, Chairman) [2]	16 Desember s/d 31 Desember 2019 December 16, 2019 until December 31, 2019	1	1	100%
Nobiru Adachi (Komisaris Utama, Anggota) (President Commissioner, Member)	01 Januari s/d 31 Desember 2019 January 1 until December 31, 2019	7	3	43%
Nobuiku Chiba (Komisaris, Anggota) [3] (Commissioner, Member) [3]	12 Maret s/d 31 Desember 2019 March 12 until December 31, 2019	7	6	86%
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen, Anggota) (Independent Commissioner, Member)	01 Januari s/d 31 Desember 2019 January 1 until December 31, 2019	7	6	86%

Nama Name	**Periode Jabatan** Terms of Position	**Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko** Number of Risk Monitoring Committee Meetings	**Frekuensi Kehadiran** Total Attendance	**Tingkat Kehadiran** Attendance
Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen, Anggota/ Sekretaris) (Independent Party, Member/ Secretary)	01 Januari s/d 31 Desember 2019 January 1 until December 31, 2019	7	7	100%
Martinus Rosadi Nugroho (Pihak Independen, Anggota) [4] (Independent Party, Member) [4]	01 Januari s/d 1 Juli 2019 January 1 until July 1, 2019	4	4	100%
Bambang Setyoko (Pihak Independen, Anggota) [5] (Independent Party, Member) [5]	19 Juli 2019 s/d. 31 Desember 2019 July 19 until December 31 2019	3	3	100%

[1] Berakhirnya masa jabatan berdasarkan hasil keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2019
[2] Ditunjuk sebagai Komisaris Independen berdasarkan hasil keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2019, dan efektif tanggal 16 Desember 2019 sebagai Komisaris Independen sejak lulus *fit and proper test* oleh OJK
[3] Ditunjuk sebagai Komisaris berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 20 September 2019 dan efektif sejak tanggal 12 Maret 2019 sebagai Komisaris sejak lulus *fit and proper test* oleh OJK
[4] Mengundurkan diri efektif sejak tanggal 2 Juli 2019
[5] Diangkat sebagai anggota Pihak Independen efektif sejak tanggal 19 Juli 2019

[1] The end of position is based on the decision of AFMS dated June 27, 2019
[2] Appointed as Independent Commissioner based on the decision of AGMS dated June 27, 2019 and effective dated December 16, 2019 served as Independent Commissioner since passing fit and proper test by OJK
[3] Appointed as Commissioner based on the decision of EGMS on September 20, 2019 and effective since March 12, 2019 as Commissioner since passing fit and proper test by OJK
[4] Resigned effective since July 2, 2019
[5] Promoted as a member from Independent Party effective since July 19, 2019

g. Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komite Pemantau Risiko, selama tahun 2019 anggota Pihak Independen Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain:

g. Education and/or Training of Members of Risk Monitoring Committee

To support the implementation of duties and responsibilities of Risk Monitoring Committee members, during 2019 members of Risk Monitoring Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. have attended various education/training programs, workshops, conferences, seminars, among others:

No.	**Nama** Name	**Periode Menjabat** Terms of Position	**Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar** Trainings, Workshop, Conference, Seminar	**Penyelenggara** Organizer	**Waktu & Lokasi** Venue & Time
1	Amalia Setyanti Lestari	01 Januari s/d 31 Desember 2019 January 1 until December 31, 2019	Workshop Certification in Audit Committee Practices (CACP) batch XI	Ikatan Komite Audit Indonesia	29 Maret 2019 March 29, 2019 Jakarta
			Panel Diskusi "Menyongsong Penerapan Standar Auditing (SA) 701 – Komunikasi Key Audit Matters" Panel discussion on "Facing the Implementation of Auditing Standard (SA) 701 – Communication Key Audit Matters"	Ikatan Komite Audit Indonesia	28 Agustus 2019 August 28, 2019 Jakarta
			Seminar Indonesia Banking Expo 2019 "Consolidate to elevate"	Perbanas dan Mc Kinsey & Co.	6 November 2019 Jakarta
			Board Governance Forum 2019	KPMG	11 November 2019 Jakarta
2	Bambang Setyoko	19 Juli s/d 31 Desember 2019 July 19 until December 31, 2019	Seminar Indonesia Banking Expo 2019 "Consolidate to elevate"	Perbanas dan Mc Kinsey & Co.	6 November 2019 Jakarta

h. Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantau Risiko

Program kerja Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2019 sebagai berikut:

1) Memberikan tanggapan atas kebijakan perkreditan Bank
2) Menanggapi profil risiko Bank yang disajikan setiap triwulan
3) Menanggapi laporan GCG Bank yang disajikan setiap semester
4) Menanggapi *update* oleh unit APU/PPT terkait inisiatif-inisiatif yang ada
5) Menanggapi *update* oleh Divisi Manajemen Risiko terkait pemekaran fungsinya dan inisiatif-inisiatif yang dicanangkan di tahun 2019
6) Ikut berpartisipasi dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi dan memberikan masukan yang dipandang perlu.

h. Work Program and Realization of Risk Monitoring Committee

The work program of the Risk Monitoring Committee in 2019 is as follows:

1) Provide response on the Bank's loan policy
2) Respond to the Bank's risk profile presented every quarter
3) Respond to the Bank's GCG report presented every semester
4) Respond to update by APU/PPT unit related to available initiatives
5) Respond on updates by Risk Management Division related to its function expansion and initiatives carried out in 2019
6) Participate in the coordination meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors and provide the necessary inputs.

Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2019 sebagai berikut:

Realization of Work Program of Risk Monitoring Committee in 2019 are as follow:

No.	Realisasi Program Kerja Realization of Working Program	
1	Pemaparan tentang beberapa pemberian kredit dengan jumlah yang cukup signifikan pada segmen Commercial dan SME	Presentation on several loan deliveries with a significant amount in Commercial and SME segment.
2	Berdiskusi secara mendalam dengan pihak Direksi terkait kinerja perkreditan Bank, seperti: evaluasi atas kredit-kredit yang dapat berpotensi menjadi bermasalah di periode berikut	Focused discussion with the Board of Directors related the Bank's loan performance, such as: evaluation on loans that potentionally become problematic in the next period.
3	Pembahasan tentang Profil Risiko Bank serta Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana disampaikan kepada OJK secara triwulanan; termasuk penerapan GCG	Discussion about the Bank's Risk Profile as well as the Bank's Soundness Level as delivered to OJK quarterly; including the implementation of GCG.
4	Pembahasan tentang adanya inisiatif kredit konsultasi dengan Dewan Komisaris	Discussion on the loan consultation initiative with the Board of Commissioners
5	Pembahasan tentang pengembangan sistem guna mendukung fungsi APU/PPT yang dicanangkan sebagai bagian dari implementasi Bersama dengan regulator terkait (PPATK)	Discussion on the system development to support the function of APU/PPT launched as part of the joint implementation with related regulators (PPATK)
6	Pembahasan tentang pemutakhiran kebijakan terkait perkreditan bersama tim *Task Force* yang dibentuk untuk itu	Discussion on policy update related to loans with the Task Force team formed for this purpose
7	*Update* dari Divisi Manajemen RIsiko terkait pemekaran pada fungsi QA	Update from Risk Management Division related to expansion on QA function
8	Ikut berpartisipasi dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi	Participate in coordination meeting for the Board of Commissioners and Directors.

3.3. Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee*)

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terkait kebijakan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Selain itu, tujuan pembentukan Komite juga untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

3.3 Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee is a committee established to assist the Board of Commissioners in supervising the nomination and remuneration policies of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In addition, the purpose of establishing the Committee is also to ensure the following:

- Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan otoritas pengawas Bank, Menteri Tenaga Kerja dan Peraturan lainnya serta hal-hal yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
- Memastikan pelaksanaan tugas penerapan tata kelola Dewan Komisaris serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas Bank.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi emiten atau Perusahaan Publik.

a. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*)

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, komposisi dan struktur organisasi serta persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja serta waktu kerja, pelaksanaan rapat dan

- Ensure compliance with the requirements from the supervisory authority of the Bank, the Minister of Manpower and other Regulations as well as matters specified in the General Meeting of Shareholders ("GMS").
- Ensure the implementation of the governance duties of the Board of Commissioners' and to meet the requirements stipulated by the supervisory authority of the Bank.

Legal Basis

The establishment of the Nomination and Remuneration Committee refers to the following Regulations:

1. Regulation of the Financial Services Authority No. 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
2. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
3. Regulation of the Financial Services Authority No. 45/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks.
4. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 40/SEOJK.03/2016 dated September 26, 2016 regarding the Implementation of Good Corporate Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks.
5. Regulation of the Financial Services Authority No. 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on the Nomination and Remuneration Committee of the issuer or Public Company.

a. Nomination and Remuneration Committee Charter

The Nomination and Remuneration Committee maintains a Nomination and Remuneration Committee Charter which governs matters relating to the performance of duties and responsibilities and authority, composition and organizational structure and requirements of membership, methods and work procedures and working hours, conduct of meetings and reporting, term of duty and honorarium. The Nomination

pelaporan, masa tugas dan honorarium. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*) ini dikaji dan diperbarui secara berkala oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku.

b. Struktur dan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 18 Juli 2019 yang disetujui dengan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 18 Juli 2019, dan Surat Keputusan Direksi No.19.05/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VII/2019 tertanggal 19 Juli 2019, maka struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi sebagai berikut:

1. Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) : Ketua/Anggota
2. Nobuiku Chiba (Komisaris) : Anggota
3. Pey Fang Ong (EVP HC & GS) : Sekretaris/Anggota

Sebagaimana dinyatakan di atas, per 31 Desember 2019 Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

a. 1 (satu) orang Komisaris
b. 1 (satu) orang Komisaris Independen
c. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Sepanjang tahun 2019, jumlah Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa berjumlah lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

and Remuneration Committee Charter will be reviewed periodically or if it is deemed necessary to review and evaluate its adequacy by the Board of Commissioners in order that the Nomination and Remuneration Committee functions can be performed at an optimal level in accordance with prevailing laws and regulations.

b. Structure and Membership of Nomination and Remuneration Committee

Based on the Recommendation from Nomination and Remuneration Committee dated July 18, 2019 approved by the Circular Decision of the Board of Commissioners dated July 18, 2019 and Decision Letter of the Board of Directors No.19.05/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VII/2019 dated July 19, 2019, then the structure and membership of Nomination and Remuneration Committee becomes as follows:

1. Mahdi Mahmudy (Independent Commissioner: Chairman/Member
2. Nobuiku Chiba (Commissioner): Member
3. Pey Fang Ong (EVP HC & GS): Secretary/ Member.

As stated above, as of 31 December 2019, Nomination and Remuneration Committee is chaired by an Independent Commissioner with the member consisting of:

a. 1 (one) Commissioner
b. 1 (one) Independent Commissioners
c. 1 (one) Executive Officer

Each Commissioner who becomes the Chairman and member of the Nomination and Remuneration Committee has effectively passed the feasibility and proper test by OJK. Appointment of the names of the Chairman and members of the Nomination and Remuneration Committee as mentioned above meets the criteria set forth in the OJK Rules.

Throughout 2019, the number of Independent Commissioners and Executive Officers who are members of the Nomination and Remuneration Committee consists of more than 51% (fifty one percent) of the total members of the Nomination and Remuneration Committee

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

- Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- Masa jabatan anggota Komite tidak lebih dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- Penggantian anggota Komite yang tidak berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anggota Komite tersebut tidak lagi dapat menjalankan fungsinya.
- Komite memilih calon anggota dari hasil pemilihan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan berdasarkan persyaratan yang ada, termasuk persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan kemampuan, dan kepatutan.

Term of Office of Members of Nomination and Remuneration Committee

- Committee member is appointed for a certain period and may be re-appointed.
- Term of office of Committee members is no more than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association.
- Replacement of Committee member that is not from the Board of Commissioners is conducted 60 (sixty) days at the latest after the Committee member is no longer able to carry out their function.
- The committee selects the candidate of members from selection process in the General Meeting of Shareholders based on the exising requirement, including general requirement, special requirement, skill requirement, and appropriateness.

Masa tugas/jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Per 31 Desember 2019 yaitu:

The term of office of members of nomination and remuneration Committee as of December 31, 2019 is as follow:

No	Nama Name	Posisi di Komite Position in Committee	Masa Tugas/Jabatan Terms of Duty/Position	
			Tanggal efektif Effective Date	Akhir Masa Tugas/ Jabatan End of Term of Duty/ Position
1	Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Ketua Chairman	27 Juni 2019 June 27, 2019	30 Juni 2020 June 30, 2020
2	Nobuiku Chiba (Komisaris) | Commissioner)	Anggota Member	12 Maret 2019 March, 12. 2019	30 Juni 2020 June 30, 2020
3	Pey Fang Ong (EVP HC & GS)	Sekretaris/Anggota Secretary/Member	19 Juli 2019 July 19, 2019	-

c. Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Kualifikasi dan Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. adalah sebagai berikut:

- **Mahdi Mahmudy**, Ketua/Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (menjabat sebagai Ketua sejak 29Juni 2018 hingga sekarang).
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Nobuiku Chiba**, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

c. Qualification and Profile of Nomination and Remuneration Committee Members

Qualification and Profile of Nomination and Remuneration Committee Members are as follow:

- **Mahdi Mahmudy**, Chairman/Member of Nomination and Remuneration Committee (served as the Chairman since June 29, 2018 until now).
  The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

- **Nobuiku Chiba**, Member of Nomination and Remuneration Committee.
  The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

- **Pey Fang Ong**, Anggota merangkap Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi.
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

d. Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Selama tahun 2019, seluruh anggota independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:
1) Seluruh anggota independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
2) Bukan merupakan anggota Direksi.

e. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
1) Terkait dengan Kebijakan Nominasi:
   1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
      - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi/pencalonan;
      - Kebijakan untuk evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen.
   2. Mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat untuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen kepada Dewan Komisaris untuk nominasi dan persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- **Pey Fang Ong**, Member and Secretary of Nomination and Remuneration Committee.
  The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

d. Independence of Members of Nomination and Remuneration Committee
During 2019, all independent members of the Nomination and Remuneration Committee have fulfilled the following independence requirements:
1) All independent members of the Nomination and Remuneration Committee shall have no financial relationship, management relationship, share ownership and/or family relationships with members of the BoC, BoD and/or Controlling Shareholders or any relationship with the Bank, which may affect the ability to act independently.
2) Not a member of the Board of Directors.

e. Roles and Responsibilities of Nomination and Remuneration Committee
The Nomination and Remuneration Committee is responsible for providing recommendations to the Board of Commissioners, including but not limited to the following:
1) Related to Nomination Policy:
   1. Provide recommendations to the Board of Commissioners on:
      - Composition of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
      - Policies and criteria required in the Nomination process;
      - Performance evaluation policy for the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
   2. Identify, review, and propose candidates for member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners and/or Independent Party to the Board of Commissioners for nomination and approval by the General Meeting of Shareholders.

3. Mengevaluasi kandidat berdasarkan kesempatan yang sama tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama atau sumber rekomendasi.
4. Mendukung Dewan Komisaris dalam evaluasi kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan untuk tujuan evaluasi.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kompetensi untuk anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2) Terkait dengan Kebijakan Remunerasi :
1. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   - Struktur remunerasi
   - Kebijakan tentang remunerasi
   - Paket remunerasi termasuk gaji, tunjangan, bonus dan insentif lainnya (jika berlaku) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Pihak Independen.
2. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai kebijakan remunerasi untuk karyawan.
3. Mendukung Dewan Komisaris dalam menilai kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Komite memastikan bahwa kebijakan remunerasi, struktur dan paket remunerasi mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:
   - Remunerasi dalam industri sesuai dengan skala dan aktivitas bisnis Bank;

3. Evaluate candidates based on equal opportunity and regardless of their gender, race, religion, or the source of recommendation.
4. Support the Board of Commissioners in evaluating the performance of the members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or Independent Party based on the determined benchmark for evaluation purposes.
5. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the competence building program for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.

2) Related to Remuneration Policy
1. Evaluate and provide recommendation to the Board of Commissioners on:
   - Remuneration structure
   - Policy on remuneration
   - Remuneration package including salary, allowance, bonus, and other incentives (if applicable) to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Independent Party.
2. Evaluate and provide recommendation to the Board of Directors on remuneration policies for employees.
3. Support the Board of Commissioners to conduct performance evaluation against the remuneration received by the member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
4. The Committee ensures that the remuneration policy, structure and package have considered the following factors:
   - Remuneration in the industry in line with the Bank's business scale and activities;

- Tugas, peran dan tanggung jawab anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan sejalan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank;
- Kinerja kerja individu;
- Keadilan terhadap "*peer group*";
- Risiko;
- Keseimbangan antara antara tunjangan tetap dan variabel lainnya;
- Pertimbangan tujuan jangka panjang dan strategi Bank, stabilitas keuangan Bank, kecukupan modal bank dan kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang Bank.

5. Komite mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan Remunerasi mematuhi peraturan yang berlaku.
6. Komite secara berkala meninjau dan memperbarui kebijakan remunerasi, struktur dan paket remunerasi.

f. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

1) Rapat Komite harus dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan.

2) Setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh Ketua Komite yang merupakan seorang Komisaris Independen Bank.

3) Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh minimal 51% dari total anggota, termasuk Komisaris Independen selaku Ketua dan sebagai anggota adalah Komisaris dan Pejabat Eksekutif.

4) Keputusan rapat Komite hanya dapat dilakukan berdasarkan konsensus. Dalam hal tidak ada konsensus tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite yang hadir dalam rapat.

- Duties, role and responsibilities of members of the Board of Directors, Commissioners and/or employees in line with the Bank's objectives and performances;
- Individual performance;
- Fairness to the "peer group";
- Risk
- Balance between fixed allowance and other variables;
- Consideration of the Bank's long-term goals and strategy, the Bank's financial stability, the Bank's capital adequacy and the Bank's requirement for short and long-term liquidity.

5. The Committee evaluates and ensures that the Remuneration policy is heeding the prevailing regulations.
6. The Committee periodically reviews and updates remuneration policy, structure and package.

f. Policy and Conduct of Nomination and Remuneration Committee Meeting

1) Committee Meetings should be conducted periodically minimum 1 (one) meeting in every 4 (four) months.
2) Each Nomination and Remuneration Committee meeting is chaired by the Chairman of the Committee who is an Independent Commissioner of the Bank.
3) Nomination and Remuneration Committee Meetings are always attended by more than 51% of the members, including Independent Commissioner as Chairperson and as a member are Commissioner and Executive Officer.
4) Decision of the Committee Meetings shall be based on deliberations to reach consensus. If no consensus is reached, then the decision is made based on voting agreed by 2/3 (two thirds) of the Committee members present at the meeting.

5) Hasil rapat Komite harus ditetapkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
6) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dinyatakan secara jelas dalam Risalah Rapat dan alasan perbedaan pendapat tersebut.
7) Sepanjang tahun 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan 6 kali rapat.

5) Meeting results are set forth in minutes of meetings and well documented.
6) The dissenting opinions that occur in Committee meetings shall be clearly stated in the minutes of the meeting and the reasons for such dissent.
7) Throughout 2019, the Nomination and Remuneration Committee has held 6 meetings.

Frekuensi Kehadiran dan Tingkat Kehadiran rapat setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

The frequency of attendance of each member of the Nomination and Remuneration Committee is as follows:

Nama Name	**Periode Jabatan** Terms of Position	**Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko** Number of Meetings for Nomination and Remuneration Committee	**Frekuensi Kehadiran** Total Attendance	**Tingkat Kehadiran** Attendance
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen, Ketua) (Independent Commissioner, Chairman)	01 Januari s/d 31 Desember 2019 January 1 until December 31, 2019	6	6	100%
Nobuiku Chiba (Komisaris, Anggota) | (Commissioner, Member)	12 Maret s/d 31 Desember 2019 March 12 until December 31, 2019	6	6	100%
Agung Cahyanto (Kadiv. HC & GS, Sekretaris/Anggota) *) Head of Divison HC & GS) *)	02 April s/d 18 Juli 2019 April 2 until July 18, 2019	3	3	100%
Pey Fang Ong (EVP HC & GS, Sekretaris/ Anggota) | Secretary/Member)	19 Juli s/d 31 Desember 2019 July 19 until December 31 2019	3	3	100%

*) Sejak tanggal 19 Juli 2019 sudah tidak menjabat sebagai Sekretaris/Anggota Komite.
No longer served as Secretary/Member of the Committee since July 19, 2019

No	**Tanggal Rapat** Date	**Agenda Rapat** Meeting Agenda
1	20 Desember 2019 December 20, 2019	Rekomendasi penunjukan Ketua Komite Pemantau Risiko & Perubahan Susunan Komite Audit Recommendation on the appointment of Chairman of Risk Monitoring Committee & Change of Structure of Audit Committee
2	5 Desember 2019 December 5, 2019	Peninjauan kembali komposisi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan KRN serta Peninjauan jangka waktu penugasan Komisaris dan Pihak Independen pada Komite Review of the composition of Audit Committee, Risk Monitoring Committee and KRN as well as Review on term of duty of Commissioners and Independent Party to the Committee.
3	26 September 2019 September 26, 2019	Peninjauan kembali atas kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD dan EVP Bank Review on the policy of compensation, benefit & facility of BOC, BOD, and EVP of the Bank.
4	19 Juli 2019 July 19, 2019	Perubahan keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite KRN Changes on the composition of the Board of Commissioner and the Board of Directors for GMS on June 2019
5	20 Juni 2019 June 20, 2019	Perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi untuk RUPS Juni 2019 Changes on the composition of the Board of Commissioner and the Board of Directors for GMS on June 2019
6	30 April 2019 April 30, 2019	*Review* kebijakan Kompensasi, benefit dan fasilitas Komisaris, Direksi dan Executive Vice President Review on the policies on compensation, benefit and facilities of the Commissioners, the Board of Directors, and Executive Vice President.

g. Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2019 anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain :

g. Education and/or Training of Members of Nomination and Remuneration Committee

To improve the competence and understanding in supporting the conduct of its duties and responsibilities, during 2018 Nomination and Remuneration Committee members of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. have attended various education/training programs, workshops, conferences, seminars, among others:

No.	Nama Name	Periode Menjabat Terms of Position	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar Trainings, Workshops, Conference, Seminars	Penyelenggara Organizer	Tempat & Waktu Place and Time
1	Agung Cahyanto	02 April s/d 18 Juli 2019 April 2 until July 18, 2019	Penerapan Operational Risk Management sebagai Mitigasi Fraud Risk (Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1) Implementation of Risk Management Operation as Risk Fraud Mitigation (Certification Maintenance of Risk Management Level 1)	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Jakarta, 12 Juli 2019 Jakarta, July 12, 2019
2	Pey Fang Ong	19 Juli s/d 31 Desember 2019 July 19 until December 31, 2019	Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 Training on Risk Management Certification Level 5	Lentera Mulia Persada (LMP)	Jakarta, 24 Oktober 2019 Jakarta, October 25, 2019

h. Program Kerja dan Realisasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2019 sebagai berikut:

1. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk dapat dipertimbangkan dan direkomendasikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.
2. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat Pihak Independen kepada Dewan Komisaris.
3. Komite meninjau, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi dan fasilitas dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Komite secara berkala meninjau, dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan penerapan kebijakan sumber daya manusia terkait remunerasi dan nominasi khususnya atas Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.
5. Komite meninjau dan memberikan rekomendasi penunjukan dan perubahan susunan anggota komite.

h. Work Program and Realization of Nomination and Remuneration Committee

The work program of the Nomination and Remuneration Committee in 2019 is as follows:

1. The Committee identifies, reviews, and proposes candidates for member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be considered and recommended by the Board of Commissioners to Shareholders.
2. The Committee identifies, reviews and proposes candidates of Independent Party to the Board of Commissioners.
3. The Committee reviews, and provides recommendation to the Board of Commissioners on remuneration and facilities from members of the Board of Commissioners and Directors.
4. The Committee periodically reviews, and provides recommendations to the policies and implementation of human resources policy related to remuneration and nomination particularly on the Board of Commissioners, Directors, and Executive Officers.
5. The Committee reviews and provides recommendation on the appointment and changes on the structure of members of the committee.

Realisasi Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2019 sebagai berikut:

The realization of the Work Program of the Nomination and Remuneration Committee in 2019 is as follows:

No.	Realisasi Program Kerja Realization of Working Program	
1	Penunjukan Ketua Komite Pemantau Risiko dan perubahan susunan Komite Audit	Appointment of Chairman of Risk Monitoring Committee and change on the structure of Audit Committee
2	Peninjauan kembali komposisi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi/Nominasi	Review on the composition of Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration/Nomination Committee
3	Perubahan terhadap kebijakan tentang kompensasi, benefit dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan EVP	Change on policies on compensation, benefit and facilities given to the Board of Commissioners, Directors and EVP
4	Rekomendasi susunan dari Komite di bawah Dewan Komisaris	Recommendation of structure from Committees under the Board of Commissioners
5	Perubahan komposisi Derwan Komisaris dan Direksi untuk RUPS Juni 2019 Penunjukan: 1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Wakil Direktur Utama, 3 (tiga) Direktur, 1 (satu) Komisaris Independen Penunjukan kembali: 1 (satu) Direktur 1 (satu) Komisaris Independen Menerima berakhirnya masa tugas 1 (satu) Komisaris Independen	Changes on the composition of the Board of Commissioner and Directors for GMS June 2019 Appointment: 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, 3 (three) Directors, 1 (one) Independent Commissioner Re-appointment: 1 (one) Director 1 (one) Independent Commissioner Accepting the end term of 1 (one) Independent Commissioner
6	Review atas kebijakan kompensasi, benefit dan fasilitas BOC, BOD dan EVP Bank	Review on the policy of compensation, benefit, and facilities of BOC, BOD, and EVP of the Bank.

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun yaitu:

Remuneration already paid to the members of Remuneration and Nomination Committee in 1 (one) year is:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain Tahun 2019 Type of Reumeration and Other Facilities 2019	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun *) Amount Received in 1 Year *) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Members of Remuneration and Nomination Committee	
	Orang Person	Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, *tantiem*, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Remuneration (salary, bonus, routine allowance, tantiem, and other non-natura facilities)	4 *)	4.975.305.116
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) Other Facilities in the form of benefits in kind (housing, transportation, health insurance etc) that: - Dapat dimiliki (purna jabatan) | Can be owned (after retirement) - Tidak dapat dimiliki | Can not be owned	4 *)	191.400.000
Total	**4**	**5.166.705.116**

Keterangan | Note:
*) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak
Remuneration received already includes tax

3.4. Penilaian terhadap Kinerja Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, yang membantu Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya.

3.4. Performance Evaluation of Committees under BOC

Performance Evaluation of Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Commitment

The Board of Commissioners has conducted evaluation to the implementation of duties and responsibilities to the committes under the Board of Commissioners, who assist the Board of Commissioners in its monitoring function.

a. Penilaian kinerja Komite Audit :

a.1. Frekuensi rapat

Pelaksanaan kegiatan rapat Komite Audit dengan satuan kerja audit internal (SKAI), satuan kerja lain (Financial Control Division) dan rapat internal komite selama tahun 2019 telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang antara lain membahas monitoring realisasi rencana audit, monitoring tindak lanjut penyelesaian audit internal dan eksternal, penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan historis tahun 2019 dan penunjukan kepala Satuan Kerja Audit Intern.

Selama tahun 2019 Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 9 kali yang dihadiri oleh seluruh anggota.

a.2. Tugas dan tanggung jawab

Dewan Komisaris memandang bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang antara lain menyediakan evaluasi dan rekomendasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Evaluasi dan rekomendasi yang telah dilakukan oleh komite antara lain :

- Evaluasi mengenai pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahun 2018.
- Evaluasi kinerja SKAI secara semesteran.
- Rekomendasi terhadap penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahun 2019.
- Rekomendasi terhadap penunjukan kepala Satuan Kerja Audit Intern yang diusulkan oleh Presiden Direktur.

a. Performance evaluation of Audit Committee:

a.1. Meeting Frequency

The implementation of meetings of the Audit Committee with internal audit working unit (SKAI), other working units (Financial Control Division) and the committee's internal meetings during 2019 went well according to its duties and responsibilities, which among others discussed monitoring the realization of audit plan, monitoring follow-up on the solution of internal and external audit, appointment of public accountant and public accountant offices that will conduct the audit on historical financial report of 2019 and appointment of Internal Audit Working Unit chairman.

During 2019, the Audit Committee held meetings 9 times and attended by all members.

a.2. Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners sees that the implementation of duties and responsibilities of Audit Committee is already in line with its main duties and responsibilities such as providing evaluation and recommendation to support the implementation of monitoring duties of the Board of Commissioners.

Evaluation and recommendation carried out by the committees are among others:

- Evaluation on the implementation of audit service on historical financial information in 2018.
- Evaluation on SKAI performance in semester.
- Recommendation on the appointment of public accountant office and public accountant that will provide audit service on the historical financial information in 2019.
- Recommendation on the appointment of chairman of Internal Audit Working Unit as proposed by the President Director.

- Rekomendasi terhadap penyusunan rencana audit tahun 2020 dan alokasi anggaran terkait pelaksanaan fungsi audit intern.

b. Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko :

b.1. Frekuensi rapat

Sepanjang tahun 2019, Komite Pemantau Risiko ("KPR") telah melakukan rapat KPR sebanyak 7 kali atau lebih dari minimum frekuensi yang dipersyaratkan oleh ketentuan maupun Piagam KPR yang ada dengan dihadiri oleh lebih dari 51% anggota KPR termasuk Komisaris Independen dan pihak-pihak Independen sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada rapat-rapat ini, KPR membahas beberapa topik secara berkala, seperti: profil risiko Bank dengan Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan dan Divisi *Financial Control*, pembahasan atas beberapa pemberian kredit tertentu (secara sampel) dengan Divisi Bisnis dan Divisi Manajemen Risiko, perubahan kebijakan dengan divisi-divisi yang terkait, dan lain-lain.

b.2. Tugas dan tanggung jawab

Dewan Komisaris memandang bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti:

- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap pemberian kredit kepada debitur-debitur tertentu.
- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap usulan perbaikan kebijakan dan prosedur perkreditan bank.
- Memberi masukan dan rekomendasi atas profil risiko Bank (khususnya atas inisiatif perbaikan atas penilaiannya di periode ke depan) dan
- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap inisiatif-inisiatif perbaikan yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan (khususnya terkait pemutakhiran sistem APU-PPT), dan lain-lain.

- Recommendation on the formulation of audit plan in 2020 and budget allocation related to the implementation of internal audit function.

b. Assessment on Risk Monitoring Committee's performance

b.1. Meeting Frequency

Throughout 2019, the Risk Monitoring Committee (KPR) held KPR meeting 7 times or more than the minimum requirement as required by the provisions and existing KPR Charter with attendance of more than 51% member of KPR including Independent Commissioner and Independent parties according to the prevailing provisions.

In these meetings, KPR discussed several topics periodically, such as: the Bank's risk profile with Risk Management Division, Compliance Division and Financial Control Division, discussion on several special loan deliveries (by sample) with Business Division and Risk Management Division, changes on policies with related divisions, and others.

b.2. Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners sees that the implementation of duties and responsibilities of Risk Monitoring Committee is in line with its main duties and functions, including:

- Providing inputs and recommendation on loan disbursement to particular debtors.
- Providing inputs and recommendation on proposal of policy improvement and the Bank's loan procedures.
- Providing inputs and recommendation on the Bank's risk profile (particularly on the improvement initiative on the assessment in the next period); and
- Providing inputs and recommendation on improvement initiatives done by Risk Management Division, Compliance Division (particularly related to APU-PPT updating system), and others.

c. Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi:

c.1. Frekuensi rapat:

Sepanjang tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi ("KRN") telah melakukan rapat KRN sebanyak enam kali atau lebih dari minimum frekuensi yang dipersyaratkan oleh ketentuan maupun Piagam KNR yang ada dengan dihadiri oleh seluruh anggota KRN termasuk Komisaris Independen dan pihak-pihak Independen sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat KRN tersebut membahas antara lain mengenai peninjauan kembali komposisi Komite di bawah Komisaris, peninjauan kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD dan EVP, peninjauan dan usulan kandidat Direksi dan anggota Dewan Komisaris, perubahan keanggotaan Komite di bawah Komisaris.

c.2. Tugas & Tanggung Jawab

Dewan Komisaris, menilai bahwa KRN telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik & telah menyediakan rekomendasi yang sesuai, di antaranya adalah rekomendasi terhadap:

- Melakukan peninjauan atas kebijakan kompensasi, benefit dan fasilitas Komisaris, Direksi dan *Executive Vice President* dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan daya saing di industri perbankan.
- Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat untuk anggota Direksi & anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk dapat dipertimbangkan dan direkomendasikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.
- Perubahan keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

c. Assessment on the Performance of Nomination and Remuneration Committee

c.1. Meeting Frequency:

Throughout 2019, the Nomination and Remuneration Committee (KRN) held KRN meetings 6 times or more than the minimum required by the provisions or existing KNR Charter, attended by all members of KRN including Independent Commissioners and Independent Parties according to prevailing provisions.

These KRN meetings discussed among others about review on the composition of Committees under the Board of Commissioners, review on policies on compensation, benefit & facilities for BOC, BOD, and EVP, review and proposal of the candidates for the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, changes on the membership of Committees under the Board of Commissioners.

c.2. Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners, appraised that KRN has carried out its duties and responsibilities in a good manner and already provided a proper recommendation, among others are recommendation on:

- Review on policies on compensation, benefit and facilities for the Board of Commissioners, Directors and Executive Vice President by considering the company's ability and competitiveness in the banking industry.
- The Committees identifying, reviewing, and proposing candidates for members of the Board of Directors & members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be considered and recommended by the Board of Commissioners to Shareholders.
- The changes of membership in Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee.

- Peninjauan kembali komposisi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi serta peninjauan jangka waktu penugasan Komisaris dan Pihak Independen pada Komite.

Sehingga secara keseluruhan, rekomendasi yang diberikan oleh KRN dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya.

Komite-Komite di Bawah Direksi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah membentuk dan menetapkan Komite-Komite di Bawah Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Direksi dalam melakukan fungsi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus dengan memberikan bimbingan/saran/rekomendasi mengenai kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan risiko Bank. Rekomendasi dari setiap komite menjadi acuan Direksi dalam proses pengambilan keputusan.

Komposisi keanggotaan komite-komite di Bawah Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. disusun sesuai dengan kompleksitas tugas dan tanggung jawab komite. Komite-Komite di bawah Direksi antara lain :

3.1. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)

Struktur dan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko adalah Komite dalam Sistem Manajemen Risiko Bank yang bersifat non-struktural, berkedudukan di Kantor Pusat yang merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi profil risiko serta memberikan saran dan langkah perbaikan dalam forum rapat minimal diselenggarakan 1 (satu) kali sebulan. Pembentukan Komite ini berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

- Review on the composition of Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee as well as review on the period of term of duties of the Board of Commissioners and Independent Party in the Committee.

Therefore, overall, the recommendation provided by KRN can provide an optimal contribution to the Board of Commissioners on its monitoring function.

Committees under BOD

To support the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, therefore the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. had established and determined the Committees under the Board of Directors in accordance with the Board of Directors' duty and collective responsibility to assist the Board of Directors in performing certain functions requiring special expertise by providing guidance/advice/recommendations for the policy and by supervising the Bank's risk management. Recommendations from each committee will serve as a reference for the Board of Directors in the decision-making process.

The composition of committees under the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is prepared in accordance with the complexity of the committee's duties and responsibilities. Committees under the Board of Directors include:

3.1. Risk Management Committee

Structure and Membership

The Risk Management Committee is a nonstructural Risk Management Committee of the Bank, domiciled in the Head Office to formulate policies, strategies and guidelines for the implementation of risk management, to oversee policy implementation, to monitor the progress and conditions of the risk profile and to provide suggestions and remedial measures in the meeting which is held at least 1 (one) time on a quarterly basis. The establishment of this Committee is based on the Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

Sesuai Surat Keputusan Direksi No.24.12/S.Kep-Dir-RMD/JTRUST/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, Struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko :

Ketua : President Director
Wakil ketua : MD Compliance & Corporate Legal

Sekretaris : EVP Risk Management
Anggota : Anggota Tetap dengan Hak Suara

- President Director
- MD Compliance & Corporate Legal
- MD Finance & Planning
- MD Operation & Credit Administration
- MD Information Strategy & Technology
- EVP Risk Management
- EVP Finance & Planning
- EVP Treasury & Financial Institution
- EVP Business
- EVP Human Capital, General Services & Corporate Secretary
- EVP Credit Risk Reviewer & Special Asset Management

Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara

1. Risk Management Division (RMD)
2. Compliance Division (CPD)
3. Internal Audit Division (IAD)

Diwakili oleh Division Head/ Deputy Division Head Apabila berhalangan hadir, dapat menunjuk/diwakilkan 1 (satu) orang level Department Head.

Anggota Tidak Tetap

1. Financial Control Division (FCD)
2. Planning & Performance Division (PPD)
3. Head Office Operation Division (HOPD)
4. Credit Administration Division (CAD)
5. Treasury Capital Markets Division (TCMD)
6. Financial Institution Division (FID)
7. Business Linkage & Consumer Division (BLCD)
8. Supply Chain Financing Division (SCFD)

In accordance with the Decree of the Board of Directors No.24.12/S.Kep-Dir-RMD/JTRUST/II/2020 dated 24 February 2020, Structure and membership of the Risk Management Committee is as follows:

Members of the Risk Management Committee:

Chairman : President Director
Vice Chairman : MD Compliance & Corporate Legal
Secretary : EVP Risk Management
Members : Permanent Voting Member

- President Director
- MD Compliance & Corporate Legal
- MD Finance & Planning
- MD Operation & Credit Administration
- MD Information Strategy & Technology
- EVP Risk Management
- EVP Finance & Planning
- EVP Treasury & Financial Institution
- EVP Business
- EVP Human Capital, General Services & Corporate Secretary
- EVP Credit Risk Reviewer & Special Asset Management

Contributing Permanent Non-Voting Member

1. Risk Management Division (RMD)
2. Compliance Division (CPD)
3. Internal Audit Division (IAD)

Represented by Division Head/ Deputy Division Head who if is unable to attend, may appoint/ be represented by 1 (one) person in Department Head level.

Non-Permanent Members

1. Financial Control Division (FCD)
2. Planning & Performance Division (PPD)
3. Head Office Operation Division (HOPD)
4. Credit Administration Division (CAD)
5. Treasury Capital Markets Division (TCMD)
6. Financial Institution Division (FID)
7. Business Linkage & Consumer Division (BLCD)
8. Supply Chain Financing Division (SCFD)

9. Commercial Division (CD)
10. Human Capital & General Services Division (HCGD)
11. Corporate Secretary Division (CSD)
12. Corporate Legal & Litigation Division (CLLD)
13. Credit Risk Reviewer (CRRD)
14. Special Asset Management Division (SAMD)
15. Information Technology Division (ITD)
16. Information Strategy Division (ISD)
17. President Office Division (POD)
18. Japan & Korea Desk (JKD)
19. Retail Banking Division (RBD)
20. Marketing & Promotion Division (MPD)

Diwakili oleh Division Head/ Deputy Division Head. Apabila berhalangan hadir, dapat menunjuk/diwakilkan 1 (satu) orang level Department Head.

Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada President Director terkait Manajemen Risiko, yang sekurang-kurangnya meliputi:

- Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
- Penyempurnaan proses Manajemen Risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal serta internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
- Penetapan (*justification*) dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*) seperti pelampauan ekspansi usaha yang *significant* dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

9. Commercial Division (CD)
10. Human Capital & General Services Division (HCGD)
11. Corporate Secretary Division (CSD)
12. Corporate Legal & Litigation Division (CLLD)
13. Credit Risk Reviewer (CRRD)
14. Special Asset Management Division (SAMD)
15. Information Technology Division (ITD)
16. Information Strategy Division (ISD)
17. President Office Division (POD)
18. Japan & Korea Desk (JKD)
19. Retail Banking Division (RBD)
20. Marketing & Promotion Division (MPD)

Represented by Division Head/ Deputy Division Head. Should they are not able to attend, they may appoint/be represented by 1 (one) person in Department Head level.

Roles and Responsibilities

The roles and responsibilities of the Risk Management Committee are to provide recommendations to the President Director related to Risk Management, which at least include:

- Preparation of Risk Management policies and its amendment, including Risk Management strategies, risk appetite, and risk tolerance, Risk Management Framework as well as contingency plan to anticipate unexpected condition.
- Improvement Risk Management process that include identification, measurement, monitor and mitigation periodically as well as incidental as the impact of the Bank's external and internal change that affect the capital adequacy, the Bank's risk profile and ineffectiveness of Risk Management implementation based on evaluation.
- The justification and/or deviant business decision (irregularities) such as significant exceed business expansion compared to the Bank's Business Plan that already stipulated or position taking or risk exposure that exceed the stipulated limit.

- Tugas Sekretaris Komite Manajemen Risiko yaitu menyusun jadwal, agenda pertemuan dan mendistribusikan materi rapat Komite Manajemen Risiko 1 hari kerja sebelum dilaksanakannya pertemuan serta membuat notulen hasil pertemuan Komite Manajemen Risiko.

- The duties of the Secretary of Risk Management Committee are organizing schedule, meeting agenda and distributing the meeting materials of Risk Management Committee 1 working day before the meeting is conducted as well as formulating minutes on the result of Risk Management Committee meetings.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2019, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat yang membahas agenda sebagai berikut:

Conduct of Duties and Frequency of Meetings

During 2019, the Risk Management Committee has held 12 (twelve) meetings and conducted various work programs with the following agenda:

No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda
1	28 Januari 2019 Januari 28, 2019	Laporan Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating*) Semester II tahun 2018 yang disampaikan ke OJK Report on the Bank's Healthiness Level (Risk Based Bank Rating) for the 2nd Semester of 2018 delivered to OJK
2	26 Februari 2019 Februari 26, 2019	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi *Market & Liquidity Risk* dan *Credit Risk* posisi Februari 2019 The Bank's monthly Risk Profile particularly on position of Market & Liquidity Risk and Credit Risk as of February 2019
3	25 Maret 2019 March 25, 2019	*Review* parameter risiko pada Profil Risiko Bank dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Review risk parameters on the Bank's Risk Profile and Credit Delivery Guideline (PPK)
4	18 April 2019 April 18, 2019	Laporan Profil Risiko Bank Triwulan I tahun 2019 yang akan disampaikan ke OJK Report on the Bank's Risk Profile for the 1st Quarter 2019 that will be presented to OJK
5	27 Mei 2019 May 27, 2019	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Market & Liquidity Risk dan Credit Risk posisi Mei 2019 The Bank's monthly Risk Profile particularly on position of Market & Liquidity Risk and Credit Risk as of May 2019
6	2 Juli 2019 July 2, 2019	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Market & Liquidity Risk dan Credit Risk posisi Semster 1 tahun 2019 The Bank's monthly Risk Profile particularly on position of Market & Liquidity Risk and Credit Risk for the 1st semester 2019
7	17 Juli 2019 July 17, 2019	Laporan Profil Risiko Bank Triwulan II tahun 2019 yang akan disampaikan ke OJK Report on the Bank's Risk Profile for the 2nd Quarter 2019 that will be presented to OJK
8	25 Juli 2019 July 25, 2019	Laporan Tingkat Kesehatan Bank (Risk Based Bank Rating) Semester I tahun 2019 yang disampaikan ke OJK Report on the Bank's Healthiness Level (Risk Based Bank Rating) for the 1st Semester of 2019 delivered to OJK
9	23 September 2019 September 23, 2019	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi *Market & Liquidity Risk, Credit Risk, Quality Assurance, Update& ReviewSOP* Bank per September 2019 Review SOP Bank per September 2019 The Bank's monthly Risk Profile particularly on position of Market & Liquidity Risk, Credit Risk, Quality Assurance, Update & Review SOP of the Bank as of September 2019
10	15 Oktober 2019 October 15, 2019	Laporan Profil Risiko Bank Triwulan III tahun 2019 yang akan disampaikan ke OJK Report on the Bank's Risk Profile for the 3rd Quarter 2019 that will be presented to OJK
11	28 Oktober 2019 October 28, 2019	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Market & Liquidity Risk dan Credit Risk posisi Oktober 2019 The Bank's monthly Risk Profile particularly on position of Market & Liquidity Risk and Credit Risk as of October 2019
12	25 November 2019 November 25, 2019	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Market & Liquidity Risk dan Credit Risk posisi November tahun 2019 The Bank's monthly Risk Profile particularly on position of Market & Liquidity Risk and Credit Risk as of November 2019

Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko secara rutin dan aktif telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko di Bank berjalan dengan baik, sehingga Bank dapat mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan

Performance Evaluation of Risk Management Committee

The Risk Management Committee regularly and actively undertakes its duties to ensure that risk management in the Bank is well implemented, so that the Bank can anticipate any changes as a result of business development as well as

usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal. Selama tahun 2019, Komite Manajemen Risiko telah melakukan antara lain:

- Menyetujui Laporan Profil Risiko Bank yang dilakukan secara berkala.
- Menyetujui Laporan Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan secara berkala.

3.2. *Asset & Liability Committee* (ALCO)

Sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia, dimana Bank membentuk *Asset & Liability Committee* (ALCO) yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kompleksitas Bank. *Asset & Liability Committee* (ALCO) adalah suatu komite yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan tingkat suku bunga dan strategi pengelolaan aktiva dan pasiva Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur dan Keanggotaan

Asset & Liability Committee (ALCO) tidak lagi merupakan Sub Komite dari Komite Manajemen Risiko, melainkan komite tersendiri yang bertanggung jawab kepada Direksi.

Sesuai Surat Keputusan Direksi No.10.06/S.Kep-DIR/TCMD/JTRUST/IV/2019 tanggal 10 April 2019 dan perubahannya sesuai Memo No.602/MEMO/TCMD/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Permohonan Review Surat Keputusan Direksi PT Bank J Trust Indonesia Tbk tentang Asset & Liability Committee, Struktur dan keanggotaan Asset & Liability Committee (ALCO) sebagai berikut:

Susunan Anggota ALCO:

Ketua : President Director
Wakil ketua : EVP /Managing Director Treasury & Funding
Sekretaris : Treasury & Capital Markets Division Head

1. Anggota dengan Hak Suara (*Voting Member*)
   a. Anggota Tetap dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*)
      - President Director
      - EVP/Managing Director Business
      - EVP/Managing Director Treasury & Funding
   b. Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)
      - EVP/Managing Director Finance, Planning, & IT
      - EVP/Managing Director Risk, Business Risk Reviewer & Collection

changes in external conditions. During 2019, the Risk Management Committee has conducted among others:

- Approval for Bank Risk Profile Reports conducted periodically.
- Approval for periodic Bank Healthiness Rating Report.

3.2. Asset & Liability Committee (ALCO)

In accordance with Bank Indonesia Regulations, in which the Bank established an Asset & Liability Committee (ALCO) whose organizational size is adjusted to the Bank's complexity. Asset & Liability Committee (ALCO) is a committee that is responsible for determining interest rate policy and management strategy of Bank assets and liabilities based on prudent principles and in accordance with prevailing regulations.

Structure and Membership

The Asset & Liability Committee (ALCO) is no longer a Sub Committee of the Risk Management Committee, but a separate committee that is responsible to the Board of Directors.

In accordance with the Letter of Decision of the Board of Directors No.10.06/S.Kep-DIR/TCMD/JTRUST/IV/2019 dated March 29, 2019 and the amendment pursuant to Memo No.602/MEMO/TCMD/III/2019 dated March 29, 2019 regarding Request for Review of Decision Letter of Directors PT Bank J Trust Indonesia Tbk on Asset & Liability Committee, Structure and Membership of Asset & Liability Committee (ALCO) is as follows:

Composition of ALCO Members:

Chairman : President Director
Vice Chairman : Director/EVP of Treasury & Institutional Banking
Secretary : Treasury & Capital Markets Division Head

1. Voting Member
   a. Permanent Voting Member
      - President Director
      - EVP/Managing Director Business
      - EVP/Managing Director Treasury & Funding
   b. Non-Permanent Voting Member
      - EVP/Managing Director Finance, Planning, & IT
      - EVP/Managing Director Risk, Business Risk Reviewer & Collection

2. Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (Contributing Non-Voting Member)
   a. Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (Contributing Permanent Non-Voting Member)
      1. EVP/Managing Director Compliance & Corporate Legal
      2. Business Linkage & Consumer Division Head
      3. Japan Linkage Division Head
      4. Consumer & SME Division Head
      5. Funding & Distribution Management Division Head
      6. Cash & Financial Technology Division Head
      7. Risk Management Division Head
      8. Compliance Division Head
      9. Corporate Legal & Litigation Division Head
      10. Planning & Performance Division Head

3. Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Permanent & Non-Voting Member*) yang hadir sesuai keterkaitan dengan agenda/topik.
   - Financial Control Division Head
   - Kepala Kantor Wilayah yang terkait dengan materi yang menjadi agenda pembahasan rapat komite.

Tugas dan Tanggung Jawab

I. Tugas Pokok Komite ALCO

Dalam menjalankan fungsinya, Komite ALCO memiliki beberapa tugas pokok yang harus dijalankan agar berjalan dengan semestinya antara lain :

1. Melakukan pengembangan, kajian dan simulasi strategi Asset dan Liabilities Management (ALMA).
2. Melakukan evaluasi risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas beserta strategi pengelolaannya.
3. Melakukan kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dari aktiva dan mengurangi beban (biaya) dari pasiva.
4. Melakukan kaji ulang antara realisasi dan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan.
5. Menyampaikan informasi setiap perkembangan ketentuan dan peraturan yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA kepada Direksi.

2. Contributing Non-Voting Member
   a. Contributing Permanent Non-Voting Member
      1. EVP/Managing Director Compliance & Corporate Legal
      2. Business Linkage & Consumer Division Head
      3. Japan Linkage Division Head
      4. Consumer & SME Division Head
      5. Funding & Distribution Management Division Head
      6. Cash & Financial Technology Division Head
      7. Risk Management Division Head
      8. Compliance Division Head
      9. Corporate Legal & Litigation Division Head
      10. Planning & Performance Division Head

3. Contributing Non-Permanent & Non-Voting Member who present according to their relation with agendas/topics.
   - Financial Control Division Head
   - Head of Regional Office related to the committee meeting agenda.

Roles and Responsibilities

I. Main Roles of ALCO Committee

In carrying out its function, ALCO Committee has several main roles to be carried out to deliver according to its objective, such as:

1. Conduct the development, review and simulation of asset and liability management strategies (ALMA).
2. Evaluate interest rate risk, exchange rate risk and liquidity risk and management strategies.
3. Review assets and liabilities pricing in order to optimize revenue from assets and reduce expenses from liabilities.
4. Review the realizations and business plans of the established bank.
5. Deliver information on every development of the rules and regulations affecting the ALMA strategy and policies to the Board of Directors.

II. Tata Tertib Pimpinan Rapat ALCO

Rapat Komite dipimpin oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua dan apabila Wakil Ketua berhalangan, maka rapat dipimpin oleh anggota *Non-Permanent Voting Members* dengan urutan sebagai berikut:

a. EVP/Managing Director Finance, Planning & IT
b. EVP/Managing Director Risk, Business Risk Reviewer & Collection

III. Working Group

1) Working Group ALCO adalah kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan masing-masing Divisi, minimal diwakili oleh Department Head dari Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*) dan Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Permanent Non-Voting Member*). *Working Group* bertanggung jawab untuk mendukung Komite dalam merumuskan usulan dari unit kerja hingga menjadi rekomendasi yang akan diputus oleh Komite di dalam Rapat Komite. Peserta *Working Group* dapat disesuaikan dengan materinya yang akan diusulkan atau dibahas dalam Rapat Komite.
2) Dalam mendukung persiapan Rapat Komite, *Working Group* akan melakukan pembahasan atas usulan yang terkait dengan Agenda Rapat Komite.
3) Dalam hal dipandang perlu melaksanakan Rapat Lintas Komite, maka *Working Group* dapat mengundang group terkait dalam Komite lain untuk membahas materi dalam rapat secara lintas Komite tersebut.
4) Pertemuan *Working Group* diselenggarakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Komite dan membahas materi yang akan diputuskan pada Rapat Komite.
5) Rapat *Working Group* memiliki wewenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui pengajuan usul materi untuk dibahas dalam rapat Komite.

II. Code of Conduct of ALCO Meeting's Chairman

The Committee Meeting is chaired by the Chairman and should the Chairman is absent, therefore the meeting is led by Vice Chairman and should the Vice Chairman is absent, then the meeting is led by Non-Permanent Voting Members with the following sequence:

a. EVP/Managing Director Finance, Planning & IT
b. EVP/Managing Director Risk, Business Risk Reviewer & Collection

III. Working Group

1) The Working Group of the ALCO Committee is a working group of representatives of each division, at least represented by the Head Department of a Contributing Permanent Non-Voting Member and Contributing Non- Permanent & Non-Voting Member. The Working Group is responsible for supporting the Committee in formulating proposals from the business unit as recommendations to be decided by the committee in the Committee meetings. Working Group participants may be adapted based on the materials to be proposed or discussed in the Committee meetings.
2) In support of the preparation of the Committee Meetings, the Working Group will discuss the proposals related to the agenda of the Committee Meetings.
3) Where it is deemed necessary to conduct a Cross-Committee Meeting, the Working Group may invite relevant groups in other Committees to discuss the matter in meetings on a cross-committee basis.
4) The Working Group Meeting shall be held no later than 2 (two) working days prior to the conduct of the Committee Meeting and it will discuss the material to be decided at the Committee Meetings.
5) Working Group Meetings have the authority to approve or not approve the submission of material for discussion in the Committee Meetings.

6) Rapat *Working Group* dipimpin oleh Sekretaris Komite sesuai topik yang dibahas. Dalam hal Sekretaris Komite berhalangan, maka sekretaris pengganti ditetapkan oleh Sekretaris Komite yang bertindak sebagai Pimpinan Rapat Working Group yaitu dipimpin oleh pejabat struktural yang ditunjuk oleh Sekretaris Komite.

7) Risalah Rapat *Working Group* dibuat oleh Sekretaris Komite dan disampaikan pada peserta rapat dengan tembusan kepada *Voting Members*.

8) *Working Group* bertanggung jawab dalam pembahasan bahan rapat serta rekomendasi yang akan disampaikan dalam Rapat Komite.

9) Dalam hal terdapat usul materi yang dibahas dalam Rapat *Working Group* telah menghasilkan rekomendasi yang tetap, maka proses pengesahan dan/atau persetujuannya dari Anggota dengan Hak Suara (Direksi & EVP) dapat dilaksanakan secara sirkuler.

IV. Pengambilan Keputusan

1. *Quorum* (minimum kehadiran) Rapat adalah sebagai berikut:
   a. 75% dari Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*) dan ditambah minimal oleh 1 (satu) orang dari Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*).
   b. 50% dari Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*).
2. Sekurang-kurangnya Keputusan Komite maupun Sub Komite diputuskan oleh:
   75% dari Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*) dan ditambah minimal oleh 1 (satu) orang dari Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*).
3. Keputusan Rapat dianggap sah bila rapat dinyatakan *quorum*.

6) Working Group Meetings are chaired by the Secretary of the Committee based on the topics covered. In the event that the Secretary is absent, the replacement Secretary shall be determined by the Secretary of the Committee acting as Chairman of the Working Group Meeting which is chaired by a structural officer appointed by the Secretary of the Committee.

7) Minutes of Working Group Meetings are made by the Secretary of the Committee and submitted to the meeting participants with a copy to the Voting Members.

8) The Working Group is responsible for the discussion of meeting materials and recommendations to be presented in the Committee Meetings.

9) In the event that any proposed material discussed in the Working Group Meeting has resulted in a permanent recommendation, the process of ratification and/or approval of the Member with the Voting Right (Board of Directors & EVP) may be implemented in circular.

IV. Decision Making

1. The Meeting Quorum is as follows:
   a. 75% from the Permanent Voting Member and minimum 1 (one) person from Non-Permanent Voting Member.
   b. 50% from Contributing Permanent Non-Voting Member.
2. The Committee or Sub-Committee Decision is at least decided by:
   75% from Permanent Voting Member and minimum 1 (one) person from Non-Permanent Voting Member.
3. The decision is valid only when the meeting is stated quorum.

V. Tim ALCO Support

Tim ALCO Support adalah staff dari Divisi Treasury (Koordinator), Planning & Performance Division, Financial Control Division, Funding & Distribution Management Division, Business Linkage & Consumer Division Head, Japan Linkage Division Head, Consumer & SME Division Head, Risk Management Division dimana tugas Divisi tersebut adalah:

1. Menyiapkan data-data yang diperlukan untuk bahan presentasi Rapat ALCO
2. Membuat undangan Rapat ALCO
3. Sebagai Notulis dalam Rapat ALCO
4. Menindaklanjuti hasil Rapat ALCO dan melaporkan kepada *Working Group*

VI. Tugas-Tugas Pokok dari Masing-Masing Divisi (*Working Group Member*)

1. Risk Management Division

Apabila diperlukan dapat memberikan opini, kajian potensi dan mitigasi risiko dari penetapan suku bunga dana pihak ketiga yang berhubungan dengan biaya dana serta penetapan suku bunga kredit dan *margin* yang dikaji dari faktor kondisi pasar serta faktor internal, antara lain: membuat analisis *Repricing Gap, Risk Premium*, dan Laporan *Risk Management Division* secara berkala.

2. Planning & Performance Division

Men-*support* data-data yang diperlukan untuk bahan presentasi Rapat ALCO

3. Divisi Treasury & Capital Markets Division

a. Menyiapkan data-data terkait dengan *treasury* seperti suku bunga acuan Bank Indonesia, suku bunga antar bank, dan lain-lain.

b. Menindaklanjuti hasil Rapat ALCO seperti:
- Surat edaran penetapan suku bunga *Fund Transfer Pricing* (FTP)
- Surat edaran penetapan suku bunga *funding* maupun *lending*
- Strategi pendanaan, *target funding* dan *lending* secara bulanan
- Masalah lain yang diputuskan dalam Rapat ALCO

V. ALCO Support Team

ALCO support team are staff from Treasury Division (Coordinator), Planning & Performance Division, Financial Control Division, Funding & Distribution Management Division, Business Linkage & Consumer Division Head, Japan Linkage Division Head, Consumer & SME Division Head, Risk Management Division Head where the divisions' roles are as follows:

1. Prepare data needed for presentation in ALCO Meetings.
2. Prepare ALCO Meeting invitations
3. As a note taker in ALCO Meetings
4. Follow up the result of ALCO Meetings and report them to the Working Group.

VI. Main Roles from Each Division (Working Group Member)

1. Risk Management Division

If needed, may provide opinion, study on risk potential and mitigation from the determination of interest rate of the third party fund related to the cost of fund as well as determination of loan interest rate and margin that are being assessed from market condition factor as well as internal factor, such as: making Analysis on Repricing Gap, Risk Premium, and periodical Report on Risk Management Division.

2. Planning & Performance Division

Support data needed for presentation in ALCO Meetings.

3. Treasury & Capital Market Division

a. Prepare data related to treasury such as Bank Indonesia's benchmark interest rate, interest rate between banks, and others.

b. Follow up the ALCO Meetings result such as:
- Circular letter on the determination of Fund Transfer Pricing (FTP) interest rate
- Circular letter on the determination of funding and lending interest rate.
- Monthly financing strategy, target funding and lending.
- Other problems decided in ALCO Meetings

- Notulen Rapat ALCO dan dokumentasinya

4. **Funding & Distribution Management Division**
   a. Menyiapkan data komparasi suku bunga yang berkaitan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari bank pesaing dalam tier yang sama, ditambah dengan satu Bank BUMN.
   b. Menyiapkan proyeksi data *funding* minimal dalam 1 (satu) bulan kedepan dan/atau lebih (apabila diperlukan) serta target dalam 1 (bulan).
   c. Membuat usulan suku bunga *funding* berupa deposito dan sejenisnya.
   d. Membuat realisasi hasil ALCO periode bulan sebelumnya yang berhubungan dengan *funding.*
   e. Mengkaji realisasi pergerakan dan komposisi Dana Pihak Ketiga.
   f. Menyiapkan data-data berkaitan dengan Suku bunga CASA maupun sejenisnya, biaya provisi dan *fee base income* serta produk-produk baru.
5. ***Business Linkage & Consumer Division, Commercial & SME Division, Japan Linkage Division***
   a. Menyiapkan data komparasi suku bunga berkaitan dengan perkreditan (*lending rate*) dari bank pesaing dalam tier yang sama, ditambah dengan satu Bank BUMN.
   b. Menyiapkan proyeksi data kredit minimal dalam 1 (satu) bulan kedepan dan/atau dapat lebih panjang dari 1 (satu) bulan (apabila diperlukan) serta target dalam satu bulan berjalan.
   c. Membuat usulan suku bunga *lending* serta realisasi ALCO periode bulan sebelumnya.
6. ***Compliance Division***
   a. Apabila diperlukan dapat memberikan opini atas keabsahan dan ruang lingkup peraturan yang berhubungan dengan penetapan serta pengelolaan suku bunga.
   b. Memastikan bahwa aspek kepatuhan harus tetap dijaga sesuai dengan ketentuan internal maupun eksternal.

- Minutes in ALCO Meetings and its documentations.

4. **Funding & Distribution Management Division**
   a. Prepare interest rate data comparison related to the Third-Party Fund (DPK) from competitors in the same tier and one State-Owned Bank.
   b. Prepare funding data projection at the minimum of 1 (one) month forward and/or more (if needed) as well as target in 1 (month).
   c. Provide proposal for interest rate funding in form of time deposit and its kind.
   d. Formulate realization of ALCO result of the previous month related to funding.
   e. Assess the realization of the Third-Party Fund movement and composition.
   f. Prepare data related to CASA interest rate or its kind, provision fee and fee base income as well as new products.
5. **Business Linkage & Consumer Division, Commercial & SME Division, Japan Linkage**
   a. Prepare comparison data of interest rate related to lending rate from competitors in the same tier, and one State-Owned Bank.
   b. Prepare lending data projection minimum 1 (one) month forward and/or longer from 1 (one) month (if needed) as well as target for ongoing month.
   c. Formulate proposal of lending interest rate as well as ALCO realization of the previous month.
6. **Compliance Division**
   a. If needed, may provide opinion on the validation and scope of regulation related to the determination and management of interest rate.
   b. Ensure that compliance aspect have to be maintained in line with internal and external provisions.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2019, *Asset & Liability Committee* (ALCO) telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali rapat dan melakukan berbagai program kerja yang membahas agenda sehingga menetapkan Memo untuk diedarkan sebagai berikut:

Conduct of Duties and Frequency of Meetings

During 2019, the Asset & Liability Committee (ALCO) has conducted 13 (thirteen) meetings and conducted various work programs with agenda as follow:

No	Tanggal Date	Memo	
1	15 Januari 2019 January 15, 2019	1. Perhitungan *Fund Transfer Pricing* (FTP) mulai tanggal 17Januari 2019 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal17 Januari 2019 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 17 Januari 2019	1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on January 17, 2019 2. Amendment of Credit Interest Rate Startted on January 17, 2019 3. Amendment of Saving Interest Rate Started on January 17, 2019
2	8 Februari 2019 February 8, 2019	1. Perhitungan *Fund Transfer Pricing* (FTP) mulai tanggal 11 Februari 2019 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 11 Februari 2019 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 11 Februari 2019	1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on February 11, 2019 2. Amendment of Credit Interest Rate Startted on February 11, 2019 3. Amendment of Saving Interest Rate Started on February 11, 2019
3	11 Maret 2019 March 11, 2019	1. Perhitungan *Fund Transfer Pricing* (FTP) mulai tanggal 12 Maret 2019 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 12 Maret 2019 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 12 Maret 2019	1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on March 12, 2019 2. Amendment of Credit Interest Rate Startted on March 12, 2019 3. Amendment of Saving Interest Rate Started on March 12, 2019
4	10 April 2019 April 10, 2019	1. Perhitungan *Fund Transfer Pricing* (FTP) mulai tanggal 11 April 2019 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 11 April 2019 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 11 April 2019	1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on April 11, 2019 2. Amendment of Credit Interest Rate Startted on April 11, 2019 3. Amendment of Saving Interest Rate Started on April 11, 2019
5	7 Mei 2019 May 7, 2019	1. Perhitungan *Fund Transfer Pricing* (FTP) mulai tanggal 8 Mei 2019 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 8 Mei 2019 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 8 Mei 2019	1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on May 8, 2019 2. Amendment of Credit Interest Rate Startted on May 8, 2019 3. Amendment of Saving Interest Rate Started on May 87, 2019
6	17 Juni 2019 June 17, 2019	1. Perhitungan *Fund Transfer Pricing* (FTP) mulai tanggal 18 Juni 2019 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 18 Juni 2019 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan mulai tanggal 18 Juni 2019	1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on June 18, 2019 2. Amendment of Credit Interest Rate Startted on June 18, 2019 3. Amendment of Saving Interest Rate Started on June 18, 2019
7	10 Juli 2019 July 10, 2019	1. Perhitungan *Fund Transfer Pricing* (FTP) mulai tanggal 11 Juli 2019 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 11 Juli 2019 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 11 Juli 2019	1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on July 11, 2019 2. Amendment of Credit Interest Rate Startted on July 11, 2019 3. Amendment of Saving Interest Rate Started on July 11, 2019
8	12 Agustus 2019 August 12, 2019	1. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 13 Agustus 2019 2. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 13 Agustus 2019	1. Amendment of Credit Interest Rate Startted on August 13, 2019 2. Amendment of Saving Interest Rate Started on August 13, 2019
9	12 September 2019 September 12, 2019	1. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 17 September 2019 2. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 17 September 2019	1. Amendment of Credit Interest Rate Startted on September 17, 2019 2. Amendment of Saving Interest Rate Started on September 17, 2019
10	7 Oktober 2019 October 7, 2019	1. Perhitungan *Fund Transfer Pricing* (FTP) mulai tanggal 9 Oktober 2019 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 9 Oktober 2019 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 9 Oktober 2019	1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on October 9, 2019 2. Amendment of Credit Interest Rate Startted on October 9, 2019 3. Amendment of Saving Interest Rate Started on October 9, 2019
11	28 Oktober 2019 October 28, 2019	Rapat bersifat ad hoc ,tidak ada Memo yang diedarkan	Ad-hoc meeting and no memo circulated

No	Tanggal Date	Memo	
12	9 Desember 2019 December 9, 2019	1. Perhitungan *Fund Transfer Pricing* (FTP) berlaku mundur untuk bulan November dan Desember 2019 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mundur untuk bulan November dan Desember 2019 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mundur untuk bulan November dan Desember 2019	1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) valid backwards for November and December 2019 2. mendment of Credit Interest Rate valid backwards for November dan December 2019 3. Amendment of Saving Interest Rate valid backwards for November and December 2019
13	23 Desember 2019 December 23, 2019	1. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mundur selama bulan Desember 2019	1. Amendment of Credit Interest Rate valid backwards for December 2019

Penilaian Kinerja Komite ALCO

Komite ALCO melakukan rapat rutin bulanan untuk memantau risiko likuiditas *dan Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB), serta mengarahkan strategi untuk mengoptimalkan komposisi *Balance Sheet* dan mengoptimalkan *Net Interest Margin* (NIM) Bank.

ALCO Committee Performance Evaluation

The ALCO Committee conducts monthly meetings to monitor liquidity risk and the Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB), and devises strategies to optimize Balance Sheet composition and optimize the Bank's Net Interest Margin (NIM).

3.3. Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*)

Komite Pengarah Teknologi Informasi berfungsi membantu Direksi dalam merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan kebijakan dalam setiap tahapan penggunaan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya teknologi informasi, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk. sehingga dapat memberikan hasil yang benar, akurat, tepat waktu, dan dapat menjamin kerahasiaan informasi.

Struktur dan Keanggotaan

Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. yang berlaku karena adanya proses penyempurnaan organisasi dalam rangka penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik dan untuk menyesuaikan kondisi bisnis Bank saat ini, maka dilakukan perubahan Struktur Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.23.02/S.Kep-Dir-ITD/JTRUST/XI/2018 tanggal 23 November 2018 sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi:

1. Ketua, merangkap anggota:
   Direktur Finance, Planning & IT
2. Sekretaris, merangkap anggota:
   Kepala Divisi IT
3. Anggota-anggota:

3.3 IT Steering Committee

The Information Technology Steering Committee functions to assist the Board of Directors in formulating and establishing strategic and policy plans in each stage of the utilization of information technology since the planning, procurement, development, operation, maintenance to discontinuation and elimination of information technology resources, to improve the effectiveness and efficiency of data processing of business activities PT Bank JTrust Indonesia Tbk. so as to provide correct, accurate, timely results and to maintain the confidentiality of information.

Structure and Membership

In connection with changes in organizational structure of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. applicable due to the process of improving the organization in order to apply the basic principles of good governance and to adjust the current business condition of the Bank, the changes the Membership Structure of Information Technology Steering Committee PT Bank JTrust Indonesia Tbk. based on Decree of Directors No.23.02/ S.Kep-Dir-ITD/JTRUST/XI/2018 dated 23 November 2018 is as follows:

Composition of Members of IT Steering Committee:

1. Chairman, cum member: Director of Finance, Planning & IT
2. Secretary, cum member: Head of IT Division
3. Members:

- Direktur Business Risk & Operation
- Direktur Treasury and Funding
- EVP Business
- Kepala Divisi Cash & Financial Technology
- Kepala Divisi Risk Management
- Kepala Divisi Corporate Legal & Compliance
- Kepala Divisi Operation & Credit Administration
- Kepala Divisi Financial Control
- Kepala Divisi Planning and Performance

Fungsi

Komite Pengarah Teknologi Informasi berfungsi membantu Direksi dalam merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan kebijakan dalam setiap tahapan penggunaan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya teknologi informasi, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk. sehingga dapat memberikan hasil yang benar, akurat, tepat waktu, dan dapat menjamin kerahasiaan informasi.

Wewenang

1) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
2) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi yang telah dibuat oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk dan juga menetapkan status prioritas proyek Teknologi Informasi serta bersifat kritikal (berdampak signifikan) terhadap kegiatan operasional Bank.
3) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati, agar sejalan dengan Rencana Bisnis Bank dan senantiasa mengupayakan investasi teknologi informasi yang memberikan nilai tambah kepada Bank.

- Director of Business Risk & Operation
- Director of Treasury and Funding
- EVP Business
- Head of Cash & Financial Technology Division
- Head of Risk Management Division
- Head of Corporate Legal & Compliance Division
- Head of Operation & Credit Administration Divsion
- Head of Financial Control Division
- Head of Planning and Performance Division

Function

The Information Technology Steering Committee functions to assist the Board of Directors in formulating and establishing strategic and policy plans in each stage of the utilization of information technology since the planning, procurement, development, operation, maintenance to discontinuation and elimination of information technology resources, to improve the effectiveness and efficiency of data processing of business activities PT Bank JTrust Indonesia Tbk. so as to provide correct, accurate, timely results and to maintain the confidentiality of information.

Authorities

1) Provide recommendations to the Board of Directors in connection with the Information Technology Strategic Plan that is in line with the strategic plan of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2) Provide recommendations to the Board of Directors in relation to the conformity of approved Information Technology projects with the Information Technology Strategic Plan established by PT Bank JTrust Indonesia Tbk. and also establish the priority status of the Information Technology project as well as critical (significant) impact on the Bank's operational activities.

3) Provide recommendations to the Board of Directors related to the conformity of the implementation of the Information Technology projects with the agreed project plan, in line with the Business Plan of the Bank and continuously seek information technology investments that add value to the Bank

4) Memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang teknologi yang sesuai kebutuhan sistem informasi manajemen dan kegiatan usaha, dimana rekomendasi yang disampaikan memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:
   a. Rencana pelaksanaan (*road map*) untuk mencapai kebutuhan teknologi informasi yang mendukung strategi bisnis Bank. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*.
   b. Sumber daya yang dibutuhkan.
   c. Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
5) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
6) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan aktifitas pengawasan dan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.
7) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara secara efektif, efisien dan tepat waktu.
8) Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam menetapkan *vendor* terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang diserahkan kepada pihak ketiga, atas dasar *due diligence* dengan melakukan evaluasi dan menilai informasi-informasi yang terkait dengan penyedia jasa antara lain meliputi:
   a. Eksistensi dan sejarah perusahaan.
   b. Kualifikasi, latar belakang dan reputasi pemilik perusahaan.
   c. Perusahaan lain yang menggunakan jasa yang sama dari penyedia jasa sebagai referensi.
   d. Kondisi keuangan termasuk *review* atas laporan keuangan *audited*.
   e. Kemampuan dan efektifitas pemberian jasa termasuk dukungan purna jual.
   f. Teknologi dan arsitektur sistem.

4) Provide recommendation to the Board of Directors on technology that suits the needs of management information systems and business activities, where the recommendations conveyed consider the efficiency, effectiveness and the following factors:
   a. Road map to achieve the information technology needs that support the Bank's business strategy. Road map consists of the current condition (current state), the condition to be achieved (future state) and the steps to be taken to achieve the future state.
   b. Resources needed.
   c. The benefits that will be obtained when the plan is implemented.
5) Provide recommendations to the Board of Directors in relation to the effectiveness of measures to minimize risks to the Bank's investment in the Information Technology sector so that the investment contributes to the achievement of the Bank's business objectives.
6) Provide recommendations to the Board of Directors in connection with monitoring activities on the performance of Information Technology and its improvement efforts.
7) Provide recommendations to the Board of Directors in connection with efforts to resolve various problems related to Information Technology, which can not be completed by the user and organize business units effectively, efficiently and timely.
8) Provide recommendations to the Board of Directors in determining vendors related to the implementation of Information Technology submitted to third parties, on the basis of due diligence by evaluating and assessing information related to service providers, including:
   a. Existence and history of the company.
   b. Qualifications, background and reputation of the company owner.
   c. Other companies that use the same services from service providers as references.
   d. Financial conditions including review of audited financial statements.
   e. Ability and effectiveness of providing services including after sales support.
   f. Technology and system architecture.

g. Lingkungan pengendalian intern, sejarah pengamanan dan cakupan audit.
h. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku.
i. Kepercayaan dan keberhasilan dalam berhubungan dengan sub kontraktor.
j. Jaminan asuransi.
k. Kemampuan untuk menyediakan *disaster recovery* dan *business continuity plan*.
l. Penerapan manajemen risiko.
m. Laporan hasil pemeriksaan pihak independen.

9) Membuat rekomendasi kepada Direksi sebagai hasil proses analisis yang dilakukan terhadap usulan pengembangan dan/atau pembelian aplikasi/*software* yang diajukan oleh *End User*/Unit Kerja.
10) Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait kesiapan *Disaster Recovery Center* (DRC), dimana tersedianya fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (*Data Center*) mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi dan merekomendasikan diperlukannya pengujian secara berkala dalam mendukung keberlangsungan kegiatan usaha (*Business Continuity Plan*).

Tanggung Jawab

1) Melakukan *review* dan evaluasi secara berkala atas implementasi proyek-proyek Teknologi Informasi yang dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan rencana semula.
2) Membantu Direksi dalam menetapkan penerapan prinsip-prinsip sistem pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan sistem dan aplikasi yang mengandung risiko tinggi, khususnya yang menyangkut teknologi topologi jaringan, *database*, komputer mikro, dan komunikasi data.
3) Membantu Direksi dalam menetapkan kebijakan dalam penggunaan Teknologi Informasi agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
4) Membantu Direksi dalam menetapkan pengendalian manajemen yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, standar dan prosedur, serta organisasi yang berkaitan dengan penggunaan Teknologi Informasi pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

g. Internal control environment, security history and audit coverage.
h. Compliance with prevailing laws and regulations.
i. Trust and success in dealing with sub contractors.
j. Insurance coverage.
k. Ability to provide disaster recovery and business continuity plan.
l. Implementation of risk management.
m. Independent inspection report.

9) Make recommendations to the Board of Directors as a result of the process of analysis carried out on the proposal of development and/or purchase of applications/software submitted by the End User/ Business Unit.
10) Provide recommendations to the Board of Directors regarding the readiness of the Disaster Recovery Center (DRC), where substitute facilities are available when the Data Center is impaired or unable to function and make recommendation for regular testing in support of Business Continuity Plan. In this case it includes Data Center and DRC readiness in case of Data Center or DRC relocation.

Responsibilities

1) Conduct periodic review and evaluation of the implementation of Information Technology projects undertaken to ensure alignment with the original plan.
2) Assist the Board of Directors in determining the application of supervisory and security system principles to the use of systems and applications that contain high risk, particularly concerning the technology of network topology, database, microcomputer, and data communications.
3) Assist the Board of Directors in establishing policies in the use of Information Technology to meet the needs and financial capabilities of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
4) Assist the Board of Directors in determining management control which includes planning, stipulation of policies, standards and procedures, and organizations related to the use of Information Technology at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

5) Membantu Direksi dalam menetapkan sistem kontrol terhadap sistem aplikasi Teknologi Informasi yang akan digunakan yang mencakup pengadaan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaannya.
6) Melakukan analisis atas usulan pengembangan dan atau pembelian aplikasi/*software* yang diajukan oleh *End User*/unit kerja.
7) Analisa yang dimaksud pada angka 6) di atas sekurang-kurangnya terdiri atas :
   - Tujuan pengembangan dan atau pembelian.
   - Tingkat kebutuhan dan kepentingan Bank untuk melakukan pengembangan dan atau pembelian.
   - Kesesuaian dengan Rencana Kerja Tahunan Bank.
   - Fitur-fitur pengamanan dan pengendalian yang terdapat pada aplikasi/*software,* perangkat keras/*hardware* dan jaringan komunikasi tersebut.
   - *Maintenance* dan *support* dari pihak *vendor*.
   - Aspek biaya dan manfaat.
   - Kecukupan kebijakan dan prosedur dalam penyelenggaraan teknologi informasi oleh pihak ketiga.
8) Berkoordinasi dan menyampaikan kepada unit kerja terkait mengenai Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang mendukung kegiatan strategis usaha Bank, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Bisnis Bank.
9) Melakukan analisa terhadap perkembangan dan perubahan teknologi sistem informasi terutama di bidang perbankan.
10) Mengkaji keefektifan rencana mitigasi risiko atas pelaksanaan investasi IT serta memastikan kontribusi investasi terhadap rencana bisnis Bank.
11) Melakukan penilaian diri sendiri/*self assessment* untuk efektivitas fungsi dari Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2019, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat yang membahas agenda sebagai berikut:

5) Assist the Board of Directors in establishing a control system on the Information Technology application system to be used which includes procurement, development, operation and maintenance.
6) Analyze the proposal for development and/or purchase of applications/software submitted by End Users/work units.
7) The analysis referred to in number 6) above shall consist of at least:
   - Purpose of development and or purchase.
   - The level of needs and interests of the Bank for development and or purchase.
   - Compliance with the Bank's Annual Work Plan.
   - Security and control features contained in applications/software, hardware and communication networks.
   - Maintenance and support from vendors.
   - Aspects of costs and benefits.
   - The adequacy of policies and procedures in the organization of information technology by third parties.
8) Coordinate and submit to the relevant business unit on the Information Technology Strategic Plan that supports the Bank's strategic business activities, which are further elaborated in the Bank's Business Plan.
9) Analyze the development and change of information system technology particularly in the banking sector.
10) Review the effectiveness of risk mitigation plans for the implementation of IT investments and ensure investment contribution to the Bank's business plan.
11) Conduct self-assessment for the effectiveness of functions of the Information Technology Steering Committee.

Conduct of Duties and Frequency of Meeting

During 2019, the Information Technology Steering Committee has conducted 7 (seven) meetings on the following agenda:

No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda
1	26 Februari 2019 February 26, 2019	Pengajuan Finacle Core Banking System & e-Channel Managed Services, EOD Managed Services, Pengadaan Network Access Control. Proposal of Finacle Core Banking System & e-Channel Managed Services, EOD Managed Services, Procurement of Network Access Control
2	18 Maret 2019 March 18, 2019	Pengajuan Branch Network Efficiency, e-Mail Solution, Finacle CBS Development Server, dan Gateway System Dukcapil. Proposing Branch Network Efficiency, e-Mail Solution, Finacle CBS Development Server, and Gateway System Dukcapil
3	8 April 2019 April 8, 2019	Pengajuan Penggantian server RTGS dan Pemilihan Vendor Aplikasi Contact Center & Helpdesk System. Proposing the Replacement of RTGS server and Selection for Vendors on Contact Center Application & Helpdesk System
4	15 April 2019 April 15, 2019	Pengajuan Aplikasi Contact Center & Helpdesk System, M2M Vendor Selection, Manage Service Active Directory & e-Mail Exchange, Smart AML. Proposing on Contact Center Application & Helpdesk System, M2M Vendor Selection, Manage Service Active Directory & e-Mail Exchange, Smart AML.
5	6 Mei 2019 May 6, 2019	Pengajuan Pengadaan Escrow Finacle CBS, Microsoft Office License, Chrome Box & Wi-fi Internet for Branches. Proposing Procurement for Escro Finacle CBS, Microsoft Office License, Chrome Box & Wi-Fi Internet for Branches.
6	22 Juli 2019 July 22, 2019	Pengajuan pengadaan Aplikasi Antasena Pelaporan Bank Indonesia (BI). Proposing procurement for Antasena Bank Indonesia (BI) Reporting Application
7	7 Oktober 2019 October 7, 2019	Pengajuan pengadaan Aplikasi *Anti Money Laundering* (AML) PPATK baru. Proposing procurement for PPATK Anti-Money Laundring (AML) New Application.

Penilaian Kinerja Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan terkait Teknologi Informasi, di antaranya melakukan *review* terhadap strategi Teknologi Informasi, *review* anggaran Teknologi Informasi, melaksanakan evaluasi proyek Teknologi Informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari *business user* dengan mengacu ke IT *Road Map* dan/atau Rencana Bisnis Bank serta memastikan investasi proyek Teknologi Informasi yang akan dijalankan memberikan hasil optimal.

Performance Evaluation of IT Steering Committee

The Information Technology Steering Committee has contributed to the implementation of all Information Technology related activities, including reviewing the Information Technology strategy, reviewing the Information Technology budget, implementing an Information Technology project evaluation developed in accordance with the needs of the business user with reference to the IT Road Map and/or the Bank's Business Plan and ensuring the investment of the Information Technology project to be run will provide optimal results.

3.4. Komite Kredit (*Credit Committee*)

Proses kredit yang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four eyes principle* merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan kredit dimana setiap keputusan kredit minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pemegang kewenangan yang independen, berasal dari *Business Unit* di satu pihak, dan *Credit Risk Reviewer (CRR)* pada pihak lainnya. Proses Persetujuan Kredit secara *four-eyes* dilakukan oleh Komite Kredit sesuai *limit* kewenangannya.

Inisiasi kredit dan pengajuan *proposal* kredit dilakukan oleh *Business Unit*. *Credit Risk Reviewer* akan melakukan kaji ulang (*review*) dan memberikan rekomendasi terhadap *proposal* kredit yang telah dibuat oleh *Business Unit*. Dalam proses *review, Business Unit* dapat meminta unit *Credit Risk Reviewer* untuk melakukan kunjungan proyek (*on the spot*), khususnya dalam rangka

3.4. Credit Committee

The credit process that takes into account the prudent principle and four eyes principle serves as the main principles underlying credit decision making where every credit decision is made by 2 (two) independent authorities, derived from Business Unit on one side, and Credit Risk Reviewer (CRR) on the other side. The Credit Approval process is conducted by the Credit Committee in accordance with the limit of authority.

Credit initiation and credit proposal submission are conducted by Business Unit. Credit Risk Reviewers will conduct reviews and provide recommendations on credit proposals made by Business Units. In the review process, Business Units may request Credit Risk Review unit to undertake project visits (on the spot), particularly in order to assess a complex credit application.

menilai suatu permohonan kredit yang dinilai kompleks. *Proposal* atau inisiasi kredit dibuat secara lengkap oleh *Business Unit* sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank dan ketentuan-ketentuan lain seperti memorandum prosedur yang mengatur mengenai SOP pemberian kredit.

Struktur dan Keanggotaan

Keputusan kredit diambil oleh pemegang kewenangan melalui Rapat Komite Kredit atau sirkulair sesuai dengan limit kredit yang diajukan.

Rapat Komite Kredit (RKK) dihadiri oleh pejabat pemegang kewenangan memutus kredit sesuai limit yang ditetapkan (*voting member)*, perekomendasi, pengusul, dan *non voting member* yaitu Divisi *Corporate Legal* & Divisi *Compliance.*

Pemutus kredit adalah pejabat yang karena kemampuan, kompetensi dan integritasnya diberi wewenang untuk memutus kredit yang mewakili fungsi *Business Unit* dan *Credit Risk Reviewer* sesuai dengan *four eyes principle*.

Keputusan kredit di bawah kewenangan Direksi/EVP dilakukan oleh minimal 2 (dua) Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK) yaitu individu yang diberi kewenangan memutus kredit mewakili *Business Unit* dan *Credit Risk Reviewer* dengan Batas Wewenang Memutus Kredit yang ditetapkan oleh Direksi.

Dengan demikian sesuai limit kredit yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit tanggal 20 September 2019 bahwa kewenangan Komite Kredit terdiri atas:

Pemegang Kewenangan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Pemegang Kewenangan Kategori A

1) Pejabat yang memutus kredit tertinggi, minimal terdiri dari 2 (dua) pihak, yaitu Direktur/EVP *yang* membawahi unit yang membuat proposal kredit dan Direktur/EVP yang membawahi unit yang memberikan rekomendasi usulan kredit.
3) Pemegang Kewenangan Kategori A melakukan kajian atas rekomendasi tingkat pertama dan memberikan keputusan kredit final sesuai limit kewenangannya melalui mekanisme Sirkulasi atau RKK.
3) Kategori A dibagi menjadi 3 sub kategori, antara lain:

The credit proposal or initiation is made completely by the Business Unit in accordance with the Bank Credit Implementation Guidelines and other provisions such as the memorandum of procedures which govern SOP for loan process.

Structure and Membership

Credit decisions are taken by the authorized party through Credit Committee Meeting or circulars in accordance with the proposed credit limit.

Credit Committee Meetings (RKK) are attended by officers who have the authority to terminate the credit based on the stipulated limit (voting member), recommendation, proposal, and non voting members which are Corporate Legal & Compliance Division.

Credit decision maker is an officer whose ability, competence and integrity are authorized to approve credits representing Business Unit and Credit Risk Reviewer in accordance with the four eyes principle.

Credit decisions under the authority of the Board of Directors/EVP shall be conducted by at least 2 (two) Authorized Parties to Approve Credit (PKK) i.e. individuals authorized to approve credit representing Business Units and Credit Risk Reviewer with the Limit of Authority to Approve Credit stipulated by the Board of Directors.

Accordingly, in accordance with the credit limit stipulated in the Credit Implementation Guidelines 2019 that the authority of Credit Committee is as follows:

Authority owner can be categorized into 2 (two):

a) Authority Holder Category A

1) The highest credit decision officials, at least comprises 2 (two) parties: Director/EVP that oversees unit formulating credit proposal and Director/EVP that oversees units providing recommendation of credit proposal.
2) Authority Holder Category A conducts an assessment on the first level recommendation and provides final credit decision according its authority limit through Circulation mechanism or RKK.
3) Category A consists of 3 sub categories as follows:

(a) Kategori A1 (> Rp 100 Miliar)
Mekanisme persetujuan melalui RKK.

Voting Member:
Keputusan kredit wajib diputuskan dan ditandatangani oleh
- Direktur Utama
- Seluruh Direktur kecuali Direktur yang membawahi *Compliance & Corporate Legal*, dan EVP yang membawahi *Business* dan *Risk*.

Non Voting Member:
- Direktur yang membawahi *Compliance & Corporate Legal* (wajib menandatangani keputusan kredit dan hadir pada RKK)
- *Compliance Division Head, Corporate Legal Division Head*, dan *Operation and Credit Administration Division* (wajib membuat opini dan tidak diwajibkan menghadiri RKK)
- *Financial Control Division Head* (*ad hoc* khusus untuk pengajuan restrukturisasi kredit)

Propose:
- *Business Unit* (wajib membuat NAK); dan
- *Credit Risk Reviewer Unit* (wajib membuat ARR).

(b) Kategori A2 (> Rp 20 – 100 Miliar)
Mekanisme persetujuan melalui RKK.

Voting Member:
Keputusan kredit wajib diputuskan dan ditandatangani oleh
- Direktur Utama
- Direktur/EVP yang membawahi *Business* dan *Risk*

(a) Category A1 (>IDR 100 Billion)
Mechanism of approval through RKK

Voting Member:
Credit decision shall be decided and signed by:
- President Director
- All Directors except who oversees Compliance & Corporate Legal, and EVP who supervises Business and Risk.

Non-Voting Member:
- Directors who oversees Compliance & Corporate Legal (obliged to sign credit decision and present on RKK)
- Compliance Division Head, Corporate Legal Division Head, dan Operation and Credit Administration Division (obliged to provide opinion and may not attend RKK)
- Financial Control Division Head (ad hoc, specially for credit restructurization proposal).

Propose:
- Business Unit (required to make NAK);
- Credit Risk Reviewer Unit (required to make ARR).

(b) Category A2 (> IDR20-100 Billion)
The approval mechanism through RKK.

Voting Member:
Credit decision is require to be made and signed by:
- President Director
- Director/EVP overseeing Business and Risk

Non Voting Member:

- Direktur yang membawahi *Compliance & Corporate Legal* (wajib menandatangani keputusan kredit dan hadir pada RKK)
- *Compliance Division Head, Corporate Legal Division Head*, dan *Operation and Credit Administration Division* (wajib membuat opini dan tidak diwajibkan menghadiri RKK)
- *Financial Control Division Head* (*ad hoc* khusus untuk pengajuan restrukturisasi kredit)

Propose:

- *Business Unit* (wajib membuat NAK); dan
- *Credit Risk Reviewer Unit* (wajib membuat ARR).

(c) Kategori A3 (> Rp 5 – 20 Miliar)

Mekanisme persetujuan melalui Sirkulasi.

Voting Member:

Keputusan kredit wajib diputuskan dan ditandatangani oleh

- Direktur/EVP yang membawahi *Business* dan *Risk*

Non Voting Member:

- Direktur yang membawahi *Compliance & Corporate Legal* (wajib menandatangani keputusan kredit)
- *Compliance Division Head, Corporate Legal Division Head*, dan *Operation and Credit Administration Division* (wajib membuat opini)
- *Financial Control Division Head* (*ad hoc* khusus untuk pengajuan restrukturisasi kredit)

Non-Voting Member:

- Director oversees Compliance & Corporate Legal (required to sign credit decision and attend RKK)
- Compliance Division Head, Corporate Legal Division Head, dan Operation and Credit Administration Division (required to make compliance opinion and not required to attend RKK)
- Financial Control Division Head (ad hoc only for credit restructurization proposal)

Propose:

- Business Unit (required to make NAK; and
- Credit Risk REviewr Unit (required to make ARR).

(c) Category A3 (>Rp 5-20 Billion)

Approval mechanism conducted through Circulation.

Voting Member:

Credit decision is required to be decided and signed by:

- Director/EVP who oversee Business and Risk

Non-Voting Member:

- Director who oversee Compliance & Corporate Legal (required to sign crdit decision
- Compliance Division Head, Corporate Legal Division Head, and Operation and Credit Administration Division (required to make opinion).
- Financial Control Division Head (ad hoc only for credit restructurization proposal)

Propose:

- *Business Unit* (wajib membuat NAK); dan
- *Credit Risk Reviewer Unit* (wajib membuat ARR).

4) Apabila Direktur Utama berhalangan hadir, maka keputusan kredit wajib diputuskan dan ditandatangani oleh 1 (satu) Direktur yang ditunjuk dengan ketentuan *alternate* sebagai berikut :
   a) *Alternate* pertama adalah Direktur yang membawahi *Finance, Planning & IT*.
   b) *Alternate* kedua adalah Direktur yang membawahi *Treasury.*
5) Apabila Direktur/EVP yang membawahi *Business* berhalangan hadir, maka keputusan kredit wajib diputuskan dan ditandatangani oleh 1 (satu) Direktur/EVP yang ditunjuk dengan ketentuan *alternate* sebagai berikut :
   a) *Alternate* pertama adalah Direktur yang membawahi *Treasury*.
   b) *Alternate* kedua adalah Direktur yang membawahi *Finance, Planning & IT*.
6) Khusus untuk Kategori A2, apabila Direktur/EVP yang membawahi *Business* dan *Risk* berhalangan hadir, maka keputusan kredit wajib diputuskan dan ditandatangani oleh Direktur yang membawahi *Finance, Planning & IT*.

b) Pemegang Kewenangan Kategori B

1) Lembaga yang memutus kredit di tingkat kedua untuk limit *Division Head* yang terdiri dari 2 (dua) pihak *voting member*, yaitu *Business Unit* dan *Credit Risk Reviewer*. Mekanisme persetujuan kredit melalui Komite Kredit Kategori B dilakukan secara sirkuler.
2) Pemegang Keputusan Kredit (PKK) adalah individu (atau pejabat Bank secara *ex-officio*) yang diberikan kewenangan memutus kredit di tingkat kedua sesuai dengan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK). BWMK merupakan besarnya limit yang diberikan oleh Direksi untuk memutus kredit secara *four eyes principle*.

Propose:

- Busniess Unit (required to make NAK);
- Credit Risk reviewer Unit (required to make ARR).

4) Should the President Director is absent, therefore the credit decision is required to be decided and signed by 1 (one) Director appointed with alternate provision as follow:
   a) First alternate is Director that oversee Finance, Planning & IT.
   b) Second alternate is Directors that supervice Treasury.
5) Should the Director/EVP that oversee Business is absent, hence the credit decision is required to be decided and signed by 1 (one) Director/EVP appointed with alternate provisions as follow:
   a) First alternate is Directors who oversee Treasury.
   b) Second alternate is the Director that oversee Finance, Planning & IT.
6) Specifically for Category A2, should the Director/EVP who oversee Business and Risk is absent, hence the credit decision is required to be decided and signed by Director and oversee Finance, Planning & IT.

b) Authorization Holder Category B

1) Credit decision maker institution in the second level for the limit of Division Head consist of 2 (two) voting member: Business Unit and Credit Risk Reviewer. The credit approval mechanism through Credit Committee Category B is conducted circularly.
2) Credit Decision maker (PKK) is an individual (or Bank officer in ex-officio) that given an authority to decide credit in second level in line with credit disbursement limit (BWMK). BWMK is the amount of limit that given by the Board of Directors to decide credit in four eyes principle.

3) Kategori B dibagi menjadi 2 sub kategori, antara lain:
   (a) Kategori B1 (> Rp 1 - 5 Miliar)
   Voting Member:
   - *Business Unit Division Head*
   - *Credit Risk Reviewer Division Head*

   (b) Kategori B2 (≤ Rp 1 Miliar)
   Voting Member:
   - Pejabat yang ditunjuk oleh *Business Unit Division Head*
   - Pejabat yang ditunjuk oleh *Credit Risk Reviewer Division Head*

4) Pejabat pemegang kewenangan memutus kredit kategori B hanya dapat memutus persetujuan kredit sesuai dengan limit kewenangannya sesuai dengan daftar pejabat pemegang kewenangan memutus kredit kategori B yang tercantum pada Surat Keputusan Direksi yang diatur secara terpisah.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Kredit bertanggung jawab untuk menelaah dan memberikan keputusan atas aplikasi/permohonan fasilitas kredit sesuai Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK)-nya dalam rangka pemenuhan prinsip kehati-hatian pemberian kredit yang sehat baik untuk permohonan fasilitas kredit baru, penambahan, perpanjangan, perubahan (penggantian agunan, perubahan jangka waktu/*rescheduling*, restrukturisasi, dan sebagainya).

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2019, Komite Kredit telah melaksanakan rapat sesuai kebutuhan dan permohonan kredit. Selanjutnya program kerja yang dilaksanakan adalah memastikan keputusan kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank dan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT Bank JTrust Indonesia Tbk. yang berlaku.

Penilaian Kinerja Komite Kredit

Komite Kredit telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four eyes principle* sesuai limit kewenangannya dalam proses pemberian kredit.

3) Category B consists of 2 sub categories:
   (a) Category B1 (> IDR 1-5 Billion)
   Voting Member:
   - Business Unit Division Head
   - Credit Risk Reviewer Division Head

   (b) Category B2 ((≤ IDR 1 Billion)
   Voting Member:
   - Officers appointed by Business Unit Division Head
   - Officers appointed by Credit Risk Reviewer Division Head

4) Credit decision maker for category B only can approve credit according to their authority credit limit according to the list of decision maker officers (PPK) that stipulated in the Decree of the Board of Directors stipulated separately.

Roles and Responsibilities

The Credit Committee is responsible for reviewing and giving decision on the application/request for credit facility according to the Limit of Authority to Approve Credit (BWMK) in order to comply with the prudent principle of sound credit for the application of new credit facility, addition, extension, amendment (replacement of collateral, amendment of time period/rescheduling, restructuring, etc.).

Conduct of Duties and Frequency of Meeting

During 2018, the Credit Committee has conducted meetings based on needs and credit applications. The further work program being implemented is to ensure that the credit decision is in accordance with the Credit Policy of Bank and Guidelines for Credit Implementation of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Performance Evaluation of Credit Committee

The Credit Committee has considered the prudent principles and four eyes principle in accordance with the limits of its authority in the process of credit approval.

3.5. Komite Produk & Aktivitas Baru (PAB)

Dengan semakin kompleksnya risiko terhadap produk dan aktivitas baru yang diterbitkan Bank sehingga diperlukan peningkatan kewaspadaan bank melalui kajian dan analisis yang komprehensif agar produk dan aktivitas baru yang diterbitkan tidak menimbulkan dampak kerugian, serta penerbitan produk dan aktivitas baru harus memperhatikan ketentuan yang terkait dalam Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan OJK, SOP Produk dan Aktivitas Baru, dan menerapkan prinsip-prinsip GCG.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah membentuk Komite Produk & Aktivitas Baru (PAB).

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No.20.07/S.Kep-Dir-CFTD/JTRUST/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 (menggantikan SK Direksi No.23.03/S.Kep-DIR-BID/JTRUST/ VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016), maka susunan Anggota Komite Produk & Aktivitas Baru (PAB):

1. Ketua, merangkap anggota : Direktur Non Business
2. Sekretaris Komite : Penunjukan oleh Ketua Komite
3. Anggota :
   1) Cash & Financial Technology Division (*Inisiator*)
   2) Funding & Distribution Management Division (*Inisiator*)
   3) Internal Audit Division
   4) Corporate Legal & Compliance Division
   5) Information Technology Division
   6) Financial & Control Division
   7) Operation & Credit Administration Division
   8) Risk Management Division
   9) Treasury & Capital Markets Division

Fungsi

1. Memberikan masukan dan kajian terhadap rencana produk dan aktivitas baru yang akan diterbitkan dengan mempertimbangkan profil risiko yang mungkin timbul dari rencana tersebut.
2. Membuat kajian dan masukan ke manajemen terhadap produk dan aktivitas bank, dalam rangka penyesuaian, pengkinian dan perubahan dengan mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku.

3.5. Committee of New Products & Activities (PAB)

With the increasing complexity of risks to new products and activities issued by the bank, it is necessary to raise bank awareness through comprehensive review and analysis so that new products and activities issued will not cause any disadvantage, and the issuance of new products and activities should take into account the relevant provisions of Bank Indonesia Regulation, Bank Indonesia Circular Letter, OJK Regulations, SOP of New Products and Activities, and adoption of GCG principles.

In relation thereto, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has established a New Product & Activity Committee (PAB).

Structure and Membership

Based on the Directors Decree (SK) No.20.07/S. Kep- Dir-CFTD/JTRUST/XII/2018 dated 20 December 2018 (replacing SK No. 23.03/S.Kep-DIR-BID/JTRUST/ VIII/2016 dated August 23, 2016), the composition of New Product & Activity Committee (PAB) Members is as follows:

1. Chairman, cum member: Director of Non Business
2. Secretary: Appointed by the Chairman of the Committee
3. Members:
   1) Cash & Financial Technology Division (Inisiator)
   2) Funding & Distribution Management Division (Inisiator)
   3) Internal Audit Division
   4) Corporate Legal & Compliance Division
   5) Information Technology Division
   6) Financial & Control Division
   7) Operation & Credit Administration Division
   8) Risk Management Division
   9) Treasury & Capital Markets Division

Function

1. Provide input and review of new product plans and activities to be issued by taking into account the risk profile that may arise from the plan.
2. Prepare a review and feedback to management on bank products and activities, in order to adapt, update and change with reference to prevailing rules and regulations.

Kewenangan

1. Melakukan tinjauan dan kajian secara komprehensif terhadap produk dan aktivitas baru yang diajukan.
2. Merekomendasikan keputusan Komite Produk & Aktivitas Baru kepada Direksi terhadap suatu produk dan aktivitas baru bank.

Tugas-Tugas

1. Menyelenggarakan pertemuan/rapat untuk mengkaji penerbitan produk dan aktivitas bank, baik untuk produk baru maupun produk yang sudah berjalan apabila dirasa diperlukan.
2. Membahas regulasi/ketentuan baru yang berlaku yang memiliki dampak pada operasional, produk, layanan dan teknologi bank, dalam rangka penyesuaian, pengkinian dan perubahan yang harus dilakukan.
3. Memberikan jawaban, penjelasan dan masukan kepada regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) atas kebijakan dan ketentuan berkenaan dengan Produk dan Aktivitas Baru.

Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab bahwa produk dan aktivitas baru yang diterbitkan sudah sesuai dengan (*comply with*) regulasi yang berlaku.
2. Bertanggung jawab memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi terhadap usulan Produk dan Aktivitas Baru.

Pelaksanaan Tugas

Bahwa produk dan aktivitas baru dimunculkan sesuai dengan rencana kerja dan kebutuhan bank. Pada tahun 2019, bank tidak menerbitkan produk dan aktivitas baru. Kebijakan ini diambil agar produk-produk yang ada dapat dioptimalkan pemasarannya. Produk yang sudah dimiliki masih harus terus dikembangkan melalui *cross selling* kepada nasabah. Oleh sebab itu kegiatan Komite Produk & Aktivitas Baru terbatas memonitor perkembangan dari produk produk yang dipasarkan melalui program-program.

Penilaian Kinerja Komite Produk & Aktivitas Baru

Meskipun pada tahun 2019 tidak dilakukan penerbitan produk dan aktivitas baru, namun dilakukan persiapan layanan *Cash Pick Up* dan produk *bancassurance* untuk diterbitkan di tahun 2020. Koordinasi antara Anggota Komite

Authority

1. Conduct a comprehensive review of the proposed new products and activities.
2. Recommend the decision of the New Products & Activity Committee to the Board of Directors of a new product and activity of the bank.

Duties

1. Organize meetings to review the issuance of bank products and activities, both for new products and products that are already in operation if deemed necessary.
2. Discuss the newly enacted regulations that have an impact on the operations, products, services and technology of the bank, in the context of adjustments, updates and changes to be made.
3. Provide answers, explanations and inputs to regulators such as the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) on policies and regulations regarding New Products and Activities.

Responsibilities

1. Be responsible that newly issued products and activities are in compliance with applicable regulations.
2. Be responsible for providing input and recommendation to the Board of Directors on the proposed New Products and Activities.

Implementation of Duties

New product and activities are launched in line with working plan and the Bank's needs. In 2019, the Bank did not launch any new products and activities. This policy is taken so that the existing product can be marketed optimally. The existing product remaining should continue be developed through cross selling to the customers. Therefore, activities of New Product and Activities Committee are only limited to monitor the development of marketed products through existing programs.

Performance Evaluation of New Product and Activities Committee

Although there were no new product and activities launching in 2019, but there was a preparation of Cash Pick Up service and bancassurance product to be launched in 2020. Coordination between members of New Product

Produk & Aktivitas Baru tetap berjalan dalam rangka memberikan opini dan penilaian terhadap layanan produk dan aktivitas baru yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi manajemen dalam mengambil keputusan.

and Activities Committee continues in providing opinion and assessment on new products and activities that will be the basis of consideration for management for decision making.

3.6. Komite *Reward and Punishment*

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), Bank telah menerapkan penghargaan (*reward)* dan sanksi (*punishment*) kepada seluruh karyawan. Pemberian *reward* kepada karyawan memberikan dampak positif, berprestasi, dan memiliki karakter diri yang baik. Selain itu, pemberian sanksi kepada karyawan sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Tujuannya adalah agar karyawan lebih optimal untuk meningkatkan produktivitas kerja dan akan berdampak pada kinerja Bank menjadi lebih baik.

Struktur dan Keanggotaan

Ketua Komite : Direktur Utama
Anggota :
- Seluruh Direktur Bidang
- Seluruh Executive Vice President (EVP)

Sekretariat :
Ketua Sekretariat : Division Head Risk Management
Anggota Sekretariat :
- Division Head Compliance
- Division Head Internal Audit
- Division Head Corporate Legal & Litigation
- Division Head Human Capital & General Services
- Division Head terkait lainnya

Tugas dan Tanggung Jawab

Ketua Komite *Reward & Punishment*:

- Memutuskan dan menyetujui pemberian penghargaan dan sanksi kepada karyawan dalam Rapat Komite *Reward & Punishment.*

Sekretariat Komite *Reward & Punishment* :

a. Mempersiapkan seluruh materi pembahasan untuk rapat pre-komite yang dihadiri oleh anggota sekretariat untuk menentukan permasalahan yang akan diangkat ke Rapat Komite *Reward & Punishment* beserta rekomendasi dan sanksinya agar diputuskan oleh Komite *Reward & Punishment.*

3.6. Reward and Punishment Committee

In implementing Good Corporate Governance, the Bank has implemented reward and punishment to all employees. Rewards are given to employees who had given positive impact, achievement, and has a good character. Moreover, giving sanctions to employees as a consequence on violation that had been made. The objective is to optimize employees' productivity and will affect the Bank's better performance.

Structure and Membership

Chairman of the Committee: President Director
Members:
- All Directors
- All Executive President (EVP)

Secretariat:
Chairman of Secretariat: Division Head Risk Management
Member of Secretariat:
- Divison Head Compliance
- Division Head Internal Audit
- Division Head Corporate Legal & Litigation
- Head Human Capital & General Services
- Other related Division Head

Roles and Responsibilities

Reward & Punishment Committee Chief:

- Decide and approve reward and punishment towards employees in Reward and Punishment Committee Meeting.

Secretariat of Reward and Punishment Committee:

a. Prepare all discussion materials for pre-committee meetings attended by the member of secretariat to determine the issues that will be raised to the Reward and Punishment Committee Meeting as well as recommendation and the sanction to be decided by the Reward and Punishment Committee.

b. Menginformasikan temuan/masalah yang akan dibawa ke Rapat Pre-Komite *Reward & Punishment* kepada karyawan dan atasannya.
c. Mempersiapkan seluruh materi dan fasilitas terkait dengan pelaksanaan Rapat Komite *Reward & Punishment.*
d. Menyampaikan Daftar Keputusan Hasil Rapat Komite *Reward & Punishment* kepada pihak terkait.
e. Mensosialisasikan Daftar Sanksi kepada seluruh karyawan melalui aplikasi Garoon.

Rapat Komite *Reward & Punishment*

a. Rapat Komite *Reward & Punishment* ini dilaksanakan di Kantor Pusat dan dipimpin oleh Direktur Utama selaku Ketua Komite.
b. Dalam hal ini, Ketua Komite dapat menunjuk anggota Komite atau Ketua Sekretariat Komite untuk memimpin rapat.
c. Rapat Komite harus dihadiri lebih dari ½ anggota Komite dan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari peserta rapat.
d. Seluruh hasil yang diputuskan dalam Komite akan dituangkan dalam Daftar Keputusan Hasil Rapat Komite *Reward & Punishment* yang dibuat oleh Sekretariat Komite. Daftar ini disampaikan kepada seluruh anggota Komite, anggota Sekretariat Komite, dan *Human Capital & General Services Division*.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2019, Komite *Reward & Punishment* telah melaksanakan rapat sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada. Keputusan rapat tetap memperhatikan kebijakan dan ketentuan eksternal dan internal yang berlaku.

b. Inform findings/issues that will be discussed to the Pre-Reward and Punishment Committee Meeting to entire employees and its supervisors.
c. Prepare entire materials and facility related to the implementation of Reward and Punishment Committee Meetings.
d. Deliver Decision List from Reward and Punishment Committee Meetings to related parties.
e. Socialize Sanction Lists to entire employees through Garoon Application.

Reward and Punishment Committee Meetings

a. The Reward and Punishment Committee Meeting is held in the Headquarter chaired by President Director as Chairman of the Committee.
b. In this matter, Chairman of the Committee may appoint member of Committee or Chairman of Committee Secretariat to chair the meeting.
c. Committee meeting shall be attended by more than ½ members of Committee and the decision taken based on the most votes of the meeting attendees.
d. All results decided in the Committee will be stipulated in the List of Decision from Reward and Punishment Committee Meeting made by the Secretariat Committee. This list is delivered to all members of the Committee, members of Secretariat Committee, and Human Capital & General Services Division.

Implementation of Roles and Meeting Frequency

In 2019, the Reward and Punishment Committee held meetings according to the demand and existing problems. Meeting decision still considered prevailing external and internal policies and provisions.

BAB IV
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

CHAPTER IV
IMPLEMENTATION OF THE BANK'S COMPLIANCE FUNCTION, INTERNAL AUDIT, AND EXTERNAL AUDIT

4.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Komitmen penerapan fungsi kepatuhan Bank perlu dilaksanakan secara konsisten dan merupakan unsur yang penting dalam meminimalkan risiko kepatuhan dan membangun budaya kepatuhan.

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante)* untuk:

a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
c. Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Prinsip Kepatuhan

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berkomitmen menerapkan aspek dan fungsi kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas usaha dan operasionalnya sebagaimana diatur dalam ketentuan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Industri perbankan merupakan industri yang diatur sangat ketat (*highly regulated*) karena merupakan industri yang mendapat izin untuk

4.1. Implementation of the Bank's Compliance Function

The implementation of the Bank's compliance function needs to be carried out consistently as it is an important element in minimizing compliance risks and building compliance culture.

The Compliance Function is a series of preventive tasks or measures (ex-ante) to:

a. Realize the implementation of compliance culture at all organization levels and Bank's business activities.
b. Manage Compliance Risk faced by the Bank.
c. Ensure that policies, regulations, systems and procedures, as well as Bank's business activities are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and applicable laws.
d. Ensure the Bank's compliance toward its commitment to the Financial Services Authority and/or other relevant supervisory authorities.

Compliance Principle

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is committed to implementing compliance aspect and function in compliance risk management in all business activities and operations as regulated in:

- Financial Services Authority Regulation (PBI) No. 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 concerning Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks
- Financial Services Authority Regulation (PBI) No. 46/POJK.03/2017 dated July 12, 2017 on the Assessment of Commercial Banks Soundness Level.
- Financial Services Authority Regulation (PBI) No. 4/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 on Implementation of the Compliance Function of Commercial Bank.

The banking industry is highly-regulated because it has permission to manage public funds or act as public funds custody. Therefore, compliance

mengelola dana masyarakat (*public funds custody*). Oleh sebab itu pengelolaan risiko kepatuhan di Bank menjadi sangat penting apalagi di tengah inovasi teknologi informasi dan digitalisasi dalam industri keuangan yang perkembangannya sangat cepat. Penerapan Fungsi Kepatuhan adalah salah satu faktor dalam penerapan Tata Kelola dan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan, melalui pengelolaan risiko kepatuhan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan dimulai dari atas;
2. Kepatuhan merupakan tanggung jawab semua pihak;
3. Kepatuhan dijalankan untuk pemenuhan hukum dan peraturan;
4. Implementasi kepatuhan agar dijalankan dengan kompetensi dan integritas sesuai dengan tanggung jawab;
5. Berorientasi kepada pemangku kepentingan;
6. Dedikasi kepada Bank; dan
7. Orientasi kepada pemecahan masalah.

Tugas dan Tanggung Jawab

4.1.1. Dewan Komisaris dan Direksi

a. **Dewan Komisaris** wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank, dengan:
   a) Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun melalui laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang ditembuskan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, maupun laporan mengenai pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang disampaikan oleh Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan. Untuk melaksanakan evaluasi yang tepat dan akurat dapat dilakukan melalui rapat-rapat, baik rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi maupun rapat komite-komite.
   b) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

risk management is very important especially in the midst of information technology innovation and digitalization in the fast-growing financial industry. The implementation of Compliance Function is one of factors in corporate governance and PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has committed to complying with the rules and regulation through compliance risk management that based on compliance principles, namely:

1. Compliance starts from the top position;
2. Compliance is a responsibility of all parties;
3. Compliance must be carried out to abide by laws and regulations;
4. Implementation of compliance must be conducted with competence and integrity in accordance with responsibilities;
5. Stakeholder oriented;
6. Dedication to the Bank;
7. Problem-solving oriented.

Duties and Responsibilities

4.1.1. The Board of Commissioners and Directors

a. **The Board of Commissioners** is required to actively monitor the implementation of Compliance Function at the Bank through:
   a) Evaluating the implementation of Bank's Compliance Function at least 2 (two) times a year through the implementation report submitted by the Director responsible for the Compliance Function to the Financial Services Authority, with copy to President Director and Board of Commissioners, or the report of Bank's Compliance Function implementation as submitted by the Compliance Division/Unit. The appropriate and accurate evaluation are carried out through the Board of Commissioners, Board of Directors and Committee meetings.
   b) Based on the evaluation results on the implementation of the Compliance Function, the Board of Commissioners conveys the recommendations to the President Director with copy to the Director which oversees Compliance Function in order to improve the quality of the Bank's Compliance Function implementation.

b. Direksi berkewajiban:

a) Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.

b) Memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

4.1.2. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

1. Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah:
   a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
   b. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
   c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
   d. Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur kepada unit kerja/karyawan melalui surat edaran atau internal memo maupun internal e-mail.
   e. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian Bank, tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundang-undangan.
   f. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
   g. Melakukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap ketentuan internal serta mekanisme sistem pelaporan dan pengendalian intern.
   h. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
   i. Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

b. The Board of Directors will:

a) Develop and realize Compliance Culture at all levels of the organization and business activities of the Bank.

b) Ensure the implementation of the Bank's Compliance Function.

4.1.2. Director Responsible for the Compliance Function

1. Duties and responsibilities of the Director Responsible for the Compliance Function are:
   a. Formulate strategies to encourage the creation of the Bank's Compliance Culture.
   b. Study and recommend compliance policy or principles to be endorsed by the Board of Directors.
   c. Establish the compliance systems and procedures to be utilized to formulate the Bank's internal rules and guidelines.
   d. Communicate the policies and procedures to unit and employees through circular letter or internal memos as well as internal e-mail.
   e. Ensure that all policies, regulations, systems and procedures, as well as business activities conducted by the Bank are in accordance with the provisions of Financial Services Authority based on the principle of prudence, Good Corporate Governance, and the prevailing legislations.
   f. Minimize the Bank's Compliance Risk.
   g. Improve and refine the internal regulations and the mechanisms for reporting and internal control systems.
   h. Take precautions to ensure that policies and/or decisions made by the Board of Directors of the Bank do not deviate from the provisions of Financial Services Authority and the prevailing legislations.
   i. Perform other tasks related to the Compliance Function, among others, monitor and maintain the Bank's compliance to the commitments made by the Bank to the Financial Services Authority as well as other related supervisory authorities.

2. Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

4.1.3. Kepala Divisi Kepatuhan (*Compliance Division Head*)

a. Membantu Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
b. Menindaklanjuti informasi dari Direktur Kepatuhan yang menjadi perhatian dari pihak otoritas yang berwenang (regulator).
c. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya baik secara berkala maupun khusus kepada Direktur Kepatuhan.
d. Memastikan Kebijakan Kepatuhan, Kebijakan Penerapan APU & PPT, *Code of Conduct* dan prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance)* diterapkan di Bank.
e. Menyediakan *compliance advice* terhadap rancangan kebijakan dan keputusan Direksi.
f. Menjadi anggota komite yang dibentuk oleh Direksi maupun Dewan Komisaris terkait kepatuhan, mengikuti rapat yang diadakan oleh komite tersebut serta melaporkannya kepada Direktur Kepatuhan.
g. Memastikan peraturan internal yang berlaku tersedia secara lengkap, akurat dan mutakhir, dan sesuai dengan peraturan regulator terkini.
h. Menjadi *liaison officer* untuk regulator perbankan dan pihak otoritas lainnya.
i. Menyiapkan Laporan kepada Direktur Kepatuhan; Laporan Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama; Laporan Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan; Laporan Kepatuhan Internal; dan laporan lainnya yang diperlukan dalam pengelolaan kepatuhan Bank.
j. Memastikan penerapan program APU & PPT dilakukan dengan baik di seluruh Unit Kerja yang mengelola nasabah dan transaksinya, termasuk pelaporannya kepada PPATK dan Instansi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
k. Menyusun dan memutakhirkan Kebijakan Kepatuhan, Standar Operasional Prosedur Kepatuhan, serta mensosialisasikannya.
l. Mengembangkan dan mengimplementasikan metodologi *Compliance Risk Management.*

2. The duties and responsibilities do not eliminate the rights and obligations of the Director in charge of the Compliance Function as a member of the Board of Directors of the Bank as stipulated in the Law on Limited Liability Companies.

4.1.3. Compliance Division Head

a. Help Compliance Director in carrying out his duties and responsibilities.
b. Follow up information from Compliance Director that has raised regulators' concerns.
c. Report his duty implementation and responsibilities both periodically and specifically to the Compliance Director.
d. Ensure the implementation of Compliance Policy, APU & PPT Policy, Code of Conduct, and Good Corporate Governance within the Bank.
e. Provide compliance advice on Board of Directors' policy drafts and decisions.
f. Become one of committee members formed by the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding compliance, attend meetings held by the committee, and report them to the Compliance Director.
g. Ensure that applicable internal regulations are available completely, accurately, and up-to-date, as well as in accordance with the latest regulations.
h. Become a liaison officer for banking regulators and other authorities.
i. Prepare a report to the Compliance Director; Compliance Director's Report to the President Director; Compliance Director's Report to Bank Indonesia/ the Financial Services Authority; Internal Compliance Report; amd other reports needed in managing Bank's compliance.
j. Ensure that the implementation of APU & PPT programs are carried out well in all Working Units that manage customers and their transactions, including reporting to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) and other authorities, in accordance with applicable regulations.
k. Arrange and update the Compliance Policy and Standard Operating Procedure and disseminate them.
l. Develop and Implement Compliance Risk Management methodology.

m. Mengembangkan, mengimplementasikan dan mengelola *Compliance Risk Information System*.

4.1.4. Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan mempunyai kedudukan setingkat Divisi dan bertanggung jawab kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai unit kerja yang bersifat independen.

1. Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank, Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :
   a) Menyusun kebijakan dan prosedur kepatuhan serta melakukan kaji ulang atau pengkiniannya secara berkala.
   b) Membuat program kepatuhan dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
   c) Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
   d) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan pelaksanaan ketentuan dari otoritas berwenang/peraturan perundang-undangan. Selain itu juga melakukan *review* kepatuhan atas pelaksanaan aspek kepatuhan di unit kerja.
   e) Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   f) Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan status kepatuhan Bank kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Direktur Kepatuhan.
   g) Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain :
      1) Memastikan kepatuhan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lain yang berwenang.

m. Develop, implement, and manage Compliance Risk Information System.

4.1.4. Compliance Working Unit

Compliance Working Unit has the same level of position as Division and is responsible to the Director in charge of Compliance Function as an independent working unit.

1. In implementing the Bank's compliance function, Compliance Division/Working Unit has duties and responsibilities, such as:
   a) Arrange compliance policies and procedures and review or update them periodically.
   b) Create a compliance program to support the creation of Compliance Culture in all Bank's business activities at every level of the organization.
   c) Coordinate with the Risk Management Unit for the identification, measurement, monitoring, and control of the Compliance Risk with reference to the regulation by the Financial Services Authority on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
   d) Assess and evaluate the effectiveness, adequacy, and suitability of policies, regulations, and the Bank's systems and procedures with the implementation of the provisions set by authorities/ statutory regulations. It also conducts review on the implementation of compliance aspect in the working unit.
   e) Review and/or recommend updates and refinement of policies, regulations, and the Bank's systems and procedures to comply with Financial Services Authority regulations and the prevailing legislations.
   f) Report the implementation of compliance function and the Bank's compliance status to the Board of Directors and Board of Commissioners through the Director of Compliance.
   g) Perform other tasks related to the Compliance Function, which includes:
      1) Ensuring the Bank's compliance commitment to the Financial Services Authority or other relevant supervisory authorities.

2) Sosialisasi/pelatihan kepada seluruh pegawai Bank mengenai ketentuan yang berlaku terkait dengan fungsi Kepatuhan.
3) Bertindak sebagai narahubung (*contact person*) untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal, seperti memberikan masukan/klarifikasi atas pertanyaan dari pihak internal/unit kerja terkait maupun pihak eksternal terkait pelaksanaan Peraturan BI/OJK.

2. Struktur Organisasi Compliance Division PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berdasarkan SK Direksi Nomor 15.38/S.Kep-DIR-HCGD/JTRUST/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 yang berlaku sejak tanggal 21 Februari 2019 sebagai berikut :

2) Dissemination/training to all Bank's employees on applicable provisions related to the Compliance function.
3) Acting as the contact person for the Bank's compliance issues for internal and external parties, such as by giving input/clarification on the questions from internal/related working units and external parties about BI/OJK rules.

2. Organizational structure of Compliance Division in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. based on Board of Directors Decree (SK) No. 15.38/S.Kep-DIR-HCGD/JTRUST/II/2019 dated February 15, 2019 that was effective since February 21, 2019 is as follows:

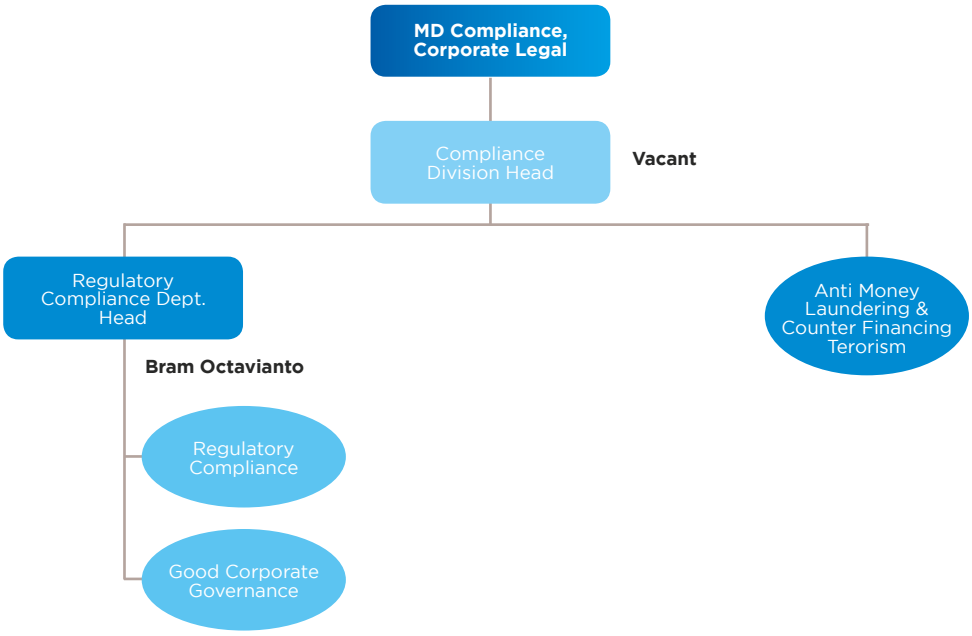

4.1.5. Rencana Kerja Kepatuhan Tahun 2019

A. Rencana Kerja Kepatuhan (*Regulatory Compliance*) pada tahun 2019 mencakup:

1. Program Sosialisasi Peraturan

- Pengkinian *database* ketentuan perbankan dan ketentuan terkait lainnya.
- Sosialisasi dan pelatihan terkait regulasi eksternal. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan melalui tatap muka maupun media komunikasi elektronik lainnya.

4.1.5. The Regulatory Compliance Work Plan for 2019

A. The Regulatory Compliance Work Plan in 2019 includes:

1. Regulatory Socialization Program

- Update the database of banking regulations and other related provisions.
- Arrange dissemination and training related to external regulations. This socialization and training activity is carried out face-to-face or through other electronic communication media.

2. **Program Uji Kepatuhan**
   - Uji Kepatuhan, yang meliputi uji kepatuhan atas rencana produk/aktivitas baru dan kebijakan/prosedur baru berikut perubahannya.
   - *Advisory*, yang meliputi rekomendasi/opini dari Unit Kepatuhan atas permintaan advis dari unit kerja lainnya yang terkait pemenuhan aspek-aspek kepatuhan dalam kegiatan Bank.
3. **Program Pemantauan Pelaksanaan Kepatuhan**
   Memantau kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat dengan regulator termasuk memantau tindak lanjut penyelesaian atas temuan Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkoordinasi dengan SKAI, serta memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK dan Bank Indonesia serta pihak regulator lainnya dalam rangka pengawasan Bank.
4. **Program dan Aktivitas dalam Laporan Status Kepatuhan**
   Membuat Laporan Kepatuhan secara berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan otoritas yang berwenang.
5. Memperkuat penerapan tata kelola (*Good Corporate Governance/GCG)* dan budaya perusahaan melalui berbagai upaya positif, antara lain:
   a. Meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik termasuk budaya tata kelola (GCG) Bank dengan membangun *awareness* GCG pada seluruh lini.
   b. Melakukan penyusunan dan pengkinian serta penyampaian terhadap Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) Tata Kelola (GCG) Bank, sebagai pedoman kerja penerapan tata kelola Bank yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   c. Penguatan infrastruktur terkait dengan *Governance Structure* dalam rangka *monitoring* penerapan tata kelola Bank melalui dukungan teknologi

2. **Compliance Test Program**
   - Compliance Test, which includes testing of new product/activity plan, new policies/procedures and their changes.
   - Advisory, which includes recommendations/opinions from the Compliance Unit for advice requests from other work units related to the fulfillment of compliance aspects in the Bank's activities.
3. **Compliance Implementation Monitoring Program**
   Monitor the Bank's compliance on its commitments with regulators, including monitoring the follow-up on the findings of the Financial Services Authority (OJK) Monitoring Team in coordination with Internal Audit Division, as well as monitoring and following-up on requests for information/data by OJK, Bank Indonesia, and other authorities in Bank supervision.
4. **Programs and Activities in the Compliance Status Report**
   Write Compliance Reports periodically to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and authorities.
5. Strengthening the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and corporate culture through various positive efforts, including:
   a. Improve good corporate governance including the Bank's corporate governance culture by building awareness on GCG across all business lines.
   b. Arrange, update, and submit the Bank's Good Corporate Governance (GCG) Policy and/or Standard Operating Procedure (SOP) as guideline for implementing Bank's corporate governance that refers to the applicable laws and regulations.
   c. Strengthen infrastructure related to Governance Structure in monitoring the implementation of Bank's corporate governance through information technology support. This leads to an

informasi yang menghasilkan Sistem Informasi Manajemen yang memadai, termasuk peningkatan kuantitas dan kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung lancarnya aktivitas Bank terkait dengan *Governance Process*, agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian.

d. Mengkoordinasi pelaksanaan penilaian sendiri (*Self Assessment*) faktor tata kelola (GCG) dari unit kerja terkait secara semesteran dalam rangka menyampaikan "Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Bank" yang diperlukan sebagai salah satu faktor penilaian selain faktor Profil Risiko (*Risk Profile*), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*) untuk mendukung pembuatan dan penyampaian "Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Tingkat Risiko (*Risk Based Bank Rating*)" kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

e. Mengkoordinasi pelaksanaan penilaian sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan Tata Kelola (GCG) Bank dari unit kerja terkait secara berkala/tahunan dalam rangka penyusunan "Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank" yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank termasuk dipublikasikan dalam situs web PT Bank JTrust Indonesia Tbk. sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan yang berlaku.

f. Memantau dan menilai setiap kegiatan bisnis, operasional, serta kegiatan perbankan lainnya agar dapat berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga Bank dapat mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik/GCG.

adequate Management Information System, such as improving the quantity and quality of Human Resources competencies to support smooth business activities related to Governance Process, so that they can run well based on prudent principles.

d. Coordinate the implementation of self-assessment of related working units each semester in order to submit the " Self-Assessment Results Report", which is required as one of the assessment factors other than the Risk Profile, Earnings, and Capital to support the preparation and submission of "Risk Based Bank Rating" to the Financial Services Authority (OJK).

e. Coordinate the implementation of Self-Assessment on the Bank's Good Corporate Governance (GCG) from relevant work units on a regular/annual basis in order to prepare "The Report on Bank's Governance Implementation", which will be submitted to the Financial Services Authority and the Bank's Shareholders, and published on the company's website in accordance with provisions on report submission.

f. Monitor and assess every business activity, operations, and other banking activities so that they can run according to the applicable rules and procedures and allow Bank to implement good corporate governance/ GCG.

g. Menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan audit internal maupun eksternal yang terkait dengan bidang Tata Kelola (GCG) berkoordinasi dengan Divisi/Unit Kerja terkait.
h. Mengembangkan *self-assessment* tata kelola (GCG) *tools* untuk mendukung penyusunan Laporan Tingkat Kesehatan Bank yang lebih efektif dengan memanfaatkan/ menggunakan sistem aplikasi yang didesain agar data/ informasi *self-assessment* faktor tata kelola (GCG) dapat terintegrasi secara optimal dengan data/informasi penilaian faktor Profil Risiko (*Risk Profile),* Rentabilitas *(Earnings),* dan Permodalan (*Capital*).

B. Rencana Kerja Bidang Penerapan APU & PPT (AML & CFT) pada tahun 2019

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, AML & CFT melakukan proses berikut ini secara berkesinambungan :

a. Melakukan *review* Kebijakan dan Prosedur internal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Sektor Jasa Keuangan.
b. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja (A*ction Plan)* Penerapan Program APU & PPT Tahun 2019, rencana pengkinian data nasabah tahun 2019 dan membuat laporan realisasi atas rencana tersebut.
c. Melaksanakan sosialisasi program penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada karyawan PT Bank JTrust Indonesia Tbk., melalui metode tatap muka dan/atau media *Electronic Learning (e-learning*).
d. Melakukan pengembangan fungsi sistem informasi (*Smart AML System*) dalam mendukung kegiatan pemantauan risiko nasabah

g. Follow up and conclude findings from internal and external audit related to the Good Corporate Governance (GCG) by coordinating with the relevant Division/ Work Unit.
h. Develop self assessment tools on corporate governance to support a more effective preparation on the Report of Bank's Health by utilizing an application system, which is designed to integrate self-assessment data/information on governance (GCG) with assessment data/information on Risk Profile, Earnings, and Capital.

B. Work Plan for the Implementation of Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) in 2019

In order to increase the effectiveness in the implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, AML & CFT carry out the following processes:

a. Review internal Policies and Procedures based on the Financial Services Authority Regulation on the Implementation of the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for the Financial Services Sector.
b. Prepare and submit an Action Plan for the Implementation of AML and CFT Program for 2019 and customer data updates, and write a report on the plan realization.
c. Carry out socialization program on the implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism to the employees of PT Bank JTrust Indonesia Tbk., by using face-to-face methods and/or Electronic Learning (e-learning).
d. Develop the function of information system (Smart AML System) in supporting customer risk monitoring activities based on profiles and/or

berdasarkan profil dan/atau transaksi, serta pelaporan kepada regulator terkait APU & PPT.

e. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman karyawan Unit Kerja Khusus APU dan PPT dalam pelaksanaan penerapan APU & PPT di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

f. Melakukan *review* dan evaluasi penerapan APU dan PPT di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

g. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses-proses pengendalian internal (*Internal Control*) terkait penerapan APU dan PPT.

h. Memberikan dukungan dan partisipasi aktif bagi pelaksanaan tugas pengawasan dan pelaksanaan strategis oleh manajemen Bank.

4.1.6. Kegiatan Kepatuhan Selama Tahun 2019

A. Selama tahun 2019 Satuan Kerja Kepatuhan melalui *Regulatory Compliance* telah melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank pada seluruh unit kerja sebagai berikut :

1. Pemantauan pelaksanaan kepatuhan di unit kerja Bank melalui penilaian sendiri terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Regulatory Compliance Self Assessment*/RCSA) serta hasil dari unit independen lainnya (seperti unit Internal Audit, unit Manajemen Risiko) dan hasil pemeriksaan otoritas yang berwenang. Juga pemantauan terhadap kewajiban penyampaian laporan rutin/non rutin kepada regulator secara akurat dan tepat waktu, dengan mengimplementasikan *Compliance Report Monitoring (CRM)* secara lebih efektif dan rutin disampaikan kepada setiap unit kerja terkait sebagai *reminder-media* sehingga Bank terhindar dari sanksi administratif baik berupa teguran tertulis maupun denda.

2. Melakukan uji kepatuhan untuk memberikan "*Compliance Opinion/ Advisory*" atas kebijakan internal serta produk dan/atau aktivitas baru agar sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang. Pemberian "opini/ advis" kepada unit kerja berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan eksternal.

transactions, as well as reporting to regulators about AML & CFT.

e. Enhance knowledge and understanding of employees working under AML and CFT wok unit in the implementation of AML and CFT at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

f. Review and evaluate the implementation of AML and CFT at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

g. Improve the quality and effectiveness of internal control processes related to the implementation of AML and CFT.

h. Provide support and active participation in the implementation of supervisory and strategic implementation by the Bank management.

4.1.6. Compliance Activities During 2019

A. Through Regulatory Compliance, the Compliance Work Unit has carried out the Compliance Function in all work units throughout 2019 as follows:

1. Monitor the implementation of compliance in the Bank's work units through Regulatory Compliance Self Assessment/RSCA) as well as results from other independent units (such as Internal Audit, Risk Management) and audit results from authorities. Monitoring is also conducted on the obligation to submit routine/ non-routine reports to regulators in an accurate and timely manner, by implementing a more effective Compliance Report Monitoring (CRM) and routinely report them to all related work units as a reminder so that Bank can avoid administrative sanctions in the form of written warnings or fine.

2. Conduct compliance tests to provide Compliance Opinion/Advisory on internal policies and new products and/or activities to comply with the authority provisions. Provide "opinions/advice" to work units based on prudent principles fulfillment of external provisions.

3. Melakukan penyusunan dan pengkinian ketentuan internal Bank terkait fungsi kepatuhan dan tata kelola yang baik (GCG), antara lain:

3. Formulate and update the Bank's internal provisions related to the compliance and good corporate governance (GCG) function, including:

Tanggal Date	**Ketentuan** Regulation	
27 September 2019 September 27, 2019	Kebijakan Kepatuhan J Trust Bank (Rev.01)	J Trust Bank's Compliance Policy (Rev.01)
1 November 2019 November 1, 2019	SOP Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance / GCG (Rev.01)	Standard Operating Procedure of Good Corporate Governance (Rev.01)
4 November 2019 November 4, 2019	SOP Kepatuhan Bank (Rev.01)	Standard Operating Procedure of Bank Compliance (Rev.01)

4. Mensosialisasikan kesadaran kepatuhan untuk seluruh jajaran insan J Trust Bank dalam rangka pengembangan Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) dengan:
   a. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan yang terkait dengan prosedur, peraturan dan ketentuan yang berlaku yang diselenggarakan secara internal bank maupun oleh pihak eksternal di tempat pelatihan yang ditentukan kepada seluruh karyawan di unit kerja/Divisi, dan Kantor Cabang/Capem/Kas. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan melalui tatap muka maupun media komunikasi elektronik lainnya.
   b. Menatausahakan dan mengkinikan *database* peraturan perbankan di sistem berbasis web internal perusahaan.
   c. Melakukan rapat budaya dan/atau rapat penilaian pelaksanaan aktivitas kinerja rutin setiap minggu di hari Senin (*Performance Culture Meeting*) serta hasil pembahasan rapat dan kehadiran karyawan wajib disampaikan langsung *via email* kepada Human Capital & General Services Division.

4. Disseminate awareness on compliance to all ranks in J Trust Bank in order to insert Compliance Culture by:
   a. Carrying out socialization and training related to applicable procedures, rules, and regulations that are held internally by the Bank or externally by third parties at a specified training places for all employees in work units/divisions, and Branch offices/Sub Branch/Cash Office.
   This socialization and training activities are carried out through face-to-face meetings and other electronic communication media.
   b. Administering and updating banking regulation database in the company's internal web-based system,
   c. Conducting cultural meetings and/or assessment meetings on the implementation of routine performances every week on Monday (Performance Culture Meeting) and the results of the meetings and employee attendance must be submitted directly via email to the Human Capital & General Services Division.

B. Laporan Kepatuhan

Regulatory Compliance menyampaikan aktivitas/fungsi kepatuhan Bank secara periodik dalam Laporan Kepatuhan kepada pihak internal dan otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan.

Laporan kepatuhan ditandatangani oleh Direktur yang Membawahkan

B. Compliance Reports

The Regulatory Compliance periodically submits the Bank's compliance activities/functions in the Compliance Report to internal parties and authorities in accordance with the provisions.

Compliance report is signed by the Director in charge of the Compliance Function and

Fungsi Kepatuhan dan disampaikan secara semesteran (setiap periode Juni dan Desember) serta disajikan secara komparatif dalam 2 (dua) periode laporan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Selama tahun 2019 telah disampaikan Laporan Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan perincian sebagai berikut:

submitted biannually (every period in June and December) and are presented comparatively in 2 (two) reporting periods with copy to the Board of Commissioners and the Board of Directors. Compliance Report to the Financial Services Auhority for 2019 was submitted with details as follows:

Laporan Kepatuhan Compliance Report	**Nomor Surat** Letter Number	**Tanggal Surat** Date
Semester I	No.30.08/S.Dir-CPD/JTRUST/VII/2019	30 Juli 2019 July 30, 2019
Semester II	No.30.09/S.Dir-CPD/JTRUST/I/2020	30 Januari 2020 January 30, 2020

C. Bank telah menerapkan dan mengevaluasi proses implementasi Tata Kelola Bank yang baik (GCG), antara lain:

1. Menumbuhkan komitmen Manajemen dalam penerapan Tata Kelola secara menyeluruh pada setiap lini organisasi.
2. Melakukan sosialisasi dan menerapkan *JTrust Employee Appraisal System* (*JTrust-EASy*) secara berkesinambungan dalam rangka menilai, membangun dan meningkatkan kinerja individu berbasis budaya setiap pegawai.
3. Terhadap *Governance Structure,* dengan membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG, antara lain melengkapi dan menyempurnakan Kebijakan dan SOP, reorganisasi berkesinambungan dalam upaya meningkatkan daya saing dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dan *governance process*.
4. Terhadap *Governance Process*, dengan memantau penerapan Tata Kelola dan senantiasa berupaya menyempurnakan infrastruktur GCG melalui buku "Kebijakan dan SOP Tata Kelola Yang Baik (GCG) PT Bank JTrust Indonesia Tbk.".
5 Meningkatkan tanggung jawab setiap lini organisasi untuk menjaga kepentingan *stakeholders*.
6. Memberikan masukan data (*supporting data*) perihal Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank kepada Corporate Secretary Division untuk penyusunan Laporan Tahunan (*Annual Report*).

C. The Bank has implemented and evaluated Good Corporate Governance (GCG), including:

1. Grow the Management's commitment in implementing Corporate Governance as a whole in every line of the organization.
2. Conduct socialization and implement JTrust Employee Appraisal System (JTrust-EASy) in order to assess, build and improve the culture-based individual performance of each employee.
3. Build and improve GCG infrastructure for Governance Structure, such as by completing and perfecting Policies and SOPs, conducting continuous reorganization in an effort to improve competitiveness while adhering to the prudent principles, and governance process.
4. Monitor the implementation of Corporate Governance for Governance Process and continue improvement in GCG infrastructure through the book titled "Policies and SOPs of Good Governance (GCG) of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.".
5. Increase the responsibility of each line of the organization to safeguard the interests of stakeholders.
6. Provide data input (supporting data) for the Report on the Implementation of Bank's Corporate Governance to the Corporate Secretary Division for the preparation of Annual Report.

7. Bank melalui koordinasi Compliance Division qq Unit Kerja GCG melakukan penilaian sendiri (*Self-Assessment)* Penerapan Tata Kelola (GCG) PT Bank JTrust Indonesia Tbk. secara berkala/tahunan untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank termasuk dipublikasikan dalam situs *web* Bank sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan yang berlaku.
8. Untuk memenuhi ketentuan regulator yang berlaku tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka Bank melalui Compliance Division qq Unit Kerja GCG telah mengkoordinasi penilaian sendiri (*Self Assessment)* faktor Tata Kelola/ GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk. untuk posisi Desember 2019 dengan hasil penilaian sendiri adalah Peringkat ke-3 (Cukup Baik) sama dengan hasil penilaian OJK untuk posisi Juni 2019 dengan Peringkat ke-3 (Cukup Baik).

D. Selama tahun 2019 Satuan Kerja Kepatuhan melalui AML & CFT telah melaksanakan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme/ APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku, antara lain:
   a. Menyusun Rencana Kerja (A*ction Plan)* Penerapan Program APU & PPT Tahun 2020.
   b. Menyampaikan Laporan Kegiatan Pengkinian Data kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa:
      - Laporan Realisasi Rencana Pengkinian Data PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Tahun 2019.
      - Laporan Rencana Pengkinian Data PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Tahun 2020.
   c. Sosialisasi/Pelatihan Regulasi APU-PPT.
   d. Opini & *Review* Produk/Aktivitas Operasional Bank.
   e. Pemenuhan permintaan data/ informasi dan korespondesi kepada Pihak Eksternal.
   f. Kewajiban pelaporan kepada PPATK.
   g. Laporan penundaan/penghentian sementara transaksi.

7. The Bank conducts self-assessment on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) periodically/annually through coordination of Compliance Division in its capacity as the GCG Work Unit. The results are submitted to the Financial Services Authority and the Bank's Shareholders and published on the Bank's website according to the provisions on report submission.
8. To meet regulatory provisions on the Rating of Commercial Banks, and the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, the Bank through the Compliance Division in its capacity as the GCG Work Unit has coordinated the Self Assessment of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. GCG for December 2019. The results of self-assessment is 3rd Rank (Fairly Good), the same as OJK assessment results for the position of June 2019 with 3rd Rank (Fairly Good).

D During 2019, the Compliance Work Unit through AML & CFT has implemented the Anti-Money Laundering and the Combating the Financing of Terrorism programs in the Financial Services Sector in accordance with applicable regulatory provisions by:
   a. Developing Action Plans for the Implementation of the AML & CFT Programs in 2020.
   b. Submitting Data Updating Activity Report to the Financial Services Authority in the form of:
      - Realization Report of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Data Updating Plan for 2019.
      - Report of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Data Updating Plan for 2020.
   c. Conducting socialization and training on AML-CFT regulations.
   d. Giving Opinions & Reviews on the Bank's Product/Operational Activities.
   e. Fulfilling data/information and correspondence requests to external parties.
   f. Submitting report to PPATK.
   g. Submitting reports on Transaction delays and terminations.

h. Identifikasi nasabah terhadap Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

i. Dalam rangka penerapan *Customer Risk Based Approach*, dilakukan pemetaan terhadap profil risiko dan transaksi nasabah/rekening yaitu pendataan terhadap jumlah nasabah berdasarkan jenis nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan produk/layanan yang digunakan (CASA).

j. Berkoordinasi dengan IT Division untuk mempersiapkan proses pengembangan Sistem Aplikasi APU & PPT dalam monitoring dan pelaporan transaksi keuangan yang diwajibkan dalam regulasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

k. Pemantauan Profil dan Transaksi nasabah.

l. Undangan/koordinasi dengan Eksternal/Regulator dan Antar Divisi.

4.1.7. Pemenuhan Komitmen Kepada Otoritas yang Berwenang

Sepanjang tahun 2019 Satuan Kerja Kepatuhan berkoordinasi dengan unit kerja SKAI dalam memantau dan memastikan pemenuhan kepatuhan Bank terhadap komitmen kepada regulator seperti pelaksanaan/*progress* penyelesaian tindak lanjut hasil temuan audit Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan.

4.1.8. Indikator Kepatuhan di Tahun 2019

Indikator kepatuhan Bank dari perkembangan masing-masing faktor yang dimonitor selama tahun 2019 menunjukkan keadaan antara lain:

h. Conducting customer identification with the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations and the List of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction.

i. Implementing Customer Risk-Based Approach by mapping customers/accounts transactions and risk profiles to collect data on the number of customers based on the Third Party Funds and the Current Account Savings Account.

j. Coordinating with the IT Division to prepare the process of developing AML & CFT Application Systems in monitoring and reporting financial transactions that are required in Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism regulations.

k. Monitoring customer profiles and transactions.

l. Having an invitation/coordination between divisions and with Regulators.

4.1.7. Fulfilling Commitments To Authorities

Throughout 2019, the Compliance Work Unit coordinated with Internal Audit Division in monitoring and ensuring the Bank's compliance commitment to regulators such as the implementation/completion progress of the follow-up on audit findings by the Financial Services Authority Supervisory Team.

4.1.8. Compliance Indicators in 2019

The Bank's compliance indicator for the development of each factor monitored during 2019 shows the following conditions:

Faktor-Faktor yang Dimonitor Monitored Factors	**Indikator/Rasio** Indicator/Ratio **Posisi Desember 2019** December 2019	**Keterangan** Description
Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/ CAR) untuk Risiko Kredit, Operasional & Pasar Capital Adequacy Ratio (CAR) for Credit, Operational, and Market Risk	14,53%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum regulator Comply, meets regulator's minimum limit requirement
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BMPK Kredit: Maximum Credit Disbursement Limit (BMPK) BMPK Credit: Pelanggaran | Violation Pelampauan | Excess	 Nil Nil	 Patuh | Comply Patuh | Comply
Posisi Devisa Neto (PDN) Nett Foreign Exchange Position (PDN)	0,74%	Patuh, memenuhi ketentuan batas maksimum 20% Comply, meets maximum limit requirement of 20%

Faktor-Faktor yang Dimonitor Monitored Factors	**Indikator/Rasio** Indicator/Ratio **Posisi Desember 2019** December 2019	**Keterangan** Description
Kualitas Aktiva Produktif (KAP)/Non Performing Loan (NPL): Earnings Assets Quality/NPL:		
NPL Gross	1,49%	Patuh, memenuhi ketentuan di bawah 5% Comply, meets below- 5% requirement
NPL Net	0,80%	Patuh, memenuhi ketentuan di bawah 5% Comply, meets below-5% requirement
Giro Wajib Minimum (GWM): Statutory Reserve Requirement: GWM Rupiah Reserve Requirement (Rupiah)	11,14%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 3% Comply with the minimum limit requirement of 3%
• Harian | Daily • Rata-rata | Average	7,43% 3,71%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 4% Comply with the minimum limit requirement of 4%
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Macroprudential Liquidity Buffer	12,87%	Patuh, sudah sesuai ketentuan minimal 8% Comply with the minimum requirement of 8%
GWM Valas Reserve Requirement (foreign exchange)	33,45%	
Liquidity Coverage Ratio (LCR)	138,43%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 100% Comply with the minimum requirement of 100%
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	166,23%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 100% Comply with the minimum requirement of 100%
Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Bank's Soundness Level	3 (cukup sehat) (moderately sound)	Trend Peringkat Komposit TKB tetap dan sesuai penilaian OJK The trend in soundness level composite rating stable and in line with OJK assessment
Profil Risiko Bank: Bank's Risk Profile:		
Profil Risiko Risiko Inheren Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Risk profile Inherent Risk The Quality of Risk Management Implementation	3 Moderate Fair	Trend Peringkat Komposit Profil Risiko tetap dan sesuai penilaian OJK The trend in Risk Profile Composite rating stable and in line with OJK assessment.

4.2. Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Internal perusahaan merupakan salah satu komponen GCG yang ikut berperan aktif dalam membentuk dan meningkatkan lingkungan pengendalian perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal
Internal Audit Division (IAD) PT Bank JTrust Indonesia Tbk. merupakan unit independen yang tidak memihak dalam menjalankan tugasnya, meliputi aktivitas *Assurance* dan *Consulting* bidang *Risk/Control* yang didesain untuk dapat memberikan nilai tambah, dapat meningkatkan operasional, membantu dan mengamankan pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan cara melakukan evaluasi efektivitas dan meningkatkan fungsi *Control, Risk Management,* dan *Governance Process*.

Dalam rangka pelaksanaan peran tersebut di atas, IAD berperan sebagai *Strategic Business Partner* bagi semua unit kerja dan hal ini akan secara terus menerus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Dalam rangka menjaga independensi fungsi audit intern, secara struktur organisasi posisi IAD berada langsung di bawah dan melapor kepada Direktur Utama, dan mempunyai garis pelaporan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. IAD berperan membantu Direktur Utama dalam menjabarkan hasil pengawasannya dalam hal proses pengendalian Intern (SPI), manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Posisi, kewenangan, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas IAD telah mengacu pada POJK Nomor 1/POJK.03/2019 dan POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

IAD membantu Bank dalam mencapai tujuan dengan pendekatan yang sistematik dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern/*control* serta GCG. Aktivitasnya mencakup bidang-bidang operasional, kredit, teknologi, dan sistem informasi serta fungsi-fungsi pendukung di Kantor Pusat. Dalam menjalankan tugasnya, IAD berwenang mengakses semua fungsi, catatan, properti dan karyawan Bank sesuai penugasan audit tanpa dibatasi oleh pihak manapun.

4.2. Internal Audit Function

The Company's Internal Audit Function is one of components of GCG that plays an active role in shaping and improving the company's control environment.

Duties and Responsibilities of Internal Audit
Internal Audit Unit (IAD) of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is an independent unit and impartial in carrying out its duties, including Assurance activity and Consulting on Risk/Control, which is designed to provide added value, improve operations, assist and secure the process of achieving the Bank's Business Plan by evaluating the effectiveness and improving the function of Control, Risk Management, and Governance Process.

In order to do so, IAD acts as Strategic Business Partner for all work units and this will be done continuously in order to achieve the objectives of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

In order to maintain the independence in internal audit function, structurally, IAD's position is directly below and reports to the President Director. It also has a line of reporting to the Board of Commissioners through the Audit Committee. IAD acts as the eyes and ears of the President Director on enforcing the Internal Control System (SPI), risk management, and corporate governance. IAD's position, authority, responsibility, professionalism, organization, and scope of duties refer to POJK No. 1/POJK.03/2019 and POJK No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Charter of the Internal Audit Unit.

IAD assists the Bank in achieving its objectives through systematic and disciplinary approach in evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance. Its activities cover several areas, including operations, credit, technology, and information systems, as well as supporting functions at Headquarters. In performing its duties, IAD is authorized to access all functions, records, property and employees of the Bank in accordance with the audit tasks without being restricted by any party.

Struktur Organisasi IAD PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Tahun 2019

Organizational Structure of the 2019 Internal Audit Division (IAD) of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

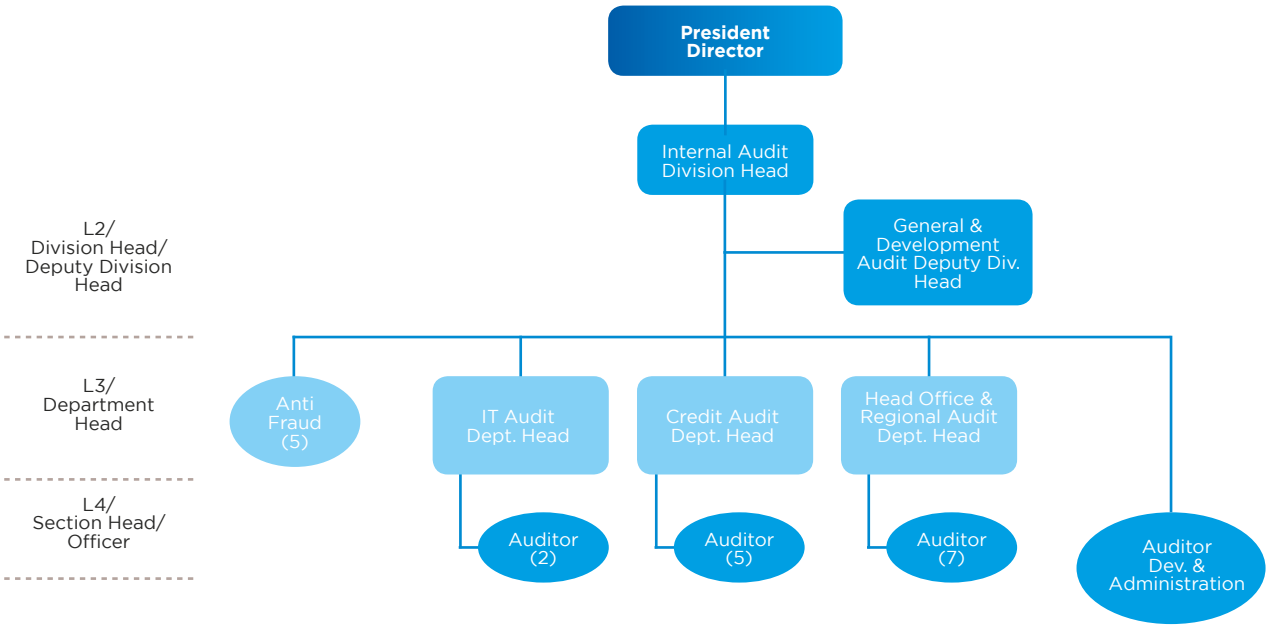

Berdasarkan POJK No.01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum pasal 19, dinyatakan bahwa Kepala IAD diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan dari Direktur Utama, surat persetujuan Dewan Komisaris, dan surat rekomendasi dari Komite Audit.

Based on the provision in Article 19 of POJK No. 1/POJK.03/2019 about the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks, it is stated that the Head of IAD is appointed and dismissed by the Bank's President Director with approval from the Board of Commissioners and recommendation letter from the Audit Committee.

Profil lengkap Kepala IAD tercantum dalam Profil pada Laporan Tahunan 2019 ini.

The full profile of the Head of IAD is listed in the Profile in this 2019 Annual Report.

Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter)

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. memiliki Piagam Audit Internal yang mendefinisikan: Tujuan, Aktivitas IAD, Kewenangan dan Tanggung Jawab IAD dalam Organisasi, termasuk hubungannya dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Kepala IAD bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai garis pelaporan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk mengkomunikasikan hasil-hasil kerja IAD. IAD PT Bank JTrust Indonesia Tbk. bertugas membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk memastikan kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), proses manajemen risiko, dan tata kelola Bank .

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dan POJK No.01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, maka dalam pembentukan dan pelaksanaan tugasnya,

Internal Audit Charter

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has an Internal Audit charter defining: Objectives, IAD Activities, IAD Authority and Responsibility within the Organization, including its relationship with the Board of Directors and Board of Commissioners. The Head of IAD directly reports the President Director and has a reporting line to the Board of Commissioners through Audit Committee to communicate IAD work results. IAD of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is responsible for assisting the President Director and the Board of Commissioners to ensure adequate and effective Internal Control System (SPI), risk management process, and the Bank's governance.

In accordance with the Regulation of the Financial Services Authority No. 56/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 on the Establishment and Guidelines for Formulating Internal Audit Charter and POJK No. 1/POJK.03/2019 concerning the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks,

Divisi Internal Audit telah membuat dan melaksanakan Piagam Audit Internal yang memuat:

a. struktur dan kedudukan IAD;
b. tugas dan tanggung jawab IAD serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain;
c. wewenang IAD;
d. Kode Etik Audit Intern;
e. persyaratan auditor intern dalam IAD;
f. pertanggungjawaban IAD;
g. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam IAD dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak;
h. kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern;
i. syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh IAD untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain;
j. tanggung jawab dan akuntabilitas kepala IAD;
k. persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern;
l. prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern;
m. kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu *(cooling-off period*) penugasan yang memadai kepada anggota IAD; dan
n. kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (*cooling-off period*) yang memadai bagi pihak ekstern

Piagam Audit Internal dikaji ulang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dimana kaji ulang terakhir telah dilakukan pada tanggal 23 Mei 2019 dan akan dilakukan kembali pada tahun 2020.

Metodologi Audit

Kepala IAD membuat *Annual Audit Plan* yang harus disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit.

Dalam menetapkan pandangan dan pemikirannya, Kepala Divisi Internal Audit (IAD) diberikan ruang yang bebas dan obyektif serta bebas dari tekanan pihak manapun (*independence*), sehingga terhindar dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksanya.

Dalam melaksanakan audit, IAD membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan/audit secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, serta memberikan saran perbaikan dan informasi obyektif tentang kegiatan yang perlu mendapat perhatian

therefore in establishing and executing its duties, the Internal Audit Division has created and implemented theInternal Audit Charter, which contains the following:

a. IAD structure and position;
b. IAD duties and responsibilities and its relations with work units that perform other control functions;
c. IAD authorities;
d. Internal Audit Code of Ethics;
e. Internal auditor requirements in IAD;
f. IAD accountability;
g. prohibition of concurrent assignment and position of internal auditor and executor in IAD from carrying out the Bank's operational activities including in subsidiary companies;
h. the criteria for using external experts in supporting the internal audit function;
i. terms and conditions that must be fulfilled by IAD to maintain independence if requested to provide consulting services or other special tasks;
j. the head of IAD responsibility and accountability;
k. requirements to comply with Internal Audit Professional Standards;
l. procedures for coordinating the internal audit function with legal experts or external auditors;
m. policy on periodic assignment restrictions and cooling-off period for IAD members; and
n. policy on restrictions on the use of services and cooling-off period for external parties.

The Internal Audit Charter is periodically reviewed, whether annually or at any time deemed necessary. The final review has been done on May 23, 2019 and will be conducted in 2020.

Audit Methodology

Head of IAD formulates Annual Audit Plan that has to be approved by the President Director and the Board of Commissioners by taking into account recommendations from Audit Committee.

In setting views and thoughts, the Head of the Internal Audit Division (IAD) is given the independence to avoid any conflict of interest on the audited objects or activities.

In performing the audit, SKAI formulates analysis and research in the financial sector, accounting, operations, and other activities through on-site inspection/audit and off-site monitoring, as well as providing suggestions for improvement and objective information on activities that need special attention

khusus oleh semua tingkatan manajemen, juga mampu mengindentifikasikan segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

Audit dilakukan dengan metodologi *Risk Based Audit* bertujuan untuk melakukan evaluasi kelengkapan dan penilaian kehandalan/efektivitas dari SPI untuk dapat meminimalisir risiko, disamping itu temuan audit akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan *corrective action* atas kelemahan SPI dan meningkatkan *risk awareness* petugas dalam mengendalikan pekerjaan yang ditangani.

Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Audit Internal dan Pelatihan

Untuk meningkatkan kompetensi Audit Internal secara berkesinambungan sehingga memberikan nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan, maka selama tahun 2019 seluruh Auditor telah diikutsertakan dalam program pelatihan dan sertifikasi.

Sampai dengan tahun 2019, Audit Internal telah memperoleh berbagai kompetensi baik internasional maupun nasional seperti CBIA (Certified Bank Internal Audit), Certified Internal Auditor (CIA), sertifikasi Manajemen Risiko level 1 – 4. Untuk terus meningkatkan kompetensi auditor IAD secara berkesinambungan sehingga mampu menjalankan fungsi audit intern secara profesional, maka kualifikasi/sertifikasi profesi yang diperlukan bagi auditor IAD adalah:

- 24 (dua puluh empat) dari 25 (dua puluh lima) anggota IAD telah memperoleh sertifikasi manajemen risiko dari LSPP dan secara bertahap disesuaikan dengan *mandatory level* yang harus dipenuhi. Satu anggota IAD merupakan karyawan baru (percobaan) yang akan diikutsertakan dalam sertifikasi setelah diangkat menjadi karyawan tetap sesuai ketentuan internal Bank.
- Selain itu, untuk mendukung kompetensi teknis, IAD telah memiliki 16 (enam belas) orang auditor yang mempunyai *Certified Bank Internal Audit* dari LSPP.
- Selain mengikuti proses sertifikasi profesi, seluruh auditor juga telah diikutkan dalam *training–training* baik yang terkait dengan aktivitas audit maupun operasional bank (kredit, IT, dan lain-lain).

Seiring dengan dinamika perusahaan, IAD dituntut untuk melakukan penyesuaian yang berkelanjutan agar mampu mempertahankan standar kinerja. Untuk itu PT Bank JTrust Indonesia Tbk. senantiasa mengikutsertakan petugas dan pejabat IAD ke pelatihan baik internal maupun eksternal agar diperoleh kualifikasi yang:

by the management at all levels. In addition, IAD also identifies every opportunities to improve and increase efficiency in the use of resources and funds.

Audits are conducted by using Risk-Based Audit methodology, which aims to evaluate the completeness and reliability of assessment/effectiveness of SPI in order to minimize risk. In addition, the audit findings are used as the basis for corrective action on weaknesses of SPI and to improve the risk awareness of personnel in managing the job at hand.

Qualification/Certification on Internal Audit Profession and Training

To continuously improve the Internal Audit's competence in order to provide added value on the company, all auditors have been included in several training and certification programs in 2019.

Until 2019, the Internal Audit has acquired a wide range of international and national competencies such as the Certified Bank Internal Audit, Qualified Internal Audit (QIA), Risk Management Certification Level 1-4. To continuously improve the competence of IAD auditors in a sustainable manner, which allow them to manage the internal audit function professionally, IAD requires the following professional qualifications/certifications:

- Twenty four out of 25 (twenty five) members of IAD has obtained risk management certification from LSPP and is gradually adjusted to the mandatory level that must be met. One IAD member is a new employee (probation), who will join the certification program after being appointed as a permanent employee in accordance with the Bank's internal regulations.
- To support technical competence, IAD has 16 (sixteen) auditors with the Certified Bank Internal Audit from LSPP.
- In addition on taking the professional certification process, all auditors have also participated in trainings both related to audit activities as well as bank operations (credit, IT, etc.).

In line with the company's dynamics, IAD is required to perform continuous adjustments to be able to maintain performance standards. Therefore , PT Bank JTrust Indonesia Tbk. includes officers and management of IAD in both internal and external training in order to obtain following qualifications:

a. Memiliki pengetahuan yang memadai secara umum dan teknis dalam bidang tugas yang relevan dengan spesialisasinya.
b. Mempunyai perilaku yang independen, jujur, obyektif, tekun dan loyal.
c. Memiliki kemampuan mempertahankan kualitas profesi yang profesional.
d. Memiliki kecakapan interaksi dan komunikasi secara lisan maupun tulisan.
e. Dapat meningkatkan perannya menjadi konsultan dan *catalyst*.

Efektivitas dan Cakupan Audit Intern dalam Menilai Seluruh Aspek dan Unsur Kegiatan Bank

Secara berkala (semesteran) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan cakupan pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan proses pengendalian intern sebagaimana yang tercantum dalam "Evaluasi Komite Audit" pada pembahasan 3.1. Komite Audit (Audit Committee).

Pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan proses pengendalian intern yang efektif dan independen oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana audit yang disusun pada awal tahun. Seluruh rencana audit tahun 2019 telah dapat direalisasikan sepenuhnya oleh SKAI dengan dukungan sumber daya yang cukup memadai, kegiatan audit dilaksanakan berdasarkan pedoman program audit yang jelas sehingga pelaksanaan audit dapat dilakukan dengan lancar, serta laporan hasil audit dilengkapi dengan rekomendasi perbaikan yang cukup baik untuk mencegah terulangnya temuan audit yang sama di masa yang datang.

Audit eksternal dalam melakukan penilaian terhadap kewajaran penyusunan laporan keuangan historis tahun 2019 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (KNMTR) yang merupakan anggota dari Crowe Global yang berpusat di Amerika Serikat telah berjalan dengan baik sesuai dengan surat perjanjian (*engagement letter*) tanggal 22 Oktober 2019 dengan opini audit tanpa modifikasi. Evaluasi pelaksanan audit eksternal didasarkan pada kesesuaian terhadap standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan.

Kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan dengan baik dengan tidak ditemukan pelanggaran ketentuan seperti antara lain dalam laporan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), laporan pagu devisa netto (PDN) dan penyampaian laporan keuangan publikasi audited.

a. Adequate general and technical knowledge of tasks that are relevant to the expertise.
b. Independent, honest, objective, diligent, and loyal.
c. Able to maintain the professional quality of profession.
d. Have interaction and communication skills both verbally and written.
e. Able to increase his/her role as a consultant and catalyst.

Effectiveness and Scope of Internal Audit in Assessing All Aspects and Elements of Bank Activities

The Audit Committee regularly (every semester) performs evaluation to the effectiveness and scope of internal audit implementation in assessing the adequacy of internal control process as stated in the "Audit Committee Evaluation" in the discussion of 3.1. Audit Committee.

The implementation of internal audit in assessing the adequacy of an effective and independent internal control process by the Internal Audit Work Unit (IAD) has run well in accordance with the audit plan laid out at the beginning of the year. All audit plans in 2019 has been fully realized by IAD with the support from adequate resources. The audit was carried out based on clear guidelines, so the audit process can be done smoothly. The audit report also contains recommendation for improvement to prevent the same findings in the future.

External audit in assessing the fairness of the 2019 historical financial statements was conducted by Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Partners, which is a member of Crowe Global based in the United States. The audit process has run well according to the engagement letter dated October 22, 2019 with opinion 'audit without modification'. The evaluation of external audit implementation is based on comformity with applicable auditing standards, sufficient time for field work, assessment on the scope of services provided, and sufficient pick test and recommendations for improvement.

The bank's compliance with existing rules and regulations has run well with no violations on the provisions, such as maximum credit disbursement limit, net foreign exchange position, and submission of audited financial report.

Evaluasi atau Kaji Ulang Pelaksanaan Audit Intern Bank

Untuk melakukan evaluasi atau kaji ulang atas hasil kerja IAD Bank dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) serta perbaikan yang mungkin dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia dan OJK yang berlaku, maka paling kurang setiap 3 (tiga) tahun sekali dilakukan evaluasi atau kaji ulang oleh auditor/pihak ekstern, yang terakhir telah dilakukan pada tahun 2019 untuk periode audit 2016–2019 dan dinyatakan bahwa IAD telah memenuhi ketentuan SPFAIB pada PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank untuk periode audit 2016 sampai 2018 dan POJK No.01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bank untuk periode audit 2019. Untuk evaluasi/kaji ulang periode berikutnya atas hasil kerja IAD Bank dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Tujuan dan Tahapan Pelaksanaan Audit Intern Bank

IAD dalam melaksanakan tugasnya terutama untuk memastikan terlaksananya SPI yang bertujuan untuk :

a. Memastikan kecukupan pengamanan dana masyarakat, meliputi deposito, giro, tabungan serta dana pihak ketiga lainnya.
b. Pengamanan *Assets* berupa audit atas Kualitas Aktiva Produktif (kredit) melalui audit unit kerja pengelola kredit dan *Loan Review* (*end to end process*) untuk memastikan bahwa proses kredit (Inisiasi, Analisis, Keputusan, Pencairan dan *Monitoring*) telah dilakukan secara *prudent*.
c. Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan, pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, efektif dan mengawasi kegiatan tertentu seperti kegiatan sistem teknologi informasi (*Core Banking, Opics, Trade Innovation, Swift*, dan lain-lain).
d. Kebenaran dan keutuhan informasi, termasuk pencatatan kewajiban Bank dan rekening administratif yang akurat, lengkap dan tepat waktu.
e. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan, termasuk penilaian aspek-aspek yang dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank.
f. Penilaian *awareness* lini manajemen/supervisi terhadap 5 (lima) komponen SPI.

Evaluation or Review on the Bank's Internal Audit Implementation

To perform an evaluation or review on the work of the Bank's IAD, its compliance with the Bank Internal Audit Function Implementation Standards (SPFAIB), and possible improvements in accordance with Bank Indonesia and OJK Regulations, an evaluation or review by external auditor/parties have been conducted at least once every three years. The most recent was conducted in 2019 for the 2016-2019 audit period, and the IAD was declared to have met the SPFAIB requirements in accordance with the Bank Indonesia Regulation No.1/6/PBI/1999 on the Assignment of Compliance Director and Standard Implementation Function of Bank Internal Audit (SPFAIB) for the 2016-2018 audit periods and POJK No.01/POJK.03/2019 concerning the Application of Internal Audit Function in Commercial Banks for the 2019 audit period. The next evaluation/review on the work results of the Bank's IAD and its compliance towards the Bank Internal Audit Function Implementation Standards (SPFAIB) will be conducted in 2022.

Objectives and the Implementation Phase of the Bank Internal Audit

IAD performs its duties to ensure the implementation of SPI, with the following objectives:

a. Ensuring the security of public funds, including deposits, current accounts, savings, and other third-party funds.
b. Securing Assets include audit on the Quality of Productive Asset through the audit work unit of credit management and Loan Review (end to end process) to ensure that the process of credit (Initiation, Analysis, Decision, Disbursement and Monitoring) has been carried out prudently.
c. The goals and objectives of the operational activities are achieved through economically efficient and effective use of resources and supervise the activities of certain activities such as information technology systems (Core Banking, Opics, Trade Innovation, Swift, and others).
d. The integrity and completeness of information, including accurate, complete, and timely recording of the Bank obligations in the administrative accounts.
e. Compliance with policies, plans, procedures, laws and regulations, including the assessment of those aspects that affect the Bank's Soundness Level.
f. Assessment on awareness of management/supervision of 5 (five) SPI components.

Pra Audit diawali dengan pemilihan metode pendekatan audit seperti *Scope Audit* berdasarkan hasil *assessment*, *Audit Program* terkait, *Mandays*, penetapan *sample size*, tehnik pengujian, bukti minimal dan cara mendapatkannya.

Penetapan penugasan ditetapkan oleh Kepala IAD berdasarkan *schedule* yang ada pada *Audit Plan*.

Penugasan Audit dimulai dengan pembuatan surat tugas, *entry meeting*, *field audit*, *exit meeting*, pembuatan Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) dan hasil audit berupa hasil penilaian SPI akan dicerminkan dalam *Audit Rating* dengan kualifikasi *Strong*, *Satisfactory*, *Fair*, *Marginal* dan *Unsatisfactory*.

Hasil audit akan ditindaklanjuti dengan pembuatan *executive summary report* yang disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait.

4.2.1. Pelaksanaan Tugas Audit Intern

A. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Yaitu pemeriksaan dengan ruang lingkup aspek kegiatan operasional Bank, dengan tujuan menilai efektivitas SPI terutama penilaian atas sistem dan prosedur yang berlaku serta implementasinya. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada seluruh Kantor Cabang/Capem dan Divisi-Divisi Kantor Pusat. Pada tahap awal menuju *Risk Based Audit* maka pada awal tahun dilakukan *risk assessment* terhadap auditable unit di kantor pusat dan kantor cabang untuk menentukan unit mana yang akan diperiksa dan frekuensinya.

B. *On Desk Audit*

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara *on desk* yang meliputi *monitoring* kepada penyelesaian DMTL, Rekening Perantara, kelengkapan pengisian data transaksi di sistem, penelitian dan pembuatan rekapitulasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kantor Cabang/ Capem.

4.2.2. Realisasi/Pencapaian Penugasan Audit Intern

Selama tahun 2019, IAD telah melaksanakan pemeriksaan umum (*General Audit*) sesuai dengan rencana kerja audit tahun 2019 sebagai berikut: [FS9]

Pre Audit begins with the selection of audit approach methods such as Audit Scope based on the assessment results, related Audit Program, Mandays, the determination of sample size, testing technique, minimal evidence and ways to acquire them.

The Assignment determined by the Head of the Internal Audit Unit based on the schedule on the Audit Plan.

Audit Assignment begins with formulating the work order, entry meeting, field audits, exit meetings, formulating the Follow Up Monitoring List, and audit results in the form of SPI assessment as reflected in the Audit Rating with the following qualifications: Strong, Satisfactory, Fair, Marginal, and Unsatisfactory.

Audit Results will be followed up by creating executive summary reports to the President Director, Board of Commissioners and copies to the respective Compliance Director and Director.

4.2.1. Internal Audit Implementation

A. General Audit

Inspection based on scope of the Bank's operational activities, aimed at assessing the effectiveness of the SPI, particularly on existing systems and procedures and their implementation. These inspections are carried out in all Branches/Sub-Branch Offices and Divisions at Head Office. At the initial stage towards Risk Based Audit, the Bank carried out risk assessment at the beginning of the year at auditable units at the head office and branch offices to determine which units will be examined and the frequency of examination.

B. On Desk Audit

On desk audit includes monitoring the completion of DMTL, Intermediary Account, the completeness of transaction data filling in the system, research, and recapitulation based on reports submitted by the Branch/ Sub Branch Office.

4.2.2. Realization/Achievement of Internal Audit

IAD has performed General Audits in accordance with the audit work plan of 2019 as follows: [FS9]

Obyek Audit Audit Object	2019			2018		
	Rencana Audit Audit Plan	Realisasi Audit Audit Realization	Pencapaian Completion (%)	Rencana Audit	Realisasi Audit	Pencapaian Completion (%)
Kantor Cabang | Branch Office	22	22	100	11	11	100
Kantor Cabang Pembantu | Sub-Branch Office	14	14	100	16	16	100
Kantor Kas | Cash Office	7	7	100	-	-	-
Unit Kerja/Divisi Kantor Pusat | Working Unit/Head Office Division	10	10	100	38	37	97
Audit Khusus | Special Audit *)	-	30	-	-	10	-
Total Audit	53	76	143	65	74	114
Loan Review	70	74	105	20	22	110
Audit Thematik | Thematic Audit **)	8	8	100	-	2	-
Mandatory Audit ***)	9	9	100	-	-	-

Keterangan | Notes:
*) Penugasan/Audit Khusus terkait dengan fungsi *anti fraud* yang merupakan bagian dari organisasi IAD. Dari 30 penugasan audit khusus 23 di antaranya sudah finalisasi laporan, sementara 7 lainnya sedang proses pendalaman dan penulisan laporan.
**) Pemeriksaan IT audit atas objek-objek IT.
***) Mandatory Audit BI atas 5 proses di bidang Operasional (BI-RTGS; BI-SKN; BI-SSSS; BI-ETP dan KPDHN) serta 4 proses di bidang IT (BI-RTGS; BI-SKN; BI-SSSS dan BI-ETP).

*) Assignment/Special Audit related to anti-fraud function is part of IAD organization. Of the 30 special audit assignments, 23 of them have already finalized the report, while 7 others are in the process of deepening and writing the report.
**) Audit of IT audits on IT objects.
***) Mandatory BI Audit of 5 processes in Operational (BI-RTGS; BI-SKN; BI-SSSS; BI-ETP and KPDHN) and 4 processes in IT (BI-RTGS; BI-SKN; BI-SSSS and BI-ETP).

Selain melakukan audit sesuai dengan rencana kerja audit, selama tahun 2019 IAD juga telah melaksanakan fungsi konsultatif.

4.2.3. Temuan Pemeriksaan Audit Intern

Beberapa kesimpulan penting terkait dengan hasil pemeriksaan terhadap beberapa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat/Kredit sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pada Kantor Cabang/Capem
   Hasil Audit IAD pada Kantor Cabang/Capem, secara umum dapat diungkapkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (5 COSO Component) sudah cukup memadai, temuan audit rata-rata ditemukan pada *Control Activities* dan *Monitoring* yaitu petugas operasional maupun Supervisor (Kacab/BSOM/BO) yang belum sepenuhnya menjalankan SOP secara konsisten dan berkesinambungan terhadap transaksi harian pada hari H+1, dengan *Audit Rating* "Satisfactory".
2. Bidang Kredit
   Dari hasil audit Kredit/*Loan Review*, temuan umumnya lebih disebabkan karena kurang komprehensifnya proses pengendalian kredit dan kurangnya *monitoring* pasca pencairan kredit, sehingga berpengaruh kepada kualitas kredit dengan nilai *Audit Rating* "Fair".

In addition to conducting audits in accordance with the audit work plan, during 2019 IAD has also implemented the consultative audit function.

4.2.3. Internal Audit Investigation Findings

Several important findings on Branch Offices, SubBranch Offices, and Work Unit/Division of the Head Office/Credit:

1. Examination at the Branch/Sub-Branch Office
   The IAD Audit on Branch/Sub Branch Office generally indicated that the Internal Control System (5 COSO Component) is adequate. The audit findings were most often found Control Activities and Monitoring, which is personnel and Supervisors (Kacab/KBO/OO) in charge of operations that do not conform to the SOPs consistently and continuously regarding the daily transactions on H+1, with an Audit Rating "Satisfactory".
2. Loan Sector
   Based on the audits on Credit Divisions/Loan Review, audit findings are mostly due to the less comprehensive process on credit control as well as inadequate post-loan disbursement monitoring process, with an Audit Rating "Fair".

3. Pemeriksaan pada Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat
   Hasil audit IAD pada Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat pada umumnya temuan audit lebih disebabkan karena belum secara optimal menerapkan *monitoring* atas aktivitas Operasional pada Divisi tersebut dengan *Audit Rating* "Fair".

4.3. Fungsi Audit Ekstern

Pengawasan terhadap PT Bank JTrust Indonesia Tbk. selain dilaksanakan oleh auditor internal, juga dilaksanakan oleh auditor eksternal, di antaranya Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Untuk memastikan pelaksanaan efektivitas fungsi audit ekstern, maka PT Bank JTrust Indonesia Tbk. mengacu kepada dan berupaya untuk memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Salah satu komponen/faktor penting dalam penerapan tata kelola yang baik adalah tersedianya laporan keuangan yang memadai serta kecukupan proses pelaporan keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan/transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Untuk memastikan pemenuhan ketentuan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, maka peran Auditor Eksternal (dalam hal ini Kantor Akuntan Publik/KAP) sangatlah penting.

Peran dan fungsi Auditor Eksternal antara lain adalah:
1. Memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Memastikan laporan keuangan internal sudah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Hasil audit atas Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh KAP merupakan *outcome* dari suatu proses yang obyektif, independen, profesional, sehingga diharapkan dapat mendukung prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan manajemen Bank sehingga dapat memenuhi harapan *stakeholder* Bank.

3. Examination of the entire Work Unit/ Division at Headquarters
   The findings of IAD audit on Work Unit/ Division at the Headquarters are generally due to the less-optimal implementation of monitoring on operational activitiesin the Division, with an Audit Rating "Fair".

4.3. External Audit Function

In addition to internal auditor, the supervision of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is also conducted by external auditors, including Financial Services Authority and Public Accounting Office (KAP). To ensure effectiveness of the implementation of the external audit function, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. refers and strives to meet the terms about engagement between the Bank, the Public Accountant Office, and Bank Indonesia as stipulated in Financial Services Authority regulation concerning Transparency of the Bank's Financial Condition.

One important component/factor in the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is the availability of adequate financial statements and the adequacy of financial statement process, in accordance with the principles of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.

In order to support and ensure the adequacy of financial statements and reporting process of the Bank in line with the Financial Accounting Standards in Indonesia, the role of External Auditor (in this case the Public Accounting Office) is important.

The role and function of the External Auditor includes:
1. Ensure compliance of financial statements with existing accounting standards.
2. Ensure internal financial statements have met the provisions of Financial Services Authority on Transparency of the Bank's Financial Condition.

The audit result on Financial Statements produced by KAP is an outcome of an objective, independent, professional process that is expected to support good corporate governance principle in the Bank's management governance so that it can fulfil the expectation of Bank's stakeholders.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Ekstern

Pada tahun 2019, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Bank adalah KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*A Member Firm of Crowe Global*). Penunjukan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan berdasarkan persetujuan RUPS Tahunan tanggal 27 Juni 2019 dan dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi serta mendapat rekomendasi dari Komite Audit termasuk dalam hal penetapan biaya audit atas dasar kewajaran.

Nama Akuntan Publik

Darmenta Pinem, CPA

Nama Kantor Akuntan Publik

KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Pengawasan Atas Auditor Eksternal

Komite Audit melakukan pengawasan selama pelaksanaan proses audit eksternal melalui pertemuan secara rutin dengan Akuntan Publik untuk membahas rencana pemeriksaan seluruh temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik, membantu dan memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit serta melakukan evaluasi atas kualitas proses audit, memastikan pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

Frekuensi Komunikasi Akuntan Publik dan Direksi

Selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik, komunikasi dan kerja sama antara Akuntan Publik dan Direksi dilaksanakan secara intensif dan reguler.

Jumlah Periode Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Telah Mengaudit Laporan Keuangan Bank

Sesuai SEBI No.3/32/DPNP tentang Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan Bank Indonesia, penunjukan KAP yang sama hanya dapat dilakukan untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut, kecuali jika memenuhi kondisi tertentu dan atas persetujuan dari otoritas yang berwenang.

Pada tahun 2019, KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*A Member Firm of Crowe Global*) merupakan KAP yang melakukan audit Bank untuk periode keempat. Penunjukan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No.23.01/S-Dir-FCD/JTRUST/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019.

Effectiveness of External Audit Implementation

In 2019, the Public Accounting Firm (KAP) that audited the Bank's consolidated financial statements was KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (A Member Firm of Crowe Global). The appointment of KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan based on the approval of the Annual General Meeting of Shareholders on June 27, 2019 and carried out through a process in accordance with applicable regulations. The appointment has been reviewed and monitored and has received a recommendation from the Audit Committee, including in determining audit fees on a fair basis.

Name of a Public Accountant

Darmenta Pinem, CPA

Name of the Public Accounting Firm

KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners

Supervision of External Auditors

The Audit Committee acts as supervisor during the external audit process through regular meetings with the Public Accountant to discuss plans to check all findings and developments during the process, assist and ensure that there are no obstacles in conducting the audit, evaluate the quality of the audit process, and ensure that the audit is in accordance with applicable provisions and standards.

Communication Frequency of Public Accountants and Directors

During the audit by Public Accountant, communication and cooperation between the Public Accountant and the Board of Directors are carried out intensively and regularly.

The Number of Accountant and Public Accounting Firms (KAP) That Has Audited the Bank's Financial Statements

According to SEBI No.3 / 32 / DPNP on relationships between Banks, Public Accountants, and Bank Indonesia, the appointment of the same Public Accounting Firm can only be carried out for an audit period of 5 (five) consecutive fiscal years, unless it meets certain conditions and obtain approval from the authority.

In 2019, KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (A Member Firm of Crowe Global) has conducted audit for the Bank for four consecutive years. . The appointment of KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners has been reported to OJK through Letter No.23.01 / S-Dir-FCD / JTRUST / X / 2019 dated October 23, 2019.

Jasa Lain yang Dilakukan Akuntan & KAP Terhadap PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Selain Memberikan Jasa Audit (Biaya Non-Audit) di Tahun 2019

Pada tahun 2019, tidak ada *fee* yang dibayarkan kepada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk jasa non-audit.

Other Services Provided by Accountants & Public Accounting Office for PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Other Than Providing Audit Services (Non-Audit Fees) in 2019

In 2019, no fees were paid to the Public Accounting Office Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners for non-audit services.

Biaya Audit Tahun 2019

Pada tahun 2019, total biaya audit Bank sebesar Rp4.700.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

Audit Fees for 2019

In 2019, the Bank's total audit fees was IDR4,700,000,000 with the following details:

Periode/Tahun Pemeriksaan Audit Period/Year	Biaya Fee
Januari | January 2019	Rp 400.000.000
Maret | March 2019	Rp 600.000.000
Oktober | October 2019	Rp 600.000.000
Desember | December 2019	Rp 3.100.000.000

Informasi mengenai Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Bank selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Information regarding the Public Accountant Firm that has conducted Bank audits in the past 5 (five) years as follows:

Tahun Pemeriksaan Audit Period	Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm	Penanggung Jawab Responsible person
2019	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Darmenta Pinem, CPA
2018	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Tjiong Eng Pin, CPA
2017	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Tjiong Eng Pin, CPA
2016	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Tjiong Eng Pin, CPA
2015	KAP Tjahjadi & Tamara	Riani, CPA

4.4. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan yang penting dalam memastikan aspek penghubung (*liaison officer*) antara Bank dengan pihak eksternal khususnya berkaitan dengan pasar modal, publik serta kebijakan internal berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Dasar Hukum

Ketentuan pembentukan Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. merujuk pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tanggal 20 Januari 2014 beserta perubahannya.

4.4.Corporate Secretary

The Corporate Secretary has an important role in ensuring the liaison aspect (liaison officer) between the Bank and external parties, particularly the capital market, public, and internal policies on the implementation of good corporate governance.

Legal Basis

The basic terms of reference for the appointment of the Corporate Secretary of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. refer to:

1. The Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 35/POJK.04/2014 dated on December 8,2014 on Corporate Secretary of Public Company.
2. The Indonesian Stock Exchange Regulation Number I-A dated January 20, 2014 and its amendments.

4.4.1 Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan serta telah dilaporkan kepada OJK (baik OJK Pengawasan Bank maupun OJK IKNB) dan diumumkan kepada publik melalui situs IDXNet (*e-reporting*). Sebelumnya jabatan Sekretaris Perusahaan/Kepala Divisi Corporate Secretary PT Bank JTrust Indonesia Tbk. dipegang oleh Sdr. Rayendra Prasetya, dan efektif sejak tanggal 19 Agustus 2019 jabatan Sekretaris Perusahaan/ Kepala Divisi Corporate Secretary PT Bank JTrust Indonesia Tbk. dipegang oleh Sdri. Christiati Elmi Sianipar, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.15.07/S.Kep.Dir-HCGD/JTRUST/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019.

Profil lengkap Kepala Divisi Corporate Secretary tercantum dalam Profil pada Laporan Tahunan 2019 ini.

4.4.1. Profile of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary shall be appointed and dismissed by the Board of Directors. The appointment of the Corporate Secretary has fulfilled the requirements and been reported to OJK (both in Banking Supervision and Non-Bank Financial Institution) and announced to the public through IDXNet website (e-reporting). Previously, the position of Corporate Secretary of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. I was held by Mr. Rayendra Prasetya, and effective since August 19, 2019, the position is held by Mrs. Christiati Elmi Sianipar, based on Directors Decree No.15.07 / S.Kep.Dir-HCGD / JTRUST / VIII / 2019 dated August 15, 2019.

The complete profile of the Head of the Corporate Secretary Division is listed in the Profiles in this 2019 Annual Report.

4.4.2.Pendidikan dan/atau Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2019 Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain:

4.4.2. Education and/or Training of Corporate Secretary

To improve competence and understanding to support of its duties and responsibilities, in 2019 the Corporate Secretary of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has attended various education/training programs, workshops, conferences, seminars, among others:

No.	Nama Name	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar Training, Workshop, Conference, Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Venue & Date
1	Christiati Elmi Sianipar	Risk Awareness - Risiko Operational & Information Security	E-Learning Training	4-20 September 2019 September 4-20, 2019 Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
		APU PPT - Sub Course 1	E-Learning Training	1-20 November 2019 November 1-20, 2019 Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
		Advanced Problem Solving	Inhouse Training-Indra Soerjaatmadja (Precena JAC Strategic Partner)	14 November 2019 November 14, 2019 Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
		Anti Fraud : Fraud Awareness	E-Learning Training	20-31 Desember 2019 Desember 20-31, 2019 Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
		Sosialisasi & Internalisasi 4 Values Jtrust Bank (EOY 2019)	Sosialisasi Boards of Directors	31 Desember 2019 December 31, 2019 Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta

Selain dari yang disebutkan di atas, Sekretaris Perusahaan senantiasa mengikuti/menghadiri sosialisasi peraturan-peraturan baru dari OJK dan BEI.

4.4..3 Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada POJK No.35/POJK.04/2014 dan SOP Corporate Secretary. Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah melaksanakan tugasnya, dengan uraian singkat pelaksanaan tugas sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan industri keuangan - perbankan dan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan - perbankan dan pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perbankan dan pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs *Web* Emiten atau Perusahaan Publik;
   b. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
   e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Sebagai fasilitator dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*/CSR).
6. Melakukan fungsi komunikasi dalam rangka membangun citra dan reputasi perusahaan serta membangun *goodwill* keluar perusahaan, menjaga konsistensi pesan dan citra yang ingin disampaikan kepada masyarakat, serta menjaga agar informasi yang disampaikan tidak melanggar hukum.

In addition to the above, the Corporate Secretary will always follow/attend the socialization of new regulations from the OJK and IDX.

4.4.3. Task Implementation of the Corporate Secretary

In carrying out its duties, Corporate Secretary must comply with POJK No. 35/POJK.04/2014 and Standard Operating Procedures for Corporate Secretary. The Corporate Secretary of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has performed its duties, with short description as follows:

1. Follow the financial industry development - banking and capital markets, particularly regulations in the financial sector – banking and capital markets.
2. Give inputs to the Board of Directors and Commissioners to comply with existing regulations in banking and the capital market.
3. Assist the Board of Directors and the Board of Commissioners in the implementation of good corporate governance, including:
   a. Disclosure of information to the public, including the availability of information on the Website of the Company;
   b. Report submission to the Financial Services Authority in a timely manner;
   c. Implementation and documentation of the General Meeting of Shareholders;
   d. Implementation and documentation of the Board of Commissioners and/or Board of Directors meetings;
   e. Implementation of the orientation program for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
4. Act as a liaison between the Issuer or Public Company with the Financial Services Authority and other stakeholders.
5. Act as the facilitator in the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR).
6. Improve communication in order to build the company's image and reputation as well as develop goodwill out of the company, maintain the consistency of message and image to be conveyed to the public, and make sure that information submitted does not violate the law.

7. Mengkoordinir pelaksanaan *office of the board* yang mencakup:
   a. Memastikan ketersediaan informasi dalam pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris.
   b. Memastikan kehadiran peserta rapat agar kuorum dapat tercapai sehinggga keputusan yang dihasilkan *legitimate* dan kredibel.
   c. Memastikan fungsi sekretariat perusahaan dalam meng-administrasikan pelaksanaan dokumentasi keputusan rapat dan kearsipan korporat.
8. Melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*).
9. Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab penuh sesuai pedoman dan prosedur.

7. Coordinate the implementation of office of the board, including:
   a. Ensure the availability of information in the decision making of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
   b. Ensure the attendance of meeting participants in order to achieve the quorum, so the decisions will be legitimate and credible.
   c. Ensure the function of the corporate secretary in administering the implementation of meeting results documentation and corporate archiving.
8. Implement the tasks in accordance with the Prudential Banking principles.
9. Fully implement its duties and responsibilities in accordance with the guidelines and procedures.

BAB V
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

CHAPTER V
RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL SYSTEM IMPLEMENTATION

5.1. Penerapan Manajemen Risiko

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah menerapkan manajemen risiko berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank.

Penerapan manajemen risiko dan tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) yang tepat dan sehat akan memiliki peran dalam meningkatkan nilai tambah dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi risiko dan kerugian Bank di masa mendatang yang disesuaikan dengan kompleksitas serta kondisi internal bank.

Untuk mencapai tujuan di atas, maka diperlukan adanya budaya sadar risiko (*risk awareness)* dan kemampuan teknis yang memadai daripada seluruh unit kerja di J Trust Bank, di mana hal ini menjadi tanggung jawab dan melibatkan seluruh unit kerja di JTrust Bank.

Efektivitas penerapan tata kelola dan kerangka kerja manajemen risiko oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk. meliputi 4 (empat) pilar yaitu:

a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Pengawasan aktif Dewan Komisaris meliputi antara lain:

(1) Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank.
(2) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.

5.1. Risk Management Implementation

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has implemented risk management based on Regulation of Financial Services Authority No. 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 on the application of Risk Management for Commercial Banks, and Financial Services Authority Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 on Risk Management Implementation for Commercial Banks.

Implementation for Appropriate and sound management of risk and governance of the Bank (Good Corporate Governance) will have a role in increasing the added value and provide a comprehensive picture of the potential risks and losses of the Bank in the future adjusted to the complexity and internal conditions of the bank.

To achieve the above objectives, it is necessary to create a risk awareness culture and adequate technical competence of the entire unit in Bank JTrust Indonesia, which is the responsibility of and involving all the work units at JTrust Bank Indonesia.

The effectiveness of the governance and risk management framework implementation by PT Bank JTrust Indonesia Tbk. includes four (4) pillars, namely:

a. Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners

The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible for the effectiveness of risk management at the Bank and ensure the implementation of adequate risk management in accordance with the characteristics, complexity, and risk profile of the Bank. Active supervision by the Board of Commissioners include, among others:

(1) To approve the risk management policy, including strategies and risk management framework established in accordance with the level of risk taken (risk appetite) and risk tolerance of the Bank;
(2) To evaluate the policies and the implementation of risk management performed by the Board of Directors.

(3) Menyelenggarakan Rapat Berkala dengan Direksi untuk mengevaluasi pencapaian tindak lanjut setiap rencana kerja (*action plan*).
(4) Memastikan rekomendasi setiap Laporan Hasil Audit (LHA) Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah ditindaklanjuti.

Sedangkan Direksi bertugas menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif, termasuk implementasinya, serta memastikan bahwa risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti. Direksi juga bertanggung jawab untuk menumbuhkembangkan budaya dan kesadaran akan risiko di seluruh jajaran unit kerja. Pengawasan aktif Direksi di antaranya meliputi:
(1) Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank.
(2) Memantau, mengevaluasi, dan memastikan Rencana Bisnis Bank, strategi dan *action plan* telah dilakukan sesuai rencana melalui rapat/pertemuan berkala.
(3) Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Kebijakan dan Prosedur telah dipahami dan dilaksanakan.
(4) Memastikan dan melaksanakan langkah perbaikan atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah dilaksanakan dengan efektif.
(5) Mengembangkan budaya manajemen risiko dan meningkatkan kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi.

Dalam rangka pengawasan dan pengelolaan risiko Bank serta penerapan Tata Kelola yang baik, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) di tingkat Komisaris dan di tingkat Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*).

(3) Holding Regular Meeting with the Board of Directors to evaluate the achievement of the follow-up of each action plan;

(4) Ensure that any recommendations the Audit Report (LHA) of the Internal and External Audit Unit have been followed up.

Meanwhile, the Board of Directors is in charge of determining the direction of policies and strategies of risk management comprehensively, including implementation, and to ensure that all material risks and the impacts have been followed up. The Board of Directors is also responsible for fostering the risk culture and awareness throughout the ranks of the working unit. Active supervision of the Board of Directors, includes:
(1) Formulate risk management policies, strategies, and framework by taking into account the level of risk taking (risk appetite) and risk tolerance of the Bank;
(2) Monitor, evaluate and ensure the Bank's business plan, strategy, and action plan has been carried out as planned through regular meeting;
(3) Ensuring the Standard Operating Procedures (SOP), Policies and Procedures have been understood and implemented;
(4) To ensure and implement corrective measures or recommendations of the Internal and External Audit Unit had been implemented effectively;
(5) Develop a risk management culture and raise awareness at entire levels of the organization.

In regard of risk supervision and management of the Bank and the implementation of Good Corporate Governance, the Board of Commissioners is assisted by the Risk Monitoring Committee and the Board of Directors is assisted by the Risk Management Committee.

Berikut Struktur Organisasi Manajemen Risiko pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk.:

The following is the Organizational Structure of Risk Management at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.:

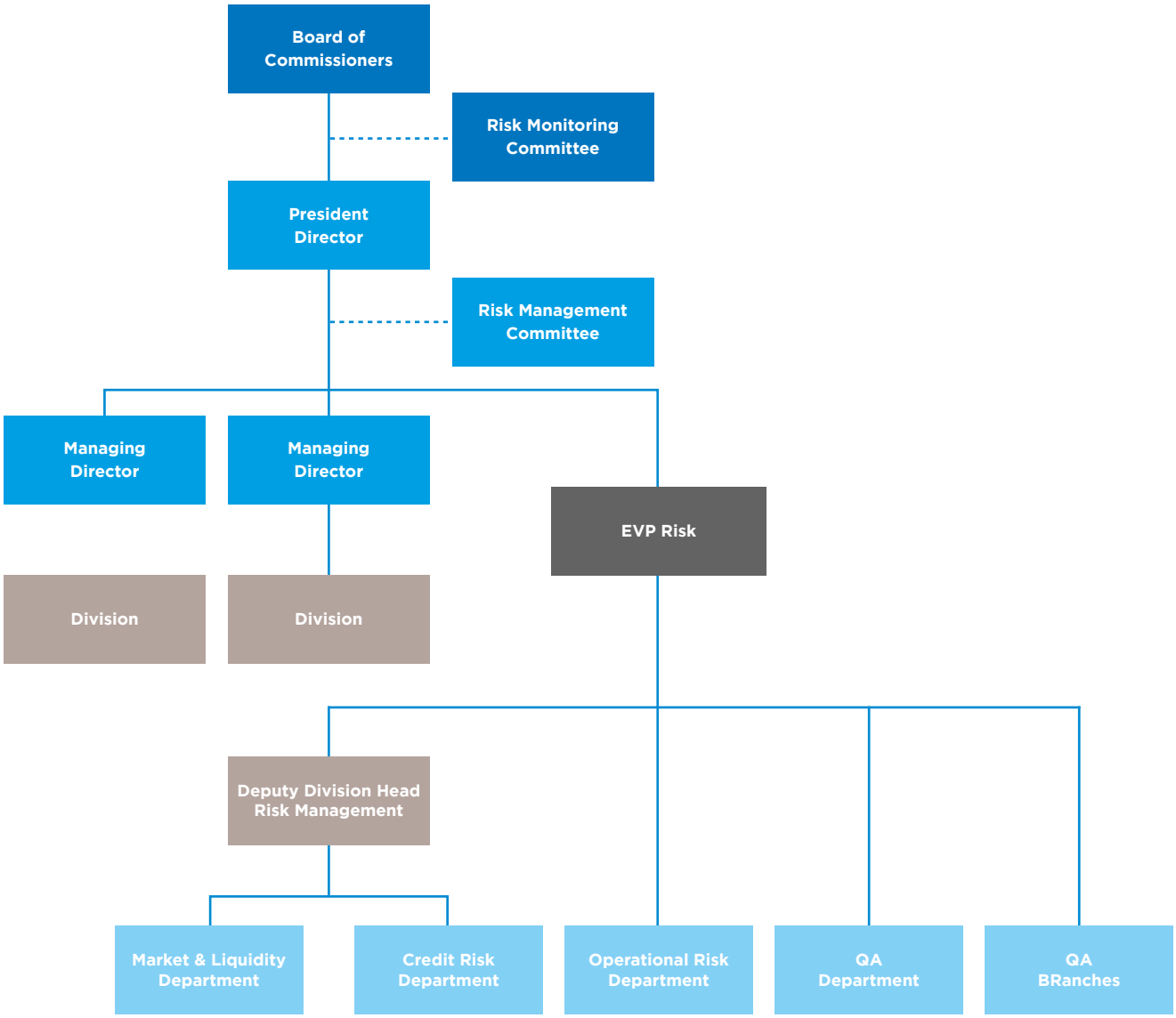

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

1. **Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)**
   Uraian mengenai Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Bab III Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
2. **Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)**
   Uraian mengenai Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada Bab III Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Risk Management Organizational Structure

1. **Risk Monitoring Committee**
   Description on the Risk Monitoring Committee can be viewed at Chapter III Structure and implementation of Committee's Duties of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
2. **Risk Management Committee**
   Description on the Risk Management Committee can be viewed at Chapter III Structure and Implementation of Committee's Duties of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

3. Satuan Kerja Manajemen Risiko / *Risk Management Division* (RMD)

RMD berada di bawah EVP Risk Management yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja bisnis/operasional. RMD mempunyai fungsi mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko untuk meminimalkan potensi maupun dampak dari berbagai jenis risiko yang dihadapi di dalam kegiatan serta proses bisnis.

Struktur organisasi RMD terdiri dari 5 (lima) unit kerja yaitu unit kerja risiko kredit, unit kerja risiko pasar & likuiditas, unit kerja risiko operasional, dan unit kerja QA Branch dan unit kerja QA Head Office.

Tugas dan tanggung jawab RMD meliputi:

a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan, kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko.
b. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
c. Melakukan pemantauan atas strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
d. Pemantauan posisi/eksposur risiko secara keseluruhan dan jenis risiko.
e. Penerapan *stress testing* untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko.
f. Melakukan kajian risiko atas usulan produk dan/atau aktivitas baru.
g. Melakukan *review* dan rekomendasi limit risiko dari usulan unit kerja bisnis dan operasional.
h. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Komite Manajemen Risiko secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
i. Menyusun laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan OJK.

b. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko

Penerapan manajemen risiko di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai ketentuan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko dalam rangka mengamankan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. atas risiko yang dihadapi dalam

3. Risk Management Division (RMD)

The RMD is under the EVP of Risk Management, which is a working unit independent from business/operational work units. RMD functions to identify, assess, monitor, and control risks to minimize the potential or impact of the various types of risks faced in business process and activities.

The RMD organizational structure consists of 5 (five) working units, namely credit risk working unit, market and liquidity risk working unit, operational risk working unit, and QA Branch working unit, and QA Head Office working unit.

Duties and responsibilities of the RMD include:

a. Providing input to the Board of Directors in the risk management preparation, policy, strategy, and framework.
b. Developing procedures and tools for the identification, measurement, monitoring and control risk.
c. Conducting monitoring of the risk management strategy, which have been approved by the Board of Directors.
d. Monitoring the overall risk position/exposure and type of risk.
e. Implementing stress testing to determine the impact of the implementation of risk management policies and strategies.
f. Conducting risk assessment on the proposed new products and/or activities.
g. Conducting a review and recommendation of risk limits of proposals by the business and operations work units.
h. Preparing and submitting risk profile reports to the Risk Management Committee regularly to be submitted to the Board of Directors and the Financial Services Authority (FSA).
i. Preparing reports on the Capital Adequacy Ratio (CAR) and the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) regularly to be submitted to the Board of Directors and FSA.

b. Sufficiency of policies, procedures, and limit setting as guidelines in the implementation of risk management

The implementation of risk management in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has been prepared under policies and procedures, among others such a General Policy of Risk Management (KUMR). KUMR as the highest policy to provide direction and control policy of risk management in order to secure the PT Bank JTrust Indonesia

aktivitas bisnisnya. Penetapan limit dikelola dalam kegiatan usaha dan produk dan telah disesuaikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan limit tersebut ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

Tbk. in its business activities. Limit determination is managed on business activities and products and adjusted the level of risk to be taken (risk appetite) and the limits are reviewed periodically to adjust to changing conditions.

c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan dan pengendalian terhadap ke delapan jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategik, risiko hukum, dan risiko reputasi.

1) Identifikasi
   Identifikasi risiko dilakukan mencakup seluruh aktivitas bisnis dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko beserta dampaknya.
2) Pengukuran
   Pengukuran risiko dimaksudkan agar Bank mampu menghitung eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usaha, dan diperkirakan dampak terhadap permodalan. Salah satu pengukuran risiko tercermin dalam Laporan Profil Risiko triwulanan.
3) Pemantauan
   Pemantauan risiko dilakukan antara lain dengan cara mengevaluasi limit transaksi *treasury* serta efektivitas proses manajemen risiko.
4) Pengendalian
   Pengendalian risiko antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat *high* (aktivitas yang berisiko tinggi).

c. Sufficiency of identification, measurement, monitoring and risk control processes, as well as risk management information system

The process of risk management includes the identification, assessment, monitoring, management, and control of the eight risks, namely the credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, strategic risk, legal risk, and reputation risk.

1) Identification
   Risk identification is conducted by covering entire business activities in order to analyze the source and possible risks and their impact.
2) Measurement
   Risk has the objective to enable the Bank to calculate the risk exposure inherent in business activities, and the estimated impact on capital.
   One of the risk assessments is reflected in the quarterly Risk Profile Report.
3) Monitoring
   Risk monitoring is conducted among others by evaluating the limit of treasury transactions and the effectiveness of the risk management process.
4) Control
   Risk control, among others, is by providing follow-up on risks in high category.

d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Aktivitas dan sistem pengendalian internal dilakukan *assessment* secara berkesinambungan oleh Internal Audit Division untuk memastikan kualitas penerapan manajemen risiko yang mumpuni pada semua pelaksanaan proses yang memiliki eksposur risiko tinggi sudah diterapkan dengan baik. Selain itu, ada pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional (*risk taking unit*) dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (*risk management unit*).

Penerapan manajemen risiko di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, di antaranya Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai ketentuan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko

c. Comprehensive Internal control System

Internal control system and activities are subject to continuous assessment by the Internal Audit Division to ensure the quality of a robust risk management implementation to all processes that have high risk exposure is implemented in a good manner. In addition, there is a clear separation of functions between the operational units (risk-taking units) with units that carry out the function of risk management (risk management unit).

The implementation of risk management in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has been prepared under policies and procedures, among others such a General Policy of Risk Management (KUMR). KUMR as the highest policy to provide direction and control policy of risk management

dalam rangka mengamankan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. atas risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnisnya.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Manajemen dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko, antara lain:

a. Melakukan pengkinian kebijakan, dan prosedur disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
b. Melakukan pengukuran Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR), dengan menggunakan 4 cakupan penilaian yaitu Laporan Profil Risiko, Laporan hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola, aspek Rentabilitas dan Permodalan.
c. Dalam upaya meningkatkan kompetensi pegawai Bank dalam hal Manajemen Risiko, Manajemen secara berkelanjutan mengikutsertakan pegawai Bank dalam Sertifikasi Manajemen Risiko, sehingga dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.
d. Pemenuhan KPMM sesuai Profil Risiko atau ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*) sesuai dengan ketentuan Regulasi terbaru.

in order to secure the PT Bank JTrust Indonesia Tbk. in its business activities.

The following is a number of efforts carried out by the Management in the implementation of Risk Management, among others:

a. Updating the policies and procedures adapted to the prevailing regulations.
b. Assessing the Bank Soundness Level through the Risk Based Bank Rating (RBBR) approach, using 4 assessment scopes, namely the Risk Profile report, Good Corporate Governance Self-Assessment Report, Profitability Aspect, and Capital.
c. In an effort to improve the competence of Bank employees in terms of Risk Management, the Management continuity engage employees in the Risk Management Certification, so as to meet the applicable provisions.
d. Fulfillment of CAR ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) in accordance with the latest Regulation.

Penilaian Profil Risiko

Penilaian Profil Risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.3/2016 tanggal 27 Januari 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dilakukan terhadap risiko yang melekat (*inherent risk*) dan kualitas penerapan manajemen risiko melalui proses *self assessment* pada seluruh aktivitas bisnis bank yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan.

Risiko Inheren merupakan risiko yang terkandung dalam aktivitas Bank, sementara Kualitas Penerapan Manajemen Risiko merupakan kemampuan Bank dalam mengendalikan risiko dalam aktivitas tersebut. Kedua penilaian tersebut diperlukan untuk menentukan gambaran umum risiko Bank, yang kerap disebut Profil Risiko. Sebagai panduan dalam mengelola ke delapan jenis risiko tersebut, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. memiliki Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) yang senantiasa diperbarui/disesuaikan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh jenis risiko yang melekat (*Inherent Risk*) pada Bank, maka diperlukan bentuk struktur organisasi pengelolaan yang sesuai dengan

Risk Profile Assessment

Risk Profile Assessment in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority No. 4/ POJK.3/2016 dated January 27, 2016 on the Soundness Level Assessment of Commercial Banks and Circular Letter of the Financial Services Authority No.14/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 on the Application of Risk Management for Commercial Banks refers to inherent risk and the quality of risk management through self-assessment in all of Bank's business activities which covers the 8 (eight) risks, namely the Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Compliance Risk, Strategic Risk, Legal Risk, and Reputation Risk.

Inherent Risk is a risk inherent to banking business activities, while the Quality of Risk Management Implementation is the ability of the Bank to control risks in the activities. Both assessments are required to establish the general risk description of the Bank, commonly named Risk Profile. As the guidelines to manage the eight type of risks, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has the General Policy of Risk Management (KUMR), which is continuously updated/ adapted in accordance with the prevailing regulations.

In order to identify, measure, monitor, and control all types of the Bank's attached risks (Inherent Risk), the management organizational structure that is in accordance with the size, complexity, and the ability

ukuran, kompleksitas, kemampuan Bank serta tujuan dan kebijakan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. melalui penyusunan Laporan Profil Risiko secara triwulanan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini hasil pengukuran atas Profil Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berdasarkan Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko periode triwulan IV Desember 2019 dibandingkan dengan periode triwulan II Juni 2019:

of the Bank, as well as the objectives and policies of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is required through the preparation of the quarterly Consolidated Risk Profile by the Risk Management Unit in accordance with the provisions of Bank Indonesia.

The following is the assessment result on the Risk Profile of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. based on Inherent Risk and the Quality of Risk Management Implementation in the 4th Quarter in December 2019 compared to the 2nd Quarter in June 2019:

Profil Risiko Risk Profile	**Desember 2019** December 2019			**Juni 2019** June 2019		
	Peringkat Risiko Inheren Inherent Risk Rating	**Peringkat Kualitas Manajemen Risiko** Risk Management Quality Rating	**Peringkat Tingkat Risiko** Risk Level Rating	**Peringkat Risiko Inheren** Inherent Risk Rating	**Peringkat Kualitas Manajemen Risiko** Risk Management Quality Rating	**Peringkat Tingkat Risiko** Risk Level Rating
Risiko Kredit Credit Risk	Moderate	Marginal	4	Moderate To High	Marginal	4
Risiko Pasar Market Risk	Low To Moderate	Satisfactory	2	Low To Moderate	Satisfactory	2
Risiko Likuiditas Liquidity Risk	Low To Moderate	Satisfactory	2	Moderate	Satisfactory	2
Risiko Operasional Operational Risk	Moderate	Fair	3	Moderate	Fair	3
Risiko Hukum Legal Risk	Moderate To High	Fair	4	Moderate To High	Fair	4
Risiko Strategik Strategic Risk	Moderate	Fair	3	Moderate	Fair	3
Risiko Kepatuhan Compliance Risk	Moderate	Fair	3	Moderate	Fair	3
Risiko Reputasi Reputation Risk	Moderate	Satisfactory	2	Moderate	Satisfactory	2
Peringkat Komposit Composite Rating	Moderate	Fair	3	Moderate	Fair	3

Dengan melihat peringkat komposit risiko inheren berada pada posisi *Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada posisi Fair, maka peringkat Profil Risiko per Desember 2019 adalah peringkat ke-3 (tiga) yang mempunyai *trend* risiko tetap dibandingkan peringkat periode Juni 2019.

Rincian penilaian dari ke delapan jenis Risiko Triwulan IV Tahun 2019 sebagai berikut:

1. **Risiko Kredit**

   Peringkat komposit Risiko Kredit adalah *Moderate* (3) di Triwulan IV tahun 2019 dengan *trend* tetap dibandingkan Triwulan II tahun 2019, namun dari sisi Risiko Inherent membaik yaitu dari *Moderate To High* ke *Moderate* akibat perbaikan kualitas aset dan kecukupan pencadangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

   a. Perbaikan kualitas aset tercermin dari perbaikan rasio Aset & TRA Kualitas Rendah, rasio Kredit Kualitas Rendah, rasio NPL *Gross*, Aset Bermasalah yang mengalami penurunan di Triwulan IV tahun 2019 dibandingkan Triwulan II 2019.

Referring to the inherent risk rating, which is in the position of Moderate and the Quality of Risk Management in the Fair position, then the Risk Profile as of December 2019 was at Rank 3 (three) which has a risk trend of stable compared to June 2019 ranking.

Details of the assessment of the eight Risks for Quarter IV 2019 are as follows:

1. **Credit Risk**

   The Credit Risk composite rank was Moderate (3) in the 4th Quarter 2019 with stable trend compare to the 2nd Quarter 2019, however the Inherent Risk improved from Moderate to High to Moderate because of the improvement of the quality of assets and capital adequacy, with the explanation as follow:

   a. The improvement on asset quality was reflected from the improvement in ratio of Asset and Low Quality TRA, ratio of Low Quality Loan, ratio of Gross NPL, Problematic Assets which decreased in 4th Quarter 2019 compared to 2nd Quarter of 2019.

b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR), dengan beberapa upaya perbaikan selama tahun 2019 sebagai berikut:

1) *Review* dan pengkinian Kebijakan dan SOP di bidang perkreditan antara lain PPK, SOP SAM, SOP Business Linkage (Manual Produk Multifinance Executing dan Channeling) dan SOP SME.
SOP SME ini sebagai panduan dalam proses pemberian kredit, analisis, format NAK dan ARR serta monitoring secara berkala.
2) Menyempurnakan BWMK di kategori A1, A2 dan A3, perbaikan PPK dan manual pelaksanaan PPK.
3) *Flow* perbaikan proses pemberian kredit dengan penentuan *Service Level Agreement* (SLA) dan mekanisme persetujuan dengan aplikasi *garoon*.
4) Perbaikan tata kelola (GCG) kredit meliputi:
   - Meningkatkan kompetensi SDM dengan memperkuat standardisasi penerimaan SDM dan evaluasi SDM bidang perkreditan.
   - Meningkatkan disiplin proses perkreditan dengan perkuatan *control* (*risk*, kepatuhan dan *governance*) dari RATEK dan keputusan kredit, monitoring kualitas kredit melalui forum KKR, menyusun *Tool*s KKR (identifikasi awal kredit bermasalah/*early loan problem identification, loan problem mitigation progress*), dan perbaikan disiplin dari kontrol *Loan Maintenance* (*post disbursement control*).
   - Meningkatkan disiplin dalam organisasi dengan penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) individu sehingga produktivitas, kinerja, penegakan sanksi & disiplin unit kerja perkreditan dapat diinformasikan secara periodik kepada Direksi.
5) Pelaksanaan *monitoring* kredit melalui rapat *Early Warning Monitoring* secara mingguan sehingga permasalahan & *action plan debitur* yang berpotensi menurun dapat diselesaikan segera.

b. Risk Management Implementation Quality, with several efforts for improvement in 2019 as follows:

1) Review and update Policies and SOP in loan unit for example: PPK, SOP SAM, SOP Business Linkage (Manual Product Multifinance Executing and Channeling) and SOP SME.
This SOP SME acts as a guideline in delivering loans, analysis, NAK and ARR format as well as periodical monitoring.
2) Improving BWMK within category A1, A2, and A3, improve PPK and the PPK implementation manual.
3) Improvement process flow in delivering loans by determining Service Level Agreement (SLA) and approval mechanism with garoon application.
4) Loan governance (GCG) improvement, that includes:
   - Improving the competence of human resources by strengthening recruitment standard and HR evaluation in loan sector.
   - Improving discipline on loan process by strengthening control (risk, compliance and governance) from RATEK and loan decision, monitoring credit quality through KKR forum, designing KKR Tools (early loan problem identification, loan problem mitigation progress), and improvement of discipline from Loan Maintenance control (post disbursement control).
   - Increasing organization discipline with clear and transparent setting related to organization, Key Performance Indicator of individuals to ensure productivity and quality, sharpen performance evaluation tools, submission of working unit performance related to credit regularly to the Board of Directors.
5) Carrying out credit monitoring through Early Warning Monitoring meeting weekly hence problems and action plans of potentially decreasing debtors can be solved immediately.

6) Meningkatkan fungsi *Loan Monitoring* dengan pelaksanaan Rapat KKR secara mingguan dan melakukan *monitoring action plan* penanganan kredit kualitas rendah.

2. Risiko Pasar

Risiko Inheren untuk Risiko Pasar berada pada posisi *Low to Moderate* (2), tidak berubah dari posisi Juni 2019. Pada kuartal keempat ini beberapa parameter menunjukkan tren yang stabil (tetap) pada risiko inheren.

Beberapa langkah pengelolaan risiko pasar adalah sebagai berikut:

a. Melakukan perbaikan terhadap struktur komposisi aktiva produktif dan non-produktifnya agar lebih menguntungkan posisi Bank.
b. Mengupayakan pengelolaan struktur kewajiban bank *(liabilities)* dalam meningkatkan sumber pendanaan jangka panjang, dengan jalan memberikan suku bunga yang menarik dan kompetitif pada deposito tiga bulan hingga satu tahun.
c. Meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan jangka waktu panjang.
d. Menerapkan *floating rate* pada pemberian kredit jenis tertentu, sehingga risiko penurunan suku bunga tidak membebani Bank dan sebaliknya juga tidak akan membebani debitur jika suku bunga meningkat.
e. Memonitor perkembangan harga pasar (*market pricing)* sekaligus memperkokoh kebijakan *pricing* aktiva maupun pasiva melalui forum rapat *Assets Liability Committee* (ALCO) dengan membahas beberapa perhitungan penting seperti *cost of money, base lending rate* dan perhitungan lainnya. Dengan demikian, setiap permasalahan yang terjadi di dalam Bank khususnya yang berkaitan dengan risiko suku bunga dapat diantisipasi sedini mungkin.
f. Melakukan *monitoring* atas likuiditas, aktivitas dan *risk limit* Divisi Treasury & Capital Markets secara harian dan melaporkannya kepada Direksi.

3. Risiko Likuiditas

Peringkat komposit Risiko Likuiditas adalah *Low to Moderate* (2) dengan pertimbangan sebagai berikut:

a) Rasio LCR per Triwulan IV Tahun 2019 sebesar 145,79% (di atas batas minimal ketentuan OJK sebesar 100%).

6) Improving Loan Monitoring by conducting weekly KKR Meeting and conducting monitoring action plan in handling low-quality loan.

2. Market Risk

Inherent Risk for Market Risk in Low to Moderate (2) position, unchanged from June 2019. In the fourth quarter, several parameters show a stable (steady) trend in inherent risk.

Several steps for managing market risk are as follow:

a. Making improvement to the structure of productive and non-productive assets composition to benefit the Bank's position.
b. Striving to manage the Bank's liability structure by improving the long-term source of fund by way of offering attractive and competitive interest rates on the three months to one year term deposits.
c. Increasing the long term Third Party Fund (DPK).
d. Applying floating rate on certain types of loans, so that the risk of a decline in interest rates does not burden the Bank and vice versa will not burden the debtor if interest rates rise.
e. monitoring the development of market pricing and at the same time strengthening the pricing policy of assets and liabilities through the Asset Liability Committee (ALCO) forum meeting to discuss various key formulations, such as cost of money, base lending rate and other calculations. Thus, any problems that occur in the Bank, particularly with regard to interest rate risk can be anticipated as early as possible.
f. Monitoring liquidity, activities and risk limits of the Treasury & Capital Markets Division on a daily basis and reporting to the Board of Directors.

3. Liquidity Risk

The composite rank of Liquidity Risk is Low to Moderate (2) with considerations as follow:

a) LCR ratio per 4th Quarter of 2019 was 145.79% (above minimum limit determined by OJK of 100%).

b) Akses pendanaan dari *Interbank Call Money* cukup memadai untuk meng-*cover* kebutuhan pendanaan bank jangka pendek.

Beberapa strategi dan pengelolaan risiko likuiditas sebagai berikut:

a) Melakukan portofolio investasi ke arah investasi yang lebih likuid.
b) Menurunkan konsentrasi deposan inti dan mengganti dengan dana *retail* sehingga menjadi lebih *sustainable* (berkesinambungan).
c) Mendorong bertumbuhnya jumlah investasi dana-dana murah atau nasabah kategori *low cost fund.*
d) Meningkatkan efektivitas pengelolaan *gap* likuiditas (*maturity gap, proyeksi cash flow*) untuk mengantisipasi risiko likuiditas sedini mungkin.
e) Meningkatkan kerja sama dengan Bank Lain agar dapat memanfaatkan fasilitas *Call Money* maupun Repo Surat Berharga intern bank.

Bank berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan *gap* likuiditas (*maturity gap* dan proyeksi arus kas) untuk mengantisipasi risiko likuiditas sedini mungkin, dan juga mengendalikan risiko likuiditas khususnya pada saat kondisi *stress*.

Bank juga telah menyusun *Contingency Funding Plan*, selain juga senantiasa memelihara kemampuannya dalam melakukan akses ke pasar uang dengan terus membina hubungan dengan bank koresponden. Untuk mendeteksi risiko likuiditas, Bank telah mempunyai *Standard Operation Procedure* LCP (*Liquidity Contigency Plan*), dan melakukan pemantauan likuiditas secara harian untuk dilaporkan kepada Direksi.

4. Risiko Operasional

Peringkat komposit Risiko Operasional adalah *Moderate* (3) dengan *trend* tetap dibandingkan Triwulan II tahun 2019 dengan pertimbangan sebagai berikut:

a) Adanya kejadian *internal fraud* sebanyak 2 kali di triwulan IV tahun 2019 dengan potensi kerugian sebesar Rp429,4 juta dengan penyebab lemahnya fungsi pejabat supervisi dan monitoring terhadap aktivitas *field collection* serta *account-account* kelolaannya, baik yang berada di kantor cabang maupun yang berada di Kantor Pusat. Saat ini Bank telah melakukan *action plan* perbaikan di proses *monitoring*

b) Financing access from Interbank Call Money was sufficient to cover the bank's short-term funding.

Some strategies and management of liquidity risk are as follows:

a. Setting investment portfolio toward more liquid investments.
b. Lowering concentration of core depositors and replacing it with a more sustainable retail funding.
c. Encouraging growth of number of low cost investment funds or customer funds in low cost category.
d. Improving the effectiveness of managing liquidity gap (maturity gap, projected cash flow) in anticipating liquidity risk early.
e. Increasing cooperation with other banks for securing Call Money and Securities Repo internal bank facilities.

The Bank seeks to increase the effectiveness of managing liquidity gap (maturity gap and cash flow projections) in anticipating liquidity risk early, and also controlling the liquidity risk, especially under stress conditions.

The Bank has also prepared a Contingency Funding Plan, as well as its ability to continue maintain access to the money market by continue building relationships with correspondent banks. To detect liquidity risk, the Bank has maintained a LCP (Liquidity Contingency Plan) Standard Operation Procedure and monitoring of daily liquidity, to be reported to the Board of Directors.

4. Operational Risk

The composite rating of Operational Risk is Moderate (3) with stable trend compared to 2nd Quarter of 2019 with considerations as follows:

a) The incidents of internal fraud twice during the 4th quarter of 2019 with potential loss of Rp429.4 million because of the weak function of supervisory and monitoring positions toward activities of field collection and its managed accounts, both in branch offices and in Headquarters. Currently, the Bank has carried out action plan in improving monitoring process in field collection – SAM Division, and the plan

aktivitas *field collection* – Divisi SAM, dan rencana penggunaan mesin/alat bantu untuk penagihan debitur sehingga dapat mempermudah *monitoring* & mitigasi *fraud*.

b) Meningkatnya rasio *turn over* karyawan tahun 2019 menjadi sebesar 30%, membuat BJI melakukan strategi terkait *Human Resource* dengan mengoptimalkan karyawan yang ada agar *multitasking* dengan tetap menjalankan fungsi-fungsi sesuai ketentuan internal dan eksternal. [401-1]

c) Penyempurnaan dan perbaikan atas implementasi *Core Banking System (Finacle)* telah dilakukan dengan baik oleh Bank serta penyelesaian atas temuan OJK terkait *Implementation Core Banking System (Finacle)*.

d) Peningkatan kompetensi & kualitas SDM dilakukan secara internal (*inhouse training*) berupa pelatihan *risk awareness* baik perkreditan & operasional, *e-learning, service quality awareness*, program *performance culture meeting*, yang dilakukan periodik baik mingguan dan bulanan, serta *Performance Management System* menilai KPI Karyawan. Selain itu Bank juga melakukan pelatihan ke Branch Supervisory Operational Manager (BSOM) khususnya pada pengelolaan dokumen asli perkreditan di forum Branch Forum di Q3-2019 dan selama Q4-2019 beberapa pelatihan terkait Analisa Legalitas di bidang Perkreditan, *Finacle System & Operational Risk* & APU-PPT untuk *frontliner*.

e) Meningkatkan fungsi Quality Assurance (QA) - RMD dengan melakukan perbaikan sebelumnya QA hanya 1 Departemen menjadi 2 Departemen yaitu QA Departemen Cabang dan QA Departemen Kantor Pusat, serta menambah personil QA baik di kantor cabang dan Divisi Kantor Pusat, yang bertujuan meningkatkan kualitas internal control di seluruh aktivitas perkreditan dan operasional.

Beberapa langkah pengelolaan risiko operasional adalah sebagai berikut:

a. Bank telah membentuk *Quality Assurance* (QA) di bawah Risk Management Division sebagai *second line of defence*. Fungsi dari QA adalah memastikan bahwa unit kerja di cabang telah melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku, serta melakukan *review* & menyempurnakan ketentuan internal.

to use a machine/tool to assist collection from the debtors hence making monitoring and fraud mitigation easier.

b) Increasing employee turn over ratio in 2019 to 30%, made BJI carrying out strategies regarding Human Resources to optimize existing employees to multitask but still carrying out their functions according to internal and external provisions. [401-1]

c) Improvement on the implementation of Core Banking System (Finacle) was well-executed by the Bank and completion on OJK's findings on the Implementation Core Banking System (Finacle).

d) Improvement of HR competence and quality by conducting inhouse training in form of risk awareness training both on loans and operations, e-learning, service quality awareness, performance culture meeting program, conducted periodically both weekly and monthly, as well as Performance Management System for assessing Employees' KPI. Moreover, the Bank also conducted training to Branch Supervisory Operational Manager (BSOM) particularly on original loan documents management in Branch Forum on 3rd Quarter 2019 and throughout 4th Quarter 2019, several trainings related to Legal Analysis on Loan, Finacle System & Operational Risk & APU-PPT for frontliner.

e) Improving the function of Quality Assurance (QA) – RMD by splitting QA that previously was only 1 Department to 2 Departments: QA Branch Department and QA Head Office Department, as well as adding personnel in QA both in branch offices and Division in the Headquarters, aiming to improve the quality of internal control in entire loan and operational activities.

Several Operational risk management steps are as follow:

a. The Bank has formed Quality Assurance (QA) under the Risk Management Division as a second line of defence. The QA function is to ensure that working units in branches have run operational transactions according to existing internal provisions, and make review & improve internal provisions.

b. Untuk melakukan identifikasi kejadian risiko yang terjadi di Cabang serta memiliki dampak kerugian, maka pemantauan dilakukan menggunakan *Irregulatory Risk Report*.
c. Melakukan pencatatan atas data kerugian yaitu *Loss Event Database* di mana data tersebut digunakan sebagai salah satu parameter dalam pengukuran Profil Risiko Operasional.
d. Bank telah menerapkan *Risk & Control Self Assessment* (RCSA) yang merupakan metodologi untuk identifikasi sumber-sumber risiko, yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko, memantau *trend* tingkat risiko, serta mengendalikan dan mitigasi risiko. Pelaksanaan Identifikasi melalui RCSA diterapkan pada seluruh unit kerja.
e. Melakukan peninjauan ulang dan penyempurnaan atas *Standard Operation Procedure* masing-masing unit kerja secara berkala.
f. Melakukan penetapan batas kewenangan dalam melakukan transaksi operasional.
g. Setiap adanya produk ataupun aktivitas baru Bank selalu dilakukan kajian risiko sesuai dengan ketentuan dari regulator.
h. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan frekuensi pelatihan internal maupun eksternal di bidang perkreditan, pemasaran produk dan motivasi kerja.
i. Pengelolaan risiko operasional juga dilakukan dengan memperkuat keamanan dan kehandalan teknologi informasi, sehingga kegagalan sistem maupun *human error* dapat ditekan.
j. Melakukan peningkatan pada IT *Security System* untuk seluruh sistem yang ada pada Bank.
k. Memastikan ketersediaan *Disaster Recovery Plan* (DRP) yang diuji secara berkala sebagai antisipasi jika terjadi gangguan IT.
l. Meningkatkan fungsi pengawasan internal melalui Divisi Audit Internal yang membawahi *Credit Audit Department, Head Office & Regional Audit Department, IT Audit Department,* dan *Anti Fraud* sebagai upaya memperkuat sistem pengendalian Intern.
m. Bank telah memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) dimaksudkan untuk minimalisasi risiko, menangani dampak dari gangguan/bencana, serta percepatan proses pemulihannya agar kegiatan operasional dan pelayanan kepada nasabah tetap dapat berjalan dengan baik.

b. To identify the risk occurrences occurring in the Branch as well as to have a loss impact, the monitoring is performed using the Irregularity Risk Report.
c. Recording of data loss is Loss Event Database where the data is used as one of the parameters in the measurement of Operational Risk Profile.
d. The Bank has implemented Risk & Control Self Assessment (RCSA) which is a methodology for identifying risk sources, which is used to measure high risk, monitor risk level trends, and control and mitigate risk. Implementation of Identification through RCSA is applied to all work units.
e. Perform regular review and refinement of Standard Operation Procedure of each work unit.
f. Establishing limits of authority in performing operational transactions.
g. In any existence of new products or activities of the Bank is always conducted risk assessment in accordance with the provisions of the regulator.
h. Improving the quality of human resources by increasing the frequency of internal and external training in the fields of credit, product marketing, and work motivation.
i. Operational risk management is also done by strengthening the security and reliability of information technology, so that system failure and human error can be suppressed.
j. Improving the IT Security System for all existing systems in the Bank.
k. Ensure availability of Disaster Recovery Plan (DRP) that is tested periodically in anticipation in case of IT interruption.
l. Improve internal control function through Internal Audit Work Unit which oversees Credit Audit Department, Head Office & Regional Audit Department, IT Audit Department, and Anti Fraud Department as an effort to strengthen the internal control system.
m. The Bank has a Business Continuity Plan (BCP) intended to minimize risks, address the impact of disruption/disaster, and accelerate the recovery process so that operational activities and services to customers can still run well.

5. Risiko Hukum

Peringkat komposit Risiko Hukum berada pada peringkat *Moderate to High (4)*. Peringkat Risiko hukum ini tetap dibandingkan dengan triwulan II sebelumnya namun rasio potensi kerugian akibat kasus hukum menjadi lebih besar. Penjelasan lebih detail mengenai beberapa upaya hukum yang telah dilakukan oleh Bank dalam beberapa kasus hukum, disampaikan pada analisis Risiko Hukum. Tim Litigasi Bank terdiri dari Staff Internal Bank dibantu oleh rekanan kantor hukum.

Pengelolaan Risiko Hukum dilakukan antara lain:

a. Melakukan peninjauan kembali (*review*) atas dokumen hukum, perjanjian maupun kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.
b. Inventarisasi atas kasus-kasus hukum yang terjadi termasuk di dalamnya memantau perkembangan dari setiap kasus hukum yang ada. Penanganan kasus hukum disusun berdasarkan skala prioritas dan seluruh perkembangannya terpantau dengan baik dan selalu dilaporkan kepada Manajemen untuk ditindaklanjuti melalui penyelesaian yang mengandung potensi risiko hukum paling sedikit.
c. Fungsi *Corporate Legal & Compliance Division* yang memiliki peranan penting dalam memberikan analisis/*review* dari sudut pandang legal terkait dengan produk atau aktivitas baru Bank, memberikan masukan dari sisi hukum akibat adanya perubahan regulasi, melakukan *review* atas perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Bank dengan pihak ketiga, selain itu juga menangani permasalahan hukum yang terkait dengan litigasi.

6. Risiko Stratejik

Peringkat komposit Risiko Stratejik adalah *Moderate* (3) dengan pertimbangan pencapaian target kinerja Triwulan IV Tahun 2019 dinilai cukup tercapai dibandingkan RBB 2019-2021, yaitu perbaikan rasio keuangan yaitu rasio NPL Net, Pencapaian Tabungan & Deposito serta CAR.

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko ini antara lain:

a. Penyusunan Rencana Bisnis Bank untuk periode tahun 2019-2021 yang digunakan sebagai pedoman oleh Manajemen dan karyawan.

5. Legal Risk

The composite rank of Legal Risk was in Moderate to High (4). This Legal Risk rank remains the same compared to the 2nd quarter, however the potential loss ratio was getting bigger. A more detailed explanation on the legal efforts taken by the Bank on the legal cases was delivered to the Legal Risk analysis. The Bank's litigation team consisted of the Bank's Internal Staff and assisted by law firm partners.

Legal Risk Management carried out included:

a. Reviewing legal documents, agreements and contracts with the third parties.
b. Inventories on existing legal cases including monitoring the development of every legal case. The treatment of legal cases were arranged based on priority scale and all developments were monitored and regularly reported to the Management for follow-ups through settlements that consisted of the least legal risk potential.
c. The function of Corporate Legal & Compliance Division that has prominent role in providing review from legal perspective related to the Bank's new products or activities, provide inputs from legal perspective in changes of provisions, conduct review on agreements made between the Bank and the third parties, and also handle legal problems related to litigation.

6. Strategic Risk

The composite rating of Strategic Risk was Moderate (3) with consideration the achievement of performance target in the 4th Quarter 2019 was deemed sufficient compared to RBB 2019-2021, namely improvement of financial ratios, such as NPL net ratio, Achievement of Saving and Time Deposit as well as CAR.

Some of the steps taken to anticipate this risk are, among others:

a. Preparation of the 2019-2021 period Bank Business Plan to be used as the guidelines by the management and employees.

b. Melakukan pemantauan atas kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi dengan sasaran/*target* yang ingin dicapai oleh Bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank tersebut.
c. *Planning Performance Division* yang secara rutin melakukan pemantauan berkala (*performance review)* atas pencapaian kinerja dari tiap divisi/kantor wilayah/cabang/capem dan Bank secara keseluruhan.
d. Merevisi pengkinian atas strategi yang ingin dicapai sesuai dengan perkembangan kondisi internal maupun eksternal, sehingga akan menjadi realistis dengan pencapaian sasaran Bank.

7. Risiko Kepatuhan

Peringkat komposit Risiko Kepatuhan berada di peringkat *Moderate* (3). Peringkat di triwulan IV tahun 2019 ini sama dengan triwulan II 2019 dengan pertimbangan masih terdapatnya potensi denda/sanksi dari Regulator.

Bank telah melakukan pengelolaan risiko kepatuhan antara lain:
a. Menyempurnakan & *monitoring* Kebijakan Kepatuhan dan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
b. Pemantauan terhadap pengkinian data nasabah dan penerapan single CIF serta penanganan rekening pasif/*dormant*.
c. Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank secara rutin melakukan sosialisasi kepada unit-unit terkait melalui *Corporate Legal & Compliance Division*.
d. Penyusunan Laporan Kepatuhan kepada pihak Internal maupun Eksternal.
e. Peningkatan fungsi kepatuhan untuk melakukan uji kepatuhan atas setiap regulasi, baik ketentuan internal maupun eksternal.

8. Risiko Reputasi

Peringkat komposit Risiko Reputasi adalah *Low To Moderate* (2). Peringkat ini sama dengan periode sebelumnya dengan pertimbangan bank dapat mengelola pemberitaan negatif melalui kegiatan *brand image*, promosi produk yang diberitakan di media massa dalam rangka penguatan *Corporate Image*.

b. monitoring the financial performance by comparing the achievements with the established objectives/targets in the Bank's Business Plan.

c. Formed the Performance Planning Division which routinely conducts regular performance review on the achievement of each division/regional office/branch/Sub Branch and the Bank in a comprehensive manner.
d. Revise and update strategies in accordance with the development of internal and external conditions, to ensure the objectives and strategies to achieve the determined targets remain realistic.

7. Compliance Risk

The Compliance Risk composite rating was ranked Moderate (3). This ranking in the 4th quarter 2019 was similar with the 2nd quarter 2019 with consideration of the existing potential of fines/sanctions from Regulator.

The Bank has conducted the compliance risk management, among others:
a. Developing and monitoring of the Compliance Policy and the Anti-Money Laundering and Prevention the Financing of Terrorism Policy.
b. Monitoring of customer data update and implementing single CIF, as well as handling of the passive/dormant account.
c. Implementing the Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing Program in accordance and as mandated in Bank Indonesia regulation. PT Bank JTrust Indonesia Tbk. routinely conducts disseminations to the relevant units through the Compliance & Legal Division.
d. Preparation of the Compliance Report to Internal as well as External parties.
e. Improving the compliance function to perform the compliance test of each regulations, both internally as well as external provisions.

8. Reputation Risk

The Reputation Risk composite rating was Low to Moderate (2). This rating is the same with previous period with the consideration that the Bank can manage negative news through brang image activities, product promotions reported in the media in order to strengthen Corporate Image.

Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan cara: [FS5]

a. Pemantauan terhadap publikasi media, yang bekerja sama dengan jasa pihak ketiga oleh *Corporate Secretary*.
b. Melakukan pemantauan terhadap keluhan nasabah melalui *Operation & Credit Administration Division* guna menangani keluhan dengan segera, serta melakukan optimalisasi fungsi *Call Center* dalam penanganan keluhan nasabah.
c. Dalam upaya pelaksanaan manajemen risiko, Bank secara aktif menjalankan program *Corporate Social Responsibility* dan aktivitas sosial lainnya, *public expose*, membangun relasi dengan media, dan *gathering* dengan nasabah.
d. Reputasi dan dukungan pemegang saham baru secara profesional membantu manajemen dalam rangka meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan kinerja yang lebih baik dan program-program kerja yang berimplikasi langsung pada pengelolaan risiko reputasi.

Berdasarkan analisis ke delapan risiko di atas, maka Peringkat Komposit Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2019 adalah *Moderate* (3), Risiko Inheren adalah *Moderate*, dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko adalah *Fair*, dengan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu:

1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.
2. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara komposit cukup memadai, meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.

Evaluasi/Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Tinjauan atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko pada keempat pilar sistem manajemen risiko telah dilakukan secara memadai yang meliputi:

a. Perumusan Tingkat Risiko
   Perumusan *risk appetite* dan *risk tolerance* sudah memadai dan selaras dengan tujuan strategis dan bisnis bank yang ditetapkan dalam RBB. Parameter *risk tolerance* secara *bankwide*

The management of the reputation risk is conducted by the following methods: [FS5]

a. Monitoring of media publication by the Corporate Secretary working closely with third-party services.
b. Monitoring of customer complaints through the Product & Networking Management Division on timeless of complaint handling, as well as optimizing the function of Call Center in handling customer complaints.
c. In the effort of risk management implementation, the Bank actively performs the Corporate Social Responsibility program and other social activities, public expose, building relationship with the media, and organizing customer gathering.
d. The reputation and support from the new shareholders in a professional manner have provided and assisted the management in improving the reputation and public confidence through performance improvement and work programs, which directly impact the management of reputation risk.

Based on the analysis of those eight risks, hence the composite rank of Risk Profile on the 4th Quarter 2019 was Moderate (3), Inherent Risk was Moderate, and the Quality of Risk Management Implementation was Fair, guiding from the Financial Services Authority (OJK) provisions namely:

1. By considering business activities conducted by the Bank, the probability of loss faced by the Bank from the composite of inherent risk was considered high throughout certain period of time in the future,
2. The composite quality of Risk Management Implementation was sufficient, despite the minimum requirement was achieved, there were several weaknesses that required attention from the management and improvement.

Evaluation on the Effectiveness of the Risk Management System

A review of the effectiveness of Risk Management implementation on the four pillars of the risk management system has been adequately conducted which includes:

a. Formulation of Risk Level
   The formulation of risk appetite and risk tolerance is adequate and in line with the strategic and business objectives of the bank set out in RBB,

didokumentasikan dalam ketentuan internal di *Risk Appetite Statement & Risk Tolerance* PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

b. Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi
Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dinilai memadai. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Risiko, antara lain:
1. Mengevaluasi dan menganalisis kecukupan kebijakan manajemen risiko secara berkala.
2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko secara triwulanan dan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran.
3. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

c. Alat Organisasi Manajemen Risiko
Alat organisasi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif dinilai memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam setiap kegiatan usaha, antara lain:
1. Dalam mengelola risiko kredit ada pemisahan petugas pinjaman, antara Unit Bisnis dan Unit *Credit Risk Review*. Delegasi wewenang diatur dalam ketentuan internal tentang Komite Kredit (KK) dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) dan dievaluasi secara rutin oleh pejabat yang berwenang.
2. Dalam pengelolaan risiko pasar dan likuiditas, fungsi manajemen risiko terdiri dari Divisi *Treasury & Capitals Market*, Divisi Operasi & *Credit Administration* dan Divisi Manajemen Risiko.
3. Dalam pengelolaan risiko operasional terdapat pemisahan tugas dan wewenang pembuat, pemeriksa, penandatangan (segregasi tugas dan *dual control*) terhadap pelaksanaan semua kegiatan operasional di unit kerja.
4. Untuk mengembangkan kompetensi dalam Manajemen Risiko, adalah wajib bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan juga pejabat sampai empat tingkat di bawah Direksi untuk mengikuti pelatihan sertifikasi Manajemen Risiko. Selain itu, *refreshment* kepada Sumber Daya Manusia juga dilakukan secara rutin.

d. Sistem Informasi
Dukungan sistem informasi untuk penerapan manajemen risiko dinilai cukup memadai, antara lain persetujuan transaksi dan delegasi

and RKAP. Bankwide risk tolerance parameters are documented in the internal terms of Risk Appetite Statement & Risk Tolerance of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

b. Adequacy of active supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors
The adequacy of active supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors, including the exercise of the authority and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors is considered adequate. The Board of Commissioners has established the Risk Monitoring Committee to, among others:
1. Evaluate and analyze the adequacy of risk management policies on a regular basis.
2. Evaluate and analyze quarterly risk profile reports and Bank Rating semi-annually.
3. Supervise and evaluate the performance of the Risk Management Committee and Risk Management Working Unit.

c. Risk Management Organization Tool
Organizational tools that support the implementation of Risk Management are effectively assessed with clear authority and responsibility in every business activity, including:
1. In managing credit risk there is separation of loan officer, between Business Unit and Credit Risk Review Unit. Delegation of authority is governed in the internal provisions of the Credit Committee (KK) and the Limit of Authority to Declare Credit (BWMK) and regularly evaluated by authorized officials.
2. In the management of market risk and liquidity, the risk management function consists of the Treasury & Capital Market Division, Operations & Administration Credit Division, and Risk Management Division.
3. In operational risk management there is a separation of duties and authority of maker, examiner, signer (task segregation and dual control) on the implementation of all operational activities in the work unit.
4. To develop competencies in Risk Management, it is mandatory for the Board of Commissioners, Board of Directors, and also officials up to four levels under the Board of Directors to attend the Risk Management certification training. In addition, refreshment to Human Resources is also done routinely.

d. Information System
Information system support for risk management implementation is considered sufficient, including transaction approval and delegation

wewenang di sistem informasi *Core Banking*, pelaksanaan *Liquidity Risk Report* secara harian, pelaksanaan *Credit Daily Report* secara harian, pelaksanaan *Risk Control Self Assessment* (RCSA) dalam pengukuran risiko operasional, sistem *Compliance Report Monitoring* (CRM) sebagai *reminder* ke unit kerja pelapor dan Direksi mengenai kewajiban penyampaian Laporan kepada Regulator.

5.2. Penerapan Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*)

Untuk dapat mengelola Bank secara efektif dan efisien serta sebagai dasar kegiatan operasional yang sehat dan aman, diperlukan adanya Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, mewajibkan Bank untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern secara efektif terhadap seluruh kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank.

Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan (*ongoing basis*) dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal secara efektif akan membantu Bank dalam:

a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
b. Menjamin tersedianya informasi dan laporan yang lebih akurat.
c. Meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Mengurangi dampak keuangan/risiko terjadinya kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya.

of authority in Core Banking information system, daily Liquidity Risk Report implementation, Risk control Self Assessment (RCSA) implementation in operational risk measurement, Compliance Report Monitoring (CRM) system as reminder to reporting unit regarding the obligation to submit the Report to the Regulator.

5.2 Implementation of Internal Control System

To be able to manage the Bank effectively and efficiently as well as become the basis of healthy and safety operational activities, it required to have Internal Control System (SPI).

The Regulation of the Financial Services Authority No. 18/POJK.03/2016 dated 16 March 2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Bank, Regulation of the Financial Services Authority No. 38/POJK.03/2016 dated 1 December 2016 on the Implementation of Risk Management in Using Information Technology by Commercial Banks, and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 35/SEOJK.03/2017 dated 7 July 2017 on the Standard guideline of Internal Control System for Commercial Bank, are required Banks to implement Internal Control System effectively to entire business activities and operation for entire lines of the Bank's organizations.

Internal Control System is a control mechanism established by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners on an ongoing basis in the context of achieving the company's objectives.

The implementation of the Internal Control System will effectively assist the Bank in:

a. Maintain and secure the Bank's assets.
b. Ensure more accurate information and reports are available.
c. Improve the Bank's compliance with prevailing laws and regulations.
d. Reduce financial impact/risk of loss occurrence, irregularities including fraud, and violation of prudential principles.
e. Improve organizational effectiveness and cost efficiency.

1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Bank mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) – Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern yang memastikan kecukupan pengendalian keuangan maupun operasional, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian Intern Bank diterapkan atas dua aspek yaitu pengendalian keuangan dan pengendalian operasional. Pengendalian intern atas pelaporan keuangan dan operasional Bank dijalankan dengan mengacu internasional COSO – *Internal Control Integrated Framework*. Dalam COSO disebutkan bahwa pengendalian internal merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen serta karyawan dalam sebuah perusahaan untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian.

Sepanjang tahun 2019, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah mengadopsi prinsip Pengendalian Internal berdasarkan COSO Model dengan 5 (lima) komponen yang harus dikendalikan sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian/*Control Environment* (CE)

CE adalah himpunan standar, ketentuan, proses dan struktur organisasi yang memberikan dasar untuk melaksanakan SPI bagi seluruh organisasi. BOD dan Manajemen melaksanakan *Tone At The Top* atas pentingnya SPI termasuk standar berperilaku. CE terdiri dari nilai-nilai integritas dan etika organisasi, parameter yang memungkinkan BOD dan Manajemen untuk melaksanakan pengendalian operasional perusahaan, efektivitas struktur organisasi, tugas individu, hambatan kinerja, insentif, dan hukuman untuk mendorong akuntabilitas kinerja, yang dihasilkan CE akan berdampak luas pada SPI secara keseluruhan.

1. Financial and operational controls, and compliance with other laws and regulations.

The implementation of the Bank's Internal Control System is based on COSO (Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) – Internal control Integrated Framework in formulating internal control framework that ensures the adequacy of financial control and operations, financial statements, operational effectiveness and efficiency, as well as compliance to the prevailing laws and regulations.

The Bank's Internal Control is implemented based on two aspects, namely financial control and operational control. Internal Control on the Bank's financial and operational report is carried out based on COSO – Internal Control Integrated Framework. COSO mentions that internal control is a system or process carried out by the Board of Commissioners, Directors, Management as well as employees in a company to provide sufficient guarantees to achieve the objective of control.

Throughout 2019, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has adopted the principle of Internal Control under the COSO Model with 5 (five) components to be controlled as follows:

1) Control Environment (CE)

CE is the set of standards, provisions, processes and organizational structures that provide the basis for implementing the SPI for the entire organization. BOD and Management implement Tone At The Top for the importance of SPI including standards of conduct. CE consists of integrity values and organizational ethics, parameters enabling BOD and Management to implement enterprise operational controls, organizational structure effectiveness, individual tasks, performance barriers, incentives and penalties to foster performance accountability, produced by CE will have broad impact on SPI.

Penerapannya:
Dewan Komisaris, melalui Komite-komite yang telah dibentuk secara berkala melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

The Implementation:
The Board of Commissioners, through established committees, periodically conducted studies on control environment and conducted assessment independently, which were communicated to the Board of Directors for follow ups.

2) **Penilaian Risiko/*Risk Assessment* (RA)** [FS9]
RA melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan, sehingga RA membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola. RA juga mengharuskan manajemen untuk mempertimbangkan dampak dari kemungkinan perubahan dalam lingkungan eksternal dan dalam model bisnis yang dapat membuat SPI tidak efektif. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan akan mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan.

2) **Risk Assessment (RA)** [FS9]

RA involves a dynamic and repeatable process to identify and assess risks that may affect the achievement of company objectives, so that RA forms the basis for determining how risk will be managed. RA also requires management to consider the impact of possible changes in the external environment and in business models that can make the SPI ineffective. Risk is defined as the possibility that an event will occur and will affect the achievement of company goals.

Penerapannya:
Direksi telah menetapkan prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan menanggapi kejadian dan kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Dewan Komisaris, melalui Komite Pemantau Risiko, memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan pengelolaan risiko secara baik.

The implementation:
The Board of Directors has determined the procedures to anticipate, identify, and respond on occurrences and obstacles that could affect the achievement of targets. The Board of Commissioners, through the Risk Monitoring Committee, ensures that the Board of Directors has carried out a good risk management.

3) **Kegiatan Pengendalian/*Control Activities* (CA)**
CA adalah arahan manajemen yang ditetapkan melalui Kebijakan dan Prosedur untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan perusahaaan. CA dilakukan di semua tingkat organisasi, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan semua Informasi Teknologi (IT). CA dapat berupa *control preventive* atau *detective* yang sifatnya dapat dilakukan secara manual dan otomatis seperti otorisasi, persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan laporan kinerja bisnis. Pemisahan Tugas (*Segregation of Duties*) dapat digunakan sebagai pembangunan dan pengembangan CA. Ketika Pemisahan Tugas tidak dapat dijalankan, manajemen harus memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian alternatif.

3) **Control Activities (CA)**
CA is the direction of management established through Policies and Procedures to reduce risks to the achievement of corporate objectives. CA is conducted at all levels of the organization, at various stages in business processes, and all Information Technology (IT). CA can be either manual or automatic detective or detective control such as authorization, approval, verification, reconciliation, and business performance reports. Segregation of Duties can be used as development and development of CA. When the Task Segregation is unworkable, management must select and develop alternative control activities.

Penerapannya:
Kebijakan dan prosedur bagi unit-unit bisnis utama dan unit-unit pendukung bisnis telah disusun serta disetujui oleh Direksi yang secara berkala ditinjau dan diperbarui oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ketentuan perbankan yang berlaku, melakukan uji kepatuhan atas kebijakan internal baru serta usulan atas produk ataupun aktivitas baru, menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memonitor pelaksanaan kepatuhan melalui *designated officer* di unit kerja lainnya yang diverifikasi oleh Unit Kerja Independen yang berada di lini pertahanan dua ataupun tiga (*2nd or 3rd Line of Defense*). Satuan Kerja Kepatuhan menyampaikan laporan kepatuhan secara berkala kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Regulator. Pejabat Bank secara berkala meninjau kembali keberadaan dan efektivitas pengendalian, melakukan pembagian tugas yang memadai, melakukan verifikasi rutin atas akurasi data serta memiliki dan menguji rencana penanganan kondisi darurat.

The Implementation:
Policies and procedures for main business units and supporting business units are formulated and approved by the Board of Directors that are periodically reviewed and renewed by the Risk Management Working Unit. The Compliance Working Unit is responsible for disseminating the prevailing banking provisions, conduct compliance test on new internal policies as well as proposal on new products or activities, implement Anti-Money Laundering (APU) and Terrorism Financing Prevention (PPT) program as well as monitoring the implementation of compliance through designated officers in other working units verified by the Independent Working Unit in the second or third line of defense. The Compliance Working Unit delivers compliance report regularly to the Board of Commissioners, Directors, and Regulators. The Bank's officials periodically review the existence and effectiveness of control, divide tasks sufficiently, conduct a routine verification on data accuracy as well as having and testing the emergency mitigation plan.

4) **Informasi dan Komunikasi /*Information and Communication* (IC)**
IC diperlukan perusahaan untuk Pelaksanaan SPI dalam rangka mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan bentuk informasi yang relevan dan berkualitas, baik sumber internal dan eksternal untuk mendukung komponen lain dari SPI. Komunikasi harus dilakukan secara kontinyu, dengan cara memberikan, berbagi dan memperoleh informasi yang diperlukan. Komunikasi Internal adalah sarana yang informasinya disebarluaskan ke seluruh organisasi, mengalir ke atas, bawah dan rekan kerja dalam *level* yang sama di mana memungkinkan pribadi untuk menerima pesan yang jelas dari manajemen demikian sebaliknya. Komunikasi Eksternal terdiri dari dua aktivitas, yaitu memungkinkan menerima informasi eksternal yang relevan, dan memberikan informasi kepada pihak eksternal.

4) **Information and Communication (IC)**

IC is required by the Company for Implementation of SPI in order to support the achievement of corporate objectives. Management obtains or generates and uses relevant and quality information forms, both internal and external sources to support other components of the SPI. Communication should be done continuously, by providing, sharing and obtaining the necessary information. Internal Communication is a means by which information is disseminated throughout the organization, flowing up, down and coworkers on the same level, that allows the person to receive a clear message of management vice versa. External communication consists of two activities, which allow receiving relevant external information, and providing information to external parties.

Penerapannya:
Telah tersedia prosedur mengenai pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

The Implementation:
The existence of procedures in data collection and information technology that can generate business activity report, financial condition, risk management implementation and provisional fulfillment to support the task of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

5) **Pemantauan**
Monitoring terdiri dari Evaluasi Berkelanjutan (*Ongoing Evaluation*), Evaluasi Terpisah (*Separate Evaluation*), atau kombinasi keduanya digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen SPI, adalah Hadir (*Present*) dan Berfungsi (*Functioning*). Evaluasi Berkelanjutan dibangun ke dalam bisnis proses pada *level* berbeda yang memberikan informasi terkait dengan kesalahan/kelalaian pada kesempatan pertama. Evaluasi Terpisah dilakukan secara periodik akan bervariasi pada lingkup dan frekuensi tergantung kepada hasil *risk assessment*, efektivitas dari Evaluasi Berkelanjutan dan pertimbangan lain manajemen. Temuan dari hasil Evaluasi dicatat dan dikomunikasikan kepada Manajemen.

5) **Monitoring**
Monitoring consists of Ongoing Evaluation, Separate Evaluation, or a combination of both is used to ascertain whether each of the five SPI components is Present and Functioning. Sustainable Evaluation is built into business processes at different levels that provide information related to mistakes/omissions at the first opportunity. Separate Evaluations conducted periodically witll vary in scope and frequency depending on the outcome of the risk assessment, the effectiveness of the Sustainable Evaluation and other management considerations. Findings from Evaluation results are recorded and communicated to the Management.

Penerapannya:
Direksi, Pejabat Bank dan SKAI melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala. Direksi dan Pejabat Bank memiliki komitmen dan telah melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang telah dilakukan maupun rekomendasi SKAI.

The Implementation:
The Board of Directors, the Bank's Officials and SKAI continuously monitor the effectiveness entire implementation of internal control. Monitoring on the main risks is prioritized and becomes part of daily activities, including periodical evaluation. The Board of Directors and the Bank's Officials have commitment and have made follow-up on the monitoring result conducted and recommended by SKAI.

Masing-masing komponen terkait satu sama lain, harus dikendalikan secara terpadu (*integrated*) dan tanggung jawab implementasinya menjadi tanggung jawab semua unit kerja dengan tujuan penerapannya sebagai berikut:

1. ***Strategic***, Rencana Bisnis Bank telah dimengerti, sejalan dan didukung oleh semua unit kerja.
2. ***Operation***, berjalan dengan efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya manusia dan prasarana.
3. ***Reporting***, akurat dan dapat dipercaya.

Each component is related to each other, must be controlled in an integrated manner and its implementation responsibilities are the responsibility of all work units with the aim of implementing as follows:

1. **Strategy**, the Bank Business Plan has been understood, in line and supported by all work units.
2. **Operation**, running effectively and efficiently in the use of human resources and infrastructure.
3. **Reporting**, accurate and reliable.

4. ***Compliance***, aktivitas dan transaksi telah tunduk dengan ketentuan serta hukum.

2. Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Selama tahun 2019 rata-rata *Audit Rating* secara *bank wide* sebagai berikut:

4. **Compliance**, activities and transactions are subject to terms and laws.

2. Review on the Effectiveness of Internal Control System

During the year of 2019 the average Audit Rating bankwide as follows:

No	Risk Owner	Audit Rating		Penjelasan Explanation
		2018	2019	
1	Cabang Branch	SATISFACTORY	SATISFACTORY	SPI pada Cabang sudah cukup baik, namun tetap diperlukan peningkatan dan penyempurnaan/*corrective* action terhadap penerapan SOP, Sistem dan SDM. SPI of Branches has been implemented quite well, but still need improvement/corrective action to the SOP, Systems and Human Resources.
2	Divisi Kantor Pusat (Non Kredit) Head Office Division (Non Credit)	SATISFACTORY	FAIR	SPI sudah berjalan cukup baik, walau demikian perlu penyempurnaan pada kepatuhan SDM dalam melakukan monitoring atas penyelenggaraan kegiatan operasional. SPI has been implemented quite well, but still need limited improvement to the SOP and human resources compliance in the administration of operations.
3	Unit Kredit Credit Division	FAIR	FAIR	SPI pada mayoritas unit Kredit masih terdapat kelemahan di komponen SPI (5 Komponen) dan harus dilakukan penyempurnaan/ *corrective action* terhadap SOP, Sistem dan SDM. SPI of all units of Credit. There were many weaknesses in the various components of SPI (5 Components) and corrective action should be performed to the SOP, Systems and Human Resources.

Secara umum selama tahun 2019 terjadi peningkatan dalam proses sistem pengendalian intern, meskipun pada beberapa aspek diperlukan peningkatan seperti penyesuaian SOP yang sejalan dengan perkembangan bisnis dan proses aktivitas operasional, disiplin proses dan peningkatan kompetensi dari ketersediaan SDM sejalan dengan adanya potensi risiko dari aktivitas dan produk baru.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Internal antara lain:

1. Melakukan reorganisasi Bank yang disesuaikan dengan Rencana Bisnis Bank.
2. Melakukan *review* dan penyesuaian kembali terhadap SOP yang ada.
3. Melakukan *assessment* terhadap pejabat maupun karyawan, yang ditindak lanjuti dengan pembekalan *training* dan sertifikasi.
4. Menerapkan *reward & punishment secara fair.*
5. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan terhadap *corporate value* J Trust Bank melalui rapat budaya (*morning briefing)*.

In general, during 2019, there has been an increase int he internal control system process, but in some cases there is still a need for improvements such as SOP adjustment in line with business development and operational process processes, process discipline and competency enhancement of existing human resources in line with the potential risks of the activity and new products.

Efforts that have been made to improve the Internal Control System include:

1. Reorganize the Bank in accordance with the Bank's Business Plan.
2. Reviewing and re-adjusting to existing SOP.
3. Perform assessment of officials ane employees, followed up with training and certification training.
4. Apply reward & punishment fairly.
5. Conducting continuing socialization of the corporate value of JTrust Bank through cultural meetings (morning briefing).

BAB VI
PENYEDIAAN DANA, RENCANA STRATEGIS BANK, TRANSPARANSI DAN PENGUNGKAPAN ASPEK LAINNYA

CHAPTER VI
PROVISIONS OF FUNDS, STRATEGIC PLAN OF THE BANK, TRANSPARENCY, AND THE DISCLOSURE OF OTHER ASPECTS

A. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) dilaksanakan dengan mengacu kepada POJK No.32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 38/POJK.03/2019, dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan/ketentuan perkreditan internal Bank, serta wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sebelum transaksi penyediaan dana kepada pihak terkait direalisasikan.

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*Related Party*) dan debitur inti (individu atau group) per posisi tanggal 31 Desember 2019, dengan tabel sebagai berikut:

A. Provision of Funds to Related Party and Large Exposures

The Provision of funds to Related Party and the Provision of Large Exposure are carried out based on POJK No. 32/POJK.03/2018 on Maximum Limit of Credit Provision and Provision of Large Exposure as amended with POJK No. 38/POJK.03/2019, and shall not contradict internal credit policies/provisions of the Bank, and is required an approval from the Board of Commissioners before the transaction of the fund provisions to related parties occurred.

The provisions of funds to Related Party and core debtor/group position as of 31 December 2019 in the following table:

No.	Penyediaan Dana Provision of Fund	Jumlah	
		Debitur | Debtor	**Nominal** (jutaan | million Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait | To Related Party *)	21	172.819
2.	Kepada Debitur Inti: | To Key Debtors **):	25	2.399.919
	- Individu | Individual	19	1.726.134
	- Group	6	673.785

Keterangan | Note:
*) Informasi terkait Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait termasuk pihak terkait, sifat dari hubungan, sifat dari transaksi dan nilai transaksi telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Audited tahun 2019 catatan 40, yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan 2019.
**) Informasi terkait Penyediaan Dana Kepada Debitur Inti (Individu atau Group) telah dilaporkan setiap akhir bulan kepada Bank Indonesia melalui LBBUK Form 10.

*) Information related to Fund Provision to Related Party includes related parties, nature of relations, nature of transactions and transaction value as disclosed in the 2019 Audited Financial Statements note 40, which is part of the 2019 Annual Report.
**) Information related to Fund Provision to Core Debtors (Individual or Group) has been reported at the end of each month to Bank Indonesia via LBBUK Form 10.

Bank telah melakukan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (individu atau kelompok, termasuk pihak terkait lainnya) dan Penyediaan Dana Besar (debitur inti: individu atau group) secara wajar dengan kebijakan harga dan syarat normal serta dilaporkan kepada pihak regulator sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku.

The Bank carried out Provision of Funds to Related Parties (individuals or groups, including other related groups) and Provision of Large Exposure (main debtors: individual or group) fairly with normal price and requirement policy, and reported to regulators according to prevailing provisions/regulations.

B. Rencana Strategis Bank

Bank pada tahun 2018 menetapkan rencana strategis Bank untuk rencana jangka panjang (*corporate plan*), rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*) yang kemudian dikoreksi pada bulan Juni 2019 dengan penjelasan sebagai berikut:

B. Bank's Strategic Plan

In 2018, the Bank established the Bank' strategic plan for the long term (corporate plan), medium, and short term plan (business plan) which was later revised on June 2019 as describe below:

Penjelasan:

1.1. Target Jangka Pendek

Target Bank jangka pendek direfleksikan dalam uraian Rencana Bisnis Bank tahun 2019-2021 dengan pembahasan untuk 1 (satu) tahun ke depan yaitu tahun 2019:

a. Bank menerapkan penyaluran kredit secara selektif dan memprioritaskan kredit berkualitas lancar. Bank tetap berupaya memperbaiki profil risiko komposit dan penguatan permodalan.
b. Pengembangan dan pertumbuhan CASA melalui inovasi produk berbasis teknologi seperti pengembangan *internet & mobile banking* diharapkan dapat membantu pencapaian COF yang pada akhirnya dapat meningkatkan NIM pada tahun 2019.
c. Pengelolaan portofolio kredit NPL pada tahun 2019.

1.2. Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah didefinisikan sebagai sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu sampai 3 (tiga) tahun ke depan, di antaranya:

a. Memperkuat struktur permodalan dengan mengandalkan pertumbuhan modal organik, disamping upaya penambahan modal eksternal yang relevan dengan kondisi permodalan Bank dalam bentuk Pinjaman Subordinasi.
b. Pertumbuhan aset yang mengutamakan kualitas.
c. Fokus pada ekspansi kredit SME dan Retail Banking melalui optimalisasi infrastruktur, pengembangan program untuk bisnis SME, *Trade Finance & Consumer Banking*, dan recruitment Sales Force untuk bisnis *Retail*.
d. Sejalan dengan rencana ekspansi kredit pada tahun 2021 bank akan melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, seperti menurunkan tingkat suku bunga deposito, meluncurkan produk dan program baru untuk meningkatkan dana murah, meluncurkan fasilitas *Internet Banking ritel*, *Virtual Account*, *Mobile Banking*, *SMS Banking*, bekerja sama dengan pihak ketiga untuk inklusi keuangan (*financial inclusion*) dengan meluncurkan produk: *financial education program, micro saving, micro insurance, micro lending*, dan mempertahankan segmen *mass affluent* melalui layanan prioritas *banking*, sehingga diharapkan dapat menambah jumlah CIF atau nasabah baru.

Notes:

1.1. Short-Term Target

The Bank's short-term target was reflected on the Bank's Business Plan 2019-2021 for the discussion of 1 (one) year forward in 2019:

a. The Bank set loan disbursement selectively and prioritized performing loans. The Bank tried to improve composite risk profile and capital strengthening.
b. CASA development and growth through technology-based product innovation such as internet & mobile banking development was expected to support COF achievement which could increase NIM in 2019.
c. Management of NPL loan portfolio in 2019.

1.2. Medium Term Target

Medium term targets are defined as targets to be achieved within the period of up to 3 (three) years ahead, including:

a. Strengthening the capital structure with priority relying on organic capital growth, in addition to efforts to increase external capital relevant to the Bank's capital condition in the form of Subordinated Loans..
b. Prioritizing the quality of asset growth.
c. Focus on SME credit expansion and Retail Banking through infrastructure optimization, program development for SME business, Trade Finance & Consumer Banking, and Sales Force recruitment for Retail business.
d. In line with the credit expansion plan in 2021 the Bank will make some strategies to increase the growth of Third Party Funds, such as reducing deposit rates, launching new products and programs to increase low-cost funds, launching facilities of retail Internet Banking, Virtual Account, Mobile Banking, SMS Banking, in cooperation with third parties for financial inclusion by launching products: financial education program, micro saving, micro insurance, micro lending, and maintaining the mass affluent segment (Chinese community as the main customer) through priority banking service, expected to add the amount of CIF or new customers.

e. Mencapai perolehan Laba Operasional positif, melalui perbaikan pada peningkatan pendapatan bunga surat berharga dan kredit, serta penurunan biaya dana, diproyeksikan pendapatan bunga bersih akan terus meningkat sampai Tahun 2021.
f. Mengoptimalkan jaringan kantor yang ada melalui relokasi kantor, perubahan status, dan melakukan penutupan kantor. Dengan adanya pengaturan lokasi jaringan kantor yang strategis akan mendukung kinerja bisnis dan meningkatkan *market share* dalam menggarap potensi bisnis daerah selain biaya operasional menjadi efisien dan efektif.
g. Menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik dan menjadikannya budaya organisasi dengan komitmen dan keterlibatan dari seluruh aspek organisasi mulai dari Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh *level* karyawan di Bank.

1.3 Target Jangka Panjang

Target Jangka Panjang didefinisikan sebagai sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu sampai 10 (sepuluh) tahun ke depan, di antaranya:

a. Perbaikan *funding mix* dengan melakukan beberapa inovasi dan pengembangan produk yang berbasis teknologi untuk meningkatkan jumlah rekening. Bank mengupayakan profiling terhadap persentase CASA (*Current Account & Savings Account*) secara bertahap sehingga jumlah komposisi CASA di tahun 2029 berada di atas 20%.
b. Penyaluran *Loan*/Kredit
   Pada tahun 2029 Bank tetap fokus terhadap segmen *Business Linked* dan *Consumer Retail*. Melakukan kajian awal untuk pengembangan Produk *FinTech* dan *android based mobile application* sebagai alternatif *Channel Customer Acquisition*, diharapkan akan memudahkan *Customer* untuk mengajukan pinjaman ke J Trust Bank dan memperluas jangkauan Bank dengan jaringan kantor cabang yang masih terbatas. Memperluas rencana kerja sama dengan Bank Daerah di Jepang yang memfasilitasi perusahaan Jepang skala SME yang akan berinvestasi di Indonesia.
c. Peningkatan *Fee Based Income*
   Alternatif perolehan pendapatan utama dari pendapatan bunga seiring dengan peningkatan volume bisnis kredit yang

e. Reaching positive Operational Profit, through improvement on rising interest income of bonds and credit, as well as reduction of cost of funds, it is projected net interest income to continue increasing to 2021.
f. Optimizing existing office networks through office relocation, status changes, and office closure. With the arrangement of strategic office network locations will support business performance and increase market share in working on regional business potential in addition to operational costs to be efficient and effective.
g. Applying good corporate governance and making it an organizational culture with commitment and involvement of all aspects of the organization ranging from Controlling Shareholders, Board of Commissioners, Directors, and all levels of the Bank employee.

1.3. Long Term Targets

Long-term targets are defined as targets to be achieved within the next 10 (ten) years, including:

a. Improvement of funding mix by conducting several technology-based innovations and product developments to increase the amount of accounts. The Bank strives the profiling on the percentage of CASA (Current Account & Savings Account) gradually hence the composition of CASA in 2029 above 20%.
b. Distribution of Loan/Credit
   In 2019 the Bank still focused on the Business Linked and Retail Consumer segments. Early study on the development of FinTech products and android based mobile application as alternative for Customer Acquisition Channel is expected to ease customer to apply for loans to J Trust Bank and expand the Bank's reach with still-limited branch network. Expanding cooperation with Regional Banks in Japan which facilitate SME-scale Japanese firms investing in Indonesia.
c. Increase Fee Based Income
   Alternative of main income from interest income in line with the increase in credit business volume with larger margin and

memiliki margin lebih besar juga melalui *fee based income* dari komisi, transaksi valas, dan *fee* produk dan aktivitas Bank.

d. Berdasarkan Kategori BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) dari Otoritas, Bank berada di BUKU 2. Fokus *positioning* Bank dalam jangka panjang sampai tahun 2029, tetap berada di BUKU 2. Bank berupaya menjadi Bank BUKU 2 yang sehat dan kuat dengan mengutamakan pertumbuhan bisnis yang berkualitas dan Bank berkomitmen untuk mewujudkan:
   - Bisnis yang berkesinambungan/ *Business Sustainabillity.*
   - Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*).
   - Permodalan dan Aktiva yang sehat.
   - *Comply* terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku.
   - Penguatan *Corporate Branding*.

C. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lain

Sebagai perusahaan terbuka, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah memberikan informasi secara jelas dan transparan/keterbukaan mengenai kondisi keuangan dan non keuangan Bank kepada para *stakeholders* melalui Publikasi Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan lainnya yang disampaikan kepada regulator seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) serta *stakeholders* lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transparansi Kondisi Keuangan

Publikasi Laporan Keuangan Tahunan setidaknya dimuat dalam 2 (dua) media massa/koran yang berperedaran nasional di Indonesia, dan untuk Laporan Keuangan Triwulanan setidaknya dimuat dalam 1 (satu) media masa/koran yang berperedaran nasional di Indonesia serta disampaikan pada media yang mudah diakses melalui situs *website* www.jtrustbank.co.id.

Di samping mempublikasikan Laporan Keuangan yang dimaksud, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. juga menyusun dan menyampaikan laporan publikasi dalam bentuk Laporan Tahunan *(Annual Report)*. Laporan Tahunan *(Annual Report)* diharapkan dapat menjelaskan transparansi kondisi Bank secara menyeluruh termasuk kepemilikan, kepengurusan, kegiatan operasional, perkembangan usaha dan kinerja Bank kepada masyarakat luas/publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bank.

through fee based income from commission, forex transaction, and products fee and Bank activities.

d. Under the BUKU Category (Commercial Bank of Business Activities) from the Authority, the Bank is in BOOK 2. The Bank's positioning focus for the long term unitl 2029, remains in BOOK 2. The Bank strives to be a healthy and strong middle class Bank with emphasis on quality business growth and the Bank is committed to realizing:
   - Business Sustainability.
   - Implementation of GCG (Good Corporate Governance).
   - Fair Capital and Assets.
   - Comply with applicable terms and regulations.
   - Strengthening Corporate Branding.

C. Transparency of Bank Financial and Non-Financial Condition Not Yet Revealed in Other Reports

As a public company, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has provided disclosure information regarding the Bank's financial and non-financial conditions to stakeholders through the Publication of Annual Financial Statement, Quarterly Financial Statement and other reports submitted to the regulators such as Bank Indonesia (BI), Financial Services Authority (FSA) and the Indonesian Stock Exchange (IDX) as well as other stakeholders in accordance with the applicable regulations.

Transparency of Financial Condition

The publication of the Annual Financial Statement is published at least in 2 (two) mass media/newspapers with national circulation in Indonesia, and the Quarterly Financial Statement is published at least in 1 (one) mass media/newspaper with national circulation in Indonesia and presented in an easily accessible medium via the website www.jtrustbank.co.id.

In addition to publishing the Financial Statements, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. also prepares and submits reports in form of Annual Report. The Annual Report is expected to explain the overall transparency of the Bank, including ownership, management, operational activities, business development and performance of the Bank to the community/public in maintaining public confidence in the Bank.

Laporan Tahunan *(Annual Report)* tersebut cakupan isinya cukup luas, meliputi penjelasan Informasi Umum perusahaan, Laporan Keuangan Tahunan, Opini dari Kantor Akuntan Publik (KAP), transparansi terkait Kelompok Usaha, transparansi laporan kepegawaian, transparansi laporan keuangan sesuai ketentuan PSAK, Eksposur dan Manajemen Risiko dan Informasi lain yang berhubungan dengan Operasional Bank.

Adapun Informasi Umum meliputi: Susunan Pengurus, Rincian Kepemilikan Saham, perkembangan usaha Bank, sasaran, strategi dan kebijakan manajemen, struktur organisasi, aktivitas utama, Teknologi Informasi, jaringan kantor, dan hal-hal penting yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang, jumlah dan struktur SDM sedangkan Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun yang merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) beserta opininya.

Transparansi Kondisi Non Keuangan

Transparansi juga harus diterapkan pada informasi mengenai produk-produk Bank maupun produk lembaga keuangan lainnya seperti *bancassurance* yang dijual melalui bank, sehingga nasabah memperoleh informasi yang jelas mengenai manfaat dan risiko serta biaya-biaya yang melekat pada produk-produk tersebut. Transparansi ini dapat berupa informasi dalam bahasa Indonesia yang disampaikan kepada nasabah secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik produk baik lisan maupun tulisan. Informasi minimal mencakup nama produk, jenis produk, manfaat dan risiko yang melekat, tata cara penggunaan produk, biaya-biaya produk, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlakunya produk dan penerbit produk Bank termasuk ada atau tidaknya penjaminan produk. Apabila terdapat perubahan karakteristik produk, Bank segera memberitahukan kepada nasabah. Informasi mengenai produk tersebut disampaikan dengan jelas, benar, dan jujur serta dengan menggunakan media yang mudah dibaca dan diakses oleh nasabah. Informasi mengenai produk yang ditawarkan kepada nasabah maupun non nasabah dapat juga diakses di *website* www.jtrustbank.co.id. atau bisa langsung menghubungi Call Center J Trust Bank di J Trust Call di 1500615.

Bank juga secara berkesinambungan melakukan pengkinian data nasabah, sehingga data pribadi yang disampaikan nasabah kepada Bank juga selain harus transparan juga merupakan data yang terkini, hal ini selain untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan Bank dan juga untuk meminimalisir risiko lainnya yang diakibatkan ketidakbenaran atau ketidakakuratan data nasabah. Bank juga harus meminta persetujuan

The Annual Report contains a wide description, including the General Information of the company, Annual Financial Statement, Opinion of Public Accounting Firm (KAP), transparency regarding Business Group, transparency of staffing report, transparency of financial statements in accordance with GAAP, Exposure and Risk Management, and other Information related with Bank Operations.

General Information contains: Management Composition, Details of Share Ownership, development of the Bank's business, objectives, strategy and policy management, organizational structure, major activities, Information Technology, office networks, and important matters that are expected to occur in the future, the number and structure of HR. Meanwhile the Annual Financial Statement is a year-end financial statement which has been audited by Public Accounting Firm (KAP) with their opinions.

Transparency on Non Financial Condition

Transparency should also apply to information regarding the Bank's products and other financial institutions products such as bancassurance that are sold through the bank, ensuring the customers are able to obtain a clear information regarding the benefits and risks and costs inherent in such products. This transparency can be in the form of information in Bahasa Indonesia and conveyed to the customers in a complete and clear manner related to the product characteristics both in oral and written. Minimum information includes the product's name, type, inherent benefits and risks, procedures to utilize the product, cost of products, the calculation of interest or for the results and profit margins, the period of validity of products and the Bank's product publishers including whether there is product guarantee or not. If there are changes in the product's characteristics, the Bank shall immediately notify the customers. Information regarding the products is conveyed clearly, truthfully, and honestly using media that is easy to read and accessible to customers. Information on products offered to customers and non customers can also be accessed on the website www.jtrustbank.co.id. or Call Center J Trust Bank at J Trust Call on 1500615,

The Bank also continuously updates customer data, so that personal data submitted by customers to the Bank is transparent and up-to-date, this is in addition to improve the protection of customers' privacy in touch with the Bank as well as to minimize other risks caused by incorrect or inaccurate customer data. The Bank also must request written consent from the customers if the Bank will provide or disseminate personal data of Customer to another Party for

tertulis dari nasabah jika Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data pribadi Nasabah kepada Pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

commercial purposes, unless otherwise stipulated by other laws and regulations.

Transparansi juga harus dilaksanakan pada informasi penyelesaian pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah sehingga hak-hak nasabah dalam bertransaksi dengan Bank senantiasa terjamin. Pengaduan nasabah harus segera ditindaklanjuti agar tidak menurunkan reputasi bagi Bank dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Bank memiliki waktu 2 (dua) hari kerja untuk penyelesaian pengaduan lisan dan 20 (dua puluh) hari kerja penyelesaian pengaduan tertulis.

Transparency should also be performed in the settlement of customer complaints, which is a form of increased customer protection so that the rights of customers in making transactions with the Bank are always guaranteed. Customer complaints should be followed up immediately to protect the Bank's reputation risk and public confidence in the banking institutions. The Bank has a period of 2 (two) business days for the settlement of oral complaints and 20 (twenty) days for written complaints.

Bank memiliki unit dan atau fungsi khusus di bidang pengaduan nasabah yang berada di Kantor Pusat Bank yang menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah yang diterima oleh Kantor Cabang/Capem/Kantor Kas atau pengaduan nasabah yang masuk melalui J Trust Call 1500615, customercare@jtrustbank.co.id. Bank wajib mempublikasikan keberadaan unit ini kepada masyarakat. Hasil penanganan dan penyelesaian pengaduan tersebut secara triwulanan harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia (BI). Selain secara triwulanan, juga melaporkan kepada OJK secara tahunan melalui *website* Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI).

The Bank shall have a special unit or function for customer complaints at the Head Office which addresses received by Branch/Sub-Branch/Cash Office or customer complaints that enter through J Trust Call 1500615, customercare@jtrustbank.co.id, Banks are required to publish the existence of this unit to the public. The results of the handling and settlement of the complaints must be reported on a quarterly basis to the Financial Services Authority (FSA)/Bank Indonesia (BI). In addition to quarterly, it is also reported to OJK on an annual basis through the website of the Education Reporting System and Consumer Protection (SIPEDULI).

Bagi *stakeholder* lainnya seperti pemegang saham dan regulator, situs web J Trust Bank juga telah menyajikan berbagai informasi kondisi non-keuangan lainnya seperti Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG), Struktur Pemegang Saham, Kegiatan Perusahaan melalui *Press Release*, Penerimaan Penghargaan, dan lain-lain.

For other stakeholders such as shareholders and regulators, J Trust Bank's website also provides other various information on non-financial conditions such as GCG, Shareholder Structure, Company Activity through Press Release, Acceptance of Award, and others.

D. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*)

Penyimpangan *(Internal Fraud)* adalah *fraud* yang dilakukan oleh Manajemen (anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris), Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap (honorer), dan/atau Tenaga Kerja Alih Daya/*outsourcing* terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan atau dampak penyimpangannya > Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Mengacu pada Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, berikut ini tabel data jumlah penyimpangan internal (*Internal Fraud)* yang perlu diungkapkan dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah):

D. Total Internal Fraud

Internal Fraud is irregularity/fraud committed by management (Member of Directors, Board of Commissioners), permanent employees, temporary employees (honorarium), and/or Outsourcing Workforce related to work process and the Bank's operations that affect the Bank's financial condition significantly. The meaning of significantly affecting the Bank's financial condition is if the impact of the deviation > IDR100,000,000,- (one hundred million Rupiah). Based on Circular Letter of OJK No. 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, the following table is the data of Internal Fraud that shall be disclosed with the value of more than IDR100,000,000.00 (one hundred million Rupiah):

(satuan) (unit)

Penyimpangan (Internal Fraud) dalam 1 tahun Internal Fraud in 1 Year	Jumlah kasus yang dilakukan oleh The number of cases involving					
	Manajemen Management		Pegawai Tetap Permanent Employee		Pegawai Tidak Tetap dan *Outsourcing* Non Permanent Employee and Outsourcing	
	Tahun Sebelumnya Preceding Year (2018)	Tahun Berjalan Running Year (2019)	Tahun Sebelumnya Preceding Year (2018)	Tahun Berjalan Running Year (2019)	Tahun Sebelumnya Preceding Year (2018)	Tahun berjalan Running Year (2019)
Total fraud Total fraud	-	-	1	-	0	1
Telah diselesaikan Settled	-	-	1	-	0	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank In the process of settlement at internal Bank	-	-	-	-	-	1
Belum diupayakan penyelesaian Settlement not yet commenced	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Followed up by legal proceedings	-	-	-	-	-	-

Selama tahun 2019 terdapat 1 (satu) kasus *fraud* (penggelapan) sebesar Rp879,6 juta yang dilakukan oleh Pegawai *Outsourcing*. Bank masih memproses penyelesaian kasus *internal fraud* tersebut sesuai dengan kebijakan perusahaan dan SOP Strategi Anti Fraud. Kasus *fraud* tersebut telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

In 2019, there was 1 (one) fraud case amounting IDR879.6 million done by Outsourcing Employee. The Bank is still in the process of settlement on the internal fraud case in accordance with the Company's policy and the Anti-Fraud Strategy SOP. The fraud case has been reported to the OJK in accordance with applicable regulations.

E. Kebijakan dan Kegiatan Penerapan Strategi *Anti Fraud*

Kebijakan *Anti Fraud* PT Bank JTrust Indonesia Tbk. merupakan bagian dari sistem pengendalian intern Bank dalam membangun budaya kepatuhan dan menciptakan kesadaran risiko atas potensi dan konsekuensi terjadinya *fraud* pada seluruh jenjang organisasi.

Kebijakan *Anti Fraud* PT Bank JTrust Indonesia Tbk. mengatur mengenai kerangka kerja, tata kelola dan penerapan strategi *anti fraud* yang merupakan strategi Bank dalam mengendalikan *fraud* dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi *fraud* serta diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud.*

Bank telah menerapkan Strategi *Anti Fraud* berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum, yang meliputi implementasi 4 (empat) Pilar strategi *anti fraud* J Trust Bank yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi, dan Pelaporan & *Monitoring* tindak lanjut.

E. Anti Fraud Strategy Implementation Policies and Activities

Anti-Fraud Policy of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is a part of the Bank's internal control system in establishing compliance culture and creating risk awareness on the potential and consequence of fraud the in entire line of organization.

The Anti-Fraud policy of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. stipulates the framework, governance, and implementation of anti-fraud strategy that posit as the Bank's strategy in controlling fraud by assessing the characteristic and outreach of potentional fraud and implementing it into a fraud control system.

The Bank has implemented the Anti-Fraud Strategy based on Bank Indonesia Circular No. 13/28/DPNP dated December 9, 2011 on the Anti-Fraud Strategy Implementation for Commercial Banks, which includes the implementation of 4 (four) Pillars of anti-fraud strategy of JTrust Bank, namely Prevention, Detection, Investigation, and Reporting & Monitoring follow up.

Manajemen J Trust Bank telah menetapkan kebijakan *zero tolerance* terhadap *fraud* dengan menetapkan *Anti Fraud Charter* dan semboyan "*No Fraud Tolerance*" pada tanggal 19 April 2012. Bank telah membentuk organisasi *Anti Fraud* (*Desk Anti Fraud*) di bawah Direktur Utama yang bertugas mengkoordinasi implementasi strategi *anti fraud* J Trust Bank.

Sejak tahun 2016 Bank telah mengimplementasikan program-program pada setiap Pilar Strategi *anti fraud* secara berkesinambungan dan konsisten antara lain:

a. Sosialisasi informasi *anti fraud* secara berkala melalui media informasi internal Bank (aplikasi *Garoon*) yang diberikan setiap bulan.
b. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan *Fraud Risk Assessment* di unit kerja Bank.
c. Pelaksanaan program *Know Your Employee* (KYE) terhadap karyawan Bank.
d. Implementasi *Whistleblowing system.*
e. Program *Surprise Audit.*
f. Program *Surveillance Audit.*
g. Investigasi kasus.
h. Evaluasi serta *monitoring* tindak lanjut penyelesaian kasus *fraud.*

Sebagai upaya meningkatkan budaya sadar risiko *fraud,* di tahun 2019 Bank juga secara berkelanjutan mengadakan sosialisasi/pelatihan *Anti Fraud Awareness* yang bersifat wajib untuk karyawan baru dan eksisting baik secara tatap muka maupun melalui media *e-Learning* yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan karyawan tentang pencegahan dan konsekuensi *fraud*. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas di tahun 2019 berdampak pada penurunan kasus *fraud* secara signifikan, yang mencerminkan telah meningkatnya *Anti Fraud Awareness* dan budaya kepatuhan pada seluruh jajaran organisasi Bank.

Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* [102-17]

Sebagai wujud nyata upaya pengendalian internal, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. melaksanakan kebijakan mengenai sistem pelaporan pelanggaran *(Whistleblowing System)* secara menyeluruh dalam setiap aspek kegiatan bisnis. Mekanisme pelaksanaan dan hasil *Whistleblowing System* (WBS) selama tahun 2019 sebagai berikut:

a) Cara penyampaian laporan pelanggaran [102-17]

Sejak tahun 2012 Bank telah mengimplementasikan WBS yang berfungsi sebagai sarana penerimaan laporan indikasi *fraud* yang diketahui oleh karyawan di lingkungan kerjanya maupun sarana penerimaan laporan indikasi *fraud* dan atau adanya benturan kepentingan yang

Management of JTrust Bank has established a zero tolerance policy towards fraud by setting the Anti Fraud Charter and the "No Fraud Tolerance" slogan on April 19, 2012. The Bank has established an Anti Fraud Desk under the President Director who is in charge of coordinating the implementation of anti-fraud strategy of JTrust Bank.

Since 2016, the Bank has implemented programs on each pillar of anti-fraud strategy continuously and consistently, among others:

a. Periodic anti-fraud information dissemination through the Bank's internal information media (Garoon application) circulating each month.
b. Implementation of Fraud Risk Assessment in the Bank's working units.
c. Implementation of Know Your Employee (KYE) program for the Bank's employees.
d. Implementation of the whistleblowing system
e. Surprise Audit Program
f. Surveillance Audit Program
g. Case Investigation
h. Evaluation and follow-up monitoring on settlement of fraud cases.

As an effort to improving fraud risk awareness culture, in 2019, the Bank also continuously conducted a mandatory dissemination/training on Anti-Fraud Awareness for new and existing employees both in direct meeting and e-Learning aimed at increasing the employees' knowledge on fraud prevention and consequence. These activities, in 2019, caused the decrease of fraud cases significantly, reflecting the increase of Anti-Fraud Awareness and compliance culture in the Bank's entire line of organization.

Whistleblowing System [102-17]

As a concrete form of internal control, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. implements a Whistleblowing System policy thoroughly in every aspect of business activities. The implementation mechanism and result of Whistleblowing System (WBS) in 2019 were as follows:

a) How to submit a violation report [102-17]

Since 2012, the Bank has implemented the Whistleblowing System (WBS), which serves as a means to receive fraud indication report known by employees in work environment as well as a means of receiving fraud indication report or conlict of interest known by customers/partners

diketahui oleh nasabah/rekanan Bank. Sarana WBS Bank saat ini adalah:

- Hotline number (021) 27889226.
- Aplikasi Messaging J Trust U: J Trust Whistleblowing System
- *Email* dengan alamat *email*: antifraud@jtrustbank.co.id.

b) Perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*)

Manajemen Bank berkomitmen untuk melindungi pelapor *fraud* yang beritikad baik dan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Perlindungan yang diberikan kepada pelapor *fraud* meliputi perlindungan Bank terhadap perlakuan yang merugikan seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan/pangkat, diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan yang merugikan dalam arsip pribadi pegawai (*personal file record*). Bahkan sesuai keputusan Manajemen akan memberikan *reward* (dalam bentuk uang penghargaan) bagi karyawan yang dapat memberikan informasi adanya indikasi *fraud* yang diketahuinya.

c) Penanganan pengaduan [102-17]

Seluruh informasi yang masuk ke dalam WBS J Trust Bank akan dilakukan analisis terlebih dahulu serta pengumpulan bukti-bukti adanya indikasi *fraud*. Dan apabila dari hasil analisis dan bukti–bukti yang ada terindikasi kuat adanya kejadian *fraud*, maka selanjutnya akan dilakukan investigasi lebih lanjut.

d) Pihak yang mengelola pengaduan

WBS J Trust Bank dikelola oleh *Anti Fraud Department* yang berada di bawah IAD sehingga setiap pengaduan yang masuk dalam WBS J Trust Bank akan dibuka oleh pejabat *anti fraud* dan diteruskan kepada Direktur Utama untuk mendapatkan tindak lanjut.

e) Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir

Selama tahun 2019 seluruh laporan tersebut ditindaklanjuti dan diselesaikan, dengan perincian sebagai berikut:

of the Bank. WBS Bank infrastructure are, among others:

- Hotline number (021) 27889226
- J Trust U Messaging Application: J Trust Whistleblowing System
- E-mail with the address: antifraud@jtrustbank.co.id

b) Protection on the whistleblower

The Bank's management is committed to protecting fraud reporter who has good faith and will adhere to all relevant rules and regulations and best practices applicable in the implementation of the Whistleblowing System.

The protection granted to fraud reporter includes Bank protection against adverse treatment such as unfair dismissal, demotion, discrimination in all forms, and harming personal file records. And according to Management's decision, reward will be given (in the form of award money) for employees who can provide information of indication of fraud which is known.

c) Complaint handling [102-17]

All information entered into the WBS J Trust Bank will be analyzed in advance and the collection of evidence of fraud indications. And if the results of analysis and evidence shows a strong indication of a fraud incident, then further investigation will be perfomed.

d) The Party managing the complaint

J Trust Bank WBS is managed by the Anti Fraud Department directly under SKAI so that any complaints received in the Bank's WBS will be opened the anti-fraud authorities and forwarded to the President Director for the follow-up.

e) The number of incoming reports and were processed in the latest financial year

In 2019, all reports have been followed-up and settled, with details as follows:

Status Laporan Whistleblowing (WB) | Whistleblowing (WB) Report Status	**Jumlah**
Total Laporan WB yang diterima | Total received WB Reports	4
1. Laporan WB yang diteruskan untuk diinvestigasi | WB reports passed for investigation	1
2. Laporan WB yang tidak diteruskan untuk diinvestigasi (Pre-CLOSED) | WB reports not passed for investigation (Pre-CLOSED)	3
3. Laporan WB yang diteruskan untuk diinvestigasi dan telah selesai diinvestigasi (Status CLOSED) | WB reports passed for investigation and have been completed (Status CLOSED)	1
4. Laporan WB yang diteruskan untuk diinvestigasi dan belum selesai diinvestigasi (Status OPEN) | WB reports passed for investigation and have not been completed (Status OPEN)	0
5. Laporan WB yang terbukti berdasarkan hasil investigasi | WB reports proven based on investigation	1

f) Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku

Sanksi/tindak lanjut yang dilakukan Bank atas proses penyelesaian pengaduan pada tahun 2019 sebagai berikut:

1. Bank melakukan tindak lanjut terhadap proses penyelesaian pengaduan dengan melakukan pelaporan kepada Manajemen untuk mendapatkan persetujuan melakukan proses investigasi terhadap pengaduan dimaksud.

2. Kepada para pelaku yang dinyatakan bersalah atau bertanggung jawab terhadap terjadinya kasus oleh Bank maka Perusahaan menjatuhkan sanksi *punishment* yang berupa pemberian Surat Peringatan, permintaan untuk membayar ganti kerugian yang dialami Bank, dan sanksi administratif lain yang dapat berupa mutasi ke unit kerja lain, baik di dalam kota ataupun di luar kota asal pelaku bertugas.

F. Kebijakan *Conflict Management* (Termasuk *Insider Trading*)

Kebijakan *Conflict Management* bertujuan untuk menetapkan aturan, mengidentifikasi, mengurangi dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam Bank akibat dari pelaksanaan kegiatan oleh unit bisnis Bank yang memperoleh informasi mengenai Bank, nasabah Bank maupun pihak terkait.

Bank memiliki kebijakan dalam dokumen internal terkait dengan Etika Korporasi dan Manajemen Konflik, seperti:

a) Etika Korporasi PT Bank JTrust IndonesiaTbk., Bab IV Kerahasiaan, Pasal 4.
b) Etika Korporasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk., Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*), Huruf C. Kerahasiaan dan Perilaku Pihak Internal.

f) Sanction/follow-up on reports that have been processed in the financial year

Sanction/follow up carried out by the Bank on the settlement process of reports in 2019 were as follow:

1. The Bank followed up the settlement process of the reports by making reports to the Management to get approval for investigation process on the aforementioned reports.

2. To the perpetrators proven guilty or responsible of the case, the Company charged them with punishment in form of Warning Letter, request to pay the losses faced by the Bank, and other administrative sanctions such as mutation to other working units, both in the city or outside the city where the perpetrators were initially on duty.

F. Conflict Management Policy (Including Insider Trading)

Conflict Management policy aims to set regulations, reduce and manage potentials for conflict of interest that may emerge within the Bank due to activities done by the Bank's business units that obtain information about the Bank, the Bank's customers as well as related parties.

The Bank has policy in internal documents related to Corporate Ethics and Conflict Management, such as:

a) Corporate Ethics of PT Bank JTrust Indonesia Tbk., Chapter IV Confidentiality, Article 4
b) Corporate Ethics of PT Bank JTrust Indonesia Tbk., Annual Disclosure, Letter C. Confidentiality and Internal Party Behavior

Selain itu Bank juga dalam SOP tentang Kode Etik Pasar mengatur larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (*Insider Dealing*) dalam transaksi pribadi instrumen pasar keuangan, termasuk surat berharga Bank oleh karyawan dan manajemen sebagai pelaku pasar.

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan penggunaan informasi orang dalam untuk kepentingan pribadi karyawan maupun manajemen (orang dalam) dapat dimitigasi.

G. Penerapan Kebijakan Anti Korupsi

Peraturan/Dasar Hukum
Penindakan/Anti Korupsi di Indonesia:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah mengatur tentang penerapan kebijakan anti korupsi di Bank yang tertuang di dalam Kebijakan Pengendalian Penerapan Strategi *Anti Fraud* yang diterapkan menggunakan 4 pilar, seperti Pilar Pencegahan melalui penandatanganan *Anti Fraud Charter*, *Annual Disclosure*, dan Pakta Integritas serta telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai.

Penetapan Komitmen Anti Korupsi

a. Dengan ditandatanganinya dokumen *Anti Fraud Charter* oleh Direksi dan Komisaris, dan Pakta Integritas oleh semua pegawai, pejabat termasuk Direksi dan Komisaris menunjukkan bahwa adanya komitmen manajemen PT Bank JTrust Indonesia Tbk. terhadap anti korupsi di mana salah satu butir isi Pakta Integritas memberikan pernyataan yaitu "Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)".
b. Dicantumkannya perundangan dan peraturan Pemerintah RI yang berkaitan dengan pencegahan korupsi dalam ketentuan internal PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Kebijakan Penerapan Strategi *Anti Fraud* tahun 2020).

H. Permasalahan Hukum

1) Permasalahan hukum adalah permasalahan Hukum Perdata dan Hukum Pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

Moreover, the Bank also stipulates on its SOP on Market Code of Ethics on the prohibition in using Insider Dealing in private transactions of financial market instrument, including the Bank's bonds by employees and management as market players.

With the policy, the usage of information by internal personnels for the personal interest of employees and managements is expected to be mitigated.

G. Implementation of Anti-Corruption Policy

Regulation/Legal Basis
Enforcement/Anti-Corruption in Indonesia:

a. Law No. 28 of 1999 on State Administration Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.
b. Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes.
c. Government Regulation No 71 of 2000 on the Implementing Procedures of Public Participation and Awards and Corruption Eradication Article 6

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has regulated the implementation of anti-corruption policy in the Bank as stipulated in the Policy of Anti-Fraud Strategy Implementation Control applied through 4 pillars, such as Prevention Pillar through the signing of Anti-Fraud Charter, Annual Disclosure, and Integrity Pact as well as the dissemination to entire employees.

Stipulation of Anti-Corruption Commitment

a. With the signing of Anti-Fraud Charter document by the Board of Directors and Commissioners, and Integrity Pact by all employees, officials including the Board of Directors and Commissioners show the commitment of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.'s management towards anti-corruption where one of the contents in the Integrity Pact states "Create a working environment that is free from Corruption, Collution, and Nepotism (KKN)."
b. The stipulation of provisions and regulations from the Indonesian Government related to corruption prevention in the internal provision of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Policy on the Implementation of Anti-Fraud Strategy 2020).

H. Legal Issues

1) Legal issues are civil and criminal legal issues faced by the Bank over a period of reporting year and have been filed through legal process.

2) Pengungkapan permasalahan hukum minimal mencakup:
   a) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap).
   b) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.

Selama tahun 2019 jumlah permasalahan hukum yang dihadapi J Trust Bank dan telah diajukan melalui proses hukum sebagaimana tabel berikut:

2) Disclosure of legal matters includes at least:
   a) Number of civil and criminal cases faced and settled (with binding legal force).
   b) Number of civil and criminal cases faced and in the settlement process.

During 2019, the number of civil and criminal cases faced b JTrust Bank which has been filed through legal process, as the following table:

1. Bank Sebagai Tergugat/Terlawan/Terlapor/Termohon

1. Bank as Defendant/Reported

(satuan) (unit)

Permasalahan Hukum Litigation Case	Jumlah Kasus Number of Case	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
A. Perkara Bank sebagai Tergugat/Terlawan | Case(s) with the Bank as Defendant (Counter Charges		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) | Settled (with binding legal force)	13	-
Dalam proses penyelesaian | in settlement process	12	-
B. Perkara Bank sebagai Terlapor | Case(s) with the Bank as the Reported		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) | Settled (with binding legal force)	-	1
Dalam proses penyelesaian | In settlement process	-	5
Total	**25**	**6**

2. Bank Sebagai Penggugat/Pelawan/Pemohon/Pelapor

2. Legal issues commonly faced by the Bank are:

(satuan) (unit)

Permasalahan Hukum Litigation Case	Jumlah Kasus Number of Case	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
A. Perkara Bank sebagai Penggugat (Gugatan Perlawanan) | Case(s) with the Bank as Plaintiff (Counter Charges)		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) | Settled (with binding legal force)	1	-
Dalam proses penyelesaian | In settlement process	12	-
Total	**13**	**-**
B. Perkara Bank sebagai Pemohon tentang Kepailitan | Case(s) with the Bank as Bancrupcy Applicant		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) | Settled (with binding legal force)	-	-
Dalam proses penyelesaian | In settlement process	-	-
Total	**0**	**-**
C. Perkara Bank sebagai Pelapor adanya Dugaan Tindak Pidana | Case(s) with the Bank as the Reporting Party of Allegation of Criminal Act		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) | Settled (with binding legal force)	-	1
Dalam proses penyelesaian | In settlement process	-	2
Total	**-**	**3**

Permasalahan hukum yang umumnya dihadapi oleh Bank adalah:

- Gugatan perdata dari debitur macet/nasabah, maupun dari pihak ketiga/pemilik jaminan;
- Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan yang diajukan oleh kreditur lain, debitur itu sendiri (debitur macet), maupun Bank yang mengajukan terhadap debitur yang telah berstatus macet kreditnya;
- Laporan adanya tindak pidana yang berasal dari eksternal Bank ataupun yang melibatkan internal Bank (*Internal Fraud*).

Upaya penyelesaian permasalahan hukum oleh Bank antara lain:

- Menganalisa perkara dan mendiskusikan dengan Tim Legal bersama-sama dengan Unit Bisnis yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud;
- Tim Legal secara bersama-sama menentukan apakah perkara akan ditangani oleh internal Bank ataupun menggunakan jasa *Lawyer* eksternal dengan persetujuan dari Direksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Memonitor perkembangan penanganan kasus-kasus hukum baik yang ditangani oleh internal Bank maupun *Lawyer* eksternal.

Pokok Perkara/Gugatan dan Status Penyelesaian

Berikut adalah 7 (tujuh) perkara perdata/pidana dengan nilai perkara terbesar yang dihadapi Bank sampai dengan periode 31 Desember 2019:

Legal issues commonly faced by the Bank are:

- Civil Action by bad debts/customers, as well as third party/collateral owner
- Suspension of Payment (PKPU) and Bankruptcy filled by the Other Creditor, the Borrower itself (Bad debt), or the Bank filling against the Debtor having defaulted on credit;
- Criminal Reports from external bank or involving internal bank (internal fraud).

Efforts to resolve legal issues by the Bank include:

- Analyze cases and discuss with Legal Team together with Business Units related to the legal issues;
- The Legal Team collectively determines whther the case will be handled by the Internal Bank or use the services of an External Lawyer with the approval of the Board of Directors in accordance with applicable law;
- Monitor the progress of legal cases handled by both internal and external lawyers.

Principal Case/Claim and Settlement Status

Here are 7 (seven) civil/criminal cases with the greatest case value that the Bank faces until 31 December 2019:

1. Perkara No. 718/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Case No. 718/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Para Pihak The Parties	HR Dkk (Penggugat)	HR et al (Plaintiff)
	BJI (Tergugat I) ADS (Tergugat II)	BJI (Defendant I) ADS (Defendant II)
Pokok Perkara Principal Case	Tuntutan yang diajukan kepada Bank dimaksudkan agar Bank mengembalikan dana investasi produk yang dikeluarkan oleh ADS yaitu berupa *Discretionary Fund*	The lawsuit aimed to the Bank is meant that the Bank return product investment fund issued by ADS in form of Discretionary Fund
Nilai Perkara Case Value	Materiil : Rp16.363.323.318,- Immateriil : Rp10.000.000.000,-	Material : IDR16,363,323,318,- Immaterial : IDR10,000,000,000,
Status Perkara Case Status	Di Tingkat Kasasi	On Appeal
Risiko yang Dihadapi oleh Bank Risk Faced by the Bank	Membayar ganti rugi sebesar nilai gugatan bersama-sama dengan Tergugat II	Pay damage according to the lawsuit value together with Defendant II

2. Perkara No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska Case No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska		
Para Pihak The Parties	GL Dkk (Penggugat)	GL et al (Plaintiff)
	BJI (Tergugat I) ADS (Tergugat II)	BJI (Defendant I) ADS (Defendant II)
Pokok Perkara Principal Case	Tuntutan yang diajukan kepada Bank dimaksudkan agar Bank mengembalikan dana investasi produk yang dikeluarkan oleh ADS yaitu berupa *Discretionary Fund*	The lawsuit aimed to the Bank is meant that the Bank return product investment fund issued by ADS in form of Discretionary Fund
Nilai Perkara Case Value	Materiil Rp41.112.691.668,-	Material IDR41,112,691,668,-
Status Perkara Case Status	Di Tingkat Peninjauan Kembali	On Judicial Review
Risiko yang Dihadapi oleh Bank Risk Faced by the Bank	Membayar ganti rugi sebesar nilai gugatan bersama-sama dengan Tergugat II	Pay damage according to the lawsuit value together with Defendant II

3. Perkara No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby Case No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby		
Para Pihak The Parties	WP (Penggugat)	WP (Plaintiff)
	BJI (Tergugat) ADS (Turut Tergugat I) LPS (Turut Tergugat II)	BJI (Defendant I) ADS (Co-Defendant I) LPS (Co-Defendant II)
Pokok Perkara Principal Case	Tuntutan yang diajukan kepada Bank dimaksudkan agar Bank mengembalikan dana investasi produk yang dikeluarkan oleh ADS yaitu berupa *Discretionary Fund*	The lawsuit aimed to the Bank is meant that the Bank return product investment fund issued by ADS in form of Discretionary Fund
Nilai Perkara Case Value	Materiil Rp94.324.725.000.-	Material IDR94,324,725,000.-
Status Perkara Case Status	Di Tingkat Peninjauan Kembali	On Judicial Review
Risiko yang Dihadapi oleh Bank Risk Faced by the Bank	Membayar ganti rugi sebesar nilai gugatan	Pay damage according to the lawsuit value

4. Perkara No. 91/Pdt.G/2012/PN.YK Case No. 91/Pdt.G/2012/PN.YK		
Para Pihak The Parties	BWG dan Yayasan SR (Para Penggugat)	BWG and SR Foundation (Plaintiffs)
	BJI (Tergugat) ADS (Turut Tergugat)	BJI (Defendant) ADS (Co-Defendant)
Pokok Perkara Principal Case	Tuntutan yang diajukan kepada Bank dimaksudkan agar Bank mengembalikan dana investasi produk yang dikeluarkan oleh ADS yaitu berupa *Discretionary Fund*	The lawsuit aimed to the Bank is meant that the Bank return product investment fund issued by ADS in form of Discretionary Fund
Nilai Perkara Case Value	Tuntutan Materiil BW Rp33.382.746.433,- Tuntutan Materiil Yayasan SR Rp24.277.458.331,-	Material Claim BW IDR33,382,746,433,- Material Claim SR Foundation Rp24,277,458,331,-
Status Perkara Case Status	Di Tingkat Peninjauan Kembali	On Judicial Review
Risiko yang Dihadapi oleh Bank Risk Faced by the Bank	Membayar ganti rugi sebesar nilai gugatan	Pay damage according to the lawsuit value

5. Perkara No. 215/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst Case No. 215/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst		
Para Pihak The Parties	CC (Penggugat)	CC (Plaintiff)
	BJI (Tergugat I) ADS (Tergugat II) BI (Tergugat III) Bpp LK (Tergugat IV)	BJI (Defendant I) ADS (Defendant II) BI (Defendant III) Bpp LK (Defendant IV)
Pokok Perkara Principal Case	Tuntutan yang diajukan kepada Bank dimaksudkan agar Bank mengembalikan dana investasi produk yang dikeluarkan oleh ADS yaitu berupa *Discretionary Fund*	The lawsuit aimed to the Bank is meant that the Bank return product investment fund issued by ADS in form of Discretionary Fund
Nilai Perkara Case Value	Materiil Rp12.787.000.000,-	Material IDR12,787,000,000,-
Status Perkara Case Status	Di Tingkat Kasasi	On Appeal
Risiko yang Dihadapi oleh Bank Risk Faced by the Bank	Membayar ganti rugi sebesar nilai gugatan bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya	Pay damage according to the lawsuit value together with Other Defendants

6. Perkara Pengadilan Negara Mrt Case of Mrt State Court		
Para Pihak The Parties	Wst Dkk (Penggugat)	Wst et al (Plaintiff)
	JTc (Tergugat I) BJI (Tergugat II)	JTc (Defendant I) BJI (Defendant II)
Pokok Perkara Principal Case	Pengajuan SOC (*statement of claim*/Gugatan) didasarkan pada Putusan Pengadilan Negara Mrt	Submission of SOC (statement of slaim) based on the Decision of Met State Court
Nilai Perkara Case Value	Materiil USD115.750.000	Material USD115,750,000
Status Perkara Case Status	Di Tingkat Pengadilan Tinggi	At the High Court Level
Risiko yang Dihadapi oleh Bank Risk Faced by the Bank	Membayar ganti rugi sebesar nilai gugatan bersama-sama dengan Tergugat lainnya	Pay damage according to the lawsuit value together with Other Defendants

7. Perkara Mahkamah Agung Negara Mrt Case of Mrt State Supreme Court		
Para Pihak The Parties	FGFL, WIARCO, WCAI, WIARCI, WICL (Para Penggugat)	FGFL, WIARCO, WCAI, WIARCI, WICL (Plaintiffs)
	BJI, JTc, NA, NF, SA, AF, FIH, LPS, KW, FI (Para Tergugat) RA, OJK (Para Turut Tergugat)	BJI, JTc, NA, NF, SA, AF, FIH, LPS, KW, FI (Defendants) RA, OJK (Co-Defendants)
Pokok Perkara Principal Case	Pada tanggal 2 November 2017, BJI menerima relaas beserta lampiran gugatan dari FGFL, W, dkk yang dalam gugatannya secara garis besar menarik BJI beserta dengan Tergugat lainnya dan Turut Tergugat; Tuntutan dari FGFL dalam perkara i ni terdiri dari 6 (enam) tuntutan (*claim*) yang berbeda-beda baik nilai gugatan maupun materi gugatannya.	On November 2, 2017, BJI received court summons and lawsuit attachments from FGFL, W, et al which in the lawsuit broadly pulled BJI with other Defendants and Co-Defendants; Lawsuit from FGFL in this case consists of 6 (six) claims that are different in case value or case materials.
Nilai Perkara Case Value	Total nilai gugatan materiil USD958.608.007	Total material lawsuit value USD958,608,007
Status Perkara Case Status	Di tingkat Mahkamah Agung Negara Mrt, dilanjutkan dengan rangkaian upaya hukum di Pengadilan luar negeri	At the Mrt State Suprement Court level, followed by legal actions in overseas Court
Risiko yang Dihadapi oleh Bank Risk Faced by the Bank	Membayar ganti rugi sebesar nilai gugatan bersama-sama dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat	Pay damage according to the lawsuit value together with Defendants and Co-Defendants

Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan

Dari perkara penting yang dihadapi Bank selama tahun 2019 terbagi menjadi 2 (dua) jenis perkara yaitu:

1. Perkara A

   Merupakan perkara dari masa Bank Century yang sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian

Influence on Company Condition

From the important issues faced by JTrust Bank during 2019 is divided into 2 (two) types of cases namely:

1. A Case:

   The case is from Century Bank era which is still in the process of settlement in court which

di pengadilan yang rata-rata sudah sampai tingkat akhir di Mahkamah Agung. Perkara ini butuh pencadangan biaya yang tidak sedikit oleh Bank maupun J Trust Group itu sendiri. Namun meskipun perkara ini masih berjalan, tidak begitu menimbulkan dampak yang signifikan bagi operasional dan bisnis Bank.

Seiring dengan perkembangan perkara yang sedang berlangsung saat ini, Bank yang sebelumnya di dalam posisi yang kurang menguntungkan karena berdasarkan putusan-putusan Pengadilan yang dalam hal ini Bank dalam keadaan kalah yaitu pada Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mewajibkan Bank untuk mengembalikan dana-dana nasabah A sesuai dengan tuntutan Para Penggugat di dalam gugatannya. Namun saat ini dengan adanya Putusan Pidana dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum RT, Putusan Pidana yang menghukum HA, Putusan Perdata di Pengadilan Jakarta Pusat, serta *Legal Action* yang dilakukan oleh Bank melalui gugatan perlawanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah berkekuatan hukum tetap (dalam hal ini Bank menang), beban Bank yang sebelumnya cukup memberatkan, kini Bank memiliki kesempatan untuk keluar dari kewajiban-kewajiban mengembalikan dana-dana nasabah nasabah A berdasarkan putusan-putusan Pengadilan yang sebelumnya memposisikan Bank dalam keadaan kalah. Dengan demikian untuk ke depannya, bisnis Bank akan semakin baik dengan telah tuntasnya perkara lama tersebut.

2. Perkara W (perkara luar negeri)
Perkara ini merupakan perkara lama mengenai sengketa surat-surat berharga yang proses penyelesaiannya berada di luar negeri yang berawal dengan adanya gugatan yang diajukan oleh perusahaan HWC dkk. Perkara-perkara ini masih berlangsung hingga saat ini.

Meskipun perkara ini masih berjalan, namun tidak begitu menimbulkan dampak yang signifikan bagi operasional dan bisnis Bank, karena perkara berlangsung di luar negeri. Adapun kemungkinan perkara tersebut dapat mengganggu bisnis Bank adalah ketika perkara-perkara yang sedang berlangsung tersebut telah mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum. Apabila Bank diputuskan bersalah oleh pengadilan luar negeri maka keputusan tersebut tidak serta merta dapat diterapkan pada Bank di Indonesia. Gugatan baru harus diajukan terhadap Bank pada pengadilan di Indonesia.

on average has reached the final level in the Supreme Court. This case needs cost reserves that is not small by J Trust Bank and J Trust Group itself. However, despite the case is still running, it does not have a significant impact on the Bank's operations and business.

Along with the ongoing progress of the case, the Bank which previously was in a disadvantage position because based on the decisions of the Courts in this case the Bank is in a state of defeat, namely the Surakarta District Court, the Surabaya District Court and the Yogyakarta District Court which requires the Bank to refund A's clients' funds in accordance with the Plaintiff's claim in its lawsuit. However, this time with the Criminal Decision of Central Jakarta District Court punishing RT, Criminal Decision punishing HA, Civil Court Decision in Central Jakarta Court, and Legal Action conducted by the Bank through a lawsuit against the South Jakarta District Court which has been enforced (in which case the Bank won), the Bank's previous burden, the Bank now has the opportunity to exit the obligations of returning A's clients' funds based on Court decisions that previously positioned the Bank in a losing state. Thus for the future, the Bank's business will be better with the completion of the old case.

2. W case (overseas case):
The case is an old case on the dispute of commercial papers which settlement process is overseas that began with the lawsuit filed by HWC companies etc. The case is still ongoing currently.

Although this case is still running, but not such a significant impact on the operations and business of the Bank, because the case took place abroad. The possibility of such case may disrupt the business of the Bank is when the ongoing cases have a verdict that is legally binding. If the Bank is found guilty by the foreign court, the decision shall not necessarily be applied to the Bank in Indonesia. A new lawsuit must be filed against the Bank in a court of law in Indonesia.

Seperti diungkapkan di atas, tidak terdapat perkara yang akan berdampak negatif bagi kondisi keuangan dan kelanjutan usaha J Trust Bank.

Permasalahan hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Di tahun 2019, beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjadi salah satu tergugat dalam perkara dengan W di luar negeri. Bank sedang melakukan upaya hukum untuk mengajukan keberatan atas gugatan tersebut dan masih menunggu perkembangan lebih lanjut (kasus no. 7 pada tabel di atas).

I. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa PT Bank JTrust Indonesia Tbk. merupakan salah satu perwujudan proses Tata Kelola Perusahaan yakni transparasi dalam hal pengadaan.

Kebijakan tersebut merupakan acuan utama seluruh aktivitas pengadaan barang dan/atau jasa pada Bank yang dilakukan melalui proses tender dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain:

1. Diwajibkan untuk mengundang 3 (tiga) *Vendor*/Rekanan dalam pelaksanaan tender untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
2. Pelaksanaan prinsip transparasi/keterbukaan dan menghindari benturan kepentingan.
3. Fokus pada tujuan untuk mendapatkan tingkat mutu barang dan/atau jasa terbaik serta efisiensi pembelian yang optimal melalui perbandingan mutu dan tingkat harga yang ditawarkan oleh *Vendor*/Rekanan.

Bank menunjuk Human Capital & General Services Division sebagai koordinator pengadaan barang dan/atau jasa pada Bank. Dalam prosesnya, unit tersebut juga melibatkan unit-unit lain di dalam Bank termasuk Legal, Finance, Internal Audit, dan Operational Risk Management untuk memastikan proses Tata Kelola Perusahaan berjalan dengan standar terbaik. Seluruh proses pengadaan mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk kewenangan, limit persetujuan, klasifikasi, serta pembagian tugas dan tanggung jawab dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa dalam Bank.

Aktivitas Terkait Kriteria dan Seleksi Rekanan (*vendor*)

Rekanan yang terlibat dalam pengadaan barang dan/atau jasa adalah Rekanan yang telah terdaftar melalui proses pelaksanaan uji terhadap keberadaan Rekanan yang dilakukan pada saat pertama kali Bank bermaksud untuk menggunakan jasa Rekanan/*Vendor* dan akan dikaji ulang secara berkala minimal 1 (satu) tahun. Pelaksanaan uji Rekanan mencakup:

As noted above, there were no cases that will have a negative impact on the financial condition and continuation of the J Trust Bank business.

Legal issues being faced by the Board of Commissioners and the Board of Directors

In 2019, several members of the Board of Commissioners an the Board of Directors became one of the defendants in the case with W in overseas. The Bank is conducting legal remedies to file an objection to the lawsuit and is still awaiting further progress (case No. 7 in the table above).

I. Policy on Procurement of Goods and Services

Policy on Procurement of Goods and Services at PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is one of the realization of Corporate Governance namely transparency on procurement.

The policy is the main guideline for all procurement activities of goods and/or services in the Bank conducted through tender process by considering several aspects, including:

1. Obligation to invite 3 (three) Vendors/Partners in the implementation of tender for procurement of goods and/or services.
2. The implementation of principles of transparency/openness and avoiding conflict of interest.
3. Focus on the objective to obtain the best quality of goods and/or services as well as optimal purchasing efficiency by comparing quality and price offered by Vendor/Partner.

The Bank appointed Human Capital & General Services Division as the coordinator for procurement of goods and/or services in the Bank. In the process, this unit also involves other units within the Bank including Legal, Finance, Internal Audit, and Operational Risk Management to ensure Corporate Governance process is carried out in the best standard. All procurement processes follow the prevailing procedures, including authority, approval limit, classification, as well as task distribution and responsibilities in goods and/or service procurement process within the Bank.

Activities Related to Criteria and Selection of Vendors

Vendors involved in the procurement of goods and/or services are Vendors registered through testing process on Vendors existence as performed first when the Bank intended to use the service of Vendors and will be reviewed periodically at least 1 (one) year. The implementation of Vendors test includes:

1. Memastikan kelengkapan perizinan usaha Rekanan telah sesuai dengan ketentuan eksternal yang berlaku melalui aplikasi yang dimiliki Bank.
2. Melakukan *site visit* ke lokasi usaha Rekanan.
3. Melakukan *cross check* atas referensi yang diberikan.
4. Melakukan evaluasi dan penilaian selama menjadi Rekanan Bank.

Penggunaan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi/*Vendor* TI

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Bank dapat menggunakan jasa pihak lain/pihak penyedia jasa teknologi informasi untuk menyelenggarakan kegiatan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan strategis.

a. Proses Pemilihan dan Penentuan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi

Secara umum proses pemilihan dan penentuan pihak penyedia jasa teknologi informasi/calon *vendor* TI (terkait dengan kerja sama sistem/program) di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. meliputi:

a.1. Mendapatkan sumber informasi calon *vendor* TI dari:
   1) Pengalaman sebelumnya dalam berinteraksi dengan calon *vendor*.
   2) Jaringan perkenalan rekan-rekan sesama IT perbankan.
   3) *Browsing* di internet.
   4) Masukan unit bisnis/Divisi/Cabang/internal lainnya.
   5) Seminar atau pelatihan.

a.2. Kriteria dan dasar pertimbangan dalam menentukan calon *vendor* TI yang akan dipilih:
   Memenuhi nilai total tertinggi/maksimal 100 dari gabungan 3 aspek penilaian yaitu:
   1) Aspek Fungsional, bobot 40% dengan maksimal nilai 40.
   2) Aspek Teknis, bobot 30% dengan maksimal nilai 30.
   3) Aspek Finansial, bobot 30% dengan maksimal nilai 30.

1. Ensuring the completion of Vendor's business permit is in line with the external prevailing provisions through the Bank's application.
2. Conducting site visit to the Vendor's business location.
3. Cross checking the references submitted.
4. Conducting evaluation and assessment during the Partnership with the Bank.

Use of Information Technology Vendor

Based on Financial Services Authority Regulation No. 38/POJK.03/2016 dated December 1, 2016, and Financial Services Authority Circular No. 21/SEOJK.03/2017 dated June 6, 2017 on the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks, the Bank may use the services of the other party/information technology vendor to organize the activities of information technology in order to improve effectiveness and efficiency in achieving strategic objectives.

a. The Selection and Determination Process of Information Technology Vendor

In general the selection and determination process of information technology vendor (related with system/program cooperation) in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. include:

a.1. Obtaining information sources of IT vendors from:
   1) Previous experience in interacting with prospective vendors.
   2) Introduction network of fellow banking IT.
   3) Browsing on the internet.
   4) Input from other business units/divisions/branches/internal.
   5) Seminars or training.

a.2. Criteria and basic consideration in determining candidates for IT vendors to choose from:
   Meeting the highest total value/maximum 100 of the combined 3 aspects of assessment, namely:
   1) Functional aspects, weighs 40% with a maximum value of 40.
   2) Technical Aspects, weighs 30% with a maximum value of 30.
   3) Financial Aspects, weighs 30% with a maximum value of 30.

a.3. Prosedur permohonan persetujuan calon *vendor* TI yang akan dipilih:

1) Melakukan *review* terhadap rencana bisnis tahunan yang berisi daftar proyek yang akan dijalankan, dan menyusun skala prioritas terhadap proyek yang akan dijalankan tersebut.
2) Mengumpulkan *requirement*/ kebutuhan fungsional dari unit bisnis.
3) Mengumpulkan *requirement*/ kebutuhan teknis dari Divisi IT.
4) Melihat *requirement*/kebutuhan *financial/Budget* dari rencana bisnis tahunan.
5) Penyusunan BRD (*Business Requirement Document*) berdasarkan *requirement*.
6) Mengirimkan undangan presentasi beserta BRD kepada beberapa calon *vendor* TI (minimum 3 vendor).
7) Calon *vendor* TI melakukan presentasi.
8) Calon *Vendor* TI mengirimkan *proposal* penawaran berdasarkan BRD.
9) Mengundang POC (*Proof Of Concept*) calon *vendor* TI (jika dimungkinkan untuk POC).
10) Calon *vendor* TI melakukan POC (jika dimungkinkan untuk POC).
11) Melakukan penilaian seluruh aspek (nilai total maksimal 100) terdiri dari:
    a. Aspek Fungsional (nilai maksimal 40), dinilai oleh unit bisnis sebagai *user*.
    b. Aspek Teknis (nilai maksimal 30), dinilai oleh Divisi IT.
    c. Aspek Finansial (nilai maksimal 30), dinilai oleh Divisi IT yang menangani Procurement IT.
    d. Penilaian calon *vendor* TI dibahas dalam rapat Komite IT (jika proyek bersifat strategis).
12) Rapat komite IT diadakan untuk pengembangan atau aktivitas yang membutuhkan *budget* setidaknya Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
13) Komite IT sesuai kewenangannya memberikan rekomendasi kepada Direksi.
14) Direksi memberikan persetujuan atau menolak terhadap rekomendasi Komite IT.

a.3. Approval application procedures for prospective vendors to choose from:

1) Conducting a review on the annual business plan that contains a list of projects to be executed and setting priority scale to the projects.
2) Gathering requirements/functional needs of the business unit.
3) Gathering requirements/technical needs of the IT Division.
4) Seeing requirements/financial needs/ budget of the annual business plan.
5) Preparation of TOR (Terms of Reference) based on the functional and technical requirements.
6) Sending invitations and TOR to several prospective IT vendors.
7) Candidates for IT vendors making presentations.
8) Candidates for IT vendors submitting bid proposals based on the TOR.
9) Inviting POC (Proof of Concept) of prospective IT vendors (if it is possible for POC).
10) Candidates for IT vendors doing a POC (if it is possible for POC).
11) Assessing all aspects (total maximum value of 100) which consist of:
    a. Functional Aspects (maximum value 40), assessed by the business unit as the user.
    b. Technical Aspects (maximum value 30), assessed by the IT Division.
    c. Financial Aspects (maximum value 30), assessed by the Division of Corporate Secretary (in charge of Procurement Section).
    d. Assessment of future IT vendor is discussed in IT Committee meeting (if the project is strategic).
12) IT Committee meeting is held for development or activities requiring a budget of at least IDR500,000,000.- (five hundred million Rupiah).
13) The IT Committee according to its authority provides recommendations to the Board of Directors.
14) The Board of Directors shall approve or reject the recommendation of the IT Committee.

15) Setelah disetujui Direksi berdasarkan batas kewenangan limit yang berlaku, maka Divisi IT menindaklanjuti proses *engagement vendor* TI selanjutnya, yaitu: Proses *Purchase Order/* pembuatan Surat Perintah Kerja, Kontrak dan lain-lain.

b. Pemantauan/Pengawasan *Vendor* TI dalam *Vendor Management*

Bank wajib memiliki program pemantauan data *vendor* TI secara berkesinambungan dalam *vendor management* untuk memastikan penyedia jasa/*vendor* TI telah melaksanakan pekerjaan/ memberikan jasa sesuai dengan kontrak/ perjanjian kerja sama dengan melakukan:

1) Pemantauan pencapaian SLA (*Service Level Agreement*) dari *vendor* TI utama.
2) Penandatanganan berita acara serah terima pekerjaan dari *vendor*.
3) Kunjungan kerja rutin ke lokasi kerja/*data center* dari *vendor* TI utama.
4) Permintaan laporan keuangan tahunan (*audited*) *vendor* TI utama.
5) Permintaan hasil audit independen dari lembaga terkait misalnya ISO.
6) Rapat berkala dengan *vendor* TI utama.
7) Pemantauan *progress* penyelesaian proyek IT secara berkala sesuai prinsip *Project Management*.

J. Informasi Lain yang Terkait dengan Tata Kelola Bank

a) Intervensi pemilik/pemegang saham
Selama tahun 2019 tidak ada intervensi dari pemegang saham.

b) Perselisihan intern Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank
Selama tahun 2019 tidak terdapat perselisihan intern Bank yang mengganggu operasional dan/ atau kelangsungan usaha Bank.

c) Permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank
Selama tahun 2019 tidak ada permasalahan yang timbul sebagai dampak dari kebijakan remunerasi pada Bank.

15) Once approved by the board of Directors based on the applicable authorization limit, the Division of Corporate Secretary follows up the next engagement process of IT vendors, namely: Purchase Order/ Work Order manufacture, contract and other processes.

b. Monitoring/Supervising of IT in Vendor Management

Bank required to have a data monitoring program of IT vendor in vendor management on ongoing basis to ensure that IT vendors/service providers have implemented work/provided services in accordance with the contract/agreement by conducting:

1) Monitoring the achievement of SLA (Service Level Agreement) from major IT vendors.
2) Signing of handover documents on the projects from vendors.
3) Routine working visit to work site/data center of the major IT vendors.
4) Requesting for annual financial statements (Audited) of major IT vendors.
5) Requesting independent audit results of the relevant institutions such as ISO.
6) Meeting regularly with major IT vendors.
7) Monitoring progress of completion of IT projects on a regular basis according to the principles of Project Management.

J. Other Information Related to Good Corporate Governance

a) Intervention of owners/shareholders
During 2019 there were no interventions from shareholders.

b) Bank internal disputes that disrupt the Bank's operational and/or business operations
During 2019, there were no internal Bank disputes that interfered with the Bank's operational and/ or business operations.

c) Issues arising from the impact of the Bank's remuneration policy
During 2019, there were no problems arising as a result of the Bank's remuneration policy.

BAB VII
PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

CHAPTER VII
DONATION FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

7.1. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. memberikan dana untuk kegiatan sosial melalui program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social and Responsibility*/CSR). Target dari program dan kegiatan CSR PT Bank JTrust Indonesia Tbk. yang diyakini nantinya dapat menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dan kondusif, serta mampu menanggapi berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan hubungan yang saling bermanfaat dan menguntungkan antara PT Bank JTrust Indonesia Tbk. dengan masyarakat luas.

Pada tahun 2019, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. mengalokasikan sebagian biaya operasionalnya untuk mengembangkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat serta lingkungannya, melalui program "J Trust Peduli" yang fokus membantu masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, lingkungan hidup, dan tanggap darurat terhadap setiap bencana alam.

Penjelasan rinci terkait dengan tanggung jawab sosial Bank disampaikan dalam bagian khusus tentang "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan" yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi 2019.

7.1. Donation for Social Activities

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. gives funds for social activities through programs and activities of Corporate Social Responsibility (CSR). The target of the CSR programs and activities of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is believed to create a better and more conducive condition in the society, while responding to changes in the society lives which eventually will create mutual benefits between PT Bank JTrust Indonesia Tbk. and the wider society.

In 2019, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. allocated some of its operational funds to develop and empower the society lives and environment, through the "J Trust Peduli" program which focused on helping the society in education, health, social, religion, environment, and emergency response to natural disaster.

Detailed explanation related to the Bank's corporate social responsibility is stated in the special section of "Integrated and Sustainable Corporate Social Responsibility" and the 2019 Sustainable Report which is an integral part of the 2019 Integrated Annual Report.

7.2 Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2019 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. **tidak pernah** melakukan kegiatan politik atau memberikan sumbangan dana untuk kegiatan politik.

7.2 Donation for Political Activities

Similar to previous years, in 2019 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. **never** performed any political activities or donated to political activities.

No	**Nama Kegiatan Politik** Name of Political Activities	**Jumlah** | Total **(Rp)**
	NIHIL	

BAB VIII
PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

CHAPTER VIII
IMPLEMENTATION OF PUBLIC COMPANY GOVERNANCE GUIDELINE

Sebagai Perusahaan Terbuka, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. wajib memenuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/ 2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka memuat praktik tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional mencakup 5 (lima) aspek, dan 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan pendekatan "*Comply or Explain*". Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. adalah sebagai berikut:

As a Public Company, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is required to comply with the Public Company Governance Guidelines set in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015, on the Implementation of Public Company Governance Guidelines and Circular Letter of Financial Services Authority (SEOJK) No. 32/ SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015, on Public Company Governance Guidelines.

Public Company Governance Guidelines covers good corporate governance practices in line with international practices comprising 5 (five) aspects, and 8 (eight) good corporate governance principles, and 25 (twenty five) recommendations for implementing good corporate governance aspects and principles based on the "Comply or Explain" approach. Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is as follows:

Aspek Aspect	**Prinsip** Principle	**Rekomendasi** Recommendations	**Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (*Comply or Explain*)** Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Comply or Explain)
1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham. Listed Company Relationships With Shareholders In Ensuring Shareholder Rights.	**Prinsip 1:** Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Principle 1: Increase the Value of General Shareholders' Meeting (GMS).	1.1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. 1.1 The Listed Company has technical or voting procedures either in an open or closed method, which prioritizes the independence and interests of shareholders.	*Comply.* - Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. - Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Pemimpin rapat akan menentukan. - Prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham, diatur dalam Kebijakan Rapat Direksi. Comply. - All decisions are made based on deliberate consensus. In the case that deliberate consensus is not reached, then the decision is made by voting of more than ½ (half) part of voting rights legally made in the meeting. - If the number of agree and disagree votes are equal, then the meeting's Chairman has the right to make decision. - Technical procedure for votings both in open or closed doors prioritize independence, and shareholders' interests, regulated in the Meetings Policy of Board of Directors.

Aspek Aspect	**Prinsip** Principle	**Rekomendasi** Recommendations	**Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (*Comply or Explain*)** Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Comply or Explain)
		1.2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. 1.2 All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Public Company are present at the Annual GMS.	*Comply.* - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) merupakan hirarki tertinggi dalam organisasi perusahaan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19. - Dengan demikian Seluruh Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan. - Apabila ada Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir dalam RUPS Tahunan, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis atas ketidakhadirannya dengan alasan yang jelas. Comply. - Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS) is the highest hierarchy in company organizations that has authority not given to the Board of Commissioners or Board of Directors of the Company within the limits specified in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association Article 19. - Thus all Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are present at the Annual GMS. - If there are Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners unable to attend the Annual GMS, then they must notify in writing of their absence for obvious reasons.
		1.3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs *Web* Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. 1.3 Summary of minutes of the GMS is available on the Listed Company Website for at least 1 (one) year.	*Comply.* Ringkasan risalah RUPS sejak RUPSLB tanggal 30 Desember 2014 hingga saat ini tersedia dalam Situs *Web* J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id). Comply. The Summary of Minutes of GMS since EGMS dated December 30, 2014 up until now is available at Jtrust Bank's webiste (www.jtrustbank.co.id)
	Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	*Comply.* PT Bank JTrust Indonesia Tbk. memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor yang telah diunggah ke Situs Web J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id). Komunikasi yang dilakukan oleh Bank di antaranya melalui pelaksanaan RUPS, kegiatan perusahaan melalui *Press Release*, publikasi Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan, serta melakukan keterbukaan informasi yang akurat dan tepat waktu. J Trust Bank juga menyediakan alamat kantor pusat dan cabang, alamat *e-mail* dan nomor telepon baik dalam situs *web* maupun Laporan Tahunan, akses Media Sosial (Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube), *Call Center*, sebagai sarana bagi pemegang saham maupun investor agar dapat melakukan komunikasi dengan Bank secara mudah.

Aspek Aspect	**Prinsip** Principle	**Rekomendasi** Recommendations	**Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (*Comply or Explain*)** Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Comply or Explain)
	Principle 2: Improve the Quality of Communication between Listed Company and Shareholders or Investors	2.1 A Listed Company maintains a communication policy with shareholders or investors.	Comply. PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has a communication policy with shareholders or investors uploaded in JTrust Bank website (www.jtrustbank.co.id). The communication conducted by the Bank are among others through GMS, company's activities through Press Release, Quarterly and Annual Report publication, as well as accurate and punctual information dissemination. J Trust Bank also provides addresses of head and branch offices, e-mail, and phone number both in the website and Annual Report, access to Social Media (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube), Call Center, as media for shareholders as well as investors to communicate with the Bank easily.
		2.2. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs *Web*. 2.2 A Listed Company discloses its communication policy with shareholders or investors in the Website.	*Comply.* PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah mengungkapkan kebijakan komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor yang diunggah ke Situs *Web* J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id). Comply PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has disclosed its communication policy with shareholders or investors uploaded to JTrust Bank webiste (www.jtrustbank.co.id).
2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris. Function and Role of the Board of Commissioners	**Prinsip 3:** Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. **Principle 3:** Strengthening the Membership and Compostion of the Board of Commissioners	3.1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. 3.1 Determination of the number of members of the Board of Commissioners considering the conditions of the Listed Company	*Comply.* - Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan mempertimbangkan: • Kondisi keuangan dan kemampuan Bank. • Kebutuhan, ukuran organisasi dan kompleksitas usaha Bank. - Jumlah komposisi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: • Jumlah anggota Dewan Komisaris 4 (empat) orang (2 orang Komisaris Independen, 1 orang Komisaris Utama, dan 1 orang Komisaris) yang tidak melebihi jumlah anggota Direksi. • Anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia sebanyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang berkewarganegaraan Jepang, namun berdomisili di Jepang. • Jumlah anggota Komisaris Independen adalah 50% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris.

Aspek Aspect	**Prinsip** Principle	**Rekomendasi** Recommendations	**Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (*Comply or Explain*)** Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Comply or Explain)
			Comply. - Determination on the number of members of the Board of Commissioners considers the condition of the Public Company, and refers to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 55/POJK.03/2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks and considering: • The Bank's financial condition and ability • Demand, organization size and complexity of the Bank's business. - The composition of Board of Commissioners is as follows: • Members of the Board of Commissioners were 4 (four) people, including 2 (two) Independent Commissioners and 1 (one) President Commissioner. • Members of the Board of Commissioners who are domiciled in Indonesia are 3 (three) people, 1 (one) is a Japanese national and is domiciled in Japan. • The number of Independent Commissioners is 50% of the total number of members of the Board of Commissioners.
		3.2. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. 3.2 Determination of the composition of members of the Board of Commissioners takes into account the diversity of skills, knowledge, and experience required.	*Comply*. Penentuan komposisi 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris Bank memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sejalan dengan kriteria utama dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Comply. Determination of the composition of 4 (four) members of the Board of Commissioners of the Bank paying attention to the diversity of expertise, knowledge and experience in line with the main criteria by considering integrity, competency, professionalism and sufficient financial reputation in accordance with the fit and proper test determined by the Financial Services Authority (OJK).
	Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. **Principle 4:** Improve the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.	4.1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self -assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. 4.1 The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.	*Comply* - Pihak yang melakukan *assessment* terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah pemegang saham (*shareholder*). - Tahapan proses untuk menilai kinerja Dewan Komisaris dilakukan langsung oleh Pemegang Saham (*shareholder*) mayoritas. - Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris adalah *Key Performance Indicator (KPI)* yang disusun dan dinilai langsung oleh pemegang saham (*shareholder*) mayoritas. Comply - The party conducting assessment on the performance of the Board of Commissioners is shareholders. - Stages of the process to assess the performance of the Board of Commissioners are carried out directly by majority Shareholders. - The indicator used to assess theperformance of the Board of Commissioners is the Key Performance Indicator (KPI) which is compiled and assessed

Aspek Aspect	**Prinsip** Principle	**Rekomendasi** Recommendations	**Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (*Comply or Explain*)** Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Comply or Explain)
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. 4.2 The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed through the Annual Report of the Listed Company.	*Comply.* Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Bank. Comply Self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners are disclosed through the Bank's Annual Report.
		4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. 4.3 The Board of Commissioners has policies related to the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes.	*Comply.* Kebijakan terkait Dewan Komisaris untuk mengundurkan diri diatur dalam pasal 14.8 hingga pasal 14.12 Anggaran Dasar Perusahaan. Pengunduran diri tersebut wajib ditindaklanjuti dengan RUPS. Selain itu dalam hal terjadi pelanggaran anggota Dewan Komisaris, RUPS juga diberikan hak untuk memberhentikan Dewan Komisaris sewaktu-waktu (dalam hal ini misalnya adanya pelanggaran atau kejahatan keuangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan). Comply. Policies related to the right of members of the Board of Commissioners to resign are regulated in Articles 14.8 to 14.12 of the Company's Articles of Association. Such resignation shall be followed up by the GMS. In addition, in the event of any violation of the members of the Board of Commissioners, the GMS is also given the right to discharge the Board of Commissioners at any time (in this case, for example, financial crime committed by member of the Board of Commissioners).
		4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. 4.4 The Board of Commissioners or the Committee performing the Nomination and Remuneration functions shall establish a succession policy in the process of Nomination of members of the Board of Directors	*Comply.* Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi & Remunerasi yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun Kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi yang telah diatur dalam Piagam Komite Nominasi & Remunerasi tercantum pada tugas, tanggung jawab dan wewenang. Comply. The Board of Commissioners through the Remuneration & Nomination Committee which runs the Nomination and Remuneration function has designed succession policy in the Nomination process of members of Board of Directors as stated in the Charter of Nomination & Remuneration Committee in the task, role and authority.
3. Fungsi dan Peran Direksi. Function and Role of Directors	**Prinsip 5:** Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. **Principle 5:** Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors.	5.1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. 5.1 Determination of the number of members of the Board of Directors takes into consideration the conditions of the Listed Company and the effectiveness of decision making.	*Comply.* - Penentuan jumlah anggota Direksi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan mempertimbang-kan: • Kondisi keuangan dan kemampuan Bank. • Kebutuhan, ukuran organisasi dan kompleksitas usaha Bank. - Per 31 Desember 2019 jumlah anggota Direksi 5 (lima) orang lebih banyak daripada jumlah anggota Dewan Komisaris.

Aspek Aspect	**Prinsip** Principle	**Rekomendasi** Recommendations	**Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (*Comply or Explain*)** Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Comply or Explain)
			Comply. - Determination of the number of the Board of Directors is based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 55/POJK.03/2016 on the Implementation of Governance for Commercial Bank, and considering: • The Bank's financial condition and ability • Demand, organization size and complexity of the Bank's business - As of 31 December 2019, the number of the Board of Directors were 5 (five) people, more than the number of the member of the Board of Commissioners.
		5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. 5.2 Determination of the composition of the members of the Board of Directors takes into account the diversity, expertise, knowledge, and experience required.	*Comply.* Komposisi anggota Direksi memiliki latar belakang yang beragam atas keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan perusahaan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Comply. The composition of members of the Company's Board of Directors has diverse background for the expertise, knowledge and experience needed. It can be seen from the profile of each member of the Board of Directors. The diversity and number of the Board of Directors ares needed by the company so they can provide the best alternative solution for the Bank, in line with the demand, size and complexity of the Bank's business.
		5.3. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. 5.3 Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in accounting.	*Comply.* Direktur Keuangan Perusahaan yaitu Bapak Helmi Arief Hidayat adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan Bank Akita dan tahun 2010 menjabat sebagai kepala Divisi Keuangan Bank Nobu. Comply. The Company's Finance Director is Mr. Helmi Arief Hidayat, a Master of Business Administration of UNKRIS, who is also a financial expert with work experience since 2003-2009 as Head of Finance Division of Bank Akita and in 2010 as head of Finance Division of Nobu Bank.
	Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. **Principle 6:** Improve the Quality of Duties and Responsibilities of the Board of Directors.	6.1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi. 6.1 The Board of Directors has its own assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.	*Comply.* Setiap tahun Direksi melaporkan hasil kinerjanya untuk tahun berjalan dalam RUPS tahunan Bank. Selain itu Bank melakukan penilaian kinerja Direksi melalui pengisian kertas kerja *Self-Assessment* Penerapan Tata Kelola untuk faktor penilaian tugas dan tanggung jawab Direksi. Comply. Each year the Board of Directors reports its performance results for the current year in the Bank's annual GMS. In addition, the Bank conducts a performance assessment of the Board of Directors through the completion of the Self-Assessment Working Paper on the Implementation of Good Corporate Governance for the assessment of the duties and responsibilities of the Board of Directors.

Aspek Aspect	**Prinsip** Principle	**Rekomendasi** Recommendations	**Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (*Comply or Explain*)** Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Comply or Explain)
		6.2. Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. 6.2 The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed through the Public Company's annual report.	*Comply.* Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk Penilaian realisasi kinerja Direksi pada tahun berjalan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi Bank. Comply. Self-assessment policy for the evaluation of the performance of the Board of Directors in the current year is disclosed in the Bank's Integrated Annual Report.
		6.3. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. 6.3 The Board of Directors has a policy related to the resignation of members of the Board of Directors if involved in financial crimes.	*Comply.* Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Comply. The Board of Directors has a policy related to the resignation of members of the Board of Directors if involved in financial crimes.
4. Partisipasi Pemangku Kepentingan. Participation of Stakeholders	**Prinsip 7:** Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. **Principle 7:** Improve the Aspects of Corporate Governance through Stakeholder Participation.	7.1. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. 7.1 Public Company has a policy to prevent insider trading.	*Comply.* Kebijakan mencegah *insider trading* diatur dalam Etika Korporasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk., dan SOP tentang Kode Etik Pasar yang mengatur larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (*Insider Dealing*) dalam transaksi pribadi instrumen pasar keuangan, termasuk surat berharga Bank oleh karyawan dan manajemen sebagai pelaku pasar. Comply. The policy to prevent insider trading is set in the Corporate Ethics of PT Bank JTrust Indonesia Tbk., and SOP on Market Code of Ethics regulating the prohibition in using Insider Dealing on private transaction for financial market, including the Bank's bonds by employees and management as market players.
		7.2. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti fraud*. 7.2 Public Company has anticorruption and anti-fraud policies.	*Comply*. Bank telah memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti fraud* yang dituangkan dalam Pedoman Strategi *Anti Fraud* yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. tanggal 27 Agustus 2019 pada persetujuan dokumen ketentuan intern Nomor 109746 dalam aplikasi *Garoon System* tentang Pedoman Strategi *Anti Fraud* 2019. Comply. The Bank has an anti-corruption and anti-fraud policy as contained in the Guidelines for Anti-Fraud Strategy established by approval of the Board of Directors of PT Bank Jtrust Indonesia Tbk dated August 27, 2019, of internal policy document Number 109746 in the Garoon System application on Guidelines for Anti-Fraud Strategy 2019.
		7.3. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*. 7.3 A Listed Company has a policy on the selection and upgrading of suppliers or vendors.	*Comply*. Perusahaan memiliki kebijakan tentang seleksi pemasok atau *vendor* yang diungkapkan dalam bagian kebijakan dan seleksi *vendor* pada laporan tahunan ini melalui unit kerja *procurement*. Comply. The company has a policy regarding the selection of suppliers or vendors disclosed in the vendor's policy and selection section on this annual report through the procurement work unit.

Aspek Aspect	**Prinsip** Principle	**Rekomendasi** Recommendations	**Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (*Comply or Explain*)** Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Comply or Explain)
		7.4. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur. 7.4 A Listed Company has a policy to meet the rights of creditors.	Perusahaan menerapkan dan menghargai hak-hak kreditur dengan memperlakukan persamaan (*equal treatment*) kepada seluruh kreditur, pelaksanaan hak dan kewajiban tepat waktu, dan tidak ada informasi perusahaan yang disembunyikan (*disclose*). The company applies and respects the rights of creditors by making equal treatment to all creditors, implementing rights and obligations on time, and no company information is hidden (disclose).
		7.5. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. 7.5 Listed Company has a whistleblowing system policy.	*Comply*. Perusahaan sudah memiliki kebijakan *whistleblowing* sebagaimana diungkapkan pada bagian Anti Fraud dan Anti Korupsi. Comply. The company has a whistleblowing policy as disclosed in the Anti-Fraud and Anti-Corruption section.
		7.6. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. 7.6 Public Company has a long term incentive policy for the Board of Directors and employees.	*Comply*. Bank telah membuat kebijakan terkait pemberian insentif jangka panjang berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 02.03/S.Kep-Dir-HCD/ JTRUST/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Penetapan *Material Risk Taker* (MRT), di antaranya mengatur para pihak yang ditetapkan sebagai MRT yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Executive Vice President (EVP). Bank masih mengkaji kebijakan terkait dengan kebijakan pemberian insentif jangka panjang bagi karyawan, dan akan dibuatkan kebijakannya dengan mempertimbang-kan Rencana Bisnis Bank di tahun 2019. Comply. The Bank has made a policy related to providing long-term incentives based on the Decree of the Board of Directors No. 02.03/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/X/2017 dated October 02, 2017, concerning the Determination of Material Risk Taker (MRT), among others regulating the parties designated as MRT, namely the Board of Commissioners, Board of Directors and Executive Vice President (EVP). The Bank is still reviewing policies related to long-term incentives policy for employees, and such policy will be made by considering the Business Plan of the Bank in 2019.

Aspek Aspect	**Prinsip** Principle	**Rekomendasi** Recommendations	**Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (*Comply or Explain*)** Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Comply or Explain)
5. Keterbukaan Informasi. Information Disclosure	**Prinsip 8:** Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. **Principle 8:** Improve the Implementation of Information Disclosure.	8.1. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs *Web* sebagai media keterbukaan informasi. 8.1 Public Company utilizes the extensive use of information technology besides the Website as a tool for information disclosure.	*Comply*. Selain melalui Situs *Web* J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id), Perseroan juga memanfa-atkan penggunaan teknologi informasi lainnya seperti media cetak dan *platform* media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube dan LinkedIn, dan lain-lain sebagai saluran media keterbukaan informasi Perseroan. Comply. In addition to Website, the Company also uses social media such as Facebook, Instagram, YouTube and LinkedIn as a media for the Company's information disclosure.
		8.2. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. 8.2 Public Company's Annual Report discloses the ultimate beneficial owner in its shareholding structure at least 5% (five per cent), besides disclosing the ultimate beneficial owner in the share ownership go Public Company through major shareholders and controllers.	*Comply*. Komposisi pemegang saham publik telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. Comply. The composition of public shareholders has been disclosed in the Annual Report of the Company.

Bank berupaya untuk menyelaraskan tiga aspek keberlanjutan yang umumnya disebut dengan *triple bottom line*, yang terdiri dari *profit* (ekonomi), *people* (sosial), dan *planet* (lingkungan) menjadi landasan komitmen berkelanjutan yang akan diterapkan Bank JTrust Indonesia

The Bank works to harmonize the three aspects of sustainability commonly referred to as the triple bottom line, profit (economy), people (social), and planet (environment) as the basis for sustainable commitment to be applied by the Bank JTrust Indonesia

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN

Integrated and Sustainable Corporate Social Responsibility

MEMBANGUN BUDAYA KEBERLANJUTAN J TRUST BANK

Build Sustainability Culture of J Trust Bank

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (J Trust Bank) melaksanakan kegiatan sosial sebagai bentuk implementasi dari program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR). Bank yakin upaya ini nantinya dapat menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dan kondusif, serta mampu menanggapi berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan hubungan yang saling bermanfaat dan menguntungkan antara J Trust Bank dengan masyarakat luas.

J Trust Bank dalam melaksanakan kegiatan operasional senantiasa berusaha menciptakan suasana yang lebih harmonis dengan masyarakat di sekitar khususnya dan masyarakat luas pada umumnya sehingga diharapkan dapat menjadi perusahaan yang terus diminati, serta disukai oleh masyarakat. Terciptanya lingkungan dalam masyarakat yang aman, nyaman, dan dinamis diyakini sebagai kondisi ideal bagi perkembangan dan kelangsungan dunia usaha di manapun.

Dilandasi suatu pemikiran bahwa Perusahaan adalah bagian dari suatu masyarakat di sekitarnya, maka J Trust Bank menyadari bahwa sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial untuk mengembangkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat di sekitarnya, melalui program "J Trust Peduli" yang fokus membantu masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, lingkungan hidup, dan tanggap darurat terhadap setiap bencana alam.

Bank juga membangun sinergi dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi CSR yang sesuai dengan Visi dan Misi Keuangan Berkelanjutan. Sinergi terwujud melalui kerja sama dalam pelaksanakan kegiatan CSR sehingga kegiatan CSR dapat lebih efektif, memiliki jaringan yang lebih luas, serta menimbulkan dampak positif yang lebih kuat. [103-1][103-2][103-3]

Di samping itu, selaras dengan regulasi terkait implementasi keuangan berkelanjutan, J Trust Bank meyakini bahwa penerapannya dapat membuka peluang bisnis yang besar dan berpotensi menumbuhkan kinerja Bank secara berkesinambungan. Oleh karena itu, Bank terus berupaya untuk mengintegrasikan penerapan keuangan berkelanjutan dengan strategi usaha Bank. Melalui inisiatif ini, diharapkan dapat memanfaatkan peluang dan prospek usaha yang ada.

Sebagai langkah awal, Bank melakukan sosialisasi budaya keberlanjutan secara internal kebijakan Bank untuk membangun 5 (lima) Pilar CSR J Trust Bank. Dengan semangat ini, Bank mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk turut serta mendukung semua upaya ini sebagai langkah wujud pembangunan budaya keberlanjutan di J Trust Bank.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (J Trust Bank) does social activities as a form of its corporate social responsibility (CSR) program implementation. The Bank believes that this effort will help to create a better and more conducive environment for the community, and can respond to changes in people's lives that will eventually shape a reciprocal and mutually benefiting relation between J Trust Bank and the wider community.

In running operations, J Trust Bank always seeks to create a more harmonious relationship with the surrounding community in particular and the wider community in general with an aim of becoming a company that remains appealing and preferable to the people. Wherever it is, a safe, comfortable and dynamic society shaped in a community is always thought of as a fertile ground for business expansion and sustainability.

Having the idea of being a part of the surrounding community, J Trust Bank is aware of the inherent social responsibility that it is bearing to develop and empower the lives of people living nearby, through the "J Trust Care" program, which lays a focus on giving assistance to the community in the fields of education, health, social, religious, environment and, post-disaster emergency response.

The Bank is also building synergy with internal and external parties to realize CSR policies and strategies that are consistent with the Vision and Mission of Sustainable Finance. Synergy is realized through collaborated implementation of CSR programs to make them more effective, have broader network, and able to give stronger positive impacts. [103-1][103-2][103-3]

In addition, J Trust believes that if implemented in compliance with relevant regulations, sustainable finance will offer enormous opportunities and allow the Bank to deliver stronger performance in a sustainable manner. Therefore, the Bank has been very consistent in integrating sustainable finance into its business strategy. It is expected that with this initiative, the Bank will benefit from every emerging business opportunity.

As a first step, the Bank internally promotes a culture of sustainability in the Bank's policy to build 5 (five) Pillars of J Trust Bank CSR. On this spirit, the Bank is engaging all stakeholders in supporting all these efforts as a step towards building a culture of sustainability at J Trust Bank.

5 (LIMA) PILAR CSR
5 (FIVE) CSR PILLARS
J TRUST BANK

Bank menjalankan berbagai upaya dengan memerhatikan 5 (lima) pilar *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai prinsip dan dasar dalam pelaksanaan kegiatan terkait di lapangan. Kelima pilar CSR J Trust Bank adalah sebagai berikut: [103-2]

The Bank makes various efforts with due attention to the 5 (five) pillars of Corporate Social Responsibility (CSR) as a principle and basis for the implementation of related field activities. J Trust Bank's five CSR pillars are as follows: [103-2]

Building Human Capital

Secara internal, Bank berupaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang andal sedangkan secara eksternal, Bank senantiasa berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat, utamanya melalui *Community Development*.

Internally, the Bank strives to produce reliable human resources while externally, the Bank empowers the people, primarily through Community Development.

Strengthening Economies

Bank berupaya mendapatkan laba dengan memerhatikan kepentingan dan kesejahteraan ekonomi komunitas, khususnya di lingkungan sekitar Perusahaan beroperasi.

The Bank strives to make a profit with due attention to the interests and economic prosperity of the community, especially in its surrounding environment.

Assessing Social Tension

Bank senantiasa akan menjaga keharmonisan dengan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar supaya tidak menimbulkan konflik.

The bank will always maintain harmony with the community, especially the surrounding community to prevent conflicts.

Encouraging Good Governance

Dalam menjalankan bisnisnya, Bank senantiasa menjalankan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

In running the business, the Bank continues to carry out Good Corporate Governance (GCG) practices properly and in accordance with applicable regulations.

Protecting these Environment

Bank senantiasa berupaya menjaga kelestarian lingkungan dan alam sekitarnya guna terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak-cucu kelak.

The Bank always strives to preserve the environment and the natural surroundings in order to realize a livable earth for the generations to come.

LINGKUNGAN HIDUP

The Environment

Komitmen dan Kepedulian terhadap LINGKUNGAN

Commitment and Concern towards the Environment

Bank berkomitmen untuk turut menjaga kelestarian lingkungan dalam menjalankan kegiatan operasional bisnis dalam industri perbankan dengan meminimalkan dampak negatif atas kegiatan bisnis. Pada 5 pilar *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank, telah tertuang komitmen dan kepedulian Bank terhadap lingkungan hidup.

The Bank is committed to helping to preserve the environment while running business operations in banking with initiatives to minimize the negative impacts of operations. Contained in the 5 pillars of the Bank's Corporate Social Responsibility (CSR), are the Bank's commitment and concern towards the environment.

Target/Rencana Kerja pada Tahun Buku yang Ditetapkan Manajemen

Targets/Work Plans for the Fiscal Year as Has Been Defined by Management

J Trust Bank telah menetapkan target/rencana kegiatan CSR tahun 2019 untuk melaksanakan 5 pilar kegiatan CSR. Selain itu, Bank merencanakan untuk memenuhi beberapa target lainnya, salah satunya pada bidang lingkungan hidup. Dalam bidang lingkungan hidup, Bank menetapkan target untuk melakukan penghematan penggunaan listrik, air, dan perlengkapan kantor, serta menghemat biaya lainnya.

J Trust Bank had set a target/plan for CSR activities in 2019 to implement the 5 pillars of CSR activities. In addition, the Bank plans to meet several other targets, including on the environmental front. On this particular front, the Bank has set a target to reduce electricity and water consumption and office equipment cost while saving on other expenses.

Jenis Program/Kegiatan yang Dilakukan dan Dampak Kuantitatif atas Kegiatan tersebut; dan Terkait Program Lingkungan Hidup yang Berhubungan dengan Kegiatan Operasional Perusahaan

Types of Programs/Activities Carried Out and Quantitative Impacts on the Activities; and related to the Environmental Program Related to the Company's Operational Activities

Dalam rangka melestarikan lingkungan, J Trust Bank berupaya mewujudkan program *green banking* sebagai bentuk nyata penerapan *green economy* dalam dunia perbankan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Salah satu penerapan intinya, yaitu melalui penyaluran pembiayaan ramah lingkungan dan kegiatan operasional ramah lingkungan (*green campaign*).

Di samping itu, Bank telah memiliki dan berupaya untuk menjalankan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Salah satu prioritas yang ditetapkan dalam RAKB tersebut, antara lain menjalankan peningkatan kompetensi karyawan terkait pemahaman Keuangan Berkelanjutan dan keahlian dalam menganalisa pengelolaan lingkungan. Bank memandang sangat perlu dilakukan peningkatan kompetensi karyawan, utamanya yang terkait langsung dengan Keuangan Berkelanjutan, karena karyawan merupakan aset utama Bank dan merupakan pelaku utama dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan. Aktivitas yang akan dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan/*workshop* Keuangan Berkelanjutan dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) bagi pejabat dan petugas Bank, utamanya yang terkait langsung dengan Keuangan Berkelanjutan.

To help preserve the environment, J Trust Bank seeks to realize the green banking program as a concrete way to implement a green economy in the banking industry in accordance with the regulations of Financial Services Authority (OJK) and the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). One of the core implementations is through the distribution of ecofriendly financing and green campaign.

In addition, the Bank already has and seeks to implement a Sustainable Financial Action Plan (RAKB). One of the priorities stipulated in in the RAKB is to increase employee competencies with regards to comprehending Sustainable Finance and building expertise in environmental management analysis. The Bank considers it necessary to improve employee competencies, especially those directly related to Sustainable Finance since employees are the Bank's main assets and the key executors of Sustainable Finance. Implemented programs include training/workshops on Sustainable Finance and Environmental Impact Analysis (EIA) for Bank executives and officers, especially those directly related to Sustainable Finance.

LINGKUNGAN
HIDUP

The Environment

Dampak Positif dan Dampak Negatif terhadap Lingkungan Hidup Termasuk Keanekaragaman Hayati

Positive and Negative Impacts on the Environment including on Biodiversity

Meskipun, J Trust Bank menjalankan kegiatan usaha dalam industri perbankan tidak bersentuhan langsung dengan lingkungan, Bank menyadari bahwa secara tidak langsung dalam pemberian kredit kepada korporasi asing dapat menjadikan Bank secara tidak langsung turut memiliki dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan, termasuk keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pada masa mendatang, Bank akan menjalankan kebijakan memberikan kredit kepada perusahaan yang berwawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) yang sejalan dengan prinsip keuangan berkelanjutan, serta lebih ramah lingkungan.

While its business operations in the banking industry have arguably no direct contact with the environment, J Trust Bank recognizes the indirect positive or negative impacts that it may cause on the environment, including on biodiversity, when the Bank gives loans to foreign corporations. Therefore, as a future plan, the Bank will implement a policy to provide loans to companies who are more ecofriendly and proven to have applied environmental, social and governance (LST) principles that are in consistent with the principles of sustainable finance.

Penyaluran Kredit Ramah Lingkungan

[FS8] [FS10][FS11]

Ecofriendly Loan Distribution

Sejalan dengan RAKB yang dimiliki Bank, dalam memberikan kredit ramah lingkungan, J Trust Bank berupaya untuk menerapkan kebijakan Peraturan Pemerintah. Bank merencanakan untuk menyalurkan dana dalam bentuk kredit sesuai target yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke sektor ekonomi yang sejalan dengan prinsip Keuangan Berkelanjutan dengan memperhitungkan aspek sosial dan lingkungan hidup. Selain itu, melalui Divisi Bisnis, Bank juga bertanggung jawab untuk menjaga Kualitas Aset kredit Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan target yang telah ditetapkan (<5%).

Consistent with its RAKB, in providing ecofriendly loan, J Trust Bank strives to implement Government Regulation policies. The Bank plans to distribute funds in the form of loans to economic sector in accordance with the targets that have been set for 5 (five) years in line with the principles of Sustainable Finance with due consideration on social and environmental aspects. In addition, through its Business Division, the Bank is also responsible for maintaining the Quality of Sustainable Finance Productive Assets in accordance with the predetermined targets (<5%).

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

Reporting Mechanism for Environmental Issues

Proses pengaduan dan penyelesaian masalah lingkungan, dilaksanakan satu pintu pada mekanisme dan tata cara pengaduan yang dimiliki Bank. Bank menklasifikasikan pengaduan masalah lingkungan sebagai pengaduan non transaksional, yaitu pengaduan yang tidak berdampak pada kerugian secara finansial. Bank menyediakan saran pengaduan secara tertulis, yaitu pengaduan yang disampaikan melalui sarana/media tertulis seperti surat yang dikirim ke kantor J Trust Bank melalui pos atau melalui email ke customercare@jtrustbank.co.id. Bank juga memastikan kerahasiaan pengaduan dan penyelesaian pengaduan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Environmental issue reporting and settling is a one-channel process that is flowed through the Bank's reporting mechanism and procedure. The Bank classifies environmental issues reporting as non-transactional, meaning that it causes no financial loss. The Bank facilitates written complaint mechanism where complaints can be submitted in a written form i.e. letter sent by mail to J Trust Bank office or by email to customercare@jtrustbank.co.id. The Bank also ensures the confidentiality of complaints and their resolutions pursuant to all applicable laws.

Sertifikasi dan Penghargaan yang Diraih di Bidang Lingkungan Hidup

Certifications and Awards Received in the Field of Environment

Hingga akhir tahun 2019, Bank belum menerima sertifikasi dan penghargaan yang terkait dengan bidang lingkungan hidup.

Until the end of 2019, the Bank had not received any certification nor awards on the environmental field.

PRAKTIK KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Employment, Health and Safety Practices

Komitmen Ketenagakerjaan dan K3

Commitment to Employment and OHS

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Bank berkomitmen menempatkan karyawan sebagai prioritas utama yang harus diperhatikan. Bank telah mengatur kebijakan terkait praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup karyawan.

In running its operations, the Bank is committed to placing employees as its top priority. The Bank has formulated policies for Employment, Health and Safety (OHS) practices to increase employee productivity and improve their quality of life.

Target/Rencana Kerja pada Tahun Buku yang Ditetapkan Manajemen

Targets/ Work Plans for the Fiscal Year as Has Been Set by Management

Dalam bidang ketenagakerjaan, Bank merencanakan kegiatan CSR dengan melaksanakan pengelolaan SDM yang berlandaskan kesetaraan dan kesempatan kerja, serta implementasi hubungan industrial yang baik. Sementara, di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, Bank melaksanakan pemberian fasilitas kesehatan bagi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memadai guna mendukung produktivitas karyawan secara berkelanjutan.

In the field of employment, the Bank plans CSR activities by running an equality- and employment opportunity-based HR management and by building healthier industrial relations. Meanwhile, in the field of occupational health and safety, the Bank provides sufficient health facilities for the employees in accordance with applicable regulations and to support employee productivity in a sustainable manner.

Kebijakan yang Ditetapkan Manajemen

Management Defined Policy

Dalam bidang ketenagakerjaan, Bank senantiasa memberikan lingkungan kerja yang layak, aman, dan nyaman bagi karyawannya dengan menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara Bank dengan seluruh karyawan. Upaya ini sejalan dengan tujuan jangka panjang J Trust Bank pada pertumbuhan usaha Bank yang berkelanjutan.

Dalam mewujudkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), J Trust Bank memastikan seluruh karyawan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama terhadap akses K3. J Trust Bank berkomitmen untuk menerapkan kebijakan terkait keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi penanganan penyakit, kompensasi kecelakaan kerja, serta memberikan bantuan terhadap karyawan yang mengalami musibah. [403-2]

In the field of employment, the Bank continues to provide a decent, safe and comfortable work environment for its employees by creating a harmonious working relationship between the Bank and the employees. This effort is in line with J Trust Bank's long-term goals for a sustainable growth of the Bank's business.

In realizing Occupational Health and Safety (K3), J Trust Bank ensures that all employees are given equal rights and opportunities to access OHS. J Trust Bank is committed to implementing policies related to occupational health and safety which include handling diseases, compensation for work accidents, and assistance to employees who are going through hardships. [403-2]

Jenis Kegiatan Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang Dilakukan serta Dampak Kuantitatif atas Kegiatan Tersebut

Types of Employment Activities and Occupational Health and Safety undertaken and Quantitative Impacts on the Activities

1. Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja [FS4]

Gender Equality and Job Opportunities

Praktik ketenagakerjaan yang baik merupakan salah satu prioritas utama Bank. Kesejahteraan dalam bekerja dan hubungan kerja yang harmonis antara Bank dan karyawan merupakan prinsip utama dalam mencapai visi, misi, dan pertumbuhan usaha Bank yang berkelanjutan. Dalam mempekerjakan karyawan, Bank tidak memandang latar belakang gender, usia, suku, agama, ras maupun hal-hal lain yang bersifat diskriminatif.

Bank juga mewujudkan komitmen kesetaraan tidak hanya melalui hal-hal di atas tetapi juga melalui kesempatan bagi kandidat terbaik kaum penyandang disabilitas untuk bekerja dan berkarya. Pada tahun 2019, karyawan penyandang disabilitas Bank tercatat sebanyak satu (1) karyawan. Berdasarkan hal ini, J Trust Bank menyimpulkan bahwa di lingkungan Bank setiap karyawan memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat atau jabatan yang lebih tinggi. [FS14]

Healthy employment practice is one of the Bank's top priorities. Prosperity at work and harmonious work relation between the Bank and employees are the main principles applied to achieve the Bank's vision, mission and sustainable growth. Employees are hired regardless of their gender, age, ethnicity, religious line, race or other discriminatory backgrounds.

The Bank also realizes equality commitments not only through the above methods but also through opportunities that are given to selected candidates with disabilities to have a job and make achievements. In 2019, the Bank employed one (1) employee who had disabilities. Based on this, J Trust Bank concludes that at the Bank every employee has the opportunity to be promoted to higher levels or positions. [FS14]

PRAKTIK
KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA

Employment, Health and Safety Practices

2. Sarana dan Keselamatan Kerja [FS4]
Work Facilities and Safety [FS4]

Sebagai bentuk komitmen Bank terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) karyawannya, kebijakan mengenai K3 tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Bank dengan karyawan. Bank menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen Bank dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kebijakan dan sarana K3 yang telah diterapkan di lingkungan Bank antara lain:

- Karyawan mengetahui prosedur menyelamatkan diri dalam keadaan darurat.
- Adanya informasi nomor telepon penting seperti pemadam kebakaran, dan kepolisian.
- Kewajiban untuk menggunakan kartu identitas selama di lingkungan kerja.
- Kewajiban identifikasi tamu tidak dikenal yang berada dalam lokasi Bank.
- Penyediaan fasilitas kesehatan asuransi jiwa dan fasilitas pendukung kerja karyawan.
- Pemeriksaan kesehatan badan dan kemampuan fisik karyawan, salah satunya melalui *medical check-up* secara rutin.

As a form of the Bank's commitment to the Occupational Health and Safety (K3) of its employees, policies regarding OHS have been specified in the Bank's Joint Work Agreement (PKB) with employees. The Bank implements a OHS management system that is integrated with the Bank's management system and is run in accordance with all applicable laws and regulations. The OHS policies and facilities that have been put in place at the Bank include:

- Employees know the evacuation procedure during emergency.
- Information about important telephone numbers i.e. the fire department and local police is available.
- Obligation to wear ID badge while at work.
- Obligation to identify unfamiliar guests in the Bank's premises.
- Provision of life insurance, health facilities, and employee work support facilities.
- Medical and physical tests for employees, which include routine medical check-ups.

3. Tingkat Kecelakaan Kerja [403-2]
Work Accident Rate [403-2]

Bank selalu berkomitmen untuk menerapkan kebijakan terkait kesehatan dan keselamatan kerja dan memberikan fasilitas terbaik bagi karyawan. Atas komitmen ini, maka sepanjang tahun 2019 tidak terjadi kecelakaan kerja fatal di seluruh jaringan kantor Bank.

The Bank is always committed to implementing policies related to occupational health and safety and providing the best facilities for the employees. On this commitment, no fatal work accidents happened at the Bank's office network throughout 2019.

4. Tingkat Perpindahan (*Turnover*) Karyawan [401-1]
Employee Turnover Rate [401-1]

Pada tahun 2019, Perseroan memiliki karyawan sebesar 800 karyawan, turun dibandingkan dengan tahun 2018, sebanyak 947 karyawan. Bank terus berupaya untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas dengan melakukan promosi dan mutasi untuk menggantikan posisi karyawan yang keluar. Lebih lanjut, Bank juga senantiasa menjaga komposisi karyawan agar tetap berimbang dengan mempertimbangkan kesetaraan dan kesempatan kerja.

In 2019, the Company had a total of 800 headcounts, a decrease from 947 in 2019. The Bank continuously strives to retain qualified employees through promotions and transfers to fill every position the becomes open when an employee resigns. Furthermore, the Bank also maintains a balanced composition of employees with due consideration on equality and employment opportunities.

5. Pendidikan dan/atau Pelatihan [404-2]
Education and/or Training [404-2]

Bank memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan karir mereka masing-masing. Selama tahun 2019, Bank menyelenggarakan berbagai program pendidikan dengan rata-rata waktu pelatihan sebanyak 21 jam per karyawan. Total dana pengembangan karyawan yang dikeluarkan Bank pada tahun 2019 mencapai Rp1,95 miliar.

The Bank provides equal opportunities for all employees to hone their potentials and enhance their ability to develop their careers. During 2019, the Bank organized various educational programs with an average training time of 21 hours per employee. The Bank's total spending for employee development in 2019 reached IDR1.95 billion.

6. Remunerasi
Remuneration

J Trust Bank memastikan pemberian remunerasi kepada karyawan telah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditentukan Pemerintah berdasarkan wilayah kerja masing-masing area.

J Trust Bank ensures that its employee remuneration does comply with applicable laws and regulations, such as the Provincial Minimum Wage (UMP) set by the Government depending on the region of each working area.

PRAKTIK KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA [403-1]

Employment, Health and Safety Practices

7. Penilaian Kinerja Karyawan [404-3]

Employee Performance Rating

J Trust Bank memberikan apresiasi kepada karyawan berprestasi yang diberikan tanpa membedakan gender, usia, suku, agama, ras maupun hal-hal lain yang bersifat diskriminatif. Apresiasi diberikan dengan promosi atau pengembangan karir. Penilaian kinerja dilakukan dengan menerapkan pendekatan *Key Performance Indicators* (KPI) yang disusun berdasarkan target kinerja Bank, target kinerja unit terkait, dan target kinerja individu yang diselaraskan dengan tujuan dan strategi Bank.

J Trust Bank gives appreciation to high achievers amongst its employees without prejudice to gender, age, ethnicity, religion, race or other discriminatory matters whatsoever. Appreciations include promotions or career development. Employee performance is appraised with Key Performance Indicators (KPI) that has been prepared based on the Bank's performance targets, relevant unit performance targets, and individual targets that are aligned with the Bank's goals and strategies.

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

Employment Complaints Mechanism

Mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan dilakukan dengan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Dalam sistem tersebut, Bank menampung pelaporan pelanggaran dari pihak eksternal maupun internal Bank, termasuk masalah ketenagakerjaan. Seluruh laporan pengaduan yang masuk akan diterima Bank, ditindaklanjuti dengan adil dan independen. Mekanisme pelaksanaan *whistleblowing system* Bank diuangkapkan pada bagian Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan 2019 ini. Selama tahun 2019, J Trust Bank tidak menerima laporan pengaduan dalam masalah ketenagakerjaan.

Employment complaints mechanism is exercised through a whistleblowing system. In this system, the Bank accommodates reports of violations from external and internal parties, including on employment issues. The Bank will receive all incoming reports and follow them up fairly and independently. The mechanism for implementing the Bank's whistleblowing system is disclosed in the Corporate Governance section of this 2019 Sustainability Report. During 2019, J Trust Bank received no complaint nor violation report for employment issues.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP NASABAH

Responsibility to Customers

Komitmen dan KEBIJAKAN

Commitment and Policy

Bank berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan CSR tanggung jawab terhadap nasabah dengan menjalankan kebijakan internal dan pemenuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan terkait. Sebagai bagian dari komitmen, Bank juga memastikan kualitas layanan perbankan J Trust Bank senatiasa diberikan secara prima serta memastikan akan menangani setiap keluhan yang disampaikan nasabah kepada Bank.

The Bank is committed to responsible CSR activities for the customers by exercising internal policies and remaining in compliance with relevant laws and regulations. As part of the commitment, J Trust Bank also ensures that it always offers excellent banking services and that it will treat every customer complaint it receives with care.

Target/Rencana Kerja pada Tahun Buku yang Ditetapkan Manajemen

Work Targets/Plans for the Fiscal Year Defined by Management

Dalam bidang tanggung jawab kepada nasabah, J Trust Bank menargetkan untuk terus melakukan perbaikan dan pemeliharaan pelayanan perbankan guna menjaga kepercayaan seluruh nasabah.

In the field responsibility to customers, J Trust Bank has set a target to continue to maintain and improve banking services in order to keep the trust of all customers.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP

NASABAH

Responsibility to Customers

Jenis Kegiatan yang Dilakukan dan Dampak Kuantitatif atas Kegiatan Tersebut

Types of Activities Carried Out and Quantitative Impacts on the Activities

1. Perlindungan Informasi untuk Nasabah [103-1] [103-2][103-3]
Protection of Information for Customers [103-1] [103-2][103-3]

Bagi J Trust Bank, informasi nasabah merupakan bentuk kerahasiaan yang tidak dapat dibagikan kepada pihak lain, kecuali sebagaimana diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bank berkomitmen menjaga privasi, informasi dan data seluruh nasabah selaras dengan peraturan yang berlaku.

Menjaga kerahasiaan data dan informasi nasabah merupakan bentuk kepercayaan yang akan mempengaruhi reputasi Bank. Selama tahun 2019, tidak terdapat keluhan yang berdampak material terkait pelanggaran kerahasiaan nasabah yang melibatkan organisasi lain dan badan regulator. [418-1]

For J Trust Bank, customer information is strictly confidential and a privacy that cannot be shared with other parties, except for cases regulated under applicable laws. The Bank is committed to keeping the privacy, information and data of all customers in line with applicable regulations.

Keeping the confidentiality of customer data and information is a form of trust that will affect the Bank's reputation. During 2019, the Bank received no complaint on breaches of customer confidentiality with potential material impact that involved other organizations and regulatory bodies. [418-1]

2. Inovasi dan Pengembangan Produk [FS15]
Product Innovation and Development [FS15]

Bank terus mengembangkan produk-produk berbasis digital guna melengkapi layanan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Perkembangan masyarakat digital harus diimbangi dengan perkembangan teknologi perbankan yang berperan penting dalam kehidupan sosial ekonomi. Selain itu, digitalisasi juga secara tidak langsung mendukung implementasi keuangan berkelanjutan karena dapat mengurangi pengeluaran emisi melalui penghematan penggunaan kertas, dan menghemat energi melalui pengurangan pemakaian transportasi. [103-1][103-2][103-3]

Bank juga terus berupaya untuk mengintegrasikan strategi usaha Bank dengan implementasi keuangan berkelanjutan, yaitu dengan meningkatkan transaksi elektronik. Evaluasi pengembangan teknologi dilakukan secara berkala dan setiap saat diperlukan. Sepanjang tahun 2019, Bank melakukan inovasi dan pengembangan produk serta jasa yang ditawarkan dengan meluncurkan fitur *internet banking* J TRUST NET Individual dan *mobile version* J TRUST MOBILE pada 21 Agustus 2019.

The Bank continues to develop digital-based products as complementary services in order to meet market demands. The Bank must respond to the current digital society development with the development of banking technology that plays an important role in socio-economic life. In addition, digitalization also gives indirect supports to the implementation of sustainable finance since it can reduce emission through paper and energy saving with reduced frequency of transportation. [103-1][103-2][103-3]

The Bank also continues to integrate the Bank's business strategy with sustainable finance implementation, by encouraging more electronic transactions. Technology development is evaluated regularly and at any time deemed necessary. Throughout 2019, the Bank innovated and developed the products and services offered by launching the J TRUST NET Individual internet banking feature and the J TRUST MOBILE mobile version on August 21, 2019.

2. Inovasi dan Pengembangan Produk [FS15] (lanjutan)
Product Innovation and Development [FS15] (continued)

J TRUST NET Individual merupakan layanan internet banking yang dapat diakses oleh nasabah dengan menggunakan semua jenis *internet browser*. Adapun, J Trust Mobile adalah layanan *internet banking mobile version* yang dapat diakses menggunakan aplikasi khusus yang tersedia dalam Google Play dan App Store.

Keunikan layanan J Trust Net Individual dan J TRUST MOBILE adalah nasabah J Trust Bank dapat mengakses kedua layanan tersebut menggunakan satu *user* ID di mana pun dan kapan pun. Nasabah dapat melakukan cek saldo, transfer, bayar tagihan, isi pulsa, Modul Penerimaan Negara (MPN), dan *top up* berbagai dompet digital seperti OVO, Gopay, dan LinkAja melalui kedua layanan tersebut.

J TRUST NET Individual is an internet banking service that can be accessed by customers using all types of internet browsers. Meanwhile, J Trust Mobile is a mobile internet banking service version that can be accessed using a special app available in Google Play and the App Store.

One feature that makes J Trust Net Individual and J TRUST MOBILE unique is that J Trust Bank customers can access both services using one user ID from wherever and whenever they are. Customers can check balances, make money transfers, pay bills, top up, State Revenue Module (MPN), and top up various digital wallets such as OVO, Gopay, and LinkAja through both services.

3. Tanggung Jawab dan Evaluasi atas Produk
Responsibility and Evaluation on Products

Bank secara berkala melakukan evaluasi atas produk dan jasa yang dimiliki termasuk dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan, proses distribusi, mitigasi, jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya. Hasil evaluasi atas produk dan jasa Bank sebagai berikut:

1. Evaluasi Produk dilakukan dengan melihat pertumbuhan produk setiap tahunnya.
2. Dari komposisi dana pihak ketiga (DPK) maka dapat dilihat bahwa perkembangan CASA pada DPK J Trust Bank masih belum menggembirakan dari waktu ke waktu. Jika dilihat dari komposisi CASA terhadap DPK berturut-turut tahun 2107 meraih 13,19%, tahun 2018 meraih 11,90% dan tahun 2019 meraih 13,87% sehingga terlihat bahwa DPK J Trust Bank didominasi oleh dana-dana mahal yaitu deposito lebih dari 85%.
3. Sebagai tindak lanjut, maka program –program yang dibuat mengarah pada pertumbuhan CASA seperti halnya tabungan berhadiah, deposito *bundling* tabungan dan tabungan suka-suka. Diharapkan melalui program-program dapat meningkatkan CASA melalui pertumbuhan jumlah nasabah dan dana pada tabungan.

The Bank makes periodic evaluations of its products and services including the positive and negative impacts they may cause, their distribution process, mitigation, how many products withdrawn and why. The results of evaluation of the Bank's products and services are as follows:

1. Products are evaluated on their annual growths.
2. From the composition of third party funds (DPK), it can be seen that the development of CASA in the J Trust Bank DPK has not been too encouraging. When analyzed, the composition of CASA to deposits in 2107 reached 13.19%, 11.90% in 2018 and 13.87% in 2019, showing that J Trust Bank third party fund has been dominated by expensive funds namely time deposits that account for more than 85 %.
3. As a follow-up, the implemented programs are directed at growing CASA for instance savings with prizes, bundling deposits savings and Suka Suka savings. It is expected that these programs can increase CASA through growth in the customer number and funds in savings.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP

NASABAH

Responsibility to Customers

4. Pusat Pengaduan Konsumen
Consumer Complaints Center

Sebagaimana Peraturan Bank Indonesia (BI) yaitu PBI No. 10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang perubahan atas PBI No. 7/7/PBI/2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan (OJK) yaitu SE OJK No. 2/SEOJK 07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa keuangan, maka Bank diwajibkan untuk menginformasikan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan.

Pursuant to Bank Indonesia (BI) Regulation PBI No.10/10/PBI/ 2008 dated February 28, 2008 on the amendments to PBI No.7/7/PBI/ 2005 on Settlement of Customer Complaints, and Circular of Financial Services Authority (OJK) SE OJK No.2/SEOJK 07/2014 dated 14 February 2014 on Services and Settlement of Consumer Complaints to Financial Service Business Players, Banks are required to inform the service mechanism and resolution of complaints.

Penyampaian mekanisme penyelesaian pengaduan ini merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah yang berhubungan dengan bank.

The submission of the complaint resolution mechanism is one form of improved customer protection in order to guarantee the rights of customers of the Bank.

Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai tata cara pengajuan pengaduan nasabah, berikut hal-hal yang perlu diketahui:

To see a complete picture of the procedure for submitting customer complaints, one needs to learn the following matters:

Pihak yang Berhak untuk Menyampaikan Pengaduan
Who has the Right to File Complaints

Seluruh nasabah termasuk pemangku kepentingan lainnya berhak untuk melaporkan pengaduan. Pengaduan dapat disampaikan langsung oleh nasabah atau perwakilannya. Apabila pengaduan nasabah disampaikan oleh perwakilan nasabah harus disertai dengan dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi bukti identitas nasabah dan perwakilan nasabah.
2. Surat kuasa dari nasabah kepada perwakilan nasabah yang menyatakan bahwa nasabah memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama nasabah.
3. Jika perwakilan nasabah adalah lembaga atau badan hukum maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan dari pihak berwenang untuk mewakili lembaga dan/atau badan hukum tersebut.

All customers including other stakeholders have the right to file complaints. Customers or their representatives can file complaints directly.
If a customer complaint is filed by his or her representative, the following documents must be attached:

1. A copy of proof of identity of the customer and his or her representative.
2. Power of attorney from the customer to his or her representative stating that the customer has given authorization to the representative to act for and on his or her behalf.
3. If the customer's representative is legal institution or entity, then a document from a relevant authority that has been appointed to represent the legal institution or entity shall be attached.

Tata Cara Pengaduan
Procedure for Complaints

Pengaduan secara tertulis, yaitu pengaduan yang disampaikan melalui sarana/media tertulis seperti surat yang dikirim ke kantor J Trust Bank melalui pos atau melalui *e-mail* ke **customercare@jtrustbank.co.id**

Written complaints, i.e. complaints filed through written media/channels such as letters sent to the J Trust Bank office by mail or by e-mail to **customercare@jtrustbank.co.id**

Jenis Pengaduan
Types of Complaint

- Pengaduan transaksional, yaitu pengaduan yang berdampak pada kerugian secara finansial.
- Pengaduan non transaksional, yaitu pengaduan yang tidak berdampak pada kerugian secara finansial

- Transactional complaints, i.e. complaints cause financial loss.
- Non-transactional complaints, i.e. complaints that cause no financial loss

Informasi dan Dokumen Pendukung
Supporting Information and Documents

Menyampaikan secara lengkap identitas nasabah, yaitu: nama, alamat, nomor rekening (apabila ada), telepon yang dapat dihubungi dan deskripsi singkat pengaduan serta melampirkan dokumen pendukung yaitu dokumen yang sesuai dengan jenis pengaduannya atau yang terkait dengan permasalahan yang diadukan, seperti:

- *Photocopy* (sesuai asli) bukti identitas yang masih berlaku (wajib)
- *Photocopy* (sesuai asli) buku tabungan/ rekening koran, atau
- *Photocopy* (sesuai asli) bukti transaksi keuangan terkait permasalahan yang diadukan atau
- *Photocopy* (sesuai asli) dokumen pendukung lainnya
- Surat Kuasa dari Nasabah yang diwakili (dokumen tambahan untuk perwakilan nasabah)

Submit complete customer identity, namely: name, address, account number (if any), reachable phone number and a brief description of the complaint and attach supporting documents that are appropriate for the type of complaint or related to the issues being complained, such as:

- A copy of valid identity (required)
- A copy of savings book/current account, or
- A copy of evidence of financial transactions related to the issues being complaint or
- A copy of other supporting documents
- Power of Attorney from the represented Customer represented (an additional document when the customer is represented)

Penyelesaian Pengaduan
Settlement of Complaints

Bank akan menindaklanjuti pengaduan yang diajukan oleh nasabah dan akan diselesaikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dalam hal terdapat kondisi tertentu. Apabila bank akan memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan, maka bank akan menginformasikan hal tersebut terlebih dahulu kepada nasabah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, sebelum jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja pertama berakhir.

The Bank will follow up on any complaint filed by a customer and will resolve it within 20 (twenty) working days, which can be extended for another 20 (twenty) working days if a certain condition occurs. If the settlement period is extended, the Bank will previously inform the customer of this matter with due consideration on applicable provisions, before the first 20 (twenty) working day period ends.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP

NASABAH

Responsibility to Customers

Hal-Hal yang harus Diperhatikan
What Should be Considered

Agar pengaduan dapat segera diselesaikan oleh Bank, maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Tentukan inti permasalahan yang akan diadukan.
- Siapkan dokumen pendukung yang terkait dengan permasalahan yang akan diadukan.
- Simpan dengan baik dokumen-dokumen asli yang Anda miliki dan sampaikan kepada bank *photocopy* dokumen tersebut bersamaan dengan pengajuan pengaduan tertulis.
- Catat nomor registrasi yang diberikan bank. Nomor registrasi tersebut digunakan untuk mengetahui status penyelesaian pengaduan nasabah.
- Simpan bukti *e-mail* jika pengaduan dilakukan melalui *e-mail* customercare@jtrustbank.co.id
- Simpan dengan baik dokumen surat menyurat dengan bank, termasuk surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan bank kepada nasabah.
- Pastikan nasabah membaca syarat dan ketentuan yang berlaku dari setiap produk dan/atau layanan yang akan digunakan oleh nasabah. Pelayanan penyelesaian pengaduan tidak dikenakan biaya apapun.

In order for the Bank to give immediate resolution, then a customer needs to consider the following matters:

- Determine the real issue to complain about.
- Prepare supporting documents related to the issue to be complained.
- Keep original documents and attach the copies of each in his or her written complaint.
- Note down the registration number provided by the bank. The registration number is used to trace the status of the complaint settlement process.
- Save email proof if the complaint is made via email customercare@jtrustbank.co.id
- Keep corresponding documents with the Bank, including the letter of settlement of complaints submitted by the Bank to the customer.
- Make sure to read the terms and conditions that apply to each product and/or service that he or she will use. Complaint settlement service is free of charge.

Kepuasan Penyelesaian Pengaduan
Complaint Settlement Satisfaction

Apabila nasabah tidak puas dengan hasil penyelesaian yang disampaikan bank, maka nasabah dapat melanjutkan upaya penyelesaian pengaduan melalui mediasi perbankan atau melalui alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

If a customer is not satisfied with the results of the settlement offered by the bank, then the customer may try to resolve the complaint through banking mediation or through any other alternative of dispute resolution.

Kerahasiaan Data Nasabah
Confidentiality of Customer Data

Bank akan menjaga kerahasiaan data nasabah yang akan melakukan pengaduan terhadap pihak manapun, kecuali:

- Kepada pihak regulator (BI, OJK)
- Dalam rangka penyelesaian pengaduan
- Diwajibkan oleh perundang-undangan
- Atas persetujuan nasabah.

Pengaduan nasabah dapat dilakukan melalui sarana e-mail ke customercare@jtrustbank.co.id atau ke kantor J Trust Bank.

The Bank will keep the confidentiality of the data of its customer who is giving complaints to any party, except:

- for regulators (BI, OJK)
- for the purpose of resolving complaints
- when required by law
- if the customer does not object

Customer complaints can be made via email to customercare@jtrustbank.co.id or to the J Trust Bank office.

PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Community Development

Filosofi Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Philosophy of Community Social Development

Dengan berlandaskan pemikiran bahwa perusahaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di sekitarnya, Bank menyadari adanya komitmen dan kewajiban moral tanggung jawab sosial untuk mengembangkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat sekitarnya, dimana Bank menjalankan kegiatan usaha. Hal ini diwujudkan melalui program "J Trust Peduli" yang fokus membantu masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, lingkungan hidup, dan tanggap darurat terhadap setiap bencana alam. J Trust Peduli juga menjadi sarana yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi penyelenggaraan kegiatan tanggung jawab sosial antara Bank, nasabah, karyawan dan komunitas. [413-1]

Based on the thought that the Company is an inseparable part of the lives of the surrounding community, the Bank realizes the commitment and moral obligations of social responsibility to develop and empower the lives of the surrounding communities, in which the Bank runs operations. This is realized through the "J Trust Care" program that lays of focus on giving assistance to the communities in the fields of education, health, social, religious, environmental, and post-disaster emergency response. J Trust Care is also a means that aims to enhance collaboration in the implementation of social responsibility activities between the Bank, customers, employees and the community. [413-1]

Target/Rencana Kerja pada Tahun Buku yang Ditetapkan Manajemen

Work Targets/Plans for the Fiscal Year Defined by Management

Pada tahun 2019, Bank menargetkan untuk menyelenggarakan kegiatan CSR bidang sosial dan kemasyarakatan dengan melaksanakan 5 (lima) Pilar CSR J Trust Bank.

In 2019, the Bank targeted to carry out CSR activities in the social and community areas by implementing 5 (five) Pillars of CSR J Trust Bank.

PENGEMBANGAN SOSIAL

KEMASYARAKATAN

Community Development

Jenis Kegiatan yang Dilakukan dan Dampak Kuantitatif atas Kegiatan Tersebut

Types of Activities Done and Quantitative Impacts on the Activities

J Trust Bank secara berkelanjutan turut berperan serta dalam membangun masyarakat melalui kerangka pelaksanaan program CSR, dengan rincian penyaluran dana yang fokus pada kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan, serta sosial dan keagamaan. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas pelaksanaan kegiatan CSR Bank sepanjang tahun 2019, sebagai berikut: [FS7]

J Trust Bank continues to participate in community development through the framework of CSR program implementation, with channeling funds that are focused on programs of education, health and humanity, as well as social and religious affairs. Activities carried out and quantitative impacts on the implementation of the Bank's CSR activities throughout 2019, are given below: [FS7]

1. Pendidikan
Education

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan terhadap masyarakat, J Trust Bank menyelenggarakan kegiatan edukasi berupa "Edukasi Produk Perbankan" yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2019, bertempat di SMP Islam Tugasku, Jl. Pulo Mas Jaya No. 2, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Kegiatan ini bertujuan sebagai edukasi pengenalan mengenai pengenalan produk, layanan, dan transaksi perbankan. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp4.500.000.

In accordance with Presidential Regulation of the Republic of Indonesia (Perpres) No. 82 of 2016 on the National Strategy for Inclusive Finance (SNKI) in the context of enhancing financial literacy and inclusion to the public, J Trust Bank held an educational program in the form of "Banking Products Education" which was held on October 29, 2019, at the Islamic Middle School Tugasku, Jl. Pulo Mas Jaya No. 2, Kayu Putih, Pulo Gadung, East Jakarta. This program was intended as an introductory education on banking products, services, and transactions. A total of expense of IDR4,500,000 was spent on this program.

2. Kesehatan dan Kemanusiaan [403-3]
Health and Humanity [403-3]

- Pemberian santunan bagi korban bencana tsunami Selat Sunda, J Trust Bank turut bersimpati atas kejadian tsunami yang menghantam kawasan di sekitar Selat Sunda, yakni Banten dan Lampung pada 22 Desember 2018. Bekerja sama dengan Serikat Pekerja J Trust Bank, Koperasi J Trust Bank Terpercaya, Keluarga Muslim J Trust Bank, dan Persekutuan Doa Kasih J Trust Bank menyelenggarakan aksi sosial peduli korban tsunami Selat Sunda di Desa Sukarame, Jl Raya Carita KM 10, Pandeglang, Banten pada Jumat, 11 Januari 2019, dengan menyerahkan donasi kebutuhan sandang, pangan, dan kebutuhan logistik lainnya senilai Rp10.000.000.
- Program rutin J Trust Bank dalam kegiatan CSR di bidang Kesehatan dan Kemanusiaan adalah penyelenggaraan Kegiatan Donor Darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Kota Tangerang. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebanyak dua kali, yakni berlokasi di Ruang Serbaguna Sakura - Gedung Sahid Sudirman Center lantai 35 pada tanggal 17 Juni 2019 dan tanggal 10 Desember 2019. Kegiatan Donor Darah selalu diadakan rutin setiap tahunnya, dengan peserta donor darah berasal dari internal Bank dan karyawan dari Perusahaan yang berkantor di lingkungan Gedung Sahid Sudirman Center – Jakarta. Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan di atas adalah sebesar Rp12.701.000.

- Giving compensation to victims of the Sunda Strait tsunami disaster, J Trust Bank also sympathized with the tsunami that stroke Sunda Strait and the surrounding areas, Banten and Lampung on December 22, 2018. Working closely with the J Trust Bank Workers Union, J Trust Bank Trustworthy Cooperatives, J Trust Bank Muslim Family, and the J Trust Bank Prayer of Love, The Bank took a social action for the victims in Sukarame Village, Jl Raya Carita KM 10, Pandeglang, Banten on Friday, January 11, 2019, by giving clothing, food, and other logistics needs that was worth IDR10,000,000.
- One J Trust Bank routine program in CSR activities in the field of Health and Humanity is the holding of Blood Donor Activities in collaboration with the Tangerang City Indonesian Red Cross (PMI). The event was held twice at the Sakura Multipurpose Room - Sahid Sudirman Center Building, 35th floor on June 17, 2019 and December 10, 2019. Blood Donor is the Bank's routine agenda usually participated by internal cycles and the employees of companies running offices in the Sahid Sudirman Center Building - Jakarta. A Total of expense of IDR12.701,000 was spent on this program.

PENGEMBANGAN SOSIAL

KEMASYARAKATAN

Community Development

3. Sosial dan Keagamaan
Social and Religious

Bentuk kegiatan program CSR dalam bidang Sosial dan Keagamaan yang dijalankan oleh J Trust Bank pada tahun 2019 sebagai berikut:

- **Pemberian santunan bagi anak yatim piatu di daerah Jakarta dan sekitarnya, bekerja sama dengan Yayasan Al-Fajr – Panti Yatim Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Serbaguna Sakura - Gedung Sahid Sudirman Center lantai 35 pada tanggal 24 Mei 2019, bertepatan dengan Bulan Suci Ramadan 1440 H. Manajemen Bank memberikan santunan berupa alat-alat tulis, makanan kering, dan uang tunai. Seluruh kebutuhan dana yang diperlukan dalam kegiatan tersebut adalah sebesar Rp21.772.000.**
- **Pemotongan hewan kurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1440 H, J Trust Bank turut memeriahkan dan mendukung kegiatan rutin keagamaan tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2019, berlokasi di Masjid Mathla'ul Anwar, Jl Jalan Karet Pasar Baru Barat IV, Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Lokasi tersebut dipilih karena terletak dekat dengan lingkungan kantor pusat J Trust Bank di Jakarta. Dalam acara pemotongan hewan kurban tersebut, Manajemen Bank menyumbangkan satu ekor sapi dengan harga senilai Rp31.860.000.**
- **Pemberian donasi pembangunan Veneer House di Palu, Sulawesi Tengah, J Trust Bank memberikan donasi senilai USD5.000 kepada Kobayashi Laboratory untuk membangun membangun satu unit bangunan tahan gempa dan tsunami (Veneer House) yang berfungsi sebagai Community Center di lokasi bekas bencana tersebut di kecamatan Ulujadi, Palu, Sulawesi Tengah.**
- **Pemberian santunan kepada anak yatim di kawasan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, J Trust Bank bersama entitas bisnis J Trust Co., Ltd. di Indonesia, yakni PT JTrust Investment Indonesia (JTII) dan PT JTrust Olympindo Multi Finance (JTO Finance) menyelenggarakan kegiatan bermain bersama anak-anak yatim di sekitar Cipanas, Cianjur sekaligus memberikan santunan dan perlengkapan kebutuhan sekolah kepada sekitar 75 anak-anak yatim, pada Sabtu, 24 Agustus 2019. Seluruh kebutuhan dana yang diperlukan dalam kegiatan tersebut adalah sebesar Rp65.640.320.**

The forms of CSR programs in the Social and Religious fields carried out by J Trust Bank in 2019 are as follows:

- Giving compensation for orphaned children in the Greater Jakarta area, in collaboration with the Al-Fajr Foundation – Orphan Home Indonesia. The activity took place in the Sakura Multipurpose Room - Sahid Sudirman Center Building on the 35th floor on May 24, 2019, to coincide with the Holy Month of Ramadan 1440 H. The Management of the Bank gave handouts in the form of stationery, dried food, and cash. The total fund required for this activity was IDR21,772,000.
- Slaughter of sacrificial animals
  In commemoration of Eid al-Adha 1440 H, J Trust Bank participated and supported the routine religious activities carried out on August 9, 2019, which took place at Mathla'ul Anwar Mosque, Jl Jalan Karet Pasar Baru Barat IV, Karet Tengsin, Jakarta Pusat. The mosque was chosen for its close location to J Trust Bank headquarter in Jakarta. In the sacrificial slaughtering event, the Bank Management donated one cow that was priced at IDR31,860,000.
- For the construction of the Veneer House in Palu, Central Sulawesi, J Trust Bank gave a donation of USD5,000 to the Kobayashi Laboratory to build a one earthquake and tsunami resistant building unit (Veneer House) that functions as a Community Center where the disaster had stricken in the district Ulujadi, Palu, Central Sulawesi.
- Giving donation to orphans in Cipanas, Cianjur, West Java, J Trust Bank and business entities J Trust Co., Ltd. in Indonesia, PT JTrust Investment Indonesia (JTII) and PT JTrust Olympindo Multi Finance (JTO Finance) organized playground activities for the orphaned children in Cipanas, Cianjur and providing donation and school supplies to around 75 orphaned children, on Saturday, August 24, 2019. The fund needed for these activities reached IDR65,640,320.

Mendukung Pemasok Lokal

Support for Local Suppliers

Bank melakukan evaluasi kepada pemasok/rekanan pada saat pertama kali Bank bermaksud menggunakan jasa rekanan tersebut dan secara berkala melakukan kajian/evaluasi selama masa kerja sama. Pelaksanaan evaluasi mencakup:

- kelengkapan izin-izin usaha rekanan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- kunjungan ke lokasi usaha rekanan
- pemeriksaan silang atas referensi yang diberikan
- screening atas rekanan dengan menggunakan aplikasi Daftar Hitam Bank Indonesia, aplikasi *Anti Money Laundering*, dan aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan.

The Bank evaluates suppliers/partners every time it uses their services for the first time and will periodically make reviews and evaluations as long as the cooperation with them lasts. The evaluation includes:

- the adequacy of business partners' licenses in accordance with applicable regulations
- official visits to the partners' premises
- cross-checking of references
- screening of partners using Bank Indonesia Black List app, the Anti Money Laundering app, and the Financial Information Services System app

Penanganan Keluhan Masyarakat

Handling of Community Complaints

Bank menyediakan mekanisme penanganan keluhan masyarakat melalui pusat pengaduan konsumen melalui e-mail customercare@jtrustbank.co.id. Sepanjang tahun 2019, Bank tidak mendapatkan adanya laporan keluhan masyarakat terkati dengan kegiatan CSR Bank pada bidang sosial kemasyarakatan.

The Bank provides a public complaint mechanism through the consumer complaint center via e-mail customercare@jtrustbank.co.id. Throughout 2019, the Bank did not receive any complaint from the public regarding the Bank's CSR activities in the social sector.

Realisasi Dana *Community Development*

Realization of Community Development Funds

Pada tahun 2019, Bank telah menyisihkan dana untuk kegiatan sosial sebagai bentuk implementasi dari program CSR sebesar Rp217.265.320. Bank yakin bahwa realisasi dana tersebut akan menjadi investasi sosial dan lingkungan yang dapat menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dan kondusif, serta mampu menanggapi berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat. Pada akhirnya, hal ini akan menciptakan hubungan yang saling bermanfaat dan menguntungkan antara PT Bank JTrust Indonesia Tbk. dengan masyarakat dan lingkungan sekitar.

In 2019, the Bank has set aside a total fund of funds IDR217,265,320 for social activities as a form of its CSR implementation. The Bank believes that the realization of these funds will be a social and environmental investment that can create a better and more conducive condition for the community, and can respond to changes in people's lives. Ultimately, this will shape a reciprocal and mutually benefiting I relationship between PT Bank JTrust Indonesia Tbk. with the community and the environment.

RENCANA CSR TAHUN 2020

CSR Plan For 2020

Untuk tahun 2020, Bank akan menerapkan Kebijakan CSR dengan fokus pada kegiatan 5 (lima) pilar CSR PT Bank JTrust Indonesia Tbk. sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun, rencana program CSR pada tahun 2020 terdapat beberapa kegiatan yang masih merupakan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, ada beberapa kegiatan yang cukup besar dan direncanakan akan dijalankan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Rencana program kegiatan CSR pada tahun 2020 meliputi:

- Donor darah
- Santunan Anak Yatim
- Donasi terhadap korban Bencana Alam di Indonesia
- Kegiatan Kurban
- Sumbangan untuk berbagai kegiatan sosial, pendidikan, lingkungan yang menganut asas manfaat, lestari, dan berkelanjutan (*sustainability*)
- Edukasi kepada nasabah dan/atau masyarakat mengenai produk dan jasa layanan perbankan.

Kegiatan tanggung jawab sosial J Trust Bank pada tahun 2020 akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta potensi risiko lainnya, dengan tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

For 2020, the Bank will implement CSR Policies with a focus on activities on the 5 (five) pillars of CSR of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. as described previously. Meanwhile, in the CSR program in 2020 there will be some of activities that will continue from the previous years. However, the Bank has in the pipeline some large events to be held according to the company's financial capabilities.

The planned program of CSR activities in 2020 includes:
Blood donors

- Donations for orphans
- Donations to victims of natural disasters in Indonesia
- Animal Sacrificaction
- Donations for various social, educational, environmental activities that adhere to the principle of benefits, sustainability, and sustainability (sustainability)
- Educate customers and/or the public about banking products and services.

J Trust Bank's social responsibility activities in 2020 will be adjusted to the Bank's financial capability and other potential risks, without neglecting the obligations as stipulated in the statutory provisions and Financial Services Authority regulations related to the company's business activities.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Funding For Political Activities

Informasi tentang Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik telah diuraikan pada Bagian Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 yang menjadi bagian tidak terpisah dari laporan ini.

Information on funding for political activities is presented in the Corporate Governance section of the 2019 Integrated Annual Report as an integral part of this report.

Laporan Keuangan
FINANCIAL STATEMENTS

PT Bank JTrust Indonesia Tbk
Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 serta
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Dan Laporan Auditor Independen

Financial Statements
As of December 31, 2019 and
For the Year Then Ended
And Independent Auditor's Report

J TRUST BANK
Jトラスト銀行

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2019 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Ritsuo Fukadai**
   Alamat Kantor : Gedung Sahid Sudirman Center (SSC)
   Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
   Alamat Rumah: Sahid Sudirman Residence Unit 8 AM
   Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
   No. Telepon : (021) 29261111
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : **Helmi A. Hidayat**
   Alamat Kantor : Gedung Sahid Sudirman Center (SSC)
   Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
   Alamat Rumah: Jl. Aries Elok IV F-8/9 RT 007/RW 006
   Meruya Utara - Jakarta Barat
   No. Telepon : (021) 29261111
   Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("Bank");
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2019 AND FOR THE YEAR THEN ENDED

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk

We the undersigned:

1. *Name* : ***Ritsuo Fukadai***
   Office Address : *Sahid Sudirman Center Building (SSC)*
   Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
   Residential Address : *Sahid Sudirman Residence Unit 8 AM*
   Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
   Telephone : *(021) 29261111*
   Title : *President Director*

2. *Name* : ***Helmi A. Hidayat***
   Office Address : *Sahid Sudirman Center Building (SSC)*
   Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
   Residential Address : *Jl. Aries Elok IV F-8/9 RT 007/RW 006*
   Meruya Utara - Jakarta Barat
   Telephone : *(021) 29261111*
   Title : *Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank JTrust Indonesia Tbk (the "Bank");*
2. *The financial statements of the Bank have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the financial statements of the Bank has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. The financial statements of the Bank do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit any information or material facts;
4. *We are responsible for the Bank's internal control system.*

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 21 Februari/*February 21*, 2020

METERAI TEMPEL
E2D94AHF173289008
6000
ENAM RIBU RUPIAH

J TRUST BANK
Jトラスト銀行

Ritsuo Fukadai
Direktur Utama/*President Director*

Helmi A. Hidayat
Direktur/*Director*

Crowe

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
Registered Public Accountants No. 854/KM.1/2015
Cyber 2 Tower 20th floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950, Indonesia
Main +62 (21) 2553 9200
Fax +62 (21) 2553 9298
www.crowe.id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00073/2.1051/AU.1/07/0519-1/1/II/2020

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Independent Auditor's Report

Report No. 00073/2.1051/AU.1/07/0519-1/1/II/2020

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank JTrust Indonesia Tbk (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2019, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank JTrust Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank JTrust Indonesia Tbk as of December 31, 2019, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Penekanan suatu hal

Laporan keuangan terlampir disusun dengan anggapan bahwa Bank akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 52 atas laporan keuangan, Bank mengalami kerugian operasional pada tahun-tahun sebelumnya yang mengakibatkan defisit sebesar Rp 11.359.219 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Rencana manajemen berhubungan dengan hal tersebut diungkapkan dalam Catatan 52 atas laporan keuangan. Pemegang saham utama dalam surat tertanggal 31 Desember 2019, menyatakan persetujuannya untuk memberikan dukungan finansial kepada Bank dengan tujuan agar Bank mampu memenuhi kewajibannya dimasa mendatang.

Emphasis of matter

The accompanying financial statements have been prepared assuming that the Bank will continue to operate as a going concern entity. As discussed in Note 52 to the financial statements, the Bank experienced operating losses from previous years which resulted to a net deficit amounting to Rp 11,359,219 million as of December 31, 2019. Management's plans in regard to this matter are described in Note 52 to the financial statements. The majority shareholder in its letter dated December 31, 2019, stated its agreement to provide financial support to the Bank so as to enable the Bank to fulfill its future obligations.

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 50 dan 53 atas laporan keuangan, beberapa pihak telah mengajukan tuntutan hukum kepada Bank di pengadilan dalam maupun luar negeri. Sampai dengan tanggal laporan ini, tuntutan hukum adalah subyek dari proses hukum yang menyebabkan keputusan atas tuntutan hukum tersebut masih tertunda.

As disclosed in Notes 50 and 53 to the financial statements, several parties have filed legal cases against the Bank in courts both in and outside the country. As of the date of this report, these legal cases are the subjects of legal proceedings and decisions on such cases are still pending.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Darmenta Pinem, CPA
Surat Izin Praktek Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP. 0519
21 Februari 2020/*February 21, 2020*

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	Catatan/ *Notes*	2018	
ASET				***ASSETS***
Kas	110.308	2,4,41,45,46	110.105	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	496.757	2,5,41,45,46	803.124	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 743 pada tanggal 31 Desember 2019 dan Rp 784 pada tanggal 31 Desember 2018	522.802	2,6,41,45,46	249.546	*Current accounts with other banks net of allowance for impairment losses of Rp 743 as of December 31, 2019 and Rp 784 as of December 31, 2018*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	462.718	2,7,41,45,46	649.905	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga				*Marketable securities*
Tersedia untuk dijual	3.700.222		3.078.473	*Available-for-sale*
Diperdagangkan	519.640		484.265	*Trading*
Total surat-surat berharga	4.219.862	2,8,41,45,46	3.562.738	*Total marketable securities*
Tagihan derivatif	2.645	2,9,41,45,46	11.324	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 113.108 pada tanggal 31 Desember 2019 dan Rp 129.938 pada tanggal 31 Desember 2018				*Loans net of allowance for impairment losses of Rp 113,108 as of December 31, 2019 and Rp 129,938 as of December 31, 2018*
Pihak berelasi	172.767		143.188	*Related parties*
Pihak ketiga	5.960.116		9.985.929	*Third parties*
Pinjaman yang diberikan - neto	6.132.883	2,10,33,40,41,45,46	10.129.117	*Loans - net*
Tagihan akseptasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar nihil pada tanggal 31 Desember 2019 dan Rp 546.943 pada tanggal 31 Desember 2018	23.518	2,11,33,41,45,46	102.188	*Acceptance receivables net of allowance for impairment losses of nil as of December 31, 2019 and Rp 546,943 as of December 31, 2018*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	129.134	2,12,41,45,46	102.992	*Accrued interest income*
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	4.618.286	2,13	1.332.489	*Prepaid expenses and advances*
Aset pajak tangguhan	74.209	2,37b	125.323	*Deferred tax assets*
Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 37.198 pada tanggal 31 Desember 2019 dan Rp 28.065 pada tanggal 31 Desember 2018	199.165	2,14	194.079	*Fixed assets net of accumulated depreciation of Rp 37,198 as of December 31, 2019 and Rp 28,065 as of December 31, 2018*
Aset takberwujud setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 125.988 pada tanggal 31 Desember 2019 dan Rp 112.322 pada tanggal 31 Desember 2018	88.859	2,15	82.679	*Intangible assets net of accumulated amortization of Rp 125,988 as of December 31, 2019 and Rp 112,322 as of December 31, 2018*
Agunan yang diambil alih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 236.162 pada tanggal 31 Desember 2019 dan Rp 200.012 pada tanggal 31 Desember 2018	131.230	2,16,33	237.653	*Foreclosed assets net of allowance for impairment losses of Rp 236,162 as of December 31, 2019 and Rp 200,012 as of December 31, 2018*
Aset lain-lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 54.158 pada tanggal 31 Desember 2019 dan Rp 16.817 pada tanggal 31 Desember 2018	99.221	2,17,41,45	130.407	*Other assets net of allowance for impairment losses of Rp 54,158 as of December 31, 2019 and Rp 16,817 as of December 31, 2018*
TOTAL ASET	**17.311.597**		**17.823.669**	***TOTAL ASSETS***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	Catatan/ *Notes*	2018	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	156.145	2,18,41,45,46	63.775	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah				*Deposits from customers*
Pihak berelasi	68.369		87.043	*Related parties*
Pihak ketiga	12.737.863		13.161.562	*Third parties*
Total simpanan dari nasabah	12.806.232	2,19,40,41,45,46	13.248.605	*Total deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	1.845.988	2,20,41,45,46	1.911.604	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	-	2,9,41,45,46	640	*Derivative payables*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	88.001	2,21,45,46	532.005	*Securities sold under repurchase agreement*
Liabilitas akseptasi	2.101	2,11,41,45,46	16.546	*Acceptance payables*
Utang pajak	18.893	2,37a	21.052	*Taxes payable*
Bunga yang masih harus dibayar	65.086	2,22,41,45,46	61.431	*Accrued interest expenses*
Liabilitas imbalan kerja	24.752	2,38	55.271	*Employee benefits liability*
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain				*Accrued expenses and other liabilities*
Pihak berelasi	-		866	*Related parties*
Pihak ketiga	230.573		237.471	*Third parties*
Total beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	230.573	2,23,40,41,45,46	238.337	*Total accrued expenses and other liabilties*
Pinjaman subordinasi	400.000	2,24,40,41,45,46,54	143.800	*Subordinated loan*
Obligasi konversi	-	2,25,41,45,54	215.700	*Convertible bonds*
TOTAL LIABILITAS	**15.637.771**		**16.508.766**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal				*Share capital - par value*
Saham seri A - Rp 1.000 (nilai penuh) per saham				*Series A shares - Rp 1,000 (full amount) per share*
Saham seri B - Rp 7.800.000 (nilai penuh) per saham				*Series B shares - Rp 7,800,000 (full amount) per share*
Modal dasar - 12.000.003.000 saham seri A dan 384.615 saham seri B				*Authorized - 12,000,003,000 series A shares and 384,615 series B shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 10.011.841.000 saham seri A dan 283.501 saham seri B	12.223.149	26,47	12.223.149	*Issued and fully paid capital - 10,011,841,000 series A shares and 283,501 series B shares*
Tambahan modal disetor	178.765	2,27	178.765	*Additional paid-in capital*
Komponen ekuitas lain	495.500	2,24	353.375	*Other components of equity*
Kerugian aktuarial	(11.096)	2,38	(34.602)	*Actuarial loss*
Surplus revaluasi aset tetap - neto	138.336	2,14	124.962	*Revaluation surplus of fixed assets - net*
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual	8.391	2,8	(122.032)	*Unrealized gain (losses) on changes in fair value of available-for-sale securities*
Saldo rugi				*Deficit*
Dicadangkan	1.002	28	1.002	*Appropriated*
Belum dicadangkan	(11.360.221)		(11.409.716)	*Unappropriated*
EKUITAS	1.673.826		1.314.903	***EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**17.311.597**		**17.823.669**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Year Ended December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	Catatan/ *Notes*	2018	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				***INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS***
Pendapatan bunga	1.132.243	2,29,40,44a	1.426.813	*Interest income*
Beban bunga	(1.081.987)	2,30,40,44a	(1.035.272)	*Interest expenses*
Pendapatan bunga - neto	**50.256**		**391.541**	*Interest income - net*
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				***OTHER INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS***
Pendapatan operasional lainnya:				*Other operating income:*
Pemulihan (penyisihan) kerugian penurunan nilai - neto	449.053	2,33	(154.506)	*Reversal of (provision for) impairment losses - net*
Keuntungan kurs mata uang asing - neto	46.097	2	58.874	*Gains on foreign exchange - net*
Provisi lain-lain	7.257	2	6.836	*Other provisions*
Keuntungan (kerugian) atas penjualan surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual dan diperdagangkan - neto	6.643	2,8,31	(16.033)	*Gains (losses) on sale of available-for-sale and trading securities - net*
Provisi dari transaksi ekspor impor	278	2	1.634	*Provision from export import transactions*
Lain-lain	17.218	2	24.409	*Others*
Total pendapatan operasional lainnya	**526.546**	44a	**(78.786)**	*Total other operating income*
Beban operasional lainnya:				*Other operating expenses:*
Umum dan administrasi	(299.569)	2,34	(326.093)	*General and administrative*
Gaji dan tunjangan	(260.154)	2,32	(289.492)	*Salaries and allowances*
Lain-lain	(5.521)	2	(2.345)	*Others*
Total beban operasional lainnya	**(565.244)**	44a	**(617.930)**	*Total other operating expenses*
LABA (RUGI) OPERASIONAL	**11.558**	44a,44b	**(305.175)**	***PROFIT (LOSS) FROM OPERATIONS***
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL				***NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)***
Pendapatan non-operasional	216.142	35,44a	18.188	*Non-operating income*
Beban non-operasional	(178.401)	36,44a	(116.594)	*Non-operating expenses*
Pendapatan (beban) non-operasional - neto	37.741		(98.406)	*Non-operating income (expenses) - net*
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	**49.299**		**(403.581)**	***PROFIT (LOSS) BEFORE TAX***
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - NETO	196	2,37b,44a	2.480	***INCOME TAX BENEFIT - NET***
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	**49.495**	44a,44b	**(401.101)**	***PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR***
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada tahun berikutnya:				***Items that will not be reclassified to profit or loss in subsequent year:***
Keuntungan revaluasi aset tetap	13.374	2,14	-	*Gain on revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	31.342	2,38	(13.684)	*Remeasurements of employee benefits liability*
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	(7.836)	2,37b	3.421	*Related income tax benefit (expense)*
Sub-total	36.880		(10.263)	*Sub-total*
Pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada tahun berikutnya:				***Item that will be reclassified to profit or loss in subsequent year:***
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual	173.897	2,8f	(185.909)	*Changes in fair value of available-for-sale securities*
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	(43.474)	2,37b	46.477	*Related income tax benefit (expense)*
Sub-total	130.423		(139.432)	*Sub-total*
Penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	167.303		(149.695)	*Other comprehensive income (loss) for the year - net of tax*
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**216.798**		**(550.796)**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR***
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	**4,94357**	2,39	**(40,06203)**	***BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE (full amount)***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For The Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Komponen ekuitas lain/ *Other component of equity*	Keuntungan (kerugian) aktuarial/ *Actuarial gain (loss)*	Surplus revaluasi aset tetap - neto/ *Revaluation surplus of fixed assets - net*	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual/ *Unrealized gains (losses) on changes in fair value of available-for-sale securities*	Saldo rugi/*Deficit*		Ekuitas - neto/ *Net equity*	
								Dicadangkan/ *Appropriated*	Belum dicadangkan/ *Unappropriated*		
Saldo 1 Januari 2018		**12.223.155**	**178.759**	**-**	**(24.339)**	**143.097**	**17.400**	**1.002**	**(11.026.750)**	**1.512.324**	***Balance as of January 1, 2018***
Rugi bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	(401.101)	(401.101)	*Net loss for the year*
Rugi komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak		-	-	-	(10.263)	-	(139.432)	-	-	(149.695)	*Other comprehensive loss for the year - net of tax*
Rugi komprehensif tahun berjalan		-	-	-	(10.263)	-	(139.432)	-	(401.101)	(550.796)	*Total comprehensive loss for the year*
Pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham	27	(6)	6	-	-	-	-	-	-	-	*Effect of reverse stock split*
Selisih revaluasi atas penyusutan nilai revaluasian dan nilai perolehan	2,14	-	-	-	-	(18.135)	-	-	18.135	-	*Excess of revaluation of depreciated revaluation value and cost value*
Reklasifikasi pinjaman subordinasi ke komponen ekuitas	24	-	-	353.375	-	-	-	-	-	353.375	*Reclassification of subordinated loan into other components of equity*
Saldo 31 Desember 2018		**12.223.149**	**178.765**	**353.375**	**(34.602)**	**124.962**	**(122.032)**	**1.002**	**(11.409.716)**	**1.314.903**	***Balance as of December 31, 2018***
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	49.495	49.495	*Net profit for the year*
Laba komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak		-	-	-	23.506	13.374	130.423	-	-	167.303	*Other comprehensive income for the year - net of tax*
Laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	23.506	13.374	130.423	-	49.495	216.798	*Total comprehensive income for the year*
Reklasifikasi pinjaman subordinasi ke komponen ekuitas	24	-	-	142.125	-	-	-	-	-	142.125	*Reclassification of subordinated loan into other components of equity*
Saldo 31 Desember 2019		**12.223.149**	**178.765**	**495.500**	**(11.096)**	**138.336**	**8.391**	**1.002**	**(11.360.221)**	**1.673.826**	***Balance as of December 31, 2019***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	Catatan/ *Notes*	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari bunga serta provisi dan komisi	1.113.636		1.431.879	*Interests, provisions and commissions received*
Pembayaran bunga dan provisi	(1.079.198)		(1.029.021)	*Payments for interests and provisions*
Penerimaan dari pelunasan dan penjualan agunan yang diambil alih	33.658		-	*Receipts from repayments and sale of foreclosed assets*
Pembayaran beban tenaga kerja	(272.517)		(272.528)	*Payments for employee expenses*
Pembayaran beban umum dan administrasi	(271.824)		(297.680)	*Payments for general and administrative expenses*
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya - neto	65.833		70.653	*Receipts from other operating income - net*
Pembayaran untuk beban non-operasional - neto	(161.585)		(84.195)	*Payments from non operating income - net*
Arus kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	(571.997)		(180.892)	*Cash flows before changes in operating assets and liabilities*
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				*Decrease (increase) in operating assets:*
Surat-surat berharga diperdagangkan	6.643		547.110	*Trading securities*
Tagihan akseptasi - neto	100.490		9.651	*Acceptance receivables - net*
Pinjaman yang diberikan	4.509.732		991.952	*Loans*
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	(3.285.797)		(1.165.354)	*Prepaid expenses and advances*
Aset lain-lain	(6.893)		52.719	*Other assets*
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				*Increase (decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera	92.370		(2.313)	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain	(507.989)		770.028	*Deposits from customers and deposits from other banks*
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(444.004)		267.965	*Securities sold under repurchase agreement*
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	4.129		(56.127)	*Accrued expenses and other liabilities*
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	**(103.316)**		**1.234.739**	***Net cash provided by (used in) operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan surat berharga tersedia untuk dijual	(657.124)		(1.373.274)	*Acquisitions of available-for-sale securities*
Hasil penjualan dari surat berharga tersedia untuk dijual	173.897		-	*Proceeds from sale of available-for-sale securities*
Hasil penjualan aset tetap	194	14	25.585	*Proceeds from sale of fixed assets*
Perolehan aset tetap	(8.625)	14	(21.452)	*Acquisition of fixed assets*
Perolehan aset takberwujud	(19.846)	15	(67.340)	*Acquisition of intangible assets*
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	**(511.504)**		**(1.436.481)**	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITY***
Penerimaan pinjaman subordinasi	400.000	24,54	143.533	*Receipt of subordinated loan*
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(214.820)		(58.209)	***NET DECREASE ON CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(5.316)		24.528	*Effect of changes in foreign currencies exchange rate*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.813.464		1.847.145	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**1.593.328**		**1.813.464**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***
Kas dan setara kas terdiri dari:				***Cash and cash equivalents consist of:***
Kas	110.308	4	110.105	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	496.757	5	803.124	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	523.545	6	250.330	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga (3) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	462.718	7	649.905	*Placements with Bank Indonesia and other banks - maturity within three (3) months or less from the date of acquisition*
Total	**1.593.328**		**1.813.464**	***Total***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian Bank

PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("Bank") semula didirikan dengan nama PT Bank Century Intervest Corporation berdasarkan akta No. 136 tanggal 30 Mei 1989 yang dibuat di hadapan Lina Laksmiwardhani, S.H., sebagai pengganti dari Lukman Kirana, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6196.HT.01.01.TH'89 tanggal 12 Juli 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 Tambahan No. 1959 tanggal 4 Mei 1993. Bank melakukan penggabungan atau *merger* dengan bank-bank lainnya pada tahun 2004.

Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 161 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara lain, mengenai perubahan Pasal 11, 12 dan 14. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0300345 tanggal 19 Juli 2019.

Sejak tanggal 6 November 2008, Bank (dahulu PT Bank Century Tbk) ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus.

Pada tanggal 20 November 2008, berdasarkan Surat No. 10/232/GBI/Rahasia, Bank Indonesia menetapkan Bank (dahulu PT Bank Century Tbk) sebagai bank gagal yang ditengarai dapat berdampak sistemik. Selanjutnya, sesuai dengan Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melalui Keputusan No. 04/KSSK.03/2008 tanggal 21 November 2008 menetapkan Bank (dahulu PT Bank Century Tbk) sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").

1. GENERAL

a. Establishment of the Bank

PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("Bank") was established under the name of PT Bank Century Intervest Corporation by deed No. 136 dated May 30, 1989 of Lina Laksmiwardhani, S.H., substitute of Lukman Kirana, S.H., notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-6196.HT.01.01.TH'89 dated July 12, 1989 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 36 Supplement No. 1959 dated May 4, 1993. The Bank conducted a business combination through merger with other banks in 2004.

The Bank's articles of association have been amended several times, the most recent is by deed No. 161 dated June 27, 2019 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, concerning, the changes in Articles 11, 12 and 14. The changes have been accepted and recorded in database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Letter No. AHU-AH.01.03-0300345 dated July 19, 2019.

Since November 6, 2008, the Bank (formerly PT Bank Century Tbk) has been classified as a Bank Under Intensive Monitoring Unit by Bank Indonesia.

On November 20, 2008, based on Letter No. 10/232/GBI/Rahasia, Bank Indonesia has determined the Bank (formerly PT Bank Century Tbk) as a failed bank which was deemed as having systemic impact. Furthermore, in accordance with Government Regulation No. 4 Year 2008 about the Safeguarding of Financial System, the Financial System Stability Committee (KSSK) through its Decree No. 04/KSSK.03/2008 dated November 21, 2008 classified the Bank (formerly PT Bank Century Tbk) as a failed bank which had systemic impact and assigned the Bank to Indonesia Deposit Insurance Corporation ("LPS").

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank (lanjutan)

Sehubungan dengan pengambilalihan Bank oleh LPS pada bulan November 2008, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang LPS, maka LPS telah melakukan program divestasi atas mayoritas saham milik LPS pada Bank kepada calon investor yang memenuhi syarat melalui penjualan strategis (*strategic sale*).

Berdasarkan hasil program divestasi, mayoritas saham LPS di Bank telah dialihkan kepada J Trust Co., Ltd., Jepang, melalui perjanjian penjualan dan pembelian saham bersyarat tanggal 12 September 2014, surat kesepakatan tanggal 18 November 2014 dan akta pengambilalihan No. 52 tanggal 20 November 2014 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

Kantor pusat Bank beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 33, Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat.

Bank memiliki kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Bank (continued)

In relation with LPS takeover of the Bank in November 2008, in compliance with Article 42 of Law No. 24 Year 2004 as subsequently amended with Law No. 7 Year 2009 regarding LPS, the LPS has already conducted a divestment program for the majority of Bank's shares owned by LPS to the qualified prospective investor through strategic sale.

Based on the results of divestment program, LPS majority shareholding in the Bank has been sold to J Trust Co., Ltd., Japan, through conditional sale and purchase agreement dated September 12, 2014, letter of agreement dated November 18, 2014 and deed of sale and purchase agreement No. 52 dated November 20, 2014 as covered by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta.

The Bank's head office is located at Sahid Sudirman Center Building, 33rd Floor, Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Central Jakarta.

The Bank has branches, sub-branches and cash offices as follows:

	2019	2018	
Kantor cabang	22	22	*Branches*
Kantor cabang pembantu	14	23	*Sub-branches*
Kantor kas	2	2	*Cash offices*

Entitas induk terakhir Bank adalah J Trust Co., Ltd., Jepang.

The ultimate parent of the Bank is J Trust Co., Ltd., Japan.

b. Penawaran Umum Saham Bank

Pada bulan Juni 1997, Bank (dahulu PT Bank CIC International Tbk) menjual 70.000.000 sahamnya yang bernilai nominal Rp 500 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp 900 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat melalui pasar modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penjualan saham kepada masyarakat ini telah memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui Surat No. S-1144/PM/1997 tanggal 3 Juni 1997.

b. Public Offering of the Bank's Shares

In June 1997, the Bank (formerly PT Bank CIC International Tbk) sold 70,000,000 shares with par value of Rp 500 (full amount) per share and offering price of Rp 900 (full amount) per share to public through stock exchange market in accordance with the prevailing regulations. The initial public offering obtained an effective statement from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (Bapepam-LK) through its Letter No. S-1144/PM/1997 dated June 3, 1997.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Bank (lanjutan)

Pada bulan April 1999, Bank (dahulu PT Bank CIC International Tbk) melakukan Penawaran Umum Terbatas I (*Rights Issue I*) kepada para pemegang sahamnya dan menerbitkan saham biasa sebanyak 570.400.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp 100 (nilai penuh) per saham, dimana melekat sejumlah 213.900.000 Waran Seri I yang dapat dikonversikan menjadi saham mulai tanggal 20 Oktober 1999 sampai dengan 19 April 2004.

Setiap pemegang saham yang memiliki 20 (dua puluh) saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli 8 (delapan) saham baru dengan harga Rp 100 (nilai penuh) per saham. Di samping itu, pada setiap 8 (delapan) saham baru melekat 3 (tiga) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma. Penawaran Umum Terbatas I ini telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 9 Maret 1999.

Pada bulan Juli 2000, Bank (dahulu PT Bank CIC International Tbk) melakukan Penawaran Umum Terbatas II (*Rights Issue II*) kepada para pemegang sahamnya dan menerbitkan saham biasa sebanyak 401.773.500 saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp 200 (nilai penuh) per saham, dimana melekat sejumlah 140.620.725 Waran Seri II yang dapat dikonversikan menjadi saham mulai tanggal 19 Januari 2001 sampai dengan 18 Juli 2005. Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga Rp 100 (nilai penuh) per saham.

Di samping itu, pada setiap 100 (seratus) saham baru melekat 35 (tiga puluh lima) Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma. Penawaran Umum Terbatas II ini telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 26 Juni 2000 dan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK melalui Surat Keputusan No. S-1517/PM/2000 tanggal 26 Juni 2000.

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Bank's Shares (continued)

In April 1999, the Bank (formerly PT Bank CIC International Tbk) conducted a Limited Public Offering I (Rights Issue I) to its existing shareholders and issued 570,400,000 common shares with par value of Rp 100 (full amount) per share and offering price of Rp 100 (full amount) per share, which were attached to 213,900,000 Warrants Series I that could be converted into shares starting from October 20, 1999 up to April 19, 2004.

Each shareholder, who owned 20 (twenty) shares was entitled to a Pre-emptive Right (HMETD) to buy 8 (eight) new shares at the price of Rp 100 (full amount) per share. In addition, every 8 (eight) new shares were attached with 3 (three) Warrants Series I which were given as an incentive. The Limited Public Offering I obtained an approval from the shareholders through the Extraordinary General Meeting of Shareholders on March 9, 1999.

In July 2000, the Bank (formerly PT Bank CIC International Tbk) conducted a Limited Public Offering II (Rights Issue II) to its existing shareholders and issued 401,773,500 common shares with par value of Rp 100 (full amount) per share and offering price of Rp 200 (full amount) per share, which were attached to 140,620,725 Warrants Series II, that could be converted into shares starting from January 19, 2001 up to July 18, 2005. Each shareholder, who owned 5 (five) shares, was entitled to a Pre-emptive Right (HMETD) to buy 1 (one) new share with an offering price of Rp 100 (full amount) per share.

In addition, every 100 (one hundred) new shares were attached with 35 (thirty five) Warrants Series II which were given as an incentive. The Limited Public Offering II was approved by the shareholders through the Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 26, 2000 and obtained the effective statement from Bapepam-LK through its Decision Letter No. S-1517/PM/2000 dated June 26, 2000.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Bank (lanjutan)

Pada bulan Maret 2003, Bank (dahulu PT Bank CIC International Tbk) melakukan Penawaran Umum Terbatas III (*Rights Issue III*) kepada para pemegang sahamnya dan menerbitkan saham biasa sebanyak 5.797.941.330 saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp 120 (nilai penuh) per saham, dimana melekat sejumlah 173.938.240 Waran Seri III yang dapat dikonversikan menjadi saham mulai tanggal 26 September 2003 sampai dengan 7 April 2008. Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli 12 (dua belas) saham baru dengan harga Rp 120 (nilai penuh) per saham.

Di samping itu, pada setiap 100 (seratus) saham baru melekat 3 (tiga) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma. Penawaran Umum Terbatas III tersebut telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 28 Februari 2003 dan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK melalui Surat Keputusan No. S-405/PM/2003 tanggal 27 Februari 2003.

Pada bulan Juli dan Agustus 2003, Bank (dahulu PT Bank CIC International Tbk) melakukan Penawaran Umum Terbatas IV (*Rights Issue IV*) kepada para pemegang sahamnya dan menerbitkan saham biasa sebanyak 2.494.146.934 saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp 120 (nilai penuh) per saham, dimana melekat sejumlah 2.244.732.240 Waran Seri IV, yang dapat dikonversikan menjadi saham mulai tanggal 22 Januari 2004 sampai dengan 3 Agustus 2008.

Setiap pemegang saham yang memiliki 10 (sepuluh) saham memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli 3 (tiga) saham baru dengan harga Rp 120 (nilai penuh) per saham.

Di samping itu, pada setiap 10 (sepuluh) saham baru melekat 9 (sembilan) Waran Seri IV yang diberikan secara cuma-cuma. Penawaran Umum Terbatas IV ini telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 27 Juni 2003 dan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK melalui Surat Keputusan No. S-1534/PM/2003 tanggal 26 Juni 2003. Setelah penggabungan, harga waran menjadi Rp 78 (nilai penuh) per saham.

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Bank's Shares (continued)

In March 2003, the Bank (formerly PT Bank CIC International Tbk) conducted a Limited Public Offering III (Rights Issue III) to its existing shareholders and issued 5,797,941,330 common shares with par value of Rp 100 (full amount) per share and offering price of Rp 120 (full amount) per share, which were attached to 173,938,240 Warrants Series III, that could be converted into shares starting from September 26, 2003 up to April 7, 2008. Each shareholder, who owned 5 (five) shares, was entitled to a Pre-emptive Right (HMETD) to buy 12 (twelve) new shares at the price of Rp 120 (full amount) per share.

In addition, every 100 (one hundred) new shares were attached with 3 (three) Warrants Series III which were given as an incentive. The Limited Public Offering III was approved by the shareholders through the Extraordinary General Meeting of Shareholders on February 28, 2003 and obtained the effective statement from Bapepam-LK through its Decision Letter No. S-405/PM/2003 dated February 27, 2003.

In July and August 2003, the Bank (formerly PT Bank CIC International Tbk) conducted a Limited Public Offering IV (Rights Issue IV) to its existing shareholders and issued 2,494,146,934 common shares with par value of Rp 100 (full amount) per share and offering price of Rp 120 (full amount) per share, which were attached to 2,244,732,240 Warrants Series IV, which could be converted into shares starting from January 22, 2004 up to August 3, 2008.

Each shareholder, who owned 10 (ten) shares, was entitled to a Pre-emptive Right (HMETD) to buy 3 (three) new shares at a price of Rp 120 (full amount) per share.

In addition, every 10 (ten) new shares were attached with 9 (nine) Warrants Series IV, which were given as an incentive. The Limited Public Offering IV was approved by shareholders through the Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 27, 2003 and obtained the effective statement from Bapepam-LK through its Decision Letter No. S-1534/PM/2003 dated June 26, 2003. After the merger, the warrant's price became Rp 78 (full amount) per share.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Bank (lanjutan)

Pada bulan Juli 2007, Bank (dahulu PT Bank Century Tbk) melakukan Penawaran Umum Terbatas V (*Rights Issue V*) kepada para pemegang sahamnya dan menerbitkan saham biasa sebanyak 5.670.029.955 saham dengan nilai nominal Rp 78 (nilai penuh) per saham, dimana melekat sejumlah 5.670.029.955 Waran Seri V, yang dapat dikonversikan menjadi saham mulai tanggal 19 Desember 2007 sampai dengan 18 Juni 2010. Setiap pemegang saham yang memiliki 4 (empat) saham memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga Rp 78 (nilai penuh) per saham.

Di samping itu, pada setiap 1 (satu) saham baru melekat 1 (satu) Waran Seri V yang diberikan secara cuma-cuma. Penawaran Umum Terbatas V ini telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 5 Juni 2007 dan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK melalui Surat Keputusan No. S-2648/BL/2007 tanggal 5 Juni 2007. Pada saat jatuh tempo, terdapat 1 (satu) pemegang waran yang mengajukan *exercise* waran sejumlah 518 unit atau senilai Rp 40.404, namun hal tersebut tidak dilakukan terhitung sejak LPS melakukan penanganan terhadap Bank dan selaku pemegang saham pengendali Bank, berdasarkan UU LPS Pasal 40 menyatakan bahwa LPS mengambil alih segala hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham, kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lain.

Berdasarkan Surat Penghentian Sementara Perdagangan Efek Bank (dahulu PT Bank Century Tbk) No. Peng-23/BEI.PSJ/SPT/11-2008 tanggal 21 November 2008, sehubungan dengan adanya informasi material yang belum disampaikan kepada publik tentang Bank, maka untuk mencegah terjadinya perdagangan yang tidak wajar atas saham Tercatat di Bursa Efek Indonesia dan untuk mendapatkan informasi yang lebih memadai tentang hal tersebut, Bursa Efek memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham Bank (dahulu PT Bank Century Tbk) di seluruh pasar mulai sesi pertama perdagangan saham pada tanggal 21 November 2008 hingga pengumuman lebih lanjut.

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Bank's Shares (continued)

In July 2007, the Bank (formerly PT Bank Century Tbk) conducted a Limited Public Offering V (Rights Issue V) to its existing shareholders and issued 5,670,029,955 common shares with par value of Rp 78 (full amount) per share, which were attached to 5,670,029,955 Warrants Series V, which could be converted into shares starting from December 19, 2007 up to June 18, 2010. Each shareholder, who owned 4 (four) shares, was entitled to a Pre-emptive Right (HMETD) to buy 1 (one) new share for a price of Rp 78 (full amount) per share.

In addition, every 1 (one) new share was attached with 1 (one) Warrant Series V which was given as an incentive. The Limited Public Offering V was approved by shareholders through the Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 5, 2007 and obtained the effective statement from Bapepam-LK through it's Decision Letter No. S-2648/BL/2007 dated June 5, 2007. At maturity date, there was 1 (one) warrant holder who exercised warrants for a number of 518 units or equivalent to Rp 40,404, but the conversion did not materialize since the LPS took over the Bank and as the controlling shareholder of the Bank, as stipulated in Article 40 of Law of LPS, stating that the LPS to take over all rights and authority of the General Meeting of Shareholders, ownership, management and/or other interests.

Based on the Letter of Temporary Suspension on Shares Trading of Bank (formerly PT Bank Century Tbk) No. Peng-23/BEI.PSJ/SPT/11-2008 dated November 21, 2008, in connection with a material information which has not been communicated to the public concerning the Bank, to prevent unusual trading activity on the Shares Listed in Indonesian Stock Exchange and to obtain more adequate information, the Stock Exchange decided to impose a temporary trading suspension of the Bank's shares in all market (formerly PT Bank Century Tbk) from the first session of trading securities on November 21, 2008 until further notification.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Bank (lanjutan)

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Oktober 2019, Bank telah menginformasikan mengenai pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama adalah sebesar 7,6433%.

Sehubungan dengan Surat Bursa Efek Indonesia No. S-07875/BEI.PP3/12-2019 tanggal 5 Desember 2019 perihal Status Suspensi Saham Perseroan dalam hal ini Bank, Bank telah memenuhi ketentuan V.1 dan ketentuan V.2 Peraturan Bursa No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Sebagai tindak lanjut atas penghentian sementara perdagangan efek Bank (suspensi) di seluruh pasar, Bursa Efek Indonesia meminta Bank menyampaikan dokumen hasil penilaian harga wajar saham oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang terdaftar pada OJK sebagai referensi harga saham saat dilakukan pembukaan suspensi.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan terhadap 100,00% saham Bank, nilai pasar saham wajar Bank adalah sebesar Rp 4,51 triliun. Dengan demikian, harga saham wajar Bank pembukaan suspensi adalah sebesar Rp 450 per saham.

Bank telah menerima Pengumuman Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek dari Bursa Efek Indonesia di bulan Januari 2020. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 56.

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Bank's Shares (continued)

Based on the Monthly Reports of Registration Holders Securities at October 31, 2019, the Bank has informed about the holder of non-controlling shares and minority shareholder shares amounting to 7.6433%.

In connection with the Letter of Indonesia Stock Exchange No. S-07875/BEI.PP3/12-2019 on December 5, 2019, regarding Status Suspension of the Company's Shares in this matter the Bank. The Bank has fulfilled the provisions of V.1 and provision V.2 Regulation of exchange No. I-A about Listing of Shares and Equity Securities in addition to shares issued by Listed Companies.

As a follow up to the write trading termination of the Bank's securities (suspension) in all markets, the Indonesia Stock Exchange requested to submits the valuation report of the fair value of shares by the Public Appraisal Office (KJPP) registered with OJK's as reference of the stock price when opening of suspension.

Based on an evaluation conducted by the Kusnanto & Partners Public Appraisal Office for 100.00% shares of the Bank, the fair value of the Bank is amounting to Rp 4.51 trillion. Accordingly, the fair value of the Bank after open suspension is amounting to Rp 450 per shares.

The Bank has received an Announcement about Revocation of Temporary Suspension on Shares Trading from the Indonesia Stock Exchange at January 2020. Further explanation disclosed in Note 56.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Bank (lanjutan)

Berikut adalah informasi jumlah modal saham Seri A dan Seri B yang ditempatkan dan disetor penuh Bank sejak Penawaran Umum Perdana Saham sampai dengan tanggal 31 Desember 2019:

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Bank's Shares (continued)

Below is the information on the Bank's issued and fully paid Series A and Series B shares since the Initial Public Offering until December 31, 2019:

Keterangan	**Jumlah Saham/** ***Number of Shares***	***Description***
Saham Seri B:		*Series B Shares:*
Saham Pendiri	160.000.000	*Founders shares*
Saham dari Penawaran Umum Perdana Saham pada tahun 1997	70.000.000	*Shares from Initial Public Offering in 1997*
Saham bonus pada bulan Agustus 1998	55.200.000	*Bonus shares in August 1998*
Pemecahan nilai saham pada bulan Maret 1999	1.140.800.000	*Stock split in March 1999*
Saham setelah pemecahan	1.426.000.000	*Shares after stock split*
Penawaran Umum Terbatas I pada bulan April 1999	570.400.000	*Limited Public Offering I in April 1999*
Pelaksanaan Waran Seri I	13.119.000	*Exercise of Series I Warrants*
Penawaran Umum Terbatas II pada bulan Juli 2000	401.773.500	*Limited Public Offering II in July 2000*
Pelaksanaan Waran Seri II	1.033.900	*Exercise of Series II Warrants*
Penawaran Umum Terbatas III pada bulan Maret 2003	5.797.941.330	*Limited Public Offering III in March 2003*
Pelaksanaan Waran Seri I	66.331.650	*Exercise of Series I Warrants*
Pelaksanaan Waran Seri II	37.223.788	*Exercise of Series II Warrants*
Penawaran Umum Terbatas IV pada bulan Juli 2003	2.494.146.934	*Limited Public Offering IV in July 2003*
Pelaksanaan Waran Seri I	250.000	*Exercise of Series I Warrants*
Pelaksanaan Waran Seri II	142.800	*Exercise of Series II Warrants*
Saham sebelum penggabungan usaha	10.808.362.902	*Shares before merger*
Saham dari penggabungan usaha pada bulan Oktober 2004	6.769.653.639	*Shares from merger in October 2004*
Saham setelah penggabungan usaha	17.578.016.541	*Shares after merger*
Penempatan langsung oleh *Klass Consultant Inc.*	2.381.538.461	*Direct placement by Klass Consultant Inc.*
Pelaksanaan Waran Seri II	145.950.973	*Exercise of Series II Warrants*
Pelaksanaan Waran Seri III dan V	27.262	*Exercise of Series III and V Warrants*
Pelaksanaan Waran Seri IV	2.574.613.843	*Exercise of Series IV Warrants*
Penawaran Umum Terbatas V pada bulan Juni 2007	5.670.029.955	*Limited Public Offering V in June 2007*
Jumlah Saham Seri B - sebelum Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham *(reverse stock split)*	28.350.177.035	*Total Series B Share - before reverse stock split*
Pengaruh Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham *(reverse stock split)* Juni 2018	(28.349.893.534)	*Effect reverse stock split in June 2018*
Jumlah Saham Seri B - setelah Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham *(reverse stock split)*	**283.501**	***Total Series B Share - after reverse stock split***

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Bank (lanjutan)

Berikut adalah informasi jumlah modal saham Seri A dan Seri B yang ditempatkan dan disetor penuh Bank sejak Penawaran Umum Perdana Saham sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 (lanjutan):

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Bank's Shares (continued)

Below is the information on the Bank's issued and fully paid Series A and Series B shares since the Initial Public Offering until December 31, 2019 (continued):

Keterangan	Jumlah Saham / *Number of Shares*	*Description*
Penerbitan saham baru Seri A:		*Issuance of Series A new shares:*
November 2008	676.236.100.000.000	*November 2008*
Januari 2014	124.948.000.000.000	*January 2014*
Januari 2015	30.000.000.000.000	*January 2015*
April 2015	30.000.000.000.000	*April 2015*
Oktober 2015	40.000.000.000.000	*October 2015*
Maret 2017	100.000.000.000.000	*March 2017*
Jumlah Saham Seri A - sebelum Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham *(reverse stock split)*	1.001.184.100.000.000	*Total Series A Shares - before reverse stock split*
Pengaruh Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham (*reverse stock split)* Juni 2018	(1.001.174.088.159.000)	*Effect of reverse stock split in June 2018*
Jumlah Saham Seri A - setelah Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham *(reverse stock split)*	**10.011.841.000**	***Total Series A Shares - after reverse stock split***

c. Susunan Manajemen Bank dan Karyawan

Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 13 Desember 2019, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 103 pada tanggal yang sama, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0375771 tanggal 19 Desember 2019.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 September 2018, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 43 pada tanggal yang sama, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0254185 tanggal 18 Oktober 2018.

c. Composition of the Bank's Management and Employees

Boards of Commissioners and Directors

The composition of the Bank's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2019 was based on Resolution of the Bank's General Meeting dated December 13, 2019, as covered by Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 103 on the same date, which has been accepted and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Letter No. AHU-AH.01.03-0375771 dated December 19, 2019.

The composition of the Bank's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2018 was based on Resolution of the Bank's Extraordinary General Meeting of Shareholders dated September 20, 2018, as covered by Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 43 on the same date, which has been accepted and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Letter No. AHU-AH.01.03-0254185 dated October 18, 2018.

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Manajemen Bank dan Karyawan (lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Composition of the Bank's Management and Employees (continued)

Boards of Commissioners and Directors (continued)

The Bank's Board of Commissioners composition as of December 31, 2019 and 2018 is as follows:

	2019	2018	
Dewan Komisaris:			***Board of Commissioners:***
Komisaris Utama	Nobiru Adachi	Nobiru Adachi	*President Commissioner*
Komisaris	Nobuiku Chiba	Nobuiku Chiba [3]	*Commissioner*
Komisaris Independen	Mahdi Mahmudy	Mahdi Mahmudy	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	-	Kwik Ing Hie [1]	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Sutirta Budiman [2]	-	*Independent Commissioner*

1) Masa jabatan yang bersangkutan berakhir setelah penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Juni 2019.

2) Berdasarkan persetujuan OJK melalui Surat No. KEP-234/D.03/2019 tanggal 16 Desember 2019.

3) Berdasarkan persetujuan OJK melalui surat No. KEP-46/D.03/2019 tanggal 12 Maret 2019.

1) His service tenure concluded after the closing of Bank's Annual General Meeting of the Shareholders on June 27, 2019.

2) Based on the approval from OJK through its Letter No. KEP-234/D.03/2019 dated Desember 16, 2019.

3) Based on the approval from OJK through its Letter No. KEP-46/D.03/2019 dated March 12, 2019.

Susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

The Bank's Board of Directors is as follows:

	2019	2018	
Direksi:			***Board of Directors:***
Direktur Utama	Ritsuo Fukadai [4]	Shigeyoshi Asano [12]	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Shigeyoshi Asano [5]	-	*Vice President Director*
Direktur	-	Ritsuo Ando [6] [13]	*Director*
Direktur	Felix Istyono Hartadi Tiono	Felix Istyono Hartadi Tiono	*Director*
Direktur	Helmi Arief Hidayat	Helmi Arief Hidayat	*Director*
Direktur	Cho Won June [7]	-	*Director*
Direktur	Bijono Waliman [8]	-	*Director*
Direktur	Rayendra Prasetya [9]	-	*Director*
Direktur	-	Haryanto Budi Purnomo [10]	*Director*
Direktur	-	Rio Lanasier [11]	*Director*

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Manajemen Bank dan Karyawan (lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

4) Berdasarkan persetujuan OJK melalui Surat No. KEP-202/D.03/2019 tanggal 7 November 2019.

5) Efektif per tanggal 12 November 2019, telah mengundurkan diri sebagai Wakil Direktur Utama Bank.

6) Penunjukkan yang bersangkutan sebagai Direktur tidak lagi menjadi efektif sesuai dengan rapat pada tanggal 25 Maret 2019.

7) Berdasarkan persetujuan OJK melalui Surat No. KEP-203/D.03/2019 tanggal 7 November 2019.

8) Berdasarkan persetujuan OJK melalui Surat No. KEP-204/D.03/2019 tanggal 7 November 2019.

9) Efektif per tanggal 28 November 2019, telah mengundurkan diri dalam proses *Fit and Proper Test* di Otoritas Jasa Keuangan dan Proses Pengangkatan sebagai Anggota Direksi Perseroan dengan Surat No. 28.01/S.Dir.CSD/JTRUST/XI/2019.

10) Berdasarkan keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 11 Februari 2019, tidak lagi menjabat sebagai Direktur.

11) Efektif per tanggal 26 April 2019 telah mengundurkan diri sebagai Direktur Bank.

12) Berdasarkan persetujuan OJK melalui Surat No. KEP-31/D.03/2019 tanggal 21 Februari 2019.

13) Berdasarkan keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 20 September 2018, tidak lagi menjabat sebagai Direktur.

1. GENERAL (continued)

c. Composition of the Bank's Management and Employees (continued)

Boards of Commissioners and Directors (continued)

4) Based on the approval from OJK through its Letter No. KEP-202/D.03/2019 dated November 7, 2019.

5) Effective on November 12, 2019 has resigned from his position as the Bank's Vice President Director.

6) His appointment as Director is no longer effective based on meeting of March 25, 2019.

7) Based on the approval from OJK through its Letter No. KEP-203/D.03/2019 dated November 7, 2019.

8) Based on the approval from OJK through its Letter No. KEP-204/D.03/2019 dated November 7, 2019.

9) Effective on November 28, 2019, has resigned in the Fit and Proper Test process at Financial Services Authority (OJK) and the Appointment Process as a Member of the Company's Directors with Letter No. 28.01/S.Dir.CSD/JTRUST/XI/2019.

10) Based on the resolution of Bank's Extraordinary Shareholder's meeting of February 11, 2019, is no longer served as Directors.

11) Effective on April 26, 2019 has resigned from his position as the Bank's Director.

12) Based on the approval from OJK through its Letter No. KEP-31/D.03/2019 dated February 21, 2019.

13) Based on the resolution of Bank's Extraordinary Shareholder's meeting of September 20, 2018, is no longer served as Directors.

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Manajemen Bank dan Karyawan (lanjutan)

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23.13/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota	Mahdi Mahmudy	Chairman and Member
Sekretaris merangkap Anggota	Bambang Setyoko	Secretary and Member
Anggota	Amalia Setyanti Lestari	Member
Anggota	Sutirta Budiman	Member

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 29.31/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota	Mahdi Mahmudy	Chairman and Member
Sekretaris merangkap Anggota	Martinus Rosadi Nugroho	Secretary and Member
Anggota	Kwik Ing Hie	Member
Anggota	Amalia Setyanti Lestari	Member

Komite Pemantau Risiko

Susunan Komite Pemantau Risiko pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23.13/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota	Sutirta Budiman	Chairman and Member
Sekretaris merangkap Anggota	Amalia Setyanti Lestari	Secretary and Member
Anggota	Mahdi Mahmudy	Member
Anggota	Bambang Setyoko	Member
Anggota	Nobiru Adachi	Member
Anggota	Nobuiku Chiba	Member

Susunan Komite Pemantau Risiko pada tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 29.32/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota	Kwik Ing Hie	Chairman and Member
Sekretaris merangkap Anggota	Amalia Setyanti Lestari	Secretary and Member
Anggota	Mahdi Mahmudy	Member
Anggota	Martinus Rosadi Nugroho	Member
Anggota	Nobiru Adachi	Member

1. GENERAL (continued)

c. Composition of the Bank's Management and Employees (continued)

Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee

The composition of Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

Audit Committee

The composition of Audit Committee as of December 31, 2019 based on Board of Directors Decision Letter No. 23.13/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/XII/2019 dated December 23, 2019 is as follows:

The composition of Audit Committee as of December 31, 2018 based on Board of Directors Decision Letter No. 29.31/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/VI/2018 dated June 29, 2018 is as follows:

Risk Monitoring Committee

The composition of Risk Monitoring Committee as of December 31, 2019 based on Board of Directors Decision Letter No. 23.13/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/XII/2019 dated December 23, 2019 is as follows:

The composition of Risk Monitoring Committee as of December 31, 2018 based on Board of Directors Decision Letter No. 29.32/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/VI/2018 dated June 29, 2018 is as follows:

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Manajemen Bank dan Karyawan (lanjutan)

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi (lanjutan)

Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 19.05/S.Kep.Dir-HCGD/JTRUST/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 adalah sebagai berikut:

Ketua	Mahdi Mahmudy	
Sekretaris merangkap Anggota	Ong Pey Fang	
Anggota	Nobuiku Chiba	

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 29.33/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Ketua	Mahdi Mahmudy	
Sekretaris merangkap Anggota	N. Krisbiyanto	

Divisi Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 15.07/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Christiati E. Sianipar.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 13.10/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/IX/2018 tanggal 21 Mei 2018, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rudyanto Gunawan.

1. GENERAL (continued)

c. Composition of the Bank's Management and Employees (continued)

Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee (continued)

Remuneration and Nomination Committee

The composition of Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2019 based on Board of Directors Decision Letter No.19.05/S.Kep.Dir-HCGD/JTRUST/VII/2019 dated July 19, 2019, is as follows:

Chairman	Mahdi Mahmudy	Ketua
Secretary and Member	Ong Pey Fang	Sekretaris merangkap Anggota
Member	Nobuiku Chiba	Anggota

The composition of Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2018 based on Board of Directors Decision Letter No. 29.33/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/VI/2018 dated June 29, 2018 is as follows:

Chairman	Mahdi Mahmudy	Ketua
Secretary and Member	N. Krisbiyanto	Sekretaris merangkap Anggota

Corporate Secretary Division

Based on the Board of Directors Decision Letter No. 15.07/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VIII/2019 dated August 15, 2019, the Head of Corporate Secretary Division as of December 31, 2019 is Christiati E. Sianipar.

Based on the Board of Directors Decision Letter No. 13.10/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/IX/2018 dated May 21, 2018, the Head of Corporate Secretary Division as of December 31, 2018 is Rudyanto Gunawan.

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Manajemen Bank dan Karyawan (lanjutan)

Satuan Kerja Internal Audit (SKAI)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 05.03/S.Kep.Dir-HCGD/JTRUST/IX/2019 tanggal 5 September 2019, Kepala Divisi Internal Audit pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Ari Prihadi Atmosoekarto.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 26.31/S.Kep.Dir-HCD/JTRUST/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018, Kepala Divisi Internal Audit pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Edi Alpian.

Personil manajemen kunci Bank meliputi Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit.

Jumlah imbalan kerja jangka pendek dan jangka panjang kepada personil manajemen kunci Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Composition of the Bank's Management and Employees (continued)

Internal Audit Division

Based on the Board of Directors Decision Letter No. 05.03/S.Kep.Dir-HCGD/JTRUST/IX/2019 dated September 5, 2019, the Head of Internal Audit Division dated December 31, 2019 is Ari Prihadi Atmosoekarto.

Based on the Board of Directors Decision Letter No. 26.31/S.Kep.Dir-HCD/JTRUST/X/2018 dated October 26, 2018, the Head of Internal Audit Division dated December 31, 2018 is Edi Alpian.

The Bank's key management personnels are Boards of Commissioners, Boards of Directors and Audit Committee.

Total short-term and long-term employee benefits of the Bank's key management personnel for the years ended December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*		Dewan Direksi/ *Board of Directors*		Komite Audit/ *Audit Committees*		
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
Imbalan kerja jangka pendek	4.997	5.674	12.437	21.541	860	885	*Short-term employee benefits*
Imbalan kerja jangka panjang	181	384	377	1.455	-	-	*Long-term employee benefits*
Total	**5.178**	**6.058**	**12.814**	**22.996**	**860**	**885**	***Total***

Tidak ada kompensasi dalam bentuk pesangon pemutusan kontrak kerja dan pembayaran berbasis saham kepada personil manajemen kunci.

Bank memiliki masing-masing 800 dan 971 karyawan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

There are no compensation of termination benefits and share-based payment to the key management personnels.

The Bank has 800 and 971 employees as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

d. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2020.

d. Completion of the Financial Statements

The management of the Bank is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements that were completed and authorized to be issued on February 21, 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK") dan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2019.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Bank menerapkan PSAK 2, "Laporan Arus Kas".

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung yang dimodifikasi, yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan yang tidak dijaminkan atau dibatasi penggunaannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Financial Statements Preparation

The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK") and Bapepam-LK Regulation No. VIII.G.7 Attachment of the Chairman of Bapepam-LK's decree No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding "Guidelines for Financial Statements Presentation and Disclosure for Issuer or Public Companies".

The financial statements have been prepared in accordance with PSAK 1, "Presentation of Financial Statements".

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those made in the preparation of the Bank's financial statements for the year ended December 31, 2018, except for the adoption of several amended SAK. As disclosed further in the relevant succeeding notes, several amended and published accounting standards were adopted effective on January 1, 2019.

The financial statements, except for the statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The Bank applied PSAK 2, "Statement of Cash Flows".

The statement of cash flows was prepared based on the modified direct method with cash flows classified into cash flows from operating, investing and financing activities. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, and placements with Bank Indonesia and other banks with original maturities of 3 (three) months or less from the acquisition date, which are not pledged as collateral or restricted in use.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- penerapan kebijakan akuntansi;
- nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan; dan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi, asumsi dan pertimbangan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank diungkapkan pada Catatan 3.

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dibulatkan dan disajikan dalam jutaan Rupiah (“Rp”), kecuali dinyatakan lain.

b. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing dan Saldo Translasi

Kebijakan akuntansi atas transaksi dan saldo dalam mata uang asing didasarkan pada peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (“PAPI”).

Bank mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (“PAPI”) dimana transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan *Reuters* yang berlaku pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui dalam laba rugi, kecuali apabila ditangguhkan pada ekuitas karena memenuhi kualifikasi/kriteria sebagai lindung nilai arus kas (*hedging*).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Financial Statements Preparation (continued)

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires use of judgments, estimates and assumptions that affect:

- *the application of accounting policies;*
- *the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements; and*
- *the reported amounts of revenues and expenses during reporting period.*

Although these estimates are based on management’s best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Significant accounting estimates, assumptions and judgments applied in the preparation of the Bank’s financial statements are disclosed in Note 3.

The financial statements are presented in Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Bank.

Figures in the financial statements are rounded and stated in millions of Rupiah (“Rp”), unless otherwise specified.

b. Foreign Currency Transactions and Balances Translation

Accounting policy for transactions and balances in foreign currency is based on Bapepam-LK rule No. VIII.G.7 and Indonesian Banking Accounting Guidelines (“PAPI”).

The Bank refers to the Indonesian Banking Accounting Guidelines (“PAPI”) where transactions denominated in a foreign currency are converted into Rupiah using the reporting (closing) rate set by Bank Indonesia that is middle rate based on the average of bid rate and ask rate of Reuters prevailing at 16.00 Western Indonesian Time.

Exchange gains and losses arising from transactions in foreign currency and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognized in the profit or loss, except when it is being deferred in equity as qualifying cash flow hedges.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing dan Saldo Translasi (lanjutan)

Selisih penjabaran mata uang asing atas aset moneter keuangan lain yang diukur berdasarkan nilai wajar dicatat sebagai bagian dari keuntungan dan kerugian selisih kurs.

Kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk menjabarkan ke dalam mata uang Rupiah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam nilai penuh) adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Foreign Currency Transactions and Balances Translation (continued)

Translation differences on other monetary financial assets measured at fair value are included in foreign exchange gains and losses.

The major exchange rates used for translation into Rupiah as of December 31, 2019 and 2018 (full amount) are as follows:

	2019	**2018**	
Dinar Bahrain	36.818	38.150	*Bahrain Dinar*
Poundsterling Inggris	18.238	18.311	*Great Britain Poundsterling*
Euro Eropa	15.571	16.441	*European Euro*
Franc Swiss	14.337	14.595	*Swiss Franc*
Dolar Amerika Serikat	13.883	14.380	*United States Dollar*
Dolar Kanada	10.640	10.561	*Canadian Dollar*
Dolar Singapura	10.315	10.555	*Singapore Dollar*
Dolar Brunei Darussalam	10.315	10.555	*Brunei Darussalam Dollar*
Dolar Australia	9.725	10.162	*Australian Dollar*
Dolar Selandia Baru	9.335	9.659	*New Zealand Dollar*
Riyal Qatar	3.813	3.949	*Qatar Riyal*
Dirham Uni Emirat Arab	3.779	3.915	*United Arab Emirates Dirham*
Riyal Arab Saudi	3.701	3.834	*Saudi Arabian Riyal*
Ringgit Malaysia	3.392	3.477	*Malaysian Ringgit*
Yuan Cina	1.994	2.090	*China Yuan*
Dolar Hong Kong	1.783	1.836	*Hong Kong Dollar*
Baht Thailand	465	444	*Thailand Baht*
Dolar Taiwan	464	472	*Taiwanese Dollar*
Peso Filipina	274	274	*Philippines Peso*
Yen Jepang	128	131	*Japanese Yen*
Won Korea	12	13	*Korea Won*

c. Instrumen Keuangan

Klasifikasi

i. Aset keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 diklasifikasikan sebagai (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Bank menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir tahun keuangan.

c. Financial Instruments

Classification

i. Financial assets

Financial assets within the scope of PSAK 55 are classified as (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables, (iii) held to maturity investments, or (iv) available-for-sale financial assets, as appropriate. The Bank determines the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates the designation of such assets at each financial year end.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 dapat dikategorikan sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau (iii) derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Bank menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Tabel berikut menyajikan klasifikasi instrumen keuangan Bank berdasarkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Classification (continued)

ii. Financial liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK 55 are classified as (i) financial liabilities at fair value through profit or loss, (ii) financial liabilities measured at amortized cost, or (iii) as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Bank determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

The following table presents the Bank's classification of financial instruments based on the characteristics of the financial instruments:

Instrumen Keuangan	**Klasifikasi/*Classification***	***Financial Instruments***
Aset Keuangan:		*Financial Assets:*
Kas	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga	Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan tersedia untuk dijual/ *Financial assets at fair value through profit or loss and available-for-sale financial assets*	*Marketable securities*
Tagihan derivatif	Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Financial assets at fair value through profit or loss*	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	*Loans*
Tagihan akseptasi	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	*Acceptance receivables*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	*Other assets*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan klasifikasi instrumen keuangan Bank berdasarkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut: (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Classification (continued)

The following table presents the Bank's classification of financial instruments based on the characteristics of the financial instruments: (continued)

Instrumen Keuangan	**Klasifikasi/*Classification***	***Financial Instruments***
Liabilitas Keuangan:		*Financial Liabilities:*
Liabilitas segera	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities measured at amortized cost*	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities measured at amortized cost*	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities measured at amortized cost*	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Financial liabilities measured at fair value through profit or loss*	*Derivative payables*
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities measured at amortized cost*	*Securities sold under repurchase agreements*
Liabilitas akseptasi	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities measured at amortized cost*	*Acceptance payables*
Bunga yang masih harus dibayar	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities measured at amortized cost*	*Accrued interest expenses*
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities measured at amortized cost*	*Accrued expenses and other liabilities*
Pinjaman subordinasi	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities measured at amortized cost*	*Subordinated loan*
Obligasi konversi	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities measured at amortized cost*	*Convertible bonds*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran

i. Aset Keuangan

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim/reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Bank berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditetapkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan dengan perubahan nilai wajar diakui sebagai pendapatan keuangan atau biaya keuangan dalam laba rugi.

Setelah pengukuran awal, aset keuangan yang dikelompokkan dalam kategori ini diukur sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar instrumen keuangan tersebut diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement

i. Financial Assets

Financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of investments not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets depends on their classification.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Bank commits to purchase or sell the assets.

a) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss includes financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivative assets are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets at fair value through profit and loss are carried in the statement of financial position at fair value with changes in fair value recognized in finance income or finance costs in profit or loss.

After initial recognition, the financial assets included in this category are measured at fair value. The unrealized gains or losses resulting from changes in fair value are recognized in the profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

b) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang termasuk aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak dikuotasikan pada pasar aktif, kecuali:

- Aset dimana Bank memiliki intensi untuk menjual segera atau dalam waktu dekat dan pinjaman yang diberikan dan piutang yang diukur Bank pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat awal pengakuan;
- Aset dimana Bank pada awal pengakuan, diakui sebagai tersedia untuk dijual; atau
- Aset dimana Bank mungkin tidak mendapat pengembalian secara substansial atas investasi awal Bank, selain karena penurunan kualitas kredit aset keuangan.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal serta *fee* dan biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif dan kerugian yang timbul atas penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

i. Financial Assets (continued)

b) Loans and receivables

Loans and receivables include non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in active markets, other than:

- *Assets where the Bank intends to sell immediately or in the near term and loans and receivables that the Bank upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;*
- *Assets where the Bank upon initial recognition, designates as available-for-sale; or*
- *Assets where the Bank may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit quality deterioration.*

After initial measurements, loans and receivables are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate, less allowance for impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees and costs that are an integral part of the effective interest rate. The effective interest rate amortization and losses arising from impairment is included in the profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

c) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan piutang.

Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual selanjutnya diukur sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui langsung dalam ekuitas dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual".

Penurunan nilai atas aset keuangan tersedia untuk dijual diakui dalam laba rugi dan dikeluarkan dari penghasilan komprehensif lain.

ii. Liabilitas Keuangan

a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari dua sub-kategori, yaitu liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Bank untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

i. Financial Assets (continued)

c) Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are non-derivative financial assets that are neither classified as held for trading nor as at fair value through profit or loss, held to maturity, loans and receivables.

After initial measurement, available-for-sale financial assets are subsequently measured at fair value. Unrealized gains and losses are recognized directly in equity and other comprehensive income as "Unrealized gains or losses on changes in fair value of available-for-sale securities".

Impairment on available-for-sale financial assets is recognized in the profit or loss and removed from other comprehensive income.

ii. Financial Liabilities

a) Financial liabilities measured at fair value through profit or loss

Financial liabilities are measured at fair value through profit or loss consist of two sub-categories, financial liabilities classified as held for trading and financial liabilities designated by the Bank as at fair value through profit or loss upon initial recognition.

A financial liability is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term or if it is part of portfolio of identified financial instrument that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short term profit taking. Derivatives are categorized as held for trading unless they are designated and effectively as hedging instruments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

ii. Liabilitas Keuangan (lanjutan)

a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dicatat sebesar nilai wajar.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat dalam laba rugi.

b) Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi merupakan liabilitas keuangan yang selain atau tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, Bank mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran tanpa memperhatikan apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengukur nilai wajar atas suatu aset atau liabilitas, Bank memperhitungkan karakteristik suatu aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

ii. Financial Liabilities (continued)

a) Financial liabilities measured at fair value through profit or loss (continued)

After initial recognition, the financial liabilities at fair value through profit or loss, are recorded at fair value.

Gains and losses arising from changes in fair value of financial liabilities classified held for trading and measured at fair value through profit or loss are recorded in the profit or loss.

b) Financial liabilities measured at amortized cost

Financial liabilities measured at amortized cost are financial liabilities that are not classified as at fair value through profit or loss.

After initial recognition, the Bank measures all financial liabilities at amortized cost using the effective interest rate method.

Fair Value of Financial Instruments

Fair value is the price that would be received to sell an asset or price to be paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Bank takes into account the characteristics of an asset or a liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan (lanjutan)

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Bank menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Bank menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menangguhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Bank mengukur aset dan posisi *long* berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan posisi *short* berdasarkan harga permintaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Fair Value of Financial Instruments (continued)

When available, the Bank measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then the Bank uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

The best evidence of the fair value of financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Bank determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognized in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Bank measures assets and long positions at a bid price and measures liabilities and short positions at an ask price.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

i. Aset Keuangan

Suatu aset keuangan, atau yang mana bagian dari aset keuangan yang berlaku atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

(a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

(b) Bank mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Bank telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan penyerahan *(pass-through arrangement)*, secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Bank terhadap aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Bank.

Dalam hal ini, Bank juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dimiliki Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Derecognition

i. Financial Asset

A financial asset, or where applicable part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

(a) The contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or

(b) The Bank has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a pass-through arrangement and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

When the Bank has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Bank's continuing involvement in the financial asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Bank could be required to repay.

In that case, the Bank also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Bank has retained.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas harus diakui dalam laba rugi.

ii. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus, nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Reklasifikasi Instrumen Keuangan

Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Derecognition (continued)

i. Financial Asset (continued)

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity is recognized in the profit or loss.

ii. Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, the net amount reported in the statement of financial position if and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Reclassification of Financial Instruments

The Bank is not allowed to reclassify a derivative out of fair value through profit or loss classification while it is held or issued.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi Instrumen Keuangan (lanjutan)

Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi setiap instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Bank sebagai instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Bank diperkenankan mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika aset keuangan tersebut tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat (meskipun aset keuangan mungkin telah diperoleh atau timbul terutama untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat).

Persyaratan untuk reklasifikasi adalah:

a) Dilakukan dalam situasi yang langka;
b) Memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang (jika aset keuangan tidak disyaratkan untuk diklasifikasikan sebagai diperdagangkan pada pengakuan awal) dan Bank memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo.

Bank diperkenankan untuk mereklasifikasi aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang (jika aset keuangan tidak ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual) dari tersedia untuk dijual jika Bank memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo.

Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasikan aset keuangan dari kategori dimiliki hingga jatuh tempo. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (selain dari kondisi-kondisi spesifik tertentu), maka seluruh aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo harus direklasifikasi menjadi aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya, Bank tidak diperkenankan mengklasifikasi aset keuangan sebagai aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo selama 2 (dua) tahun buku berikutnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Reclassification of Financial Instruments (continued)

The Bank shall not reclassify any financial instrument out of fair value through profit or loss classification if upon initial recognition the financial instrument is designated by the Bank as at fair value through profit or loss.

The Bank may reclassify a financial asset out of fair value through profit or loss classification if the financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term (although the financial asset may have been acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in short-term).

Requirements for the reclassification are:

a) Occurs in a rare circumstances;
b) Qualifies as loans and receivables definition (if the financial asset is not designated at held for trading upon initial recognition) and the Bank has the intention and ability to hold the financial assets for the future that can be forecasted or to maturity.

The Bank may reclassify a financial asset at available-for-sale classification which qualifies as loans and receivables definition (if the financial asset is not designated as at available-for-sale) from available-for-sale if the Bank has the intention and ability to hold the financial assets for the future that can be forecasted or to maturity.

The Bank shall not reclassify any financial assets under the category of held to maturity. If there is a sale or reclassification of held to maturity financial asset for more than an insignificant amount before maturity (other than in certain specific circumstances), the entire held to maturity financial assets will have to be reclassified as available for sale financial assets. Subsequently, the Bank shall not classify financial asset as held to maturity financial assets during the following 2 (two) financial years.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi Instrumen Keuangan (lanjutan)

Kondisi spesifik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, dimana harga perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
b) Ketika Bank telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset-aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Bank telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
c) Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Bank, tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Bank.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ke dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebagai laba rugi tidak dapat dibalik.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas dicatat dengan cara sebagai berikut:

a) Jika aset keuangan memiliki jatuh tempo tetap, keuntungan atau kerugian diamortisasi ke laba rugi selama sisa umur investasi dengan metode suku bunga efektif.

b) Jika aset keuangan tidak memiliki jatuh tempo yang tetap, keuntungan atau kerugian tetap dalam ekuitas sampai aset keuangan tersebut dijual atau dilepaskan dan pada saat itu keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Reclassification of Financial Instruments (continued)

The certain specific circumstances are as follows:

a) If financial assets are so close to maturity or redemption date that changes in the market rate of interest would not have a significant effect on their fair value of those financial assets;

b) When the Bank has collected substantially all of the financial assets original principal based on scheduled of payment or Bank receipt early prepayments; or

c) Related to an isolated event that is beyond the Bank's control, is non-recurring and could not have been reasonably anticipated by the Bank.

Reclassification of fair value through profit or loss financial asset to loans and receivables financial asset is recorded at cost or amortized cost. Unrealized gain or loss that has been recognized as profit or loss shall not be reversed.

Reclassification of available-for-sale financial asset to loans and receivables financial asset is recorded at cost or amortized cost. Gain or loss which has previously been recognized in equity shall be accounted for as follows:

a) In the case of a financial asset with a fixed maturity, the gain or loss shall be amortized to profit or loss over the remaining life of the investment using the effective interest rate method.
b) In the case of a financial asset that does not have a fixed maturity, the gain or loss shall remain in equity until the financial asset is sold or otherwise disposed of, also when it incurred any gain or loss shall be recognized in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi Instrumen Keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi dari kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui sebagai laba rugi.

Reklasifikasi surat berharga dari dan ke klasifikasi diperdagangkan tidak diperbolehkan.

Pengungkapan

Bank mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan dalam melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

a) Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik (*Level* 1);
b) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level* 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas baik secara langsung (misalnya, harga) atau secara tidak langsung (misalnya, derivasi dari harga) (*Level* 2); dan
c) *Input* untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*input* yang tidak dapat diobservasi) (*Level* 3).

Risiko pasar - analisis sensitivitas

Bank mengungkapkan:

a) Analisis sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar dimana entitas terekspos pada akhir periode pelaporan yang menunjukkan bagaimana laba rugi dan ekuitas mungkin terpengaruh oleh perubahan pada variabel risiko yang relevan yang mungkin dapat terjadi pada tanggal tersebut;
b) Metode dan asumsi yang digunakan dalam menyusun analisis sensitivitas; dan
c) Perubahan metode dan asumsi yang digunakan tahun sebelumnya dan alasan perubahannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Reclassification of Financial Instruments (continued)

Reclassification of held to maturity financial asset to available-for-sale is recorded at fair value. The unrealized gain or loss is recognized in equity until the time financial assets is derecognized and at the time the cumulative gain or loss previously recognized in equity shall be recognized in the profit or loss.

Reclassification of securities into and out of the trading portfolio is not allowed.

Disclosure

The Bank classifies fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the measurements. The fair value hierarchy shall have the following levels:

a) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);
b) Inputs other than quote prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability either directly (example, price) or indirectly (example, derived from prices) (Level 2); and

c) Inputs for the asset and liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (Level 3).

Market risk - sensitivity analysis

The Bank discloses:

a) A sensitivity analysis for each type of market risk to which the entity is exposed at the end of reporting period, showing how profit or loss and equity would have been affected by changes in the relevant risk variable that were reasonably possible at that date;
b) The methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis; and
c) Changes from the previous year in the methods and assumptions used and the reasons for such changes.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Risiko pasar - analisis sensitivitas (lanjutan)

Untuk pengukuran nilai wajar yang diakui dalam laporan posisi keuangan untuk setiap kelompok instrumen keuangan, Bank mengungkapkan:

a) *Level* pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan, memisahkan pengukuran nilai wajar sesuai *level* yang ditentukan di atas.
b) Setiap pemindahan signifikan antara *Level* 1 dan *Level* 2 pada hierarki nilai wajar dan alasannya. Pemindahan ke dalam setiap *level* diungkapkan dan dijelaskan secara terpisah dari pemindahan keluar dari setiap *level*.

d. Kas dan Setara Kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik Rupiah dan mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kas yang telah ditentukan penggunaannya atau kas yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak diklasifikasikan dalam kas. Pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam perjalanan dan mata uang yang ditarik dari peredaran dan yang masih dalam masa tenggang untuk penukaran ke Bank Indonesia.

Untuk tujuan penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri atas kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan yang tidak dijaminkan atau dibatasi penggunaannya.

e. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain setelah pengakuan awal dinilai sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penyisihan kerugian penurunan nilai diukur bila terdapat indikasi penurunan nilai dengan menggunakan metodologi penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2j.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Instruments (continued)

Market risk - sensitivity analysis (continued)

For fair value measurements recognized in the statement of financial position for each class of financial instruments, the Bank discloses:

a) The level in the fair value hierarchy into which the fair value measurements are categorized in their entirety, segregating fair value measurements in accordance with the levels defined above.
b) Any significant transfers between Level 1 and Level 2 of the fair value hierarchy and the reasons for those transfers. Transfer into each levels is disclosed and discussed separately from transfers out of each level.

d. Cash and Cash Equivalents

Cash represents currency bills and coins, both in Rupiah and foreign currencies which are valid as legal instruments of payment. Appropriated cash or restricted cash that cannot be used freely cannot be classified as cash. Cash also includes cash in vault, petty cash, cash in transit and currency withdrawn from circulation and still within the grace period for exchange with Bank Indonesia.

For statement of cash flows presentation purposes, cash and cash equivalents consists of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks with original maturities of 3 (three) months or less from the acquisition date, which are not pledged as collateral or restricted in use.

e. Current Accounts with Bank Indonesia and Other Banks

Subsequent to initial recognition, current accounts with Bank Indonesia and other banks are measured at their amortized cost using effective interest rate method less the allowance for impairment losses. Allowance for impairment losses is assessed if there is an indication of impairment using the impairment methodology as disclosed in Note 2j.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penempatan dana pada Bank Indonesia dalam bentuk *deposit facility*, serta penempatan dana pada bank lain dalam bentuk *interbank call money*, deposito berjangka dan tabungan.

Penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan pendapatan bunga yang ditangguhkan.

Pada awal transaksi penempatan pada bank lain dinilai berdasarkan nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Penyisihan kerugian penurunan nilai diukur bila terdapat indikasi penurunan nilai dengan menggunakan metodologi penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2j.

g. Surat-surat Berharga

Surat-surat berharga terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia, Obligasi Korporasi, Obligasi Pemerintah, Obligasi Retail Indonesia, Wesel Jangka Menengah (*Medium Term Notes*) dan efek lainnya yang diperdagangkan di bursa efek.

Surat-surat berharga diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan tersedia untuk dijual.

Surat-surat berharga yang diklasifikasikan ke dalam kelompok untuk diperdagangkan ("*trading*") disajikan sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar disajikan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Pendapatan bunga dari efek utang dicatat dalam laba rugi sesuai dengan persyaratan dalam kontrak. Atas penjualan portofolio efek yang diperdagangkan, selisih antara harga jual dengan nilai tercatat diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada periode dimana efek tersebut dijual.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Placements with Bank Indonesia and Other Banks

Placements with Bank Indonesia and other banks represent placements of funds in Bank Indonesia in the form of deposit facility and placements with other banks in the form of interbank call money, time deposits and saving deposits.

Placements with Bank Indonesia are stated at the outstanding balances less unearned interest income.

Placements with other banks are initially measured at fair value plus direct attributable transaction costs, if any and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method. Allowance for impairment losses is assessed if there is an indication of impairment using the impairment methodology as disclosed in Note 2j.

g. Marketable Securities

Marketable securities consist of Certificates of Bank Indonesia, Corporate Bonds, Government Bonds, Indonesian Retail Bonds, Medium Term Notes and other debt marketable securities traded in stock exchanges.

Marketable securities are classified as financial assets for trading and available-for-sale.

Marketable securities classified as trading are stated at fair value. The unrealized gains or losses resulting from the increase or decrease in fair value are recognized in the statement of profit or loss for current year. The interest income from debt securities is recorded in the statement of profit or loss according to the terms of the contract. Upon sale of trading securities portfolio, the difference between the selling price and the carrying value is recognized as a gain or loss in the period when the securities were sold.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

g. Surat-surat Berharga (lanjutan)

Surat-surat berharga yang diklasifikasikan ke dalam kelompok tersedia untuk dijual ("*available-for-sale*") disajikan sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan dari kenaikan (penurunan) nilai wajar, setelah pajak, diakui dan disajikan sebagai komponen penghasilan komprehensif lain. Ketika surat berharga tersebut dihapus, keuntungan dan kerugian kumulatif setelah pajak, yang sebelumnya dicatat di penghasilan komprehensif lain, diakui dalam laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai pada surat berharga tersebut diakui dalam laba rugi dan dikeluarkan dari penghasilan komprehensif lain.

Cadangan kerugian penurunan nilai dan perubahan nilai wajar disajikan sebagai penambahan/pengurangan terhadap saldo surat-surat berharga. Penyisihan kerugian penurunan nilai diukur bila terdapat indikasi penurunan nilai dengan menggunakan metodologi penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2j.

h. Instrumen Keuangan Derivatif

Dalam melakukan usaha bisnisnya, Bank melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur pada risiko pasar seperti risiko mata uang. Setiap kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang tidak ditujukan untuk lindung nilai (atau tidak memenuhi kriteria untuk dapat diklasifikasikan sebagai lindung nilai) diakui dalam laba rugi.

Instrumen derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama non-derivatif dan diperlakukan sebagai instrumen derivatif jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:

1. Karakteristik ekonomi dan risiko dari derivatif melekat tidak secara erat berhubungan dengan karakteristik ekonomi dan risiko kontrak utama;

2. Instrumen terpisah dengan kondisi yang sama dengan instrumen derivatif melekat memenuhi definisi dari derivatif; dan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Marketable Securities (continued)

Marketable securities classified as available-for-sale are stated at fair value. The unrealized gains or losses from increase (decrease) of fair value, net of tax, is recognized and presented as other comprehensive income component. When the marketable securities is disposed, the cumulative gain or loss, net of tax, previously recognized in other comprehensive income, is recognized in the profit or loss. The losses arising from impairment of such marketable securities are recognized in the profit or loss and removed from other comprehensive income.

The allowance for impairment losses and changes in fair value are presented as addition/deduction to the outstanding balance of marketable securities. Allowance for impairment losses is assessed if there is an indication of impairment using the impairment methodology as disclosed in Note 2j.

h. Derivative Financial Instruments

In conducting its business, the Bank conducts transactions of derivative financial instruments to manage exposure on market risks such as currency risk. All derivative contracts are recorded as assets when fair value is positive and as liabilities when fair value is negative.

Gain or loss on a derivative contract not designated as a hedging instrument (or derivative contract that does not qualify as a hedging instrument) is recognized in the profit or loss.

Embedded derivatives instrument are separated from their host non-derivative contract and accounted for as a derivative instrument if all of the following criteria are met:

1. *The economic characteristics and risks of the embedded derivative are not closely related to those of economic characteristic and risk of the main contract;*

2. *A separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan Derivatif (lanjutan)

Instrumen derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama non-derivatif dan diperlakukan sebagai instrumen derivatif jika seluruh kriteria berikut terpenuhi (lanjutan):

3. Instrumen hibrid (kombinasi) tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (dalam hal ini derivatif melekat di dalam aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak dipisahkan).

Seluruh instrumen derivatif (termasuk transaksi valuta asing untuk tujuan pendanaan dan perdagangan) dicatat dalam laporan posisi keuangan berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar, kurs *Reuters* pada tanggal laporan posisi keuangan, diskonto arus kas, model penentu harga opsi atau harga yang diberikan oleh *broker* (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

i. Pinjaman yang Diberikan

Pinjaman yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi pada saat akuisisi dan biaya transaksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Amortisasi tersebut diakui dalam laba rugi. Penyisihan kerugian penurunan nilai diukur bila terdapat indikasi penurunan nilai dengan menggunakan metodologi penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2j.

Pinjaman yang diberikan dengan perjanjian penerusan pinjaman diakui sebesar porsi pinjaman yang risikonya ditanggung oleh Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Derivative Financial Instruments (continued)

Embedded derivatives instrument are separated from their host non-derivative contract and accounted for as a derivative instrument if all of the following criteria are met (continued):

3. The hybrid (combined) instrument is not measured at fair value through profit or loss (i.e. a derivative that is embedded in a financial asset or financial liability at fair value through profit or loss is not separated).

All derivatives instruments (including foreign exchange transactions for financing and trading) are recorded in the statement of financial position at fair value. The fair value is based on the market rate, Reuters exchange rate at statement of financial position date, discounted cash flows, option pricing models or broker quoted price on other instruments with similar characteristics.

i. Loans

Loans are measured at amortized cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment losses. Amortized cost is calculated by discounted or premium on acquisition and transaction costs that are an integral part of effective interest rate. The amortization is recognized in the profit or loss. Allowance for impairment losses is assessed if there is an indication of impairment using the impairment methodology as disclosed in Note 2j.

Loans under channeling agreement are recognized at the portion of loans in which the risks are covered by the Bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

i. Pinjaman yang Diberikan (lanjutan)

Restrukturisasi pinjaman dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan melalui modifikasi persyaratan pinjaman seperti perpanjangan jangka waktu pembayaran, penurunan suku bunga pinjaman dan ketentuan pinjaman yang baru. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok pinjaman yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi pinjaman yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan pinjaman diakui bila nilai sekarang dari jumlah penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan pinjaman yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai pinjaman yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

Kerugian yang mungkin timbul dari restrukturisasi pinjaman merupakan bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah direalisasi atau sudah diambil alih. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebet cadangan kerugian penurunan nilai.

Penerimaan kembali atas pokok pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan bunga atas pinjaman yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya. Penerimaan denda atas pinjaman yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai pendapatan non-operasional.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Loans (continued)

Loan restructuring is performed for debtors who are facing financial difficulties in fulfilling their obligations, through a modification of the terms of the loan such as the extension of payment terms, interest rate discount and definitions of the new loan. After restructuring, all future cash receipts under the new terms are accounted for as the recovery of principal loan and interest income, in accordance with the restructuring scheme.

Losses on loan restructuring in respect of modification of the terms of the loans are recognized only if the present value of total future cash receipts specified by the new terms of the loans, including both receipts designated as interest and those designated as loan principal, are less than the carrying amount of loans before restructuring.

The possible losses from loan restructuring are part of the allowance for impairment losses.

Loans are written-off when there are no realistic prospects of future recovery and all collateral have been realized or have been foreclosed. When loans are deemed uncollectible, they are written-off against the related allowance for impairment losses.

Subsequent recoveries of written-off loans are credited by adjusting the allowance for impairment losses account. Interest received on loans previously written-off are recorded as other operating income. Penalties received on loans previously written-off are recorded as non-operating income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

j. Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Keuangan

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;

b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;

c) Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan keuangan tersebut;

d) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;

e) Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

f) Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:

   1) Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan

   2) Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang diharapkan tapi belum terjadi).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Impairment of Financial and Non-Financial Assets

Impairment of Financial Assets

The criteria that the Bank uses to determine the objective evidence of impairment loss include:

a) Significant financial difficulties of the issuer or obligor;

b) Breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;

c) The lender, with economic or legal reasons related to the financial difficulties experienced by the debtor, provide relief (concessions) to the debtor that can not be provided if the debtor is not experiencing those financial difficulties;

d) It is probable that the debtor will declare bankruptcy or other financial reorganization;

e) The disappearance of an active market for the financial asset because of financial difficulties; or

f) Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition of the asset, although the decrease can not yet be identified to the individual financial assets in the asset group, including:

   1) Deterioration in the payment status of debtors in the group; and

   2) National or local economic conditions that correlate with defaults on assets in the group.

If there is an objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

j. Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Penilaian secara individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang memiliki bukti objektif penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan dimasukan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan dilakukan penilaian secara kolektif.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang menyebabkan penurunan nilai), yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Impairment of Financial and Non-Financial Assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

The estimated period between the event and the identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, this period varies between 3 (three) to 12 (twelve) months, for a particular case requires a longer period.

For financial assets carried at amortized cost, the Bank initially assesses individually whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

Individual assessment is performed on the significant financial assets that had objective evidence of impairment. The insignificant financial assets included in the group of financial assets with similar credit risk characteristics and assessed collectively.

The Bank assesses at each statement of financial position date whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired and impairment losses are incurred if and only if, there is an objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred loss event), which has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

j. Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi menggunakan cadangan kerugian penurunan nilai dan jumlah kerugian penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Arus kas masa datang dari kelompok keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di Bank. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Pinjaman bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan pinjaman hanya bersumber dari agunan; atau
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Impairment of Financial and Non-Financial Assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

If there is an objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred) discounted using the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment losses account and the amount of the loss is recognized in the profit or loss. The calculation of the estimated future cash flows of a collateralized financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure of assets less costs for obtaining and selling the collateral, whether foreclosure is probable or not.

If the Bank determines that there is no objective evidence of impairment value for an individually assessed financial asset, whether those financial asset significant or not, the Bank includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. The future cash flows of group of financial assets that are collectively assessed are estimated based on historical loss experience of assets with similar credit risk characteristics with credit risk characteristics of such group in the Bank. Financial assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

The Bank uses fair value of the collateral as a basis for future cash flows if it meets one of the following conditions:

1. Loans are collateral dependent, i.e. if the loan repayment is only from the collateral; or
2. Foreclosure of collateral is likely to occur and supported by legally binding collateral agreements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

j. Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual atas aset keuangan dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flows method*).

Bank menetapkan pinjaman yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Pinjaman yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti objektif penurunan nilai; atau
2. Pinjaman yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara kolektif dilakukan untuk: (a) Pinjaman dalam segmen pasar korporasi dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus serta tidak direstrukturisasi; atau (b) Pinjaman dalam segmen pasar usaha kecil dan konsumen.

Perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan pengalaman kerugian yang lalu (*historical loss experience*). Pengalaman kerugian yang lalu disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap risiko kredit Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini. Aset keuangan dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi kredit dan tunggakan debitur.

Bank menggunakan *migration analysis method*, untuk menilai penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman dengan menggunakan data historis dalam menghitung *Probability of Default* (PD) dan *Loss of Given Default* (LGD).

Aset keuangan dan penyisihan yang terkait dihapuskan jika tidak ada peluang yang realistis untuk pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah direalisasi atau sudah diambil alih oleh Bank. Aset keuangan tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik penyisihan kerugian penurunan nilai. Aset keuangan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Impairment of Financial and Non-Financial Assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Allowance for impairment losses on impaired financial assets is assessed individually by using discounted cash flows method.

The Bank determines the loans that must be evaluated for impairment on an individual basis, if it meets one of the following criteria:

1. *Loans which individually have significant value and objective evidence of impairment; or*
2. *Restructured loans that individually have significant value.*

Based on the above criteria, the collective assessment conducted to: (a) Loans in the corporate market segment with the current collectibility and special attention and not restructured; or (b) Loans in the small business market segment and consumers.

Calculation of the allowance for impairment losses on financial assets that are collectively assessed based on past loss experience (historical loss experience). Historical loss experience is adjusted by using basic observable data to reflect the effects of the current state of the Bank's credit risk and eliminate the effects of the past that is not applicable currently. Financial assets are classified based on similar credit risk characteristics such as segmentation considering credit and delinquent debtors.

The Bank uses the migration analysis method to assess the allowance for loan impairment losses using historical data to calculate the Probability of Default (PD) and Loss of Given Default (LGD).

Financial assets and the associated allowance are written-off when there is no realistic prospect of future recovery and all collaterals have been realized or have been transferred to the Bank. Financial assets are written-off by reversing the allowance for impairment losses. Financial assets are written-off if all necessary procedures have been performed and the amount of loss has been determined.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

j. Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Jika pada suatu periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat pinjaman debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar dari investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Ketika terdapat bukti tersebut di atas untuk aset yang tersedia untuk dijual, kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laba rugi. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laba rugi merupakan selisih antara biaya perolehan, setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi, dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laba rugi.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai.

Suatu aset mengalami penurunan nilai jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai yang dapat dipulihkan. Nilai tercatat dari aset non-keuangan, kecuali aset pajak tangguhan, ditelaah setiap periode, untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Bank akan melakukan estimasi jumlah nilai yang dapat dipulihkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Impairment of Financial and Non-Financial Assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

If in the next period, the amount of allowance for impairment losses decreased and the decrease can be related objectively to an event that occured after the recognition of the impairment losses (i.e. upgrade debtor's or issuer's collectibility), therefore the impairment loss that was previously recognized has to be reversed, by adjusting the allowance account. The reversal amount of financial assets is recognized in the profit or loss.

For available-for-sale financial assets, the Bank assesses at each statement of financial position date whether there is an objective evidence that the financial assets are impaired.

A significant or long term decline in the fair value of investment in case of debt instruments classified as available-for-sale, a significant or prolonged decline in the fair value of debt instrument below its cost is an objective evidence of impairment resulting in the recognition of an impairment loss. If any such evidence exists for available-for-sale financial assets, impairment losses on available-for-sale financial assets are recognized by transferring the cumulative loss that has been recognized directly in equity to the profit or loss. The cumulative loss that has been removed from equity and recognized in the profit or loss is the difference between the acquisition cost, net of any principal repayment and amortization and the current fair value, less any impairment loss that previously recognized in the profit or loss.

Impairment of Non-Financial Assets

The Bank assesses at the end of each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired.

Assets are considered as impaired when the carrying value of assets exceeded the recoverable amount. The carrying amount of non-financial assets, except for deferred tax assets are reviewed at each period to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists the assets recoverable amount is estimated.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

j. Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (lanjutan)

Pengujian penurunan nilai atas aset takberwujud yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas dilakukan secara tahunan pada saat yang sama, dengan membandingkan nilai tercatatnya dengan jumlah yang dapat dipulihkan.

Jumlah yang dapat dipulihkan dari suatu aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi antara nilai pakainya dan nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual. Dalam menentukan nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai kas kini dan risiko spesifik terhadap aset tersebut.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, aset yang tidak dapat diuji secara individual akan digabungkan dengan kelompok yang lebih kecil yang memberikan arus kas masuk dari penggunaan berkelanjutan yang sebagian besar independen terhadap arus kas masuk atas aset lainnya atau UPK.

Penyisihan penurunan nilai diakui jika nilai tercatat dari suatu aset atau UPK melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Penyisihan penurunan nilai diakui pada laba rugi.

Penyisihan penurunan nilai diakui pada periode sebelumnya dinilai pada setiap tanggal pelaporan untuk melihat adanya indikasi bahwa kerugian telah menurun atau tidak ada lagi. Kerugian penurunan nilai dipulihkan jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan nilai yang dapat dipulihkan.

k. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

Dalam kegiatan aktivitas bisnisnya, Bank memberikan jaminan keuangan, seperti *letters of credit*, bank garansi dan akseptasi.

Tagihan akseptasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai. Liabilitas akseptasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Penyisihan kerugian penurunan nilai dilakukan bila terdapat indikasi penurunan nilai dengan menggunakan metodologi penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2j.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Impairment of Financial and Non-Financial Assets (continued)

Impairment of Non-Financial Assets (continued)

The testing of impairment of intangible assets that have indefinite useful lives or that are not yet available for use, is performed annually at the same time, by comparing the carrying amount with the recoverable amount.

The recoverable amount of an assets or Cash Generating Unit (CGU) is greater of its value in use and its fair value or CGU less cost to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessment of the time value of money and the risk specific to the assets.

For the purpose of impairment testing, assets that cannot be tested individually are grouped together into the smallest group that generates cash inflows from continuing use that are largely independent of the cash inflows of other assets or CGU.

An impairment loss is recognized if the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount. Impairment losses are recognized in the profit or loss.

Impairment losses recognized in prior period are assessed at each reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been changes in the estimates used to determine the recoverable amount.

k. Acceptance Receivables and Payables

In the ordinary course of business, the Bank provides financial guarantees, consisting of letters of credit, bank guarantees and acceptances.

Acceptance receivables are measured at amortized cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment losses. Acceptance payables are measured at amortized cost by using the effective interest rate method.

Allowance of impairment losses is calculated if there is an objective evidence of impairment by using the impairment methodology as disclosed in Note 2j.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

I. Aset Tetap

Tanah dan bangunan dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi, kecuali tanah tidak disusutkan.

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan. Aset yang mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan direvaluasi secara periodik.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi aset tetap langsung dikreditkan ke akun "Surplus revaluasi aset tetap" pada penghasilan komprehensif lain, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dalam hal ini kenaikan revaluasi, dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Surplus revaluasi yang dipindahkan secara periodik ke saldo rugi adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Selanjutnya, akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Pada saat penghentian aset, surplus revaluasi untuk aset tetap yang dijual dipindahkan ke saldo rugi.

Penyusutan atas bangunan yang telah di revaluasi diakui dalam laba rugi. Pada penjualan atau penghentian pengakuan selanjutnya suatu aset yang direvaluasi, surplus revaluasi yang dapat diatribusikan yang tersisa di aset akan dialihkan langsung ke saldo laba. Tanah tidak mengalami penyusutan.

Kendaraan bermotor dan perlengkapan dan peralatan kantor dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Fixed Assets

Land and buildings are stated at their revalued amounts, being the fair value at the date of revaluation, less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses, except for land that is not depreciated.

Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materiality from the determined fair value as at statement of financial position reporting date. Asset with significant changes in fair value will be revalued periodically.

Any revaluation increase arising on the revaluation of such fixed assets is credited to the "Revaluation surplus on fixed assets" account in other comprehensive income, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which was previously recognized in profit or loss and other comprehensive income, in which case the increase is credited to profit or loss and other comprehensive income to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount of land and buildings revaluation is charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income, if the decrease exceeds the assets revaluation surplus balance, if any.

A periodic annual transfer from the asset revaluation surplus to deficit is made for the difference between depreciation based on the revalued carrying amount of the assets with the depreciation based on the original cost of the assets. Additionally, accumulated depreciation at the revaluation date is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net assets amount is restated to the revalued amount of the asset. Upon disposal, any revaluation surplus relating to the particular asset being sold is transferred to deficit.

Depreciation on revalued buildings is recognized in profit or loss. On the subsequent sale or retirement of revalued property, the attributable revaluation surplus remaining in the properties is transferred directly to retained earnings. Land is not depreciated.

Motor vehicles and office furniture and equipment are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

l. Aset Tetap (lanjutan)

Hak atas tanah tidak disusutkan kecuali terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Fixed Assets (continued)

Land right is not depreciated unless there is contrary evidence indicating that the extension or renewal of land right is likely or definitely not obtainable.

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the fixed assets as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	20	*Buildings*
Inventaris kantor	4 - 8	*Office equipment*
Kendaraan	4 - 8	*Vehicles*

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The carrying value of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use. Any gain or loss arising on derecognition of the assets is charged to profit or loss in the year the assets derecognized.

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direviu dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan.

The residual values, estimated useful lives, and depreciation method are reviewed and adjusted, at year end, if necessary.

Aset yang dimiliki untuk dijual diukur berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai buku atau nilai wajar.

Assets held for sale are measured at the lower of book value or fair value.

m. Aset Takberwujud

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset takberwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis adalah nilai wajar aset pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat yang terbatas ditinjau setidaknya pada setiap akhir periode pelaporan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset takberwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laporan laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

m. Intangible Assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is its fair value as of the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life is reviewed at least at the end of each reporting period.

Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and recognized in profit or loss when the asset is derecognized.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud yang dimiliki oleh Bank berupa perangkat lunak dan lisensi. Aset takberwujud diakui jika dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Bank akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut.

Perangkat lunak yang bukan merupakan bagian integral dari perangkat keras yang terkait dicatat sebagai aset takberwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Biaya perolehan perangkat lunak terdiri dari seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam persiapan perangkat lunak tersebut sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak dapat ditambahkan pada biaya perolehan perangkat lunak atau dikapitalisasi sebagai perangkat lunak hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak yang bersangkutan sehingga menjadi lebih besar dari standar kinerja yang diperkirakan semula. Pengeluaran yang tidak menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Perangkat lunak dengan umur terbatas diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat ekonomis yaitu 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun.

Amortisasi perangkat lunak diakui dalam laporan laba rugi sejak tanggal perangkat lunak tersebut tersedia untuk dipakai sampai berakhirnya masa manfaat dari perangkat lunak tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Intangible Assets (continued)

Intangible assets held by the Bank are softwares and licenses. Intangible assets are recognized if and only if, when their cost can be measured reliably and is probable that expected future benefits that are attributable to it will flow to the Bank.

Software which is not an integral part of a related hardware is recorded as intangible asset and stated at carrying amount, which is cost less accumulated amortization.

The cost of software consists of all expenses directly attributable to the preparation of such software, until it is ready to be used for its intended purpose.

Subsequent expenditure on software acquisition is capitalized to the value of software only when it increases the future economic benefits of the software, so that it becomes larger than originally expected performance standards. Expenditure with no addition of future economic benefits from the software is directly recognized as expense when incurred.

Software with a finite useful life is amortized using straight-line method over the estimated useful life of software, which is 8 (eight) until 12 (twelve) years.

Software amortization is recognized in the statement of profit or loss from the date that is available for use until the economic benefits of software ended.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

n. Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih dinyatakan sebesar nilai terendah antara nilai tercatat pinjaman yang diberikan atau nilai realisasi neto dari agunan yang diambil alih. Nilai realisasi neto adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan tersebut. Selisih lebih saldo pinjaman di atas nilai realisasi neto dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan.

Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan pada laba rugi dan pada saat terjadinya.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan kerugian agunan yang diambil alih dibentuk berdasarkan penurunan nilai agunan yang diambil alih.

o. Biaya Dibayar Dimuka dan Aset Lain-lain

Biaya dibayar dimuka merupakan pembayaran kepada pihak lain yang telah dilakukan namun belum diakui sebagai beban pada saat pembayaran dilakukan. Biaya dibayar dimuka akan digunakan untuk aktivitas Bank dimasa mendatang. Biaya dibayar dimuka akan diakui sebagai beban pada saat diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.

Asuransi kredit dibayar dimuka diamortisasi berdasarkan pola manfaat ekonomik masa depan berupa pencapaian pendapatan bunga bersih yang diperkirakan dalam rencana bisnis Bank selama umur manfaatnya.

Sewa dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Aset lain-lain disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi penurunan nilai, jika ada.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Foreclosed Assets

Foreclosed assets are stated at net realizable value of those foreclosed assets or at loan outstanding amount, whichever is lower. Net realizable value is the fair value of the foreclosed assets less estimated costs of liquidating the assets. The excess of loan receivable over the net realizable value of the foreclosed assets is charged to the allowance for impairment losses of non-financial assets.

The difference between the value of the foreclosed assets and the proceeds from the sale of such assets is recorded as a gain or loss when the assets is sold.

Expenses for maintaining foreclosed assets are charged in the profit or loss as incurred.

Management evaluates the value of foreclosed assets regularly. An allowance for impairment losses of foreclosed assets is provided based on the decline in value of foreclosed assets.

o. Prepaid Expenses and Other Assets

Prepaid expenses are payments made to other parties but have not been recognized as expense at the time of payment. Prepaid expenses will be used for the Bank's activities in the future. Prepaid expenses are recognized as expenses during the amortization in accordance with the expected period of benefit.

The prepaid credit insurance is amortized based on the pattern of future economic benefits in the form of achieving the estimated net interest income in the Bank's business plan for the useful life.

Prepaid rent is amortized over its useful life using the straight-line method.

Other assets are stated at carrying amount, which is cost less accumulated amortization and accumulated impairment loss, if any.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank yang harus segera dibayarkan kepada pihak lain berdasarkan kontrak atau perintah dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu. Liabilitas segera dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

q. Simpanan Nasabah dan Simpanan dari Bank Lain

Simpanan nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah (di luar bank lain) kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Simpanan nasabah terdiri dari giro, tabungan dan deposito berjangka.

Simpanan dari bank lain merupakan liabilitas kepada bank lain dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar jumlah liabilitas kepada bank lain tersebut.

Simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

r. Liabilitas atas Efek-Efek yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi dengan bunga dibayar dimuka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali yang disepakati diperlakukan sebagai beban bunga dibayar dimuka dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

s. Pinjaman Subordinasi

Pinjaman subordinasi diakui sebesar nilai wajarnya pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman subordinasi dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Obligations Due Immediately

Obligations due immediately represent the Bank's obligations to other parties based on contract or order by those having authority that have to be settled immediately. Obligations due immediately are stated at amortized cost using the effective interest rate method.

q. Deposits from Customers and Deposits from Other Banks

Deposits from customers are deposits from customers (excluding other banks) to the Bank based on deposit agreements. Deposits from customers consist of demand deposits, savings deposits and time deposits.

Deposits from other banks represent liabilities to other banks, in the form of demand deposits, saving deposits and time deposits. Deposits from other banks are stated at the amount due to the other banks.

Deposits from customers and deposits from other banks are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method.

r. Securities Sold Under Repurchase Agreements

Securities sold under repurchase agreements are presented as liabilities in the statement of financial position at the agreed repurchase price net of the unamortized interest. The difference between the selling price and the agreed repurchase price is treated as unamortized interest and recognized as interest expense over the period, commencing from the selling date to the repurchase date using effective interest rate method.

s. Subordinated Loan

Subordinated loan is initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on subordinated loan and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

t. Biaya Emisi Saham

Biaya yang terjadi sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat dan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan dicatat sebagai pengurang tambahan modal disetor.

u. Pendapatan dan Beban Bunga

Untuk instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, pendapatan maupun beban bunganya diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang akan didiskontokan secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut atau, jika lebih tepat untuk masa yang lebih singkat, sebagai nilai tercatat bersih dari aset atau liabilitas keuangan tersebut. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh syarat dan ketentuan kontraktual instrumen keuangan termasuk *fees*/biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan instrumen tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Nilai tercatat aset atau liabilitas keuangan disesuaikan jika Bank merevisi estimasi pembayaran maupun penerimaan. Nilai tercatat yang disesuaikan tersebut dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif awal dan perubahan nilai tercatat dicatat di laba rugi.

Pinjaman yang diberikan dan aset produktif lainnya (tidak termasuk surat-surat berharga) diklasifikasikan sebagai *non-performing* jika telah masuk dalam klasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet, sedangkan, surat-surat berharga diklasifikasikan sebagai *non-performing* jika penerbit surat berharga tidak dapat memenuhi pembayaran bunga dan/atau pokok atau memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah peringkat investasi.

Penerimaan tunai atas pinjaman yang diberikan yang diklasifikasikan sebagai diragukan atau macet, diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok pinjaman yang diberikan. Kelebihan penerimaan kas dari pokok pinjaman yang diberikan diakui sebagai pendapatan bunga dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Shares Issuance Cost

Cost related to Initial Public Offering and Limited Public Offering with Pre-emptive Rights (HMETD) are deducted from the proceeds and presented as a deduction of the additional paid-in capital.

u. Interest Income and Expense

Interest income and expenses for all financial instruments measured at amortized cost and financial assets classified as available-for-sale is recorded using the effective interest rate method, which is the rate that exactly discounts of estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. The calculation takes into account all contractual terms of the financial instrument and includes any fees or incremental costs that are directly attributable to the instrument and an integral part of the effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset or liability is adjusted if the Bank revises its estimates of payments or receipts. The adjusted carrying amount is calculated based on the original effective interest rate and the change in carrying amount is recorded in the profit or loss.

Loans and other earning assets (excluding securities) are classified as non-performing when they are classified as sub-standard, doubtful, and loss, while marketable securities are categorized as non-performing when the issuer of securities defaults on its interest and/or principal payments or if the securities are rated at least 1 (one) level below investment grade.

Cash receipts from loans which are classified as doubtful or loss are applied first as a reduction to the loan principal. The excess of cash receipts over loan principal is recognized as interest income in the profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Pendapatan dan Beban Bunga (lanjutan)

Pengakuan pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan dihentikan pada saat pinjaman yang diberikan tersebut diklasifikasikan mengalami penurunan nilai. Pendapatan bunga dari pinjaman yang mengalami penurunan nilai dilaporkan sebagai tagihan kontinjensi dan diakui sebagai pendapatan pada saat pendapatan tersebut diterima *(cash basis)*.

v. Pendapatan dan Beban Provisi dan Komisi

Pendapatan dan beban provisi dan komisi yang jumlahnya material yang berkaitan langsung dengan kegiatan perolehan aset keuangan diakui sebagai bagian/pengurang dari biaya perolehan aset keuangan yang bersangkutan dan akan diakui sebagai pendapatan dengan cara diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif sepanjang perkiraan umur aset atau liabilitas keuangan.

Saldo beban dan pendapatan provisi dan komisi yang ditangguhkan atas pinjaman yang diberikan yang diakhiri atau diselesaikan sebelum jatuh tempo langsung diakui sebagai pendapatan pada saat penyelesaiannya.

Provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan pinjaman yang diberikan atau jangka waktu pinjaman yang diberikan, atau jumlahnya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

w. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya

Seluruh pendapatan dan beban operasional lainnya dibebankan pada laba rugi saat terjadinya transaksi.

x. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laba rugi, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas atau penghasilan komprehensif lain. Dalam hal ini, pajak tersebut diakui langsung pada ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Interest Income and Expense (continued)

The recognition of interest income on loans is discontinued when the loans are classified as impaired. Interest income from impaired loans is reported as contingent receivables and to be recognized as income when the cash is received (cash basis).

v. Fees and Commission Income and Expense

Fees and commission income and expense that have material amount directly related with the acquisition of financial assets are recognized as part of/deduction to acquisition cost of related financial assets and will be recognized as income and amortized using effective interest rate method during the expected life of financial assets or liabilities.

The outstanding balances of deferred fees and income on provision and commission of loans terminated or settled prior to maturity are directly recognized as income in settlement.

Fees and commissions which are not related to loans or loan period, or immaterial are recognized as income or expenses at the time the transactions occur.

w. Other Operating Income and Expenses

All other operating income and expenses are charged to the profit or loss at the time the transaction occur.

x. Taxation

The income tax expense is comprised of current and deferred income tax. Tax is recognized in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized directly in equity or other comprehensive income. In this case, the tax is also recognized directly in equity or other comprehensive income.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income for the current period and computed based on the tax rates and tax regulations that are enacted or substantively enacted as at the reporting date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

x. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Manajemen secara periodik melakukan evaluasi atas posisi yang diambil dalam pelaporan pajak sehubungan dengan situasi dimana peraturan pajak terkait menjadi subjek interpretasi dan menetapkan provisi bila diperlukan.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat diterimanya surat ketetapan pajak atau, jika Bank mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut ditetapkan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif (atau peraturan) pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan untuk diterapkan jika aset pajak tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

x. Taxation (continued)

Current Tax (continued)

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Management periodically evaluates position taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions when appropriate.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed by the Bank, when the result of the appeal is determined.

Deferred Tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date. However, deferred tax liabilities are not recognized if they arise from the initial recognition of goodwill or from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates (or regulations) that have been enacted or substantially enacted as at the reporting date and expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

x. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Pada setiap tanggal pelaporan, Bank meninjau kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui dan mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disalinghapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama, atau Bank bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

y. Laba (Rugi) per Saham Dasar

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) periode dan tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode berjalan.

Bank tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2019, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

x. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax assets to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity, or the Bank intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

y. Basic Earnings (Loss) per Share

Basic earning (loss) per share is calculated by dividing earning (loss) for the period and year by the weighted-average number of shares outstanding during the year.

The Bank has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2019, and accordingly, no diluted earning per share is calculated and presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

z. Imbalan Kerja

Efektif 1 Januari 2019, Bank menerapkan Amandemen PSAK 24, "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program."

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa biaya jasa lalu (atau keuntungan atau kerugian atas penyelesaian) dihitung dengan mengukur liabilitas (aset) imbalan pasti menggunakan asumsi aktuarial kini dan membandingkan imbalan yang ditawarkan dalam program dan aset program sebelum dan setelah amendemen, (atau kurtailmen atau penyelesaian program) tetapi tidak mempertimbangkan dampak batas atas asset (yang mungkin timbul ketika program imbalan pasti dalam keadaan surplus). PSAK 24 secara jelas mengatur bahwa dampak perubahan dari batas atas aset yang timbul dari perubahan program (atau kurtailmen atau penyelesaian) ditentukan dalam tahap kedua dan diakui secara normal di penghasilan komprehensif lain.

Paragraf yang berkaitan dengan pengukuran biaya jasa kini dan bunga neto atas liabilitas (aset) manfaat pasti juga telah diamandemen. Bank sekarang disyaratkan untuk menggunakan asumsi yang diperbarui dari pengukuran kembali tersebut untuk menentukan biaya jasa kini dan bunga neto untuk sisa periode pelaporan setelah perubahan program. Dalam hal bunga neto, amandemen telah menjelaskan bahwa untuk periode setelah amandemen program, bunga neto dihitung dengan mengalikan liabilitas (aset) manfaat pasti neto sebagaimana telah diukur kembali berdasarkan PSAK 24 dengan tingkat diskonto yang digunakan dalam pengukuran kembali (juga memperhitungkan dampak kontribusi dan pembayaran manfaat terhadap liabilitas (aset) manfaat pasti).

Penerapan dari amandemen PSAK 24 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Employee Benefits

Effective January 1, 2019, the Bank adopted Amendments to PSAK 24 , "Employee Benefits: Plan Amendment, Curtailment or Settlement".

The amendments clarify that the past service cost (or of the gain or loss on settlement) is calculated by measuring the defined benefit liability (asset) using updated assumptions and comparing benefits offered and plan assets before and after the plan amendment (or curtailment or settlement) but ignoring the effect of the asset ceiling (that may arise when the defined benefit plan is in a surplus position). PSAK 24 is now clear that the change in the effect of the asset ceiling that may result from the plan amendment (or curtailment or settlement) is determined in a second step and is recognized in the normal manner in other comprehensive income.

The paragraphs that relate to measuring the current service cost and the net interest on the net defined benefit liability (asset) have also been amended. The Bank will now be required to use the updated assumptions from this remeasurement to determine current service cost and net interest for the remainder of the reporting period after the change to the plan. In the case of the net interest, the amendments make it clear that for the period post plan amendment, the net interest is calculated by multiplying the net defined benefit liability (asset) as remeasured under PSAK 24 with the discount rate used in the remeasurement (also taking into account the effect of contributions and benefit payments on the net defined benefit liability (asset)).

The adoption of Amendments to PSAK 24 has no significant impact on the financial statements.

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when incurred to the employees on an accrual basis.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

z. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pasca kerja

Bank memberikan imbalan pasca kerja manfaat pasti kepada karyawannya sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Bank menyelenggarakan dana pensiun untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Sinarmas MSIG. Pembayaran kepada dana pensiun didasarkan pada iuran pasti tertentu yang ditentukan program pensiun. Iuran pensiun ditanggung oleh Bank.

Penyisihan menurut undang-undang dihitung dengan membandingkan imbalan yang akan diterima oleh karyawan pada usia pensiun normal melalui program pensiun dengan imbalan yang dihitung berdasarkan undang-undang setelah dikurangi akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Jika bagian iuran yang didanai oleh Bank melalui program pensiun kurang dari imbalan yang diwajibkan menurut undang-undang, Bank akan melakukan penyisihan atas kekurangannya.

Liabilitas imbalan pasca kerja merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan. Liabilitas imbalan pasca kerja dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode *Projected-Unit-Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga Obligasi Pemerintah dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo pensiun yang bersangkutan.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amandemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Employee Benefits (continued)

Post-employment benefits

The Bank provides defined post-employment benefits for its employees based on Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003.

The Bank has pension fund covering substantially all of its qualified permanent employees which is managed by Financial Institution Pension Fund Sinarmas MSIG. Payment made to pension fund is based on certain dues on pension plan. Retirement contributions are funded by the Bank.

The provision for the Law has been calculated by comparing the benefit that will be received by an employee at normal pension age from the pension plan with the benefit as stipulated under the Law after deduction of accumulation of contribution and the related investment result. If the funded portion of the pension plan benefit is less than the benefit as required by the Law, the Bank will provide for such shortage.

Post-employment benefits liability is the present value of defined benefits obligation at the statement of financial position date. Post-employment benefits liability is calculated annually by independent actuary using the Projected-Unit-Credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds that are denominated in the currency in which the benefit will be paid and that have the terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Past service costs arising from amendment or curtailment programs are recognized as expenses in profit or loss when incurred.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

z. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian aktuarial yang terjadi dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuaria dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas di penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari:

i. Keuntungan atau kerugian aktuarial;
ii. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset); dan
iii. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi.

Kurtailmen terjadi apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

i. Menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau
ii. Mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang material dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Penyelesaian program terjadi ketika Bank melakukan transaksi yang menghapuskan semua liabilitas hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Bank memberikan penghargaan layanan jangka panjang dan tunjangan cuti panjang untuk karyawan yang telah mencapai masa kerja tertentu.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Employee Benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Remeasurement on net defined benefit liabilities (assets), recognized as other comprehensive income, consists of:

i. Actuarial gain or losses;
ii. Return on program asset, excluding amounts included in net interest on liabilities (assets); and
iii. Every changes in asset ceiling, excluding amounts included in net interest on liabilities (assets).

Remeasurement on net defined benefit liabilities (assets) recognized as other comprehensive income shall not be reclassified to profit or loss in the next periods.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized when the curtailment or settlement occurs.

A curtailment occurs when an entity either:

i. Demonstrably committed to make a significant reduction in the number of employees covered by a plan; or
ii. Amends the terms of a defined benefit plan so that a significant element of future service by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits.

A settlement occurs when the Bank enters into a transaction that eliminates all further legal or constructive obligation for part or all of the benefits provided under a defined benefit plan.

Other long-term service benefits

The Bank also provides long service award and long service leave for employees attaining a certain number of years of service.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

z. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya - (penghargaan kerja dan cuti besar), kepada para karyawan kuncinya. Biaya untuk menyediakan imbalan ini ditetapkan dengan menggunakan metode *Projected-Unit-Credit.* Metode ini merefleksikan jasa yang diserahkan oleh karyawan hingga tanggal penilaian dan memperhitungkan asumsi terkait proyeksi gaji karyawan. Imbalan kerja jangka panjang lainnya termasuk biaya jasa kini, biaya bunga, biaya jasa lalu dan pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial. Keuntungan dan kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

aa. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai *lessee*

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontinjensi yang timbul dibawah sewa operasi diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Employee Benefits (continued)

Other long-term service benefits (continued)

The Bank provides other long-term employee benefits - (service award and long service leave), to its key employees. The cost of providing this benefit is determined using the Projected-Unit-Credit method. This method reflects service rendered by employees to the date of valuation and incorporates assumptions concerning employees projected salaries. Other long-term employee benefit expense includes current service cost, interest cost, past service costs and recognition of actuarial gains and losses. The actuarial gains and losses and past service costs are recognized immediately in the current years profit or loss.

aa. Leases

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

As lessee

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

ab. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Bank yang secara regular direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional yaitu Direksi.

Segmen geografis Bank adalah komponen Bank yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain. Bank melaporkan segmen geografis berdasarkan daerah Jakarta, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali dan Kalimantan.

ac. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Bank menerapkan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ab. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Bank that are regularly reviewed by "the chief operating decision maker" in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

a. that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);

b. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and

c. for which discrete financial information is available.

The Bank presents operating segments based on internal reports that are presented to the operating decision maker which is the Board of Directors.

The Bank's geographical segment is a distinguishable component of the Bank that is engaged in providing services within a particular economic environment and that is subject to risks and returns that are different from those operating in other economic environments. The Bank reports geographical segments based on the area of Jakarta, Java, Sumatera, Sulawesi, Bali and Kalimantan.

ac. Transaction with Related Parties

The Bank applied PSAK 7, "Related Parties Disclosures", which requires disclosure of related party relationships, transactions and outstanding balances, including commitments in the financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

ac. Transaksi Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Bank (entitas pelapor), yang meliputi:

a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

(i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
(ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
(iii) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

(i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
(ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
(iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
(iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
(v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
(vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
(vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); dan
(viii) Entitas atau anggota grup yang merupakan bagian dari personil kunci manajemen kepada Bank atau induk dari Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ac. Transactions with Related Parties (continued)

A related party represents a person or an entity who is related with the Bank (the reporting entity), as follows:

a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:

(i) Has control or joint control over the reporting entity;
(ii) Has significant influence over the reporting entity; or
(iii) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b) An entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:

(i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
(ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
(iii) Both entities are joint ventures of the same third party;
(iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
(v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees from either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
(vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
(vii) A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); and
(viii) The entity or any member of a group of which it is party provides key management personnel services to the Bank or to the parent of the Bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

ac. Transaksi Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat normal maupun tidak, sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, telah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

ad. Provisi

Bank menerapkan PSAK 57 (Revisi 2014), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi". PSAK 57 menetapkan kriteria pengakuan dan dasar pengukuran untuk provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi dan untuk memastikan bahwa informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan pengguna memahami sifat, waktu dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut.

Provisi diakui jika Bank memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) jika, sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah liabilitas tersebut dapat diestimasi secara andal.

Provisi diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Peningkatan provisi ini sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban bunga.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan liabilitas kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

ae. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui melainkan diungkapkan dalam laporan keuangan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil (*remote*). Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus masuk manfaat ekonomi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ac. Transactions with Related Parties (continued)

All significant transactions and balances with related party, whether or not conducted under terms and conditions similar to those granted to third party, are disclosed in the notes to the financial statements.

ad. Provision

The Bank applied PSAK 57 (Revised 2014), "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets". PSAK 57 provides that appropriate recognition criteria and measurement bases are applied to provisions, contingent liabilities and contingent assets and to ensure that sufficient information is disclosed in the notes to the financial statements to enable users to understand the nature, timing and amount related to the information.

Provisions are recognized when the Bank has present obligations (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provision is measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation. The increase in the provision due to the passage of time is recognized as interest expense.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

ae. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized but are disclosed in the financial statements, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized in the financial statements but disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

af. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Bank pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

ag. Interpretasi dan Penyesuaian Tahunan 2019

Dalam tahun berjalan, Bank telah menerapkan standar dan sejumlah amandemen/ penyesuaian/interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019.

PSAK 46 (penyesuaian), "Pajak Penghasilan"

Amendemen ini mengklarifikasi bahwa suatu entitas harus mengakui konsekuensi pajak penghasilan atas dividen dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan di mana entitas awalnya mengakui transaksi yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan tersebut. Ini diterapkan terlepas dari apakah tarif pajak yang berbeda berlaku untuk laba yang didistribusikan dan tidak didistribusikan.

Penerapan dari PSAK tersebut tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

af. Events After the Reporting Period

Post period end events that provide additional information about the financial position of the Bank as of the statement of financial position date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post period end events that are not adjusting events disclosed in the notes to the financial statements when material.

ag. 2019 Interpretations and Annual Improvements

In the current year, the Bank has applied standards and a number of amendments/ improvements/interpretation to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2019.

PSAK 46 (improvement), "Income Taxes"

The amendments clarify that an entity should recognize the income tax consequences of dividends in profit or loss, other comprehensive income or equity according to where the entity originally recognized the transactions that generated the distributable profits. This is the case irrespective of whether different tax rates apply to distributed and undistributed profits.

The adoption of PSAK above does not have significant affect to the financial statements of the Bank.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir tahun pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The preparation of the financial statements of the Bank requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities at the end of reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcome that requires material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Kelangsungan usaha

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi instrumen keuangan

Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 55 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti yang diungkapkan pada Catatan 2c.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari Bank adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan substansi ekonomi dari kondisi mendasari yang relevan, mata uang fungsional dan penyajian Bank adalah Rupiah.

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilainya ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar.

Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgements

In the process of applying the Bank's accounting policies, management has made the following judgement which have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Going concern

The Bank's management has made an assessment of the Bank's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue in business for the foreseeable future. Therefore, the financial statements continue to be prepared on a going concern basis.

Classification of the financial instruments

The Bank determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 55. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are recognized for in accordance with the accounting policies as disclosed in Note 2c.

Determination of functional currency

The functional currency of the Bank is the currency of the primary economic environment in which the entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on the economic substance of the relevant underlying circumstances, the functional and presentation currency of the Bank is in Rupiah.

Fair value of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, if observable market data are not available, management's judgment is required to establish fair values.

The management's judgments include considerations of liquidity and model inputs such as volatility for long-term derivatives and discount rates, early payment rates and default rate assumptions.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Nilai wajar atas instrumen keuangan (lanjutan)

Bank menampilkan nilai wajar atas instrumen keuangan berdasarkan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- *Level* 1: Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- *Level* 2: Teknik penilaian yang menggunakan input selain harga kuotasi yang termasuk di dalam *level* 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik langsung (misalnya, harga) maupun tidak langsung (misalnya, turunan dari harga); dan
- *Level* 3: Teknik penilaian yang menggunakan input untuk aset dan liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (*input* yang tidak dapat diobservasi).

Penurunan nilai pinjaman yang diberikan

Bank menelaah pinjaman yang diberikan yang signifikan secara individual pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi. Secara khusus, pertimbangan manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan kerugian penurunan nilai. Dalam estimasi arus kas tersebut, Bank melakukan penilaian atas kondisi keuangan peminjam dan nilai realisasi neto agunan. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah faktor dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan di masa mendatang atas cadangan penurunan nilai.

Penurunan nilai aset keuangan tersedia untuk dijual

Bank mengevaluasi efek utang yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai. Penilaian tersebut memerlukan pertimbangan yang sama seperti yang diterapkan pada penilaian secara individual atas pinjaman yang diberikan.

Sewa

Bank memiliki perjanjian sewa dimana Bank sebagai *lessee* sehubungan dengan sewa gedung. Bank mengevaluasi apakah risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset sewaan ditransfer berdasarkan PSAK 30, "Sewa" yang mengharuskan Bank untuk membuat pertimbangan dan estimasi atas transfer risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset.

Berdasarkan penelaahan yang dilakukan Bank atas perjanjian sewa gedung, transaksi sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgments (continued)

Fair value of financial instruments (continued)

The Bank presents the fair value of financial instruments based on the following fair value hierarchy:

- *Level 1: Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2: Valuation techniques using inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and*
- *Level 3: Valuation techniques using inputs for the asset and liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).*

Impairment losses on loans

The Bank reviews its individually significant loans at each statement of financial position date to assess whether an impairment loss should be recorded in the profit or loss. In particular, judgment by the management is required in the estimation of the amount and timing of future cash flows when determining the impairment losses. In estimating these cash flows, the Bank makes judgments about the borrower's financial condition and the net realizable value of collateral. These estimates are based on assumptions from a number of factors and actual results may differ resulting in future changes to the amount of impairment allowance.

Impairment of available-for-sale financial assets

The Bank reviews its debt securities classified as available-for-sale at each statement of financial position date to assess whether they are impaired. This requires similar judgment as applied to the individual assessment of loans.

Leases

The Bank has leases agreement where as the Bank acts as lessee in respect of office rental. The Bank evaluates whether significant risks and rewards of lease asset ownership are transferred based on PSAK 30, "Leases" which requires the Bank to make judgment and estimates of the transfer of risks and rewards related to the ownership of asset.

Based on the review performed by the Bank for the office rental agreement, such rental transactions are classified as operating lease.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas periode keuangan satu periode ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dievaluasi penurunan nilainya sesuai dengan Catatan 2j.

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi neto dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat disetujui secara independen oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions

Certain estimates and assumption are made in the preparation of the financial statements which require management judgment in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial period. All estimates and assumptions required in conformity with PSAK are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgments are evaluated on a continuous basis and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumptions are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

Allowance for impairment losses on financial assets

Financial assets accounted for under amortized cost are evaluated for impairment on a basis as described in Note 2j.

The specific counterparty component of the total allowances for impairment applies to financial assets evaluated individually for impairment based on management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. In estimating these cash flows, management makes judgments about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable are independently approved by the Risk Management Working Unit.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items can not yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made by management to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan

Penurunan nilai timbul saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada data yang tersedia dari transaksi penjualan yang mengikat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, model penilaian yang sesuai digunakan untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan ini dipadukan dengan penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas kemungkinan penurunan potensial atas nilai aset non-keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Imbalan kerja

Penentuan liabilitas dan beban imbalan kerja Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Seluruh asumsi ditelaah setiap akhir periode pelaporan.

Sementara Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan pasca kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat atas liabilitas imbalan kerja Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 24.752 dan Rp 55.271. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 38.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Impairment of non-financial assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the specific risks to the asset.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if its available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are collaborated by valuation multiples or other available fair value indicators. The calculation of useful value is based on a discounted cash flow model.

Management believes that there is no indication of potential impairment in values of non-financial assets as of December 31, 2019 and 2018.

Employee benefits

The determination of the Bank's employee benefits liability and expense depends on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include discount rates, annual salary increase rate, annual resignation rate, disability rate, retirement age and mortality rate. All assumptions are reviewed at the end of reporting period.

While the Bank believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Bank's actual experiences or significant changes in the Bank's assumptions may materially affect its post-employment benefits liability and net post-employment benefits expense. The carrying amount of the Bank's employee benefits liability as of December 31, 2019 and 2018 were Rp 24,752 and Rp 55,271, respectively. Further details are disclosed in Note 38.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyusutan aset tetap

Nilai tercatat aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 (empat) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Ini adalah umur secara umum diharapkan dalam industri dimana Bank menjalankan bisnisnya. Setelah memperhitungkan sisa manfaat ekonomis aset tetap setelah revaluasi, penyusutan dihitung berdasarkan taksiran sisa manfaat yaitu 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai buku neto aset tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 199.165 dan Rp 194.079. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 14.

Revaluasi aset tetap

Revaluasi aset tetap Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, nilai tukar, tingkat inflasi, tingkat kenaikan pendapatan dan biaya. Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material nilai aset tetap yang direvaluasi.

Asuransi kredit dibayar dimuka

Asuransi kredit dibayar dimuka diamortisasi sampai dengan jangka waktu berlakunya polis asuransi selama 6 (enam) tahun berdasarkan asumsi pencapaian pendapatan bunga bersih yang diperkirakan akan diperoleh dalam rencana bisnis Bank selama 6 (enam) tahun ke depan.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Depreciation of fixed assets

Carrying value of fixed assets is depreciated using the straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 (four) up to 20 (twenty) years. These are common life expectancies applied in the industries where the Bank conducts its businesses. After considering the remaining of estimated useful lives after revaluation, depreciation is computed based on the remaining of estimated useful lives within 1 (one) until 20 (twenty) years.

Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets and therefore future depreciation charges could be revised. The net book value of the Bank's fixed assets as of December 31, 2019 and 2018 were amounted to Rp 199,165 and Rp 194,079, respectively. Further details are disclosed in Note 14.

Fixed asset revaluation

The Bank's fixed assets revaluation depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate, exchange rate, inflation rate, revenue increase rate and cost. The Bank believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Bank's assumptions may materially affect the valuation of its fixed assets.

Prepaid credit insurance

Prepaid credit insurance are amortized until maturity period of the insurance policy during 6 (six) years based on the assumption of achieving net interest income that is expected to be obtained in the Bank's business plan for the next 6 (six) years.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Asuransi kredit dibayar dimuka (lanjutan)

Manajemen Bank berpendapat bahwa target pencapaian pendapatan bunga bersih sejalan dengan target pertumbuhan kredit yang dibuat dalam rencana bisnis Bank dan telah disusun dengan menggunakan asumsi pertumbuhan yang wajar dan memadai sesuai dengan kemampuan Bank dengan memperhatikan faktor internal maupun eksternal yang relevan. Manajemen berkeyakinan bahwa target yang direncanakan tersebut akan dapat terealisasi. Perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi target pencapaian yang direncanakan dan karenanya biaya amortisasi masa depan mungkin dapat direvisi.

Nilai tercatat asuransi kredit dibayar dimuka, yang belum diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp 4.305.476 dan Rp 1.110.493. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 13.

Pajak penghasilan

Estimasi signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Bank mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Apabila keputusan final atas pajak tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut dicatat pada laba rugi pada periode dimana hasil tersebut dikeluarkan.

Akumulasi rugi fiskal Bank masing-masing adalah sebesar Rp 821.050 dan Rp 1.432.304 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 37b.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 37b.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Prepaid credit insurance (continued)

The Bank's management believes that the target of achieving net interest income in line with the target of credit growth made in the Bank's business plan that has been prepared using reasonable and adequate growth assumptions in accordance with the Bank's ability by taking into account relevant internal and external factors. Management believes that the planned target achievement will be realized. Significant differences in assumptions set by the Bank could impact the planned targets achievement and therefore future amortization costs could be revised.

The carrying amount of the prepaid credit insurance, which has not been amortized as of December 31, 2019 and 2018, amounting to Rp 4,305,476 and Rp 1,110,493. Further explanation is disclosed in Note 13.

Income tax

Significant estimate is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Bank recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Where the final tax outcome of those matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will be recorded in the profit or loss in the period in which such determination is made.

The accumulated fiscal loss of the Bank amounted to Rp 821,050 and Rp 1,432,304 for the years ended December 31, 2019 and 2018, respectively. Further details are disclosed in Note 37b.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences. Significant estimates by management are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of the future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 37b.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Tuntutan hukum

Bank sedang menghadapi kasus-kasus hukum. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, proses hukum terhadap pihak-pihak antara lain seperti investor yang membeli produk investasi milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, nasabah, debitur, Direksi, pihak ketiga dan manajemen lama dan pemegang saham semasa sebelum Bank diambilalih oleh LPS, sebagian sudah mendapat putusan tetap dan/atau peninjauan kembali.

Bank akan membukukan kerugian atas tuntutan hukum tersebut pada saat hasil keputusan final atas status hukum tersebut diperoleh dan akan dicatat pada laba rugi pada periode dimana hasil putusan final tersebut diterbitkan.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Legal cases

The Bank is facing legal cases. Up to December 31, 2019, legal proceedings against parties such as investors who bought investment products issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, customers, debtors, Board of Directors, third parties the former management and shareholders before the Bank was taken over by LPS, some cases of which already have the final decision and/or judicial review.

The Bank will recognize the loss on lawsuit when the result of the final decision from those cases are awarded and the loss will be recorded in profit or loss in the period in which such final legal decision is determined.

4. KAS / ***4. CASH***

	2019	**2018**	
Rupiah	87.493	91.750	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 41)			*Foreign currencies (Note 41)*
Dolar Amerika Serikat	16.663	12.964	*United States Dollar*
Mata uang asing lainnya	6.152	5.391	*Other foreign currencies*
Sub-total	22.815	18.355	*Sub-total*
Total	**110.308**	**110.105**	***Total***

Saldo mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sebesar Rp 5.698 dan Rp 6.282 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Kas dalam mata uang asing lainnya terdiri dari Dolar Singapura, Dolar Australia, Riyal Arab Saudi, Euro Eropa, Dolar Kanada, Dolar Hong Kong, Dolar Brunei Darussalam, Franc Swiss, Ringgit Malaysia, Poundsterling Inggris, Yen Jepang, Dolar Selandia Baru, Dolar Taiwan, Baht Thailand, Peso Filipina, Dinar Bahrain, Riyal Qatar, Dirham Uni Emirat Arab, Won Korea dan Yuan Cina.

Balance in Rupiah includes cash in ATM (Automated Teller Machine) amounting to Rp 5,698 and Rp 6,282 as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

Cash in other foreign currencies are denominated in Singapore Dollar, Australian Dollar, Saudi Arabian Riyal, European Euro, Canadian Dollar, Hong Kong Dollar, Brunei Darussalam Dollar, Swiss Franc, Malaysian Ringgit, Great Britain Poundsterling, Japanese Yen, New Zealand Dollar, Taiwanese Dollar, Thailand Baht, Philippines Peso, Bahrain Dinar, Qatar Riyal, United Arab Emirates Dirham, Korea Won and Chinese Yuan.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

	2019	2018	
Rupiah	398.117	693.759	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat (Catatan 41)	98.640	109.365	*United States Dollar (Note 41)*
Total	**496.757**	**803.124**	***Total***

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum dan GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing.

The Bank is required to maintain Minimum Statutory Reserves (GWM) in Rupiah for conventional banking and Minimum Statutory Reserves in foreign currencies for foreign exchange transactions.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, GWM Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018 dan No. 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang masing-masing sebesar:

As of December 31, 2019 and 2018, the Bank's GWM complies with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 15/15/PBI/2013 dated December 24, 2013 which latest amendment is PBI No. 20/3/PBI/2018 dated March 29, 2018, and Regulation of Members of The Board of Governors (PADG) No. 20/30/PADG/2018 dated November 30, 2018 and No. 21/14/PADG/2019 dated June 26, 2019 concerning Minimum Statutory Reserve of Commercial Banks in Rupiah and foreign currency, which are as follows:

	2019	2018	
Rupiah			*Rupiah*
GWM Primer	6,00%	6,50%	*Primary GWM*
Harian *)	3,00%	3,50%	*Daily *)*
Rata-rata *)	3,00%	3,00%	*Average *)*
PLM **)	4,00%	4,00%	*PLM **)*
Mata uang asing	8,00%	8,00%	*Foreign currencies*

*) Mulai berlaku per 16 Juli 2018
**) Per 16 Juli 2018, berdasarkan PBI No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, istilah GWM Sekunder berubah menjadi PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) dan GWM LFR (*Loan to Funding Ratio*) berubah menjadi RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial)

**) Effective on July 16, 2018*
***) Effective on July 16, 2018, based on PBI No.20/4/PBI/2018 dated March 29, 2018, the term GWM Secondary changed to PLM (Macroprudential Liquidity Buffer) and the LFR (Loan to Funding Ratio) GWM changed to RIM (Macroprudential Intermediation Ratio)*

GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia (BI). GWM Sekunder dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa SBI, Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau *excess reserve* yang merupakan kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer, GWM LFR dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). GWM LFR dan RIM adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, jika LFR dan RIM Bank dibawah minimum LFR dan RIM target BI (84%) atau jika di atas maksimum LFR dan RIM target BI (94%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif BI sebesar 14%.

Primary Minimum Statutory Reserve is a minimum reserve that should be maintained by the Bank in Current Accounts with Bank Indonesia (BI). Secondary Minimum Statutory Reserve and Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) are the minimum reserves that should be maintained by the Bank which comprised of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Government Debenture Debt (SUN), Sharia Government Securities (SBSN), and/or excess reserve which represent the excess reserve of the Bank's Current Accounts in Rupiah over the Primary Minimum Statutory Reserve, Minimum Statutory Reserve on LFR and Macroprudential Intermediation Ratio (RIM). Minimum Statutory Reserve on LFR and RIM is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of Current Accounts with BI, if the Bank's LFR and RIM is below the minimum of LFR and RIM targeted by BI (84%) or if the Bank's LFR and RIM is above the maximum of LFR and RIM targeted by BI (94%) and the Capital Adequacy Ratio (CAR) is below BI requirement of 14%.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

Rasio GWM Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The Bank's GWM ratio as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	2019	2018	
Rupiah			*Rupiah*
GWM Primer	11,14%	14,66%	*Primary Minimum Statutory Reserves*
Harian	7,43%	9,77%	*Daily*
Rata-rata	3,71%	4,89%	*Average*
PLM	12,87%	20,35%	*PLM*
Mata Uang Asing	33,45%	10,34%	*Foreign Currency*

6. GIRO PADA BANK LAIN

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

a. Berdasarkan pihak, mata uang dan bank

a. By parties, currencies and banks

	2019	2018	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Central Asia Tbk	13.917	21.822	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.463	20.860	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	535	531	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	8	36	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Sub-total	27.923	43.249	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 41)			*Foreign currencies (Note 41)*
PT Bank Central Asia Tbk	150.580	64.634	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, New York	102.556	16.251	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, New York*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	70.384	10.670	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
United Overseas Bank (UOB), Singapura	62.617	32.766	*United Overseas Bank (UOB), Singapore*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo	38.217	13.220	*Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	21.131	21.796	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Permata Tbk	13.992	14.458	*PT Bank Permata Tbk*
Australia and New Zealand Bank (ANZ), Melbourne	10.749	12.160	*Australia and New Zealand Bank (ANZ), Melbourne*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.497	9.660	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
KB Kookmin Bank, Korea Selatan	9.170	1.943	*KB Kookmin Bank, South Korea*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.110	2.185	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Australia and New Zealand Bank, Wellington	1.158	466	*Australia and New Zealand Bank, Wellington*
Standard Chartered Bank, Hong Kong	905	933	*Standard Chartered Bank, Hong Kong*
Indonesische Overzeese Bank N.V. (Indover), Belanda	743	784	*Indonesische Overzeese Bank N.V. (Indover), Netherlands*
Industrial and Commercial Bank of China, Jakarta	461	360	*Industrial and Commercial Bank of China, Jakarta*
Industrial and Commercial Bank of China, Hong Kong	266	138	*Industrial and Commercial Bank of China, Hong Kong*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	86	90	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
United Overseas Bank (UOB), Jakarta	-	4.567	*United Overseas Bank (UOB), Jakarta*
Sub-total	495.622	207.081	*Sub-total*
Total	523.545	250.330	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(743)	(784)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**522.802**	**249.546**	***Net***

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

b. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

b. The changes in allowance for impairment losses are as follows:

	2019	2018	
Saldo awal tahun	784	774	*Balance at beginning of year*
Selisih perbedaan kurs	(41)	10	*Exchange rate differences*
Saldo akhir tahun	**743**	**784**	***Balance at end of the year***

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, seluruh rekening giro pada bank lain, kecuali rekening giro pada Indover, dikategorikan lancar. Bank telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas rekening giro pada Indover sehubungan dengan telah dibekukannya operasional bank tersebut pada tanggal 7 Oktober 2008.

As of December 31, 2019 and 2018, all current accounts with other banks, except the current accounts with Indover, are classified as current. The Bank has provided allowance for impairment losses for current accounts with Indover due to the suspension of the banking operations on October 7, 2008.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai untuk giro pada bank lain telah memadai.

Management believes that allowance for impairment losses on current accounts with other banks is adequate.

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut:

c. The average interest rates per annum are as follows:

	2019	2018	
Rupiah	1,06%	1,00%	*Rupiah*
Mata uang asing	0,31%	0,50%	*Foreign currencies*

d. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pada Indover masing-masing adalah sebesar EUR 47.700 (ekuivalen Rp 743 dan Rp 784).

d. The outstanding balance in Indover as of December 31, 2019 and 2018 amounted to EUR 47,700 (equivalent to Rp 743 and Rp 784, respectively).

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan bank

a. By type, currency and bank

	2019	2018	
Rupiah			*Rupiah*
Fasilitas Deposito			*Deposit Facility*
Bank Indonesia	399.953	649.905	*Bank Indonesia*
Interbank Call Money			*Interbank Call Money*
PT Bank Amar Indonesia Tbk	20.000	-	*PT Bank Amar Indonesia Tbk*
PT Bank MNC Internasional Tbk	15.000	-	*PT Bank MNC Internasional Tbk*
Sub-total	434.953	649.905	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 41)			*Foreign currency (Note 41)*
Interbank Call Money			*Interbank Call Money*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	27.765	-	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
Total	**462.718**	**649.905**	***Total***

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

b. Berdasarkan jatuh tempo

b. By maturity period

	2019	2018	
Rupiah			*Rupiah*
Kurang dari 1 bulan	434.953	649.905	*Less than 1 month*
Mata uang asing			*Foreign currency*
Kurang dari 1 bulan	27.765	-	*Less than 1 month*
Total	**462.718**	**649.905**	***Total***

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut:

c. The average annual interest rates were as follows:

	2019	2018	
Rupiah			*Rupiah*
Fasilitas deposito - BI	4,25%	4,09%	*Deposit facility - BI*
Interbank call money - Bank lain	6,20%	5,15%	*Interbank call money - Other banks*
Mata uang asing			*Foreign currency*
Interbank call money - Bank lain	3,75%	-	*Interbank call money - Other banks*

d. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas penempatan pada bank lain sehingga tidak diperlukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

d. Management believes that there is no impairment on placements with other banks, therefore no allowance for impairment losses was provided as of December 31, 2019 and 2018.

8. SURAT-SURAT BERHARGA

8. MARKETABLE SECURITIES

a. Berdasarkan tujuan, jenis dan mata uang

a. By purpose, type and currencies

Rincian dari masing-masing kategori tersebut diatas adalah sebagai berikut:

The details for each category mentioned above are as follows:

	2019					
	Nilai perolehan/ *Acquisition amount*	Saldo yang belum diamortisasi/ *Unamortized amount* *)	Keuntungan (kerugian) belum direalisasi/ *Unrealized gain (loss)*	Total	Lancar/ *Current*	
Tersedia untuk dijual						***Available-for-sale***
Rupiah						*Rupiah*
Obligasi Pemerintah	1.625.967	4.868	(31.290)	1.599.545	1.599.545	*Government Bonds*
Sertifikat Bank Indonesia	100.000	(3.803)	333	96.530	96.530	*Certificates of Bank Indonesia*
Obligasi lainnya	1.827.390	(3.603)	34.641	1.858.428	1.858.428	*Other bonds*
Sub-total	3.553.357	(2.538)	3.684	3.554.503	3.554.503	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 41)						*Foreign currency (Note 41)*
Obligasi Pemerintah	138.825	(610)	7.504	145.719	145.719	*Government Bonds*
Sub-total	3.692.182	(3.148)	11.188	3.700.222	3.700.222	*Sub-total*
Diperdagangkan						***Trading***
Rupiah						*Rupiah*
Sertifikat Bank Indonesia	294.980	-	-	294.980	294.980	*Certificates of Bank Indonesia*
Obligasi Pemerintah	224.560	-	-	224.560	224.560	*Government Bonds*
Obligasi Ritel Indonesia	100	-	-	100	100	*Indonesian Retail Bonds*
Sub-total	519.640	-	-	519.640	519.640	*Sub-total*
Total	**4.211.822**	**(3.148)**	**11.188**	**4.219.862**	**4.219.862**	***Total***

8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

a. Berdasarkan tujuan, jenis dan mata uang (lanjutan)

a. By purpose, type and currencies (continued)

	2018					
	Nilai perolehan/ *Acquisition amount*	Saldo yang belum diamortisasi/ *Unamortized amount* *)	Kerugian belum direalisasi/ *Unrealized loss*	Total	Lancar/ *Current*	
Tersedia untuk dijual						***Available-for-sale***
Rupiah						*Rupiah*
Obligasi Pemerintah	1.311.678	11.520	(106.300)	1.216.898	1.216.898	*Government Bonds*
Obligasi Ritel Indonesia	294.425	239	(4.074)	290.590	290.590	*Indonesian Retail Bonds*
Sertifikat Bank Indonesia	100.000	(2.237)	(15)	97.748	97.748	*Certificates of Bank Indonesia*
Obligasi lainnya	747.990	(5.070)	(17.122)	725.798	725.798	*Other bonds*
Sub-total	2.454.093	4.452	(127.511)	2.331.034	2.331.034	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 41)						*Foreign currency (Note 41)*
Obligasi Pemerintah	774.234	8.403	(35.198)	747.439	747.439	*Government Bonds*
Sub-total	3.228.327	12.855	(162.709)	3.078.473	3.078.473	*Sub-total*
Diperdagangkan						***Trading***
Rupiah						*Rupiah*
Sertifikat Bank Indonesia	285.431	-	-	285.431	285.431	*Certificates of Bank Indonesia*
Obligasi Pemerintah	198.834	-	-	198.834	198.834	*Government Bonds*
Sub-total	484.265	-	-	484.265	484.265	*Sub-total*
Total	**3.712.592**	**12.855**	**(162.709)**	**3.562.738**	**3.562.738**	***Total***

*) Saldo yang belum diamortisasi terdiri dari nilai premi/(diskonto) yang belum diamortisasi.

*) *Unamortized amount consists of unamortized premium/(discount).*

Surat berharga dalam mata uang asing adalah dalam Dolar Amerika Serikat.

Marketable securities in foreign currency are denominated in United States Dollar.

b. Berdasarkan golongan penerbit efek

b. By issuer

	2019	2018	
Rupiah			*Rupiah*
Pemerintah	2.215.715	2.089.501	*Government*
Korporasi	1.470.186	504.824	*Corporates*
Bank-bank	388.242	220.974	*Banks*
Sub-total	4.074.143	2.815.299	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 41)			*Foreign currency (Note 41)*
Pemerintah	145.719	747.439	*Government*
Total	**4.219.862**	**3.562.738**	***Total***

8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

c. Berdasarkan peringkat surat-surat berharga

c. By rating of marketable securities

		2019		2018		
	Pemeringkat/ *Rating agency*	Nilai wajar/ *Fair value*	Peringkat/ *Rating*	Nilai wajar/ *Fair value*	Peringkat/ *Rating*	
Tersedia untuk dijual						***Available-for-sale***
Rupiah						*Rupiah*
Sertifikat Bank Indonesia	-	96.530		97.748	-	*Certificates of Bank Indonesia*
FR0059	-	350.583		345.954	-	*FR0059*
FR0064	-	300.160		280.816	-	*FR0064*
FR0082		246.461		-	-	*FR0082*
FR0061	-	86.204		82.623	-	*FR0061*
FR0065	-	78.652		73.831	-	*FR0065*
FR0056	-	21.504		20.295	-	*FR0056*
FR0075	-	16.793		15.549	-	*FR0075*
ORI015	-	-		146.986	-	*ORI015*
ORI014	-	-		138.734	-	*ORI014*
ORI013	-	-		4.871	-	*ORI013*
SPN200220	-	99.380		-	-	*SPN200220*
SR010	-	399.808		397.829	-	*SR010*
Obligasi						*Bonds*
Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017	Pefindo	30.110	idAA+	29.205	idAA+	*Bond Indofood Sukses Makmur VIII Year 2017*
Obligasi I Pelindo Tahap IV Tahun 2018 Seri A	Pefindo	50.553	idAA	49.866	idAA	*Bond I Pelindo Phase IV Year 2018 Series A*
Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri A	Pelindo	20.369	idAAA	19.594	idAAA	*Bond I Angkasa Pura II Year 2016 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri C	Pefindo	52.995	idAAA	-	-	*Continuous Bond Indonesia Eximbank IV Phase IV 2019 Series C*
Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Tahap II Tahun 2018 Seri C	Pefindo	50.318	idAAA	47.493	idAAA	*Continuous Bond I Bank UOB Phase II Year 2018 Series C*
Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 Seri B	Pefindo	41.208	idA-	39.599	idAA	*Continuous Bonds I Bank Victoria Phase II Year 2018 Series B*
Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 Seri B	Pefindo	30.986	idAA+	29.660	idAA+	*Continuous Bonds I XL Axiata Phase I Year 2018 Series B*
Tahap I Tahun 2018 Seri C	Pefindo	18.148	idAA+	16.991	idAA+	*Phase I Year 2018 Series C*
Obligasi Berkelanjutan I BRI Agro Tahun 2017 Seri B	Pefindo	10.166	idAA	9.714	idAA	*Continuous Bonds I BRI Agro Year 2017 Series B*
Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap III Tahun 2018	Pefindo	10.046	idAA	9.515	idAA	*Continuous Bonds I Mayora Indah Phase III Year 2018*
Obligasi Berkelanjutan I Permodalan Nasional Madani Tahap II Tahun 2016 Seri A	Pefindo	-		2.585	idA	*Continuous Bonds I Permodalan Nasional Madani Phase II Year 2016 Series A*
Obligasi Berkelanjutan III Permodalan Nasional Madani Tahap I Tahun 2019 Seri B	Pefindo	72.737	idA	-	-	*Continuous Bonds III Permodalan Nasional Madani Phase I Year 2019 Series B*
Madani Tahap II Tahun 2019 Seri B	Pefindo	104.926	idA	-	-	*Madani Phase II Year 2019 Series B*
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap III Tahun 2018	Pefindo	48.558	idAA	46.176	idAA	*Continuous Bond II Bank Panin Phase III Year 2018*
Tahap IV Tahun 2018	Pefindo	50.222	idAA	48.170	idAA	*Phase IV Year 2018*
Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 Seri C	Pefindo	5.690	idAAA	5.608	idAAA	*Continuous Bonds II Indosat Phase I Year 2017 Series C*
Tahap II Tahun 2018 Seri C	Pefindo	49.614	idAAA	47.762	idAAA	*Phase II Year 2018 Series C*
Tahap III Tahun 2018 Seri B	Pefindo	3.990	idAAA	3.886	idAAA	*Phase III Year 2018 Series B*
Obligasi Berkelanjutan II PT PP Tahap I Tahun 2018 Seri B	Pefindo	48.150	idA+	45.390	idA+	*Continuous Bonds II PT PP Phase I Year 2018 Series B*
Tahap II Tahun 2019 Seri B	Pefindo	149.832	idBBB	-	-	*Phase II Year 2019 Series B*
Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018 Seri C	Pefindo	30.977	idAAA	29.823	idAAA	*Continuous Bonds II Bank CIMB Niaga Phase IV Year 2018 Series C*
Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastruktur Tahap II Tahun 2017	Pefindo	6.019	idAA-	5.936	idAA-	*Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2017*
Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastruktur Tahap I Tahun 2018	Pefindo	30.327	idAA-	29.267	idAA	*Continuous Bonds III Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2018*
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B	Pefindo	49.940	idA-	46.404	idA-	*Continuous Bonds III Waskita Karya Phase I Year 2017 Series B*
Tahap I Tahun 2018 Seri B	Pefindo	34.304	idA-	32.032	idA-	*Phase I Year 2018 Series B*
Tahap II Tahun 2018 Seri A	Pefindo	14.849	idA-	14.129	idA-	*Phase II Year 2018 Series A*
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2019 Seri C	Pefindo	51.947	idAAA	-	-	*Continuous Bonds II Sarana Multi Infrastruktur Phase I Year 2019 Series C*
Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap II 2019 Seri A	Pefindo	51.495	idAA+	-	-	*Continuous Bond I Semen Indonesia Phase II 2019 Series A*

8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

c. Berdasarkan peringkat surat-surat berharga (lanjutan) / *c. By rating of marketable securities (continued)*

	Pemeringkat/ *Rating agency*	2019 Nilai wajar/ *Fair value*	2019 Peringkat/ *Rating*	2018 Nilai wajar/ *Fair value*	2018 Peringkat/ *Rating*	
Tersedia untuk dijual (lanjutan)						***Available-for-sale (continued)***
Rupiah						*Rupiah*
Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multigriya Finansial Tahap VI Tahun 2018 Seri B	Pefindo	30.675	idAAA	29.952	idAAA	*Continuous Bonds IV Sarana Multigriya Financial Phase VI Year 2018 Series B*
Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019	Pefindo	50.073	idA-	-	-	*Continuous Bonds II Adhi Karya Phase II Year 2019*
Obligasi PT Astra International Tahun 2019 Seri B	Pefindo	51.870	idAAA	-	-	*Bond PT Astra International Year 2019 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Adira Dinamika Multi Finance Tahap IV 2019 Seri C	Pefindo	53.541	idAAA	-	-	*Continuous Bond Adira Dinamika Multi Finance Phase IV Year 2019 Series C*
Obligasi Bank Maybank Indonesia II Tahun 2019 Seri B	Pefindo	52.014	idAAA	-	-	*Bonds Bank Maybank Indonesia II Year 2019 Seri B*
MTN						*MTN*
MTN Indah Kiat Pulp & Paper VI Tahun 2018 Seri A	Pefindo	50.300	idA+	50.265	idA+	*MTN Indah Kiat Pulp & Paper VI Year 2018 Series A*
MTN Trimegah Sekuritas Indonesia I Tahun 2018	Pefindo	37.705	idA	36.776	idA	*MTN Trimegah Sekuritas Indonesia I Year 2018*
MTN Kimia Farma (PERSERO) Tbk I Tahun 2019	Pefindo	121.299	idAA-	-	-	*MTN Kimia Farma (PERSERO) Tbk I Year 2019*
MTN PT PN Pengelola Assets I Tahun 2019	Pefindo	162.385	idA	-	-	*MTN PT PN Pengelola Assets I Year 2019*
MTN PT Perkebunan Nusantara XIII Tahun 2019	Pefindo	78.308	idA	-	-	*MTN PT Perkebunan Nusantara XIII Year 2019*
MTN BRI Multifinance Indonesia I Tahun 2019	Pefindo	51.782	idAA-	-	-	*MTN BRI Multifinance Indonesia I Year 2019*
Sub-total		3.554.503		2.331.034		*Sub-total*
Mata uang asing						*Foreign currency*
INDON3.50	-	101.384	-	-	-	*INDON3.50*
INDON3.85N	-	44.335	-	-	-	*INDON3.85N*
INDON28	-	-	-	119.542	-	*INDON28*
INDOIS23	-	-	-	112.477	-	*INDOIS23*
INDON27N	-	-	-	109.405	-	*INDON27N*
INDOIS27	-	-	-	87.037	-	*INDOIS27*
INDOIS26	-	-	-	85.505	-	*INDOIS26*
INDOIS28	-	-	-	56.133	-	*INDOIS28*
INDOIS25	-	-	-	50.902	-	*INDOIS25*
INDON27	-	-	-	42.597	-	*INDON27*
INDOIS24	-	-	-	28.528	-	*INDOIS24*
INDOIS22N	-	-	-	28.120	-	*INDOIS22N*
INDOIS22	-	-	-	27.193	-	*INDOIS22*
Sub-total		145.719		747.439		*Sub-total*
Diperdagangkan						***Trading***
Rupiah						*Rupiah*
Sertifikat Bank Indonesia	-	294.980	-	285.431	-	*Certificates of Bank Indonesia*
FR0078	-	21.604	-	-	-	*FR0078*
FR0077	-	45.714	-	-	-	*FR0077*
FR0082	-	20.109	-	-	-	*FR0082*
SPN12200106	-	39.410	-	-	-	*SPN12200106*
SPN200220	-	97.723	-	-	-	*SPN200220*
SPN14022019	-	-	-	99.301	-	*SPN14022019*
SPN31012019	-	-	-	99.533	-	*SPN31012019*
ORI16-087	-	100	-	-	-	*ORI16-087*
Sub-total		519.640		484.265		*Sub-total*
Total		**4.219.862**		**3.562.738**		***Total***

d. Berdasarkan tanggal jatuh tempo / *d. By maturity*

	2019	2018	
Rupiah			*Rupiah*
Kurang dari 1 tahun	684.342	589.468	*Less than 1 year*
1 sampai dengan 5 tahun	2.333.935	1.489.385	*1 up to 5 years*
5 sampai dengan 10 tahun	693.850	647.066	*5 up to 10 years*
Lebih dari 10 tahun	362.016	89.380	*More than 10 years*
Sub-total	4.074.143	2.815.299	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 41)			*Foreign currency (Note 41)*
1 sampai dengan 5 tahun	-	167.790	*1 up to 5 years*
5 sampai dengan 10 tahun	145.719	579.649	*5 up to 10 years*
Sub-total	145.719	747.439	*Sub-total*
Total	**4.219.862**	**3.562.738**	***Total***

8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

e. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut:

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

e. The average interest rates per annum are as follows:

	2019	2018	
Sertifikat Bank Indonesia	5,39%	6,49%	*Certificates of Bank Indonesia*
Obligasi	7,53%	6,66%	*Bonds*

f. Perubahan keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual di ekuitas adalah sebagai berikut:

f. The changes in unrealized gains (losses) on changes in fair value of available-for-sale securities in equity are as follows:

	2019	2018	
Saldo awal tahun - sebelum pajak penghasilan tangguhan	(162.709)	23.200	*Balance at beginning of year - before deferred income tax*
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi tahun berjalan - neto	139.958	(174.931)	*Unrealized gain (loss) during year - net*
Keuntungan (kerugian) yang direalisasi atas penjualan selama tahun berjalan - neto	33.939	(10.978)	*Realized gain (loss) from sale during year - net*
Neto sebelum pajak penghasilan tangguhan	11.188	(162.709)	*Net before deferred income tax*
Pajak penghasilan tangguhan (Catatan 37)	(2.797)	40.677	*Deferred income tax (Note 37)*
Saldo akhir tahun	**8.391**	**(122.032)**	***Balance at end of year***

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas surat-surat berharga, sehingga tidak diperlukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Management believes that there is no impairment on marketable securities, therefore no allowance for impairment losses was provided as of December 31, 2019 and 2018.

Keuntungan (kerugian) penjualan surat berharga yang tersedia untuk dijual dan diperdagangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 6.643 dan (Rp 16.033) (Catatan 31).

Gains (losses) on sale of available-for-sale and trading securities for the years ended December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp 6,643 and (Rp 16,033), respectively (Note 31).

Keuntungan atas perubahan nilai wajar surat-surat berharga yang diperdagangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 2.404 dan Rp 4.113.

Gains on changes in fair value of trading securities for the years ended December 31, 2019 and 2018 amounted Rp 2,404 and Rp 4,113, respectively.

9. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Bank melakukan transaksi derivatif berupa kontrak berjangka mata uang asing dengan pihak lain yang memungkinkan Bank atau pihak lain mengurangi risiko atas pengaruh fluktuasi kurs mata uang asing.

Kontrak berjangka mata uang asing merupakan komitmen untuk menjual sejumlah mata uang tertentu kepada pembeli atau untuk membeli sejumlah mata uang tertentu dari penjual pada suatu tanggal di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Berdasarkan pihak dan mata uang:

9. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES

The Bank entered into derivative transactions of forward contracts with other parties which enables the Bank or other parties to reduce the fluctuation risk of foreign currency.

Foreign currency forward contract is a commitment to sell a number of foreign currency to a buyer or to buy a number of foreign currency from seller at a certain date in the future at a predetermined price.

By parties and currency:

	2019			
	Nilai nosional (kontrak)/ *Notional amount (contract)*	**Tagihan derivatif/ *Derivative receivables***	**Liabilitas derivatif/ *Derivative payables***	
Pihak ketiga				***Third parties***
Forward mata uang asing (Catatan 41)				*Forward foreign currency (Note 41)*
Forward - jual				*Forward - sell*
Dolar Amerika Serikat	235.979	2.645	-	*United States Dollar*
Spot mata uang asing				*Spot foreign currency*
Spot - jual				*Spot - sell*
Dolar Amerika Serikat	13.920	-	-	*United States Dollar*
Spot - beli				*Spot - buy*
Dolar Amerika Serikat	41.615	-	-	*United States Dollar*
Total		**2.645**	**-**	***Total***

	2018			
	Nilai nosional (kontrak)/ *Notional amount (contract)*	**Tagihan derivatif/ *Derivative receivables***	**Liabilitas derivatif/ *Derivative payables***	
Pihak ketiga				***Third parties***
Forward mata uang asing (Catatan 41)				*Forward foreign currency (Note 41)*
Forward - jual				*Forward - sell*
Dolar Amerika Serikat	1.195.005	11.324	640	*United States Dollar*
Total		**11.324**	**640**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2019, transaksi *forward* mata uang asing dilakukan dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk, dan pada tanggal 31 Desember 2018, transaksi *forward* mata uang asing dilakukan dengan PT Bank UOB Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai *counter parties* dengan jangka waktu satu sampai dengan dua bulan sejak tanggal transaksi.

As of December 31, 2019, foreign currency forward was conducted with PT Bank Maybank Indonesia Tbk, and as of December 31, 2018, foreign currency forward was conducted with PT Bank UOB Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk and PT Bank Maybank Indonesia Tbk as the counter parties with a period of one to two months from the transaction date.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kontrak derivatif tidak ditujukan untuk akuntansi lindung nilai.

As of December 31, 2019 and 2018, derivative contracts were not designated for hedge accounting.

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN / *10. LOANS*

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas / *a. By type, currency and collectibility*

	2019						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Sub-standard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	
Rupiah							***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 40)							***Related parties (Note 40)***
Kredit ekspor impor	12.937	-	-	-	-	12.937	*Export import loans*
Kredit pemilikan rumah	5.296	-	-	-	-	5.296	*Housing loans*
Kredit rekening koran	23.723	-	-	-	-	23.723	*Current account loans*
Kredit kendaraan bermotor	514	-	-	-	-	514	*Vehicle loans*
Kredit modal kerja	130.000	-	-	-	-	130.000	*Working capital loans*
Lain-lain	350	-	-	-	-	350	*Others*
Sub-total	172.820	-	-	-	-	172.820	*Sub-total*
Pihak ketiga							***Third parties***
Kredit kendaraan bermotor	1.222.421	63.149	3.718	3.447	49.661	1.342.396	*Vehicle loans*
Kredit investasi	405.599	1.652	-	-	-	407.251	*Investment loans*
Kredit rekening koran	672.836	38.347	-	-	5.000	716.183	*Current account loans*
Kredit modal kerja	1.056.095	50.077	-	2.609	19.657	1.128.438	*Working capital loans*
Kredit pemilikan rumah	134.743	11.342	414	1	-	146.500	*Housing loans*
Kredit ekspor impor	1.283.074	20.615	-	50	-	1.303.739	*Export import loans*
Lain-lain	532.967	13.659	2.904	280	5.058	554.868	*Others*
Sub-total	5.307.735	198.841	7.036	6.387	79.376	5.599.375	*Sub-total*
Sub-total - Rupiah	5.480.555	198.841	7.036	6.387	79.376	5.772.195	*Sub-total - Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 41)							***Foreign currency (Note 41)***
Pihak ketiga							***Third parties***
Kredit investasi	112.600	25.465	-	-	-	138.065	*Investment loans*
Kredit modal kerja	244.687	-	-	-	-	244.687	*Working capital loans*
Kredit rekening koran	54.739	-	-	-	-	54.739	*Current account loans*
Kredit ekspor impor	36.305	-	-	-	-	36.305	*Export import loans*
Sub-total - mata uang asing	448.331	25.465	-	-	-	473.796	*Sub-total - foreign curency*
Total	5.928.886	224.306	7.036	6.387	79.376	6.245.991	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.097)	(55.217)	(922)	(1.593)	(40.279)	(113.108)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**5.913.789**	**169.089**	**6.114**	**4.794**	**39.097**	**6.132.883**	***Net***

	2018						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Sub-standard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	
Rupiah							***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 40)							***Related parties (Note 40)***
Kredit ekspor impor	73.087	-	-	-	-	73.087	*Export import loans*
Kredit pemilikan rumah	9.977	-	-	-	-	9.977	*Housing loans*
Kredit kendaraan bermotor	559	-	-	-	-	559	*Vehicle loans*
Kredit rekening koran	59.612	-	-	-	-	59.612	*Current account loans*
Sub-total	143.235	-	-	-	-	143.235	*Sub-total*
Pihak ketiga							***Third parties***
Kredit kendaraan bermotor	688.255	37.724	8.587	5.839	61.167	801.572	*Vehicle loans*
Kredit investasi	927.680	178.312	830	14.262	5.055	1.126.139	*Investment loans*
Kredit rekening koran	1.497.109	137.325	8.924	2.733	49.928	1.696.019	*Current account loans*
Kredit modal kerja	2.364.359	206.268	153	13.703	45.247	2.629.730	*Working capital loans*
Kredit pemilikan rumah	240.670	8.615	752	8.147	343	258.527	*Housing loans*
Kredit ekspor impor	1.381.588	42.079	1.944	-	10.915	1.436.526	*Export import loans*
Lain-lain	573.733	150.827	735	171.636	26.563	923.494	*Others*
Sub-total	7.673.394	761.150	21.925	216.320	199.218	8.872.007	*Sub-total*
Sub-total - Rupiah	7.816.629	761.150	21.925	216.320	199.218	9.015.242	*Sub-total - Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 41)							***Foreign currency (Note 41)***
Pihak ketiga							***Third parties***
Kredit investasi	373.560	-	-	-	-	373.560	*Investment loans*
Kredit modal kerja	388.905	-	-	-	-	388.905	*Working capital loans*
Kredit rekening koran	56.292	-	-	-	-	56.292	*Current account loans*
Kredit ekspor impor	56.933	-	-	-	-	56.933	*Export import loans*
Lain-lain	-	368.123	-	-	-	368.123	*Others*
Sub-total - mata uang asing	875.690	368.123	-	-	-	1.243.813	*Sub-total - foreign curency*
Total	8.692.319	1.129.273	21.925	216.320	199.218	10.259.055	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.937)	(9.708)	(2.896)	(25.050)	(89.347)	(129.938)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**8.689.382**	**1.119.565**	**19.029**	**191.270**	**109.871**	**10.129.117**	***Net***

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *10. LOANS (continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi / *b. By economic sector*

	2019						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Sub-standard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	
Rupiah							***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 40)							***Related parties (Note 40)***
Perantara keuangan	36.660	-	-	-	-	36.660	*Financial agent*
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	130.000	-	-	-	-	130.000	*Real estate, rental and services*
Rumah tangga	6.160	-	-	-	-	6.160	*Household*
Sub-total	172.820	-	-	-	-	172.820	*Sub-total*
Pihak ketiga							***Third parties***
Rumah tangga	1.746.829	87.717	7.036	3.728	54.719	1.900.029	*Household*
Industri pengolahan	662.377	-	-	-	-	662.377	*Processing industry*
Perdagangan besar dan eceran	911.401	99.758	-	637	24.657	1.036.453	*Wholesaler and retailer*
Perantara keuangan	1.077.346	8.994	-	-	-	1.086.340	*Financial agent*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	126.190	-	-	-	-	126.190	*Transportation, warehousing and communications*
Konstruksi	332.727	1.584	-	1.968	-	336.279	*Construction*
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	10.585	354	-	54	-	10.993	*Lifestyle, social cultural, entertainment and other individuals*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	348	-	-	-	-	348	*Healthcare services and social activities*
Penyediaan akomodasi, makanan dan minuman	155.735	-	-	-	-	155.735	*Supply of accommodation, food and beverages*
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	186.132	434	-	-	-	186.566	*Real estate, rental and services*
Pertambangan	11.387	-	-	-	-	11.387	*Mining*
Perikanan	14.999	-	-	-	-	14.999	*Fishery*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	196	-	-	-	-	196	*Agribusiness, hunting and forestry*
Lain-lain	71.483	-	-	-	-	71.483	*Others*
Sub-total	5.307.735	198.841	7.036	6.387	79.376	5.599.375	*Sub-total*
Sub-total - Rupiah	5.480.555	198.841	7.036	6.387	79.376	5.772.195	*Sub-total - Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 41)							***Foreign currency (Note 41)***
Pihak ketiga							***Third parties***
Industri pengolahan	217.355	25.465	-	-	-	242.820	*Processing industry*
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	87.106	-	-	-	-	87.106	*Real estate, rental and services*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	49.625	-	-	-	-	49.625	*Agriculture, hunting and forestry*
Perdagangan besar dan eceran	94.245	-	-	-	-	94.245	*Wholesaler and retailer*
Sub-total - mata uang asing	448.331	25.465	-	-	-	473.796	*Sub-total - foreign currency*
Total	5.928.886	224.306	7.036	6.387	79.376	6.245.991	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.097)	(55.217)	(922)	(1.593)	(40.279)	(113.108)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**5.913.789**	**169.089**	**6.114**	**4.794**	**39.097**	**6.132.883**	***Net***

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *10. LOANS (continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan) / *b. By economic sector (continued)*

	2018						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Sub-standard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	
Rupiah							***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 40)							***Related parties (Note 40)***
Perantara keuangan	132.700	-	-	-	-	132.700	*Financial agent*
Rumah tangga	10.535	-	-	-	-	10.535	*Household*
Sub-total	143.235	-	-	-	-	143.235	*Sub-total*
Pihak ketiga							***Third parties***
Rumah tangga	1.337.385	54.109	10.074	19.353	88.072	1.508.993	*Household*
Industri pengolahan	1.659.716	60.181	-	-	24.480	1.744.377	*Processing industry*
Perdagangan besar dan eceran	1.819.183	286.463	11.755	56.834	41.066	2.215.301	*Wholesaler and retailer*
Perantara keuangan	1.099.050	14.725	-	-	-	1.113.775	*Financial agent*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	497.936	1.613	-	-	34.190	533.739	*Transportation, warehousing and communications*
Konstruksi	414.686	67.129	-	14.531	92	496.438	*Construction*
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	35.089	5.767	96	336	502	41.790	*Lifestyle, social cultural, entertainment and other individuals*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	9.779	-	-	-	-	9.779	*Healthcare services and social activities*
Penyediaan akomodasi, makanan dan minuman	294.918	206.052	-	110.998	-	611.968	*Supply of accommodation, food and beverages*
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	361.870	54.981	-	14.268	10.816	441.935	*Real estate, rental and services*
Pertambangan	14.831	-	-	-	-	14.831	*Mining*
Perikanan	14.956	-	-	-	-	14.956	*Fishery*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	200	9.620	-	-	-	9.820	*Agribusiness, hunting and forestry*
Jasa pendidikan	-	510	-	-	-	510	*Education services*
Listrik, gas dan air	22.367	-	-	-	-	22.367	*Electricity, gas and water*
Lain-lain	91.428	-	-	-	-	91.428	*Others*
Sub-total	7.673.394	761.150	21.925	216.320	199.218	8.872.007	*Sub-total*
Sub-total - Rupiah	7.816.629	761.150	21.925	216.320	199.218	9.015.242	*Sub-total - Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 41)							***Foreign currency (Note 41)***
Pihak ketiga							***Third parties***
Industri pengolahan	531.952	368.123	-	-	-	900.075	*Processing industry*
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	103.602	-	-	-	-	103.602	*Real estate, rental and services*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	62.017	-	-	-	-	62.017	*Agriculture, hunting and forestry*
Perdagangan besar dan eceran	77.459	-	-	-	-	77.459	*Wholesaler and retailer*
Pertambangan	100.660	-	-	-	-	100.660	*Mining*
Sub-total - mata uang asing	875.690	368.123	-	-	-	1.243.813	*Sub-total - foreign currency*
Total	8.692.319	1.129.273	21.925	216.320	199.218	10.259.055	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.937)	(9.708)	(2.896)	(25.050)	(89.347)	(129.938)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**8.689.382**	**1.119.565**	**19.029**	**191.270**	**109.871**	**10.129.117**	***Net***

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

c. Berdasarkan periode pinjaman dan sisa umur jatuh tempo

Golongan jangka waktu pinjaman yang diberikan berdasarkan periode pinjaman sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pinjaman dan waktu yang tersisa sampai dengan saat jatuh temponya adalah sebagai berikut:

10. LOANS (continued)

c. By loan period and maturity

The classification of loans is based on loan period as stated in the loan agreements and the remaining period until maturity were as follows:

	2019		2018		
	Berdasarkan periode perjanjian kredit/ *Based on loan period*	**Berdasarkan sisa umur jatuh tempo/ *Based on remaining period until maturity***	**Berdasarkan periode perjanjian kredit/ *Based on loan period***	**Berdasarkan sisa umur jatuh tempo/ *Based on remaining period until maturity***	
Rupiah					***Rupiah***
Kurang dari 1 tahun	1.201.701	2.468.147	3.719.156	3.502.542	*Less than 1 year*
1 sampai dengan 2 tahun	1.092.632	554.742	1.004.440	1.576.977	*1 up to 2 years*
2 sampai dengan 5 tahun	2.355.287	2.293.970	2.260.216	2.435.092	*2 up to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	1.122.575	455.336	2.031.430	1.500.631	*More than 5 years*
Sub-total	5.772.195	5.772.195	9.015.242	9.015.242	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 41)					***Foreign currency (Note 41)***
Kurang dari 1 tahun	146.548	356.501	421.838	391.501	*Less than 1 year*
1 sampai dengan 2 tahun	138.950	19.519	187.900	228.912	*1 up to 2 years*
2 sampai dengan 5 tahun	141.405	97.776	215.514	531.780	*2 up to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	46.893	-	418.561	91.620	*More than 5 years*
Sub-total	473.796	473.796	1.243.813	1.243.813	*Sub-total*
Total	**6.245.991**	**6.245.991**	**10.259.055**	**10.259.055**	***Total***

d. Berdasarkan kolektibilitas

d. Based on collectibility

	2019						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Sub-standard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Total**	
Rupiah							***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 40)	172.820	-	-	-	-	172.820	*Related parties (Note 40)*
Pihak ketiga	5.307.735	198.841	7.036	6.387	79.376	5.599.375	*Third parties*
Sub-total	5.480.555	198.841	7.036	6.387	79.376	5.772.195	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 41)							***Foreign currency (Note 41)***
Pihak ketiga	448.331	25.465	-	-	-	473.796	*Third parties*
Total	5.928.886	224.306	7.036	6.387	79.376	6.245.991	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.097)	(55.217)	(922)	(1.593)	(40.279)	(113.108)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**5.913.789**	**169.089**	**6.114**	**4.794**	**39.097**	**6.132.883**	***Net***

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *10. LOANS (continued)*

d. Berdasarkan kolektibilitas (lanjutan) / *d. Based on collectibility (continued)*

	2018						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Sub-standard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	
Rupiah							***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 40)	143.235	-	-	-	-	143.235	*Related parties (Note 40)*
Pihak ketiga	7.673.394	761.150	21.925	216.320	199.218	8.872.007	*Third parties*
Sub-total	7.816.629	761.150	21.925	216.320	199.218	9.015.242	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 41)							***Foreign currency (Note 41)***
Pihak ketiga	875.690	368.123	-	-	-	1.243.813	*Third parties*
Total	8.692.319	1.129.273	21.925	216.320	199.218	10.259.055	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.937)	(9.708)	(2.896)	(25.050)	(89.347)	(129.938)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**8.689.382**	**1.119.565**	**19.029**	**191.270**	**109.871**	**10.129.117**	***Net***

e. Cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan untuk kelompok individual dan kolektif adalah sebagai berikut:

e. Allowance for impairment losses

The changes in allowance for impairment losses of loans to individual and collective groups are as follows:

	2019		2018		
	Individual/ *Individual*	Kolektif/ *Collective*	Individual/ *Individual*	Kolektif/ *Collective*	
Rupiah					***Rupiah***
Saldo awal tahun	61.947	66.529	81.429	103.224	*Balance at beginning of the year*
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan (Catatan 33)	4.786	(32.338)	105.397	(36.695)	*Provision (reversal) during the year (Note 33)*
Penghapusbukuan pinjaman	(20.558)	-	(6.805)	-	*Written-off loans*
Pelunasan dari klaim asuransi	-	-	(100.436)	-	*Paid off from insurance claim*
Pemulihan yang timbul dari *unwinding interest*	7.140	-	(17.638)	-	*Reversal arising from unwinding interest*
Saldo akhir tahun	53.315	34.191	61.947	66.529	*Balance at end of the year*
Mata uang asing					***Foreign currency***
Saldo awal tahun	1.173	289	2.007	372	*Balance at beginning of the year*
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan (Catatan 33)	(11.813)	25.313	5.881	(83)	*Provision (reversal) during the year (Note 33)*
Selisih perbedaan kurs	10.640	-	(6.715)	-	*Exchange rate differences*
Saldo akhir tahun	-	25.602	1.173	289	*Balance at end of year*
Total	**53.315**	**59.793**	**63.120**	**66.818**	***Total***

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pinjaman.

Management believes that allowance for impairment losses on loans provided is adequate to cover impairment losses that might arise from uncollectible loans.

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) / ***10. LOANS (continued)***

f. Perubahan pinjaman yang dihapusbukukan adalah sebagai berikut: / *f. The changes in the balance of loans that have been written-off are as follows:*

	2019	2018	
Saldo awal tahun	121.297	422.907	*Balance at beginning of the year*
Penghapusbukuan pinjaman yang diberikan tahun berjalan	20.558	6.805	*Written-off loans during the year*
Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan	(16.604)	(302.478)	*Recoveries from written-off loans*
Hapus tagih pinjaman yang diberikan tahun berjalan	(20.558)	(6.521)	*Claims written-off during the year*
Selisih perbedaan kurs	-	584	*Exchange rate differences*
Saldo akhir tahun	**104.693**	**121.297**	***Balance at end of year***

g. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun / *g. The average interest rates per annum*

	2019	2018	
Rupiah	12,53%	13,25%	*Rupiah*
Mata uang asing	5,86%	6,01%	*Foreign currency*

h. Informasi penting lainnya / *h. Other important information*

1. Jumlah pinjaman yang telah direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 144.239 dan Rp 844.907. Restrukturisasi pinjaman yang diberikan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang antara lain berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan pengurangan pembayaran pokok kredit.

1. Total restructured loans as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp 144,239 and Rp 844,907, respectively. Loan restructuring represents recovery efforts made by the Bank to the debtors, who have financial difficulty to pay its obligation, among others, by reducing the credit interest rate, rescheduling term of payment, reducing overdue interest payments and writing-off the principal payment.

2. Jaminan pemberian kredit pada umumnya berupa harta berwujud (tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, tagihan piutang, persediaan, giro, deposito berjangka, *personal guarantee* dan *corporate guarantee*). Jumlah deposito berjangka yang dijadikan sebagai jaminan tunai untuk pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 135.323 dan Rp 302.085 (Catatan 19c dan 20a). Jumlah tabungan yang dijadikan sebagai jaminan tunai untuk pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar nihil dan Rp 6.000 (Catatan 19b). Jumlah giro yang dijadikan sebagai jaminan tunai untuk pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 4.308 dan Rp 5.456 (Catatan 19a).

2. Collateral of loans is generally in the form of tangible assets (land, buildings, machinery, equipment, vehicles, receivables collections, inventories, demand deposits, time deposits, personal guarantee and corporate guarantee). Total time deposits pledged as cash collateral for loans granted as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp 135,323 and Rp 302,085, respectively (Notes 19c and 20a). Savings deposits which are pledged as collateral on loans as of December 31, 2019 and 2018 amounted to nil and Rp 6,000, respectively (Note 19b). Demand deposits which are pledged as collateral on loans as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp 4,308 and Rp 5,456, respectively (Note 19a).

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

h. Informasi penting lainnya (lanjutan)

3. Rasio pinjaman bermasalah (*Non-Performing Loans* (NPL)) pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 1,49% (*gross*) dan 0,80% (*net*) dan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 4,26% (*gross*) dan 3,12% (*net*).

4. Rasio pinjaman bermasalah terhadap aset produktif pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0,81% dan 2,97%.

5. Rasio pinjaman usaha kecil dan mikro terhadap pinjaman yang diberikan masing-masing adalah sebesar 0,71% dan 0,65% pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

6. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank memiliki masing-masing nihil dan 1 (satu) debitur yang telah melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

7. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank melakukan hapus buku serta hapus tagih untuk 245 (dua ratus empat puluh lima) debitur dengan jumlah Rp 20.558 dan 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) debitur dengan jumlah Rp 6.521. Pada tanggal 31 Desember 2018, Bank melakukan hapus buku tetapi tidak hapus tagih untuk 1 (satu) debitur dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 284. Hapus buku kredit telah mendapatkan persetujuan dari manajemen Bank.

8. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank telah melakukan klaim asuransi atas kredit bermasalah kepada PT Asuransi Sinarmas Tbk masing-masing sebesar Rp 3.942.215 dan Rp 1.047.635.

10. LOANS (continued)

h. Other important information (continued)

3. Non-performing Loans (NPL) ratios as of December 31, 2019 were 1.49% (gross) and 0.80% (net) and as of December 31, 2018 were 4.26% (gross) and 3.12% (net).

4. Non-performing loans ratios to earnings assets as of December 31, 2019 and 2018 were 0.81% and 2.97%, respectively.

5. Ratio of small and micro business loans to total loans were 0.71% and 0.65% as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

6. As of December 31, 2019 and 2018, the Bank had nil and 1 (one) debtor which exceeded the Legal Lending Limit (BMPK), respectively.

7. As of December 31, 2019 and 2018, the Bank has written-off loans and there is no any collection effort for 245 (two hundred forty five) debtors totaling Rp 20,558 and 359 (three hundred fifty nine) debtors totaling Rp 6,521. As of December 31, 2018, the Bank has written-off loans however, the collection effort is still on going for 1 (one) debtor totaling Rp 284. The loans written-off have been approved by the Bank's management.

8. As of 31 December 2019 and 2018, the Bank made insurance claims of non-performing loan to PT Asuransi Sinarmas Tbk in the amount of Rp 3,942,215 and Rp 1,047,635, respectively.

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI / *11. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES*

a. Berdasarkan pihak dan mata uang / *a. By party and currency*

	2019		2018		
	Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	Liabilitas akseptasi/ *Acceptance payables*	Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	Liabilitas akseptasi/ *Acceptance payables*	
Pihak ketiga					***Third parties***
Rupiah					*Rupiah*
Nasabah	-	-	16.546	-	*Debtors*
Bank lain	-	-	-	16.546	*Other banks*
Sub-total	-	-	16.546	16.546	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 41)					***Foreign currency (Note 41)***
Nasabah	23.518	-	632.585	-	*Debtors*
Bank lain	-	2.101	-	-	*Other banks*
Sub-total	23.518	2.101	632.585	-	*Sub-total*
Total	23.518	2.101	649.131	16.546	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	(546.943)	-	*Allowance for impairment losses*
Neto	**23.518**	**2.101**	**102.188**	**16.546**	***Net***

b. Berdasarkan jatuh tempo / *b. By maturity*

	2019		2018		
	Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	Liabilitas akseptasi/ *Acceptance payables*	Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	Liabilitas akseptasi/ *Acceptance payables*	
Telah jatuh tempo	-	-	612.372	-	*Overdue*
Belum jatuh tempo:					*Not yet due:*
Kurang dari 1 bulan	4.761	-	13.810	4.222	*Less than 1 month*
1 sampai dengan 3 bulan	8.630	-	22.949	12.324	*1 up to 3 months*
3 sampai dengan 6 bulan	10.127	2.101	-	-	*3 up to 6 months*
Total	**23.518**	**2.101**	**649.131**	**16.546**	***Total***

c. Berdasarkan kolektibilitas / *c. By collectibility*

	2019	2018	
Lancar	23.518	36.759	*Current*
Macet	-	612.372	*Loss*
Total	23.518	649.131	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(546.943)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**23.518**	**102.188**	***Net***

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

11. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)

d. Tagihan akseptasi berdasarkan debitur

d. Acceptance receivables by debtors

	2019 USD	2018 USD	2019 Rp	2018 Rp	
Rupiah					*Rupiah*
PT Intipelangi Drumasindo			-	15.915	*PT Intipelangi Drumasindo*
PT Wiraswasta Gemilang Indonesia			-	631	*PT Wiraswasta Gemilang Indonesia*
Sub-total			-	16.546	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 41)					*Foreign currency (Note 41)*
PT Liebra Permana	1.098.243	1.405.674	15.246	20.213	*PT Liebra Permana*
PT Argo Manunggal	444.520	-	6.171	-	*PT Argo Manunggal*
PT Besindo Prima	151.332	-	2.101	-	*PT Besindo Prima*
PT Damar Kristal Mas	-	21.499.994	-	309.170	*PT Damar Kristal Mas*
PT Dwiputra Mandiri Perkasa	-	9.999.990	-	143.800	*PT Dwiputra Mandiri Perkasa*
PT Sakti Persada Raya	-	6.999.999	-	100.660	*PT Sakti Persada Raya*
PT Petrobas Indonesia	-	4.084.993	-	58.742	*PT Petrobas Indonesia*
Sub-total	1.694.095	43.990.650	23.518	632.585	*Sub-total*
Total			23.518	649.131	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai			-	(546.943)	*Allowance for impairment losses*
Neto			**23.518**	**102.188**	***Net***

e. Berikut adalah informasi terkait tagihan akseptasi bermasalah:

(i) Bank memiliki tagihan *Letter of Credit (L/C)* kepada PT Damar Kristal Mas sebesar nihil pada tanggal 31 Desember 2019 dan sebesar USD 21.499.994 pada tanggal 31 Desember 2018. Bank telah mengirimkan surat No. 035/Century/TPA/III/09 tanggal 4 Maret 2009 mengenai pemberitahuan kewajiban utang L/C yang harus segera dilunasi oleh debitur sesuai dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas L/C *Usance Import* tersebut di atas. Terdapat jaminan deposito masing-masing sebesar USD 2.150.000 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang sampai saat ini masih disita oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia/Bareskrim Polri sebagai barang bukti perkara tindak pidana bidang perbankan dan Bank telah membentuk cadangan sebesar nihil pada tanggal 31 Desember 2019 dan sebesar USD 19.349.995 pada tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan surat pengajuan klaim polis asuransi No. 30.03/S.Dir-SAM/JTRUST/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dan No. 17.17-S.Dir-SAM/JTRUST/XII/ 2019 tanggal 17 Desember 2019, Bank telah melakukan klaim penggantian atas tagihan L/C kepada perusahaan asuransi dengan jumlah sebesar USD 21.499.994.

e. The following are information concerning the non-performing acceptance receivables:

(i) The Bank has Letter of Credit (L/C) receivable from PT Damar Kristal Mas amounting to nil as of December 31, 2019 and USD 21,499,994 as of December 31, 2018. The Bank has sent a letter No. 035/Century/TPA/III/09 dated March 4, 2009 regarding the notification that the L/C payable must be settled by the debtor in accordance with the Usance Import L/C Facility Agreement. The L/C receivable has a deposit collateral of USD 2,150,000 as of December 31, 2019 and 2018 which is still confiscated by the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia / Criminal Investigation Police as evidence of criminal acts in the banking sector and the Bank has made an allowance for the uncollateralized portion amounting to nil as of December 31, 2019 and USD 19,349,995 as of December 31, 2018. Based on the letter of claim submission insurance policy No. 30.03/S.Dir-SAM/JTRUST/IX/2019 dated September 30, 2019 and No. 17.17-S.Dir-SAM/JTRUST/XII/2019 dated December 17, 2019, the Bank has made a claim for reimbursement of the L/C bill to the insurance company in the amount of USD 21,499,994.

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

e. Berikut adalah informasi terkait tagihan akseptasi bermasalah: (lanjutan)

(ii) Bank memiliki tagihan L/C kepada PT Dwiputra Mandiri Perkasa sebesar nihil pada tanggal 31 Desember 2019 dan sebesar USD 9.999.990 pada tanggal 31 Desember 2018. Bank telah mengirimkan surat No. 037/Century/TPA/III/09 tanggal 4 Maret 2009 mengenai pemberitahuan kewajiban utang L/C yang harus segera dilunasi oleh debitur sesuai dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas L/C *Usance Import* tersebut di atas. Terdapat jaminan deposito masing-masing sebesar USD 1.000.000 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta Bank telah membentuk cadangan sebesar nihil pada tanggal 31 Desember 2019 dan sebesar USD 8.999.990 pada tanggal 31 Desember 2018.

Berdasarkan surat pengajuan klaim polis asuransi No. 25.01/S-Dir-SAM/JTRUST/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dan No. 17.17-S.Dir-SAM/JTRUST/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, Bank telah melakukan klaim penggantian atas tagihan L/C kepada perusahaan asuransi dengan jumlah sebesar USD 9.999.990.

(iii) Bank memiliki tagihan L/C kepada PT Sakti Persada Raya sebesar nihil pada tanggal 31 Desember 2019 dan sebesar USD 6.999.999 pada tanggal 31 Desember 2018. Bank telah mengirimkan surat No. 036/Century/TPA/III/09 tanggal 4 Maret 2009 mengenai pemberitahuan kewajiban utang L/C yang harus segera dilunasi oleh debitur sesuai dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas L/C *Usance Import* tersebut di atas. Terdapat jaminan deposito sebesar USD 1.400.000 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Bank telah membentuk cadangan sebesar nihil pada tanggal 31 Desember 2019 dan sebesar USD 5.599.999 pada tanggal 31 Desember 2018.

11. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)

e. The following are information concerning the non-performing acceptance receivables: (continued)

(ii) The Bank has L/C receivable from PT Dwiputra Mandiri Perkasa amounting to nil as of December 31, 2019 and USD 9,999,990 as of December 31, 2018. The Bank has sent a letter No. 037/Century/TPA/III/09 dated March 4, 2009 regarding the notification that L/C payable must be settled by the debtor in accordance with the Usance Import L/C Facility Agreement. The L/C receivable has a deposit collateral of USD 1,000,000 as of December 31, 2019 and 2018 and the Bank has made an allowance for the uncollateralized portion amounting to nil as of December 31, 2019 and USD 8,999,990 as of December 31, 2018.

Based on the insurance policy claim filing letter No. 25.01/S-Dir-SAM/JTRUST/X/ 2019 dated October 25, 2019 and No. 17.17-S.Dir-SAM/JTRUST/XII/ 2019 dated December 17, 2019, the Bank has made a claim for reimbursement of the L/C bill to the insurance company in the amount of USD 9,999,990.

(iii) The Bank has L/C receivable from PT Sakti Persada Raya amounting to nil as of December 31, 2019 and USD 6,999,999 as of December 31, 2018. The Bank has sent a letter No. 036/Century/TPA/III/09 dated March 4, 2009 regarding the notification that the L/C payable must be settled by the debtor in accordance with the Usance Import L/C Facility Agreement. The L/C receivable has a collateral deposit of USD 1,400,000 as of December 31, 2018 and the Bank has made an allowance for the uncollateralized portion amounting to nil as of December 31, 2019 and USD 5,599,999 as of December 31, 2018, respectively.

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

e. Berikut adalah informasi terkait tagihan akseptasi bermasalah: (lanjutan)

Berdasarkan surat pengajuan klaim polis asuransi No. 21.05/S.Dir-SAM/JTRUST/XI/ 2019 tanggal 21 November 2019 dan No. 17.17-S.Dir-SAM/JTRUST/XII/ 2019 tanggal 17 Desember 2019, Bank telah melakukan klaim penggantian atas tagihan L/C kepada perusahaan asuransi dengan jumlah sebesar USD 6.999.999.

(iv) Bank memiliki tagihan L/C kepada PT Petrobas Indonesia sebesar USD 4.300.000. Pada tahun 2008, PT Petrobas Indonesia berencana untuk menyelesaikan kewajibannya dengan cara restrukturisasi dan kemudian dikonversi menjadi pinjaman angsuran dengan menyerahkan agunan aset tetap dalam bentuk tanah dari pihak ketiga sebagai penjamin, tetapi sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, restrukturisasi tersebut belum terlaksana dan terdapat pembayaran atas sebagian tagihan tersebut sebesar USD 215.007. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, sisa saldo tagihan L/C kepada PT Petrobas Indonesia masing-masing sebesar nihil pada tanggal 31 Desember 2019 dan sebesar USD 4.084.993 pada tanggal 31 Desember 2018. Bank telah membentuk cadangan sebesar nihil pada tanggal 31 Desember 2019 dan sebesar USD 4.084.993 pada tanggal 31 Desember 2018.

Berdasarkan surat pengajuan klaim polis asuransi No. 17.17-S.Dir-SAM/JTRUST/XII/ 2019 tanggal 17 Desember 2019, Bank telah melakukan klaim penggantian atas tagihan L/C kepada perusahaan asuransi sebesar USD 4.084.993.

f. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

11. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)

e. The following are information concerning the non-performing acceptance receivables: (continued)

Based on the insurance policy claim filing letter No. 21.05/S.Dir-SAM/JTRUST/XI/ 2019 dated November 21, 2019 and No. 17.17-S.Dir-SAM/JTRUST/XII/2019 dated December 17, 2019, the Bank has made a claim for reimbursement of the L/C bill to the insurance company in the amount of USD 6,999,999.

(iv) The Bank has L/C receivable from PT Petrobas Indonesia amounting to USD 4,300,000. In 2008, PT Petrobas Indonesia planned to settle its obligations by restructuring and then by converting the loan into an installment loan by providing fixed asset collateral (land) from a third party as a guarantor, but as of the issuance date of the financial statements, the restructuring has not been executed and there is a partial payment of the bills amounting to USD 215,007. As of December 31, 2019 and 2018 the remaining balance of L/C receivable from PT Petrobas Indonesia amounted to nil as of December 31, 2019 and USD 4,084,993 as of December 31, 2018. Bank has made an allowance for the uncollateralized portion amounting to nil as of December 31, 2019 and USD 4,084,993 as of December 31, 2018, respectively.

Based on the insurance policy claim filing letter No. 17.17-S.Dir-SAM/JTRUST/XII/ 2019 dated December 17, 2019, the Bank has made a claim for reimbursement of the L/C bill to the insurance company in the amount of USD 4,084,993.

f. The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	2019	2018	
Saldo awal tahun	546.943	516.040	*Balance at beginning of the year*
Pemulihan tahun berjalan (Catatan 33)	(535.711)	-	*Reversal during the year (Note 33)*
Selisih perbedaan kurs	(11.232)	30.903	*Exchange rate differences*
Saldo akhir tahun	**-**	**546.943**	***Balance at end of the year***

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai untuk tagihan akseptasi yang telah dibentuk adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya tagihan akseptasi.

Management believes that the allowance for impairment losses on acceptance receivables is adequate to cover impairment losses that might arise from uncollectible acceptance receivables.

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan) / *11. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)*

g. Liabilitas akseptasi berdasarkan nama bank / *g. Acceptance payables based on bank's name*

	2019 USD	2018 USD	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak ketiga					***Third parties***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk			-	15.915	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk			-	631	*PT Bank Central Asia Tbk*
Sub-total			-	16.546	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 41)					*Foreign currency (Note 41)*
Toronto - Dominion Bank	151.332	-	2.101	-	*Toronto - Dominion Bank*
Total			**2.101**	**16.546**	***Total***

12. PENDAPATAN BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA / *12. ACCRUED INTEREST INCOME*

	2019	2018	
Pinjaman yang diberikan	87.209	73.177	*Loans*
Surat-surat berharga dan penempatan pada bank lain	41.925	29.815	*Marketable securities and placements with other bank*
Total	**129.134**	**102.992**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, termasuk dalam pendapatan bunga yang masih akan diterima adalah pendapatan bunga dalam mata uang asing masing-masing sebesar Rp 5.617 dan Rp 13.097 (Catatan 41).

As of December 31, 2019 and 2018, accrued interest income includes interest income in foreign currency amounting to Rp 5,617 and Rp 13,097, respectively (Note 41).

13. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA / *13. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES*

	2019	2018	
Asuransi kredit dibayar dimuka	4.305.476	1.110.493	*Prepaid credit insurance*
Sewa gedung	233.775	122.398	*Office rental*
Subrogation dan *broker fee*	51.824	62.858	*Subrogation and broker fee*
Lain-lain	27.211	36.740	*Others*
Total	**4.618.286**	**1.332.489**	***Total***

Asuransi kredit dibayar dimuka

Merupakan premi asuransi yang dibayarkan kepada PT Asuransi Sinarmas Tbk atas portofolio kredit yang dimiliki Bank terhadap risiko kredit bermasalah (*non-performing loans*) dengan jangka waktu selama 6 (enam) tahun sampai dengan tahun 2024.

Prepaid credit insurance

This pertains to insurance premium paid to PT Asuransi Sinarmas Tbk for the loan portfolio of the Bank against the risk of non-performing loans with term of 6 (six) years to 2024.

13. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA (lanjutan)

13. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES (continued)

Perubahan asuransi kredit dibayar dimuka adalah sebagai berikut:

Changes to prepaid credit insurance are as follows:

	2019	2018	
Saldo awal tahun	1.110.493	-	*Beginning balance*
Premi tahun berjalan	3.302.637	1.110.493	*Current premium insurance*
Amortisasi dan penggantian tahun berjalan	(107.654)	-	*Amortization and reimbursement current year*
Saldo akhir tahun	**4.305.476**	**1.110.493**	***Ending balance***

Berdasarkan surat dari pemegang saham No. 201327099W tanggal 31 Desember 2019, Bank menerima penggantian atas beban amortisasi tahun berjalan dari pemegang saham sebesar Rp 100.000.

Based on a letter from the shareholders No. 201327099W dated December 31, 2019, the Bank received reimbursement of current year's amortization expense from shareholders of Rp 100,000.

Sewa gedung

Office rental

Sewa gedung dibayar dimuka terutama merupakan sewa gedung untuk kantor di Sahid Sudirman Center, Jakarta Pusat sebesar Rp 233.775 dan Rp 122.398 masing-masing tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Prepaid office rentals mainly consist of office space rentals in Sahid Sudirman Center, Central Jakarta amounting to Rp 233,775 and Rp 122,398 as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

14. ASET TETAP

14. FIXED ASSETS

	2019					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Penerapan metode revaluasi/ *Application of the revaluation method*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai revaluasi						***Revaluation value***
Hak atas tanah	135.148	-	-	11.325	146.473	*Land rights*
Bangunan	27.260	-	-	(5.116)	22.144	*Buildings*
Inventaris kantor	59.475	7.686	615	-	66.546	*Office equipment*
Kendaraan	261	939	-	-	1.200	*Vehicles*
Total nilai revaluasi	222.144	8.625	615	6.209	236.363	*Total revaluation value*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	3.521	1.299	-	(4.543)	277	*Buildings*
Inventaris kantor	24.370	12.697	403	-	36.664	*Office equipment*
Kendaraan	174	83	-	-	257	*Vehicles*
Total akumulasi penyusutan	28.065	14.079	403	(4.543)	37.198	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**194.079**				**199.165**	***Net book value***

14. ASET TETAP (lanjutan) / *14. FIXED ASSETS (continued)*

	2018				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan					***Acquisition Cost***
Hak atas tanah	165.430	-	30.282	135.148	*Land rights*
Bangunan	38.314	-	11.054	27.260	*Buildings*
Inventaris kantor	39.688	21.408	1.621	59.475	*Office equipment*
Kendaraan	706	44	489	261	*Vehicles*
Total harga perolehan	244.138	21.452	43.446	222.144	*Total acquisition cost*
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan	3.819	1.613	1.911	3.521	*Buildings*
Inventaris kantor	16.212	9.409	1.251	24.370	*Office equipment*
Kendaraan	623	39	488	174	*Vehicles*
Total akumulasi penyusutan	20.654	11.061	3.650	28.065	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**223.484**			**194.079**	***Net book value***

Pada tanggal 31 Desember 2019, aset tetap dicatat berdasarkan nilai revaluasi yang telah direviu oleh manajemen dan didukung oleh laporan penilai independen profesional KJPP Sugianto Prasodjo & Rekan berdasarkan laporan penilaian No. 02406/2.0131-00/PI/07/0375/1/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk hak atas tanah dan bangunan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pasar (*market approach*) dan pendekatan pendapatan (*income approach*) untuk hak atas tanah dan bangunan berupa ruko. Pendekatan pendapatan (*income approach*) dan pendekatan biaya (*cost approach*) untuk penilaian tanah, bangunan dan sarana pelengkap berupa gedung kantor.

On December 31, 2019, fixed assets were recorded based on revaluation value, the latest as reviewed by management and supported by an independent professional appraiser of KJPP Sugianto Prasodjo & Rekan based on its report No. 02406/2.0131-00/PI/07/0375/1/X/2019 dated October 10, 2019 for land rights and buildings. The approach method used is market approach and income approach for land rights and building in the form of shop houses. Income approach and cost approach are used for the valuation of land, buildings and complementary facilities in the form of office buildings.

Perubahan surplus revaluasi aset tetap adalah sebagai berikut:

The changes in revaluation surplus of fixed assets are as follows:

	2019	2018	
Saldo awal tahun	124.962	143.097	*Balance at beginning of year*
Perubahan tahun berjalan	13.374	(18.135)	*Changes during the year*
Saldo akhir tahun	**138.336**	**124.962**	***Balance at end of year***

Jika aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, nilai buku neto aset tetap adalah sebagai berikut:

If fixed assets were stated using historical cost basis, the net book value of fixed assets would be as follows:

	2019	2018	
Hak atas tanah	19.542	19.542	*Land rights*
Bangunan	10.882	15.793	*Buildings*
Inventaris kantor	29.321	34.675	*Office equipment*
Kendaraan	931	85	*Vehicles*
Total	**60.676**	**70.095**	***Total***

14. ASET TETAP (lanjutan)

Beban penyusutan aset tetap dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 34).

Rincian laba penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	2019	2018	
Hasil penjualan	194	25.585	*Proceeds from sale*
Nilai buku neto	173	23.406	*Net book value*
Laba penjualan aset tetap (Catatan 36)	**21**	**2.179**	***Gain on sale of fixed assets (Note 36)***

Rincian penghapusan aset tetap adalah sebagai berikut:

	2019	2018	
Nilai buku neto	350	19.153	*Net book value*
Akumulasi penyusutan	(311)	(2.763)	*Accumulated depreciation*
Rugi penghapusan aset tetap (Catatan 36)	**(39)**	**(16.390)**	***Loss on disposal of fixed assets (Note 36)***

Aset tetap Bank telah diasuransikan dengan *property all risk insurance* dan *earthquake insurance* pada PT Asuransi Buana Independent (pihak ketiga) dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 271.732 dan Rp 179.000 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan asuransi kendaraan pada PT Asuransi Buana Independent (pihak ketiga) dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 511 dan Rp 1.211 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Bank memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Jakarta, Medan, Palembang, Pangkal Pinang, Sungai Liat, Solo, Surabaya dan Makassar dengan hak kepemilikan berupa Hak Guna Bangunan (HGB) yang akan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2038. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan.

14. FIXED ASSETS (continued)

Depreciation expense of fixed assets is charged to general and administrative expenses (Note 34).

The details of gain on sale of fixed assets are as follows:

The details of disposal of fixed assets are as follows:

Fixed assets of the Bank have been insured with property all risk insurance and earthquake insurance with PT Asuransi Buana Independent (third party) for a total coverage amount of Rp 271,732 and Rp 179,000 as of December 31, 2019 and 2018, respectively and vehicle insurance with PT Asuransi Buana Independent (third party) for a total coverage amount of Rp 511 and Rp 1,211 as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

The Bank owned parcels of land in Jakarta, Medan, Palembang, Pangkal Pinang, Sungai Liat, Solo, Surabaya and Makassar with Building Usage Rights ("HGB") which will expire on various dates up to 2038. Management believes that there will be no difficulty in the extension of the land rights since all of the land were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

As of December 31, 2019 and 2018, there are no fixed assets pledged as collateral.

14. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak ada aset tetap yang dipakai sementara atau dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank melakukan peninjauan kembali atas masa manfaat, metode penyusutan dan nilai residu aset tetap dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan atas metode dan asumsi tersebut.

Berdasarkan penelaahan manajemen Bank, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Manajemen berpendapat bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, seluruh aset tetap yang dimiliki oleh Bank telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup.

14. FIXED ASSETS (continued)

As of December 31, 2019 and 2018, there are no fixed assets used temporarily or terminated from active use and not classified as held-for-sale.

As of December 31, 2019 and 2018, the Bank undertake a review of useful lives, depreciation method and residual values of fixed assets and concluded that there was no change in the methods and assumptions.

Based on the Bank's management assessment, there were no events or changes in circumstances that indicate an impairment of fixed assets as of December 31, 2019 and 2018.

Management believes that as of December 31, 2019 and 2018, all fixed assets owned by the Bank are covered by insurance.

15. ASET TAKBERWUJUD / *15. INTANGIBLE ASSETS*

	2019			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan				***Acquisition cost***
Perangkat lunak	141.049	13.640	154.689	*Software*
Lisensi	53.952	6.206	60.158	*License*
Total harga perolehan	195.001	19.846	214.847	*Total acquisition cost*
Akumulasi amortisasi				***Accumulated amortization***
Perangkat lunak	81.819	8.227	90.046	*Software*
Lisensi	30.503	5.439	35.942	*License*
Total akumulasi amortisasi	112.322	13.666	125.988	*Total accumulated amortization*
Nilai buku neto	**82.679**		**88.859**	***Net book value***

	2018			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan				***Acquisition cost***
Perangkat lunak	88.106	52.943	141.049	*Software*
Lisensi	39.555	14.397	53.952	*License*
Total harga perolehan	127.661	67.340	195.001	*Total acquisition cost*
Akumulasi amortisasi				***Accumulated amortization***
Perangkat lunak	74.758	7.061	81.819	*Software*
Lisensi	25.703	4.800	30.503	*License*
Total akumulasi amortisasi	100.461	11.861	112.322	*Total accumulated amortization*
Nilai buku neto	**27.200**		**82.679**	***Net book value***

15. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Beban amortisasi aset takberwujud dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 34).

Berdasarkan penelaahan manajemen Bank, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

15. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Amortization of intangible assets is charged to general and administrative expenses (Note 34).

Based on the Bank's management assessment, there were no events or changes in circumstances that indicate an impairment of intangible assets as of December 31, 2019 and 2018.

16. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

16. FORECLOSED ASSETS

	2019				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan					***Acquisition cost***
Tanah	37.481	-	-	37.481	*Land*
Tanah dan bangunan	400.184	-	70.273	329.911	*Land and buildings*
Total	437.665	-	70.273	367.392	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	200.012	62.631	26.481	236.162	*Allowance for impairment losses*
Nilai buku neto	**237.653**			**131.230**	***Net book value***

	2018				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan					***Acquisition cost***
Tanah	37.481	-	-	37.481	*Land*
Tanah dan bangunan	313.892	86.292	-	400.184	*Land and buildings*
Total	351.373	86.292	-	437.665	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	120.006	80.006	-	200.012	*Allowance for impairment losses*
Nilai buku neto	**231.367**			**237.653**	***Net book value***

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank mengakui kerugian atas penjualan agunan yang diambil alih masing-masing sebesar Rp 10.134 dan nihil (Catatan 36).

For the years ended December 31, 2019 and 2018, the Bank has recognize loss on sale of foreclosed assets amounting to Rp 10,134 and nil, respectively (Note 36).

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	2019	2018	
Saldo awal tahun	200.012	120.006	*Balance at beginning of year*
Penyisihan selama tahun berjalan - neto (Catatan 33)	62.631	80.006	*Provision during the year - net (Note 33)*
Penjualan agunan yang diambil alih	(26.481)	-	*Sale of foreclosed assets*
Saldo akhir tahun	**236.162**	**200.012**	***Balance at end of year***

Manajemen berpendapat bahwa pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih telah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

Management believes that allowance for impairment losses on foreclosed assets is adequate to cover any possible losses.

17. ASET LAIN-LAIN / *17. OTHER ASSETS*

	2019	2018	
Tagihan kepada Weston Capital Advisors Inc. (Catatan 50c)	46.127	47.780	*Receivable from Weston Capital Advisors Inc. (Note 50c)*
Renovasi dibayar di muka	28.569	35.144	*Prepaid renovation*
Surat Ketetapan Pajak untuk tahun pajak - 2015 (Catatan 37b dan 56)	22.881	-	*Tax Assessment Letters for fiscal year - 2015 (Notes 37b and 56)*
Pengembangan sistem dan informasi	9.610	6.957	*System and information development*
Piutang bunga lain-lain	8.188	15.297	*Other interest receivables*
Setoran jaminan	6.563	6.702	*Security deposits*
Piutang terkait transaksi ATM	5.726	8.554	*Receivables related to ATM*
Tagihan kepada J Trust Co., Ltd. (Catatan 40)	-	2.222	*Receivable from J Trust Co., Ltd. (Note 40)*
Lain-lain	25.715	24.568	*Others*
Total	153.379	147.224	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(54.158)	(16.817)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**99.221**	**130.407**	***Net***

Tagihan kepada Weston Capital Advisors Inc.

Tagihan kepada Weston Capital Advisors Inc. sebesar USD 3.322.652,33 (ekuivalen Rp 46.127 pada tanggal 31 Desember 2019 dan ekuivalen Rp 47.780 pada tanggal 31 Desember 2018) merupakan dana milik Bank yang harus dikembalikan oleh Weston Capital Advisors Inc. sehubungan dengan Putusan dalam bentuk *Order Vacating Judgment* yang dikeluarkan oleh *United States District Court Southern District of New York* tanggal 19 November 2013 (Catatan 50c).

Receivable from Weston Capital Advisors Inc.

Receivable from Weston Capital Advisors Inc. amounting to USD 3,322,652.33 (equivalent to Rp 46,127 as of December 31, 2019 and equivalent to Rp 47,780 as of December 31, 2018) represents the Bank's fund which should be returned by Weston Capital Advisors Inc. in relation to Verdict of Order Vacating Judgment issued by United States District Court Southern District of New York dated November 19, 2013 (Note 50c).

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses are as follows:

	2019	2018	
Saldo awal tahun	16.817	16.240	*Balance at beginning of year*
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 33)	38.079	-	*Provision during the year (Note 33)*
Selisih perbedaan kurs	(738)	577	*Exchange rate difference*
Saldo akhir tahun	**54.158**	**16.817**	***Balance at end of year***

18. LIABILITAS SEGERA / *18. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY*

	2019	2018	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			*Rupiah*
Liabilitas cadangan pembayaran	109.539	26.909	*Liability payment reserve*
Titipan asuransi konsumen	20.150	6.158	*Insurance advances from customers*
Biaya jasa	8.834	8.834	*Service costs*
Insentif yang masih harus dibayar	7.465	6.856	*Incentive payables*
ATM Prima	1.123	1.381	*ATM Prima*
Transfer, inkaso dan kliring	675	454	*Transfer, cheques for collection and clearing*
ATM Bersama	456	786	*ATM Bersama*
Pinjaman karyawan	1	3	*Employee loans*
Liabilitas lainnya	5.132	4.363	*Other liabilities*
Sub-total	153.375	55.744	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 41)			*Foreign currency (Note 41)*
Insentif yang masih harus dibayar	2.231	2.053	*Incentive payable*
Transfer, inkaso dan kliring	490	4.969	*Transfer, cheques for collection and clearing*
Liabilitas cadangan pembayaran	49	997	*Liability payment reserve*
Liabilitas lainnya	-	12	*Other liabilities*
Sub-total	2.770	8.031	*Sub-total*
Total	**156.145**	**63.775**	***Total***

19. SIMPANAN NASABAH / *19. DEPOSITS FROM CUSTOMERS*

	2019	2018	
Pihak ketiga			***Third parties***
Deposito berjangka	10.934.152	11.632.586	*Time deposits*
Giro	639.021	740.250	*Demand deposits*
Tabungan	1.164.690	788.726	*Savings deposits*
Sub-total	12.737.863	13.161.562	*Sub-total*
Pihak berelasi (Catatan 40)			***Related parties (Note 40)***
Deposito berjangka	52.679	39.301	*Time deposits*
Giro	13.846	45.923	*Demand deposits*
Tabungan	1.844	1.819	*Savings deposits*
Sub-total	68.369	87.043	*Sub-total*
Total	**12.806.232**	**13.248.605**	***Total***

19. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004, efektif tanggal 22 September 2005, seluruh bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia menjadi peserta penjaminan LPS. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp 100. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin LPS, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2008 nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank diubah menjadi paling banyak Rp 2.000 dan tingkat bunga yang diberikan tidak melebihi tingkat bunga LPS.

Tingkat suku bunga penjaminan LPS untuk simpanan dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat adalah masing-masing sebesar 6,25% dan 1,75% pada tanggal 31 Desember 2019 dan 6,75% dan 2,00% pada tanggal 31 Desember 2018.

19. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

Based on Law No. 24 dated September 22, 2004, which became effective on September 22, 2005, all commercial banks which conduct business activities in Indonesia have to become participants of LPS. The maximum deposit amount per customer in a bank guaranteed by LPS is Rp 100. Based on Government Regulation in Lieu of Law No. 3 Year 2008 regarding the Change in Law No. 24 Year 2004 juncto Government Regulation No. 66 Year 2008 regarding the Maximum Deposits Amount Guaranteed by the LPS, effective from October 13, 2008, total deposits guaranteed by LPS is maximum of Rp 2,000 per customer in a bank and the interest rate given for customers should not exceed the interest rate of LPS.

The interest rate guaranteed by LPS for deposits in Rupiah and United States Dollar were 6.25% and 1.75% as of December 31, 2019 and 6.75% and 2.00% as of December 31, 2018, respectively.

a. Giro

(i) Berdasarkan pihak dan mata uang

a. Demand deposits

(i) By party and currency

	2019	2018	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	362.191	525.782	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 41)	276.830	214.468	*Foreign currencies (Note 41)*
Sub-total	639.021	740.250	*Sub-total*
Pihak berelasi (Catatan 40)			***Related parties (Note 40)***
Rupiah	9.783	43.574	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 41)	4.063	2.349	*Foreign currencies (Note 41)*
Sub-total	13.846	45.923	*Sub-total*
Total	**652.867**	**786.173**	***Total***

(ii) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

(ii) Average interest rates per annum:

	2019	2018	
Rupiah	0,48%	1,82%	*Rupiah*
Mata uang asing	0,50%	0,55%	*Foreign currencies*

19. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

a. Giro (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, terdapat giro yang diblokir oleh Bank atas kasus yang masih diselidiki berdasarkan Surat BI No. 11/16/DPB1/TPB-7/Rahasia tanggal 29 Januari 2009. Saldo giro yang diblokir adalah sebagai berikut:

19. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

a. Demand deposits (continued)

As of December 31, 2019 and 2018, there were demand deposits frozen by the Bank for cases which are being investigated based on BI Letter No. 11/16/DPB1/TPB-7/Rahasia dated January 29, 2009. The demand deposits that are frozen are as follows:

	2019	2018	
Mata Uang			***Currency***
Dolar Amerika Serikat	8.899	8.983	*United States Dollar*
Rupiah	8.645	8.587	*Rupiah*
Dolar Australia	10	11	*Australian Dollar*
Total	**17.554**	**17.581**	***Total***

Giro yang dijadikan sebagai jaminan tunai atas pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 4.308 dan Rp 5.456 (Catatan 10h).

Demand deposits which are pledged as collateral on loans as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp 4,308 and Rp 5,456, respectively (Note 10h).

b. Tabungan

(i) Berdasarkan pihak, mata uang dan jenis

b. Savings deposits

(i) By party, currency and type

	2019	2018	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			*Rupiah*
Tabungan Jtrust Bisnis	657.709	309.517	*Tabungan Jtrust Bisnis*
Tabungan Mutiara	449.460	445.701	*Tabungan Mutiara*
Tabungan Komunitas MOE	33.278	14.733	*Tabungan MOE Community*
Tabungan Rencana Mutiara	16.813	11.045	*Tabungan Rencana Mutiara*
Tabunganku	7.430	7.730	*Tabunganku*
Sub-total	1.164.690	788.726	*Sub-total*
Pihak berelasi (Catatan 40)			***Related parties (Note 40)***
Rupiah			*Rupiah*
Tabungan Mutiara	993	1.240	*Tabungan Mutiara*
Tabungan Jtrust Bisnis	389	181	*Tabungan Jtrust Bisnis*
Tabungan Rencana Mutiara	287	182	*Tabungan Rencana Mutiara*
Tabungan Komunitas MOE	155	161	*Tabungan MOE Community*
Tabunganku	20	55	*Tabunganku*
Sub-total	1.844	1.819	*Sub-total*
Total	**1.166.534**	**790.545**	***Total***

19. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

b. Tabungan (lanjutan)

(ii) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

	2019	2018
Rupiah	0,83%	1,86%

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, terdapat tabungan yang diblokir oleh Bank atas kasus yang masih diselidiki berdasarkan Surat BI No. 11/16/DPB1/TPB-7/Rahasia tanggal 29 Januari 2009. Saldo tabungan yang diblokir adalah masing-masing sebesar Rp 6.032 dan Rp 4.387.

Tabungan yang dijadikan sebagai jaminan tunai atas pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2019 and 2018 masing-masing adalah sebesar nihil dan Rp 6.000 (Catatan 10h).

c. Deposito berjangka

(i) Berdasarkan pihak dan mata uang

	2019	2018
Pihak ketiga		
Rupiah	10.275.020	10.861.843
Mata uang asing (Catatan 41)	659.132	770.743
Sub-total	10.934.152	11.632.586
Pihak berelasi (Catatan 40)		
Rupiah	33.135	39.282
Mata uang asing (Catatan 41)	19.544	19
Sub-total	52.679	39.301
Total	**10.986.831**	**11.671.887**

19. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

b. Savings deposits (continued)

(ii) Average interest rates per annum

		Rupiah

As of December 31, 2019 and 2018, there were savings deposits frozen by the Bank for cases which are being investigated by authorities based on BI Letter No. 11/16/DPB1/TPB-7/ Rahasia dated January 29, 2009. The balance of savings deposits that are frozen amounted to Rp 6,032 and Rp 4,387, respectively.

Savings deposits which are pledged as collateral on loans as of December 31, 2019 and 2018 amounted to nil and Rp 6,000, respectively (Note 10h).

c. Time deposits

(i) By party and currency

Third parties		
Rupiah		
Foreign currencies (Note 41)		
Sub-total		
Related parties (Note 40)		
Rupiah		
Foreign currencies (Note 41)		
Sub-total		
Total		

19. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / ***19. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)***

c. Deposito berjangka (lanjutan) / *c. Time deposits (continued)*

(ii) Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan periode deposito berjangka / *(ii) Classification of time deposits based on period of time deposits*

	2019	2018	
Rupiah			*Rupiah*
On call	33.000	29.000	*On call*
1 bulan	5.300.888	5.846.850	*1 month*
3 bulan	3.983.794	3.882.440	*3 months*
6 bulan	445.482	540.930	*6 months*
12 bulan	544.991	601.905	*12 months*
Sub-total	10.308.155	10.901.125	*Sub-total*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
1 bulan	483.503	333.391	*1 month*
3 bulan	94.073	284.023	*3 months*
6 bulan	93.497	22.086	*6 months*
12 bulan	7.603	131.262	*12 months*
Sub-total	678.676	770.762	*Sub-total*
Total	**10.986.831**	**11.671.887**	***Total***

(iii) Berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo / *(iii) Based on remaining period until maturity*

	2019	2018	
Rupiah			*Rupiah*
Kurang dari 1 bulan	6.390.126	6.856.696	*Less than 1 month*
1 sampai dengan 3 bulan	3.042.979	3.089.996	*1 up to 3 months*
3 sampai dengan 6 bulan	394.133	425.126	*3 up to 6 months*
6 sampai dengan 12 bulan	480.917	529.307	*6 up to 12 months*
Sub-total	10.308.155	10.901.125	*Sub-total*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Kurang dari 1 bulan	424.309	337.968	*Less than 1 month*
1 sampai dengan 3 bulan	199.430	286.002	*1 up to 3 months*
3 sampai dengan 6 bulan	54.921	23.360	*3 up to 6 months*
6 sampai dengan 12 bulan	16	123.432	*6 up to 12 months*
Sub-total	678.676	770.762	*Sub-total*
Total	**10.986.831**	**11.671.887**	***Total***

19. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

c. Deposito berjangka (lanjutan)

(iv) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

19. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

c. Time deposits (continued)

(iv) Average interest rates per annum

	2019	2018	
Rupiah			*Rupiah*
On call	4,4%	4,8%	*On call*
1 bulan	7,3%	7,0%	*1 month*
3 bulan	7,8%	7,3%	*3 months*
6 bulan	8,2%	7,4%	*6 months*
12 bulan	7,3%	7,1%	*12 months*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
1 bulan	1,3%	0,9%	*1 month*
3 bulan	1,7%	1,2%	*3 months*
6 bulan	2,3%	1,4%	*6 months*
12 bulan	2,3%	1,8%	*12 months*

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, terdapat deposito berjangka yang diblokir oleh Bank atas kasus yang masih diselidiki berdasarkan Surat BI No. 11/16/DPB1/TPB-7/ Rahasia tanggal 29 Januari 2009. Saldo deposito yang diblokir adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2019 and 2018, there were time deposits frozen by the Bank for cases which are being investigated by authorities based on BI Letter No. 11/16/DPB1/TPB-7/Rahasia dated January 29, 2009. The balance of deposits that are frozen are as follows:

	2019	2018	
Mata Uang			***Currency***
Dolar Amerika Serikat	21.271	22.025	*United States Dollar*
Rupiah	1.802	1.719	*Rupiah*
Total	**23.073**	**23.744**	***Total***

Deposito berjangka yang dijadikan sebagai jaminan tunai atas pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 125.823 dan Rp 295.085 (Catatan 10h).

Time deposits which are pledged as collateral on loans as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp 125,823 and Rp 295,085, respectively (Note 10h).

20. SIMPANAN DARI BANK LAIN / *20. DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

	2019	2018	
Rupiah			*Rupiah*
Giro	947.770	1.056.642	*Demand deposits*
Deposito berjangka	682.278	697.141	*Time deposits*
Tabungan	76.383	31.800	*Savings deposits*
Call money	-	125.000	*Call money*
Sub-total	1.706.431	1.910.583	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 41)			*Foreign currency (Note 41)*
Call money	138.825	-	*Call money*
Giro	732	1.021	*Demand deposits*
Sub-total	139.557	1.021	*Sub-total*
Total	**1.845.988**	**1.911.604**	***Total***

a. Deposito berjangka / *a. Time deposits*

(i) Berdasarkan periode / *(i) By period*

	2019	2018	
Rupiah			*Rupiah*
Kurang dari 1 bulan	-	12.000	*Less than 1 month*
1 bulan	303.680	408.053	*1 month*
3 bulan	355.550	259.040	*3 months*
6 bulan	13.423	6.423	*6 months*
12 bulan	9.625	11.625	*12 months*
Total	**682.278**	**697.141**	***Total***

(ii) Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo / *(ii) Based on remaining period until maturity*

	2019	2018	
Rupiah			*Rupiah*
Kurang dari 1 bulan	506.958	474.837	*Less than 1 month*
1 sampai dengan 3 bulan	150.772	193.256	*1 up to 3 months*
3 sampai dengan 6 bulan	14.923	17.423	*3 up to 6 months*
6 sampai dengan 12 bulan	9.625	11.625	*6 up to 12 months*
Total	**682.278**	**697.141**	***Total***

Deposito yang dijadikan sebagai jaminan tunai atas pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 9.500 dan Rp 7.000 (Catatan 10h).

Time deposits which are pledged as collateral on loans as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp 9,500 and Rp 7,000, respectively (Note 10h).

20. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan) / *20. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)*

b. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun / *b. Average interest rate per annum*

	2019	2018	
Deposito berjangka	7,60%	6,68%	*Time deposits*
Giro	3,45%	4,52%	*Demand deposits*
Call money	7,20%	1,32%	*Call money*
Tabungan	5,91%	5,85%	*Savings deposits*

21. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI / *21. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENT*

	2019						
Jenis efek	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tanggal mulai/ *Starting date*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Nilai beli kembali/ *Buy back value*	Beban bunga belum diamortisasi/ *Unamortized interest*	Nilai neto/ *Net value*	*Type of securities*
Pihak ketiga							***Third parties***
Rupiah							*Rupiah*
Obligasi Pemerintah							*Goverment Bonds*
FR0082	100.000	19/12/2019	09/01/2020	88.134	133	88.001	*FR0082*

	2018						
Jenis efek	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tanggal mulai/ *Starting date*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Nilai beli kembali/ *Buy back value*	Beban bunga belum diamortisasi/ *Unamortized interest*	Nilai neto/ *Net value*	*Type of securities*
Pihak ketiga							***Third parties***
Rupiah							*Rupiah*
Sertifikat Bank Indonesia							*Certificates of Bank Indonesia*
IDBI	100.000	11/12/2018	11/01/2019	85.941	175	85.766	*IDBI*
Obligasi Pemerintah							*Goverment Bonds*
FR0059	200.000	19/12/2018	03/01/2019	176.987	64	176.923	*FR0059*
SR010	300.000	19/12/2018	16/01/2019	270.098	782	269.316	*SR010*
Total	**600.000**			**533.026**	**1.021**	**532.005**	***Total***

22. BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *22. ACCRUED INTEREST EXPENSES*

	2019	2018	
Rupiah	62.705	58.693	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 41)	2.381	2.738	*Foreign currencies (Note 41)*
Total	**65.086**	**61.431**	***Total***

23. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR DAN LIABILITAS LAIN-LAIN / *23. ACCRUED EXPENSES AND OTHER LIABILITIES*

	2019	2018	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			*Rupiah*
Surat kesanggupan	198.746	198.325	*Promissory notes*
Setoran jaminan	2.827	943	*Security deposits*
Personalia	9	13.195	*Personnel*
Lain-lain	27.528	23.485	*Others*
Sub-total	229.110	235.948	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 41)			*Foreign currency (Note 41)*
Lain-lain	1.463	1.523	*Others*
Sub-total - pihak ketiga	230.573	237.471	*Sub-total - third parties*
Pihak berelasi (Catatan 40)			***Related party (Note 40)***
Mata uang asing (Catatan 41)			*Foreign currency (Note 41)*
Bunga pinjaman subordinasi	-	866	*Interest on subordinated loan*
Total	**230.573**	**238.337**	***Total***

24. PINJAMAN SUBORDINASI / *24. SUBORDINATED LOAN*

	2019	2018	
J Trust Asia Pte., Ltd.			*J Trust Asia Pte., Ltd.*
(Catatan 40 dan 41)			*(Notes 40 and 41)*
Pinjaman Subordinasi II	-	143.800	*Subordinated Loan II*
J Trust Co., Ltd. (Catatan 40)			*J Trust Co., Ltd. (Note 40)*
Pinjaman Subordinasi III	400.000	-	*Subordinated Loan III*
Total	**400.000**	**143.800**	***Total***

Pinjaman Subordinasi I

Pada tanggal 16 Oktober 2015, Bank menandatangani perjanjian pinjaman subordinasi dengan J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura (“JTA”). Dalam perjanjian tersebut, JTA menyetujui untuk memberikan pinjaman subordinasi tanpa jaminan sebesar USD 25.000.000, serta dikenakan suku bunga sebesar LIBOR 3 (tiga) bulan ditambah 1% per tahun dan dibayar setiap 3 (tiga) bulan. Jatuh tempo pinjaman ini adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal 16 Oktober 2015 atau dapat dilunasi sesuai dengan kesepakatan para pihak, tetapi harus mendapat persetujuan dari regulator.

Subordinated Loan I

On October 16, 2015, the Bank entered into a subordinated loan agreement with J Trust Asia Pte., Ltd., Singapore (“JTA”). In this agreement, JTA agreed to provide unsecured subordinated loan amounting to USD 25,000,000, which bears an interest rate at 3 (three) months LIBOR plus 1% per annum and it shall be paid quarterly. The maturity date of this loan is 5 (five) years since October 16, 2015 or other later date as agreed by parties and must also subject to prior consent from the regulator.

24. PINJAMAN SUBORDINASI (lanjutan)

Pinjaman Subordinasi I (lanjutan)

Pinjaman subordinasi ini memiliki fitur dimana Bank memiliki pilihan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemegang saham akhir untuk mengkonversi sebagian jumlah pokok yang ada tertunggak dan/atau bunga saham yang ditempatkan dan disetor atau mengurangi pinjaman dengan cara yang ditetapkan apabila Bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya.

Pada setiap tanggal pembayaran bunga, JTA dapat meminta pinjaman diselesaikan dan dilunasi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan penyerahan saham oleh Bank (konversi). Konversi tersebut hanya dapat dilakukan oleh Bank setelah menerima persetujuan dari regulator dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika pada tanggal jatuh tempo, Bank perlu memperkuat struktur permodalannya, dengan persetujuan terlebih dahulu dari JTA dan regulator, Bank dapat melunasi pinjaman tersebut dengan penerbitan saham Bank untuk JTA.

Berdasarkan Surat OJK No. S-105/PB.31/2015 tanggal 20 Oktober 2015, OJK menyetujui untuk memperhitungkan pinjaman subordinasi ini sebagai komponen modal pelengkap Bank dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Berdasarkan Surat OJK No. SR-64/PB.31/2018 tanggal 24 Mei 2018, OJK menyetujui untuk pelaksanaan konversi pinjaman subordinasi dari sebelumnya bersifat *non-perpetual* menjadi *perpetual* sehingga pencatatannya dapat direklasifikasi dari komponen Modal Pelengkap menjadi komponen Modal Inti Tambahan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman subordinasi adalah nihil karena sudah direklasifikasi dan disajikan sebesar Rp 353.375 sebagai komponen ekuitas lain dengan memakai kurs tanggal 24 Mei 2018 sebagai dasar pengakuan di laporan keuangan.

Pinjaman Subordinasi II

Pada tanggal 23 Juli 2018, Bank telah melakukan penandatanganan kerjasama pinjaman subordinasi dengan J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura (“JTA”) sebesar USD 10.000.000 dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan pinjaman subordinasi I, termasuk suku bunga dan periode jatuh tempo.

24. SUBORDINATED LOAN (continued)

Subordinated Loan I (continued)

This subordinated loan has a feature whereby the Bank has a choice by first obtaining approval from the final shareholder to convert a portion of the outstanding principal amount and/or interest of the issued and paid-up shares or reduce the loan determined if the Bank has the potential to disrupt continuity of its business.

At any interest payment date, JTA may request the loan to be settled and redeemed, in whole or in part, by issuance of fully paid up shares by the Bank (conversion). Such conversion may only be made by the Bank after receiving the prior consent from the regulator and in accordance with the applicable laws. If at the maturity date, the Bank needs to strengthen its capital structure, by prior consent of JTA and approval from regulator, the Bank could settle the outstanding loan by issuance of fully paid up shares of the Bank to JTA.

Based on OJK’s Letter No. S-105/PB.31/2015 dated October 20, 2015, OJK agreed to take into account the subordinated loan as component of the Bank’s supplementary capital in the calculation of Capital Adequacy Ratio (CAR).

Based on OJK’s Letter No. SR-64/PB.31/2018 dated May 24, 2018, OJK agreed the implementation of the conversion of subordinated loans from formerly non-perpetual to perpetual so that its record may be reclassified from component of the Bank’s Supplementary Capital to Additional Core Capital.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of subordinated loan I amounted to nil because it has been reclassified and presented as other component of equity amounting to Rp 353,375 by using exchange rate as of May 24, 2018 as a basis for recognition in the financial statements.

Subordinated Loan II

On July 23, 2018, the Bank entered into a subordinated loan agreement with J Trust Asia Pte., Ltd., Singapore (“JTA”) amounting to USD 10,000,000 with similar terms and conditions of subordinated loan I, including interest rate and maturity period.

24. PINJAMAN SUBORDINASI (lanjutan)

Pinjaman Subordinasi II (lanjutan)

Berdasarkan Surat OJK No. S-86/PB.31/2018 tanggal 30 Juli 2018, OJK menyetujui untuk memperhitungkan pinjaman subordinasi ini sebagai komponen modal pelengkap Bank dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Berdasarkan Surat OJK No. S-146/PB.31/2019 tanggal 18 September 2019, OJK menyetujui untuk pelaksanaan konversi pinjaman subordinasi dari sebelumnya bersifat non perpetual menjadi perpetual sehingga pencatatannya dapat direklasifikasi dari komponen Modal Pelengkap menjadi komponen Modal Inti Tambahan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman subordinasi II adalah nihil karena sudah direklasifikasi dan disajikan sebesar Rp 142.125 sebagai komponen ekuitas lain dengan memakai kurs tanggal 23 Agustus 2019 sebagai dasar pengakuan di laporan keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo pinjaman subordinasi adalah sebesar USD 10.000.000 (ekuivalen Rp 143.800).

Pinjaman Subordinasi III

Pada tanggal 11 Januari 2019, Bank menandatangani perjanjian pinjaman subordinasi dengan J Trust Co., Ltd., Jepang. Dalam perjanjian tersebut, J Trust Co., Ltd., Jepang menyetujui untuk memberikan pinjaman subordinasi tanpa jaminan sebesar Rp 400.000, serta dikenakan suku bunga sebesar LIBOR 3 (tiga) bulan dalam Rupiah dikurangi JIBOR 3 (tiga) bulan dalam Yen ditambah 2,667% per tahun dan dibayar setiap 3 (tiga) bulan. Jatuh tempo pinjaman ini adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal 11 Januari 2019 atau dapat dilunasi sesuai dengan kesepakatan para pihak, tetapi harus mendapat persetujuan dari regulator.

Berdasarkan Surat OJK No. S-13/PB.31/2019 tanggal 31 Januari 2019, OJK menyetujui untuk memperhitungkan pinjaman subordinasi ini sebagai komponen modal pelengkap Bank dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Pada tanggal 10 Oktober 2019 terdapat addendum perjanjian pinjaman subordinasi antara Bank dengan J Trust Co., Ltd., Jepang. dengan mengubah beberapa pasal dalam perjanjian diantaranya pasal 1.1, 2.2, 5, 6, 10.1 dan pasal 10.5. Namun ada juga penambahan dalam pasal 2.3 yang mengatur mengenai perintah regulator dalam pengembalian pinjaman ini menjadi komponen Modal Tier 2 atau meningkatkan peringkat pinjaman.

24. SUBORDINATED LOAN (continued)

Subordinated Loan II (continued)

Based on OJK's Letter No. S-86/PB.31/2018 dated July 30, 2018, OJK agreed to take into account the subordinated loan as component of the Bank's supplementary capital in the calculation of Capital Adequacy Ratio (CAR).

Based on OJK's Letter No. S-146/PB.31/2019 dated September 18, 2019, OJK agreed the implementation of the conversion of subordinated loans from formerly non-perpetual to perpetual so that its record may be reclassified from component of the Bank's Supplementary Capital to Additional Core Capital.

As of December 31, 2019, the balance of subordinated loan II amounted to nil because it has been reclassified and presented as other component of equity amounting to Rp 142,125 by using exchange rate as of August 23, 2019 as a basis for recognition in the financial statements. As of December 31, 2018, the balance of subordinated loan amounted to USD 10,000,000 (equivalent to Rp 143,800).

Subordinated Loan III

On January 11, 2019, the Bank entered into a subordinated loan agreement with J Trust Co., Ltd., Japan. In this agreement, J Trust Co., Ltd., Japan agreed to provide unsecured subordinated loan amounting to Rp 400,000, which bears an interest rate of 3 (three) months LIBOR in Rupiah less 3 (three) months JIBOR in Yen plus 2.667% per annum and it shall be paid quarterly. The maturity date of this loan is 5 (five) years since January 11, 2019 or other later date as agreed by parties and must also subject to prior consent from the regulator.

Based on OJK's Letter No. S-13/PB.31/2019 dated January 31, 2019, OJK agreed to take into account the subordinated loan as component of the Bank's supplementary capital in the calculation of Capital Adequacy Ratio (CAR).

On October 10, 2019, an addendum to the subordinated loan agreement was made between the Bank and J Trust Co., Ltd., Japan. which changes several articles in the agreement including articles 1.1, 2.2, 5, 6, 10.1 and article 10.5. However, there are also additions to Article 2.3 that regulates regulator's orders to repay loans to Tier 2 Capital components or improve loan ratings.

24. PINJAMAN SUBORDINASI (lanjutan)

Pinjaman Subordinasi III (lanjutan)

Berdasarkan addendum perjanjian pinjaman subordinasi diatas, pinjaman ini diberikan kepada Bank tanpa jaminan, tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan waktu pelunasan, yang hak dan prioritas pembayarannya dalam hal terjadi Bank mengalami pembubaran atau likuidasi akan tersubordinasi dengan klaim deposan, dan semua kreditur Bank lainnya berperingkat paripassu dengan, atau lebih rendah, dari pinjaman. Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman subordinasi III adalah sebesar Rp 400.000.

OJK telah menyetujui untuk pelaksanaan konversi pinjaman subordinasi ini dari sebelumnya bersifat *non-perpetual* menjadi *perpetual*. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 56.

24. SUBORDINATED LOAN (continued)

Subordinated Loan III (continued)

Based on the addendum of the subordinated loan agreement above, this loan is given to the Bank without collateral, does not have a due date and time of repayment, the right and priority of payment in the event the Bank experiences liquidation or dissolution will be subordinated to the depositor's claim, and all other Bank's creditors are ranked paripassu with, or lower, from loans. As of December 31, 2019, the subordinated loan III amounted to Rp 400,000.

OJK agreed the implementation of the conversion of subordinated loans from formerly non-perpetual to perpetual. Further details are disclosed in Note 56.

25. OBLIGASI KONVERSI

Dalam rangka pemenuhan permodalan, Bank menerbitkan 150 sertifikat *Mandatory Convertible Bonds* (MCB) dengan nilai nominal USD 100.000 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2006 dan jatuh tempo tanggal 16 Juni 2009. Sesuai dengan *Terms and Conditions Mandatory Convertible Bond* jatuh tempo pada tanggal 16 Juni 2009, tingkat suku bunga sebesar 7% per tahun. Ketentuan MCB mengatur bahwa MCB harus dikonversikan seluruhnya dengan saham Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Nomura International Plc menyetor dana sebesar USD 14.850.000 (setelah diskon bunga) dan Bank membukukan ke dalam rekening dana setoran modal *Escrow* dana yang akan dikonversi menjadi modal dalam bentuk saham pada saat jatuh tempo pada tanggal 16 Juni 2009.

MCB diperhitungkan sebagai *Tier* I dalam perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Dalam penerbitan saham MCB tergantung pada manajemen Bank dan persetujuan otoritas terkait.

Saldo obligasi konversi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar nihil dan Rp 215.700 (Catatan 41).

25. CONVERTIBLE BONDS

To comply with the capital requirement, the Bank issued 150 certificates of Mandatory Convertible Bonds (MCB) with par value of USD 100,000 that was issued on June 16, 2006 and matured on June 16, 2009. According to the Terms and Conditions of the Mandatory Convertible Bond due on June 16, 2009, the bonds bear a fixed interest rate of 7% per annum. The terms of the MCB provide that the MCB should be converted entirely to Bank's shares listed on Indonesia Stock Exchange.

Nomura International Plc deposited some funds amounting to USD 14,850,000 (after interest discount) and the Bank recorded it in the Escrow account of fund capital contribution, which should be converted into shares at the maturity date on June 16, 2009.

This MCB was considered as Tier I in the calculation of Capital Adequacy Ratio. The issuance of the shares under the MCB depends on the Bank's management and the approval of the related authorities.

The balance of convertible bonds as of December 31, 2019 and 2018, amounted to nil and Rp 215,700, respectively (Note 41).

25. OBLIGASI KONVERSI (lanjutan)

Dalam gugatan yang dimulai oleh Weston di Pengadilan Tinggi Singapura pada 16 Oktober 2015 ("Proses Hukum Singapura") (Catatan 50b), Weston mengklaim pemulihan/penyelesaian jumlah pokok MCB sebesar USD 15.000.000, serta pembayaran pokok berdasarkan dugaan MCB lain dengan tanggal jatuh tempo 14 April 2011 sebesar USD 40.000.000 (secara kolektif "MCB Klaim"). Bank membantah Klaim MCB termasuk atas dasar bahwa klaim telah berakhir berdasarkan hukum yang mengatur MCB (hukum Inggris, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan MCB) dan karena ketentuan MCB tidak memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk pembayaran pokok pada saat jatuh tempo tetapi hanya untuk konversi ke saham Bank. Selain itu, Bank tidak mengakui MCB sebesar USD 40.000.000 karena tidak ada catatan MCB ini yang dikeluarkan oleh Bank, tidak melalui proses persetujuan oleh pemegang saham melalui RUPS, dan Bank tidak menerima aliran dana apa pun dari penerbitan MCB. Berdasarkan laporan tahunan pada 2008 dan 2009, tidak ada catatan MCB senilai USD 40.000.000 dalam laporan keuangan Bank.

Pada tanggal 26 Januari 2018, Pengadilan Tinggi Singapura mengabulkan permohonan Bank untuk mencabut klaim tertentu terhadap Bank dalam Proses Hukum Singapura, termasuk Klaim MCB. Pengadilan Tinggi Singapura menyatakan bahwa Klaim MCB telah kadaluarsa berdasarkan hukum yang berlaku (hukum Inggris). Keputusan ini ditegakkan dengan naik banding atas perintah Pengadilan Tinggi Singapura tanggal 21 Mei 2018 (Catatan 50b). Klaim MCB telah dihapus dari Proses Hukum Singapura.

Pada tahun 2019, Bank menghentikan pengakuan obligasi konversi tersebut dari liabilitas Bank pada laporan posisi keuangan karena manajemen berpendapat bahwa obligasi konversi telah jatuh tempo dan kadaluarsa, serta proses perdamaian yang telah dilakukan Bank dengan pihak yang melakukan gugatan seperti yang telah disebutkan diatas melalui mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Catatan 50d).

Manajemen berkeyakinan bahwa jika dikemudian hari terdapat hal-hal diluar dari penyelesaian ini yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Bank dan kinerja keuangan Bank dan jika terdapat klaim-klaim dari pihak lain selain yang disebutkan tersebut akan menjadi tanggung jawab dari pemegang saham pengendali terakhir Bank.

25. CONVERTIBLE BONDS (continued)

In the lawsuit commenced by Weston in the High Court of Singapore on October 16, 2015 (the "Singapore Proceedings") (Note 50b), Weston claimed the recovery/settlement of the principal amount of the MCB amounting to USD 15,000,000, as well as principal repayment under another alleged MCB with a maturity date of April 14, 2011 amounting to USD 40,000,000 (collectively, the "MCB Claims"). The Bank denied the MCB Claims including on the basis that the claims had expired under the law governing the MCB (English law, as stated in the terms of the MCB), and because the terms of the MCB did not entitle the bondholder to principal repayment upon maturity but only to conversion to the Bank's shares. Also, the Bank does not recognize the MCB for USD 40,000,000 because there is no record of this MCB being issued by the Bank, it did not go through a process of approval with shareholders through the General Meeting of Shareholders, and Bank did not receive any flow of funds from the issuance of the MCB. Based on annual reports in 2008 and 2009, there was no record of MCB worth USD 40,000,000 in the Bank's financial statements.

On January 26, 2018, the High Court of Singapore granted the Bank's application to revoke certain claims against the Bank in the Singapore Proceedings, including the MCB Claims. The High Court of Singapore held that the MCB Claims had expired under the applicable law (English law). This decision was upheld on appeal by order of the High Court of Singapore dated May 21, 2018 (Note 50b). The MCB Claims have accordingly been removed from the Singapore Proceedings.

In 2019, Bank has derecognized its convertible bonds from Bank's liabilities in the statement of financial position as management believes that the convertible bonds had been due and expired, as well as the settlement agreement has been made between the Bank and the plaintiff as mentioned above through mediation conducted by Central Jakarta District Court (Note 50d).

Management believes that if there are any matters outside this settlement, it will affect the Bank's operational activities and the Bank's financial performance, and if there is a claim from another party except of those mentioned above, it will be the responsibility of the Bank's ultimate controlling shareholder.

25. OBLIGASI KONVERSI (lanjutan)

Oleh karena telah terdapat perdamaian antara para pihak melalui akta perdamaian beserta putusan yang mengikat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Bank tidak memiliki lagi kewajiban apapun juga terkait dengan obligasi konversi sehingga Bank menghentikan pengakuan obligasi konversi, dan mengakui pendapatan atas obligasi konversi tersebut sebesar Rp 212.100 (USD 15.000.000) setelah dikurangi dengan uang kompensasi sebesar Rp 12,5 dalam pendapatan non operasional tahun berjalan (Catatan 35).

25. CONVERTIBLE BONDS (continued)

Since there has been settlement between the parties through a settlemet agreement along with a binding decision from the Central Jakarta District Court, the Bank no longer have any obligations related to the current year convertible bonds amounting to Rp 212,100 (USD 15,000,000) after deducting the compensation money of Rp 12.5 in non operating income for the current year (Note 35).

26. MODAL SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Bank berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek, PT Sharestar Indonesia, adalah sebagai berikut:

26. SHARE CAPITAL

As of December 31, 2019 and 2018, the Bank's shareholders and its ownership based on the report from the Shares Registration Bureau, PT Sharestar Indonesia, are as follows:

2019

Pemegang saham/ *Shareholders*	Jumlah saham (nilai penuh)/ *Number of shares (full amount)*)*			Persentase kepemilikan/ *Percentage ownership*	Nilai nominal/ *Amount*)*		Total dalam jutaan/ *In millions*
	Seri A/ *Series A*	Seri B/ *Series B*	Total		Seri A/ *Series A*	Seri B/ *Series B*	
J Trust Co., Ltd., Jepang	8.679.019.445	26.038	8.679.045.483	86,685%	1.000	7.800.000	8.887.224
J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	467.700.928	-	467.700.928	4,671%	1.000	-	467.701
PT JTrust Investments Indonesia	100.121.245	-	100.121.245	1,000%	1.000	-	100.121
Lain-lain/*Others*	764.999.382	257.463	765.256.845	7,644%	1.000	7.800.000	2.768.103
Total	**10.011.841.000**	**283.501**	**10.012.124.501**	**100,000%**			**12.223.149**

*) Angka setelah Laporan Perubahan Kepemilikan Saham 5% atau lebih dari PT Sharestar Indonesia.

*) *Figures are after Report of Changes in Share Ownership of 5% or more from PT Sharestar Indonesia.*

2018

Pemegang saham/ *Shareholders*	Jumlah saham (nilai penuh)/ *Number of shares (full amount)**)*			Persentase kepemilikan/ *Percentage ownership*	Nilai nominal/ *Amount**)*		Total dalam jutaan/ *In millions*
	Seri A/ *Series A*	Seri B/ *Series B*	Total		Seri A/ *Series A*	Seri B/ *Series B*	
J Trust Co., Ltd., Jepang	9.630.170.618	26.693	9.630.197.311	96,185%	1.000	7.800.000	9.838.376
Group Lease Holdings Pte. Ltd.	281.549.137	-	281.549.137	2,812%	1.000	-	281.549
PT JTrust Investments Indonesia	100.121.245	-	100.121.245	1,000%	1.000	-	100.121
Lain-lain/*Others*	-	256.808	256.808	0,003%	-	7.800.000	2.003.103
Total	**10.011.841.000**	**283.501**	**10.012.124.501**	**100,000%**			**12.223.149**

**) Angka setelah Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dinyatakan dalam Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 64 pada tanggal 26 Juli 2018.

**) *Figures are after the Reverse Stock Split based on the Decision of Annual General Meeting of Shareholders as covered by Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 64 dated July 26, 2018.*

26. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pengalihan saham dari J Trust Co., Ltd. kepada Samurai Capital Management No. 2 Limited Liability Company dan J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura

Pada tanggal 31 Oktober 2019, terdapat perubahan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Bank berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek, PT Sharestar Indonesia, yaitu pengalihan dari J Trust Co., Ltd., Jepang kepada J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura dan transaksi jual beli antara J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura dan Samurai Capital Management No. 2 Limited Liabilities Company, Jepang.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, pengalihan atas saham tersebut belum dilakukan pengesahan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Bank dan belum tercatat pada akta resmi notaris.

26. SHARE CAPITAL (continued)

Transfer of shares from J Trust Co., Ltd. to Samurai Capital Management No. 2 Limited Liability Company and J Trust Asia Pte., Ltd., Singapore

On October 31, 2019, there was a change in the composition of shareholders and ownership of the Bank based on reports from the Securities Administration Bureau, PT Sharestar Indonesia, which is the transfer from J Trust Co., Ltd., Japan to J Trust Asia Pte., Ltd., Singapore and sale and purchase transactions between J Trust Asia Pte., Ltd., Singapore and Samurai Capital Management No. 2 Limited Liabilities Company, Japan.

As of December 31, 2019, the transfer of shares has not been approved by the General Meeting of Shareholders of the Bank and has not been recorded on an official notarial deed.

27. TAMBAHAN MODAL DISETOR / *27. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

	2019 dan/*and* 2018	
Tambahan modal disetor	208.416	*Additional paid-in capital*
Biaya emisi saham	(29.657)	*Share issuance cost*
Pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham	6	*Effect of reverse stock split*
Neto	**178.765**	***Net***

28. CADANGAN UMUM

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, cadangan umum masing-masing sebesar Rp 1.002. Cadangan ini dibentuk sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dinyatakan dalam akta No. 8 tanggal 25 Juni 2008 dari Hestyani Hassan, S.H., notaris di Jakarta.

28. GENERAL RESERVE

As of December 31, 2019 and 2018, the general reserve amounted to Rp 1,002, respectively. The reserve was provided in accordance with the Decision of Annual General Meeting of Shareholders as covered by deed No. 8 dated June 25, 2008 of Hestyani Hassan, S.H., notary in Jakarta.

29. PENDAPATAN BUNGA / *29. INTEREST INCOME*

	2019	2018	
Pinjaman yang diberikan			***Loans***
Kredit modal kerja	352.391	537.177	*Working capital loans*
Kredit konsumer	234.572	198.526	*Consumers loans*
Kredit rekening koran	163.240	234.166	*Current accounts loans*
Kredit investasi	87.291	193.889	*Investments loans*
Kredit pemilikan rumah	22.472	35.520	*Housing loans*
Kredit ekspor impor	1.410	3.306	*Export import loans*
Lain-lain	474	5.630	*Others*
Sub-total	861.850	1.208.214	*Sub-total*
Surat-surat berharga			***Marketable securities***
Obligasi Pemerintah	228.357	158.477	*Government Bonds*
Sertifikat Bank Indonesia	39.281	52.704	*Certificates of Bank Indonesia*
Lain-lain	63	36	*Others*
Sub-total	267.701	211.217	*Sub-total*
Penempatan pada BI dan bank lain			***Placements with BI and other banks***
Interbank call money	1.883	4.927	*Interbank call money*
Giro pada bank lain	765	646	*Current accounts with other banks*
Deposit facility	44	953	*Deposit facility*
Giro pada BI	-	856	*Current accounts with BI*
Sub-total	2.692	7.382	*Sub-total*
Total	**1.132.243**	**1.426.813**	***Total***

Jumlah pendapatan bunga dari pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 1.162 dan Rp 642 (Catatan 40).

Total interest income from related parties for the years ended December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp 1,162 and Rp 642, respectively (Note 40).

30. BEBAN BUNGA / *30. INTEREST EXPENSES*

	2019	2018	
Deposito berjangka	851.460	839.129	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain	96.104	83.051	*Deposits from other banks*
Surat berharga	78.858	53.058	*Marketable securities*
Tabungan	43.334	37.389	*Savings deposits*
Giro	11.513	22.125	*Demand deposits*
Provisi dan komisi	4	38	*Provision and commission*
Lain-lain	714	482	*Others*
Total	**1.081.987**	**1.035.272**	***Total***

Jumlah beban bunga kepada pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 227 dan Rp 13.207 (Catatan 40).

Total interest expenses to related parties for the years ended December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp 227 and Rp 13,207, respectively (Note 40).

31. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) ATAS PENJUALAN SURAT-SURAT BERHARGA YANG TERSEDIA UNTUK DIJUAL DAN DIPERDAGANGKAN - NETO

31. GAIN (LOSS) ON SALE OF AVAILABLE-FOR-SALE AND TRADING SECURITIES - NET

	2019	2018	
Surat utang negara	6.251	(14.418)	*Government promissory notes*
Obligasi korporasi	2.608	4.007	*Corporate bonds*
Sertifikat Bank Indonesia	(2.216)	(5.622)	*Certificates of Bank Indonesia*
Neto (Catatan 8)	**6.643**	**(16.033)**	***Net (Note 8)***

32. GAJI DAN TUNJANGAN

32. SALARIES AND ALLOWANCES

	2019	2018	
Gaji, upah, pensiun dan tunjangan pajak	181.672	200.095	*Salaries, wages, pension and tax allowance*
Kesejahteraan karyawan	29.514	36.556	*Employees benefits*
THR, cuti dan tunjangan terkait lainnya	14.728	17.586	*THR, annual leaves and other related benefits*
Beban imbalan pasca kerja (Catatan 38)	15.678	15.615	*Post-employment benefits expense (Note 38)*
Lain-lain	18.562	19.640	*Others*
Total	**260.154**	**289.492**	***Total***

33. PEMULIHAN (PENYISIHAN) CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI - NETO

33. REVERSAL OF (PROVISION FOR) IMPAIRMENT LOSSES - NET

	2019	2018	
Pinjaman yang diberikan (Catatan 10)	14.052	(74.500)	*Loans (Note 10)*
Tagihan akseptasi (Catatan 11)	535.711	-	*Acceptance receivables (Note 11)*
Agunan yang diambil alih (Catatan 16)	(62.631)	(80.006)	*Foreclosed assets (Note 16)*
Aset lain-lain (Catatan 17)	(38.079)	-	*Other assets (Note 17)*
Neto	**449.053**	**(154.506)**	***Net***

34. UMUM DAN ADMINISTRASI / *34. GENERAL AND ADMINISTRATIVE*

	2019	2018	
Sewa	54.126	52.569	*Rent*
Umum	44.345	36.537	*General*
Jasa profesional	41.383	37.048	*Professional fees*
Premi asuransi	40.547	31.282	*Insurance premium*
Penyusutan dan amortisasi (Catatan 14 dan 15)	27.745	22.922	*Depreciation and amortization (Notes 14 and 15)*
Perbaikan dan pemeliharaan	26.473	17.442	*Repairs and maintenance*
Transportasi dan perjalanan dinas	10.507	14.214	*Transportation and business traveling*
Komunikasi	10.450	11.465	*Communication*
Iuran keanggotaan	10.002	10.440	*Membership*
Iklan dan promosi	9.081	53.527	*Advertising and promotion*
Kebersihan dan keamanan	8.441	9.673	*Cleaning and security*
Listrik, gas dan air	5.196	6.115	*Electricity, gas and water*
Cetakan dan alat tulis	2.905	4.255	*Printing and stationery*
Pendidikan dan pengembangan	2.415	8.206	*Education and development*
Pajak dan izin	1.778	2.202	*Taxes and licenses*
Administrasi	1.345	1.183	*Administration*
Jamuan	609	949	*Entertainment*
Lain-lain	2.221	6.064	*Others*
Total	**299.569**	**326.093**	***Total***

35. PENDAPATAN NON-OPERASIONAL / *35. NON-OPERATING INCOME*

	2019	2018	
Obligasi Konversi (Catatan 25)	212.100	-	*Convertible Bonds (Note 25)*
Komisi asuransi	442	1.141	*Insurance commision*
Lain-lain	3.600	17.047	*Others*
Total	**216.142**	**18.188**	***Total***

36. BEBAN NON-OPERASIONAL / *36. NON-OPERATING EXPENSES*

	2019	2018	
Perkara	94.927	51.195	*Legal*
Rugi penjualan agunan yang diambil alih (Catatan 16)	10.134	-	*Loss on sale of foreclosed assets (Note 16)*
Denda dan sanksi	5.049	6.120	*Fine and penalties*
Rugi penjualan dan penghapusan aset tetap - neto (Catatan 14)	18	14.211	*Loss on sale and disposal of fixed assets - net (Note 14)*
Sumbangan	2	12	*Donation*
Lain-lain	68.271	45.056	*Others*
Total	**178.401**	**116.594**	***Total***

37. PERPAJAKAN / *37. TAXATION*

a. Utang Pajak / *a. Taxes Payable*

	2019	2018	
Pajak penghasilan:			*Income taxes:*
Pasal 4(2)	16.637	15.456	*Article 4(2)*
Pasal 21	611	2.799	*Article 21*
Pasal 23	182	1.282	*Article 23*
Pasal 26	427	1.491	*Article 26*
Modul penerimaan negara, pajak pertambahan nilai, bea materai dan lainnya	1.036	24	*Government revenue module, value-added tax, stamp duty and others*
Total	**18.893**	**21.052**	***Total***

b. Pajak Penghasilan / *b. Income Tax*

	2019	2018	
Manfaat pajak penghasilan tangguhan	**196**	**2.480**	*Deferred income tax benefit*

Pajak kini / ***Current tax***

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan, yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dengan taksiran laba (rugi) fiskal Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit (loss) before income tax, as stated in the statement of profit or loss and other comprehensive income, with the estimated fiscal gain (loss) of the Bank for years ended December 31, 2019 and 2018 is as follows:

	2019	2018	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	49.299	(403.581)	*Profit (loss) before income tax*
Perbedaan temporer			***Temporary differences***
Pemulihan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan lainnya - neto	86.658	154.506	*Reversal for impairment losses on loans and other - net*
Imbalan kerja	822	9.911	*Employee benefits*
Penyisihan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain	(41)	10	*Provision for impairment losses on current accounts with other banks*
Penyusutan aset tetap	(3.916)	(710)	*Depreciation of fixed assets*
Sub-total	83.523	163.717	*Sub-total*
Perbedaan tetap			***Permanent differences***
Kesejahteraan pegawai natura	16.573	14.478	*Employee welfare*
Denda	4.980	5.186	*Penalties*
Iklan dan promosi	1.272	13.678	*Entertainment and promotion*
Representasi	375	711	*Representation*
Sumbangan	2	12	*Donation*
Lain-lain	1.646	3.091	*Others*
Sub-total	24.848	37.156	*Sub-total*
Taksiran laba (rugi) fiskal tahun berjalan	157.670	(202.708)	*Estimated fiscal gain (loss) for the current year*
Akumulasi rugi fiskal awal tahun	(1.432.304)	(2.190.079)	*Accumulated fiscal losses at beginning of year*
Penyesuaian berdasarkan SKPN	439.525	-	*Adjustment based on SKPN*
Rugi fiskal yang tidak dapat dimanfaatkan	14.059	960.483	*Expired fiscal loss*
Akumulasi rugi fiskal akhir tahun	**(821.050)**	**(1.432.304)**	***Accumulated fiscal losses at end of year***

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara manfaat pajak tangguhan Bank dan manfaat pajak penghasilan yang dihitung dengan menerapkan tarif pajak yang berlaku terhadap laba (rugi) akuntansi sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

37. TAXATION (continued)

b. Income Tax (continued)

Current tax (continued)

The reconciliation between the Bank's deferred income tax benefit and the income tax benefit calculated by applying the prevailing tax rate to the accounting profit (loss) before income tax is as follows:

	2019	2018	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	49.299	(403.581)	*Profit (loss) before income tax per statement of profit or loss and other comprehensive income*
Manfaat (beban) pajak penghasilan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	(12.325)	100.895	*Income tax benefit (expense) based on the prevailing tax rate*
Pajak tangguhan tidak diakui atas:			*Unrecognized deferred tax on:*
Pemulihan kerugian penurunan nilai pinjaman dan lainnya - neto	(21.664)	(38.627)	*Revesal for impairment losses on loans and others - net*
Laba (rugi) fiskal	39.418	(50.677)	*Fiscal gain (loss)*
Penyusutan aset tetap	979	178	*Depreciation of fixed assets*
Pengaruh pajak atas beda tetap pada tarif pajak yang berlaku	(6.212)	(9.289)	*Effect of tax on permanent differences at prevailing tax rate*
Manfaat pajak penghasilan tangguhan - neto	**196**	**2.480**	***Deferred income tax benefit - net***

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Bank menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the Taxation Laws in Indonesia, the Bank submits tax returns on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax (DGT) may assess or amend taxes payable within 5 (five) years since the tax becomes due.

Rugi fiskal dapat dimanfaatkan melalui kompensasi terhadap laba fiskal dalam masa 5 (lima) tahun sejak terjadinya rugi fiskal dengan rincian sebagai berikut:

Fiscal losses can be utilized through compensation against future taxable income within 5 (five) years since the fiscal loss incurred are as follows:

	2019	2018	
Rugi fiskal			*Fiscal losses*
2014 revisi	-	(171.729)	*2014 revised*
2015 revisi	(217.165)	(656.690)	*2015 revised*
2016	(291.526)	(291.526)	*2016*
2017	(109.651)	(109.651)	*2017*
2018	(202.708)	(202.708)	*2018*
Total	**(821.050)**	**(1.432.304)**	***Total***

Nilai revisi pada rugi fiskal berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Revised amount in fiscal losses are based on Notice of Nil Tax Assesment (SKPN).

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Ketetapan pajak

Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 28 November 2013, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk pajak penghasilan pasal 4(2), 23, 26 dan Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2005, 2006, 2007 dan 2008 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 25.933, Rp 30.352, Rp 29.957 dan Rp 24.020.

Pada tanggal yang sama, Bank juga menerima Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2005, 2006, 2007 dan 2008 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 38, Rp 119, Rp 119 dan Rp 205.

Bank mengirimkan Surat Keberatan tertanggal 25 Februari 2014 kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas SKPKB tahun pajak 2005 sampai dengan 2008 tersebut di atas.

Bank telah membayar seluruh SKPKB dan STP untuk tahun pajak 2005 sampai dengan 2008 sebesar Rp 110.743 pada tanggal 23 Desember 2013.

Berdasarkan pengucapan putusan tanggal 1 Desember 2016, Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan pengajuan banding yang diajukan oleh Bank.

Berikut ini adalah putusan dari Pengadilan Pajak yang mengabulkan banding yang diajukan oleh pihak Bank:

37. TAXATION (continued)

b. Income Tax (continued)

Tax assessments

Tax Assessment Letter

On November 28, 2013, the Bank received Tax Assessment Letters regarding underpayment (SKPKB) of income tax article 4(2), 23, 26 and Value-Added Tax for fiscal year 2005, 2006, 2007 and 2008 with a total amounting to Rp 25,933, Rp 30,352, Rp 29,957 and Rp 24,020, respectively.

On the same date, the Bank also received Tax Collection Letter (STP) of Value-Added Tax for fiscal year 2005, 2006, 2007 and 2008 amounting to Rp 38, Rp 119, Rp 119 and Rp 205, respectively.

The Bank sent Tax Objection Letters dated February 25, 2014 to the Directorate General of Tax (DGT) on aforementioned SKPKB for fiscal years 2005 up to 2008.

The Bank has paid all tax assessment letters of SKPKB and STP for fiscal years 2005 up to 2008 amounting to Rp 110,743 on December 23, 2013.

Based on the hearing session on December 1, 2016, the Tax Court decided to grant the Bank's appeal application.

The following is the Tax Court's decision granting an appeal filed by the Bank:

Tahun/ *Year*	No. Putusan/ *Verdict No.*	Diterima Bank/ *Received by Bank*	Tanggal Terima/ *Received Date*
2005	78369/PP/M.IIIA/25/2016	23.996	24 Januari/*January 24,* 2017
2006	78370/PP/M.IIIA/25/2016	12.072	17 Februari/*February 17*, 2017
2007	78371/PP/M.IIIA/25/2016	8.441	17 Februari/*February 17*, 2017
2008	78372/PP/M.IIIA/25/2016	15.916	24 Januari/*January 24,* 2017
	Total	**60.425**	

Pada tanggal 24 Januari 2017, Bank telah menerima pengembalian pajak tahun 2005 dan 2008 masing-masing sebesar Rp 23.996 dan Rp 15.916. Pada tanggal 17 Februari 2017, Bank telah menerima pengembalian pajak untuk tahun pajak 2006 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 12.072 dan Rp 8.441.

On January 24, 2017, the Bank received tax refund for fiscal years 2005 and 2008 amounting to Rp 23,996 and Rp 15,916, respectively. On February 17, 2017, Bank received tax refunds for fiscal years 2006 and 2007 amounting to Rp 12,072 and Rp 8,441, respectively.

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Ketetapan pajak (lanjutan)

Pada tanggal 25 Juli 2019, Bank menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Direktur Jenderal Pajak telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung mengenai Permohonan Banding yang menyangkut Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas nama PT Bank JTrust Indonesia Tbk (d/h PT Bank Mutiara Tbk) untuk putusan Pengadilan Pajak dibawah ini:

37. TAXATION (continued)

b. Income Tax (continued)

Tax assessment (continued)

On July 25, 2019, the Bank received a notification from the tax Court that the Director General of Tax had filed a Request for Judicial Review to the Supreme Court on Tax Court regarding Appeals concerning the Final Article of Income Tax 4 paragraph (2) Period on behalf of PT Bank JTrust Indonesia Tbk (previously PT Bank Mutiara Tbk) for the Tax Court's decision below:

Masa Pajak/ ***Periodic Tax***	**No. Putusan/** ***Verdict No.***
Desember 2005	78369/PP/M.IIIA/25.2016
Desember 2006	78370/PP/M.IIIA/25.2016
Desember 2007	78371/PP/M.IIIA/25.2016
Desember 2008	78372/PP/M.IIIA/25.2016

Sampai dengan laporan keuangan ini dibuat, Bank belum menerima keputusan dari Mahkamah Agung.

Until this financial report is made, the Bank has not yet received a decision from the Supreme Court.

Surat Ketetapan Pajak Tahun 2013

Pada tanggal 9 Januari 2017, Bank diperiksa oleh KPP PMB untuk tahun 2013. Pemeriksa menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) tertanggal 27 Agustus 2018 untuk semua jenis pajak karena Bank menerapkan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT (Pasal 8 ayat (4)). Atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT ini, sebelumnya Bank telah membayar pajak sebesar Rp 3.020 pada tanggal 30 Mei 2018.

Tax Assessment Letter Year 2013

On January 9, 2017, the Bank was reviewed by KPP PMB for fiscal year 2013. The reviewer issued Notice of Nil Tax Assesment (SKPN) dated August 27, 2018 for all taxes due to the Bank applying the Disclosure of the Unrighteousness of the Tax Return Fulfillment (Article 8 paragraph (4)). For this purpose, the Bank has paid the tax amounting to Rp 3,020 on May 30, 2018.

Surat Ketetapan Pajak Tahun 2014

Pada tanggal 20 September 2017, Bank diperiksa oleh KPP PMB untuk tahun 2014. Pemeriksa menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) tertanggal 8 November 2018 untuk semua jenis pajak karena Bank menerapkan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT (Pasal 8 ayat (4)). Atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT ini, sebelumnya Bank telah membayar pajak sebesar Rp 3.049 pada tanggal 3 Oktober 2018.

Tax Assessment Letter Year 2014

On September 20, 2017, the Bank was reviewed by KPP PMB for fiscal year 2014. The reviewer issued Notice of Nil Tax Assesment (SKPN) dated November 8, 2018 for all taxes due to the Bank applying the Disclosure of the Unrighteousness of the Tax Return Fulfillment (Article 8 paragraph (4)). For this purpose, the Bank has paid the tax amounting to Rp 3,049 on October 3, 2018.

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Surat Ketetapan Pajak Tahun 2015

Pada tanggal 30 Oktober 2018, Bank diperiksa oleh KPP PMB untuk tahun 2015. Pemeriksa menerbitkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) tertanggal 17 Desember 2019 untuk semua jenis pajak sebesar Rp 27.861. Bank tidak menyetujui sebagian besar hasil keputusan di dalam SKPKB dan STP tersebut.

Dalam SKPN, rugi fiskal direvisi menjadi Rp 217.615 dan Bank telah menyesuaikan hasil pemeriksaan itu pada tahun berjalan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas.

37. TAXATION (continued)

b. Income Tax (continued)

Tax Assessment Letter Year 2015

On October 30, 2018, the Bank was reviewed by KPP PMB for fiscal year 2015. The reviewer issued Notice of Tax Underpayment Assesment (SKPKB), Notice of Tax Collection (STP) and Notice of Nil Tax Assesment (SKPN) dated December 17, 2019 for all taxes amounting to Rp 27,861. The Bank also disputes most of the items contained in the SKPKB and STP.

In the SKPN, the fiscal loss has been revised to Rp 217,165 and the Bank has adjusted in accordance to the result of tax assessment in the current year.

Deferred Tax

Deferred income tax is calculated based on the temporary differences between the tax base of assets and liabilities and their carrying values for financial reporting purposes.

	1 Januari/ *January 1,* 2019	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to profit or loss*	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income*	31 Desember/ *December 31,* 2019	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan:					***Deferred tax assets (liability):***
Rugi fiskal	70.632	-	-	70.632	*Fiscal loss*
Liabilitas imbalan kerja	13.818	206	(7.836)	6.188	*Employee benefits liability*
Kerugian (keuntungan) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual (Catatan 8f)	40.677	-	(43.474)	(2.797)	*Unrealized losses (gain) on changes in fair value of available for-sale securities (Note 8f)*
Penyisihan kerugian giro pada bank lain	196	(10)	-	186	*Allowance for impairment losses on current accounts with other banks*
Neto	**125.323**	**196**	**(51.310)**	**74.209**	***Net***

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

37. TAXATION (continued)

b. Pajak Penghasilan (lanjutan)

b. Income Tax (continued)

	1 Januari/ *January 1,* 2018	Dikreditkan ke laba rugi/ *Credited to profit or loss*	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited to other comprehensive income*	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Aset pajak tangguhan:					***Deferred tax assets:***
Rugi fiskal	70.632	-	-	70.632	*Fiscal loss*
Liabilitas imbalan kerja	7.919	2.478	3.421	13.818	*Employee benefits liability*
Kerugian (keuntungan) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual (Catatan 8f)	(5.800)	-	46.477	40.677	*Unrealized losses (gain) on changes in fair value of available for-sale securities (Note 8f)*
Penyisihan kerugian giro pada bank lain	194	2	-	196	*Allowance for impairment losses on current accounts with other banks*
Total	**72.945**	**2.480**	**49.898**	**125.323**	***Total***

Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan di masa mendatang.

Deferred Tax

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable income will be available against which the temporary differences can be utilized. Management believes that the deferred tax assets can be utilized in the future.

38. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Bank menghitung dan membukukan liabilitas imbalan pasca kerja berdasarkan Undang-Undang ("UU") Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003, peraturan Bank dan Amandemen PSAK 24 (2018), "Imbalan Kerja". Liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dihitung oleh Aktuaris Independen, PT Quattro Asia Consulting, dalam laporannya tertanggal 8 Januari 2020 dan 9 Januari 2019. Bank menyelenggarakan dana pensiun untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Sinarmas MSIG. Iuran pensiun ditanggung oleh Bank. Pendanaan tersebut diperhitungkan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja.

Imbalan kerja adalah sebagai berikut:

38. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

The Bank has calculated and recorded the employee benefits liability based on the Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003, the Bank's policy and Amendments to PSAK 24 (2018), "Employee Benefits". The employee benefits liability as of December 31, 2019 and 2018 was calculated by an Independent Actuary, PT Quattro Asia Consulting, on its report dated January 8, 2020 and January 9, 2019. The Bank has pension fund covering substantially all of its qualified permanent employees which is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan Sinarmas MSIG. Retirement contributions are funded by the Bank. Such funding is included in the employee benefits liability calculation.

The employee benefits are as follows:

	2019	2018	
Kewajiban posisi keuangan untuk:			*Financial position obligations for:*
Imbalan pensiun	15.228	46.506	*Pension benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	9.524	8.765	*Other long-term service benefits*
Total	**24.752**	**55.271**	***Total***

38. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *38. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)*

a. Beban Imbalan Kerja / *a. Employee Benefits Expense*

	2019	2018	
Imbalan pensiun			*Pension benefits*
Biaya jasa kini	11.748	13.845	*Current service cost*
Biaya bunga	5.966	4.444	*Interest cost*
Imbal hasil atas aset program	(2.036)	(2.674)	*Return on plan assets*
Sub-total	15.678	15.615	*Sub-total*
Manfaat jangka panjang lainnya	9.524	8.765	*Other long-term benefits*
Total	**25.202**	**24.380**	***Total***

Biaya imbalan pasca kerja diakui sebagai akun gaji dan tunjangan (Catatan 32).

Post-employment benefit expense is recognized in salaries and allowances account (Note 32).

b. Liabilitas Imbalan Kerja / *b. Employee Benefits Liability*

	2019	2018	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	88.472	79.366	*Present value of defined benefits obligation*
Nilai wajar aset	(63.720)	(24.095)	*Fair value of plan assets*
Neto	**24.752**	**55.271**	***Net***

Perubahan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The changes in the present value of defined benefits obligation in the current year is as follows:

	2019	2018	
Imbalan pensiun			*Pension benefits*
Saldo awal tahun	70.601	61.804	*Balance at beginning of year*
Pembayaran manfaat	(5.682)	(14.582)	*Benefits paid*
Biaya jasa kini	11.748	13.845	*Current service cost*
Biaya bunga	5.966	4.444	*Interest cost*
Pengukuran kembali:			*Remeasurements:*
Dampak penyesuaian pengalaman	(7.331)	11.681	*Effect of experience adjustments*
Dampak perubahan asumsi keuangan dan demografik	3.646	(6.591)	*Effect of changes in financial and demographic assumptions*
Saldo akhir tahun	78.948	70.601	*Balance at end of year*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	9.524	8.765	*Other long-term service benefits*
Total	**88.472**	**79.366**	***Total***

38. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

38. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY (continued)

Perubahan nilai wajar aset program imbalan pasti pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The changes in the fair value of defined benefit plan assets in the current year is as follows:

	2019	2018	
Saldo awal tahun	24.095	37.188	*Balance at beginning of year*
Pendapatan bunga	2.036	2.674	*Interest income*
Pembayaran manfaat	(5.682)	(14.582)	*Benefits paid*
Pengukuran kembali imbal hasil atas aset program	27.657	(8.594)	*Remeasurement of return on plan assets*
Kontribusi pemberi kerja	15.614	7.409	*Contribution from the company*
Saldo akhir tahun	**63.720**	**24.095**	***Balance at end of year***

Perubahan liabilitas imbalan pasca kerja pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The changes in post-employment benefits liability in the current year is as follows:

	2019	2018	
Imbalan pensiun			*Pension benefits*
Saldo awal tahun	46.506	24.616	*Balance at beginning of year*
Pengukuran kembali	(31.342)	13.684	*Remeasurements*
Beban imbalan pasca kerja tahun berjalan	15.678	15.615	*Employee benefits expense in the current year*
Kontribusi pemberi kerja	(15.614)	(7.409)	*Contribution from the company*
Saldo akhir tahun	15.228	46.506	*Balance at end of year*
Manfaat jangka panjang lainnya	9.524	8.765	*Other long-term benefits*
Total	**24.752**	**55.271**	***Total***

Perubahan pengukuran kembali pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The changes in remeasurements in the current year is as follows:

	2019	2018	
Saldo awal tahun	46.136	32.452	*Balance at beginning of year*
Pengukuran kembali tahun berjalan	(31.342)	13.684	*Remeasurements in the current year*
Saldo akhir tahun	**14.794**	**46.136**	***Balance at end of year***

38. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam menghitung liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

38. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY (continued)

The principal assumptions used to determine post-employment benefits liability as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	2019	2018	
Metode perhitungan	Metode Proyeksi Unit Kredit/ *Projected Unit Credit Method*	Metode Proyeksi Unit Kredit/ *Projected Unit Credit Method*	*Actuarial method*
Usia pensiun normal	56 tahun/*years*	56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat mortalitas	TMI III 2011	TMI III 2011	*Mortality rate*
Tingkat kenaikan gaji	3,35% per tahun/*per annum*	3,35% per tahun/*per annum*	*Salary increase rate*
Tingkat diskonto	7,70% per tahun/*per annum*	8,45% per tahun/*per annum*	*Discount rate*
Durasi rata-rata	16,83	17,59	*Average duration*
Tingkat pengunduran diri	20 - 29 = 15%	20 - 29 = 15%	*Resignation rate*
	30 - 39 = 10%	30 - 39 = 10%	
	40 - 44 = 7,5%	40 - 44 = 7,5%	
	45 - 49 = 5%	45 - 49 = 5%	
	50 - 55 = 1%	50 - 55 = 1%	

Perkiraan analisis jatuh tempo atas imbalan pensiun tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits as of December 31, 2019 and 2018 is as follows:

	2019	2018	
Kurang dari 1 tahun	3.372	2.058	*Less than 1 year*
1 Sampai dengan 5 tahun	47.787	42.889	*1 up to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	417.382	520.113	*More than 5 years*
Total	**468.541**	**565.060**	***Total***

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi liabilitas atas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah memenuhi persyaratan minimum UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

Management believes that the estimated post-employment benefits liability as of December 31, 2019 and 2018 has fulfilled the minimum requirements of Labor Law No. 13 Year 2003.

38. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan analisis sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas imbalan pasca kerja dan beban jasa kini Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

38. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY (continued)

The following table demonstrates the sensitivity analysis to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, to the post-employment benefits liability and current service cost of the Bank as of December 31, 2019 and 2018:

	100 basis poin/ *100 basis point* Kenaikan/*Increase*	**100 basis poin/ *100 basis point* Penurunan/*Decrease***	
31 Desember 2019			***December 31, 2019***
Tingkat diskonto	8,70%	6,70%	*Discount rate*
Dampak manfaat liabilitas pasca kerja	(4.573)	5.037	*Impact on post-employment benefits liability*
Tingkat kenaikan gaji	4,35%	2,35%	*Salary increase rate*
Dampak manfaat liabilitas pasca kerja	5.045	(4.517)	*Impact on post-employment benefits liability*
31 Desember 2018			***December 31, 2018***
Tingkat diskonto	9,45%	7,45%	*Discount rate*
Dampak manfaat liabilitas pasca kerja	(4.247)	4.682	*Impact on post-employment benefits liability*
Tingkat kenaikan gaji	4,35%	2,35%	*Salary increase rate*
Dampak manfaat liabilitas pasca kerja	4.742	(4.366)	*Impact on post-employment benefits liability*

39. LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun berjalan.

39. BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE

Basic earnings (loss) per share is calculated by dividing profit for the year by the weighted-average number of shares outstanding during the year.

	2019	**2018**	
Laba (rugi) neto untuk perhitungan laba (rugi) per saham dasar	49.495	(401.101)	*Net profit (loss) for the computation of the basic earning (loss) per share*
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa - Seri A dan Seri B	10.012.124.501 *)	10.012.124.501 *)	*Weighted average number of outstanding common shares - Series A and Series B*
Laba (rugi) per saham dasar (nilai penuh)	**4,94357**	**(40,06203)**	***Basic earnings (loss) per share (full amount)***

*) Nilai penuh/*Full amount*

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar telah memperhitungkan efek retroaktif pemecahan saham.

The weighted average number of shares is after considering the retroactive effect of stock split.

40. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi tersebut dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, kecuali untuk pinjaman yang diberikan kepada karyawan kunci.

Sifat Hubungan

Pihak-pihak berelasi adalah perusahaan atau perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Bank sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2ac.

40. RELATED PARTIES INFORMATION

In the normal course of business, the Bank entered into transactions with related parties. Transactions with related parties were conducted under terms and conditions similar to those granted to third parties, with the exception of loans granted to the key employees.

Nature of Relationship

Related parties are companies or individuals who have ownership or management relationship directly or indirectly with the Bank as stated in Note 2ac.

Pihak berelasi/ ***Related parties***	**Sifat dari hubungan/** ***Nature of relationship***	**Sifat dari transaksi/** ***Nature of transaction***
J Trust Co., Ltd., Jepang/*Japan*	Pemegang saham/ *Shareholder*	Tagihan, pinjaman subordinasi dan giro/*Receivable, subordinated loan and demand deposits*
J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura/*Singapore*	Pemegang saham/ *Shareholder*	Pinjaman subordinasi, giro dan deposito/*Subordinated loan, demand deposit and time deposit*
PT JTrust Investments Indonesia	Pemegang saham/ *Shareholder*	Pinjaman yang diberikan, giro dan deposito/*Loans, demand deposits and time deposit*
PT JTrust Olympindo Multi Finance	Entitas sepengendali/*Entity under common control*	Pinjaman yang diberikan dan giro/*Loans and demand deposits*
PT JTrust Consulting Indonesia	Entitas sepengendali/*Entity under common control*	Giro/*Demand deposits*
Komisaris, Direksi, Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan Cabang, serta keluarga sesuai ketentuan yang berlaku/ *Commissioner, Directors, Head of Divisions, Head of Regions, Branch Managers and their families in accordance with the prevailing procedure*	Manajemen dan Karyawan Kunci Bank/*Management and Key Employees of the Bank*	Pinjaman yang diberikan dan simpanan/*Loans and deposits*

40. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

40. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Saldo aset dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The balance of assets with related parties are as follows:

	2019		2018		
	Total	Persentase terhadap total aset/ *Percentage to total assets*	Total	Persentase terhadap total aset/ *Percentage to total assets*	
Aset					***Assets***
Pinjaman yang diberikan (Catatan 10)					*Loans (Note 10)*
PT JTrust Investments Indonesia	130.000	0,75%	-	-	*PT JTrust Investments Indonesia*
PT JTrust Olympindo Multi Finance	36.660	0,21%	132.700	0,74%	*PT JTrust Olympindo Multi Finance*
Karyawan kunci	6.160	0,04%	10.535	0,06%	*Key employees*
Total	172.820	1,00%	143.235	0,80%	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	53	0,00%	47	0,00%	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**172.767**	**1,00%**	**143.188**	**0,80%**	***Net***
Tagihan (Catatan 17)					*Receivables (Note 17)*
J Trust Co., Ltd.	-	-	2.222	0,01%	*J Trust Co., Ltd.*

Saldo liabilitas dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The balance of liabilities with related parties are as follows:

	2019		2018		
	Total	Persentase terhadap total liabilitas/ *Percentage to total liabilities*	Total	Persentase terhadap total liabilitas/ *Percentage to total liabilities*	
Liabilitas					***Liabilities***
Simpanan nasabah (Catatan 19)					*Deposits from customers (Note 19)*
Giro					*Demand deposits*
PT JTrust Investments Indonesia	5.493	0,04%	41.847	0,25%	*PT JTrust Investments Indonesia*
J Trust Co., Ltd.	5.045	0,03%	2.732	0,02%	*J Trust Co., Ltd.*
PT J Trust Consulting Indonesia	2.387	0,02%	-	-	*PT J Trust Consulting Indonesia*
PT JTrust Olympindo Multi Finance	325	0,00%	558	0,00%	*PT JTrust Olympindo Multi Finance*
J Trust Asia Pte., Ltd.	55	0,00%	583	0,00%	*J Trust Asia Pte., Ltd.*
Karyawan kunci	541	0,00%	203	0,00%	*Key employee*
Tabungan					*Savings deposits*
Karyawan kunci	1.844	0,01%	1.819	0,01%	*Key employees*
Deposito berjangka					*Time deposits*
J Trust Asia Pte., Ltd.	37.982	0,24%	-	-	*J Trust Asia Pte., Ltd.*
PT JTrust Investments Indonesia	5.000	0,03%	31.000	0,19%	*PT JTrust Investments Indonesia*
Karyawan kunci	9.697	0,06%	8.301	0,05%	*Key employees*
Total	68.369	0,43%	87.043	0,52%	*Total*
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain (Catatan 23)					*Accrued expenses and other liabilities (Note 23)*
J Trust Asia Pte., Ltd.	-	-	866	0,01%	*J Trust Asia Pte., Ltd.*
Pinjaman subordinasi (Catatan 24)					*Subordinated loan (Note 24)*
J Trust Co., Ltd.	400.000	2,56%	-	-	*J Trust Co., Ltd.*
J Trust Asia Pte., Ltd.	-	-	143.800	0,87%	*J Trust Asia Pte., Ltd.*
Total	400.000	2,56%	143.800	0,87%	*Total*

40. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

40. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Saldo pendapatan dan beban dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The balance of income and expenses with related parties are as follows:

	2019		2018		
	Total	Persentase terhadap total pendapatan atau beban/ *Percentage to total income or expense*	Total	Persentase terhadap total pendapatan atau beban/ *Percentage to total income or expense*	
Pendapatan bunga (Catatan 29)	1.162	0,10%	642	0,04%	*Interest income (Note 29)*
Beban bunga (Catatan 30)	227	0,02%	13.207	1,28%	*Interest expenses (Note 30)*

Seluruh saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

All transaction with related parties have been disclosed in notes of financial statements.

41. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

41. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

	2019	2018	
Aset			***Assets***
Kas (Catatan 4)	22.815	18.355	*Cash (Note 4)*
Giro pada Bank Indonesia (Catatan 5)	98.640	109.365	*Current accounts with Bank Indonesia (Note 5)*
Giro pada bank lain (Catatan 6)	495.622	207.081	*Current accounts with other banks (Note 6)*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (Catatan 7)	27.765	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks (Note 7)*
Surat-surat berharga (Catatan 8)	145.719	747.439	*Marketable securities (Note 8)*
Tagihan derivatif (Catatan 9)	2.645	11.324	*Derivative receivables (Note 9)*
Pinjaman yang diberikan (Catatan 10)	473.796	1.243.813	*Loans (Note 10)*
Tagihan akseptasi (Catatan 11)	23.518	632.585	*Acceptance receivables (Note 11)*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima (Catatan 12)	5.617	13.097	*Accrued interest income (Note 12)*
Aset lain-lain	54.164	56.266	*Other assets*
Sub-total	1.350.301	3.039.325	*Sub-total*
Liabilitas			***Liabilities***
Liabilitas segera (Catatan 18)	2.770	8.031	*Obligations due immediately (Note 18)*
Simpanan nasabah (Catatan 19)	959.569	987.579	*Deposits from customers (Note 19)*
Simpanan dari bank lain (Catatan 20)	139.557	1.021	*Deposits from other banks (Note 20)*
Liabilitas derivatif (Catatan 9)	-	640	*Derivative payables (Note 9)*
Liabilitas akseptasi (Catatan 11)	2.101	-	*Acceptance payables (Note 11)*
Bunga yang masih harus dibayar (Catatan 22)	2.381	2.738	*Accrued interest expenses (Note 22)*
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain (Catatan 23)	1.463	2.389	*Accrued expenses and other liabilities (Note 23)*
Pinjaman subordinasi (Catatan 24)	-	143.800	*Subordinated loan (Note 24)*
Obligasi konversi (Catatan 25)	-	215.700	*Convertible bonds (Note 25)*
Sub-total	1.107.841	1.361.898	*Sub-total*
Neto	**242.460**	**1.677.427**	***Net***

42. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

42. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

a. The Bank has outstanding commitments and contingent receivables and liabilities as follows:

	2019	2018	
Komitmen			***Commitments***
Tagihan komitmen			***Commitment receivables***
Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	41.648	28.855	*Current position of buying spot and derivative*
Lain-lain	294.159	1.195.005	*Others*
Sub-total	335.807	1.223.860	*Sub-total*
Liabilitas komitmen			***Commitment liabilities***
Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	250.305	1.183.997	*Current position of selling spot and derivatives*
Fasilitas pinjaman yang belum digunakan	131.876	327.172	*Unused loan facilities*
Letter of Credit (L/C) yang masih beredar	10.727	6.156	*Outstanding irrevocable Letter of Credit (L/C)*
Sub-total	392.908	1.517.325	*Sub-total*
Liabilitas komitmen - neto	**(57.101)**	**(293.465)**	***Commitment liabilities - net***
Kontinjensi			***Contingencies***
Tagihan kontinjensi			***Contingent receivables***
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	8.334	31.590	*Interest receivable on non-performing assets*
Pinjaman yang diberikan	104.693	121.297	*Loans*
Lainnya	3.639.442	3.765.100	*Others*
Sub-total	3.752.469	3.917.987	*Sub-total*
Liabilitas kontinjensi			***Contingent liabilities***
Bank garansi yang diterbitkan	332.351	474.000	*Bank guarantees issued*
Tagihan kontinjensi - neto	**3.420.118**	**3.443.987**	***Contingent receivables - net***

b. Jangka waktu rata-rata L/C dan bank garansi adalah antara 1 (satu) bulan sampai 12 (dua belas) bulan.

b. The average period of L/C and bank guarantees is within 1 (one) month up to 12 (twelve) months.

c. Penjualan tunai mata uang asing yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

c. Unsettled spot of foreign currency sale transactions at the reporting date are as follows:

	2019	2018	
Penjualan tunai mata uang asing			***Sale of foreign currency***
Forward			***Forward***
Dolar Amerika Serikat	236.003	1.179.160	*United States Dollar*
Spot			***Spot***
Dolar Amerika Serikat	124.943	129.420	*United States Dollar*
Total	**360.946**	**1.308.580**	***Total***

43. POSISI DEVISA NETO

Perhitungan Posisi Devisa Neto Bank berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga posisi devisa neto secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal.

Rasio posisi devisa neto untuk laporan posisi keuangan adalah selisih neto jumlah aset dan jumlah liabilitas dalam setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah. Rasio posisi devisa neto secara keseluruhan adalah penjumlahan nilai absolut dari selisih neto antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih neto dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi, yang dicatat dalam akun administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing, yang dinyatakan dalam Rupiah.

43. NET OPEN POSITION

The Net Open Position calculation for the Bank are based on Bank Indonesia Regulation No. 12/10/PBI/2010 dated July 1, 2010. Based on such regulation, the Bank is required to maintain the overall net open position at a maximum of 20% from total capital.

Net open position ratio of statement of financial position is the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency which is stated in Rupiah. The overall net open position is the sum of the absolute values of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency, which are stated in Rupiah.

	2019			
Mata Uang Asing	**Aset/ *Assets***	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Posisi Devisa Neto (nilai absolut)/ *Net Open Position (absolute amount)***	***Foreign Currency***
Keseluruhan (Laporan posisi keuangan dan rekening administratif)				*Aggregate (Statement of financial position and administrative accounts)*
Dolar Amerika Serikat	2.855.180	2.854.962	218	*United States Dollar*
Dolar Singapura	86.040	86.432	392	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	81.499	80.324	1.175	*Japanese Yen*
Dolar Australia	27.717	29.768	2.051	*Australian Dollar*
Euro Eropa	25.654	20.390	5.264	*European Euro*
Poundsterling Inggris	1.118	559	559	*Great Britain Poundsterling*
Mata uang lainnya	8.439	4.221	4.218	*Other currencies*
Total	**3.085.647**	**3.076.656**	**13.877**	***Total***
Modal			1.882.672	***Capital***
Rasio Posisi Devisa Neto (Laporan posisi keuangan dan rekening administratif)			0,74%	***Net Open Position Ratio (Statement of financial position and administrative accounts)***

43. POSISI DEVISA NETO (lanjutan)

43. NET OPEN POSITION (continued)

	2018			
Mata Uang Asing	**Aset/** ***Assets***	**Liabilitas/** ***Liabilities***	**Posisi Devisa Neto (nilai absolut)/** ***Net Open Position (absolute amount)***	***Foreign Currency***
Keseluruhan (Laporan posisi keuangan dan rekening administratif)				*Aggregate (Statement of financial position and administrative accounts)*
Dolar Amerika Serikat*)	4.033.431	4.053.047	19.616	*United States Dollar*)*
Dolar Singapura	66.587	70.001	3.414	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	40.595	40.967	372	*Japanese Yen*
Dolar Australia	29.838	29.634	204	*Australian Dollar*
Euro Eropa	22.018	22.256	238	*European Euro*
Poundsterling Inggris	818	415	403	*Great Britain Poundsterling*
Mata uang lainnya	6.467	3.250	3.217	*Other currencies*
Total	**4.199.754**	**4.219.570**	**27.464**	***Total***
Modal			1.509.713	***Capital***
Rasio Posisi Devisa Neto (Laporan posisi keuangan dan rekening administratif)			1,82%	***Net Open Position Ratio (Statement of financial position and administrative accounts)***

*) Tidak termasuk obligasi konversi/*Excluding convertible bonds*

44. INFORMASI SEGMEN

Informasi segmen dilaporkan sesuai dengan laporan internal yang disiapkan untuk pengambil keputusan operasional yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya ke segmen tertentu dan melakukan penilaian atas kinerjanya. Seluruh informasi segmen yang digunakan oleh Bank telah memenuhi kriteria pelaporan.

Informasi segmen pada Bank mempertimbangkan aktivitas bisnis dan industri, berdasarkan segmen usaha dan geografis.

Bank mempertimbangkan pendanaan ritel, pinjaman dan ekspor impor, serta *treasury* sebagai informasi segmen atas segmen usaha.

Pendanaan ritel atas segmen usaha merupakan pendanaan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah ritel dalam skala segmen; kecil, sedang dan konsumen.

Pinjaman dan ekspor impor memperoleh pendapatan dari:

Pendapatan dan beban Bank atas pinjaman yang diberikan yang didasarkan atas penggunaannya yaitu kredit modal kerja, investasi dan konsumen. Pendapatan dan beban Bank atas pinjaman yang diberikan paling besar bersumber dari pinjaman yang diberikan untuk modal kerja baik dalam bentuk Kredit Angsuran Berjangka (KAB), Kredit Atas Permintaan (KAP) dan Kredit Rekening Koran (KRK).

44. SEGMENT INFORMATION

Segments information are reported in accordance with the internal reporting provided to the chief operating decision maker, which is responsible for allocating resources to the reportable segments and assessing its performance. All segments information used by the Bank meet the definition of a reportable segment.

Segment information on the Bank considers the business activity and industry, based on business and geographical segments.

The Bank considers the retail funding, loan and export import and treasury as the segment information on business segments.

Retail funding on business segment constitutes funding provided by the Bank to retail customers on a segment scale; small, medium and consumers.

Loan and export import earn its revenues from the following:

Revenues and expenses on Bank loans, which are based on the usage are working capital loan, investment and consumers. Sources of revenue and expenses on bank loans mostly come from the loans for working capital in the form of Installment Loans (KAB), Demand Loans (KAP) and Current Accounts Loans (KRK).

44. INFORMASI SEGMEN OPERASI (lanjutan)

Pendapatan dan beban ekspor impor yang diperoleh berasal dari Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Wesel Ekspor Impor dan *Letter of Credit (L/C)*.

Pendapatan dan beban yang berasal dari *treasury* diperoleh dari surat berharga pendapatan tetap dan transaksi valuta asing.

Bank mempertimbangkan daerah Jakarta, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali dan Kalimantan sebagai segmen geografis.

a. Segmen Usaha

Untuk tujuan pelaporan manajemen, segmen usaha Bank dibagi menjadi pendanaan retail, pinjaman dan ekspor impor dan *treasury*. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen primer Bank.

44. OPERATING SEGMENT INFORMATION (continued)

Export import revenues and expenses are derived from Domestic Letter of Credit (SKBDN), Export Import Notes and Letter of Credit (L/C).

Treasury derives its revenue and expenses from fixed income marketable securities and foreign exchange transactions.

The Bank considers the areas such as Jakarta, Java, Sumatera, Sulawesi, Bali and Kalimantan as geographical segments.

a. Business Segment

The details outlined below are business segment information of the Bank based on business activities consisting of retail funding, loans and export import and treasury. The Bank used this classification as the basis of its primary segment report.

	2019				
	Pendanaan Retail/ *Retail Funding*	**Pinjaman dan Ekspor Impor/ *Loan and Export Import***	***Treasury***	**Total**	
Pendapatan					***Income***
Pendapatan bunga (Catatan 29)	61	861.852	270.330	1.132.243	*Interest income (Note 29)*
Pendapatan operasional lainnya	478.084	(4.278)	52.740	526.546	*Other operating income*
Total	478.145	857.574	323.070	1.658.789	*Total*
Beban					***Expenses***
Beban bunga (Catatan 30)	(895.406)	(5)	(186.576)	(1.081.987)	*Interest expenses (Note 30)*
Beban operasional lainnya	(531.926)	(33.318)	-	(565.244)	*Other operating expenses*
Total	(1.427.332)	(33.323)	(186.576)	(1.647.231)	*Total*
Pendapatan (beban) segmen - neto	(949.187)	824.251	136.494	11.558	*Income (expenses) of segment - net*
Pendapatan non-operasional (Catatan 35)				216.142	*Non-operating income (Note 35)*
Beban non-operasional (Catatan 36)				(178.401)	*Non-operating expenses (Note 36)*
Laba sebelum pajak penghasilan				49.299	*Profit before income tax*
Manfaat pajak penghasilan tangguhan (Catatan 37b)				196	*Deferred income tax benefit (Note 37b)*
Laba bersih tahun berjalan				**49.495**	***Net profit for the year***
Total aset				17.311.597	*Total assets*
Persentase dari total aset				0,29%	*Percentage to total assets*
Total liabilitas				15.637.771	*Total liabilities*
Persentase dari total liabilitas				0,32%	*Percentage to total liabilities*

44. INFORMASI SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *44. OPERATING SEGMENT INFORMATION (continued)*

a. Segmen Usaha (lanjutan) / *a. Business Segment (continued)*

	2019				
	Pendanaan Retail/ *Retail Funding*	Pinjaman dan Ekspor Impor/ *Loan and Export Import*	*Treasury*	Total	
Aset					***Assets***
Aset segmen	4.808.199	6.439.031	5.702.134	16.949.364	*Segment assets*
Aset yang belum dialokasikan				362.233	*Unallocated assets*
Total aset				**17.311.597**	***Total assets***
Liabilitas					***Liabilities***
Liabilitas segmen	13.561.724	2.101	2.049.194	15.613.019	*Segment liabilities*
Liabilitas yang belum dialokasikan				24.752	*Unallocated liabilities*
Total liabilitas				**15.637.771**	***Total liabilities***

	2018				
	Pendanaan Retail/ *Retail Funding*	Pinjaman dan Ekspor Impor/ *Loan and Export Import*	*Treasury*	Total	
Pendapatan					***Income***
Pendapatan bunga (Catatan 29)	36	1.208.214	218.563	1.426.813	*Interest income (Note 29)*
Pendapatan operasional lainnya	(144.719)	7.059	58.874	(78.786)	*Other operating income*
Total	(144.683)	1.215.273	277.437	1.348.027	*Total*
Beban					***Expenses***
Beban bunga (Catatan 30)	(876.815)	(38)	(158.419)	(1.035.272)	*Interest expenses (Note 30)*
Beban operasional lainnya	(563.981)	(37.916)	(16.033)	(617.930)	*Other operating expenses*
Total	(1.440.796)	(37.954)	(174.452)	(1.653.202)	*Total*
Pendapatan (beban) segmen - neto	(1.585.479)	1.177.319	102.985	(305.175)	*Income (expenses) of segment - net*
Pendapatan non-operasional (Catatan 35)				18.188	*Non-operating income (Note 35)*
Beban non-operasional (Catatan 36)				(116.594)	*Non-operating expenses (Note 36)*
Rugi sebelum pajak penghasilan				(403.581)	*Loss before income tax*
Manfaat pajak penghasilan tangguhan (Catatan 37b)				2.480	*Deferred income tax benefit (Note 37b)*
Rugi bersih tahun berjalan				**(401.101)**	***Net loss for the year***
Total aset				17.823.669	*Total assets*
Persentase dari total aset				(2,25%)	*Percentage to total assets*
Total liabilitas				16.508.766	*Total liabilities*
Persentase dari total liabilitas				(2,43%)	*Percentage to total liabilities*

44. INFORMASI SEGMEN OPERASI (lanjutan)

44. OPERATING SEGMENT INFORMATION (continued)

a. Segmen Usaha (lanjutan)

a. Business Segment (continued)

	2018				
	Pendanaan Retail/ *Retail Funding*	Pinjaman dan Ekspor Impor/ *Loan and Export Import*	*Treasury*	Total	
Aset					***Assets***
Aset segmen	1.559.148	10.597.149	5.265.291	17.421.588	*Segment assets*
Aset yang belum dialokasikan				402.081	*Unallocated assets*
Total aset				**17.823.669**	***Total assets***
Liabilitas					***Liabilities***
Liabilitas segmen	14.325.628	17.186	2.110.681	16.453.495	*Segment liabilities*
Liabilitas yang belum dialokasikan				55.271	*Unallocated liabilities*
Total liabilitas				**16.508.766**	***Total liabilities***

b. Segmen Geografis

Informasi segmen geografis adalah sebagai berikut:

b. Geographical Segment

The geographical segment information is as follows:

	2019							
Keterangan	Jakarta	Jawa	Sumatera	Sulawesi	Bali	Kalimantan	Total	*Description*
Pendapatan:								***Income:***
Pendapatan bunga dan operasional lainnya	1.299.784	267.108	80.233	36.664	(26.577)	1.577	1.658.789	*Interest income and other operating income*
Beban:								***Expenses:***
Beban bunga dan operasional lainnya	(1.161.297)	(210.889)	(199.840)	(26.029)	(23.796)	(25.380)	(1.647.231)	*Interest and other operating expenses*
Laba (rugi) operasional	**138.487**	**56.219**	**(119.607)**	**10.635**	**(50.373)**	**(23.803)**	**11.558**	***Profit (loss) from operations***
Laba (rugi) tahun berjalan	**195.156**	**42.431**	**(122.330)**	**10.507**	**(52.473)**	**(23.796)**	**49.495**	***Profit (loss) for the year***
Total aset*	**14.714.101**	**1.477.217**	**771.665**	**187.824**	**67.000**	**19.581**	**17.237.388**	***Total assets****

	2018							
Keterangan	Jakarta	Jawa	Sumatera	Sulawesi	Bali	Kalimantan	Total	*Description*
Pendapatan:								***Income:***
Pendapatan bunga dan operasional lainnya	736.993	446.048	98.834	41.379	23.512	1.261	1.348.027	*Interest income and other operating income*
Beban:								***Expenses:***
Beban bunga dan operasional lainnya	(980.695)	(370.938)	(190.409)	(21.019)	(77.412)	(12.729)	(1.653.202)	*Interest and other operating expenses*
Laba (rugi) operasional	**(243.702)**	**75.110**	**(91.575)**	**20.360**	**(53.900)**	**(11.468)**	**(305.175)**	***Profit (loss) from operations***
Laba (rugi) tahun berjalan	**(306.539)**	**40.876**	**(91.540)**	**21.500**	**(53.909)**	**(11.489)**	**(401.101)**	***Profit (loss) for the year***
Total aset*	**12.740.799**	**3.337.318**	**1.064.759**	**255.792**	**278.909**	**20.769**	**17.698.346**	***Total assets****

* Total aset tidak termasuk aset pajak tangguhan/*Total assets excluding deferred tax assets*.

45. MANAJEMEN RISIKO

I. Kerangka Manajemen Risiko

Penerapan kerangka manajemen risiko pada Bank berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan secara internasional berpedoman pada dokumen dari *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS).

Penerapan manajemen risiko didasari oleh kebutuhan akan keseimbangan fungsi bisnis dengan pengelolaan risiko, dimana manajemen risiko menjadi *strategic partner* dari unit bisnis untuk mengoptimalkan pendapatan dari unit bisnis secara keseluruhan.

Kerangka manajemen risiko Bank mencakup keseluruhan lingkup aktivitas usaha, transaksi dan produk Bank termasuk produk atau aktivitas baru berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan risiko yang berlaku dengan menjaga keseimbangan antara fungsi pengendalian usaha yang efektif serta kebijakan yang jelas dalam pengelolaan risiko.

Kerangka dasar manajemen risiko Bank merupakan bagian integral dari proses manajemen risiko dalam pengelolaan bisnis dan operasional Bank yang meliputi 4 (empat) pilar yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

   a. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank.

   b. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite sebagai berikut:

      - Komite Pemantau Risiko
      - Komite Audit
      - Komite Remunerasi dan Nominasi

45. RISK MANAGEMENT

I. Risk Management Framework

The implementation of risk management framework in Bank is based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 and Financial Services Authority Regulations (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 regarding the Implementation of Risk Management for Commercial Banks and the use of the international guidelines of Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).

The implementation of risk management is based on the need to balance the business function with risk management, where the risk management is becoming a strategic partner for the business units to optimize the revenue from the business units as a whole.

The Bank's risk management framework covers the entire scope of business activities, transactions and bank products, including new products or activities based on the applicable basic principles of risk management to maintain a balance between the effective business control functions and a clear policy in business management.

The basic framework of risk management is an integral part of the risk management process in management of business and operations of the Bank which includes 4 (four) pillars as follows:

1. Boards of Commissioners and Directors Active Supervision

   a. The Boards of Commissioners and Directors are responsible for the effectiveness of risk management implementation in the Bank and to ensure its adequate implementation according to the Bank's characteristics, complexity and risk profile.

   b. To support its duties and responsibilities, the Board of Commissioners established the following Committees:

      - *Risk Monitoring Committee*
      - *Audit Committee*
      - *Remuneration and Nomination Committee*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

I. Kerangka Manajemen Risiko (lanjutan)

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

   c. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR).

      Direksi membentuk *Assets and Liabilites Committee* (ALCO) yang bertanggung jawab dalam menetapkan strategi dalam pengelolaan aset dan liabilitas Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

   d. Untuk pengendalian internal, Direksi membentuk Satuan Kerja Audit Intern, sedangkan Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

      Direksi membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang berfungsi memastikan fungsi kepatuhan Bank.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

   a. Seluruh aktivitas Bank dan setiap produk/jasa Bank harus memiliki pedoman dan prosedur yang ditetapkan secara jelas dan cakupannya sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank.

   b. Kebijakan Umum Manajemen Risiko disusun untuk memenuhi perkembangan terkini dalam industri perbankan yang berpengaruh pada semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha Bank.

   c. Kebijakan Umum Manajemen Risiko tersebut secara terus menerus akan disesuaikan dengan perubahan peraturan dan ketentuan regulator eksternal/internal.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.

4. Sistem pengendalian internal yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank.

Sistem pengendalian internal Bank yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh unit kerja operasional dan unit kerja pendukung serta satuan kerja audit intern.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

I. Risk Management Framework (continued)

1. Boards of Commissioners and Directors Active Supervision (continued)

   c. To support its duties and responsibilities, the Board of Directors formed a Risk Management Committee (KMR).

      The Board of Directors established Assets and Liabilities Committee (ALCO) which is responsible for determining strategy in the management of the Bank's assets and liabilities in accordance with applicable regulations.

   d. For internal control, the Board of Directors established the Internal Audit Unit, while the Risk Management Unit has a function for identifying, measuring, monitoring and controlling risk.

      The Board of Directors established a Compliance Unit which has a function to ensure the Bank's compliance function.

2. Sufficiency of policy, procedure and limit setting

   a. All of the Bank's activities and any products/services should have a clear guideline and procedure which is in line with the Bank's vision, mission and business strategy.

   b. The Risk Management General Policy is prepared to meet the latest developments of banking industry which affects complexity of the risk in the Bank's business activities.

   c. The Risk Management General Policy is continuously being upgraded for the changes in the rules and regulations of external/internal regulator as well.

3. Sufficiency of the identification of processes, measurement, monitoring and risk control, as well as management of information system risks.

4. Effective internal control system in the implementation of the Bank's operations.

A reliable and effective internal control system of the Bank is the responsibility of all operational and supporting units as well as internal audit division.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

I. Kerangka Manajemen Risiko (lanjutan)

Penerapan manajemen risiko di Bank telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, salah satunya adalah Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai kebijakan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko dalam rangka mengamankan Bank atas risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnisnya.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang efektif, Bank telah menetapkan struktur manajemen risiko disertai dengan tugas dan tanggung jawab pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

II. Struktur Organisasi

Dalam struktur pengawasan dan pengelolaan risiko Bank serta pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*) di tingkat Komisaris dan KMR di tingkat Direksi.

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyusun dan menyesuaikan kebijakan strategi, serta pedoman penerapan manajemen risiko serta untuk memastikan bahwa pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko berjalan efektif, mengevaluasi perkembangan dan kondisi profil risiko, serta memberikan saran-saran dan langkah-langkah perbaikan untuk membahas permasalahan yang spesifik pada jenis risiko tertentu dan membutuhkan putusan segera dengan dilakukan rapat KMR yang bersifat terbatas.

III. Profil Risiko

Bank menyadari bahwa untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang baik, maka risiko-risiko yang dihadapi perlu dikendalikan secara baik, dimana di dalam kegiatannya selalu terdapat risiko yang melekat (*inherent*), yaitu dalam bentuk risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan. Rincian risiko-risiko tersebut adalah sebagai berikut:

(i) Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan atau potensi kegagalan nasabah/*counterparty* dalam memenuhi kewajibannya secara penuh sesuai perjanjian, baik karena tidak mampu ataupun tidak memiliki niat baik atau karena sebab-sebab lain, sehingga Bank mengalami kerugian.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

I. Risk Management Framework (continued)

Implementation of risk management in Bank has been prepared under policies and procedures, one of them is General Policy of Risk Management (KUMR). KUMR as the highest policy to provide direction and control policy of risk management in order to secure the Bank from its business risk activities.

In the implementation of risk management and effective corporate governance, the Bank has determined the structure of risk management along with the duties and responsibilities in all units adapted to the objectives and business policy, the size and complexity of the Bank's business activities.

II. Organizational Structure

In the structure of supervision and risk management of the Bank as well as the implementation of Good Corporate Governance, the Board of Commissioners is supported by the Risk Oversight Committee at the Commissioner level and KMR at the Board of Directors level.

The Risk Management Committee has duties and responsibilities to prepare and enhance strategy, policies and guidelines for the implementation of risk management and to ensure that implementation of the processes and systems of risk management is effective, to evaluate the development of risk profiles and conditions, and also to provide suggestions and remedial measures to address the issues that are specific to certain types of risk and require immediate decision by conducting limited KMR's meetings.

III. Risk Profile

The Bank realized that in order to maintain and improve good performance, the risk exposures need to be controlled properly, where in its business activities there is always an inherent risk, which are the credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk. The details of these risks are as follows:

(i) Credit risk

Credit risk is risk arising from the loss or potential loss of the customers/ counterparty to fulfill its obligations in accordance with the agreement, either due to inability, or delibrate intention to default or other causes, which results for the Bank to suffer losses.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

1. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut menyajikan eksposur risiko kredit terhadap asset - neto sesudah cadangan kerugian penurunan nilai pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

1. Maximum exposure to credit risk

The following table presents the maximum exposure to credit risk exposures relating to the assets - net of allowance for possible losses on the statement of financial position and administrative accounts as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	2019	2018	
Giro pada Bank Indonesia	496.757	803.124	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	522.802	249.546	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	462.718	649.905	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga	4.219.862	3.562.738	*Marketable securities*
Tagihan derivatif	2.645	11.324	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	6.132.883	10.129.117	*Loans*
Tagihan akseptasi	23.518	102.188	*Acceptance receivables*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	129.134	102.992	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	15.905	16.044	*Other assets*
Total	**12.006.224**	**15.626.978**	***Total***

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Credit risk exposures relating to administrative accounts items as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	2019	2018	
Bank garansi yang diterbitkan	332.351	474.000	*Bank guarantees issued*
Fasilitas pinjaman yang belum digunakan	131.876	327.172	*Unused loans facilities*
L/C yang masih beredar	10.727	6.156	*Outstanding irrevocable L/C*
Total	**474.954**	**807.328**	***Total***

Eksposur maksimum pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang berasal dari pinjaman yang diberikan yaitu masing-masing sebesar 51,08% dan 64,82%.

The maximum exposure as of December 31, 2019 and 2018 which is derived from loans is 51.08% and 64.82%, respectively.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

2. Konsentrasi risiko kredit

Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum dalam jumlah bruto berdasarkan sektor industri adalah sebagai berikut:

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

2. Concentration of credit risk

The disclosure on the gross maximum credit risk concentration by industry sector is as follows:

	2019						
	Pemerintah/ *Government*	Bank/ *Bank*	Perindustrian/ *Manufacturing*	Jasa-jasa Dunia Usaha/ *Business Services*	Perusahaan Lainnya dan Perorangan/ *Other Companies and Individual*	Total	
Giro pada Bank Indonesia	496.757	-	-	-	-	496.757	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	523.545	-	-	-	523.545	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	399.953	62.765	-	-	-	462.718	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga	2.361.434	388.242	-	-	1.470.186	4.219.862	*Marketable securities*
Tagihan derivatif	-	2.645	-	-	-	2.645	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	-	95.462	-	5.881.228	269.301	6.245.991	*Loans*
Tagihan akseptasi	-	-	-	23.518	-	23.518	*Acceptance receivables*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	17.931	68.531	-	39.927	2.745	129.134	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	9.343	-	-	-	6.562	15.905	*Other assets*
Total	**3.285.418**	**1.141.190**	**-**	**5.944.673**	**1.748.794**	**12.120.075**	***Total***

	2018						
	Pemerintah/ *Government*	Bank/ *Bank*	Perindustrian/ *Manufacturing*	Jasa-jasa Dunia Usaha/ *Business Services*	Perusahaan Lainnya dan Perorangan/ *Other Companies and Individual*	Total	
Giro pada Bank Indonesia	803.124	-	-	-	-	803.124	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	250.330	-	-	-	250.330	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	649.905	-	-	-	-	649.905	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga	2.836.940	220.974	-	-	504.824	3.562.738	*Marketable securities*
Tagihan derivatif	-	11.324	-	-	-	11.324	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	-	104.847	-	9.343.433	810.775	10.259.055	*Loans*
Tagihan akseptasi	-	-	-	36.759	612.372	649.131	*Acceptance receivables*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	18.908	23.565	-	58.520	1.999	102.992	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	9.343	-	-	-	6.701	16.044	*Other assets*
Total	**4.318.220**	**611.040**	**-**	**9.438.712**	**1.936.671**	**16.304.643**	***Total***

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

2. Konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

2. Concentration of credit risk (continued)

Credit risk exposures relating to administrative accounts as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	2019						
Keterangan	**Pemerintah (Termasuk BI)/ *Government (Including BI)***	**Bank/ *Bank***	**Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institution***	**Perusahaan/ *Corporate***	**Perorangan/ *Individual***	**Total**	***Description***
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	273.765	58.586	332.351	*Bank guarantees issued*
Fasilitas pinjaman yang belum digunakan	-	10	-	131.866	-	131.876	*Unused loans facilities*
L/C yang masih beredar	-	-	-	10.727	-	10.727	*Outstanding irrevocable L/C*
Total	**-**	**10**	**-**	**416.358**	**58.586**	**474.954**	***Total***

	2018						
Keterangan	**Pemerintah (Termasuk BI)/ *Government (Including BI)***	**Bank/ *Bank***	**Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institution***	**Perusahaan/ *Corporate***	**Perorangan/ *Individual***	**Total**	***Description***
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	191.464	282.536	474.000	*Bank guarantees issued*
Fasilitas pinjaman yang belum digunakan	-	10	-	327.162	-	327.172	*Unused loans facilities*
L/C yang masih beredar	-	-	-	6.156	-	6.156	*Outstanding irrevocable L/C*
Total	**-**	**10**	**-**	**524.782**	**282.536**	**807.328**	***Total***

Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum dalam jumlah bruto berdasarkan letak geografis adalah sebagai berikut:

The disclosure on the gross maximum credit risk concentration by geography is as follows:

	2019			
	DKI Jakarta/ *Special City of Jakarta*	**Luar DKI Jakarta/ *Outside of Special City of Jakarta***	**Total**	
Aset				***Assets***
Giro pada Bank Indonesia	496.757	-	496.757	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	399.720	123.825	523.545	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	462.718	-	462.718	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga	4.219.862	-	4.219.862	*Marketable securities*
Tagihan derivatif	2.645	-	2.645	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	4.323.018	1.922.973	6.245.991	*Loans*
Tagihan akseptasi	23.518	-	23.518	*Acceptance receivables*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	86.787	42.347	129.134	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	15.905	-	15.905	*Other assets*
Total Aset	**10.030.930**	**2.089.145**	**12.120.075**	***Total Assets***

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

2. Konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum dalam jumlah bruto berdasarkan letak geografis adalah sebagai berikut: (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

2. Concentration of credit risk (continued)

The disclosure on the gross maximum credit risk concentration by geography is as follows: (continued)

	2018			
	DKI Jakarta/ *Special City of Jakarta*	Luar DKI Jakarta/ *Outside of Special City of Jakarta*	Total	
Aset				***Assets***
Giro pada Bank Indonesia	803.124	-	803.124	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	171.669	78.661	250.330	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	649.905	-	649.905	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga	3.562.738	-	3.562.738	*Marketable securities*
Tagihan derivatif	11.324	-	11.324	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	6.105.371	4.153.684	10.259.055	*Loans*
Tagihan akseptasi	649.131	-	649.131	*Acceptance receivables*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	72.939	30.053	102.992	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	16.044	-	16.044	*Other assets*
Total Aset	**12.042.245**	**4.262.398**	**16.304.643**	***Total Assets***

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The exposures relating to credit risk of administrative accounts as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	2019			
Keterangan	DKI Jakarta/ *Special City of Jakarta*	Luar DKI Jakarta/ *Outside of Special City of Jakarta*	Total	***Description***
Bank garansi yang diterbitkan	310.697	21.654	332.351	*Bank guarantees issued*
Fasilitas pinjaman yang belum digunakan	59.456	72.420	131.876	*Unused loans facilities*
L/C yang masih beredar	10.727	-	10.727	*Outstanding irrevocable L/C*
Total	**380.880**	**94.074**	**474.954**	***Total***

	2018			
Keterangan	DKI Jakarta/ *Special City of Jakarta*	Luar DKI Jakarta/ *Outside of Special City of Jakarta*	Total	***Description***
Bank garansi yang diterbitkan	474.000	-	474.000	*Bank guarantees issued*
Fasilitas pinjaman yang belum digunakan	136.589	190.583	327.172	*Unused loans facilities*
L/C yang masih beredar	6.156	-	6.156	*Outstanding irrevocable L/C*
Total	**616.745**	**190.583**	**807.328**	***Total***

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

2. Konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum berdasarkan sektor ekonomi yang terdapat pada pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

2. Concentration of credit risk (continued)

The disclosure on the maximum credit risk concentration by economic sector on loans is as follows:

	2019		2018		
Rumah tangga	1.906.189	30,52%	1.519.528	14,81%	*Household*
Perdagangan besar dan eceran	1.130.698	18,10%	2.292.760	22,35%	*Wholesaler and retailer*
Perantara keuangan	1.123.000	17,99%	1.246.475	12,15%	*Financial agent*
Industri pengolahan	905.197	14,49%	2.644.452	25,78%	*Processing industry*
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	403.672	6,46%	545.537	5,32%	*Real estate, rental and services*
Konstruksi	336.279	5,38%	496.438	4,84%	*Constructions*
Penyediaan akomodasi, makanan dan minuman	155.735	2,49%	611.968	5,97%	*Supply of accommodation, food and beverages*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	126.190	2,02%	533.739	5,20%	*Transportation, warehousing and communication*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	49.821	0,81%	71.837	0,70%	*Agribusiness, hunting and forestry*
Perikanan	14.999	0,24%	14.956	0,14%	*Fishery*
Pertambangan	11.387	0,18%	115.491	1,12%	*Mining*
Jasa	11.341	0,18%	52.079	0,51%	*Services*
Lain-lain	71.483	1,14%	113.795	1,11%	*Others*
Total	**6.245.991**	**100,00%**	**10.259.055**	**100,00%**	***Total***

Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum berdasarkan kelompok debitur adalah sebagai berikut:

The disclosure on the maximum credit risk concentration by debtor classification is as follows:

	2019		2018		
Komersial	4.339.802	69,48%	8.739.527	85,19%	*Commercial*
Konsumen	1.906.189	30,52%	1.519.528	14,81%	*Consumer*
Total	**6.245.991**	**100,00%**	**10.259.055**	**100,00%**	***Total***

Pengungkapan risiko kredit maksimum adalah sebelum efek mitigasi melalui *master netting* dan/atau perjanjian jaminan. Apabila instrumen keuangan dicatat berdasarkan nilai wajar, angka yang ditunjukkan mencerminkan pengungkapan risiko kredit saat ini tetapi bukan pengungkapan risiko maksimal yang dapat timbul di masa yang akan datang sebagai akibat perubahan nilai.

The details of maximum credit risks by economic sector are before the effect of mitigation through the use of master netting and/or collateral agreements. Where the financial instruments are recorded at fair value, the amounts shown represent the current credit risk exposure but not the maximum risk exposure that could arise in the future as a result of changes in value.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

2. Konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mengantisipasi risiko kredit adalah:

a. Pengelolaan Risiko kredit dilakukan dengan penerapan *Four Eyes Principles* merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan kredit dengan melibatkan unit Bisnis dan unit *Credit Risk Reviewer Division* (CRRD), yang saling independen satu sama lain dengan pemisahan wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- Divisi Bisnis adalah unit bisnis yang melaksanakan usulan pemberian kredit atau penyediaan dana dan berfungsi juga melakukan penanganan debitur kualitas kredit 2A agar tidak berpotensi menjadi *Non-Performing Loans* (NPL);
- *Credit Risk Reviewer Division* (CRRD) adalah unit yang melakukan reviu Nota Analisa Kredit dan hasilnya dalam bentuk Analisa Risiko dan Rekomendasi (ARR) serta dilengkapi kewenangan dalam batas limit tertentu untuk menyetujui atau menolak proposal yang diusulkan oleh Divisi Bisnis;
- Divisi *Corporate Legal and Litigation* dan Divisi *Compliance* sebagai *Non-Voting Member* dalam pemberian opini kepatuhan, legal, dan *Operation* dan *Credit Administration Division* serta *Financial Control Division* sebagai tim *ad hoc* dalam pemberian opini operasional dan restrukturisasi pinjaman didalam mekanisme komite kredit;

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

2. Concentration of credit risk (continued)

There are several actions which have been taken to anticipate the credit risk:

a. The Credit Risk Management is applied by implementing Four Eyes Principles that underlies the main principle to decide approval of credit proposal with the involvement of Business Units and units of Credit Risk Reviewer Division (CRRD), which are working independently with different authority and responsibility, as follows:

- *Business Division is a business unit to propose a credit granting or funding availability and functions to handle the debtors with credit collectability of 2A in order not to potentially become a Non-Performing Loans (NPL);*
- *Credit Risk Reviewer Division (CRRD) is a unit which reviews Credit Memorandum Notes and results in Risk Analysis and Recommendation (ARR) and is authorized within certain limits to approve or reject proposals proposed by the Business Division;*
- *Corporate Legal & Litigation Division and Compliance Division as Non-Voting Member in providing compliance, legal, and Operation and Credit Administration Division and Financial Control Division as ad hoc team providing operational opinion and loan restructuring in the credit committee mechanism;*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

2. Konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

- *Special Asset Management Division* (SAMD) berfungsi melakukan penanganan debitur kualitas 2B, 2C agar tidak berpotensi menjadi *Non-Performing Loans* (NPL) serta penyelamatan kredit dengan *rescheduling, reconditioning* dan *restructuring*, serta debitur pinjaman bermasalah (NPL) dengan penjualan agunan dll, dan penyelesaian aset bermasalah.
- Divisi Manajemen Risiko berfungsi sebagai unit independen yang melakukan identifikasi, pengukuran, memantau risiko kredit dengan berpegang pada *prudent banking policy*; dan
- Komite Kredit merupakan mekanisme proses persetujuan kredit sesuai dengan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) yang telah ditetapkan oleh Direksi.

b. Melakukan penetapan *limit*/batas wewenang untuk memutuskan kredit yang direviu secara berkala.

c. Melakukan penyempurnaan terhadap proses kredit Bank perihal Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) sehingga proses pengambilan keputusan kredit berjalan lebih cepat namun tetap berpedoman terhadap asas *prudent banking*.

d. Melengkapi Bank dengan Kebijakan Perkreditan dan Pedoman Pelaksanaan Kredit yang secara berkala dilakukan peninjauan kembali, selain itu terus melengkapi dan menyempurnakan *Standard Operating Procedure* bidang perkreditan.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

2. Credit risk concentration (continued)

- *Special Asset Management Division (SAMD) whose functions to handle the debtors with credit collectability of 2B, 2C in order not to potentially become a Non-Performing Loans (NPL) and to save credit by rescheduling, reconditioning and restructuring, and handle debtors with Non-Performing Loans (NPL) by selling collateral etc, and the assets settlement.*
- *Risk Management Division (RMD) whose function as an independent unit to identify, measure and monitor credit risk by implementing a prudent banking policy; and*
- *Credit Committee evaluates the process of credit approval in accordance with the Limitation of Credit Authorization Limit (BWMK) assigned by the Board of Directors.*

b. Setting up of credit limits/level of authority to approve credit are being evaluated on a regular basis.

c. Credit Authorization Limit (BWMK) makes improvement to the Bank's process of evaluation of granting credits so that the credit decision-making processes will be faster but still guided by the principles of prudent banking.

d. Complementing the Bank with the Credit Policy and Credit Manual which are regularly being reviewed also to complement and enhance the Standard Operating Procedure for granting credit sector.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

2. Konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

e. Melakukan *monitoring* terhadap portofolio pinjaman Bank, yang dilakukan antara lain terhadap segmentasi kredit, kualitas kredit, serta terhadap 25 (dua puluh lima) debitur inti.

f. Melakukan penyempurnaan atas Nota Analisa Kredit yang disertakan dengan *spreadsheet* laporan keuangan.

g. Melakukan pembahasan rutin terkait dengan permasalahan di bidang kredit termasuk didalamnya mengenai Kredit Kualitas Rendah (KKR) dan pinjaman bermasalah.

h. Melakukan perbaikan pada pinjaman bermasalah dengan melakukan penyelesaian pinjaman bagi debitur yang bermasalah.

i. Melakukan penyusunan portofolio pinjaman per sektor industri yang digunakan untuk menyusun *Industry Code and Catalogues*, dan Rekomendasi *Approved Industries* dan *Target Market*.

j. Pemberian pinjaman dengan mempertimbangkan BMPK, limit kredit dan konsentrasi kredit.

Proses pemberian kredit dilakukan dengan penentuan *target market* terlebih dahulu, dengan memperhatikan industri *outlook* yang direkomendasikan serta memperhatikan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang ditetapkan manajemen Bank, selanjutnya melakukan analisis kredit termasuk di dalamnya melakukan *BI Checking* dan *Trade Checking*, pengajuan kepada Rapat Komite Kredit sesuai dengan kewenangan masing-masing pemutus, ditindaklanjuti dengan memberikan keputusan atas permohonan kredit oleh Rapat Komite Kredit.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

2. Credit risk concentration (continued)

e. Monitoring of the Bank's loans portfolio, which covers under segment of credit, credit quality, for the top 25 (twenty five) debtors.

f. Improving Credit Analysis Memorandum and with attached financial statements spreadsheet.

g. Conducting regular discussion related to the loans problems of outstanding which includes Low Quality Loans and Non-Performing Loans.

h. Improving the Non-Performing Loans by resolving the problems of non-performing debtors.

i. Preparing the loan portfolio by industry sector to compile the Industry Code and Catalogues, and Recommendations of Approved Industries and Target Market.

j. Granting loan by considering the Legal Lending Limit, credit limit and credit concentration.

The credit granting evaluation process is conducted initially by determining the target market, and considering recommendation from outlook of industry and attention to risk appetite and risk tolerance established by the Bank's management, and then conducting evaluation and credit analysis including BI Checking and Trade Checking, submission to Credit Committee Meeting in accordance with the limit authority, followed by a decision on a credit application by the Credit Committee Meeting.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

Setelah adanya persetujuan pinjaman tersebut, maka Surat Penawaran Kredit diberikan kepada debitur dan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pinjaman, pengikatan agunan dan penutupan asuransi agunan. Setelah proses tersebut maka dilanjutkan dengan proses dokumentasi dan administrasi kredit, melakukan pencairan, dilanjutkan dengan pemantauan serta pelaporan kredit.

Jaminan dan perlindungan kredit lainnya

Bank menerapkan berbagai kebijakan dan praktik untuk memitigasi risiko kredit. Praktik perbankan yang umum dilakukan adalah dengan meminta agunan sebagai uang muka. Bank menerapkan berbagai panduan atas jenis-jenis agunan yang dapat diterima dalam rangka memitigasi risiko kredit. Jenis-jenis agunan atas pinjaman yang diberikan antara lain adalah: hipotek atas properti hunian, agunan atas aset usaha seperti tanah dan bangunan, persediaan dan piutang usaha dan agunan atas instrumen keuangan.

Kualitas kredit per golongan aset keuangan

Kualitas kredit aset keuangan dikelola oleh Bank dengan menggunakan pedoman dari Bank Indonesia. Kualitas kredit berdasarkan golongan aset yang memiliki risiko kredit mengacu pada hasil penilaian dari lembaga pemeringkat eksternal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Agunan yang diambil alih

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank mengakui kerugian atas penjualan agunan yang diambil alih masing-masing sebesar Rp 10.134 dan nihil (Catatan 16).

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

After the loan has been approved, the debtor is going to receive an Offering Letter of Credit, and continued by signing on the loan agreement, binding of collateral and collateral insurance. The process is continued with the documentation and credit administration, credit disbursement, followed by monitoring and reporting of credit.

Collateral and other credit protection

The Bank implements policies and practices to mitigate the credit risk. The general banking practice is to secure collateral as an advance. The Bank implements guidelines on the acceptability of specific classes of collateral or credit risk mitigation. The principal types of collateral for loans are as follows: mortgage over residential properties, collaterals over business assets such as land and buildings, inventories and accounts receivable and collaterals over financial instruments.

Credit quality per class of financial assets

On determining the credit quality of financial assets managed by the Bank, uses the guidance from Bank Indonesia. The credit quality based on asset classification that has a credit risk refers to the assessment of external agencies as stipulated by Bank Indonesia.

Foreclosed assets

For the years then ended December 31, 2019 and 2018, the Bank recognized loss on the sale of foreclosed assets amounting to Rp 10,134 and nil, respectively (Note 16).

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

Penilaian penurunan nilai

Pertimbangan utama untuk penilaian penurunan nilai pinjaman yang diberikan termasuk pembayaran-pembayaran pokok atau bunga yang menunggak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari atau kesulitan atau pelanggaran yang diketahui dari persyaratan pinjaman yang terdapat dalam kontrak. Bank melakukan penilaian penurunan nilai dalam 2 (dua) area: penilaian penyisihan penurunan nilai individual dan penilaian penyisihan penurunan nilai kolektif.

Penilaian penyisihan penurunan nilai individual

Bank menentukan penyisihan secara individual untuk masing-masing aset keuangan pinjaman yang diberikan yang signifikan secara individu. Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah penyisihan antara lain mencakup:

(1) Kemungkinan rencana bisnis debitur;
(2) Kemampuan untuk memperbaiki kinerja setelah adanya kesulitan keuangan;
(3) Proyeksi penerimaan dan pembayaran apabila terjadi kebangkrutan;
(4) Kemungkinan adanya sumber pembayaran lainnya; dan
(5) Jumlah yang dapat direalisasikan atas jaminan dan ekspektasi waktu arus kas.

Penilaian penyisihan penurunan nilai kolektif

Penilaian penyisihan kerugian secara kolektif dilakukan atas aset keuangan yang tidak signifikan secara individu.

Evaluasi penurunan nilai

Bank memberlakukan *monitoring* dan pengawasan kredit yaitu *Early Warning System*.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

Impairment assessment

The main considerations for the impairment of loan includes any principal or interest payment with default for more than 90 (ninety) days or any problems or breaches of loan agreement. The Bank implements evaluation of impairment assessment in 2 (two) areas: individually assessed allowances and collectively assessed allowances.

Individually assessed allowances

The Bank provides the individual allowances for each individually significant financial assets of loans. Items considered when determining allowance include:

(1) The sustainability of the debtors business plan;
(2) Ability to improve performance once a financial difficulty has arisen;
(3) Projected cash receipt and the expected payout if debtor is bankrupt;
(4) The availability of other source of payment; and
(5) The realizable value of collateral and the timing of expected cash flows.

Collectively assessed allowances

Allowances are assessed collectively for losses on financial assets that are not individually significant.

Impairment evaluation

The Bank imposed a monitoring and supervision of credit that is the Early Warning System.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Tujuan dari *Early Warning System* digunakan untuk melakukan pemantauan kredit agar dapat diketahui sedini mungkin apabila terjadi penyimpangan/deviasi yang dapat berdampak pada turunnya kualitas kredit (kolektibilitas) sehingga Bank dapat secepat mungkin mengambil langkah-langkah perbaikan sehingga Bank tidak mengalami kerugian.

Berikut beberapa hal yang menjadi *warning signs* atas diberlakukannya *Early Warning System*, sebagai berikut:

a. Laporan keuangan
b. Kondisi bisnis debitur
c. Sikap debitur
d. Ekonomi makro

Early Warning System atas debitur dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat profil risiko, sebagai berikut:

a. Risiko tinggi
b. Risiko menengah tinggi
c. Risiko menengah
d. Risiko menengah rendah
e. Risiko rendah

Berikut ini adalah risiko kredit berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

Impairment evaluation (continued)

Early Warning System is used by the Bank to conduct credit monitoring to recognize as early as possible if there any event of irregularities/deviations that could impact the decline of credit quality (collectibilities) as soon as possible so that the Bank can take corrective measures as soon as possible to avoid suffering losses.

Below are some indicators that serve as warning signs on the implementation of the Early Warning System, as follows:

a. Financial statements
b. Business conditions of debtor
c. Attittude of debtor
d. Macro economy

The Early Warning System on debtors are categorized into 5 (five) ranks of risk profile, as follows:

a. High risk
b. Medium to high risk
c. Medium risk
d. Medium to low risk
e. Low risk

The following is credit risk based on allowance for impairment losses assessment classification as of December 31, 2019 and 2018:

Giro pada Bank Indonesia / *Current accounts with Bank Indonesia*

	2019			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Non-impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Total**	
Rupiah	398.117	-	398.117	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 41)	98.640	-	98.640	*Foreign currencies (Note 41)*
Total	**496.757**	**-**	**496.757**	***Total***

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / ***45. RISK MANAGEMENT (continued)***

III. Profil Risiko (lanjutan) / *III. Risk Profile (continued)*

(i) Risiko kredit (lanjutan) / *(i) Credit risk (continued)*

Giro pada Bank Indonesia (lanjutan) / *Current accounts with Bank Indonesia (continued)*

	2018			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Non-impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Total**	
Rupiah	693.759	-	693.759	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 41)	109.365	-	109.365	*Foreign currencies (Note 41)*
Total	**803.124**	**-**	**803.124**	***Total***

Giro pada bank lain / *Current accounts with other banks*

	2019			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Non-impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Total**	
Rupiah	27.923	-	27.923	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 41)	494.879	743	495.622	*Foreign currencies (Note 41)*
Total	522.802	743	523.545	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(743)	(743)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**522.802**	**-**	**522.802**	***Net***

	2018			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Non-impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Total**	
Rupiah	43.249	-	43.249	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 41)	206.297	784	207.081	*Foreign currencies (Note 41)*
Total	249.546	784	250.330	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(784)	(784)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**249.546**	**-**	**249.546**	***Net***

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / ***45. RISK MANAGEMENT (continued)***

III. Profil Risiko (lanjutan) / *III. Risk Profile (continued)*

(i) Risiko kredit (lanjutan) / *(i) Credit risk (continued)*

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain / *Placements with Bank Indonesia and other banks*

	2019			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Non-impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Total**	
Rupiah				*Rupiah*
Fasilitas Deposito Bank Indonesia	399.953	-	399.953	*Bank Indonesia Deposit Facility*
Interbank Call Money	35.000	-	35.000	*Interbank Call Money*
Sub-total	434.953	-	434.953	*Sub-total*
Mata uang asing (Catatan 41)				*Foreign currency (Note 41)*
Interbank Call Money	27.765	-	27.765	*Interbank Call Money*
Total	**462.718**	**-**	**462.718**	***Total***

	2018			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Non-impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Total**	
Rupiah				*Rupiah*
Fasilitas Deposito Bank Indonesia	649.905	-	649.905	*Bank Indonesia Deposit Facility*

Surat-surat berharga / *Marketable securities*

	2019			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Non-impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Total**	
Tersedia untuk dijual	3.700.222	-	3.700.222	*Available-for-sale*
Diperdagangkan	519.640	-	519.640	*Trading*
Total	**4.219.862**	**-**	**4.219.862**	***Total***

	2018			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Non-impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Total**	
Tersedia untuk dijual	3.078.473	-	3.078.473	*Available-for-sale*
Diperdagangkan	484.265	-	484.265	*Trading*
Total	**3.562.738**	**-**	**3.562.738**	***Total***

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / ***45. RISK MANAGEMENT (continued)***

III. Profil Risiko (lanjutan) / *III. Risk Profile (continued)*

(i) Risiko kredit (lanjutan) / *(i) Credit risk (continued)*

Pinjaman yang diberikan / *Loans*

	2019			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Non-impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Total**	
Kredit modal kerja	1.480.859	22.266	1.503.125	*Working capital loans*
Kredit ekspor impor	1.352.931	50	1.352.981	*Export import loans*
Kredit kendaraan bermotor	1.286.084	56.826	1.342.910	*Vehicle loans*
Kredit rekening koran	789.645	5.000	794.645	*Current accounts loans*
Kredit investasi	545.316	-	545.316	*Investment loans*
Kredit pemilikan rumah	151.381	415	151.796	*Housing loans*
Lain-lain	546.976	8.242	555.218	*Others*
Total	6.153.192	92.799	6.245.991	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(70.314)	(42.794)	(113.108)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**6.082.878**	**50.005**	**6.132.883**	***Net***

	2018			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Non-impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Total**	
Kredit modal kerja	2.959.532	59.103	3.018.635	*Working capital loans*
Kredit rekening koran	1.750.338	61.585	1.811.923	*Current accounts loans*
Kredit ekspor impor	1.553.687	12.859	1.566.546	*Export import loans*
Kredit investasi	1.479.552	20.147	1.499.699	*Investment loans*
Kredit kendaraan bermotor	726.538	75.593	802.131	*Vehicle loans*
Kredit pemilikan rumah	259.262	9.242	268.504	*Housing loans*
Lain-lain	1.092.683	198.934	1.291.617	*Others*
Total	9.821.592	437.463	10.259.055	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.645)	(117.293)	(129.938)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**9.808.947**	**320.170**	**10.129.117**	***Net***

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *45. RISK MANAGEMENT (continued)*

III. Profil Risiko (lanjutan) / *III. Risk Profile (continued)*

(i) Risiko kredit (lanjutan) / *(i) Credit risk (continued)*

Tagihan akseptasi / *Acceptance receivables*

	2019			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Non-impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Total**	
Mata uang asing (Catatan 41)	23.518	-	23.518	*Foreign currencies (Note 41)*

	2018			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Non-impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Total**	
Rupiah	16.546	-	16.546	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 41)	20.213	612.372	632.585	*Foreign currencies (Note 41)*
Total	36.759	612.372	649.131	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(546.943)	(546.943)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**36.759**	**65.429**	**102.188**	***Net***

Tabel di bawah ini menunjukkan kualitas kredit per jenis instrumen keuangan:

The table below shows the credit quality per class of financial assets:

	2019							
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*				Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Total	
	Tingkat tinggi/ *High grade*	Tingkat sedang/ *Standard grade*	Tingkat rendah/ *Low grade*	Tanpa peringkat/ *Unrated*				
Aset Keuangan								***Financial Assets***
Giro pada Bank Indonesia	496.757	-	-	-	-	-	496.757	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	522.802	-	-	-	-	743	523.545	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	462.718	-	-	-	-	-	462.718	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga	1.858.428	-	-	2.361.434	-	-	4.219.862	*Marketable securities*
Tagihan derivatif	2.645	-	-	-	-	-	2.645	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	-	-	-	6.142.217	10.975	92.799	6.245.991	*Loans*
Tagihan akseptasi	-	-	-	23.518	-	-	23.518	*Acceptance receivables*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	86.224	-	-	40.329	2.581	-	129.134	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	-	-	-	15.905	-	-	15.905	*Other assets*
Total	3.429.574	-	-	8.583.403	13.556	93.542	12.120.075	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai							(113.851)	*Allowance for impairment losses*
Neto							**12.006.224**	***Net***

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

	2018							
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*				Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Total	
	Tingkat tinggi/ *High grade*	Tingkat sedang/ *Standard grade*	Tingkat rendah/ *Low grade*	Tanpa peringkat/ *Unrated*				
Aset Keuangan								***Financial Assets***
Giro pada Bank Indonesia	803.124	-	-	-	-	-	803.124	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	249.546	-	-	-	-	784	250.330	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	649.905	-	-	-	-	-	649.905	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga	675.533	-	-	2.599.052	288.153	-	3.562.738	*Marketable securities*
Tagihan derivatif	11.324	-	-	-	-	-	11.324	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	-	-	-	9.694.686	126.538	437.831	10.259.055	*Loans*
Tagihan akseptasi	-	-	-	36.759	-	612.372	649.131	*Acceptance receivables*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	42.220	-	-	60.632	140	-	102.992	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	-	-	-	16.044	-	-	16.044	*Other assets*
Total	2.431.652	-	-	12.407.173	414.831	1.050.987	16.304.643	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai							(677.665)	*Allowance for impairment losses*
Neto							**15.626.978**	***Net***

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

a. Tingkat tinggi: peringkat dalam kategori ini memiliki kapasitas sangat baik dalam memenuhi komitmen keuangan dengan risiko kredit sangat rendah.

b. Tingkat sedang: peringkat dalam kategori ini memiliki kapasitas yang baik dalam memenuhi komitmen keuangan dengan risiko kredit sangat rendah.

c. Tingkat rendah: peringkat dalam kategori ini memiliki kapasitas yang cukup dalam memenuhi komitmen keuangan dengan risiko kredit sedang.

d. Tanpa peringkat: kategori ini tidak menyediakan peringkat dikarenakan ketidaktersediaan dari model-model peringkat pemerintah dan/atau agen-agen yang berhubungan dengan pemerintah.

The credit qualities are defined as follows:

a. High grade: rating in this category has an excellent capacity to meet financial commitments with very low credit risk.

b. Standard grade: rating in this category has a good capacity to meet financial commitments with very low credit risk.

c. Low grade: rating in this category has fairly acceptable capacity to meet financial commitments with standard credit risk.

d. Unrated: this category is currently not assigned with any ratings due to unavailability of rating models from governments and/or government-related agencies.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut: (lanjutan)

Analisis umur pinjaman yang diberikan yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

The credit qualities are defined as follows: (continued)

The aging analysis of past due but not impaired loans as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	2019				
	Kurang dari 30 hari/ *Less than 30 days*	**31 sampai dengan 60 hari/ *31 up to 60 days***	**61 sampai dengan 90 hari/ *61 up to 90 days***	**Total**	
Komersial/Usaha Kecil Menengah (UKM)	539	6.623	3.773	10.935	*Commercial/Small and Medium Enterprises (SME)*
Konsumen	38	-	2	40	*Consumer*
Total	**577**	**6.623**	**3.775**	**10.975**	***Total***

	2018				
	Kurang dari 30 hari/ *Less than 30 days*	**31 sampai dengan 60 hari/ *31 up to 60 days***	**61 sampai dengan 90 hari/ *61 up to 90 days***	**Total**	
Korporasi	16.697	44.316	-	61.013	*Corporate*
Komersial/Usaha Kecil Menengah (UKM)	39.700	16.558	9.258	65.516	*Commercial/Small and Medium Enterprises (SME)*
Konsumen	4	3	2	9	*Consumer*
Total	**56.401**	**60.877**	**9.260**	**126.538**	***Total***

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(i) Risiko kredit (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, rincian kualitas kredit atas pinjaman yang diberikan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan *rating* internal adalah sebagai berikut:

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(i) Credit risk (continued)

The credit quality of loans that are neither past due nor impaired as of December 31, 2019 and 2018 can be assessed by reference to the internal rating as follows:

	2019				
	Kurang dari 30 hari/ *Less than 30 days*	**31 sampai dengan 60 hari/ *31 up to 60 days***	**61 sampai dengan 90 hari/ *61 up to 90 days***	**Total**	
Lancar	1.742.014	3.474.781	701.116	5.917.911	*Current*
Dalam perhatian khusus	87.717	109.473	27.116	224.306	*Special mention*
Total	**1.829.731**	**3.584.254**	**728.232**	**6.142.217**	***Total***

	2018				
	Kurang dari 30 hari/ *Less than 30 days*	**31 sampai dengan 60 hari/ *31 up to 60 days***	**61 sampai dengan 90 hari/ *61 up to 90 days***	**Total**	
Lancar	1.347.920	5.916.253	1.301.240	8.565.413	*Current*
Dalam perhatian khusus	54.108	798.495	276.670	1.129.273	*Special mention*
Total	**1.402.028**	**6.714.748**	**1.577.910**	**9.694.686**	***Total***

(ii) Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko pasar melekat pada hampir seluruh kegiatan dan aktivitas Bank baik di *banking book* maupun *trading book*. Bank melakukan pengelolaan risiko pasar yang mencakup risiko suku bunga dan risiko nilai tukar.

(ii) Market risk

Market risk is risk on the statement of financial position and administrative accounts, including derivative transactions, due to overall changes in market conditions, including the risk of change of option price. Market risk is almost inherent in all Bank's events and activities in both of its banking book and trading book. The Bank manages the market risk including interest rate risk and foreign exchange risk.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(ii) Risiko pasar (lanjutan)

1. Risiko suku bunga

Potensi risiko suku bunga pada Bank cukup signifikan karena penyaluran dana selain dalam bentuk pinjaman, juga berupa portofolio investasi pada surat berharga. Kondisi ini akan menekan *Net Interest Margin* (NIM) saat suku bunga dana cenderung meningkat. Beberapa antisipasi/strategi dan mitigasi risiko Bank dalam menyikapi kondisi ini, antara lain, adalah sebagai berikut:

a. Bank melakukan perbaikan terhadap struktur komposisi aset produktif dan non-produktifnya agar lebih menguntungkan posisi Bank.

b. Mengupayakan pengelolaan struktur liabilitas Bank dalam meningkatkan sumber pendanaan jangka panjang, dengan jalan memberikan suku bunga yang menarik dan kompetitif pada deposito tiga bulan hingga satu tahun.

c. Meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari *government funding* dengan jangka waktu panjang.

d. Menerapkan *floating rate* pada pemberian pinjaman jenis tertentu, sehingga risiko penurunan suku bunga tidak membebani Bank dan sebaliknya juga tidak akan membebani debitur jika suku bunga meningkat.

e. Memonitor perkembangan harga pasar (*market pricing*) sekaligus memperkokoh kebijakan *pricing* aset maupun liabilitas melalui forum rapat *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) dengan membahas beberapa perhitungan penting seperti *cost of money*, *base lending rate* dan perhitungan lainnya.

f. Melakukan *monitoring* atas likuiditas, aktivitas dan *risk limit* Divisi *Treasury* dan *Capital Market* secara harian dan melaporkannya ke Direksi.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(ii) Market risk (continued)

1. Interest rate risk

Potential interest rate risk in the Bank is significant because of the distribution of funds, other than loan and investment portfolio in marketable securities. This condition will depress Net Interest Margin (NIM) when the interest rate is likely to increase. There are some anticipation/strategies and the Bank's risk mitigation in addressing the issues, among others, are as follows:

a. The Bank makes improvement to the composition structure of productive and non-productive assets to make profit for the Bank's position.

b. Arrange the management of Bank's liabilities structure in improving the long-term funding sources, by providing attractive and competitive interest rates on time deposits for three months to one year.

c. Increase Third Party Fund (DPK) from government funding with the long-term period.

d. Apply the floating rate on certain types of loans, then the risk of a decrease in interest rates will not suffer the Bank, and on the other hand, will not charge to debtors if interest rates rise.

e. Monitor the development of the market pricing and strengthen policy of asset and liabilities pricing through meetings of Assets and Liabilities Committee (ALCO) to discuss some important calculations such as cost of money, base lending rate and other calculations.

f. Conduct monitoring of liquidity, activity and risk limitation of Treasury and Capital Market Division on daily basis and report to the Board of Directors.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(ii) Risiko pasar (lanjutan)

1. Risiko suku bunga (lanjutan)

Tabel berikut merupakan kisaran tingkat suku bunga kontraktual per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(ii) Market risk (continued)

1. Interest rate risk (continued)

The following table summarizes the range of contractual interest rates per annum for significant financial assets and liabilities as of December 31, 2019 and 2018:

	2019								
	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	Yen Jepang/ *Japanese Yen* %	Euro Eropa/ *European Euro* %	Dolar Hong Kong/ *Hong Kong Dollar* %	Dolar Australia/ *Australian Dollar* %	Dolar Singapura/ *Singapore Dollar* %	Lain-lain/ *Others* %	
Aset									*Assets*
Giro pada bank lain	1,56	0,13	1,86	5,29	3,56	3,07	1,30	9,94	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5,30	1,05	-	-	-	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga	7,59	3,52	-	-	-	-	-	-	*Marketable securities*
Pinjaman yang diberikan	12,53	5,93	-	-	-	-	5,79	-	*Loans*
Liabilitas									*Liabilities*
Simpanan nasabah	2,77	1,11	0,48	0,53	-	1,12	0,71	-	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	6,76	-	1,09	-	-	-	-	-	*Deposits from other banks*
Pinjaman subordinasi	8,16	2,38	-	-	-	-	-	-	*Subordinated loan*

	2018								
	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	Yen Jepang/ *Japanese Yen* %	Euro Eropa/ *European Euro* %	Dolar Hong Kong/ *Hong Kong Dollar* %	Dolar Australia/ *Australian Dollar* %	Dolar Singapura/ *Singapore Dollar* %	Lain-lain/ *Others* %	
Aset									*Assets*
Giro pada bank lain	1,00	0,20	2,29	2,43	8,71	2,91	2,29	3,91	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4,94	0,45	-	-	-	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga	6,96	3,95	-	-	-	-	-	-	*Marketable securities*
Pinjaman yang diberikan	13,25	6,43	-	-	-	-	5,58	-	*Loans*
Liabilitas									*Liabilities*
Simpanan nasabah	2,14	0,80	0,13	0,18	-	1,11	0,38	-	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	6,21	-	0,10	-	-	-	-	-	*Deposits from other banks*
Pinjaman subordinasi	-	2,99	-	-	-	-	-	-	*Subordinated loan*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(ii) Risiko pasar (lanjutan)

1. Risiko suku bunga (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan yang memiliki tingkat suku bunga pada nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, yang dikategorikan berdasarkan tanggal kontraktual perubahan tingkat suku bunga atau tanggal jatuh tempo, mana yang lebih dahulu:

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(ii) Market risk (continued)

1. Interest rate risk (continued)

The following table presents the interest bearing financial assets and liabilities at the carrying amount as of December 31, 2019 and 2018, which are categorized by the earlier contractual repricing or maturity dates:

	2019						
	Kurang dari 6 bulan/ *Less than 6 months*	6 bulan sampai dengan 12 bulan/ *6 months until 12 months*	1 tahun sampai dengan 2 tahun/ *1 year until 2 years*	2 tahun sampai dengan 5 tahun/ *2 years until 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Total	
Giro pada bank lain	523.545	-	-	-	-	523.545	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	462.718	-	-	-	-	462.718	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga	587.812	96.530	618.930	1.715.005	1.201.585	4.219.862	*Marketable securities*
Pinjaman yang diberikan	1.722.913	1.088.426	561.181	2.403.409	470.062	6.245.991	*Loans*
Total aset keuangan	3.296.988	1.184.956	1.180.111	4.118.414	1.671.647	11.452.116	*Total financial assets*
Simpanan nasabah	11.714.658	538.979	552.595	-	-	12.806.232	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	1.372.930	13.423	9.635	450.000	-	1.845.988	*Deposits from other banks*
Pinjaman subordinasi	-	-	-	400.000	-	400.000	*Subordinated loan*
Total liabilitas keuangan	13.087.588	552.402	562.230	850.000	-	15.052.220	*Total financial liabilities*
Selisih penilaian bunga - neto	**(9.790.600)**	**632.554**	**617.881**	**3.268.414**	**1.671.647**	**(3.600.104)**	***Net interest repricing gap***

	2018						
	Kurang dari 6 bulan/ *Less than 6 months*	6 bulan sampai dengan 12 bulan/ *6 months until 12 months*	1 tahun sampai dengan 2 tahun/ *1 year until 2 years*	2 tahun sampai dengan 5 tahun/ *2 years until 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Total	
Giro pada bank lain	250.330	-	-	-	-	250.330	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	649.905	-	-	-	-	649.905	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga	486.987	193.215	198.485	949.534	1.734.517	3.562.738	*Marketable securities*
Pinjaman yang diberikan	4.978.200	573.760	726.623	2.991.435	989.037	10.259.055	*Loans*
Total aset keuangan	6.365.422	766.975	925.108	3.940.969	2.723.554	14.722.028	*Total financial assets*
Simpanan nasabah	11.985.347	530.091	733.167	-	-	13.248.605	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	1.443.556	6.423	11.625	450.000	-	1.911.604	*Deposits from other banks*
Pinjaman subordinasi	-	-	-	143.800	-	143.800	*Subordinated loan*
Total liabilitas keuangan	13.428.903	536.514	744.792	593.800	-	15.304.009	*Total financial liabilities*
Selisih penilaian bunga - neto	**(7.063.481)**	**230.461**	**180.316**	**3.347.169**	**2.723.554**	**(581.981)**	***Net interest repricing gap***

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(ii) Risiko pasar (lanjutan)

1. Risiko suku bunga (lanjutan)

Analisis atas sensitivitas Bank, berupa perubahan pendapatan bunga neto sampai dengan 1 (satu) pelaporan periode kedepan, atas kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga pasar, dengan asumsi bahwa tidak ada pergerakan asimetris pada kurva imbal hasil dan laporan posisi keuangan yang tetap adalah sebagai berikut:

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(ii) Market risk (continued)

1. Interest rate risk (continued)

An analysis of the Bank's sensitivity, in terms of net interest income changes for the whole 1 (one) reporting period ahead as an impact of the increase or decrease in market interest rates, by assuming no asymmetrical movement in curves and a constant statement of financial position are as follows:

	IDR		USD		
	Kenaikan rata-rata suku bunga sebesar 1%/ *Increase in average interest rate of 1%*	**Penurunan rata-rata suku bunga sebesar 1%/ *Decrease in average interest rate of 1%***	**Kenaikan rata-rata suku bunga sebesar 1%/ *Increase in average interest rate of 1%***	**Penurunan rata-rata suku bunga sebesar 1%/ *Decrease in average interest rate of 1%***	
31 Desember 2019					***December 31, 2019***
Sensitivitas atas proyeksi pendapatan bunga - neto	(98.889)	98.889	(7.883)	7.883	*Sensitivity of projected interest income - net*
31 Desember 2018					***December 31, 2018***
Sensitivitas atas proyeksi pendapatan bunga - neto	(99.739)	99.739	1.306	(1.306)	*Sensitivity of projected interest income - net*

2. Risiko nilai tukar

Sebagai bank devisa, Bank tentunya tidak dapat terlepas dari risiko nilai tukar atau risiko fluktuasi nilai tukar sebagai akibat belum stabilnya kondisi ekonomi makro Indonesia maupun negara lain akibat krisis keuangan global yang sangat dirasakan. Kondisi ini mengharuskan Bank menjaga posisi aset dan liabilitas valuta asingnya dalam posisi sesuai ketentuan Bank Indonesia, untuk memitigasi potensi kerugian jika terjadi fluktuasi nilai tukar.

2. Foreign exchange rate risk

As a foreign exchange bank, the Bank attached with the foreign exchange rate risk or the risk of exchange rate fluctuations as a result of the unstable macro economic conditions in Indonesia and other countries due to the global financial crisis were keenly felt. This condition requires the Bank to maintain the position of assets and liabilities denominated in foreign currency in a position in accordance with Bank Indonesia regulation, to mitigate potential losses in the event of exchange rate fluctuations.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(ii) Risiko pasar (lanjutan)

2. Risiko nilai tukar (lanjutan)

Bank membentuk ALCO yang bertanggung jawab dalam menetapkan strategi dalam pengelolaan aset dan liabilitas Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Bank juga telah menetapkan batasan-batasan seperti batas transaksi Pertukaran Mata Uang Asing (*Foreign Exchange), Bank Notes* dan *Money Market*.

Dari sisi pengembangan *Information Technology* (IT), Bank mengoptimalkan aplikasi OPICS, yang saat ini telah diimplementasikan sebagai sistem yang mendukung transaksi *Treasury*.

Bank telah mengelola posisi mata uang asing untuk aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki oleh Bank dengan memonitor Posisi Devisa Neto (PDN). Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, PDN Bank telah diungkapkan dalam Catatan 43.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank atas risiko nilai tukar mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Termasuk di dalamnya adalah instrumen keuangan pada nilai tercatat, dikategorikan berdasarkan jenis mata uang:

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(ii) Market risk (continued)

2. Foreign exchange rate risk (continued)

The Bank established ALCO which is responsible in setting the strategy in the management of its assets and liabilities in accordance with the applicable regulations. In addition, the Bank also has set-up restrictions such as transactions limit for Foreign Exchange, Bank Notes and Money Market.

In terms of Information Technology (IT) development, the Bank optimizes OPICS application, which has been implemented as a system that supports the Treasury transaction.

The Bank manages its foreign currency position for its financial assets and liabilities by monitoring the Bank's Net Open Position (NOP). As of December 31, 2019 and 2018, the Bank's NOP has been disclosed in Note 43.

The table below summarizes the exposure to foreign currency exchange rate risk as of December 31, 2019 and 2018. Included in the table are financial instruments at carrying amounts, categorized by currency as follows:

	2019						
	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar*	Euro Eropa/ *European Euro*	Dolar Singapura/ *Singapore Dollar*	Dolar Australia/ *Australian Dollar*	Lain-lain/ *Others*	Total	
Aset							***Assets***
Kas	16.663	1.881	2.055	948	1.268	22.815	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	98.640	-	-	-	-	98.640	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	395.683	10.775	36.240	10.757	42.167	495.622	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	27.765	-	-	-	-	27.765	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga	145.719	-	-	-	-	145.719	*Marketable securities*
Tagihan derivatif	2.645	-	-	-	-	2.645	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	472.453	-	1.343	-	-	473.796	*Loans*
Tagihan akseptasi	23.518	-	-	-	-	23.518	*Acceptance receivables*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	5.614	-	3	-	-	5.617	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	46.133	8.031	-	-	-	54.164	*Other assets*
Sub-total	1.234.833	20.687	39.641	11.705	43.435	1.350.301	*Sub-total*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(ii) Risiko pasar (lanjutan)

2. Risiko nilai tukar (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank atas risiko nilai tukar mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Termasuk di dalamnya adalah instrumen keuangan pada nilai tercatat, dikategorikan berdasarkan jenis mata uang (lanjutan):

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(ii) Market risk (continued)

2. Foreign exchange rate risk (continued)

The table below summarizes the exposure to foreign currency exchange rate risk as of December 31, 2019 and 2018. Included in the table are financial instruments at carrying amounts, categorized by currency as follows (continued):

	2019						
	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar*	Euro Eropa/ *European Euro*	Dolar Singapura/ *Singapore Dollar*	Dolar Australia/ *Australian Dollar*	Lain-lain/ *Others*	Total	
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	2.770	-	-	-	-	2.770	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	862.517	6.643	39.927	13.753	36.729	959.569	*Deposits from customers*
Simpanan pada bank lain	138.825	-	-	-	732	139.557	*Deposits from other banks*
Bunga yang masih harus dibayar	2.272	5	96	4	4	2.381	*Accrued interest expenses*
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	1.443	1	-	-	19	1.463	*Accrued expenses and other liabilities*
Liabilitas akseptasi	2.101	-	-	-	-	2.101	*Acceptance liabilities*
Sub-total	1.009.928	6.649	40.023	13.757	37.484	1.107.841	*Sub-total*
Neto	**224.905**	**14.038**	**(382)**	**(2.052)**	**5.951**	**242.460**	***Net***

	2018						
	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar*	Euro Eropa/ *European Euro*	Dolar Singapura/ *Singapore Dollar*	Dolar Australia/ *Australian Dollar*	Lain-lain/ *Others*	Total	
Aset							***Assets***
Kas	12.964	1.094	1.507	485	2.305	18.355	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	109.365	-	-	-	-	109.365	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	143.244	10.109	24.715	12.676	16.337	207.081	*Current accounts with other banks*
Surat-surat berharga	747.439	-	-	-	-	747.439	*Marketable securities*
Tagihan derivatif	11.324	-	-	-	-	11.324	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	1.238.570	-	5.243	-	-	1.243.813	*Loans*
Tagihan akseptasi	632.585	-	-	-	-	632.585	*Acceptance receivables*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	13.080	-	17	-	-	13.097	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	47.780	8.486	-	-	-	56.266	*Other assets*
Sub-total	2.956.351	19.689	31.482	13.161	18.642	3.039.325	*Sub-total*
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	8.014	1	12	-	4	8.031	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	911.107	10.927	34.800	12.950	17.795	987.579	*Deposits from customers*
Simpanan pada bank lain	1.021	-	-	-	-	1.021	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	640	-	-	-	-	640	*Derivative payables*
Bunga masih harus dibayar	2.648	15	70	4	1	2.738	*Accrued interest expenses*
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	1.752	500	16	2	119	2.389	*Accrued expenses and other liabilities*
Pinjaman subordinasi	143.800	-	-	-	-	143.800	*Subordinated loan*
Obligasi konversi	215.700	-	-	-	-	215.700	*Convertible bonds*
Sub-total	1.284.682	11.443	34.898	12.956	17.919	1.361.898	*Sub-total*
Neto	**1.671.669**	**8.246**	**(3.416)**	**205**	**723**	**1.677.427**	***Net***

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(ii) Risiko pasar (lanjutan)

2. Risiko nilai tukar (lanjutan)

Tabel dibawah ini menggambarkan posisi mata uang asing atas aset dan liabilitas moneter yang tidak diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dimana Bank memiliki risiko yang signifikan terhadap arus kas masa depan. Analisis tersebut menghitung pengaruh dari pergerakan wajar mata uang asing yang memungkinkan terhadap Rupiah, dengan seluruh variabel lain dianggap konstan, terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (akibat adanya perubahan nilai wajar aset dan liabilitas moneter yang tidak diperdagangkan yang sensitif terhadap nilai tukar) dan ekuitas (akibat adanya perubahan nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan yang termasuk kategori tersedia untuk dijual).

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(ii) Market risk (continued)

2. Foreign exchange rate risk (continued)

The table below indicates the foreign currency position of non-trading monetary assets and liabilities as of December 31, 2019 and 2018 which the Bank has significant exposure against its forecasted cash flows. The analysis calculates the effect of a reasonably possible movement of the currency rate against the Indonesian Rupiah, with all variables held constant, on the statement of profit or loss and other comprehensive income (due to changes in the fair value of currency sensitive to non-trading monetary assets and liabilities) and equity (due to changes in fair value of financial assets and liabilities which are categorized as available-for-sale).

	2019		
	Kenaikan/(penurunan) dalam nilai tukar/ *Increase/(decrease) in exchange rate*	Sensitivitas terhadap laporan laba rugi/ *Sensitivity of profit or loss*	
Mata uang			***Currency***
Dolar Amerika Serikat	10/(10)	150/(150)	*United States Dollar*
Euro Eropa	10/(10)	3,38/(3,38)	*European Euro*
Poundsterling Inggris	10/(10)	0,31/(0,31)	*Great Britain Poundsterling*

	2018		
	Kenaikan/(penurunan) dalam nilai tukar/ *Increase/(decrease) in exchange rate*	Sensitivitas terhadap laporan laba rugi/ *Sensitivity of profit or loss*	
Mata uang			***Currency***
Dolar Amerika Serikat	10/(10)	779/(779)	*United States Dollar*
Euro Eropa	10/(10)	(0,20)/0,20	*European Euro*
Poundsterling Inggris	10/(10)	0,22/(0,22)	*Great Britain Poundsterling*

b. Risiko suku bunga dalam *Banking Book*

Risiko suku bunga dalam *Banking Book* merupakan Risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan pendapatan Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.

b. Interest rate risk in the Banking Book

Interest rate ratio in the Banking Book is a risk due to interest rate movements in the market that are opposite to the Banking Book position, which has the potential to have an impact on capital and income of the Bank, both now and in the future.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(ii) Risiko pasar (lanjutan)

3. Risiko suku bunga dalam *Banking Book*

Sesuai SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tentang "Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in The Banking Book*) bagi Bank Umum", Bank menggunakan 2 (dua) metode dalam melakukan pengukuran Risiko IRRBB sebagai berikut:

a. Pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*), yang selanjutnya disingkat EVE, adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank; dan
b. Pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*Net Interest Income*), yang selanjutnya disingkat NII, adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan Bank.

Berdasarkan hasil simulasi *sensitivity analysis* per akhir tahun 2019, dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas dan pendapatan bunga bersih sebagai berikut:

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(ii) Market risk (continued)

3. Interest rate risk in the Banking Book

In accordance SEOJK No. 12/SEOJK. 03/2018 concerning "Application of Risk Management and Risk Measurement Standard Approach to Interest Rate Risk in the Banking Book (Interest Rate Risk in the Banking Book) for Commercial Banks", the Bank uses 2 (two) methods in measuring IRRBB Risk as follows:

a. Measurement based on changes in the economic value of equity (economic value of equity), hereinafter abbreviated as EVE, is a method that measures the impact of changes in interest rates on the economic value of the Bank's equity; and
b. Measurement based on changes in net interest income (Net Interest Income), hereinafter abbreviated as NII, is a method that measures the impact of changes in interest rates on bank income.

Based on the results of a sensitivity analysis simulation at the end of 2019, the impact of changes in interest rates on the economic value of equity and net interest income is as follows:

	∆EVE		∆NII	
Periode/*Period*	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**
Parallel up	(658.436)	n.a	(403.440)	n.a
Parallel down	812.698	n.a	403.440	n.a
Steepener	(172.322)	n.a		
Flattener	24.672	n.a		
Short rate up	309.413	n.a		
Short rate down	(288.615)	n.a		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)/*Negative Maximum Value (absolute)*	658.436	n.a	403.440	n.a
Modal Tier 1 (untuk ∆EVE) atau *Projected Income* (untuk ∆NII)/ *Tier 1 capital (for ∆EVE) or Projected Income (for ∆NII)*	1.417.112	n.a	577.563	n.a
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk ∆EVE) atau Projected Income (untuk ∆NII)/*Maximum Value divided by Tier 1 Capital (for ∆EVE) or Projected Income (for ∆NII)*	46,46%	n.a	69,85%	n.a

*) Metode perhitungan sesuai dengan SEOJK *Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)* No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

*) *Calculation method according to SEOJK Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) No.12/SEOJK.03/2018 dated August 21, 2018.*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(ii) Risiko pasar (lanjutan)

3. Risiko suku bunga dalam *Banking Book* (lanjutan)

Analisa Kualitatif IRRBB

a. Penjelasan mengenai bagaimana Bank mendefinisikan IRRBB untuk pengukuran dan pengendalian risiko.

Bank melakukan pengendalian serta mitigasi risiko suku bunga melalui strategi rekomposisi aset dan liabilitas atau strategi *hedging*.

b. Penjelasan mengenai strategi manajemen dan mitigasi IRRBB.

Bank menetapkan strategi pengendalian IRRBB yang sejalan dengan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang disetujui oleh Dewan Direksi. Sementara itu, strategi mitigasi IRRBB terhadap perubahan nilai ekonomis dari modal (ΔEVE) ditetapkan tergantung dari posisi *duration* (rata-rata *repricing maturity*) dari aset dan kewajiban. Per 31 Desember 2019, ΔEVE Bank sebesar 46,46% masih jauh di bawah limit regulator yakni 15%.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(ii) Market risk (continued)

3. Interest rate risk in the Banking Book

IRRBB Quantitative Analysis

a. An explanation of how the Bank defines the IRRBB for risk measurement and management.

The Bank carries out control and mitigation of interest rate risk through asset and liability recomposition strategies or hedging strategies.

b. A description of the IRRBB management and mitigation strategy.

The Bank determines the IRRBB control strategy that is in line with the Bank's overall business strategy by taking into account the level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance approved by the Board of Directors. Meanwhile, the IRRBB mitigation strategy for changes in the economic value of capital (ΔEVE) is determined depending on the position duration (average repricing maturity) of assets and liabilities. On December 31, 2019, ΔEVE Bank of 46.46% was far below the regulator limit of 15%.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(ii) Risiko pasar (lanjutan)

3. Risiko suku bunga dalam *Banking Book* (lanjutan)

Analisa Kualitatif IRRBB (lanjutan)

c. Periodisasi perhitungan IRRBB bank, dan penjelasan mengenai tindakan spesifik yang digunakan bank untuk mengukur sensitivitas terhadap IRRBB.

Untuk memastikan IRRBB termonitor dengan baik, Bank melakukan perhitungan IRRBB untuk setiap posisi akhir bulan laporan dan melakukan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengukuran sensitivitas terhadap IRRBB dilakukan sesuai ketentuan dalam SE OJK No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018, antara lain sebagai berikut:

- Perhitungan IRRBB memperhitungkan keseluruhan posisi *Banking Book* dengan mengeluarkan ekuitas dan dikelompokkan berdasarkan posisi mata uang yang material bagi Bank.
- Perhitungan ΔEVE tidak memperhitungkan keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas.

d. Penjelasan mengenai skenario *shock* suku bunga dan skenario *stress* yang digunakan bank untuk mengestimasi perubahan *economic value* dan *earnings*.

Berdasarkan ketentuan regulator untuk ΔEVE, Bank menerapkan skenario:
- *Shock* suku bunga yang paralel ke atas (*parallel shock up*).
- *Shock* suku bunga yang paralel ke bawah (*parallel shock down*).
- *Shock* suku bunga yang melandai (*steepener shock*).
- *Shock* suku buga yang mendatar (*flattener shock*).
- *Shock* suku bunga jangka pendek yang meningkat (*short rates shock up*).
- *Shock* suku bunga jangka pendek yang menurun (*short rates shock down*).

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(ii) Market risk (continued)

3. Interest rate Risk in the Banking Book (continued)

IRRBB Qualitative Analysis (continued)

c. Periodization of bank IRRBB calculations, and an explanation of the specific actions used by banks to measure sensitivity to IRRBB.

To ensure that the IRRBB is properly monitored, the Bank performs an IRRBB calculation for each position at the end of the reporting month and reports according to applicable regulations. Measurement of sensitivity to IRRBB is carried out according to the provisions in the OJK SE No. 12 / SEOJK.03 / 2018 date August 21, 2018, among others, as follows:

- *IRRBB calculation takes into account the entire Banking Book position by issuing equity and grouped by material currency positions for the Bank.*
- *Calculation ΔEVE does not take into account the existence of commercial margins in cash flows and discounts on cash flows.*

d. An explanation of the interest rate shock scenario and the stress scenario used by banks to estimate changes in economic value and earnings.

Based on the regulatory provisions for ΔEVE, the Bank applies a scenario:
- *parallel interest rate shock upwards (parallel shock up).*
- *Parallel shock down interest rates (parallel shock down).*
- *Sloping interest shock (steepener shock).*
- *Horizontal tribal shock (flattener shock).*
- *Short-term shock on rising interest rates (short rates shock up).*
- *Shock short-term interest rates decrease (short rates shock down).*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(ii) Risiko pasar (lanjutan)

3. Risiko suku bunga dalam *Banking Book* (lanjutan)

Analisa Kualitatif IRRBB (lanjutan)

Untuk ∆NII:
- *Shock* suku bunga yang *parallel* ke atas (*parallel shock up*).
- *Shock* suku bunga yang *parallel* ke bawah (*parallel shock down*).

e. Asumsi permodalan yang berdampak signifikan dalam perhitungan.

Dalam perhitungan IRRBB, Bank menggunakan asumsi permodalan dengan pendekatan standar maupun acuan yang ditetapkan oleh regulator.

f. Penjelasan komprehensif mengenai asumsi utama pemodalan dan parametrik yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII.

Asumsi yang digunakan oleh Bank dalam menghitung IRRBB merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (*Interest Rate Risk in the Banking Book*) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas.

Analisa Kuantitatif IRRBB

a. Rata-rata *repricing maturity* yang ditetapkan untuk NMD.

Dalam menetapkan *repricing maturity* untuk NMD, bank melakukan pendekatan konservatif dengan memperhitungkan NMD kedalam penyesuaian suku bunga (*repricing maturity*) *overnight.*

b. *Repricing maturity* terpanjang yang diterapkan untuk NMD.

Bank melakukan pendekatan konservatif dengan memperhitungkan NMD kedalam penyesuaian suku bunga (*repricing maturity*) *overnight*.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(ii) Market risk (continued)

3. Interest rate Risk in the Banking Book (continued)

IRRBB Qualitative Analysis (continued)

For ∆NII:
- *parallel interest rate shock upwards (parallel shock up).*
- *Shock in parallel interest rates.*

e. Capital assumptions that have a significant impact on calculations.

In the IRRBB calculation, the Bank uses capital assumptions using standard approach and references that is set by the regulator.

f. A comprehensive explanation of the key assumptions of capitalization and parametric used in calculating ΔEVE and ΔNII.

The assumptions used by the Bank in calculating IRRBB refer to the Financial Services Authority Regulation which regulates the Implementation of Risk Management and Risk Measurement Standard Approach for Interest Rate Risk in the Banking Book and the Financial Services Authority Regulation which regulates the obligation to fulfill liquidity adequacy ratio.

IRRBB Quantitative Analysis

a. Average repricing maturity set for NMD.

In setting up maturity repricing for NMD, the Bank takes a conservative approach by calculating NMD into maturity repricing overnight.

b. Longest repricing maturity applied for NMD.

The Bank takes a conservative approach by calculating NMD into overnight repricing maturity.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(iii) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul dari ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajiban arus kas yang bersifat kontraktual baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang atau kewajiban yang diharuskan peraturan yang telah jatuh tempo tanpa mempengaruhi aktivitas harian dan menimbulkan kerugian yang tidak dapat diterima.

Tujuan utama manajemen risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.

Bank berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan *gap* likuiditas (*maturity gap* dan proyeksi arus kas) untuk mengantisipasi risiko likuiditas sedini mungkin dan juga mengendalikan risiko likuiditas khususnya pada saat kondisi stres. Bank juga telah menyusun *Contingency Funding Plan*, dan juga senantiasa memelihara kemampuannya dalam melakukan akses ke pasar uang dengan terus membina hubungan dengan bank koresponden. Untuk mendeteksi risiko likuiditas, Bank telah mempunyai Standar Prosedur Operasional *Liquidity Contigency Plan* (LCP).

Limit risiko likuiditas harus konsisten dan relevan dengan bisnis Bank, kompleksitas kegiatan usaha Bank, toleransi risiko, karakteristik produk, valuta, pasar dimana Bank tersebut aktif melakukan transaksi, data historis, tingkat profitabilitas dan modal yang tersedia.

Beberapa strategi yang dilakukan Bank untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain, adalah:

1. Komitmen dari pemegang saham Bank untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia dalam rangka pengendalian risiko likuiditas, sewaktu-waktu jika diperlukan;
2. Melakukan portofolio investasi ke arah investasi yang lebih likuid;
3. Mendorong bertumbuhnya jumlah investasi dana-dana murah atau nasabah kategori *low cost fund*;
4. Meningkatkan efektivitas pengelolaan *gap* likuiditas (*maturity gap*, proyeksi arus kas) untuk mengantisipasi risiko likuiditas sedini mungkin;
5. Meningkatkan kerja sama dengan bank lain agar dapat memanfaatkan fasilitas *interbank call money* maupun *repurchase* (repo) surat berharga *interbank*.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(iii) Liquidity risk

Liquidity risk is defined as the current and prospective risk to earnings or capital arising from the Bank's inability to meet its current and future contractual cash flows or regulatory obligations when they are due without affecting daily operations and incurring unacceptable losses.

The main objective of liquidity risk management is to minimize the possibility of the Bank's inability to obtain funding sources of cash flow.

The Bank has program to increase effectiveness of liquidity maturity gap management (maturity gap and the projected cash flows) to anticipate the liquidity risk as early as possible and also controls the liquidity risk during stressful conditions. The Bank also has developed a Contingency Funding Plan, and also maintain its ability to access the money market by maintaining relationship with correspondent banks. To detect liquidity risk, the Bank has established Standard Operating Procedures for Liquidity Contingency Plan (LCP).

Liquidity risk limit must be consistent and relevant to the Bank's business, the complexity of the Bank's business, risk tolerance, characteristics of the product, currency, markets in which the Bank has active transactions, historical data, the level of profitability and available capital.

The Bank carried out several strategies to manage the risks which, among others, are as follows:

1. *The Bank's shareholders commitment to comply with the provisions of Bank Indonesia in order to control liquidity risk, at any time if needed;*
2. *Conduct investments portfolio towards more liquid investments;*
3. *Encourage development of the number of low cost investment funds at reasonable price or low cost fund customers;*
4. *Increase effectivity on management of liquidity gap (maturity gap, cash flows projections) to anticipate liquidity risk as early as possible;*
5. *Develop cooperation with other banks in order to utilize the facilities of interbank call money and repurchase (repo) interbank securities.*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(iii) Risiko likuiditas (lanjutan)

Analisis jatuh tempo aset dan liabilitas (sebelum cadangan kerugian penurunan nilai) menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh temponya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(iii) Liquidity risk (continued)

The maturity analysis of assets and liabilities (before allowance for impairment losses) by maturity groups based on the remaining period until the maturity date as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	2019						
	Kurang dari atau sampai dengan 1 bulan/ *Less than 1 month or up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan/ *More than 3 months up to 6 months*	Lebih dari 6 bulan sampai dengan 12 bulan/ *More than 6 months up to 12 months*	Lebih dari 12 bulan/ *More than 12 months*	Total	
Aset							***Assets***
Kas	110.308	-	-	-	-	110.308	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	496.757	-	-	-	-	496.757	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	523.545	-	-	-	-	523.545	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	462.718	-	-	-	-	462.718	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga	139.410	253.422	194.980	96.530	3.535.520	4.219.862	*Marketable securities*
Tagihan derivatif	2.645	-	-	-	-	2.645	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	380.043	589.552	753.318	1.088.425	3.434.653	6.245.991	*Loans*
Tagihan akseptasi	-	6.171	16.835	512	-	23.518	*Acceptance receivables*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	19.332	10.350	5.786	9.426	84.240	129.134	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	-	-	-	-	15.905	15.905	*Other assets*
Total aset	**2.134.758**	**859.495**	**970.919**	**1.194.893**	**7.070.318**	**12.230.383**	***Total assets***
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	156.145	-	-	-	-	156.145	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	1.870.898	5.791.892	4.051.870	538.978	552.594	12.806.232	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	1.163.710	303.670	355.550	13.423	9.635	1.845.988	*Deposits from other banks*
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	88.001	-	-	-	-	88.001	*Securities sold under repurchase agreement*
Liabilitas akseptasi	-	2.101	-	-	-	2.101	*Acceptance payables*
Bunga yang masih harus dibayar	65.086	-	-	-	-	65.086	*Accrued interest expenses*
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	230.573	-	-	-	-	230.573	*Accrued expenses and other liabilities*
Pinjaman subordinasi	-	-	-	-	400.000	400.000	*Subordinated loan*
Total liabilitas	**3.574.413**	**6.097.663**	**4.407.420**	**552.401**	**962.229**	**15.594.126**	***Total liabilities***
Aset (liabilitas) - neto	**(1.439.655)**	**(5.238.168)**	**(3.436.501)**	**642.492**	**6.108.089**	**(3.363.743)**	***Assets (liabilities) - net***

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(iii) Risiko likuiditas (lanjutan)

Analisis jatuh tempo aset dan liabilitas (sebelum cadangan kerugian penurunan nilai) menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh temponya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut (lanjutan):

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(iii) Liquidity risk (continued)

The maturity analysis of assets and liabilities (before allowance for impairment losses) by maturity groups based on the remaining period until the maturity date as of December 31, 2019 and 2018 are as follows (continued):

	2018						
	Kurang dari atau sampai dengan 1 bulan/ *Less than 1 month or up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan/ *More than 3 months up to 6 months*	Lebih dari 6 bulan sampai dengan 12 bulan/ *More than 6 months up to 12 months*	Lebih dari 12 bulan/ *More than 12 months*	Total	
Aset							***Assets***
Kas	110.105	-	-	-	-	110.105	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	803.124	-	-	-	-	803.124	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	250.330	-	-	-	-	250.330	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	649.905	-	-	-	-	649.905	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga	288.153	198.834	-	193.215	2.882.536	3.562.738	*Marketable securities*
Tagihan derivatif	11.324	-	-	-	-	11.324	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	2.512.767	1.381.277	1.084.157	573.760	4.707.094	10.259.055	*Loans*
Tagihan akseptasi	613.003	2.626	33.502	-	-	649.131	*Acceptance receivables*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	25.409	9.004	7.053	3.659	57.867	102.992	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	-	-	-	9.343	6.701	16.044	*Other assets*
Total aset	**5.264.120**	**1.591.741**	**1.124.712**	**779.977**	**7.654.198**	**16.414.748**	***Total assets***
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	63.775	-	-	-	-	63.775	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	1.954.795	7.168.699	2.861.852	530.092	733.167	13.248.605	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	826.463	417.553	199.540	6.423	461.625	1.911.604	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	640	-	-	-	-	640	*Derivative payables*
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	532.005	-	-	-	-	532.005	*Securities sold under repurchase agreement*
Liabilitas akseptasi	631	2.626	13.289	-	-	16.546	*Acceptance payables*
Bunga yang masih harus dibayar	61.431	-	-	-	-	61.431	*Accrued interest expenses*
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	238.337	-	-	-	-	238.337	*Accrued expenses and other liabilities*
Pinjaman subordinasi	-	-	-	-	143.800	143.800	*Subordinated loan*
Obligasi konversi	-	-	-	-	215.700	215.700	*Convertible bonds*
Total liabilitas	**3.678.077**	**7.588.878**	**3.074.681**	**536.515**	**1.554.292**	**16.432.443**	***Total liabilities***
Aset (liabilitas) - neto	**1.586.043**	**(5.997.137)**	**(1.949.969)**	**243.462**	**6.099.906**	**(17.695)**	***Assets (liabilities) - net***

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(iv) Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko yang timbul dari ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan faktor manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang akan mempengaruhi operasional Bank.

Bank menerapkan manajemen risiko operasional dengan sasaran memastikan bahwa Bank telah melakukan proses manajemen risiko yang meliputi *risk identification, risk assessment, risk evaluation, risk mitigation* serta dilakukan *monitoring* dan *reporting* atas pelaksanaannya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan akhir memaksimalkan *benefit* dari suatu produk/layanan atau proses transaksi/aktivitas dengan potensi risiko operasional yang telah diperhitungkan.

Pengelolaan risiko operasional ditujukan untuk meningkatkan budaya sadar risiko dari tiap unit kerja, sehingga dapat menurunkan frekuensi dan dampak dari suatu kerugian. Bentuk pengelolaan risiko operasional yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap adanya produk ataupun aktivitas baru, Bank selalu melakukan kajian risiko sesuai dengan amanat dari regulator.
2. Melakukan peninjauan ulang dan penyempurnaan atas *Standard Operating Procedure* masing-masing unit kerja secara berkala.
3. Memastikan ketersediaan *Disaster Recovery Plan* (DRP) yang diuji secara berkala sebagai antisipasi jika terjadi gangguan IT.
4. Pengelolaan risiko operasional juga dilakukan dengan memperkuat keamanan dan keandalan teknologi informasi, sehingga kegagalan sistem maupun *human error* dapat ditekan.
5. Melakukan peningkatan pada IT *Security System* untuk seluruh sistem yang ada pada Bank.
6. Melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem yang digunakan untuk perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai maupun biaya diamortisasi atas provisi sesuai PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(iv) Operational risk

Operational risk is the risk that arise from the malfunction and/or inadequacy of internal proccess, human errors, system failure, or external problem affecting the operations of the Bank.

The Bank implements operational risk management with the goal of ensuring that it has performed a risk management process that includes risk identification, risk assessment, risk evaluation, risk mitigation and performed monitoring and reporting on its implementation. It is done with the ultimate goal to maximize the benefits of a product/service or transaction/activity process with the potential operational risks are being considered.

Operational risk management is being addressed in order to increase a culture of risk awareness of each working unit, so it can reduce the frequency and impact of a loss. The operational risk management being performed is as follows:

1. *On each new product or activity, the Bank is performing the risk assessment in accordance with the requirement of the regulators.*
2. *Conducting a periodic review and improvement of the Standard Operating Procedures of each working unit on a regular basis.*
3. *Ensuring the availability of the Disaster Recovery Plan (DRP) that is being tested periodically in case of IT disruption.*
4. *Operational risk management is also being supported by strengthening the security and reliability of information technology, so that the system failure and human error can be reduced.*
5. *Increasing the IT Security System for the entire system in the Bank.*
6. *Developing and improving the system that is used for the calculation of allowance for impairment losses and amortized cost of provision in accordance with PSAK 50, PSAK 55 and PSAK 60.*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(iv) Risiko operasional (lanjutan)

Pengelolaan risiko operasional ditujukan untuk meningkatkan budaya sadar risiko dari tiap unit kerja, sehingga dapat menurunkan frekuensi dan dampak dari suatu kerugian. Bentuk pengelolaan risiko operasional yang telah dilakukan sebagai berikut (lanjutan):

7. Melakukan penetapan batas kewenangan dalam melakukan transaksi operasional.
8. Meningkatkan fungsi pengawasan internal melalui *Internal Audit Division* (IAD) dan *Anti Fraud* sebagai upaya memperkuat sistem pengendalian internal.
9. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan frekuensi pelatihan internal maupun eksternal di bidang perkreditan, pemasaran produk dan motivasi kerja.
10. Melakukan identifikasi kejadian risiko yang terjadi di cabang serta memiliki dampak kerugian, maka pemantauan dilakukan menggunakan *Operational Risk Report.*
11. Melakukan pencatatan atas data kerugian, dimana data tersebut digunakan sebagai salah satu parameter dalam pengukuran Profil Risiko Operasional.
12. Melakukan *Risk and Control Self-Assessment* (RCSA) yang merupakan metodologi untuk identifikasi sumber-sumber risiko, yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko, memantau tren tingkat risiko, serta mengendalikan dan mitigasi risiko. Pelaksanaan identifikasi melalui RCSA tersebut akan diterapkan pada seluruh unit kerja.
13. Meningkatkan fungsi *Quality Assurance* baik di Kantor Cabang maupun di Kantor Pusat untuk mengoptimalkan *internal control* di *second line of defense* serta memastikan pelaksanaan aktivitas operasional dan perkreditan berjalan sesuai dengan Kebijakan/SOP Bank.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(iv) Operational risk (continued)

Operational risk management is being addressed in order to increase a culture of risk awareness of each working unit, so it can reduce the frequency and impact of a loss. The operational risk management being performed is as follows (continued):

7. *Setting-up of limit of authority in banking operational transactions.*
8. *Improving the internal control functions through the Internal Audit Division (IAD) and Anti Fraud to strengthen the internal control system.*
9. *Improving the quality of human resources by developing the frequency of internal and external training in the function of credit, marketing products and motivational work.*
10. *Identifying of the risk events that may occur in branches resulting to losses and then the monitoring is performed by using the Operational Risk Report.*
11. *Maintaining the record of loss data, where the data is used as one of the parameters in the measurement of Operational Risk Profile.*
12. *Performing the Risk and Control Self-Assessment (RCSA), a methodology for identifying the sources of risk, which is used to measure the level of risk, monitor the level of trend of risk, as well as controlling and mitigating risks. Implementation of identification through the RCSA is applied to all working units.*
13. *Improve the Quality Assurance function both at Branch Offices and at Headquarters to optimize internal control in the second line of defense and ensure the implementation of operational and credit activities in accordance with Bank Policies/SOPs.*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(iv) Risiko operasional (lanjutan)

Bank membentuk tim *Bussiness Continuity Plan* (BCP), dimana tim tersebut memiliki tugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan BCP sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Bank. Pelaksanaan BCP itu sendiri mempunyai tujuan untuk meminimalkan risiko, menangani dampak gangguan/bencana dan proses pemulihan agar kegiatan operasional Bank dan pelayanan kepada nasabah tetap dapat berjalan. Selain itu, Bank juga telah dilengkapi dengan Kebijakan maupun *Standard Operating Procedure* dan kebijakan BCP. Bank telah melakukan penyempurnaan BCP dengan reviu *Business Impact Analysis* (BIA) sesuai dengan *business process* dan telah melakukan sosialisasi dan uji coba BCP ke seluruh cabang dengan simulasi antara lain bencana kebakaran dan dilanjutkan melakukan reviu Kebijakan dan *Standard Operating Procedure*, serta reviu Prosedur Alternatif (*Contingency Plan*).

Bank telah melakukan penyempurnaan BCP dengan reviu *Business Impact Analysis* (BIA) sesuai dengan *business process* dan telah melakukan uji coba BCP minimal satu kali setahun serta sosialisasi BCP ke seluruh cabang. Uji coba BCP antara lain bencana kebakaran di Kantor Pusat dengan penanganan bencana serta pemulihan di BCP *Site*. Selain itu juga melakukan reviu Kebijakan dan *Standard Operating Procedure*, serta reviu Prosedur Alternatif (*Contingency Plan*).

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(iv) Operational risk (continued)

The Bank has setup a Business Continuity Plan (BCP) team, where the team has duties to coordinate the implementation of the BCP in accordance with the requirements and conditions of the Bank. The implementation of BCP has the objectives to minimize the risk, to handle the impact of disruption/disaster and recovery process so the operational activities of the Bank and services to customers are running continuously. In addition, the Bank is also equipped with Standard Operating Procedures and Policy of BCP. Bank has improved its BCP by reviewing Business Impact Analysis (BIA) in accordance with the business process and has socialized and tested the BCP to the entire branches, such as, fire disaster simulation and continued with the review of Policies and Standard Operating Procedures, as well as the Review of Alternative Procedures (Contingency Plan).

The Bank has improved the BCP with a Business Impact Analysis (BIA) review in accordance with the business process and has conducted a BCP trial at least once a year as well as BCP socialization to all branches. BCP trials include fire disasters at the Head Office with disaster management and recovery at the BCP Site. It also reviews the Policy and Standard Operating Procedure, as well as the Review of Alternative Procedures (Contingency Plan).

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(v) Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan pengikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Sebagai sebuah perusahaan yang berdiri dalam yuridiksi hukum Indonesia, Bank harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia selaku regulator industri perbankan di Indonesia dan instansi berwenang lainnya terkait dengan Bank. Selain itu, Bank juga harus mengikuti segala bentuk peraturan perundangan yang berlaku di masyarakat baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Bank. Kegagalan Bank dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku dapat mengakibatkan pada timbulnya tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada Bank.

Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan cara melakukan penelaahan kembali dokumen hukum, perjanjian maupun kontrak-kontrak dengan pihak ketiga. Selain itu, juga dilakukan pendataan atas kasus-kasus hukum yang terjadi dan telah dikelola oleh Divisi C*orporate Legal and Litigation*. Penanganan kasus hukum disusun berdasarkan skala prioritas dan seluruh perkembangannya terpantau dengan baik dan selalu dilaporkan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti melalui penyelesaian yang mengandung potensi risiko hukum paling sedikit. Selain itu, untuk melengkapi Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur di bidang Hukum, Divisi *Corporate Legal and Litigation* telah melengkapi dengan membuat Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur mengenai produk, *advice and policy*, litigasi dan kebijakan hukum Bank.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(v) Legal risk

Legal risk is the risk related to legal claims and/or weakness in the legal aspect, such weakness in legal aspect is caused, among others, by the lack of the supporting legislation or weakness of the contracts such as incomplete requirements for a valid contract and imperfect document contract.

As an entity that is established in the jurisdiction of the law of Indonesia, the Bank shall always be subjected to all the regulations issued by Financial Services Authority and Bank Indonesia as the regulator of the banking industry in Indonesia and other authorities related to the Bank. In addition, the Bank must also comply with any regulations in society that is relevant either directly or indirectly to its business activities. The Bank's incompliance to the regulation may result in the claim or lawsuits that will be addressed to the Bank.

Legal risk management is performed by reviewing the legal documents, agreements and contracts with third parties. Further more, it also performed an assessment of legal cases that occured and has been managed by the Corporate Legal and Litigation Division. The legal cases handling have been prepared on the priority basis and the progress is well monitored and reported to the management to be followed up through a completion which contains less potential legal risk. In addition, to complete the Legal Policy and Standard Operating Procedure, the Corporate Legal and Litigation Division has fit up the policy by establishing the Policies and Standard Operating Procedure regarding the products, advice and policy, litigation and legal policy of the Bank.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(v) Risiko hukum (lanjutan)

Untuk memitigasi risiko hukum yang mungkin timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis, Bank memiliki Divisi *Corporate Legal and Litigation*. Divisi tersebut memiliki peranan antara lain:

1) Melakukan analisa hukum atas produk dan/atau aktivitas baru serta membuat standar dokumen hukum yang terkait dengan produk dan/atau aktivitas tersebut;
2) Memberikan analisa/advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi;
3) Memberikan advis atas eksposur hukum akibat perubahan ketentuan atau peraturan;
4) Memeriksa segala perjanjian yang akan dibuat antara Bank dengan pihak ketiga;
5) Melakukan pemeriksaan berkala atas perjanjian yang telah dibuat; dan
6) Memantau risiko hukum yang ada di seluruh cabang Bank.

Dengan adanya divisi tersebut, maka Bank memiliki kebijakan hukum dan standar dokumen hukum baku yang terkait dengan produk atau fasilitas perbankan yang ditawarkan oleh Bank kepada masyarakat, dimana kebijakan hukum dan standar dokumen hukum dimaksud dibuat dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan kepentingan aspek yuridis dari Bank. Selain itu, Divisi *Corporate Legal and Litigation* Bank juga memiliki fungsi litigasi yang salah satu tugasnya adalah menangani setiap permasalahan hukum yang terkait dengan litigasi agar risiko hukum yang mungkin timbul dapat diminimalisasi.

Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan memantau perkembangan kasus-kasus hukum yang terjadi dan mengambil pelajaran dari kasus-kasus tersebut. Penanganan kasus hukum yang dilakukan pada Bank senantiasa memperhitungkan potensi kerugian baik atas penyelesaian kasus secara musyawarah mufakat/damai ataupun melalui jalur pengadilan. Bank juga memberikan perhatian khusus atas kasus hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian secara signifikan.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(v) Legal risk (continued)

To mitigate the legal risks that may arise from lawsuit or juridical weakness, the Bank has a Corporate Legal and Litigation Division. This division has the following roles:

1) Conducts legal analysis on the new product and/or activities as well as creating a standard legal documents related to the product and/or activities;
2) Provide analysis/legal advice to all employees at every level of the organization;
3) Provide advice on the legal exposure due to changes in rule or regulation;
4) Examine any agreements that will be made between the Bank and third parties;
5) Conduct periodic inspections on the agreement that has been made; and
6) Monitor the legal risks in the overall Bank's branches.

Through this division, the Bank has legal policies and standard general legal documents related to the product or banking facilities offered by the Bank to the community, where such legal policy and standard general legal documents are created with reference to the provisions of applicable laws and considering the interest of the juridical aspects of the Bank. In addition, the Bank's Corporate Legal and Litigation Division has the litigation function by handling all legal issues related to litigation in order to minimize legal risks that may arise.

The legal risk is also conducted by monitoring the development of legal cases and take lessons learned principle from those cases. The management of legal cases conducted by the Bank at all time calculates potential loss, either through settlement or court. The Bank also pays special attention to legal cases which potentially may create significant loss to the Bank.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(vi) Risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Kegagalan Bank dalam menjaga reputasinya di mata masyarakat dapat menimbulkan pandangan maupun persepsi negatif masyarakat terhadap Bank. Apabila risiko ini dihadapi oleh Bank, maka dalam waktu singkat dapat terjadi hilangnya kepercayaan nasabah terhadap Bank yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap pendapatan usaha dan *volume* aktivitas Bank.

Pengelolaan risiko reputasi dilakukan melalui pemantauan terhadap publikasi media yang bekerjasama dengan jasa pihak ketiga. Selain itu, Bank juga melakukan pemantauan terhadap keluhan nasabah guna menangani keluhan dengan segera, serta melakukan optimalisasi fungsi *call center* dalam penanganan keluhan nasabah.

Dalam upaya pelaksanaan manajemen risiko, Bank secara aktif menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan aktivitas-aktivitas sosial lainnya, *public expose*, membangun relasi dengan media dan *gathering* dengan nasabah.

Bank meyakini bahwa setiap aspek efektivitas pelaksanaan manajemen Bank yang baik (termasuk manajemen risiko dan sistem pengendalian internal) dalam kaitannya dengan *Good Corporate Governance* (GCG) akan memperbaiki reputasi.

Reputasi dan dukungan pemegang saham baru secara profesional membantu manajemen dalam rangka meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan kinerja yang lebih baik dan program-program kerja yang berimplikasi langsung pada pengelolaan risiko reputasi.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(vi) Reputation risk

Reputation risks are the risks related to the decreasing level of stakeholder confidence arising from the negative perception of the Bank.

The Bank's failure to protect its reputation in the public's perception may result in negative view and also perception by the public towards the Bank. If the Bank faces this risk, in the short run the Bank may lose the customer's trust that will ultimately result in a negative impact to the Bank's income and activity's volume.

The management of reputation risk includes monitoring through media publication collaboration with third party services. In addition, the Bank also monitors customer complaints to handle complaints promptly, as well as to optimize the function of call center in the handling of customer complaints.

In implementation of risk management, the Bank is actively running its Corporate Social Responsibility and other social activities, public expose, building relationship with the media and conducting customer gatherings.

The Bank believes that every aspect of the effectiveness of its good management (including risk management and internal control systems) in relation to Good Corporate Governance (GCG) will improve its reputation.

The reputation and professional support from new shareholder assists management to improve the reputation and public trust through better performance improvement and work programs that directly implicates the risk management reputation.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(vii) Risiko stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Tujuan dari manajemen risiko untuk risiko stratejik adalah untuk memastikan bahwa dalam proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan dalam implementasi strategi dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi sebuah institusi keuangan terdepan di Indonesia, Bank membutuhkan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Ketidakmampuan Bank dalam melakukan penyusunan strategi yang tepat dapat menimbulkan kegagalan bisnis Bank di masa yang akan datang.

Risiko ini juga mencakup kemampuan Bank dalam mengembangkan daya saing dan menciptakan keunggulan kompetitif Bank di tengah kompetisi perbankan yang semakin ketat. Ketidakmampuan Bank dalam menghadapi tantangan bisnis yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu akan mengakibatkan kegagalan bagi Bank untuk mencapai visi yang selama ini telah ditetapkan. Dalam jangka panjang, apabila risiko ini terus dihadapi oleh Bank, hal ini akan berdampak terhadap kelangsungan bisnis Bank. Oleh sebab itu, Bank telah melakukan beberapa langkah mitigasi.

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko ini dilakukan dengan cara:

a. Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2019 sampai dengan 2021 yang digunakan sebagai pedoman oleh manajemen.
b. Melakukan pemantauan atas kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ingin dicapai oleh Bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank tersebut.
c. *Planning Performance Division* dan *President Office Division* yang secara rutin melakukan pemantauan berkala (*performance review*) atas pencapaian kinerja dari tiap divisi dan Bank secara keseluruhan.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(vii) Strategic risk

Strategic risk is the risk due to inaccuracy in deciding and/or implementing a strategic decision as well as the failure in anticipating the changes in the business environment.

The purpose of risk management for strategic risk is to ensure that the process of risk management will minimize possible negative impacts of inaccurate implementation of the strategy and failure to anticipate changes in the business environment.

In order to grow and develop as one of the leading financial institutions in Indonesia, the Bank needs to adopt certain strategies to achieve such goals. The Bank's failure in formulating the right strategy may deteriorate the Bank's business in the future.

This risk also includes the Bank's ability to develop its competitiveness and to create a competitive excellence amidst the tight competition in the banking industry. The inability to cope with such business challenges which are constantly changing from time to time will lead to failure to accomplish specified vision. In the longer term, if the Bank faces such risks, it will affect the continuity of the Bank's operations. Therefore, the Bank has taken several mitigation steps.

Some steps taken to anticipate these risks are as follows:

a. Develop Bank's Business Plan for the year 2019 up to 2021 that will be used as a guideline by the management.

b. Monitor the financial performance by comparing the actual with target to be achieved by the Bank in accordance with the Bank's Business Plan.

c. Planning Performance Division and President Office Division that regularly performs periodic monitoring (performance review) on performance of each division and the Bank as a whole.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(vii) Risiko stratejik (lanjutan)

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko ini dilakukan dengan cara: (lanjutan)

d. Memperbaiki strategi yang ingin dicapai sesuai dengan perkembangan kondisi internal maupun eksternal, sehingga akan menjadi realistis dengan pencapaian tujuan Bank.

(viii) Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul ketika Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Jika risiko kepatuhan tidak dikelola dengan baik, berpotensi pada pengenaan denda, hukuman, atau rusaknya reputasi.

Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri perbankan, Bank diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia maupun Pemerintah. Selain itu, Bank juga wajib tunduk kepada beberapa ketentuan lainnya seperti: peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan yang mengatur Jasa Keuangan, Penjaminan Simpanan, Perseroan Terbatas dan Perpajakan.

Pada umumnya, risiko kepatuhan melekat pada sebuah perseroan terbatas yang terkait erat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, yang mengatur kewajiban Bank sebagai sebuah lembaga perbankan, seperti: risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM); Kualitas Aset Produktif; Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN); Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); Penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG); dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu. Ketidakmampuan Bank untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank dapat berdampak buruk terhadap kelangsungan usaha Bank.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(vii) Strategic risk (continued)

Some steps taken to anticipate these risks are as follows: (continued)

d. Revise the strategy to be achieved in accordance with the development of internal and external conditions, so it will be realistic with the achievement of the Bank's objectives.

(viii) Compliance risk

Compliance risk is the risk that arise when the Bank does not comply or implement current laws and regulations and other policies. If compliance risk is not well managed, it will lead to potential penalty charges, punishments, or damage to reputation.

In running the banking industry, the Bank is required to comply with the banking regulations issued by Bank Indonesia and the Government. In addition, the Bank is also required to comply with several other rules such as: Financial Services Authority Regulation and Regulation on Deposit Guarantee Program, Limited Liability Company and Taxation.

In general, the compliance risk is embedded in the limited liability company which is related to the prevailing laws and regulations and other regulations, which regulate the Bank's responsibility as a banking institution, such as: credit risks related to Capital Adequacy Ratio (CAR) regulations; Earning Assets Quality; Allowance for Impairment Losses (CKPN); Legal Lending Limit (LLL); Good Corporate Governance (GCG); and other risks related to certain regulations. The inability of the Bank to follow and comply with all laws and regulations related to the Bank's business activities may affect the continuity of the Bank.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(viii) Risiko kepatuhan (lanjutan)

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko ini adalah dengan:

a. Menyusun Kebijakan Kepatuhan dan Kebijakan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
b. Pemantauan terhadap pengkinian data nasabah dan penerapan *single Customer Identity File (CIF)* serta penanganan rekening pasif/dorman.
c. Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT) sesuai dengan amanat dalam Peraturan Bank Indonesia, dimana Bank secara rutin melakukan sosialisasi kepada unit-unit terkait melalui Divisi Kepatuhan.

d. Untuk mendukung Rezim Anti Pencucian Uang, Bank secara konsisten telah melakukan analisis dan menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
e. Peningkatan fungsi Divisi Kepatuhan untuk melakukan uji kepatuhan atas setiap regulasi, baik ketentuan internal maupun eksternal.
f. Penyusunan Laporan Kepatuhan untuk kepentingan eksternal dan internal Bank.
g. Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa melakukan pemantauan secara aktif terhadap tingkat kepatuhan Bank melalui laporan yang disampaikan secara berkala oleh Divisi Kepatuhan, seperti Laporan Pemantauan Kepatuhan, Laporan Uji Kepatuhan dan Laporan Pelaksanaan GCG.
h. Memantau pelaksanaan proses pemberian pinjaman dan proses pemulihan atas aset ataupun pinjaman bermasalah, untuk memastikan bahwa pelaksanaan dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur internal dan eksternal yang berlaku.
i. Memastikan bahwa setiap penerbitan produk dan aktivitas baru dijalankan sesuai dengan ketentuan internal dan eksternal yang berlaku serta mengingatkan kepada unit kerja terkait agar melakukan analisis dan reviu secara berkala terkait dengan *costs* dan *benefits,* serta aspek risiko yang mungkin muncul dari penerbitan produk dan aktivitas baru tersebut.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(viii) Compliance risk (continued)

The steps to be taken to anticipate these risks are as follows:

a. Develop a Compliance Policy and Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT).
b. Monitor update of customer data and implementation of a single Customer Identity File (CIF) as well as passive/dormant account management.
c. Implement the Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) Program in accordance with the mandate in the Regulation of Bank Indonesia, where the Bank routinely socialize the regulation to the relevant units through the Compliance Division.
d. Support the Anti-Money Laundering Regime, the Bank has consistently analyzed and delivered the Suspicious Transaction Reports and Cash Transaction Reports to the Financial Transaction Reports and Analysis Center.

e. Improve the function of Compliance Division to conduct compliance tests on any regulations, both internal and external.
f. Prepare Compliance Reports for the needs of external and internal of the Bank.
g. The Boards of Commissioners and Directors actively monitors the compliance level of the Bank through periodic reports that are submitted by the Compliance Division which include Compliance Monitoring Report, Fit and Proper Test and Implementation Report of GCG.
h. Monitor the implementation of lending process and the recovery of assets or Non-Performing Loans (NPL), to ensure that the implementation is executed in accordance with the applicable internal and external policies and procedures.

i. Ensure each issuance of new products and the activities are carried out in accordance with internal and external policies and reminds the related work unit to perform analysis and review regularly the related costs and benefits and aspects of risk that may arise from the issuance of new products and activities.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil Risiko (lanjutan)

(viii) Risiko kepatuhan (lanjutan)

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko ini adalah dengan (lanjutan):

j. Memantau kepatuhan terhadap pelaksanaan pelaporan kepada pihak regulator secara akurat dan tepat waktu.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk Profile (continued)

(viii) Compliance risk (continued)

The steps to be taken to anticipate these risks are as follows (continued):

j. Monitor the compliance on reporting to the regulator accurately and on a timely basis.

46. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan disajikan per kategori dari instrumen keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The tables below summarize the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities presented per category of financial instruments. The fair values disclosed are based on relevant information available as of December 31, 2019 and 2018 and not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after this date.

	2019		2018		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas	110.308	110.308	110.105	110.105	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	496.757	496.757	803.124	803.124	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain - neto	522.802	522.802	249.546	249.546	*Current accounts with other banks - net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	462.718	462.718	649.905	649.905	*Placements with Bank Indonesia and other banks - net*
Surat-surat berharga - neto	4.219.862	4.219.862	3.562.738	3.562.738	*Marketable securities - net*
Tagihan derivatif	2.645	2.645	11.324	11.324	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan - neto	6.132.883	6.132.883	10.129.117	10.129.117	*Loans - net*
Tagihan akseptasi - neto	23.518	23.518	102.188	102.188	*Acceptance receivables - net*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	129.134	129.134	102.992	102.992	*Accrued interest income*
Aset lain-lain	15.905	15.905	16.044	16.044	*Other assets*
Total	**12.116.532**	**12.116.532**	**15.737.083**	**15.737.083**	***Total***
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Liabilitas segera	156.145	156.145	63.775	63.775	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	12.806.232	12.806.232	13.248.605	13.248.605	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	1.845.988	1.845.988	1.911.604	1.911.604	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	-	-	640	640	*Derivative payables*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	88.001	88.001	532.005	532.005	*Securities sold under repurchase agreement*
Liabilitas akseptasi	2.101	2.101	16.546	16.546	*Acceptance payables*
Bunga yang masih harus dibayar	65.086	65.086	61.431	61.431	*Accrued interest expenses*
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	230.573	230.573	238.337	238.337	*Accrued expenses and other liabilities*
Pinjaman subordinasi	400.000	400.000	143.800	143.800	*Subordinated loan*
Obligasi konversi	-	-	215.700	215.700	*Convertible bonds*
Total	**15.594.126**	**15.594.126**	**16.432.443**	**16.432.443**	***Total***

46. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, pendapatan bunga yang masih akan diterima dan aset lain-lain.

Nilai tercatat dari giro pada Bank Indonesia dan bank lain dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Estimasi nilai wajar pendapatan bunga yang masih akan diterima ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah 1 (satu) tahun, nilai tercatat dari pendapatan bunga yang masih akan diterima adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Nilai tercatat aset lain-lain kecuali setoran jaminan adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar karena memiliki tenor kurang dari 1 (satu) tahun. Nilai wajar setoran jaminan diasumsikan sama dengan nilai terutangnya karena memiliki persyaratan pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk dikembalikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan.

b. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah 1 (satu) tahun, nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

c. Surat berharga, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali dan obligasi konversi

Nilai wajar untuk surat berharga, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali dan obligasi konversi ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/ pedagang efek (*dealer*).

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

a. Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, accrued interest income and other assets.

The carrying amount of current accounts with Bank Indonesia and other banks with floating rate is a reasonable approximation of fair value.

The estimated fair value of accrued interest income is based on discounted cash flows using prevailing money market interest rates for debts with similar credit risk and remaining maturity. Since the maturity is less than 1 (one) year, the carrying amount of accrued interest income is a reasonable approximation of fair value.

The carrying amount of other assets except security deposits is a reasonable approximation of fair value since the maturity is less than 1 (one) year. The fair value of security deposits are assumed to be the same as their original principal amounts since they have no fixed repayment terms although they are not expected to be settled within 12 (twelve) months after the reporting period.

b. Placements with Bank Indonesia and other banks

The carrying amount of placements with floating rate is a reasonable approximation of fair value.

The estimated fair value of fixed interest bearing deposits is based on discounted cash flows using prevailing money market interest rates for debts with similar credit risk and remaining maturity. Since the maturity is less than 1 (one) year, the carrying amount of fixed interest bearing deposits is a reasonable approximation of fair value.

c. Marketable securities, securities sold under repurchase agreement and convertible bonds

The fair value for marketable securities, securities sold under repurchase agreement and convertible bonds is based on market prices or broker/dealer price quotations.

46. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

d. Pinjaman yang diberikan dan tagihan akseptasi

Portofolio pinjaman Bank secara umum terdiri dari pinjaman yang diberikan dan tagihan akseptasi dengan suku bunga mengambang dan pinjaman yang diberikan dengan jangka pendek dengan suku bunga tetap. Pinjaman yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortized cost*.

Nilai tercatat dari pinjaman yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan nilai tercatat atas pinjaman jangka pendek dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

e. Instrumen derivatif

Nilai wajar atas instrumen derivatif yang dinilai menggunakan teknik penilaian dengan menggunakan komponen yang dapat diamati di pasar terutama adalah *swap* suku bunga, *swap* mata uang dan kontrak pertukaran mata uang. Teknik penilaian yang paling banyak digunakan meliputi model penilaian *forward* dan *swap* yang menggunakan perhitungan nilai kini. Model tersebut menggabungkan berbagai komponen yang meliputi kualitas kredit dari *counterparty*, nilai spot dan kontrak berjangka serta kurva tingkat suku bunga.

f. Liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, bunga masih harus dibayar, beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain.

Estimasi nilai wajar simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga, adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut dibayarkan.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan dengan tingkat suku bunga tetap, bunga masih harus dibayar, beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah 1 (satu) tahun, nilai tercatat dari simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, bunga masih harus dibayar, beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

d. Loans and acceptance receivables

The Bank's loan portfolio primarily consists of loans and acceptance receivables with floating interest rate and short-term loans with fixed interest rate. Loans are stated at amortized cost.

The carrying amounts of floating rate loans and short-term fixed rate loans are the reasonable approximation of their fair values.

e. Derivatives instrument

The fair values of derivatives instrument are valued by valuation techniques using components which can be observed in the market, primarily are interest rate swaps, currency swaps and currency exchange contracts. Most widely used valuation techniques include forward and swap valuation models which use the present value calculation. The models incorporate various components which include the credit quality of the counterparty, spot value and future contracts and interest rate curve.

f. Obligations due immediately, deposits from customers, deposits from other banks, accrued interest expenses, accrued expenses and other liabilities.

The estimated fair value of deposits with no stated maturity, which includes non-interest bearing deposits, is the amount repayable on demand.

The estimated fair value of fixed interest bearing deposits, accrued interest expenses, accrued expenses and other liabilities not quoted in an active market is based on discounted cash flows using interest rates for new debts with similar remaining maturity. Since the maturity is less than 1 (one) year, the carrying amount of deposits from customers, deposits from other banks, accrued interest expenses, accrued expenses and other liabilities is a reasonable approximation of fair value.

46. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

g. Pinjaman subordinasi

Nilai wajar dari pinjaman subordinasi dihitung menggunakan arus kas yang didiskonto berdasarkan suku bunga pasar.

Tabel di bawah ini menunjukkan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar yang dikelompokkan berdasarkan hierarki nilai wajar:

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

g. Subordinated loan

The fair value of subordinated loan is calculated using discounted cash flows based on market rate.

The tables below show the financial instruments measured at fair value grouped based on fair value hierarchy:

	2019				
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/*Fair value*			
		Level 1	*Level 2*	*Level 3*	
Aset keuangan					***Financial assets***
Nilai wajar melalui laba rugi					*Fair value through profit or loss*
Surat-surat berharga	519.640	519.640	-	-	*Marketable securities*
Tagihan derivatif	2.645	-	2.645	-	*Derivative receivables*
Tersedia untuk dijual					*Available-for-sale*
Surat-surat berharga	3.700.222	3.700.222	-	-	*Marketable securities*
Total	**4.222.507**	**4.219.862**	**2.645**	**-**	***Total***

	2018				
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/*Fair value*			
		Level 1	*Level 2*	*Level 3*	
Aset keuangan					***Financial assets***
Nilai wajar melalui laba rugi					*Fair value through profit or loss*
Surat-surat berharga	484.265	484.265	-	-	*Marketable securities*
Tagihan derivatif	11.324	-	11.324	-	*Derivative receivables*
Tersedia untuk dijual					*Available-for-sale*
Surat-surat berharga	3.078.473	3.078.473	-	-	*Marketable securities*
Total	**3.574.062**	**3.562.738**	**11.324**	**-**	***Total***
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Nilai wajar melalui laba rugi					*Fair value through profit or loss*
Liabilitas derivatif	640	-	640	-	*Derivative payables*
Total	**640**	**-**	**640**	**-**	***Total***

47. MANAJEMEN MODAL

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, nasabah dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham dan keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

Manajemen menggunakan rasio permodalan yang diwajibkan regulator untuk memantau permodalan Bank. Pendekatan Otoritas Jasa Keuangan untuk pengukuran tersebut terutama berdasarkan pengawasan atas hubungan antara kecukupan modal dengan ketersediaan modal.

47. CAPITAL MANAGEMENT

The Bank's capital management objective is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investors, depositors, customers and market confidence. In managing its capital, the Bank consider factors such as providing optimal capital rate of return to shareholders and safety resulting from a good capital position.

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital. The Financial Service Autorities approach to such measurement is primarily based on monitoring the correlation of the capital adequacy to availability of capital resources.

47. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) adalah rasio modal terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, sejak akhir bulan September 2016, Cadangan Tujuan tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai komponen Modal Bank. Peraturan ini juga mengatur tentang pemenuhan rasio modal inti (*Tier* 1) paling rendah sebesar 6% dan rasio modal inti utama (*Common Equity Tier* 1) paling rendah sebesar 4,5%.

Bank telah melakukan perhitungan kecukupan modal berdasarkan ketentuan OJK yang berlaku, dimana modal yang dimiliki diklasifikasikan dalam 2 (dua) *Tier* yaitu Modal *Tier* 1 dan Modal *Tier* 2.

a. Komposisi permodalan Bank

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

47. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

The Capital Adequacy Ratio (CAR) is the ratio of the Bank's capital over its Risk-Weighted Assets (RWA). In accordance with OJK Regulation No. 34/POJK.03/2016 amendments to the Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2016 concerning Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Banks and OJK Circular Letter No. 43/SEOJK.03/2016 on Transparency and Conventional Commercial Bank Report Publication, since the end of the September 2016, Specific Reserves can no longer be taken into account as a component of Bank's Capital. This regulation also stipulates requirement of Tier 1 ratio at a minimum of 6% and Common Equity Tier 1 ratio at a minimum of 4.5%.

The Bank calculates its capital adequacy requirements using the prevailing OJK regulation, where the regulatory capital is classified into 2 (two) Tiers, i.e., Tier 1 Capital and Tier 2 Capital.

a. Composition of the Bank's capital

As of December 31, 2019 and 2018, the Bank's Capital Adequacy Ratio which is calculated in compliance with Financial Services Authority's regulation is as follows:

	2019	2018	
Komponen modal			***Component of capital***
A. Modal inti			***A. Core capital***
Modal disetor	12.223.149	12.223.149	*Paid-in capital*
Cadangan tambahan modal	(11.289.895)	(11.416.808)	*Reserve for additional capital*
Modal inti tambahan	495.500	353.375	*Additional Tier I*
Total modal inti	1.428.754	1.159.716	*Total core capital*
B. Modal pelengkap			***B. Supplementary capital***
Cadangan umum penyisihan kerugian aset produktif	84.581	97.248	*General reserve of allowance for possible losses on earning assets*
Amortisasi berdasarkan jangka waktu	(80.000)	(14.380)	*Amortization based on time period*
Pinjaman subordinasi	400.000	543.800	*Subordinated loan*
Total modal pelengkap	404.581	626.668	*Total supplementary capital*
Total modal pelengkap yang diperhitungkan	404.581	626.668	*Total accounted supplementary capital*
Total modal inti dan modal pelengkap	1.833.335	1.786.384	*Total core capital and supplementary capital*
Total modal	**1.833.335**	**1.786.384**	***Total capital***
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit	11.500.543	11.746.022	*Risk Weighted Assets (RWA) for credit risk*
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko pasar	53.607	58.852	*Risk Weighted Assets (RWA) for market risk*
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko operasional	1.063.517	926.700	*Risk Weighted Assets (RWA) for operational risk*
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk risiko kredit dan risiko operasional	14,59%	14,10%	*Capital Adequacy Ratio for credit risk and operational risk*
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	14,53%	14,03%	*Capital Adequacy Ratio for credit risk, market risk and operational risk*
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	11,00%	11,00%	*Minimum Capital Adequacy Ratio Requirement*

47. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

a. Komposisi permodalan Bank (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan.

b. Alokasi permodalan

Pengalokasian permodalan untuk aktivitas bisnis dan operasional Bank merupakan tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Manajemen Risiko yang terkait dengan profil risiko Bank. Pengambilan keputusan atas alokasi modal dilakukan dalam rapat ALCO.

Pengalokasian modal untuk aktivitas bisnis dan operasional bertujuan untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal dengan rasio KPMM yang terjaga pada *level* yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank dan ketentuan regulasi perbankan.

47. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

a. Composition of the Bank's capital (continued)

As of December 31, 2019 and 2018, the Bank has complied with all capital requirements.

b. Capital allocation

The capital allocation for business activities and operations of the Bank is the duty and responsibility of the Risk Management Unit related to the Bank's risk profile. The capital allocation decisions were made in the ALCO meeting.

The capital allocation for business and operational activities is aimed to achieve an optimal level of income while the CAR is maintained at a predetermined level by the Bank's management and the provision of banking regulation.

48. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK

Sejak tahun 1998, Pemerintah menjamin liabilitas bank umum meliputi giro, tabungan, deposito berjangka dan *deposits on call*, obligasi, surat berharga, pinjaman antar bank, pinjaman yang diterima, *Letters of Credit*, akseptasi, *swap* mata uang dan liabilitas kontinjensi lainnya seperti bank garansi, *standby Letters of Credit*, *performance bonds* dan liabilitas sejenis selain yang dikecualikan dalam keputusan ini seperti obligasi subordinasi dan liabilitas kepada direksi, komisaris dan pihak berelasi dengan Bank.

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan Peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp 100 diubah menjadi maksimum Rp 2.000 dan tentang LPS, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, wajib menjadi peserta Penjaminan LPS. Berdasarkan hal tersebut, Bank merupakan Bank peserta penjaminan LPS. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sejak tanggal 13 Januari 2009.

Beban premi penjaminan Pemerintah yang dibayar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 27.797 dan Rp 21.804.

48. GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATION OF COMMERCIAL BANKS

Since 1998, the Government guarantees the obligations of commercial banks including demand deposits, savings deposits, time deposits and deposits on call, bonds, marketable securities, interbank borrowings, fund borrowings, Letters of Credit, acceptances, currency swap and other contingent liabilities such as bank guarantees, standby Letters of Credit, performance bonds and other kinds of liabilities other than those excluded in this regulation such as subordinated bonds and liabilities to board of directors, commissioners and related parties of the Bank.

On October 13, 2008, the President of the Republic of Indonesia issued the Government Regulation No. 66 Year 2008 regarding the amount of deposits guaranteed by LPS. Based on these regulations, the amount of deposits guaranteed for eac of the customers in one bank which was originally based on Law No. 24 Year 2004 and was set for a maximum of Rp 100 and was eventually changed to a maximum of Rp 2,000 and about the LPS, whereas any banks conducting business in the territory of the Republic of Indonesia, shall become participants of LPS. Accordingly, Bank is a participant of LPS. Based on the Law of the Republic of Indonesia No. 7 Year 2009, the Government Regulation in Lieu of Law regarding Indonesia Deposit Insurance Corporation has been determined into Law since January 13, 2009.

The Government guarantee premium paid for the years ended December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp 27,797 and Rp 21,804, respectively.

49. PINJAMAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA

Pada tanggal 12 Mei 1999, Bank Indonesia menyetujui untuk menunjuk Bank sebagai bank penyalur Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro (KPKM). Jumlah dana yang disepakati untuk disalurkan adalah sebesar Rp 2.197 dengan suku bunga KLBI sebesar 13% per tahun dan suku bunga KPKM kepada debitur sebesar 16% per tahun.

Jangka waktu KLBI adalah maksimum 6 (enam) tahun termasuk masa tenggang *(grace period)* selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 untuk kredit modal kerja.

Bank tidak menanggung risiko kredit atas penyaluran KPKM tersebut, namun Bank juga wajib untuk:

a. Menganalisa dan memeriksa pemenuhan persyaratan administrasi debitur;
b. Membuat perjanjian dengan debitur;
c. Menatausahakan KPKM;
d. Menerima pelunasan KPKM dan debitur dan meneruskannya kepada Bank Indonesia;
e. Menyampaikan laporan penyaluran dan pengembalian KPKM; dan
f. Membantu mengawasi penggunaan serta membantu menagih kembali KPKM.

Berdasarkan surat dari Bank ke Bank Indonesia No. 078/Mutiara/D/I/10 tanggal 27 Januari 2010 perihal rekonsiliasi saldo rekening pinjaman per tanggal 31 Maret 2010, tercatat saldo rekening pinjaman KLBI (ex PT Bank Pikko) yang jumlahnya adalah sebesar Rp 165 pada tanggal 31 Desember 2011 dengan keterangan semua debitur pinjaman bermasalah.

49. BANK INDONESIA LIQUIDITY LOAN

On May 12, 1999, Bank Indonesia agreed to appoint the Bank as the distributor for the Bank Indonesia Liquidity Loan (KLBI) for Small and Micro Business (KPKM). The amount of fund to be distributed was Rp 2,197 with KLBI interest rate at 13% per annum and KPKM interest rate to debtors at 16% per annum.

The maturity period of KLBI is for a maximum of 6 (six) years including 1 (one) year grace period or until December 31, 2004 for working capital loan.

The Bank does not bear credit risk from those KPKM distributions, but the Bank is obliged to:

a. Analyze and check the requirement of debtors administration;
b. Make agreement with the debtors;
c. Manage the administration of KPKM;
d. Receive KPKM payment from debtors and forward to Bank Indonesia;
e. Submit a report for the distribution and payments received for KPKM; and
f. Assist in monitoring the use of and recollection of KPKM.

Based on letter from the Bank to Bank Indonesia No. 078/Mutiara/D/I/10 on January 27, 2010 regarding reconciliation of outstanding loan as of March 31, 2010, the carrying outstanding loan of KLBI (ex PT Bank Pikko) amounted to Rp 165 as of December 31, 2011 with the status of all loans are non-performing.

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING

a. Proses Persidangan di Pengadilan Mauritius

Pada tanggal 27 Desember 2012, di Mahkamah Agung Mauritius (Divisi Komersial), First Global Funds Limited PCC ("FGFL") mengajukan klaim terhadap Bank untuk pembayaran kembali dugaan pinjaman dan bunga sebesar USD 18.292.131 bersama dengan bunga hingga tanggal pembayaran akhir dan Weston International Asset Recovery Co., Ltd. ("WIARCO") mengajukan klaim terhadap Bank dengan kasus bahwa Bank memiliki kewajiban untuk membayar WIARCO sebagai pemegang obligasi jumlah pokok di bawah *Mandatory Convertible Bond* (MCB) yang diduga dikeluarkan oleh Bank (dahulu PT Bank Century Tbk) pada 16 Juni 2006 dan 14 April 2008, masing-masing sebesar USD 15.000.000 (Catatan 25) dan USD 40.000.000, bunga yang masih harus dibayar sebesar USD 10.350.000 bersama dengan seluruh bunga hingga tanggal pembayaran akhir (secara bersama-sama disebut "Proses Hukum Mauritian 2013"). Bank tidak muncul dalam Proses Hukum Mauritian 2013. Pada tanggal 15 Februari 2013, Pengadilan Mauritius memberikan keputusannya tanpa dihadiri Bank dan mendukung FGFL dan WIARCO memerintahkan Bank untuk membayar USD 18.292.131 ditambah bunga kepada FGFL dan WIARCO sebesar USD 65.350.000 (secara bersama-sama disebut dengan "Putusan Mauritian 2013"). Menurut pendapat hukum dari penasihat hukum Bank Pradjoto & *Associates*, sebagaimana dinyatakan dalam surat No. 35/PNA/LO-BM.MCB/04/14 tanggal 29 April 2014, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, keputusan Pengadilan Mauritius tidak dapat dieksekusi di Indonesia. Jika Weston ingin mengeksekusi keputusan Pengadilan Mauritius di Indonesia, maka Weston harus mengajukan gugatan baru di Pengadilan Indonesia dan menggunakan Hukum Indonesia sebagai rujukan.

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION

a. Proceedings in the Mauritius Court

On December 27, 2012, in the Supreme Court of Mauritius (Commercial Division), First Global Funds Limited PCC ("FGFL") filed a claim against the Bank for repayment of alleged loans and interest of USD 18,292,131 together with interest there on until the final payment date and Weston International Asset Recovery Co., Ltd. ("WIARCO") filed a claim against the Bank with the case that the Bank has an obligation to pay WIARCO as bondholder the principal amounts under Mandatory Convertible Bond (MCB) allegedly issued by the Bank (formerly PT Bank Century Tbk) on June 16, 2006 and April 14, 2008, with an amount of USD 15,000,000 (Note 25) and USD 40,000,000, respectively, their accrued interest of USD 10,350,000 together with any interest there on until the final payment date (collectively, the "2013 Mauritian Proceedings"). The Bank did not appear in the 2013 Mauritian Proceedings. On February 15, 2013, the Mauritius Court rendered its decision in the absence of the Bank in favor of FGFL and WIARCO ordering the Bank to pay USD 18,292,131 plus interest to FGFL, and USD 65,350,000 plus interest to WIARCO (collectively, the "2013 Mauritian Judgments"). According to the legal opinion from Bank's legal counsel, Pradjoto & Associates, as stated in its letter No. 35/PNA/LO-BM.MCB/04/14 dated on April 29, 2014, under the provisions of applicable law in Indonesia, the decision of the Mauritius Court can not be executed in Indonesia. If Weston wishes to execute the decision of the Mauritius Court in Indonesia, then Weston must file a new lawsuit in the Indonesian Court and use Indonesian Law as a reference.

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

a. Proses Persidangan di Pengadilan Mauritius (lanjutan)

Pada pertengahan Maret 2015, FGFL bersama-sama dengan perusahaan afiliasinya, WIARCO, Weston Capital Advisors, Inc. ("WCAI") dan Weston International Asset Recovery Corporation Inc. ("WIARCI") (secara kolektif, "Weston") mengajukan tindakan terhadap Bank dan J Trust Co., Ltd. di Mahkamah Agung Mauritius (Divisi Komersial) dengan klaim berikut ("Proses Persidangan Mauritian 2015"):

- Klaim yang diajukan oleh FGFL:

  Wanprestasi atas pembayaran registrasi ulang dan biaya transfer saham sebesar USD 4.171.231 (termasuk bunga dan denda bunga) dan panggilan modal atas biaya yang dapat diganti sebesar USD 635.430 (termasuk bunga dan denda bunga).

- Klaim yang diajukan oleh WCAI dan WIARCI:

  Sehubungan dengan Keputusan Proses Hukum Mauritian 2013, antara lain Obligasi Konversi, Bank telah gagal menyelesaikan jumlah USD 97.556.515 (termasuk bunga).

- Klaim yang diajukan oleh WIARCO:

  Wanprestasi atas pembayaran kewajiban kontraktual atas pelunasan Sertifikat Setoran Dana LB Barat Linked Note sebesar USD 8.176.821 (termasuk bunga).

Bank dan J Trust Co., Ltd. tidak muncul dalam Persidangan Mauritian 2015. Pada tanggal 29 Mei 2015, Mahkamah Agung Mauritius mengeluarkan keputusan tanpa Bank dan J Trust Co., Ltd. memerintahkan Bank dan J Trust Co., Ltd. untuk membayar sejumlah USD 4.806.661 kepada FGFL dengan bunga sampai pembayaran terakhir, dan meminta J Trust Co., Ltd. untuk membayar sejumlah USD 97.556.515 dengan bunga sampai pembayaran akhir ke WCAI dan WIARCI sejumlah USD 8.176.821 dengan bunga sampai pembayaran akhir ke WIARCO ("Putusan Mauritian 2015").

Pada bulan September 2015, Weston memperoleh *ex parte Mareva Injunction* dari Mahkamah Agung Mauritius (Divisi Komersial) terhadap Bank dan J Trust Co., Ltd. yang melarang mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk membuang dan/atau berurusan dengan uang hingga nilai USD 120 juta untuk mengamankan pembayaran Keputusan pengadilan Mauritian 2015 ("Keputusan Mareva").

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

a. Proceedings in the Mauritius Court (continued)

In mid March 2015, FGFL together with its affiliated companies, WIARCO, Weston Capital Advisors, Inc. ("WCAI") and Weston International Asset Recovery Corporation Inc. ("WIARCI") (collectively, "Weston") filed an action against the Bank and J Trust Co., Ltd. in the Supreme Court of Mauritius (Commercial Division) with the following claims (the "2015 Mauritian Proceedings"):

- *Claim filed by FGFL:*

  Default on payment on the re-registration and share transfer fees amounting to USD 4,171,231 (including interest and penalty interest) and capital calls on reimbursable expenses amounting to USD 635,430 (including interest and penalty interest).

- *Claim filed by WCAI and WIARCI:*

  In connection with the Decision of the 2013 Mauritian Proceedings, among others the Convertible Bond, the Bank has failed to settle the amount of USD 97,556,515 (including interest).

- *Claim filed by WIARCO:*

  Default on payment on contractual obligation of the redemption of West LB Fund Linked Note Certificate of Deposit amounting to USD 8,176,821 (including interest).

The Bank and J Trust Co., Ltd. did not appear in the 2015 Mauritian Proceedings. On May 29, 2015, the Supreme Court of Mauritius issued a decision in the absence of the Bank and J Trust Co., Ltd. ordering the Bank and J Trust Co., Ltd. to pay an amount of USD 4,806,661 to FGFL with interest until final payment, and ordering J Trust Co., Ltd. to pay an amount of USD 97,556,515 with interest until final payment to WCAI and WIARCI amount of USD 8,176,821 with interest until final payment to WIARCO (the "2015 Mauritian Judgment").

In September 2015, Weston obtained an ex parte Mareva Injunction from the Supreme Court of Mauritius (Commercial Division) against the Bank and J Trust Co., Ltd. prohibiting them, whether directly or indirectly, from disposing of and/or dealing with any money up to the value of USD 120 million to secure payment of the 2015 Mauritian Judgment (the "Mareva Injunction").

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

a. Proses Persidangan di Pengadilan Mauritius (lanjutan)

Pada 2016, Weston mengajukan persidangan hukum di Mauritius terhadap Bank, J Trust Co., Ltd. dan pihak-pihak lain (termasuk direktur individual Bank) meminta bahwa para terdakwa melakukan penghinaan terhadap pengadilan atas tuduhan pelanggaran keputusan Mareva dan untuk kegagalan Bank dan kegagalan J Trust Co., Ltd. untuk membayar Putusan Mauritian 2015. Pada tahun 2017, pengadilan Mauritius mengabulkan mosi Weston dengan tidak adanya Bank dan J Trust Co., Ltd. dan menyatakan semua terdakwa dengan penghinaan terhadap keputusan Mareva ("Perintah Penghinaan").

Pada bulan Maret 2017, FGFL, WIARCO, WCAI dan WIARCI mengaku berkaitan dengan 12 penyitaan terkait Weston, semua uang atau properti yang saat ini dipegang oleh *garnishees* Weston untuk rekening Bank, termasuk Perintah Revestasi Pengadilan New York (didefinisikan di bawah). Pada bulan Juli 2018, pengadilan Mauritian mengesahkan *Attachment Order* dengan tidak adanya Bank ("*Attachment Order*").

Pengadilan Mauritius tidak memiliki yurisdiksi atas Bank karena keputusan di atas dikeluarkan tanpa kehadiran Bank (*in-absentia*). Putusan Mauritian 2013 dan 2015, Putusan Mareva, Perintah Penghinaan atau Perintah Lampiran ("Keputusan Mauritian") mungkin tidak dapat dieksekusi langsung di Indonesia. Bank akan mengambil tindakan hukum untuk menolak upaya apa pun oleh Weston untuk menegakkan Keputusan Mauritian di luar yurisdiksi Indonesia. Pada bulan September 2017, FGFL, WIARCO, WCAI, WIARCI dan Weston International Capital Limited memulai tindakan hukum terhadap 21 terdakwa, termasuk Bank dan J Trust Co., Ltd. di mana mereka mencari, di antara klaim lain, untuk membuat lebih banyak pihak yang bertanggung jawab atas putusan untuk membayar yang dikeluarkan dalam Persidangan Mauritian 2013 dan Persidangan Mauritian 2015 ("Kasus Utama 2017"). Weston mengklaim ganti rugi USD 400 juta untuk penipuan dan konspirasi (beberapa kerugian terkait dengan utang 2015 keputusan Mauritian sebelumnya). Bank dan J Trust Co., Ltd. belum masuk. Terdakwa tertentu muncul untuk mengikuti layanan dan yurisdiksi pengadilan Mauritian dan untuk tetap melanjutkan proses ini.

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

a. Proceedings in the Mauritius Court (continued)

In 2016, Weston filed contempt proceedings in Mauritius against Bank, J Trust Co., Ltd. and other parties (including the Bank's individual directors) asking for an order that the defendants committed contempt of court for alleged breaches of the Mareva Injunction and for Bank and J Trust Co., Ltd. failure to pay the 2015 Mauritian Judgment. In 2017, the Mauritius court granted Weston's motion in the absence of the Bank and J Trust Co., Ltd. and declared all defendants in contempt of the Mareva Injunction (the "Contempt Order").

In March 2017, FGFL, WIARCO, WCAI and WIARCI purported to attach in the hands of 12 Weston-related garnishees, all money or properties presently held or to be held by the Weston garnishees for the account of the Bank, including the New York Court's Revesting Orders (defined below). In July 2018, the Mauritian court validated the Attachment Order in the absence of the Bank ("Attachment Order").

The Mauritius Courts had no jurisdiction over the Bank as the above decisions were issued without the presence of the Bank (in-absentia). The 2013 and 2015 Mauritian Judgments, the Mareva Injunction, the Contempt Order or the Attachment Order (the "Mauritian Decisions") may not be directly executed in Indonesia. The Bank will take legal action to resist any attempt by Weston to enforce the Mauritian Decisions outside the jurisdiction of Indonesia. In September 2017, FGFL, WIARCO, WCAI, WIARCI and Weston International Capital Limited commenced a legal action against 21 defendants, including the Bank and J Trust Co., Ltd. in which they sought, among other claims, to make more parties liable to pay for the judgments issued in the 2013 Mauritian Proceedings and the 2015 Mauritian Proceedings (the "2017 Main Case"). Weston is claiming USD 400 million in damages for fraud and conspiracy (some of the damages related to the previous 2015 Mauritian Judgment debts). Bank and J Trust Co., Ltd. have not entered an appearance. Certain defendants have appeared to contest service and jurisdiction of Mauritian court and to stay these proceedings.

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

a. Proses Persidangan di Pengadilan Mauritius (lanjutan)

Dalam perkembangannya Bank memohon penundaan atas pembacaan putusan atas kasus ini yang dijadwalkan pada tanggal 26 November 2018 terhadap pihak Para Tergugat. Permohonan ini dikabulkan oleh Pengadilan Mauritius dimana Pengadilan menolak pembacaan putusan pada tanggal 26 November 2018 tersebut. Pengadilan memutuskan untuk tidak menjatuhkan putusan tersebut kepada Para Tergugat dan memilih untuk menyidangkan pokok perkara terlebih dahulu dan Pengadilan memutuskan untuk mengadakan *hearing* lanjutan pada tanggal 28 Januari 2019. Pengadilan juga tertarik dengan masalah perwakilan WCAI di dalam persidangan/kasus ini. Adapun dalam hal ini WCAI memiliki 2 perwakilan. Perwakilan pertama adalah dari pihak Weston sedangkan perwakilan kedua adalah Bank selaku pemilik WCAI berdasarkan Putusan Pengadilan New York.

b. Proses Persidangan di Pengadilan Singapura

FGFL, WIARCI, WCAI dan WIARCO (secara kolektif, "Weston") mengajukan gugatan terhadap Bank dan J Trust Co., Ltd. di Pengadilan Singapura pada 16 Oktober 2015 ("Pengadilan Singapura"). Weston mengklaim jumlah berikut terhadap Bank dan J Trust Co., Ltd. dalam Proses Persidangan Singapura:

- FGFL sebesar USD 5.533.117,36
- WIARCO sebesar USD 14.812.672,26
- WCAI sebesar USD 21.361.561,84
- WIARCL sebesar USD 138.078.386,73

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

a. Proceedings in the Mauritius Court (continued)

In its development, the Bank requested a delay in reading the verdict on this case scheduled for November 26, 2018 against the Defendants. This request was granted by the Mauritius Court where the Court refused to read the verdict on November 26, 2018. The court decided not to impose the decision on the Defendants and chose to hear the main case first and the Court decided to hold a follow-up hearing on January 28, 2019. The court was also interested in the issue of WCAI representatives in this trial/case. In this case WCAI has 2 representatives. The first representative was from Weston while the second representative of was from the Bank as WCAI owner which was based on the New York Court Decision.

b. Proceedings in Singapore Courts

FGFL, WIARCI, WCAI and WIARCO (collectively, "Weston") filed a lawsuit against the Bank and J Trust Co., Ltd. in the Court of Singapore on October 16, 2015 (the "Singapore Proceedings"). Weston claim the following amount against the Bank and J Trust Co., Ltd. in the Singapore Proceedings:

- *FGFL amounting to USD 5,533,117.36*
- *WIARCO amounting to USD 14,812,672.26*
- *WCAI amounting to USD 21,361,561.84*
- *WIARCL amounting to USD 138,078,386.73*

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

b. Proses Persidangan di Pengadilan Singapura (lanjutan)

Klaim terhadap Bank dalam Persidangan Singapura adalah untuk menegakkan Putusan Mauritian 2013 dan 2015 untuk jumlah yang disebutkan di atas, dan sebagai alternatif untuk utang yang mendasari ("Klaim yang Mendasari"). Namun, Klaim yang Mendasari WIARCO, WCAI dan WIARCI telah dikeluarkan dari Persidangan Singapura berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Singapura Perkara No. HC/S1060/2015, Sub Perkara No. HC/RA 14/2018, *Doc* No. HC/ORC 3714/2018, tanggal 21 Mei 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Singapura Perkara No. HC/S 1060/2015, Sub Perkara No. HC/SUM 5284/2017 tanggal 26 Januari 2018 Pengadilan Tinggi Singapura mengeluarkan penilaian tingkat pertama (*first instance judgement*) yang menyatakan bahwa klaim atas MCB USD 15.000.000 telah kadaluarsa. Bahwa menurut hukum Inggris, jangka waktu untuk mengajukan gugatan atas suatu pelanggaran kontrak terbatas pada 6 tahun. Sehingga, jika seorang pemegang MCB ingin mengajukan gugatan atas pelanggaran kontrak, maka gugatan tersebut harus diajukan dalam 6 tahun sejak tanggal diduganya pelanggaran tersebut. Menurut Weston, pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh Bank terjadi ketika Bank tidak melakukan pengumuman pengambilalihannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 21 November 2008.

Weston mengajukan banding atas penilaian tersebut namun tidak berhasil. Pada tanggal 21 Mei 2018, Pengadilan Tinggi Singapura mengeluarkan putusan lebih lanjut yang mengkonfirmasi bahwa klaim atas MCB USD 15.000.000 telah kadaluarsa. Weston tidak dapat mengajukan upaya hukum lainnya, karena putusan Pengadilan Tinggi Singapura adalah bersifat final dan *binding* (Catatan 25).

Menanggapi gugatan yang diajukan oleh Weston, baik J Trust Co., Ltd. dan Bank telah mengajukan pembelaan mereka dengan menolak semua klaim Weston. Pembelaan Bank terhadap klaim untuk menegakkan Putusan Mauritian 2013 dan 2015 adalah bahwa Putusan Mauritian 2013 dan 2015 tidak mampu ditegakkan atau diakui di Singapura karena Mahkamah Agung Mauritius tidak memiliki yurisdiksi atas Bank, dan karena Weston tidak memiliki wewenang untuk menegakkan Putusan Mauritian.

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

b. Proceedings in Singapore Courts (continued)

The claims against the Bank in the Singapore Proceedings are to enforce the 2013 and 2015 Mauritian Judgments for the above-stated amounts, and as the alternative for the underlying debts (the "Underlying Claims"). However, the Underlying Claims of WIARCO, WCAI and WIARCI have been removed from of the Singapore proceedings based on the decision of the Supreme Court of Singapore No. HC/S1060/2015, Sub Case No. HC/RA 14/2018, Doc No. HC/ORC 3714/2018, May 21, 2018 and the Decision of the Supreme Court of Singapore Case No. HC/S 1060/2015, Sub Case No. HC/SUM 5284/2017 dated January 26, 2018 The high Court of Singapore issued a first instance judgment which states that claims for MCB of USD 15,000,000 have expired. Whereas according to English law, the period for filing a claim for breach of contract is limited to 6 years. Therefore, if an MCB holder wishes to file a claim for breach of contract, the claim must be filed within 6 years from the date the violation was alleged. According to Weston, a breach of contract committed by Bank occurred when Bank did not announce its take over by the Indonesian Deposit Insurance Corporation on November 21, 2008.

Weston appealed the assessment but was unsuccessful. On May 21, 2018, the Singapore Supreme Court issued a further ruling confirming that the claim on the USD 15,000,000 MCB had expired. Weston cannot file for other legal remedies, because the decision of the Singapore Supreme Court is final and binding (Note 25).

In response to the lawsuit filed by Weston, both J Trust Co., Ltd. and Bank have filed their defences denying all of Weston's claims. The Bank's defence against the claim to enforce the 2013 and 2015 Mauritian Judgments is that the 2013 and 2015 Mauritian Judgments are incapable of enforcement or recognition in Singapore because the Supreme Court of Mauritius had no jurisdiction over the Bank, and because Weston has no standing to enforce the Mauritian Judgments.

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

b. Proses Persidangan di Pengadilan Singapura (lanjutan)

Pada tanggal 12 November 2018, Pengadilan Tinggi Singapura memerintahkan Weston untuk membayar jaminan SGD 130.000 dan SGD 175.000 ke Pengadilan pada tanggal 3 Desember 2018, sehubungan dengan Bank dan J Trust Co., Ltd. Biaya masing-masing dalam Persidangan Singapura, gagal karena Persidangan Singapura melawan Bank dan J Trust Co., Ltd. akan ditangguhkan secara otomatis. Weston gagal memberikan jaminan seperti yang diperintahkan. Oleh karena itu, Persidangan Singapura telah ditangguhkan dengan efek mulai 4 Desember 2018.

c. Proses Hukum di Pengadilan Tinggi New York

Pada tanggal 1 Oktober 2013, WCAI mengajukan petisi *ex parte* di Pengadilan Distrik Amerika Serikat Distrik Selatan New York (“Pengadilan New York”) untuk meminta pengakuan dan penegakan salah satu Putusan Mauritian 2013 untuk USD 19.202.226,21 (USD 18.292.131 ditambah bunga pasca penilaian) yang telah dibeli WCAI dari FGFL (“FGFL Keputusan Mauritian”).

Pada 20 Juni 2014, WIARCI mengajukan petisi di Pengadilan New York untuk meminta pengakuan dan penegakan Putusan Mauritian 2013 lainnya untuk USD 65.350.000 plus biaya dan bunga setelah penilaian, yang dibeli WIARCI dari WIARCO, terhadap Bank (“WIARCO Keputusan Mauritian”).

Pengadilan New York awalnya mengakui FGFL Keputusan Mauritian pada 4 Oktober 2013, dan WCAI kemudian mendapatkan pesanan omset *ex parte* yang mengakibatkan WCAI menyita dana dari Bank sebesar USD 3.621.127,33.

Pada tanggal 19 November 2013, Pengadilan New York mengeluarkan Putusan yang mengosongkan pesanan 4 Oktober 2013 (“Putusan Pengosongan Pesanan”), memerintahkan agar setiap dana Bank yang sebelumnya ditransfer ke WCAI sesuai dengan pesanan 4 Oktober 2013 harus dikembalikan ke Bank (“Pengembalian Dana Pesanan”).

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

b. Proceedings in Singapore Courts (continued)

On November 12, 2018, the Supreme Court of Singapore ordered Weston to pay security of SGD 130,000 and SGD 175,000 to Judiciary by December 3, 2018, in respect of the Bank and J Trust Co,. Ltd. The respective fees in the Singapore Proceedings, which was the Singapore Proceedings against the Bank and J Trust Co., Ltd., was suspended automatically. Weston failed to provide the security as ordered. Accordingly, the Singapore Proceedings have been suspended starting from December 4, 2018.

c. Proceedings in the New York Courts

On October 1, 2013, WCAI filed an ex parte petition in the United States District Court Southern District of New York (“New York Court”) seeking the recognition and enforcement of one of the 2013 Mauritian Judgments for USD 19,202,226.21 (USD 18,292,131 plus post-judgment interest) which WCAI had purchased from FGFL (the “FGFL Mauritian Judgment”).

On June 20, 2014, WIARCI filed a petition in the New York Court seeking the recognition and enforcement of the other 2013 Mauritian Judgment for USD 65,350,000 plus costs and post-judgment interest, which WIARCI had purchased from WIARCO, against the Bank (the “WIARCO Mauritian Judgment”).

The New York Court initially recognised the FGFL Mauritian Judgment on October 4, 2013, and WCAI then obtained ex parte turnover orders which resulted in WCAI seizing funds from the Bank amounting to USD 3,621,127.33.

On November 19, 2013, the New York Court issued a vacating verdict for October 4, 2013 order (the “Order Vacating Judgment”), ordering that any of the Bank’s funds previously transferred to WCAI pursuant to the October 4, 2013 order should be returned to the Bank (the “Return of Funds Order”).

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

c. Proses Hukum di Pengadilan Tinggi New York (lanjutan)

Pada tanggal 16 Januari 2014, WCAI telah mengembalikan dana sebesar USD 23.475 kepada Bank. Pada 18 Desember 2014, Bank telah menandatangani perjanjian dengan Kelley Drye & Warren LLP (penasihat WCAI) dimana WCAI setuju untuk mengembalikan dana sebesar USD 175.000 kepada Bank. Pada 21 Desember 2014, WCAI telah mengembalikannya ke Bank. Pada tanggal 7 Mei 2015, Bank telah menandatangani perjanjian dengan penasihat hukum WCAI dimana WCAI setuju untuk mengembalikan dana sebesar USD 100.000 kepada Bank. Pada 15 Mei 2015, WCAI telah mengembalikannya ke Bank.

Pada tanggal 19 Maret 2014, Pengadilan New York memberikan mosi Bank untuk menahan WCAI dalam penghinaan terhadap pengadilan dan memerintahkan WCAI untuk segera mengembalikan sisa dana dan bunga kepada Bank. Pada tanggal 16 Juli 2014, Pengadilan New York mengeluarkan ringkasan perintah yang mengulangi permintaan bagi WCAI untuk mengembalikan dana sebesar USD 3.597.652,33 dengan bunga yang belum dibayarkan WCAI kepada Bank.

Pada tanggal 8 September 2015, Pengadilan New York mengeluarkan Opini dan Perintah memperluas perintah penghinaan tertanggal 19 Maret 2014 untuk mencakup John Liegey ("Liegey") dan berbagai afiliasi WCAI ("Entitas Weston") dan memerintahkan Liegey dan Entitas Weston untuk mematuhi Pengembalian Dana Pesanan dan mengembalikan uang kepada Bank jumlah terutang yang disita dari Bank.

Pada tanggal 1 Juli 2015 dan 31 Januari 2017, WIARCI dan WCAI masing-masing mengajukan Pemberitahuan Pemberhentian Sukarela untuk mengakhiri klaim mereka atas pengakuan Putusan Mauritius 2013 di Pengadilan New York masing-masing sebesar USD 65.350.000 dan USD 19.202.226,21.

Jumlah terhutang dari Liegey dan Entitas Weston kepada Bank dibawah *Return of Funds Order* berjumlah USD 3.322.652,33 (setara dengan sekitar Rp 46.127) pada tanggal 31 Desember 2019 dan USD 3.322.652,33 (setara dengan sekitar Rp 47.780) pada tanggal 31 Desember 2018. Bank mencatat piutang dari Liegey dan Entitas Weston sebagai bagian dari akun "Aset Lain-lain" dalam laporan posisi keuangan (Catatan 17).

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

c. Proceedings in the New York Courts (continued)

As of January 16, 2014, WCAI has returned the fund amounting to USD 23,475 to the Bank. On December 18, 2014, the Bank has signed an agreement with Kelley Drye & Warren LLP (WCAI's counsel) whereby WCAI agreed to return fund amounting to USD 175,000 to the Bank. On December 21, 2014, WCAI has returned it to the Bank. On May 7, 2015, the Bank has signed an agreement with WCAI's counsel whereby WCAI agreed to return fund amounting to USD 100,000 to the Bank. On May 15, 2015, WCAI has returned it to the Bank.

On March 19, 2014, the New York Court granted the Bank's motion to hold WCAI in contempt of court and ordered WCAI to immediately refund remaining funds and interest to the Bank. On July 16, 2014, the New York Court issued a summary order repeating the order for WCAI to return funds amounting to USD 3,597,652.33 with interest which WCAI had not been repayed to the Bank.

On September 8, 2015, the New York Court issued an Opinion and Order expanding its contempt order dated March 19, 2014 to cover John Liegey ("Liegey") and various affiliates of WCAI (the "Weston Entities") and ordering Liegey and the Weston Entities to comply with the Return of Funds Order and refund to the Bank the outstanding amounts seized from the Bank.

On July 1, 2015 and January 31, 2017, WIARCI and WCAI respectively submitted Notices of Voluntarily Dismissal to terminate their claims for the recognition of the 2013 Mauritian Judgments in the Court of New York amounting to USD 65,350,000 and USD 19,202,226.21, respectively.

The outstanding amount due from Liegey and the Weston Entities to the Bank under the Return of Funds Order amounting to USD 3,322,652.33 (equivalent to about Rp 46,127) as of December 31, 2019 and USD 3,322,652.33 (equivalent to about Rp 47,780) as of December 31, 2018. The Bank recorded the receivable from Liegey and the Weston Entities as part of "Other Assets" account in the statement of financial position (Note 17).

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

c. Proses Hukum di Pengadilan Tinggi New York (lanjutan)

Pada 13 Februari 2017, Pengadilan New York mengeluarkan Opini dan Perintah yang mengabulkan permohonan Bank untuk omset berikut kepada Bank pada tanggal yang ditentukan jika Liegey dan Weston Entitas gagal membayar jumlah yang belum dibayar berdasarkan Pengembalian Pesanan Dana: 1) Putusan Mauritian 2013 dan 2015; 2) instrumen keamanan yang konon dipegang oleh Entitas Weston termasuk MCB ("Sekuritas"); dan 3) kepentingan ekuitas di Entitas Weston sendiri ("Hak Atas Saham"). Karena Liegey dan Entitas Weston gagal membayar dana, pada 6 Maret, 27 Maret, dan 17 April 2017, Pengadilan New York memerintahkan agar Kepentingan, Efek, dan Putusan Mauritian 2013 dan 2015 diserahkan dan diinvestasikan kembali dalam Bank ("*Revesting Order*"). Perintah *Revesting* ditegaskan atas banding oleh Pengadilan Tinggi Amerika Serikat untuk Sirkuit Kedua berdasarkan perintah tanggal 25 Juni 2018.

Berdasarkan perintah *revesting*, Bank memiliki dan sebagai pengganti hak yang sebelumnya dimiliki oleh Weston International Asset Recovery Corporatian Inc. ("WIARCI") berupa hak atas kepemilikan Saham atas WIARCI dan mengambil alih Putusan Mauritius 2013 dan 2015 . Selanjutnya hak-hak yang dimiliki oleh Bank, berupa kepemilikan Saham atas WIARCI dan mengambil alih Putusan Mauritius 2013 dan 2015, dialihkan berdasarkan Perjanjian Pengalihan dan Perjanjian Pemindahan tanggal 7 Agustus 2018 kepada Celestial Jade International Limited ("CJI") dan karenanya CJI sebagai pengganti dan pemilik terhadap kepemilikan Saham atas WIARCI dan mengambil alih Putusan Mauritius 2013 dan 2015 yang sebelumnya dimiliki oleh Bank berhak untuk mengajukan atau memulihkan hak-haknya tersebut dengan cara mengajukan gugatan terhadap Bank.

d. Proses Perdamaian di Pengadilan Negeri di Indonesia

Dalam perkembangannya, CJI telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Bank di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah register perkara No. 566/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 September 2019. Dalam tahap mediasi para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian sebagaimana ternyata dalam akta Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 566/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan Perjanjian perdamaian ini setiap pihak tidak lagi memiliki kewajiban ataupun hutang ataupun kewajiban dalam bentuk apapun lainnya terhadap Pihak lainnya baik berdasarkan MCB dan/atau gugatan.

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

c. Proceedings in the New York Courts (continued)

On February 13, 2017, the New York Court issued an Opinion and Order granting the Bank's application for the turnover of the following to the Bank on specified dates should the Liegey and Weston Entities fail to repay the outstanding amount under the Return of Funds Order: 1) the 2013 and 2015 Mauritian Judgments; 2) the security instruments purportedly held by the Weston Entities including the MCBs ("Securities"); and 3) the equity interests in the Weston Entities themselves ("Equity Interests"). As the Liegey and Weston Entities failed to repay the funds, on March 6, March 27, and April 17, 2017, the New York Court ordered that the 2013 and 2015 Mauritian Judgments, Securities, and Equity Interests respectively be turned over and revested in the Bank (the "Revesting Order"). The Revesting Order was affirmed on appeal by the United States Court of Appeals for the Second Circuit by order dated June 25, 2018.

Pursuant to the revesting orders, Bank has and as a substitute for the rights which was previously owned by Weston International Asset Recovery Corporation Inc. ("WIARCI") in the form of rights to share ownership in WIARCI and taking over the 2013 and 2015 Mauritians Judgement. Furthermore, the rights owned by the Bank, in the form of share ownership in WIARCI and taking over the 2013 and 2015 Mauritians Judgment, were transferred in accordance with the Transfer Agreement and the Assignment Agreement dated August 7, 2018 to Celestial Jade International Limited ("CJI") hence CJI as a replacement and the owner of the shares ownership in WIARCI and taking over the 2013 and 2015 Mauritians Judgment which previously owned by the Bank has the right to submit or restore these rights by filing a lawsuit against the Bank.

d. Settlement Proceedings in the Indonesian Courts

In its development, CJI has filed a lawsuit against the law committed by the Bank at the Central Jakarta District Court, under case register No. 566/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Pst., dated September 16, 2019. In the mediation stage, the parties agreed to conduct an amicable settlement based on the Central Jakarta District Court's Settlement Deed No. 566/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., dated October 29, 2019, which basically states that with this Settlement Agreement, each party has no longer have any obligations or debts or obligations of any kind to other party whether pursuant to the MCB and/or lawsuit.

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

d. Proses Perdamaian di Pengadilan Negeri di Indonesia (lanjutan)

Pada tanggal 24 Oktober 2019, di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, diadakan perjanjian perdamaian oleh CJI dan Bank melalui akta No. 129. Berdasarkan akta tersebut kedua pihak sepakat damai dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu adanya Putusan Pengadilan Tinggi Singapura No. HC/RA 14/2018 dan No. HC/SUM 5284/2017 dalam perkara No. HC/S 1060/2015 yang menyatakan kasus tersebut telah kadaluarsa dan penerbitan MCB melanggar beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia pada saat itu.

Atas dasar tersebut CJI menyadari terdapat permasalahan hukum atas penerbitan MCB tersebut, maka dari itu pihak CJI beriktikad baik untuk menempuh jalur perdamaian dengan ketentuan Bank memberikan kompensasi sebesar Rp 12,5.

Manajemen berkeyakinan bahwa atas hasil putusan tersebut Bank tidak lagi memiliki hak dan kewajiban atas kepemilikan MCB tersebut dan kepemilikan telah berpindah kepada penggugat.

Berdasarkan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Oktober 2019 No. 566/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, telah tercapai perdamaian diantara CJI, selaku Penggugat, dengan Bank, selaku Tergugat, terkait dengan sengketa klaim oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Para Pihak menyatakan tidak lagi memiliki tanggung jawab ataupun hutang atau kewajiban dalam bentuk apapun lainnya terhadap Pihak lainnya baik berdasarkan MCB dan/atau gugatan.

Bahwa mengacu pada peraturan hukum di Indonesia, Pasal 1381 KUHPerdata mengatur bahwa hapusnya suatu perikatan, salah satunya dikarenakan telah lewatnya waktu. Pada faktanya, MCB USD 15M telah jatuh tempo pada tanggal 16 Juni 2009, sehingga kewajiban bank yang ditimbulkan oleh MCB tersebut telah hapus atas dasar ketentuan pasal tersebut.

Bahwa kekuatan hukum suatu akta perdamaian, diatur dalam Pasal 154 RBG/130 HIR, yang mengatakan bahwa kekuatan hukum yang dimiliki suatu akta perdamaian adalah sama dengan kekuatan hukum putusan pengadilan tingkat akhir sehingga terhadap penetapan suatu akta perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut.

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

d. Settlement Proceedings in the Indonesian Courts (continued)

On October 24, 2019, in the presence of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, a settlement agreement was signed by CJI and Bank through deed No. 129. Based on the deed, both parties agreed to settle by considering several things, namely the Supreme Court of Singapore No. HC/RA 14/2018 and No. HC/SUM 5284/2017 in case No. HC/S 1060/2015, which states the case has expired and the issuance of MCB violates several legal provisions in force in Indonesia at that time.

Based on above, CJI realized that there were legal issues regarding the issuance of the MCB, therefore CJI had a good intention to take the settlement route provided that the Bank compensates an amount of Rp 12.5.

Management believes that based on the results of the decision, the Bank does not have any rights and obligations on the ownership of the MCB and ownership has been transferred to the plaintiff.

Based on Deed of Settlement Agreement of the Central Jakarta District Court on October 29, 2019 No. 566/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Pst, the Settlement Agreement between CJI, as the Plaintiff, and Bank, as the Defendant, in relation to the dispute of the Plaintiff, the settlement agreement agrees and acknowledges that the Defendant no longer has any obligation of any kind to the Plaintiff in relation to the MCB or the lawsuit.

Article 1381 of the Civil Code governing the engagement, one of which relates to the specified time. In fact, the USD 15M MCB was due on June 16, 2009, causing the bank arising from this MCB to write-off based on the provisions of that article.

Regarding the legal force of the settlement agreement, regulated in Article 154 RBG/130 HIR, which states that the legal force relating to a settlement agreement is the same as the legal force of the final decision level so no further legal remedies can be made for the establishment of settlement agreement.

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

e. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Kasus Perdata:

Posisi Bank sebagai Tergugat:

1. Gugatan kepada Bank yang diajukan oleh Investor yang membeli produk investasi *(Discretionary Fund)* milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) terdiri dari:

   a. Gugatan yang diajukan oleh salah satu investor ADS di Surabaya selaku Penggugat terhadap Bank selaku Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Surabaya yang terdaftar dalam Perkara No. 742/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 17 Desember 2008. Penggugat menuntut Bank bersama-sama dengan Tergugat lainnya secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat sebesar Rp 400 berikut keuntungan yang akan diperoleh.

   Di tingkat Pengadilan Negeri Surabaya Bank bersama-sama dengan Tergugat lainnya dihukum secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat sebesar Rp 400 berikut keuntungan yang akan diperoleh. Atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Bank telah menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

   Pada tanggal 3 September 2013, Bank telah menerima putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang isinya mengabulkan permohonan banding Bank bersama Tergugat lainnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 742/Pdt.G/2008/ PN.Sby tanggal 8 Desember 2009 serta menyatakan ADS selaku Tergugat XI telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat dan menghukum ADS selaku Tergugat XI membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 400 berikut keuntungan yang akan diperoleh. Bank menerima Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Saat ini, Bank masih menunggu upaya hukum kasasi dari Penggugat.

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

e. The outstanding legal and fraud cases up to December 2019 are as follows:

Civil Cases:

Bank as the Defendant:

1. The lawsuit filed against the Bank submitted by Investors who bought investment products (Discretionary Fund) issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) consists of:

   a. Lawsuit filed by one of the ADS investor in Surabaya as the Plaintiff and the Bank as Defendant I through the District Court of Surabaya which is registered in Case No. 742/Pdt.G/2008/PN.Sby dated December 17, 2008. The Plaintiff claimed to the Bank together with other Defendants jointly and severally, to pay to the Plaintiff amounting to Rp 400 including forseeable gain.

   At the Surabaya District Court the Bank is punished together with the other Defendants jointly and severally, to pay compensation to the Plaintiff amounting to Rp 400 including forseeable gain. On the Decision of the District Court of Surabaya, the Bank has submitted an appeal to the High Court of Surabaya.

   On September 3, 2013, the Bank has received decision from the Surabaya High Court which accepted the Bank's appeal with other Defendants and cancelled the Surabaya District Court Decision No. 742/Pdt.G/2008/PN.Sby dated December 8, 2009 and stated that ADS, as Defendants XI, has breached the covenant which is detrimental to the Plaintiff and penalized ADS, as Defendants XI, to pay the Plaintiff a material loss of Rp 400 including foreseeable gain. The Bank received the High Court Surabaya Decision and did not file a cassation. Currently, the Bank is still waiting for cassation from the Plaintiff.

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

e. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

1. Gugatan kepada Bank yang diajukan oleh Investor yang membeli produk investasi *(Discretionary Fund)* milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) terdiri dari: (lanjutan)

b. Gugatan yang diajukan beberapa investor ADS di Surakarta selaku penggugat kepada Bank selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Surakarta yang terdaftar dalam perkara No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska tanggal 31 Maret 2010. Dalam gugatan para penggugat menuntut Bank mengembalikan uang pembelian produk *Discretionary Fund (DF)* sebesar Rp 35.437 berikut keuntungan sebesar Rp 5.676.

Pada tingkatan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, gugatan Penggugat dikabulkan.

Setelah mengalami proses Pengadilan dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung, pada tanggal 15 Oktober 2012, Bank telah menerima Surat Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) No. 2838K/Pdt/2011 tanggal 19 April 2012, yang menolak permohonan kasasi dari Bank dan menghukum Bank untuk mengembalikan uang pembelian produk investasi kepada Para Penggugat sebesar Rp 35.437 dan membayar ganti rugi sebesar Rp 5.676.

Bank telah mengajukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan menyampaikan Memori Peninjauan Kembali No. 105/Pdt.G/2014/PN.Ska.

Pada tanggal 11 Desember 2014, Bank telah menerima Surat Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali dari Pengadilan Negeri Surakarta yang memberitahukan bahwa Mahkamah Agung RI telah menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Bank.

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

e. The outstanding legal and fraud cases up to December 2019 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

1. The lawsuit filed against the Bank submitted by Investors who bought investment products (Discretionary Fund) issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) consists of: (continued)

b. The lawsuit submitted by some ADS investors as plaintiff in Surakarta against the Bank in the District Court of Surakarta which is registered in case No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska dated March 31, 2010. The plaintiffs claimed from the Bank to refund the purchase money of Discretionary Fund (DF) product amounting to Rp 35,437 with gain amounting to Rp 5,676.

At the level of District Court, High Court and Supreme Court, the claim from the Plaintiffs was accepted.

After having proceeding process for District Court to Supreme Court level, on October 15, 2012, the Bank has received a Notification Letter of The Supreme Court of the Republic of Indonesia (RI) Decision No. 2838K/Pdt/2011 dated April 19, 2012, which rejected the Bank's cassation and ordered the Bank to refund the purchase price of investment products to the Plaintiffs amounting Rp 35,437 and pay a loss compensation amounting to Rp 5,676.

The Bank has submitted extraordinary legal act by filing Judicial Review and Memory of Judicial Review No. 105/Pdt.G/2014/PN.Ska.

On December 11, 2014, the Bank has received a Notification Letter of Judicial Review from The Discrict Court of Surakarta which confirmed that the Supreme Court of RI has rejected the Bank's Judicial Review.

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

e. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

1. Gugatan kepada Bank yang diajukan oleh Investor yang membeli produk investasi *(Discretionary Fund)* milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) terdiri dari: (lanjutan)

Bank telah menerima Surat Teguran *(aanmaning)* dari Pengadilan Negeri Surakarta untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung dan pada bulan April 2015, Bank telah menyampaikan kepada Pengadilan Negeri Surakarta berupa tanggapan dan keberatan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung mengingat Putusan Mahkamah Agung dikategorikan sebagai Putusan Yang Tidak Dapat Dilaksanakan (*Non-Executable*).

Pada tanggal 11 Juli 2017, Pengadilan Negeri Surakarta telah berkirim surat kepada para investor bahwa sehubungan dengan penyelesaian eksekusi Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara di atas maka Pengadilan Negeri Surakarta menginformasikan agar para investor menghubungi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Perkembangan selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2017, Pengadilan Negeri Surakarta juga telah berkirim surat kepada para investor bahwa sehubungan dengan eksekusi pengadilan yang menghukum Bank untuk mengembalikan uang ditangguhkan pelaksanaannya.

Pada tanggal 27 Desember 2017, petugas pengadilan di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1 A Khusus melakukan sita eksekusi di kantor Bank di Surakarta. Namun, sita eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kantor Bank Cabang Surakarta adalah milik pihak ketiga, sehingga sita eksekusi tidak dapat dilakukan oleh Petugas Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1 A Khusus.

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

e. The outstanding legal and fraud cases up to December 2019 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

1. The lawsuit filed against the Bank submitted by Investors who bought investment products (Discretionary Fund) issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) consists of: (continued)

The Bank has received a Reprimand Letter (aanmaning) from the District Court of Surakarta to execute the Supreme Court Decision and in April 2015, the Bank has submitted to the Court of Surakarta in the form of comments and objections to execute the Supreme Court Decision in view of Supreme Court Decision is categorized as Non-Executable Verdict.

On July 11, 2017, the Surakarta court has delivered letter to the investors related to the execution of the Surakarta verdict, the investors must coordinate with Deposit Insurance Corporation (LPS). Further, on August 1, 2017, the Surakarta Court also sent a letter to the investors that the execution of Surakarta Court, which orders the Bank to return the money, is postponed.

On December 27, 2017, the bailiffs in the Surakarta District Court Class 1 A Special conducted an attachment on the Bank's office in Surakarta. However, the attachment was unable to perform because the Bank's branch office of Surakarta is a third party's property, therefore the attachment can not be done by the Bailiffs of Surakarta District Court Class 1 A Special.

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

e. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

1. Gugatan kepada Bank yang diajukan oleh Investor yang membeli produk investasi *(Discretionary Fund)* milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) terdiri dari: (lanjutan)

Selanjutnya, Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1 A Khusus melalui Surat No. W12-U2/094/PDT.04.10/II/ 2018 tanggal 6 Februari 2018 menjelaskan kepada investor ADS di Surakarta bahwa sita eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Kantor Bank Cabang Surakarta dimiliki oleh pihak ketiga. Dan terkait perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde)* berdasarkan putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 58/Pdt.G/2010/ PN.Ska jo. No. 30 PK/Pdt/2014 tanggal 8 April 2014.

c. Gugatan perwakilan kelompok (*class action)* yang diajukan oleh beberapa investor ADS kepada Bank melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam perkara No. 215/Pdt.G/PN2011/PN.Jkt.Pst. Dalam gugatannya, Para Penggugat menuntut Bank untuk mengembalikan dana yang telah diinvestasikan di produk DF milik ADS sebesar Rp 7.787 (pokok dan bunga). Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam putusannya tanggal 14 Februari 2012, menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Para Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 31 Mei 2012.

Pada tanggal 28 Juni 2013, Bank menerima Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang isinya menguatkan Putusan No. 215/Pdt.G/PN2011/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Februari 2012.

Para Penggugat telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2013.

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

e. The outstanding legal and fraud cases up to December 2019 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

1. The lawsuit filed against the Bank submitted by Investors who bought investment products (Discretionary Fund) issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) consists of: (continued)

Futhermore, the Surakarta District Court Class 1 A Special through Letter No. W12-U2/094/PDT.04.10/II/2018 dated February 6, 2018 explains to the ADS investor in Surakarta that the attachment can not be executed because the Bank's branch office in Surakarta is owned by third party. And related to the case has permanent legal force (inkracht van gewijsde) based on the decision of the Review of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 58/Pdt.G/ 2010/PN.Ska jo. No. 30 PK/Pdt/2014 dated April 8, 2014.

c. Class action was filed by some of ADS's investors against the Bank through the District Court of Central Jakarta which is registered in the case No. 215/Pdt.G/PN2011/PN.Jkt.Pst. In their lawsuit, the Plaintiffs sued the Bank to refund the investment fund of DF product owned by ADS amounting to Rp 7,787 (principal and interest). The District Court of Central Jakarta, in its verdict dated February 14, 2012, stated that the lawsuit of Plaintiffs could not be accepted.

The Plaintiffs have filed an appeal and submitted a memory of appeal on May 31, 2012.

On June 28, 2013, the Bank received Decision from DKI Jakarta High Court which strengthened the Decision No. 215/Pdt.G/PN2011/PN. Jkt.Pst dated February 14, 2012.

The Plaintiffs have filed cassation request on July 26, 2013.

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

e. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

1. Gugatan kepada Bank yang diajukan oleh Investor yang membeli produk investasi *(Discretionary Fund)* milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) terdiri dari: (lanjutan)

Pada tanggal 26 November 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) melalui Putusan No. 1216K/Pdt/2014, menolak permohonan kasasi dari para penggugat.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, tidak terdapat perkembangan perkara.

d. Gugatan perbuatan melawan hukum dari investor ADS di Surabaya kepada Bank melalui Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby yang menuntut Bank mengembalikan dana sebesar Rp 66.250 berikut keuntungan yang seharusnya didapat dan kerugian bunga sebesar Rp 10.600.

Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusannya No. 55/Pdt.G/2012/ PN.Sby tanggal 29 Oktober 2012 telah menyatakan Bank melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Bank mengembalikan kepada Penggugat sejumlah Rp 66.250 berikut keuntungan sebesar Rp 2.153 dan ganti rugi materiil sebesar Rp 25.921.

Pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung gugatan penggugat dikabulkan.

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2016 Bank telah menyatakan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan sekaligus menyampaikan memo Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Bank telah menerima Surat Teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung dan pada bulan Agustus 2016, Bank telah menyampaikan kepada Pengadilan Negeri Surabaya berupa tanggapan dan keberatan untuk melaksanakan.

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

e. The outstanding legal and fraud cases up to December 2019 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

1. The lawsuit filed against the Bank submitted by Investors who bought investment products (Discretionary Fund) issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) consists of: (continued)

On November 26, 2015, the Supreme Court of the Republic of Indonesia (RI) via Verdict No. 1216K/Pdt/2014, rejected the cassation of plaintiffs.

As of the issuance date of the financial statements, there is no progress on the case.

d. The lawsuits from ADS' investors in Surabaya to the Bank through the District Court of Surabaya under Case No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby suing Bank to return the funds amounting to Rp 66,250 including any benefits earned and interest cost amounting to Rp 10,600.

The District Court of Surabaya through its Verdict No. 55/Pdt.G/ 2012/PN.Sby dated October 29, 2012 has been declared that the Bank committed an unlawful act and punished the Bank to return the fund amounting to Rp 66,250 including gain of Rp 2,153 and compensation of Rp 25,921 to the Plaintiff.

At the level of District Court, High Court and Supreme Court, the claim from the Plaintiffs was granted.

On August 1, 2016, the Bank has filed a Judicial Review (PK) and handed the Judicial Review memo (PK) to the Supreme Court of RI through the Surabaya District Court.

The Bank has received a Reprimand Letter (aanmaning) from Surabaya District Court to implement the Supreme Court Verdict and in August 2016, the Bank has submitted to the District Court of Surabaya as form of responses and objections to implement.

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

e. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

1. Gugatan kepada Bank yang diajukan oleh Investor yang membeli produk investasi *(Discretionary Fund)* milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) terdiri dari: (lanjutan)

Bank telah mendapatkan Relaas Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali No. 04 PK/PDT/2017 tanggal 14 Maret 2018 yang intinya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Bank. Kemudian pada tanggal 28 Maret 2018 Bank juga sudah menerima Berita Acara Sita Eksekusi terhadap bangunan dari kantor cabang Bank Cabang Rajawali dan Kantor Cabang Bank Cabang Kertajaya.

Bank sudah mengajukan perlawanan terhadap sita jaminan dengan mengajukan gugatan perlawanan kepada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 April 2018. Selain itu, Bank telah menyampaikan bantahan terhadap lelang atas aset Bank di Surabaya dan mengumumkan bantahan melalui media cetak pada tanggal 28 dan 29 Juni 2018 dan melakukan permohonan blokir kepada kantor pertanahan setempat pada tanggal 26 Juni 2018. Bank berencana untuk mengajukan permohonan penangguhan lelang kepada KPKNL Surabaya.

Pada tanggal 6 Juli 2018, Bank telah mendapatkan informasi pengumuman lelang ke - 2 terkait eksekusi dari Pengadilan Negeri Surabaya No. 31/Eks/2016/PN.Sby Jo. No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby melalui media masa.

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

e. The outstanding legal and fraud cases up to December 2019 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

1. The lawsuit filed against the Bank submitted by Investors who bought investment products (Discretionary Fund) issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) consists of: (continued)

The Bank obtained a Notice of Judicial Review Verdict No. 04 PK/PDT/2017 dated March 14, 2018 which essentially rejected the Bank's Request of Review. On March 28, 2018, the Bank also received an attachment request on the building of the Rajawali Branch Office and Kertajaya Branch Office.

The Bank has already filed a resistance against the confiscation by filing a claim against the Surabaya District Court on April 13, 2018. In addition, the Bank has submitted an objection to the auction of the Bank's assets in Surabaya and announced an objection through mass media on June 28 and 29, 2018 and made a blockage request to the local land office on June 26, 2018. The Bank plans to apply for the suspension of the auction to KPKNL Surabaya.

On July 6, 2018, the Bank received an information on the announcement of the second auction related to the execution of the Surabaya District Court No. 31/Eks/2016/PN.Sby Jo. No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby through the mass media.

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

e. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

1. Gugatan kepada Bank yang diajukan oleh Investor yang membeli produk investasi *(Discretionary Fund)* milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) terdiri dari: (lanjutan)

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018, Bank telah menerima Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang dengan perkara No. 31/Eks/2016/PN.Sby Jo. No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby terhadap 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang saat ini merupakan gedung kantor Bank Cabang Rajawali dan Cabang Kertajaya Surabaya, dengan jadwal pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, 20 Juli 2018.

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2018, telah diumumkan pengumuman lelang ke - 2 terkait “objek lelang yang sedang menjadi objek sengketa” melalui media massa nasional Kompas dan Surabaya Pagi.

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, telah diumumkan pengumuman lelang ke - 3 terkait “objek lelang yang sedang menjadi objek sengketa” melalui media massa nasional Kompas dan Surabaya Pagi.

Berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor: 778/45/2018 tanggal 20 Juli 2018, bahwa terhadap aset milik Bank telah dilaksanakan lelang eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya atas barang tidak bergerak.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Bank masih dalam proses melakukan upaya hukum lainnya.

Berdasarkan berita acara sita eksekusi PN Jakarta Pusat tanggal 3 Januari 2019 dan berita acara sita eksekusi PN Jakarta Barat tanggal 4 Januari 2019. Penggugat telah melakukan penyitaan terhadap 3 (tiga) aset Bank di Tanah Abang, Pangeran Jaya dan Puri Kembangan.

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

e. The outstanding legal and fraud cases up to December 2019 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

1. The lawsuit filed against the Bank submitted by investors who bought investment products (Discretionary Fund) issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) consists of: (continued)

On July 10, 2018, the Bank has received a Notice of Notification of Auction Execution by Case No. 31/ Eks/2016/PN.Sby Jo. No. 55/Pdt.G/ 2012/PN.Sby on 2 (two) land and building which is currently the Bank’s office buildings of the Rajawali Branch and Kertajaya Branch in Surabaya, with the schedule for the auction held on Friday, July 20, 2018.

On July 14, 2018, the announcement of the second auction was regarding "the object of the auction being the object of dispute" through the Kompas and Surabaya Pagi national mass media.

On July 17, 2018, the announcement of the third auction related to "the object of the auction that is being the object of dispute" was announced through the Kompas and Surabaya Pagi national mass media.

Based on the Auction Minutes Copy Number: 778/45/2018 dated July 20, 2018, the assets of the Bank has been executed for auction by the Surabaya District Court as an immovable property.

As of the issuance date of the financial statements, the Bank is still in process of making other legal remedies.

Based on the minutes of the seizure execution of the Central Jakarta District Court on January 3, 2019 and the minutes of the seizure execution of West Jakarta District Court on January 4, 2019, the plaintiff has placed foreclosures on 3 (three) Bank’s assets in Tanah Abang, Pangeran Jaya and Puri Kembangan.

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

e. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

1. Gugatan kepada Bank yang diajukan oleh Investor yang membeli produk investasi *(Discretionary Fund)* milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) terdiri dari: (lanjutan)

   Berdasarkan berita acara sita eksekusi PN Palembang tanggal 29 Januari 2019, Penggugat telah melakukan penyitaan eksekusi terhadap 3 (tiga) aset Bank di Palembang yaitu di Kebumen, Letkol Iskandar dan Sudirman.

   Bank mengajukan permohonan blokir terhadap aset-aset Bank yang telah dilakukan eksekusi penyitaan.

   Bareskrim telah melakukan penyitaan terhadap aset-aset Bank terkait dengan Laporan Polisi dugaan tindak pidana pemalsuan surat dalam proses pembuktian perkara ADS.

   e. Gugatan ganti kerugian (*schadevergoeding*) yang diajukan beberapa investor ADS di Yogyakarta dan Gugatan Intervensi dari Yayasan sebuah Universitas di Yogyakarta kepada Bank melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terdaftar dengan perkara No. 91/Pdt.G/2012/PN.Yk. Para Penggugat menuntut Bank dengan ADS masing-masing sebagai Tergugat dan Turut Tergugat, untuk mengembalikan pokok sebesar Rp 22.700 dan membayar ganti rugi sebesar Rp 10.700. Sedangkan Penggugat Intervensi menuntut Bank mengembalikan pokok sebesar Rp 16.600 dan membayar ganti rugi sebesar Rp 7.700.

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

e. The outstanding legal and fraud cases up to December 2019 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

1. The lawsuit filed against the Bank submitted by investors who bought investment products (Discretionary Fund) issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) consists of: (continued)

   Based on the minutes seizure execution of the PN Palembang on January 29, 2019, the Plaintiff has placed foreclosures on 3 (three) Bank's assets in Palembang, namely in Kebumen, Letkol Iskandar and Sudirman.

   The Bank submits a blocking application to the Bank's assets that have been placed for foreclosure.

   Bareskrim has confiscated the Bank's assets concerning with Police Report of alleged criminal fraud in the process of proving ADS' case.

   e. Lawsuit of a compensation (schadevergoeding) filed by several ADS's investors in Yogyakarta and Intervention Lawsuit from a Foundation of University in Yogyakarta to the Bank through the District Court of Yogyakarta registered by case No. 91/Pdt.G/2012/PN.Yk. The Plaintiffs are suing the Bank together with ADS as the Defendant and Co-Defendant, to return the principal of Rp 22,700 and to pay compensation amounting to Rp 10,700. The Plaintiff Interveniant sue the Bank to return the principal amount of Rp 16,600 and to pay a compensation amounting to Rp 7,700.

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

e. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

1. Gugatan kepada Bank yang diajukan oleh Investor yang membeli produk investasi *(Discretionary Fund)* milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) terdiri dari: (lanjutan)

Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Putusan No. 91/Pdt.G/2012/PN.Yk tanggal 16 Oktober 2013 telah memutuskan bahwa Bank selaku Pelaku Usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Bank untuk mengembalikan kepada penggugat sebesar Rp 22.700 dan membayar ganti rugi sebesar Rp 10.700 serta mengembalikan kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp 16.600 serta membayar ganti rugi sebesar Rp 7.700.

Pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung gugatan penggugat dikabulkan.

Pada tanggal 11 Januari 2017, Bank telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan No. 91/Pdt.G/2012/PN.YK Jo. No. 36/PDT/2014/PT.YK Jo. No. 2330 K/Pdt/2015.

Pada tanggal 27 Desember 2017, Bank telah mendapat Surat No. W13-U1/6089/HK.02.PK/XII/2017 perihal Pemeriksaan Peradilan Tingkat PK dari Bank, Perkara No. 91/Pdt.G/2012/PN.YK Jo. No. 36/PDT/2014/PT.YK Jo. No. 2330 K/Pdt/2015, surat dimaksud pada intinya memberitahukan berkas Bundel A dan Bundel B yang dimohonkan untuk pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Juni 2016 dalam Perkara Perdata antara Bank, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali melawan Bunadi Wijaya, M.Sc, dkk sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali.

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

e. The outstanding legal and fraud cases up to December 2019 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

1. The lawsuit filed against the Bank submitted by Investors who bought investment products (Discretionary Fund) issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) consists of: (continued)

The District Court of Yogyakarta through its Verdict No. 91/Pdt.G/ 2012/PN.Yk dated October 16, 2013 has decided that the Bank as part of business communities committed an unlawful act and punish the Bank to return to the plaintiff an amount of Rp 22,700 and pay a compensation amounting to Rp 10,700 and return to the plaintiff the amount of Rp 16,600 and pay a compensation amounting to Rp 7,700.

At the level of District Court, High Court, and Supreme Court, the claim from plaintiff was granted.

On January 11, 2017, the Bank has submitted a review request to review the Verdict No. 91/Pdt.G/2012/PN.YK Jo. No.36/PDT/2014/PT.YK Jo. No. 2330 K/Pdt/2015.

On December 27, 2017, the Bank received a Letter No. W13-U1/6089/ HK.02.PK/XII/2017 regarding the Judicial Review Examination Level of the Bank, the Case No. 91/Pdt.G/ 2012/PN.YK Jo. No. 36/PDT/2014/ PT.YK Jo. No. 2330 K/Pdt/2015, the letter basically notify files Bundles A and Bundles B that were requested for an examination of the level of Judicial Review of the Decision of the Supreme Court of Indonesia dated June 15, 2016 in the Civil Case between the Bank, as an applicant for Judicial Review against Bunadi Wijaya, M.Sc, and others as Applicants for Judicial Review.

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

e. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

1. Gugatan kepada Bank yang diajukan oleh Investor yang membeli produk investasi *(Discretionary Fund)* milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) terdiri dari: (lanjutan)

Tanggal 20 Maret 2018, Bank telah mendapat Surat dari Mahkamah Agung RI No. 18.223 PK/PDT/2018 Perihal Penerimaan dan Pemberitahuan Register Berkas Perkara Peninjauan Kembali, surat dimaksud pada intinya memberitahukan bahwa berkas perkara perdata yang dimohonkan pemeriksaan Peninjauan Kembali oleh Bank sebagai Pemohon Peninjauan Kembali melawan Bunadi Wijaya, M.Sc, dkk sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali, yang telah dikirim dengan surat pengantar No. W13-U1/6089/HK.02.PK/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, telah diterima pada tanggal 13 Februari 2018 dan telah didaftarkan dengan Register Nomor: 223 PK/PDT/2018.

Tanggal 11 Maret 2019, Bank menerima relaas pemberitahuan isi Putusan Peninjauan Kembali No. 223 PK/PDT/2018 Jo., No. 2230K/PDT/ 2015 Jo., No. 36/PDT/2014/PT.YYK Jo., dan No. 91/Pdt.G/2012/PN.Yyk., yang menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali dari Bank.

f. Gugatan yang diajukan beberapa investor ADS di Jakarta Selatan selaku Penggugat kepada Bank selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menuntut Bank untuk mengembalikan dana sebesar Rp 9.158 dan bunga sebesar Rp 7.205 serta ganti rugi sebesar Rp 10.000. Pada tanggal 20 Agustus 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan Putusan No.718/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Sel yang menolak gugatan yang diajukan oleh para penggugat.

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

e. The outstanding legal and fraud cases up to December 2019 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

1. The lawsuit filed against the Bank submitted by Investors who bought investment products (Discretionary Fund) issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) consists of: (continued)

On March 20, 2018, the Bank has received a Letter from the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 18.223 PK/PDT/2018 regarding the Receipt and Notification of the Judicial Review File Register, the letter basically tells that the civil case file requested for review by the Bank, as the applicant for Judicial Review against Bunadi Wijaya, M.Sc, and others as Judicial Reviewers, who have been sent with a cover letter No. W13-U1/6089/HK.02.PK/XII/2017 dated December 27, 2017, has been received on February 13, 2018 and has been registered with Register Number: 223 PK/PDT/2018.

On March 11, 2019, the Bank received a notification notice of the contents of the Judicial Review Decision No. 223 PK/PDT/2018 Jo., No. 2230K/PDT/ 2015 Jo., No. 36/PDT/2014/PT.YYK Jo., and No. 91/Pdt.G/2012/PN.Yyk., which stated that it refused the request for a review from the Bank.

f. The lawsuit submitted by some ADS's investors in South Jakarta, as the Plaintiff, against the Bank, as the Defendant in the District Court of South Jakarta, which claimed the Bank to return the fund amounting to Rp 9,158 and interest amounting to Rp 7,205 and compensation amounting to Rp 10,000. On August 20, 2015, the District Court of South Jakarta issued Verdict No. 718/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, which rejected the lawsuit submitted by the plaintiffs.

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

e. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

1. Gugatan kepada Bank yang diajukan oleh Investor yang membeli produk investasi *(Discretionary Fund)* milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) terdiri dari: (lanjutan)

Pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, gugatan penggugat telah ditolak. Dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung maka perkara telah berkekuatan hukum tetap dan memenangkan Bank. Sampai saat ini, Bank tidak menerima infomasi pengajuan peninjauan kembali dari penggugat.

g. Gugatan yang diajukan oleh Yonggris yang menyatakan sebagai pemilik sah atas AJB No. 22/2018 tanggal 24 Januari 2018 dan SHGB No. 20084/Patunuang yang merupakan tanah sengketa, dan telah ada penetapan eksekusi ketua PN Surabaya dan mengajukan penetapan sita eksekusi Ketua PN Makassar batal demi hukum.

Aset berupa SHGB No. 20084 yang telah dibeli dari Bank (dahulu SHGB No. 1784/Patunuang) telah dilakukan eksekusi penyitaan oleh Jurusita PN Makassar. Perkembangan atas kasus ini adalah mengabulkan perlawanan Yonggris untuk sebagian dan menyatakan sah atas AJB No. 22/2018 tanggal 24 Januari 2018 dan SHGB No. 20084.

Saat ini perkara dalam pemeriksaan banding pada Pengadilan Tinggi Makassar. Bank menunggu putusan dalam tingkat banding.

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

e. The outstanding legal and fraud cases up to December 2019 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

1. The lawsuit filed against the Bank submitted by Investors who bought investment products (Discretionary Fund) issued by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADS) consists of: (continued)

At the level of District Court, High Court and Supreme Court, the claim from the plaintiff was rejected. Upon the issuance of Supreme Court, the case has been permanent legal force and it won by the Bank. Until to date, the Bank has not received information that the plaintiffs submitted judicial review.

g. Lawsuit filed by Yonggris which states as the legal owner of AJB No. 22/2018 date January 24, 2018 and SHGB No. 20084/Patunuang that is a disputed land, and on which the execution has been determined by the head of the Surabaya District Court and the proposed seizure execution of the Chairperson of the Makassar District Court is null and void.

The asset in the form of SHGB No. 20084 which has been purchased from the Bank (formerly SHGB No. 1784/Patunuang) had been seized by the bailiffs of District Courts of Makassar. The development of this case is to accept the resistance of the opposition for AJB No. 22/2018 dated January 24, 2018 and SHGB No. 20084.

Currently, the case is in a Appeal Hearing at Makassar High Court. The Bank is still waiting for verdict on its appeal.

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

e. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

2. Weston International Asset Recovery Co., Ltd. (WIARCO) telah mengajukan gugatan terhadap Bank di Pengadilan Mauritius dengan dasar gugatan bahwa Bank mempunyai kewajiban pembayaran terhadap Weston sebagai pemegang Obligasi Konversi (OK) yang diterbitkan oleh Bank (dahulu PT Bank Century Tbk) pada tanggal 16 Juni 2006 dan 14 April 2008 dengan nilai masing-masing sejumlah USD 15.000.000 (Catatan 25) dan USD 40.000.000. Pada tanggal 15 Februari 2013, pengadilan Mauritius telah memberikan putusan bahwa Bank wajib untuk membayar kepada Weston sebesar USD 65.350.000 (termasuk bunga dan ditambah dengan bunga berjalan sampai dengan dibayarkannya kewajiban). Menurut pendapat konsultan hukum Bank yaitu Pradjoto & *Associates* dalam suratnya No. 35/PNA/LO-BM.MCB/04/14 tanggal 29 April 2014, sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, putusan Pengadilan Mauritius tidak dapat dieksekusi di Indonesia. Apabila Weston hendak melakukan pelaksanaan putusan Pengadilan Mauritius di Indonesia, maka Weston harus mengajukan gugatan baru terlebih dahulu di Pengadilan Indonesia dan menggunakan hukum di Indonesia.

Weston mengajukan permohonan eksekusi Putusan Pengadilan Mauritius melalui yurisdiksi Pengadilan di New York.

Dengan adanya Putusan Pengadilan Negara Bagian New York *(United States District Court for the Southern District of New York)* tanggal 8 September 2015, maka proses pemeriksaan perkara ini ditunda sampai Weston menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bank.

Pada tanggal 1 Juli 2015, Weston International Asset Recovery Corporation Inc. telah mencabut gugatan sebesar USD 65.350.000 dari pengadilan New York.

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

e. The outstanding legal and fraud cases up to December 2019 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

2. Weston International Asset Recovery Co., Ltd. (WIARCO) has filed a legal claim against the Bank in Mauritius Court with the case that the Bank has an obligation to pay Weston as the Mandatory Convertible Bond (MCB) holder issued by Bank (formerly PT Bank Century Tbk) on June 16, 2006 and April 14, 2008, with an amount of USD 15,000,000 (Note 25) and USD 40,000,000, respectively. As of February 15, 2013, the Mauritius Court has rendered its decision in favor of Weston whereby the Court ordered the Bank to pay to Weston in the amount of USD 65,350,000 (including interest and on going interest). According to the legal opinion from Bank's legal counsel, Pradjoto & Associates as stated in its letter No. 35/PNA/LO-BM.MCB/ 04/14 dated April 29, 2014, under the provisions of applicable law in Indonesia, the decision of Mauritius Court can not be executed in Indonesia. If Weston is willing to execute the decision of Mauritius Court in Indonesia, then Weston must file a new lawsuit in the Indonesian Court and using Indonesian Law as a reference.

Weston submitted the petition for execution of Mauritius Court Verdict through the jurisdiction of the Court in New York.

With the Verdict of United States District Court for the Southern District of New York dated September 8, 2015, the examination process of the case was postponed until Weston settles all obligations to the Bank.

On July 1, 2015, Weston International Asset Recovery Corporation Inc. has submitted voluntarily dismissal on the claim of USD 65,350,000 from the New York court.

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

e. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

3. Gugatan yang diajukan oleh Gavin Goh Meng-meng terkait permohonan pembatalan terhadap seluruh akta yang mengatur tentang penerbitan saham Bank, nilai nominal saham dan pengalihan saham dari LPS kepada Bank, lalu menyatakan komposisi pemegang saham sesuai dengan Akta Notaris No. 22 tanggal 5 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris dan akta No. 112 tanggal 12 Juni 2018 serta menghukum para tergugat untuk membayar tanggung renteng mengganti kerugian sebesar Rp 1.000.663. Perkembangan terakhir atas kasus ini adalah pemanggilan para pihak oleh PN Jakarta Pusat (sidang selanjutnya tanggal 15 Oktober 2019 dan Bank hadir di sidang mediasi).

   Mediasi di perpanjang karena para pihak yang berperkara ada yang tidak hadir, mengingat pihak yang tidak hadir berdomisili di luar negeri. Hakim Mediator perlu memanggil kembali pihak yang tidak hadir secara patut, mediasi selanjutnya dijadwalkan tanggal 5 Februari 2020.

4. Gugatan yang diajukan oleh Priscilia Georgia (Penggugat) dikarenakan saat ini fasilitas kredit debitur telah dialihkan hak tagihnya ke JTII dan jaminan kredit milik Penggugat telah disita JTII sebagai kreditur baru. Penggugat sudah mengajukan perlawanan di PN Cibinong namun ditolak oleh majelis hakim dan saat ini sedang proses banding di Mahkamah Agung Jawa Barat dan debitur kembali mengajukan gugatan melalui PN Jakarta Pusat. Tuntutan atas kasus ini antara lain:

   - Menyatakan bahwa akta perjanjian jual beli piutang Nomor 16 tertanggal 22 Oktober 2015 yang kemudian diikuti dengan perjanjian pengalihan piutang dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

e. The outstanding legal and fraud cases up to December 2019 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

3. The lawsuit submitted by Gavin Goh Meng-meng regarding the cancellation for all deeds governing the issuance of Bank shares, the nominal value of shares and the transfer of shares from LPS to the Bank, then stated the composition of shareholders in accordance with Notary Deed No. 22 dated June 5, 2007 made before Buntario Tigris and deed No. 112 dated June 12, 2018, which sentenced the defendants to pay joint responsibility to compensate for a loss of Rp 1,000,663. The latest development in this case is the calling of the parties by the Central Jakarta District Court (the next agenda on October 15, 2019 and the Bank is present at the mediation hearing).

   The mediation has been extended as the litigants were absent, bearing in mind that those not present are domiciled abroad. The Mediator Judge needs to summon the parties who did not attend properly, wherein the next mediation is scheduled on February 5, 2020.

5. The lawsuit submitted by Priscilia Georgia (Plaintiff) whereas currently the debtor credit facility has been transferred to JTII and the plaintiff's pledge has been confiscated by JTII as a new creditor. The plaintiff has filed a resistance at Cibinong District Court but was rejected by the panel of judges and is currently being appealed at West Java Supreme Court and The debtor filed again a lawsuit through the Central Jakarta District Court. The claims for this cases include:

   - *To declare that the deed of sale and purchase agreement Number 16 dated October 22, 2015 which is then followed by the transfer of receivables agreement should be declared null and void for the sake of law and has no binding legal force.*

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

e. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

- Menyatakan bahwa penetapan eksekusi di PN Cibinong No. 09/PN. Pdt/Sita.Eks.Akte/2018/PN.Cbi tanggal 23 Maret 2018 juga harus dinyatakan batal demi hukum.

- Menetapkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan sertifikat hak milik Nomor: 6274, Kelurahan Ciangsana Kabupaten Bogor, menjadi atas nama Penggugat yang terletak di komplek perumahan Kota Wisata Cluster Pesona Virginia Blok L 1 Nomor 2, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang telah diletakkan akta pemberian hak tanggungan dengan sertifikat hak tanggungan peringkat pertama Nomor: 8978/2012 tanggal 13 Agustus 2012 jo APHT, dan Nomor: 701/2012 tanggal 28 Maret 2012.

- Menghukum Bank dan JTII dan Turut Tergugat lainnya secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 5.000 dan imateril Rp 1.000. Perkembangan kasus ini adalah menunggu sidang lanjutan untuk pembacaan putusan sela.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 176/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, menyatakan mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat (Bank). Saat ini menunggu upaya hukum banding dari Penggugat.

6. Gugatan yang diajukan oleh PT Tjitajam (Penggugat) antara lain: menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, menyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku akta-akta maupun perbuatan hukum lainnya yang timbul, menghukum para tergugat untuk memberikan ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat, kerugian materiil Rp 50.000 dan kerugian imateriil Rp 4.000. Agenda selanjutnya adalah jawaban dari pihak Tergugat dan hukum selanjutnya adalah replik Penggugat.

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

e. The outstanding legal and fraud cases up to December 2019 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

- *To state that the determination of execution at Cibinong District No. 09/PN.Pdt/Sita.Eks.Akte/2018/ PN.Cbi dated March 23, 2018 must also be declared null and void by law and has no binding legal force.*

- *To set seizure guarantee for land and building certificate of ownership Number: 6274, Kelurahan Ciangsana Bogor Regency, to be on behalf of the Plaintiff located in the housing complex Kota Wisata Cluster Pesona Virginia Block L 1 Number 2, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, which has been issued based on the deed of granting rights with certificate of mortgages first rank Number: 8978/2012 dated August 13, 2012 jo APHT, and Number: 701/2012 dated March 28, 2012.*

- *To sentence Bank and JTII and the other Defendant jointly to pay material damages of Rp 5,000 and immaterial assets of Rp 1,000. The development of this case is awaiting a further hearing for the reading of the interlocutory verdict.*

Court Verdict Central Jakarta District Court No. 176/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Pst, decide's grant the exception from Defendant (the Bank). Currently awaiting an appeal from the Plaintiff.

4. The lawsuit submitted by PT Tjitajam (Plaintiff) include: to declare that the defendant have committed an unlawful act which caused harm to the Plaintiff, to declare null and void and do not apply deeds and other legal actions that arise, to punish the defendants to give joint compensation to the Plaintiff, material loss Rp 50,000 and immaterial loss Rp 4,000. The next agenda is the replica from plaintiff.

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

e. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

Posisi Bank sebagai Tergugat: (lanjutan)

7. Gugatan diajukan oleh PT Group Lease Finance Indonesia ("GLFI") yang awalnya merupakan rekanan Bank dalam kerjasama pemberian fasilitas pembiayaan bersama (*channelling*). Penggugat mendalilkan bahwa Bank telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dengan tidak melakukan kewajibannya berdasarkan akta-akta perjanjian pembiayaan bersama.

   Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk menghukum Bank membayar kerugian materiil sebesar Rp 10.404 dan kerugian immaterial sebesar Rp 10.000. Agenda selanjutnya adalah mediasi.

   Mediasi gagal dan perkara kembali diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Selanjutnya tanggal 26 November 2019 dengan agenda penyerahan jawaban dari Tergugat (jawaban adalah yang berisi tanggapan menyeluruh terhadap gugatan).

   Setelah penyerahan jawaban dari Tergugat, selanjutnya agenda Replik dari Penggugat pada tanggal 10 Desember 2019, setelah penyerahan Replik diagendakan kembali dengan agenda sidang penyerahan Duplik dari Tergugat.

   Setelah agenda replik dan duplik, Majelis Hakim mengagendakan kembali dengan agenda bukti sampai dengan tanggal laporan ini, proses persidangan masih berlanjut.

Kasus hukum dimana posisi Bank sebagai Penggugat

1. Bank melakukan gugatan terhadap ADS dan manajemennya pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No. 8/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. Bank telah menerima putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa antara lain:

   a. Bank dibebaskan dari kewajiban untuk mengembalikan uang investor ADS.

   b. Menghukum ADS dan manajemennya untuk mengembalikan uang investor.

   Para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

e. The outstanding legal and fraud cases up to December 2019 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

Bank as the Defendant: (continued)

5. The lawsuit submitted by PT Group Lease Finance Indonesia ("GLFI") which was originally a partner of the Bank in providing joint financing facilities (channelling). The Plaintiff declares Bank has breached the contract (defaulted) by not performing an action under the joint financing agreement.

   The Plaintiff punished the defendant to pay material loss in the amount of Rp 10,404 and immaterial loss in the amount of Rp 10,000. The next agenda is mediation.

   The mediation failed and the case was returned to the Panel of Judges who examined the case. The continuation is on November 26, 2019 with the agenda of submitting the response from the Defendant (the answer is a comprehensive response to the claim).

   After submitting the response from the Defendant, then the Replica's agenda of the Plaintiff is scheduled on December 10, 2019, and after the submission of the Replic it is scheduled again with the agenda of the Duplicate submission session of the Defendant.

   After the replica and duplicate agenda, the Panel of Judges reopened with an evidence agenda and as of the date of this report, the trial process continues.

The Lawsuit filed by Bank as Plaintiff

1. The Bank submitted legal claim to the District Court against ADS and its management at the South Jakarta Court Case No. 8/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, the Bank has received verdict from the South Jakarta District Court among others contains:

   a. The Bank is released from the obligation to refund the investor of ADS.
   b. Punished the defendants to refund to the investor.

   The Parties did not submit an Appeal so the decision of the South Jakarta District Court has permanen legal force.

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

e. Kasus-kasus hukum dan *fraud* yang masih belum selesai sampai bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kasus Perdata: (lanjutan)

2. Bank melakukan gugatan terhadap entitas Weston melalui pengadilan New York untuk menuntut agar terjadi pengalihan kepemilikan/kontrol kepada Bank atas hal-hal sebagai berikut: 1) aset Weston; 2) tiga putusan pengadilan Mauritius melawan Bank; 3) MCB; dan 4) hak atas saham atas entitas Weston.

   Dalam perkembangan terakhir, Pengadilan New York telah mengabulkan ketiga tuntutan tersebut. Akan tetapi Weston kemudian mengajukan banding kepada Pengadilan atas putusan pengadilan New York. Akan tetapi dalam perkembangannya permohonan banding dari Weston ditolak oleh Pengadilan New York dan pengadilan New York menguatkan putusan sebelumnya. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, manajemen Bank masih berkoordinasi dengan kuasa hukum Bank di New York untuk menentukan langkah hukum selanjutnya serta menunggu langkah selanjutnya yang akan diambil oleh WCAI.

3. Gugatan diajukan oleh Bank terhadap PT Group Lease Finance Indonesia ("GLFI") yang awalnya merupakan rekanan Bank dalam kerjasama pemberian fasilitas pembiayaan bersama (*channelling*), karena wanprestasi tidak membayarkan angsuran yang telah dibayar para *end user* walaupun telah ditegur dan diberi peringatan. Dengan wanptrestasinya GLFI, maka Bank memutuskan perjanjian kerjasama sehingga GLFI memiliki kewajiban untuk seketika dan sekaligus membayar lunas semua hutang-hutang GLFI kepada Bank sebesar Rp 97.767 serta ganti kerugian materiil sebesar Rp 1.000. Namun gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri terkait.

   Status terakhir, Bank sedang mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi.

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

e. The outstanding legal and fraud cases up to December 2019 are as follows: (continued)

Civil Cases: (continued)

2. The Lawsuit filed by Bank against Weston entities through the New York court to claim of the turnover of the below to the Bank: 1) Weston's assets; 2) three Mauritius judgments against Bank; 3) the MCBs; and 4) the equity interests in the Weston entities themselves.

   Based on the latest condition, the New York Court has granted these three claims. However, Weston appealed to the Court over the New York court verdict. However, in its application, the Weston's appeal was rejected by the New York Court and the New York Court upheld the previous decisions. As of the date of this financial statement, the Management of the Bank is coordinating with the Legal Counsel of the Bank in New York to determine the next action and wait for the next step to be taken by WCAI.

3. The Lawsuit filed by Bank against PT Group Lease Finance Indonesia ("GLFI") which was originally a partner of the Bank in providing joint financing facilities (channelling), because of the default by not paying installment that have been paid by end users even though it has been reprimanded and given a warning. With the default of GLFI, the Bank interrupt the joint agreement, so that GLFI has the obligation to immediately and simultaneously pay all GLFI debts to the Bank in the amount of Rp 97,767 as well as material loss in the amount of Rp 1,000. However, the claim was declared unacceptable by the relevant District Court.

   The latest status, the Bank is filling an appeal to the High Court.

50. PERIKATAN, PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

f. Kasus pidana

Mantan direksi dan mantan karyawan Bank menghadapi beberapa tuntutan hukum dari pihak-pihak tertentu atas dugaan tindakan pidana yang dilakukan, dimana sebagian masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, sebagian telah memasuki tahap persidangan dan ada pula yang sudah mendapat putusan tetap dan/atau dalam proses peninjauan kembali. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, tuntutan hukum tersebut masih sedang dalam proses hukum dan hasil akhir dari proses hukum tersebut belum dapat diperkirakan.

g. Sewa Gedung

Bank mengadakan perjanjian sewa gedung dengan PT Sahid dengan Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor tanggal 20 Mei 2015 atas sewa gedung yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta. Nilai sewa gedung tersebut sebesar Rp 259.696 dengan luas ruang yang disewa seluas 7.655 meter persegi dan untuk periode sewa dari tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2026. Pembayaran sewa minimal sebagai berikut:

50. COMMITMENTS, AGREEMENTS AND OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

f. Criminal cases

The Bank's former directors and employees had several lawsuits from certain parties on suspicion of criminal acts committed, where some are still in the stage of the investigation and inspection, some have entered the stage of the proceeding to the courts and some already have the final decision and/or in the process of judicial review remedies. As of the issuance date of the financial statements, the lawsuits have been subjected to the legal proceedings and the outcome of these legal proceedings can not be determined yet.

g. Office Lease

The Bank entered into a building rental agreement with PT Sahid as covered by lease agreement dated May 20, 2015, for building rental at Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta. The rental charges amounted to Rp 259,696 with rental space of 7,655 square meters and covering period from January 2, 2016 up to January 1, 2026. The minimum lease payments is as follows:

	2019	2018	
Pembayaran sewa minimal			***Minimum lease payments***
Kurang dari satu tahun	22.795	46.995	*Less than one year*
1 sampai 5 tahun	57.554	49.991	*1 to 5 years*
Diatas 5 tahun	95.262	101.499	*More than 5 years*
Total	**175.611**	**198.485**	***Total***

51. INFORMASI LAINNYA

a. Penerapan Tata Kelola Yang Baik

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/ 2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. PT Bank JTrust Indonesia Tbk melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan bisnis sesuai nilai-nilai pokok yang tertuang dalam tata kelola yang baik. Hal ini dilaksanakan sebagai bagian utama dari "*governance structure",* dengan didukung ketersediaan dan kesiapan infrastruktur lainnya untuk melakukan proses (*governance process*). Dalam pelaksanaannya mengutamakan prinsip moral dan etika serta praktik bisnis perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dicapai suatu hasil (*governance outcome*) yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Tata Kelola yang baik.

Etika dan perilaku merupakan pilar terpenting dalam membangun suatu budaya perusahaan yang bertanggung jawab. Oleh karenanya, standar dan perilaku bisnis serta tingkah laku pribadi yang etis ditetapkan dalam Buku Etika Korporasi Perusahaan yang berlaku untuk seluruh karyawan dan manajemen tanpa terkecuali. Penerapan regulasi serta prinsip dasar Tata Kelola yang baik pada industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka untuk memperhatikan dan melindungi kepentingan semua pihak (*stakeholders*) serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

51. OTHER INFORMATION

a. Implementation of Good Corporate Governance (GCG)

In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning Good Corporate Governance Implementation by Commercial Bank. PT Bank JTrust Indonesia Tbk, through the Board of Commissioners, Directors and all employees are committed to implement the basic principles of Good Corporate Governance (GCG) and conservatism principles in any business activities with appropriate basic values contained in GCG. It is implemented as a major part of the "governance structure", supported by the availability and readiness of other infrastructure to process (governance process). The priority is the implementation of moral and ethical principles and practices for sound banking business in accordance with applicable regulations, is to achieve an outcome (governance outcome) in accordance with GCG basic principles.

Ethics and behavior is the most important pillar in building a responsible corporate culture. Therefore, the standards and conduct of business and personal ethical behavior as set out in the Book of the Company's Corporate Ethics are applicable to all employees and management without exception. The application of regulations as well as basic principles of good corporate governance in the banking industry is a key requirement in order to protect the interests of all parties (stakeholders) and to take into consideration the interests and free from conflict of interest.

51. INFORMASI LAINNYA (lanjutan)

a. Penerapan Tata Kelola Yang Baik (lanjutan)

Penerapan Tata Kelola yang baik mencakup implementasi dari 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik yakni: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik, Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala yang paling sedikit meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola Yang Baik sebagai berikut:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
- Penanganan benturan kepentingan.
- Penerapan fungsi kepatuhan Bank.
- Penerapan fungsi audit intern.
- Penerapan fungsi audit ekstern.
- Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related parties*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola yang baik dan pelaporan internal.
- Rencana strategis Bank.

Selain dari 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang baik, perlu diperhatikan informasi lain yang terkait dengan penerapan Tata Kelola Bank seperti permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi Bank atau perselisihan intern Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.

5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik tersebut akan mendukung pelaksanaan 4 (empat) bidang utama penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang secara berkelanjutan menjadi fokus perbaikan antara lain: Penguatan Permodalan (*Capital*), Pendapatan (*Earnings*), Perbaikan Penerapan Tata Kelola dan Perbaikan risiko (*Risk Profile)*. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Tingkat Risiko (*Risk Based Bank Rating*/RBBR) tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

51. OTHER INFORMATION (continued)

a. Implementation of Good Corporate Governance (GCG) (continued)

The implementation of GCG includes the implementation of the 5 (five) basic principles of GCG: transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness. In order to ensure the application of the 5 (five) basic principles of GCG, Bank must do self-assessment periodically and containing at least 11 (eleven) GCG assessment factors as follows:

- *Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors.*
- *Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners.*
- *Completeness and task implementation of the Committee.*
- *Conflicts of interest handling.*
- *Compliance function implementation.*
- *Internal audit function implementation.*
- *External audit function implementation.*
- *Risk management application including internal control system.*
- *Provision of funds to related parties and large exposure.*
- *Transparency of financial and non-financial condition of the Bank, GCG implementation and internal reports.*
- *Bank's strategic plan.*

In addition to the 11 (eleven) appraisal factors for the implementation of Good Corporate Governance, considerate to other information relating for implementation of the Bank's Governance as an impact of remuneration policy or internal disputes that interfere with the Bank's operational and/or business operations.

The 5 (five) basic principles of GCG will support the implementation of the 4 (four) that major areas of the Bank's Soundness Rating that are continuously become the focus of improvement among others: Capital Strengthening (Capital), Income (Earnings), Corporate Governance Improvement and Risk Profile Improvement. Bank Rating is based on Level of Risk (Risk Based Bank Rating/RBBR) contained in POJK No. 4/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2017 date March 17, 2017 on the Assessment of Commercial Banks Soundness Level.

51. INFORMASI LAINNYA (lanjutan)

a. Penerapan Tata Kelola Yang Baik (lanjutan)

Selanjutnya, menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 maka Bank terus berupaya menguatkan permodalan. Untuk kemudian pada fase selanjutnya bank berupaya melakukan penguatan implementasi *internal control* dan peningkatan kualitas bisnis kembali pada tahun kedepan melalui rencana pengembangan bisnis yang lebih terfokus pada bidang *commercial loans,* SME *loans* serta produk yang berbasis teknologi sehingga dapat memperbaiki komposisi pendanaan pada CASA dan perolehan *fee-based income* yang lebih baik. Selain itu, penurunan biaya dana (*cost of funds*) dan efisiensi biaya *overhead.*

b. Susunan Pengurus Bank

Memperhatikan susunan pengurus terbaru Bank untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dari keputusan hasil RUPS Tahunan pada tanggal 27 Juni 2019, maka jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan anggota Direksi sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

c. Penyelamatan Aset Bank

Salah satu upaya yang dilakukan oleh manajemen saat ini adalah membentuk fungsi penyelamatan aset untuk menelusuri, menyelamatkan dan menyelesaikan aset-aset Bank yang diduga bermasalah (*asset recovery*), melakukan pemetaan, analisa dan rekomendasi mengenai kondisi seluruh aset, baik berupa pinjaman diberikan, surat berharga, agunan pinjaman dan aset-aset lainnya.

Dalam rangka penyelamatan aset Bank, selain membentuk fungsi penyelamatan aset, dalam struktur organisasi Bank juga membentuk *Spesial Asset Management Division* (SAMD) yang merupakan divisi yang menangani restrukturisasi pinjaman bermasalah, realisasi upaya penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), hapus buku aset dan *collection*. Selain itu Bank juga melakukan pengalihan piutang terhadap debitur-debitur NPL.

51. OTHER INFORMATION (continued)

a. Implementation of Good Corporate Governance (GCG) (continued)

Further, based on the Financial Services Authority Regulation No. 6/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 regarding Business Activities and Office Network based on Bank's Core Capital, as amended by the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.03/2018 dated August 15, 2018 the Bank continues to strengthen capital. For the next phase, the Bank seeks to strengthen the implementation of the internal control and improve the quality of business through business development plan that is more focused on the field of commercial loans, SME loans as well as product that is based on the technology so as to improve funding composition in CASA and the acquisition of the better fee-based income. In addition, the decrease of cost of funds and efficiency of overhead cost.

b. The Bank's Organizational Structure

Looking at the latest organization structure of the Bank for the Board of Commissioners and Directors of the results of the Annual General Meeting of Shareholder's decision on June 27, 2019, the number and composition of the Board of Commissioners as compared to members of the Board of Directors already met the regulations.

c. Recovery of the Bank's Assets

One of the management effort was to establish assets recovery function to investigate, secure and recover the Bank's non-performing assets, prepared mapping, analysis and provided recommendation on the condition of the overall assets such as loans, securities, loan collaterals and other assets.

In order to recover the Bank's assets, besides establishing an assets recovery function, the Bank also set-up Special Asset Management Division (SAMD) as the division which handles restructuring of non-performing loans, the realization of the sale of foreclosed assets (AYDA), written-off of assets and collections. In addition, the Bank also transfers receivables of NPL debtors.

51. INFORMASI LAINNYA (lanjutan)

c. Penyelamatan Aset Bank (lanjutan)

Bank senantiasa mendukung upaya pengembalian aset-aset Bank di luar negeri yang dilaksanakan oleh Tim Bersama Penyelesaian Permasalahan Aset Bank (dahulu PT Bank Century Tbk) yang anggotanya terdiri dari Kementerian Keuangan, Kepolisian Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia, Kejaksaan Agung, LPS, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 220/KMK.01/2009 mengenai Pembentukan Tim Bersama Penanganan Permasalahan Bank.

d. Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Mengacu juga pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.01/2017 Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Perbankan, serta ketentuan terkait yang diterbitkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

51. OTHER INFORMATION (continued)

c. Recovery of the Bank's Assets (continued)

The Bank always support the efforts to recover the Bank's assets overseas by the Joint Team for Settlement of Non-Performing Assets of the Bank's (formerly PT Bank Century Tbk), in which the members consist of Ministry of Finance, Police Department of the Republic of Indonesia, Financial Services Authority (formerly Indonesia Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency), Financial Transaction Reports and Analysis Center (FTRAC), Bank Indonesia, Attorney General, LPS, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Law and Human Rights, based on Ministry of Finance Decree No. 220/KMK.01/2009 regarding the Establishment of Joint Team for Handling the Bank's Problems.

d. Implementation of Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT)

The application of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT) refers to the Law of the Republic of Indonesia No. 8 Year 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering and the Law of the Republic of Indonesia No. 9 Year 2013 concerning Preventing and Combating Terrorism Financing Criminal Offense. Referring also to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism in Financial Services Sector, Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 23/POJK.01/2019 Regarding Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.01/2017 Regarding the Implementation of Anti Money Laundering Programs and with amendments thereto and Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.03/2017 concerning Application of AML and CFT Program in Banking Sector, as well as the relevant provisions issued by the Center for Financial Transaction Reporting and Analysis (FTRAC).

51. INFORMASI LAINNYA (lanjutan)

d. Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) (lanjutan)

Bank telah melaksanakan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), antara lain sebagai berikut:

1. Melaporkan secara berkala pelaksanaan penerapan APU dan PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam rangka pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Melakukan peninjauan dan perbaikan atas kecukupan kebijakan dan prosedur dalam penerapan APU dan PPT di Bank, untuk memastikan sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme.

3. Melakukan analisa dan reviu atas rencana produk dan aktivitas baru untuk memastikan telah memperhatikan peraturan APU dan PPT.

4. Melakukan pengendalian internal melalui program audit internal yang dilaksanakan secara berkala.

5. Meningkatkan fungsi Sistem Informasi pendukung dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada otoritas atau regulator serta pelaksanaan pemantauan tingkat risiko nasabah berdasarkan profil dan transaksi yang dilakukan.

6. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam penerapan APU dan PPT kepada seluruh karyawan Bank.

7. Melaksanakan kewajiban pelaporan kepada pihak otoritas (PPATK dan OJK), berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan APU dan PPT di Indonesia.

8. Turut membantu Institusi Penegak Hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

9. Bekerjasama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam mengembangkan dan mengimplementasikan *risk and compliance awareness.*

51. OTHER INFORMATIONS (continued)

d. Implementation of Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) (continued)

The Bank has implemented programs on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT) programs, among others, as follows:

1. Report about AML and CFT Implementation in periodically to Directors and Board of Commissioners, in the context of supervision by the Directors and Board of Commissioners.

2. Review and improve on the adequacy of policies and procedures in the implementation of AML and CFT in the Bank, to ensure that they are in line with changes and development of Bank product, services and technology and in accordance with developments in the made of money laundering or terrorism financing.

3. Analyze and review the plans for new products and activities to ensure that they pay attention to AML and CFT.

4. Conduct internal control through internal audit program as conducted periodically.

5. Improve the function of Information System in order to support reporting to authorities/regulators as well as monitoring implementation of client's risk rating based on profile and transactions.

6. Improve the understanding and ability in the application of AML and CFT to all employees of the Bank.

7. Implement reporting obligations to the authorities (PPATK and OJK), under the rules and regulations governing the implementation of AML and CFT in Indonesia.

8. Participate the Law Enforcement Institutions in the prevention and combat of money laundering and terrorism financing.

9. Cooperate with the Risk Management Working Unit in developing and implementing risk and compliance awareness.

51. INFORMASI LAINNYA (lanjutan) / ***51. OTHER INFORMATIONS (continued)***

e. Perhitungan rasio keuangan / *e. Financial ratios calculation*

	2019	2018	
	%	%	
Permodalan			***Capital***
Rasio KPMM yang tersedia untuk risiko kredit dan risiko operasional	14,59	14,10	*CAR with credit and operational risk*
Rasio KPMM yang tersedia setelah memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	14,53	14,03	*CAR with credit, market and operational risk*
Aset tetap terhadap modal	12,89	12,44	*Fixed assets to capital*
Aset produktif			***Earnings assets***
Aset produktif bermasalah	0,84	7,13	*Non-performing earning assets*
Pinjaman yang diberikan - bermasalah kotor	1,49	4,26	*Non-performing loans - gross*
Pinjaman yang diberikan bermasalah - neto	0,80	3,12	*Non-performing loans - net*
Pembentukan Penyisihan Aset Produktif (PPAP) terhadap aset produktif	1,02	4,59	*Allowance for Possible Losses (PPAP) on earning assets*
Pemenuhan PPAP	70,19	82,49	*Allowance for possible losses (PPAP) compliance*
Rentabilitas			***Rentability***
Rasio laba (rugi) sebelum pajak terhadap rata-rata aset (ROA)	0,29	(2,25)	*Return on Assets Ratio (ROA)*
Rasio laba (rugi) setelah pajak terhadap rata-rata ekuitas (ROE)	4,24	(29,13)	*Return on Equity Ratio (ROE)*
Margin bunga bersih	0,39	2,28	*Net Interest Margin*
Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	99,92	116,32	*Operating Expenses to Operating Revenues Ratio (BOPO)*
Likuiditas			***Liquidity***
Rasio Kredit yang Diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (LFR)	48,77	77,43	*Loan to Funding Ratio (LFR)*
Kepatuhan			***Compliance***
Giro Wajib Minimum (GWM)			*Minimum Statutory Reserve (GWM)*
GWM primer Rupiah	11,14	14,66	*Primary reserve in Rupiah*
Harian	7,43	9,77	*Daily*
Rata-rata	3,71	4,89	*Average*
PLM	12,87	20,35	*PLM*
GWM mata uang asing	33,45	10,34	*Reserve in foreign currencies*
Posisi Devisa Neto (PDN)	0,74	1,82	*Net Open Position (NOP)*

52. KELANGSUNGAN USAHA

Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa Bank akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank mengalami akumulasi kerugian operasional yang mengakibatkan defisit masing-masing sebesar Rp 11.359.219 dan Rp 11.408.714.

Untuk memperbaiki kondisi ini, Bank mempersiapkan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Bank berencana untuk memperkuat permodalannya. Bank memiliki rencana untuk mengumpulkan dana yang merupakan campuran ekuitas dan utang.

b. Bank juga terus memantau eksposur dalam mata uang dan memberlakukan kebijakan yang cocok untuk mengurangi risiko.

c. Bank juga berencana untuk melakukan langkah-langkah untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keuntungan.

Pemegang saham utama dalam surat tertanggal 31 Desember 2019, menyatakan persetujuannya untuk memberikan dukungan finansial kepada Bank dengan tujuan agar Bank mampu memenuhi kewajibannya dimasa mendatang.

52. GOING CONCERN

The financial statements have been prepared assuming that the Bank will continue to operate as a going concern entity. As of December 31, 2019 and 2018, the Bank experienced accumulated operating losses which resulted to a net deficit amounting to Rp 11,359,219 and Rp 11,408,714, respectively.

To improve this condition, the Bank has prepared the following plans:

a. The Bank is plans to strengthen its capital base. The Bank has plans to raise funds which is combination of equity and debt.

b. The Bank also closely monitors its exposure in currencies and applies suitable policies to mitigate this risk.

c. The Bank also plans to undertake measures to reduce its operational cost and improve profitability.

The majority shareholder in a letter dated December 31, 2019 stated its agreement to provide financial support to the Bank so as to enable the Bank to fulfill its future obligations.

53. HAL LAINNYA

Kasus Hukum

Bank sedang menghadapi kasus-kasus hukum. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, beberapa pihak telah mengajukan tuntutan hukum kepada Bank di pengadilan di dalam maupun di luar negeri. Sampai dengan tanggal laporan ini, tuntutan hukum adalah subyek dari proses hukum dan keputusan atas tuntutan hukum tersebut masih tertunda. Hasil final dari kasus-kasus tersebut belum dapat ditentukan oleh Bank.

53. OTHER MATTERS

Legal Cases

The Bank is facing several legal cases. Until December 31, 2019, several parties have filed legal cases against the Bank in courts both in and outside the country. As of the date of this report, these legal cases are the subjects of legal proceedings and decisions on such cases are still pending. The final decision of the legal cases has not been determined by the Bank.

54. PRAKARSA PENGUNGKAPAN

Berikut merupakan rekonsiliasi atas perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan:

54. DISCLOSURE INITIATIVES

The following is the reconciliation of movements of liabilities to cash flows arising from financing activities:

Komponen dari aktivitas pendanaan (diluar ekuitas)	1 Januari/ *January 1, 2019*	Kas/ *Cash*	Non-kas/ *Non-cash*	Pergerakan valuta asing/ *Movement of foreign exchange*	31 Desember/ *December 31, 2019*	*Component of financing activities (excluding equity)*
Pinjaman subordinasi	143.800	400.000	(142.125)	(1.675)	400.000	*Subordinated loan*
Obligasi konversi	215.700	-	(212.100)	(3.600)	-	*Convertible bonds*
Total	**359.500**	**400.000**	**(354.225)**	**(5.275)**	**400.000**	***Total***

Komponen dari aktivitas pendanaan (diluar ekuitas)	1 Januari/ *January 1, 2018*	Kas/ *Cash*	Non-kas/ *Non-cash*	Pergerakan valuta asing/ *Movement of foreign exchange*	31 Desember/ *December 31, 2018*	*Component of financing activities (excluding equity)*
Pinjaman subordinasi	339.188	143.533	(353.375)	14.454	143.800	*Subordinated loan*
Obligasi konversi	203.513	-	-	12.187	215.700	*Convertible bonds*
Total	**542.701**	**143.533**	**(353.375)**	**26.641**	**359.500**	***Total***

55. TRANSAKSI NON-KAS

55. NON-CASH TRANSACTIONS

	2019	2018	
Reklasifikasi pinjaman subordinasi ke komponen ekuitas lain	142.125	353.375	*Reclassification of subordinated loan to other component of equity*
Reklasifikasi ke agunan yang diambil alih	-	86.292	*Reclassification to foreclosed assets*
Aset tetap yang dihapusbukukan	350	19.153	*Written-off fixed assets*
Pinjaman yang dihapusbukukan	20.558	6.805	*Written-off loans*

56. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Legal - Gugatan perbuatan melawan hukum dari investor ADS di Surabaya melalui Pengadilan Negeri Surabaya

Pada tanggal 14 Januari 2020, Bank telah mendapat surat pemberitahuan pelaksanaan lelang eksekusi No. 19/2019Del Jo. No. 31/Eks/2016/PN.Sby Jo. No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby yang intinya telah memberitahukan kepada Bank selaku Termohon Eksekusi, bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III akan melaksanakan eksekusi lelang (penjualan di muka umum) (tidak terjadi lelang eksekusi) (Catatan 50).

Berdasarkan hal tersebut diatas, pelaksanaan lelang yang sebagaimana telah terjadwal tidak terlaksana dikarenakan ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

56. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Legal - the Lawsuit from ADS investors in Surabaya throught District Court of Surabaya

On January 14, 2020, the Bank has received a notification letter on the execution of the auction No. 19/2019 Del Jo. No. 31/Eks/2016/PN.Sby Jo. No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby which in essence has informed the Bank as the Respondent Execution, that the Chairperson of the West Jakarta District Court, through the intermediaries of the Office of State Assets and Jakarta Auction III, will carry out auction execution (public sales) (not occurring execution auction) (Note 50).

Based on the above, the scheduled auction has not been carried out because there was one condition that has not been met which is the Land Registration Certificate (SKPT).

56. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Legal - Gugatan perbuatan melawan hukum dari investor ADS di Surabaya melalui Pengadilan Negeri Surabaya (lanjutan)

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020, Bank telah mendapat surat pemberitahuan pelaksaan lelang eksekusi No. 18/2018.Del.PN.Jkt.Pst Jo. No. 31/Eks/2016/PN.Sby Jo. No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby yang intinya telah memberitahukan kepada Bank selaku Termohon Eksekusi, bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta akan melaksanakan eksekusi lelang (penjualan di muka umum) (tidak terjadi lelang eksekusi) (Catatan 50).

Berdasarkan hal tersebut diatas, pelaksanaan lelang yang sebagaimana telah terjadwal tidak terlaksana dikarenakan didalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terdapat sita pidana yang diajukan oleh bank.

Pinjaman Subordinasi III

Berdasarkan Surat OJK No. S-8/PB.31/2020 tanggal 24 Januari 2020, OJK menyetujui untuk pelaksanaan konversi pinjaman subordinasi dari sebelumnya bersifat non perpetual menjadi perpetual sehingga pencatatannya dapat direklasifikasi dari komponen Modal Pelengkap menjadi komponen Modal Inti Tambahan.

Pernyataan Keputusan Rapat

Pada tanggal 17 Januari 2020 telah diadakan Rapat yang membahas tentang perubahan susunan pengurus perseroan dan telah dinyatakan dalam Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 61 pada tanggal 17 Januari 2020 yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0056880 tanggal 31 Januari 2020.

Penawaran Umum Saham Bank

Mengacu kepada Pengumuman Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) Tercatat di Papan: Pengembangan No. Peng-UPT-00001/ BEI.PP3/01-2020, Bursa Efek Indonesia telah memutuskan untuk mencabut penghentian sementara perdagangan efek PT Bank JTrust Indonesia Tbk di seluruh Pasar mulai dari sesi *pre-opening* pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020.

56. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

Legal - the Lawsuit from ADS investors in Surabaya throught District Court of Surabaya (continued)

Whereas on January 21, 2020, the Bank received a notice of the implementation of the auction execution No. 18/2018.Del.PN.Jkt.Pst Jo. No. 31/Eks/2016/PN.Sby Jo. No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby which in essence has informed the Bank as the Respondent, that the Chairperson of the Central Jakarta District Court, through the intermediaries of the Jakarta Office of State Assets and Auction Services, will carry out auction execution (public sales) (not auction execution) (Note 50).

Based on the above, the scheduled auction has not been carried out because there was a criminal confiscation filed by the bank in the Land Registration Certificate (SKPT).

Subordinated Loan III

Based on OJK's Letter No. S-8/PB.31/2020 dated January 24, 2020, OJK agreed on the implementation of the conversion of subordinated loans from formerly non-perpetual to perpetual so that its record may be reclassified from component of the Bank's Supplementary Capital to Additional Core Capital.

Statement of Meeting Decision

On meeting held on January 17, 2020, there was discussion on changes in the management composition of the Bank and as covered by Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 61 dated January 17, 2020 which was accepted and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Letter No. AHU-AH.01.03-0056880 dated January 31, 2020.

Public Offering of the Bank's Shares

Referring to the Announcement of the Temporary Revocation of the Securities Trading of PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC), listed on the Board: Development No. Peng-UPT-00001/BEI.PP3/01-2020, the Indonesia Stock Exchange has decided to lift the temporary suspension of PT Bank JTrust Indonesia Tbk's securities trading in all markets starting from the pre-opening session on Wednesday, January 8, 2020.

56. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Penawaran Umum Saham Bank (lanjutan)

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan kewajaran proses pembentukan harga, maka pelaksanaan perdagangan saham Bank di Pasar Reguler pada tanggal 8 Januari 2020 dilaksanakan melalui sesi *pre-opening* dengan mengacu pada Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Khusus.

Surat Ketetapan Pajak Tahun 2015

Pada tanggal 16 Januari 2020, Bank telah membayar sebagian dari SKPKB dan STP yang diterima untuk tahun pajak 2015 sebesar Rp 4.980 dan menyampaikan surat keberatan sebesar Rp 22.881 pada tanggal 20 Februari 2020 (Catatan 37b).

56. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

Public Offering of the Bank's Shares (continued)

Furthermore, in order to realize the fairness of the process of price formation, the implementation of stock exchange trade in the Regular Market on January 8, 2020 was carried out through a pre-opening session with reference to Rule Number II-A concerning Special Securities Trading.

Tax Assessment Letter Year 2015

On January 16, 2020, the Bank had partially paid the SKPKB and STP for fiscal year 2015 amounting to Rp 4,980 an and filed an objection letter for Rp 22,881 on February 20, 2020 (Note 37b).

57. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan periode berjalan diungkapkan di bawah ini:

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2020:

- PSAK 71 - "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72 - "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73 - "Sewa"
- Amandemen PSAK 15 - "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amandemen PSAK 62 - "Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK 1 - "Penyajian Laporan Keuangan: Definisi Material" dan Amandemen PSAK 25 - "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Material"

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2021:

- Amandemen PSAK 22 - "Definisi Bisnis"

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2020:

- PSAK 74 - "Kontrak Asuransi"

Bank sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan.

57. NEW PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current period financial statements are disclosed below:

Effective on or after January 1, 2020:

- *PSAK 71 - "Financial Instruments"*
- *PSAK 72 - "Revenue from Contracts with Customers"*
- *PSAK 73 - "Leases"*
- *Amendments to PSAK 15 - "Investments in Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures"*
- *Amendments to PSAK 62 - "Insurance Contracts Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts"*
- *Amendments to PSAK 1 - "Presentation of Financial Statements: Definition of Material" and Amendments to PSAK 25 - "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Material"*

Effective beginning on or after January 1, 2021:

- *Amendment PSAK 22 - "Definition of Business"*

Effective beginning on or after January 1, 2020:

- *PSAK 74 - "Insurance Contracts"*

The Bank is still assessing the impact of these accounting standards and interpretations on the financial statements.

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun Fiskal 31 Desember 2019 (IFRS)

Entitas Induk
Parent Company

Consolidated Financial Results for Fiscal
Year Ended December 31, 2019 (IFRS)

Consolidated Financial Results
For the Fiscal Year Ended December 31, 2019 (IFRS)

February 13, 2020

Company name: J Trust Co., Ltd. Stock exchange: Tokyo Stock Exchange
URL: https://www.jt-corp.co.jp/en/ Securities code: 8508
Representative: Nobuyoshi Fujisawa, Representative Director, President & CEO
Contact: Taiji Hitachi, Director and Executive Officer
Telephone: +81-3-4330-9100

Scheduled date of ordinary general meeting of shareholders: March 26, 2020
Scheduled date of commencement of dividend payment: March 27, 2020
Scheduled date of filing of annual securities report: March 27, 2020
Preparation of supplemental materials for financial results: Yes
Holding of earnings presentation (for institutional investors): Yes

(Figures rounded down to the nearest million yen)

I. Consolidated financial results for the fiscal year ended December 31, 2019 (April 1, 2019 - December 31, 2019)

1. Consolidated operating results

(% indicates year-on-year changes)

	Operating revenue		Operating profit		Profit before tax		Profit		Profit attributable to owners of parent		Total comprehensive income	
Fiscal year ended	million yen	%	million yen	%	million yen	%	million yen	%	million yen	%	million yen	%
Dec. 31, 2019	58,105	-	287	-	(312)	-	(3,725)	-	(3,249)	-	(4,398)	-
Mar. 31, 2019	74,935	0.8	(32,600)	-	(31,135)	-	(36,676)	-	(36,107)	-	(37,859)	-

	Basic earnings per share	Diluted earnings per share	Ratio of profit to equity attributable to owners of parent	Ratio of profit before tax to total assets	Ratio of operating profit to operating revenue
Fiscal year ended	yen	yen	%	%	%
Dec. 31, 2019	(30.69)	(30.69)	(3.2)	(0.0)	0.5
Mar. 31, 2019	(349.70)	(349.70)	(29.1)	(4.7)	(43.5)

Note 1: Share of profit (loss) of investments accounted for using equity method
Fiscal year ended Dec. 31, 2019: (9) million yen Fiscal year ended Mar. 31, 2019: (36) million yen

Note 2: Fiscal year ended Dec. 31, 2019 is a 9-month period from April 1, 2019 to Dec. 31, 2019 due to the change in the Company's accounting period. Thus year-on-year changes are omitted.

2. Consolidated financial position

	Total assets	Total equity	Equity attributable to owners of parent	Ratio of equity attributable to owners of parent to total assets	Equity per share attributable to owners of parent
As of	million yen	million yen	million yen	%	yen
Dec. 31, 2019	731,268	118,953	100,006	13.7	944.61
Mar. 31, 2019	668,377	110,727	104,173	15.6	983.96

3. Consolidated cash flows

	Cash flows from operating activities	Cash flows from investing activities	Cash flows from financing activities	Cash and cash equivalents at end of period
Fiscal year ended	million yen	million yen	million yen	million yen
Dec. 31, 2019	(20,829)	15,431	18	81,913
Mar. 31, 2019	18,831	(15,190)	(525)	87,150

II. Dividends

	Annual dividends					Total dividends	Dividend payout ratio (consolidated)	Ratio of total amount of dividends to equity attributable to owners of parent (consolidated)
	1Q end	2Q end	3Q end	Fiscal year end	Total			
Fiscal year ended	yen	yen	yen	yen	yen	million yen	%	%
Mar. 31, 2019	-	6.00	-	1.00	7.00	724	-	0.6
Dec. 31, 2019	-	0.00	-	1.00	1.00	105	-	0.1
Fiscal year ending Dec. 31, 2020 (Forecast)	-	-	-	1.00	1.00		-	

III. Consolidated financial forecasts for the fiscal year ending December 31, 2020 (Jan. 1, 2020 - Dec.31, 2020)

(% indicates year-on-year changes)

	Operating revenue		Operating profit		Profit attributable to owners of parent		Basic earnings per share
	million yen	%	million yen	%	million yen	%	yen
Full year	86,511	-	1,681	-	(1,657)	-	(15.65)

Note: Fiscal year ended December 31, 2019 is a 9-month period from April 1, 2019 to December 31, 2019 due to the change in the Company's accounting periods. Thus year-on-year changes are omitted.

(Notes)

(1) Changes in significant subsidiaries during the current period
(change in specified subsidiaries resulting in a change in the scope of consolidation): Yes

Added: (one) J Trust Royal Bank Ltd. (formerly known as ANZ Royal Bank (Cambodia) Ltd.)

(2) Changes in accounting policies and accounting estimates

(i) Changes in accounting policies required by IFRS: Yes

(ii) Changes in accounting policies other than IFRS requirements: No

(iii) Changes in accounting estimates: No

Note: For details, please refer to III. Consolidated financial statements and significant notes thereto, (Changes in accounting policies) on Page 14.

(3) Number of issued and outstanding shares (common shares)

(i) Number of issued and outstanding shares (including treasury shares)

As of Dec. 31, 2019	115,469,910 shares
As of Mar. 31, 2019	115,469,910 shares

(ii) Number of treasury shares

As of Dec. 31, 2019	9,598,666 shares
As of Mar. 31, 2019	9,598,538 shares

(iii) Average number of shares during the period

Fiscal year ended Dec. 31, 2019	105,871,312 shares
Fiscal year ended Mar. 31, 2019	103,254,798 shares

✓ This report is not subject to audit by certified public accountants or audit firms.

✓ Explanation regarding the appropriate use of financial forecast and other special remarks

1. Any information contained in this document pertaining to future financial performance etc. is based on the information currently available to J Trust and certain other premises judged to be reasonable, and J Trust does not guarantee the achievement of this performance. Actual financial performance may vary significantly from the forecasts contained herein. "I. Overview of operating results (4) Forecasts" in the attached document on Page 5 shows the assumptions and premises on which the financial forecast is based.

2. Supplemental materials will be posted on the J Trust website (https://www.jt-corp.co.jp/en/). Earnings presentation for institutional investors is planned on Feb. 14, 2020. Video and materials of the presentation will be available on the J Trust website afterwards.

Table of Attached Document

I. Overview of operating results 2

(1) Overview of operating results for the current fiscal year 2

(2) Overview of financial position for the current fiscal year 4

(3) Overview of cash flows for the current fiscal year 4

(4) Forecasts 5

II. Basic Policy on selection of accounting standards 6

III. Consolidated financial statements and significant notes thereto 7

(1) Consolidated statement of financial position 7

(2) Consolidated statement of profit or loss and consolidated statement of comprehensive income 8

(3) Consolidated statement of changes in equity 10

(4) Consolidated statement of cash flows 12

(5) Notes to consolidated financial statements 14

(Notes on premise of going concern) 14

(Changes in accounting policies) 14

(Segment information) 16

(Per share information) 19

(Significant subsequent events) 19

I. Overview of operating results

J Trust Co., Ltd. (the "Company") has changed the last day of the accounting period, from March 31 to December 31 in the fiscal year ended December 31, 2019. Accordingly, this fiscal year is an irregular 9-month period and year-on-year changes are omitted in this report.

(1) Overview of operating results for the current fiscal year

During the current fiscal year, developed countries' economies, such as the United States and Europe maintained solid growth. Meanwhile, uncertainties about the US-China trade conflicts, the slowing Chinese economy, the Brexit issue and the tensions in the Middle East and East Asia are casting a shadow over the global economy. The Japanese economy has been on a moderate recovery trend, underpinned by strong corporate performance, capital investment and improvements in the employment and income environment. However, there is a growing concern about the developments of US-China trade tensions and the effects of the consumption tax hike in October 2019.

In this economic environment, we consider it inevitable to transform our business in anticipation of changes in the global and Japanese economies. We have been expanding business in Asia, which is expected to continue growing economically at a fast pace, and seeking business development by maximizing the synergy of our group network to realize stronger management bases and sustainable growth. During the current fiscal year, we continued to work toward the improvement of corporate value and reinforcement of operational bases proactively at home and abroad to achieve sustainable profit expansion centering on core banking service.

a. Business developments in Japan

In the previous fiscal year, the Company and Nihon Hoshou Co., Ltd. ("Nihon Hoshou") and KeyHolder Inc. ("KeyHolder" and its subsidiaries are collectively referred to as "KeyHolder Group") respectively formed a business alliance with SAMURAI&J PARTNERS Co., Ltd. (SAMURAI&J PARTNERS Co., Ltd. and its subsidiaries are collectively referred to as "SAMURAI Group"). In October and November 2019, the Company raised funds through SAMURAI Group's crowdfunding site "SAMURAI". Meanwhile, in May 2019, Nihon Hoshou and SAMURAI set up a joint fund that incorporates Nihon Hoshou's guarantee schemes and has started offering guarantee services utilizing crowdfunding. In October 2019, Nihon Hoshou began providing operational support for maneo market Inc. together with its subsidiary Partir Servicer Co., Ltd. to improve credit standings of maneo market Inc. In December 2019, Nihon Hoshou partnered with THE KAGAWA BANK, LTD. ("KAGAWA BANK"), providing guarantees for KAGAWA BANK's overseas property-backed loans.

Meanwhile, KeyHolder has been pursuing flexible business reorganization and the optimal allocation of its management resources through aggressive M&As. In April 2019, KeyHolder Group acquired: (i) allfuz, Inc. ("allfuz"), a company mainly engaged in advertising agency business; and (ii) Foolenlarge, Inc., currently known as UNITED PRODUCTIONS, INC. ("UNITED PRODUCTIONS"), a company engaged in video production business.

In May 2019, allfuz and UNITED PRODUCTIONS respectively signed an absorption-type merger agreement with KeyStudio, Inc. and KeyProduction, Inc. In July 2019, UNITED PRODUCTIONS, which had supported the rehabilitation of image Field Inc., took over the video production business of image Field Inc. In October 2019, KeyHolder resolved to acquire all shares of Wisenlarge, Inc., a staffing agency dispatching content creators and staff who are mainly active in media. In December 2019, KeyHolder resolved to establish Whole World Media Inc. jointly with Kadokawa Haruki Corporation, a company mainly engaged in: (i) event planning/management; and (ii) management of models including career transitions of "Popteen" fashion magazine exclusive models.

b. Business developments overseas

As part of our growth strategies, the J Trust Group (the "Group") proactively pursues M&A activities centering on banking and financial services with a main focus on the business expansion in Southeast Asia. We believe we can leverage retail finance expertise developed in Japan and South Korea to help grow target countries' financial businesses.

In August 2019, the Company acquired 55% of outstanding shares of Cambodian commercial bank ANZ Royal Bank (Cambodia) Ltd. currently known as J Trust Royal Bank Ltd. ("J Trust Royal Bank") from ANZ Funds Pty Ltd., making it a consolidated subsidiary. Going forward, the Company aims to further grow its business, innovate its retail strategy, and expand its target markets to segments with large growth potential. In addition, the Company is set to expand business by taking advantage of J Trust Royal Bank's diverse multinational customer base, the Group's high receivables collection know-how, new product development capabilities, and a network of Japanese-

affiliated companies.

c. Others

More than half of the Group's operating revenue is generated from overseas subsidiaries. Given such circumstances and our proactive overseas business expansion strategies going forward, the Group decided to have a uniform accounting period to coincide the parent's fiscal period with that of major overseas subsidiaries. The shift aims to further promote the globally integrated business operations and transparency of management through timely and appropriate disclosure of management information. The Company accordingly changed the last day of its accounting period (fiscal year end) to December 31 of each year as it obtained approval for "Partial Amendments to the Articles of Incorporation" at the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders held on June 26, 2019.

As a result, operating revenue for the current fiscal year was 58,105 million yen, operating profit was 287 million yen and loss attributable to owners of parent was 3,249 million yen after reviewing collectability of deferred tax assets and their reduction in value, which added income tax expense by 830 million yen.

Segment performance is shown below.
The balance of trade receivables in the report is before allowance for doubtful accounts.

(Financial business in Japan)
Nihon Hoshou provides credit guarantee services. Nihon Hoshou and Partir Servicer Co., Ltd. are responsible for receivables collection services in Japan. J TRUST Card Co., Ltd. offers credit and consumer credit services and Nihon Hoshou provides other financial services.
The balance of credit guarantee was 210,824 million yen. The breakdown was 15,808 million yen in credit guarantees on unsecured loan and 195,015 million yen in credit guarantees on secured loan due to an increase in guarantees on condominium loans and property-backed loans.

Meanwhile, the balance of purchased receivables was 15,402 million yen. The balance of: (i) advances paid – installment was 2,793 million yen; (ii) commercial notes was 1,451 million yen; and (iii) accounts receivable – operating loans was 2,869 million yen.

Operating revenue was 7,676 million yen due to a steady increase in guarantee revenue in line with growing credit guarantee balances. Segment profit was 3,085 million yen.

(Financial business in South Korea and Mongolia)
In South Korea, JT Chinae Savings Bank Co., Ltd. and JT Savings Bank Co., Ltd. conduct savings bank business while JT Capital Co., Ltd. provides installment financing and leasing services, and TA Asset Management Co., Ltd. purchases and collects Non-Performing Loans (NPLs). In Mongolia, J Trust Credit NBFI provides financial services.

Loans for banking business were 284,329 million yen. The balance was kept at the same level as the previous year despite the effects of tighter regulations and the progress in receivables collections/sale with our efforts to increase medium interest rate loans for which new loans are exempt from total lending volume ceilings under certain conditions. The balance of purchased receivables dropped to 109 million yen due to NPL sales. Accounts receivable – operating loans also declined to 57,445 million yen due to factors such as receivables sales and collections.

Operating revenue was 29,585 million yen. This is mainly due to (i) a drop in interest revenue accompanying a decline in average interest rates during the period with an increase in medium interest rate loans; and (ii) increases in gain on receivables sales.

Segment profit was 7,500 million yen mainly due to reduced provision of allowance for doubtful accounts upon reviewing actual collection rates for receivables.

(Financial business in Southeast Asia)
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ("Bank JTrust Indonesia") conducts banking operations, PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA ("JTII") is engaged in receivables collections and PT JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE ("JTO") provides loans for automobiles and agriculture equipment in Indonesia. Meanwhile, J Trust Royal Bank started banking operations in Cambodia on August 19, 2019.

Loans for banking business was 100,167 million yen mainly due to the addition of J Trust Royal Bank and NPL transfers from Bank JTrust Indonesia to JTII. The balance of purchased receivables was 29,663 million yen. Accounts receivable - operating loans were 3,782 million yen due to sluggish loan disbursements.

Operating revenue was 9,673 million yen due to a decrease in interest revenue accompanying a decrease in loans for banking business at Bank JTrust Indonesia. Meanwhile, segment loss became smaller to 4,647 million yen mainly because gain on bargain purchase was recorded by making J Trust Royal Bank a consolidated subsidiary.

(General Entertainment Business)

allfuz mainly conducts advertising agency business and live entertainment business; UNITED PRODUCTIONS handles video production business; FA Project, Inc. is engaged in planning, development and production of entertainment content business; and Zest, Inc.*(formerly known as SKE, Inc.) operates talent agency business.

*The new corporate name effective July 1, 2019.

Operating revenue was 4,849 million yen. Segment loss was 159 million yen.

(Real estate business)

Keynote Co., Ltd. ("Keynote") handles real estate business and KeyHolder operates real estate asset business. Operating revenue was 4,729 million yen mainly due to property sales by Keynote. Segment profit was 829 million yen.

(Investment business)

JTRUST ASIA PTE.LTD. mainly conducts investment business and provides management support for investees. Operating revenue was 815 million yen. Segment loss was 1,768 million yen due to an increase in litigation costs.

(Other business)

J Trust System Co., Ltd. mainly provides IT system development and operation and management of computers for the Group, and Keynote constructs commercial facilities.

Operating revenue was 1,187 million yen due to a decrease in construction contract revenue at Keynote. Segment loss was 472 million yen.

(2) Overview of financial position for the current fiscal year

Assets as of December 31, 2019 increased by 62,891 million yen to 731,268 million yen from March 31, 2019. This is mainly because loans for banking business increased by 43,939 million yen and other financial assets increased by 7,458 million yen by making J Trust Royal Bank a consolidated subsidiary.

Liabilities grew by 54,665 million yen to 612,315 million yen from March 31, 2019. This is mainly because deposits for banking business increased by 46,391 million yen due to the consolidation of J Trust Royal Bank.

Equity increased by 8,226 million yen from March 31, 2019, to 118,953 million yen. This is mainly because non-controlling interests increased by 12,392 million yen due to the consolidation of J Trust Royal Bank though retained earnings were reduced by 3,354 million yen mainly because loss attributable to owners of parent of 3,249 million yen was recorded.

(3) Overview of cash flows for the current fiscal year

Consolidated cash and cash equivalents ("Funds") as of December 31, 2019 decreased by 5,236 million yen from March 31, 2019 to 81,913 million yen.

The following is an overview of cash flows for the current fiscal year with relevant factors.

(Cash flows from operating activities)

Funds used in operating activities were 20,829 million yen. This is mainly due to a decrease of 13,724 million yen in deposits for banking business and an increase of 17,559 million yen in loans for banking business, which reduced Funds.

(Cash flows from investing activities)
Funds provided by investing activities were 15,431 million yen. This is mainly due to the following: purchase of investment securities for banking business of 74,266 million yen exceeded proceeds from sale/redemption of investment securities for banking business of 68,860 million yen, which reduced Funds; on the other hand, proceeds from acquisition of shares of subsidiaries 24,370 million yen exceeded purchase of shares of subsidiaries of 752 million yen, which increased Funds.
(Cash flows from financing activities)
Funds provided by financing activities was 18 million yen.

(4) Forecasts

Aiming for realizing stronger operational bases and sustainable growth, the Group has been expanding business in Asia, a region with great potential for future economic growth, to optimize synergy through our networking. For the next fiscal year, we continue to pursue sustainable profit expansion centering on the banking business.

We will work toward growing revenue in Financial Business in Japan with its main focus on credit guarantee and servicer businesses. In the credit guarantee business, on top of stable fee-based revenue from the current business, we will break a new path for growth in guaranteeing overseas property-backed loans and reverse mortgage loans. For servicer business, we will build up assets by leveraging our superior receivables collection capabilities in the shrinking market.

Financial Business in South Korea and Mongolia continues to be firm, supported by the well-established infrastructure to offer comprehensive financial services even in the slowing economy. We achieved a full-year surplus for the fifth consecutive year with steady accumulation in operating assets. As a financial group in South Korea, the four entities are poised to secure profit mainly from banking business, which is projected to continue sustainable expansion, while adapting flexibly to stricter financial regulations revised almost every year. For the next fiscal year, we aim to continue moderate growth in asset volume to optimize risks and returns and will expand revenue by seeking “qualitative” rather than “quantitative” enhancement and growth of operating assets through effective sales strategies including Fintech-based credit screening, marketing and branding.

On January 8, 2020, the Indonesia Stock Exchange lifted the trading suspension on Bank JTrust Indonesia. This will broadly appeal to the revival of Bank JTrust Indonesia, and is expected to significantly improve the bank’s social credibility in the future.

Bank JTrust Indonesia’s loans for banking business decreased due to the disposal of NPL loans (non-performing loans). However, we expect the trend to reverse and Bank JTrust Indonesia will strengthen joint finance with JTO. In addition, NIM (net interest margin) is expected to improve gradually due to an increase in lending and a decrease in COF (cost of funds) by reducing time deposits with high interest rates and increasing low-cost deposits through mobile banking. In addition, we will strive to improve our earnings structure by strengthening foreign exchange trading to secure stable revenue streams.

JTII also aims to maximize the collection amount of NPL receivables transferred from Bank JTrust Indonesia by increasing the number of collection staff and legal collection staff (collection attorneys or those who have passed the bar exam) and hiring appraisers while working to restore business performance and eliminate excess debts. Meanwhile, JTO will continue to develop originality in business by increasing the balance of accounts receivable - operating loans utilizing Bank JTrust Indonesia's back finance, expanding its sales base and dealer network, as well as new products in addition to used cars and agricultural equipment.

The Group has successfully built a three-pronged business model comprising banking, servicer and financing in Indonesia, which can respond to various needs, we will reinforce the operational bases with effective marketing strategies and value-added financial services utilizing the Group’s extensive network.

Moreover, with the Group’s objective of establishing a dominant position in retail finance mainly in banking and finance in Southeast Asia, a region of continuing economic growth, we have acquired shares of J Trust Royal Bank in the current fiscal year, making it a consolidated subsidiary. We will continue to take a proactive stance toward M&A, mainly in banking and finance to obtain more deposit accounts, place compliance and governance at the core of management and grow with local communities for mutual prosperity by providing customers with high value added financial services.

For financial forecasts for the next fiscal year (from January 1 to December 31, 2020), the Group estimates operating revenue of 86,511 million yen, operating profit of 1,681 million yen, and loss attributable to owners of parent of 1,657 million yen. This estimate takes into consideration the slower-than-expected recovery process of Financial Business in Southeast Asia and anticipated increases in one-off expenses from litigations, which will be partially offset by steady

revenue growth in Financial Business in Japan; and Financial Business in South Korea and Mongolia.

Applicable exchange rates for the above are 108.13 yen per USD, 82.27 yen per Singapore Dollar, 0.093 yen per South Korean Won, 0.0083 yen per Indonesian Rupiah and 0.0423 yen per Mongolian Tugriks.

II. Basic Policy on selection of accounting standards

The Group started adopting IFRS from the fiscal year ended March 31, 2018 with the aim of enhancing operational transparency by accelerating management's decision-making and the international comparability of financial information under the unified group-wide accounting method, and raising the convenience of stakeholders.

III. Consolidated financial statements and significant notes thereto

(1) Consolidated statement of financial position

(Millions of yen)

	As of March 31, 2019	As of December 31, 2019
Assets		
Cash and cash equivalents	87,150	81,913
Trade and other receivables	106,735	113,942
Investment securities for banking business	46,599	52,805
Loans for banking business	326,234	370,174
Operational investment securities	2,855	1,895
Marketable securities	1,179	721
Other financial assets	33,416	40,874
Investments accounted for using equity method	126	118
Inventories	6,742	7,285
Assets held for sale	2,310	1,102
Property, plant and equipment	5,119	9,871
Investment property	916	2,309
Goodwill	33,508	36,232
Intangible assets	3,790	7,027
Deferred tax assets	2,373	939
Other assets	9,317	4,053
Total assets	668,377	731,268
Liabilities		
Trade and other payables	14,613	16,137
Deposits for banking business	437,010	483,402
Bonds and borrowings	86,002	85,105
Other financial liabilities	13,383	19,907
Income taxes payable	1,215	962
Provisions	1,114	1,214
Deferred tax liabilities	1,076	1,720
Other liabilities	3,233	3,864
Total liabilities	557,650	612,315
Equity		
Share capital	54,760	54,760
Capital surplus	53,844	54,082
Treasury shares	(7,685)	(7,685)
Retained earnings	6,424	3,069
Other components of equity	(3,170)	(4,219)
Total equity attributable to owners of parent	104,173	100,006
Non-controlling interests	6,554	18,946
Total equity	110,727	118,953
Total liabilities and equity	668,377	731,268

(2) Consolidated statement of profit or loss and consolidated statement of comprehensive income

(Consolidated statement of profit or loss)

(Millions of yen)

	Fiscal year ended March 31, 2019	Fiscal year ended December 31, 2019
Continuing operations		
Operating revenue		
Interest revenue calculated using the effective interest method	53,676	36,047
Gain arising from the derecognition of financial assets measured at amortized cost	1,016	2,700
Impairment gains on credit-impaired financial assets	2,719	1,578
Other	17,523	17,779
Total operating revenue	74,935	58,105
Operating expenses		
Loss arising from the derecognition of financial assets measured at amortized cost	508	-
Impairment losses on loans	45,941	11,233
Other	31,804	24,472
Total operating expenses	78,253	35,706
Selling, general and administrative expenses	28,488	27,370
Other income	366	5,624
Other expenses	1,159	365
Operating profit (loss)	(32,600)	287
Finance income	1,612	121
Finance costs	110	712
Share of profit (loss) of investments accounted for using equity method	(36)	(9)
Profit (loss) before tax	(31,135)	(312)
Income tax expense	2,753	3,413
Loss from continuing operations	(33,888)	(3,725)
Discontinued operations		
Profit (loss) from discontinued operations	(2,787)	-
Profit (loss)	(36,676)	(3,725)
Profit (loss) attributable to		
Owners of parent	(36,107)	(3,249)
Non-controlling interests	(568)	(476)
Profit (loss)	(36,676)	(3,725)
Earnings (loss) per share		
Basic earnings (loss) per share		
Continuing operations	(322.70)	(30.69)
Discontinued operations	(27.00)	-
Total	(349.70)	(30.69)
Diluted earnings (loss) per share		
Continuing operations	(322.70)	(30.69)
Discontinued operations	(27.00)	-
Total	(349.70)	(30.69)

Translation for reference purposes only

(Consolidated statement of comprehensive income)

(Millions of yen)

	Fiscal year ended March 31, 2019	Fiscal year ended December 31, 2019
Profit (loss)	(36,676)	(3,725)
Other comprehensive income		
Items that will not be reclassified to profit or loss		
Remeasurements of defined benefit plans	(69)	166
Net change in fair value of equity instruments designated as measured at fair value through other comprehensive income	(85)	(791)
Total of items that will not be reclassified to profit or loss	(154)	(624)
Items that may be reclassified to profit or loss		
Exchange differences on translation of foreign operations	(615)	(830)
Net change in fair value of debt instruments measured at fair value through other comprehensive income	(437)	757
Provision for expected credit losses on debt instruments measured at fair value through other comprehensive income	25	24
Share of other comprehensive income of investments accounted for using equity method	-	1
Total of items that may be reclassified to profit or loss	(1,028)	(48)
Other comprehensive income, net of tax	(1,183)	(672)
Comprehensive income	(37,859)	(4,398)
Comprehensive income attributable to		
Owners of parent	(37,302)	(4,299)
Non-controlling interests	(557)	(99)
Comprehensive income	(37,859)	(4,398)

(3) Consolidated statement of changes in equity

(Millions of yen)

	Share capital	Capital surplus	Treasury shares	Retained earnings	Other components of equity	Total equity attributable to owners of parent	Non-controlling interests	Total
Balance as of April 1, 2018	53,638	52,713	(7,685)	47,555	(1,854)	144,366	6,409	150,776
Cumulative effect of accounting change	-	-	-	(3,784)	(123)	(3,908)	(42)	(3,950)
Restated balance	53,638	52,713	(7,685)	43,770	(1,978)	140,458	6,367	146,825
Profit (loss)	-	-	-	(36,107)	-	(36,107)	(568)	(36,676)
Other comprehensive income	-	-	-	-	(1,194)	(1,194)	11	(1,183)
Total comprehensive income	-	-	-	(36,107)	(1,194)	(37,302)	(557)	(37,859)
Issuance of new shares	1,121	1,118	-	-	-	2,240	-	2,240
Dividends of surplus	-	-	-	(1,236)	-	(1,236)	-	(1,236)
Purchase of treasury shares	-	-	(0)	-	-	(0)	-	(0)
Transfer from other components of equity to retained earnings	-	-	-	(5)	5	-	-	-
Other	-	20	-	3	-	23	-	23
Total contributions by and distributions to owners	1,121	1,139	(0)	(1,238)	5	1,027	-	1,027
Changes in ownership interest in subsidiaries	-	(8)	-	-	(0)	(8)	20	11
Dividends to non-controlling interests	-	-	-	-	-	-	(79)	(79)
Change in scope of consolidation	-	-	-	-	(2)	(2)	803	801
Other	-	-	-	-	0	0	(0)	-
Total changes in ownership interests in subsidiaries	-	(8)	-	-	(2)	(10)	744	733
Total transactions with owners	1,121	1,130	(0)	(1,238)	2	1,016	744	1,761
Balance as of March 31, 2019	54,760	53,844	(7,685)	6,424	(3,170)	104,173	6,554	110,727
Cumulative effect of accounting change	-	-	-	(51)	-	(51)	(81)	(132)
Restated balance as of April 1, 2019	54,760	53,844	(7,685)	6,373	(3,170)	104,121	6,473	110,595
Profit (loss)	-	-	-	(3,249)	-	(3,249)	(476)	(3,725)
Other comprehensive income	-	-	-	-	(1,050)	(1,050)	377	(672)
Total comprehensive income	-	-	-	(3,249)	(1,050)	(4,299)	(99)	(4,398)
Dividends of surplus	-	-	-	(105)	-	(105)	-	(105)
Purchase of treasury shares	-	-	(0)	-	-	(0)	-	(0)
Transfer from other components of equity to retained earnings	-	-	-	0	(0)	-	-	-
Other	-	17	-	50	-	67	-	67
Total contributions by and distributions to owners	-	17	(0)	(54)	(0)	(38)	-	(38)
Changes in ownership interest in subsidiaries	-	220	-	-	1	222	1,532	1,754
Dividends to non-controlling interests	-	-	-	-	-	-	(561)	(561)
Change in scope of consolidation	-	-	-	-	-	-	11,441	11,441

Other	-	-	-	-	-	-	160	160
Total changes in ownership interests in subsidiaries	-	220	-	-	1	222	12,572	12,794
Total transactions with owners	-	237	(0)	(54)	0	184	12,572	12,756
Balance as of December 31, 2019	54,760	54,082	(7,685)	3,069	(4,219)	100,006	18,946	118,953

(4) Consolidated statement of cash flows

(Millions of yen)

	Fiscal year ended March 31, 2019	Fiscal year ended December 31, 2019
Cash flows from operating activities		
Profit (loss) before tax	(31,135)	(312)
Profit (loss) before tax from discontinued operations	(2,786)	-
Depreciation and amortization	1,535	2,722
Impairment losses	368	3
Impairment losses (gains) on other financial assets	18,731	(55)
Interest and dividend income	(57,362)	(39,807)
Interest expenses	19,332	13,767
Gain on bargain purchase	-	(3,355)
Other (profit) loss	(4,310)	29
Decrease (increase) in trade and other receivables	497	840
Increase (decrease) in deposits for banking business	39,554	(13,724)
Decrease (increase) in loans for banking business	(5,395)	(17,559)
Increase (decrease) in trade and other payables	4,853	605
Interest and dividends received	59,293	41,206
Interest paid	(18,818)	(15,049)
Income taxes paid	(2,332)	(2,574)
Income taxes refund	880	633
Other	(4,073)	11,799
Net cash provided by (used in) operating activities	18,831	(20,829)
Cash flows from investing activities		
Purchase of investments accounted for using equity method	(549)	-
Proceeds from sale of investments accounted for using equity method	200	-
Decrease (increase) in time deposits	198	(13)
Purchase of property, plant and equipment, and investment property	(1,941)	(1,636)
Proceeds from sale of property, plant and equipment, and investment property	48	737
Purchase of intangible assets	(1,983)	(2,312)
Purchase of investment securities for banking business	(105,252)	(74,266)
Proceeds from sale of investment securities for banking business	95,565	67,529
Proceeds from redemption of investment securities for banking business	5,869	1,331
Proceeds from acquisition of shares of subsidiaries	-	24,370
Purchase of shares of subsidiaries	(2,838)	(752)
Proceeds from acquisition of shares of subsidiaries through share exchanges	-	474
Payments for sale of shares of subsidiaries	(149)	-
Payments for acquisition of businesses	(3,399)	(73)
Other	(957)	44
Net cash provided by (used in) investing activities	(15,190)	15,431

(Millions of yen)

	Fiscal year ended March 31, 2019	Fiscal year ended December 31, 2019
Cash flows from financing activities		
Net increase (decrease) in discounted notes	310	20
Net increase (decrease) in short-term borrowings	(4,929)	(770)
Net increase (decrease) in short-term bonds payable	(5,487)	(4,251)
Repayments of long-term borrowings	(26,946)	(20,349)
Proceeds from long-term borrowings	31,964	23,344
Redemption of bonds	(5,956)	(6,371)
Proceeds from issuance of bonds	9,540	10,050
Repayments of lease liabilities	(48)	(1,002)
Payments for purchase of treasury shares	(0)	(0)
Proceeds from exercise of employee share options	2,232	-
Dividends paid	(1,236)	(105)
Dividends paid to non-controlling interests	(79)	(561)
Proceeds from partial sale of interests in subsidiaries to non-controlling interests	11	-
Other	100	17
Net cash provided by (used in) financing activities	(525)	18
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	3,116	(5,379)
Cash and cash equivalents at beginning of period	84,723	87,150
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	(689)	142
Cash and cash equivalents at end of period	87,150	81,913

(5) Notes to consolidated financial statements

(Notes on premise of going concern)

No items to report.

(Changes in accounting policies)

The Group started applying the following accounting standards from the current fiscal year.

IFRS ("International financial reporting standards")		Overview of the new standard or revision
IFRS 16	Leases	Revisions concerning accounting treatments for leases

The Group applies IFRS 16 retrospectively in accordance with transitional measures, and the cumulative effects of applying IFRS 16 are recognized as an adjustment to the opening balance of retained earnings for the current fiscal year. By applying IFRS 16, retained earnings at the beginning of the current fiscal year declined by 51 million yen compared to the case where previous accounting standards were used.

In applying IFRS 16, the Group elects practical expedients of IFRS 16, Paragraph C3 by grandfathering the assessment of IAS 17 "Leases" ("IAS 17") and IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) 4 "Determining whether an Arrangement contains a Lease" as to whether an arrangement contains a lease. The Group applies the following practical expedients permitted under IFRS 16:

- No requirement to reassess whether an existing contract contains leases.
- Recognition exemptions for short-term leases and leases for which the underlying asset is of low value.

For leases that the Group classified previously as operating leases applying IAS 17, the Group has recognized right-of-use assets and lease liabilities at the date of the initial application of IFRS 16. The Group measured the lease liabilities at the present value of the remaining lease payments, discounted using the lessee's incremental borrowing rate at the date of the initial application. The lessee's weighted average incremental borrowing rate applied to lease liabilities at the date of the initial application is 4.0%.

The reconciliations of operating lease contracts disclosed under IAS 17 as of the end of the previous fiscal year and lease liabilities recognized in the consolidated statement of financial position at the date of the initial application are provided in the following table:

(Millions of yen)

	Amount
Operating lease contracts disclosed as of the end of the previous fiscal year	2,575
The amount discounted using the incremental borrowing rate at the date of the initial application	1,538
Finance lease obligations recognized as of the end of the previous fiscal year	119
Discounted present value of cancellable operating lease contracts	3,110
Exemption from recognition	
Short-term leases	(194)
Leases of low-value assets	(125)
Lease liabilities at the date of the initial application	4,448

With the adoption of IFRS 16, right-of-use assets of 5,431 million yen and lease liabilities of 4,448 million yen were recorded as of April 1, 2019.

For leases as lessee that the Group classified previously as finance leases applying IAS 17, the Group transferred the carrying amounts of lease assets and lease obligations at the date of the initial application to right-of-use assets and lease liabilities, respectively.

The differences in the amount of non-cancellable operating lease contracts applying IAS 17 at the end of the previous fiscal year and that of lease liabilities recognized in the consolidated statement of financial position at the date of the initial application are mainly attributable to the amount of cancellable operating lease contracts.

In the consolidated statement of financial positon for the current fiscal year, right-of-use assets are included in "Property, plant and equipment", "Investment property" and "Intangible assets", and lease liabilities are included in "Other financial liabilities".

"Repayments of lease obligations" included in "Cash flows from financing activities" in the consolidated statement of cash flows in the previous fiscal year, are presented as "Repayments of lease liabilities" from the current fiscal year.

(Segment information)

1. Overview of reportable segments

   The Group's reportable segments consist of constituent units for which separate financial information is available. The reportable segment is also subject to periodic review by the Company's Board of Directors, which is responsible for deciding the allocation of management resources and assessing business results.

   The Group has six reportable segments by business, namely "Financial Business in Japan," "Financial Business in South Korea and Mongolia," "Financial Business in Southeast Asia," "General Entertainment Business," "Real Estate Business" and "Investment Business."

   The Group's business activities according to economic characteristics, services and geographical areas are as below.

   "Financial business in Japan" includes credit guarantee business, receivables collection business, credit and consumer credit business, and other financial business. "Financial business in South Korea and Mongolia" includes savings bank business, receivables collection business, capital business and financial business. "Financial business in Southeast Asia" includes banking business, receivables collection business and multi-finance business. "General entertainment business" includes live entertainment business, advertising agency business, video production business, planning, development and production of entertainment content business, and talent agency business. "Real estate business" mainly includes purchase and sale of detached housing and other properties, and real estate asset business. "Investment business" includes inbound and outbound investment business.

2. Segment revenue and business results

Revenue and business results by reportable segments are as shown below. Operating revenue from inter-segment transactions or transfers are based on prevailing market prices or arm's length prices.

Fiscal year ended March 31, 2019 <From April 1, 2018 to March 31, 2019>

(Millions of yen)

	Reportable segments							Other (Note 1)	Adjust-ments (Note 2)	Consoli-dated
	Financial business in Japan	Financial business in South Korea and Mongolia	Financial business in Southeast Asia	General entertain-ment business	Real estate business	Investment business	Total			
Operating revenue										
External customers	10,554	39,515	13,025	1,520	6,440	1,036	72,092	2,843	-	74,935
Inter-segment transactions or transfers	147	147	0	-	0	177	472	384	(857)	-
Total	10,701	39,662	13,025	1,520	6,441	1,214	72,565	3,227	(857)	74,935
Segment profit (loss)	4,251	4,880	(17,712)	(15)	91	(20,568)	(29,073)	39	(235)	(29,269)
Unallocated corporate expenses, etc. (Note 3)										(3,331)
Operating profit (loss)										(32,600)
Finance income										1,612
Finance costs										(110)
Share of profit (loss) of investments accounted for using equity method										(36)
Profit (loss) before tax										(31,135)

(Millions of yen)

	Reportable segments							Other (Note 1)	Adjust-ments (Note 2)	Consoli-dated
	Financial business in Japan	Financial business in South Korea and Mongolia	Financial business in Southeast Asia	General entertain-ment business	Real estate business	Invest-ment business	Total			
Other items										
Depreciation and amortization	86	969	311	49	21	5	1,443	3	19	1,466

(Millions of yen)

	Reportable segments							Other (Note 1)	Adjust-ments (Note 2)	Consoli-dated
	Financial business in Japan	Financial business in South Korea and Mongolia	Financial business in Southeast Asia	General entertain-ment business	Real estate business	Investment business	Total			
Segment assets	48,500	421,826	165,497	4,389	9,303	9,401	658,918	1,835	7,623	668,377
Segment liabilities	40,395	373,307	145,929	4,133	6,402	246	570,414	1,891	(14,656)	557,650
Other items										
Non-current assets (additions) (Note) 4	129	872	4,501	2,717	8	18	8,247	1,224	312	9,784
Investments accounted for using equity method	-	-	126	-	-	-	126	-	-	126

Note 1: "Other," which refers to business segments that are not attributable to reportable segments, mainly includes commercial facility construction business and IT system business.

Note 2: "Adjustments" mainly include elimination of inter-segment transactions and unallocated operating expenses that are not attributable to reportable segments.

Note 3: "Unallocated corporate expenses, etc." include general and administrative expenses not mainly attributable to reportable segments.

Note 4: "Non-current assets (additions)" refer to property, plant and equipment, investment property, goodwill and intangible assets.

Translation for reference purposes only

Fiscal year ended December 31, 2019 <from April 1, 2019 to December31, 2019>

(Millions of yen)

	Reportable segments							Other (Note 1)	Adjust-ments (Note 2)	Consoli-dated
	Financial business in Japan	Financial business in South Korea and Mongolia	Financial business in Southeast Asia	General entertain-ment business	Real estate business	Investment business	Total			
Operating revenue										
External customers	7,673	29,563	9,673	4,847	4,718	734	57,210	895	-	58,105
Inter-segment transactions or transfers	2	21	0	2	11	81	119	291	(410)	-
Total	7,676	29,585	9,673	4,849	4,729	815	57,329	1,187	(410)	58,105
Segment profit (loss)	3,085	7,500	(4,647)	(159)	829	(1,768)	4,838	(472)	634	5,001
Unallocated corporate expenses, etc. (Note 3)										(4,713)
Operating profit										287
Finance income										121
Finance costs										(712)
Share of profit (loss) of investments accounted for using equity method										(9)
Profit (loss) before tax										(312)

(Millions of yen)

	Reportable segments							Other (Note 1)	Adjust-ments (Note 2)	Consoli-dated
	Financial business in Japan	Financial business in South Korea and Mongolia	Financial business in Southeast Asia	General entertain-ment business	Real estate business	Invest-ment business	Total			
Other items	139	899	1,025	400	108	16	2,589	22	110	2,722
Depreciation and amortization	-	-	-	3	-	-	3	-	-	3

(Millions of yen)

	Reportable segments							Other (Note 1)	Adjust-ments (Note 2)	Consoli-dated
	Financial business in Japan	Financial business in South Korea and Mongolia	Financial business in Southeast Asia	General entertain-ment business	Real estate business	Invest-ment business	Total			
Segment assets	42,726	414,807	242,985	10,326	11,084	9,274	731,204	1,241	(1,177)	731,268
Segment liabilities	23,971	362,693	202,835	8,209	7,532	1,241	606,483	3,292	2,540	612,315
Other items										
Non-current assets (additions) (Note 4)	239	722	7,796	4,412	162	-	13,332	-	14	13,347
Investments accounted for using equity method	-	-	118	-	-	-	118	-	-	118

Note 1: “Other,” which refers to business segments that are not attributable to reportable segments, mainly includes commercial facility construction business and IT system business.

Note 2: “Adjustments” mainly include elimination of inter-segment transactions and unallocated operating expenses that are not attributable to reportable segments.

Note 3: “Unallocated corporate expenses, etc.” include general and administrative expenses not mainly attributable to reportable segments.

Note 4: “Non-current assets (additions)” refer to property, plant and equipment, investment property, goodwill and intangible assets.

(Per share information)

	Previous Fiscal Year Fiscal year ended March 31, 2019 (From April 1, 2018 to March 31, 2019)	Current Fiscal Year Fiscal year ended December 31, 2019 (From April 1, 2019 to December 31, 2019)
Profit (loss) from continuing operations attributable to owners of parent (million yen)	(33,320)	(3,249)
Profit (loss) from discontinued operations attributable to owners of parent (million yen)	(2,787)	-
Total	(36,107)	(3,249)
The weighted average number of issued and outstanding common shares (shares)	103,254,798	105,871,312
Increase in the number of common shares		
Increase due to the exercise of stock option (shares)	-	-
Diluted weighted average number of common shares (shares)	103,254,798	105,871,312
Basic earnings (loss) per share (yen)		
Continuing operations	(322.70)	(30.69)
Discontinued operations	(27.00)	-
Total	(349.70)	(30.69)
Diluted basic earnings (loss) per share (yen)		
Continuing operations	(322.70)	(30.69)
Discontinued operations	(27.00)	—
Total	(349.70)	(30.69)
Summary of potential shares that are not included in the calculation of diluted loss per share due to their anti-dilutive effects	(Filing company) J Trust Co., Ltd. The N-7th share acquisition rights (“Share Acquisition Rights”) [The number of shares underlying Share Acquisition Rights: 80) J Trust Co., Ltd. The N-8th Share Acquisition Rights [The number of shares underlying Share Acquisition Rights: 1,520] J Trust Co., Ltd. The N-10th Share Acquisition Rights [The number of shares underlying Share Acquisition Rights: 2,200)	(Filing company) J Trust Co., Ltd. The N-10th Share Acquisition Rights [The number of shares underlying Share Acquisition Rights: 2,200)

Note: For diluted loss per share in the Previous Fiscal Year and Current Fiscal Year, exercising stock options reduce loss per share. Thus, potential shares have no dilutive effects.

(Significant subsequent events)

No items to report.

Referensi Silang terhadap SE OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Cross Reference to SE OJK No. 30/SEOJK.04/2016 concerning the Form and Content of Annual Report of the Issuer or Public Company

No	Kriteria	Item Penjelasan	Halaman Page	Description Items	Criteria
I.	UMUM/GENERAL				
1.	Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.		√		Annual Report is presented in printed documents and copies of electronic documents.
2.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.		√		Annual Report is presented in printed documents, printed on light-colored paper, good quality, A4 size, bound, and can be reproduced with good quality.
3.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf.		√		Annual Report presented in the form of electronic document copies is an Annual Report that converted in pdf format.
4.	Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:	a) ikhtisar data keuangan penting; b) Informasi saham (jika ada); c) Laporan Direksi; d) Laporan Dewan Komisaris; e) Profil Emiten atau Perusahaan Publik; f) Analisis dan pembahasan manajemen; g) Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; h) Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; i) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan j) Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan;	√	a) Financial highlights; b) Shares information (if any); c) Board of Directors' Reports; d) Board of Commissioners' Reports; e) Profile of Issuers or Public Companies; f) Management analysis and discussion; g) Good Corporate Governance of Issuers or Public Companies; h) Social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company; i) Audited annual financial statements; and j) Statement of members of the Board of Directors and Board of Commissioners regarding their responsibility for Annual Report;	Annual reports shall at least contain the following information:
5.	Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami;		√		Annual Reports can present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by stating a clear title and/or description, making it easy to read and understand;
II.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING/FINANCIAL HIGHLIGHTS				
1.	Informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	a. pendapatan/penjualan; b. laba bruto; c. laba (rugi); d. jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali; e. total laba (rugi) komprehensif; f. jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali; g. laba (rugi) per saham; h. jumlah aset; i. jumlah liabilitas; j. jumlah ekuitas; k. rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; l. rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; m. rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; n. rasio lancar; o. rasio liabilitas terhadap ekuitas; p. rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan q. informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya;	18-19	a. Revenues; b. gross profit; c. profit (loss); d. profit (loss) attributable to owners of the parent and non-controlling interests; e. total comprehensive profit (loss); f. total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent and non-controlling interests; g. earnings (loss) per share; h. total assets; i. total liabilities; j. total equity; k. ratio of profit (loss) to total assets; l. ratio of profit (loss) to equity; m. ratio of profit (loss) to income/sales; n. current ratio; o. ratio of liabilities to equity; p. ratio of liabilities to total assets; and q. other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and type of industry;	Financial information presented in the form of comparisons for 3 (three) consecutive financial years or since starting its business if the Issuer or Public Company is operating for less than 3 (three) years, at least containing:

No	Kriteria	Item Penjelasan	Halaman Page	Description Items	Criteria
2.	Informasi harga saham bentuk tabel dan grafik.	Informasi saham (jika ada) paling sedikit memuat: a. saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi: • jumlah saham yang beredar; • kapitalisasi pasar; • harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan • volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	20	Stock information (if any) shall at least contain: a. issued shares for each quarter (if any) are presented in a comparative form for the last 2 (two) financial years, covering at least: • total outstanding shares; • market Capitalization; • highest, lowest, and closing price of stock; and • trading volume on the Stock Exchange where the shares are listed	Stock price information in the tables and charts.
3.	Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 2a) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi; b) rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham; c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan d) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	21	a) date of implementation of corporate actions; b) stock split ratio, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes in the par value of shares; c) number of shares outstanding before and after corporate actions; and d) share prices before and after corporate actions;	In the event of a corporate action, such as a stock split, reverse stock, share dividend, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, stock information as referred to in number 2a) is added the least explanation, i.e.:
4.	Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*), dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) tersebut		20		In the event of a temporary suspension of trading (suspension), and/or delisting of shares during the financial year, the Issuer or Public Company explains the reasons for the trading suspension of shares and/or the delisting of shares; and
5.	Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) sebagaimana dimaksud pada angka 4) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut		21		In the event of trading suspension of shares (suspension) and/or delisting of shares (as referred to in number 4) is still ongoing until the end of Annual Report period, the Issuer or Public Company explains the actions taken to resolve that trading suspension of shares (suspension) and/or delisting of shares;
III.	**LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI/REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS**				
1.	Laporan Direksi	Uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi: a. strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; b. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan c. kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; d. gambaran tentang prospek usaha; e. penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; dan f. perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada);	51-59	A brief description on the performance of the Issuer or Public Company, at least includes: a. strategies and strategic policies of the Issuer or Public Company; b. comparison between results achieved and targets; and c. constraint faced by the Issuers or Public Companies; d. overview of the business prospects; e. good governance implementation of the Issuer or Public Company; and f. changes in the Board of Directors' composition and its reasons (if any).	Board of Directors' Report
2.	Laporan Dewan Komisaris	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat: a. penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik; b. pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; c. pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; d. pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; e. perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan f. frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi;	43-49	The Board of Commissioners' report contains at least: a. assessment on BOD's performance regarding the company management of Issuers or Public Companies; b. supervision on the strategy implementation of the Issuer or Public Company; c. view on the business prospects of Issuers or Public Company prepared by the Board of Directors; d. view on the GCG implementation of Issuer or Public Company governance; e. changes in the composition of members of the Board of Commissioners and its reasons for changes (if any); and f. frequency and method of providing advice to members of the Board of Directors;	Board of Commissioners' Report

No	Kriteria	Item Penjelasan	Halaman Page	Description Items	Criteria
IV.	PROFIL PERUSAHAAN/COMPANY PROFILE				
1.	Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;		64, 67		Name of the Issuer or Public Company including if there is a change of name, reason for the change, and effective date of name change in the financial year;
2.	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	a. alamat; b. nomor telepon; c. nomor faksimile; d. alamat surat elektronik; dan e. alamat Situs Web;	64	a. address; b. phone number; c. fax number; d. e-mail; and e. Website;	Access to Issuer or Public Company including branch offices or representative offices that allows the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including:
3.	Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;		66		A brief history of the Issuer or Public Company
4.	Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik;		70		Vision and mission of the Issuer or Public Company;
5.	Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;		73-75		Business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the financial year, and types of goods and/or services produced;
6.	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;		76-77		Organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to 1 (one) level below the Board of Directors, accompanied by name and position;
7.	Profil Direksi, paling sedikit memuat:	a. nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; b. foto terbaru; c. usia; d. kewarganegaraan; e. riwayat pendidikan; f. riwayat jabatan, meliputi informasi: • dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; • rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan • pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; g. pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Direksi dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada); dan h. hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi;	91-95	a. name and position in accordance with duties and responsibilities; b. current photo; c. age; d. citizenship; e. educational background; f. career history, including information: • legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned; • concurrent positions, both as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or members of the committee and other positions (if any); and • work experiences and time periods both inside and outside the Issuer or Public Company; g. education and/or training that has been followed by members of the Board of Directors in improving competence in the financial year (if any); and h. affiliation relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and major shareholders (if any) include names of affiliated parties	Profile of Board of Directors, at least contains:

No	Kriteria	Item Penjelasan	Halaman Page	Description Items	Criteria
8.	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	a. nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; b. foto terbaru; c. usia; d. kewarganegaraan; e. riwayat pendidikan; f. riwayat jabatan, meliputi informasi: • dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; • dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; • rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan • pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; g. pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada); dan h. hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi; i. pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada);	87-90	a. name and position in accordance with duties and responsibilities; b. current photo; c. age; d. citizenship; e. educational background; f. career history, including information: • legal basis for the appointment as a member of the Board of Commissioners who is not an Independent Commissioner of the Issuer or Public Company concerned; • legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an Independent Commissioner of the Issuer or Public Company concerned; • concurrent positions, both as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or members of the committee and other positions (if any); and • work experiences and time periods both inside and outside the Issuer or Public Company; g. education and/or training that has been followed by members of the Board of Directors in improving competence in the financial year (if any); and h. affiliation relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and major shareholders (if any) include names of affiliated parties i. independence statement of Independent Commissioner in the event that Independent Commissioner has served for more than 2 (two) periods (if any);	Profile of the Board of Commissioners, at least contains:
9.	Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;		N/A		In the event of any change in the composition of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners that occurred after the fiscal year ends until the deadline for submitting Annual Report, then the composition included in Annual Report is the composition of the last and previous members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
10.	Jumlah dan demografi karyawan, minimal mencakup aspek:	tingkat pendidikan dan kelompok usia karyawan	82-83	education level and age group of employees	Number and demographics of employees, including as a minimum:
11.	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:	a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih; b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan c) kelompok pemegang saham masyarakat yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen);	79-80	a) shareholders who own 5% (five percent) or more; b) members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners whose own shares of the Issuer or Public Company; and c) groups of public shareholders who each with less than 5% ownership	Name of shareholders and percentage of ownership at the end of the financial year, consisting of:
12.	Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	a) kepemilikan institusi lokal; b) kepemilikan institusi asing; c) kepemilikan individu lokal; dan d) kepemilikan individu asing;	80	a) ownership of local institutions; b) ownership of foreign institutions; c) local individual ownership; and d) foreign individual ownership;	Number of shareholders and percentage of ownership at the end of the financial year based on classification:
13.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu	disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	79	presented in the form of scheme or chart;	Information regarding major and controlling shareholders of Issuers or Public Companies, both directly and indirectly, up to ultimate shareholders
14.	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, mencakup:	a) kepemilikan saham b) bidang usaha c) total aset d) status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada); e) alamat entitas anak;	81	a) share ownership b) business field c) total assets d) operation status of the Issuer or Public Company (if any); e) addresses of subsidiaries;	Name of subsidiaries, associated companies, joint venture company in which the Issuer or Public Company have jointly controlled the entities, include:
15.	Kronologi pencatatan saham, mencakup:	a) jumlah saham; b) nilai nominal dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku; dan c) nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada).	81	a) number of shares; b) nominal value and offering price from the beginning of listing to the end of financial year; and c) name of Stock Exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed (if any).	Share listing chronology includes:

No	Kriteria	Item Penjelasan	Halaman Page	Description Items	Criteria
16.	Kronologis pencatatan efek lainnya, paling sedikit memuat:	a) nama Efek; b) tahun penerbitan; c) tanggal jatuh tempo; d) nilai penawaran; dan e) peringkat Efek (jika ada);	81	a. name of the securities; b. issuance year; c. due date; d. offering price; and e. securities rating (if any);	Listing chronology of other securities
17.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal;	Dalam hal terdapat profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, diungkapkan informasi mengenai: a) jasa yang diberikan; b) komisi (fee), dan c) periode penugasan;	N/A	In the event that there is a capital market supporting profession that provides services regularly to the Issuer or Public Company, disclosed at least the following information: a) services provided; b) commission (fee); and c) assignment period;	Name and address of capital market supporting institutions and professions;
18.	Penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Emiten atau Perusahaan Publik baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat:	a) nama penghargaan dan/atau sertifikasi; b) badan atau lembaga yang memberikan penghargaan dan/atau sertifikasi; c) masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (jika ada);	N/A	a) name of award and/or certification; b) agency or institution that gives awards and/or certifications; c) validity period of awards and/or certifications (if any);	Awards and/or certifications received by the Issuer or Public Company during last financial year both national and international (if any), which contain:
V.	**ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN/MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON COMPANY PERFORMANCE**				
1.	Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	a) produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; b) pendapatan/penjualan; dan c) profitabilitas;	114-125	a) production, which includes the process, capacity and development; b) income/sales; and c) profitability;	Overview of operations per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:
2.	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	a) aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; b) liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; c) ekuitas; d) pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan e) arus kas;	126-136	a) current assets, non-current assets, and total assets; b) short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities; c) equity; d) revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and e) cash flow;	Comprehensive financial performance that includes a comparison of financial performance within the last 2 (two) fiscal years, an explanation of the causes of changes and the impact of these changes, at least regarding:
3.	Kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;		142-143		The ability to pay debts by presenting relevant ratio calculations;
4.	Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;		143-144		Receivables collectability of the Issuer or Public Company receivables by presenting relevant ratio calculations;
5.	Struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure*) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;		144-146		Capital structure and its management policies for the capital structure as well as the basis for determining the intended policies;
6.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	a) tujuan dari ikatan tersebut; b) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; c) mata uang yang menjadi denominasi; dan d) langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	147	a) purpose of the commitments; b) source of funds expected to fulfill the commitments; c) denominated currencies; and d) steps planned by the Issuer or Public Company to protect the risks of relevant foreign currency positions;	A discussion of material commitments for capital goods investment with an explanation at least including:
7.	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	a) jenis investasi barang modal; b) tujuan investasi barang modal; dan c) nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	147	a) type of investment in capital goods; b) investment objectives of capital goods; and c) investment value of capital goods issued;	Discussions on capital investment which realized during the last financial year, covering at least the following:
8.	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);		149		Material information and facts that occur after the date of the accountant's report (if any);
9.	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;		153-154		Business prospects of the Issuer or Public Company which related to the industry's condition, general economy and international market as well as quantitative supporting data from reliable data sources;
10.	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	a) pendapatan/penjualan; b) laba (rugi); c) struktur modal (capital structure); atau d) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	136-138	a) income/sales; b) profit (loss); c) capital structure; d) other matters that are considered important for the Issuer or Public Company;	Comparison between targets/projections at the beginning of financial year with the results achieved (realization), regarding:
11.	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	a) pendapatan/penjualan; b) laba (rugi); c) struktur modal (capital structure); d) kebijakan dividen; atau e) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	138-142	a) income/sales; b) profit (loss); c) capital structure; d) dividend policy; or e) other matters that are considered important for the Issuer or Public Company;	Targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding:

No	Kriteria	Item Penjelasan	Halaman Page	Description Items	Criteria
12.	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;		155-159		Marketing aspects of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least concerning marketing strategy and market share;
13.	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	a) kebijakan dividen; b) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; c) jumlah dividen per saham (kas dan/atau non-kas); dan jumlah dividen per tahun yang dibayar;	151	a) dividend policy; b) date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends; c) amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and amount of dividends paid per year;	A description of dividend for the last 2 (two) financial years (if any), at least:
14.	Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	152	a) in terms of during the book year, the Issuer has the obligation to submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of funds resulting from the Public Offering is disclosed until the end of the financial year; and b) in the event of changes in the use of funds as stipulated in the Regulation of Financial Services Authority on Utilization of Proceeds Report of the Public Offering, the Issuer explained the changes;	Realization of the use of proceeds from the Public Offering, provided that:
15.	Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	a) tanggal, nilai, dan objek transaksi; b) nama pihak yang melakukan transaksi; c) sifat hubungan Afiliasi (jika ada); d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan e) pemenuhan ketentuan terkait;	151	a) date, value and transaction object; b) name of the party conducting the transaction; c) nature of the Affiliate's relationship (if any); d) explanation regarding fairness of the transaction; and e) compliance with relevant provisions;	
16.	Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan		152		Changes in the provisions of laws and regulations that have a significant effect on the Issuer or Public Company and its impact on the financial statements (if any); and
17.	Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);		152-153		Changes in accounting policies, reasons and its impact on the financial statements (if any);
VI.	TATA KELOLA PERUSAHAAN/GOOD CORPORATE GOVERNANCE				
1.	Direksi, mencakup antara lain:	a) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; b) pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; c) prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik; d) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut; e) informasi mengenai keputusan RUPS 1 (satu) tahun sebelumnya, meliputi: • keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan • alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; f) informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku, meliputi: • keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan • alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; dan g) penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi;	297-305 305 316-317 307-311 271 258-271 370, 378, 383, 388	a) duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; b) statement that the Board of Directors has a Board of Directors' guidelines or charter; c) procedure, basis for determining, structure, and amount of remuneration for each member of the Board of Directors, as well as relationship between remuneration and performance of the Issuer or Public Company; d) policies and implementation regarding the frequency of Board of Directors' meetings, including joint meetings with the Board of Commissioners, and attendance level of members of the Board of Directors at the meeting; e) information regarding the GMS' resolution of 1 (one) year prior decision, including: • the GMS' resolutions realized during the financial year; and • reasons on the decisions that have not yet been realized; f) information regarding the GMS' decision during the financial year, including: • the GMS' resolutions realized in the financial year; and • reasons for decisions that have not yet been realized; and g) performance evaluation of the committee that supports the implementation of the Board of Directors' duties;	Board of Directors, including among others:

No	Kriteria	Item Penjelasan	Halaman Page	Description Items	Criteria
2.	Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	a) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris; b) pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; c) prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris; d) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut; e) kebijakan Emiten atau Perusahaan Publik tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit meliputi: • prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; • kriteria yang digunakan; dan • pihak yang melakukan penilaian; f) penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; dan g) dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dimuat informasi paling sedikit mengenai: • alasan tidak dibentuknya komite; dan • prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku;	277-281 281 290-291 283-286 287-288 289-290 N/A	a) duties and responsibilities of each member of the Board of Commissioners; b) statement that the Board of Commissioners has a Board of Commissioners' guidelines or charter; c) procedure, basis for determining, structure, and amount of remuneration for each member of the Board of Commissioners; d) policies and implementation regarding the frequency of Board of Commissioners' meetings, including joint meetings with the Board of Directors, and attendance level of members of the Board of Commissioners at the meeting; e) Issuer or Public Company policy on evaluating the performance of members of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as its implementation, at least includes: • procedures for conducting performance appraisals; • criteria used; and • party that performed the assessment; f) performance evaluation of committees that support the implementation of duties of the Board of Commissioners; and g) in the event that the Board of Commissioners does not form a Nomination and Remuneration Committee, then the least information contained about: • reasons for not forming a committee; and • nomination and remuneration procedures performed during the financial year;	Board of Commissioners, including among others:
3.	Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	a) nama; b) tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan c) frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	N/A	a) name; b) duties and responsibilities of Sharia Supervisory Board; and c) frequency and method of providing advice as well as monitoring the fulfillment of Sharia Principles in the Capital Market toward the Issuer or Public Company;	Sharia Supervisory Board, for Issuers or Public Companies that conduct business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, at least contains:
4.	Komite Audit, mencakup antara lain:	a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b) usia; c) kewarganegaraan; d) riwayat pendidikan; e) riwayat jabatan, meliputi informasi: · dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; · rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan · pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f) periode dan masa jabatan anggota Komite Audit; g) pernyataan independensi Komite Audit; h) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut; i) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan j) pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) Komite Audit;	334-346	a) name and position in the committee membership; b) age; c) citizenship; d) educational history; e) career history, including information on: • legal basis for the appointment as a committee member; • concurrent positions, both as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or committee members and other positions (if any); and • work experiences and time periods both inside and outside the Issuer or Public Company; f) period and tenure of members of Audit Committee; g) independence statement of Audit Committee; h) policies and implementation regarding frequency of Audit Committee's meetings and attendance level of Audit Committee members at the meetings; i) education and/or training that has been followed during the financial year (if any); and j) implementation of Audit Committee's activities during the financial year as stated in Audit Committee guidelines or charter;	Audit Committee, including among others:

No	Kriteria	Item Penjelasan	Halaman Page	Description Items	Criteria
5.	Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti Komite Nominasi dan Remunerasi, mencakup antara lain:	a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b) usia; c) kewarganegaraan; d) riwayat pendidikan; e) riwayat jabatan, meliputi informasi: • dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; • rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan • pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f) periode dan masa jabatan anggota komite; g) uraian tugas dan tanggung jawab; h) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; i) pernyataan independensi komite; j) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; k) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	346-392	a) name and position in the committee membership; b) age; c) citizenship; d) educational history; e) career history, including information on: • legal basis for the appointment as a committee member; • concurrent positions, both as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or committee members and other positions (if any); and • work experiences and time periods both inside and outside the Issuer or Public Company; f) period and tenure of members of Audit Committee; g) description of duties and responsibilities; h) statement that the committee has guidelines or charter (charter); i) independence statement of Audit Committee; j) policies and implementation regarding frequency of Committee's meetings and attendance level of Committee members at the meetings; k) education and/or training that has been followed during the financial year (if any); and l) a brief description regarding the implementation of committee's activities during the financial year;	Other committees owned by Issuer or Public Company in order to support the functions and duties of the Board of Directors and/or Board of Commissioners, such as Nomination and Remuneration Committee, include among others:
6.	Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:	a) nama; b) domisili; c) riwayat jabatan, meliputi informasi: • dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan • pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; d) riwayat pendidikan; e) pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan f) uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;	418-421	a) name; b) domicile; c) position history, including information: • legal basis for the appointment as Corporate Secretary; and • work experiences and time periods both inside and outside the Issuer or Public Company; d) educational history; e) education and/or training followed during the financial year; and f) a brief description regarding the implementation of duties of Corporate Secretary during the financial year;	Corporate Secretary, including among others:
7.	Unit Audit Internal, mencakup antara lain:	a) nama kepala Unit Audit Internal; b) riwayat jabatan, meliputi informasi: • dasar hukum penunjukan sebagai kepala Unit Audit Internal; dan • pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; c) kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); d) pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; e) struktur dan kedudukan Unit Audit Internal; f) uraian tugas dan tanggung jawab; g) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Unit Audit Internal; dan h) uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku;	408-416	a) name of head of Internal Audit Unit; b) position history, including information: • legal basis for the appointment as head of Internal Audit Unit; and • work experiences and time periods both inside and outside the Issuer or Public Company; c) qualification or certification as an internal audit profession (if any); d) education and/or training followed during the financial year; e) structure and position of Internal Audit Unit; f) description of duties and responsibilities; g) statement that Internal Audit Unit has a guideline or charter; and h) a brief description on the implementation of duties of Internal Audit Unit during the financial year;	Internal Audit Unit, including among others:
8.	Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	a) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan b) tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;	438-443	a) financial and operational controls, as well as compliance with other laws and regulations; and b) review on the effectiveness of internal control system;	A description of internal control system (internal control) implemented by the Issuer or Public Company, at least concerning:
9.	Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	a) gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; b) jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan c) tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	422-443	a) overview of risk management system of the Issuer or Public Company; b) type of risk and mitigation risk; and c) review on the effectiveness of risk management system of the Issuer or Public Company;	Risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least includes:

No	Kriteria	Item Penjelasan	Halaman Page	Description Items	Criteria
10.	Perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi:	a) pokok perkara/gugatan; b) status penyelesaian perkara/ gugatan; dan c) pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik	454-460	a) subject matter/lawsuit; b) case status/lawsuit settlement; and c) its impact on the condition of the Issuer or Public Company	Litigation cases faced by the Issuer or Public Company, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), including but not limited to:
11.	Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);		333		Information on administrative sanctions imposed on the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by Capital Market authorities and other authorities in the financial year (if any);
12.	Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	a) pokok-pokok kode etik; b) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan c) pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	331-332	a) Content of code of ethics; b) socialization of code of ethics and its enforcement efforts; and c) a statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Issuer or Public Company;	Information regarding ethical code of the Issuer or Public Company, includes:
13.	Informasi mengenai budaya perusahaan (*corporate culture*) atau nilai-nilai perusahaan (jika ada);		332-333		Information on corporate culture or corporate values (if any);
`14.	Uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/ atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain mengenai:	a) jumlah saham dan/atau opsi; b) jangka waktu pelaksanaan; c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan d) harga pelaksanaan;	333	a) number of shares and/or options; b) implementation period; c) requirements for entitled employees and/or management; and d) exercise price;	A description of employee and/or management stock ownership program implemented by the Issuer or Public Company (if any), including but not limited to:
15.	Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:	a) cara penyampaian laporan pelanggaran; b) perlindungan bagi pelapor; c) penanganan pengaduan; d) pihak yang mengelola pengaduan; dan e) hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi: • jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan • tindak lanjut pengaduan;	451-453	a) method of submitting violation report; b) protection for the rapporteur; c) handling complaints; d) party who managing the complaint; and e) results of handling complaints, at least include: • number of complaints received and processed during the financial year; and • follow up actions on the complaints;	An explanation of whistleblowing system of the Issuer or Public Company (if any), including but not limited to:
16.	Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	a) pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau b) penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada);	465-473	a) statement regarding recommendations that have been implemented; and/or b) explanation of the recommendations that have not been implemented, along with the reasons and alternatives for their implementation (if any);	Implementation of Corporate Governance Guidelines for Issuer that issue Equity Securities or Public Company, includes:
VII.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY				
	Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:				Information regarding the social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company includes policies, types of programs, and costs incurred, including aspects related to:
1.	Lingkungan hidup, antara lain:	a) penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang; b) sistem pengolahan limbah Emiten atau Perusahaan Publik; c) mekanisme pengaduan masalah lingkungan; dan d) sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki;	478-481	a) use of environmentally friendly and recyclable materials and energy; b) waste treatment system of the Issuer or Public Company; c) mechanism for complaints of environmental problems; and d) environmental certification owned;	The environment, including:
2.	Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, antara lain:	a) kesetaraan *gender* dan kesempatan kerja; b) sarana dan keselamatan kerja; c) tingkat perpindahan (*turnover*) karyawan; d) tingkat kecelakaan kerja; e) pendidikan dan/atau pelatihan; f) remunerasi; dan g) mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan;	482-486	a) gender equality and employment opportunities; b) work facilities and safety; c) employee turnover rate; d) work accident rate; e) education and/or training; f) remuneration; and g) mechanism for complaints of labor problems;	Labor, health and safety practices, including:

No	Kriteria	Item Penjelasan	Halaman Page	Description Items	Criteria
3.	Pengembangan sosial dan kemasyarakatan, antara lain:	a) penggunaan tenaga kerja lokal; b) pemberdayaan masyarakat sekitar Emiten atau Perusahaan Publik antara lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan oleh masyarakat atau pemberian edukasi; c) perbaikan sarana dan prasarana sosial; d) bentuk donasi lainnya; dan e) komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di Emiten atau Perusahaan Publik, serta pelatihan mengenai anti korupsi (jika ada);	493-497	a) use of local labor; b) empowering communities around the Issuer or Public Company, among others through the use of raw materials produced by the community or giving education; c) improvement of social facilities and infrastructure; d) other forms of donations; and e) communication regarding anti-corruption policies and procedures at the Issuer or Public Company, as well as training on anti-corruption (if any);	Social and community development, including:
4.	Tanggung jawab barang dan/atau jasa, antara lain:	a) kesehatan dan keselamatan konsumen; b) informasi barang dan/atau jasa; dan c) sarana, jumlah, dan penanggulangan atas pengaduan konsumen.	487-492	a) consumer health and safety; b) information on products and/or services; and c) media, total, and countermeasures for consumer complaints	Corporate social responsibility of products and/or services, including:
VIII.	LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN YANG TELAH DIAUDIT/AUDITED ANNUAL FINANCIAL STATEMENT				
1.	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan.		500-722		Annual financial statements contained in the Annual Report are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and have been audited by an Accountant.
2.	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan		60-61		Statement of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners on the Responsibility for Annual Report

DAFTAR INDEKS POJK NO.51/OJK.03/2017

POJK No.51/POJK.03/2017 index

No.	Laporan Keberlanjutan memuat informasi mengenai:	Halaman Page	No.	The Sustainability Report contains information about:
1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	7, 27, 28, 46, 47, 54, 56	1	Explanation of Sustainable Strategy
2	Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan	22-26	2	Performance Overview on Sustainability Aspects
	a. aspek ekonomi	22-24		a. Economic aspect
	1) kuantitas produksi atau jasa yang dijual;			1) quantity of production or service offered
	2) pendapatan atau penjualan;			3) revenue or sales
	3) laba atau rugi bersih;			4) net profit or loss;
	4) produk ramah lingkungan; dan			5) environmental-friendly product; and
	5) pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan.			6) Involvement of local party that relates with Sustainable-Finance business process.
	b. aspek Lingkungan Hidup	25		b. Environmental aspect
	1) penggunaan energi (antara lain listrik dan air);			1) energy use (including electricity and water)
	2) pengurangan emisi yang dihasilkan			2) reduction of emission produced
	3) pengurangan limbah dan efluen			3) waste and effluent reduction
	4) pelestarian keanekaragaman hayati			4) biodiversity preservation
	c. uraian mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan	30, 435-436		c. Description of the positive and negative impacts of implementing Sustainable Finance for the community and the environment.
3	Profil singkat	63-107	3	General profile
	a. visi, misi, dan nilai keberlanjutan	70-72		a. Vision, mission and sustainable values
	b. nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, alamat surat elektronik (e-mail), dan situs web LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan	64		b. Name, address, telephone number, facsimile number, e-mail address, and website of Financial Service Institutions (FSI), Issuer and Public Company, as well as branch offices and / or representative offices
	c. skala usaha	20, 26, 79-81, 82, 106-107		c. Business size
	1) total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban			1) total assets or assets capitalization, and total liabilities
	2) jumlah karyawan			2) number of employees
	3) persentase kepemilikan saham			3) ownership percentage
	4) wilayah operasional.			4) operational area
	d. penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan;	73-75		d. Brief explanation about product, service and business activity performed;
	e. keanggotaan pada asosiasi;	254-255		e. Member of an association;
	f. perubahan signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan.	26		f. Significant changes, among others related to the closing or opening of branches, and ownership structure.

DAFTAR INDEKS POJK NO.51/OJK.03/2017

POJK No.51/POJK.03/2017 index

No.	Laporan Keberlanjutan memuat informasi mengenai:	Halaman Page	No.	The Sustainability Report contains information about:
4	Penjelasan Direksi memuat:	27, 51-59	4	Report of the Board of Directors consists of:
	a. Kebijakan untuk merespons tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan, paling sedikit meliputi:	27, 54-56, 254		a. Policies to respond in meeting the sustainable strategy, at least include:
	1) penjelasan nilai keberlanjutan bagi Perusahaan;			1) an explanation about the value of sustainability for the Company;
	2) penjelasan respons Perusahaan terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan;			2) an explanation of the Company's response to issues related to the implementation of Sustainable Finance
	3) penjelasan komitmen pimpinan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan;			3) an explanation of the commitment of Financial Service Industry (FSI) leaders, Issuers, and Public Company's in conducting Sustainable Finance implementation
	4) pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan			4) achieving performance in the application Sustainable Finance; and
	5) tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan.			5) Challenges in acquiring performance on Sustainable Finance
	b. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, paling sedikit meliputi:	27-37, 54-56		b. Sustainable Finance implementation, at least include:
	1) pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup) dibandingkan dengan target; dan			1) achievement in the performance of the implementation of Sustainable Finance (economic, social and environmental) compared to the target; and
	2) penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan (bagi LJK yang diwajibkan membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan).			2) explanation on achievements and challenges including important events during the reporting period (as for FSI, it is required to formulate Sustainable Finance Action Plan)
	c. Strategi pencapaian target, paling sedikit meliputi:	27-28, 54-56		c. Target achievement strategies, at least include:
	1) pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup;			1) risk management for the implementation of Sustainable Finance related to economic, social, and environmental;
	2) pemanfaatan peluang dan prospek usaha; dan			2) exploiting business opportunities and prospects; and
	3) penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.			3) explanation on external economy, social and environmental condition that has the potential to affect the sustainability of FSI, Issuers and Public Companies.

No.	Laporan Keberlanjutan memuat informasi mengenai:	Halaman Page	No.	The Sustainability Report contains information about:
5	Tata kelola keberlanjutan memuat:	253-255	5	Sustainable Governance consists of:
	a. Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.	277-281, 297-305		a. Job description of the Board of Directors and the Board of Commissioners, employees, officers and or work units who are responsible for implementing Sustainable Finance.
	b. Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.	83, 222, 227-231, 234, 288-289, 314-315		b. Explanations regarding competency development carried out for members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, employees, officers and or work units who are responsible for the implementation of Sustainable Finance.
	c. Penjelasan mengenai prosedur LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.	27-29, 163-167		c. Explanations on the procedures for FSI, Issuers and Public Companies in identifying, measuring, monitoring, and controlling risks for the implementation of Sustainable Finance related to economic, social, and environmental aspects, including the role of the Directors and Board of Commissioners in managing, conducting periodic reviews, and reviewing the effectiveness risk management processes for FSI, Issuers and Public Companies.
	d. Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi:	13-14		d. Explanations of stakeholders include:
	1) keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (assessment) manajemen, RUPS, surat keputusan atau lainnya; dan			1) stakeholder's involvement based on management assessment, annual general shareholders meeting, decree or other; and
	2) pendekatan yang digunakan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain dalam bentuk dialog, survei, dan seminar.			2) approach used by FSI, Issuers, and Public Companies in involving stakeholders in the implementation of Sustainable Finance, such as dialogue, surveys and seminars.
	e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.	254		e. Problems encountered, developments, and influences on the implementation of Sustainable Finance
6	Kinerja keberlanjutan paling sedikit memuat:	28-35, 476-477, 478-481, 482-486, 487-492, 493-497,	6	Sustainable performance, at least includes:
	a. Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.	476-477		a. Explanation regarding the activities of building a sustainable culture in the internal FSI, Issuers, and Public Companies.
	b. Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam 3 (tiga) tahun terakhir meliputi:	28-35		b. Analysis of economic performance for the last three years includes:
	1) perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dengan Laporan Tahunan; dan			1) comparison of targets and performance of production, portfolio, financing targets, or investment, revenue and profit or loss in the event that the Sustainable Report is prepared separately from the Annual Report; and
	2) perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.			2) comparison of target and portfolio performance, financing targets, or investments in financial instruments or projects that are aligned with the application of Sustainable Finance.

DAFTAR INDEKS POJK NO.51/OJK.03/2017

POJK No.51/POJK.03/2017 index

No.	Laporan Keberlanjutan memuat informasi mengenai:	Halaman Page	No.	The Sustainability Report contains information about:
	c. Kinerja sosial dalam 3 (tiga) tahun terakhir:	482-486, 493-497		c. Social performance for the last three years:
	1) Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk memberikan layanan atas produk dan/ atau jasa yang setara kepada konsumen.			1) commitments of FSI, Issuers, or Public Companies to provide services for products and or services that are equal to consumers.
	2) Ketenagakerjaan, paling sedikit memuat:			2) Labour, at least includes:
	a. pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak;			a. statement of equality of employment opportunities and the presence or absence of forced and child labor;
	b. persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional;			b. the percentage of permanent employee remuneration at the lowest level to the regional minimum wage;
	c. lingkungan bekerja yang layak dan aman; dan			c. a decent and safe working environment; and
	d. pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai.			d. employee training and capacity building.
	3) Masyarakat, paling sedikit memuat:			3) Community, at least includes:
	a. informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan;			a. information of activities or operational areas that produce positive and negative impacts on the surrounding community including financial literacy and inclusion;
	b. mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti; dan			b. the mechanism of public complaints as well as the number of public complaints received and acted upon; and
	c. TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat			c. TJSL that can be linked to support for sustainable development goals includes the types and achievements of community empowerment program activities
	d. Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	478-481		d. Environmental Performance for FSI, Issuers, and Public Companies, at least contains:
	1) biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan;			1) environmental costs incurred;
	2) uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang; dan			2) a description of the use of environmentally friendly materials, for example the use of recycled materials; and
	3) uraian mengenai penggunaan energi, paling sedikit memuat:			3) a description of the use of energy, at least contains:
	a. jumlah dan intensitas energi yang digunakan; dan			a. the amount and intensity of the energy used; and
	b. upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan;			b. efforts and achievement of energy efficiency including the use of renewable energy sources;
	e. Tanggung jawab pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	487-492		e. Responsibility for developing Sustainable Financial Products and or Services
	1) inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa			1) innovation and development of Products and or Services
	2) jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan			2) the number and percentage of products and services that have been evaluated for the safety.
	3) dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari Produk dan/atau Jasa dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif			3) positive and negative impacts arising from Products and / or Services and distribution processes, as well as mitigation undertaken to overcome the negative impacts
	4) jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya			4) the number of products withdrawn and its reasons
	5) survei kepuasan pelanggan			5) customer satisfactory survey
7	Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada.	Belum dilaporkan Not reported	7	Written verification from independent party, if any.

INDEKS STANDAR GRI "INTI" [102-55]

GRI Content Index - Core [102-55]

PENGUNGKAPAN STANDAR UMUM | **GENERAL STANDARD DISCLOSURES**

	Pengungkapan		Halaman Page	Disclosures
PROFIL ORGANISASI				**ORGANIZATIONAL PROFILE**
GRI 102: Pengungkapan Umum | General Disclosures 2016	102-1	Nama organisasi	64, 67	Name of the organization
	102-2	Merek, produk, dan jasa utama	73, 74	Primary brands, products, and services
	102-3	Lokasi kantor pusat	64, 84	Location of headquarters
	102-4	Jumlah negara tempat operasi	84	Number of countries of operation
	102-5	Sifat kepemilikan dan badan hukum	79	Nature of ownership and legal form
	102-6	Pasar yang dilayani	26, 67	Markets served
	102-7	Skala organisasi	18, 26, 82, 232	Scale of the organization
	102-8	Informasi terkait karyawan dan pekerja lain	6, 24, 82, 232	Information on employees and other workers
	102-9	Rantai pasokan organisasi	253, 254	Organization's supply chain
	102-10	Perubahan signifikan selama periode pelaporan	26	Significant changes during the reporting period
	102-11	Prinsip kehati-hatian	254	Precautionary approach or principle
	102-12	Inisiatif Eksternal	254	External initiatives
	102-13	Keanggotaan asosiasi	254	Memberships of associations
	STRATEGI			**STRATEGY**
	102-14	Pernyataan dari manajemen puncak	27, 43-59	Statement from the senior decision-maker
	102-15	Dampak penting, risiko, dan peluang	163	Key Impact, risks, and opportunities
	ETIK DAN INTEGRITAS			**ETHIC AND INTEGRITY**
	102-16	Nilai-nilai, standar, dan norma-norma perilaku	332	Values, principles, standards, and norms of behavior
	102-17	Mekanisme permintaan nasihat dan pertimbangan terkait etik	451	Mechanisms for advice and concerns about ethics
	TATA KELOLA			**GOVERNANCE**
	102-18	Struktur tata kelola	249, 253	Governance structure
	PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN			**STAKEHOLDER ENGAGEMENT**
	102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	13	List of stakeholder groups
	102-41	Perjanjian Kerja Bersama	238	Collective bargaining agreements
	102-42	Identifikasi dan pemilihan pemangku kepentingan	13	Identifying and selecting stakeholders
	102-43	Pendekatan untuk melakukan pelibatan pemangku kepentingan	13	Approach to stakeholder engagement
	102-44	Topik dan perhatian utama	14	Key topics and concerns

INDEKS STANDAR GRI "INTI"

GRI Content Index - Core

PENGUNGKAPAN STANDAR UMUM **GENERAL STANDARD DISCLOSURES**

	Pengungkapan	Halaman Page	Disclosures
	PRAKTIK PELAPORAN		**REPORTING PRACTICES**
102-45	Entitas yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian	12	Entities included in the organization's consolidated financial statements
102-46	Proses untuk menetapkan isi laporan dan Batasan topik	12	Defining the report content and topics boundaries
102-47	Daftar topik material	13	List of material topics
102-50	Periode pelaporan	11	Reporting period
102-51	Tanggal laporan paling terakhir	11	Date of most recent previous report
102-52	Siklus pelaporan	11	Reporting cycle
102-53	Poin Kontak atas pertanyaan terkait laporan ini	15	Contact point for questions regarding the report
102-54	Klaim pelaporan yang 'kesesuaian dengan' Standar GRI	11	Claims of reporting In accordance with the GRI Standards
102-55	Indeks isi GRI	759	GRI Content Index

PENGUNGKAPAN STANDAR KHUSUS | **SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES**

	Pengungkapan		Halaman Page	Disclosures
KINERJA EKONOMI				**ECONOMIC PERFORMANCE**
GRI 103: Pendekatan Manajemen | Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	28, 31, 33, 476, 488	Explanation of the material topic and its Boundary
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	28, 31, 33, 476, 477, 488	The management approach and its components
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	28, 31, 33, 476, 488	Evaluation of the management approach
GRI 201 Kinerja Ekonomi | Economic Performance 2016	201-1	Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan	30	Direct economic value generated and distributed
DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG				**INDIRECT ECONOMIC IMPACT**
GRI 103: Pendekatan Manajemen | Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	28, 31, 33, 476, 488	Explanation of the material topic and its Boundary
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	28, 31, 33, 476, 477, 488	The management approach and its components
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	28, 31, 33, 476, 488	Evaluation of the management approach
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung | Indirect Eco nomic Impact 2016	203-1	Investasi pada infrastruktur dan layanan yang diberikan	33	Infrastructure investments and services supported
MATERIAL				**MATERIAL**
GRI 103: Pendekatan Manajemen | Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	28, 31, 33, 476, 488	Explanation of the material topic and its Boundary
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	28, 31, 33, 476, 477, 488	The management approach and its components
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	28, 31, 33, 476, 488	Evaluation of the management approach
ENERGI				**ENERGY**
GRI 103: Pendekatan Manajemen | Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	28, 31, 33, 476, 488	Explanation of the material topic and its Boundary
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	28, 31, 33, 476, 477, 488	The management approach and its components
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	28, 31, 33, 476, 488	Evaluation of the management approach
GRI 302: Energi | Energy 2016	302-1	Konsumsi energi di dalam organisasi	25	Energy consumption within the organization

INDEKS STANDAR GRI "INTI"

GRI Content Index - Core

PENGUNGKAPAN STANDAR KHUSUS | **SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES**

	Pengungkapan		Halaman Page	Disclosures
AIR				**WATER**
GRI 103: Pendekatan Manajemen | Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	28, 31, 33, 476, 488	Explanation of the material topic and its Boundary
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	28, 31, 33, 476, 477, 488	The management approach and its components
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	28, 31, 33, 476, 488	Evaluation of the management approach
GRI 303: Air | Water 2016	303-1	Pengambilan air berdasarkan sumber	25	Water withdrawal by source
EMISI				**EMISSION**
GRI 103: Pendekatan Manajemen | Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	28, 31, 33, 476, 488	Explanation of the material topic and its Boundary
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	28, 31, 33, 476, 477, 488	The management approach and its components
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	28, 31, 33, 476, 488	Evaluation of the management approach
EFFLUEN DAN LIMBAH				**EFFLUENT AND WASTE**
GRI 103: Pendekatan Manajemen | Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	28, 31, 33, 476, 488	Explanation of the material topic and its Boundary
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	28, 31, 33, 476, 477, 488	The management approach and its components
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	28, 31, 33, 476, 488	Evaluation of the management approach
KEPATUHAN LINGKUNGAN				**ENVIRONMENTAL COMPLIANCE**
GRI 103: Pendekatan Manajemen | Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	28, 31, 33, 476, 488	Explanation of the material topic and its Boundary
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	28, 31, 33, 476, 477, 488	The management approach and its components
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	28, 31, 33, 476, 488	Evaluation of the management approach
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA				**OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY**
GRI 103: Pendekatan Manajemen | Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	28, 31, 33, 476, 488	Explanation of the material topic and its Boundary
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	28, 31, 33, 476, 477, 488	The management approach and its components
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	28, 31, 33, 476, 488	Evaluation of the management approach
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja |Occupational Health and Safety 2016	403-3	Tingkat Kecelakaan Kerja	495	Work Accident Rate

PENGUNGKAPAN STANDAR KHUSUS **SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES**

	Pengungkapan		Halaman Page	Disclosures
KETENAGAKERJAAN				**EMPLOYMENT**
GRI 103: Pendekatan Manajemen | Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	28, 31, 33, 476, 488	Explanation of the material topic and its Boundary
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	28, 31, 33, 476, 477, 488	The management approach and its components
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	28, 31, 33, 476, 488	Evaluation of the management approach
GRI 401: Ketenagakerjaan | Employment 2016	401-1	Tenaga Kerja Baru dan *Turnover*	432, 485	New employee hires and employee turnover
PELATIHAN DAN PENDIDIKAN				**TRAINING AND EDUCATION**
GRI 103: Pendekatan Manajemen | Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	28, 31, 33, 476, 488	Explanation of the material topic and its Boundary
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	28, 31, 33, 476, 477, 488	The management approach and its components
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	28, 31, 33, 476, 488	Evaluation of the management approach
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan | Training and Education 2016	404-2	Program untuk pengelolaan keterampilan dan pembelajaran seumur hidup	83, 234, 485	Programs for skills Management and lifelong learning
MASYARAKAT LOKAL				**LOCAL COMMUNITIES**
GRI 103: Pendekatan Manajemen | Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	28, 31, 33, 476, 488	Explanation of the material topic and its Boundary
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	28, 31, 33, 476, 477, 488	The management approach and its components
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	28, 31, 33, 476, 488	Evaluation of the management approach
GRI 413: Masyarakat Lokal | Local Community 2016	413-1	Pelibatan masyarakat lokal	493	Local community engagement

INDEKS STANDAR GRI "INTI"

GRI Content Index - Core

	Pengungkapan	Halaman Page	Disclosures
GRI-G4 SEKTOR SUPLEMEN JASA KEUANGAN			**GRI-G4 FINANCIAL SERVICES SUPPLEMENT SECTOR**
FS1	Kebijakan dengan komponen lingkungan dan sosial yang spesifik diterapkan pada lini bisnis	35	Policies with specific environmental and social components are applied to business lines
FS2	Prosedur dengan komponen lingkungan dan sosial yang spesifik diterapkan pada lini bisnis	35	Procedures with specific environmental and social components are applied to business lines
FS3	Proses untuk memantau pelaksanaan dan kepatuhan klien terhadap persyaratan lingkungan dan sosial	35	Process to monitor client implementation and compliance with environmental and social requirements
FS4	Proses untuk meningkatkan kompetensi staf dalam menerapkan kebijakan dan prosedur lingkungan sosial	483, 484	Process to improve staff competence in implementing social environment policies and procedures
FS5	Interaksi dengan klien/investor/mitra bisnis mengenai risiko dan peluang lingkungan dan sosial	436	Interaction with clients/investors/business partners regarding environmental and social risks and opportunities
FS6	Persentase portofolio untuk bidang usaha berdasarkan daerah, ukuran dan sektor	31	Percentage of portfolio for business sectors based on region, size and sector
FS7	Nilai moneter produk dan layanan yang ditinjau untuk memberikan manfaat sosial	494	The reviewed monetary values of products and services to provide social benefits
FS8	Nilai moneter produk dan layanan yang ditinjau untuk memberikan manfaat lingkungan khusus	35, 481	The reviewed monetary values of products and services to provide specific environmental benefits
FS9	Cakupan dan frekuensi audit serta prosedur penilaian risiko	414	Scope and frequency of audits and risk assessment procedures
FS10	Kemitraan yang bertanggungjawab atas masalah lingkungan atau sosial	481	Partnerships responsible for environmental or social problems
FS11	Persentase aktiva yang terjadi pada lingkungan positif dan negatif atau sosial	481	The percentage of assets occurring in a positive and negative or social environment
FS12	Kebijakan pemberian suara diterapkan pada masalah lingkungan atau sosial	35	Voting policy (ies) applied to environmental or social issues
FS14	Inisiatif untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan untuk orang-orang yang kurang beruntung	33, 483	Initiatives to improve access to financial services for disadvantage people
FS15	Kebijakan untuk desain yang adil dan penjualan produk dan layanan keuangan	488, 489	Policy for fair design and sale of financial products and services
FS16	Inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan berdasarkan jenis penerima manfaat	33	Initiative to enhance financial literacy by type of beneficiary

2019 **Laporan Tahunan**
Annual Report

JUMP TOGETHER!

J TRUST BANK
Jトラスト銀行

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.

Sahid Sudirman Center 33rd Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Jakarta Pusat 10220, Indonesia
Tel. +62 21 2926 1111

www.jtrustbank.co.id